



Mewujudkan **Swasembada Energi Berkelanjutan** yang **Berintegritas, Transparan** dan **Akuntabel**

Realizing Sustainable Energy Self-Sufficiency
with Integrity, Transparency, and Accountability

20
24

Laporan Tahunan
Annual Report



PLN



Tentang Laporan Ini dan Sanggahan/Batasan

About This Report and Disclaimer

Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memuat informasi berupa pernyataan operasional, keuangan, proyeksi, hingga rencana usaha yang disajikan bagi pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi. Selain yang bersifat historis, informasi-informasi yang dimuat di dalam laporan memiliki risiko serta ketidakpastian yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan material terhadap perkembangan aktual. Informasi yang bersifat proyektif disusun berdasarkan asumsi serta analisis mengenai kondisi terkini, yang seluruhnya bersifat valid dan telah dipastikan keabsahannya.

Laporan ini memuat kata “PLN”, “Kami”, dan “Perseroan” yang merujuk pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan perusahaan *holding*, yang memiliki 4 (empat) perusahaan *subholding* dan sejumlah anak perusahaan.

Penyusunan Laporan Tahunan PLN ini merujuk pada beberapa aturan, yaitu POJK No. 29/POJK.04/2016, POJK No. 51/POJK.03/2017, serta SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021. Selain itu juga merujuk pada Kriteria *Annual Report Award* (ARA), *ASEAN Corporate Governance Score Card* (ACGS) dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia.

Selain itu, Laporan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023, dimana Laporan ini juga disebut sebagai Laporan Tahunan Dipublikasi, yang juga meliputi Laporan Keberlanjutan yang Kami terbitkan secara terpisah namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) contains statements related to operational, financial, projections, and business plans that are presented to stakeholders as information users. In addition to historical data, the information contained in the Report is subject to risks and uncertainties that may result in material differences with actual conditions. Projective information is prepared based on assumptions and analysis of current conditions, all of which are valid, and the validity has been confirmed.

This Report contains the words “PLN,” “We,” and “The Company,” which refer to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), a holding company covering 4 (four) sub-holding companies and a number of subsidiary companies.

The preparation of this PLN Annual Report refers to several regulations, namely POJK No. 29/POJK.04/2016, POJK No. 51/POJK.03/2017, and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021. In addition, this report refers to the criteria set forth in the Annual Report Award (ARA), the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) and the Indonesian Code of Corporate Governance.

Furthermore, this Report also refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023, under which this Report also refers to as the Published Annual Report, including the Sustainability Report, which is published separately but constitutes an integral part of this Annual Report.

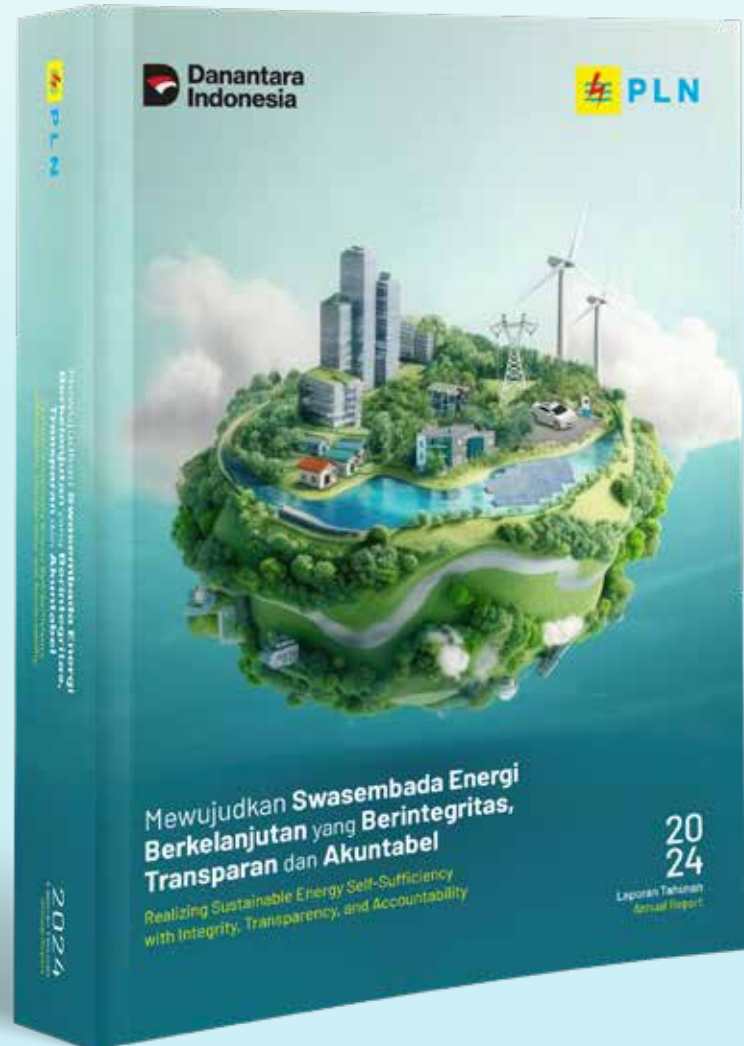


Tema dan Kesenambungan Tema

Theme and Theme Continuity

Mewujudkan
**Swasembada Energi
Berkelanjutan**
yang **Berintegritas,
Transparan** dan
Akuntabel

Realizing Sustainable
Energy Self-Sufficiency with
Integrity, Transparency, and
Accountability



Kesenambungan Tema

Theme Continuity

2023

2022





Tema dan Kesenambungan Tema

Theme and Theme Continuity

Peran PLN dalam swasembada energi memiliki andil yang sangat penting, terutama dalam hal pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta peningkatan infrastruktur energi yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi impor. Dengan fokus pada transisi energi, PLN tidak hanya berkontribusi pada penyediaan listrik yang lebih bersih dan ramah lingkungan, tetapi juga pada pencapaian kemandirian energi nasional yang berkelanjutan. PLN berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan.

PLN telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mewujudkan swasembada energi berkelanjutan dengan mengembangkan berbagai proyek energi terbarukan serta membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi listrik yang efisien dan berkelanjutan ke seluruh pelosok negeri dengan pemanfaatan berbagai sumber energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur yang dilakukan adalah implementasi *smart grids* dan sistem penyimpanan energi yang menjadi peran penting PLN mendukung swasembada energi, khususnya dalam mengawal target penambahan kapasitas terpasang EBT hingga 69,5 Gigawatt (GW) pembangkit EBT 2034.

Dalam mewujudkan swasembada energi berkelanjutan, PLN berkomitmen mengedepankan aspek integritas, transparansi dan akuntabel dalam setiap operasional dan pengambilan keputusan. Hal ini akan membangun kepercayaan dari pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan komitmen tersebut, PLN optimis dapat mempercepat transisi energi dan mencapai swasembada energi berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi upaya mitigasi perubahan iklim global.

PLN's role in advancing energy self-sufficiency is crucial, particularly through renewable energy development, energy efficiency initiatives, and energy infrastructure improvement to reduce Indonesia's dependence on imported energy. With a strong focus on energy transition, PLN contributes not only to the provision of cleaner and more environmentally friendly electricity but also to the achievement of sustainable national energy self-sufficiency. PLN is committed to supporting the government's vision of maximizing the utilization of new and renewable energy (NRE) sources while simultaneously fostering national economic growth by providing safe and sustainable energy infrastructure.

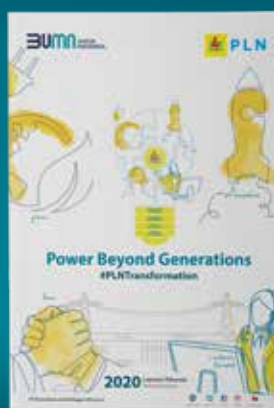
PLN has undertaken various concrete measures to realize sustainable energy self-sufficiency by developing a range of renewable energy projects and building the necessary infrastructure to ensure the efficient and sustainable availability and distribution of electricity throughout the country by utilizing diverse renewable energy sources such as Solar Power Plants (PLTS), Wind Power Plants (PLTB), Hydro Power Plants (PLTA), Geothermal Power Plants (PLTP), and Biomass Power Plants (PLTBm). In building and developing infrastructure, implementing smart grids and energy storage systems is vital for PLN to support energy self-sufficiency, particularly in supporting the realization of the target to add up to 69.5 Gigawatts (GW) of installed NRE generation by 2034.

In realizing sustainable energy self-sufficiency, PLN is committed to upholding the principles of integrity, transparency, and accountability in all operational activities and decision-making processes. These values are fundamental in building the trust of shareholders and all stakeholders. With this commitment, PLN remains confident in its ability to accelerate the energy transition and achieve sustainable energy self-sufficiency that not only benefits Indonesia, but also contributes positively to global climate change mitigation efforts.

2021



2020



2019



Daftar Isi

Table of Contents

Pendahuluan

Introduction



3

3	Disclaimer dan Lingkup Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability
4	Tema dan Kesenambungan Tema Theme and Theme Continuity
6	Daftar Isi Table of Contents
10	Keunggulan Kompetitif Competitive Advantages
14	Aksi Nyata PLN dalam Mewujudkan Swasembada Energi Berkelanjutan PLN's Concrete Actions in Achieving Sustainable Energy Self-Sufficiency
16	Capaian Penting Tahun 2024 Significant Achievements in 2024
18	Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights
24	Ikhtisar Saham Shares Highlights
25	Ikhtisar Obligasi Bonds Highlights
25	Aksi Korporasi Corporate Action
26	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications
33	Peristiwa Penting Tahun 2024 Significant Events in 2024
38	Testimoni Testimonials

Laporan Manajemen

Management Report



40

42	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
66	Laporan Direksi Board of Directors Report
98	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT PLN (Persero) Statement of the Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for the 2024 Annual Report of PT PLN (Persero)

Profil Perusahaan

Company Profile

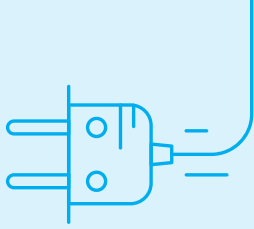


100

102	Identitas Perusahaan Company Information
104	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company
108	Jejak Langkah Milestones
111	Transformasi Berkelanjutan PLN PLN Sustainable Transformation
115	Maksud dan Tujuan Perseroan Purposes and Objectives of the Company
115	Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission, Motto and Corporate Values
119	Kegiatan Usaha Business Activities

121	Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio
126	Skema Penyaluran Listrik PLN PLN Electricity Distribution Scheme
128	Struktur Grup Group Structure
130	Informasi tentang <i>Subholding</i> , Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/ <i>Purpose Vehicle</i> Information on Subholdings, Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures/ Purpose Vehicles • Daftar <i>Subholding</i>, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/Perusahaan Patungan/ <i>Purpose Vehicle</i> List of Subholdings, Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures/ Purpose Vehicles • Sekilas Kinerja Keuangan <i>Subholding</i>, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahan Patungan/ <i>Purpose Vehicle</i> Financial Performance Overview of Subholdings, Subsidiaries/ Associates/ Joint Ventures/ Purpose Vehicles
136	Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices
143	Struktur Organisasi Organization Structure
146	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
164	Profil Direksi Board of Directors Profile
174	Informasi Perubahan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Selama Tahun 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024 Information on Changes in the Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners During 2024 and After the 2024 Fiscal Year
177	Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development





Daftar Isi Table of Contents

182	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition and Structure
	• Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Information on Major and Controlling Shareholders • Komposisi Kepemilikan Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih 5% Share Ownership Composition with Ownership of 5% or More • Komposisi Kepemilikan Saham Oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Share Ownership Composition by Members of the Board of Commissioners and Directors • Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Public Shareholder Group with Ownership Less Than 5% • Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi Number of Shareholders and Ownership Percentage, Based on Classification
184	Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations
185	Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik PLN Information on Public Accounting Firm and Public Accountant of PLN
188	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Perseroan Supporting Institutions and/or Professions for the Company
189	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listings
190	Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listings
196	Informasi Pada Situs Web Perusahaan Information on the Company's Website

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Analysis and Discussion



198

200	Kondisi Ekonomi Makro Macroeconomic Conditions
202	Tinjauan Industri Kelistrikan Electricity Industry Overview
203	Posisi PLN di Industri Ketenagalistrikan Indonesia PLN's Position in Indonesia's Electricity Industry
205	Peran PLN dalam Penyaluran Subsidi Listrik PLN's Role in Electricity Subsidy Distribution
207	Aspek Pemasaran Marketing Aspects
209	Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment
224	Tinjauan Kinerja Keuangan Financial Performance Overview
239	Rasio Keuangan Financial Ratios
242	Struktur Modal Capital Structure
244	Kebijakan Dividen Dividend Policy
246	Aspek Perpajakan Taxation Aspects
247	Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Achievement of Key Performance Indicators (KPIs)
250	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024 Comparison on 2024 Targets and Realizations
251	Prospek Usaha Business Prospects
254	Proyeksi Tahun 2025 2025 Projections

255	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Utilization of Funds from Public Offerings
256	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Investment
259	Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Investment
260	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
260	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts after the Accountant's Report Date
262	Informasi Material Transaksi terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi Material Information on Transactions related to Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and Restructuring
262	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/ Related Parties
270	Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Amendments to Accounting Policies and Their Impact
272	Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba Impact of Price Changes on Revenue and Profit
273	Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact
282	Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



286

288	Pendahuluan Introduction
	• Tujuan Penerapan Governansi Perseroan Objectives of GCG Implementation • Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan Governansi Perseroan Legal Basis and Policy for Implementing Corporate Governance • Struktur Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Structure • Praktik dan Strategi Perseroan Menjaga Governansi Terbaik dan Berkelanjutan The Company's Practices and Strategies for Maintaining the Best and Sustainable Governance • Hasil Penilaian Implementasi Governansi Perseroan Assessment Results of Corporate Governance Implementation
298	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
307	Direksi Board of Directors
332	Dewan Komisaris Board of Commissioners
358	Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Professional Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners
358	Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris Diversity Policy of the Board of Directors and Board of Commissioners

361	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners
369	Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners
	• Komite Audit Audit Committee • Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee • Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee
411	Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris Other Committees under the Board of Commissioners
	• Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee
420	Komite Lain di Bawah Direksi Other Committees under the Board of Directors
	• Komite Sustainability Sustainability Committee • Komite Pengarah Teknologi Informasi Information Technology Steering Committee
429	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners
433	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
440	Unit Audit Internal Internal Audit Unit
450	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System
453	Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
470	Kode Etik Perusahaan Corporate Code of Ethics
474	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan Policy of Long-Term Performance-Based Compensation for Management and/or Employees

475	Pengungkapan Kepemilikan Saham Disclosure of Share Ownership
475	Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Fulfillment of Creditors' Rights
476	Kebijakan Insider Trading Insider Trading Policy
476	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System
483	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy
	• Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi Training and Dissemination of Anti-Corruption Policy • Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (ABMS) • Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control • Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Officials' Wealth Report (LHKPN) • Pengelolaan Benturan Kepentingan Management of Conflict of Interest
489	Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi Legal Cases and Administrative Sanctions
496	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services
501	Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan Implementation of Corporate Governance Guidelines
	• POJK • PUGKI • ACGS



Daftar Isi Table of Contents

Tata Kelola TI Information Technology Governance



554

556 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology
Governance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environmental Responsibility



574

576 Komitmen dan Strategi PLN
Dalam Penerapan Program
Keberlanjutan
PLN's Commitment and Strategy
in Implementing Sustainability
Programs

578 Governansi (Tata Kelola)
Keberlanjutan
Sustainability Governance

582 Kinerja Ekonomi
Economic Performance

584 Kinerja Lingkungan
Environmental Performance

592 Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan
Hubungan dengan Pelanggan
Social Performance – Customer
Relationship Management
Aspects

598 Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja
Social Performance –
Employment, Health, and Safety
Management Aspects

605 Kinerja Sosial – Aspek
Pengembangan Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
Social Performance – Social
Development and Community
Empowerment Aspects

Laporan Keuangan Audited Audited Financial Statements



612

614 Laporan Keuangan Audit
Audited Financial
Statements

Lampiran Appendix



830

831 Referensi SEOJK Nomor 16/
SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan
Emiten atau Perusahaan Publik
Reference of SEOJK Number 16/
SEOJK.04/2021: Annual Report of
Issuers or Public Companies

848 Referensi Pertanyaan ARA di Luar
SEOJK 016/2021
Reference of ARA Questions
Outside SEOJK 016/2021

848 Referensi Bonus Penilaian ARA
Reference of ARA Rating Bonus

849 Referensi Penalti Penilaian ARA
Reference of ARA Rating Penalty

Keunggulan Kompetitif

Competitive Advantages

Sejak berdirinya, PLN teguh mengemban amanah untuk menerangi seluruh penjuru Nusantara. Dalam perjalanannya, PLN terus bertumbuh dan bertransformasi, senantiasa hadir mendampingi masyarakat Indonesia melalui penyediaan listrik yang handal, merata, dan terjangkau bagi semua lapisan.

Since its establishment, PLN has firmly carried out its mandate to illuminate all corners of the archipelago. Along its journey, PLN has continued to grow and transform, constantly present in the lives of the Indonesian people by delivering reliable, equitable, and affordable electricity for all levels.



Memiliki basis pelanggan listrik lebih dari 92 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia
Has an electricity customer base of more than 92 million customers spread throughout Indonesia

Memiliki kompetensi menyeluruh di bidang kelistrikan mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan retail

Has comprehensive competence in the electricity sector, starting from primary energy, generation, transmission, distribution, and retail

Kepemilikan negara atas PLN sebesar 100% menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat untuk menghadirkan listrik untuk seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat Indonesia

100% state ownership of PLN shows strong commitment and support to provide electricity to all regions and all levels of Indonesian society

Dukungan Pemerintah melalui subsidi dan kompensasi listrik sebagai wujud komitmen negara melalui PLN dalam menghadirkan listrik yang andal dengan harga yang terjangkau

Government support through electricity subsidies and compensation as a form of the nation's commitment through PLN to provide reliable electricity at affordable prices

Portofolio bisnis PLN yang mendukung rantai nilai PLN dari hulu ke hilir

PLN business portfolio that supports the PLN value chain from upstream to downstream

Dukungan digitalisasi di semua lini proses bisnis memungkinkan terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan pelanggan yang prima

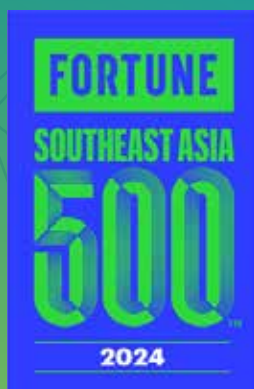
Digitalization support in all lines of business processes enables the implementation of operational activities and excellent customer service

Jaringan transmisi dan distribusi listrik serta kantor layanan PLN yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia untuk menyampaikan listrik yang andal dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)

Electricity transmission and distribution networks, as well as PLN service offices spread throughout Indonesia to deliver reliable and quality electricity to all levels of society, including communities in 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) areas

Transformasi Berkelas Dunia, Diakui Regional

World-Class Transformation, Recognized in Regional Level



TOP 6
Fortune 500
Southeast Asia 2024



Transformasi menyeluruh yang dijalankan PT PLN (Persero) kembali membuahkan hasil gemilang. Pada tahun 2024, PLN resmi masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi *Fortune 500 Southeast Asia*, dan menempati posisi ke-6, mengungguli sejumlah perusahaan multinasional dari berbagai negara di Kawasan Asia.

Capaian ini tak lepas dari keberhasilan transformasi bisnis yang dilakukan secara konsisten selama 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo. Dengan strategi transformasi *digital* yang dijalankan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir, PLN berhasil menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi.

Seluruh lini operasi PLN kini terdigitalisasi, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga sistem keuangan, pengadaan, pembayaran, dan layanan pelanggan. Hasilnya, PLN menjelma menjadi perusahaan energi yang lebih lincah, kokoh, dan adaptif dalam menjawab tantangan zaman.

Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh insan PLN yang terus berkomitmen melayani masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati. Tak hanya memperkuat reputasi perusahaan di tingkat regional, pencapaian ini juga menjadi batu loncatan penting menuju visi besar PLN untuk menjadi *Top 500 Global Company*. PLN akan terus melanjutkan agenda transformasi bisnis, selaras dengan mandat pemerintah untuk menyediakan energi yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan.

The comprehensive transformation undertaken by PT PLN (Persero) has once again yielded remarkable results. In 2024, PLN officially ranked among the top 10 best companies in Southeast Asia according to *Fortune 500 Southeast Asia*, holding the 6th position, surpassing numerous multinational companies from various countries within Asia.

This achievement is inseparable from the successful business transformation consistently implemented over the past 4 years under the leadership of President Director Darmawan Prasodjo. Through a comprehensive digital transformation strategy—spanning upstream to downstream—PLN succeeded in establishing business processes that are more efficient, responsive, and integrated.

All operational lines of PLN are now fully digitalized, starting from generation, transmission, and distribution to financial systems, procurement, payment, and customer services. As a result, PLN has evolved into a more agile, robust, and adaptive energy company capable of addressing contemporary challenges.

This accomplishment reflects the hard work and dedication of all PLN personnel who remain committed to serving the Indonesian people wholeheartedly. Beyond strengthening the company's reputation at the regional level, this milestone also serves as an important stepping stone towards PLN's grand vision of becoming a *Top 500 Global Company*. PLN will continue advancing its business transformation agenda, in alignment with the government's mandate to provide reliable, affordable, and environmentally friendly energy, for a brighter and more sustainable future for Indonesia.

Inovasi Berbuah Apresiasi: PLN Raih Penghargaan ESG Bergengsi 2024

**Innovation Earns Recognition: PLN
Wins Prestigious ESG Award in 2024**



Sebagai lokomotif dalam transisi energi nasional, PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia listrik, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mendorong perubahan menuju energi bersih di Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim global, PLN mengusung misi besar: menghadirkan energi yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan. Melalui berbagai langkah nyata dan inovatif, PLN terus bergerak memastikan bahwa setiap aliran listrik yang disalurkan membawa harapan akan masa depan bumi yang lebih lestari.

Dalam setiap proses bisnisnya, PLN senantiasa menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, tidak hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk manusia yang menjadi penggerak utama Perusahaan. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah menciptakan tempat kerja yang sehat dan mendukung kesejahteraan pegawai. PLN percaya bahwa lingkungan kerja yang layak dan positif akan menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas serta inovasi yang berkelanjutan.

Berbagai inisiatif dan langkah nyata yang dijalankan PLN dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan kini membuahkan hasil membanggakan. Dalam ajang bergengsi *ESG Business Award 2024*, PLN berhasil meraih dua penghargaan internasional sekaligus, yakni kategori *Net Zero Awards* dan *Workplace Wellness Programme Awards*. Penghargaan ini menjadi bukti nyata pengakuan internasional atas komitmen PLN dalam menekan emisi karbon melalui proses bisnis yang lebih hijau, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. Pencapaian ini juga mencerminkan keberhasilan implementasi nilai-nilai ESG di setiap lini operasional Perusahaan.

As a locomotive in the national energy transition, PLN not only plays a role as an electricity provider, but also a frontliner in driving change towards clean energy in Indonesia. Amidst the global climate change challenges, PLN carries a big mission: to deliver reliable, affordable, and environmentally friendly energy. Through various deliver and innovative steps, PLN continues to ensure that every flow of electricity brings hope for a more sustainable future for the earth.

In every business process, PLN consistently instills sustainability values, not only for the environment, but also for people who are the Company's main drivers. One tangible form of this commitment is the creation of a healthy workplace that supports employee welfare. PLN believes that a decent and positive work environment forms the foundation for higher productivity and ongoing innovation.

PLN's wide range of initiatives and concrete steps toward sustainable business have now yielded proud results. At the prestigious *ESG Business Award 2024*, PLN won two international awards: the *Net Zero Award* and *Workplace Wellness Programme Award*. These awards serve as a concrete proof of international recognition of PLN's commitment to reducing carbon emissions through greener business processes, while creating a healthy, inclusive, and competitive work environment. This achievement also reflects the successful implementation of ESG values in across all of the Company's operations.



Integritas Berkelanjutan, Prestasi Gemilang: PLN Raih Penghargaan Sapphire 2024

**Sustained Integrity, Outstanding Achievement:
PLN Wins Sapphire Award 2024**



Komitmen PLN dalam menjunjung tinggi integritas dan keberlanjutan kembali mendapat pengakuan di kancah nasional. Dalam ajang Integritas Bisnis Lestari 2024, PLN meraih penghargaan kategori *Sapphire*, sebuah bentuk apresiasi atas upaya nyata perusahaan dalam membangun tata kelola yang transparan, beretika, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Penghargaan ini menegaskan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari capaian finansial, tetapi juga dari konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik, menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta memastikan seluruh proses bisnis selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan. Salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut adalah kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, yang dibangun bersama mitra global Masdar. Dengan kapasitas 192 MWp, PLTS ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan kini telah menyuplai energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun.

Prestasi ini semakin memperkuat posisi PLN sebagai perusahaan energi yang tidak hanya unggul secara operasional, tetapi juga menjadikan integritas sebagai pondasi dalam mengemban peran strategis di era transisi energi. Dengan semangat berkelanjutan, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi energi yang andal, ramah lingkungan, dan beretika demi mendukung pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kolaborasi internasional menjadi bagian penting dari strategi PLN dalam memperluas kapasitas energi hijau dan memperkuat ketahanan energi nasional.

PLN's commitment to upholding integrity and sustainability has once again earned national recognition. At the 2024 Sustainable Business Integrity Award, PLN won the *Sapphire* category award, a form of appreciation for the company's real efforts in building transparent, ethical, and environmentally and socially responsible governance.

This award emphasizes that success is not only measured by financial achievements, but also by consistently maintaining public trust, implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG), and ensuring that all business processes are in line with sustainability values. One clear example of this commitment is the Cirata Floating Solar Power Plant (PLTS), which was built with global partner Masdar. With a capacity of 192 MWp, this PLTS is the largest in Southeast Asia and now delivers clean energy to approximately 50,000 households, while reducing carbon emissions by 214,000 tons per year.

This achievement further strengthens PLN's position as an energy company that not only excels operationally, but also places integrity at the foundation of its strategic role in the energy transition era. With a spirit of sustainability, PLN remains committed to constantly delivering reliable, environmentally friendly, and ethical energy solutions to support Indonesian Government's target of achieving *Net Zero Emissions* by 2060 or sooner. International collaboration is a key component of PLN's strategy to expand green energy capacity and strengthen national energy security.



Aksi Nyata PLN dalam Mewujudkan Swasembada Energi Berkelanjutan

PLN's Concrete Actions in Achieving Sustainable Energy Self-Sufficiency

PLN telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mewujudkan swasembada energi berkelanjutan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aksi nyata yang telah dilakukan:

Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan (EBT)

Development of New and Renewable Energy (NRE) Power Plants



Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 MWac
Construction of the 50 MWac Solar Power Plant (PLTS) at the IKN



Peresmian 37 Proyek Ketenagalistrikan
Inauguration of 37 Electricity Projects

Melakukan *cofiring* pembangkit PLTU

Implementation of Cofiring at Coal-Fired Power Plants (PLTU)



Uji coba penggunaan *green ammonia* sebagai bahan bakar alternatif di PLTU Labuan 2x300 MW

Pilot test of green ammonia utilization as an alternative fuel at Labuan PLTU 2x300 MW



Penyediaan 1,6 juta ton Biomassa untuk program *co-firing* di 47 PLTU
Provision of 1.6 million tons of Biomass for co-firing program in 47 PLTUs

Kolaborasi Global

Global Collaboration



Conference of the Parties (COP) 29



Kerja sama pendanaan hijau dengan mitra global seperti United Kingdom Export Finance (UKEF)

Green financing partnerships with global partners such as United Kingdom Export Finance (UKEF)



Aksi Nyata PLN dalam Mewujudkan Swasembada Energi Berkelanjutan

PLN's Concrete Actions in Achieving Sustainable Energy Self-Sufficiency

PLN has undertaken various concrete measures to achieve sustainable energy self-sufficiency in Indonesia. The following are several tangible actions that have been implemented:

Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Infrastructure and Technology Enhancement



Menggunakan teknologi *smart grid* untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan

Utilization of smart grid technology to maintain power system stability



Pembangunan jaringan transmisi listrik hijau sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit untuk menyalurkan Listrik dari sumber energi terbarukan ke pusat permintaan

Construction of 70,000 circuit kilometers of green electricity transmission networks to deliver electricity from renewable energy sources to demand centers

Layanan Kelistrikan Anti Kedip untuk Event Nasional

Flicker-free electricity services for national events

Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Jakarta
2024 National Christmas Celebration at Indonesia Arena, Jakarta



Zero down time (ZDT) pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke-10

Zero Down Time (ZDT) was achieved during the 10th World Water Forum (WWF) Summit

Pengembangan Produk Inovatif

Innovative Product Development



Menjadi pionir dalam membentuk ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKL), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan *home charging services* yang terintegrasi dengan PLN Mobile

Become a pioneer in shaping the electric vehicle ecosystem through the provision of infrastructure for Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU), Public Electric Vehicle Battery Exchange Stations (SPBKL), Public Electric Charging Stations (SPLU), and home charging services integrated with PLN Mobile

Mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine*

Encourage increased productivity in the agriculture and fisheries sectors through Electrifying Agriculture and Electrifying Marine programs

Menggalakan kampanye *electrifying lifestyle* serta pemberian insentif berupa diskon biaya penyambungan melalui berbagai promo

Promoting the electrifying lifestyle campaign and providing incentives in the form of discounts on connection fees through various promos

Capaian Penting PLN Tahun 2024

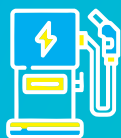
PLN's Significant Achievements in 2024

Kinerja Operasional

Operational Performance

Jumlah SPKLU

Number of Public
Electric Vehicle Charging
Stations (SPKLU)



3.233

Unit milik PLN dan mitra
Unit owned by PLN and partners

Tersebar di
Across



2.306

titik strategis di seluruh Indonesia
locations throughout Indonesia

Jumlah Unit
Pembangkit

Number of Power
Generation Units



6.875

Unit

Produksi Listrik
Electricity Production



343.891,75

GWh

Kapasitas
Pembangkit
Terpasang
Available Generating
Capacity



75.936,46

MW

Daya Mampu
Pembangkit
Installed Generating
Capacity



69.967,41

MW

Panjang Jaringan
Transmisi
Length of Transmission
Network



72.656

kms

Penambahan
Daya Tersambung
Additional Connected
Power Capacity



10.517.83

MVA

Panjang
Jaringan
Distribusi
Length of
Distribution Network



1.066.197

kms

Susut Jaringan
Network Losses



8,55%

Indeks Kepuasan
Pelanggan
Customer Satisfaction
Index



98,93%

Penambahan
Pelanggan
Additional Customers



3.724.014

Pelanggan Customers



Capaian Penting PLN Tahun 2024 PLN's Significant Achievements in 2024

System Average
Interruption
Duration Index
(SAIDI)



320,24

Menit/Pelanggan **Minutes/Customer**

System Average
Interruption
Frequency Index
(SAIFI)



3,23

Kali/Pelanggan **Interruptions/Customer**



Assessment GCG
Assessment GCG



**ASEAN
Capital
Markets
Forum**

ASEAN CG Scorecard



OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Assessment GCG POJK 21



KNKG

Assessment GCG PUG-KI

Kinerja Keuangan Financial Performance

Jumlah Aset
Total Assets



Rp1.772.375

Miliar **Billion**

Laba Tahun
Berjalan
Profit for the Year



Rp17.763

Miliar **Billion**

Pendapatan
Usaha
Revenue



Rp545.381

Miliar **Billion**

EBITDA
EBITDA



Rp108,66

Triliun **Trillion**

Jumlah Ekuitas
Total Equity



Rp1.061.160

Miliar **Billion**

Capaian KPI
KPI Achievement



103,97

Tingkat Kesehatan **Soundness Level**

Sangat Sehat **Excellent**

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Statements of Financial Position

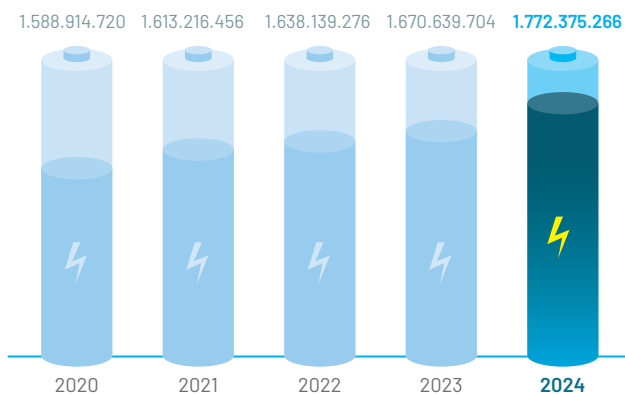
(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah) (presented in millions of Rupiah)

Uraian Description	2020*	2021	2022	2023	2024
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.491.686.215	1.527.305.081	1.518.747.894	1.539.256.218	1.604.928.877
Aset Lancar Current Assets	97.228.505	85.911.375	119.391.382	131.383.486	167.446.389
Jumlah Aset Total Assets	1.588.914.720	1.613.216.456	1.638.139.276	1.670.639.704	1.772.375.266
Jumlah Ekuitas Total Equity	939.812.592	981.607.123	991.450.566	1.015.631.399	1.061.160.235
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	499.472.600	485.070.853	501.617.259	511.812.872	539.162.948
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	149.629.528	146.538.480	145.071.451	143.195.433	172.052.083
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	649.102.128	631.609.333	646.688.710	655.008.305	711.215.031
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.588.914.720	1.613.216.456	1.638.139.276	1.670.639.704	1.772.375.266

*) Direklasifikasi kembali Reclassified

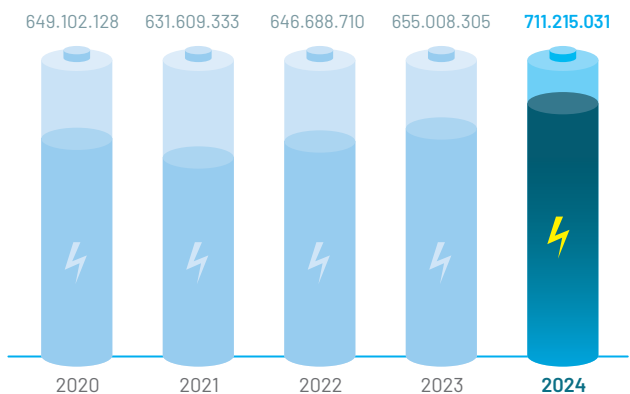
Jumlah Aset (Rp juta)

Total Assets (Rp million)



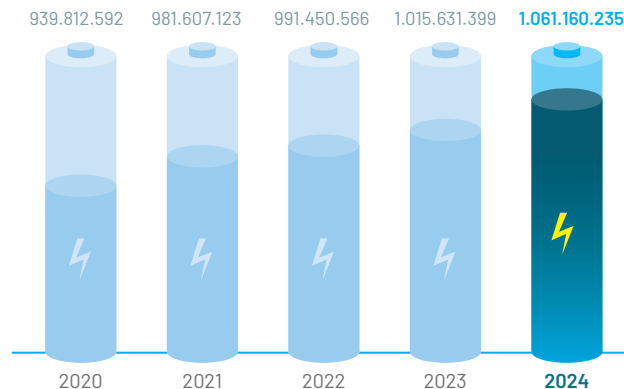
Jumlah Liabilitas (Rp juta)

Total Liabilities (Rp million)



Jumlah Ekuitas (Rp juta)

Total Equity (Rp million)





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laporan laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah)(presented in millions of Rupiah)

Uraian Description	2020*	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	345.415.637	368.174.270	441.131.943	487.384.064	545.380.993
Penjualan tenaga listrik Sales of electricity	274.898.464	288.862.726	311.057.224	333.191.062	353.176.020
Penyambungan pelanggan Customer connection fees	312.725	493.437	857.468	1.288.284	1.746.004
Subsidi listrik Pemerintah Government electricity subsidies	47.988.114	49.796.949	58.831.960	68.636.731	77.045.335
Pendapatan kompensasi Compensation income	17.904.508	24.594.425	63.649.821	73.991.897	100.184.044
Lain-lain Others	4.311.826	4.426.733	6.735.470	10.276.090	13.229.590
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	301.008.165	323.119.125	386.193.802	440.183.990	484.759.987
Laba Usaha Operating Profit	44.407.472	45.055.145	54.938.141	47.200.074	60.621.006
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih Other (expenses)/income - net	1.916.966	(4.921.682)	2.841.675	1.513.051	(2.129.058)
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih (Loss)/gain on foreign exchange - net	(7.742.152)	2.676.145	(19.790.474)	3.723.639	(6.780.398)
Penghasilan keuangan Finance income	1.125.519	787.231	687.495	953.515	976.269
Beban keuangan Finance costs	(27.415.886)	(20.375.755)	(17.135.165)	(21.010.355)	(24.417.860)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	12.291.919	23.221.084	21.541.672	32.379.924	28.269.959
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(6.298.491)	(10.046.207)	(7.126.952)	(10.308.466)	(10.506.935)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	5.993.428	13.174.877	14.414.720	22.071.458	17.763.024
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Other Comprehensive Income for the Year, Net of Tax	308.766	24.007.703	(9.006.358)	4.297.375	30.855.816
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	6.302.194	37.182.580	5.408.362	26.368.833	48.618.840
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: Total profit for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent	5.950.884	13.128.626	14.334.040	22.025.595	17.705.027
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	42.544	46.251	80.680	45.863	57.997
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent	6.259.650	37.107.612	5.316.879	26.322.970	48.560.843
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	42.544	74.968	91.483	45.863	57.997
Laba Per Saham Dasar/Dilusan (dalam Rupiah penuh) Basic/Diluted Earnings Per Share (in Rupiah full amount)	48.439	96.972	99.339	149.874	117.613

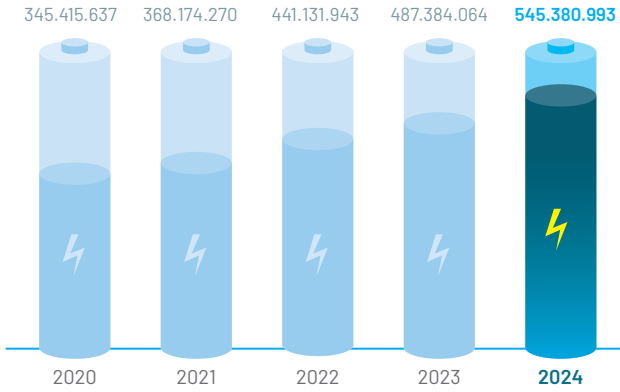
(*) Direklasifikasi kembali Reclassified

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

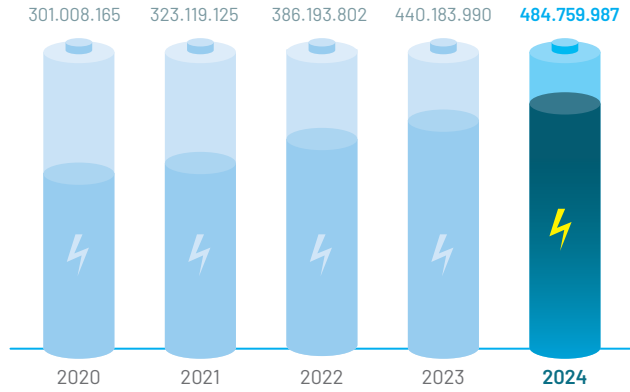
Pendapatan Usaha (Rp juta)

Revenue (Rp million)



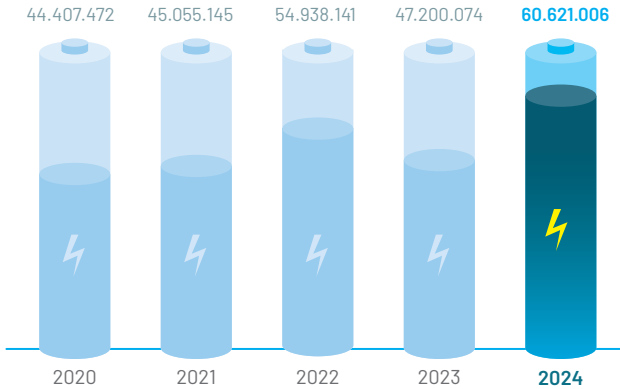
Beban Usaha (Rp juta)

Operating expenses (Rp million)



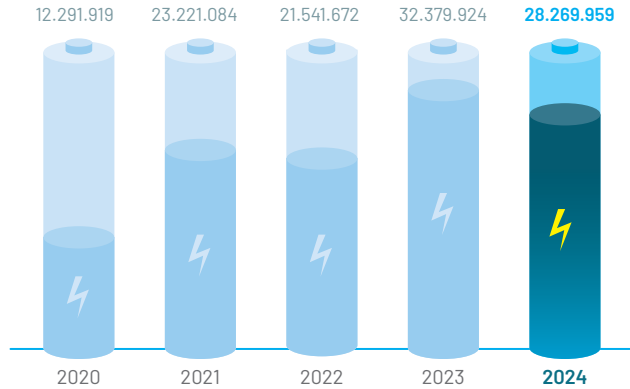
Laba Usaha (Rp juta)

Operating profit (Rp million)



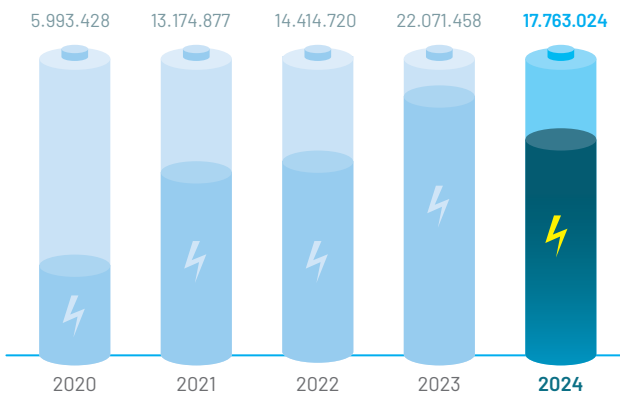
Laba Sebelum Pajak (Rp juta)

Profit before tax (Rp million)



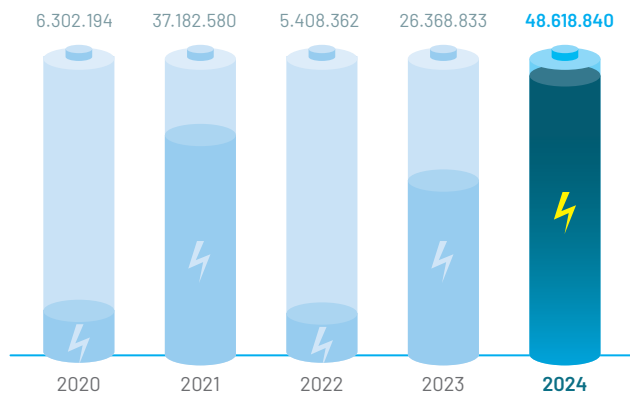
Laba Tahun Berjalan (Rp juta)

Profit for the year (Rp million)



Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan (Rp juta)

Total comprehensive income for the year (Rp million)





Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Statements of Cash Flows

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah) (presented in millions of Rupiah)

Uraian Description	2020*	2021	2022	2023	2024
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net Cash Provided from Operating Activities	91.609.951	68.621.074	97.710.224	87.389.971	75.359.028
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net Cash Used in Investing Activities	(69.015.717)	(59.552.028)	(54.763.962)	(65.667.486)	(62.441.438)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(14.619.905)	(25.880.660)	(30.092.064)	(17.029.832)	(7.830.344)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	7.974.329	(16.811.614)	12.854.198	4.692.653	5.087.246
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing Effect of Changes in Foreign Currency	164.464	44.621	680.515	(275.190)	356.678
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kas dan setara kas Allowance for Expected Credit Loss on Cash and Cash Equivalents	(2.142)	(42)	(16)	(18)	(19)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	46.598.783	54.735.434	37.968.399	51.503.096	55.920.541
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	54.735.434	37.968.399	51.503.096	55.920.541	61.364.446

*) Direklasifikasi kembali Reclassified

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	Satuan Unit	2020*	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios						
Rasio Lancar Current Ratio	%	64,98	58,63	82,30	91,75	97,32
Rasio Kas Cash Ratio	%	36,83	26,11	35,87	39,69	35,67
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios						
Jumlah Liabilitas terhadap Aset Total Liabilities to Assets	%	40,85	39,15	39,48	39,21	40,13
Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas Total Liabilities to Equity	%	69,07	64,34	65,23	64,49	67,02
Debt to equity ratio	%	47,95	42,71	41,32	39,01	38,02
EBITDA to interest expense**	%	284,55	448,67	485,85	486,90	445,01
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios						
Laba bersih terhadap jumlah aset Return on assets	%	0,38	0,82	0,88	1,32	1,00
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas Return on equity	%	0,64	1,34	1,45	2,17	1,67
Margin laba usaha Operating profit margin	%	12,86	11,95	12,45	9,68	11,12
Margin laba bersih Net profit margin	%	1,74	3,58	3,27	4,53	3,26
EBITDA margin**	%	22,59	24,91	18,87	20,99	19,92
Rasio Operasional Operational Ratios						
Perputaran piutang usaha Receivables turnover	kali times	11,85	12,82	12,81	12,91	12,96
Periode penagihan Collection period	hari day	30,89	28,48	28,49	28,26	28,23
Perputaran Aset Tetap Fixed asset turnover	kali times	0,20	0,20	0,22	0,23	0,24

*) Direklasifikasi Reclassification

**) EBITDA dihitung kembali tanpa amortisasi manfaat pekerja EBITDA was recalculated without amortization of employee benefits

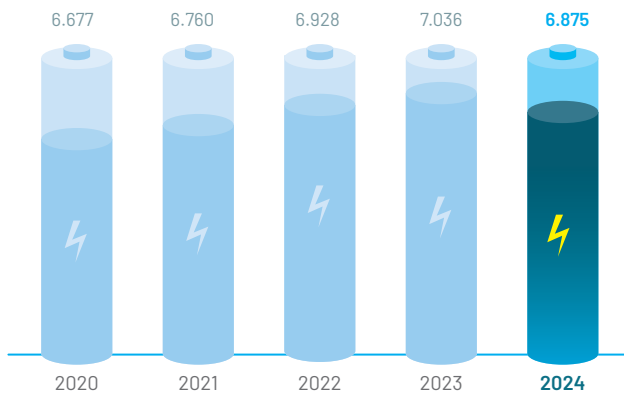
Ikhtisar Infrastruktur dan Operasional

Infrastructure and Operational Highlights

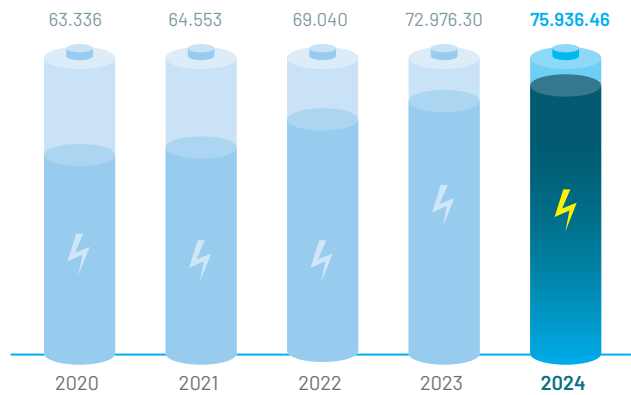
Uraian Description	Satuan Unit	2020*	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pembangkit* Total Power Plant *	Unit	6.677	6.760	6.928	7.036	6.875
Jumlah Pelanggan Total Customers	Pelanggan Customer	79.000.033	82.543.980	85.636.198	89.153.278	92.877.292
Kapasitas Terpasang* Power Capacity*	MW	63.336	64.553	69.040	72.976.30	75.936.46
Produksi Tenaga Listrik Electricity Production	GWh	274.851	289.471	308.002	323.321	343.892
Daya Mampu Pembangkit Optimum Power Plant Capacity	MW	52.263	57.679	61.726	67.190	69.967
Panjang Jaringan Transmisi Length of Transmission Network	Kms	61.334	64.807	68.206	70.933	72.656
Panjang Jaringan Distribusi Length of Distribution Network	Kms	1.006.265	1.022.124	1.033.662	1.048.183	1.066.197
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	GWh	243.583	257.634	273.761	288.436	306.219
Susut Jaringan Network Losses	%	9,15	8,59	8,72	8,57	8,55
Rasio Elektrifikasi Electrification Ratio	%	99,20	99,45	99,63	99,79	99,83

*) Termasuk milik PLN, IPP, dan Sewa Including those owned by PLN, IPP, and Leased

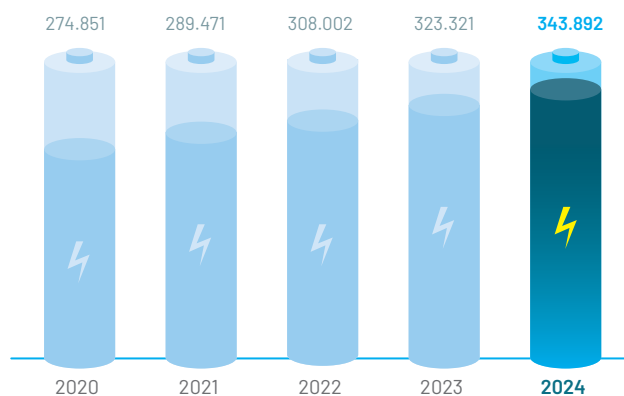
Jumlah Pembangkit (unit)
Number of Power Plant (unit)



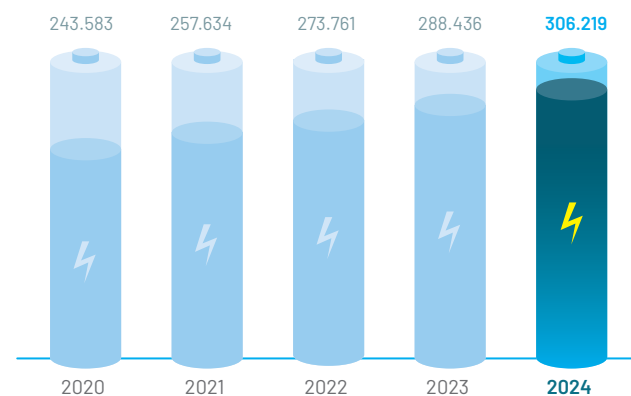
Kapasitas Terpasang (MW)
Power Capacity (MW)



Produksi Tenaga Listrik (GWh)
Electricity Production (GWh)



Penjualan Tenaga Listrik (GWh)
Sales of Electricity (GWh)

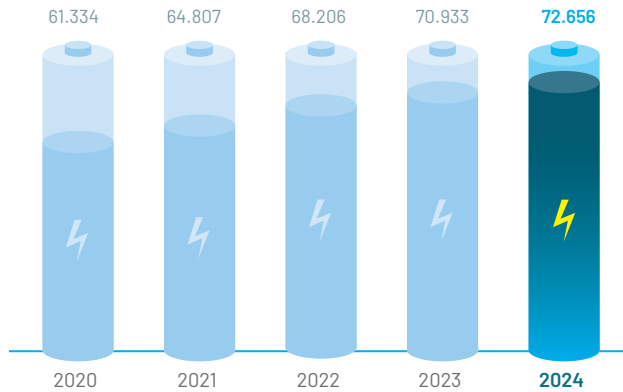




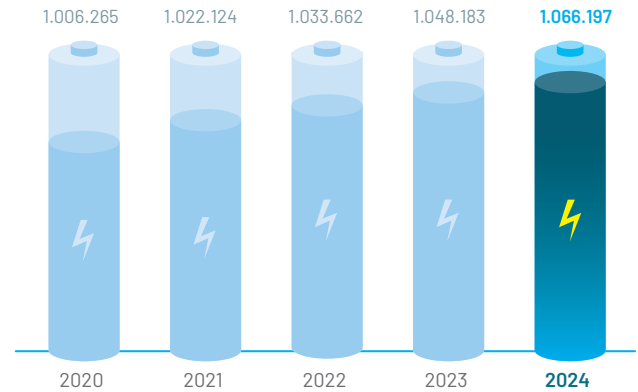
Ikhtisar Infrastruktur dan Operasional

Infrastructure and Operational Highlights

Panjang Jaringan Transmisi (kms)
Length of Transmission Network (kms)



Panjang Jaringan Distribusi (kms)
Length of Distribution Network (kms)



Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Highlights

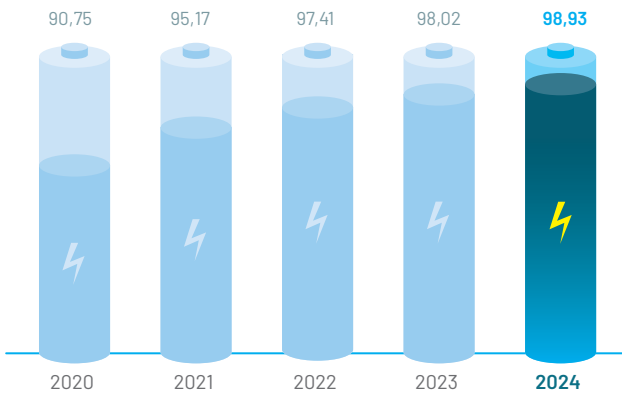
Uraian Description	Satuan Unit	2020	2021	2022	2023	2024
Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	%	90,75	95,17	97,41	98,02	98,93
Biaya Pelatihan Pegawai Employee Training Cost	Rp miliar Rp billion	255,9	182	670,15	1.157,9	1.042,65
Skor KPI Korporat Corporate KPI's Score	Skor Score	103,46	107,49	101,92	107,19	103,97
Tingkat Kesehatan Corporate Soundness Level					Sangat Sehat Excellent	Sangat Sehat Excellent
Peringkat Efek Securities Ratings						
- Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating					idAA(sa)	idAA(sa)
- Peringkat Akhir Final Rating		idAAA	idAAA	idAAA	idAAA	idAAA

Ikhtisar Infrastruktur dan Operasional

Infrastructure and Operational Highlights

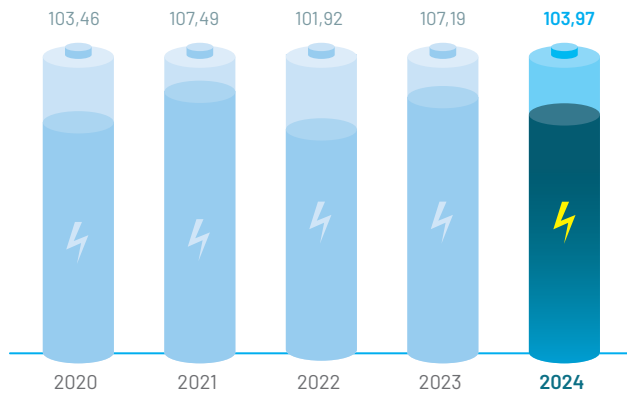
Survei Kepuasan Pelanggan (%)

Customer Satisfaction Survey (%)



Skor KPI Korporat (skor)

Corporate KPI Score (score)



Ikhtisar Saham

Shares Information

Jumlah Saham

Total Shares

Sampai dengan 31 Desember 2024, saham PLN dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu sejumlah 439.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, dengan modal yang sudah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 150.536.096 lembar saham.

As of December 31, 2024, PLN shares are entirely owned by the Government of the Republic of Indonesia, namely 439,000,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, with subscribed and paid-up capital amounting to 150,536,096 shares.

Informasi Saham

Shares Information

PLN tidak melakukan penawaran umum perdana saham, dan karenanya, tidak memperdagangkan saham pada bursa mana pun. Tidak terdapat informasi jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga penutupan, dan volume perdagangan. Selain itu, tidak terdapat informasi tahun penerbitan saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah tindakan korporasi, serta nama bursa tempat saham PLN dicatatkan.

PLN did not conduct an initial public offering of shares, and therefore, did not trade shares on any stock exchange. There is no information on the total outstanding shares, market capitalization based on prices on the stock exchange, the highest share price, lowest share price, closing price, and trading volume. In addition, there is no information on the year the shares were issued, the nominal value of the shares, the share offering price for each corporate action, the number of shares registered after the corporate action, and the name of the exchange where PLN shares are listed.



Photo by Abdul Jawad
PLN UIT JBT

Ikhtisar Obligasi

Bond Overview

Informasi mengenai tabel ikhtisar obligasi yang mencakup nilai, tenor, dan tahun penerbitan diuraikan lebih lanjut pada Bab Profil Perusahaan, sub bab Kronologis Pencatatan Efek Lainnya.

Details of the bond overview table, including value, tenor, and year of issuance, are further explained in the Company Profile chapter, subchapter Chronology of Other Securities Listings.

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Pada tahun 2024, PLN tidak melakukan aksi korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

In 2024, PLN did not undertake any Corporate Actions related to activities affecting the number of outstanding shares, including stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Selama 2024, PLN Group berhasil meraih 780 penghargaan dalam berbagai kategori, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Diantara 780 penghargaan tersebut, PLN Holding meraih 254 penghargaan. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya transformasi dan inovasi yang dilakukan oleh PLN dengan konsisten selama 4 tahun terakhir.

Dari 780 penghargaan tersebut, beberapa diantaranya sebagaimana di bawah ini. Untuk penghargaan yang diterima oleh Subholding dan Anak Perusahaan, diungkapkan pada Laporan Tahunan masing-masing entitas.

Throughout 2024, PLN Group successfully obtained 780 awards across various categories at both national and international levels. Of these 780 awards, PLN Holding received 254 awards. This achievement is undoubtedly the result of consistent transformation and innovation efforts carried out by PLN over the past 4 years.

Several of the 780 awards are listed below. The awards received by Subholdings and Subsidiaries are disclosed in the respective entities' Annual Reports.

Penghargaan Internasional dan Regional

International and Regional Awards

No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Unit Bisnis Penerima Awarded Business Unit	Penyelenggara Organizers
1	18 Januari 2024 January 18, 2024	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup pada ajang <i>Energy Globe Award</i> Environmental Award at the Energy Globe Award event	TJSL dan CSR TJSL and CSR	PT PLN (Persero)	Energy Globe Foundation (Austria)
2	23 Januari 2024 January 23, 2024	<i>Indonesia Team of The Year - Energi</i> Indonesia Team of The Year – Energy	Komunikasi Communication	PT PLN (Persero)	Asian Business Review (Hongkong)
3	23 Januari 2024 January 23, 2024	<i>Indonesia Executive of The Year - Energi</i> Indonesia Executive of The Year – Energy	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	PT PLN (Persero)	Asian Business Review
4	12 Maret 2024 March 12, 2024	<i>Best Green Loan - Utility Indonesia - Triple A Awards 2024 - The Asset Triple A Sustainable Finance Award 2024</i>	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	The Asset Asian Awards (Hongkong)
5	14 Juni 2024 June 14, 2024	<i>Gold Medal "China International Technology Fair"</i> melalui karya inovasi <i>Verticality Online Monitoring System (Venom)</i> Gold Medal at the China International Technology Fair for the innovation titled Verticality Online Monitoring System (Venom)	Inovasi dan Digitalisasi Innovation and Digitalization	UIT JBB	China International Technology Fair, Shanghai, Tiongkok
6	20 Juni 2024 June 20, 2024	<i>6th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2024, Electricity Category, Title: Best Brand Popularity</i>	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	PT PLN (Persero)	World Business Outlook Singapura
7	20 Juni 2024 June 20, 2024	Penghargaan <i>Indonesia Top SOEs Popular Leader 2024</i> kepada Bapak Adi Priyanto Indonesia Top SOEs Popular Leader 2024 Award presented to Mr. Adi Priyanto	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	PT PLN (Persero)	World Business Outlook Singapura



CEO OF THE YEAR

DARMAWAN PRASODJO

DIREKTUR UTAMA PT PLN PERSERO



No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Unit Bisnis Penerima Awarded Business Unit	Penyelenggara Organizers
8	20 Juni 2024 June 20, 2024	Penghargaan <i>Indonesia Top SOEs Popular Leader 2024</i> kepada Bapak Dadan Kusdiana Indonesia Top SOEs Popular Leader 2024 Award presented to Mr. Dadan Kusdiana	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	PT PLN (Persero)	World Business Outlook Singapura
9	30 September 2024 September 30, 2024	Penghargaan <i>Asian Impact Tahun 2024 Predikat Platinum Program Bank Sampah Mobile Prabumulih: Inovasi Terdepan dalam Pengelolaan Sampah Menuju Kawasan Go Green di Kota Prabumulih</i> Asian Impact Award 2024 – Platinum Recognition – Mobile Waste Bank Program Prabumulih: Leading Innovation in Waste Management Towards a Go Green Area in Prabumulih City	TJSL dan CSR TJSL and CSR	UID S2JB	Portman College Malaysia
10	22 Oktober 2024 October 22, 2024	<i>Hydrogen Power Project of the Year – Gold – PLN's Green Hydrogen Plant</i>	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	Asian Power Magazine Singapura
12	22 Oktober 2024 October 22, 2024	<i>The Solar Power Project of the Year – Indonesia Awards – Cirata Floating PV</i>	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	Asian Power Magazine Singapura
13	22 Oktober 2024 October 22, 2024	<i>CEO of the Year at the Asian Power Awards 2024</i> kepada Darmawan Prasodjo CEO of the Year at the Asian Power Awards 2024 – awarded to Darmawan Prasodjo	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	Asian Power Magazine Singapura

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Penghargaan Nasional

National Awards

No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Unit Bisnis Penerima Awarded Business Unit	Penyelenggara Organizers
1	9 Januari 2024 January 9, 2024	Penghargaan PWI: atas pengelolaan komunikasi dan hubungan <i>stakeholder</i> PWI Award: excellence in communication management and stakeholder relations	Komunikasi Communication	UID Aceh	Persatuan Wartawan Indonesia Indonesian Journalists Association
2	12 Januari 2024 January 12, 2024	<i>Best Spokesperson Power Company</i>	Komunikasi Communication	PT PLN (Persero)	Energy and Mining Editor Society (E2S)
3	12 Januari 2024 January 12, 2024	<i>Best CSR/CID Power Company</i>	TJSL dan CSR TJSL and CSR	PT PLN (Persero)	Energy and Mining Editor Society (E2S)
4	12 Januari 2024 January 12, 2024	<i>Innovations Pioneer</i>	Inovasi dan Digitalisasi Innovation and Digitalization	PT PLN (Persero)	Energy and Mining Editor Society (E2S)
5	30 Januari 2024 January 30, 2024	Proper Hijau: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan Green Proper: Implementation of Electricity Safety Management System	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Occupational Health and Safety (OHS)	UIW PPB	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia
6	31 Januari 2024 January 31, 2024	<i>Living Legend Company in Provide Electricity Needs through Strengthening Innovative Orientation in Sustainability Environments and Renewable Energy - Gold</i>	Pelayanan dan Marketing Service and Marketing	PT PLN (Persero)	Warta Ekonomi. co.id
7	6 Februari 2024 February 6, 2024	Zero Kecelakaan Instalasi Terbaik Kategori Transmisi Best Zero Accident Installation in Transmission Category	K3 OHS	UIT JBTB	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower
8	15 Maret 2024 March 15, 2024	<i>Platinum Awards the Most Attractive Company in Media Communications</i>	Komunikasi Communication	UID JAYA	Majalah Listrik Indonesia Listrik Indonesia Magazine



Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications



No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Unit Bisnis Penerima Awarded Business Unit	Penyelenggara Organizers
9	21 Maret 2024 March 21, 2024	<i>Best CEO Awards 2024 in Electricity Category</i>	Pelayanan dan Marketing Service and Marketing	PT PLN (Persero)	The Economics
10	21 Maret 2024 March 21, 2024	Penghargaan <i>Best Green Energy Initiative</i> dalam CNN Indonesia Awards 2024 Best Green Energy Initiative Awards in CNN Indonesia Awards 2024	Transisi Energi Energy Transition	UID SULSELBAR	CNN Indonesia
11	30 April 2024 April 30, 2024	Kategori <i>Gold</i> pada CSR dan PDB Awards 2024 Kerjasama Antara Kementerian Desa Tertinggal dan ISSF Gold Category in CSR and PDB Awards 2024 by Cooperating with the Ministry of Disadvantaged Regions and ISSF	TJSL dan CSR TJSL and CSR	UIP JBTB, UID Bali	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan ISSF Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration in collaboration with ISSF
12	13 Mei 2024 May 13, 2024	<i>Category Outstanding Disability Empowerment</i> CNN Indonesia Awards 2024	TJSL dan CSR TJSL and CSR	UID Bali	CNN Indonesia
13	15 Mei 2024 May 15, 2024	<i>Gold Winner The Most Promising Company in Marketing 3.0 Category</i>	Pelayanan dan Marketing Service and Marketing	PT PLN (Persero)	MarkPlus Inc.
14	29 Mei 2024 May 29, 2024	- Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Kategori <i>Green</i> - Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Kategori <i>Platinum</i> - Green Category in Corporate Emission Reduction Transparency - Platinum Category in Corporate Emission Reduction Transparency	Komunikasi Communication	PT PLN (Persero)	Investortrust.id

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

No	Tanggal Date	Nama Penghargaan Awards	Kategori Category	Unit Bisnis Penerima Awarded Business Unit	Penyelenggara Organizers
15	29 Mei 2024 May 29, 2024	<i>Green Ratings Awards 2024</i>	Komunikasi Communication	PT PLN (Persero)	CNBC Indonesia
16	29 Mei 2024 May 29, 2024	<i>Green Business Terbaik</i> Best Green Business	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	CNBC Indonesia
17	31 Mei 2024 May 31, 2024	<i>Juara 1 Sapphire Compliance, Indonesia</i> <i>Regulatory Compliance Awards</i> 1 st Place in Sapphire Compliance, Indonesia Regulatory Compliance Awards	Pelayanan dan Marketing Service and Marketing	PT PLN (Persero)	Hukum Online.com
18	20 Juni 2024 June 20, 2024	<i>Gold Awards Pembina - Hub UMK Jakarta pada</i> <i>UMKM Award 2024</i> Best Performing Waste Bank of the Year 2024	TJSL dan CSR TJSL and CSR	UID JAYA	Corporate Forum For Community Development (CFCD)
19	16 Juli 2024 July 16, 2024	<i>Bank Sampah dengan Kinerja Terbaik 1 Tahun</i> <i>2024</i> Best Performing Waste Bank of the Year 2024	TJSL dan CSR TJSL and CSR	UIT JBT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia
20	10 September 2024 September 10, 2024	Sertifikat Penghargaan "ADI NITI" (Kategori Pelaku Usaha Penerap Standar) "ADI NITI" Award Certificate (Standardizing Businesses Category)	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	UIP JBB	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia
21	24 September 2024 September 24, 2024	<i>Kategori Workplace Wellness Programme Awards</i> <i>- Indonesia untuk "Connect to be Healthy and</i> <i>Happy Programme"</i> Workplace Wellness Programme Awards - Indonesia for "Connect to be Healthy and Happy Programme"	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	PT PLN (Persero)	Majalah ESGBusiness Majalah ESGBusiness
22	24 September 2024 September 24, 2024	<i>Kategori Net Zero Awards - Energy untuk "Fossil</i> <i>Fuel-Based Decarbonization Programme"</i> Net Zero Awards - Energy Category for "Fossil Fuel-Based Decarbonization Programme"	Transisi Energi Energy Transition	PT PLN (Persero)	Majalah ESGBusiness ESGBusiness Magazine
23	17 Oktober 2024 October 17, 2024	<i>Penghargaan kategori Inovasi Tata Kelola (Good</i> <i>Governance) dengan predikat "Terdepan sebagai</i> <i>Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi</i> <i>Energi"</i> Award for Governance Innovation Category - with the title 'Foremost in Driving a People's Economy in the Energy Transition'	Komunikasi Communication	PT PLN (Persero)	Detikcom Awards 2024
24	21 November 2024 November 21, 2024	<i>SNI Award Tahun 2024 - Peringkat Gold</i> SNI Award 2024 - Gold Rank	Transformasi Perusahaan Corporate Transformation	UIP3B Sumatera	Badan Standardisasi Nasional National Standardization Agency



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Sertifikasi

Certification

No	Nama Sertifikat Certificate Name	Ruang Lingkup Scope	Pemberi Sertifikasi Certifiers	Masa Berlaku Sertifikasi Certification Validity Period
1	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Anti-Bribery Management System (SMAP)	PLN Kantor Pusat dan 46 Unit Induk PLN Head Office and 46 Parent Units	- TUV NORD	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
2	<i>Integrated Management System</i>	Unit Induk Parent Unit	- PUSERTIF - SUCOFINDO - TUV SUD	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
3	Sistem Manajemen K3 PP No 50 Tahun 2012 (SMK3) OHS Management System PP No. 50 of 2012 (SMK3)	Unit Induk Parent Unit	- KEMNAKER	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
4	SMM (Sistem Manajemen Mutu) Quality Management System	Unit Induk Parent Unit	- PUSERTIF - TUV RHEINLAND - TUV SUD - SUCOFINDO - MS CERTIFICATION	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
5	ISO 45001:2018	Unit Induk Parent Unit	- PUSERTIF - TUV RHEINLAND - TUV SUD - PT TAFE SERTIFIKASI INDONESIA (TSI) - SUCOFINDO - TUV NORD INDONESIA - 7MS CERTIFICATIONS - ISCT	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
6	SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management Systems	Unit Induk Unit Induk	- PUSERTIF - TUV RHEINLAND - TUV SUD - TUV NORD INDONESIA - CIPTA CERTIFICATION REGISTRAR - PT TAFE SERTIFIKASI INDONESIA (TSI) - DBS CERTIFICATIONS - SUCOFINDO - MS CERTIFICATIONS	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
7	SMA (Sistem Manajemen Aset) Asset Management System	Unit Induk Parent Unit	- BSI - PUSERTIF - SUCOFINDO - TUV SUD	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
8	SNI ISO 27001:2013	Unit Induk Parent Unit	BSI	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
9	SNI ISO 22301:2019 <i>Business Continuity Management System</i> (BCMS)	UIT JBT & UIP2B Jamali	- BSI - TUV SUD	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
10	SNI ISO 17020: 2012 Lembaga Inspeksi Teknik Lembaga Inspeksi Teknik	Pusertif & Pusmanpro Pusertif & Pusmanpro	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

No	Nama Sertifikat Certificate Name	Ruang Lingkup Scope	Pemberi Sertifikasi Certifiers	Masa Berlaku Sertifikasi Certification Validity Period
11	SNI ISO 50001 Sistem Manajemen Energi Energy Management Systems	UIK TJB	SUCOFINDO	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
12	SNI ISO 17021:2015 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Quality Management System Certification Institute	Pusertif Pusertif	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
13	SNI ISO 17021:2015 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Environmental Management System Certification Institute	Pusertif Pusertif	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
14	SNI ISO 17021:2015 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti Bribery Management System Certification Institute	Pusertif Pusertif	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
15	SNI ISO 17021:2015 Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System Certification Institute SNI ISO 45001:2018	Pusertif Pusertif	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
16	Lembaga Audit SMK3 (Perpanjangan) SMK3 Audit Institute (Extension)	Pusertif Pusertif	KEMNAKER	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
17	SNI ISO 17065:2015 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Product Certification Institute (LSPro)	Pusertif Pusertif	KAN	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024
18	Akreditasi DJK DJK Accreditation	Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik	ESDM DJK	Masih berlaku di Tahun 2024 Still valid in 2024



Peristiwa Penting Tahun 2024

Significant Events in 2024



5 Januari 2024
January 5, 2024



PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit EBT baru, program dieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan *green hydrogen*.

Throughout 2024, PLN successfully completed 28 NRE power plants, implemented a dieselization program by developing transmission and distribution networks, and advanced the green hydrogen initiative.



20 Januari 2024
January 20, 2024



PLN sukses menghadirkan kenyamanan bagi pengguna kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) lewat ekosistem yang kokoh dari sisi suplai maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mudah dijumpai. Saat ini telah ada 1.081 unit SPKLU yang beroperasi, baik milik PLN maupun mitra dan swasta.

PLN successfully enhanced convenience for electric vehicle (EV) users by developing a robust ecosystem, including a reliable electricity supply and easily accessible Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). Currently, there are 1,081 SPKLU units operating, owned by PLN as well as its partners and private sector players.



4 Februari 2024
February 4, 2024



PLN tercatat berhasil menurunkan ESG *risk rating* sebesar 8 poin dari 38,5 pada tahun 2022 menjadi 30,3 di tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian *Sustainalytics* dan menjadi yang terendah pada sektor utilitas kelistrikan di Kawasan ASEAN.

PLN succeeded in reducing its ESG risk rating by 8 points from 38.5 in 2022 to 30.3 in 2023 based on *Sustainalytics*' assessment, making it the lowest in the electricity utility sector across the ASEAN.



21 Februari 2024
February 21, 2024



PLN meresmikan *Hydrogen Refueling Station* (HRS) atau stasiun pengisian kendaraan hidrogen pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan, Jakarta.

PLN inaugurated Indonesia's first Hydrogen Refueling Station (HRS), located in Senayan, Jakarta.



2 Maret 2024
March 2, 2024



PLN melalui *Subholding* PLN Nusantara Power berhasil menyambung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke jaringan transmisi atau sinkronisasi tahap I sebesar 10 Megawatt (MW) dari total 50 MW.

Through its subholding named PLN Nusantara Power, PLN successfully connected the first phase of the Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Solar Power Plant (PLTS) to the transmission grid, with a capacity of 10 Megawatts (MW) out of the planned total of 50 MW.

Peristiwa Penting Tahun 2024

Significant Events in 2024



12 Maret 2024
March 12, 2024



PLN menyuplai kebutuhan energi hijau pabrik pemurnian atau *smelter* PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui *Renewable Energy Certificate* (REC) sebesar 1.009.000 unit atau setara 1.009 GWh hingga tahun 2025. PLN supplied green energy to PT Freeport Indonesia's (PTFI) smelter facilities through 1,009,000 Renewable Energy Certificates (REC), equivalent to 1,009 GWh, valid until 2025.



21 April 2024
April 21, 2024



PLN sukses menyediakan pasokan listrik andal selama periode siaga Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah yang terhitung sejak 3 April hingga 19 April 2024. PLN successfully provided reliable electricity supply during the standby period of Ramadan and Eid al-Fitr 1445 Hijriah starting from April 3 to April 19, 2024.



23 April 2024
April 23, 2024



PLN mendukung penuh penyelenggaraan Periklindo *Electric Vehicle Show* (PEVS) 2024 guna memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. PLN fully supported the 2024 Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) as part of its effort to strengthen collaboration in developing the EV ecosystem.



24 September 2024
September 24, 2024



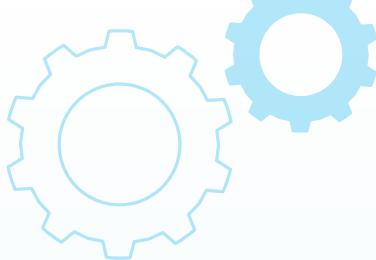
PLN sukses menghadirkan pasokan listrik berkualitas selama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 mulai 8 hingga 20 September 2024. PLN managed to provide a high-quality electricity supply during the 2024 National Sports Week (PON) XXI held in Aceh and North Sumatra from September 8 to 20, 2024.



29 Mei 2024
May 29, 2024



PLN berhasil membukukan keuntungan dengan meraih laba bersih sebesar Rp22,07 Triliun pada tahun 2023. Melalui Transformasi yang telah dijalankan perseroan kondisi keuangan PLN diharapkan akan terus membaik kedepannya. PLN successfully recorded a net profit of Rp22.07 trillion in 2023. The company expects continued financial improvement through its ongoing transformation initiatives.



Peristiwa Penting Tahun 2024 Significant Events in 2024



25 Mei 2024
May 25, 2024



PLN sukses menghadirkan listrik yang andal dan tanpa kedip sepanjang Konferensi Tingkat Tinggi *World Water Forum* (KTT WWF) ke-10.

PLN managed to provide uninterrupted and reliable electricity throughout the 10th *World Water Forum* (WWF) Summit.



2 Juni 2024
June 2, 2024



PLN berhasil merampungkan 3 (tiga) infrastruktur bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketiga infrastruktur dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri sebesar 67,29% tersebut meliputi 1 unit *Gas Insulated Switchgear* (GIS) dan 2 unit jaringan transmisi bertegangan 150 kV.

PLN completed three high-voltage infrastructure projects to support the electricity system of Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. These three infrastructures, which achieved a Domestic Component Level of 67.29%, include one unit of Gas Insulated Switchgear (GIS) and two 150 kilovolt (kV) high-voltage transmission lines.



13 Juni 2024
June 13, 2024



PLN melakukan kolaborasi pendanaan dengan *World Bank*, *Canada Clean Energy & Forest Climate Facility* dan *Clean Technology Fund* sebesar USD 581,5 juta untuk mendukung peningkatan akses elektrifikasi di Indonesia.

PLN collaborated with the *World Bank*, *Canada Clean Energy & Forest Climate Facility* and *Clean Technology Fund* for USD 581.5 million to support electrification access improvements in Indonesia.



16 Agustus 2024
August 16, 2024



PLN menghadirkan listrik andal untuk operasional pabrik baterai anoda lithium yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah.

PLN delivered reliable power to support operations at the newly inaugurated lithium anode battery plant in the Kendal Special Economic Zone (SEZ), Central Java, officiated by President Joko Widodo.



30 Agustus 2024
August 30, 2024



PLN melalui *Subholding* PLN Indonesia Power meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tambak Lorok Blok 3 yang berkapasitas 779 Megawatt (MW) di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (30/8).

Through its subholding, PLN Indonesia Power, PLN launched operations of the 779 MW Tambak Lorok Block 3 Combined Cycle Power Plant (PLTGU) in Semarang, Central Java, on Friday, August 30.

Peristiwa Penting Tahun 2024

Significant Events in 2024



26 September 2024
September 26, 2024



PLN melalui *Subholding* PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meresmikan program “Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu” di lahan kritis seluas 100 hektar di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya.

Through its subholding, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN launched the “Biomass Ecosystem Development Based on Community Economy and Integrated Agriculture” program on 100 hectares of critical land in Bojongkapol Village, Bojongsambir Subdistrict, Tasikmalaya Regency.



30 September 2024
September 30, 2024



PLN sukses memastikan pasokan listrik yang andal dan stabil pada perhelatan MotoGP 2024 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27-29 September 2024.

PLN managed to provide reliable and stable electricity during the 2024 MotoGP event held at Mandalika Circuit, West Nusa Tenggara (NTB), from September 27 to 29, 2024.



27 Oktober 2024
October 27, 2024



Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-79 di Kantor Pusat PLN.
79th National Electricity Day (HLN) Commemoration at PLN Head Office.



20 Oktober 2024
October 20, 2024



PLN berhasil melaksanakan rangkaian agenda kenegaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 dengan menerjunkan ratusan personel siaga dan suplai kelistrikan berlapis sehingga acara berjalan lancar.

PLN ensured the success of the 2024-2029 Presidential and Vice Presidential Inauguration by deploying hundreds of standby personnel and layered power supply systems to ensure the event went smoothly.



Peristiwa Penting Tahun 2024

Significant Events in 2024



12 November 2024
November 12, 2024



PLN menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam *Conference of the Parties (COP) 29* yang digelar di Baku, Azerbaijan.

PLN engaged in global collaboration during the 29th Conference of the Parties (COP 29) held in Baku, Azerbaijan.



26 November 2024
November 26, 2024



PLN menyiapkan ribuan personel siaga untuk memastikan pasokan listrik aman selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia.

PLN deployed thousands of standby personnel to secure electricity supply during the 2024 Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) held on November 27, 2024 across Indonesia.



30 Desember 2024
December 30, 2024



PLN sukses menyuplai listrik andal tanpa kedip untuk perayaan Natal Nasional yang dihadiri tak kurang dari 13 ribu umat kristiani di Indonesia Arena, Jakarta.

PLN managed to deliver uninterrupted electricity during the National Christmas Celebration, which was attended by more than 13,000 worshippers at Indonesia Arena, Jakarta.

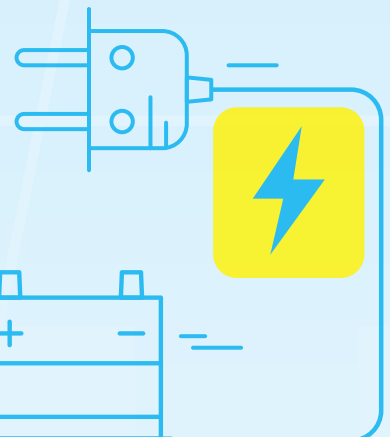


16 Desember 2024
December 16, 2024



PLN mendukung penuh langkah Pemerintah dalam menyalurkan paket stimulus ekonomi bagi 81,4 juta pelanggan atau 97 persen dari total 84 juta pelanggan golongan rumah tangga.

PLN fully supported the Government's initiative in distributing an economic stimulus package benefiting 81.4 million customers, or 97 percent of the 84 million total residential customers.



Testimoni

Testimonials



Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia
President of the Republic of Indonesia

Saya sangat bangga ya, kita bisa meresmikan 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih, kemudian jaringan, gardu-gardu, ini saya kira cukup membanggakan. Dan untuk itu, saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Inshaallah, kita akan selesaikan dalam lima tahun yang akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimistis melihat perkembangan ini. Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan.

I am incredibly proud that we have inaugurated 37 projects, including 26 power plants across 18 provinces, generating over 3.2 gigawatts of energy, along with transmission lines and substations, this is something to be proud of. Therefore, I congratulate and appreciate all parties who have worked hard. There are still fellow citizens who have yet to enjoy access to electricity. Insha Allah, we will address this issue within the next five years. I believe we are more than capable. We are very optimistic when we see the progress. Indonesia may be among the most advanced and consistent countries transforming from fossil to renewable energy.

<https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-prabowo-subianto-usai-peresmian-proyek-strategis-ketenagalistrikan-di-18-provinsi-di-kawasan-plta-jatigede-kabupaten-sumedang-provinsi-jawa-barat-senin/>



Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia ke-5
The 5th Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment of Indonesia

Perkembangan teknologi yang sangat cepat harus diikuti langkah yang cepat, tepat dan strategis. Dunia ini cepat mengembangkan teknologi. Saya harap, kalau bersinergi seperti ini, pasti bisa. Saya senang PLN mampu menggandeng mitra strategis untuk mempercepat program kendaraan Listrik berbasis baterai. Kita tidak boleh berhenti di MOU saja, segala macam aturan kita ikuti.

"The rapid advancement of technology must be met with swift, precise, and strategic actions. The world is rapidly developing technology. I hope that through synergy, we can certainly achieve our goals. I'm glad to see PLN teaming up with key partners to accelerate the battery-based electric vehicle program. We must not stop at just signing MOUs, every regulation must be followed accordingly."

<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2019/10/pln-gandeng-20-mitra-strategis-percepat-program-kendaraan-listrik-berbasis-baterai>



Arifin Tasrif

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ke-17
The 17th Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

PLN telah mengambil langkah signifikan untuk mengatasi bottleneck dalam sistem kelistrikan. Untuk seluruh kesiapan fisik aman dan teknis saya kira semua aman. PLN sudah melakukan antisipasi dan langkah preventif terhadap sistem dan program agar pelayanan bisa maksimal dan tidak ada gangguan listrik bagi masyarakat.

PLN has taken significant measures to address bottlenecks in the electricity system. In terms of physical and technical readiness, everything is secure. PLN has implemented anticipatory and preventive measures to ensure the system and programs run optimally so that no power disruptions will affect the public.



Testimoni Testimonials



Sudaryono

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia
Deputy Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia

Saya sangat menghargai, dengan diprioritaskan sumber dari biomassa di tanah marginal yang sulit ditanami dan tempatnya jauh sehingga bernilai ekonomi. Di situ ada bisnis dengan perputaran uang yang dapat memberi penghasilan bagi masyarakat. Ini artinya apa? Artinya manfaatnya besar sekali, bagi masyarakat sekitar. Saya sekali lagi mengapresiasi PLN atas semua inisiasinya. Kami dari Kementerian Pertanian siap sinergi, siap mendorong, siap membantu. Apa pun yang baik untuk masyarakat, kita siap jiwa raga kita.

I deeply appreciate the prioritization of biomass sourced from marginal lands that are difficult to cultivate and located in remote regions, thus providing economic value. This approach opens up business opportunities and encourages financial circulation that can benefit local communities. What does this mean? It means the people in these areas genuinely feel the positive impact. Once again, I commend PLN for all of its initiatives. We from the Ministry of Agriculture are ready to collaborate, support, and assist. Whatever benefits the people, we are committed to giving our full support.



Brian Dusza

Direktur Lingkungan Hidup USAID Indonesia
Director of Environment, USAID Indonesia

Kemitraan antara Amerika Serikat, Indonesia, dan PLN sudah terjalin lama. Saya meyakini, kolaborasi ini akan berpengaruh besar terhadap program transisi energi untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan inklusif. Amerika Serikat bangga bermitra dengan Indonesia dan PLN untuk mengembangkan peran energi berkelanjutan dalam transisi sektor energi di Indonesia.

"The partnership between the United States, Indonesia, and PLN has been long established. I firmly believe this collaboration will significantly impact Indonesia's energy transition program towards a greener and more inclusive future. The United States is proud to partner with Indonesia and PLN in advancing the role of sustainable energy in the country's energy sector transition."

<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2024/07/pln-perkuat-kolaborasi-global-gandeng-usaid-untuk-akselerasi-transisi-energi>



Ravi Kurmarohita

Deputy CEO Gulf Energy Development
Deputy CEO, Gulf Energy Development

Keberhasilan transformasi yang dilakukan PLN ini dapat menjadi inspirasi untuk diimplementasikan perusahaan lainnya, termasuk Gulf Energy Development terutama di sektor energi terbarukan. Kami berharap ke depannya, Gulf Energy Development dapat berkolaborasi dengan PLN dalam agenda transformasi di sektor energi.

"Successful transformation by PLN serves as an inspiration and a model that can be adopted by other companies, including Gulf Energy Development, particularly in the renewable energy sector. We, Gulf Energy Development, look forward to potential future collaboration with PLN to advance the energy sector transformation agenda."

<https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2024/09/keberhasilantransformasi-pln-menjadi-benchmark-perusahaan-internasional/>



Photo by Wahyu Ashar Prasetya
PLN Pusmanpro



Laporan Manajemen

Management Report



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Burhanuddin Abdullah

Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner and
Independent Commissioner

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi atas kinerja positif PLN pada tahun 2024 di tengah dinamika dan tantangan global. Direksi dinilai berhasil melaksanakan empat *strategic goals* yaitu *Green, Innovative, Customer Focused*, dan *Lean* dengan *strategic enabler* yang efektif. Namun demikian, Direksi tetap diminta untuk meningkatkan efisiensi belanja modal, memastikan pertumbuhan pendapatan melebihi biaya, dan melakukan evaluasi anggaran investasi secara menyeluruh.

The Board of Commissioners would like to express appreciation to the Board of Directors for PLN's positive performance in 2024 amidst the global dynamics and challenges. The Board of Directors is considered successful in implementing four strategic goals, namely Green, Innovative, Customer Focused, and Lean, with effective strategic enablers. However, the Board of Directors is still required to increase capital expenditure efficiency, ensure revenue growth exceeding costs, and comprehensively evaluate the investment budget.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dewan Komisaris mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, PLN dapat melalui berbagai macam tantangan di tengah ketidakpastian makro ekonomi, ketegangan geopolitik, dan perkembangan industri kelistrikan saat ini dengan pencapaian kinerja yang solid dan positif. Laporan ini merupakan bagian dari laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan sepanjang tahun 2024. Dalam laporan ini kami memaparkan pandangan dan penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola PLN selama tahun 2024, pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan yang dijalankan Direksi, penilaian kami terhadap penerapan tata kelola perusahaan termasuk pengawasan atas kebijakan *Whistleblowing System* (WBS), penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris, dan pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi serta perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Di tahun ini kami fokus pada upaya Direksi untuk semakin meningkatkan daya saing dan memperkuat strategi PLN guna meraih pertumbuhan kinerja di tengah tantangan ekonomi, transformasi digital dan aspek keberlanjutan. Hasilnya, kami berhasil membukukan berbagai peningkatan kinerja baik dalam aspek operasional maupun keuangan.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

The Board of Commissioners would like to express gratitude to the Almighty God for the abundance of His blessings so as PLN was able to overcome various challenges amidst macroeconomic uncertainty, geopolitical tensions, and current electricity industry developments with solid and positive performance achievements. This report is part of the Board of Commissioners' supervisory report to the Board of Directors in performing the Company's business activities throughout 2024. In this report, we present our views and assessments of the Board of Directors' performance in managing PLN throughout 2024, supervision of the formulation and implementation of the Company's strategy carried out by the Board of Directors, our assessment of corporate governance implementation including supervision of Whistleblowing System (WBS) policy, performance assessment of the Committees under the Board of Commissioners, and views on business prospects prepared by the Board of Directors as well as changes in the Board of Commissioners' composition.

This year, we focus on the Board of Directors' efforts to further increase competitiveness and strengthen PLN's strategy to achieve performance growth amidst economic challenges, digital transformation, and sustainability aspects. As a result, we have succeeded in recording various performance improvements both in operational and financial aspects.

Tinjauan Makro Ekonomi 2024

Macroeconomic Overview in 2024

Sepanjang tahun 2024, PLN dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik global maupun domestik. ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik yang tidak kondusif serta risiko depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ketahanan pangan serta perubahan iklim. Hal tersebut tentunya mempengaruhi harga dan rantai pasok energi primer, yang mencakup batubara, minyak bumi, serta gas. Untuk itu, PLN terus berusaha menjaga keandalan pasokan listrik dengan memperkuat *energy security* melalui upaya-upaya perbaikan keandalan dan efisiensi rantai pasok, serta penggunaan sumber-sumber energi terbarukan. Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi PLN untuk memperkuat fundamental pengelolaan Perseroan terutama dalam menjalankan bisnisnya.

Perekonomian nasional masih memiliki daya tahan yang baik, walaupun mengalami perlambatan dalam pertumbuhan menjadi sebesar 5,03% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,05%. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari peran penting Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program dalam mendorong peningkatan daya saing produk nasional maupun adanya program stabilisasi harga pangan. Rupiah menunjukkan volatilitas yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai imbas dari ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan moneter AS yang lebih agresif. Inflasi akhir tahun 2024 (yoy) mencapai 1,57%, terjaga tidak terlampaui tinggi karena akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Kebutuhan energi nasional terus meningkat, seiring peningkatan jumlah penduduk dan nilai PDB yang terus tumbuh dan memicu peningkatan proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sebesar 4,9% menjadi 1.411 kWh/kapita dibandingkan tahun lalu sebesar 1.285 kWh/kapita. Selain itu, sektor ketenagalistrikan nasional menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek strategis. Rasio elektrifikasi Nasional tahun 2024 mencapai 99,83%. Selain itu, investasi yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk ketenagalistrikan adalah sebesar USD5,33 miliar. Hal ini menjadi potensi peluang bagi PLN untuk menguatkan infrastruktur ketenagalistrikan guna menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Terbitnya Permen ESDM No. 7 tahun 2024 mengatur

Throughout 2024, PLN was confronted with a number of global and domestic challenges, such as global economic uncertainty, unfavorable geopolitical conditions, and risk of rupiah depreciation against the US dollar, food security, and climate change. These matters certainly affected the price and supply chain of primary energy, which included coal, oil, and gas. To that end, PLN continuously strove to maintain the reliability of electricity supply by strengthening energy security through efforts to improve supply chain reliability and efficiency, as well as the use of renewable energy sources. In facing such challenges, it is important for PLN to strengthen the fundamentals of the Company's management, particularly in running its business.

The national economy still had good resilience, though it slowed down in growth to 5.03% (yoy) compared to the previous year's growth of 5.05%. Of course, this could not be separated from the Government's important role in maintaining national economic growth through various programs to encourage increased competitiveness of national products and provide food price stabilization programs. Rupiah showed significant volatility against the US Dollar (USD) until the end of 2024 as a result of geopolitical tensions and changes in more aggressive US monetary policy. Inflation at the end of 2024 (yoy) reached 1.57%, managed not to be too high as it would affect people's purchasing power.

National energy needs to continuously increase, in line with the increasing population and GDP value which constantly grows and triggers an increase in the average projected growth in electricity needs by 4.9% to 1,411 kWh/capita compared to last year's 1,285 kWh/capita. In addition, the national electricity sector shows significant progress in various strategic aspects. National electrification ratio in 2024 reached 99.83%. Furthermore, the investment allocated by the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources for electricity is USD5.33 billion. This is a potential opportunity for PLN to strengthen electricity infrastructure to ensure equal basic services to the community. The issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2024 regulating Electricity Tariffs Provided by PLN, which regulates the mechanism



tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN, yang mengatur mekanisme penyesuaian tarif listrik non-subsidi setiap 3 bulan dan mengatur diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga tertentu, tentunya membawa perubahan signifikan dalam sistem tarif listrik dan subsidi, yang berdampak pada kinerja keuangan PLN dan pengelolaan energi listrik secara nasional.

for non-subsidized electricity tariff adjustment every 3 months and regulates a 50% discount for certain household customers, definitely brings significant changes to the electricity tariff and subsidy system, which affects PLN's financial performance and national electricity management.

Peran Dewan Komisaris Dalam Perumusan dan Implementasi Strategi Perseroan

Board of Commissioners' Role in Formulating and Implementing the Company's Strategy

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2022-2026 maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Dalam perumusan strategi Perseroan, antara lain pada proses penyusunan RKAP 2024, Dewan Komisaris memberikan saran agar Direksi memantau dan mencermati pergerakan kurs valuta asing dan lainnya yang diperkirakan akan semakin *volatile* di tahun 2024, serta mengupayakan tindakan-tindakan yang diperlukan agar dampak negatif terhadap PLN dapat dikurangi. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan telaah dan memberikan tanggapan/masukan terhadap rancangan RKAP 2024 serta memastikan bahwa rumusan dan penerapan strategi, serta kebijakan yang ditetapkan telah didasarkan pada analisis peluang dan kondisi terkini Perseroan dengan mempertimbangkan asumsi internal maupun eksternal yang relevan, termasuk perkembangan industri kelistrikan global dan nasional. Selain itu, penyusunan RKAP 2024 telah berbasis pada permintaan pelanggan (*demand driven*) dan selaras dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan RJPP PLN Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024 Direksi telah menetapkan 4 (empat) *strategic goals* Perseroan, yakni *Green*, *Innovative*, *Customer Focused* dan *Lean* dengan 4 (empat) *strategic enabler* meliputi organisasi dan SDM, pengembangan teknologi, keberlanjutan finansial serta pembangunan nasional. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah mengeksekusi keempat *strategic goals* dan *strategic enabler* dengan sangat baik, terbukti mampu menjawab tantangan PLN dalam mencapai tujuan bisnis. Namun demikian, Direksi perlu terus mengupayakan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar daripada pertumbuhan biaya, mengelola *Capex* dengan

In performing its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners refers to the Company's Articles of Association, the Company's Long-Term Plan for 2022-2026, and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024. In formulating the Company's strategy, including in the process of preparing the 2024 RKAP, the Board of Commissioners advises the Board of Directors to monitor and pay close attention to movements in foreign exchange rates and others expected to become increasingly volatile in 2024, as well as to take necessary actions so that the negative impact on PLN can be reduced. Furthermore, the Board of Commissioners reviews and provides responses/input to the draft 2024 RKAP and ensures that the strategy formulation and implementation, as well as the policies set are based on the analysis of the Company's current opportunities and conditions by considering relevant internal and external assumptions, including the developments in global and national electricity industry. In addition, the preparation of the 2024 RKAP is demand driven and is in line with the General National Electricity Plan (RUKN), Electricity Supply Business Plan (RUPTL), and the 2020-2024 PLN RJPP.

In 2024, the Board of Directors set 4 (four) strategic goals of the Company, namely Green, Innovative, Customer Focused, and Lean, with 4 (four) strategic enablers including organization and HR, technology development, financial sustainability, and national development. The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has executed the four strategic goals and strategic enablers very well, proven to be able to address PLN's challenges in achieving business goals. However, the Board of Directors needs to continuously strive for revenue growth that is greater than cost growth, manage Capex with discipline and

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

disiplin dan tata kelola yang baik, mulai dari *Feasibility Study* (termasuk *concept* dan *technology selection*), *Front-End Engineering Design*, *Tender Process*, *Final Investment Decision*, *Engineering Procurement*, *Construction* and *Installation* untuk diimplementasikan di seluruh PLN group serta mengkaji kembali total anggaran investasi sesuai peruntukannya.

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penyelenggaraan rapat berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi, maupun rapat internal Dewan Komisaris dan rapat-rapat komite serta laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai, Direksi beserta jajaran manajemen telah mencatatkan kinerja yang baik selama tahun 2024. Berbagai target kinerja dapat tercapai dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan maupun operasional di semua lini portofolio bisnis PLN.

good governance, starting from *Feasibility Study* (including concept and technology selection), *Front-End Engineering Design*, *Tender Process*, *Final Investment Decision*, *Engineering Procurement*, *Construction*, and *Installation* to be implemented throughout PLN group, and review the total investment budget according to its designation.

Supervision by the Board of Commissioners is performed through regular meetings held between the Board of Commissioners and Board of Directors, internal meetings of the Board of Commissioners, and committee meetings, as well as reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners considered that the Board of Directors and management recorded good performance throughout 2024. Various performance targets were achieved and made positive contribution to improving financial and operational performance in all lines of PLN's business portfolio.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Tahun 2024

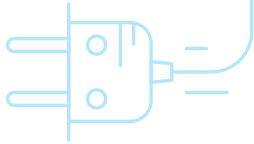
Assessment of Board of Directors' Performance in 2024

Tahun 2024 menjadi tahun kedua terbentuknya *Holding-Subholding* PLN, yang berfokus untuk menciptakan *value creation* serta peningkatan efisiensi bagi Perseroan di lingkungan PLN group. Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas capaian target kinerja Perseroan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap setiap inisiatif strategis yang diambil oleh Direksi yang tertuang dalam RKAP 2024 untuk memastikan kesesuaian program dengan rencana Perseroan. Target kinerja Perseroan di tahun 2024 secara umum menunjukkan peningkatan baik di sisi penjualan tenaga listrik maupun keandalan sistem. Hasil penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi dituangkan dalam realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi, baik secara individu maupun kolektif, yang disampaikan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian Perseroan pada tahun 2024, dengan realisasi penjualan tenaga listrik sebesar 306,22 TWh dengan total pendapatan usaha yang diperoleh mencapai Rp545,38 triliun dan laba tahun berjalan mencapai Rp17,76 triliun serta keseluruhan KPI tercapai sesuai target RKAP 2024 kecuali program gasifikasi, penyelesaian *Roadmap Energy Transition* (*Green RUPTL*), rasio ROIC dan *Distribution Efficiency Rate*.

The year 2024 marks the second year of the establishment of PLN Holding-Subholding, which focuses on creating value creation and increasing efficiency for the Company within the PLN group. Throughout 2024, the Board of Commissioners supervised the achievement of the Company's performance targets through monitoring and evaluating each strategic initiative taken by the Board of Directors as stated in the 2024 RKAP to ensure that the program was in line with the Company's plans. The Company's performance targets in 2024 generally showed an increase in both sales of electricity and system reliability. The Board of Commissioners' assessment results of the Board of Directors' performance are stated in the realization of the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI), both individually and collegially, submitted to Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism.

The Board of Commissioners expressed its appreciation for the Company's achievements in 2024, with the realization of sales of electricity of 306.22 TWh, total revenue reaching Rp545.38 trillion, and profit for the year reaching Rp17.76 trillion, as well as the achievement of all KPIs according to the 2024 RKAP target, except for the gasification program, completion of *Roadmap Energy Transition* (*Green RUPTL*), ROIC ratio, and *Distribution Efficiency Rate*.



Dengan kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, PLN berhasil mencapai skor KPI Perseroan tahun 2024 sebesar 103,97 dari target, yang meliputi 5 (lima) pilar utama sebagai indikatornya, yaitu Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Peningkatan Investasi, dan Pengembangan Talenta. Dewan Komisaris meminta Direksi agar melakukan upaya dan langkah yang diperlukan serta fokus terhadap pencapaian kinerja yang belum maksimal antara lain terkait dengan pendapatan *Beyond kWh*, pengelolaan efisiensi dan biaya serta program gasifikasi.

With hard work and support from all stakeholders, PLN succeeded in achieving the Company's 2024 KPI score of 103.97 from the target, which included 5 (five) main pillars as indicators, namely Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development. The Board of Commissioners requested the Board of Directors to make necessary efforts and steps and focus on achieving performance not yet maximized, including those related to *Beyond kWh* revenue, efficiency and cost management, and gasification program.

Transformasi 2024 - *Next Chapter of Transformation*

Transformation in 2024 - Next Chapter of Transformation

Melanjutkan program Transformasi PLN 2.0 yang telah dimulai sejak tahun 2019, untuk menjadi *The New PLN 4.0: Unleashing Energy and Beyond*, PLN telah mampu menghadirkan kontribusi positif melalui 4 *Strategic Goals* yaitu *Green, Innovative, Customer Focused*, dan *Lean*. Tahun 2024 dengan tema *Next Chapter of Transformation*, PLN fokus untuk mendukung tercapainya aspirasi Visi "Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 pilihan pelanggan untuk solusi energi" dengan memperkuat transformasi berkelanjutan, mengakselerasi teknologi digital, menjaga efisiensi operasional, dan menghadirkan layanan yang semakin relevan sesuai kebutuhan pelanggan.

Continuing PLN 2.0 Transformation program that has been started since 2019, to become *The New PLN 4.0: Unleashing Energy and Beyond*, PLN has been able to present positive contributions through 4 *Strategic Goals*, namely *Green, Innovative, Customer Focused*, and *Lean*. In 2024, with the theme *Next Chapter of Transformation*, PLN focused on supporting the achievement of Vision aspiration "Becoming a Global Top 500 Company and #1 customer choice for energy solutions" by strengthening sustainable transformation, accelerating digital technology, maintaining operational efficiency, and presenting increasingly relevant services according to customer needs.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan Program Transformasi *The New PLN 4.0* yang dijalankan oleh Direksi perlu terus dijaga konsistensinya berada dalam jalur yang tepat. Terbukti, capaian kinerja Perseroan dari hasil transformasi berhasil diperoleh antara lain berupa peningkatan pendapatan usaha dan indeks *customer satisfaction* menjadi salah satu indikator kuncinya. Meski demikian, untuk melangkah lebih lanjut ke Program Transformasi *The New PLN 4.0*, Dewan Komisaris memandang perlu dilakukan review dan penyempurnaan terus-menerus, untuk inisiatif *Green, Innovative, Customer Focus*, dan *Human Capital*.

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of *The New PLN 4.0 Transformation Program* run by the Board of Directors needs to be consistently maintained on the right track. Evidently, the Company's performance achievements from the transformation results are successfully obtained, including in revenue increase, and customer satisfaction index serves as one of its key indicators. However, to move further to *The New PLN 4.0 Transformation Program*, the Board of Commissioners considers it necessary to conduct continuous reviews and refinements for the *Green, Innovative, Customer Focus*, and *Human Capital* initiatives.

Kinerja Perseroan Tahun 2024

Company Performance in 2024

Sepanjang tahun 2024, PLN berhasil memberikan kontribusi nyata sebagai agent of development melalui peningkatan penjualan listrik, peningkatan pendapatan, peningkatan laba bersih, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja-kinerja tersebut kelak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penjualan tenaga listrik pada tahun 2024 mencapai 306.219 GWh, meningkat 6,17% dari tahun 2023 sebesar 288,436 GWh, kontribusi dominan berasal dari segmen Regional Jawa, Madura, & Bali sebesar 69,93%, selanjutnya Regional Sumatera & Kalimantan sebesar 22,19%, serta Regional Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara sebesar 7,89%. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi yang konsisten melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, tercatat di tahun 2024 jumlah pelanggan meningkat 4,18% dari tahun 2023 menjadi total 92,877 juta pelanggan. Dengan peningkatan penjualan listrik dan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa PLN berhasil menjangkau lebih banyak pelanggan dalam memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor, tidak hanya bagi rumah tangga, termasuk juga industri, dan komersial.

Perseroan telah menunjukkan keberhasilan menjaga keandalan sistem distribusi listrik, dengan tercapainya indeks durasi gangguan listrik per pelanggan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) dengan realisasi tahun 2024 sebesar 320,24 menit/pelanggan, mengalami pengurangan 5,29% dibandingkan tahun 2023 sebesar 338,13 menit/pelanggan. Selain itu, juga terlampauinya target indeks jumlah gangguan listrik per pelanggan (*System Average Interruption Frequency Index/SAIFI*) dengan realisasi tahun 2024 mencapai 3,23 kali/pelanggan dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,27 kali/pelanggan. Untuk indeks kepuasan pelanggan tahun 2024 mencapai 98,93%, meningkat dari tahun 2023 dengan indeks 98,02%.

Pada tahun 2024, PLN berhasil mencatat pendapatan usaha mencapai Rp545,38 triliun, meningkat 11,90% atau Rp58 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp487,38 triliun, terutama disebabkan peningkatan penjualan tenaga listrik. Total pendapatan usaha tersebut kontribusi dominan berasal dari penjualan tenaga listrik sebesar 64,67%, disusul dari pendapatan kompensasi sebesar 18,37%, dan subsidi

Throughout 2024, PLN managed to provide concrete contribution as an agent of development through increasing electricity sales, increasing revenue, increasing net profit, and improving service quality to the community. The improvement in these performances will later improve the quality of life of the community, encourage economic growth, and support sustainable development. Sales of electricity in 2024 reached 306,219 GWh, an increase of 6.17% from 2023 of 288,436 GWh, the dominant contribution came from Java, Madura, & Bali Regional segment of 69.93%, then Sumatera & Kalimantan Regional of 22.19%, and Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara Regional of 7.89%. The Board of Commissioners fully supported the Board of Directors' consistent steps in transforming services to customers, recorded in 2024, the number of customers increased by 4.18% from 2023 to a total of 92.877 million customers. With the increase in electricity sales and the number of customers, it shows that PLN manages to reach more customers in meeting energy needs in various sectors, not only for households, but also industry and commercial.

The Company has demonstrated success in maintaining the reliability of electricity distribution system, with the achievement of the electricity interruptions duration index per customer (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) with the realization in 2024 of 320.24 minutes/customer, reducing by 5.29% compared to 338.13 minutes/customer in 2023. In addition, the target achievement for electricity interruptions frequency index per customer (*System Average Interruption Frequency Index/SAIFI*) with the realization in 2024 reaching 3.23 times/customer compared to 4.27 times/customer in 2023. The customer satisfaction index in 2024 reached 98.93%, increasing from 2023 with an index of 98.02%.

In 2024, PLN managed to record revenue of Rp545.38 trillion, an increase of 11.90% or Rp58 trillion compared to Rp487.38 trillion in 2023, mainly driven by increasing of electricity sales. The total revenue was predominantly contributed by sales of electricity of 64.67%, followed by compensation income of 18.37%, and Government electricity subsidy of 14.23%. The increased revenue shows that PLN has



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

listrik dari Pemerintah sebesar 14,23%. Pendapatan yang meningkat menunjukkan bahwa PLN berhasil meningkatkan daya saingnya di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan, sehingga dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menjaga dan senantiasa mendorong pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Total beban usaha tahun 2024 tercatat mencapai Rp484,76 triliun, meningkat 10,13% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp440,18 triliun, terutama didorong adanya peningkatan permintaan energi listrik oleh pelanggan serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Laju peningkatan beban usaha tahun 2024 mampu ditopang oleh pertumbuhan pendapatan, namun terdapat kerugian selisih kurs dan beban lain-lain bersih sehingga menurunkan pencapaian laba sebelum pajak. Meskipun tahun 2024 diwarnai tantangan berat seperti penguatan dollar dan cuaca ekstrim, PLN berhasil melampaui target RKAP 2024 dengan capaian laba bersih sebesar Rp17,76 triliun. Tentunya, perolehan kinerja laba ini berdampak terhadap kontribusi PLN, dalam bentuk pajak maupun dividen.

Dalam menjalankan peran *public service obligation* (PSO) dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi listrik, PLN menghadapi tantangan keterjangkauan tarif. Pemerintah memantau dan memastikan agar tarif listrik tetap terjangkau bagi masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN, terutama untuk golongan rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM), sehingga tidak menjadi beban bagi perekonomian. Ketergantungan Perseroan terhadap APBN masih cukup tinggi dengan meningkatnya persentase pendapatan subsidi dan kompensasi terhadap total pendapatan usaha. Dari 29,5% pada tahun 2023 meningkat menjadi 32,6% pada tahun 2024, terutama disebabkan tidak adanya penyesuaian tarif penjualan tenaga listrik di hampir seluruh golongan pelanggan sejak tahun 2018. Hasil selisih antara BPP ditambah margin dan tarif akan dihitung serta dibayarkan dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Sepanjang tahun 2024, Perseroan memperoleh subsidi mencapai Rp77,05 triliun, meningkat 12,25% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun dan nilai kompensasi mencapai Rp100,18 triliun, meningkat 35,40% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp73,99 triliun.

succeeded in increasing its competitiveness in the market and attracting more customers, thereby strengthening the Company's financial position. The Board of Commissioners requested the Board of Directors to maintain and continuously encourage the Company's revenue growth in a sustainable manner.

Total operating expenses in 2024 were recorded at Rp484.76 trillion, an increase of 10.13% compared to Rp440.18 trillion in 2023, mainly driven by higher electricity demand from customers as well as the weakening of the rupiah against foreign currencies. The rate of increase in operating expenses in 2024 was supported by revenue growth, but there were foreign exchange losses and other net expenses, which reduced the achievement of profit before tax. Even though 2024 was marked by tough challenges such as the strengthening of US dollar and extreme weather, PLN managed to exceed the 2024 RKAP target by achieving net profit of Rp17.76 trillion. Certainly, this profit performance has an impact on PLN's contribution, in the form of taxes and dividends.

In carrying out the role of Government's public service obligation (PSO) to distribute electricity subsidy, PLN faces the challenge of affordable tariffs. The government monitors and ensures that electricity tariffs remain affordable for the community by referring to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2023 on the fifth amendment to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2016 on electricity tariffs provided by PT PLN, particularly for households and small and medium enterprises (SMEs), so that it does not become a burden on the economy. The Company's dependence on the State Budget is still quite high with an increase in the percentage of subsidy and compensation income to total revenue. From 29.5% in 2023, it increased to 32.6% in 2024, mainly due to the absence of adjustments to electricity sales tariffs for almost all customer groups since 2018. The difference between BPP plus margin and tariffs will be calculated and paid in the form of subsidies and compensation. Throughout 2024, the Company received subsidies of Rp77.05 trillion, an increase of 12.25% compared to Rp68.64 trillion in 2023 and compensation value of Rp100.18 trillion, an increase of 35.40% compared to Rp73.99 trillion in 2023.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

PLN terus meningkatkan kontribusi kepada negara diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara, baik melalui pembayaran pajak, dividen, maupun kontribusi langsung dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk tahun 2024, PLN menyetorkan dividen kepada negara mencapai Rp3,10 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,19 triliun. Pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 mencapai sebesar Rp62,24 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023. Keseluruhan pencapaian kinerja keuangan yang positif di atas tidak terlepas dari komitmen PLN menjalankan bisnis secara transparan dan akuntabel, antara lain adanya penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai upaya menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.

Inovasi dan Digitalisasi

Innovation and Digitalization

Dewan Komisaris meminta Direksi untuk mendorong Perseroan terus berinovasi dan melakukan digitalisasi di berbagai aspek operasional, seperti dalam pengelolaan energi, pelayanan pelanggan, dan pengembangan bisnis baru. Digitalisasi PLN di tahun 2024 terus berlanjut dengan berbagai inisiatif, termasuk integrasi layanan kendaraan listrik melalui aplikasi PLN *Mobile*, pengembangan aplikasi baru untuk pengelolaan arsip, sistem monitoring digital, integrasi aset dan layanan serta kolaborasi dengan startup energi melalui *platform Connex Powered by PLN*. Dari sisi IT & *Cyber Security*, Dewan Komisaris menyarankan Direksi melanjutkan program transformasi teknologi informasi dan digitalisasi untuk mendukung perbaikan proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan yang semakin baik. Selain itu, Direksi perlu fokus untuk memperkuat aspek *cyber security*, salah satunya melalui pembentukan Komite Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/3/2023.

PLN continues to increase its contribution to the state, expected to provide a greater contribution to the state, including through tax payments, dividends, and direct contributions in supporting national development. In 2024, PLN paid dividends to the state of Rp3.10 trillion, an increase compared to Rp2.19 trillion in 2023. Tax payments and Non-Tax State Revenue (PNBP) in 2024 reached Rp62.24 trillion, an increase/ compared to 2023. The overall positive financial performance achievement above is inseparable from PLN's commitment to running a business in a transparent and accountable manner, including the signing of memorandum of understanding with the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an effort towards a corporation with good and clean governance.

The Board of Commissioners requested the Board of Directors to encourage the Company to continuously innovate and digitize in various operational aspects, such as in energy management, customer service, and new business development. PLN's digitalization in 2024 continued with various initiatives, including the integration of electric vehicle services through PLN Mobile application, development of new applications for archive management, digital monitoring systems, asset and service integration and collaboration with energy startups through Connex Powered by PLN platform. From IT & Cyber Security side, the Board of Commissioners advised the Board of Directors to continue the information technology transformation and digitalization program to support business process improvements that could increase efficiency and provide better customer service. In addition, the Board of Directors needs to focus on strengthening cyber security aspects, one of which is through the establishment of Information Technology Committee as stipulated in the Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/3/2023.





Transisi Energi Bersih

Clean Energy Transition

Terkait dengan transisi energi bersih, pada tahun 2024 PLN terus menggerakkan transisi energi di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, kolaborasi global, dan pengembangan teknologi. Pada Juni 2024, PLN melakukan kolaborasi pendanaan senilai USD581,5 juta dengan World Bank, Canada Clean Energy & Forest Climate Facility dan Clean Technology Fund untuk mendukung peningkatan akses elektrifikasi di Indonesia, program transisi energi serta digitalisasi yang ditandai dengan penandatanganan skema hibah dan perjanjian pinjaman langsung dengan *Sovereign Guarantee*, dalam Program Indonesia *Sustainable Least-cost Electrification-1* (ISLE-1). Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi dalam menyiapkan langkah jangka pendek hingga tahun 2030 maupun jangka panjang sampai tahun 2060 untuk mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060.

Sepanjang tahun 2024, PLN telah merealisasikan pengembangan kapasitas pembangkit listrik EBT yang mencapai 8,80 GW dari target 51,6% atau 20,93 GW pada tahun 2030. Produksi listrik EBT PLN untuk tahun 2024 mencapai 44.717 GWh atau 13,02% dari total produksi tahun 2024 sebesar 343.891 GWh.

Related to clean energy transition, in 2024, PLN continued to drive energy transition in Indonesia, with a focus on increasing the use of renewable energy, global collaboration, and technology development. In June 2024, PLN collaborated on funding worth USD581.5 million with the World Bank, Canada Clean Energy & Forest Climate Facility, and Clean Technology Fund to support increasing access to electrification in Indonesia, energy transition programs, and digitalization marked by the signing of grant scheme and direct loan agreement with the Sovereign Guarantee, in the Indonesia Sustainable Least-cost Electrification-1 (ISLE-1) Program. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' steps in preparing short-term steps until 2030 and long-term steps until 2060 to achieve Net Zero Emissions (NZE) by 2060.

Throughout 2024, PLN realized the development of NRE (new renewable energy) power plant capacity which reached 8.80 GW from the target of 51.6% or 20.93 GW in 2030. PLN's NRE electricity production for 2024 reached 44,717 GWh or 13.02% of the total production in 2024 of 343,891 GWh.

Kinerja Subholding dan Anak Perusahaan

Performance of Subholdings and Subsidiaries

Realisasi kinerja *Subholding* dan Anak Perusahaan (SHAP) PLN pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian positif, termasuk dalam hal peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional. *Subholding* PLN, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berperan dalam memastikan ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik, PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power, berperan penting dalam memastikan pasokan energi listrik yang andal. Sedangkan PLN Icon Plus, *subholding* yang fokus pada layanan digital, mencapai lebih dari 1 juta pelanggan internet. Dewan Komisaris meminta agar Direksi terus menyempurnakan seluruh proses bisnis SHAP di lingkungan PLN *Group* agar kinerja *Holding*, *Subholding*, dan Anak Perusahaan dapat mencapai *value creation* yang ditargetkan, baik dari sisi peningkatan pendapatan usaha maupun pengelolaan efisiensi biaya.

The realization of PLN Subholding and Subsidiaries (SHAP) performance in 2024 showed positive achievements, including in increasing revenue and operational efficiency. PLN's subholding, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) played a role in ensuring the availability of primary energy for power plants, PLN Indonesia Power and PLN Nusantara Power, played an important role in ensuring a reliable supply of electrical energy. Meanwhile, PLN Icon Plus, a subholding focusing on digital services, reached more than 1 million internet customers. The Board of Commissioners requested the Board of Directors to continuously improve all SHAP business processes within PLN Group so that the performance of Holding, Subholding, and Subsidiaries could achieve the targeted value creation, both in terms of increasing revenue and managing cost efficiency.

Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3L)

Occupational Health, Safety, Security and Environment (HSSE)

Risiko kecelakaan kerja yang menyebabkan *fatality* dalam bidang K3L menjadi salah satu risiko korporat dengan level *high*. Untuk itu, Dewan Komisaris meminta Direksi agar memperkuat kebijakan dan implementasi K3L, antara lain dengan adanya KPI K3L yang saling terkait antar Direktorat untuk membangun budaya K3L berjalan dengan baik melalui pendidikan dan bimbingan dari Pimpinan serta memastikan keandalan serta kompetensi mitra yang bekerja sama dengan PLN.

The risk of occupational accidents that cause fatalities in HSSE sector is one of the high-level corporate risks. For this reason, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to strengthen HSSE policy and implementation, including by having interrelated HSSE KPIs among Directorates to establish a well-run HSSE culture through education and guidance from Leadership and ensure the reliability and competence of partners who work with PLN.

Penyertaan Modal Negara (PMN)

State Equity Participation (PMN)

Selama tahun 2024 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memperhatikan penyerapan PMN sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan tetap memperhatikan kualitas proyek-proyek yang didanai oleh PMN dengan hasil yang signifikan. Proyek Listrik Pedesaan (Lisdes) yang bersumber dari PMN digunakan untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan dan meningkatkan akses listrik di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil dan terluar (3T), dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, proyek Lisdes diharapkan dapat mencapai titik sambung pelanggan, tentunya didukung dengan alternatif model bisnis lain, sehingga dapat menghasilkan peningkatan pendapatan usaha.

Throughout 2024, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to pay attention to the absorption of PMN from 2021 to 2024 while still paying attention to the quality of projects funded by PMN with significant results. The Rural Electricity Project (Lisdes) sourced from PMN is used to develop electricity infrastructure and increase electricity access in various regions, including remote and outermost areas (3T), and encourage local economic growth. In addition, the Lisdes project is expected to reach customer connection points, surely supported by alternative business models, so that it can generate increased revenue.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Di awal tahun 2025, perekonomian Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintah sebesar 5,2%, dengan inflasi yang dijaga pada kisaran 2,5%. Proyeksi ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang terjaga, investasi yang terus meningkat, serta ekspor nonmigas yang semakin menunjukkan tren positif. Sejalan dengan RUPTL tahun 2021-2030, proyeksi pertumbuhan listrik nasional mencapai 305 TWh pada skenario optimistis atau 295 TWh pada skenario moderat untuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan korelasi adanya peluang dalam pertumbuhan permintaan listrik secara nasional dan sekaligus tantangan yang dihadapi PLN terkait pengelolaan likuiditas dan biaya operasional perusahaan.

In early 2025, the Indonesian economy is projected to experience fairly stable growth. The government's targeted economic growth is 5.2%, with inflation maintained at around 2.5%. This projection is driven by maintained household consumption, increasing investment, and non-oil and gas exports that increasingly show a positive trend. In line with the 2021-2030 RUPTL, the national electricity growth projection reached 305 TWh in optimistic scenario or 295 TWh in moderate scenario for 2024. This shows a correlation between opportunities in the growth of national electricity demand and at the same time challenges faced by PLN related to the management of liquidity and the Company's operational costs.



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Atas prospek usaha PLN yang disusun Direksi, Dewan Komisaris memandang PLN memiliki prospek yang baik untuk terus memperkuat kontribusi dalam penyediaan energi listrik di tengah laju pembangunan nasional. Seiring upaya Pemerintah dalam meneruskan pemerataan pembangunan Indonesia, terdapat kesempatan besar bagi PLN untuk memperkuat keandalan operasional untuk menghadirkan dukungan energi bagi pusat-pusat ekonomi baru. Dalam upaya mewujudkan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus berupaya mengoptimalkan sumber daya dalam meningkatkan porsi energi baru terbarukan termasuk dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal setempat sehingga dapat meningkatkan pelibatan potensi masyarakat lokal.

Dewan Komisaris terlibat dalam penyusunan prospek usaha Perseroan dan menyampaikan tanggapan terhadap usulan tersebut, baik yang tertuang dalam RJPP Perseroan Tahun 2024-2028 maupun RKAP Tahun 2025 guna memastikan tercapainya Visi untuk menjadi "Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi". Dengan dukungan realisasi kinerja PLN tahun ini yang cukup solid, menjadi pondasi bagi pertumbuhan bisnis Perseroan ke depan. Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi bersama-sama dengan jajaran manajemen di bawahnya mampu mengeksekusi prospek usaha tersebut, salah satunya dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi kelak akan membuahkan hasil kinerja yang positif.

Regarding PLN business prospects prepared by the Board of Directors, the Board of Commissioners views that PLN has a good prospect to constantly strengthen its contribution to the provision of electricity amidst the pace of national development. In line with Government's efforts to continue equal development in Indonesia, there is a great opportunity for PLN to strengthen its operational reliability to provide energy support for new economic centers. To realize the transition to clean and sustainable energy, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continuously optimize resources in increasing the portion of new renewable energy, including by developing the potential of local resources so as to increase the involvement of local community potential.

The Board of Commissioners is involved in the preparation of the Company's business prospects and provides responses to the proposals, both those set out in the Company's 2024-2028 RJPP and the 2025 RKAP, to ensure the achievement of Vision of "To be the Global Top 500 Company and #1 Customer Choice for Energy Solutions". With the support of PLN's solid performance realization this year, it serves as the foundation for the Company's future business growth. The Board of Commissioners is optimistic that the Board of Directors, together with the management below it, is able to execute business prospects, one of which is by adapting to changes that occur in the future in order to produce positive performance results.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Frequency and Method of Providing Advice to the Board of Directors

Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris bertujuan untuk memastikan Direksi dapat mencapai target pada KPI Korporat, target Program Transformasi, dan arahan-arahan RUPS. Pengawasan dan pemberian nasihat dilaksanakan melalui rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan seluruh Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur tertentu, Rapat Internal Dewan Komisaris, dan rapat-rapat Komite maupun surat menyurat dalam bentuk persetujuan dan tanggapan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners' supervision and advisory aim at ensuring that the Board of Directors can achieve the Corporate KPIs targets, Transformation Program targets, and GMS directions. Supervision and advisory are carried out through Board of Commissioners' meetings consisting of Board of Commissioners' Consultation Meetings with all Board of Directors, Board of Commissioners' Meetings with certain Directors, Board of Commissioners' Internal Meeting, and Committee meetings or correspondence in form of approval and responses from the Board of Commissioners.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Selama tahun 2024, terdapat berbagai hal yang telah dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. Selaras dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan Dewan Komisaris dilakukan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi, memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, termasuk rekomendasi atas penerapan kebijakan strategis PLN dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Komite di bawah Dewan Komisaris; maupun Rapat Gabungan (rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi).

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 51 (lima puluh satu) kali, dengan rincian 7 (tujuh) kali Rapat internal, 32 (tiga puluh dua) kali Rapat dengan Direktur Tertentu, dan 12 kali Rapat bersama seluruh Direksi.

Throughout 2024, various matters were conducted as part of the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties and responsibilities. In line with the Articles of Association and applicable laws and regulations, the Board of Commissioners' supervision was carried out on the Company's management policies by the Board of Directors, by providing direction and advice to the Board of Directors, including recommendations on the implementation of PLN's strategic policies in Board of Commissioners' Meetings, Board of Commissioners' Meetings with Committees under the Board of Commissioners; and Joint Meetings (Board of Commissioners meetings inviting the Board of Directors).

In 2024, the Board of Commissioners held 51 (fifty-one) meetings, consisting of 7 (seven) internal meetings, 32 (thirty-two) meetings with specific Directors, and 12 (twelve) meetings with the entire Board of Directors.

Pandangan Atas Penerapan Governansi Korporat dan Manajemen Risiko Terintegrasi

Views on Corporate Governance Implementation and Integrated Risk Management

Dinamika lingkungan internal maupun eksternal semakin mendorong PLN untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas implementasi tata kelola perusahaan (GCG), yang saat ini dikenal dengan istilah governansi korporat. Dewan Komisaris menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan perlu terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kami percaya bahwa penerapan praktik tata kelola akan membawa PLN dapat berkontribusi lebih baik, bagi segenap pemangku kepentingan.

Seiring berkembangnya regulasi maupun *best practices* tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris menilai bahwa GCG PLN perlu terus ditingkatkan kualitas maupun cakupan implementasinya. Untuk itu, PLN melakukan penilaian terhadap implementasi GCG secara berkala. Dewan Komisaris dibantu Komite Audit, telah melakukan pengawasan atas implementasi GCG di PLN dan memandang bahwa penerapan GCG di PLN telah berjalan dengan baik, melalui berbagai laporan dan aktivitas yang dilakukan baik secara periodik maupun *incidental*. Pada tahun 2024, PLN berinisiatif melakukan penilaian GCG mengacu

The dynamics of internal and external environment increasingly encourage PLN to continue to strengthen its supervisory and advisory functions on the implementation of corporate governance (GCG), currently known as corporate governance. The Board of Commissioners is fully aware that improving the quality of implementation of corporate governance principles needs to be carried out consistently and continuously. We believe that the implementation of governance practices will enable PLN to contribute better to all stakeholders.

As regulations and best practices for corporate governance develop, the Board of Commissioners considers that the quality and scope of PLN's GCG implementation need to continuously be improved. For this reason, PLN periodically assesses GCG implementation. The Board of Commissioners, assisted by Audit Committee, has supervised the implementation of GCG at PLN through various reports and activities carried out periodically and incidentally and views that the implementation of GCG at PLN runs properly. In 2024, PLN took the initiative to conduct GCG assessment by referring to the ASEAN Corporate Governance Scorecard



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

pada parameter pengujian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.21 tentang Keterbukaan Informasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (PUGKI). Hasil penilaian tersebut menjadi *opportunity for improvement* dalam strategi implementasi GCG secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karenanya, implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah tanggung jawab semua organ Perseroan, Dewan Komisaris mengajak segenap unsur untuk selalu konsisten dalam penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan, sekaligus menjadi bagian dari komitmen dalam penerapan prinsip keberlanjutan.

Terkait dengan pengelolaan risiko Perseroan, Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi dalam penguatan fungsi manajemen risiko terutama dalam konteks pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. Dewan Komisaris memandang penerapan manajemen risiko perlu terus dievaluasi dan mutakhirkan, untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentunya didukung oleh SDM fungsi pengelola manajemen risiko yang kompeten dan andal melalui program sertifikasi manajemen risiko dengan kerangka kerja manajemen risiko yang lengkap. Dewan Komisaris juga aktif melaksanakan evaluasi manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko. Untuk memastikan risiko telah dikelola dengan baik, PLN menyusun profil risiko Perseroan secara berkala yang menggambarkan pengelolaan risiko yang melekat dalam kegiatan usahanya. Tingkat risiko akhir dari masing-masing risiko utama korporat tahun 2024 digambarkan pada Peta Risiko di akhir tahun 2024 dimana terdapat Risiko Inherent dan Risiko Residu. Risiko Inherent adalah tingkat risiko awal dimana perlakuan risiko baik itu tindakan pengendalian maupun tindakan mitigasi risikonya belum dilaksanakan sedangkan Risiko Residu adalah tingkat risiko yang tertinggal saat dilaporkan pada akhir masa pemantauan risiko. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk terus meningkatkan kualitas akurasi identifikasi, pengukuran, serta metodologi perencanaan manajemen risiko, dan selalu mempertimbangkan residual *risk* dengan kinerja aktual Perseroan. Selain itu, Direksi perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan risiko K3L yang menyebabkan *fatality* dan risiko depresiasi Rupiah terhadap valuta asing ke dalam profil risiko korporat mengingat dampak atas kedua risiko tersebut sangat signifikan terhadap PLN.

(ACGS) testing parameters, Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21 on Information Disclosure for Issuers or Public Companies, and General Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia (PUGKI). The assessment results become opportunity for improvement in the strategy for implementing GCG in a gradual and sustainable manner. Therefore, the implementation of good corporate governance is the responsibility of all Company organs. The Board of Commissioners invites all elements to always be consistent in implementing and improving corporate governance, as well as to become part of the commitment to implementing sustainability principle.

Regarding the Company's risk management, the Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' steps in strengthening risk management function, particularly in implementing integrated risk management. The Board of Commissioners views that the implementation of risk management needs to be continuously evaluated and updated, to obtain optimal results, certainly supported by competent and reliable risk management function human resources through risk management certification program with a complete risk management framework. The Board of Commissioners also actively evaluates risk management through the Risk Management Committee. To ensure that risks are managed properly, PLN periodically prepares the Company's risk profile which describes the risk management inherent in its business activities. The final risk level of each main corporate risk in 2024 was depicted in the Risk Map at the end of 2024, which contained Inherent Risk and Residual Risk. Inherent Risk is the initial risk level in which risk treatment, both control measures and risk mitigation measures, is not yet implemented, while Residual Risk is the level of risk left behind when reported at the end of the risk monitoring period. The Board of Commissioners requested the Board of Directors to continuously improve the quality of accuracy of identification, measurement, as well as risk management planning methodology, and to always consider residual risk with the Company's actual performance. In addition, the Board of Directors needs to pay more attention to the management of K3L risks that cause fatalities and the risk of Rupiah depreciation against foreign currencies into the corporate risk profile considering that the impact of these two risks is very significant for PLN.

Pandangan Atas Implementasi Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) Views on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) Policy

Dalam meningkatkan budaya tata kelola perusahaan, Direksi telah memutakhirkan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) melalui Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) tentang Standar Prosedur Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) Nomor: 0018.E/DIR/2024 tanggal 26 Juni 2024. Hal ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Direksi Nomor: 0015.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Kepatuhan PT PLN (Persero), sebagai bentuk strategi manajemen kepatuhan dalam mendeteksi potensi tindakan *fraud* dan/atau pelanggaran. Pedoman WBS menjadi salah satu mekanisme dan sarana pengaduan pelanggaran untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang/aset, penggelapan, rekayasa laporan keuangan dan/atau non keuangan, kecurangan, pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal PLN, maupun peraturan disiplin pegawai. Detil Pedoman WBS dapat diakses pada *website* <https://web.pln.co.id/tentang-kami/whistleblowers-system>.

Selama tahun 2024, terdapat 364 pengaduan WBS yang diterima, dengan hasil penanganan adalah seluruh pengaduan WBS tersebut telah selesai ditindaklanjuti. Jumlah laporan WBS tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 728 pengaduan. Adapun peran Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan penerapan WBS PLN. Peran aktif Dewan Komisaris antara lain berupa penandatanganan Pakta Integritas, yang berisi komitmen Dewan Komisaris untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian dan pencegahan *fraud* dan pelanggaran kode etik, serta kesediaan untuk melakukan pelaporan ke WBS dalam hal terjadi tindakan *fraud* dan pelanggaran kode etik di lingkungan PLN.

Pengelola WBS PLN yang dijalankan oleh Satuan Kerja fungsi kepatuhan, menerima Pengaduan dan melakukan pra-analisa Pengaduan yang masuk dalam ruang lingkup kategori Pengaduan WBS serta menganalisa dan mengevaluasi Pengaduan terhadap pemenuhan indikasi dan Bukti Permulaan dalam menentukan tindak lanjut Pengaduan. Tim Pengelola WBS secara berkala menyusun laporan penerapan WBS dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bahan monitoring dan evaluasi penerapan WBS yang telah dilakukan, mencakup laporan penerimaan dan tindak lanjut atas pengaduan WBS tersebut.

In improving corporate governance culture, the Board of Directors has updated the Whistleblowing System (WBS) Guidelines through the Implementing Regulation of PT PLN (Persero) on Standard Procedure for Whistleblowing System within PT PLN (Persero) Number: 0018.E/DIR/2024 dated June 26, 2024. This is a follow-up to the Board of Directors Regulation Number: 0015.P/DIR/2023 on Strategic Compliance Management Policies of PT PLN (Persero), as a form of compliance management strategy in detecting potential *fraud* and/or violations. The WBS Guidelines are one of the mechanisms and means of reporting violations to prevent *fraud* in form of corruption, abuse of authority/assets, embezzlement, manipulation of financial and/or non-financial statements, *fraud*, violations of applicable laws and regulations, PLN's internal policies, and employee disciplinary regulations. Details of WBS Guidelines is accessible on the *website* <https://web.pln.co.id/tentang-kami/whistleblowers-system>.

Throughout 2024, there were 364 WBS complaints received, with the results of handling that all WBS complaints were followed up. The number of WBS reports decreased compared to 728 complaints in 2023. The Board of Commissioners plays an active role in the implementation and supervision of PLN's WBS. The active role of the Board of Commissioners includes signing the Integrity Pact, which contains the Board of Commissioners' commitment to playing an active role in efforts to control and prevent *fraud* and violations of the code of conduct, as well as the willingness to report to WBS in the event of *fraud* and violations of the code of conduct within PLN.

The PLN's WBS Manager, carried out by Compliance Function Work Unit, receives Complaints and conducts pre-analysis of Complaints that fall within the scope of WBS Complaint category and analyzes and evaluates Complaints against the fulfillment of indications and Initial Evidence in determining the follow-up to such Complaints. The WBS Management Team periodically prepares a report on WBS implementation and submits it to the President Director and the Board of Commissioners as a monitoring and evaluation material for the implementation of WBS that has been carried out, including reports on receipt and follow-up of complaints about WBS.



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan pedoman kerja komite. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menilai komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam piagam komite, termasuk pelaksanaan rapat dan realisasi program kerja komite. Keempat komite di bawah Dewan Komisaris tersebut telah membantu dan mendukung fungsi pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris secara positif. Setiap komite telah melakukan evaluasi kinerja komite serta memberikan masukan dan rekomendasi yang independen, profesional dan berkualitas, disertai dengan latar belakang permasalahan dan argumentasi yang relevan untuk setiap permasalahan yang dibahas.

In carrying out its supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners has Committees under the Board of Commissioners consisting of Audit Committee, Risk Management Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Integrated Governance Committee with their respective roles and responsibilities in accordance with the committee's work guidelines. Throughout 2024, the Board of Commissioners evaluated the committees under the Board of Commissioners in accordance with their scope of duties and responsibilities in the committee charter, including the implementation of meetings and realization of the committee's work program. The four committees under the Board of Commissioners assisted and supported the supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners positively. Each committee evaluated its performance and provided independent, professional, and quality input and recommendations, accompanied by a background to the problem and relevant arguments for each problem discussed.

Komite Audit

Audit Committee

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman kerjanya, Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam melakukan telaah dan pengawasan terhadap informasi Keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi Audit Internal dan Audit Eksternal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PLN dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain terkait dengan laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait informasi keuangan Perseroan, termasuk ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PLN. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan (*oversight*) terhadap proses *auditing*, dan implementasi *corporate governance*, termasuk telaah terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta tindak lanjutnya oleh Direksi atas temuan audit tersebut.

Based on the Audit Committee Charter which serves as its work guideline, the Audit Committee is responsible for reviewing and overseeing financial information, internal control systems, implementation of Internal Audit and External Audit functions, compliance with laws and regulations, review of complaints related to PLN and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners. The implementation of overseeing function covers financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information, including the Company's compliance with laws and regulations related to PLN's business activities. The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out oversight of auditing process, and implementation of corporate governance, including reviewing the effectiveness of internal and external audits and their follow-up by the Board of Directors on the audit findings.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 60 (enam puluh) kali sesuai dengan Pedoman Kerjanya, paling sedikit sebulan sekali dengan tingkat kehadiran rata-rata setiap anggota Komite Audit adalah 89,62%. Hasil evaluasi kinerja Komite Audit menunjukkan bahwa Komite Audit telah memberikan kontribusi positif dalam memastikan transparansi laporan keuangan PLN, penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melakukan *review* secara berkala atas sistem pengelolaan talenta (*Talent Management System*), mengevaluasi calon wakil PLN yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris melakukan validasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk mendapatkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*), menyusun usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta menelaah usulan perubahan struktur organisasi perusahaan yang disampaikan oleh Direksi. Selain itu, komite juga bertugas merumuskan kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel untuk diusulkan kepada RUPS.

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan, dengan realisasi 6 (enam) kali rapat, dan tingkat kehadiran rata-rata anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 90,25%. Hasil evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi menunjukkan bahwa Komite telah menjalankan tugasnya secara efektif dengan memberikan kontribusi positif dalam memastikan kepatuhan PLN terkait akuntabilitas pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi.

Throughout 2024, the Audit Committee held 60 (sixty) meetings in accordance with its Work Guidelines, at least once a month, with an average attendance rate of each member of the Audit Committee of 89.62%. The results of the Audit Committee's performance evaluation showed that Audit Committee made positive contribution in ensuring the transparency of PLN's financial statements, and strengthening internal control system as well as corporate governance.

In accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter (KNR), the responsibility of Nomination and Remuneration Committee is to conduct periodic reviews of the Talent Management System, evaluate candidates of PLN representatives who will be recommended as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of Subsidiaries, before being submitted to the GMS. The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in validating the talents recommended by the Board of Directors to the Board of Commissioners (*Selected Talent*), to obtain a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (*Nominated Talent*), prepares proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and reviews proposals for changes to the Company's organizational structure submitted by the Board of Directors. In addition, the committee is also in charge of formulating remuneration policy for the Board of Directors and Board of Commissioners in form of salary and honorariums, fixed benefits and facilities and variable performance bonuses/incentives to be proposed to the GMS.

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee held meetings at least once every 3 (three) months or as necessary, with the realization of 6 (six) meetings, and an average attendance rate of members of the Remuneration and Nomination Committee of 90.25%. The results of the Nomination and Remuneration Committee performance evaluation showed that the Committee carried out its duties effectively by providing positive contribution in ensuring PLN's compliance with the accountability of nomination and remuneration function implementation.



Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko, tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi di PLN serta menyampaikan rekomendasi terkait dengan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. Komite Manajemen Risiko juga memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko, menjadi counterpart dari Satuan Manajemen Risiko PLN dalam implementasi program manajemen risiko korporat berjalan efektif serta membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terkait dengan manajemen risiko secara menyeluruh.

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat minimal sebulan sekali sesuai dengan Pedoman Kerjanya atau sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat, dengan tingkat kehadiran anggota rata-rata Komite Manajemen Risiko adalah 96,4%. Hasil evaluasi kinerja Komite menunjukkan bahwa Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugasnya secara efektif dengan memberikan kontribusi positif dalam memastikan kepatuhan PLN terhadap akuntabilitas pengelolaan risiko.

Based on the Risk Management Committee Charter, the responsibility of the Risk Management Committee is to monitor and evaluate the planning and implementation of integrated risk management at PLN and to submit recommendations regarding the suitability between risk management policies and their implementation. The Risk Management Committee also monitors and ensures that all Company activities listed in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work and Budget Plan (RKAP) implement risk management principles, becoming a counterpart of PLN Risk Management Unit in implementing corporate risk management programs effectively and assisting the Board of Commissioners in their supervisory functions related to overall risk management.

Throughout 2024, the Risk Management Committee held meetings at least once a month in accordance with its Charter or 40 (forty) meetings, with an average attendance rate of the Risk Management Committee members of 96.4%. The results of the Committee's performance evaluation showed that the Risk Management Committee carried out its duties effectively by providing positive contribution to ensuring PLN's compliance with risk management accountability.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee

Komite ini dibentuk pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 dimana PLN termasuk BUMN dengan klasifikasi risiko sistemik dan kategori konglomerasi, sehingga wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman kerjanya ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, dengan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi dan evaluasi kebijakan tata kelola terintegrasi, termasuk pemantauan kesesuaian kebijakan tata kelola terintegrasi di lingkungan PLN dan Anak Perusahaan. Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.

This committee was established in 2024, as a follow-up to the issuance of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023, in which PLN was included in SOE with systemic risk classification and conglomerate category, so that it was required to establish an Integrated Governance Committee. Its charter is set out in the Integrated Governance Committee Charter, with the responsibility to assist the Board of Commissioners in providing recommendations and evaluations of integrated governance policies, including monitoring the suitability of integrated governance policies within PLN and its Subsidiaries. In addition, the Integrated Governance Committee assesses the adequacy of internal control, implements integrated compliance function, and provides recommendations for improving integrated governance policies.

Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali rapat dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 100%. Hasil evaluasi kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi menunjukkan bahwa Komite telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan implementasi tata kelola terintegrasi sebagai bagian dari penguatan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

In 2024, the Integrated Governance Committee held meetings at least once a month, with the realization of 4 meetings and an average attendance rate of Integrated Governance Committee members of 100%. The results of the Integrated Governance Committee performance evaluation indicated that the Committee carried out its duties properly in ensuring the implementation of integrated governance as part of strengthening risk management and corporate governance.

Implementasi Prinsip *Environmental, Social & Governance* (ESG) Berkelanjutan, Dukong Keberlanjutan Sosial

Implementation of Sustainable Environmental, Social & Governance (ESG) Principles, Supporting Social Sustainability

Sebagai BUMN ketenagalistrikan yang memegang peranan penting dalam industri listrik nasional, PLN bertanggung jawab dalam menghasilkan produk listrik yang aman bagi pelanggan dan juga ramah terhadap lingkungan. Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah Direksi dalam menjalankan eksekusi program ESG dan prinsip keberlanjutan dengan mendorong praktik pengelolaan bisnis yang berorientasi pada aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan risiko terkait perubahan iklim, praktik kesetaraan *gender*, sosial dan tata kelola yang mulai diinisiasi sejak tahun 2023. Sejalan hal tersebut, PLN melakukan langkah terobosan, khususnya di bidang ketenagalistrikan, baik oleh PLN sebagai entitas bisnis maupun di lingkungan Holding Subholding PLN group, dengan memandang prinsip ESG sebagai peluang yang akan meningkatkan nilai Perusahaan sekaligus menjadi kontribusi nyata PLN dalam mendorong terwujudnya ketahanan energi nasional.

As a state-owned electricity company that plays an important role in the national electricity industry, PLN is responsible for producing electricity products that are safe for customers and also environmentally friendly. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' steps in implementing ESG program and sustainability principles by encouraging business management practices oriented towards environmental and biodiversity aspects, risk management related to climate change, and gender, social and governance equality practices initiated since 2023. In line with this, PLN takes breakthrough steps, particularly in electricity sector, both by PLN as a business entity and within PLN Group Holding-Subholding, by viewing the ESG principle as an opportunity that will increase the Company's value as well as serve as PLN's concrete contribution in encouraging the realization of national energy security.

Terkait kinerja lingkungan, PLN mendukung sepenuhnya upaya dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi berkelanjutan baik dalam kancah nasional maupun global. Pengembangan kebijakan dan strategi lingkungan yang sejalan dengan prinsip ESG diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional Perusahaan, mengurangi emisi karbon dan mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. Selain itu, PLN juga aktif dalam program rehabilitasi lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Regarding environmental performance, PLN fully supports the efforts to mitigate climate change and sustainable energy transitions at both national and global levels. The development of environmental policies and strategies in line with ESG principles is aimed at increasing efficiency in the Company's operations, reducing carbon emissions, and developing innovations in the use of clean and renewable energy. In addition, PLN is also active in environmental rehabilitation programs, biodiversity conservation, and community education and involvement in preserving the environment.



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

Dalam melaksanakan program transisi energi, Dewan Komisaris meminta Direksi didasari oleh kajian yang komprehensif dan realistis, dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan listrik sebagai energi bersih dari pembangkit EBT, melakukan pengembangan jaringan pintar (*smart grid*) dan interkoneksi sehingga mampu mengoptimalkan kontribusi EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional tanpa meningkatkan nilai BPP per kWh. Komitmen dalam pengembangan energi bersih dan upaya penurunan emisi karbon secara terus-menerus, di tahun 2024 PLN memperoleh penghargaan tertinggi Aditama dalam ajang 'Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan 3 (tiga) penghargaan bergengsi lainnya dalam *Investing on Climate Editor's Choice Award 2024*, dalam kategori *Renewable Energy Investment*, *Best Literacy for Climate Resilience*, dan *Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability*. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas prestasi tersebut, yang menegaskan PLN dalam memimpin transisi energi dan pengembangan pembangkit EBT di Indonesia untuk mendukung tercapainya target *net zero emission*.

PLN berupaya menciptakan kesetaraan layanan dengan memperluas jaringan listrik ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) melalui Program Listrik Desa dan Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Selain itu, program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine* mendukung sektor pertanian dan perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja sosial di bidang pengembangan sosial dan pemberdayaan masyarakat dijalankan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang fokus pada sektor-sektor strategis yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah sekitar operasi PLN meliputi 4 (empat) sektor, yaitu pendidikan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), lingkungan, serta inisiatif *Creating Shared Value* (CSV) yang mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat. Realisasi program TJSL tahun 2024 berdasarkan alokasi anggaran, yakni Program *Community Involvement and Development* (CID) mencapai Rp377,37 miliar, Program Non-CID mencapai Rp176,85 miliar dan Program Usaha Mikro Kecil (UMK) mencapai Rp1,5 miliar.

In implementing energy transition program, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to be guided by a comprehensive and realistic study, with the support of competent human resources to produce electricity as clean energy from NRE plants, develop smart grids and interconnections so as to optimize the contribution of NRE in the national electricity system without increasing BPP value per kWh. As the commitment to developing clean energy and efforts to continuously reduce carbon emissions, in 2024, PLN received the highest Aditama award at the '2024 EBTKE Stakeholder Performance Appreciation Night' from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and 3 (three) other prestigious awards in the Investing on Climate Editor's Choice Award 2024, under the category of Renewable Energy Investment, Best Literacy for Climate Resilience, and Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability. The Board of Commissioners expressed its appreciation for this achievement, which emphasized PLN's leadership in leading energy transition and developing NRE plants in Indonesia to support the achievement of net zero emission target.

PLN strives to create equality of service by expanding the electricity network to 3T areas (disadvantaged, frontier, and outermost) through the Village Electricity Program and Targeted Electricity Subsidies. In addition, the Electrifying Agriculture and Electrifying Marine programs support the agriculture and fisheries sectors, in order to improve community welfare.

Social performance in social development and community empowerment is carried out through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, which focuses on strategic sectors considered capable of making significant contribution to the acceleration of sustainable development, particularly in areas around PLN operations covering 4 (four) sectors, namely education, development of micro and small businesses (MSEs), environment, and the Creating Shared Value (CSV) initiative that integrates business interests with community empowerment. The realization of the 2024 TJSL program was based on budget allocation, namely Community Involvement and Development (CID) Program which reached Rp377.37 billion, Non-CID Program which reached Rp176.85 billion, and the Micro and Small Business (MSE) Program which reached Rp1.5 billion.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in Board of Commissioners' Composition

Sepanjang tahun 2024 terjadi 3 (tiga) kali perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN, dalam rangka untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi yang lebih baik. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-72/MBU/ 03/2024 tanggal 19 Maret 2024, pemegang saham mengangkat Sdri. Nawal Nely sebagai Komisaris dan memberhentikan Sdr. Eko Sulistyو dan Sdr. Tedi Bharata sebagai Komisaris. Dalam Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor: SK-189/MBU/07 tanggal 23 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pengangkatan Bpk. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Bpk. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen dan Bpk. Andi Arief sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024, pemegang saham menyetujui pengangkatan Bpk. Aminuddin Ma'ruf sebagai Komisaris, Bpk. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris, Bpk. Yazid Fanan sebagai Komisaris Independen dan Bpk. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

Atas nama Dewan Komisaris, Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris sebelumnya yakni Bpk. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Bpk. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris, atas kontribusi dan dedikasinya kepada PLN dan menyampaikan selamat bergabung kepada para anggota Dewan Komisaris yang baru. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PLN menjadi sebagai berikut:

Burhanuddin Abdullah	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Suahasil Nazara	: Wakil Komisaris Utama
Dadan Kusdiana	: Komisaris
Susiwijono Moegiarso	: Komisaris
Mutanto Juwono	: Komisaris Independen
Andi Arief	: Komisaris Independen
Aminuddin Ma'ruf	: Komisaris
Yazid Fanani	: Komisaris Independen
Ali Masykur Musa	: Komisaris Independen
Jisman Parada Hutajulu	: Komisaris

Dewan Komisaris berupaya terus meningkatkan soliditas internal agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasehatan berjalan semakin baik.

Throughout 2024, there were 3 (three) changes in the composition of PLN Board of Commissioners, in order to continue to provide best services for customers and carry out a better energy transition. Based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number: SK-72/MBU/03/2024 dated March 19, 2024, the shareholders appointed Ms. Nawal Nely as Commissioner and dismissed Mr. Eko Sulistyو and Mr. Tedi Bharata as Commissioners. In the Decree of the Minister of SOEs as GMS Number: SK-189/MBU/07 dated July 23, 2024, the shareholders approved the appointment of Mr. Burhanuddin Abdullah as President Commissioner and Independent Commissioner, Mr. Mutanto Juwono as Independent Commissioner, and Mr. Andi Arief as Independent Commissioner. Furthermore, based on the Decree of the Minister of SOEs as GMS No.SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2024, the shareholders approved the appointment of Mr. Aminuddin Ma'ruf as Commissioner, Mr. Jisman Parada Hutajulu as Commissioner, Mr. Yazid Fanan as Independent Commissioner, and Mr. Ali Masykur Musa as Independent Commissioner.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank the previous Board of Commissioners, namely Mr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo as President Commissioner and Independent Commissioner and Mr. Mohamad Ikhsan as Commissioner, for their contributions and dedication to PLN, and congratulate the new members of the Board of Commissioners. Thus, the composition of the PLN Board of Commissioners is as follows:

Burhanuddin Abdullah	: President Commissioner and Independent Commissioner
Suahasil Nazara	: Deputy President Commissioner
Dadan Kusdiana	: Commissioner
Susiwijono Moegiarso	: Commissioner
Mutanto Juwono	: Independent Commissioner
Andi Arief	: Independent Commissioner
Aminuddin Ma'ruf	: Commissioner
Yazid Fanani	: Independent Commissioner
Ali Masykur Musa	: Independent Commissioner
Jisman Parada Hutajulu	: Commissioner

The Board of Commissioners strives to continuously improve internal solidarity so that the implementation of supervisory and advisory functions runs better.



Apresiasi

Appreciation

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris PLN ini Kami sampaikan. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah, seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh pelanggan, dan mitra usaha PLN atas seluruh dukungan dan kerja samanya selama tahun 2024.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang telah berperan penting dalam mendukung seluruh proses bisnis PLN secara berkelanjutan. Sebagai *agent of development*, PLN hadir dalam menjalankan peran penyaluran subsidi listrik dan memastikan bahwa subsidi dilakukan dengan tepat sasaran.

Dewan Komisaris terus berupaya meningkatkan fungsi pengawasan dan an guna mendorong pertumbuhan kinerja Perusahaan, dengan terus mengoptimalkan peluang bisnis yang ada mencapai keberlanjutan bagi bangsa Indonesia tercinta.

Thus, we submit the report on the supervisory duties of PLN Board of Commissioners. We express our appreciation and gratitude to the central and regional Government, all stakeholders, including all customers, and PLN business partners for all their support and cooperation throughout 2024.

The Board of Commissioners would like to thank and express our appreciation to the Ministry of State-Owned Enterprises (Ministry of SOEs), Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources (Ministry of ESDM) that have played important roles in supporting all PLN business processes sustainably. As an agent of development, PLN is present in carrying out the role of distributing electricity subsidies and ensuring that subsidies are carried out on target.

The Board of Commissioners continues to strive to improve the supervisory and financial functions to encourage the growth of the Company's performance, by continuing to optimize existing business opportunities to achieve sustainability for the beloved Indonesian nation.

Jakarta, Juni 2025 Jakarta, June , 2025

Atas Nama Dewan Komisaris On Behalf of the Board of Commissioners

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Burhanuddin Abdullah

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner



1 Mutanto Juwono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

2 Yazid Fanani
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 Aminuddin Ma'ruf
Komisaris
Commissioner

4 Andi Arief
Komisaris Independen
Independent Commissioner

5 Burhanuddin Abdullah
Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen
President Commissioner and
Independent Commissioner



6

Suahasil Nazara

Wakil Komisaris Utama
Deputy President Commissioner

7

Susiwijono Moegiarso

Komisaris
Commissioner

9

Ali Masykur Musa

Komisaris Independen
Independent Commissioner

8

Jisman Parada Hutajulu

Komisaris
Commissioner

10

Dadan Kusdiana

Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Darmawan Prasodjo
Direktur Utama
President Director

Transformasi PLN 2.0 - *The Next Chapter of Transformation* telah membentuk ekosistem korporat PLN menjadi semakin kokoh dan dinamis. Hal ini mendorong PLN semakin dekat dalam mencapai aspirasi untuk menjadi **#1 The Largest Utility & #1 Energy Transition Leader in Southeast Asia**. Pada 2024, PLN berhasil masuk dalam 10 besar perusahaan terbaik versi *Fortune Southeast Asia*, menempati peringkat ke-6 berkat kinerja bisnis, pertumbuhan keuangan tahunan, dan transformasi digital *end-to-end*. Selain itu, PLN juga dinobatkan sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia, dengan pertumbuhan aset signifikan sejak 2020 dan pasca transformasi HSH meningkat 6,09% menjadi Rp1,77 kuadriliun.

PLN Transformation 2.0 - The Next Chapter of Transformation has made PLN's corporate ecosystem increasingly solid and dynamic. This drives PLN closer to achieving its aspiration to become **#1 The Largest Utility & #1 Energy Transition Leader in Southeast Asia**. In 2024, PLN successfully entered the top 10 best companies according to *Fortune Southeast Asia*, ranking 6th thanks to its business performance, annual financial growth, and end-to-end digital transformation. In addition, PLN was also named the largest utility state-owned company in Indonesia, with significant asset growth since 2020 and post-HSH transformation increasing by 6.09% to Rp1.77 quadrillion.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

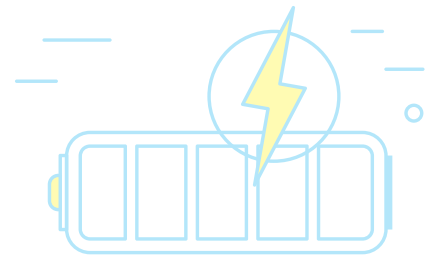
Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nyalah, kami, Perseroan dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dengan pertumbuhan dan kinerja yang positif. Memasuki Transformasi Etape Kedua pasca pembentukan *Holding Subholding* untuk mewujudkan struktur organisasi yang lebih *fit* dengan kebutuhan masa depan, telah membawa PLN menghadirkan kontribusi positif bagi ketersediaan energi listrik di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja Perseroan sepanjang tahun buku 2024 melalui Laporan Tahunan 2024 ini. Laporan ini memberikan gambaran bagi segenap pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja PLN dalam memimpin Perseroan, mencakup analisis kinerja Perseroan selama tahun 2024, kendala yang dihadapi dan upaya mitigasinya, perkembangan penerapan tata kelola, termasuk integrasi prinsip *Environmental, Social & Governance* (ESG) ke dalam proses bisnis, uraian terkait prospek usaha Perseroan, penilaian atas kinerja komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi Perseroan.

Distinguished Shareholders and Stakeholders,

We would like to express our praise and gratitude to the presence of Allah SWT that for the blessings and abundance of His grace, we, the Company, were able to go through the challenging year 2024 with positive growth and performance. Entering the Second Stage of Transformation, after establishing Holding Subholding to realize an organizational structure that is more fit with future needs, has brought PLN to present positive contribution to the availability of electricity in Indonesia.

On this occasion, allow us to report on the management and performance of the Company throughout the 2024 financial year through this 2024 Annual Report. This report provided an overview for all stakeholders to learn about PLN's performance in leading the Company, including the analysis of the Company's performance throughout 2024, the obstacles faced and their mitigation efforts, the development of governance implementation, including the integration of Environmental, Social & Governance (ESG) principles into business processes, a description of the Company's business prospects, performance assessment of the committees under the Board of Directors, and changes in the Company's Board of Directors composition.



Tinjauan Makro Ekonomi 2024

Macroeconomic Overview in 2024

Sampai dengan akhir tahun 2024, ekonomi global menghadapi situasi ketidakpastian dan risiko perlambatan pertumbuhan. Tingkat inflasi global menunjukkan tren yang menurun walaupun sejumlah negara mengalami perbaikan. Konflik geopolitik yang sebelumnya memicu hambatan pada komoditas energi, antara lain berupa peningkatan harga pada bahan bakar fosil, berangsur menurun. Hambatan pada rantai pasok komoditas energi telah mendorong dunia untuk memperkuat keamanan energi melalui penggunaan sumber-sumber energi terbarukan. Meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah negara, isu ketahanan pangan serta perubahan iklim ekstrim semakin menambah risiko terhadap stabilitas ekonomi global, yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional.

Permintaan listrik global meningkat tajam pada 2024, melampaui pertumbuhan listrik bersih. Lonjakan ini didorong oleh pesatnya adopsi teknologi seperti AI, pusat data, kendaraan listrik, dan pompa panas. Namun, faktor utama peningkatan permintaan adalah penggunaan pendingin udara yang melonjak selama gelombang panas. Kondisi ini turut memicu kenaikan kecil pada pembangkitan listrik berbasis fosil dan mendorong emisi sektor ketenagalistrikan ke level tertinggi sepanjang sejarah. Untuk itu, program transisi energi perlu dikembangkan untuk pembangkit listrik rendah karbon. Tenaga surya menjadi penggerak utama transisi energi global, meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, serta menyumbang tambahan listrik lebih banyak dibandingkan sumber energi lainnya dalam periode tersebut.

Kapasitas energi terbarukan (EBT) global tumbuh di level 15,1% pada tahun 2024 atau memecahkan rekor 4.448 gigawatt (GW). Pertumbuhan energi terbarukan tahunan ini menegaskan bahwa EBT kini semakin layak secara ekonomi dan mudah diadopsi.

Until the end of 2024, the global economy faced a situation of uncertainty and the risk of slowing growth. The global inflation rate showed a downward trend though a number of countries improved. Geopolitical conflicts that previously triggered obstacles to energy commodities, such as increasing prices for fossil fuels, gradually decreased. Constraints in energy commodity supply chain pushed the world to strengthen energy security through the use of renewable energy sources. Rising geopolitical tensions in several countries, issues of food security, and extreme climate change were increasing risks to global economic stability, which would certainly affect national economic development.

The global electricity demand increased sharply in 2024, surpassing clean electricity growth. This surge was driven by the rapid adoption of technologies such as AI, data centers, electric vehicles, and heat pumps. However, the main factor in the increased demand was the soaring use of air conditioning during heat waves. This condition also triggered a small increase in fossil-based electricity generation and pushed electricity sector emissions to their highest level in history. For this reason, energy transition program needs to be developed for low-carbon power plants. Solar power is the key driver of global energy transition, doubling in the past three years, and contributing more additional electricity than other energy sources in that period.

Global renewable energy (RNE) capacity grew at 15.1% in 2024 or broke a record of 4,448 gigawatts (GW). This annual renewable energy growth confirms that EBT is now increasingly economically viable and easy to adopt.

(sumber: <https://www.weforum.org/stories/2025/04/renewable-energy-transition-wind-solar-power-2024/>)
(source: <https://www.weforum.org/stories/2025/04/renewable-energy-transition-wind-solar-power-2024/>)

2024 Headline Figures

Renewable power capacity 4 448 GW	Renewables share of total capacity 46.4% YoY growth of renewable power capacity 15.1%	Variable renewable share of total capacity 31.3% YoY growth of variable renewable power capacity 23.2%	2030 Target 11.17 TW Base year (2022) 3.38 TW End of 2024, cumulative 4.45 TW Needed to reach target 6.72 TW
 Solar 1 865 GW	 Hydro 1 283 GW	 Wind 1 133 GW	
 Bioenergy 151 GW	 Geothermal 15 GW	 Marine 1 GW	

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 tetap tangguh, ditopang permintaan domestik. Ekonomi tumbuh 5,03% (yoy), sedikit melambat dari 5,05% pada tahun 2023. Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi melalui program peningkatan daya saing produk nasional dan stabilisasi harga pangan. Investasi tumbuh positif didorong oleh penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan insentif bagi investasi swasta. Nilai tukar Rupiah per akhir 2024 berada di Rp16.095, melemah 4,34% (yoy), namun relatif lebih baik dibanding won Korea, yen Jepang, dan lira Turki. Inflasi per posisi Desember 2024 tercatat 1,57% (yoy), terendah sepanjang sejarah, dipicu normalisasi harga pangan dan penyesuaian harga pemerintah.

Kebutuhan energi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun seiring bertambahnya populasi penduduk dan volume PDB yang terus tumbuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Indonesia meningkat 1,11% (yoy) dengan pertumbuhan ekonomi 5,03% (yoy). Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah mendorong transisi energi menuju target Net Zero Emission di tahun 2060, didukung Perpres Nomor: 112/2022 yang memprioritaskan pembangkit listrik dengan teknologi rendah emisi dan membatasi pembangunan PLTU.

The national economic growth in 2024 remained resilient, supported by domestic demand. The economy grew by 5.03% (yoy), slightly slowing from 5.05% in 2023. The government maintained economic growth through a program to increase national product competitiveness and stabilize food prices. Investment grew positively driven by the completion of National Strategic Projects and incentives for private investment. The Rupiah exchange rate at the end of 2024 was at Rp16,095, weakening by 4.34% (yoy), but relatively better than those of Korean won, Japanese yen, and Turkish lira. The inflation as of December 2024 was recorded at 1.57% (yoy), the lowest in history, triggered by the normalization of food prices and government price adjustments.

Energy needs in Indonesia increases from year to year in line with the increase in population and the volume of GDP. Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's population increased by 1.11% (yoy) with economic growth of 5.03% (yoy). To address this challenge, the government pushes for an energy transition towards Net Zero Emission target in 2060, supported by Presidential Regulation Number: 112/2022 which prioritizes power plants with low-emission technology and limits the construction of PLTU.

Analisis Kinerja Perseroan Tahun 2024

Company Performance Analysis in 2024

Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi PLN. Pencapaian kinerja PLN dalam aspek operasional maupun keuangan menunjukkan hasil yang baik dan membanggakan. Untuk itu, Direksi terus berupaya memenuhi target kinerja usaha Perseroan setiap tahun dalam RKAP 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasi, layanan dan keandalan kepada pelanggan, realisasi produksi kWh listrik EBT dan bauran energi EBT untuk memenuhi akses listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan tema Laporan Tahunan ini yakni **"Mewujudkan Swasembada Energi Berkelanjutan yang Berintegritas, Transparan dan Akuntabel"** artinya bahwa PLN hadir untuk menyediakan listrik bagi semua melalui penataan ulang proses bisnis PLN dengan tata kelola yang berfokus pada prinsip integritas, transparan dan akuntabel guna mencapai ketahanan energi nasional berkelanjutan.

Year 2024 was a year full of challenges for PLN. PLN's performance achievements in operational and financial aspects showed good and favorable results. For this reason, the Board of Directors continued to strive to meet the Company's business performance targets every year in the 2024 RKAP which was approved by the Board of Commissioners and shareholders. PLN is committed to continuing to improve operational efficiency, service and reliability to customers, realization of kWh of renewable electricity production and renewable energy mix to fulfill electricity access for all Indonesian people. In line with the theme of this Annual Report, namely **"Realizing Sustainable Energy Self-Sufficiency with Integrity, Transparency, and Accountability"**, PLN is here to provide electricity for all through restructuring PLN's business processes with governance that focuses on the principles of integrity, transparency, and accountability in order to achieve sustainable national energy security.

Strategi dan Kebijakan PLN 2024

PLN Strategy and Policy in 2024

Sejalan dengan RKAP 2024, PLN fokus pada akselerasi teknologi digital, penguatan transformasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan efisiensi untuk menjaga sustainabilitas Perseroan. PLN menetapkan arah strategis Perseroan tahun 2024 yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) peluncuran transformasi dan fokus pada *breakthrough* prioritas; (2) membangun momentum untuk menetapkan basis *utility* masa depan; dan (3) menjadi Perusahaan *Global Top 500* dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

In line with the 2024 RKAP, PLN focused on accelerating digital technology and strengthening inclusive and sustainable transformation to increase efficiency to maintain the Company's sustainability. PLN set the Company's strategic direction in 2024, divided into 3 (three), namely: (1) launching transformation and focusing on priority breakthroughs; (2) building momentum to establish future utility base; and (3) becoming a *Global Top 500 Company* and #1 Customer Choice for Energy Solutions.

Dalam mencapai arah strategis Perseroan, Direksi menetapkan fokus pada sasaran utama menjadi 4 (empat) *strategic goals* dan 4 (empat) *strategic enablers*. *Strategic goals* tahun 2024 pada prinsipnya adalah melanjutkan dan menguatkan strategi PLN yang terdiri dari:

1. **Green**, dengan tujuan untuk memimpin transisi energi Indonesia melalui peningkatan energi baru terbarukan (EBT) secara pesat dan efisien;
2. **Innovative**, yang akan mendorong pertumbuhan melalui model bisnis dan layanan yang inovatif;

In achieving the Company's strategic direction, the Board of Directors set the focus on the main targets into 4 (four) *strategic goals* and 4 (four) *strategic enablers*. The 2024 *strategic goals* were principally aimed to continue and strengthen PLN's strategy consisting of:

1. Green, with the aim of leading Indonesia's energy transition by increasing new renewable energy (RNE) rapidly and efficiently;
2. Innovative, which will drive growth through innovative business models and services;



3. **Customer Focused**, yang bertujuan memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui kualitas dan layanan kelas dunia; serta
4. **Lean**, yang bertujuan menyediakan tenaga listrik yang *lean*, andal dan berbiaya termurah untuk pelanggan.

Selain itu, PLN juga meneruskan *next chapter* dari program Transformasi 2.0 melalui “moonshots”, yaitu *Growth Moonshots*, *Digital Moonshots*, *NZE Moonshots* dan *Moonshot Launchpad*. Keempat *strategic goals* tersebut diterjemahkan dalam 5 (lima) fokus yaitu (a) peningkatan ketahanan energi melalui transisi energi pengembangan energi baru terbarukan; (b) digitalisasi; (c) inovasi peningkatan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan tenaga listrik; (d) *value creation* pembentukan *Subholding*; dan (e) pendapatan *beyond kWh*. Adapun *strategic enablers*, yang menjadi faktor pendukung keberhasilan strategi dan tujuan PLN meliputi 1) organisasi dan SDM; 2) pengembangan teknologi; 3) keberlanjutan finansial; dan (4) pembangunan nasional.

Strategi dan kebijakan PLN 2024 fokus dalam mengakselerasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga sustainabilitas Perseroan. Selain konsisten dengan kelima fokus program di atas, Direksi juga komitmen dalam menjaga tingkat likuiditas perusahaan, mengelola efisiensi dan memastikan tersedianya *green financing* untuk investasi pembangkit rendah karbon untuk transisi energi berkelanjutan.

3. Customer Focused, which aims to provide satisfaction to customers through world-class quality and service; and
4. Lean, which aims to provide lean, reliable, and lowest-cost electricity for customers.

Furthermore, PLN also continues the next chapter of Transformation 2.0 program through “moonshots”, namely Growth Moonshots, Digital Moonshots, NZE Moonshots, and Moonshot Launchpad. The four strategic goals are translated into 5 (five) focuses, namely (a) increasing energy security through energy transition of developing new renewable energy; (b) digitalization; (c) innovation in increasing revenue through intensification and extensification of electricity sales; (d) value creation by establishing Subholding; and (e) revenue beyond kWh. While strategic enablers, which become supporting factors for the success of PLN’s strategies and objectives include 1) organization and human resources; 2) technology development; 3) financial sustainability; and (4) national development.

PLN’s 2024 strategy and policies focused on accelerating digital technology to increase efficiency and maintain the Company’s sustainability. In addition to being consistent with the five program focuses above, the Board of Directors is also committed to maintaining the Company’s liquidity level, managing efficiency, and ensuring the availability of green financing for low-carbon power plant investments for a sustainable energy transition.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan

Board of Directors’ Role in Formulating Strategy and Policy

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan Perseroan, Direksi memiliki peran kunci dalam menetapkan visi dan misi PLN dalam jangka panjang. Direksi memimpin proses perumusan strategi dan kebijakan strategis yang termuat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melalui proses yang melibatkan peran Dewan Komisaris dalam menelaah hingga memberi tanggapan dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, Direksi beserta jajaran manajemen di bawahnya melakukan identifikasi risiko utama dan peluang bisnis yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, seperti perkembangan regulasi sektor ketenagalistrikan, perkembangan perekonomian nasional, tren industri, dan literasi publik terkait transisi energi, *green financing*, pembangkit listrik rendah karbon,

In formulating the Company’s strategy and policy, the Board of Directors has a key role in determining PLN’s long-term vision and mission. The Board of Directors leads the process of formulating strategic strategies and policies set out in the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), through a process involving the role of the Board of Commissioners in reviewing and providing responses and recommendations for improvement. Furthermore, the Board of Directors and the management below it identify the main risks and business opportunities influenced by internal and external factors, such as developments in electricity sector regulations, national economic developments, industry trends, and public literacy related to energy transition, green financing, low-carbon power plants, including support in achieving

Laporan Direksi

Board of Directors Report

termasuk dukungan dalam mencapai target NZE 2060. Selain itu, Direksi juga telah mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan mencakup prospek usaha, APBN 2024, serta arahan pemegang saham. Untuk selanjutnya, Direksi mengembangkan strategi bisnis yang tepat, termasuk namun tidak hanya terbatas pada strategi pemasaran, operasional, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu, agar eksekusi terhadap strategi Perseroan berjalan dengan baik, Direksi bersama-sama dengan jajaran manajemen di bawahnya melakukan sosialisasi secara berjenjang terhadap target dan tujuan sebagaimana tercantum dalam RJPP Tahun 2020-2024 maupun RKAP tahun 2024 dapat dipahami dengan baik.

the NZE 2060 target. In addition, the Board of Directors has also considered various relevant aspects including business prospects, the 2024 State Budget, and shareholder direction. Furthermore, the Board of Directors develops the right business strategy, including but not limited to marketing, operational, financial, and human resource management strategies, to achieve the predetermined goals and objectives.

Furthermore, for the execution of the Company's strategy to run properly, the Board of Directors, together with the management below it, gradual disseminates the targets and objectives as stated in the 2020-2024 RJPP and the 2024 RKAP so that they can be well understood.

Proses yang Dilakukan Direksi dalam Memastikan Implementasi Strategi

Process Carried Out by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

Transformasi yang telah dijalankan PLN sejak tahun 2020 mendorong PLN untuk senantiasa *agile* terhadap perkembangan bisnis modern dan pada awal tahun 2024 ini. Untuk itu, Direksi telah memimpin implementasi program-program transformasi agar dapat dilakukan secara terukur. Direksi melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan kinerja Perseroan untuk memastikan realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap bulan, Direksi melaporkan kinerja Perseroan kepada Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada aspek keuangan, operasi pembangkit, anggaran investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur transmisi dan gardu induk maupun pengelolaan risiko secara terintegrasi.

Apabila diperlukan, Direksi juga dapat melakukan penyesuaian atas strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk memastikan kebijakan-kebijakan strategis Perseroan dapat diimplementasikan secara optimal. Hasil implementasi strategi dan kebijakan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada segenap pemangku kepentingan yang terkait, antara lain kepada pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, terkait kinerja keuangan maupun non-keuangan yang dapat diakses dalam situs *web* Perseroan <https://web.pln.co.id/>, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

The transformation carried out by PLN since 2020 has encouraged PLN to always be agile towards the development of modern business and of the beginning of 2024. For this reason, the Board of Directors has led the transformation program to ensure it is implemented in a measurable manner. The Board of Directors conducts periodic evaluations and monitoring of the progress of the Company's performance to ensure that the realization of performance achievements is in accordance with the predetermined targets and objectives. Every month, the Board of Directors reports the Company's performance to the Board of Commissioners, including but not limited to, financial aspects, power plant operations, investment budgets for the development of transmission infrastructure, and substations as well as integrated risk management.

If necessary, the Board of Directors can also make adjustments to previously established strategies and policies, to ensure that the Company's strategic policies is implemented optimally. The results of strategy and policies implementation are submitted by the Board of Directors to all relevant stakeholders, including shareholders, regulators, and other stakeholders, related to financial and non-financial performance which is accessible on the Company's website <https://web.pln.co.id/>, Annual Report, and Sustainability Report.



Pencapaian Transformasi PLN 2.0 - *The Next Chapter of Transformation*

PLN Transformation 2.0 Achievements - The Next Chapter of Transformation

Transformasi PLN hingga akhir 2024 menunjukkan capaian positif. Setelah sukses menjalankan Etape Pertama, PLN melanjutkan Transformasi Etape Kedua melalui pembentukan *Holding Subholding* (HSH) sebagai pondasi menuju energi berkelanjutan dan *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Program ini berkembang menjadi *The Next Chapter of Transformation* untuk merealisasikan aspirasi Visi PLN menjadi perusahaan *global Top 500* dan pilihan utama solusi energi. Transformasi difokuskan melalui 3 (tiga) *Moonshots*:

1. **Growth Moonshots**

Mendorong pertumbuhan listrik dan bisnis *beyond kWh* untuk masuk jajaran 500 perusahaan terbesar dunia. *Growth Moonshots* direalisasikan antara lain dengan capaian *total revenue* PLN sebesar Rp545,38 triliun; *launching Hydrogen Refueling Station* (HRS) Senayan yang merupakan pertama di Indonesia untuk kendaraan dengan kapasitas hingga 100kg/day; *launching Green Hydrogen Plant* (GHP) Kamojang yang merupakan PLTP pertama di Asia Tenggara yang memproduksi hidrogen hijau; berkolaborasi dengan mitra dalam membangun infrastruktur SPKLU Nasional dengan total sebanyak 3.233 Unit dan *first cell production* oleh PT TMAI Solar PV Manufacturing.

2. **Digital Moonshots**

Menjadi *Global Digital Lighthouse* dengan keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang prima. *Digital Moonshots* direalisasikan per Desember 2024 antara lain melalui Integrasi MAPP dengan Navitas dan Pronia (Sistem di PLN IP dan PLN NP) pada *Moonshot Smart Power plant*; *pilot project* pemasangan *IoT* di 4 lokasi PLTD *Isolated*; *Go Live Quick Win 1-Efficiency and Heat Loss* pada *Development Digital Power Plant to Digital Twin*; *Rating PLN Mobile* mencapai 4,9/5; Jumlah *downloader PLN Mobile* mencapai 52,5 juta pelanggan; dan jumlah transaksi *PLN Mobile* mencapai 21,82 juta kali dengan nilai transaksi Rp8,03 triliun.

PLN's transformation until the end of 2024 showed positive achievements. After successfully implementing the First Stage, PLN continued the Second Stage Transformation by establishing Holding Subholding (HSH) as a foundation towards sustainable energy and Net Zero Emission (NZE) 2060. This program was developed into The Next Chapter of Transformation to realize PLN's Vision aspiration to becoming a global Top 500 company and the main choice for energy solutions. The transformation is focused on 3 (three) Moonshots:

1. **Growth Moonshots**

Encouraging the growth of electricity and business beyond kWh to enter the ranks of the world's 500 largest companies. Growth Moonshots are realized, among others, by achieving PLN's total revenue of Rp545.38 trillion; launching Senayan Hydrogen Refueling Station (HRS), the first station in Indonesia for vehicles with a capacity of up to 100 kg/day; launching Kamojang Green Hydrogen Plant (GHP), the first PLTP in Southeast Asia to produce green hydrogen; collaborating with partners in building the National SPKLU infrastructure with a total of 3,233 Units and first cell production by PT TMAI Solar PV Manufacturing.

2. **Digital Moonshots**

Becoming a Global Digital Lighthouse with operational excellence and excellent customer service. Digital Moonshots were realized as of December 2024, among others, through the Integration of MAPP with Navitas and Pronia (Systems at PLN IP and PLN NP) at Moonshot Smart Power plant; pilot project for installing IoT at 4 Isolated PLTD locations; Go Live Quick Win 1-Efficiency and Heat Loss at the Development Digital Power Plant to Digital Twin; PLN Mobile Rating reaching 4.9/5; The number of PLN Mobile downloaders reached 52.5 million customers; and the number of PLN Mobile transactions reached 21.82 million times with a transaction value of Rp8.03 trillion.

3. *NZE Moonshots*

Memimpin transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau yang terintegrasi. *NZE Moonshots* direalisasikan per Desember 2024 antara lain melalui *go-live co-firing* di PLTU Tembilahan, *co-firing* PLTU Tanjung Balai Karimun dan PLTU Labuhan Angin dan *co-firing* PLTU Malinau; penetapan *strategi Accelerated Renewable Energy Development* (ARED) dalam *draft RUPTL 2024–2033*; penandatanganan MoU antara PLN EPI dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terkait pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan dan pertanian terpadu; penurunan emisi dari tahun 2021 sampai Desember 2024 mencapai sebesar 2,9 juta tCO₂e dan produksi *green energy* sebesar 2,7 TWh dari *co-firing biomass*.

Dukungan terhadap ketiga *Moonshots* di atas dilakukan melalui *Moonshot Launchpads*, yang mencakup aspek manajemen risiko, penguatan HSH, transformasi SDM untuk transisi energi, transformasi IT, manajemen aset, perencanaan dan investasi terpusat, serta pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Realisasinya dilakukan dengan: *go live Risk Control Center* (RCC) *phase 1* sebagai pusat perencanaan, pemantauan dan pencegahan risiko, serta memberikan *early warning* dan pemantauan *real time* untuk mendukung pengambilan keputusan; penyelesaian pemodelan risiko terhadap 9 isu strategis (ARED, TKDN Regulation, Icon Infrastructure, AMI, SSoT SAP/4HANA, EV Infrastructure, Sustainability Co-firing, New Revenue Model, RE Generation Procurement) untuk memperkuat proses manajemen risiko serta menunjang pengambilan keputusan berbasis kuantifikasi; *go live* struktur organisasi dengan melakukan penguatan peran lini kedua dalam pengelolaan risiko dengan berevolusi menjadi Direktorat Manajemen Risiko.

Agar Transformasi berjalan efektif, diperlukan dukungan program komunikasi yang menyampaikan informasi ke seluruh pegawai PLN melalui media komunikasi internal, terdiri dari Rubrik Transformasi, PLN 1, Podcast Kilat, PLN Go and See, Video Transformasi, Buku Saku Transformasi, dan media komunikasi lainnya.

3. *NZE Moonshots*

Leading energy transition and integrated green economy development. *NZE Moonshots* were realized as of December 2024, among others, through *go-live co-firing* at PLTU Tembilahan, *co-firing* at PLTU Tanjung Balai Karimun and PLTU Labuhan Angin and *co-firing* at PLTU Malinau; determination of the Accelerated Renewable Energy Development (ARED) strategy in the 2024–2033 RUPTL draft; signing of the MoU between PLN EPI and the Agricultural Instrument Standardization Agency (BSIP) regarding the development of biomass ecosystem based on integrated people's economy and agriculture; emission reduction from 2021 to December 2024 reaching 2.9 million tCO₂e and green energy production of 2.7 TWh from biomass co-firing.

Support for the three Moonshots above is carried out through Moonshot Launchpads, which include aspects of risk management, HSH strengthening, HR transformation for energy transition, IT transformation, asset management, centralized planning and investment, and integrated financial management. The realization is carried out by: going live Risk Control Center (RCC) phase 1 as a center for planning, monitoring, and risk prevention, as well as providing early warning and real-time monitoring to support decision making; completing risk modeling for 9 strategic issues (ARED, TKDN Regulation, Icon Infrastructure, AMI, SSoT SAP/4HANA, EV Infrastructure, Sustainability Co-firing, New Revenue Model, RE Generation Procurement) to strengthen the risk management process and support quantification-based decision making; going live organizational structure by strengthening the role of the second line in risk management by evolving into a Risk Management Directorate.

For the Transformation to run effectively, support is needed for a communication program that conveys information to all PLN employees through internal communication media, consisting of the Transformation Rubric, PLN 1, Lightning Podcast, PLN Go and See, Transformation Video, Transformation Pocket Book, and other communication media.



Perbandingan Antara Target dan Hasil yang Dicapai

Comparison Between Targets and Achieved Results

PLN berhasil menjaga ketersediaan dan pemenuhan pasokan energi primer yang stabil dan berkelanjutan, melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dan PLN Energi Gas di tahun 2024, serta mendukung transisi energi, dan memastikan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat. Secara umum kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP Tahun 2024 dan KPI Perusahaan 2024. Hal ini tercermin dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2024 yang relevan dengan target kinerja tersebut.

Dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, PLN berhasil mencapai KPI Perusahaan 2024 dengan skor sebesar 103,97 pada tahun 2024 dengan pencapaian setiap indikator kinerja, meliputi (1) Nilai Ekonomi dan Sosial mencapai skor 50,04 dari maksimal bobot 50, (2) Inovasi Model Bisnis mencapai skor 16,50 dari maksimal bobot 16, (3) Kepemimpinan Teknologi mencapai skor 16,23 dari maksimal bobot 16, (4) Peningkatan Investasi mencapai skor 10,50 dari maksimal bobot 10, dan (5) Pengembangan Talenta tercapai skor 10,70 dari maksimal bobot 10 dan Kepatuhan. Indikator target kinerja PLN yang melewati target KPI Perusahaan 2024, antara lain ditunjukkan dengan rasio EBITDA, BPP Pembangkit, *maturity level sustainability* - untuk Indikator Kinerja Nilai Ekonomi dan Sosial; pendapatan *beyond kWh* melalui jumlah kontrak bisnis di luar negeri, sinergi antar *Subholding*, Anak Perusahaan dan Pusharlis, optimalisasi *Holding Subholding* - untuk Indikator Kinerja Inovasi Model Bisnis; *Digital Power Plant Implementation*, *Value Creation* - untuk Indikator Kinerja Kepemimpinan Teknologi; *Green Industrial Cluster*, *Solar PV Manufacturing* - untuk Indikator Kinerja Peningkatan Investasi; Rasio *Top Talent Millennial* (≤ 42 tahun) dalam *Nominated Talent*, Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent*, Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko SH/AP, Nihil kecelakaan - untuk Indikator Kinerja Pengembangan Talenta dan *Compliance*, terdiri dari GCG, *Zero Fatality*, Kepatuhan K3L, SPI, *Reporting*, *Busdev Alignment* - untuk Indikator Kinerja Kepatuhan.

PLN managed to maintain the availability and fulfillment of a stable and sustainable primary energy supply, through Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) and PLN Energi Gas in 2024, as well as support energy transition, and ensure a reliable electricity supply for the community. In general, the performance in 2024 achieved the targets set in the 2024 RKAP and the Company's 2024 KPI. This was reflected in the financial statements for the 2024 financial year audited by Public Accounting Firm that were relevant to the performance targets.

With hard work and support from all parties, PLN managed to achieve the 2024 Company KPI with a score of 103.97 in 2024, with the achievement of each performance indicator, including (1) Economic and Social Value reaching a score of 50.04 from a maximum weight of 50, (2) Business Model Innovation reaching a score of 16.50 from a maximum weight of 16, (3) Technology Leadership reaching a score of 16.23 from a maximum weight of 16, (4) Investment Increase reaching a score of 10.50 from a maximum weight of 10, and (5) Talent Development reaching a score of 10.70 from a maximum weight of 10 and Compliance. PLN's performance target indicators that exceeded the 2024 Company KPI target were indicated by EBITDA ratio, BPP Generation, maturity level sustainability - for Economic and Social Value Performance Indicator; beyond kWh revenue through the number of overseas business contracts, synergy between Subholdings, Subsidiaries, and Pusharlis, optimization of Holding Subholding - for Business Model Innovation Performance Indicator; Digital Power Plant Implementation, Value Creation - for Technology Leadership Performance Indicator; Green Industrial Cluster, Solar PV Manufacturing - for Investment Increase Performance Indicator; Millennial Top Talent Ratio (≤ 42 years old) in Nominated Talent, Female Ratio in Nominated Talent, SH/AP Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio, Zero Accidents - for Talent Development Performance Indicator and Compliance, consisting of GCG, Zero Fatality, HSSE Compliance, SPI, Reporting, Busdev Alignment - for Compliance Performance Indicator.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Kinerja rasio EBITDA tahun 2024 mencapai Rp108,66 triliun atau 106,68% dari target RKAP sebesar Rp101,86 triliun, peningkatan pendapatan *Beyond kWh* tahun 2024 mencapai Rp13,23 triliun atau 110,00% dari target RKAP sebesar Rp10,97 triliun. Dukungan infrastruktur kendaraan listrik melalui peningkatan jumlah SPKLU sebanyak 1.597 unit dan SPBKLU sebanyak 547 unit atau 110,00% dari target RKAP SPKLU sebanyak 1.000 dan SPBKLU sebanyak 200 unit.

The EBITDA ratio performance in 2024 reached Rp108.66 trillion or 106.68% of the RKAP target of Rp101.86 trillion, the increase in *Beyond kWh* revenue in 2024 reached Rp13.23 trillion or 110.00% of the RKAP target of Rp10.97 trillion. Support for electric vehicle infrastructure was through an increase in the number of SPKLU by 1,597 units and SPBKLU by 547 units or 110.00% of the RKAP target of SPKLU by 1,000 and SPBKLU by 200 units.

Hasil Kinerja Tahun 2024

Performance Results in 2024

Pada tahun 2024, PLN sukses menjalankan peran sebagai agen pembangunan dengan meningkatkan penjualan listrik, pendapatan, laba bersih, dan kualitas layanan. Dengan capaian kinerja ini PLN turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, Transformasi PLN 2.0 melalui restrukturisasi organisasi HSH telah membentuk PLN *group* menjadi ekosistem korporat yang kokoh dan dinamis, serta berkontribusi positif dalam mendekatkan Perseroan mencapai aspirasi untuk menjadi *#1 The Largest Utility & #1 Energy Transition Leader in Southeast Asia*. Tahun 2024 PLN berhasil mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak terkait hasil kinerja yang dicapainya, antara lain dengan masuknya PLN ke dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi *500 Fortune Southeast*. Kinerja bisnis yang positif dan pertumbuhan kinerja keuangan secara tahunan serta transformasi berbasis digital secara *end to end* membawa Perseroan menempati peringkat ke-6 dalam *500 Fortune Southeast Asia* tahun 2024. Selain itu, diraihnya predikat sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia, mengingat pertumbuhan aset PLN terus meningkat pasca transformasi proses bisnis perusahaan melalui pembentukan HSH, tercatat aset PLN tahun 2020 mencapai Rp1.588 triliun menjadi Rp1,77 kuadriliun di akhir tahun 2024 atau meningkat Rp101,74 triliun dari tahun sebelumnya.

In 2024, PLN successfully carried out its role as a development agent by increasing electricity sales, revenue, net profit, and service quality. With this performance achievement, PLN also improved the quality of life of the community, and supported economic growth as well as sustainable development. In addition, PLN Transformation 2.0 through the restructuring of HSH organization has shaped PLN group into a strong and dynamic corporate ecosystem, and has contributed positively to bringing the Company closer to achieving its aspirations to become *#1 The Largest Utility & #1 Energy Transition Leader in Southeast Asia*. In 2024, PLN successfully received appreciation and awards from various parties related to its performance results, including PLN's entry into the list of the 10 best companies in Southeast Asia according to the *500 Fortune Southeast*. Positive business performance, annual financial performance growth, as well as end-to-end digital-based transformation brought the Company to rank 6th in the *500 Fortune Southeast Asia* in 2024. In addition, the predicate that was achieved as the largest utility SOE in Indonesia, was due to PLN's asset growth that continued to increase after the transformation of the Company's business processes through the establishment of HSH, PLN's assets in 2020 reaching Rp1,588 trillion to Rp1.77 quadrillion at the end of 2024 or an increase of Rp101.74 trillion from the previous year.





PLN terus mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2024 PLN telah menyelesaikan 28 pembangkit EBT baru, program dedieselisasi dengan pembangunan jaringan transmisi dan jaringan distribusi hingga pengembangan *green hydrogen*. Dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV) hadir dari sisi suplai maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mudah dijumpai, dengan 3.233 unit SPKLU yang beroperasi, baik milik PLN maupun mitra dan swasta.

Pencapaian Kinerja Operasional

Achievement of Operational Performance

Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik di tahun 2024. Kinerja tersebut tercermin dari peningkatan produksi tenaga listrik tahun 2024 mencapai sebesar 343.891,75 GWh, meningkat 20.571,13 GWh atau 6,36% dari tahun 2023 terutama disebabkan oleh penambahan pembangkit baru yang mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penjualan tenaga listrik. Kontribusi utama berasal dari segmen Regional Jawa, Madura, & Bali sebesar 69,93%, selanjutnya Regional Sumatera & Kalimantan sebesar 22,19%, serta Regional Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara sebesar 7,89%. Jumlah pelanggan pada 2024 bertambah sebanyak 3.724.014 pelanggan, menjadi 92.877.292 pelanggan dari tahun 2023. Meningkatnya pelanggan mendorong peningkatan penjualan listrik tahun 2024 sebesar 6,17% pada tahun 2024, dari 288.436 GWh menjadi 306.219 GWh, atau 102,08% terhadap target RKAP 2024.

Indikator keandalan sistem distribusi listrik PLN tercermin dari indeks durasi gangguan listrik per pelanggan atau *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan indeks jumlah gangguan listrik per pelanggan atau *System Average Interruption Frequency Index* (SAIFI). PLN berhasil menjaga keandalan distribusi listrik pada tahun 2024, dengan SAIDI turun 5,29% menjadi 320,24 menit/pelanggan dari 338,13 menit pada tahun 2023. SAIFI juga membaik menjadi 3,23 kali/pelanggan dari 4,27 kali/pelanggan. Adapun indeks kepuasan pelanggan meningkat menjadi 98,93% dari 98,02% di tahun 2023.

PLN continues to accelerate the development of New Renewable Energy (RNE) to support the energy transition agenda in Indonesia. As a result, in 2024 PLN completed 28 new RNE plants, a dedieselization program with the construction of transmission and distribution networks to the development of green hydrogen. Support for the electric vehicle (EV) ecosystem comes from the supply side and the Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) which are easy to find, with 3,233 SPKLU units in operation, both owned by PLN and partners and the private sector.

The Company recorded good operational performance in 2024. This performance was reflected in the increase in electricity production in 2024 reaching 343,891.75 GWh, an increase of 20,571.13 GWh or 6.36% from that of 2023, mainly due to the addition of new power plants that began operating to meet the needs of growing sales of electricity. The main contribution came from Java, Madura, & Bali Regional segment of 69.93%, then Sumatra & Kalimantan Regional segment of 22.19%, and Sulawesi, Maluku, Papua, & Nusa Tenggara Regional segment of 7.89%. The number of customers in 2024 increased by 3,724,014 customers, to 92,877,292 customers from that of 2023. The increase in customers drove an increase in sales of electricity in 2024 by 6.17% in 2024, from 288.436 GWh to 306.219 GWh, or 102.08% of the 2024 RKAP target.

The reliability indicator of PLN's electricity distribution system was reflected in the electricity interruptions duration index per customer or System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and the number of electricity interruptions per customer or System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). PLN successfully maintained the reliability of electricity distribution in 2024, with SAIDI decreasing by 5.29% to 320.24 minutes/customer from 338.13 minutes in 2023. SAIFI also improved to 3.23 times/customer from 4.27 times/customer. The customer satisfaction index increased to 98.93% from 98.02% in 2023.

Pencapaian Kinerja Keuangan

Achievement of Financial Performance

PLN berhasil mencatat pendapatan usaha mencapai Rp545,38 triliun atau meningkat 11,90% dari realisasi pada tahun sebelumnya sebesar Rp487,38 triliun. Kontributor utama adalah penjualan tenaga listrik yang mencapai Rp353,18 triliun, memenuhi 102,08% dari target RKAP atau 64,67% dari perolehan total pendapatan tahun 2024. Porsi sumber pendapatan lainnya dilihat dari total pendapatan yang diperoleh meliputi kompensasi Rp100,18 triliun (18,37%), subsidi listrik Rp77,05 triliun (14,23%), lain-lain Rp13,23 triliun (2,43%) dan penyambungan pelanggan Rp1,75 triliun (0,32%). Hal ini membuktikan bahwa PLN berhasil memperkuat posisi keuangan Perseroan dengan menarik lebih banyak pelanggan.

Didukung upaya efisiensi selama 2024, PLN membukukan beban usaha sebesar Rp484,76 triliun, meningkat 10,13% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp440,18 triliun, terutama didorong adanya peningkatan permintaan energi listrik oleh pelanggan serta melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Beban usaha tersebut terutama dikontribusikan oleh biaya bahan bakar dan minyak pelumas sejumlah Rp179,29 triliun serta diikuti pembelian tenaga listrik sebesar Rp178,63 triliun, dengan persentase terhadap total beban usaha, masing-masing sebesar 36,37% dan 36,85%. Adapun komponen beban kepegawaian turun 5,09% dari tahun lalu menjadi Rp30,71 triliun. Laju peningkatan total beban usaha tahun 2024 mampu ditopang oleh pertumbuhan pendapatan sehingga berdampak positif pada peningkatan laba usaha Perseroan sebesar 28,43% dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp60,62 triliun.

Dalam melaksanakan mandat *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah terkait penyaluran subsidi listrik, PLN dihadapkan pada tantangan menjaga keterjangkauan tarif listrik. Pemerintah terus mengawasi agar tarif tetap sesuai kemampuan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 8 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kelima atas Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik oleh PT PLN, terutama bagi pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), guna mencegah dampak negatif terhadap perekonomian. Ketergantungan PLN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup tinggi, mengingat terjadi peningkatan

PLN managed to record revenue reaching Rp545.38 trillion or an increase of 11.90% from the previous year's realization of Rp487.38 trillion. The main contributor was sales of electricity which reached Rp353.18 trillion, meeting 102.08% of the RKAP target or 64.67% of the total revenue in 2024. The portion of other sources of income was seen from the total revenue obtained included compensation of Rp100.18 trillion (18.37%), electricity subsidy of Rp77.05 trillion (14.23%), others of Rp13.23 trillion (2.43%), and customer connection fees of Rp1.75 trillion (0.32%). This proved that PLN managed in strengthening the Company's financial position by attracting more customers.

Supported by efficiency efforts throughout 2024, PLN recorded operating expenses of Rp484.76 trillion, an increase of 10.13% compared to 2023 of Rp440.18 trillion, mainly driven by higher electricity demand from customers as well as the weakening of the rupiah against foreign currencies. These operating expenses were mainly contributed by fuel and lubricants costs of Rp179.29 trillion, and followed by purchased electricity of Rp178.63 trillion, with a percentage of total operating expenses of 36.37% and 36.85%, respectively. The personnel expense component decreased by 5.09% from last year to Rp30.71 trillion. The rate of increase in total operating expenses in 2024 was supported by revenue growth, which had a positive impact on the increase in the Company's operating profit by 28.43% compared to Rp60.62 trillion in the previous year.

In carrying out the mandate of the Government's Public Service Obligation (PSO) regarding the distribution of electricity subsidies, PLN is faced with the challenge of maintaining the affordable tariffs. The government continues to monitor so that the tariffs remain in accordance with the community's ability, as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2023, the fifth amendment to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2016 on electricity tariffs by PT PLN, particularly for household customers and small and medium enterprises (SMEs), in order to prevent negative impacts on the economy. PLN's dependence on the State Budget (APBN) is quite high,



proporsi subsidi dan kompensasi dalam total pendapatan usaha PLN, dari 29,5% pada 2023 menjadi 32,6% di 2024. Kenaikan ini utamanya disebabkan tidak adanya penyesuaian tarif pada mayoritas golongan pelanggan sejak 2018. Selisih antara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) ditambah margin dan tarif pelanggan ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi. Sepanjang 2024, PLN menerima subsidi sebesar Rp77,05 triliun atau naik 12,25% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun, serta kompensasi mencapai sebesar 100,18 triliun, meningkat 35,40% dari Rp73,99 triliun pada tahun sebelumnya.

PLN terus meningkatkan kontribusinya kepada negara melalui pembayaran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun berkontribusi langsung dalam mendukung pembangunan nasional. Pada 2024, PLN menyetorkan dividen sebesar Rp3,10 triliun, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2,19 triliun. Pembayaran pajak dan PNBP tahun 2024 mencapai Rp62,24 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52,57 triliun. Pencapaian ini mencerminkan komitmen PLN dalam menjalankan bisnis yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

considering the increase in the proportion of subsidies and compensation in PLN's total revenue, from 29.5% in 2023 to 32.6% in 2024. This increase was mainly due to the absence of adjustments to tariff for the majority of customer groups since 2018. The difference between the Basic Cost of Provision (BPP) plus margin and customer tariffs is borne by the Government in the form of subsidies and compensation. Throughout 2024, PLN received subsidies of Rp77.05 trillion or an increase of 12.25% compared to 2023 of Rp68.64 trillion, and compensation reached Rp100.18 trillion, an increase of 35.40% from Rp73.99 trillion in the previous year.

PLN continues to increase its contribution to the state through tax payments, dividends, Non-Tax State Revenue (PNBP) and directly contributing to supporting national development. In 2024, PLN paid dividends of Rp3.10 trillion, indicating an increase compared to 2023 amount of Rp2.19 trillion. Tax and PNBP payments in 2024 reached Rp62.24 trillion, an increase compared to the previous year amount of Rp52.57 trillion. This achievement reflects PLN's commitment to running a transparent and accountable business, including through the signing of memorandum of understanding with the Ministry of SOEs and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to strengthen corporate governance.

Transformasi Human Capital 2.0

Human Capital Transformation 2.0

Pada 2024, PLN melaksanakan Transformasi *Human Capital* (HC) 2.0 yang berlandaskan pada 4 (empat) HC *objectives*, yaitu: (1) *Right Size*—penyesuaian proses bisnis dan desain organisasi agar selaras dengan strategi perusahaan; (2) *Right Skill*—pengembangan talenta unggul yang adaptif dan kompetitif; (3) *Right Spend*—pengelolaan remunerasi berbasis produktivitas dan kinerja dengan prinsip efisiensi serta keadilan; dan (4) *Right System*—peningkatan sistem HC secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi. Transformasi ini bertujuan untuk memperkuat peran *Human Capital* sebagai katalisator pencapaian strategi korporasi.

In 2024, PLN implemented Human Capital Transformation (HC) 2.0 which was based on 4 (four) HC objectives, namely: (1) Right Size—adjustment of business processes and organizational design to align with corporate strategy; (2) Right Skill—development of excellent talent that was adaptive and competitive; (3) Right Spend—management of remuneration based on productivity and performance with the principles of efficiency and fairness; and (4) Right System—improvement of HC system in an integrated and sustainable manner through the utilization of technology. This transformation aims to strengthen the role of Human Capital as a catalyst for achieving corporate strategy.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Untuk selanjutnya, Fungsi HC menyelaraskan Program Transformasi Moonshot 2.0 melalui inisiatif *Human Capital Transformation for Energy Transition* sebagai *Moonshot Launchpad*, dengan mengacu pada HC Roadmap 2021–2025. Transformasi HC 2.0 ini mendukung visi korporasi melalui penerapan tata kelola HC berstandar internasional, penguatan *employee experience*, dan penciptaan nilai berbasis teknologi. Direksi berhasil mengimplementasikan program yang berdampak positif terhadap indikator HC dan produktivitas karyawan hingga mencapai *competitive index*. Selain itu, PLN juga mendorong *High Quality Growth* melalui Program Transformasi Kesehatan yang dijalankan bersama Serikat Pekerja PLN (SP PLN).

Direksi memastikan bahwa seluruh aspek dalam Transformasi HC 2.0 dapat terealisasi dengan baik, sehingga mendukung tercapainya *future leader readiness* sehingga mampu menciptakan pemimpin masa depan yang siap mendukung tercapainya transisi energi. PLN memberi kesempatan yang setara pada setiap karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, tanpa memperhatikan gender, ras, dan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2024, realisasi investasi pendidikan dan pelatihan karyawan mencapai sebesar Rp1.042,65 miliar.

PLN terus memperkuat strategi manajemen talenta secara berkelanjutan melalui identifikasi, pengembangan, dan retensi SDM unggul, guna memastikan kesiapan kandidat untuk setiap posisi strategis. Optimalisasi retensi dilakukan melalui jalur karir kepakaran, pendidikan formal seperti Pegawai Tugas Belajar (PTB) dan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta pelatihan nonformal untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menghadapi tantangan bisnis kini dan mendatang.

Perseroan juga menetapkan indikator kinerja manajemen talenta dalam bentuk *key performance indicators* (KPI) antara lain adalah 9% *talent* milenial (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* level BOD-1. Setelah mendapatkan arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Direksi mengusulkan *nominated talent* BOD-1 ke *Cluster Talent Committee* (CTC) Klaster Industri Energi, Minyak dan Gas yang disepakati berasal dari Talenta Muda PLN yakni 18% atau 2 kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Kesempatan yang sama bagi perempuan dalam *nominated*

Furthermore, the HC Function aligns the Moonshot 2.0 Transformation Program through Human Capital Transformation for Energy Transition initiative as the Moonshot Launchpad, referring to the HC Roadmap 2021–2025. This HC 2.0 transformation supports corporate vision through the implementation of international standard HC governance, strengthening employee experience, and technology-based value creation. The Board of Directors has successfully implemented programs with positive impact on HC indicators and employee productivity to achieve competitive index. In addition, PLN also encourages High Quality Growth through the Health Transformation Program which is run together with PLN Labor Union (SP PLN).

The Board of Directors ensures that all aspects of HC 2.0 Transformation can be realized properly, thus supporting the achievement of future leader readiness so as to create future leaders who are ready to support the achievement of energy transition. PLN provides equal opportunities for every employee to participate in education and training programs, regardless of gender, race, and religion, tailored to the needs of the Company. In 2024, the realization of employee education and training investments reached Rp1,042.65 billion.

PLN continues to strengthen its talent management strategy sustainably through the identification, development, and retention of excellent human resources, to ensure candidates' readiness for each strategic position. Retention optimization is carried out through expert career paths, formal education such as Employee Study Task (PTB) and Distance Learning Programs (PJJ), as well as non-formal training to improve employee competency in facing current and future business challenges.

The Company also sets talent management performance indicators in the form of key performance indicators (KPIs), including 9% millennial talent (≤ 42 years old) in nominated talent level BOD-1. After receiving direction and recommendations from the Board of Commissioners, the Board of Directors recommends BOD-1 nominated talent to the Cluster Talent Committee (CTC) of Energy, Oil, and Gas Industry Cluster agreed to come from PLN Young Talent, namely 18% or 2 times the target set. Equal opportunities for women in nominated talent are also carried out by



talent juga telah dilakukan oleh PLN, dengan menyepakati bahwa Talenta Perempuan PLN adalah 33% dari seluruh *nominated talent* BOD-1. Melalui langkah-langkah strategis ini, PLN percaya bahwa investasi pada manajemen talenta dan perencanaan suksesi akan menjaga stabilitas bisnis jangka panjang, mendorong pertumbuhan, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

PLN menanamkan *core value* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai fondasi budaya kerja dan enabler Transformasi PLN 2.0. Penguatan nilai ini dimulai dari peningkatan awareness, pemahaman, hingga keterlibatan karyawan untuk mendukung Aspirasi Transformasi 2.0. Direksi dan segenap jajaran manajemen PLN turut memastikan seluruh insan PLN siap menerima perubahan dan berkomitmen mewujudkan tujuan Perseroan, mengimplementasikan RJPP PLN 2020-2024, serta mendukung tercapainya target *Net Zero Emission* 2060.

PLN, by agreeing that PLN Female Talent is 33% of all BOD-1 nominated talent. Through these strategic steps, PLN believes that investment in talent management and succession planning will maintain long-term business stability, drive growth, and create sustainable value for all stakeholders.

PLN instills the core value of AKHLAK (Trustworthiness, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) as the foundation of work culture and enabler of PLN Transformation 2.0. Strengthening this value starts from increasing awareness, understanding, to employee involvement to support Transformation Aspiration 2.0. The Board of Directors and all levels of PLN management also ensure that all PLN employees are ready to accept changes and are committed to realizing the Company's goals, implementing PLN's 2020-2024 RJPP, and supporting the achievement of the 2060 Net Zero Emission target.

Digitalisasi dan Kepemimpinan Teknologi

Digitalization and Technology Leadership

Direksi berkomitmen mendukung pengembangan sistem TI yang adaptif untuk mendorong transformasi digital dan inovasi bisnis. Melalui adopsi teknologi seperti *big data analytics*, integrasi sistem, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan lainnya, PLN terus meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan kecepatan pengambilan keputusan. Upaya ini diharapkan mempercepat digitalisasi dan mewujudkan *Digital Moonshots* menuju *Global Digital Lighthouse*, dengan fokus pada keunggulan operasional dan pengalaman pelanggan yang unggul.

Untuk menjaga keamanan TI dari risiko siber dan gangguan operasional, PLN menerapkan sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013 guna memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selain itu, standar pengelolaan TI juga mengacu pada standar National Institute of Standards and Technology (NIST), dan North American Electric Reliability Corporation (NERC). Pada tahun 2024, PLN memperkuat keamanan siber, dengan membentuk unit khusus keamanan siber.

The Board of Directors is committed to supporting the development of adaptive IT systems to drive digital transformation and business innovation. Through the adoption of technologies such as big data analytics, system integration, cloud computing, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), and others, PLN continues to improve efficiency, added value, and speed of decision-making. This effort is expected to accelerate digitalization and realize Digital Moonshots towards the Global Digital Lighthouse, with a focus on operational excellence and superior customer experience.

To maintain IT security from cyber risks and operational disruptions, PLN implements ISO 27001:2013 Information Security Management certification to ensure confidentiality, integrity, and availability of information. In addition, IT management standards also refer to the National Institute of Standards and Technology (NIST) and North American Electric Reliability Corporation (NERC) standards. In 2024, PLN strengthened its cybersecurity by establishing a special cybersecurity unit.

Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mitigasinya

Obstacles Faced and Mitigation Efforts

PLN menghadapi tantangan dalam mencapai pertumbuhan berkualitas dan penciptaan nilai tinggi, termasuk peningkatan pendapatan (termasuk *beyond kWh*), efisiensi, serta penurunan BPP, subsidi, dan kompensasi. Untuk meningkatkan pendapatan, PLN mendorong penjualan listrik melalui penyelesaian daftar tunggu, program *electrifying agriculture* dan *marine*, diskon tambah daya, serta akuisisi pelanggan *captive*. PLN juga menawarkan tarif kompetitif untuk industri di luar jam beban puncak guna meningkatkan produktivitas pelanggan.

Untuk meningkatkan pendapatan *beyond kWh*, PLN membangun ekosistem kendaraan listrik lewat Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta mengembangkan layanan dengan memperluas basis pelanggan internet, *Renewable Energy Certificate* (REC), monetisasi PLN *Mobile*, pendayagunaan aset properti PLN, dan pengembangan PV *Rooftop*.

PLN menghadapi tantangan menjaga keandalan pasokan energi listrik dan memastikan transisi menuju energi berkelanjutan dengan target *Net Zero Emission 2060*. Untuk itu, PLN perlu memanfaatkan teknologi cerdas untuk mendukung ekspansi bisnis dan transisi energi. Melalui *subholding* PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN juga memastikan pasokan energi primer seperti batubara, gas, BBM, dan biomassa melalui kerja sama dengan perusahaan terkait. Kami mendukung transisi energi menuju *Net Zero Emission 2060* melalui dedieselisasi PLTD ke EBT, penambahan kapasitas pembangkit EBT, dan peningkatan penggunaan biomassa untuk *cofiring* PLTU batubara.

Tantangan lainnya adalah peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan terkait topik transisi energi, pengembangan EBT dan *green business development* maupun *green financing* sebagai alternatif pendanaan investasi pembangkit rendah karbon. Untuk itu, PLN secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan, program *Expert Coaching Clinic* sebagai kegiatan Kolaborasi Pakar sebagai *Subject Matter Expert* dan *Problem Solver* di PLN *Group* untuk mengoptimalkan peran para pakar yang relevan dengan aktivitas atau proyek yang sedang berjalan di PLN *group*.

PLN faces challenges in achieving quality growth and high value creation, including increasing revenue (including *beyond kWh*), efficiency, and reducing BPP, subsidies, and compensation. To increase revenue, PLN encourages electricity sales by completing waiting lists, *electrifying agriculture* and *marine* programs, discounts on additional power, and acquisition of captive customer. PLN also offers competitive rates for industries outside peak load times to increase customer productivity.

To increase revenue *beyond kWh*, PLN builds an electric vehicle ecosystem through Public Electricity Supply Stations (SPLU) and Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU), and developing services by expanding internet customer base, *Renewable Energy Certificate* (REC), PLN *Mobile* monetization, utilization of PLN property assets, and development of *Rooftop PV*.

PLN faces the challenge of maintaining the reliability of electricity supply and ensuring the transition to sustainable energy with the *Net Zero Emission* target of 2060. To that end, PLN needs to utilize smart technology to support business expansion and energy transition. Through the *subholding* PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN also ensures the supply of primary energy such as coal, gas, fuel, and biomass through collaboration with related companies. We support the energy transition to *Net Zero Emission 2060* through dedieselization of PLTD to RNE, additional RNE generating capacity, and increasing the use of biomass for *cofiring* coal-fired PLTU.

Another challenge is the continuous improvement of human resource quality related to the topic of energy transition, development of RNE and *green business development* as well as *green financing* as an alternative funding for low-carbon power plant investment. To that end, PLN continuously improves the quality of human resources through education and training programs, the *Expert Coaching Clinic* program as an Expert Collaboration activity as *Subject Matter Expert* and *Problem Solver* in the PLN *Group* to optimize the role of experts who are relevant to ongoing activities or projects in PLN *group*. In addition, PLN also carried out a capacity



Selain itu, PLN juga melakukan program *capacity building* melalui program COLONY (*Collaboration Learning and Innovation Opportunity*) tahun 2024 yang merupakan wadah bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi spesifik di bidangnya masing-masing, seperti *Power System, Smart Grid, Carbon Carbon Utilization Storage, Battery Energy Storage System, Solar, Geothermal, Hidrogen, Biomassa, Hydro Power, Wind, Digital, serta Asset Management*.

PLN memerlukan dukungan dari Pemegang Saham dan/atau Pemerintah dalam upayanya untuk mengatasi sejumlah tantangan di atas, termasuk melalui regulasi yang mendukung transisi energi pada sektor ketenagalistrikan, rencana penyusunan RUU Energi Baru & Energi Terbarukan (EBET) serta kebijakan Tarif, Subsidi dan Kompensasi. Dukungan juga dibutuhkan untuk menjamin keandalan pasokan energi primer, termasuk regulasi harga energi primer dan EBT.

Seluruh tantangan di atas termasuk mitigasinya ditujukan untuk memastikan keberlanjutan PLN dalam menyediakan listrik yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk peningkatan akses listrik, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan pengembangan industri kelistrikan lokal.

Prospek Usaha Perseroan

The Company's Business Prospects

Perekonomian global 2025 diperkirakan tetap menghadapi tantangan, dengan proyeksi pertumbuhan 3,3% menurut IMF, meningkat dari 3,2% pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi global dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang berdampak pada ekspor Indonesia, sementara ekonomi India diperkirakan tumbuh stabil di 6,5%. Secara global, isu-isu utama termasuk potensi eskalasi perang dagang AS dan Tiongkok, konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, potensi munculnya kembali tekanan inflasi, dan risiko gangguan rantai pasokan, dapat berdampak kepada negara-negara berkembang.

Ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh di level 5,2% dengan inflasi 2,5%, yang ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor non-migas; dengan kurs USD/IDR diperkirakan Rp16.000. Sementara itu pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan masih cukup tangguh, di tengah sejumlah risiko yang perlu diwaspadai antara lain volatilitas harga komoditas dan perlambatan pertumbuhan.

building program through the COLONY (*Collaboration Learning and Innovation Opportunity*) program in 2024 which was a forum for employees to develop specific competencies in their respective fields, such as *Power Systems, Smart Grid, Carbon Carbon Utilization Storage, Battery Energy Storage Systems, Solar, Geothermal, Hydrogen, Biomass, Hydro Power, Wind, Digital, and Asset Management*.

PLN requires support from Shareholders and/or the Government in its efforts to overcome a number of the above challenges, including through regulations that support the energy transition in electricity sector, plans to draft the New Energy & Renewable Energy (EBET) Bill and Tariff, Subsidy and Compensation policies. Support is also needed to ensure the reliability of primary energy supply, including regulations on primary energy and RNE prices.

All of the above challenges including their mitigation are aimed at ensuring PLN's sustainability in providing sustainable and affordable electricity for the community, including increasing access to electricity, energy efficiency, reducing carbon emissions, and developing the local electricity industry.

The global economy in 2025 is expected to continue to face challenges, with a projected growth of 3.3% according to the IMF, increasing from 3.2% in 2024. The global economic growth is affected by the slowdown in Chinese economy which has an impact on Indonesian exports, while Indian economy is expected to grow steadily at 6.5%. Globally, key issues including the potential for an escalation of the US-China trade war, ongoing conflicts in the Middle East, the potential for a re-emergence of inflationary pressures, and the risk of supply chain disruptions, could impact developing countries.

The national economy is projected to grow at 5.2% with an inflation of 2.5%, supported by household consumption, investment, and non-oil and gas exports; with USD/IDR exchange rate estimated at Rp16,000. Meanwhile, domestic economic growth is expected to remain quite resilient, amidst a number of risks requiring close attention, including commodity price volatility and slowing growth.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, proyeksi pertumbuhan penjualan listrik nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2% atau mencapai 430 TWh dengan proyeksi penambahan pelanggan sebanyak 12,1 juta pada periode 2021-2025. Selain itu, RUPTL juga memberikan porsi lebih besar bagi energi baru terbarukan (EBT), memproyeksikan penambahan kapasitas gardu induk sebesar 45,5 ribu MVA dan penambahan jaringan transmisi mencapai 34,5 ribu kms pada tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem kelistrikan nasional. Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2025 dan hingga triwulan I tahun 2025 tercatat mencapai 98,51%. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan akses listrik ke daerah-daerah terpencil dan belum terlistriki. Proyeksi ini mencerminkan peluang peningkatan permintaan listrik nasional bagi PLN. Untuk itu, PLN optimis dalam menghadapi peluang tersebut dengan tetap melakukan pengelolaan tantangan yang terjadi secara lebih berhati-hati.

Direksi telah merumuskan prospek usaha Perseroan dalam rencana bisnis lima tahunan dalam RJPP Tahun 2024-2028 dan rencana bisnis tahunan dalam RKAP Tahun 2025. PLN fokus untuk melanjutkan program inisiatif transformasi sebagai *corrective action* di setiap lini untuk mencapai Perusahaan yang *Green, Lean, Innovative dan Customer Focused*. Selain itu, Perseroan juga telah menata ulang setiap proses bisnis PLN dengan digitalisasi *end-to-end*. Artinya bahwa transformasi digital mencakup seluruh lini bisnis PLN, mulai dari energi primer hingga layanan pelanggan.

Dengan kinerja positif yang ditunjukkan sampai dengan akhir 2024, Direksi optimistis semangat transformasi akan terus mendorong PLN meraih pencapaian kinerja terbaik secara berkelanjutan. Direksi menyambut positif segenap dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, sebagai wujud upaya bersama menjadikan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

Based on the 2021-2030 RUPTL, the projected growth in national electricity sales in 2025 is estimated to reach 5.2% or reach 430 TWh with a projected increase in customers of 12.1 million in the 2021-2025 period. In addition, the RUPTL also provides a larger portion for new renewable energy (RNE), projecting an additional substation capacity of 45.5 thousand MVA and an additional transmission network of 34.5 thousand kms in 2025 which aims to increase the capacity and efficiency of national electricity system. The national electrification ratio is targeted to reach 100% in 2025 and until the first quarter of 2025, it is recorded at 98.51%. To that end, the Government constantly strives to increase the electrification ratio by providing electricity access to remote and un-electrified areas. This projection reflects the opportunity for increasing national electricity demand for PLN. Therefore, PLN is optimistic in facing this opportunity by continuing to manage the challenges that occur more carefully.

The Board of Directors has formulated the Company's business prospects in a five-year business plan in the 2024-2028 RJPP and an annual business plan in the 2025 RKAP. PLN focuses on continuing the transformation initiative program as a corrective action in every line to achieve a Green, Lean, Innovative, and Customer Focused Company. In addition, the Company has also reorganized every PLN business process with end-to-end digitalization. This means that digital transformation covers all PLN business lines, from primary energy to customer service.

With the positive performance shown until the end of 2024, the Board of Directors is optimistic that the spirit of transformation will continue to drive PLN to achieve the best performance achievements in a sustainable manner. The Board of Directors welcomes all support and collaboration from various parties, as a form of joint effort to make electricity for a better life.



Memperkuat Implementasi Governansi dan Manajemen Risiko Melalui Integrasi ESG Dalam Proses Bisnis

Strengthening Governance and Risk Management Implementation through ESG Integration in Business Processes

Sebagai BUMN yang memiliki peran vital dalam mengemban fungsi strategis mendukung perekonomian nasional, PLN terus meningkatkan komitmen dalam implementasi governansi atau tata kelola perusahaan, salah satunya dengan memperkuat penerapan ESG ke dalam kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terciptanya nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Direksi, Dewan Komisaris, beserta seluruh Insan PLN berkomitmen untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan agar setiap program tata kelola dapat terealisasi untuk mencapai hasil yang optimal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun *best practice*. Penyusunan maupun pemutakhiran kebijakan tata Kelola berlandaskan prinsip GCG (TARIF) dan pilar (ETAK) yakni Etika, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan praktik tata kelola secara berkesinambungan, setiap tahun PLN melakukan penilaian atas kualitas tata kelola (*assessment* GCG). Penilaian GCG di tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) parameter pengujian yaitu ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015 dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021. Ketiga penilaian tersebut mendapatkan hasil yang baik, yang menggambarkan potret tata kelola PLN saat ini sekaligus menjadi feedback implementasi GCG guna perbaikan dan penyempurnaan di masa depan.

Penguatan governansi dalam praktik Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh PLN dengan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) melalui siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) dalam pengambilan setiap keputusan. Implementasi 4EP dalam pengelolaan risiko melekat pada rangkaian proses bisnis dan manajerial di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mekanisme *delegation of authority* yang berlaku PLN. Untuk tahun 2024 terdapat 20 (dua puluh) Risiko

As an SOE with vital role in carrying out strategic functions to support the national economy, PLN continues to increase its commitment to implementing governance or corporate governance, one of which is by strengthening ESG application into the Company's business and operational activities. This is done to ensure the creation of added value for all stakeholders in the long term.

The Board of Directors, Board of Commissioners, and all PLN Personnel are committed to implementing corporate governance practices so that every governance program is realized to achieve optimal results by referring to applicable laws and regulations and best practices. The preparation and updating of governance policies are based on the principles of GCG (TARIF) and pillars (ETAK), namely Ethics, Transparency, Accountability and Sustainability in every decision-making process. As part of the commitment to continuously improve the quality of the governance practice implementation, PLN annually assesses the quality of governance (GCG assessment). GCG assessment in 2024 was conducted by using 3 (three) testing parameters, namely the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), Guidelines for Public Company Governance POJK 21/POJK.04/2015, and the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021. The three assessments obtained good results, which described the current portrait of PLN's governance as well as served as feedback on GCG implementation for improvement and refinement in the future.

Strengthening governance in Integrated Risk Management practices is carried out by PLN with the Four Eyes Principle (4EP) mechanism through the Plan, Do, Check, Act (PDCA) cycle in making every decision. The implementation of 4EP in risk management is inherent in a series of business and managerial processes at all levels of the organization with the delegation of authority mechanism applicable to PLN. In 2024, there were 20 (twenty) Main Risks identified

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Utama yang teridentifikasi menjadi Profil Risiko Korporat. Tingkat risiko akhir dari setiap risiko utama korporat tahun 2024 mencakup Risiko *Inherent* dan Risiko Residu. Secara berkesinambungan, Direksi melakukan upaya penanganan (mitigasi) setiap risiko tersebut untuk memastikan tingkat risiko sesuai dengan *Risk Appetite* yang ditetapkan. Selain itu, Direksi juga berupaya melakukan penyempurnaan terhadap perangkat manajemen risiko Perseroan sesuai perkembangan proses bisnis, regulasi yang berlaku maupun masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris terkait dengan *Business Continuity Management* (BCM).

Sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka *Integrated Management System* (IMS), PLN telah mengembangkan dan menerapkan inisiatif penting terkait ESG dalam proses penyediaan listrik, mulai dari produksi, transmisi dan distribusi listrik sampai dengan retail kepada pelanggan *end users* termasuk penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan pembangkit, *digital power plant*, *biomass co-firing*, *anti-blackout*, *digital distribution*, *billing & collection optimization*, serta *EV infrastructure* dan *PLN Mobile relaunch*.

as Corporate Risk Profile. The final risk level of each main corporate risk in 2024 included Inherent Risk and Residual Risk. On an ongoing basis, the Board of Directors makes efforts to mitigate each of these risks to ensure that the risk level is in accordance with the established Risk Appetite. In addition, the Board of Directors also strives to improve the Company's risk management tools in accordance with business process developments, applicable regulations, and input and recommendations from the Board of Commissioners related to Business Continuity Management (BCM).

As a unified system within the Integrated Management System (IMS) framework, PLN has developed and implemented important initiatives related to ESG in electricity supply process, from production, transmission, and distribution of electricity, to retail to end-user customers, including the implementation of environmental management policies for power plants, digital power plants, biomass co-firing, anti-blackout, digital distribution, billing & collection optimization, as well as EV infrastructure and PLN Mobile relaunch.

Memperluas Akses Penyediaan Energi Listrik

Expanding Access to Electricity Supply

PLN senantiasa berkomitmen dalam menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru nusantara. Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN hingga akhir tahun 2024 mencapai 93,05%. Terdapat 83.763 desa atau kelurahan di seluruh penjuru tanah air memperoleh akses terhadap listrik dengan 77.942 desa dilayani langsung oleh listrik PLN, termasuk wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, PLN juga memberikan layanan listrik terhadap kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses listrik yang *fair* melalui Program Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Adapun program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine* hadir untuk memberikan dukungan listrik di bidang pertanian dan perikanan, sehingga meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat bidang tersebut.

PLN is always committed to providing equitable access to electricity throughout the archipelago. The Village Electrification Ratio (RDB) PLN as of the end of 2024 reached 93.05%. There are 83,763 villages or sub-districts throughout the country with access to electricity, with 77,942 villages were directly served by PLN electricity, including disadvantaged, frontier, and outermost areas (3T). In addition, PLN also provides electricity services to vulnerable groups and low-income communities to obtain fair access to electricity through the Targeted Electricity Subsidy Program. The Electrifying Agriculture and Electrifying Marine programs are available to provide electricity support in agriculture and fisheries, thereby increasing the productivity and welfare of the community in these fields.



Meningkatkan Porsi EBT Produksi Listrik

Increasing the Portion of RNE Electricity Production

PLN berkomitmen menjalankan transisi energi dengan berpegang pada trilema energi yakni keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi. Untuk itulah, kebijakan dan strategi PLN diarahkan untuk fokus memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara andal dan terjangkau, dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Transisi energi bertujuan untuk menghasilkan energi bersih dari pembangkit EBT. Selain itu, PLN juga melakukan kolaborasi dalam strategi, inovasi maupun investasi untuk mengendalikan perubahan iklim.

Komitmen PLN dalam mendukung transisi energi dan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan melalui 4 (empat) inisiatif utama PLN yaitu, penambahan kapasitas pembangkit EBT, program *co-firing* biomassa PLTU, konversi Pembangkit Listrik Tenaga Gas menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU), serta *clean coal technology* telah berhasil merealisasikan reduksi emisi sebesar $\pm 12,77$ juta ton CO₂ pada tahun 2024. Perseroan mengelola pembangkit EBT dengan kapasitas mencapai 8.801 MW dan 2.222 unit SPKLU milik PLN dari total produksi listrik pada posisi akhir 2024.

Di sisi pembiayaan berkelanjutan untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi dapat dieksekusi dengan skema ARED (*Accelerated Renewable Energy Development*), PLN terus melanjutkan konsep pembiayaan hijau (*green financing*) untuk memperluas akses investor dalam mendukung skema keberlanjutan PLN. *Green financing* bertujuan untuk mewujudkan 75% kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan dan 25% sisanya berbasis gas pada tahun 2040. Upaya lainnya adalah mendorong transisi energi ke penggunaan energi rendah karbon dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicles/EV*) yang menjadi inovasi produk *beyond kWh*.

Konsistensi PLN dalam pengembangan energi bersih dan penurunan emisi karbon berkelanjutan memperoleh rekognisi positif di tahun 2024, dengan meraih 42 penghargaan, termasuk 10 penghargaan Aditama dari Kementerian ESDM. Diantaranya adalah 3 (tiga) penghargaan prestisius dalam ajang *Investing on Climate Editor's Choice Award 2024* yang diselenggarakan oleh Investing on Climate bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk kategori

PLN is committed to implementing energy transition by adhering to the energy trilemma, namely energy reliability, affordability, and sustainability. For this reason, PLN's policies and strategies are directed to focus on meeting the community's energy needs reliably and affordably, while still reducing negative impacts on the environment. The energy transition aims to produce clean energy from RNE plants. In addition, PLN also collaborates in strategies, innovations, and investments to control climate change.

PLN's commitment to supporting the energy transition and decarbonization of the electricity sector through 4 (four) main PLN initiatives, namely, increasing the capacity of renewable energy plants, PLTU biomass *co-firing* program, converting Gas Power Plants to Steam Power Plants (PLTGU), and *clean coal technology* managed to realize emission reductions of ± 12.77 million tons of CO₂ in 2024. The Company managed renewable energy plants with a capacity of 8,801 MW and 2,222 SPKLU units owned by PLN of the total electricity production at the end of 2024.

In terms of sustainable financing to accelerate energy transition projects that can be executed with the ARED (*Accelerated Renewable Energy Development*) scheme, PLN continues to continue the green financing concept to expand investor access in supporting PLN's sustainability scheme. Green financing aims to realize 75% of generating capacity based on renewable energy and the remaining 25% based on gas by 2040. Another effort is to encourage the energy transition to the use of low-carbon energy by developing an electric vehicle (EV) ecosystem which is a product innovation beyond kWh.

PLN's consistency in developing clean energy and reducing sustainable carbon emissions received positive recognition in 2024, by winning 42 awards, including 10 Aditama awards from the Ministry of Energy and Mineral Resources. Among them were 3 (three) prestigious awards at the Investing on Climate Editor's Choice Award 2024 event organized by Investing on Climate in collaboration with Indonesia Stock Exchange for the Renewable Energy Investment category,

Renewable Energy Investment, Best Literacy for Climate Resilience, dan Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability merupakan penghargaan kepada PLN yang berkontribusi besar dalam investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim.

Best Literacy for Climate Resilience, and Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability, an award for PLN which made a major contribution to investments that supported environmental sustainability and climate resilience.

Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Reducing Greenhouse Gas Emissions

Kebijakan dan strategi tata Kelola, terutama di bidang lingkungan dikembangkan sejalan dengan prinsip ESG. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan emisi karbon, serta mendorong inovasi dalam penggunaan energi bersih dan terbarukan. Di samping itu, PLN juga berperan aktif dalam kegiatan rehabilitasi lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta edukasi dan keterlibatan masyarakat untuk mendukung kelestarian alam.

Governance policies and strategies, particularly in the environmental sector, are developed in line with ESG principles. The goal is none other than to improve operational efficiency, reduce carbon emissions, and encourage innovation in the use of clean and renewable energy. In addition, PLN also plays an active role in environmental rehabilitation activities, biodiversity conservation, and community education and involvement to support environmental sustainability.

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, PLN menerapkan berbagai inisiatif strategis. Dalam pengembangan EBT, PLN menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW hingga 2034. Untuk menekan emisi dari pembangkit listrik, PLN menerapkan teknologi rendah emisi, seperti *co-firing* biomassa, konversi PLTG ke PLTGU, dan *Clean Coal Technology* (CCT).

To reduce greenhouse gas emissions, PLN implements various strategic initiatives. In developing RNE, PLN targets an additional capacity of 69.5 GW by 2034. To reduce emissions from power plants, PLN applies low-emission technologies, such as biomass *co-firing*, conversion of PLTG to PLTGU, and Clean Coal Technology (CCT).

Komitmen Dalam Implementasi *Whistleblowing System*

Commitment to Implementing a Whistleblowing System

Keberadaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan sekaligus menjadi mekanisme *early warning system* dalam mendeteksi adanya pelanggaran ataupun *fraud*. Untuk perkembangannya sejalan dengan regulasi yang berlaku maupun Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP), PLN telah melakukan pemutakhiran Pedoman WBS yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) Nomor: 0018 .E/DIR/2024 tanggal 26 Juni 2024. Pedoman WBS dapat diakses oleh publik pada website PLN <https://web.pln.co.id/tentang-kami/whistleblowers-system>. Untuk memastikan pedoman WBS telah dimutakhirkan, diketahui dan dipahami secara baik

The existence of a Whistleblowing System (WBS) is part of the Company's internal control system as well as an early warning system mechanism in detecting violations or fraud. For its development to be in line with applicable regulations and Anti-Bribery Management System (SMAP), PLN updated the WBS Guidelines as stipulated in the Standard Procedure for Whistleblowing System within PT PLN (Persero) Number: 0018. E/DIR/2024 dated June 26, 2024. The WBS Guidelines is publicly accessible on PLN website <https://web.pln.co.id/tentang-kami/whistleblowers-system>. To ensure that the WBS guidelines have been updated, are known and understood well by all internal and external stakeholders, PLN periodically internalizes and disseminates WBS Guidelines. Dissemination is carried out through various communication



Laporan Direksi

Board of Directors Report

oleh segenap pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, PLN melakukan internalisasi dan sosialisasi Pedoman WBS secara berkala. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain dengan pertemuan tatap muka, pertemuan daring (*virtual meeting*), portal internal perusahaan, situs *web* resmi PLN, maupun dengan pemasangan *banner* di setiap setiap kerja.

Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS antara lain terkait dengan segala tindakan *fraud* dalam bentuk korupsi, penyalahgunaan wewenang/aset, penggelapan, rekayasa laporan keuangan dan/atau non keuangan, kecurangan, pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal PLN, maupun peraturan disiplin pegawai. Dengan implementasi WBS diharapkan PLN dapat mendukung terciptanya budaya integritas di segenap jajaran Insan PLN dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Selama tahun 2024, terdapat 364 pengaduan WBS yang diterima, menurun dari jumlah laporan WBS tahun lalu sebanyak 728 pengaduan. Dari hasil penanganan WBS tersebut seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Tim Pengelola WBS secara berkala menyusun laporan penerapan WBS dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi penerapan WBS untuk perbaikan di masa mendatang.

channels, including face-to-face meetings, online meetings (virtual meetings), internal company portals, the official PLN website, or by installing banners at each work site.

The types of violations that can be reported through WBS channel include all acts of fraud in the form of corruption, abuse of authority/assets, embezzlement, engineering of financial and/or non-financial reports, fraud, violations of applicable laws and regulations, PLN internal policies, and employee disciplinary regulations. With the implementation of WBS, it is hoped that PLN can support the creation of a culture of integrity in all levels of PLN personnel and support from all stakeholders. Throughout 2024, there were 364 WBS complaints received, decreased from the number of WBS reports last year of 728 complaints. From the results of handling the WBS, all were followed up. The WBS Management Team periodically prepares reports on WBS implementation and submits them to the President Director and the Board of Commissioners as material for monitoring and evaluating the implementation of WBS for future improvements.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi membentuk Komite di Bawah Direksi diantaranya Komite *Sustainability*, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi. Pembentukan Komite *Sustainability* dan Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

In order to support effective implementation of its duties, the Board of Directors has formed Committees under the Board of Directors, which are the Sustainability Committee and the Information Technology Steering Committee. The establishment of Sustainability Committee and Information Technology Committee is a follow-up to the issuance of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

Setiap Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Piagam Komite sebagai pedoman kerjanya, dengan memberikan dukungan positif dalam membantu Direksi sesuai fokus ruang lingkup tanggung jawab komite. Setiap komite telah memberikan masukan dan rekomendasi yang independen, profesional dan berkualitas, yang dilengkapi dengan pembahasan permasalahan yang dihadapi, analisis dan argumentasi yang relevan untuk setiap permasalahan yang dibahas dan menjadi kewenangannya.

Secara keseluruhan, Direksi menilai kinerja Komite di bawah Direksi selama tahun 2024 berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari dukungan aktif dan kontribusi komite dalam membantu pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Direksi, khususnya melalui pemberian rekomendasi dan pengambilan keputusan sesuai lingkup kewenangannya.

Komite *Sustainability*

Sustainability Committee

Berdasarkan Pedoman Komite *Sustainability*, Komite memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam penerapan prinsip keberlanjutan, yang mencakup aspek pengelolaan lingkungan, pengelolaan perubahan iklim mencakup dekarbonisasi pembangkit fosil, ekspansi EBT dan pengembangan ekosistem hijau, serta melakukan pembahasan penerapan prinsip keberlanjutan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Komite *Sustainability* diketuai oleh Executive Vice President (EVP) Transisi Energi dan Keberlanjutan. Untuk memastikan integrasi prinsip keberlanjutan dalam lingkungan bisnis PLN *group*, Komite *Sustainability* juga dibentuk di lingkungan PLN Unit, *Subholding*, dan Anak Perusahaan guna menjalankan kegiatan keberlanjutan sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Komite *Sustainability* membantu Direksi dalam menjalankan pengelolaan proses bisnis Perseroan telah sejalan dengan prinsip dan praktik keberlanjutan yang diatur dalam regulasi yang berlaku maupun *best practice*.

Selama tahun 2024, Komite *Sustainability* telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, paling sedikit rapat 1 kali setiap triwulan dengan dihadiri oleh setiap anggota Komite *Sustainability*.

Each Committee carries out its respective duties and responsibilities in accordance with its Committee Charter as a working guideline, providing positive support in assisting the Board of Directors in line with the committee's scope of responsibilities. Each committee has delivered independent, professional, and high-quality input and recommendations, accompanied by discussions of the issues faced, relevant analysis, and sound arguments for each matter under its authority.

Overall, the Board of Directors considered that the performance of Committees under the Board of Directors throughout 2024 went properly. This was reflected in the active support and contribution of the committees in assisting the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, particularly through providing suggestions and making decisions according to their scope of authority.

Based on the Sustainability Committee Guidance, the Committee has the duty and responsibility to determine the direction of policies and strategies in implementing sustainability principles, which include aspects of environmental management, climate change management including decarbonization of fossil fuel power plants, expansion of renewable energy, and development of green ecosystems, as well as discussing the implementation of sustainability principles and reporting them to the Board of Commissioners. The Sustainability Committee is chaired by the Executive Vice President (EVP) of Energy Transition and Sustainability. To ensure the integration of sustainability principles in PLN group business environment, the Sustainability Committee is also established in PLN Unit, Subholding, and Subsidiary environments to carry out sustainability activities in line with their respective business processes. The Sustainability Committee assists the Board of Directors in performing the management of the Company's business processes in line with the sustainability principles and practices as stipulated in applicable regulations and best practices.

Throughout 2024, the Sustainability Committee held 12 (twelve) meetings, at least 1 meeting every quarter attended by each member of the Sustainability Committee.



Komite Pengarah Teknologi Informasi (Komite TI) Information Technology Steering Committee (IT Steering Committee)

Komite Pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam penerapan sistem teknologi informasi, memastikan keselarasan antara Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan TI. Selain itu, Komite Pengarah TI juga memastikan proses integrasi sistem TI di lingkungan PLN group berjalan efektif.

Selama tahun 2024, Komite Pengarah TI telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan dihadiri oleh setiap anggota Komite.

The IT Steering Committee has the duties and responsibilities of determining the direction of policies and strategies in the implementation of information technology systems, ensuring alignment between the Information Technology Strategic Plan and the Company's Long-Term Plan, ensuring the implementation of Information Technology Strategic Plan, as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and evaluating, directing, and monitoring IT implementation. In addition, the IT Steering Committee also ensures that the IT system integration process within PLN group environment runs effectively.

Throughout 2024, the IT Steering Committee held 7 (seven) meetings, attended by each member of the Committee.

Konsistensi Penerapan *Environmental Social Governance* (ESG) Untuk Kehidupan yang Lebih Baik Consistent Implementation of Environmental Social Governance (ESG) for a Better Life

Listrik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, mulai dari penerangan, penghasil panas, hingga sarana pekerjaan dan juga hiburan. Untuk itu, PLN berkomitmen dalam menjaga dan memproduksi listrik yang aman dan ramah terhadap lingkungan. PLN memandang bahwa penerapan prinsip ESG sangat penting, karena membantu Perseroan mengelola risiko, meningkatkan tata kelola, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, ESG juga akan meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang, dan menjaga keberlanjutan bisnis Perseroan. Eksekusi program ESG dilakukan dengan pengelolaan bisnis yang berorientasi pada aspek lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan risiko terkait perubahan iklim, praktik kesetaraan *gender*, sosial dan tata.

Electricity plays an important role in improving the quality of human life, from lighting, heat generation, to work facilities and entertainment. For this reason, PLN is committed to maintaining and producing electricity that is safe and environmentally friendly. PLN views that the implementation of ESG principles is very important, as it helps the Company manage risks, improve governance, and build better relationships with various stakeholders. In addition, ESG will also improve long-term financial performance and maintain the Company's business sustainability. The ESG program is executed by business management that is oriented towards environmental and biodiversity aspects, risk management related to climate change, gender equality practices, social and governance.

Laporan Direksi

Board of Directors Report

PLN secara konsisten berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh aktivitas usahanya. Tidak hanya berkomitmen pada penyediaan listrik yang andal, Perseroan juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung transisi penggunaan energi bersih untuk mewujudkan masa depan yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal kinerja lingkungan, PLN menunjukkan komitmen penuh terhadap upaya mitigasi perubahan iklim dan transisi menuju energi berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Program transisi energi dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh dan realistis, dengan dukungan sumber daya manusia yang andal dan kompeten. Transisi energi bertujuan untuk menghasilkan energi bersih dari pembangkit EBT, mengembangkan jaringan pintar (*smart grid*), dan memperluas interkoneksi agar kontribusi EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional dapat dioptimalkan tanpa meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kWh.

Dalam kinerja sosial, PLN melakukan upaya mewujudkan kesetaraan layanan kepada pelanggan, PLN terus membangun dan memperkuat jaringan listrik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) untuk pemerataan akses listrik ke pelosok nusantara, antara lain melalui Program Listrik Desa dan Program Subsidi Listrik Tepat Sasaran, program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine* hadir untuk mendukung listrik di bidang pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PLN memberikan dukungan penuh dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang lebih terintegrasi, terarah, terukur hasil dan dampaknya ke dalam 17 (tujuh belas) aspek SDG's. Adapun fokus program TJSL PLN berlandaskan pada 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum & Tata Kelola. Selama tahun 2024 PLN telah menyalurkan dana TJSL yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain dari *Community Involvement and Development* (CID) dengan alokasi sebesar Rp400 miliar dan realisasi sebesar Rp377,37 miliar, serta Program Pendanaan Usaha

PLN consistently strives to apply sustainability principles in all its business activities. Not only committed to providing reliable electricity, the Company also contributes to maintaining the sustainability of the ecosystem and supporting the transition to clean energy use to realize a more environmentally friendly future. In terms of environmental performance, PLN shows its full commitment to climate change mitigation efforts and the transition to sustainable energy, both at national and international levels.

The energy transition program is carried out based on a comprehensive and realistic study, with the support of reliable and competent human resources. The energy transition aims to produce clean energy from renewable energy generators, develop smart grids, and expand interconnections so that renewable energy contributions to the national electricity system can be optimized without increasing the Cost of Provision (BPP) of electricity per kWh.

In social performance, PLN makes efforts to realize equal service to customers, PLN continues to build and strengthen electricity network in 3T (disadvantaged, frontier, and outermost) areas for equal access to electricity to remote areas of the archipelago, including through Village Electricity Program and Targeted Electricity Subsidy Program, *Electrifying Agriculture* and *Electrifying Marine*. These programs are present to support electricity in agriculture and fisheries, which can ultimately improve people's welfare.

PLN provides full support in achieving the Sustainable Development Goals, through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) program which is more integrated, focused, measurable in terms of results and impacts into 17 (seventeen) aspects of the SDG's. The focus of PLN's TJSL program is based on 4 (four) pillars, namely Social Pillar, Economic Pillar, Environmental Pillar, and Legal & Governance Pillar. Throughout 2024, PLN distributed TJSL funds sourced from various funding schemes, including from *Community Involvement and Development* (CID) with an allocation of Rp400 billion and a realization of Rp377.37 billion, and the Micro, Small and Medium Enterprises (UMK)



Laporan Direksi

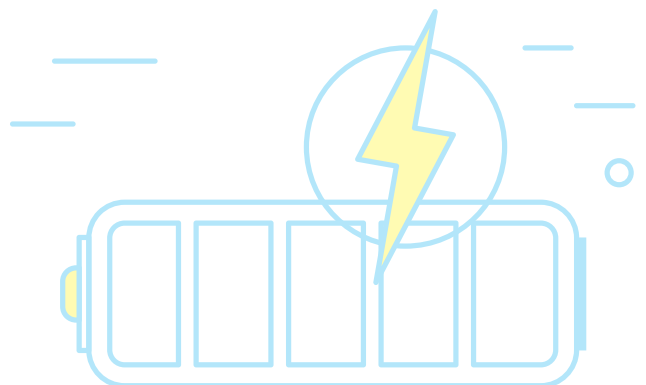
Board of Directors Report

Mikro Kecil (UMK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar dengan tingkat realisasi 100%. Selain itu, terdapat pula alokasi untuk program TJSL non-CID sebesar Rp210,79 miliar dengan realisasi mencapai Rp176,85 miliar. Seluruh inisiatif ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan dampak positif yang merata bagi masyarakat.

Selain fokus dalam pertumbuhan kinerja Perusahaan dalam jangka panjang, PLN juga berupaya mengoptimalkan peran dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. Pencapaian kinerja ekonomi mengalami peningkatan, antara lain dilihat dari perolehan total pendapatan, total aset, total laba tahun berjalan, distribusi nilai ekonomi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk pajak, dividen, remunerasi pegawai, dan realisasi program TJSL yang meliputi Program *Community Involvement and Development* (CID), Program Non-CID dan Program Usaha Mikro Kecil (UMK) yang meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp602,63 miliar. Selain itu, PLN juga aktif dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta kerjasama dengan perusahaan listrik nasional. PLN memiliki peran penting dalam memastikan akses listrik yang merata dan andal bagi seluruh rakyat Indonesia.

Funding Program with a budget allocation of Rp1.5 billion with a realization rate of 100%. In addition, there was also allocation for the non-CID TJSL program of Rp210.79 billion with a realization reaching Rp176.85 billion. All of these initiatives were implemented in an integrated and sustainable manner, with the aim of creating a positive impact that was evenly distributed to the community.

In addition to focusing on the Company's long-term performance growth, PLN also seeks to optimize its role in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), by balancing economic, social and environmental interests in every decision-making. The achievement of economic performance increased as seen from the acquisition of total revenue, total assets, total profit for the year, distribution of economic value to stakeholders in the form of taxes, dividends, employee remuneration, and the realization of TJSL program including the Community Involvement and Development (CID) Program, Non-CID Program, and Micro and Small Business Program (UMK) which increased compared to Rp602.63 billion in 2023. In addition, PLN is also active in developing electricity infrastructure in remote areas, increasing the capacity of the local workforce, and collaborating with national electricity companies. PLN has an important role in ensuring equitable and reliable access to electricity for all Indonesian people.



Perubahan Komposisi Direksi

Changes in Board of Directors' Composition

Selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi maupun jumlah Direksi Perseroan, sehingga komposisi Direksi tetap berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan 1 (satu) Direktur Utama dan 9 (sembilan) anggota Direksi atau sama dengan jumlah dan komposisi Direksi pada akhir tahun 2023.

Darmawan Prasodjo	: Direktur Utama
Sinthya Roesly	: Direktur Keuangan
Yusuf Didi Setiarto	: Direktur Legal dan Manajemen Human Capital
Hartanto Wibowo	: Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
Suroso Isnandar	: Direktur Manajemen Risiko
Wiluyo Kusdwiarto	: Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Adi Lumakso	: Direktur Manajemen Pembangkitan
Evy Haryadi	: Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
Adi Priyanto	: Direktur Distribusi
Edi Srimulyanti	: Direktur Retail dan Niaga

Untuk itu, Direksi diharapkan dapat terus meningkatkan soliditas dengan segenap jajaran manajemen PLN, dengan cara mendorong peran aktif seluruh anggota Direksi menjalankan fungsi pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang berfokus pada pertumbuhan kinerja berkelanjutan di masa mendatang.

Throughout 2024, there were no changes in the composition or number of the Company's Board of Directors, therefore, the Board of Directors' composition remained at 10 (ten) members with 1 (one) President Director and 9 (nine) members of the Board of Directors or the same as the number and composition of the Board of Directors at the end of 2023.

Darmawan Prasodjo	: President Director
Sinthya Roesly	: Director of Finance
Yusuf Didi Setiarto	: Director of Legal and Human Capital Management
Hartanto Wibowo	: Director of Corporate Planning and Business Development
Suroso Isnandar	: Director of Risk Management
Wiluyo Kusdwiarto	: Director of Project Management and Renewable Energy
Adi Lumakso	: Director of Generation Management
Evy Haryadi	: Director of Transmission and System Planning
Adi Priyanto	: Director of Distribution
Edi Srimulyanti	: Director of Retail and Commerce

Therefore, the Board of Directors is expected to continue to increase solidarity with all levels of PLN management, by encouraging the active role of all members of the Board of Directors in carrying out the management and administration functions of the Company that focus on sustainable performance growth in the future.



Apresiasi dan Penutup Appreciation

Kami atas nama seluruh jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham PLN atas arahan dan kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Perseroan ini, serta apresiasi kepada Dewan Komisaris atas segala nasihat, saran, dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi sepanjang tahun buku 2024. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis, regulator dan segenap pemangku kepentingan terkait atas dukungan, kepercayaan dan kerja sama yang baik selama ini. Direksi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan PLN, atas kerja sama dan sinergi yang telah terjalin hingga Perseroan mampu menghadirkan kontribusi nyata dan kinerja yang positif di tengah tantangan kelistrikan global yang terjadi.

Kami meyakini bahwa dengan adaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terus berkembang, program transformasi hari ini dan ke depan untuk mewujudkan mimpi bersama dalam energi berkelanjutan dengan target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060, serta semangat dalam mengoptimalkan peluang bisnis yang ada, PLN terus melaju dan maju bersama dengan segenap pemangku kepentingan mewujudkan "Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik".

On behalf of the entire Board of Directors, we would like to thank PLN Shareholders for the direction and trust given to lead this Company, as well as appreciation to the Board of Commissioners for all advice, suggestions, and recommendations given to the Board of Directors throughout the 2024 financial year. We would also like to appreciate all customers, business partners, regulators, and all relevant stakeholders for their support, trust, and good cooperation throughout the years. The Board of Directors would also express our appreciation to all PLN personnel, for the cooperation and synergy established so that the Company was able to present concrete contributions and positive performance amidst the global electricity challenges that occur.

We believe that by adapting to the ever-evolving business environment, today's and future transformation programs to realize a shared dream in sustainable energy with Net Zero Emission (NZE) target in 2060, and the spirit of optimizing existing business opportunities, PLN can continue to move forward and advance together with all stakeholders to realize "Electricity for a Better Life".

Jakarta, Juni 2025 Jakarta, June , 2025

Atas Nama Direksi On Behalf of the Board of Directors

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Darmawan Prasodjo

Direktur Utama
President Director



1 Wiluyo Kusdiharto
 Direktur Manajemen Proyek dan
 Energi Baru Terbarukan
 Director of Project Management
 and Renewable Energy

2 Suroso Isnandar
 Direktur Manajemen Risiko
 Director of Risk Management

3 Edi Srimulyanti
 Direktur Retail dan Niaga
 Director of Retail and Commerce

4 Adi Priyanto
 Direktur Distribusi
 Director of Distribution

5 Darmawan Prasodjo
 Direktur Utama
 President Director



6 Sinthya Roesly

Direktur Keuangan
Director of Finance

7 Hartanto Wibowo

Direktur Perencanaan Korporat dan
Pengembangan Bisnis
Director of Corporate Planning and
Business Development

9 Yusuf Didi Setiarto

Direktur Legal dan Manajemen
Human Capital
Director of Legal and Human
Capital Management

8 Adi Lumakso

Direktur Manajemen Pembangkitan
Director of Generation Management

10 Evy Haryadi

Direktur Transmisi dan
Perencanaan Sistem
Director of Transmission and
System Planning

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2025

Direksi
Board of Director



Darmawan Prasodjo

Direktur Utama
President Director



Sinthya Roesly

Direktur Keuangan
Director of Finance



Yusuf Didi Setiarto

Direktur Legal dan Manajemen
Human Capital
Director of Legal and Human Capital
Management



Hartanto Wibowo

Direktur Perencanaan Korporat dan
Pengembangan Bisnis
Director of Corporate Planning and
Business Development



Suroso Isnandar

Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management



Wiluyo Kusdwiarto

Direktur Manajemen Proyek dan
Energi Baru Terbarukan
Director of Project Management and
Renewable Energy



Adi Lumakso

Direktur Manajemen Pembangkitan
Director of Generation Management



Evy Haryadi

Direktur Transmisi dan
Perencanaan Sistem
Director of Transmission and
System Planning



Adi Priyanto

Direktur Distribusi
Director of Distribution



Edi Srimulyanti

Direktur Retail dan Niaga
Director of Retail and Commerce



Statements of Members of The Board of Directors and of Commissioners on the Accountability for the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

We, the signatories, hereby stated that all information in the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been comprehensively presented and that we are fully accountable for the accuracy of the content of this Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, June , 2025

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Burhanuddin Abdullah

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Suahasil Nazara

Wakil Komisaris Utama
Deputy President Commissioner

Aminuddin Ma'ruf

Komisaris
Commissioner

Dadan Kusdiana

Komisaris
Commissioner

Jisman Parada Hutajulu

Komisaris
Commissioner

Susiwijono Moegiarso

Komisaris
Commissioner

Yazid Fanani

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Mutanto Juwono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Andi Arief

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ali Masykur Maza

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Photo by Kuku Tri Utomo
PLN Pusharlis



Profil Perusahaan

Company Profile



Identitas Perusahaan

Corporate Identity

Nama Perusahaan

Company Name



PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Nama Singkat

Short Name



PLN

Tanggal Pendirian

Date of Establishment



- Pertama kali berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945.
- Menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero) berdasarkan Akta 169, 30 Juli 1994 dari Notaris Sutjipto.
- First established as Electricity and Gas Bureau based on the Government Decree No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945.
- Became a Limited Liability Company under the name PT PLN (Persero) based on Deed 169, July 30, 1994, made before Sutjipto, a Notary.

Bentuk Badan Hukum

Legal Entity Form



Perseroan Terbatas
Limited Liability Company

Bidang Usaha

Line of Business



Pembangkitan, Distribusi, Transmisi, dan Jasa Lain Terkait Kelistrikan
Generation, Distribution, Transmission, and Other Services Related to Electricity

Tanggal Pencatatan Obligasi Pertama Kali di Bursa

Bonds' First Listing Date on the Stock Exchange



10 November 1992
November 10, 1992

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment



- Penetapan Pemerintah No. 1 SD/1945 tanggal 27 Oktober 1945 berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas.
- Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965, dibentuk sebagai Perusahaan Listrik Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, ditegaskan menjadi Perusahaan Umum Perusahaan Listrik Negara.
- Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT PLN (Persero).
- Government Stipulation No. 1 SD/1945 dated October 27, 1945, established as Electricity and Gas Bureau.
- Government Regulation No. 67 of 1961, changed into a State Company (Perusahaan Negara), and renamed as the General Management Board of State Electricity Company.
- Government Regulation No. 19 of 1965, established as a State-Owned Electricity Company.
- Government Regulation No. 18 of 1972, dated June 3, 1972, affirmed as a Public Corporation (Perum) of State Electricity.
- Deed No. 169, July 30, 1994, from Sutjipto, a Notary, changed into a Limited Liability Company under the name PT PLN (Persero).

Pemegang Saham

Shareholder



Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan 100%
Government of the Republic of Indonesia with ownership percentage of 100%

Kode Obligasi

Bonds Code



PPLN



Nama Bursa

Stock Exchange Name



Bursa Efek Indonesia (dh. Bursa Paralel Indonesia)
Indonesia Stock Exchange (formerly Indonesia Parallel Exchange)

Jumlah Karyawan (Per 31 Desember 2024)

Number of Employees (as of December 31, 2024)



38.289

Karyawan *Holding*
Holding Employees

13.061

Karyawan *Subholding* dan Anak Perusahaan
Subholding and Subsidiary Employees

Modal Dasar

Authorized Capital



Rp439 Triliun Trillion

yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp1.000.000,- per lembar saham
divided into 439,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid Capital



Rp150,54 Triliun Trillion

yang terbagi atas 150.536.096 saham
divided into 150,536,096 shares

Wilayah Operasional

Operational Area



Wilayah Republik Indonesia
Area of the Republic of Indonesia

Entitas Anak Perusahaan

Subsidiaries



- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
- PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya
- PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
- Majapahit Holding BV
- PT Haleyora Power
- PT Energy Management Indonesia
- PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara

Alamat Perusahaan

Company Address



Kantor Pusat Head Office

Jl. Trunojoyo Blok M I -135 Jakarta 12160

☎ (021) 7261875; 7261122; 7262234; 7251234; 7250550

📠 (021) 7221330; 7397150

🌐 www.pln.co.id

✉ investor.relation@pln.co.id

Entitas Subholding

Subholdings



- PT PLN Indonesia Power
- PT PLN Nusantara Power
- PT PLN Energi Primer Indonesia
- PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus)

Sejarah Singkat PLN

Brief History of PLN



Photo by Dimas Wahyu Adhi Kusuma

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau yang dikenal dengan "PLN", berdiri pada 27 Oktober 1945 sebagai Jawatan Listrik dan Gas, beroperasi di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW. Sebelumnya, Jawatan Listrik dan Gas tersebut merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asal Belanda yang mengoperasikan pabrik gula dan perkebunan teh di wilayah Nusantara. Seiring adanya kebutuhan tenaga listrik pada proses produksi di akhir abad ke-19, N.V. Handelsvennootschap yang berpusat di Amsterdam kemudian mendirikan perusahaan listrik di Batavia dengan nama *Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM).

Setelah beroperasi sebagai Jawatan Listrik dan Gas, PLN diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) pada 1 Januari 1961. Sebagai BPU-PLN, Perseroan beroperasi pada bidang usaha penyediaan listrik, gas, dan kokas, sebelum akhirnya diubah kembali pada 1 Januari 1965 menjadi 2 (dua) perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selanjutnya, seiring adanya Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang diperkuat Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972, status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dan bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK).

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), or known as "PLN", was founded on October 27, 1945, as the Electricity and Gas Departmental Enterprise, operating under the Department of Public Works and Energy with an electricity generating capacity of 157.5 MW. Initially, the Electricity and Gas Departmental Enterprise was a merger of several Dutch companies that operated sugar factories and tea plantations in the Archipelago. As the presence of the need for electric power in the production process in the late 19th century, N.V. Handelsvennootschap, based in Amsterdam, established an electricity company in Batavia under the name *Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij* (NIEM).

After operating as the Bureau of Electricity and Gas, PLN was then changed to become BPU-PLN (General Board of the State Electricity Company) on January 1, 1961. As BPU-PLN, the Company operated in the business sector that provided electricity, gas, and coke, before finally being changed back on January 1, 1965, it became 2 (two) state companies, namely the State Electricity Company (PLN) and the State Gas Company (PGN). Furthermore, according to Government Regulation No. 30 of 1970, which was strengthened by Government Regulation No. 18 of 1972, the status of PLN changed to become a State Electricity Public Company (Perum) and acted as the Holder of the Authority to Conduct Business Electricity (PKUK).



Sejarah Singkat PLN Brief History of PLN

Pada tahun 2009, sesuai Undang-Undang No. 30 tahun 2009, PLN tidak lagi beroperasi sebagai PKUK tetapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. PLN kemudian berkembang sebagai salah satu korporasi pengelola aset kelistrikan terbesar di Indonesia. Hingga kini, PLN telah mengelola pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas terpasang 72.976,30 MW, serta jaringan transmisi sepanjang 70.933 kms dan gardu induk sebesar 166.727 MVA.

Perseroan melakukan restrukturisasi perusahaan melalui pembentukan *Holding-Subholding* PLN yang berlaku mulai 1 Januari 2023 sebagai salah satu wujud komitmen mempercepat akselerasi menuju transisi energi di Indonesia. Lebih dari itu, pembentukan *Holding-Subholding* PLN sekaligus merupakan upaya mendorong optimalisasi utilitas aset, *core competency*, serta *technical skills* yang dimiliki, di samping memanfaatkan potensi pengembangan usaha agar lebih lincah (*agile*) dan efektif di tengah perubahan zaman.

Melalui restrukturisasi tersebut, PLN kini beroperasi sebagai *holding* yang membawahi 4 (empat) *subholding*, yaitu dua *subholding* di bidang pembangkitan tenaga listrik (PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power), satu *subholding* di bidang penyediaan dan logistik energi primer (PLN Energi Primer Indonesia), serta satu *subholding* untuk kegiatan usaha di luar pembangkitan, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan atau "*Beyond kWh*" (PLN Icon Plus) dengan tetap memiliki secara langsung beberapa Anak Perusahaan lainnya.

In 2009, pursuant to Law No. 30 of 2009, PLN ceased to operate as the Provider of Electricity for the Public Interest (PKUK) and became a State-Owned Enterprise (SOE) with the mandate to provide electricity for the public interest. PLN has since evolved into one of the largest electricity asset management corporations in Indonesia. To this day, PLN has managed a power plant with a capacity of 72,976.30 MW, as well as a transmission network of 70,933 kms and a substation of 166,727 MVA.

The Company carried out a corporate restructuring through the establishment of the PLN Holding-Subholding, which took effect on January 1, 2023, as a form of commitment to accelerating the energy transition in Indonesia. Furthermore, the formation of the PLN Holding-Subholding is also an effort to encourage the optimization of asset utilization, core competency, and technical skills, in addition to utilizing business development potential to make it more agile and effective amid the changing times.

Through the restructuring, PLN currently operates as a holding which oversees 4 (four) subholdings, namely two subholdings in the field of electricity generation (PLN Nusantara Power and PLN Indonesia Power), one subholding in the field of primary energy supply and logistics (PLN Energi Primer Indonesia), as well as one subholding for business activities other than electricity generation, transmission and distribution or "Beyond kWh" (PLN Icon Plus) while still directly owning several other Subsidiaries.

Informasi Perubahan Nama

Information of Name Changes

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau yang dikenal dengan "PLN", berdiri pada 27 Oktober 1945 sebagai Jawatan Listrik dan Gas, beroperasi di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW. Sebelumnya, Jawatan Listrik dan Gas tersebut merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asal Belanda yang mengoperasikan pabrik gula dan perkebunan teh di wilayah Nusantara. Seiring adanya kebutuhan tenaga listrik pada proses produksi di akhir abad ke-19, N.V. Handelsvennootschap yang berpusat di Amsterdam kemudian mendirikan perusahaan listrik di Batavia dengan nama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM).

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), commonly known as "PLN," was established on October 27, 1945, as the Electricity and Gas Bureau, operating under the Department of Public Works and Energy with an electricity generation capacity of 157.5 MW. Before that, the Electricity and Gas Bureau was a consolidation of several Dutch companies that operated sugar factories and tea plantations in the Archipelago. As the presence of the need for electric power in the production process in the late 19th century, N.V. Handelsvennootschap, based in Amsterdam, established an electricity company in Batavia under the name Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM).



1994

16 Juni
16 June

Sesuai PP No. 23/1994 Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara atau PT PLN (Persero).

Based on Government Regulation No. 23/1994, the Company changed its name to Perusahaan Perseroan (Persero) Listrik Negara or PT PLN (Persero).



1972

3 Juni
3 June

Sesuai PP No. 18/1972, Perusahaan berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

Based on Government Regulation No. 18/1972, the Company changed its name to Public Corporation (Perum) of State Electricity.



1965

1 Januari
1 January

Sesuai PP No. 19/1965 BPU PLN dipecah menjadi 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN)

Based on Government Regulation No. 19/1965, BPU PLN demerged into 2 state companies, namely Perusahaan Listrik Negara (PLN) and Perusahaan Gas Negara (PGN).



1961

1 Januari
1 January

Sesuai PP No. 67/1961, Perusahaan berubah nama menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara)

Based on Government Regulation No. 67/1961, the Company changed its name to BPU-PLN (General Management Board of State Electricity Company).

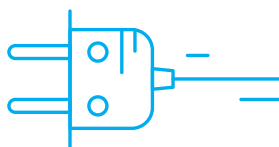


1945

27 Oktober
27 October

Sesuai PP No. 1SD/1945, Perusahaan berdiri dengan nama Jawatan Listrik dan Gas, di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Based on Government Stipulation No. 1SD/1945, the Company was established as the Electricity and Gas Bureau under the Department of Public Works and Energy.





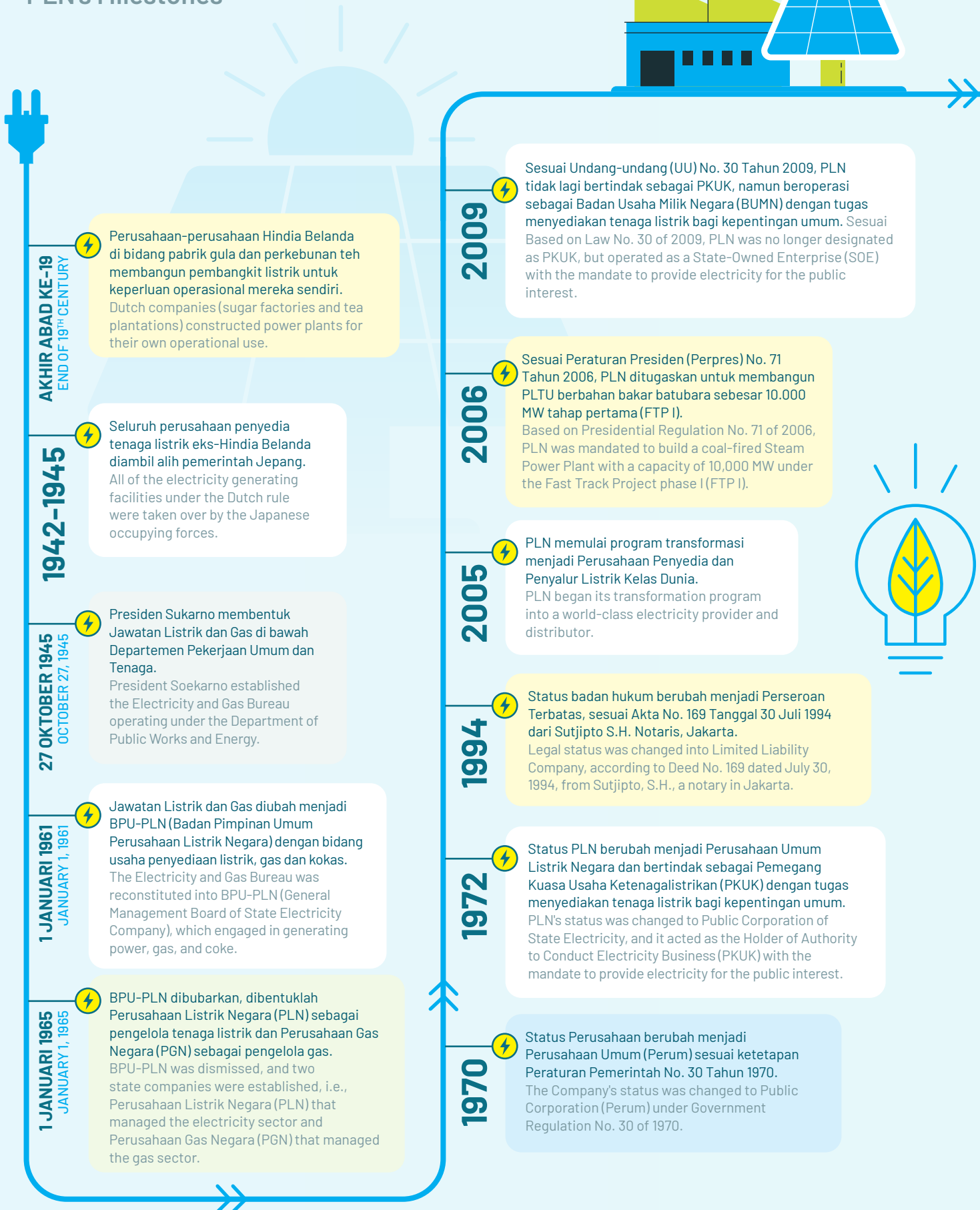
Sejarah Singkat PLN Brief History of PLN



Photo by Dwi Ayu Puspitaningtyas

Jejak Langkah PLN

PLN's Milestones





Jejak Langkah PLN PLN's Milestones



2010



Sesuai Perpres No.4 Tahun 2010, PLN ditugaskan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi dalam bentuk program percepatan tahap kedua (FTP II).
Based on Presidential Regulation No. 4 of 2010, PLN was mandated to build coal, gas, and geothermal steam power plants under the Fast Track Project phase II (FTP II).

2011



Pemerintah menyerahkan saham BUMN PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) kepada PT PLN (Persero) pada tanggal 5 Agustus 2011 dan menjadi anak perusahaan PT PLN (Persero).
The Government handed over the SOE shares of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) to PT PLN (Persero) on August 5, 2011, thus establishing BAG as a subsidiary of PT PLN (Persero).

2013



PLN mengoperasikan *Compressed Natural Gas* (CNG) sebagai bahan bakar pengganti BBM untuk memenuhi kebutuhan pembangkit beban puncak (*peaker*).
PLN operated Compressed Natural Gas (CNG) as an alternative to fossil fuel to meet the needs of peak load generators (peakers).

2014



PLN menjadi salah satu dari kelompok perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia versi Fortune 500.
PLN became one of the companies with the largest revenues in the world according to Fortune 500.

2015



- PLN mendeklarasikan dimulainya pembangunan PLTU berbahan bakar batubara, gas maupun panas bumi sebesar 35.000 MW dengan target penyelesaian 5 tahun ke depan.
- PLN mulai merealisasikan proyek pembangunan PLTU berteknologi *ultra super critical* dengan kapasitas 2.000 MW di Batang (Jawa Tengah) melalui skema *Public Private Partnership*.
- PLN declared the commencement of the construction of coal, gas, and geothermal power plants with a capacity of 35,000 MW scheduled for completion in 5 years.
- PLN began the construction project of a steam power plant using ultra super critical technology with a capacity of 2,000 MW in Batang (Central Java) through the Public Private Partnership scheme.

2019



Dengan terbitnya Perpres No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan, PLN mendukung penuh pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagai salah satu peluang bisnis baru di masa depan, di antaranya dengan menginisiasi pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Due to the issuance of Presidential Regulation No. 55 of 2019 on Acceleration of Battery Electric Vehicle Program for Road Transportation, PLN fully supported the development of the electric vehicle ecosystem in Indonesia as one of the new business opportunities in the future, including by initiating the development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU).

2018



Di tengah peningkatan harga energi primer dunia serta nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap US Dollar, PLN tetap mampu menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus melanjutkan program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
In the midst of increasing world primary energy prices and the weakening Rupiah exchange rate against the US Dollar, PLN was still able to provide affordable electricity to the public while continuing the electricity infrastructure development program.

2017



Tidak ada lagi sistem kelistrikan di Indonesia yang mengalami defisit. Artinya, masalah pemadaman akibat kekurangan pasokan daya listrik sudah terselesaikan.
There was no longer a deficit in Indonesia's electricity system. This means the blackout problem due to the lack of electricity supply has been resolved.

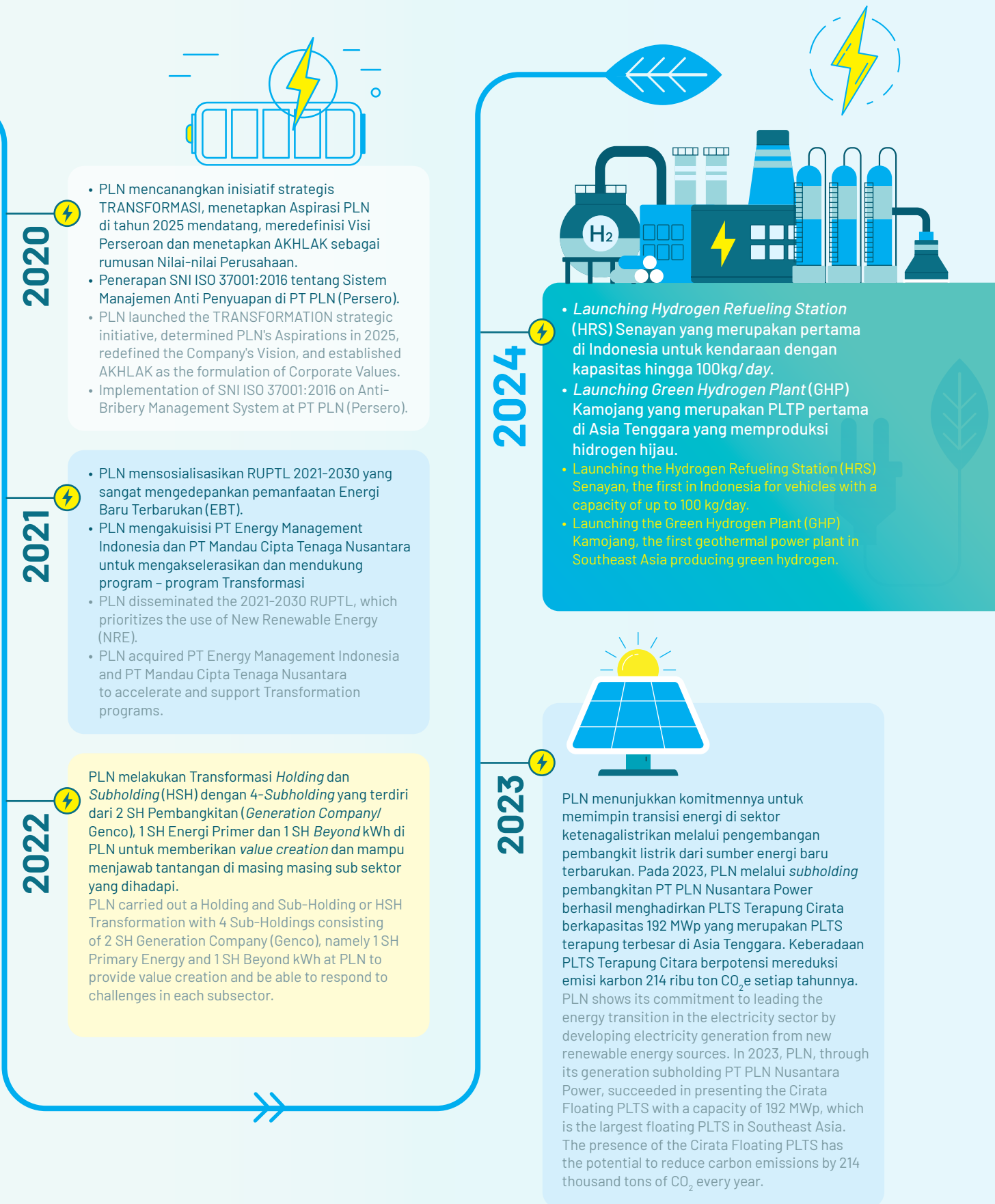
2016



Untuk memenuhi amanat Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah untuk mengeksekusi proyek ketenagalistrikan dalam hal penjaminan, percepatan perizinan dan non-perizinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah, penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.
To fulfill the mandate of Presidential Decree No. 4 of 2016 on Acceleration of Electricity Infrastructure Development, PLN was fully supported by the Government to execute electricity projects in terms of guarantees, accelerated licensing & non-licensing, provision of primary energy, spatial planning, land provision, solving obstacles & problems, and solving all legal issues faced.

Jejak Langkah PLN

PLN's Milestones



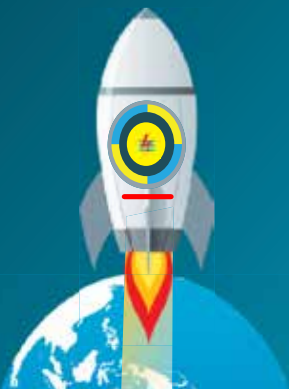
Transformasi Berkelanjutan PLN

PLN Sustainable Transformation

VISI VISION

Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

To Become a Global Top 500 Company and the #1 Customer Choice for Energy Solutions



Growth Moonshots

Masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dunia melalui pertumbuhan *demand* listrik dan bisnis *beyond kWh*

Entering the ranks of the world's top 500 companies through the growth of electricity demand and beyond kWh business.



Digital Moonshots

Menjadi *Global Digital Lighthouse*, memberikan pengalaman pelanggan *excellent* dan keunggulan operasional

Becoming a Global Digital Lighthouse, providing excellent customer experience and operational excellence



NZE Moonshots

Memimpin transisi energi Indonesia dan ekonomi hijau yang terintegrasi dengan pembangunan kawasan

Leading Indonesia's energy transition and green economy integrated with regional development



Moonshots Launchpad

Membangun organisasi dan kompetensi yang relevan untuk kebutuhan bisnis masa depan

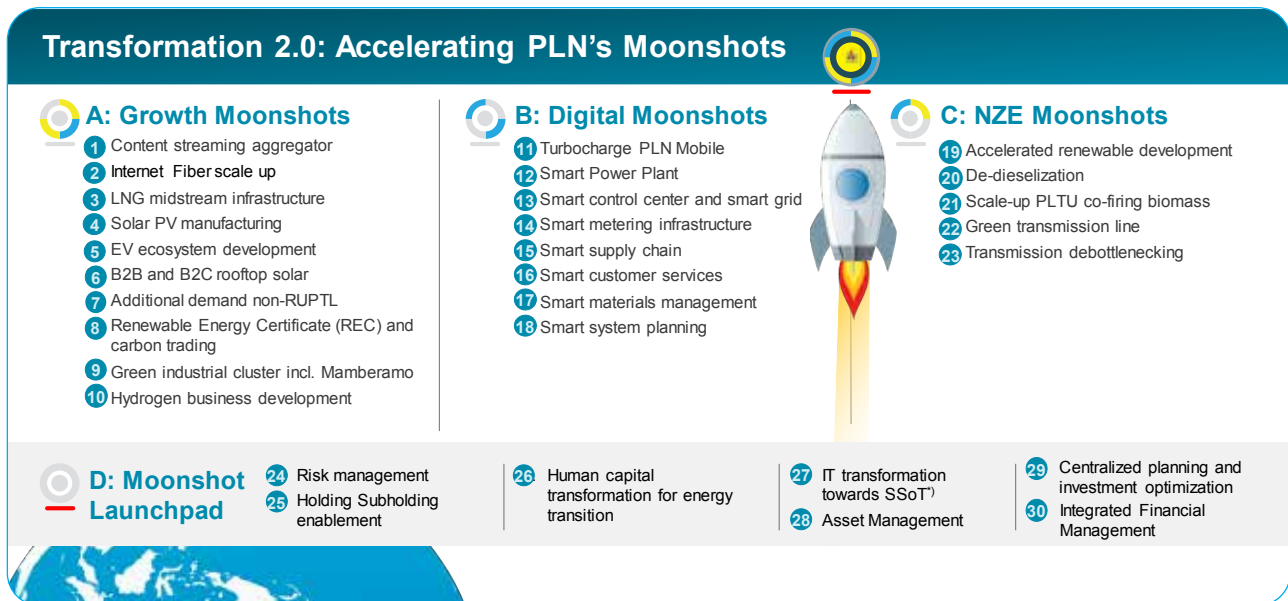
Building organizations and competencies relevant to future business needs

Dalam rangka memperkuat posisi sebagai penyedia solusi energi pilihan pelanggan, sekaligus mendukung visi besar untuk "Menjadi Perusahaan Global Top 500." Sesuai dengan RKAP tahun 2024, PLN memperkenalkan *Next Chapter of Transformation*, yang merupakan langkah strategis yang dirancang untuk akselerasi teknologi digital dan memperkuat transformasi yang inklusif serta berkelanjutan. Transformasi ini bertujuan untuk menjaga efisiensi operasional, memperkuat keberlanjutan finansial, dan menghadirkan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan.

Sebagai bagian dari program "*Moonshots*," PLN berfokus pada tiga pilar utama: *Growth*, *Digital*, dan *Net Zero Emission*. Hal ini mencerminkan aspirasi PLN untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mempercepat adopsi teknologi digital, dan mendukung upaya dekarbonisasi guna mencapai tujuan *Net Zero Emission*. Dengan langkah ini, PLN tidak hanya beradaptasi dengan tantangan masa depan tetapi juga menjadi katalisator inovasi dalam sektor energi.

To strengthen its position as customers' preferred energy solution provider and to support the grand vision of "Becoming a Global Top 500 Company," in line with the 2024 RKAP, PLN introduced the Next Chapter of Transformation, which is a strategic step designed to accelerate digital technology and strengthen inclusive and sustainable transformation. This transformation aims to maintain operational efficiency, strengthen financial sustainability, and provide services that are increasingly relevant to customer needs.

As part of the "*Moonshots*" program, PLN focuses on three main pillars: *Growth*, *Digital*, and *Net Zero Emission*. This reflects PLN's aspiration to drive sustainable growth, accelerate digital technology adoption, and support decarbonization efforts to achieve the *Net Zero Emission* goal. With this step, PLN is not only adapting to future challenges but also becoming a catalyst for innovation in the energy sector.



Transformasi 2.0 PLN diarahkan pada tiga fokus utama yang dikenal sebagai moonshots, yakni *Growth*, *Digital*, dan *Net Zero Emission* (NZE). Fokus *Growth Moonshots* bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis baru dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sementara *Digital Moonshots* menekankan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Adapun *NZE Moonshots* mendukung komitmen transisi menuju energi bersih dalam rangka mencapai target nol emisi karbon. Ketiga pilar ini dijalankan secara terintegrasi melalui *Moonshot Launchpad*, sebuah sistem dan *platform* penggerak transformasi yang dirancang untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan terukur.

Seluruh strategi ini sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN, yang menjadikan *Digital*, *Sustainability*, dan *Growth* (DSG) sebagai kerangka transformasi BUMN secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan juga memastikan bahwa setiap langkah strategis dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas. Bagi Perusahaan, integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang membawa dampak positif, baik dalam menjaga reputasi, meningkatkan kinerja operasional, maupun mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

PLN's Transformation 2.0 is directed at three main focuses known as moonshots, namely Growth, Digital, and Net Zero Emission (NZE). The focus of Growth Moonshots aim to encourage new business growth and create added value for the Company. Digital Moonshots emphasize the use of technology to improve operational efficiency and quality of service to customers. Meanwhile, NZE Moonshots support the commitment to transitioning to clean energy, aiming to achieve the target of zero carbon emissions. These three pillars are applied in an integrated manner through Moonshot Launchpad, a system and platform for driving transformation designed to ensure effective and measurable implementation.

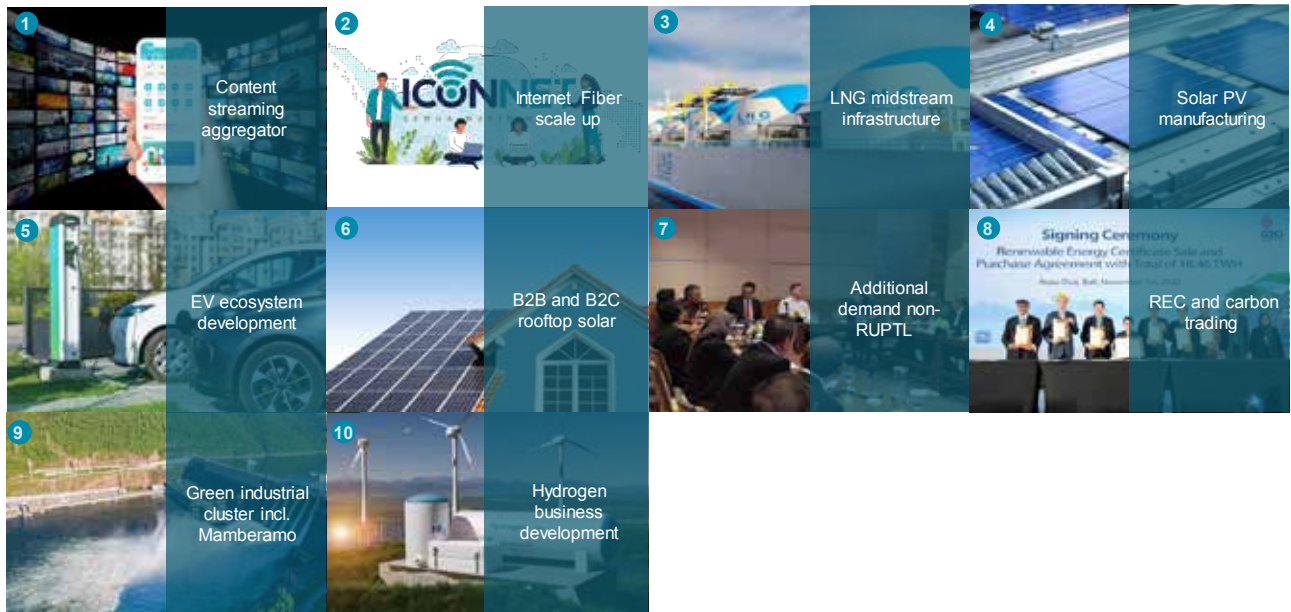
All these strategies are in line with the policy of the Ministry of SOEs, which makes Digital, Sustainability, and Growth (DSG) the framework for SOE's overall transformation. In its implementation, the Company also ensures that every strategic step is carried out by upholding the principle of integrity. For the Company, integrity is not only about compliance with regulations, but is an important part of a business strategy that has a positive impact, both in maintaining reputation, improving operational performance, and supporting long-term business sustainability.

Transformasi Berkelanjutan PLN PLN Sustainable Transformation

Growth Moonshots

Melalui *Growth Moonshots*, PLN bercita-cita masuk ke dalam jajaran 500 perusahaan terbesar dunia melalui pertumbuhan *demand listrik dan bisnis beyond kWh*.

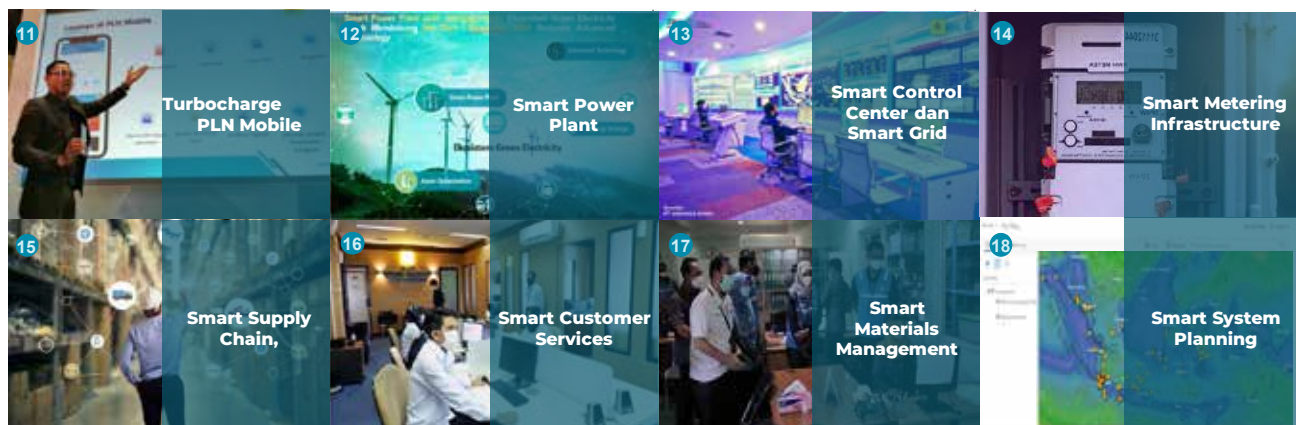
Through *Growth Moonshots*, PLN aspires to enter the ranks of the top 500 companies, largest in the world through the growth of electricity demand and beyond kWh business.



Digital Moonshots

Digital Moonshots adalah lompatan perubahan yang *disupport* oleh digitalisasi baik dalam *design*, pengembangan, infrastruktur, talenta dan solusi.

Digital Moonshots are leaps of change supported by digitalization in design, development, infrastructure, talent, and solutions.



Transformasi Berkelanjutan PLN

PLN Sustainable Transformation

NZE Moonshots

Dengan NZE *Moonshots*, PLN memimpin transisi energi Indonesia dan ekonomi hijau yang terintegrasi dengan pembangunan Kawasan.

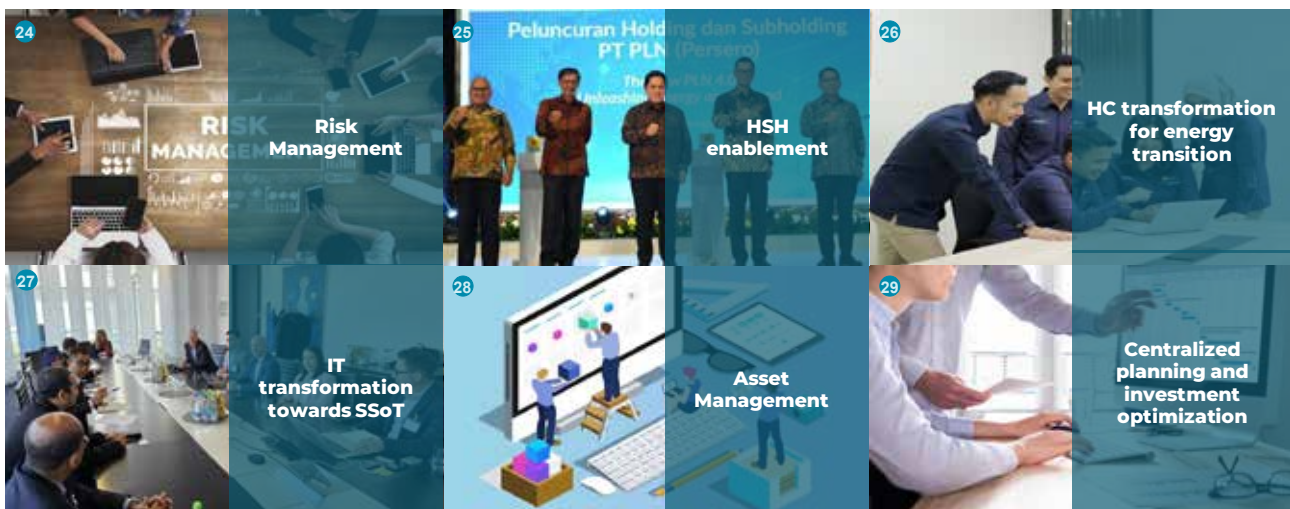
With NZE *Moonshots*, PLN is leading Indonesia's energy transition and integrated green economy with regional development.



Moonshot Launchpad

Moonshot Launchpad memastikan *supporting system* yang kokoh dengan tata kelola SDM, Organisasi, IT, dan *system planning* yang mumpuni untuk mendukung setiap inisiatif *Moonshot*.

Moonshot Launchpad ensures a robust supporting system with governance manage HR, Organization, IT, and robust system planning to support every Moonshot initiative.





Maksud dan Tujuan Perseroan

Purposes and Objectives of the Company

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Seiring dengan dinamika perubahan internal dan eksternal perusahaan, PLN juga mulai menambah bidang usaha berupa pengembangan produk/layanan turunan pada sisi *retail* dan juga kegiatan usaha di luar ketenagalistrikan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki.

To operate the business of electricity supply for public interest in adequate quantity and quality, while generating profit and fulfilling Government assignments in the electricity sector to support national development by applying the principles of a Limited Liability Company. In line with the Company's dynamic internal and external changes, PLN has also begun to expand its business scope by developing derivative products/services in the retail segment, as well as exploring non-electricity business activities by optimizing its existing assets.

Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, Motto and Corporate Values

Persetujuan Visi dan Misi

Vision and Mission Approval

PLN menetapkan visi, misi, dan tata nilai perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang berlaku pada 2024 telah disetujui seiring penetapan Program Transformasi, dengan diberlakukannya Keputusan Direksi No. 0319.K/DIR/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Visi Perusahaan PT PLN (Persero).

PLN established its vision, mission, and corporate values as an integral part of the Long-Term Plan (LTP), which is reviewed and formulated every 5 (five) years. The vision, mission, and corporate values applicable in 2024 were approved in line with the implementation of the Transformation Program, as stipulated in the Board of Directors' Decision No. 0319.K/DIR/2024 dated December 3, 2024, on the Establishment of the Corporate Vision of PT PLN (Persero).

Reviu Visi dan Misi

Vision and Mission Review

Setelah dilakukan peninjauan kembali atas pernyataan visi dan misi Perusahaan dengan mempertimbangkan perubahan internal dan eksternal Perusahaan, tren global pada sektor ketenagalistrikan, serta mendukung Visi BUMN "Membangun Masa Depan Indonesia yang Inklusif dan Tumbuh Berkelanjutan", memperbarui Visi Perusahaan, yaitu: Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

Following a comprehensive review of the Company's vision and mission statements by considering internal and external changes, global trends in the electricity sector, and in support of the SOEs' Vision of "Building an Inclusive and Sustainable Future for Indonesia," the Company has updated its Vision, which is To Become a Global Top 500 Company and the #1 Customer Choice for Energy Solutions.

Sosialisasi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi

Dissemination and Efforts to Accomplish the Vision and Mission

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, PLN menyosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi, dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan.

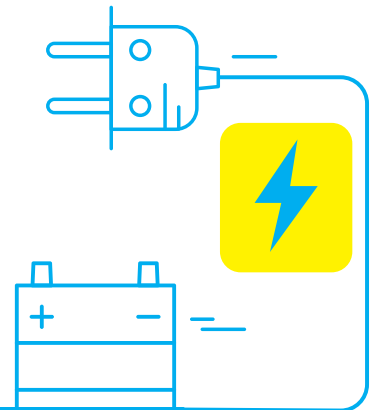
To ensure the accomplishment of its vision and mission, PLN periodically disseminates the vision and mission statements to all employees. The recruitment process, employee performance evaluation, promotion, and rotation are some of the moments utilized by the Company to disseminate the Company's vision and mission.

Visi

Vision

Menjadi Perusahaan Global Top 500 dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi

To Become a Global Top 500 Company and the #1 Customer Choice for Energy Solutions



- Perusahaan Global Top 500

Perusahaan memiliki bisnis utama berupa penyediaan tenaga listrik dengan pengelolaan rantai nilai ketenagalistrikan mulai dari energi primer, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan untuk mendukung sustainabilitas industri ketenagalistrikan di Indonesia, serta tetap mengembangkan bisnis inovatif, sehingga menjadikan posisi Perusahaan sebagai salah satu Perusahaan Global Top 500.

- Terpercaya #1 Pilihan Pelanggan

Perusahaan merupakan pilihan utama pelanggan karena kualitas dan pelayanan yang diberikan sehingga konsumen menjadi loyal.

- Solusi Energi

Perusahaan dapat memberikan nilai kepada pelanggan berupa solusi total terhadap setiap permasalahan terkait energi sehingga perusahaan harus mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan usaha, serta konsisten dalam pengembangan standar kerja.

- Global Top 500 Company

The Company's core business is the provision of electricity, encompassing the management of the entire electricity value chain ranging from primary energy, generation, transmission, distribution, to sales to support the sustainable electricity industry in Indonesia, while continuing to develop innovative businesses, reinforcing its position as one of the Global Top 500 companies.

- Trusted #1 Customer Choice

The Company is the preferred choice of customers due to the quality and excellence of its services, resulting in strong customer loyalty.

- Energy Solutions

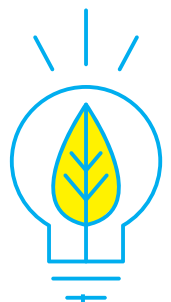
The Company delivers value to customers by offering comprehensive solutions to any energy-related problems, so the Company must be able to anticipate various business opportunities and challenges, as well as consistently develop work standards.

Misi

Mission

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

- To operate electricity-related and other relevant businesses with a focus on customer, employee, and shareholder satisfaction.
- To position electricity as a means to improve the quality of life for the community.
- To ensure that electricity serves as a driver of economic activity.
- To carry out business operations with environmental consciousness.





Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, Motto and Corporate Values

Motto

Motto



Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan melalui Visi, Misi, dan *Purpose* PLN

Strengthening Governance and Sustainability through PLN's Vision, Mission, and Purpose

Visi, misi, dan purpose PLN menjadi dasar strategis dalam menciptakan kinerja berkelanjutan dan nilai yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip keberlanjutan diintegrasikan dalam seluruh proses bisnis, termasuk perencanaan, operasional, dan pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan *purpose* secara konsisten, Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Dewan Komisaris berperan aktif menerapkan prinsip ETAK (Etika, Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan) yang dijalankan secara menyeluruh dalam operasional, pengambilan keputusan, serta pelibatan pemangku kepentingan. Dewan Komisaris mengawasi penerapan tata kelola dan arah strategis perusahaan, Direksi memastikan operasional berjalan etis, transparan, dan akuntabel, serta Komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris memperkuat pengawasan, kepatuhan, dan inisiatif keberlanjutan. Kolaborasi ini memperkuat fondasi Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan menciptakan nilai berkelanjutan.

PLN's vision, mission, and purpose are the strategic foundation for creating sustainable performance and balanced value economically, socially, and environmentally. The sustainability principle is integrated across all business processes, including planning, operations, and decision-making.

To consistently achieve the vision, mission, and purpose, the Board of Commissioners, Board of Directors, and Board of Commissioners' committees play an active role in applying ETAK principle (Ethics, Transparency, Accountability, and Sustainability), which is carried out comprehensively in operations, decision-making, and stakeholder involvement. The Board of Commissioners oversees the implementation of governance and the Company's strategic direction, the Board of Directors ensures that operations are ethical, transparent, and accountable, and the committees as supporting organs of the Board of Commissioners strengthen supervision, compliance, and sustainability initiatives. This collaboration strengthens the Company's foundation in facing challenges and creating sustainable value.

Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, Motto and Corporate Values

Tata Nilai Perusahaan

Corporate Core Values

Tata nilai PLN mengacu pada *core values* BUMN yang diberlakukan melalui Surat Edaran Menteri No. BUMN SE-7/MBU/07/2020, berupa “AKHLAK”. Penjelasan mengenai tata nilai tersebut adalah sebagai berikut:

PLN's corporate values are based on the SOE core values mandated through the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. BUMN SE-7/MBU/07/2020, namely “AKHLAK.” The explanation of these values is as follows:

AKHLAK

Amanah Trustworthy	Kompeten Competent	Harmonis Harmonious	Loyal Loyal	Adaptif Adaptive	Kolaboratif Collaborative
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan We uphold the trust given	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas We continue to learn and develop capabilities	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan We care for each other and value differences	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara We are dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State	Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan atau pun menghadapi perubahan We continue to innovate and are enthusiastic about moving or facing changes	Kami membangun kerja sama yang sinergis We build synergistic cooperation

Nilai Values	Arti Meaning	Perilaku Behaviors
Amanah Trustworthiness	Memegang teguh kepercayaan yang diberikan Upholding the trust given	- Memenuhi janji dan komitmen - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan - Keeping promises and commitments - Being responsible for the tasks, decisions, and actions carried out
Kompeten Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuously learning and developing capabilities	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik - Enhancing personal competence to respond to ever-changing challenges - Helping others learn - Completing tasks with the highest quality
Harmonis Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Caring for each other and respecting differences	- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif - Respecting everyone regardless of their backgrounds - Being helpful to others - Building a conducive work environment
Loyal	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Dedicating and prioritizing the interests of the nation and the state	- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara - Rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika - Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOE, and the State - Willing to sacrifice to achieve a greater goal - Obeying leaders as long as it is not against the law and ethics
Adaptif Adaptive	Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan atau pun menghadapi perubahan Making continuous innovations and remaining enthusiastic in moving or facing changes	- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi - Bertindak positif - Quickly adapting to be better - Continuously improving to keep up with technological developments - Acting positively
Kolaboratif Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergistic cooperation Behaviors	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama - Providing opportunities for various parties to contribute - Being open to collaboration to generate added value - Mobilizing the utilization of various resources for common goals



Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, Motto and Corporate Values

PLN mengimplementasikan *core values* AKHLAK sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, dengan mendorong Insan Perseroan untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan (Amanah), terus belajar dan mengembangkan kapabilitas (Kompeten), saling peduli dan menghargai perbedaan (Harmonis), berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (Loyal), terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan (Adaptif) serta membangun kerja sama yang sinergis (Kolaboratif). *Core values* AKHLAK telah ditetapkan sebagai nilai-nilai perusahaan PLN berdasarkan Keputusan Direktur Utama, No. 0073.P/DIR/2020 tanggal 28 September 2020.

PLN implements the AKHLAK core values as a guiding principle in carrying out its daily business activities, encouraging all personnel to uphold the trust given to them (Trustworthiness), continuously learn and develop their capabilities (Competent), care for one another and respect differences (Harmonious), remain dedicated and prioritize the interests of the nation (Loyal), consistently innovate and remain enthusiastic in driving and adapting to change (Adaptive) and build synergistic collaboration (Collaborative). The AKHLAK core values have been established as PLN's corporate values pursuant to the President Director's Decision No. 0073.P/DIR/2020 dated September 28, 2020.

Kegiatan Usaha

Business Activities

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar

Business Activities Based on the Articles of Association

Mengacu pada Anggaran Dasar, PLN beroperasi pada bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Bidang usaha tersebut mencakup bermacam kegiatan, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Selain itu, bidang usaha PLN juga mencakup perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik.

Referring to the Articles of Association, PLN operates in the electricity supply business sector. This business line encompasses various activities, including power generation, transmission, and distribution. In addition, PLN's business activities also cover the planning and development of electricity supply facilities, as well as the advancement of electricity provision.

Atas bidang usaha yang termuat di dalam Anggaran Dasar, PLN dapat melakukan sejumlah kegiatan berikut:

Under the scope of business outlined in the Articles of Association, PLN is authorized to carry out the following activities:

1. Ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan, antara lain: energi tidak terbarukan (antara lain batubara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomassa, bahan bakar, nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan retail tenaga listrik;
1. Engage in business activities related to the use of natural resources and other energy sources associated with the electricity supply. These energy sources include: non-renewable energy (such as coal, natural gas, and petroleum), renewable energy (such as hydropower, geothermal, solar, wind, biomass, fuel, biofuel, hybrids, and ocean waves), and other sources of energy like nuclear, which may be developed in accordance with technological advancements and relevant laws and regulations;
2. Provide operational and regulatory services (such as dispatching) in the areas of electricity generation, transmission, distribution, and retail;

Kegiatan Usaha

Business Activities

3. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan listrik;
4. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional telekomunikasi, dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen, dan bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan, dan pelatihan manajemen jasa engineering, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, PLN menjalankan usaha penunjang tenaga listrik meliputi:

1. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
2. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
3. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

3. Operate in industrial activities related to hardware and software in the electricity sector, as well as in the production and provision of equipment associated with electricity;
4. Collaborate with other agencies or other parties or organizing bodies in the field of electricity, both domestic and international, particularly in areas such as development, telecommunications operations, and information related to electricity, finance, human resources, as well as research and development, in accordance with their business activities or other relevant fields deemed necessary to support the Company's operations, in the form of joint ventures, profit-sharing agreements, management contracts, or other arrangements in compliance with the applicable laws and regulations;
5. Carry out service-based businesses related to the electricity sector, including consulting, construction, education, and training in the areas of engineering services management, research, and development of electricity technology, as well as other related services, in accordance with the applicable laws and regulations.

Furthermore, PLN engages in supporting electricity-related businesses, which include:

1. Consultancy services related to the electricity sector;
2. Construction and installation of electrical equipment;
3. Maintenance of electrical equipment;
4. Development of technologies supporting the electricity supply.

Kegiatan Usaha yang Dilakukan Pada 2024

Business Activities Conducted in 2024

Pada tahun 2024 PLN melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan secara langsung oleh PLN maupun melalui *Subholding*/Anak Perusahaan.

In 2024, PLN carried out its business activities according to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association. These business activities were undertaken directly by PLN as well as through its Subholdings and Subsidiaries.



Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan

Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio

Lima Klaster Portofolio PLN

Five Clusters of PLN Portfolio

Klaster 1 Cluster 1

Penyediaan Energi Primer Primary Energy Provision

PT PLN Energi Primer Indonesia



Kegiatan Usaha

Memastikan ketersediaan pasokan suplai energi primer melalui:

- Konsolidasi proses pengadaan & logistik energi primer.
- Pengembangan ekosistem yang tangguh.
- Pencarian Sumber Energi Primer.
- Penguatan rantai pasok energi primer.

Lini Bisnis

- Penyediaan batubara.
- Penyediaan gas untuk pembangkit.
- Penyediaan biomassa untuk *co-firing* PLTU.
- Pengembangan tambang.
- Penyediaan BBM untuk pembangkit.

Business Activities

To ensure the availability of primary energy supply through:

- Consolidation of procurement and logistics processes for primary energy.
- Development of a resilient ecosystem.
- Exploration of primary energy sources.
- Strengthening of the primary energy supply chain.

Line of Business

- Provision of coal.
- Provision of gas for power plants.
- Provision of biomass for *co-firing* PLTU.
- Mine development.
- Provision of fuel for power plants.

Klaster 2 Cluster 2

Pembangkitan Generation

PT PLN Indonesia Power



Kegiatan Usaha

PT PLN Indonesia Power (sebelumnya bernama PT Indonesia Power) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang memegang peranan strategis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Kegiatan utama bisnis PT PLN Indonesia Power saat ini adalah sebagai penyedia solusi energi yang meliputi penyediaan tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik yang tersebar di Indonesia.

Business Activities

PT PLN Indonesia Power (formerly PT Indonesia Power) is a subholding of PT PLN (Persero) that holds a strategic role in Indonesia's electricity sector. The core business of PT PLN Indonesia Power is to provide energy solutions, which includes the provision of electricity through power plants spread across Indonesia.

PT PLN Nusantara Power



Kegiatan Usaha

PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali/PJB) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Berdiri sejak 3 Oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit yang dikelola sebesar 18.573 MW tersebar di seluruh Indonesia. PLN NP juga mengembangkan bisnis melalui anak perusahaan di bidang jasa *operation and maintenance* pembangkit, investasi pembangkit melalui JVC, penyediaan sparepart dan jasa pendukung lainnya.

Business Activities

PT PLN Nusantara Power (formerly PT Pembangkitan Jawa-Bali/PJB) is a subholding of PT PLN (Persero) engaged in electricity generation. Established on October 3, 1995, manages a generating capacity of 18,573 MW distributed across Indonesia. PLN NP also expands its business through subsidiaries involved in operation and maintenance services for power plants, investment in power plants through JVC, provision of spare parts, and other supporting services.

Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan

Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio

PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara



Kegiatan Usaha

PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) mengelola PLTG yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik dan uap Blok Rokan yang meningkat di tahun 1998 untuk pengembangan lapangan minyak Duri. Konstruksi dimulai pada 1998 dan mulai operasi pada September 2000 dengan nilai investasi USD300 juta. Pembangkit PT MCTN dengan sistem *Cogeneration* terletak di *North Duri Field* di *Rokan Block Work Area* di Sumatera, Indonesia dengan kapasitas pembangkit listrik 300 MW dan uap 360.000 steam barrel per hari. Sejalan dengan Blok Rokan yang diambil alih oleh Pertamina, PT MCTN diakuisisi oleh PT PLN (Persero) pada 6 Agustus 2021. *North Duri Cogeneration* (NDC) tetap menjadi fasilitas penting untuk mendukung operasi Blok Rokan sampai dengan 2041. Adapun kegiatan utama MCTN antara lain:

1. Pembangkit Tenaga Listrik
2. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
3. Pengadaan Uap/Air panas dan udara dingin
4. Instalasi Listrik
5. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
6. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.

Business Activities

PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) operates PLTG, which was built to meet the increased electricity and steam demands of the Rokan Block in 1998, driven by the development of the Duri oil field. The construction started in 1998, and operations commenced in September 2000, with an investment of USD 300 million. PT MCTN's Cogeneration plant is located at the North Duri Field in the Rokan Block Work Area in Sumatra, Indonesia with a power generation capacity of 300 MW and steam of 360,000 steam barrels per day. Following the takeover of the Rokan Block by Pertamina, PT MCTN was acquired by PT PLN (Persero) on August 6, 2021. The North Duri Cogeneration (NDC) facility continues to be a key asset supporting operations in the Rokan Block through 2041. The main activities of MCTN include:

1. Electrical Power Generation
2. Operation of Electricity Supply Installations
3. Procurement of Steam/Hot Water and Chilled Air
4. Electrical Installation
5. Construction of Civil and Electrical Buildings
6. Leasing Activities and Leases Without Option to Purchase of Mining and Energy Machinery and Equipment

Klaster 3 Cluster 3

Wilayah Usaha Business Area

PT PLN Batam



Kegiatan Usaha

PT PLN Batam sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Umum (PIUKU) untuk wilayah kerja Batam, Rempang, Galang dan wilayah lainnya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan senantiasa menyediakan tenaga listrik yang handal dengan bertumpu pada Sumber Daya Manusia yang profesional.

Business Activities

PT PLN Batam, as the holder of the Public Electricity Business License (PIUKU) for Batam, Rempang, Galang, and other areas, continues to be committed to providing the best service for customers by consistently delivering reliable electricity supported by professional Human Resources.



Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan

Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio

Klaster 4 Cluster 4

Beyond kWh

PT Indonesia Comnets Plus



Kegiatan Usaha

PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) merupakan *subholding* PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan solusi bisnis. Berdiri pada 3 Oktober 2000, PLN Icon Plus yang saat ini bertransformasi menjadi *Subholding Beyond KWH* menjalankan lini bisnis diluar ketenagalistrikan, meliputi internet, konektivitas, *market place*, pengisian daya kendaraan listrik, swap baterai, sistem *Charge-In* dan PLTS Atap. Layanan PLN Icon Plus meliputi:

- Pelanggan korporasi (*enterprise business*):
- Layanan Konektivitas;
- Layanan *Manage Service*;
- *Digital Platform Based Services*.
- Pelanggan retail (rumah): produk *Fixed Broadband Internet* yang dikenal dengan ICONNET.

Business Activities

PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) is a subholding of PT PLN (Persero), which operates in the fields of information and communication technology (ICT) and business solutions. Founded on October 3, 2000, PLN Icon Plus, which has now transformed into Subholding Beyond KWH, runs business lines outside electricity, including internet, connectivity, marketplace, electric vehicle charging, battery swap, Charge-In system, and Rooftop PLTS. PLN Icon Plus Services include:

- Corporate Clients (*enterprise business*):
- Connectivity Services;
- Managed Services;
- Digital Platform-Based Services.
- Retail Clients (residential): Fixed Broadband Internet product known as ICONNET.

Klaster 5 Cluster 5

Solusi Bisnis Business Solutions

PT Energy Management Indonesia



Kegiatan Usaha

PT Energy Management Indonesia (EMI) bergerak di bidang konservasi energi dan lingkungan serta energi baru dan terbarukan, sebagai *Leading Energy Service Company* Nasional yang mendukung penurunan emisi karbon. Berdiri sejak 28 Januari 1987 dengan nama PT Konservasi Energi Abadi, EMI berubah status dari yang sebelumnya merupakan BUMN menjadi Anak Perusahaan PT PLN (Persero) pada tahun 2021. Kegiatan usaha EMI antara lain:

- Asesmen, studi kelayakan dan implementasi konservasi dan efisiensi energi,
- Pengembangan ekosistem bioenergi,
- Pengelolaan dan pemanfaatan FABA,
- *Waste/water/waste water treatment*,
- *Waste heat recovery*

Produk dan Layanan:

- *EEC Engineering and Implementation*
Layanan komprehensif: *feasibility study*, desain dan *engineering*, pelaksanaan *EPC*, *Project Management Consultant* serta Operasi dan Pemeliharaan untuk proyek-proyek Konservasi Energi & Lingkungan.
- *New & Renewable Energy Utilization*
Mengembangkan pemanfaatan Energi Terbarukan, khususnya

Business Activities

PT Energy Management Indonesia (EMI) operates in the field of energy and environmental conservation, as well as new and renewable energy, as a National Leading Energy Service Company that supports carbon emissions reduction. Founded on January 28, 1987, under the name PT Konservasi Energi Abadi, EMI changed its status from an SOE to a subsidiary of PT PLN (Persero) in 2021. EMI's business activities include:

- Assessment, feasibility study, and implementation of energy conservation and efficiency,
- Development of bioenergy ecosystems,
- Management and utilization of FABA,
- *Waste/water/wastewater treatment*,
- *Waste heat recovery*

Products and Services:

- *EEC Engineering and Implementation*.
Comprehensive services: *feasibility study*, design and *engineering*, *EPC* implementation, *Project Management Consultant*, and Operation and Maintenance for Energy & Environmental Conservation projects.
- *New & Renewable Energy Utilization*.
Developing the use of Renewable Energy, especially

Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan

Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio

Biomassa dan Bioenergi terdesentralisasi yang melibatkan masyarakat dan sumber daya setempat untuk digunakan sebagai energi alternatif untuk konversi LPG/BBM, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM) dan *Co-Firing* Batubara: *Biomass dan Other Decentralized Bioenergy*.

- **EEC Power Solutions**

Berfokus pada peningkatan efisiensi energi pengguna akhir mulai dari Audit Energi dan Studi Kelayakan, hingga pelaksanaan proyek-proyek hemat energi pada *Green Economy Estate* seperti Penerangan Jalan Umum dan *Green Building* atau *Green Industrial Estate*.

decentralized Biomass and Bioenergy involving local communities and resources to be used as alternative energy for LPG/BBM conversion, Biomass Power Plants (PLTBM), and Coal Co-Firing: Biomass and Other Decentralized Bioenergy.

- **EEC Power Solutions.**

It focuses on increasing end-user energy efficiency starting from Energy Audits and Feasibility Studies to implementing energy-saving projects in Green Economy Estates such as Public Street Lighting and Green Industrial Estates.

PT PLN Nusa Daya



Kegiatan Usaha

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PT PLN Nusa Daya) merupakan Anak Perusahaan PT PLN (Persero) yang menjalankan bisnis di bidang pengelolaan jasa operasi & pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan di wilayah Indonesia Timur yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, serta menyediakan pembangkit dengan kapasitas maksimum 100 MW di wilayah kerjanya. Melalui anak usahanya PT Paguntaka Cahaya Nusantara, PT PLN Nusa Daya juga menyediakan jasa penunjang untuk *Beyond kWh* dan pengelolaan gedung. Produk dan Layanan meliputi:

- Jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit.
- Jasa operasi dan pemeliharaan transmisi.
- Jasa operasi dan pemeliharaan distribusi.
- Penyediaan Pembangkit.
- Manajemen Billing.
- ListriQu.
- Manajemen Building untuk anak perusahaan (PCN).

Area Pelayanan

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Business Activities

PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya (PT PLN Nusa Daya) is a subsidiary of PT PLN (Persero) engaged in the management of operation and maintenance services for power plants, transmission, distribution, and customer services in Eastern Indonesia, covering Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua, as well as provide power plants with a maximum capacity of 100 MW within its working area. Through its subsidiary, PT Paguntaka Cahaya Nusantara, PT PLN Nusa Daya also offers supporting services beyond kWh and building management. Its products and services include:

- Operation and maintenance services for power plants.
- Operation and maintenance services for transmission.
- Operation and maintenance services for distribution.
- Power plant provision.
- Billing management.
- ListriQu.
- Building management for the subsidiary (PCN).

Service Area

Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua.

PT Haleyora Power



Kegiatan Usaha

PT Haleyora Power (HP) bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. Didirikan sejak 18 Oktober 2011, HP beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. HP ditugaskan untuk mengelola bisnis penjualan tenaga listrik (*retail*), yang di masa mendatang diperkirakan akan makin kompetitif melalui pengembangan penyediaan tenaga listrik dengan layanan dan tarif khusus, sehingga dapat menekan subsidi.

Business Activities

PT Haleyora Power (HP) is engaged in the operation and maintenance of electricity transmission and distribution networks. Founded on October 18, 2011, HP operates in Sumatra, Java, and Bali. HP is assigned to manage the electricity sales (*retail*) business, which is expected to become more competitive in the future through the development of electricity supply with special services and tariffs to reduce subsidies.



Lini Bisnis, Produk, dan Jasa Portofolio Perseroan

Line of Business, Products and Services of Company's Portfolio

PT PLN Enjiniring



Kegiatan Usaha

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring atau lebih dikenal dengan PLN Enjiniring merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi enjiniring ketenagalistrikan. PLN Enjiniring menyediakan berbagai macam layanan; mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, manajemen kinerja infrastruktur ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan. PLN Enjiniring menyediakan berbagai macam layanan; mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, manajemen kinerja infrastruktur ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan.

Produk dan Layanan

Dokumen enjiniring pembangkit listrik, dokumen enjiniring konstruksi, dokumen enjiniring transmisi dan distribusi.

Business Activities

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring or better known as PLN Enjiniring is a company engaged in the field of electrical engineering consultancy. PLN Enjiniring provides a variety of services; starting from planning, construction, operation and maintenance, performance management of electricity and non-electricity infrastructure.

Products and Services

Engineering documents for power plants, construction projects, as well as transmission and distribution systems.

Klaster 6 Cluster 6

Investasi Investment

Majapahit Holding BV



Kegiatan Usaha

Majapahit Holding B.V. adalah anak perusahaan dari PLN. Perusahaan ini didirikan sebagai entitas khusus untuk mendukung kegiatan pembiayaan internasional PLN.

Kegiatan Usaha

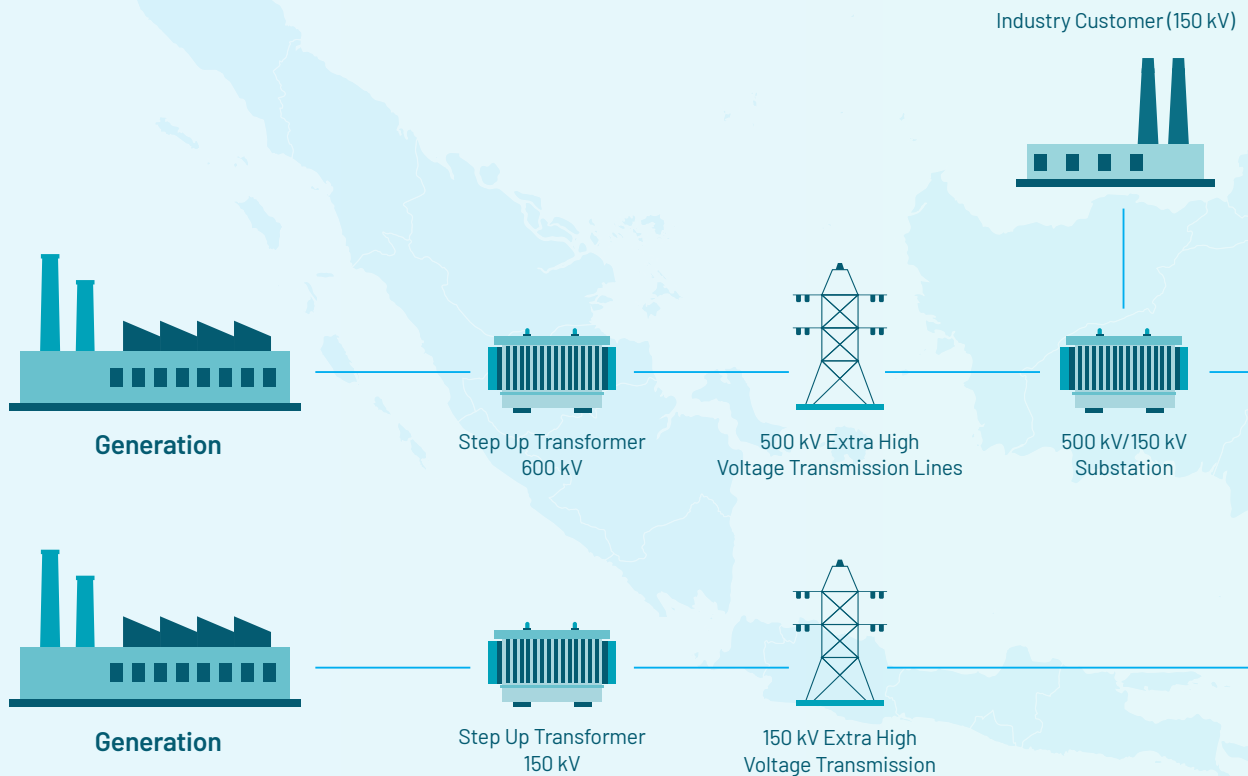
Majapahit Holding B.V. is a subsidiary of PLN. The Company was established as a special-purpose entity to support PLN's international financing activities.

Skema Penyaluran Listrik PLN

PLN Electricity Distribution Scheme

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia listrik yang memiliki kompetensi utama dalam pengelolaan sistem kelistrikan terintegrasi, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan di seluruh Indonesia. Sejak berdiri, PLN berkomitmen menerangi seluruh Nusantara sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan listrik yang andal, aman, dan terjangkau. Proses penyediaan listrik mencakup pembangkitan, transmisi tegangan tinggi, penurunan tegangan di gardu induk, dan distribusi ke berbagai segmen pelanggan. Selain melayani wilayah perkotaan, PLN juga berupaya mewujudkan pemerataan akses listrik di daerah 3T melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sistem, dan program elektrifikasi desa.

PT PLN (Persero) is an electricity provider company with its core competence of managing an integrated electricity system, starting from generation, transmission, distribution, to customer service throughout Indonesia. Since its establishment, PLN has been committed to lighting up the entire archipelago as a manifestation of the state's presence in providing reliable, safe, and affordable electricity. The electricity supply process includes generation, high voltage transmission, voltage reduction at substations, and distribution to various customer segments. In addition to serving urban areas, PLN also strives to provide equal access to electricity in 3T areas through infrastructure development, system strengthening, and village electrification programs.

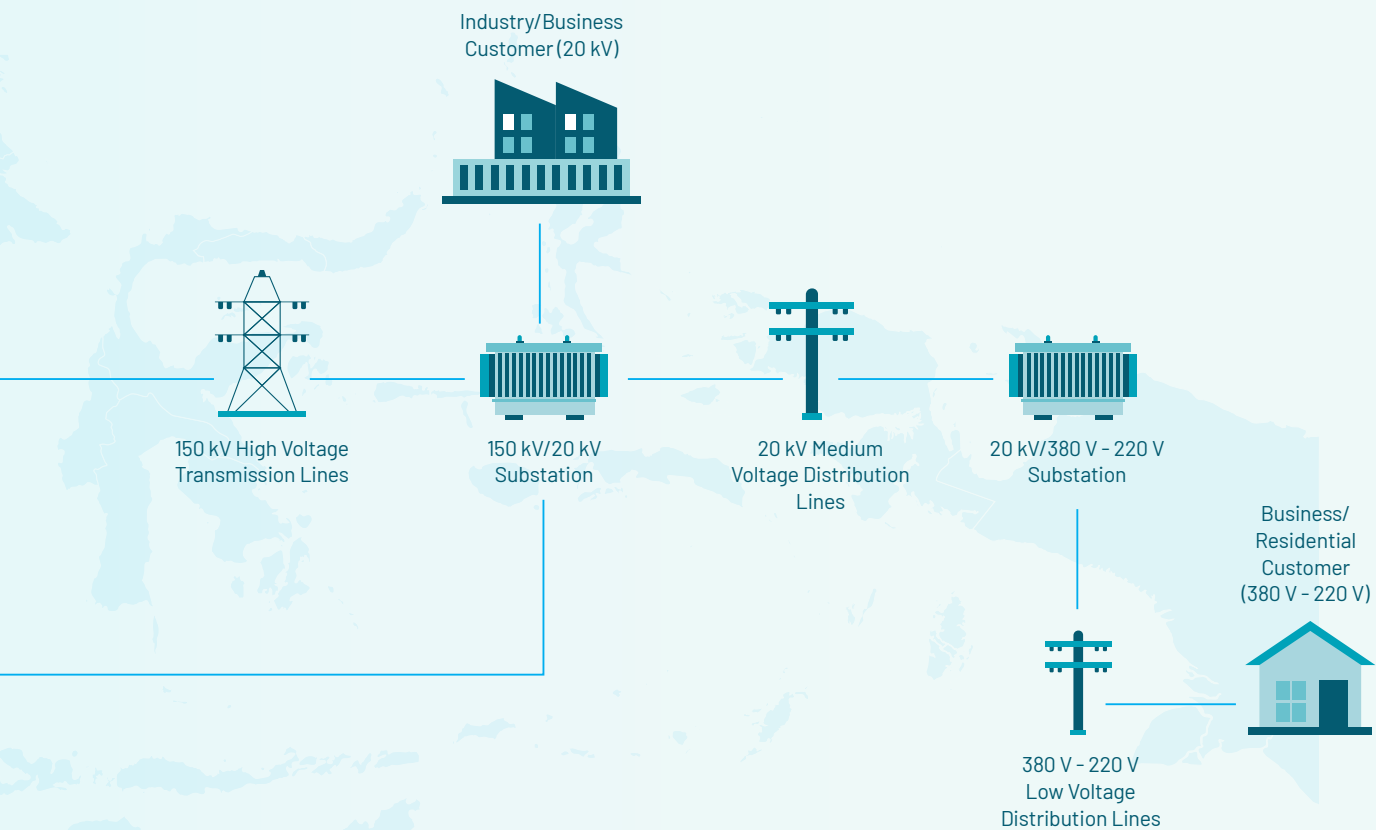




Skema Penyaluran Listrik PLN PLN Electricity Distribution Scheme

Komitmen ini juga mencakup wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang sebelumnya belum terjangkau oleh listrik. Melalui berbagai inisiatif, mulai dari pembangunan infrastruktur baru, penguatan jaringan, hingga program elektrifikasi desa, PLN memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam menikmati manfaat energi listrik.

This commitment also covers the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) areas that were previously unserved by electricity. Through various initiatives, ranging from the construction of new infrastructure, network strengthening, to village electrification programs, PLN ensures that no community is left behind in receiving the benefits of electric energy.



Struktur Grup

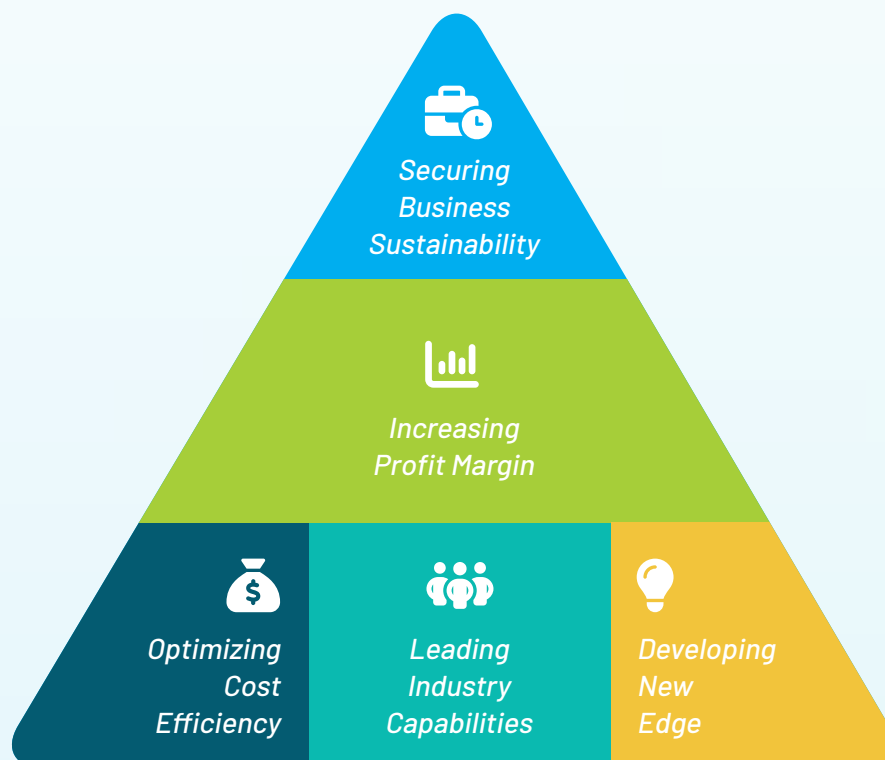
Group Structure

Kebijakan dan Struktur Portofolio Perusahaan

Company Portfolio Policy and Structure

Dalam upaya menyelaraskan arah dan strategi pengembangan portofolio bisnis, serta mengoptimalkan kontribusi anak perusahaan, afiliasi, dan entitas turunannya, PLN menetapkan Misi Portofolio "PLN SOLID" sebagai panduan utama pengelolaan portofolio bisnis. Misi ini mendukung perubahan visi perusahaan dari "Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi" menjadi "Perusahaan Global Top 500 dan No.1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi". Melalui Kepdir No. 1780 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Portofolio Bisnis, PLN mengarahkan seluruh portofolio bisnis untuk mendukung mandat sebagai BUMN serta menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan. Misi Portofolio PLN SOLID terdiri dari:

In an effort to align the direction and strategy for business portfolio development, as well as to optimize the contribution of its subsidiaries, affiliates, and related entities, PLN has established the "PLN SOLID" Portfolio Mission as the main guideline for managing its business portfolio. This mission supports the company's vision transition from "Becoming the Leading Electricity Company in Southeast Asia and the #1 Customer Choice for Energy Solutions" to "A Global Top 500 Company and the No.1 Customer Choice for Energy Solutions." Through the Decision of the Board of Directors No. 1780 of 2018 on Business Portfolio Management Guidelines, PLN directs its entire business portfolio to support its SOE mandate and meet stakeholders' expectations. The PLN SOLID Portfolio Mission consists of:





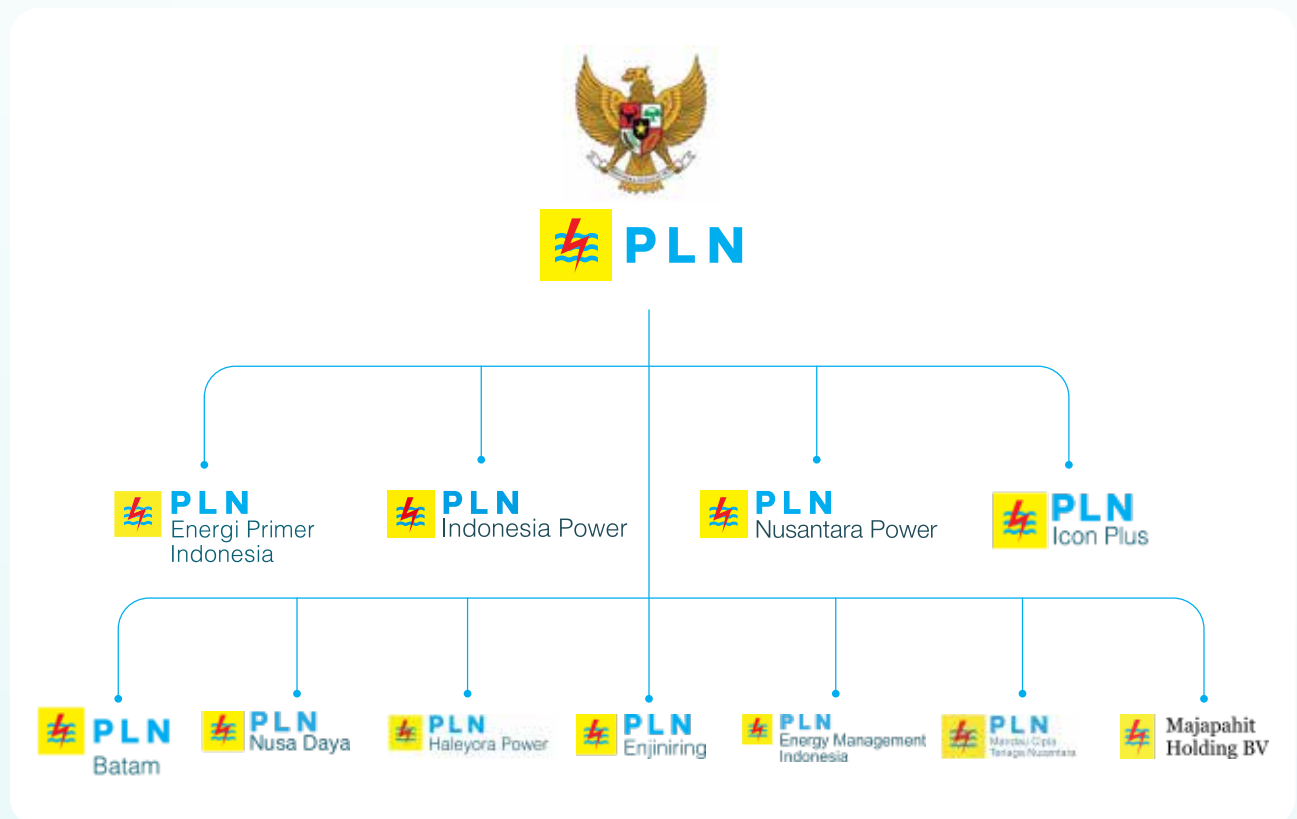
Struktur Grup Group Structure

Dalam rangka mempertajam implementasi PLN SOLID, PLN melakukan restrukturisasi portofolio melalui pembentukan *Subholding* serta penetapan peran dan *business boundaries* Anak Perusahaan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar PLN yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat ekosistem industri nasional, dan mendorong daya saing BUMN di tingkat global. Pembentukan *Holding* dan *Subholding* PLN memungkinkan entitas di dalam grup beroperasi secara lebih fokus, lincah, efisien, transparan, dan profesional, sehingga mendorong peningkatan keberlanjutan dan penciptaan nilai bisnis baru secara grup.

Berikut struktur grup portofolio bisnis PLN:

In order to strengthen PLN SOLID implementation, PLN has undertaken a portfolio restructuring through the establishment of Subholdings as well as the definition of roles and business boundaries for its Subsidiaries. This initiative is part of PLN's major transformation aimed at enhancing service quality, strengthening the national industrial ecosystem, and boosting the competitiveness of SOE on a global scale. The formation of PLN Holding and Subholdings enables entities within the group to operate with greater focus, agility, efficiency, transparency, and professionalism, thereby driving improved sustainability and creating new business value at the group level.

The following is the group structure of PLN's business portfolio:



Informasi tentang *Subholding*, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/*Purpose Vehicle*

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/
Joint Ventures/*Purpose Vehicles*

Daftar *Subholding*, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/ *Purpose Vehicle*

List of Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/*Purpose Vehicles*

Sampai dengan 31 Desember 2024, PLN memiliki 4 (empat)
Perusahaan *Subholding* dan 7 (tujuh) anak perusahaan yaitu:

As of December 31, 2024, PLN owns 4 (four) Subholding
Companies and 7 (seven) subsidiaries, as follows:

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operating Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Activities	Jumlah Pegawai Number of Em- ployees
1	PT PLN Indonesia Power	3 Oktober 1995 October 3, 1995	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Setiabudi, Jakarta Selatan Kode Pos 12950 ☎ 021- 22958455 (Hunting) ☎ 021- 5252623 🌐 www.plnindonesiapower.co.id	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik Operation and maintenance of power plants	5.407
2	PT PLN Nusantara Power	3 Oktober 1995 October 3, 1995	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya, Jawa Timur Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan Gedung 18 Office Park Lt. 2 & 8 Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan ☎ 031-8283180 ☎ 031-8283183 ✉ info@plnnusantarapower.co.id 🌐 www.plnnusantarapower.co.id	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik Operation and maintenance of power plants	4.940
3	PT PLN Energi Primer Indonesia	11 Agustus 2008 August 11, 2008	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Centennial Tower, Lantai 7-8, Jl. Gatot Subroto No 24-25 Setiabudi, Jakarta 12930 ☎ 021-29122118; 021-29122182 ☎ 031-8283183 ✉ kontak@plnepi.co.id 🌐 www.plnepi.co.id	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Penyediaan batubara dan pengembangan tambang eksisting untuk mensuplai seluruh PLTU PLN Group Provision of coal and development of existing mines to supply all PLN Group's PLTU	5.407
4	PT Indonesia Comnets Plus	3 Oktober 2000 October 3, 2000	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Jamsostek Tower B Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan 12710 ☎ 021-5253019 ✉ humas@iconpln.co.id 🌐 www.plniconplus.co.id	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Menjalankan layanan jasa internet, konektivitas, market place, pengisian daya kendaraan listrik, swap baterai, sistem Charge-In dan PLTS Atap Provide internet services, connectivity, marketplace, electric vehicle charging, battery swapping, Charge-In systems, and Rooftop PLTS	1.009



Informasi tentang Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/Purpose Vehicle

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operating Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Activities	Jumlah Pegawai Number of Employees
5	PT PLN Batam	3 Oktober 2000 October 3, 2000	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Jl. Engku Putri No.3 Centre-Batam – Batam ☎ 0778-463150; 0778-463153 ☎ 0778-463143 ✉ humas@plnbatam.com 🌐 www.plnbatam.com	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Menyediakan layanan ketenagalistrikan di Batam Provide electrical services in Batam.	528
6	PT PLN Nusa Daya	15 Desember 2003 December 15, 2003	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Jln. Letjen ZA Maulani RT 41 No 78 Damai Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan Balikpapan – Kalimantan Timur	PLN IP: 99,97% YPK IP: 0,03%	Penyedia Jasa Operasi dan Pemeliharaan Transmisi, Distribusi, Pembangkit dan Pelayanan Pelanggan di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Provider of operation and maintenance services for transmission, distribution, power plants, and customer services in the regions of Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, and Papua.	228
7	PT Haleyora Power	18 Oktober 2011 October 18, 2011	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Kindo Square, Blok A15-16 Jl. Duren Tiga Raya No. 101, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 ☎ 021-79192517 ✉ info@haleyorapower.co.id 🌐 www.haleyorapower.co.id	PLN: 99,99% YPK IP: 0,01%	Menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan untuk instalasi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang terletak di Sumatera, Jawa, dan Bali. Provide operation and maintenance services for power generation, transmission, and distribution installations located in Sumatra, Java, and Bali.	239
8	PT PLN Enjiniring	3 Oktober 2022 October 3, 2022	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Gedung Pusenlis lantai 5 Jl. Aipda K.S. Tubun 1/2 Petamburan, Jakarta ☎ 021-5608432 ☎ 021-5640132 ✉ contactplne@plne.co.id 🌐 www.plne.co.id	PLN IP: 99,90% YPK IP: 0,1%	Jasa konsultansi ketenagalistrikan. Electrical consulting services.	308
9	PT Energy Management Indonesia	4 Mei 2021 May 4, 2021	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Graha Pratama Building Lt. 12 Jl. M.T. Haryono Kav.15 Tebet, Jakarta Selatan 12810 ☎ 021-83793680 ☎ 021-83793688 ✉ info@emipersero.co.id 🌐 www.emipersero.co.id	Pemerintah RI: 0,01% Government of Republic of Indonesia: PLN: 99,99%	Penyedia Jasa Konservasi Energi dan Lingkungan serta Energi Terbarukan. Provider of Energy Conservation and Environmental Services as well as Renewable Energy	30

Informasi tentang Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/Purpose Vehicle

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

No	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operating Status	Alamat Perusahaan Company Address	% Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business Activities	Jumlah Pegawai Number of Employees
10	PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara	5 Agustus 2021 August 5, 2021	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Plaza Simatupang, Lt. 7 & 9 Jl. Tahi Bonar Simatupang Raya, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 ☎ +6281180104384 ✉ sekretariat@mctn.co.id 🌐 mctn.co.id	PLN: 95% YPK IP: 0,005% MCTN: 4,995%	Penyedia Jasa Pembangkitan Tenaga Listrik, pengadaan Jasa Uap/Air Panas dan Udara Dingin, Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi, Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal. Provider of Power Generation Services, Procurement of Steam/Hot Water and Chilled Air Services, Leasing and Lease-To-Own Without Purchase Option of Mining and Energy Machinery, Operation of Power Supply Installations, and Construction of Electrical Civil Buildings.	39
11	Majapahit Holding B.V (MHBV)	3 Oktober 2006 October 3, 2006	Beroperasi Operating	Kantor Pusat Head Office Herengracht 450, 1017 CA AmsterdamThe Netherlands	PLN: 100%	Jasa Keuangan Financial services	0

Kinerja Keuangan Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/ Purpose Vehicle

Performance of Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

1 PT PLN Indonesia Power		
Kinerja PLN IP Tahun 2024 PLN IP Performance in 2024	Daya Terpasang Installed Capacity	21,53 GW
	Produksi Listrik Electricity Production	87.806,73 GWh
	Penjualan Listrik Electricity Sales	83.082,40 GWh
	Jumlah Aset Total Assets	Rp426.759.733.600.212
	Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp373.640.718.228.214
	Pendapatan Usaha Revenue	Rp110.745.333.854.355
	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp13.303.692.136.017
2 PT PLN Nusantara Power		
Kinerja PLN NP Tahun 2024 PLN NP Performance in 2024	Daya Terpasang Installed Capacity	24,18 GW
	Produksi Listrik Electricity Production	67.094,65 GWh
	Penjualan Listrik Electricity Sales	63.415,18 GWh
	Jumlah Aset Total Assets	Rp355.367.229.381.606
	Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp314.643.995.292.900
	Pendapatan Usaha Revenue	Rp91.713.159.364.144
	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp12.909.578.448.370



Informasi tentang Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/Purpose Vehicle

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

3 PT PLN Energi Primer Indonesia

Kinerja PLN EPI Tahun 2024 PLN EPI Performance in 2024



Pasokan Batubara Coal Supply	63.586.835,23 MT
Pasokan Gas Gas Supply	467.348 BBTU
Pasokan BBM Fuel Supply	3.863.923 kL
BioDiesel(B30)	467.348 BBTU
High Speed Diesel(HSD)	3.863.923 kL
Marine Fuel Oil(MFO)	467.348 BBTU
Pasokan Biomassa Biomass Supply	1,65 Juta Ton Million Ton
Jumlah Aset Total Assets	Rp25.345.814.537.882
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp8.203.800.558.752
Penjualan Sales	Rp41.540.694.239.598
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp1.938.841.953.791

4 PT Indonesia Comnets Plus

Kinerja PLN Icon Plus Tahun 2024 PLN Icon Plus Performance in 2024



Transaksi Kelistrikan PLN Mobile PLN Mobile Electricity Transactions	21.185.363 juta million
Transaksi Non-Kelistrikan PLN Mobile PLN Mobile Non-Electricity Transactions	635.549 juta million
Jumlah Pelanggan Number of Customers	B2B: 7.729 (Lampiran pendapatan dikurangi ICONNET) Pelanggan Retail: 732.610 (Sesuai ARPU) B2B: 7.729 (Revenue Attachment minus ICONNET) Retail Customers: 732,610 (As per ARPU)
Jumlah Aset Number of Assets	Rp11.824.302.562.728
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp5.508.077.603.495
Pendapatan Usaha Revenue	Rp6.851.330.835.009
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp499.907.669.478

5 PT PLN Batam

Kinerja PLN Batam Tahun 2024 PLN Batam Performance in 2024



Produksi Listrik Electricity Production	4.432.343 MWh
Penjualan Listrik Electricity Sales	3.588.244 MWh
Daya Tersambung Connected Power	2.009.540 kVA
Penambahan Daya Tersambung Additional Connected Power	177.772 kVA
Jumlah Pelanggan Number of Customers	382.939
Jumlah Aset Number of Assets	Rp21.941.506.056.079
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp13.695.028.700.812
Pendapatan Usaha Revenue	Rp8.707.506.614.964
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp784.415.916.095

Informasi tentang *Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/Purpose Vehicle*

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

6

PT PLN Nusa Daya

Kinerja PLN ND Tahun 2024

PLN ND Performance in 2024

Jumlah Kontrak Baru Number of New Contracts	49 kontrak contract
Nilai Kontrak Baru Value of New Contracts	Rp2.039.360.626.580
Jumlah Kontrak Berjalan Number of Current Contracts	177 kontrak contract
Nilai Kontrak Berjalan Value of Current Contracts	Rp14.837.037.549.639
Jumlah Aset Total Assets	Rp1.391.732.680.913
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp622.959.693.470
Pendapatan Usaha Revenue	Rp3.244.779.865.772
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp184.554.552.111

7

PT Haleyora Power

Kinerja PT Haleyora Power Tahun 2024

PT Haleyora Power Performance in 2024

Jumlah Pelanggan Baru Number of New Customers	50 Setara Unit Layanan (ULP/ULTG/ULPLTD/ULPLTU) yang dilayani HP 50 Equivalent Service Units (ULP/ULTG/ ULPLTD/ ULPLTU) Served by HP
Jumlah Aset Total Assets	Rp1.877.284.980.404
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp1.215.641.578.173
Pendapatan Usaha Revenue	Rp5.114.146.453.475
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp230.586.346.318

8

PT PLN Enjiniring

Kinerja PLN Enjiniring Tahun 2024

PLN Enjiniring Performance in 2024

Nilai Kontrak Baru Bidang Pembangkit New Contract Value in Power Generation	Rp550.496.325.773
Nilai Kontrak Baru Bidang Transmisi dan Distribusi New Contract Value in Transmission and Distribution	Rp284.924.404.453
Nilai Kontrak Baru Bidang Konstruksi New Contract Value in Construction	Rp68.693.400.287
Nilai Kontrak Baru Pengembangan Enjiniring New Contract Value in Engineering Development	Rp71.288.299.359
Nilai Kontrak Baru Jasa Enjiniring dan Pengembangan Enjiniring New Contract Value in Engineering and Engineering Development Services	Rp975.402.429.872
Jasa Non Enjiniring Non-Engineering Services	Rp To Be Confirmed
Jumlah Aset Total Assets	Rp1.925.406.765.261
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp1.161.061.275.200
Pendapatan Usaha Revenue	Rp1.051.310.942.664
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp225.654.102.365

Informasi tentang Subholding, Entitas Anak/Entitas Asosiasi/ Perusahaan Patungan/Purpose Vehicle

Information on Subholdings, Subsidiaries/Associate Entities/Joint Ventures/Purpose Vehicles

9 PT Energy Management Indonesia

Kinerja EMI Tahun 2024

EMI Performance in 2024

Jumlah Pendapatan Proyek Total Project Revenue	Rp138.793.124.200
Jumlah Aset Total Assets	Rp49.180.425.789
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp29.324.937.596
Pendapatan Usaha Revenue	Rp138.793.124.200
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp4.242.441.566

10 PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara

Kinerja PLN MCTN Tahun 2024

PLN MCTN Performance in 2024

Kapasitas Terpasang Power Capacity	300 MW
Produksi Listrik Electricity Production	2.489,43 GWh
Penjualan Listrik Sales of Electricity	2.403,98 GWh
Produksi Uap Steam Production	16.719.356,26 Ton
Jumlah Aset Total Assets	Rp1.357.696.418.168
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp1.289.745.732.561
Pendapatan Usaha Revenue	Rp911.552.525.144
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp462.123.459.429

11 Majapahit Holding BV

Kinerja MHBV Tahun 2024

MHBV Performance in 2024

Jumlah Aset Total Assets	Rp6.047.887.734.220
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp151.698.761.826
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	Rp1.843.668.037

Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

Wilayah operasi PLN pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada peta berikut:

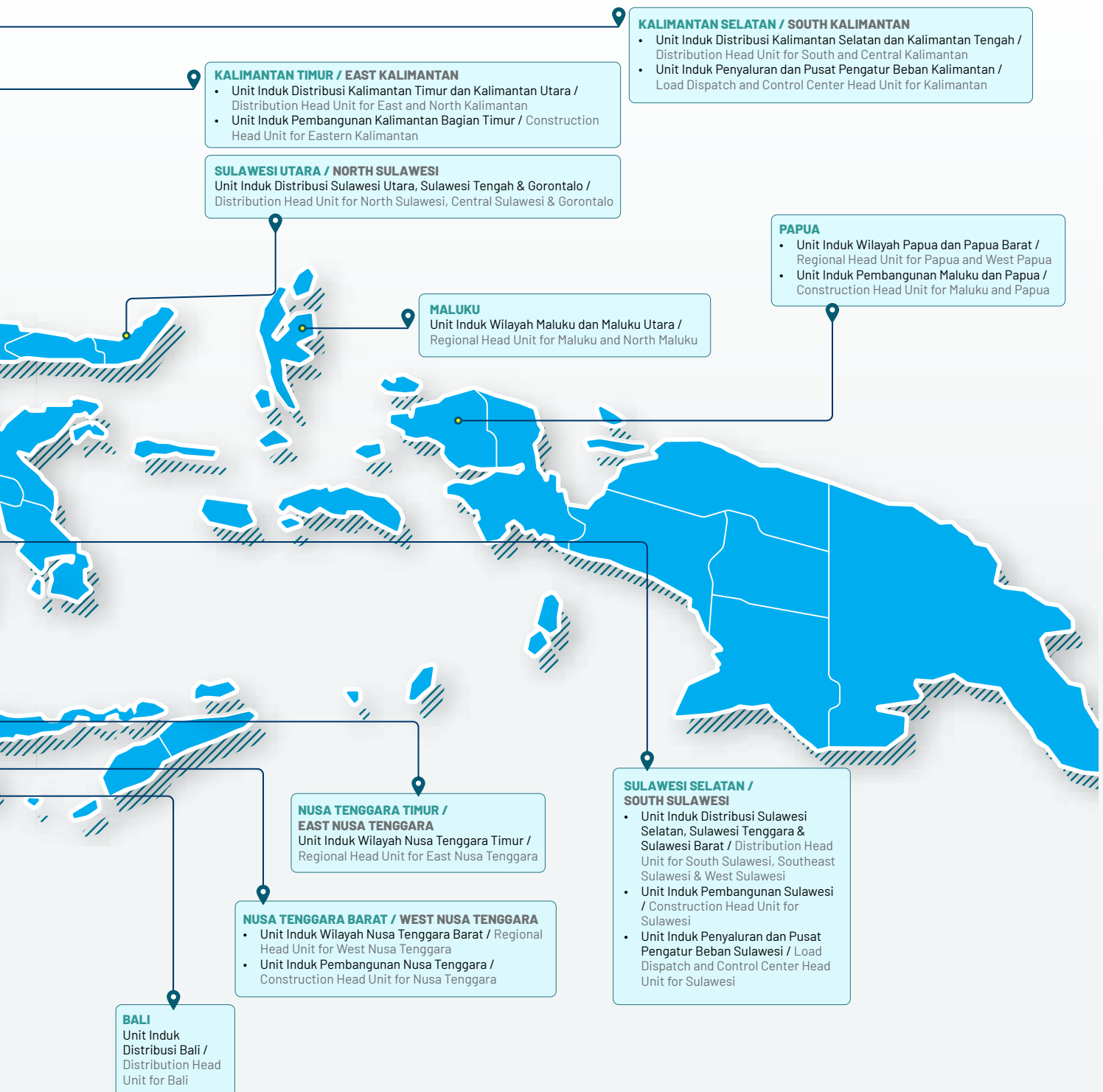
As of December 31, 2024, PLN's operational areas are illustrated in the following map:





Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices



Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

Photo by Ali Faqih
UIT JBT

No	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
I	PT PLN (Persero) Kantor Pusat Head Office	Jl. Trunojoyo Blok M I -135 Jakarta 12160 ☎ (+62-21) 7261875; 7261122; 7262234 📠 (+62-21) 7251234; 7250550 : 7221330; 7397150 ✉ investor.relation@pln.co.id 🌐 www.pln.co.id
II	PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan ISO/IEC 17025:2005 Research and Development Center ISO/IEC 17025:2005	Jl. Duren Tiga No. 102, Jakarta 12760 ☎ (+62-21) 7973774, 7980190, 7989982 (Hunting) 7991155 (GM) 📠 (+62-21) 7991762, 7975414 ✉ customercare@pln-litbang.co.id 🌐 www.pln-litbang.co.id Jwots: 13107,13109,13110,13111,13115,13121
III	PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Center	Jl. HR. Harsono RM. No. 59, Ragunan – Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 ☎ (+62-21) 7811292, 7811293, 7800832, 7811368 (KPUSDIKLAT) 📠 (+62-21) 7811294, 7811295 (Sekretaris KPUSDIKLAT) 7829263 🌐 http://pln-pusdiklat.co.id
IV	PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan Electricity Maintenance Center	Jl. Banten No. 10 Bandung 40272 ☎ (+62-22) 7236791-3 📠 (+62-22) 7236794 ✉ pusharlis@pln.co.id 🌐 www.pln.co.id/pusharlis



Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

No	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
V	PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Project Management Center	Jl. Slamet No. 1, Gajah Mungkur, Semarang 50232 ☎ (+62-24) 8310060 📠 (+62-24) 8317241 ✉ pusmankon@pln.co.id
VI	PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi Certification Center ISO 17021:2011	Jl. Laboratorium, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 ☎ (+62-21) 7900034 📠 (+62-21) 7982034, 7992056, 7943450 Jwots: 15192, 15193, 15194, 15195 ✉ niaga.pusertif@pln.co.id 🌐 www.pln.co.id/jaser Vicon: 192.168.1.154
VII	Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Transmission and Load Control Center	
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatra Sumatra Load Dispatch and Control Center Head Unit	Jl. Musyawarah/Nangka Ujung Kel. Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28233 ☎ (+62-761) 6700011, 6700012 📠 (+62-761) 6700015 ✉ sekretariatp3bs@yahoo.co.id, p3bs@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali Java, Madura, and Bali Load Control Center Head Unit	Jl. JCC Cinere 16514, Jakarta Selatan ☎ (+62-21) 7542646, 7543566 📠 (+62-21) 7542516 ✉ Sekr.p2b@gmail.com
3.	PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat West Java Transmission	Jl. JCC, Krukut Limo Cinere, Jakarta Selatan 16514 ☎ (+62-21) 7543566 📠 (+62-21) 7542380
4.	PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah Central Java Transmission	Jl. Moch. Toha Km. 4 Komplek PLN Cigereleng, Bandung 40255 ☎ (+62-22) 5201723 📠 (+62-22) 5220214 ✉ sekretariat.tjbt@gmail.com; sekr.induk@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali Transmission Head Unit for East Java and Bali	Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo, Surabaya 61257 ☎ (+62-31) 7882113, 7882114 📠 (+62-31) 7882578, 7883266 ✉ tjbtb1@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan Kalimantan Load Dispatch and Control Center Head Unit	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 ☎ (+62-511) 4772520, 4772633, 4772261 📠 (+62-511) 4773283 ✉ plnkitlur@pln.co.id
7.	PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi Sulawesi Load Dispatch and Control Center Head Unit	Jl. Letjen Hertasning Blok B Panakukkang, Makassar 90222 ☎ (+62-411) 444488 📠 (+62-411) 440888
VIII	Kantor Wilayah Regional Offices	
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Regional Head Unit for Bangka Belitung	Jl. Soekarno Hatta KM 5 Pangkalpinang 33171, Bangka Belitung ☎ (+62-717) 439300 (hunting) 📠 (+62-717) 439600 ✉ wbabel@pln.co.id
2.	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Regional Head Unit for Maluku and North Maluku	Jl. Diponegoro No. 2, Ambon 97127 ☎ (+62-911) 311810, 347766, 354696 📠 (+62-911) 310910 ✉ plnwilmaluku@plnmmu.co.id

Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

No	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
3.	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Regional Head Unit for Papua and West Papua	Jl. Ahmad Yani No. 18, Jayapura 99111 ☎ (+62-967) 533891, 533981, 536637 📠 (+62-967) 534694 ✉ wilpapua@pln.co.id
4.	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat Regional Head Unit for West Nusa Tenggara	Jl. Langko No. 25-27 Ampenan Mataram 83114 ☎ (+62-370) 643123 📠 (+62-370) 648692 ✉ sekretariat.ntb@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Regional Head Unit for East Nusa Tenggara	Jl. Piet A. Tallo No. 101, Kupang 85228 ☎ (+62-380) 8554005 (hunting) 📠 (+62-380) 8554010 ✉ ntt@pln.co.id 🌐 http://www.pln.co.id/ntt
IX Kantor Distribusi Distribution Units		
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur Distribution Head Unit for East Java	Jl. Embong Trengguli No. 19 - 21, Surabaya 60271 ☎ (+62-31) 5340651 - 5340655 📠 (+62-31) 5310057 Jwots: 71016 -18 (hunting) ✉ moch.sulatyo@pln.co.id 🌐 www.pln-jatim.co.id
2.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Distribution Head Unit for Central Java and D.I Yogyakarta	Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang ☎ (+62-24) 8411991 (hunting) 📠 (+62-24) 8412268 ✉ plnjatengdiy@pln.co.id; plnubd@plnjateng.co.id 🌐 www.plnjateng.co.id
3.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Distribution Head Unit for West Java	Jl. Asia Afrika No. 63, Bandung 40111 ☎ (+62-22) 4230747 (hunting), 4206287 (GM) 📠 (+62-22) 4230822, 4207114 Jwots: 30995 ✉ info.djbb@pln.co.id
4.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten Distribution Head Unit for Banten	Jl. Jendral Sudirman No. 1, Tangerang 15118 ☎ (+62-21) 5526716, 5526717 📠 (+62-21) 5526721 ✉ disbanten@pln.co.id
5.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Distribution Head Unit for Jakarta Raya	Jl. M. I. Ridwan Rais No. 1, Jakarta 10110 ☎ (+62-21) 3454000, 3455000 📠 (+62-21) 3456694 ✉ humasjaya@pln.co.id
6.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali Distribution Head Unit for Bali	Jl. Letda Tantular No. 1 Renon, Denpasar 80234 ☎ (+62-361) 221960 s.d 221968, 221957 📠 (+62-361) 227101
7.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Distribution Head Unit for Lampung	Jl. Z.A. Pagar Alam No. 05 Rajabasa, Bandar Lampung 35144 ☎ (+62-721) 774868 📠 (+62-721) 780247 ✉ kanwil.lampung@pln.co.id
8.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh Distribution Head Unit for Aceh	Jl. H. Mohd. Tgk. Daud Bereueh No. 172 Lampriet, Banda Aceh, Aceh 23243 ☎ (+62-651) 22188 (hunting 8 saluran) 📠 (+62-651) 21516 ✉ sekretariat.wa@pln.co.id



Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

No	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
9.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatra Utara Distribution Head Unit for North Sumatra	Jl. K.L. Yos Sudarso No. 284, Medan 20115 ☎ (+62-61) 6615155 📠 (+62-61) 6613789 ✉ plnsumut@plnwill.co.id
10.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatra Barat Distribution Head Unit for West Sumatra	Jl. Dr. Wahidin No. 8, Padang 25121 ☎ (+62-751) 33446 📠 (+62-751) 29540, 31564 ✉ PLNW3@indosat.net.id
11.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau Distribution Head Unit for Riau and Riau Islands	Jl. Musyawarah RT. 01 RW. 09, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28295 ☎ (+62-761) 855840, 855841, 853737, 855309 📠 (+62-761) 855310 ✉ wrkr@pln.co.id
12.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatra Selatan, Jambi dan Bengkulu Distribution Head Unit for South Sumatra, Jambi and Bengkulu	Jl. Kapten A. Rivai No. 37, Palembang 30129 ☎ (+62-711) 358355, 358804, 358859, 313217 (GM) 📠 (+62-711) 310376, 356759 (GM) ✉ gmws2jb@plnpalembang.co.id 🌐 http://www.plnpalembang.co.id
13.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Distribution Head Unit for West Kalimantan	Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya Pontianak, Kalimantan Barat 78391 ☎ (+62-561) 722037 📠 (+62-561) 721395 ✉ kalbar@pln.co.id
14.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Distribution Head Unit for South Kalimantan and Central Kalimantan	Jl. Panglima Batur Barat No. 1, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70711 ☎ (+62-511) 4772520, 4774342, 4772261 📠 (+62-511) 4772442 ✉ humas.kalseteng@pln.co.id
15.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Distribution Head Unit for East Kalimantan and North Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Balikpapan 76114 ☎ (+62-542) 871840 (hunting) 📠 (+62-542) 876130 ✉ kaltimra@pln.co.id
16.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo Distribution Head Unit for North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo	Jl. Bethesda No. 32, Manado 95116 ☎ (+62-431) 863644, 865651, 862444 (GM) 📠 (+62-431) 863660, 862360 ✉ gmsutg@pln.co.id
17.	PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Distribution Head Unit for South Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi	Jl. Letjend Hertasning Blok B, Kotak Pos 1206, Panakukang, Makassar 90222 ☎ (+62-411) 457155, 457157 📠 (+62-411) 444800

Wilayah Operasional dan Jaringan Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan

Operational Areas and Network of Business Units and Representative Offices

No	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
X Pembangkitan Generation		
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B Generation Head Unit for Tanjung Jati B	Desa Tubanan, Kec Kembang Kab. Jepara, Jawa Tengah 59453 ☎ (+62-291) 772121, 772123, 772124 📠 (+62-291) 772125 ✉ tanjungjatib@pln.co.id
XI Unit Induk Pembangunan Construction Parent Units		
1.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Utara Construction Head Unit for North Sumatra	Jl. Dr. Cipto No. 12, Medan 20152 ☎ (+62-61) 4144151, 4144152 📠 (+62-61) 4144153 ✉ sekrt.gm@pikitringsuar.co.id
2.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Tengah Construction Head Unit for Central Sumatra	Komplek Citra Garden Blok R1 No. 7-11 dan R2 No. 1-3, Jl. Purwodadi Panam, Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau 28294 ☎ (+62-761) 6704881 📠 (+62-761) 6704882 ✉ uipsumbagteng@gmail.com
3.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatra Bagian Selatan Construction Head Unit for South Sumatra	Jl. Residen A. Rozak No. 2180 Sekojo, Palembang 30118 ☎ (+62-711) 719103 s.d 719109 📠 (+62-711) 719102 ✉ info@uipring-Sumatra2.co.id
4.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat Construction Head Unit for West Java	Jl. Ehave-Gandul Kel. Gandul Kec. Cinere, Depok 16514 ☎ (+62-21) 7535500, 7548461, 7548467 📠 (+62-21) 7535599
5.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah Construction Head Unit for Central Java	Jl. Karawitan No. 32, Turangga, Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40264 ☎ (+62-22) 7320595 📠 (+62-22) 7320596 ✉ sekretariatuijpbt1@gmail.com
6.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali Construction Head Unit for East Java and Bali	Jl. Ketintang Baru I No. 1-3 Surabaya 60231 ☎ (+62-31) 8281200 📠 (+62-31) 8280214 ✉ sekre.uip7@pln.co.id; sekretariat.uip7@gmail.com
7.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Construction Head Unit for East Kalimantan	Jl. MT. Haryono No. 384, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 ☎ (+62-542) 871559 📠 (+62-542) 871558, 871565 ✉ plnuipkalbagtim@pln.co.id
8.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat Construction Head Unit for West Kalimantan	Jl. Letjen Suprpto No. 50 G, Pontianak, Kalimantan Barat 78121 ☎ (+62-561) 762580 📠 (+62-561) 762579 ✉ uip.kalimantan.barat@gmail.com
9.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Construction Head Unit for Nusa Tenggara	Jl. Yos Sudarso No. 2A, Mataram 83114 ☎ (+62-370) 621732, 621733 📠 (+62-370) 621734 ✉ pln@uip-nusra.co.id
10.	10 PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Construction Head Unit for Sulawesi	Jl. Letjend. Hertasning, Panakkukang, Makassar 90222 ☎ (+62-411) 852519 📠 (+62-411) 444339 ✉ pln.uipsulbagsel@pln.co.id
11.	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua Construction Head Unit for Maluku and Papua	Jl. Baru Kotaraja, Kel. Wai Mhorock, Kec. Abepura Jayapura, Papua 99225 ☎ (+62-967) 587773, 5180157, 581740 📠 (+62-967) 581740 ✉ plnuippapua@pln.co.id



Struktur Organisasi Organizational Structure

Dalam rangka menjalankan Transformasi PLN 2.0, PLN melakukan penguatan Struktur Organisasi yang berfokus pada penyelarasan dan optimalisasi struktur yang ada, guna mendukung transisi energi yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk itu, Direksi telah mengeluarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:0026.P/DIR/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN(Persero), yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Dengan memperkuat struktur organisasi yang sudah ada, PLN dapat lebih siap menghadapi perubahan besar dalam industri energi dan mewujudkan tujuan energi berkelanjutan untuk Indonesia.

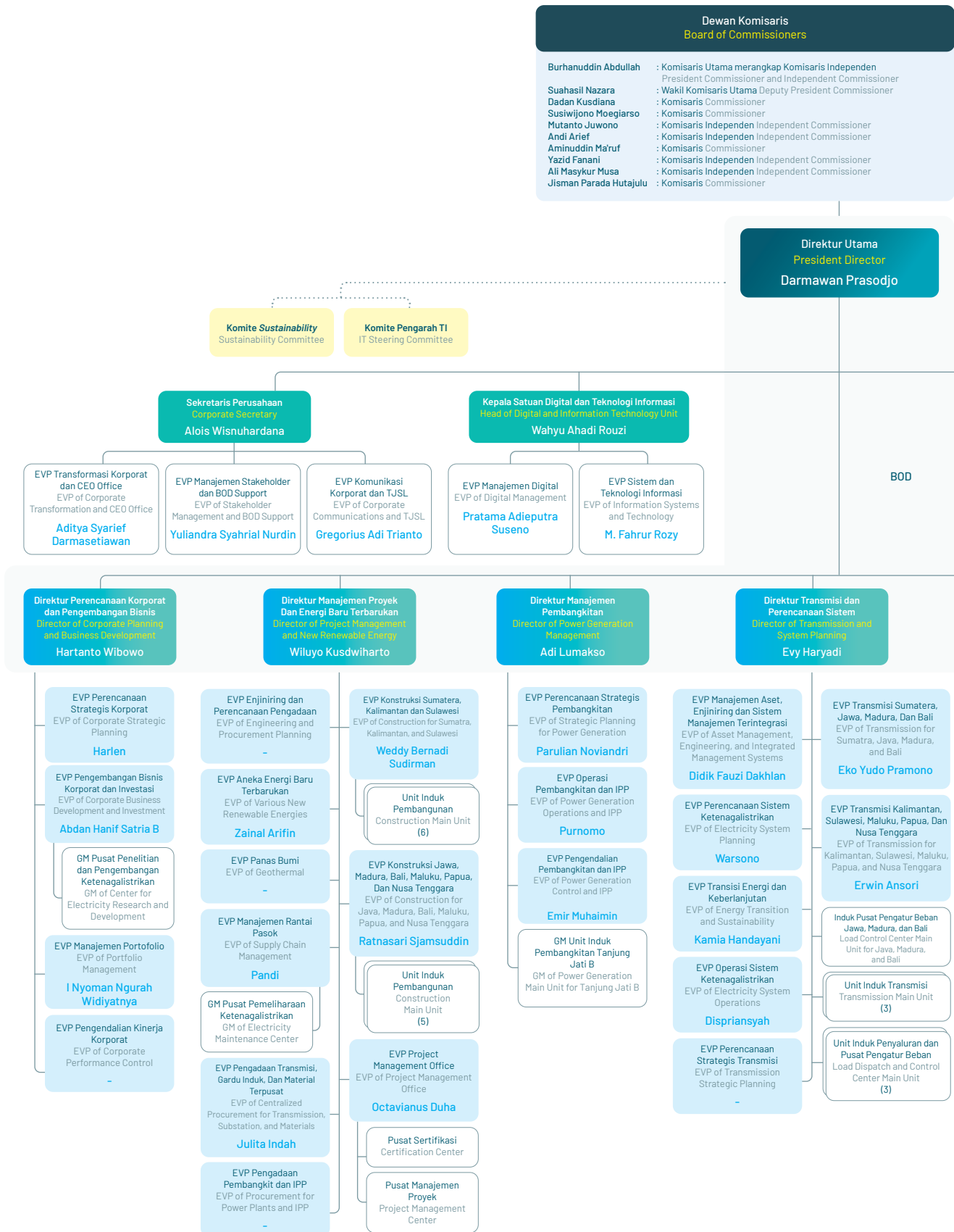
Berikut bagan Organisasi dan Struktur Jabatan PT PLN (Persero) yang berlaku saat ini:

In order to implement the PLN 2.0 Transformation, PLN has strengthened its Organizational Structure by focusing on the alignment and optimization of the existing structure to support a sustainable energy transition, enhance operational efficiency, and reinforce the organization's capabilities in facing future challenges. Therefore, the Board of Directors issued the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) Number: 0026.P/DIR/2024 dated July 1, 2024, on the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero), which has received approval from the Board of Commissioners. By reinforcing the existing organizational structure, PLN is better prepared to face significant changes in the energy industry and to realize sustainable energy goals for Indonesia.

The following is the current Organizational Chart and Job Structure of PT PLN (Persero):

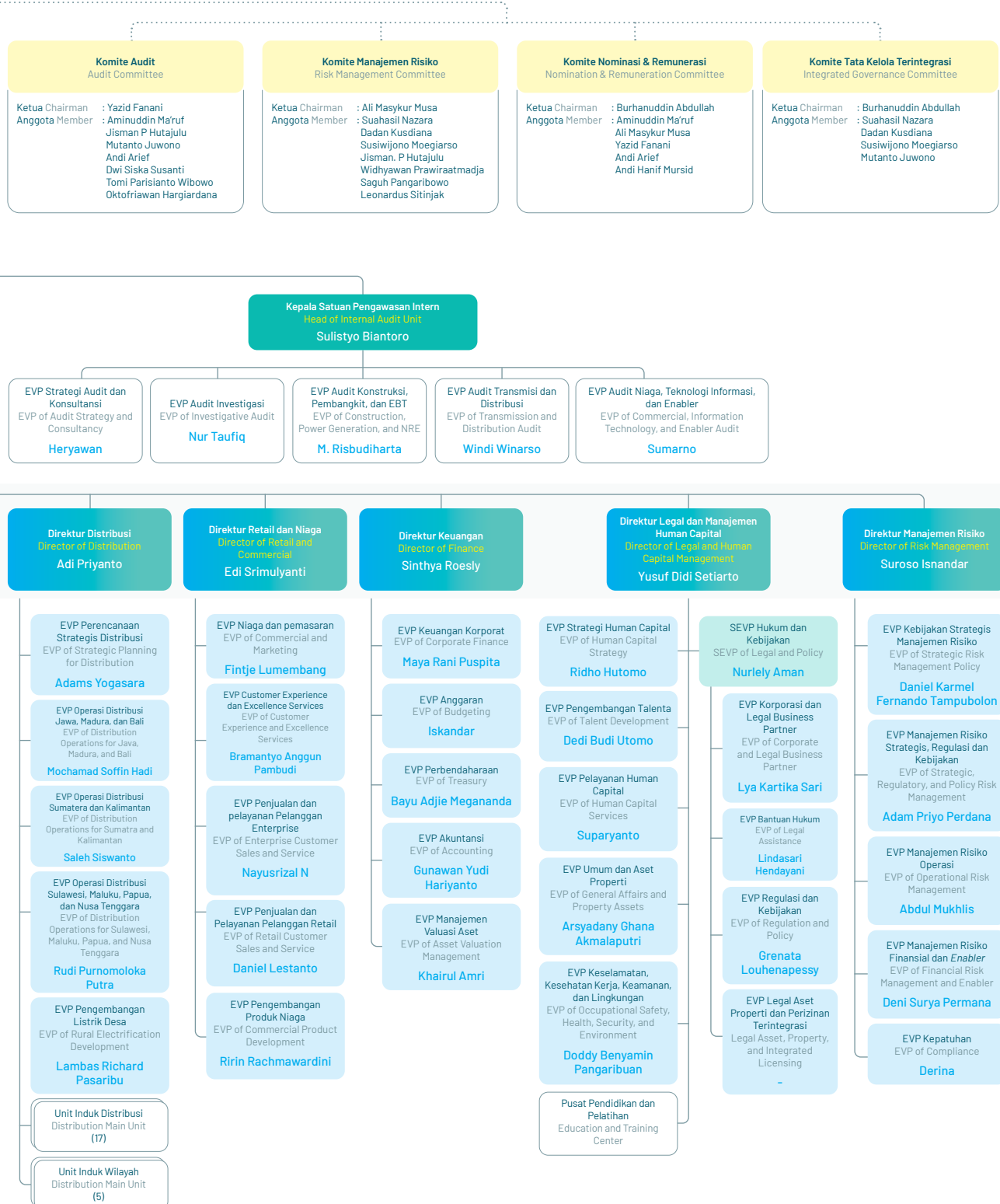
Struktur Organisasi

Organizational Structure





Struktur Organisasi Organizational Structure



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Burhanuddin Abdullah

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period

	Garut, 10 Juli 1947 Garut, July 10, 1947
	77 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- Doktor Honoris Causa di bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro (2006). - Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari Universitas Negeri Michigan, Amerika Serikat (1984). - Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1974).	- Doktor Honoris Causa di bidang Ekonomi dari Universitas Diponegoro (2006). - Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari Universitas Negeri Michigan, Amerika Serikat (1984). - Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1974).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan RUPS Sirkuler No.SK-189/MBU/07 tanggal 23 Juli 2024	Circular of the GMS Resolution No. SK-189/MBU/07 dated July 23, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Di Luar Perusahaan: Tidak ada	- Within the Company: - Chairman of the Nomination and Remuneration Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Gubernur Bank Indonesia (2003-2008) - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia ke-9 (2001) - Rektor Universitas Koperasi Indonesia (2011-2023)	- Governor of Bank Indonesia (2003-2008) 9th Coordinating Minister for Economic Affairs, Finance, and Industry of Indonesia (2001) - Rector of the Indonesian Cooperative University (2011-2023)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report.



Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile

Suhasil Nazara

Wakil Komisaris Utama
Deputy President Commissioner

Periode 2024 - 2029 **2024 - 2029 Period**

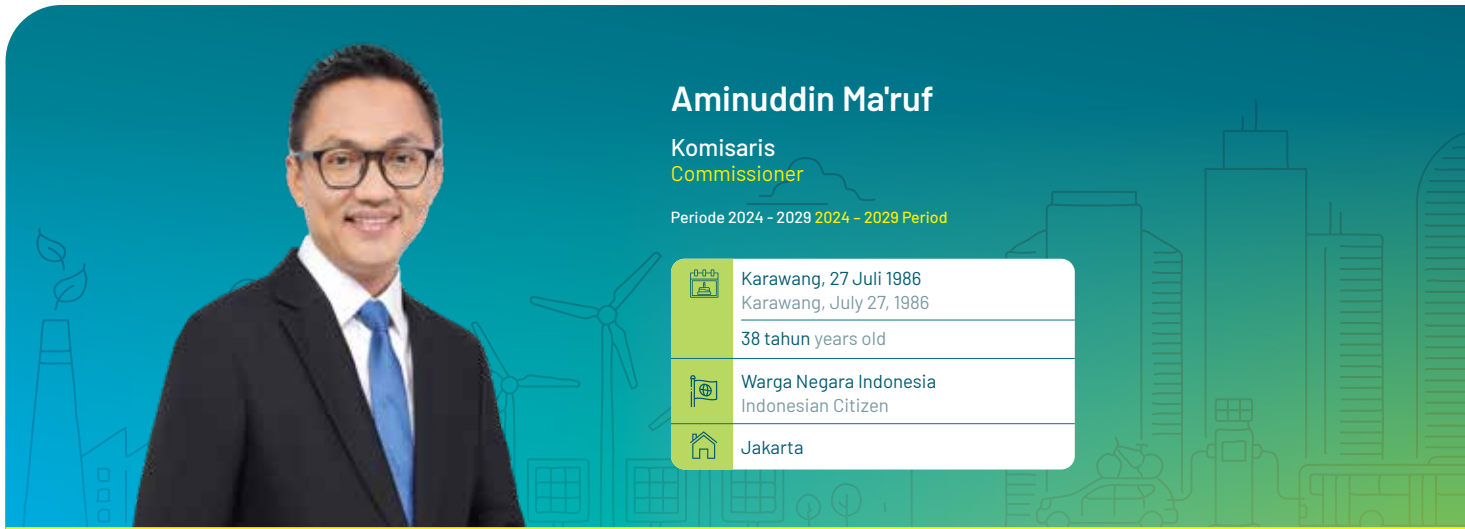
	Jakarta, 23 November 1970 Jakarta, November 23, 1970
	54 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Warga Negara Indonesia
	Jakarta



Pendidikan Education	• Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell University, USA (1997) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1994)	• Doctor of Philosophy (PhD), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2003) • Master of Science (MSc), Cornell University, USA (1997) • Bachelor's Degree in Economics, University of Indonesia (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-326/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 • Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024	• Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-326/MBU/12/2019 dated December 23, 2019 • Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2019
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Anggota Komite Manajemen Risiko • Di Luar Perusahaan: - Wakil Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2019-sekarang)	• Within the Company: - Member of the Risk Management Committee • In Other Companies: - Deputy Minister of Finance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2019-present)
Pengalaman Kerja Career History	• Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional/KEN (2013-2019) • Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2016) • Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2K (2010-2015) • Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah/KPPOD (2009-2015) • Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB Universitas Indonesia (2009-2013) • Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011) • Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB, Universitas Indonesia (2005-2008) • Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005) • Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2009) • Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (1999)	• Member of the National Economic Committee (KEN) (2013-2019) • Head of the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance (2016) • Coordinator of the Policy Working Group, Secretariat of the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) (2010-2015) • Vice Chair of the Regional Autonomy Implementation Monitoring Committee (KPPOD) (2009-2015) • Head of the Department of Economics, Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Indonesia (2009-2013) • Member of the Minister of Finance's Advisory Team on Fiscal Decentralization (2009-2011) • Head of the Demographic Institute, Faculty of Economics and Business (FEB), Universitas Indonesia (2005-2008) • Head of the Graduate Program in Economics (2004-2005) • Professor in Economics, Universitas Indonesia (since 2009) • Lecturer, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (since 1999)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode kedua	Second term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Aminuddin Ma'ruf

Komisaris
Commissioner

Periode 2024 - 2029 **2024 - 2029 Period**



Karawang, 27 Juli 1986
Karawang, July 27, 1986

38 tahun years old



Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen



Jakarta

Pendidikan Education	- S2 Universitas Negeri Jakarta Jurusan Ekonomi (2010) - S1 Universitas Airlangga Jurusan Pengembangan SDM	- Master's Degree, Jakarta State University, Department of Economics (2010) - Bachelor's Degree, Airlangga University, Department of Human Resources Development.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Di Luar Perusahaan: - Wakil Menteri BUMN Kementerian BUMN	- Within the Company: - Member of the Audit Committee - Member of the Nomination and Remuneration Committee - In Other Companies: - Deputy Minister of SOEs, Ministry of SOEs
Pengalaman Kerja Career History	2019 - 2024 Staf Khusus Presiden RI Sekretaris Kabinet RI	2019 - 2024 Special Staff to the President of the Republic of Indonesia Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners and members of Board of Directors
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Dadan Kusdiana

Komisaris
Commissioner

Periode 2022 - 2027 **2022 - 2027 Period**

	Sumedang, 29 Desember 1968 Sumedang, December 29, 1968
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta Jakarta



Pendidikan Education	• Doctoral Energy Science, Kyoto University • Master Energy Science, Kyoto University • Sarjana Mekanisme Pertanian, Institut Pertanian Bogor	• Doctoral Degree in Energy Science, Kyoto University • Master's Degree in Energy Science, Kyoto University • Bachelor's Degree in Agricultural Mechanization, Institut Pertanian Bogor (IPB)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-212/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-212/MBU/09/2022 dated September 21, 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Anggota Komite Manajemen Risiko • Di Luar Perusahaan: - Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (2023-sekarang)	• Within the Company: - Member of the Risk Management Committee • In Other Companies: - Secretary General, Ministry of Energy and Mineral Resources (2023-present)
Pengalaman Kerja Career History	• Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation (2020-2023) • Head of Research And Development Agency, MEMR (2019-2020) • Senior Advisor to Minister on the Economic of Natural Resources (2017-2019)	• Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation (2020-2023) • Head of the Research and Development Agency, Ministry of Energy and Mineral Resources (2019-2020) • Senior Advisor to the Minister on the Economics of Natural Resources (2017-2019)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Jisman Parada Hutajulu

Komisaris
Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period

	Tapanuli, 18 Januari 1967 Tapanuli, January 18, 1967
	57 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- Elektro Arus Kuat Institut Sains dan Teknologi (1992) - Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2004)	- Bachelor of Electrical Engineering, Strong Electric Current, Institut Sains dan Teknologi (1992) - Master of Management, Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2004)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Anggota Komite Audit - Anggota Komite Manajemen Risiko - Di Luar Perusahaan: - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2023-sekarang)	- Within the Company: - Member of the Audit Committee - Member of the Risk Management Committee - In Other Companies: - Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2023-present)
Pengalaman Kerja Career History	- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2023-Sekarang) - Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2022-2023) - Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2018-2022) - Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik Kementerian ESDM (2016-2018) - Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan merangkap Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Kementerian ESDM (2014-2016)	- Director General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2023-Present) - Director of Electricity Business Development, Ministry of Energy and Mineral Resources (2022-2023) - Director of Electricity Program Development, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018-2022) - Head of Electricity Price Sub-Directorate, Ministry of Energy and Mineral Resources (2016-2018) - Chief Civil Servant of Investigator (PPNS) for Electricity, concurrently Head of Electricity Price and Subsidy Sub-Directorate, Ministry of Energy and Mineral Resources (2014-2016)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Susiwijono Moegiarto

Komisaris
Commissioner

Periode 2021 – 2026 **2021 – 2026 Period**

	Ponorogo, 07 Juli 1969 Ponorogo, July 7, 1969
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Magister Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) • Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia (1997)	• Master of Economics, Universitas Trisakti, Jakarta (2017) • Bachelor of Economics in Management, Universitas Indonesia (1997)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021	Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Anggota Komite Manajemen Risiko • Di Luar Perusahaan: - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018-sekarang)	• Within the Company: - Member of the Risk Management Committee • In Other Companies: - Secretary to the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Economic Affairs (2018-present)
Pengalaman Kerja Career History	• Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan (2015-2018). • Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan (2012-2015). • Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2010-2012). • Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2006-2010) • Kepala Subdirektorat Manajemen Risiko, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (2005-2006).	• Expert Staff to the Minister of Finance for Organization, Bureaucracy, and Information Technology, Ministry of Finance (2015-2018). • Director of Revenue and Customs and Excise Regulation, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2012-2015). • Director of Customs and Excise Information, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2010-2012). • Head of the Automation of Systems and Procedures Sub-directorate, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2006-2010). • Head of the Risk Management Sub-directorate, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance (2005-2006).
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report.

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Yazid Fanani

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period

	Kediri, 29 April 1965 Kediri, April 29, 1965
	59 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- S2 Magister Kajian Ilmu Kepolisian (2001) - Akademi Polisi (1988)	- Master's degree in Police Science Studies (2001) - Police Academy graduate (1988)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Ketua Komite Audit - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Di Luar Perusahaan: Tidak ada	- Within the Company: - Chairman of the Audit Committee - Member of the Nomination and Remuneration Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Ketua STIK Lemdiklat Polri (2020–2023) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (2018–2020) - Kepala Kepolisian Daerah Jambi (2016–2017)	- Chairman of the College of Police Science (STIK), Police Education and Training Institute (2020–2023) - Regional Police Chief of South Kalimantan (2018–2020) - Regional Police Chief of Jambi (2016–2017)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Mutanto Juwono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period

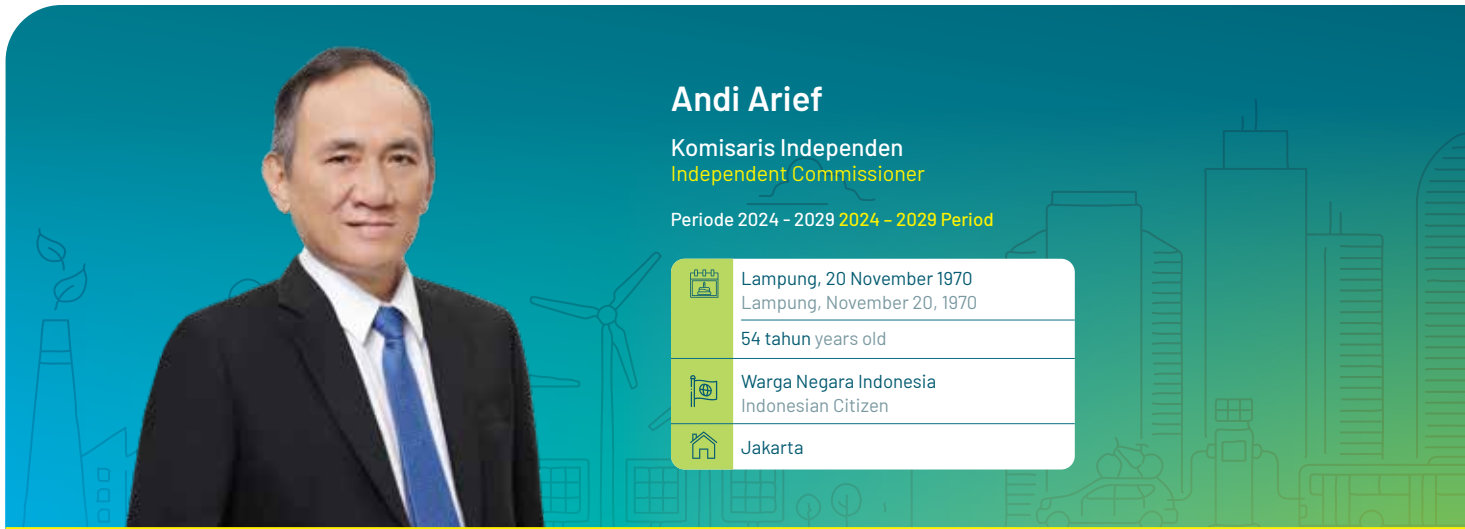
	Kediri, 22 November 1947 Kediri, November 2, 1947
	78 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	- S2 - Magister Manajemen Widya Jayakarta (2000) - S2 - Sekolah Staf Komando ABRI TNI (1994) - S2 - Sekolah Staf Komando Angkatan Udara (1987) - S2 - Sekolah Komando Angkatan Udara (1981) - D4 - AKABRI Udara AKABRI (1972)	- S2 - Widya Jayakarta Master of Management (2000) - S2 - TNI ABRI Command Staff School (1994) - S2 - Air Force Command Staff School (1987) - S2 - Air Force Command School (1981) - D4 - AKABRI Udara AKABRI (1972)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan RUPS Sirkuler No.SK-189/MBU/07 tanggal 23 Juli 2024	Circular of the GMS Resolution No. SK-189/MBU/07 dated July 23, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Anggota Komite Audit - Di Luar Perusahaan: Tidak ada	- Within the Company: - Member of the Audit Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Dirrenbangpuan Ditjen Rensishan Dephan Kemhan (2001-2003) - PABAN-I/REN SOPS TNI TNI/ABRI (1998-2001) - PABAN-I/REN SOPS TNI-AU TNI-AU (1997-1998) - ASRENBANG KOOPS AU II UJUNG PANDANG TNI-AU (1995-1997) - KASUBDIT DALKARPERSAMIL DITRENDAL PERSAU TNI-AU (1993-1995) - KASI DALKARPA SUBDIT DALKARPERSAU TNI-AU (1991-1993) - PENERBANG KEPRESIDENAN (VVIP) TNI-AU (1987-1991) - Komandan Skuadron Udara 8 TNI-AU (1986-1987) - Perwira Penerbang/Staff Tingkat Satuan & Tk. Komando TNI-AU (1972-1986)	- Dirrenbangpuan Directorate General of Defense Ministry of Defense (2001-2003) - PABAN-I/REN SOPS TNI TNI/ABRI (1998-2001) - PABAN-I/REN SOPS TNI-AU TNI-AU (1997-1998) - ASRENBANG KOOPS AU II UJUNG PANDANG TNI-AU (1995-1997) - HEAD OF DALKARPERSAMIL SUBDIT DITRENDAL PERSAU TNI-AU (1993-1995) - KASI DALKARPA SUBDIT DALKARPERSAU TNI-AU (1991-1993) - PRESIDENTIAL FLIGHTER (VVIP) TNI-AU (1987-1991) - Air Squadron Commander 8 TNI-AU (1986-1987) - Flight Officer/Staff Unit Level & Command Level TNI-AU (1972-1986)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report

Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Andi Arief

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period



Lampung, 20 November 1970
Lampung, November 20, 1970

54 tahun years old



Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen



Jakarta

Pendidikan Education	- S1 – Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (1996) - SMA/SMK Sederajat Tanjung Karang, Lampung (1989)	- S1 – Faculty of Political Science, Gajah Mada University (1996) - Senior High School/Vocational High School, Tanjung Karang, Lampung (1989)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan RUPS Sirkuler No.SK-189/MBU/07 tanggal 23 Juli 2024	Circular of the GMS Resolution No. SK-189/MBU/07 dated July 23, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Anggota Komite Audit - Di Luar Perusahaan: Tidak ada	- Within the Company: - Member of the Nomination and Remuneration Committee - Member of the Audit Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Staf Ahli PT Pelindo Indonesia (2010) - Staf Khusus Presiden RI ke-6 (2009) - Komisaris PT Pos Indonesia (2006)	- Expert Staff of PT Pelindo Indonesia (2010) - Special Staff of the 6th President of the Republic of Indonesia (2009) - Commissioner of PT Pos Indonesia (2006)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report



Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

Ali Masykur Musa

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2024 - 2029 2024 - 2029 Period

	Tulungagung, 12 September 1962 Tulungagung, September 12, 1962 62 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	- S3 Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta (2007) - S2 Hukum Bisnis, Universitas Gajah Mada (2009) - S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (1998) - S1 Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta (2010) - S1 FISIP Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember (1986)	- Doctoral degree in Educational Management, Universitas Negeri Jakarta (2007) - Master's degree in Business Law, Universitas Gadjah Mada (2009) - Master's degree in Political Science, Universitas Indonesia (1998) - Bachelor's degree in Law, Universitas Sahid Jakarta (2010) - Bachelor's degree in International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember (1986)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-269/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-269/MBU/11/2024 dated November 14, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Ketua Komite Manajemen Risiko - Di Luar Perusahaan: Tidak ada	- Within the Company: - Member of the Nomination and Remuneration Committee - Chairman of the Risk Management Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	2022-sekarang PTNBH UM Anggota MWA 2021-sekarang UIN SATU Anggota DEWAS BLU 2019-2023 PT PELNI (Persero) Komisaris Utama 2014-2019 MPR RI Anggota Lembaga Pengkajian 2014 - 2019 PT Reasuransi Indonesia Utama/Indonesia Re (Persero) Komisaris Utama 2013 - 2016 BPK RI Chairman off INTOSAI WGEA (Ketua Pelaksana Audit Lingkungan BPK Se-Dunia) 2009-2014 BPK RI Anggota IV Bidang Pemeriksaan: Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), BPH Migas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPLS, BPJT	2022-present PTNBH UM Member of MWA 2021-present UIN SATU Member of DEWAS BLU 2019-2023 PT PELNI (Persero) Main Commissioner 2014-2019 MPR RI Member of the Research Institute 2014 - 2019 PT Reasuransi Indonesia Utama/Indonesia Re (Persero) President Commissioner 2013 - 2016 BPK RI Chairman off INTOSAI WGEA (Chairman of the BPK Environmental Audit Worldwide) 2009-2014 BPK RI Member IV Audit Sector: Energy and Mineral Resources (ESDM), BPH Migas, Ministry of Public Works, Ministry of Environment, Ministry of Agriculture, Ministry of Forestry, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, BPLS, BPJT
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter, under the Board of Commissioners Subchapter in this Annual Report

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024



Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
President Commissioner and Independent Commissioner

Periode 2023 - 2024 2023 - 2024 Period

	Amsterdam, 24 Januari 1956 Amsterdam, January 24, 1956
	69 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1975) - Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1975)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-257/MBU/09/2023 tanggal 20 September 2023. Appointed as President Commissioner and Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-257/MBU/09/2023 dated September 20, 2023.
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Komisaris Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk President Commissioner at PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Pengalaman Kerja Career History	- Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)(2023-2024) - Komisaris Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (2023-Sekarang) - Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2023) - Komisaris Utama PT Tokopedia (2019-2023) - Komisaris Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(2019-2020) - Komisaris PT AKR Corporindo Tbk (2019-2020) - Gubernur Bank Indonesia (2013-2018) - Menteri Keuangan Republik Indonesia (2010-2013) - President Director & CEO PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010) - Presiden Direktur PT Bank Permata Tbk (2002-2005) - President Commissioner at PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)(2023-2024) - President Commissioner at PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (2023-Present) - President Commissioner at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2023) - President Commissioner at PT Tokopedia (2019-2023) - President Commissioner at PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(2019-2020) - Commissioner at PT AKR Corporindo Tbk (2019-2020) - Governor of Bank Indonesia (2013-2018) - Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2010-2013) - President Director & CEO of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005-2010) - President Director of PT Bank Permata Tbk (2002-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama First term



Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024

Mohamad Ikhsan

Komisaris
Commissioner

Periode 2019 - 2024 Periode 2019 - 2024

	Sigli, 7 November 1964 Sigli, November 7, 1964
	60 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Serikat (1999) • MA in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tenn, Amerika Serikat (1991) • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1988)	• Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, United States (1999) • Master of Arts in Economics, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States (1991) • Bachelor of Economics, Universitas Indonesia (1988)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-334/MBU/12/2019 tanggal 26 Desember 2019	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-334/MBU/12/2019 dated December 26, 2019
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Economic and Social Research Institute (1999-2001) • Member of Advisory Board, Mandiri Institute (Desember 2019-Sekarang) • Staf Khusus Menteri BUMN (2019-sekarang) • Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan (2015-sekarang) • Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2010-sekarang) • Anggota Masyarakat Ekonomi Statistik, BPS dan Bappenas (2007-sekarang)	• Economic and Social Research Institute (1999-2001) • Member of the Advisory Board, Mandiri Institute (December 2019-Present) • Special Staff to the Minister of SEO (2019-Present) • Member of Policy Advisory, Asian Development Bank Institute, Tokyo, Japan (2015-Present) • Professor at the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (2010-Present) • Member of the Economic Statistics Society, BPS and Bappenas (2007-Present)
Pengalaman Kerja Career History	• Anggota Tim Asistensi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2017-2019) • Anggota Tim Ahli Wakil Presiden RI (2014-2019) • Komisaris PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Komisaris PT JICT (2011-2017) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Ketua Tim Asistensi Menko Perekonomian, Kemenko Perekonomian (2014-2017) • Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014) • Komisaris PT Danareksa (2008-2015) • Komisaris Independen PT Bakrie Brothers (2006-2015)	• Member of the Assistance Team to the Coordinating Minister for Economic Affairs (2017-2019) • Member of the Expert Team of the Vice President of the Republic of Indonesia (2014-2019) • Commissioner at PT PGN Tbk (2015-2019) • Head of Advisory Panel, ASEAN Plus 3 Macroeconomics Research Office/AMRO, Singapore (2018-2019) • Commissioner at PT JICT (2011-2017) • Member of Policy Advisory AMRO, Singapore (2015-2019) • Coordinating Minister for the Economy Assistance Team Leader, Coordinating Ministry for the Economy (2014-2017) • Special Staff to the Vice President of the Republic of Indonesia (2009-2014) • Commissioner at PT Danareksa (2008-2015) • Independent Commissioner at PT Bakrie Brothers (2006-2015)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024



Dudy Purwagandhi

Komisaris
Commissioner

Periode 2020 - 2024 2020 - 2024 Period

	Manado, 23 September 1970 Manado, September 23, 1970
	54 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	Sarjana Hukum, Universitas Trisakti (1995)	Bachelor of Law, Universitas Trisakti (1995)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Ada	None
Pengalaman Kerja Career History	- Direktur Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) - Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (2019) - Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2018-2019) - Komisaris PT Satui Terminal Utama (2015-2019) - Direktur PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) - Direktur PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) - Direktur PT Jhonlin Air Transport (2008-2009) - Internal Audit PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008) - GA Dept. Head PT Tri Usaha Bhakti / Truba (Operational)(2004-2007) - Staff of Assistant BOD PT Tri Usaha Bhakti Truba (Holding)(1997-2004)	- Director of Seacons Trading Limited, Singapore (2011-2020) - Deputy Treasurer of the National Campaign Team (TKN) for the Advanced Indonesia Coalition (2019) - Special Staff to the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (2018-2019) - Commissioner at PT Satui Terminal Utama (2015-2019) - Director of PT Dua Samudera Perkasa (2009-2011) - Director of PT Jhonlin Marine Trans (2008-2009) - Director of PT Jhonlin Air Transport (2008-2009) - Internal Auditor of PT Dua Samudera Perkasa (2007-2008) - Head of GA Dept., PT Tri Usaha Bhakti / Truba (Operational)(2004-2007) - Staff to Assistant Board of Directors, PT Tri Usaha Bhakti Truba (Holding)(1997-2004)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024

Arcandra Tahar

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2023 -2024 2023 - 2024 Period

	Padang, 10 Oktober 1970 Padang, October 10, 1970
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• PhD, Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station, (2001) • MS, Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station, (1998) BS, • Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, (1994)	• PhD in Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station (2001) • MS in Ocean Engineering, Texas A&M University, College Station (1998) • Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-257/MBU/09/2023 tanggal 20 September 2023	Appointed as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-257/MBU/09/2023 dated September 20, 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Ada	None
Pengalaman Kerja Career History	• Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk, Jakarta, Indonesia (2020-2023) • Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2016-2019) • Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Jakarta, Indonesia (2016-2019) • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2016) • Presiden di Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013-2016) • Principal di Naval Architecture Horton Wison Deepwater, Inc., Houston, Texas (2009-2013) • Principal dan Presiden Asia Pasifik di AGR Deepwater Development System, Inc., Houston, Texas (2007-2009)	• President Commissioner at PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk, Jakarta, Indonesia (2020-2023) • Vice Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (2016-2019) • Vice President Commissioner at PT Pertamina (Persero), Jakarta, Indonesia (2016-2019) • Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia at the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (2016) • President at Petroneering, LLC, Houston, Texas (2013-2016) • Principal at Naval Architecture Horton Wison Deepwater, Inc., Houston, Texas (2009-2013) • Principal and President of Asia Pacific at AGR Deepwater Development System, Inc., Houston, Texas (2007-2009)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024



Charles Sitorus

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Periode 2022 - 2024 **2022 - 2024 Period**

	Medan, 9 Mei 1966 Medan, May 9, 1966
	58 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	• Doctor of Research Management, Bina Nusantara • Magister Ilmu Administrasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) • Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor	• Doctor of Research Management, Universitas Bina Nusantara • Master of Administrative Science, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) • Bachelor of Agricultural Industrial Technology, Institut Pertanian Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-154/MBU/07/2022 tanggal 22 Juli 2022	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-154/MBU/07/2022 dated July 22, 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Ada	None
Pengalaman Kerja Career History	• Direktur Bisnis Jaringan & Layanan Keuangan, PT Pos Indonesia (Persero) (2020-2022) • Direktur Komersial, PT Pos Indonesia (Persero) (2018-2020) • Direktur Informasi dan Teknologi, PT Pos Indonesia (Persero) (2016-2018) • Direktur Pengembangan Usaha, PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2015-2016) • Plt. Direktur Utama, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2015) • Direktur Pengembangan, PD. Pembangunan Sarana Jaya (BUMD DKI Jakarta) (2013-2015) • Direktur Sales, PT Smart Telecom (2008-2011) • Direktur Sales, PT Bakrie Telecom (2004-2008) • Head of Marketing, PT Satelindo Agustus (2002-2004)	• Director of Network Business & Financial Services, PT Pos Indonesia (Persero) (2020-2022) • Director of Commerce, PT Pos Indonesia (Persero) (2018-2020) • Director of Information and Technology, PT Pos Indonesia (Persero) (2016-2018) • Director of Business Development, PT Perdagangan Indonesia (Persero) (2015-2016) • Acting President Director, PD Pembangunan Sarana Jaya (Jakarta Regional-Owned Enterprise) (2015) • Director of Development, PD Pembangunan Sarana Jaya (Jakarta Regional-Owned Enterprise) (2013-2015) • Director of Sales, PT Smart Telecom (2008-2011) • Director of Sales, PT Bakrie Telecom (2004-2008) • Head of Marketing, PT Satelindo Agustus (2002-2004)
Sertifikasi Certifications	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	Certification in Audit Committee Practices (CACP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term



Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024

Tedi Bharata

Komisaris
Commissioner

Periode 2022 - 2024 2022 - 2024 Period

	Magelang, 31 Mei 1983 Magelang, May 31, 1983
	41 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Master of Public Administration, Columbia University (2016) • Sarjana Sistem Informasi Manajemen, Universitas Pelita Harapan (2001-2005)	• Master of Public Administration, Columbia University (2016) • Bachelor of Management Information Systems, Universitas Pelita Harapan (2001-2005)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-85/MBU/03/2022 tanggal 25 Maret 2022	Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-85/MBU/03/2022 dated March 25, 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Agustus 2021-sekarang)	Deputy for Human Resources, Technology, and Information, Ministry of State-Owned Enterprises (August 2021-present)
Pengalaman Kerja Career History	• Staf Khusus V Menteri BUMN (Maret 2021-Juli 2021) • VP Office of the Board PT Indonesia Asahan Aluminium (2019-2021) • Kepala Seksi Industri Telematika Badan Koordinasi Penanaman Modal (2016-2019) • Kepala Seksi Infrastruktur Energi Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012-2014) • Wakil Direktur Indonesia Investment Promotion Center - New York (2009-2012) • Staff Project Management PT Siemens Indonesia (2005-2008)	• Special Staff V to the Minister of State-Owned Enterprises (March 2021-July 2021) • Vice President, Office of the Board, PT Indonesia Asahan Aluminium (2019-2021) • Head of Telematics Industry Section, Investment Coordinating Board (2016-2019) • Head of Energy Infrastructure Section, Investment Coordinating Board (2012-2014) • Deputy Director, Indonesia Investment Promotion Center - New York (2009-2012) • Project Management Staff, PT Siemens Indonesia (2005-2008)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024



Eko Sulistiyo

Komisaris
Commissioner

Periode 2020 - 2024 2020 - 2024 Period

	Kendal, 30 Maret 1968 Kendal, March 30, 1968
	56 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Surakarta

Pendidikan Education	Sarjana Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1994)	Bachelor of History, Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-22/MBU/01/2020 tanggal 16 Januari 2020	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-22/MBU/01/2020 dated January 16, 2020
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak Ada	None
Pengalaman Kerja Career History	- Komisaris PT Danareksa (2016-2020) - Deputi IV Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (2014-2019) - Konsultan Politik Gubernur DKI Jakarta (2012-2014) - Konsultan Politik Walikota Surakarta (2008-2012) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta (2003-2008) - Direktur Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (2000-2003) - Pendiri Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) (2000-2003) - Direktur Penelitian di Lembaga Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1994-2000) - Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo dan menjadi Koordinator KIPP Jawa Tengah (1996-1999)	- Commissioner at PT Danareksa (2016-2020) - Deputy IV for Political Communication and Information Dissemination of Presidential Staff Office (2014-2019) - Political Consultant to the Governor of DKI Jakarta (2012-2014) - Political Consultant to the Mayor of Surakarta (2008-2012) - Chairman of the General Election Commission (KPU) of Surakarta City (2003-2008) - Director of the Consortium for Monitoring and Empowerment of Public Institutions (2000-2003) - Founder of Women's Solidarity for Humanity and Human Rights (SPEK-HAM) (2000-2003) - Research Director at Gita Pertiwi Institute for Ecological Studies Project (1994-2000) - Coordinator of the Independent Election Monitoring Committee (KIPP) Solo and became KIPP Coordinator of Central Java (1996-1999)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Dewan Komisaris yang Pernah Menjabat di Tahun 2024

Profiles of the Board of Commissioners with Tenure in 2024

Nawal Nely

Komisaris
Commissioner

Periode Maret - November 2024 March - November 2024 Period

	Pekalongan, 12 Mei 1973 Pekalongan, May 12, 1973
	51 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	- Executive Master of Business Administration di INSEAD, Fontainebleau (2019) - Sarjana Akuntansi, Universitas Gajah Mada (1995)	- Executive Master of Business Administration, INSEAD, Fontainebleau (2019) - Bachelor of Accounting, Universitas Gajah Mada (1995)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-72/MBU/03/2024 tanggal 19 Maret 2024	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-72/MBU/03/2024 dated March 19, 2024
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian BUMN (2020-saat ini)	Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of State-Owned Enterprises (2020-present)
Pengalaman Kerja Career History	- Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian BUMN (2020-saat ini) - Partner of Ernst & Young (2010-2019) - Manager National Bank of Kuwait (2005-2006)	- Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of State-Owned Enterprises (2020-present) - Partner at Ernst & Young (2010-2019) - Manager, National Bank of Kuwait (2005-2006)
Sertifikasi Certifications	Chartered Financial Analyst (CFA)	Chartered Financial Analyst (CFA)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Commissioners and members of Board of Directors
Periode Menjabat Term of Office	Periode pertama	First term

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Darmawan Prasodjo

Direktur Utama
President Director

Periode 2024 - 2029 **Periode 2024 - 2029**

	Malang, 23 Januari 1970 Malang, January 23, 1970
	54 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Des 2012) Post-Doctoral, Natural Resources and Energy Policy - Texas A&M University – USA (Jan 2004 – Mei 2011) Ph.D, Applied Economics, Natural Resources Economics - Texas A&M University – USA (Jan 1998–Des 1999) MCS, Computer Science with Software Engineering	- Nicholas Institute, Duke University – USA (Sep 2009 – Dec 2012), Postdoctoral Research, Natural Resources and Energy Policy - Texas A&M University – USA (Jan 2004 – May 2011), Ph.D. in Applied Economics, specializing in Natural Resource Economics - Texas A&M University – USA (Jan 1998 – Dec 1999), Master of Computer Science, specializing in Software Engineering
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.SK-270/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024 - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 - Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama pada 23 Desember 2019 berdasarkan SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019	- Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No.SK-270/MBU/11/2024 dated November 14, 2024 - Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021 - Appointed as Deputy President Director on December 23, 2019 based on Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Ketua Pengarah Komite TI - Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	- Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Head of IT Steering Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero)(2019 – 2021) - Komisaris PT PLN (Persero)(2018–2019) - Pendiri, Pemimpin Redaksi, dan Ekonomi Energi di Petronomist.com (2011–sekarang) - Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals (MDGs), Bali (2013) - Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy, Surya University (2012–2013)	- Deputy President Director of PT PLN (Persero) (2019–2021) - Commissioner at PT PLN (Persero)(2018–2019) - Founder, Editor-in-Chief, and Energy Economist at Petronomist.com (2011–present) - Co-chairman of the Post-2015 Millennium Development Goals (MDGs), Bali (2013) - Director at the Indonesia Center for Green Economy and Head of Green Economy Study Program, Surya University (2012–2013)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode kedua	Second term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi Board of Directors Profile

Sinthya Roesly

Direktur Keuangan
Director of Finance

Periode 2024 - 2028 **2024-2028 Period**

	Pekanbaru, 6 Oktober 1969 Pekanbaru, October 6, 1969
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Magister Manajemen, IPMI International Business School (2003) • Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) • Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) • Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia (1993) • Diploma Sastra Inggris, Universitas Indonesia (1993)	• Master of Management, IPMI International Business School (2003) • Master of Business Administration, Monash University, Australia (2003) • Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales, Australia (1996) • Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Indonesia (1993) • Diploma in English Literature, Universitas Indonesia (1993)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-270/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024 • SK Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019	• Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-270/MBU/11/2024 dated November 14, 2024 • Decree of the Minister of SOEs as the Company's GMS No. SK-325/MBU/12/2019 dated December 23, 2019
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Wakil Ketua Pengarah Komite TI • Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	• Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Deputy Head of IT Steering Committee • In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	• Direktur Eksekutif/CEO merangkap Ketua Dewan Direktur, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ LPEI atau Indonesia Eximbank (2017-2019) • Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII (2009-2017) • Deputi Direktur Perencanaan Strategis Korporat PT PLN (Persero) (2006-2009) • Manajer Analisa & Evaluasi Sistem PT PLN (Persero) (2003-2006) • Divisi Keuangan & Niaga PT PLN (Persero) (1996-2003) • Power System Operations Engineer PT PLN (Persero) (1994-1996) • Commissioning Engineer Thermal Power Generation Project PT PLN (Persero) (1993-1994)	• Executive Director/CEO and Chairman of the Board of Directors, Indonesian Export Financing Agency (LPEI) or Indonesia Eximbank (2017-2019) • President Director, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII (2009-2017) • Deputy Director of Corporate Strategic Planning, PT PLN (Persero) (2006-2009) • Manager of System Analysis & Evaluation, PT PLN (Persero) (2003-2006) • Finance & Commercial Division, PT PLN (Persero) (1996-2003) • Power System Operations Engineer, PT PLN (Persero) (1994-1996) • Commissioning Engineer for Thermal Power Generation Project, PT PLN (Persero) (1993-1994)
Sertifikasi Certifications	IFAC, IAI	IFAC, IAI
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode kedua	Second term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Evy Haryadi

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
Director of Transmission and System Planning

Periode 2021 - 2026 2021 - 2026 Period



Jakarta, 19 Desember 1969
Jakarta, December 19, 1969

55 tahun years old



Warga Negara Indonesia
Indonesian citizen



Jakarta

Pendidikan Education	• Master of Power Engineering, Waseda University Tokyo (1999) • Sarjana Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1993)	• Master of Power Engineering, Waseda University Tokyo (1999) • Bachelor of Electrical Engineering, Institut Teknologi Bandung (1993)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-200/MBU/06/2021 tanggal 16 Juni 2021	Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-200/MBU/06/2021 dated June 16, 2021
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI • Di Perusahaan Lain: - Dewan Komisaris di <i>Subholding</i> yaitu PLN Nusantara Power *	• Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee • In Other Companies: - Board of Commissioners at the Subholding, namely PLN Nusantara Power *
Pengalaman Kerja Career History	• Kepala Satuan Pusat Keunggulan PT PLN (Persero) (2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (2019-2021) • General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2017-2019) • Staf Ahli Direksi PT PLN (Persero) (2016-2017) • Kepala Divisi Operasi PLN Bisnis Regional Sumatera (2016) • General Manager PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2013-2016) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali (2010-2013) • Manajer Operasi Sistem PT PLN (Persero) P3B Sumatera (2009-2010) • Manajer Bidang Perencanaan Operasi PT PLN (Persero) Unit Bidding dan Operasi Sistem (2006-2009)	• Head of Center of Excellence Unit, PT PLN (Persero) (2021) • General Manager, PT PLN (Persero) Java-Bali Load Control Center (2019-2021) • General Manager, PT PLN (Persero) Electricity Research and Development Center (2017-2019) • Expert Staff to the Board of Directors, PT PLN (Persero) (2016-2017) • Head of Operations Division, PLN Regional Business Unit Sumatera (2016) • General Manager, PT PLN (Persero) Java-Bali Load Control Center (2013-2016) • System Operations Manager, PT PLN (Persero) Java-Bali Load Control Center (2010-2013) • System Operations Manager, PT PLN (Persero) Sumatera Load Control Center (2009-2010) • Operations Planning Manager, PT PLN (Persero) Bidding and System Operations Unit (2006-2009)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

* Per tanggal 23 April 2025 diberhentikan sebagai Komisaris PLN Nusantara Power
Effective as of April 23, 2025, was honorably discharged from the position of Commissioner of PLN Nusantara Power

Yusuf Didi Setiarto

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital
Director of Legal and Human Capital Management

Periode 2021 - 2026 2021 - 2026 Period

	Padang, 17 Januari 1974 Padang, January 17, 1974
	50 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1999) • Sarjana Ekonomi, Universitas Andalas Padang (1994)	• Bachelor of Law, Universitas Indonesia (1999) • Bachelor of Economics, Universitas Andalas Padang (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN (Persero) No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 7 Desember 2021	Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the General Meeting of Shareholders of PT PLN (Persero) No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI • Di Perusahaan Lain: - Dewan Komisaris di <i>Subholding</i> Perseroan yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia	• Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee • In Other Companies: - Board of Commissioners at the Company's Subholding, namely PT PLN Energi Primer Indonesia
Pengalaman Kerja Career History	• Tenaga Ahli Utama Kedeputan Bidang Energi (Eselon 1B) pada Kantor Staf Presiden (KSP) (2015 - 2021) • CEO Advisor pada PT Pertamina (Persero) (2019 - 2020) • Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) Dewan Komisaris pada PT Pertamina (Persero) (2017 - 2020) • Special Advisor Menteri ESDM (2016) • Special Advisor Wakil Menteri ESDM (2016 - 2019) • Tenaga Ahli Kepala Biro Hukum KESDM (2017 - 2019) • SVP Legal/Kepala Divisi Hukum dan Formalitas BP Migas/SKK Migas (2013 - 2015) • VP of Commercial Contract BP Migas/SKK Migas (2011 - 2013) • Senior Lawyer BP Migas/SKK Migas (2009 - 2011) • Associate Lawyer di Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000 - 2003)	• Principal Expert, Deputy for Energy Affairs (Echelon 1B) at the Presidential Staff Office (KSP) (2015 - 2021) • CEO Advisor at PT Pertamina (Persero) (2019 - 2020) • Member of the Risk Management Monitoring Committee (KPMR) of the Board of Commissioners at PT Pertamina (Persero) (2017 - 2020) • Special Advisor to the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) (2016) • Special Advisor to the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (2016 - 2019) • Expert Staff to the Head of Legal Bureau at the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) (2017 - 2019) • SPV Legal/Head of Legal and Formalities Division BP Migas/SKK Migas (2013 - 2015) • VP of Commercial Contract, BP Migas/SKK Migas (2011 - 2013) • Senior Lawyer, BP Migas / SKK Migas (2009 - 2011) • Associate Lawyer at Wiriadinata & Widyawan Law Offices (W&W) (2000 - 2003)
Sertifikasi Certifications	<i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Edi Srimulyanti

Direktur Retail dan Niaga
Director of Retail and Commerce

Periode 2022 - 2027 **2022 - 2027** Period

	Kediri, 3 Oktober 1966 Kediri, October 3, 1966
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- S2 Bidang Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia (2005-2007) - S1 Listrik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1998)	- Master's Degree in Financial Management, Universitas Indonesia (2005-2007) - Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1998)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-213/MBU/09/2022 dated September 21, 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI - Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	- Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- Executive Vice President Change Management Office (2020 - 2022) - Vice President Change Management DIV CMO (2019 - 2020) - Vice President Metering DIV QAS (2018 - 2019)	- Executive Vice President, Change Management Office (2020 - 2022) - Vice President, Change Management Division, CMO (2019 - 2020) - Vice President, Metering Division, QAS (2018 - 2019)
Sertifikasi Certifications	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Hartanto Wibowo

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
Director of Corporate Planning and Business Development

Periode 2022 - 2027 **Periode 2022 - 2027**

	Boyolali, 9 Februari 1976 Boyolali, February 9, 1976
	49 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	- S2 Magister Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung	- Master of Management, majoring in Financial Management, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta - Bachelor of Industrial Engineering, Institut Teknologi Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-213/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-213/MBU/09/2022 dated September 21, 2022
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI - Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	- Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee - In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	- EVP Anggaran PT PLN (Persero)(2021) - EVP Risk Management PT PLN (Persero)(2020) - Direktur Keuangan merangkap Direktur Pengembangan PT PLN Batu Bara (2018-2020) - VP Portfolio Management (2016-2017) - Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Korporat PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016)	- EVP of Budget, PT PLN (Persero)(2021) - EVP of Risk Management, PT PLN (Persero)(2020) - Director of Finance and Development, PT PLN Batu Bara (2018-2020) - VP of Portfolio Management (2016-2017) - Head of Corporate Planning and Development Division, PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016)
Sertifikasi Certifications	<i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini.	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Adi Lumakso

Direktur Manajemen Pembangkitan
Director of Generation Management

Periode 2021 - 2026 **Periode 2021 - 2026**

	Pati, 22 Juli 1969 Pati, July 22, 1969
	55 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Tenaga Nasional, Malaysia - S2 Magister Manajemen Bisnis, Universitas Sriwijaya - S1 Listrik, Universitas Sriwijaya - S1 Sipil (Bangunan), Universitas Diponegoro	- Master of Business Management, National Energy University, Malaysia - Master of Business Management, Universitas Sriwijaya - Bachelor of Electrical Engineering, Universitas Sriwijaya - Bachelor of Civil Engineering (Building), Universitas Diponegoro
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-389/MBU/12/2021 tanggal 6 Desember 2021	Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-389/MBU/12/2021 dated December 6, 2021
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI - Di Perusahaan Lain: - Dewan Komisaris di <i>Subholding</i> Perusahaan yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia	- Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee - In Other Companies: - Board of Commissioners at the Company's Subholding, namely PT PLN Energi Primer Indonesia
Pengalaman Kerja Career History	- Expert Pengadaan pada Direktorat Mega Proyek PT PLN (Persero) Kantor Pusat - Expert Pengadaan pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) - Executive Vice President Konstruksi Regional Sumatera pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) - Kepala Divisi Konstruksi Regional Sumatera pada Direktorat Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Kantor Pusat - Kepala Divisi Administrasi Konstruksi pada Direktorat Pengadaan PT PLN (Persero) Kantor Pusat - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan V PT PLN (Persero) - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X PT PLN (Persero)	- Procurement Expert at Mega Project and NRE Directorate of PT PLN (Persero) Head Office - Procurement Expert at Sumatra and Kalimantan Regional Business Directorate of PT PLN (Persero) - Executive Vice President of Sumatra Regional Construction at the Directorate of Sumatra and Kalimantan Regional Business PT PLN (Persero) - Head of Sumatra Regional Construction Division at the Directorate of Sumatra Regional Business PT PLN (Persero) Head Office - Head of Construction Administration Division at the Procurement Directorate of PT PLN (Persero) Head Office - General Manager of PT PLN (Persero) Main Unit Development V, PT PLN (Persero) - General Manager of PT PLN (Persero) Main Unit Development X, PT PLN (Persero)
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi Board of Directors Profile

Adi Priyanto

Direktur Distribusi
Director of Distribution

Periode 2021 – 2026 **2021 – 2026 Period**

	Tulungagung, 8 Februari 1966 Tulungagung, February 8, 1966
	58 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• S2 Listrik – Institut Teknologi Bandung (1998) • S2 Bidang Manajemen – IPWI Jakarta (1998) • S2 Manajemen Bisnis – Jakarta Institute of Management Studies (1997) • S1 Listrik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)	• Master's Degree in Electrical Engineering – Institut Teknologi Bandung (1998) • Master's Degree in Management – IPWI Jakarta (1998) • Master's Degree in Business Management – Jakarta Institute of Management Studies (1997) • Bachelor's Degree in Electrical Engineering – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1991)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku Papua & Nusa Tenggara berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-392/MBU/12/2021 tanggal 07 Desember 2021	Appointed as Director of Regional Business for Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-392/MBU/12/2021 dated December 7, 2021
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI • Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	• Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee • In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	• General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (2021) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali (2020–2021) • Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2017–2020) • Mulai berkarier di PT PLN (Persero) sejak 1993	• General Manager of PT PLN (Persero) East Java Distribution Main Unit (2021) • General Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Main Unit (2020–2021) • Head of System Planning Division at PT PLN (Persero) (2017–2020) • He began his career at PT PLN (Persero) in 1993
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Profil Direksi

Board of Directors Profile



Wiluyo Kusdiharto

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan
Director of Project Management and New Renewable Energy

Periode 2021 – 2026 **2021 – 2026 Period**

	Surabaya, 25 Juli 1971 Surabaya, July 25, 1971
	53 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta

Pendidikan Education	- Magister Manajemen, Universiti Tenaga Nasional, Malaysia (2005) - Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994)	- Master of Management, National Energy University, Malaysia (2005) - Bachelor of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	- Menjabat kembali sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan untuk periode yang kedua berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) SK-162/MBU/07/2022 - Ditetapkan pertama kali sebagai Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. SK-239/MBU/07/2021 tanggal 16 Juli 2021 - Ditetapkan sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-147/MBU/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 - Diangkat sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017	- Reappointed as Director of Project Management and New Renewable Energy for a second term based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-162/MBU/07/2022 - Initially appointed as Director of Mega Project and New Renewable Energy based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-239/MBU/07/2021 dated July 16, 2021 - Appointed as Director of Regional Business for Sumatra and Kalimantan based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-147/MBU/05/2020 dated May 14, 2020 - Appointed as Director of Regional Business for Sumatra based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-138/MBU/07/2017 dated July 24, 2017
Rangkap Jabatan Concurrent Position	- Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Anggota Pengarah Komite TI - Di Perusahaan Lain: - Dewan Komisaris di <i>Subholding</i> Perusahaan yaitu PT PLN Indonesia Power*	- Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Member of IT Steering Committee - In Other Companies: - Board of Commissioners of the Company's Subholding, namely PT PLN Indonesia Power*
Pengalaman Kerja Career History	- General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur (2021) - General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali (2020–2021) - Kepala Divisi Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) (2017–2020) - Mulai berkarier di PT PLN (Persero) sejak 1993	- General Manager of PT PLN (Persero) East Java Distribution Main Unit (2021) - General Manager of PT PLN (Persero) Bali Distribution Main Unit (2020–2021) - Head of System Planning Division at PT PLN (Persero) (2017–2020) - He began his career at PT PLN (Persero) in 1993
Sertifikasi Certifications	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode kedua	Second term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

* Per tanggal 23 April 2025 diberhentikan sebagai Komisaris PLN Indonesia Power
Effective as of April 23, 2025, was honorably discharged from the position of Commissioner of PLN Indonesia Power

Profil Direksi Board of Directors Profile

Suroso Isandar

Direktur Manajemen Risiko
Director of Risk Management

Periode 2023 - 2028 **2023 - 2028 Period**

	Klaten, 12 Agustus 1971 Klaten, August 12, 1971
	53 tahun years old
	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
	Jakarta



Pendidikan Education	• Master of Science, Power System Engineering and Management, University of Abertay (1999) • Sarjana Teknik, Power System Engineering, Institut Teknologi Bandung (1994)	• Master of Science in Power System Engineering and Management, University of Abertay (1999) • Bachelor of Engineering in Power System Engineering, Institut Teknologi Bandung (1994)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No. SK-258/MBU/09/2023 tanggal 20 September 2023	Decree of the Minister of SOEs as the GMS No. SK-258/MBU/09/2023 dated September 20, 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Perusahaan: - Pengarah Komite <i>Sustainability</i> - Wakil Ketua Pengarah Komite TI • Di Perusahaan Lain: Tidak Ada	• Within the Company: - Steering Committee Sustainability - Deputy Head of IT Steering Committee • In Other Companies: None
Pengalaman Kerja Career History	• Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi pada Satuan Digital dan Teknologi Informasi Direktorat Utama PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2022-2023) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (2021-2022) • General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi (2019-2021)	• Head of Digital and Information Technology Unit at the Digital and Information Technology Unit, Main Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2022-2023) • General Manager of Load Control Center Main Unit for Java, Madura, and Bali, PT PLN (Persero) (2021-2022) • General Manager of Power Generation and Transmission Main Unit for Sulawesi, PT PLN (Persero) (2019-2021)
Sertifikasi Certifications	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham	Does not have any affiliations with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders
Periode Menjabat dan Masa Jabatan Term of Office and Tenure	Periode pertama	First term
Pernyataan Independensi, Kepemilikan Saham dan Pelatihan 2024 Statement of Independence, Shareholding and Training in 2024	Disajikan terpisah pada Bab Governansi Perseroan di Sub Bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini	Presented separately in the Corporate Governance Chapter under the Board of Directors Subchapter in this Annual Report

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors In and After the 2024 Fiscal Year

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris pada Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Board of Commissioners' Composition in the 2024 Fiscal Year

Komposisi Dewan Komisaris PLN mengalami 3 (tiga) kali perubahan pada 2024. Perubahan pertama berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No.SK-72/MBU/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang mengangkat Sdri. Nawal Nely sebagai Komisaris dan memberhentikan Sdr. Eko Sulistyو dan Sdr. Tedi Bharata sebagai Komisaris.

Perubahan kedua, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PLN (Persero) No.SK-189/MBU/07 tanggal 23 Juli 2024 yaitu pengangkatan Sdr. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menggantikan Sdr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Sdr. Mutanto Yuwono dan Sdr. Andi Arief sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, perubahan ketiga berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-269/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 14 November 2024, Pemegang Saham menyepakati pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris yang terdiri dari Sdr. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama, Sdri. Nawal Nely sebagai Komisaris, Sdr. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris, Sdr. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, Sdr. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru yang terdiri dari Sdr. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Sdr. Aminuddin Ma'ruf sebagai Komisaris, Sdr. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris, Sdr. Yazid Fanani, dan Sdr. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen.

Penjelasan mengenai perubahan komposisi Dewan Komisaris PLN pada 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The composition of PLN's Board of Commissioners underwent 3 (three) changes in 2024. The first change was based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero) No. SK-72/MBU/03/2024, dated March 19, 2024, which appointed Ms. Nawal Nely as Commissioner as well as dismissed Mr. Eko Sulistyو and Mr. Tedi Bharata from their positions as Commissioners.

The second change was based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT PLN (Persero) No. SK-189/MBU/07 dated July 23, 2024, which appointed Mr. Burhanuddin Abdullah as President Commissioner and Independent Commissioner, replacing Mr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, appointed Mr. Mutanto Yuwono, and Mr. Andi Arief as Independent Commissioners.

Furthermore, the third change was based on the Shareholders' Decree No. SK-269/MBU/11/2024 on the Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Commissioners dated November 14, 2024 where the Shareholders agreed to respectfully dismiss the members of the Board of Commissioners, namely Mr. Suahasil Nazara as Deputy President Commissioner, Ms. Nawal Nely as Commissioner, Mr. Mohamad Ikhsan as Commissioner, Mr. Arcandra Tahar as Independent Commissioner, and Mr. Dudy Purwagandhi as Commissioner, and confirmed the dismissal of Mr. Charles Sitorus as Independent Commissioner. Then, the GMS appointed the new members of the Board of Commissioners, consisting of Mr. Suahasil Nazara as Deputy President Commissioner, Mr. Aminuddin Ma'ruf as Commissioner, Mr. Jisman P. Hutajulu as Commissioner, Mr. Yazid Fanani, and Mr. Ali Masykur Musa as Independent Commissioners.

Details of the changes in the composition of PLN's Board of Commissioners in 2024 are presented in the table below:



Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors In and After the 2024 Fiscal Year

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2024 – 19 Maret 2024 Board of Commissioners' Composition January 1, 2024 – March 19, 2024		Komposisi Dewan Komisaris Periode 20 Maret 2024 – 23 Juli 2024 Board of Commissioners' Composition March 20, 2024 – July 23, 2024		Komposisi Dewan Komisaris Periode 24 Juli 2024 – 31 Desember 2024 Board of Commissioners' Composition July 24, 2024 – December 31, 2024	
Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position	Nama Name	Jabatan Position
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo ³	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Burhanuddin Abdullah	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner
Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Burhanuddin Abdullah ⁴	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Suahasil Nazara ^{5,6}	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Mohamad Ikhsan	Komisaris Commissioner	Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Mohamad Ikhsan ⁵	Komisaris Commissioner
Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner	Mohamad Ikhsan	Komisaris Commissioner	Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner
Dudy Purwagandhi	Komisaris Commissioner	Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner	Dudy Purwagandhi ⁵	Komisaris Commissioner
Susiwijono Moegiarso	Komisaris Commissioner	Dudy Purwagandhi	Komisaris Commissioner	Susiwijono Moegiarso	Komisaris Commissioner
Tedi Bharata ¹	Komisaris Commissioner	Susiwijono Moegiarso	Komisaris Commissioner	Charles Sitorus ⁵	Komisaris Independen Independent Commissioner
Eko Sulistyio ¹	Komisaris Commissioner	Charles Sitorus	Komisaris Independen Independent Commissioner	Arcandra Tahar ⁵	Komisaris Independen Independent Commissioner
Charles Sitorus	Komisaris Independen Independent Commissioner	Arcandra Tahar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nawal Nely ⁵	Komisaris Commissioner
Arcandra Tahar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nawal Nely	Komisaris Commissioner	Andi Arief	Komisaris Independen Independent Commissioner
Nawal Nely ²	Komisaris Commissioner	Andi Arief ⁴	Komisaris Independen Independent Commissioner	Mutanto Juwono	Komisaris Independen Independent Commissioner
		Mutanto Juwono ⁴	Komisaris Independen Independent Commissioner	Aminuddin Ma'ruf ⁶	Komisaris Commissioner
				Jisman P. Hutajulu ⁶	Komisaris Commissioner
				Yazid Fanani ⁶	Komisaris Independen Independent Commissioner
				Ali Masykur Musa ⁶	Komisaris Independen Independent Commissioner

Keterangan

- ¹ Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Maret 2024
² Menjabat sejak tanggal 19 Maret 2024
³ Berhenti menjabat sejak tanggal 23 Juli 2024
⁴ Menjabat sejak tanggal 23 Juli 2024
⁵ Berhenti menjabat sejak tanggal 14 November 2024
⁶ Menjabat sejak tanggal 14 November 2024

Remarks

- ¹ Resigned as of March 19, 2024
² Appointed as of March 19, 2024
³ Resigned as of July 23, 2024
⁴ Appointed as of July 23, 2024
⁵ Resigned as of November 14, 2024
⁶ Appointed as of November 14, 2024

Alasan Perubahan komposisi Dewan Komisaris adalah demi kepentingan terbaik kegiatan usaha dalam kelancaran operasional Perusahaan.

The reason for the changes in the composition of the Board of Commissioners was to serve the best interests of business activities and the smooth operation of the Company.

Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors In and After the 2024 Fiscal Year

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Board of Commissioners' Composition After the 2024 Fiscal Year

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya Laporan Tahunan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan.

After the period of this Annual Report ended until its ratification, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

Direksi

Board of Directors

Informasi Perubahan Komposisi Direksi pada Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Board of Directors' Composition in the 2024 Fiscal Year

Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perusahaan, namun terjadi pengangkatan kembali dua Direksi, berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham RUPS No.SK-270/MBU/11/2024 tanggal 14 November 2024, RUPS mengangkat Sdr. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sdri. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan. Dengan pengangkatan ini, maka susunan Direksi PLN adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors. However, two members of the Board of Directors were reappointed based on the Resolution of the GMS No. SK-270/MBU/11/2024 dated November 14, 2024, through which the GMS reappointed Mr. Darmawan Prasodjo as President Director and Ms. Sinthya Roesly as Director of Finance. With these appointments, the composition of PLN's Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director
Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance
Yusuf Didi Setiarto	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Director of Legal and Human Capital Management
Evy Haryadi	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning
Edi Srimulyanti	Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce
Hartanto Wibowo	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Director of Corporate Planning and Development
Wiluyo Kusdiharto	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Project Management and Renewable Energy
Adi Lumakso	Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Generation Management
Adi Priyanto	Direktur Distribusi Director of Distribution
Suroso Isnandar	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management

Informasi Perubahan Komposisi Direksi Setelah Tahun Buku 2024

Information on Changes in the Board of Directors' Composition After the 2024 Fiscal Year

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya Laporan Tahunan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

After the period of this Annual Report ended until its ratification, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors.



Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development

Komposisi Pegawai Holding, Subholding, dan Entitas Anak PLN

Employee Composition of Holdings, Subholdings, and Subsidiaries of PLN

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Pegawai Holding (PLN) Employees of Holding (PLN)	38.289	38.542	42.151
Pegawai Subholding dan Entitas Anak: Employees of Subholding and Subsidiaries:			
PT PLN Indonesia Power	5.407	5.393	4.195
PT PLN Nusantara Power	4.940	4.842	2.970
PT Energi Primer Indonesia	333	280	117
PT Indonesia Comnets Plus	1.009	873	782
PT PLN Batam	528	513	500
PT PLN Nusa Daya	228	155	112
PT Haleyora Power	239	186	169
PT PLN Enjiniring	308	304	269
PT Energy Management Indonesia	30	34	40
PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara	39	34	37
Majapahit Holding B.V (MHBV)	0	0	0
Jumlah Pegawai Subholding dan Entitas Anak Number of Employees in Subholding and Subsidiaries	13.146	12.703	9.326
Pegawai Alihdaya Outsourced Employees	103.531	101.879	110.588
Jumlah Keseluruhan Total Number	154.966	153.124	162.0657

Berikut jumlah dan komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, level jabatan, penugasan dan status ketenagakerjaan:

The following are number and composition of the Company's employees categorized by gender, education level, age, job level, assignment, and employment status:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Perempuan Female	8.084	8.070	8.327
Laki-laki Male	30.205	30.472	33.824
Jumlah Total	38.289	38.542	42.151

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penugasan

Employee Composition by Assignment

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Unit Bisnis PLN PLN Business Unit	34.085	34.735	34.735
PLN Kantor Pusat PLN Head Office	4.204	3.807	3.807
Jumlah Total	38.289	38.542	38.542

Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
≤ D2 Diploma 2 or below	10.586	11.461	14.116
D3 Diploma 3	8.645	9.079	9.833
S1 Bachelor's Degree	17.232	16.321	16.626
S2 Master's Degree	1.806	1.669	1.564
S3 Doctoral Degree	20	12	12
Jumlah Total	38.289	38.542	42.151

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
≤ 25	1.765	2.981	4.941
26 – 30	11.433	12.620	14.259
31 – 35	11.414	10.138	9.804
36 – 40	6.616	5.588	5.274
41 – 45	2.559	2.090	1.564
46 – 50	1.038	2.046	2.046
> 50	3.464	3.795	4.263
Jumlah Total	38.289	38.542	42.151

Komposisi Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition by Position

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Fungsional Functional	23.604	24.034	27.298
Supervisi Dasar Basic Supervisor	8.880	8.436	8.933
Supervisi Atas Top Supervisor	3.476	3.418	3.658
Manajemen Dasar Basic Management	1.758	1.684	1.683
Manajemen Menengah Middle Management	471	445	446
Manajemen Atas Top Management	100	109	114
Jumlah Total	38.289	38.542	42.151

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Employee Composition by Employment Status

(Dalam satuan orang) (In Person)

Uraian Description	2024	2023	2022
Permanen Permanent	38.283	38.535	42.144
Kontrak Contract	6	7	7
Jumlah Total	38.289	38.542	42.151



Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Employee Competency Development

Kebijakan Pengembangan Pegawai

Employee Development Policy

Sebagai perusahaan energi nasional dengan skala operasional yang luas dan kompleks, PLN didukung oleh sumber daya manusia yang andal, profesional, dan tersebar di seluruh Indonesia. Komposisi pegawai PLN mencerminkan keberagaman dalam hal usia, latar belakang pendidikan, gender, dan kompetensi yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung transformasi bisnis dan pelayanan kepada pelanggan. PLN secara konsisten mengelola dan memetakan struktur pegawai berdasarkan kelompok usia, golongan jabatan, tingkat pendidikan, dan distribusi wilayah kerja guna memastikan kecukupan, kesesuaian, serta optimalisasi talenta sesuai kebutuhan organisasi. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan SDM berbasis data (*human capital analytics*) yang mendukung efektivitas perencanaan tenaga kerja dan program pengembangan berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan kompetensi pegawai PLN mengacu pada Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor: 0046.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Sistem Manajemen Pengembangan Pegawai di Lingkungan PT PLN (Persero). Program Pengembangan Pegawai PLN dikelola oleh PLN Pusdiklat terdiri dari program Pembelajaran dan *Knowledge Management*.

As a national energy company with a broad and complex operational scale, PLN is supported by reliable, professional human resources assigned across Indonesia. The composition of PLN's employees reflects diversity in terms of age, educational background, gender, and competence, which is a major strength in supporting business transformation and customer service. PLN consistently manages and maps its employee structure based on age, position, education, and place of assignment to ensure adequacy, alignment, and optimal utilization of talent in accordance with organizational needs. This approach forms part of PLN's data-driven human capital management strategy (*human capital analytics*), which supports effective workforce planning and continuous development programs. The competency management policy of PLN is governed by the Implementing Regulation of PT PLN (Persero) No. 0046.E/DIR/2023 on the Standard Operating Procedures for the Employee Development Management System in PT PLN (Persero). PLN's employee development programs are managed by PLN's Training Center, which consists of Learning and Knowledge Management initiatives.

Realisasi Pengembangan Pegawai Tahun 2024

Realization of Employee Development in 2024

PLN senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia. Setiap pegawai, tanpa memandang latar belakang, posisi, atau jenjang jabatan, diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Hal ini menjadi wujud komitmen PLN dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sekaligus mendukung pertumbuhan karier pegawai secara berkelanjutan.

PLN upholds the principle of equality in human capital development. Every employee, regardless of background, position, or job level, is granted equal opportunity to participate in educational, training, and competency development programs. This reflects PLN's commitment to fostering an inclusive work environment while supporting sustainable career growth.

Pada tahun 2024, sebanyak 42.234 pegawai telah mengikuti program pelatihan, meningkat sekitar 9,09% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 38.715 pegawai. Sejalan dengan itu, total jam pelatihan yang diikuti mencapai 3.616.254 jam, atau meningkat sekitar 9,17% dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 3.312.404 jam.

In 2024, a total of 42,234 employees participated in training programs, an increase of approximately 9.09% compared to the previous year's participants of 38,715. In parallel, the total training hours reached 3,616,254 hours, an increase of approximately 9.17% from 2023 of 3,312,404 hours.

Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development

Rata-rata jam pelatihan per pegawai juga menunjukkan tren positif, yakni sebesar 85,62 jam per orang, sedikit meningkat dibandingkan dengan 85,56 jam per orang di tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan komitmen PLN dalam menjaga konsistensi pengembangan kapasitas pegawai secara berkelanjutan. Uraian terkait jenis pelatihan yang diikuti pegawai PLN selama tahun 2024 lebih lanjut disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

The average training hours per employee also showed a positive trend, reaching 85.62 hours per person, slightly increasing from 85.56 hours per person in the previous year. This improvement reflects PLN's commitment to consistent capacity building for its workforce. Details regarding the types of training programs undertaken by PLN employees throughout 2024 are further presented in the Sustainability Report.

Anggaran Pengembangan Kompetensi Pegawai

Budget for Employee Competency Development

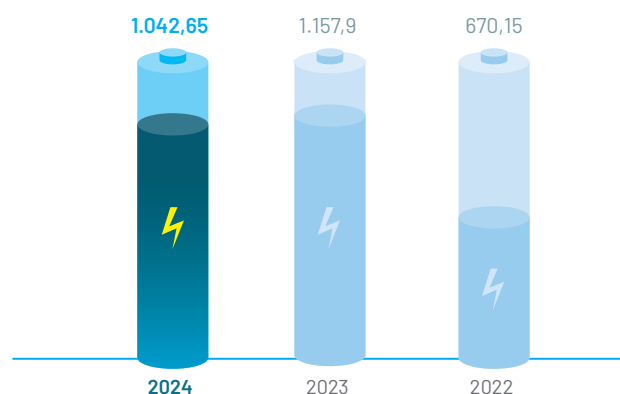
Dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, PLN secara konsisten menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sepanjang tahun 2024. Program pengembangan ini mencakup pelatihan prajabatan, pelatihan profesi, pelatihan penjenjangan, pelatihan penunjang, pelatihan menjelang masa purnabakti, serta pelatihan strategis untuk mendukung peran-peran kunci di organisasi.

In its ongoing efforts to enhance the quality of its human capital, PLN consistently implemented various education and training programs for employees throughout 2024. These development programs included pre-service training, professional training, career-level training, supporting training, pre-retirement training, and strategic training to support key roles within the organization.

Komitmen terhadap pengembangan kompetensi pegawai tercermin dari alokasi anggaran yang meningkat signifikan. Sepanjang tahun 2024, total investasi untuk program diklat mencapai Rp1.042,65 miliar. Realisasi anggaran pengembangan kompetensi pegawai dalam 3 (tiga) tahun terakhir, terlihat dalam grafik berikut:

The Company's commitment to employee competency development is evident in the significantly increased budget allocation. Throughout 2024, total investment in training programs reached Rp1,042.65 billion. The realization of the employee competency development budget over the past 3 (three) years is illustrated in the following chart:

Biaya Pendidikan dan Pelatihan (Rp miliar)
Education and Training Expenses (Rp billion)





Profil Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Profile of Corporate Human Capital and Employee Competency Development

Rencana Pengembangan Kompetensi pegawai Tahun 2025

Employee Competency Development Plan for 2025

Program pengembangan kompetensi di PLN dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri energi masa depan. Seluruh kegiatan pengembangan disusun dengan mengacu pada kebutuhan organisasi, hasil *talent mapping*, serta arah transformasi bisnis PLN.

The competency development program at PLN is implemented continuously as part of a long-term strategy to ensure the availability of superior, adaptive human capital ready to face the challenges of the future energy industry. All development activities are designed with reference to organizational needs, talent mapping results, and PLN's business transformation direction.

Tabel Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2025

Table of Employee Competency Development Plan for 2025

Jenis Pengembangan Kompetensi Competency Development Type	Jumlah Judul Number of Titles	Target Peserta Target Participants
Pembelajaran Education	1.167	71.482
Sertifikasi Certification	513	10.721
Jumlah Total	1.680	82.203

Kebijakan Perencanaan Suksesi Manajemen Kunci

Key Management Succession Planning Policy

PLN memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan kepemimpinan melalui perencanaan suksesi manajemen kunci secara sistematis dan terarah. Sebagai bentuk komitmen tersebut, PLN telah menetapkan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor: 0050.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Sistem Manajemen Talenta dan Pegawai, yang ditetapkan pada 21 Desember 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya talenta internal yang siap menduduki posisi strategis di masa depan, serta menjaga kesinambungan operasional dan pencapaian visi jangka panjang perusahaan. Kebijakan ini juga menjadi landasan formal dalam pelaksanaan proses manajemen talenta, termasuk identifikasi, pengembangan, dan pemetaan talenta potensial yang dapat diproyeksikan sebagai calon pengisi posisi manajemen kunci.

PLN is strongly committed to leadership continuity through a structured and systematic key management succession planning process. As a manifestation of this commitment, PLN has established Implementation Regulation of PT PLN (Persero) Number: 0050.E/DIR/2023 concerning Standard Procedures for Talent and Employee Management Systems, enacted on 21 December 2022. This policy aims to ensure the availability of internal talent who are ready to assume strategic positions in the future, while maintaining operational continuity and the achievement of the Company's long-term vision. It also serves as a formal foundation for the implementation of talent management processes, including the identification, development, and mapping of high-potential talent projected to fill key management positions.

Melalui sistem ini, PLN melaksanakan program pengembangan kompetensi, asesmen potensi dan kinerja, serta pelatihan kaderisasi secara berjenjang untuk memastikan kesiapan talenta dalam mendukung transformasi perusahaan menuju penyedia layanan energi berkelas dunia. Kebijakan suksesi ini juga selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya manusia berkelanjutan di lingkungan PLN.

Through this system, PLN implements various programs such as competency development, potential and performance assessment, as well as structured leadership training to prepare talents in supporting the Company's transformation into a world-class energy provider. This succession policy aligns with good corporate governance principles and forms an integral part of PLN's sustainable human resource management strategy.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Structure and Composition

Sampai dengan 31 Desember 2024, berdasarkan Anggaran Dasar PLN Pasal 5 ayat 1 dan 2, semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, Perseroan hanya mengaku 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

Until December 31, 2024, according to PLN's Articles of Association, Article 5, paragraphs 1 and 2, all shares issued by the Company are registered shares. The Company recognizes only one individual or 1 (one) legal entity as the owner of 1 (one) share.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders



PLN merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai pemegang saham utama dan pengendali. Pemegang Saham pengendali adalah pemilik saham mayoritas dan memiliki peran untuk mengendalikan kebijakan yang akan diambil oleh manajemen Perusahaan. Oleh karena itu, PLN tidak memiliki struktur kepemilikan berjenjang (*pyramidal ownership*) dan tidak menerbitkan saham ekuitas. Dengan demikian kebijakan mengenai struktur modal mengikuti arahan dan kebijakan dari Kementerian BUMN termasuk yang berkaitan dengan penerbitan surat berharga untuk memperkuat struktur modal Perusahaan.

PLN is an SOE whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, as the major and controlling shareholder. The controlling shareholder is the majority shareholder who holds the authority to control the policies adopted by the Company's management. Therefore, PLN does not have a pyramidal ownership structure and does not issue equity shares. Consequently, the policy regarding capital structure follows the directives and policies of the Ministry of SOEs, including those related to the issuance of securities to strengthen the Company's capital structure.

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	Jumlah Saham Number of Shares	%
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	150.536.096	100%

Informasi kepemilikan saham PLN pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:*) Satu lembar saham senilai Rp1.000.000,-

Information on PLN's share ownership as of December 31, 2024, is as follows: *) One share is valued at Rp1,000,000.

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Structure and Composition

Komposisi Kepemilikan Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih 5%

Share Ownership Composition with Ownership of 5% or More

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi kepemilikan saham PLN dengan persentase 5% atau lebih.

As of December 31, 2024, all of the PLN shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information on PLN share ownership with a percentage of 5% or more by other parties.

Komposisi Kepemilikan Saham Oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership Composition by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham PLN, baik berupa kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan oleh Menteri BUMN yang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, tidak terdapat pengaturan atau pemberian saham dalam struktur kepemilikan PLN.

As of December 31, 2024, no members of the Board of Commissioners or Board of Directors own PLN shares, either directly or indirectly. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the Minister of SOEs, representing the Government of Indonesia as the shareholder, through the General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism. Therefore, there is no arrangement or issuance of shares within PLN's ownership structure.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Public Shareholder Group with Ownership of Less Than 5%

Sampai dengan 31 Desember 2024, PLN tidak mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dan seluruh saham PLN dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi kepemilikan saham PLN oleh masyarakat dengan persentase kurang dari 5%.

As of December 31, 2024, PLN's shares are not listed on the Indonesia Stock Exchange, and all shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, information on PLN share ownership by the public with less than 5% ownership is not available.

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Ownership Percentage, Based on Classification

Sampai dengan 31 Desember 2024, kepemilikan saham PLN seluruhnya dimiliki oleh institusi lokal yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

As of December 31, 2024, PLN's share ownership is entirely held by a local institution, namely the Government of the Republic of Indonesia located in Indonesia, as detailed in the following table:

Kepemilikan saham Share Ownership Type	Jumlah dan Persentase Kepemilikan Saham Number and Percentage of Share Ownership
Kepemilikan institusi lokal Local Institutional Ownership	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia
Kepemilikan institusi asing Foreign Institutional Ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu lokal Local Individual Ownership	Tidak ada None
Kepemilikan individu asing Foreign Individual Ownership	Tidak ada None

Keanggotaan dalam Asosiasi

Membership in Associations

PLN turut aktif berkontribusi dalam keanggotaan beberapa asosiasi dengan maksud menunjang kegiatan operasi Perseroan saat ini maupun untuk mendukung keberlanjutan di masa yang akan datang.

PLN actively contributes through its membership in several associations, with the objective of supporting the Company's current operational activities as well as promoting long-term sustainability.

Keanggotaan Asosiasi PLN

PLN Association Membership



UNGC
United Nations Global Compact



Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia
Indonesian Electrical Power Society



Heads of ASEAN Power Utilities Authorities



AESIEAP
Association of the Electricity Supply Industry of East Asian and Western Pacific



AWS
Alliance for Water Stewardship



Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
Indonesia Renewable Energy Society



INDONESIAN HYDROPOWER ASSOCIATION (INAHA)



World Energy Council



Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik PLN

Information on Public Accounting Firm and Public Accountant of PLN

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 agenda 4, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit Laporan Keuangan Perusahaan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

In accordance with the resolution of the Annual GMS held on July 22, 2024, agenda item 4, the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year was delegated separately to the Minister of SOEs as the GMS, based on the recommendation of the Board of Commissioners.

Selanjutnya Pemegang Saham pada tanggal 30 September 2024 Nomor S-471/MBU/09/2024 perihal Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun Buku 2024, Pemegang Saham mengeluarkan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

Subsequently, the Shareholder on September 30, 2024, through Letter No. S-471/MBU/09/2024 on the Approval of Appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Financial Statements of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for the 2024 Fiscal Year, the Shareholder issued the following designation of the Public Accounting Firm (KAP):

Nama KAP KAP Name	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia)	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia)
Nama AP AP Name	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	Yanto, S.E., M.Ak., CPA
Alamat KAP KAP Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Lantai 34, 36-43 Jakarta 12920, Indonesia ☎ +62 21 50992901/31192901 📠 +62 21 52905555/52905050 🌐 www.pwc.com/id	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Lantai 34, 36-43 Jakarta 12920, Indonesia ☎ +62 21 50992901/31192901 📠 +62 21 52905555/52905050 🌐 www.pwc.com/id
Periode Penugasan KAP KAP Assignment Period	2 (dua)	2 (two)
Periode Penugasan AP AP Assignment Period	5 (lima)	5 (five)
Jasa Audit Audit Services	1. Audit umum atas laporan keuangan (untuk Dana Pensiun, audit umum atas laporan aset <i>neto</i> dan laporan perubahan aset <i>neto</i> ; 2. Audit Kepatuhan sesuai PSA No. 62; 3. Audit atas Laporan Keuangan Program Pendanaan UMK; 4. Audit atas <i>Project Financial Statement Loan</i> ADB, IsDB, AIIB dan Laporan Perikatan Asuransi;	1. General audit of the financial statements (for the Pension Fund, a general audit of the statement of net assets and changes in net assets); 2. Compliance audit in accordance with PSA No. 62; 3. Audit of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program; 4. Audit of the Project Financial Statements for loans from ADB, IsDB, AIIB, and Assurance Engagement Reports;
Jasa Non-Audit Non-Audit Services	1. Prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja; 2. Prosedur yang disepakati atas Laporan KPPK, Evaluasi Kinerja per Direktorat, EBITDA Margin Regional Regional JMB, Paket Informasi Keuangan Konsolidasian Perusahaan; 3. Prosedur yang disepakati atas <i>financial covenant ratio</i> dan perhitungan CICR.	1. Agreed-upon procedures on the Performance Evaluation Report; 2. Agreed-upon procedures on the KPPK Report, Directorate-level Performance Evaluation, Regional EBITDA Margin for JMB Region, and the Company's Consolidated Financial Information Package; 3. Agreed-upon procedures on the financial covenant ratio and CICR calculation.
Fee Audit dan Fee Non Audit pada PLN dan Entitas Anak Audit Fees and Non-Audit Fees for PLN and Subsidiaries	PLN	
	Audit atas laporan keuangan konsolidasian Audit of consolidated financial statements	Rp14.111.958.000
	AUP KPPK AUP KPPK	Rp100.000.000
	Jasa audit dan non audit lainnya (termasuk audit atas PUMK) Other audit and non-audit services (including audits of PUMK)	Rp2.020.292.000
	Dana Pensiun PLN PLN Pension Fund	Rp902.241.000
	Entitas Anak Subsidiary	Rp21.744.408.000
	Biaya langsung dan non personel dalam kota Direct and non-personnel costs in the city	Rp1.046.101.000
	Jumlah Amount	Rp39.925.000.000
	PPN VAT	Rp4.391.750.000
	Total setelah PPN Total after VAT	Rp44.316.750.000

Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik PLN

Information on Public Accounting Firm and Public Accountant of PLN

Berikut Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dalam 6 (enam) tahun terakhir:

The following is information on Public Accounting Firms and Public Accountants collaborated with PT PLN (Persero) in the last 6 (six) years:

Daftar Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2019-2024

List of Public Accountants and Public Accounting Firms in 2019-2024

Tahun	Kantor Akuntan Publik & Nomor Izin Public Accounting Firm and License Number	Akuntan Publik & Nomor Izin Public Accountant and License Number	Periode KAP KAP Period	Periode AP AP Period	Jasa Audit Audit Services	Opini Audit Keuangan Financial Audit Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp Miliar) Audit Service Fee (Rp Billion)
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	2	5	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Financial Statements and implementation of the Micro and Small Business (UMK) Funding Programs.	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified opinion in all material respects	44,0
2023	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	1	4	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Financial Statements and implementation of the Micro and Small Business (UMK) Funding Programs.	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified opinion in all material respects	46,62
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	3	3	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Financial Statements and implementation of the Micro and Small Business (UMK) Funding Programs.	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified opinion in all material respects	37,46
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	2	2	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report.	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified opinion in all material respects	35,05
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Yanto, S.E., M.Ak., CPA	1	1	Audit Laporan Keuangan PLN dan entitas anak; Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Audit of the Financial Statements of PLN and its subsidiaries; Partnership and Community Development Program Report.	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified opinion in all material respects	27,5



Informasi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik PLN

Information on Public Accounting Firm and Public Accountant of PLN

Pengawasan dan Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Tugas KAP

Supervision and Evaluation of the Effectiveness of KAP Duties

Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan tugas Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan standar profesional dan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini mencakup evaluasi atas kualitas proses audit yang dilakukan, untuk menjamin akurasi, transparansi, dan kredibilitas hasil laporan yang dihasilkan oleh KAP.

Secara paralel, Direksi bersama Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) juga mengambil langkah proaktif dalam memantau tindak lanjut atas temuan yang disampaikan oleh KAP. Melalui koordinasi intensif dan rapat rutin antara Direksi dan Kepala SPI, PLN memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan diterapkan dengan tepat waktu dan mendukung peningkatan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Kepala Satuan Pengawasan Intern telah melakukan rapat dengan agenda pembahasan terkait:

1. Kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerja audit;
2. Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik;
3. Hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal; dan
4. Tindak lanjut temuan hasil audit KAP.

Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, turut memberikan rekomendasi strategis dalam penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2024. Pada tanggal 20 Agustus 2024, Komite Audit mengusulkan penunjukan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan PT PLN (Persero) dan Entitas Anak. Usulan ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, mencerminkan proses tata kelola yang transparan dan akuntabel.

The Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, plays an active role in ensuring that the duties of the Public Accounting Firm (KAP) are carried out in accordance with applicable professional standards and regulations. This supervision includes evaluating the quality of the audit process to ensure the accuracy, transparency, and credibility of the reports issued by the KAP.

In parallel, the Board of Directors and the Head of the Internal Audit Unit (SPI) also take proactive measures to monitor the follow-up of findings reported by the KAP. Through intensive coordination and regular meetings between the Board of Directors and the Head of SPI, PLN ensures that each audit recommendation is implemented in a timely manner, contributing to improved corporate governance.

In 2024, the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, and Head of Internal Audit held meetings with the following agenda:

1. Alignment of audit progress completion with the audit work plan;
2. Compliance of the audit implementation with public accountant professional standards;
3. External audit results and the quality of external audit recommendations; and
4. Follow-up on KAP audit findings.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, also provided strategic recommendations for the appointment of the KAP for the 2024 Fiscal Year. On August 20, 2024, the Audit Committee proposed the appointment of KAP to audit the Financial Statements of PT PLN (Persero) and its Subsidiaries. This proposal serves as the basis for the Shareholder's decision-making, reflecting a transparent and accountable governance process.

Lembaga Profesi Penunjang Perseroan

Professional Supporting Institutions of the Company

Lembaga Profesi Professional Institutions	Alamat Address
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	
Kantor Akuntan Publik Rintis, Ju adi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia) Kantor Akuntan Publik Rintis, Ju adi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers Indonesia)	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia
Biro Administrasi Efek Share Registrar	
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Wali Amanat Obligasi Bond Trustees	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta
Deutsche Bank Trust Company Americas	60 Wall Street, MS: NYC 60-1630, New York, New York 10005
Agen Fiskal Fiscal Agent	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	3-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan
Perusahaan Pemeringkat Efek Rating Agencies	
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	Panin Tower Senayan City 17 th floor, Jl. Asia Afrika, Lot. 19 Jakarta
Moody's Investor Service Singapore Pte. Limited	50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore, 048623
Standard and Poor's Singapore Pte.	Ltd 12 Marina Boulevard #23-01 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore 018982
Fitch Ratings Ltd.	30 North Colonnade London E14 5GN
Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)	Jiji Press Building 5-15-8, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan
Bursa Efek Stock Exchange	
PT Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190
Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX)	2 Shenton Way, #02-02 SGX Centre 1, Singapore 068804
Notaris Notary	
Lenny Janis, SH	Jln. Hang Lekir 9 No.1 Jakarta 12120
Muhammad Hanafi, SH	Komp. Rukan Tendean Square No. 26 Jl. Walter Mongonsidi 122-124, Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Konsultan Hukum Legal Consultant	
Nahr Murdhono	Mitra Building 9 th Floor Suite 902 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930
UMBRA	Telkom Landmark Tower Tower 2, 49 th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710
Azwar Hadisupani Rum & Partners	Menara Palma Lt. 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta
Tumbuan & Partners	Jl. Gandaria Tengah III No. 8 RT 3/RW 1 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12240
Kantor Hukum Anullah & Partners	Sampoerna Strategic Square Tower B 19 th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
Citra Lentera Hukum Gedung AKABA	Jl. Sunan Kalijaga No. 63 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
Feri Samad	Perkantoran Royal Palace Blok C No. 10 Jl. Prof Soepomo No. 178 Jakarta 12870



Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan

Lembaga Profesi Professional Institutions	Alamat Address
Hadiputranto Hadinoto & Partner (HHP)	Pacific Century Palace, level 55 SCBD District Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hogan Lovells Lee & Lee 50	Coller Quay 20-01 OVE Bayfront, Singapore 049321
Karsa Mandiri	Kindo Square Blok C-8, Jl. Duren Tiga Raya No. 101, Jakarta Selatan 12790
Alfonso Law Firm	The H Tower Lt. 15 Suite G, Jl H.R Rasuna Said Kav. 20 Kuningan, Jakarta Selatan
JANIS & ASSOCIATES	Royal Palace Blok C11, Jl. Prof Soepomo No 178A, Jakarta Selatan
JTAsyer Law Firm	Kompleks Wijaya Graha Puri Blok 65, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Krismandro Family Lawyer & Partner	Jl. Kapten A.Riva 1006 Ilir, Barat I Palembang
LBH Adil	Jl. Gusdur Kawasan Pertokoan SimPANG Tiga Blok E-16, Jombang
Melli Darsa & Co	Gedung WTC Lt. 3. Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31. Jakarta
Nurruddin & Partners	Gedung Arva Lt. 2, Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat
Reggie Tentero & Partners	Plaza Asia Lt. 3 Suite 3D, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Jakarta Selatan
Guido Hidayanto & Partners	World Trade Center 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta
Maramis, Purba, Santi, Singara Law Firm	Sequis Center Lantai 7, Unit 706, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta
Dede Sri Astuti & Partner	Hanurata Graha Lt. 2 No. 67-69, Jakarta
Ramlan & Partner Puri	Radensa Blok A, No. 03, Jl. Raden Saleh, Kec Sukmajaya, Depok
Forte Law Firm	Menara Kuningan Lt. 30 B-C, Jl. H-R. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta Selatan

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham

Share Listing and Issuance Chronology

PLN tidak pernah melakukan penawaran umum perdana saham dan tidak memperdagangkan saham pada bursa manapun dan seluruh sahamnya dimiliki oleh negara melalui pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak ada perdagangan saham di bursa. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait kronologi penerbitan dan pencatatan saham PLN, mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah tindakan korporasi, dan nama bursa tempat saham PLN diperdagangkan.

PLN has never conducted an initial public offering of shares and does not trade shares on any exchange and all shares are wholly owned by the state through the Government of the Republic of Indonesia, thus, there is no trading activity of PLN shares on any exchange. Consequently, there is no available information regarding the chronology of PLN's share issuance and listing, including the year of issuance, total shares, par value, offering price for each corporate action, number of shares listed following such corporate actions, or the name of the exchange where PLN shares are traded.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2024, PLN telah beberapa kali melakukan penerbitan obligasi dan sukuk, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Informasi mengenai obligasi dan sukuk yang belum jatuh tempo dan belum lunas serta obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada 2024 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, PLN has conducted several issuances of bonds and sukuk, both in rupiah and foreign currencies, in domestic and international markets. Information regarding bonds and sukuk that have not matured and have not been paid off and bonds and sukuk that mature in 2024 are as follows:

Obligasi dan Sukuk yang Belum Jatuh Tempo dan Belum Lunas

Bonds and Sukuk Not Yet Matured and Not Yet Paid-Off

Pada 31 Desember 2024, PLN memiliki beberapa obligasi dan sukuk dalam mata uang rupiah yang belum jatuh tempo, dengan nilai Rp23,7 triliun, dengan tenor 5 sampai dengan 20 tahun. Seluruh obligasi dan sukuk tersebut diterbitkan secara bertahap sejak 11 Juli 2017 sampai dengan 8 September 2020. Selain itu, PLN memiliki obligasi dalam mata uang asing yang belum jatuh tempo pada 31 Desember 2024 dengan nilai US\$10,1 miliar, EUR1 miliar, dan JPY1 miliar.

As of December 31, 2024, PLN has several bonds and sukuk denominated in rupiah that have not yet matured, with a value of Rp23.7 trillion, with tenors of 5 to 20 years. All bonds and sukuk were issued in stages from July 11, 2017, to September 8, 2020. In addition, PLN has foreign currency bonds that have not yet matured on December 31, 2024, with a value of USD10.1 billion, EUR1 billion, and JPY1 billion.

Obligasi dan Sukuk yang Jatuh Tempo Pada 2024

Bonds and Sukuk Matured in 2024

Secara kumulatif, nilai obligasi dan sukuk PLN dengan mata uang rupiah yang jatuh tempo pada 2024 adalah mencapai Rp3,56 triliun. Pengungkapan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Cumulatively, the total value of PLN's rupiah-denominated bonds and sukuk maturing in 2024 amounted to Rp3.56 trillion. The disclosure regarding this matter is as follows:

No	Nama Obligasi Name of Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon (%)	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating
1	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Series B	169,000,000,000.00	8.10%	7	11-Jul-17	11-Jul-24	
2	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Series B	201,000,000,000.00	7.50%	7	3-Nov-17	3-Nov-24	
3	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series B	1,212,000,000,000.00	9.10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	
4	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series B	263,000,000,000.00	9.10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	
5	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series A	637,000,000,000.00	8.000%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	



Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Nama Obligasi Name of Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon (%)	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating
6	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series A	274,000,000,000.00	8.000%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	
7	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series A	795,700,000,000.00	7.90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	
8	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series A	6,500,000,000.00	7.90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	

Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi

Overview of Bonds, Sukuk, or Convertible Bonds

Obligasi Domestik berdenominasi Rupiah

Domestic Bonds Denominated in Rupiah

No	Nama Obligasi Domestik Name of Domestic Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating (PEFINDO)
3	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Series B	169	8.10%	7	11-Jul-17	11-Jul-24	idAAA
4	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri C Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Series C	1,217	8.50%	10	11-Jul-17	11-Jul-27	idAAA
5	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase I Series B	214	8.50%	10	11-Jul-17	11-Jul-27	idAAA(sy)
6	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Series B	201	7.50%	7	03-Nov-17	03-Nov-24	idAAA
7	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Series C	800	8.20%	10	03-Nov-17	03-Nov-27	idAAA
8	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri D Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Series D	1,093	8.70%	15	03-Nov-17	03-Nov-32	idAAA
9	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase II Series B	121	8.20%	10	03-Nov-17	03-Nov-27	idAAA(sy)
10	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase II Series C	490	8.70%	15	03-Nov-17	03-Nov-32	idAAA(sy)
11	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Series B	10	6.80%	7	22-Feb-18	22-Feb-25	idAAA
12	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Series C	341	7.25%	10	22-Feb-18	22-Feb-28	idAAA
13	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Series D	362	8.20%	15	22-Feb-18	22-Feb-33	idAAA
14	Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri E Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Series E	1,365	8.75%	20	22-Feb-18	22-Feb-38	idAAA
15	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Series B	88	7.25%	10	22-Feb-18	22-Feb-28	idAAA(sy)

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Nama Obligasi Domestik Name of Domestic Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating (PEFINDO)
16	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Series C	57.5	8.20%	15	22-Feb-18	22-Feb-33	idAAA(sy)
17	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Series D	449	8.75%	20	22-Feb-18	22-Feb-38	idAAA(sy)
18	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Series B	442	8.35%	7	10-Jul-18	10-Jul-25	idAAA
19	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Series C	138	8.40%	10	10-Jul-18	10-Jul-28	idAAA
20	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Series D	281	8.90%	15	10-Jul-18	10-Jul-33	idAAA
21	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Series E	339	9.00%	20	10-Jul-18	10-Jul-38	idAAA
22	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Series B	150	8.35%	7	10-Jul-18	10-Jul-25	idAAA(sy)
23	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Series C	258	8.40%	10	10-Jul-18	10-Jul-28	idAAA(sy)
24	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Series D	105	8.90%	15	10-Jul-18	10-Jul-33	idAAA(sy)
25	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Series E	110	9.00%	20	10-Jul-18	10-Jul-38	idAAA(sy)
26	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Series A	210	8.65%	5	10-Oct-18	10-Oct-23	idAAA
27	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Series B	483	9.00%	7	10-Oct-18	10-Oct-25	idAAA
28	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Series C	78	9.10%	10	10-Oct-18	10-Oct-28	idAAA
29	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Series D	15	9.30%	15	10-Oct-18	10-Oct-33	idAAA
30	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Series E	46	9.65%	20	10-Oct-18	10-Oct-38	idAAA
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Series A	114	8.65%	5	10-Oct-18	10-Oct-23	idAAA(sy)
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Series B	45	9.00%	7	10-Oct-18	10-Oct-25	idAAA(sy)
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Series C	15	9.10%	10	10-Oct-18	10-Oct-28	idAAA(sy)
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Series D	50	9.65%	20	10-Oct-18	10-Oct-38	idAAA(sy)
35	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series B	1,212	9.10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	idAAA
36	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series C	183	9.35%	7	19-Feb-19	19-Feb-26	idAAA
37	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series D	211	9.60%	10	19-Feb-19	19-Feb-29	idAAA



Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Nama Obligasi Domestik Name of Domestic Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating (PEFINDO)
38	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series E	263	9.80%	15	19-Feb-19	19-Feb-34	idAAA
39	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Series F	155	9.95%	20	19-Feb-19	19-Feb-39	idAAA
40	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series B	263	9.10%	5	19-Feb-19	19-Feb-24	idAAA(sy)
41	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series C	204	9.35%	7	19-Feb-19	19-Feb-26	idAAA(sy)
42	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series D	45	9.60%	10	19-Feb-19	19-Feb-29	idAAA(sy)
43	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series E	60	9.80%	15	19-Feb-19	19-Feb-34	idAAA(sy)
44	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Seri F Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Series F	28	9.95%	20	19-Feb-19	19-Feb-39	idAAA(sy)
45	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series A	637	8.00%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	idAAA
46	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series B	315.25	8.50%	7	1-Aug-19	1-Aug-26	idAAA
47	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series C	346	8.75%	10	1-Aug-19	1-Aug-29	idAAA
48	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series D	150	8.95%	15	1-Aug-19	1-Aug-34	idAAA
49	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Series E	75	9.10%	20	1-Aug-19	1-Aug-39	idAAA
50	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series A	100	8.00%	5	1-Aug-19	1-Aug-24	idAAA(sy)
51	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series B	45	8.50%	7	1-Aug-19	1-Aug-26	idAAA(sy)
52	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series C	60	8.75%	10	1-Aug-19	1-Aug-29	idAAA(sy)
53	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series D	40	8.95%	15	1-Aug-19	1-Aug-34	idAAA(sy)
54	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Series E	20	9.10%	20	1-Aug-19	1-Aug-39	idAAA(sy)
55	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series A	795.7	7.90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	idAAA
56	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series B	445	8.40%	7	1-Oct-19	1-Oct-26	idAAA
57	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series C	6.2	8.60%	10	1-Oct-19	1-Oct-29	idAAA
58	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series D	166	9.40%	15	1-Oct-19	1-Oct-34	idAAA
59	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Series E	500	9.90%	20	1-Oct-19	1-Oct-39	idAAA

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Nama Obligasi Domestik Name of Domestic Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating (PEFINDO)
60	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series A	6.5	7.90%	5	1-Oct-19	1-Oct-24	idAAA(sy)
61	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series B	10	8.40%	7	1-Oct-19	1-Oct-26	idAAA(sy)
62	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series C	92	8.60%	10	1-Oct-19	1-Oct-29	idAAA(sy)
63	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series D	135	9.40%	15	1-Oct-19	1-Oct-34	idAAA(sy)
64	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Series E	554	9.90%	20	1-Oct-19	1-Oct-39	idAAA(sy)
65	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Series A	540.63	7.20%	5	18-Feb-20	18-Feb-25	idAAA
66	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Series B	672.5	7.70%	7	18-Feb-20	18-Feb-27	idAAA
67	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Series C	544.25	8.00%	10	18-Feb-20	18-Feb-30	idAAA
68	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Series D	1,459	8.70%	15	18-Feb-20	18-Feb-35	idAAA
69	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri E Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Series E	1,596.05	9.05%	20	18-Feb-20	18-Feb-40	idAAA
70	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Series A	40.5	7.70%	7	18-Feb-20	18-Feb-27	idAAA(sy)
71	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Series B	3.5	8.00%	10	18-Feb-20	18-Feb-30	idAAA(sy)
72	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Series C	9	8.70%	15	18-Feb-20	18-Feb-35	idAAA(sy)
73	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Series D	62.5	9.05%	20	18-Feb-20	18-Feb-40	idAAA(sy)
74	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri B Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Series B	99.155	8.25%	5	6-May-20	6-May-25	idAAA
75	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri C Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Series C	312.18	8.55%	7	6-May-20	6-May-27	idAAA
76	Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Seri D Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Series D	1,009.1	9.10%	10	6-May-20	6-May-30	idAAA
77	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Series A	312	6.70%	5	08-Sep-20	08-Sep-25	idAAA
78	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Series B	28	7.25%	7	08-Sep-20	08-Sep-27	idAAA
79	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Series C	158	7.90%	10	08-Sep-20	08-Sep-30	idAAA
80	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Series D	841	8.65%	15	08-Sep-20	08-Sep-35	idAAA
81	Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Series E	161	8.86%	20	08-Sep-20	08-Sep-40	idAAA



Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Nama Obligasi Domestik Name of Domestic Bonds	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Rp Billion)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating (PEFINDO)
82	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri A Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Series A	39	6.70%	5	08-Sep-20	08-Sep-25	idAAA(sy)
83	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri B Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Series B	35	7.25%	7	08-Sep-20	08-Sep-27	idAAA(sy)
84	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri C Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Series C	200	7.90%	10	08-Sep-20	08-Sep-30	idAAA(sy)
85	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri D Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Series D	56	8.65%	15	08-Sep-20	08-Sep-35	idAAA(sy)
86	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Seri E Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Series E	46.5	8.86%	20	08-Sep-20	08-Sep-40	idAAA(sy)

Obligasi internasional berdenominasi valuta asing

International Bonds Denominated in Foreign Currencies

No	Kode Obligasi Internasional International Bond Code	Nama Name	Mata Uang Curren- cy	Nominal (Juta) Nominal (Million)	Kupon Coupon	Tenor (Tahun) Tenore (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	S&P	Moody's	Fitch	Japan Credit
									Rating	Rating	Rating	Rating
1	56068TAD9 N54360AD9	GLOBAL BOND II Tr. B	USD	288,312	7.875%	30	28-Jun-07	29-Jun-37	BBB	Baa2	BBB	-
2	71568PAB5 71568QAB3	GMTN 2 nd DD 2012	USD	1,001	5.25%	30	24-Oct-12	24-Oct-42	BBB	Baa2	BBB	-
3	71568PAC3 71568QAC1	GMTN 2017 Tranche A	USD	1,500	4.125%	10	15-May-17	15-May-27	-	Baa2	BBB	-
4	71568PAD1 71568QAD9	GMTN 2017 Tranche B	USD	500	5.25%	30	15-May-17	15-May-47	-	Baa2	BBB	-
5	71568PAE9 71568QAE7	GMTN 2018 Seri 1	USD	1,000	5.45%	10	21-May-18	21-May-28	-	Baa2	BBB	-
6	71568PAF6 71568QAF4	GMTN 2018 Seri 2	USD	1,000	6.15%	30	21-May-18	21-May-48	-	Baa2	BBB	-
7	71568PAG4 71568QAG2	GMTN 2018 Seri 3	USD	500	5.375%	10	25-Oct-18	25-Jan-29	-	Baa2	BBB	-
8	71568PAH2 71568QAH0	GMTN 2018 Seri 4	USD	500	6.25%	30	25-Oct-18	25-Jan-49	-	Baa2	BBB	-
9	XS1895571328 XS1891336932	GMTN 2018 Seri 5	EUR	500	2.875%	7	25-Oct-18	25-Oct-25	BBB	Baa2	BBB	-
10	71568PAJ8 71568QAJ6	GMTN 2019 – Seri 6	USD	700	3.875%	10	17-Jul-19	17-Jul-29	BBB	Baa2	BBB	-
11	71568PAK5 71568QAK3	GMTN 2019 – Seri 7	USD	700	4.875%	30	17-Jul-19	17-Jul-49	BBB	Baa2	BBB	-
12	JP-536002BK95 JP-536002BK95	Japanese Yen Bond 2019 Seri 2 – 5Y	JPY	18,500	0.87%	5	20-Sep-19	20-Sep-24	BBB	Baa2	BBB	BBB+

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing and Issuance Chronology

No	Kode Obligasi Internasional International Bond Code	Nama Name	Mata Uang Curren- cy	Nominal (Juta) Nominal (Million)	Kupon Cupon	Tenor (Tahun) Tenore (Year)	Tanggal Terbit Issuance Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	S&P	Moody's	Fitch	Japan Credit
									Rating	Rating	Rating	Rating
13	JP536002DK93 JP536002DK93	Japanese Yen Bond 2019 Seri 4 – 10Y	JPY	1,000	1.05%	10	20-Sep-19	20-Sep-29	BBB	Baa2	BBB	BBB+
14	71568PAL3 71568QAL1	GMTN 2019 Seri 8	USD	500	3.375%	10	05-Nov-19	05-Feb-30	BBB	Baa2	BBB	-
15	71568PAM1 71568QAM9	GMTN 2019 Seri 9	USD	500	4.375%	30	05-Nov-19	05-Feb-50	BBB	Baa2	BBB	-
16	XS2073758612 XS2073758885	GMTN 2019 Seri 10	EUR	500	1.875%	12	05-Nov-19	05-Nov-31	BBB	Baa2	BBB	-
17	71568PAN9 71568QAN7	GMTN 2020 Seri 11	USD	500	3.00%	10	30-Jun-20	30-Jun-30	BBB	Baa2	BBB	-
18	71568PAP4	GMTN 2020 Seri 12	USD	1,000	4.00%	30	30-Jun-20	30-Jun-50	BBB	Baa2	BBB	-

Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Information on the Company's Website

Sebagai penerapan prinsip transparansi sesuai praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG), PLN menyediakan informasi perusahaan melalui situs *web* resmi pada alamat <https://web.pln.co.id/>. Pengungkapan informasi melalui situs *web* tersebut mengacu pada standar pengungkapan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain memuat 4 (empat) bagian utama berikut:

1. Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi pemodal atau investor;
3. Informasi tata kelola perusahaan; dan
4. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Perseroan melakukan pemutakhiran terhadap informasi yang tersedia pada situs *web* tersebut secara berkala, sebagai upaya dalam menjaga muatan situs *web* tetap akurat dan relevan.

Muatan situs *web* PLN antara lain terdiri atas sejumlah informasi berikut:

1. Informasi terkait Pelanggan: Layanan *Online*, Listrik Pintar, Tarif Tenaga Listrik, Q&A Tarif Listrik, Uang Jaminan Langganan, Informasi P2TL, Kompensasi, Informasi Tagihan dan Token Listrik, dan Stimulus Covid-19.

As part of the implementation of the transparency principle in accordance with the best practices of Good Corporate Governance (GCG), PLN provides company information through its official website at <https://web.pln.co.id/>. The disclosure of information on the website refers to the disclosure standards set forth in OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies. The website contains 4 (four) main sections as follows:

1. General information of the Issuer or Public Company;
2. Information for investors;
3. Corporate governance information; and
4. Corporate social responsibility information.

The Company regularly updates the information available on the website to ensure the content remains accurate and relevant.

The contents of PLN's website include, among others, the following information:

1. Information on Customers: Online Services, Smart Electricity, Electricity Tariffs, Electricity Tariffs Q&A, Customer Security Deposits, P2TL Information, Compensation, Electricity Bills and Token Information, and Covid-19 Stimulus.



2. Informasi terkait Hubungan Investor: Informasi Keuangan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik, Informasi Saham, Informasi RUPS, Informasi Dividen, Informasi Obligasi, Informasi Prospektus, Peringkat Utang, Informasi Penunjang Pasar Modal, Informasi Investor, Informasi Fakta Material, Independent *Power Producers*, dan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Informasi tentang Media: Siaran Pers, Warta PLN, Program 35.000 MW, Video, *Journalist Award*, Inovasi dan Penghargaan.
4. Informasi terkait Profil Perusahaan (Tentang Kami): Profil Perusahaan, *Good Corporate Governance*, Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, Anak Perusahaan, Buku Saku Covid-19 PLN, Pedoman Perilaku, *Whistleblower's System*, Ekspedisi Papua Terang, LHKPN Dewan Komisaris dan Direksi, Program Pengendalian Gratifikasi, LHKPN, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, *Workshop* Penggunaan Listrik yang Aman dan Produktif, dan Tata Nilai Manajemen Risiko.
5. Informasi tentang Program PLN Peduli: PLN Peduli, *Corporate Social Responsibility*, Laporan PKBL & CSR, dan Video PLN Peduli.
6. Informasi tentang Keterbukaan Informasi Perusahaan (KIP), yang terhubung ke alamat domain KIP, yaitu eppid.pln.co.id. Layanan ini merupakan sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PLN.
7. Informasi terkait Karier: Informasi Rekrutmen PLN, Pendaftaran, dan Pengumuman *Test*.
2. Information on Investor Relations: Financial Information, Annual Report, Sustainability Report, Statistical Report, Stock Information, GMS Information, Dividend Information, Bond Information, Prospectus Information, Debt Rating, Capital Market Supporting Information, Investor Information, Material Fact Information, Independent Power Producers, and Procurement of Goods/Services.
3. Information on the Media: Press Releases, PLN News, 35,000 MW Program, Videos, Journalist Award, Innovation and Awards.
4. Information on Company Profile (About Us): Company Profile, Good Corporate Governance, Organizational Structure, Board of Commissioners, Directors, Subsidiaries, PLN Covid-19 Handbook, Code of Conduct, Whistleblower's System, Bright Papua Expedition, LHKPN of the Board of Commissioners and Directors, Gratification Control Program, Anti-Bribery Management System, Workshop on Safe and Productive Use of Electricity, and Risk Management Values.
5. Information on PLN Peduli Program: PLN Peduli, Corporate Social Responsibility, PKBL & CSR Reports, and PLN Peduli Videos.
6. Information on Corporate Information Disclosure (KIP): Linked to the KIP domain at eppid.pln.co.id, this service is an online platform for public information request applicants as part of PLN's implementation of public information disclosure.
7. Career-Related Information: PLN Recruitment Information, Registration, and Test Announcements.



Photo by Hadiyanto
PLN Enjiniring



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Kondisi Ekonomi Makro

Macroeconomic Conditions

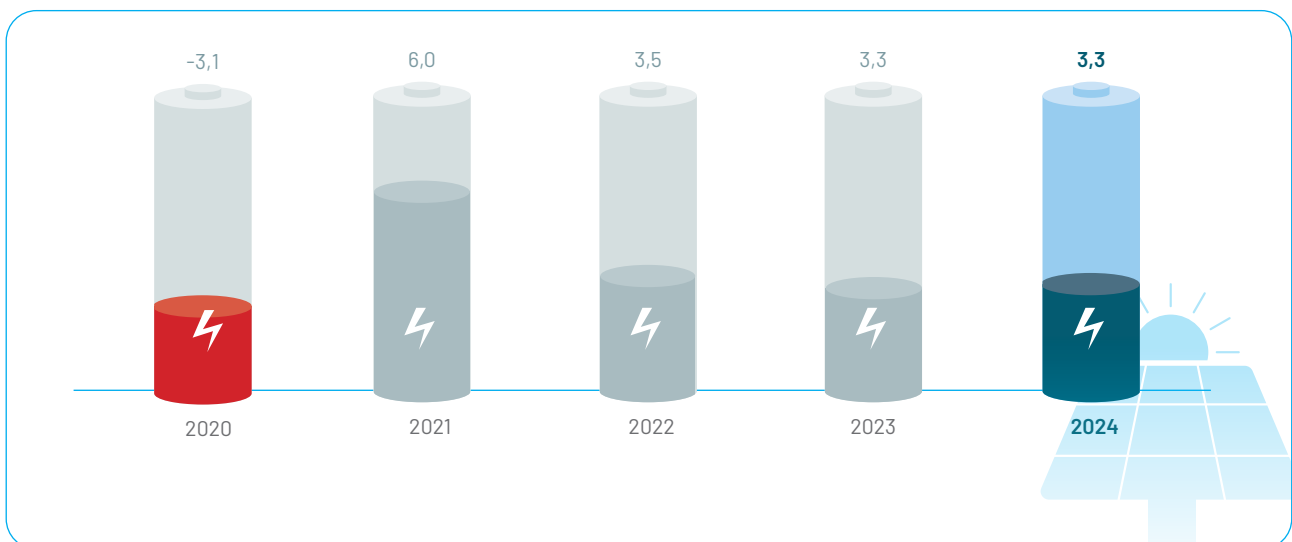
Menurut laporan *World Economic Outlook (WEO)* edisi April 2025 yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,3%, masih berada di bawah rata-rata historis sebesar 3,7% pada periode 2000 hingga 2019. Kondisi ini mencerminkan perlambatan ekonomi yang terus berlanjut dan pemulihan global yang belum merata. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik yang meningkat, kebijakan moneter yang ketat di banyak negara untuk mengendalikan inflasi, serta perubahan struktur perdagangan global yang semakin dipengaruhi oleh fragmentasi dan proteksionisme. IMF juga menyoroti bahwa risiko terhadap prospek global cenderung mengarah ke bawah, terutama karena potensi gangguan pada proses penurunan inflasi, ketidakpastian kebijakan, dan ketegangan perdagangan antara negara-negara besar. Oleh karena itu, meskipun pemulihan sedang berlangsung, laju pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi oleh tantangan-tantangan struktural dan geopolitik yang signifikan.

According to the April 2025 edition of the *World Economic Outlook (WEO)* released by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2024 was recorded at 3.3%, still below the historical average of 3.7% during the period from 2000 to 2019. This condition reflects a continued economic slowdown and an uneven global recovery. The slowdown is influenced by various external factors such as rising geopolitical tensions, tight monetary policies in many countries aimed at controlling inflation, and changes in the structure of global trade increasingly shaped by fragmentation and protectionism. The IMF also highlighted that risks to the global outlook remain tilted to the downside, particularly due to potential disruptions in the disinflation process, policy uncertainty, and trade tensions among major economies. Therefore, although recovery is underway, the pace of global economic growth continues to be overshadowed by significant structural and geopolitical challenges.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Global

Global Economic Growth Trends

(disajikan dalam satuan %) (presented in percentage)



Sumber:
World Economic Outlook (WEO), *International Monetary Fund (IMF)* versi April 2025.

Source:
World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2025 edition.

Kondisi Ekonomi Makro

Macroeconomic Conditions

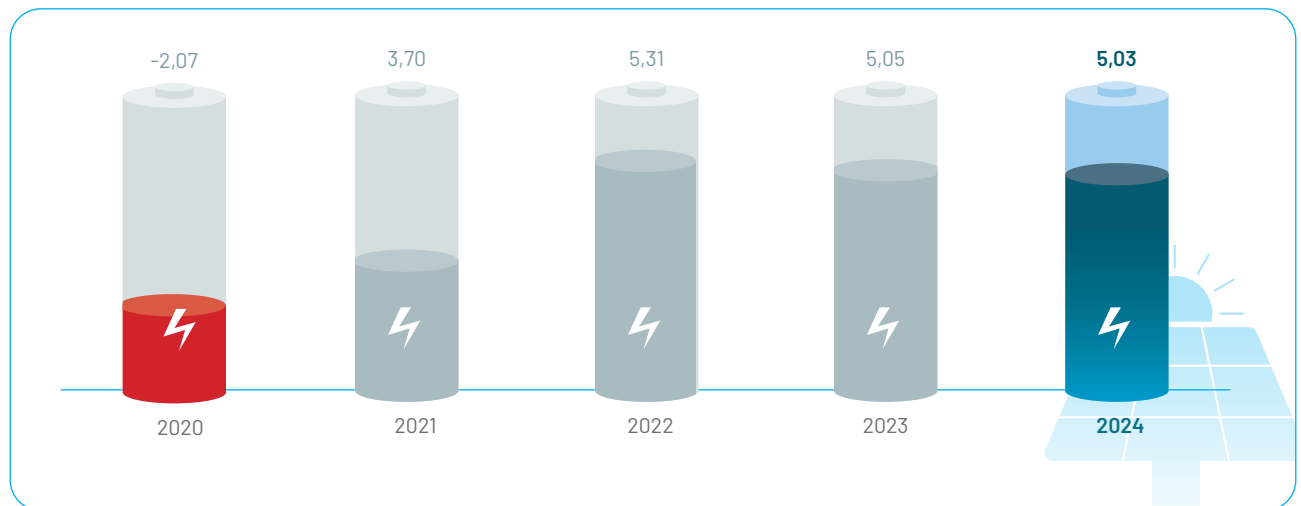
Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05% (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48%.

Meanwhile, Indonesia's economic growth in 2024 reached 5.03%, slightly slowing down compared to the 5.05% growth achieved in 2023 (c-to-c). From the production side, the highest growth was recorded in the "Other Services Activities" sector at 9.80%. On the expenditure side, the highest growth was recorded in the Consumption Expenditure Component of Non-Profit Institutions Serving Households (NPISH), at 12.48%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia's Economic Growth Trends

(disajikan dalam satuan %)(presented in percentage)



Sumber:
World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF) versi April 2025.

Source:
World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2025 edition.

Sementara itu, laju inflasi sepanjang tahun 2024 cukup terkendali dengan tingkat inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 1,57% pada bulan Desember 2024. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan harga tertinggi sebesar 7,02%, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,48%, serta kelompok pendidikan sebesar 1,94%. Di sisi lain, sektor transportasi mengalami deflasi sebesar 0,30%, yang

Meanwhile, inflation throughout 2024 remained well-controlled, with a year-on-year (y-on-y) inflation rate of 1.57% recorded in December 2024. The "Personal Care and Other Services" group posted the highest price increase at 7.02%, followed by the "Food and Beverage/Restaurant Services" group at 2.48%, and the "Education" group at 1.94%. On the other hand, the transportation sector experienced deflation of 0.30%, largely driven by a decline in airfares and gasoline

Kondisi Ekonomi Makro

Macroeconomic Conditions

sebagian besar disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara dan harga bensin. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan tekanan inflasi yang relatif rendah, mencerminkan kondisi makroekonomi yang cukup baik.

Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS)

prices. Overall, Indonesia's economy in 2024 demonstrated stable growth with relatively low inflationary pressure, reflecting sound macroeconomic conditions.

Source: Official Statistical News Release, Statistics Indonesia (BPS)

Tinjauan Industri Kelistrikan

Electricity Industry Overview

Menurut laporan Electricity 2024 dari International Energy Agency (IEA), permintaan listrik global mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, meningkat menjadi sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,2%. Dalam tiga tahun ke depan, konsumsi listrik global diperkirakan akan meningkat sebesar 3.500 TWh, sebuah lonjakan yang signifikan, serta yang tertinggi sejak tahun 2007.

Peningkatan permintaan ini didorong oleh beberapa faktor utama, termasuk gelombang panas ekstrem yang meningkatkan penggunaan pendingin udara, pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai negara, serta percepatan elektrifikasi di sektor transportasi dan bangunan. Selain itu, ekspansi pesat pusat data dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan konsumsi listrik global.

Secara regional, Tiongkok mencatat pertumbuhan permintaan listrik sebesar 6,4% pada 2023, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,1% pada 2024. India diperkirakan akan mengalami pertumbuhan permintaan listrik di atas 6% per tahun hingga 2026, didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat dan peningkatan kepemilikan pendingin udara.

Sumber: *Electricity 2024*, International Energy Agency (IEA).

According to the Electricity 2024 report by the International Energy Agency (IEA), global electricity demand saw a significant surge in 2024, rising by 4.3% compared to 2.2% in the previous year. Over the next three years, global electricity consumption is projected to increase by 3,500 TWh—marking a substantial surge and the highest increase since 2007.

This surge in electricity demand has been driven by several key factors, including extreme heatwaves that increased air conditioning usage, strong economic growth in various countries, and accelerated electrification in the transport and building sectors. Additionally, the rapid expansion of data centers and the use of artificial intelligence (AI) have also contributed significantly to the rise in global electricity consumption.

Regionally, China recorded electricity demand growth of 6.4% in 2023, with a projected growth of 5.1% in 2024. India is expected to see electricity demand grow by over 6% annually through 2026, fueled by strong economic activity and increased ownership of air conditioning units.

Source: *Electricity 2024*, International Energy Agency (IEA).

Pada tahun 2024, sektor ketenagalistrikan nasional menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek strategis. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indeks utama yang menggambarkan kinerja sistem

In 2024, Indonesia's national electricity sector made significant progress across various strategic aspects. This is reflected in the performance of several key indices that represent the overall condition of the national power system.



Tinjauan Industri Kelistrikan Electricity Industry Overview

ketenagalistrikan secara nasional. Rasio elektrifikasi Nasional tahun 2024 mencapai 99,83%. Investasi yang dialokasikan Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk Ketenagalistrikan adalah sebesar USD5,33 miliar.

Dari kinerja industri ketenagalistrikan pada tahun 2024, tercapai Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional mencapai angka 75,28, melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian sebesar 105,67%. Capaian ini menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik dari sumber daya dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar. Sementara itu, Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional mencapai 89,15, dengan persentase capaian sebesar 100,78%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kelistrikan nasional telah memiliki tingkat keandalan dan ketangguhan yang baik dalam menghadapi potensi gangguan, serta mampu menjaga kontinuitas pasokan listrik di seluruh wilayah. Serta, untuk Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan, tercapai nilai sebesar 97,87% dari target. Meskipun mendekati sasaran, masih terdapat sejumlah area kritis yang memerlukan perhatian dan penguatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Sumber:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

The electrification ratio for PLN in 2024 reached 99.83%. The investment allocated by the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) for the electricity sector amounted to USD 5.33 billion.

Based on the electricity sector performance in 2024, the National Electricity Self-Reliance Index reached 75.28, surpassing the set target with an achievement rate of 105.67%. This indicates an improved ability to meet electricity demand using domestic energy resources, while also reducing reliance on external supply. Meanwhile, the National Electricity Resilience Index stood at 89.15, with an achievement rate of 100.78%. This indicates that the national electricity system has achieved a strong level of reliability and resilience in facing potential disruptions, while maintaining continuity of electricity supply across the country. Additionally, the Electricity Infrastructure Availability Index reached 97.87% of its target. Although close to the goal, several critical areas still require attention and infrastructure strengthening to support national economic growth and ensure the equitable provision of basic services to the population.

Source:
Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

Posisi PLN di Industri Ketenagalistrikan Indonesia PLN's Position in Indonesia's Electricity Industry

Perseroan memainkan peran strategis dalam industri ketenagalistrikan nasional melalui kegiatan usaha yang terintegrasi secara menyeluruh, mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan, pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga layanan retail. Posisi strategis ini diperkuat oleh dominasi Perseroan dalam sektor pembangkitan listrik serta cakupan jaringan transmisi dan distribusi yang luas di seluruh penjuru Indonesia.

The Company plays a strategic role in the national electricity industry through fully integrated business operations, encompassing the development of electricity infrastructure, power generation, transmission, distribution, and retail services. This strategic position is reinforced by the Company's dominance in the power generation sector and its extensive transmission and distribution network coverage across Indonesia.

Posisi PLN di Industri Ketenagalistrikan Indonesia

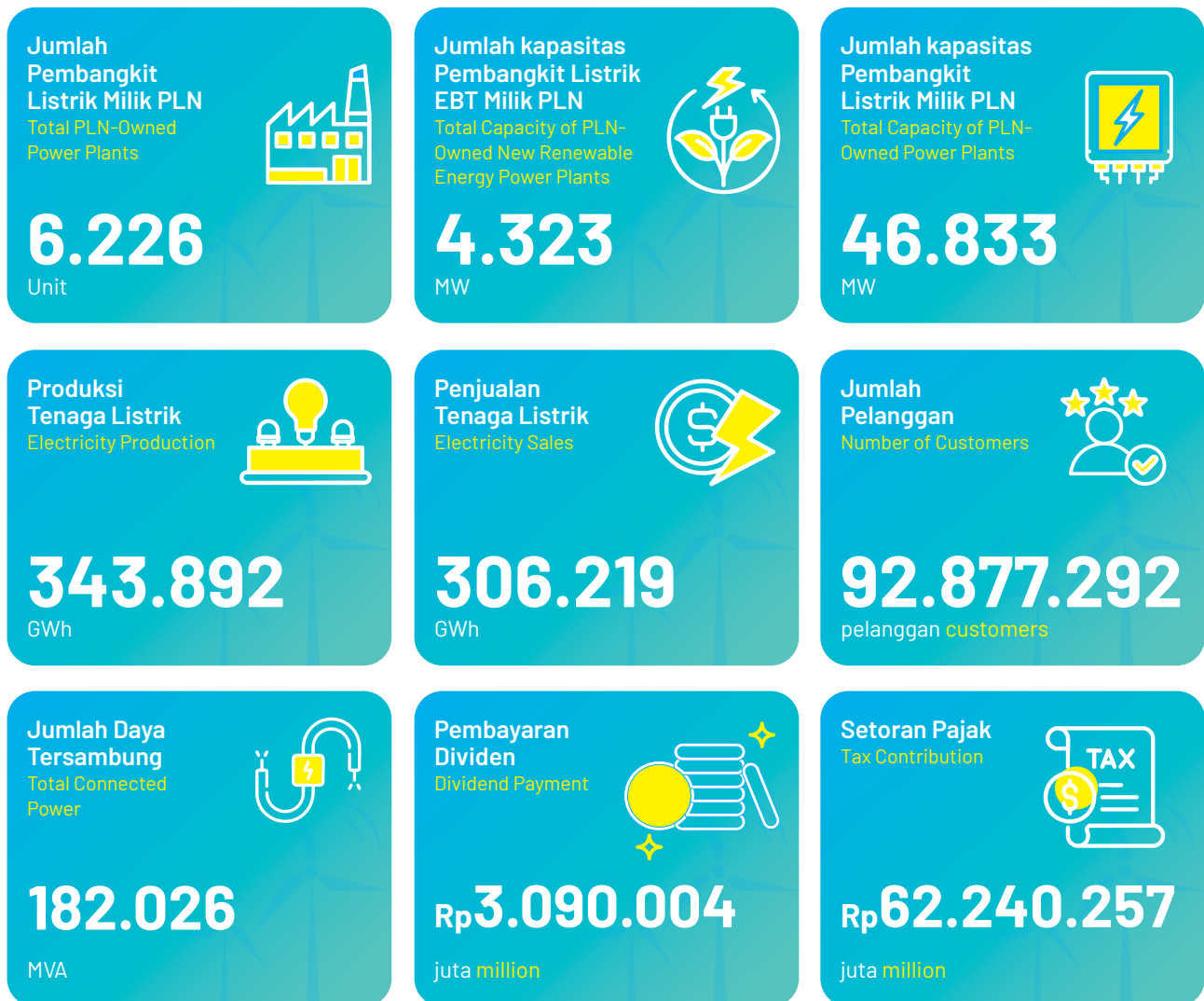
PLN's Position in Indonesia's Electricity Industry

Dari sisi pasokan, Perseroan memenuhi kebutuhan listrik nasional dengan mengoperasikan pembangkit listrik yang dimiliki secara langsung, bekerja sama dengan *Independent Power Producers* (IPP), serta melalui skema sewa. Hingga 31 Desember 2024, jumlah total unit pembangkit yang dioperasikan mencapai 6.875 unit, lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 7.036. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.226 unit merupakan aset milik Perseroan sendiri.

On the supply side, the Company meets national electricity demand by operating its own power plants, collaborating with Independent Power Producers (IPPs), and through lease schemes. As of December 31, 2024, the total number of power plant units in operation reached 6,875 units, a decrease compared to 7,036 units in the previous year. Of this total, 6,226 units are Company-owned assets.

Berikut merupakan kontribusi PLN dalam industri ketenagalistrikan nasional:

Below is PLN's contribution to the national electricity industry:





Peran PLN dalam Penyaluran Subsidi Listrik

PLN's Role in Distributing Electricity Subsidies

Sebagai BUMN, Perseroan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga bertugas menyalurkan subsidi kepada pelanggan yang memenuhi syarat, sesuai kebijakan pemerintah. Dalam konteks APBN, subsidi merupakan bantuan dana dari pemerintah yang bertujuan menurunkan harga barang atau jasa. Karena itu, subsidi listrik menjadi wujud bantuan pemerintah agar masyarakat dapat menikmati tarif listrik yang lebih terjangkau dibandingkan tarif berdasarkan nilai keekonomiannya.

Penyaluran subsidi listrik dilakukan berdasarkan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi: "Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu";
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan: "Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu".
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

Perubahan kebijakan subsidi listrik oleh Pemerintah dari tahun ke tahun, sesuai data Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut:

As an SOE, the Company not only focuses on profit, but is also tasked with distributing subsidy to eligible customers, under the government policy. In the context of the State Budget, subsidy refers to financial assistance from the government aimed at lowering the price of goods or services. Therefore, electricity subsidy is a form of government assistance that enables the public to enjoy more affordable electricity rates compared to rates based on the economic value.

The distribution of electricity subsidies is carried out based on the following laws:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 on Energy: "The Government and regional governments provide subsidy funds for underprivileged communities."
2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2009 on Electricity: "For the provision of electricity, the Government and regional governments provide funds for underprivileged communities."
3. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 3 of 2024 on the Provision of Electricity Tariff Subsidies for Household Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
4. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2024 on Electricity Tariffs Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
5. Minister of Finance Regulation No. 178/PMK.02/2021 of 2021 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 174/PMK.02/2019 on Procedures for the Provision, Calculation, Payment, and Accountability of Electricity Subsidies.

Changes in the Government's electricity subsidy policy from year to year are reflected in the data provided by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, as shown in the following table:

Tahun Year	Penjelasan Explanation
2024	Pemerintah menerapkan stratifikasi tarif dimana tarif S1 220 dihilangkan dan pemecahan golongan tarif Traksi menjadi T/TM, T/TT dan Curah menjadi C/TR, C/TM, dan C/TT sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). The government has implemented tariff stratification where the S1 220 tariff is eliminated and the Traction tariff group is divided into T/TM, T/TT, and Bulk into C/TR, C/TM, and C/TT pursuant to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2024 on Electricity Tariffs Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2023	Pelanggan segmen rumah tangga daya 450 VA dan daya 900 VA golongan tidak mampu masih menerima subsidi dari pemerintah. Household customers in the 450 VA and 900 VA low-income segments continue to receive government subsidies.
2022	Pemerintah masih memberikan subsidi untuk pelanggan listrik Rumah Tangga tidak mampu dengan daya terpasang 450-900 VA. The government still provides electricity subsidies for low-income household customers with an installed capacity of 450-900 VA.

Peran PLN dalam Penyaluran Subsidi Listrik

PLN's Role in Distributing Electricity Subsidies

Tahun Year	Penjelasan Explanation
2021	Semua pelanggan rumah tangga 450 VA masih menerima subsidi listrik. Pemerintah sedang mengupayakan untuk melanjutkan reformasi subsidi listrik. All 450 VA household customers still receive electricity subsidies. The government is currently working to reform the electricity subsidy.
2017	- Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk terus melakukan perbaikan sasaran penerima subsidi listrik dengan melakukan reformasi subsidi listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA. - Kebijakan ini dilakukan untuk mengembalikan mandat pemberian subsidi, yaitu untuk masyarakat kurang mampu. Reformasi ini dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menyasar pelanggan rumah tangga 900 VA. Pelanggan rumah tangga 900 VA yang berhak menerima subsidi adalah rumah tangga yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu/BDT (sekarang menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS). - Untuk mengatasi adanya rumah tangga yang berhak menerima subsidi tapi tidak terdaftar dalam BDT, maka Pemerintah dan PLN menyediakan mekanisme pengaduan yang memungkinkan mereka untuk menerima tarif listrik bersubsidi. - The Government and the House of Representatives (DPR RI) have agreed to continue improving the targeting of electricity subsidy recipients by reforming subsidies for 450 VA and 900 VA household customer groups. - This policy aims to restore the original mandate of subsidy provision, which is to support low-income communities. The reform is being implemented gradually, beginning with 900 VA household customers. Only those registered in the Unified Database (BDT) now known as the Integrated Social Welfare Data (DTKS), are eligible to receive the subsidy. - To address cases where eligible households are not listed in the DTKS, the Government and PLN have established a complaint mechanism that allows them to access subsidized electricity tariffs.
2015	- Pemerintah menghapus subsidi listrik untuk 12 jenis pelanggan PLN yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga daya 1300 VA ke atas, pelanggan golongan Industri Besar (200 VA ke atas), pelanggan golongan Bisnis Besar (6600 VA ke atas), dan pelanggan golongan Pemerintah (6600 VA ke atas). - Kebijakan ini didasari pemahaman bahwa golongan pelanggan tersebut tidak berhak menerima subsidi listrik. Kebijakan ini secara signifikan mengurangi besaran anggaran subsidi listrik dari Rp99,30 triliun di 2014 menjadi Rp56,55 triliun di 2015. - The Government has eliminated electricity subsidies for 12 categories of PLN customers, including household customers with a capacity of 1,300 VA and above, large industrial customers (200 kVA and above), large business customers (6,600 VA and above), and government customer groups (6,600 VA and above). - This policy is based on the understanding that these customer groups are not entitled to receive electricity subsidies. As a result, the electricity subsidy budget was significantly reduced from Rp99.30 trillion in 2014 to Rp56.55 trillion in 2015.
2014	Perubahan kebijakan subsidi listrik yang dilakukan hanya berupa kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik, seperti kebijakan untuk menaikkan tarif listrik sebesar 10% di tahun 2010 dan sebesar 15% di tahun 2013. Akan tetapi, semua 38 golongan pelanggan PLN masih menerima subsidi listrik pada periode ini. Previous changes in electricity subsidy policy mainly involved adjustments to electricity tariffs, such as the 10% increase in 2010 and the 15% increase in 2013. However, during this period, all 38 customer categories of PLN continued to receive electricity subsidies.





Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Marketing Strategy

Untuk mencapai target pertumbuhan kinerja penjualan yang telah ditetapkan, PLN menerapkan dua pendekatan strategis dalam pemasaran, yakni strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi difokuskan pada optimalisasi konsumsi energi listrik oleh pelanggan eksisting serta menjaga loyalitas mereka. Sementara itu, strategi ekstensifikasi diarahkan pada peningkatan volume penjualan (kWh) maupun pendapatan melalui perluasan basis pelanggan. Upaya ini mencakup akuisisi pelanggan baru, termasuk konversi dari pengguna *captive power* serta program dedieselisasi.

To achieve its targeted sales performance growth, PLN implements two strategic marketing approaches: intensification and extensification strategies. The intensification strategy focuses on optimizing electricity consumption among existing customers while maintaining their loyalty. Meanwhile, the extensification strategy aims to increase sales volume (kWh) and revenue by expanding the customer base. This effort includes acquiring new customers, such as through the conversion of captive power users and the diesel-to-electricity (de-dieselization) program.

Strategi Intensifikasi

Intensification Strategy

1. Mendorong pertumbuhan alami pemakaian listrik oleh pelanggan eksisting melalui peningkatan keandalan pasokan, pengurangan kebocoran dan pencurian listrik, serta promosi gaya hidup berbasis listrik (*electrifying lifestyle*);
2. Meningkatkan konsumsi listrik pelanggan dengan menambah kapasitas daya tersambung, baik melalui layanan reguler, prioritas, maupun kerja sama bisnis (B2B);
3. Mendorong peningkatan konsumsi listrik pelanggan dengan mengalihkan layanan dari reguler ke layanan prioritas atau skema kerja sama bisnis (B2B); dan
4. Meningkatkan konsumsi listrik dengan mengakuisisi sumber listrik mandiri (*captive power*) yang dimiliki oleh pelanggan eksisting
1. Encouraging natural growth in electricity usage by existing customers through increasing supply reliability, reducing electricity leakage and theft, and promoting an electrifying lifestyle;
2. Increasing customers' electricity consumption by increasing connected power capacity, either through regular services, priority, or business cooperation (B2B);
3. Encouraging increased customers' electricity consumption by switching services from regular to priority services or business cooperation schemes (B2B); and
4. Increasing electricity consumption by acquiring independent power sources (captive power) owned by existing customers.

Strategi Ekstensifikasi

Extensification Strategy

1. Meningkatkan penjualan listrik dengan mempercepat proses penyambungan pelanggan baru, baik reguler maupun layanan prioritas, sesuai dengan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang berlaku;
2. Meningkatkan penjualan listrik dengan mengakuisisi pelanggan yang menggunakan pembangkit listrik sendiri (*captive power*), melalui program akuisisi captive, pengurangan penggunaan pembangkit diesel (dedieselisasi), serta mendorong pemanfaatan listrik di sektor pertanian (*electrifying agriculture*); dan
1. Increasing electricity sales by accelerating the process of connecting new customers, both regular and priority services, in accordance with the applicable Service Level Agreement (SLA) provisions;
2. Increasing electricity sales by acquiring customers who use their own power plants (captive power) through captive acquisition programs, reducing the use of diesel generators (dedieselization), and encouraging the use of electricity in the agricultural sector (electrifying agriculture); dan

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

3. Meningkatkan penjualan listrik dengan mengakuisisi pelanggan baru melalui program dedieselisasi, baik di sektor non-pertanian maupun pada sektor pertanian, kelautan, *cold storage*, perikanan, peternakan, dan sektor terkait lainnya melalui inisiatif *electrifying agriculture*.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, Perseroan telah melaksanakan berbagai program kerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur kelistrikan guna menekan gangguan serta pemadaman yang berakibat pada hilangnya potensi penjualan listrik (*Energy Not Sales*);
2. Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk mengurangi susut distribusi, meningkatkan kualitas layanan, serta mencegah risiko bahaya listrik bagi masyarakat;
3. Penggalakan kampanye *Electrifying Lifestyle* dan *Electrifying Agriculture*, serta pemberian insentif berupa diskon biaya penyambungan melalui berbagai promo tematik dan inovatif;
4. Mempercepat proses penyambungan pelanggan baru melalui penguatan rantai pasok, penyempurnaan prosedur operasional standar, serta peningkatan jumlah dan kualitas petugas untuk memenuhi standar mutu layanan;
5. Peningkatan kompetensi *Priority Account Executive* (PAE) dalam membangun hubungan dan mengakuisisi pelanggan *captive*, dedieselisasi, dan skema bisnis ke bisnis (B2B);
6. Promosi dan sosialisasi program serta produk kelistrikan secara luas melalui media digital maupun konvensional;
7. Pengembangan solusi kelistrikan terpadu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan potensial, khususnya di segmen B2B.

3. Increasing electricity sales by acquiring new customers through the de-dieselization program, both in the non-agricultural sector and in the agricultural, marine, cold storage, fisheries, livestock, and other related sectors through the electrifying agriculture initiative.

To implement these strategies, the Company carried out various work programs in 2024, including:

1. Maintenance and improvement of electrical infrastructure to reduce disruptions and blackouts that result in the loss of potential electricity sales (*Energy Not Sales*);
2. Implementation of Electricity Usage Control (P2TL) to reduce distribution losses, improve service quality, and prevent the risk of electrical hazards for the community;
3. Promotion of the Electrifying Lifestyle and Electrifying Agriculture campaigns, as well as providing incentives in the form of connection fee discounts through various thematic and innovative promotions;
4. Accelerating the process of connecting new customers by strengthening the supply chain, improving standard operating procedures, and increasing the number and quality of officers to meet service quality standards;
5. Improving the competence of Priority Account Executives (PAE) in building relationships and acquiring captive customers, dedieselization, and business-to-business (B2B) schemes;
6. Promotion and dissemination of electrical programs and products widely through digital and conventional media;
7. Development of integrated electrical solutions to meet the needs of potential customers, especially in the B2B segment.

Pangsa Pasar

Market Share

PLN merupakan pemain utama dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia, mencakup seluruh rantai dari produksi hingga distribusi listrik ke konsumen. Oleh karena itu, untuk mengetahui pangsa pasar PLN, indikator yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah energi listrik (dalam GWh) yang diproduksi oleh PLN dengan total energi listrik (dalam GWh) yang dihasilkan secara keseluruhan. Pangsa pasar PLN berdasarkan parameter ini mencapai 53,69% pada tahun 2024 dan 55,55% pada tahun 2023.

PLN is a leading player in the electricity industry in Indonesia, covering the entire chain from production to distribution of electricity to consumers. Therefore, to determine PLN's market share, the indicator used is the comparison between the amount of electrical energy (in GWh) produced by PLN with the total electrical energy (in GWh) produced as a whole. Based on this parameter, PLN's market share reached 53.69% in 2024 and 55.55% in 2023.



Aspek Pemasaran Marketing Aspect

Tabel Pangsa Pasar Produksi Tenaga Listrik
Table of Electricity Production Market Share

Uraian Description	2024		2023	
	GWh	%	GWh	%
Produksi Sendiri Own Production	184.622,24	53,69%	179.605,52	55,55%
Sewa Lease	5.952,65	1,73%	4.375,37	1,35%
Pembelian - IPP dan Proyek Purchases - IPP and Projects	153.316,85	44,58%	139.339,73	43,10%
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Total of Electricity Production	343.891,75	100,00%	323.320,62	100,00%

Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Informasi Segmen Segment Information

Segmen operasi Perseroan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pada sisi konstruksi, operasi, dan pengembangan, khususnya yang digunakan dalam mengambil keputusan yang strategis. Untuk tahun 2024, manajemen Perseroan membagi segmen operasi menjadi 3 (tiga) segmen operasi regional, yaitu (1) Sumatra-Kalimantan, (2) Jawa, Madura, dan Bali, serta (3) Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

The Company's operating segments are identified based on the needs of construction, operations, and development, particularly those used in making strategic decisions. For the year 2024, the Company's management divided its operating segments into 3 (three) regional operating segments, namely: (1) Sumatra-Kalimantan, (2) Java, Madura, and Bali, and (3) Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara.

Uraian Kinerja Operasional Description of Operational Performance

Aset Pembangkit Listrik Power Plant Assets

Pada tahun 2024, pembangkit listrik milik PLN adalah berjumlah 6.226 unit, jumlah ini berkurang 220 unit atau 3,41% dibandingkan tahun 2023 yang disebabkan oleh adanya penghapusan aset/ATTB pada PLTD dan PLTB (PLTB Nusa Penida) yang telah rusak permanen dan berdasarkan hasil kajian tidak layak untuk diperbaiki kembali.

In 2024, PLN-owned power plants totaled 6,226 units, a decrease of 220 units or 3.41% compared to 2023, this reduction was due to asset write-offs/fixed asset removals (ATTB) of diesel power plants (PLTD) and wind power plants (PLTB, specifically PLTB Nusa Penida) that had been permanently damaged and, based on assessments, were deemed not feasible to repair.

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Pembangkit Listrik Milik PLN
Table of PLN-Owned Power Plants

(disajikan dalam satuan unit) (presented in units)

Jenis Pembangkit Listrik Type of Power Plants	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
PLTA/PLTM/PLTMH	256	253	3	1,19%
PLTU	137	135	2	1,48%
PLTG	63	63	-	-
PLGU	91	90	1	1,11%
PLTP	18	18	-	-
PLTD	5.154	5.428	(274)	(5,05)%
PLTMG	191	189	2	1,06%
PLN Surya	312	263	49	18,63%
PLT Bayu	2	5	(3)	(60,00)%
PLTBM	2	2	-	-
Jumlah Pembangkit Milik PLN Number of PLN-Owned Power Plants	6.226	6.446	(220)	(3,41)%
IPP dan Sewa IPP and Rental	649	590	59	10,00%
Jumlah Pembangkit Total Number of Power Plants	6.875	7.036	(161)	(2,29)%

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik

Installed Capacity of Power Plant

Jumlah kapasitas terpasang mengalami peningkatan 2.960 MW atau 4,06%, dari 72.976,3 MW pada tahun 2023, menjadi 75.936,46 MW pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan kapasitas *Commercial on Date* (COD) pembangkit selama tahun 2024.

The total installed capacity experienced an increase of 2,960 MW or 4.06%, from 72,976.3 MW in 2023 to 75,936.46 MW in 2024. This was primarily due to the addition of commercial on-date (COD) power plant capacity in 2024.

Tabel Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik
Table of Installed Capacity of Power Plant

(disajikan dalam satuan MW) (presented in MW)				
Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Pembangkit Milik PLN: Power Plants Owned by PLN:				
PLTA/PLTM/PLTMH PLTA/PLTM/PLTMH	3.709,05	3.597,12	111,93	3,11%
PLTU PLTU	21.026,90	20.439,90	587,00	2,87%
PLTG, PLGU, PLTMG PLTG, PLGU, PLTMG	18.057,76	16.924,38	1.133,38	6,70%
PLTP PLTP	579,26	579,26	-	-
PLTD PLTD	3.425,94	3.521,21	95,27	(2,71)%



Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
PLT Surya PLT Surya	33,65	32,33	1,32	4,08%
PLT Bayu, PLTBM PLT Bayu, PLTBM	0,69	0,99	(0,30)	(30,30)%
Jumlah Kapasitas Pembangkit Milik PLN Installed Capacity of PLN-Owned Power Plants	46.833,23	45.095,19	1.738,04	3,85%
Swasta atau IPP Private or IPP	27.465,09	26.557,74	907,35	3,42%
Sewa Lease	1.638,14	1.323,37	314,77	23,79%
Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik Total Installed Capacity of Power Plants	75.936,46	72.976,30	2.960,16	4,06%

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT

Installed Capacity of New Renewable Energy Power Plants

Jumlah kapasitas terpasang pembangkit EBT mengalami peningkatan 11 MW atau 0,13%, dari 8.790 MW pada tahun 2023, menjadi 8.801 MW pada tahun 2024. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan kapasitas COD pembangkit EBT selama tahun 2024.

The total of the installed capacity of NRE power plants increased by 11 MW or 0.13%, from 8,790 MW in 2023 to 8,801 MW in 2024. This was mainly due to the addition of COD capacity from NRE power plants during 2024.

Tabel Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT

Table of Installed Capacity of Renewable Energy Power Plants

(disajikan dalam satuan MW) (presented in MW)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Air Water	5.931	5.780	151	2,61%
Panas Bumi Geothermal	2.343	2.519	(176)	(6,99)%
Surya Solar	243	242	1	0,41%
EBT Lainnya Other NRE	283	248	35	14,11%
Jumlah Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Total Installed Capacity of New Renewable Energy Power Plants	8.801	8.790	11	0,13%

Kinerja Produksi Tenaga Listrik

Electricity Power Production Performance

Produksi tenaga listrik pada tahun 2024 adalah sebesar 343.891,75 GWh, yaitu mengalami peningkatan sebesar 20.571,13 GWh atau 6,36% dari tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pembangkit baru yang mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan penjualan tenaga listrik.

Electricity power production in 2024 reached 343,891.75 GWh, representing an increase of 20,571.13 GWh, or 6.36%, compared to 2023. This increase was primarily due to the operation of newly commissioned power plants, which helped meet the growing demand for electricity sales.

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Produksi Tenaga Listrik
Table of Electricity Power Production

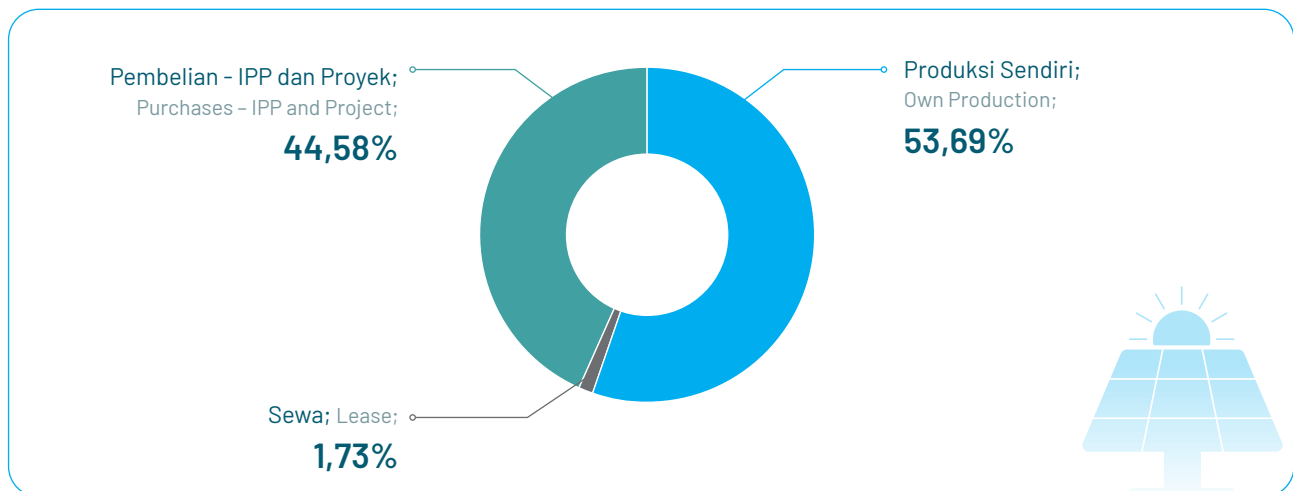
(disajikan dalam satuan GWh) (presented in GWh)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Produksi Sendiri Own Production	184.622,24	179.605,52	5.016,72	2,79%
Sewa Lease	5.952,65	4.375,37	1.577,28	36,05%
Pembelian - IPP dan Proyek Purchases - IPP and Projects	153.316,85	139.339,73	13.977,12	10,03%
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Total electricity power production	343.891,75	323.320,62	20.571,13	6,36%

Dari jumlah produksi tenaga listrik tahun 2024, dominasi kontribusi adalah dari produksi sendiri sebesar 53,69%, disusul dari pembelian sebesar 44,58%, dan sewa sebesar 1,73%.

Of the total electricity production in 2024, the most significant contribution came from PLN's own production at 53.69%, followed by purchases at 44.58%, and leased production at 1.73%.

Grafik Komposisi Produksi Tenaga Listrik Tahun 2024
Chart of Electricity Power Production Composition in 2024



Bauran Energi Primer

Primary Energy Mix

Dilihat dari jumlah produksi, penggunaan bahan bakar batubara menduduki posisi pertama dalam produksi tenaga listrik yaitu dengan bauran sebesar 66,43%.

In terms of total production, coal fuel holds the top position in electricity power production with a share of 66.43%.



Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Tabel Produksi Tenaga Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Pembangkit
Table of Electricity Power Production by Type of Power Plant Fuel

(disajikan dalam satuan GWh) (presented in GWh)

Jenis Bahan Bakar Pembangkit Type of Power Plant Fuel	2024		2023		Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
	Produksi Production	Bauran Mix	Produksi Production	Bauran Mix	Selisih Differences	%
Batubara Coal	228.433,46	66,43%	216.776,86	67,05%	11.656,6	(0,62)%
BBM Fuel Oil	10.054,41	2,92%	8.576,07	2,65%	1.478,34	0,27%
Gas Alam Natural Gas	60.686,45	17,65%	55.979,00	17,31%	4.707,45	0,33%
Panas Bumi Geothermal	16.763,21	4,87%	16.935,73	5,24%	(172,52)	(0,36)%
Air Water	21.505,13	6,25%	19.931,87	6,16%	1.573,26	0,09%
Lainnya Others	6.449,09	1,88%	5.121,09	1,58%	1.328	0,29%
Jumlah Produksi Tenaga Listrik Total of Electricity Power Production	343.891,75	100,00%	323.320,62	100,00%		

Bauran Energi BBM Fuel Energy Mix

Bauran energi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan perbandingan produksi listrik yang berasal dari pembangkit berbahan bakar BBM dengan keseluruhan pembangkit listrik. Realisasi bauran energi BBM dipengaruhi oleh pola operasi di dalam sistem kelistrikan serta tingkat kinerja dari pembangkit berbahan bakar murah, mencakup batubara, air, dan panas bumi, serta pembangkit berbahan bakar gas dan lain-lain. Strategi operasi pembangkit diterapkan melalui pola *merit order* untuk mencapai sasaran operasional berupa nilai keekonomian sistem kelistrikan (BPP terjaga) serta memenuhi keandalan pasokan listrik (menghindari pemadaman). Upaya untuk menekan produksi pembangkit dari BBM merupakan salah satu cara Perseroan untuk menerapkan efisiensi biaya, mengingat tingginya biaya pokok penyediaan listrik dari BBM.

The energy mix of Fuel Oil (BBM) refers to the ratio of electricity production from fuel oil-based power plants to total electricity generation. The actual BBM energy mix is influenced by the operational pattern within the power system and the performance level of low-cost fuel plants, including coal, hydro, geothermal, as well as gas-fired and other types of power plants. Power plant operation strategies are implemented through a merit order dispatch system to achieve operational targets such as maintaining economic efficiency of the power system (controlled BPP) and ensuring a reliable power supply (avoiding outages). Efforts to reduce electricity generation from fuel oil are part of the Company's cost-efficiency measures, considering the high basic cost of electricity production using BBM.

Bauran energi BBM pada tahun 2024 tanpa IPP adalah sebesar 6,49%, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh masih adanya pembangkit berbahan bakar gas yang beroperasi menggunakan BBM.

The BBM energy mix in 2024 excluding IPPs was 6.49%, an increase compared to 2023. This was mainly due to the continued operation of gas-fired power plants using fuel oil.

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Sedangkan untuk bauran energi BBM pada tahun 2024 dengan IPP adalah sebesar 3,94%, yaitu menurun dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan sebagai upaya meningkatkan kesiapan pasokan listrik untuk mencegah terjadinya defisit atau pemadaman.

Meanwhile, the BBM energy mix in 2024 including IPPs was 3.94%, also a decrease compared to 2023. This was primarily driven by efforts to enhance electricity supply readiness to prevent deficits or outages.

Tabel Bauran Energi BBM
Table of BBM Energy Mix

(disajikan dalam satuan %)(presented in percentage %)

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Bauran Energi BBM (tanpa IPP) Fuel Energy Mix (Without IPP)	6,49	5,87	0,62	10,63
Bauran Energi BBM (dengan IPP) Fuel Energy Mix (With IPP)	3,94	3,58	0,36	10,06

Keterangan:
Bauran Energi (BBM) termasuk Bio, sudah termasuk produksi proyek yang belum COD, dan tidak termasuk IPP

Note:
BBM Energy Mix includes Bio, production from projects not yet COD, and excludes IPPs.

Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)

Renewable Energy Mix (NRE)

Jumlah produksi listrik dari pembangkit EBT pada tahun 2024 adalah sebesar 44.717,43 GWh dengan bauran sebesar 13,02%, yaitu meningkat dibandingkan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan kapasitas pembangkit EBT, sehingga mempengaruhi persentase bauran EBT secara keseluruhan.

The total electricity power production from new renewable energy (NRE) power plants in 2024 was 41,238.34 GWh, with a mix percentage of 11.99%, which was a decline compared to 2023. This is mainly due to the addition of renewable energy generation capacity, thus affecting the overall percentage of the renewable energy mix.

Tabel Produksi Tenaga Listrik Berdasarkan Jenis Bahan Bakar Pembangkit
Table of New Renewable Energy (NRE) Electricity Power Production

(disajikan dalam satuan GWh, kecuali dinyatakan lain)(presented in GWh, unless otherwise stated)

Jenis Bahan Bakar Pembangkit Type of Power Plant Fuel	2024		2023		Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
	Produksi Production	Bauran Mix	Produksi Production	Bauran Mix	Selisih Differences	%
Air Water	21.505,13	6,33%	19.931,87	6,16%	1.573,26	0,17%
Panas Bumi Geothermal	16.763,21	4,89%	16.935,73	5,24%	(172,52)	(0,35)%
Surya Solar	424,98	0,12%	177,88	0,06%	247,1	0,06%
Lainnya Others	6.024,11	1,68%	4.943,21	1,53%	1.080,9	0,15%
Jumlah Produksi Listrik EBT Total NRE Electricity Power Production	44.717,43	13,02%	41.988,69	12,99%	2.728,74	0,03%



Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Kinerja Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales Performance

Penjualan tenaga listrik pada tahun 2024 adalah sebesar 306.219 GWh, yaitu mengalami peningkatan sebesar 17.784 GWh atau 6,17% dari tahun 2023.

Electricity sales in 2024 totaled 306,219 GWh, representing a 17,784 GWh increase, or 6.17%, compared to 2023.

Berikut diuraikan rincian penjualan tenaga listrik berdasarkan kelompok tarif dan regional.

Below is a breakdown of electricity sales based on tariff groups and regions.

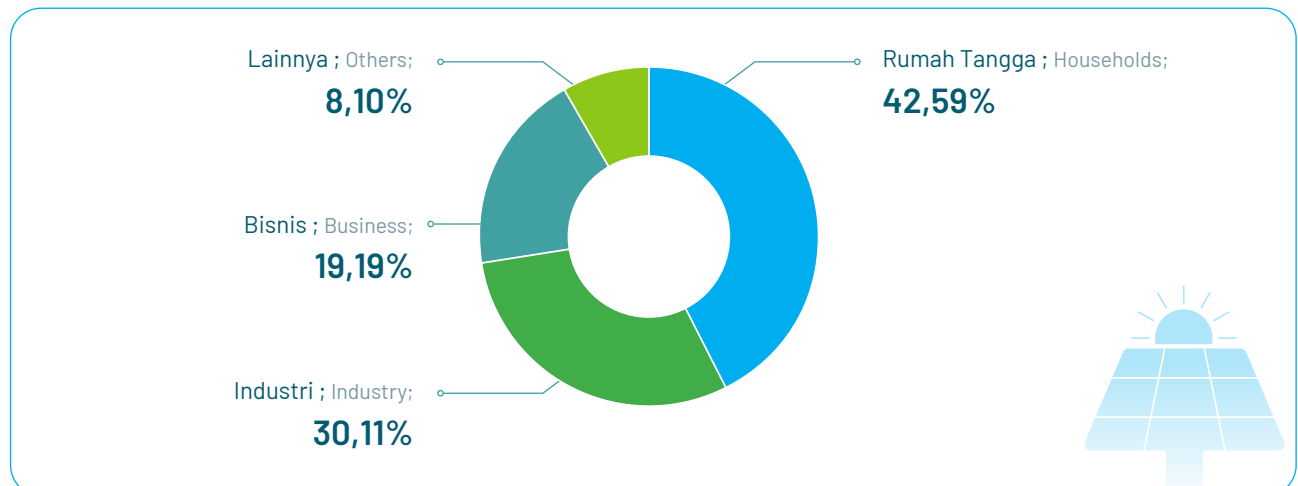
Tabel Penjualan Tenaga Listrik Per Kelompok Tarif
Table of Electricity Sales by Tariff Group

Kelompok Tarif Tariff Group	2024	2023	(disajikan dalam satuan GWh) (presented in GWh) Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Rumah Tangga Households	130.433	122.339	8.094	6,62%
Industri Industry	92.196	88.588	3.608	4,07%
Bisnis Business	58.771	54.383	4.388	8,07%
Lainnya Others	24.819	23.126	1.694	7,33%
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Total Electricity Sales	306.219	288.436	17.784	6,17%

Kelompok tarif rumah tangga masih mendominasi kontribusi penjualan tenaga listrik pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 42,59%, disusul oleh kelompok tarif industri sebesar 30,11%, kelompok tarif bisnis sebesar 19,19%, dan lainnya sebesar 8,10%.

The household tariff group continued to dominate electricity sales contribution in 2024 with a share of 42.59%, followed by the industrial tariff group at 30.11%, the business tariff group at 19.19%, and others at 8.10%.

Grafik Komposisi Penjualan Tenaga Listrik Per Kelompok Tarif Pada Tahun 2024
Chart of Electricity Sales Composition by Tariff Group in 2024



Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Penjualan Tenaga Listrik Per Regional
Table of Electricity Sales by Region

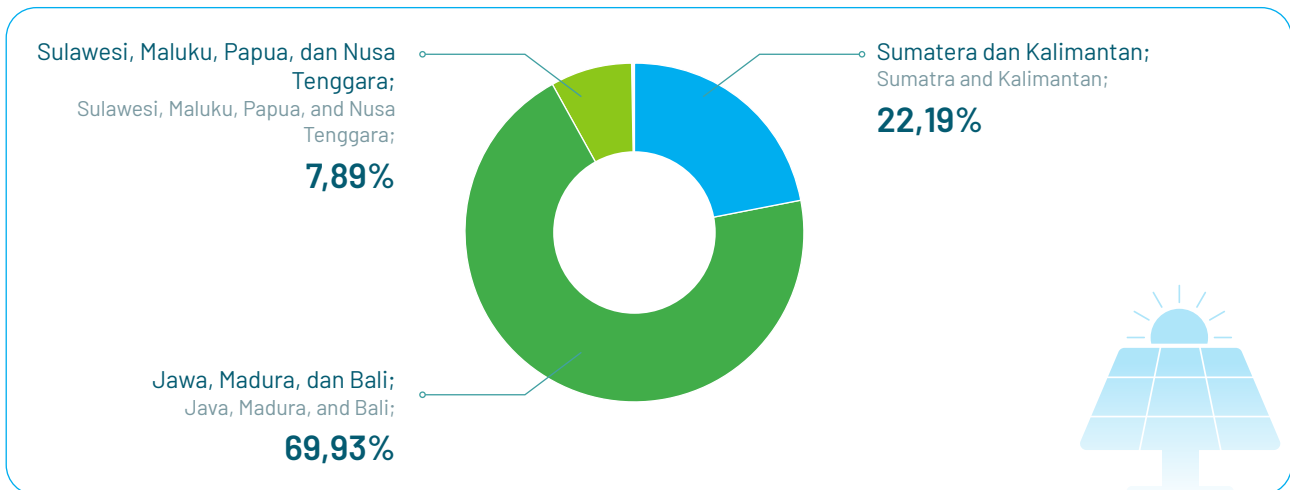
(disajikan dalam satuan GWh, kecuali dinyatakan lain) (presented in GWh, unless otherwise stated)

Regional Region	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Sumatera dan Kalimantan Sumatra and Kalimantan	67.944	63.243	4.701	7,43%
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	214.128	202.765	11.363	5,60%
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	24.148	22.428	1.720	7,67%
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik Total of Electricity Sales	306.219	288.436	17.784	6,17%

Penjualan tenaga listrik pada tahun 2024 di regional Jawa, Madura, dan Bali masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 69,93%, disusul oleh regional Sumatera & Kalimantan sebesar 22,19%, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 7,89%.

Electricity sales in 2024 in the Java, Madura, and Bali region continued to dominate with a contribution of 69.93%, followed by the Sumatra & Kalimantan region at 22.19%, and the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara region at 7.89%.

Grafik Komposisi Penjualan Tenaga Listrik Per Regional Pada Tahun 2024
Chart of Electricity Sales Composition by Region in 2024



Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Jumlah Pelanggan

Total Customers

Jumlah pelanggan pada tahun 2024 adalah sebanyak 92.877.292 pelanggan, yaitu mengalami peningkatan sebesar 3.724.014 pelanggan atau 4,18% dari tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh program *agresive marketing* penambahan pelanggan baru di sektor retail.

Berikut diuraikan rincian jumlah pelanggan berdasarkan kelompok tarif dan regional.

The number of customers in 2024 reached 92,877,292, representing an increase of 3,724,014 customers or 4.18% compared to 2023. This increase was primarily driven by aggressive marketing program to add new customers in the retail sector.

Below is a breakdown of the number of customers by tariff group and region:

Tabel Jumlah Pelanggan Per Kelompok Tarif

Table of Number of Customers by Tariff Group

(disajikan dalam satuan pelanggan, kecuali dinyatakan lain) (presented in number of customers, unless otherwise stated)

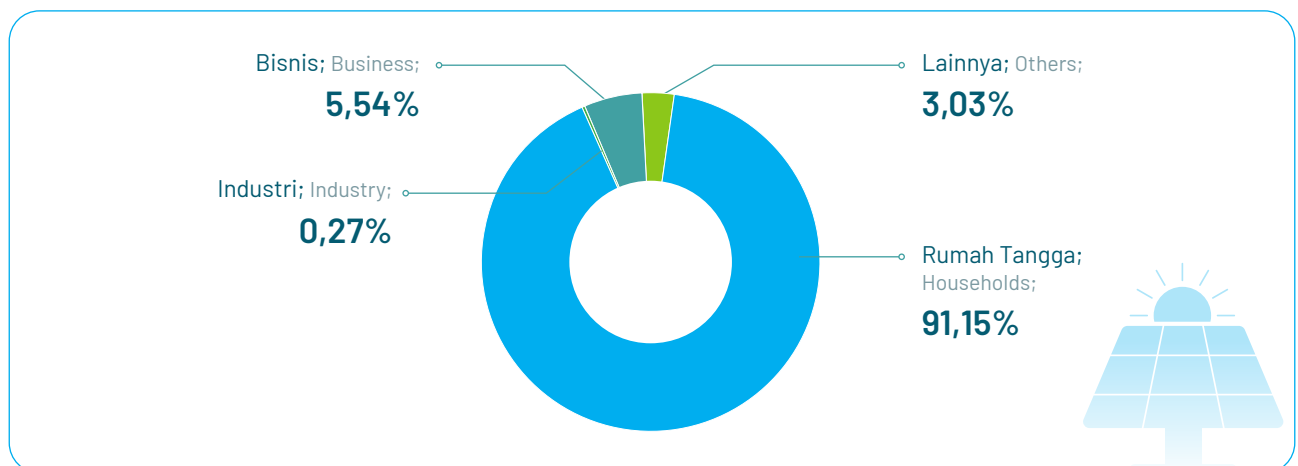
Kelompok Tarif Tariff Group	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Rumah Tangga Households	84.660.382	81.551.348	3.109.057	3,81%
Industri Industry	253.055	206.770	46.285	22,38%
Bisnis Business	5.146.548	4.806.141	439.601	9,34%
Lainnya Others	2.817.307	2.589.019	129.071	4,80%
Jumlah Pelanggan Total Customers	92.877.292	89.153.278	3.724.014	4,18%

Pelanggan kelompok rumah tangga masih mendominasi dengan tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 91,15% disusul oleh kelompok tarif bisnis sebesar 5,54% kelompok tarif lain-lain sebesar 3,03% dan industri sebesar 0,27%.

The household customer group still dominated in 2024, contributing 91.15%, followed by the business tariff group at 5.54%, other tariff groups at 3.03%, and the industrial group at 0.27%.

Grafik Komposisi Jumlah Pelanggan Per Kelompok Tarif Pada Tahun 2024

Chart of Customer Composition by Tariff Group in 2024



Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Jumlah Pelanggan Per Regional
Table of Total Customers by Region

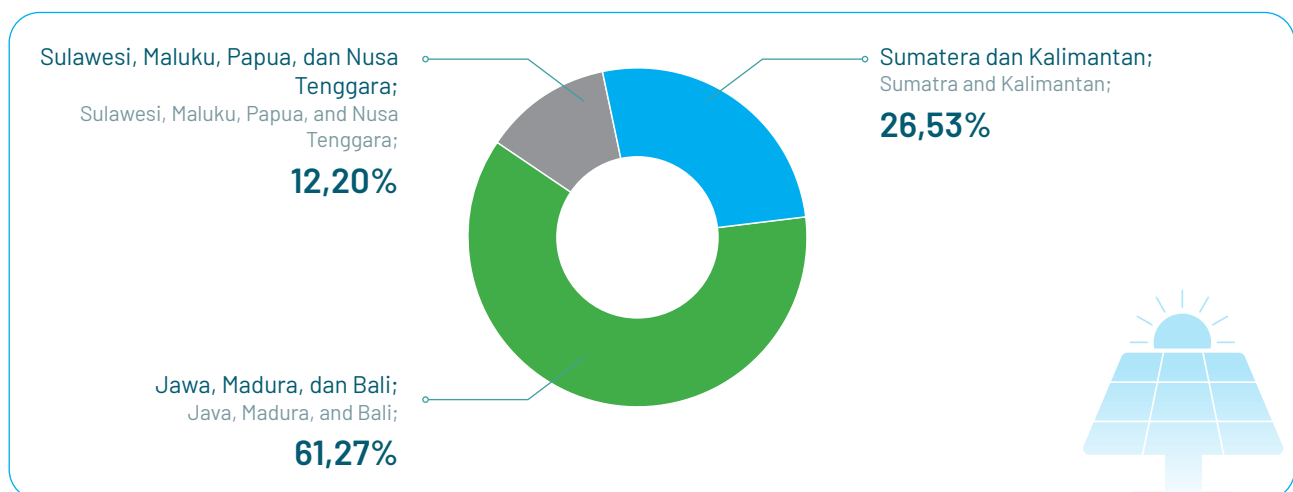
(disajikan dalam satuan pelanggan) (presented in number of customers)

Regional Region	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Sumatera dan Kalimantan Sumatra and Kalimantan	24.643.046	23.554.024	1.089.022	4,62%
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	56.902.543	54.876.864	2.025.679	3,69%
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	11.331.703	10.722.390	609.313	5,68%
Jumlah Pelanggan Total Customers	92.877.292	89.153.278	3.724.014	4,18%

Jumlah pelanggan pada tahun 2024 di regional Jawa, Madura, dan Bali masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 61,27% disusul oleh regional Sumatera dan Kalimantan sebesar 26,53% dan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 12,20%.

The total of customers in 2024 in the Java, Madura, and Bali region still dominated with a contribution of 61.27%, followed by the Sumatra and Kalimantan region at 26.53%, and the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara region at 12.20%.

Grafik Komposisi Jumlah Pelanggan Per Regional Pada Tahun 2024
Chart of Total Customer Composition by Region in 2024



Daya Tersambung

Connected Power

Daya tersambung pada tahun 2024 adalah sebesar 182.026 MVA, yaitu mengalami peningkatan sebesar 10.517 MVA atau 6,13% dari tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan pelanggan Kelompok Tegangan Tinggi (KTT) serta *agresive marketing* pada penyambungan pelanggan baru/ tambah daya di sektor retail.

The connected power in 2024 reached 182,026 MVA, representing an increase of 10,517 MVA, or 6.13%, compared to 2023. This increase was primarily driven by addition of High Voltage Group (KTT) customers and aggressive marketing in connecting new customers/adding power in the retail sector.

Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Berikut diuraikan rincian daya tersambung berdasarkan kelompok tarif dan regional.

The following sections present a detailed breakdown of connected power by tariff group and region.

Tabel Daya Tersambung Per Kelompok Tarif
Table of Connected Power by Tariff Group

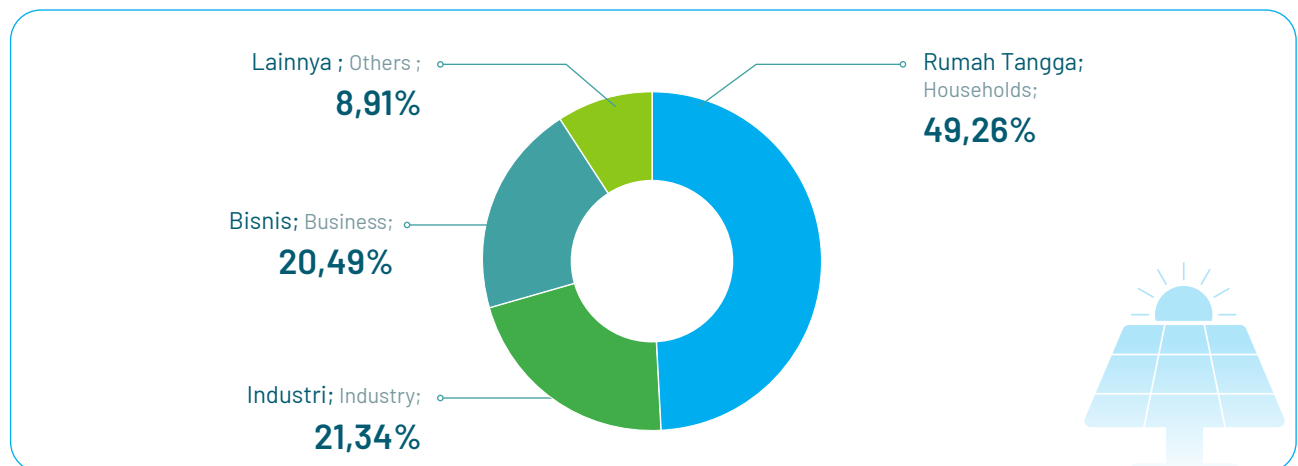
(disajikan dalam satuan MVA, kecuali dinyatakan lain) (presented in MVA, unless otherwise stated)

Kelompok Tarif Tariff Group	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Rumah Tangga Households	89.657	85.318.86	4.337	5,08%
Industri Industry	38.852	36.698.11	2.154	5,87%
Bisnis Business	37.295	36.060.99	1.234	3,42%
Lainnya Others	16.222	13.430.46	2.792	20,79%
Jumlah Daya Tersambung Total of Connected Power	182.026	171.508.42	10.518	6,13%

Kontribusi daya tersambung pada kelompok rumah tangga tahun 2024 masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 49,26%, disusul oleh kelompok tarif industri sebesar 21,34%, kelompok tarif bisnis sebesar 20,49%, dan lainnya sebesar 8,91%.

The contribution of connected power in the household group remained dominant in 2024, accounting for 49.26%, followed by the industrial tariff group at 21.34%, the business tariff group at 20.49%, and others at 8.91%.

Grafik Komposisi Daya Tersambung Per Kelompok Tarif Pada Tahun 2024
Chart of Composition of Connected Power by Tariff Group in 2024



Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Daya Tersambung Per Regional
Table of Connected Power by Region

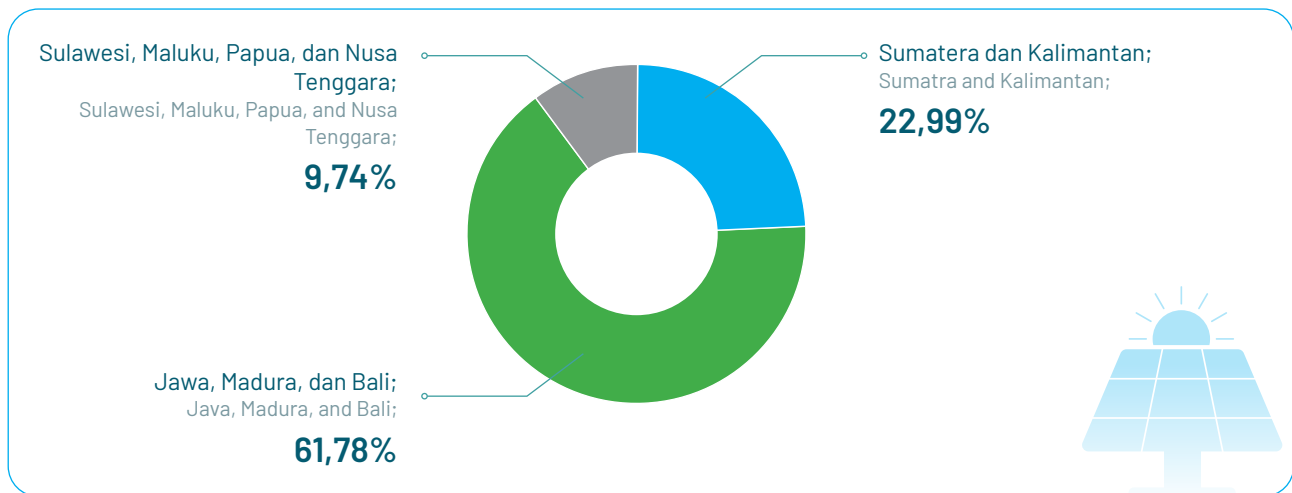
(disajikan dalam satuan MVA, kecuali dinyatakan lain) (presented in MVA, unless otherwise stated)

Regional Regional	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Sumatera dan Kalimantan Sumatra and Kalimantan	41.845.12	39.136.01	2.709	6,92%
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	112.459.39	116.072.58	6.387	5,50%
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	17.721.75	16.299.83	1.422	8,72%
Jumlah Daya Tersambung Number of Connected Power	182.026.25	171.508.42	10.518	6,13%

Daya tersambung pada tahun 2024 di regional Jawa, Madura, dan Bali masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 61,78%, disusul oleh regional Sumatera dan Kalimantan sebesar 22,99%, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 9,74%.

Connected Power in 2024 in the Java, Madura, and Bali region remained dominant with a contribution of 61.78%, followed by the Sumatra and Kalimantan region at 22.99%, and the Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara region at 9.74%.

Grafik Komposisi Daya Tersambung Per Regional Pada Tahun 2024
Chart of Composition of Connected Power by Region in 2024



Susut Jaringan

Network Loss

Susut jaringan mengacu pada persentase hilangnya energi listrik sebagai konsekuensi dari penyaluran energi listrik, baik pada proses transmisi maupun distribusi. Susut jaringan dapat disebabkan oleh penyebab teknis seperti faktor penghantar dan peralatan ataupun oleh faktor non-teknis seperti pencurian listrik dan kesalahan pencatatan meter.

Network loss refers to the percentage of electricity energy lost due to the transmission and distribution processes. Network loss may be caused by technical factors, such as conductor and equipment conditions, or by non-technical factors, including electricity theft and meter reading errors.



Tinjauan Operasi Per Segmen Operational Overview by Segment

Susut jaringan pada tahun 2024 adalah sebesar 8,55% dan sebesar 8,57% di tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh:

Susut Transmisi

1. Sistem Sumatera:

Konfigurasi sistem kelistrikan di Sumatera belum optimal karena sebagian besar pembangkit listrik berada di wilayah selatan. Akibatnya, terjadi peningkatan aliran daya antar sub-sistem untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah lainnya. Selain itu, masuknya pembangkit besar PLTU Sumsel 8 (2 x 600 MW) ke sub-sistem Sumsel (Sumatera Selatan) tidak diimbangi dengan penyelesaian proyek SUTET 275 kV dan 500 kV yang pembangunannya tertunda. Hal ini membuat evakuasi daya harus melalui jaringan 150 kV yang kapasitasnya lebih terbatas, sehingga susut meningkat.

2. Sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali):

Di wilayah barat sistem Jamali, terdapat kendala pada kesiapan pembangkit, baik karena keterbatasan pasokan energi primer maupun gangguan pada pembangkit itu sendiri, dimana wilayah barat merupakan pusat beban utama. Karena pembangkit tidak siap, kebutuhan listrik harus dipenuhi dari wilayah tengah, sehingga terjadi peningkatan transfer daya. Selain itu, pertumbuhan beban yang pesat di Bali menyebabkan peningkatan transfer listrik dari Jawa Timur ke Bali.

Mitigasi yang dilakukan atas susut transmisi:

1. Koordinasi dengan stakeholder pelaksana proyek untuk percepatan masuknya jalur transmisi pendukung turunya susut.
2. Koordinasi dengan stakeholder pengelola pembangkit dan penyedia energi primer untuk terus meningkatkan kesiapan pembangkitnya, terutama untuk pembangkit-pembangkit di pusat beban.
3. Melakukan evaluasi pola operasi periodik untuk mendapatkan susut yang optimal dengan tetap memperhatikan kondisi sistem.
4. Pembatasan transfer antar sub-sistem sesuai batasan stabilitas.

Network loss in 2024 was 8.55%, compared to 8.57% in 2023. This was mainly due to:

Transmission Loss

1. Sumatra System:

The electrical system configuration in Sumatra is not yet optimal, as most power plants are in the southern part of the region. As a result, there has been an increase in power flow between sub-systems to meet electricity demand in other areas. Additionally, the integration of the large-scale PLTU Sumsel 8 power plant (2 x 600 MW) into the South Sumatra sub-system was not supported by the completion of the 275 kV and 500 kV high-voltage transmission line (SUTET) projects, whose construction has been delayed. This situation forced power evacuation to rely on the 150 kV network, which has a more limited capacity, thereby increasing transmission loss.

2. Java-Madura-Bali (Jamali) System:

In the western region of the Jamali system, challenges related to power plant readiness arose, primarily due to limitations in primary energy supply and disturbances at the plants themselves, despite the western region being the main load center. Because the power plants were not fully operational, electricity demand had to be met from the central area, leading to increased power transfer. Additionally, rapid load growth in Bali led to an increase in electricity transfer from East Java to Bali.

Mitigation measures taken for transmission losses:

1. Coordination with project implementation stakeholders to accelerate the operation of transmission lines that support the reduction of losses.
2. Coordination with power plant operators and primary energy suppliers to continuously improve the readiness of power plants, especially those located in major load centers.
3. Conducting periodic evaluations of operational patterns to achieve optimal loss levels while considering system conditions.
4. Limiting inter-subsystem power transfers according to stability constraints.

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel Susut Jaringan
Table of Network Loss

(disajikan dalam satuan %)(presented in percentage %)

Uraian Description	2024	2023	Selisih Differences
Susut Transmisi Transmission Losses	2,03	2,01	0,02
Susut Distribusi Distribution Losses	6,55	6,56	(0,01)
Susut Jaringan Network Losses	8,55	8,57	(0,02)

Tabel Susut Jaringan Per Regional
Network Loss Table by Region

(disajikan dalam satuan %)(presented in percentage %)

Regional Region	2024	2023	Selisih Differences
Susut Transmisi Transmission Losses	2,03	2,01	0,02
Sumatera dan Kalimantan Sumatera and Kalimantan	10,78	10,52	0,26
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	7,91	7,93	(0,02)
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	8,75	8,69	0,04

Tingkat Keandalan Layanan

Service Reliability Level

Tingkat keandalan layanan PLN diukur dengan menggunakan indeks lama gangguan (*System Average Interruption Duration Index/SAIDI*) serta indeks frekuensi gangguan (*System Average Interruption Frequency/SAIFI*). SAIDI merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat durasi gangguan per pelanggan, sedangkan SAIFI merupakan indeks untuk mengukur banyaknya jumlah gangguan per pelanggan.

Jumlah SAIDI tahun 2024 adalah selama 320,24 menit/pelanggan, yaitu mengalami pengurangan 5,29% atau 17,89 menit/pelanggan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa upaya penguatan keandalan selama tahun 2024 diantaranya yaitu: penambahan *keypoint* dan *remote* untuk percepatan pemulihan gangguan dan penurunan durasi padam serta Implementasi *Outage Management* dan *Yantek Optimization*.

PLN's service reliability level is measured using the System Average Interruption Duration Index (SAIDI) and the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). SAIDI is an index used to determine the duration of interruptions per customer, while SAIFI is an index that measures the number of interruptions per customer.

The total SAIDI in 2024 was 320.24 minutes per customer, representing a 5.29% decrease or 17.89 minutes per customer compared to 2023. This was mainly due to the several efforts made to strengthen reliability throughout 2024, which included: adding keypoints and remotes to accelerate disruption recovery and reduce the duration of outages, as well as implementing Outage Management and Yantek Optimization.

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Tabel SAIDI Per Regional
SAIDI Table Per Regional

(disajikan dalam satuan menit/pelanggan, kecuali dinyatakan lain) (Presented in units of minutes, customers, unless otherwise stated)

Regional Region	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Sumatera dan Kalimantan Sumatera and Kalimantan	634,50	521,32	113,18	21,71%
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	158,34	229,79	(71,45)	(31,09)%
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	466,89	490,13	(23,24)	(4,74)%
Jumlah SAIDI Total SAIDI	320,24	338,13	(17,89)	(5,29)%

Jumlah SAIFI tahun 2024 adalah sebanyak 3,23 kali/pelanggan, yaitu mengalami pengurangan 24,36% atau 1,04 kali/pelanggan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya gangguan permanen pada Jaringan Tegangan Menengah setelah dilakukan beberapa upaya perkuatan keandalan selama tahun 2024 diantaranya yaitu: penambahan *Keypoint* dan *Remote* untuk percepatan *manuver* penyulang serta memaksimalkan pekerjaan dengan metode PDKB & pemeliharaan minim padam.

The total SAIFI in 2024 was 3.23 times per customer, representing a 24.36% decrease or 1.04 times per customer compared to 2023. This improvement was mainly due to the decrease of permanent disruptions to the Medium Voltage Network after several reliability strengthening efforts were carried out throughout 2024, including: adding Keypoints and Remotes to accelerate feeder maneuvers and maximizing work with PDKB method & minimal outage maintenance.

Tabel SAIFI Per Regional
SAIFI Table Per Region

(disajikan dalam satuan menit/pelanggan, kecuali dinyatakan lain) (Presented in units of times per customer)

Regional Region	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Sumatera dan Kalimantan Sumatera and Kalimantan	5,08	5,98	(0,9)	(15,05)%
Jawa, Madura, dan Bali Java, Madura, and Bali	2,12	3,08	(0,96)	(31,17)%
Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Sulawesi, Maluku, Papua, and Nusa Tenggara	4,87	6,63	(1,76)	(26,55)%
Jumlah SAIFI Total SAIFI	3,23	4,27	(1,04)	(24,36)%

Tinjauan Operasi Per Segmen

Operational Overview by Segment

Panjang Jaringan Transmisi dan Distribusi

Length of Transmission Network and Distribution

Panjang jaringan transmisi pada tahun 2024 adalah sepanjang 72.656 kms, yaitu lebih panjang dibandingkan tahun 2023 sepanjang 70.933 kms. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan beban dan kebutuhan penyaluran tenaga listrik yang meningkat, serta upaya untuk meningkatkan keandalan sistem transmisi agar dapat mendukung pasokan listrik secara nasional.

Adapun, panjang jaringan distribusi pada tahun 2024 adalah sepanjang 1.066.197 kms, yaitu lebih panjang dibandingkan tahun 2023 sepanjang 1.048.183 kms. Hal ini disebabkan oleh penambahan jaringan untuk program penyambungan pelanggan dan penguatan kehandalan distribusi.

The total length of the transmission network in 2024 reached 72,656 kilometers, surpassing the 70,933 kilometers recorded in 2023. This increase was driven by the growth of load and the need for increased electricity distribution, as well as efforts to improve the reliability of the transmission system in order to support national electricity supply.

Meanwhile, the length of the distribution network in 2024 reached 1,066,197 kilometers, an increase from 1,048,183 kilometers in 2023. This growth was due to the network expansion for customer connection programs and strengthening distribution reliability.

Profitabilitas Per Segmen

Profitability Per Segment

Profitabilitas per segmen mengacu pada Laporan Keuangan Audit yang terlampir dalam Laporan ini yaitu pada Catatan No. 53.

The profitability per segment is disclosed in the Audited Financial Statements attached to this Report, specifically in Note 53.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tinjauan keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, dengan Akuntan Publik adalah Yanto S.E., Ak., M.Ak., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.0241).

KAP memberikan opini bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN (Persero) telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian, sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

This financial overview is prepared based on the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) for the period ended December 31, 2024, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, with the Public Accountant being Yanto S.E., Ak., M.Ak., CPA (Public Accountant License No. AP.0241).

The KAP issued an opinion stating that the Consolidated Financial Statements of PT PLN (Persero) present fairly, in all material respects, the consolidated financial position, financial performance, and cash flows, in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position

Tabel Ringkasan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Table of Summary of the Consolidated Statement of Financial Position

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.604.928.877	1.539.256.218	65.672.659	4,27%
Aset Lancar Current Assets	167.446.389	131.383.486	36.062.903	27,45%
Jumlah Aset Total Asset	1.772.375.266	1.670.639.704	101.735.562	6,09%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.061.160.235	1.015.631.399	45.528.836	4,48%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	539.162.948	511.812.872	27.350.076	5,34%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	172.052.083	143.195.433	28.856.650	20,15%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	711.215.031	655.008.305	56.206.726	8,58%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.772.375.266	1.670.639.704	101.735.562	6,09%

Jumlah Aset

Total Assets

Jumlah aset PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,77 kuadriliun yaitu mengalami peningkatan 6,09% atau Rp101,74 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,67 kuadriliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan dari Aset Tetap, Kas dan Setara Kas, juga Piutang dari Pemerintah.

Dari peningkatan jumlah aset tersebut berdampak pada berdampak pada rasio *Return on Assets* (ROA) dan rasio liabilitas terhadap aset.

PLN's total assets in 2024 amounted to Rp1.77 quadrillion, an increase of 6.09% or Rp101.74 trillion compared to Rp1.67 quadrillion in 2023. The increase was primarily driven by growth in Fixed Assets, Cash and Cash Equivalents, as well as Receivables from the Government.

This growth in total assets consequently impacted the Return on Assets (ROA) ratio and the liabilities-to-assets ratio.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Asset

Jumlah aset tidak lancar PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,60 kuadriliun yaitu mengalami peningkatan 4,27% atau Rp65,67 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,54 kuadriliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan aset tetap karena adanya revaluasi aset yang dilakukan pada tahun 2024.

Dari peningkatan jumlah aset tidak lancar tersebut berdampak pada rasio liabilitas terhadap aset.

PLN's non-current assets in 2024 amounted to Rp1.60 quadrillion, an increase of 4.27% or Rp65.67 trillion compared to Rp1.54 quadrillion in 2023. The increase was primarily driven by the rise in fixed assets due to an asset revaluation conducted in 2024.

This growth in non-current assets consequently impacted the liabilities-to-assets ratio.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tabel Aset Tidak Lancar
Table of Non-Current Assets

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Aset tetap Property, plant, and equipment	1.511.901.240	1.448.970.621	62.930.619	4,34%
Aset hak guna Right to Use Assets	29.368.236	30.574.504	(1.206.268)	(3,95)%
Properti investasi Investment properties	5.567.178	5.939.235	(372.057)	(6,26)%
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investments in associates and joint ventures	30.284.844	26.526.781	3.758.063	14,17%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	12.340.937	12.376.005	(35.068)	-0,28%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	609.374	540.694	68.680	12,70%
Piutang pihak berelasi Receivables from related parties	1.097.914	1.028.387	69.527	6,76%
Rekening bank dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks	3.289.705	4.434.080	(1.144.375)	(25,81)%
Piutang lain-lain Other receivables	1.500.345	1.883.832	(383.487)	(20,36)%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	246.471	41.138	205.333	499,13%
Aset Derivatif Derivative Assets	604.572	-	604.572	100,00%
Aset tidak lancar lain Other Non-current Assets	8.118.061	6.940.941	1.177.120	16,96%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.604.928.877	1.539.256.218	65.672.659	4,27%

Aset Lancar

Current Assets

Jumlah aset lancar PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp167,45 triliun yaitu mengalami peningkatan 27,45% atau Rp36,06 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp131,38 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan kas dan piutang dari pemerintah.

Dari peningkatan jumlah aset lancar tersebut berdampak pada rasio likuiditas.

PLN's current assets in 2024 totaled Rp167.45 trillion, representing a 27.45% increase of Rp36.06 trillion from Rp131.38 trillion in 2023. The increase was mainly driven by growth in cash and receivables from the government.

This growth in current assets subsequently affected the liquidity ratios.

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance OverviewTabel Aset Lancar
Table of Current Assets

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	61.364.446	55.920.541	5.443.905	9,74%
Rekening bank dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks	232.510	99.019	133.491	134,81%
Investasi jangka pendek Short-term investments	984.587	913.670	70.917	7,76%
Piutang usaha: Trade receivables				
- Pihak berelasi Related parties	2.569.123	2.412.928	156.195	6,47%
- Pihak ketiga Third parties	25.077.279	24.428.027	649.252	2,66%
Piutang dari Pemerintah Receivables from Government	43.290.748	22.446.998	20.843.750	92,86%
Piutang lain-lain Other receivables	3.417.791	2.306.621	1.111.170	48,17%
Persediaan Inventories	20.139.800	17.862.312	2.277.488	12,75%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	5.403.503	3.783.609	1.619.894	42,81%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	4.269.422	952.477	3.316.945	348,24%
Piutang pihak berelasi Receivables from related parties	178.202	251.026	(72.824)	(29,01)%
Aset derivatif Derivative assets	518.978	6.258	512.720	8193,03%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	167.446.389	131.383.486	36.062.903	27,45%

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Jumlah ekuitas PLN adalah mengalami peningkatan 4,48% atau Rp45,53 triliun menjadi sebesar Rp1,06 kuadriliun pada tahun 2024 dari sebesar Rp1,02 kuadriliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya surplus atas revaluasi aset tetap yang dilakukan.

Dari peningkatan jumlah ekuitas tersebut berdampak pada rasio *Return on Equity* (ROE) dan liabilitas terhadap ekuitas.

PLN's total equity increased by 4.48% or Rp45.53 trillion to Rp1.06 quadrillion in 2024 from Rp1.02 quadrillion in 2023. The increase was primarily driven by a surplus from the revaluation of fixed assets.

This growth in equity consequently affected the Return on Equity (ROE) ratio and the liabilities-to-equity ratio.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tabel Ekuitas
Table of Equity

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Modal saham Capital Stock	150.536.096	150.536.096	-	-
Tambahan modal disetor Additional Paid-in Capital	34.608	34.608	-	-
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali Difference in value from transactions with non-controlling interests	(2.100)	(2.100)	-	-
Saldo laba: Retained Earnings				
- Ditentukan penggunaannya Appropriated	95.738.657	76.803.066	18.935.591	24,65%
- Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	103.765.084	107.538.313	(3.773.229)	(3,51)%
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	709.892.501	679.584.024	30.308.477	4,46%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent	1.059.964.846	1.014.494.007	45.470.839	4,48%
Kepentingan non-pengendali Non-Controlling Interest	1.195.389	1.137.392	57.997	5,10%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.061.160.235	1.015.631.399	45.528.836	4,48%

Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

Jumlah liabilitas PLN adalah mengalami peningkatan 8,58% atau Rp56,21 triliun menjadi sebesar Rp711,22 triliun pada tahun 2024 dari sebesar Rp655,01 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan liabilitas pajak tangguhan, utang usaha, *interest bearing debt*, dan liabilitas imbalan kerja.

Dari peningkatan jumlah liabilitas tersebut berdampak pada rasio total liabilitas terhadap total aset dan rasio solvabilitas.

PLN's total liabilities increased by 8.58% or Rp56.21 trillion to Rp711.22 trillion in 2024 from Rp655.01 trillion in 2023. The increase was primarily driven by rises in deferred tax liabilities, accounts payable, interest-bearing debt, and employee benefit liabilities.

This growth in total liabilities subsequently impacted the total liabilities-to-total assets ratio and the solvency ratio.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka panjang PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp539,16 triliun, yaitu mengalami peningkatan 5,34% atau Rp27,35 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp511,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan liabilitas pajak tangguhan, pendapatan ditangguhkan, dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

PLN's non-current liabilities in 2024 amounted to Rp539.16 trillion, increasing by 5.34% or Rp27.35 trillion compared to Rp511.81 trillion in 2023. The increase was primarily driven by rises in deferred tax liabilities, deferred revenue, and long-term employee benefit liabilities.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Dari peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang tersebut berdampak pada rasio total liabilitas terhadap total aset.

This growth in long-term liabilities consequently impacted the total liabilities-to-total assets ratio.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Non-Current Liabilities

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	70.002.171	58.228.739	11.773.432	20,22%
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term liabilities - net of current portion				
- Penerusan pinjaman Two-step loans	23.023.177	26.243.812	(3.220.635)	(12,27)%
- Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank Government and non-bank Government financial institution loans	2.092.807	1.472.907	619.900	42,09%
- Utang sewa Lease Liabilities	10.015.345	10.501.832	(486.487)	(4,63)%
- Utang bank Bank loans	135.444.401	127.875.171	7.569.230	5,92%
- Utang obligasi dan sukuk ijarah Bonds payable and sukuk ijarah	188.527.108	191.986.322	(3.459.214)	(1,80)%
- Utang listrik swasta Electricity purchase payables	4.723.016	5.101.199	(378.183)	(7,41)%
- Utang lain-lain Other payables	433.655	466.867	(33.212)	(7,11)%
Pendapatan ditangguhkan Deferred revenues	34.449.127	27.104.985	7.344.142	27,10%
Liabilitas imbalan kerja Employee benefits liabilities	70.452.141	62.831.038	7.621.103	12,13%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	539.162.948	511.812.872	27.350.076	5,34%

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka pendek PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp172,05 triliun, yaitu mengalami peningkatan 20,15% atau Rp28,86 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp143,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya utang usaha, interest bearing debt jangka pendek, imbalan kerja jangka pendek, dan pendapatan ditangguhkan.

PLN's current liabilities in 2024 amounted to Rp172.05 trillion, representing an increase of 20.15% or Rp28.86 trillion compared to Rp143.19 trillion in 2023. The increase was primarily driven by accounts payable, short-term interest-bearing debt, short-term employee benefits, and deferred revenue.

Dari peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek tersebut berdampak pada rasio solvabilitas.

This growth in short-term liabilities consequently impacted the solvency ratio.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Current Liabilities

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Utang usaha: Trade payables				
- Pihak berelasi Related Parties	22.712.501	15.523.529	7.188.972	46,31%
- Pihak ketiga Third Parties	47.985.318	41.623.998	6.361.320	15,28%
Utang pajak Taxes payable	5.301.877	4.231.945	1.069.932	25,28%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	10.495.898	8.049.497	2.446.401	30,39%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefits liabilities	10.998.635	7.882.380	3.116.255	39,53%
Uang jaminan langganan Customer security deposits	18.463.585	17.245.794	1.217.791	7,06%
Utang biaya proyek Project cost payables	1.680.636	1.512.219	168.417	11,14%
Pendapatan ditangguhkan Deferred revenues	3.849.635	1.581.942	2.267.693	143,35%
Liabilitas derivatif Derivative liabilities	61.781	201.359	(139.578)	(69,32)%
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun: Current maturities of long-term liabilities				
- Penerusan pinjaman Two-step loans	3.013.763	2.939.616	74.147	2,52%
- Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank Government and non-bank Government financial institution loans	750.000	750.000	-	-
- Utang sewa Lease liabilities	2.880.568	2.267.698	612.870	27,03%
- Utang bank Bank loans	21.785.261	20.947.017	838.244	4,00%
- Utang obligasi dan sukuk ijarah Bonds payable and sukuk ijarah	10.532.135	5.578.511	4.953.624	88,80%
- Utang listrik swasta Electricity purchase payables	615.418	554.608	60.810	10,96%
- Utang lain-lain Other payables	10.925.072	12.305.320	(1.380.248)	(11,22)%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	172.052.083	143.195.433	28.856.650	20,15%



Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Analysis of Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	545.380.993	487.384.064	57.996.929	11,90%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	484.759.987	440.183.990	44.575.997	10,13%
Laba Usaha Operating Profit	60.621.006	47.200.074	13.420.932	28,43%
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih Other (expenses)/income - net	(2.129.058)	1.513.051	(3.642.109)	(240,71)%
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih (Loss)/gain on foreign exchange - net	(6.780.398)	3.723.639	(10.504.037)	(282,09)%
Penghasilan keuangan Finance income	976.269	953.515	22.754	2,39%
Beban keuangan Finance costs	(24.417.860)	(21.010.355)	(3.407.505)	16,22%
Laba Sebelum Pajak Profit before tax	28.269.959	32.379.924	(4.109.965)	(12,69)%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(10.506.935)	(10.308.466)	(198.469)	1,93%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	17.763.024	22.071.458	(4.308.434)	(19,52)%
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak Other comprehensive income for the year after tax	30.855.816	4.297.375	26.558.441	618,02%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	48.618.840	26.368.833	22.250.007	84,38%
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:				
- Pemilik entitas induk Owners of the parent	17.705.027	22.025.595	(4.320.568)	(19,62)%
- Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	57.997	45.863	12.134	26,46%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada: Total comprehensive income for the year attributable to:				
- Pemilik entitas induk Owners of the parent	48.560.843	26.322.970	22.237.873	84,48%
- Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	57.997	45.863	12.134	26,46%
Laba Per Saham Dasar/Dilusian (dalam Rupiah penuh) Earnings Per Share Basic/Diluted (in Rupiah full amount)	117.613	149.874	(32.261)	(21,53)%

Pendapatan Usaha

Revenue

Pada tahun 2024, PLN berhasil mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp545,38 triliun, yaitu mengalami peningkatan 11,90% atau Rp58,00 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp487,38 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan penjualan listrik sebesar 17,78 TWh sehingga menjadi 306,2 TWh.

Dari peningkatan pendapatan usaha tersebut berdampak pada rasio profitabilitas dan EBITDA *margin*.

In 2024, PLN successfully recorded operating revenue of Rp545.38 trillion, representing an increase of 11.90% or Rp58.00 trillion compared to Rp487.38 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a rise in electricity sales of 17.78 TWh, reaching a total of 306.2 TWh.

This growth in operating revenue consequently impacted the profitability ratios and EBITDA *margin*.

Tabel Pendapatan Usaha

Total of Revenue

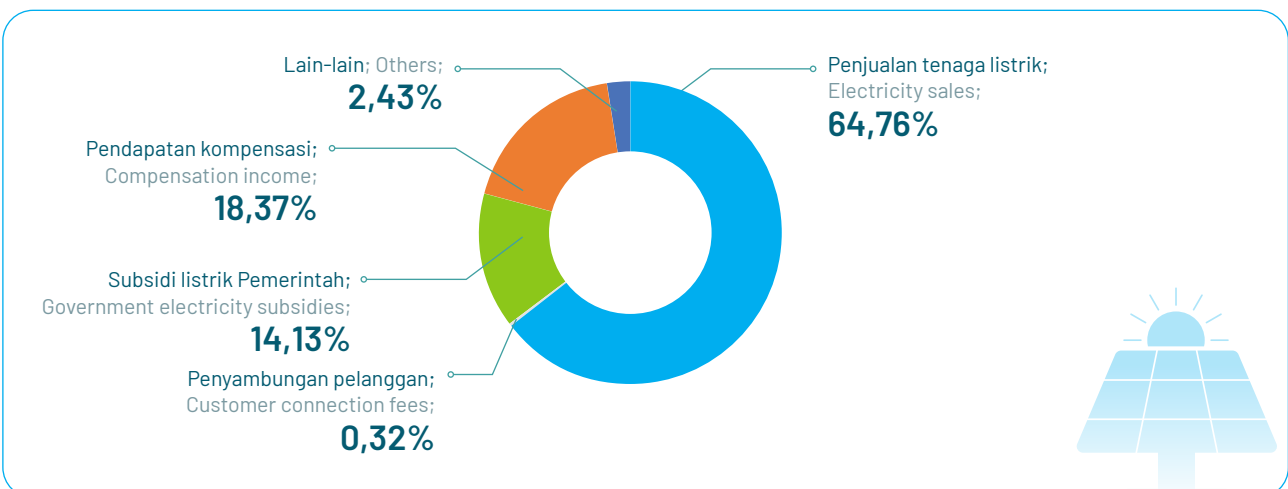
(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Penjualan tenaga listrik Sale of electricity	353.176.020	333.191.062	19.984.958	6,00%
Penyambungan pelanggan Customer connection fees	1.746.004	1.288.284	457.720	35,53%
Subsidi listrik Pemerintah Government electricity subsidy	77.045.335	68.636.731	8.408.604	12,25%
Pendapatan kompensasi Compensation income	100.184.044	73.991.897	26.192.147	35,40%
Lain-lain Others	13.229.590	10.276.090	2.953.500	28,74%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	545.380.993	487.384.064	57.996.929	11,90%

Dari jumlah pendapatan usaha pada tahun 2024, dominasi kontribusi adalah dari penjualan tenaga listrik sebesar 64,76%, pendapatan kompensasi sebesar 18,37%, subsidi listrik dari Pemerintah sebesar 14,13%, lain-lain sebesar 2,43%, dan penyambungan pelanggan sebesar 0,32%.

In 2024, the majority of revenue was contributed by electricity sales, accounting for 64.76% followed by compensation income at 18.37%, at 14.13%, other income at 2.43%, and customer connection fees at 0.32%.

Grafik Komposisi Pendapatan Usaha Tahun 2024
Chart of Revenue Composition in 2024





Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Penjualan Tenaga Listrik

Sales of Electricity

Jumlah penjualan tenaga listrik PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp353,18 triliun yaitu mengalami peningkatan 6,00% atau Rp19,98 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp333,19 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan penjualan listrik sebesar 17,78 TWh.

Dari peningkatan penjualan tenaga listrik tersebut berdampak pada rasio profitabilitas.

PLN's sales of electricity in 2024 totaled Rp353.18 trillion, representing a 6.00% increase of Rp19.98 trillion from Rp333.19 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a rise in electricity sales of 17.78 TWh.

This growth in electricity sales consequently impacted the profitability ratios.

Penyambungan Pelanggan

Customer Connection Fees

Jumlah biaya penyambungan tenaga listrik yang diakui sebagai pendapatan usaha PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1,75 triliun, yaitu mengalami peningkatan 35,53% atau Rp457,72 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya adanya bertambahnya daya tersambung sampai dengan 10,52 MVA.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio profitabilitas.

Revenue from electricity connection fees recognized as PLN's revenue in 2024 amounted to Rp1.75 trillion, a 35.53% increase or Rp457.72 billion compared to Rp1.29 trillion in 2023. The increase was primarily driven by the addition of concealed capacity up to 10.52 MVA.

This growth consequently impacted the profitability ratios.

Subsidi listrik Pemerintah

Government Electricity Subsidy

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah *margin* 7% terhadap harga jual aktual per masing-masing golongan tarif, kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Jumlah pendapatan usaha dari subsidi Pemerintah PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp77,05 triliun, yaitu mengalami peningkatan 12,25% atau Rp8,41 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp68,64 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan beban operasi yang dikeluarkan perusahaan seiring juga meningkatnya permintaan tenaga listrik oleh pelanggan.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio profitabilitas.

Subsidy income refers to revenue from the government for the difference between the allowable cost plus a 7% margin and the actual selling price per tariff group, except for those tariff groups that have undergone automatic tariff adjustments. This is based on Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2023, the fifth amendment to Regulation No. 28 of 2016 on electricity tariffs provided by PT PLN (Persero).

PLN's operating revenue from government subsidies in 2024 amounted to Rp77.05 trillion, marking a 12.25% increase or Rp8.41 trillion compared to Rp68.64 trillion in 2023. The increase was primarily driven by higher operating expenses incurred by the company, which corresponded with the rising demand for electricity from customers.

This increase consequently impacted the profitability ratios.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Pendapatan Kompensasi

Compensation Income

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan tarif. Kompensasi dari Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan/atau BPK Republik Indonesia, dan jumlahnya telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan ditinjau oleh BPKP dan/atau BPK.

Jumlah pendapatan kompensasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp100,18 triliun, yaitu mengalami peningkatan 35,40% atau Rp26,19 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp73,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan beban operasi yang dikeluarkan perusahaan seiring juga meningkatnya permintaan tenaga listrik oleh pelanggan.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio profitabilitas.

Compensation income represents payments from the Government of Indonesia for non-subsidized customer groups whose tariffs have remained unchanged since 2017. The compensation is recognized as revenue based on audit reports by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and/or the Audit Board of Indonesia (BPK), and the amount is acknowledged as a liability by the Government. The compensation value is a management estimate that is reviewed by BPKP and/or BPK at the end of the year.

Compensation income in 2024 amounted to Rp100.18 trillion, a 35.40% increase or Rp26.19 trillion compared to Rp73.99 trillion in 2023. The increase was mainly driven by higher operating expenses incurred by the company, which aligned with the growing demand for electricity from customers.

This increase subsequently impacted the profitability ratios.

Pendapatan Usaha Lain-lain

Other Revenue

Pendapatan usaha lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari jaringan dan jasa telekomunikasi, penjualan batubara, jasa pemeliharaan, sewa transformator, perubahan daya tersambung dan administrasi, serta lain-lain.

Jumlah pendapatan usaha lain-lain pada tahun 2024 adalah sebesar Rp13,23 triliun, yaitu mengalami peningkatan 28,74% atau Rp2,95 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10,28 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan pada Pendapatan Penjualan Batubara, Jasa Telekomunikasi oleh PLN Icon+, dan Lain-lain.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio profitabilitas.

Other revenue includes income from telecommunications networks and services, coal sales, maintenance services, transformer rentals, power connection adjustments and administration, and other sources.

Other revenue in 2024 amounted to Rp13.23 trillion, a 28.74% increase or Rp2.95 trillion compared to Rp10.28 trillion in 2023. The increase was primarily driven by higher revenues from coal sales, telecommunications services provided by PLN Icon+, and other sources.

This growth consequently impacted the profitability ratios.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Beban Usaha

Operating Expenses

Jumlah beban usaha PLN adalah mengalami peningkatan 10,13% atau Rp44,58 triliun menjadi sebesar Rp484,76 triliun pada tahun 2024 dari sebesar Rp440,18 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan permintaan energi listrik oleh pelanggan serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada laba usaha dan EBITDA *margin*.

PLN's total operating expenses increased by 10.13% or Rp44.58 trillion to Rp484.76 trillion in 2024, compared to Rp440.18 trillion in 2023. The increase was primarily driven by higher electricity demand from customers as well as the weakening of the rupiah against foreign currencies.

This growth consequently impacted operating profit and EBITDA margin.

Tabel Beban Usaha

Table of Operating Expenses

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Bahan bakar dan pelumas Fuel and lubricants	179.290.971	164.731.578	14.559.393	8,84%
Pembelian tenaga listrik Purchase of electricity	178.626.777	154.831.184	23.795.593	15,37%
Sewa Leases	2.607.032	1.874.862	732.170	39,05%
Pemeliharaan Maintenance	31.546.011	29.518.324	2.027.687	6,87%
Kepegawaian Personnel	30.709.373	32.355.934	(1.646.561)	(5,09)%
Penyusutan aset tetap Property, plant, and equipment depreciation	46.672.799	43.967.082	2.705.717	6,15%
Penyusutan aset hak guna Right-of-use assets depreciation	3.822.214	3.347.165	475.049	14,19%
Lain-lain Others	11.484.810	9.557.861	1.926.949	20,16%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expense	484.759.987	440.183.990	44.575.997	10,13%

Laba Usaha

Operating Profit

Jumlah laba usaha pada tahun 2024 adalah sebesar Rp60,62 triliun, yaitu mengalami peningkatan 28,43% atau Rp13,42 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp47,20 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pendapatan usaha lebih besar dibandingkan dengan peningkatan beban usaha.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio profitabilitas dan EBITDA.

In 2024, operating profit amounted to Rp60.62 trillion, representing an increase of 28.43% or Rp13.42 trillion compared to Rp47.20 trillion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in demand for electrical energy by customers as well as the weakening of the rupiah against foreign currencies.

The increase had an impact on operating profit and EBITDA.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Laba Sebelum Pajak

Profit Before Tax

Pada tahun 2024, jumlah laba sebelum pajak adalah sebesar Rp28,27 triliun yaitu menurun 12,69% atau Rp4,11 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp32,38 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh adanya kerugian selisih kurs yang dibukukan pada periode 2024.

Dari penurunan tersebut tidak berdampak pada rasio yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

In 2024, profit before tax amounted to Rp28.27 trillion, a decrease of 12.69% or Rp4.11 trillion compared to Rp32.38 trillion in 2023. This was primarily driven by foreign exchange losses recorded during the 2024 period.

This decline did not impact the ratios presented in this Annual Report.

Beban Pajak Penghasilan

Income Tax Expense

Jumlah beban pajak penghasilan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp10,51 triliun, yaitu mengalami peningkatan 1,93% atau Rp198,47 miliar dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10,31 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya kenaikan beban pajak kini – entitas anak.

Dari peningkatan tersebut tidak berdampak pada rasio yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

In 2024, income tax expense amounted to Rp10.51 trillion, an increase of 1.93% or Rp198.47 billion compared to Rp10.31 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a rise in current tax expenses of the subsidiary.

This increase did not affect the ratios presented in this Annual Report.

Laba Tahun Berjalan

Profit for the Year

PLN berhasil membukukan laba tahun berjalan tahun 2024 adalah sebesar Rp17,76 triliun, yaitu mengalami penurunan 19,52% atau Rp4,31 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp22,07 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh adanya penurunan laba sebelum pajak.

Dari penurunan tersebut berdampak pada rasio ROA, ROE, dan rasio profitabilitas.

PLN recorded a profit for the year of Rp17.76 trillion in 2024, a decrease of 19.52% or Rp4.31 trillion compared to Rp22.07 trillion in 2023. This was primarily driven by a decline in profit before tax.

This decrease consequently impacted the ROA, ROE, and profitability ratios.



Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak

Other Comprehensive Income for the Year After Tax

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak pada tahun 2024 adalah sebesar Rp30,86 triliun, yaitu mengalami peningkatan 618,02% atau Rp26,56 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,30 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya surplus revaluasi aset tetap.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

Other comprehensive income for the year after tax in 2024 amounted to Rp30.86 trillion, an increase of 618.02% or Rp26.56 trillion compared to Rp4.30 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a surplus from the revaluation of fixed assets.

This increase consequently impacted the ratios presented in this Annual Report.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

Pada tahun 2024, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang berhasil dibukukan PLN adalah sebesar Rp48,62 triliun, yaitu mengalami peningkatan 84,38% atau Rp22,25 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp26,37 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya surplus revaluasi aset tetap.

Dari peningkatan tersebut tidak berdampak pada rasio yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, PLN recorded a total comprehensive income for the year of Rp48.62 trillion, an increase of 84.38% or Rp22.25 trillion compared to Rp26.37 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a surplus from the revaluation of fixed assets.

This increase did not affect the ratios presented in this Annual Report.

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

Analysis of Consolidated Statements of Cash Flows

Jumlah kas dan setara kas PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp61,36 triliun, yaitu mengalami peningkatan 9,74% atau Rp5,44 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp55,92 triliun. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh berkurangnya kas yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi dan pendanaan.

Dari peningkatan tersebut berdampak pada rasio yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini

PLN's total cash and cash equivalents in 2024 amounted to Rp61.36 trillion, reflecting an increase of 9.74% or Rp5.44 trillion compared to Rp55.92 trillion in 2023. The increase was primarily driven by a reduction in cash outflows for investing and financing activities.

This increase consequently impacted the ratios presented in this Annual Report.

Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of Consolidated Statements of Cash Flows

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash provided from operating activities	75.359.028	87.389.971	(12.030.943)	(13,77)%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash used in investing activities	(62.441.438)	(65.667.486)	3.226.048	(4,91)%
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash used in financing activities	(7.830.344)	(17.029.832)	9.199.488	(54,02)%
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	5.087.246	4.692.653	394.593	8,41%
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing Effect of changes in foreign currency	356.678	(275.190)	631.868	(229,61)%
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kas dan setara kas Allowance for expected credit loss of cash and cash equivalents	(19)	(18)	(1)	5,56%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	55.920.541	51.503.096	4.417.445	8,58%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	61.364.446	55.920.541	5.443.905	9,74%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Pada tahun 2024, jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp75,36 triliun, yaitu mengalami penurunan 13,77% atau Rp12,03 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp87,39 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pembayaran ke supplier, pembayaran bunga dan pegawai.

Dari penurunan tersebut tidak berdampak pada rasio keuangan yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

In 2024, total net cash provided by operating activities amounted to Rp75.36 trillion, a decrease of 13.77% or Rp12.03 trillion compared to Rp87.39 trillion in 2023. This was primarily driven by increased payments to suppliers, interest expenses, and employee costs.

This decrease did not affect the financial ratios presented in this Annual Report.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp62,44 triliun, yaitu mengalami penurunan 4,91% atau Rp3,23 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp65,67 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh adanya penurunan realisasi CAPEX serta peningkatan perolehan investasi asosiasi, rekening bank dan deposito serta investasi lainnya.

Total net cash used in investing activities in 2024 amounted to Rp62.44 trillion, a decrease of 4.91% or Rp3.23 trillion compared to Rp65.67 trillion in 2023. This was primarily driven by a decrease in CAPEX realization, along with increases in acquisitions of associate investments, bank accounts and deposits, and other investments.



Tinjauan Kinerja Keuangan

Financial Performance Overview

Dari penurunan tersebut tidak berdampak pada rasio yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

This decline did not impact the ratios presented in this Annual Report.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Pada tahun 2024, jumlah kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp7,83 triliun, yaitu mengalami penurunan 54,02% atau Rp9,20 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp17,03 triliun. Hal tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan perolehan utang sekaligus kenaikan pembayaran utang dan dividen.

In 2024, total net cash used in financing activities amounted to Rp7.83 trillion, a decrease of 54.02% or Rp9.20 trillion compared to Rp17.03 trillion in 2023. This was primarily driven by increases in loan proceeds alongside higher debt repayments and dividend payments.

Dari penurunan tersebut tidak berdampak pada rasio yang disampaikan pada Laporan Tahunan ini.

This decrease did not impact the ratios presented in this Annual Report.

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Rasio Kemampuan Membayar Utang

Debt Service Ability Ratio

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban utangnya yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

The indicators used to assess the Company's ability to meet its debt obligations are liquidity ratios and solvency ratios.

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajiban jangka pendek. Adapun rasio yang digunakan antara lain terdiri dari rasio lancar dan rasio kas.

The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to meet all its short-term obligations. The ratios used include the current ratio and the cash ratio.

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Tabel Rasio Likuiditas
Table of Liquidity Ratio

(disajikan dalam satuan persen) (presented in percentage)

Uraian Description	2024	2023
Rasio Lancar Current Ratio	97,32	91,75
Rasio Kas Cash Ratio	35,67	39,69

Secara umum, kedua rasio likuiditas pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek adalah lebih baik. Rasio lancar sebesar 97,32% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan nilai rasio kas sebesar 35,67% yaitu lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Hal ini didorong oleh Kas setara kas dan investasi jangka pendek 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023, namun liabilitas jangka pendek 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023.

In general, both liquidity ratios in 2024 experienced an increase, indicating that the Company's ability to fulfill its short-term obligations has improved. The current ratio was 97.32%, which is higher compared to 2023, while the cash ratio was 35.67%, which is lower compared to 2023.

This was driven by higher cash and cash equivalents and short-term investments in 2024 compared to those of 2023, but higher current liabilities in 2024 compared to that of 2023.

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratio

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Liquidity ratio is a ratio used to measure the Company's ability to meet its obligations, both short-term and long-term obligations.

Tabel Rasio Solvabilitas
Table of Solvency Ratio

(disajikan dalam satuan persen) (presented in percentage)

Uraian Description	2024	2023
Jumlah liabilitas terhadap aset Total Liabilities to Asset	40,13	39,21
Jumlah liabilitas terhadap ekuitas Total Liabilities to Equity	67,02	64,49
Debt to equity ratio	38,02	39,01
EBITDA to interest expense*	445,01	486,90

*) EBITDA dihitung kembali tanpa amortisasi manfaat pekerja.

*) EBITDA was recalculated without amortization of employee benefits.



Rasio Keuangan Financial Ratio

Secara umum, kedua rasio solvabilitas pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek adalah lebih baik. Rasio jumlah liabilitas terhadap aset sebesar 40,13% yaitu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 dan jumlah liabilitas terhadap ekuitas sebesar 67,02% yaitu lebih tinggi juga dibandingkan tahun 2023.

Hal ini didorong oleh kenaikan liabilitas karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap valas walaupun ada pelunasan utang valas.

In general, both solvency ratios in 2024 experienced an increase, indicating that the Company's ability to fulfill its obligations, both long-term and short-term, has improved. The ratio of total liabilities to assets was 40.13%, which is higher compared to 2023, and the ratio of total liabilities to equity was 67.02%, which is also higher compared to 2023.

This was driven by an increase in liabilities due to the weakening of the rupiah against foreign currencies, despite repayments of foreign currency-denominated debt.

Rasio Kolektibilitas Piutang Receivable Collectability Ratio

Tingkat kolektibilitas piutang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang usaha yang dimilikinya, yang umumnya diukur melalui perhitungan periode penagihan atau jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Semakin singkat periode penagihan, semakin tinggi tingkat kolektibilitas dan semakin efisien pengelolaan piutang.

The receivables collectability level reflects the Company's ability to collect its trade receivables, which is generally measured by calculating the collection period or the average time required to collect receivables. The shorter the collection period, the higher the collectability level and the more efficient the receivables management.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang
Table of Receivable Collectability Level

Uraian Description	Satuan Unit	2024	2023
Perputaran piutang usaha Receivable Turnover	kali times	12,96	12,91
Periode penagihan Collection Period	hari days	28,23	28,26

Periode penagihan pada tahun 2024 rata-rata adalah selama 28,23 hari, yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2023 selama 28,26 hari. Hal ini terutama didorong oleh tingginya perputaran piutang usaha dibanding tahun 2023.

The average collection period in 2024 was 28.23 days, slightly faster compared to 28.26 days in 2023. This improvement was primarily driven by a higher turnover of accounts receivable compared to 2023.

Rasio Kemampuan Menghasilkan Laba Profitability Ratio

Untuk mengukur kemampuan Perseroan menghasilkan laba, Perseroan menggunakan rasio profitabilitas.

To measure the Company's ability to generate profit, the Company uses profitability ratios.

Rasio Keuangan

Financial Ratio

Tabel Rasio Profitabilitas
Table of Profitability Ratios

(disajikan dalam satuan persen) (presented in percentage)

Uraian Description	2024	2023
Laba bersih terhadap jumlah aset Net income to total assets	1,00	1,32
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas Net income to total equity	1,67	2,17
Margin laba usaha Operating profit margin	11,12	9,68
Margin laba bersih Net profit margin	3,26	4,53
EBITDA margin*	19,92	20,99

*) EBITDA dihitung kembali tanpa amortisasi manfaat pekerja.

*) EBITDA was recalculated without amortization of employee benefits.

Rasio profitabilitas pada tahun 2024 relatif stabil yang menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba adalah baik. Rasio laba bersih terhadap jumlah aset sebesar 1,00%, laba bersih terhadap jumlah aset ekuitas sebesar 1,67%, marjin laba usaha sebesar 11,12%, marjin laba bersih sebesar 3,26%, dan EBITDA margin sebesar 19,92%.

The profitability ratios in 2024 were relatively stable, indicating that the Company's ability to generate profit was good. The ratio of net income to total assets was 1.00%, net income to total equity was 1.67%, operating profit margin was 11.12%, net profit margin was 3.26%, and EBITDA margin was 19.92%.

Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan usaha dan pengendalian biaya yang baik, sehingga laba usaha lebih baik dibandingkan tahun lalu.

This was driven by increased operating revenue and effective cost control, resulting in better operating profit compared to the previous year.

Struktur Modal

Capital Structure

Rincian Struktur Modal

Details on Capital Structure

Perseroan mengelola struktur modal dalam rangka memelihara kemampuan modal untuk mendukung pengembangan usaha serta memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Company manages its capital structure to maintain capital adequacy to support business development and deliver optimal returns to shareholders and all stakeholders.

Struktur modal PLN pada tahun 2024 terdiri atas 40,13% liabilitas dan 59,87% ekuitas. Dan pada tahun 2023 terdiri atas 39,21% liabilitas dan 60,79% ekuitas. Perseroan memiliki struktur modal yang baik dengan ekuitas memiliki kontribusi lebih besar dibanding liabilitas.

PLN's capital structure in 2024 consisted of 40.13% liabilities and 59.87% equity. In 2023, it consisted of 39.21% liabilities and 60.79% equity. The Company maintained a sound capital structure, with equity contributing more than liabilities.

Tabel Struktur Modal
Table of Capital Structure

Uraian Description	2024		2023	
	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition
Liabilitas Liabilities	711.215.031	40,13%	655.008.305	39,21%
Ekuitas Equity	1.061.160.235	59,87%	1.015.631.399	60,79%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.772.375.266	100,00%	1.670.639.704	100,00%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Manajemen menetapkan kebijakan struktur modal Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

1. Struktur modal mencerminkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian untuk meningkatkan nilai Perseroan, dengan cara:
 - a. Memperhitungkan penggunaan utang yang proporsional untuk menjaga kemampuan pembayaran kewajiban keuangan (tingkat bunga) dan pokok pinjaman yang sejalan dengan pengendalian likuiditas Perseroan;
 - b. Mengoptimalkan rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri;
2. Struktur modal ditinjau dengan melakukan evaluasi hubungan antara *financial leverage*, nilai Perseroan dan biaya modal;
3. Struktur modal terdiri atas kombinasi yang optimal atas utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan serta memastikan pelaksanaan program pengembangan usaha;
4. Kombinasi struktur modal yang mencakup perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisis sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi oleh Perseroan;
5. Perseroan telah memiliki kebijakan struktur modal dengan menetapkan pemenuhan *covenant* dari para kreditur.

The management determines the capital structure policy as follows:

1. The capital structure reflects the balance between financial risk and rate of return to increase the value of the Company, by:
 - a. Taking into account the use of proportional debt to maintain the ability to pay financial obligations (interest rates) and the loan principal, which aligns with the Company's liquidity control.
 - b. Optimizing economic profitability and profitability of equity.
2. The capital structure is reviewed by evaluating the relationship between financial leverage, Company value, and the cost of capital.
3. The capital structure comprises an optimal combination of debt and equity, which maximizes the company's value and ensures the implementation of business development programs.
4. The combination of capital structure, which includes the ratio of equity to liquidity, is determined through the implementation of a sensitivity analysis with a variety of core assumptions that are most likely to be faced by the Company.
5. The Company has a capital structure policy that stipulating the fulfillment of covenants from creditors.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure

Direksi menetapkan kebijakan struktur modal sebagai upaya melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kualitas kelangsungan usaha, untuk dapat memberikan imbal hasil optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

The Board of Directors sets the capital structure policy as an effort to safeguard the Company's ability to maintain the quality of business continuity, to provide optimal returns for shareholders and stakeholders.

Direksi dan Komisaris meninjau struktur modal PLN secara berkala dengan mempertimbangkan biaya modal dan risiko terkait, mencakup risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

The Board of Commissioners and the Board of Directors regularly review PLN's capital structure by considering the cost of capital and associated risks, including market risk (such as foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Uraian Kebijakan Dividen

Description of Dividend Policy

PLN membagikan dividen atas laba bersih, sesuai dengan keputusan pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang ditetapkan berdasarkan kinerja tahun berjalan dan kebutuhan pengembangan usaha jangka panjang. Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian dividen antara lain perolehan laba bersih di tahun buku, kondisi keuangan dan tingkat kesehatan perseroan, serta rencana modal dan prospek pertumbuhan usaha ke depan.

PLN distributes dividends from net income in accordance with shareholder resolutions adopted during the General Meeting of Shareholders (GMS), which are determined based on the Company's performance during the fiscal year and the long-term business development needs. Several factors considered in dividend distribution include net income for the fiscal year, the Company's financial condition and sound level, as well as capital plans and future business growth prospects.

Kebijakan Dividen Tahun 2024 (Tahun Buku 2023)

Dividend Policy for 2024 (Fiscal Year 2023)

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2024 pada agenda ke - 2, RUPS menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk Tahun 2023 sebesar Rp22.025.595.125.212 sebagai berikut:

Based on the resolution of the Annual GMS held on July 22, 2024, under the second agenda item, the GMS approved the appropriation of Net Income Attributable to the Parent Entity for the 2023 Fiscal Year, amounting to Rp22,025,595,125,212 as follows:



Kebijakan Dividen

Dividend Policy

- sebesar 14,03% atau Rp3.090.004.000.000 ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham;
- sisanya ditetapkan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
- 14.03% or Rp3,090,004,000,000 was determined to be distributed as cash dividends to shareholders;
- the remaining amount was allocated as reserves to support the Company's operational activities and development.

Kebijakan Dividen Tahun 2023 (Tahun Buku 2022)

Dividend Policy for 2023 (Fiscal Year 2022)

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 7 Juni 2023 agenda ke - 3, RUPS menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk Tahun 2022 sebesar Rp14.334.040.000.000 sebagai berikut:

- sebesar 15,26% atau Rp2.188.000.000.000 ditetapkan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham;
- sebesar 84,74% atau Rp12.146.040.000.000 ditetapkan sebagai cadangan Perseroan.

Based on the resolution of the Annual GMS held on June 7, 2023, under the third agenda item, the GMS approved the appropriation of Net Income Attributable to the Parent Entity for the 2022 Fiscal Year, amounting to Rp14,334,040,000,000 as follows:

- 15.26% or Rp2,188,000,000,000 was determined to be distributed as cash dividends to shareholders;
- 84.74% or Rp12,146,040,000,000 was allocated as reserves for the Company.

Pembagian dan Pembayaran Dividen

Dividend Distribution and Payment

Berikut disajikan tabel kronologis pembagian dan pembayaran dividen selama 2 (dua) tahun terakhir:

The following table presents the chronological record of dividend distribution and payment over the last 2 (two) years:

Tabel Pembagian dan Pembayaran Dividen

Table of Dividend Distribution and Payment

Uraian Description	Satuan Unit	Tahun 2024 (Tahun Buku 2023) Year 2024 (2023 Fiscal Year)	Tahun 2023 (Tahun Buku 2022) Year 2024 (2022 Fiscal Year)
Jumlah dividen yang dibayarkan Total dividends distributed	Rp juta Rp million	3.090.004	2.188.000
Dividen per lembar saham Dividend per share (Rp)	Rp	20.527	15.034
<i>Dividend payout ratio</i>	%	14,03	15,26
Tanggal pengumuman Announcement Date		22 Juli 2024 July 22, 2024	7 Juni 2023 June 7, 2023
Tanggal pembayaran Payment Date		Tahap 1 tanggal 19 Agustus 2024: Rp772.501.000.000 Tahap 2 tanggal 24 September 2024: Rp2.317.503.000.000. Stage 1 on August 19, 2024: Rp772,501,000,000 Stage 2 on September 24, 2024: Rp2,317,503,000,000	6 Juli 2023 July 6, 2023

Aspek Perpajakan

Taxation Aspect

Pengelolaan Pajak

Tax Management

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup Perseroan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Based on the applicable tax laws in Indonesia, the companies within the Group domiciled in Indonesia calculate and pay the amount of tax owed by themselves. The Directorate General of Taxes (DJP) may assess or amend the tax within a period of five years from the time the tax becomes payable.

Pembayaran Pajak

Tax Payment

Jumlah pajak yang dibayarkan Perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp62,24 triliun, yaitu mengalami peningkatan 18,39% atau Rp9,67 triliun dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah.

The amount of tax paid by the Company in 2024 was Rp62.16 trillion, an increase of 18.23% or Rp9.58 trillion compared to the tax paid in 2023. This was mainly due to an increase in Income Tax and Regional Tax.

Tabel Pembayaran Pajak
Table of Tax Payment

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
PPh Pasal 4 Ayat (2) Income Tax 4 Article (2)	803.347	1.299.255	(495.908)	(38,17)%
PPh Pasal 15 Income Tax Article 15	78.052	76.641	1.411	1,84%
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	6.301.545	5.018.087	1.283.458	25,58%
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	5.347.379	3.250.175	2.097.204	64,53%
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	2.141.056	1.767.928	373.128	21,11%
PPh Pasal 26 Income Tax Article 26	1.083.466	1.039.423	44.043	4,24%
PPh Pasal 19 Income Tax Article 19	-	-	-	-
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	349.352	464.651	(115.299)	(24,81)%
PPh Pasal 29 Income Tax Article 29	4.355.636	1.625.845	2.729.791	167,90%
Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Total Income Tax	20.459.832	14.542.004	5.917.828	40,69%
PPN & PPh BM VAT & Sales Tax on Luxury Goods	22.069.040	20.990.951	1.078.089	5,14%
Bea Materai Stamp Duty	268.841	77.471	191.370	247,02%



Aspek Perpajakan

Taxation Aspect

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Bea Masuk Import Duty	48.076	113.906	(65.830)	(57,79)%
Pajak Karbon Carbon Tax	-	-	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Local Taxes and Regional Levies	19.320.789	16.660.764	2.660.025	15,97%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non-Tax Revenue	73.679	188.230	(114.551)	(60,86)%
Jumlah Pembayaran Pajak Total Tax Payment	62.240.257	52.573.326	9.666.930	18,39%

Kepatuhan Perpajakan

Tax Compliance

Perseroan senantiasa tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya untuk setor dan lapor pajak. Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun.

The Company consistently fulfills its obligations to pay and report taxes on time. In the last three years, the Company has not received any guilty verdicts from the highest tax court regarding any tax issues.

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI)

Achievement of Key Performance Indicator (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) Perseroan ditetapkan melalui RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2024.

The Company's Key Performance Indicators (KPIs) were established through the GMS for the Approval of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP), which was held on January 29, 2024.

Pencapaian KPI Perseroan pada tahun 2024 adalah sebesar 103,97%, yaitu menurun dibandingkan pencapaian KPI pada tahun 2023 sebesar 107,19%. Berikut disajikan rincian pencapaian KPI pada tahun 2024:

The Company's KPI achievement in 2024 was 103.97%, which is a decrease compared to the 2023 KPI achievement of 107.19%. The following table presents the KPI achievements in 2024:

Tabel Pencapaian KPI
Table of KPI Achievements

No	KPI	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
I	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia Financial	50					50,04
1.	EBITDA	7	Rp triliun Rp trillion	101,86	108,66	106,68%	7,46
2.	ROIC - WACC	4	%	-1,25	-1,28	97,65%	3,90

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI)

Achievement of Key Performance Indicator (KPI)

No	KPI	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
3.	Interest Bearing Debt to EBITDA	6	Kali Times	3,99	3,71	106,96%	6,41
4.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	6	%	28,4	27,54	103,01%	6,18
5.	Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 Completion and Submission of Audited Financial Statements for 2023	4	Hari kerja Working days	5	3.090.004	3.090.004	2.188.000
Operational Operational							
6.	Distribution Efficiency Rate	5	%	8,51	8,55%	99,57%	4,97
Sosial Social							
7.	Rasio Elektrifikasi Nasional National Electrification Ratio	5	%	99,83	99,83%	100,00%	5,00
8.	Penyelesaian Roadmap Energy Transition (Green RUPTL) Completion of Energy Transition Roadmap (Green RUPTL)	3	Tahapan milestone Milestone stage	Penyelesaian Dokumen RUPTL 2024-2033 yang disetujui Kementerian Completion of the 2024-2033 RUPTL Document approved by the Ministry	Pembahasan Draft RUPTL 2024-2033 bersama Kementerian Tahap 2 Discussion of the 2024-2033 RUPTL Draft with the Ministry Stage 2	93,61%	2,80
9.	Penyelesaian Program Dedieselisasi Completion of the Dedieselization Program	5	Tahapan milestone Milestone stage	Penyelesaian Dokumen RKS Tahap 2 Completion of RKS Document Stage 2	Penyampaian Dokumen Lelang ke Pelaksana Submission of Auction Documents to the Auctioneer	104,24%	5,21
10.	Penyelesaian Program Gasifikasi Completion of Gasification Program	5	Tahapan milestone Milestone stage	Pelaksanaan Konstruksi Construction Stage	Penandatanganan SHA - LNG infrastructure servicer agreement Signing of SHA - LNG infrastructure servicer agreement	74,21%	3,71
II Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation		15					16,50
11.	Optimasi Holding Subholding Optimization of Holding Subholding	3	Tahapan milestone Milestone stage	Persetujuan RUPS SH GMS SH Approval	Closing Transaksi - Akta disahkan oleh Notaris Closing Transaction - Deed legalized by Notary	110,00%	3,30
12.	Peningkatan Pendapatan Beyond kWh Increase in Revenue Beyond kWh	3	Rp triliun Rp trillion	10,97	13,23	110,00%	3,30
13.	Dukungan infrastruktur kendaraan listrik melalui peningkatan jumlah SPKLU Support for electric vehicle infrastructure through increasing the number of SPKLU	3	Unit	SPKLU = 1.000 unit SPBKLU = 200 unit SPKLU = 1,000 units SPBKLU = 200 units	SPKLU = 1.597 unit SPBKLU = 547 unit SPKLU = 1,597 units SPBKLU = 547 units	110,00%	3,30
14.	Jumlah Transaksi melalui PLN Mobile Number of Transactions through PLN Mobile	3	Juta transaksi Million transaction	12,2	21,82	110,00%	3,30
15.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Roadmap for Risk Management Improvement	3	%	100% (17 program) (17 programs)	110,00%	110,00%	3,30



Pencapaian Key Performance Indicator (KPI)

Achievement of Key Performance Indicator (KPI)

No	KPI	Bobot Weight	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	Nilai Value
III	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	16					16,23
16.	SAIDI	4	Menit/ Pelanggan Minutes/ Customer	400	320,24	110,00%	4,40
17.	SAIFI	4	Kali/ Pelanggan Times/ Customer	5	3,23	110,00%	4,40
18.	Pencapaian Program <i>Green Enabling Super Grid</i> Achievement of Green Enabling Super Grid Program	4	Tahapan <i>milestone</i> Tahapan milestone	Penyelesaian Kajian Completion of Study	Penyampaian Kajian Super Grid ke BOD Submission of Super Grid Study to BOD	110,00%	4,40
19.	Pencapaian Program <i>Green Enabling Super Grid</i> Achievement of Green Enabling Smart Grid Program	3	Tahapan <i>milestone</i> Milestone stage	Penyelesaian Dokumen Lelang (<i>smart control system</i>) Completion of Auction Documents (smart control system)	Pembuatan dokumen lelang SCADA/ EMS SCC SumKalSul Preparation of auction documents SCADA/ EMS SCC SumKalSul	101,21%	3,03
IV	Peningkatan Investasi Investment Increase	10					10,50
20.	Realisasi PMN PMN Realization	5	%	100	100,00%	100,00%	5,00
21.	Jumlah Tambahan Kapasitas Pembangkit EBT Additional Capacity of NRE Generation	5	MW	242,08	474,08	110,00%	5,50
V	Pengembangan Talenta Talent Development	10					10,50
22.	Rasio <i>Top Talent</i> Milenial ($\leq$ tahun) dalam Nominated Talent Ratio of Millennial Top Talent ($\leq$ years) in Nominated Talent	2	%	9	18,18%	110,00%	2,20
23.	Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Female in Nominated Talent	2	%	32	33,33%	104,17%	2,08
24.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Risk Management Organ Qualification Fulfillment	3	%	90	93,84%	104,26%	3,12
25.	Implementasi <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Implementation of Pension Fund Restructuring Roadmap	3	%	100% (4 program)	110,00%	110,00%	3,30
Total Penilaian Kinerja Total Performance Assessment		100					103,97

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024

Comparison Between Target and Realization for 2024

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Operasional Tahun 2024

Comparison Between Target and Realization of Operational Performance for 2024

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Operasional Tahun 2024

Table of Comparison Between Target and Actual Operational Performance for 2024

Uraian Description	Satuan Satuan	Target 2024 Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian Achievement
GWh Loko Sentral (Bruto Production) GWh Loko Sentral (Gross Production)	GWh	340.679	343.892	100,94%
GWh Penjualan Tenaga Listrik Electricity Sales GWh	GWh	299.994	306.219	102,08%
SAIDI	menit/ pelanggan minutes, customer	4,00	320,24	110%
SAIFI	kali/ pelanggan times, customer	5,00	3,23	110%
Susut Jaringan Energy Losses	%	8,51	8,55	99,53%

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2024

Comparison Between Target and Realization of Financial Performance for 2024

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2024

Table of Comparison Between Target and Realization of Financial Performance for 2024

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2024 Target 2024	Realisasi 2024 Realization 2024	Pencapaian Achievement
Jumlah Aset Total Assets	1.711.639.365	1.772.375.266	103,9%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	687.007.303	711.215.031	104,2 %
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.024.632.062	1.061.160.235	103,7%
Pendapatan Usaha Revenue	536.830.020	545.380.993	102,1%
Beban Usaha Operating Expenses	487.285.899	484.759.987	100,5%
Laba Usaha Operating Profit	49.544.121	60.621.006	117,9%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	17.567.363	17.763.024	101,5%



Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024 Comparison Between Target and Realization for 2024

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2024 Comparison Between Target and Realization of Capital Structure for 2024

Tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2024
Table of Comparison Between Target and Realization Financial Performance for 2024

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Target 2024 Target 2024		Realisasi 2024 Realization 2024		Pencapaian Achievement
	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	
Liabilitas Liabilities	687.007.303	40,14%	711.215.031	40,13%	103,52%
Ekuitas Equity	1.024.632.062	59,86%	1.061.160.235	59,87%	103,57%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.711.639.365	100,00%	1.772.375.266	100,00%	103,55%

Prospek Usaha Business Prospect

Lanskap ekonomi global mengalami perubahan signifikan seiring dengan pemberlakuan kebijakan oleh berbagai negara yang memiliki pengaruh signifikan. Sejak awal tahun 2025, serangkaian kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat beserta tindakan balasan dari mitra dagangnya telah diumumkan dan diimplementasikan. Puncaknya, pada tanggal 2 April 2025, AS menetapkan tarif hampir menyeluruh terhadap produk impor, yang menyebabkan tingkat tarif efektif mencapai level tertinggi dalam satu abad terakhir. Eskalasi ini tidak hanya menjadi guncangan besar bagi pertumbuhan global, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian kebijakan secara tajam, yang berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi dan proyeksi makroekonomi global.

Ketegangan pasar dan ketidakpastian atas kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi global. Dalam skenario *reference forecast*, pertumbuhan global diproyeksikan turun menjadi 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026, turun dari tahun 2024 sebesar 3,3%, serta jauh di bawah rata-rata historis 2000-2019 sebesar 3,7%. Pertumbuhan di negara maju diprediksi mencapai 1,4% pada 2025, dengan

The global economic landscape has undergone significant changes following the implementation of policies by several influential countries. Since the beginning of 2025, a series of new tariff measures from the United States, along with retaliatory actions from its trading partners, have been announced and implemented. The escalation peaked on April 2, 2025, when the U.S. imposed near-comprehensive tariffs on imported goods, pushing the effective tariff rate to its highest level in the past century. This escalation not only delivered a significant shock to global growth but also sharply increased policy uncertainty, negatively affecting economic activity and global macroeconomic projections.

Market tensions and uncertainty surrounding these policies are expected to have a significant impact on global economic activity. In the reference forecast scenario, global growth is projected to decline to 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026, down from 3.3% in 2024 and below the historical average of 3.7% during the period 2000-2019. Growth in advanced economies is predicted to reach 1.4% in 2025, with the United States experiencing a slowdown to 1.8% due to rising

Prospek Usaha

Business Prospect

Amerika Serikat mengalami perlambatan hingga 1,8% karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan, tensi perdagangan, dan melemahnya permintaan domestik. Di kawasan berkembang, termasuk negara-negara yang terkena dampak langsung seperti Tiongkok, pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 3,7% di 2025 dan 3,9% di 2026. Sementara itu, inflasi global diperkirakan akan menurun lebih lambat dari ekspektasi awal, dengan tingkat inflasi mencapai 4,3% di 2025 dan 3,6% di 2026. Risiko penurunan (*downside risks*) semakin mendominasi prospek jangka pendek maupun panjang, dan jika ketegangan dagang terus meningkat, risiko terhadap stabilitas dan pertumbuhan global akan semakin besar.

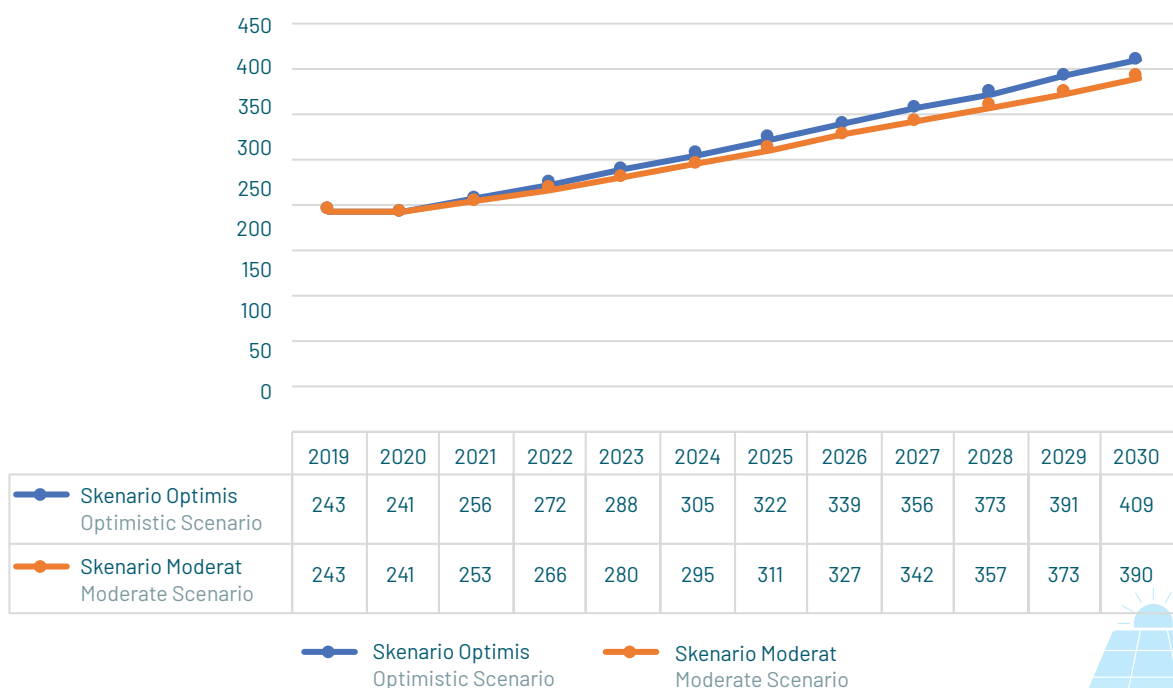
Sumber: *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

policy uncertainty, escalating trade tensions, and weakening domestic demand. In developing regions, including countries directly impacted, such as China, growth is projected to slow to 3.7% in 2025 and 3.9% in 2026. Meanwhile, global inflation is expected to decline more slowly than previously anticipated, with inflation rates reaching 4.3% in 2025 and 3.6% in 2026. Downside risks are increasingly dominating both short- and long-term outlooks, and if trade tensions continue to escalate, the risks to global stability and growth will intensify further.

Source: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), April 2025 Edition.

Mengacu pada dokumen RUPTL 2021-2030, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, hingga rasio elektrifikasi, Perseroan memproyeksikan adanya pertumbuhan listrik Indonesia sebesar 322 TWh pada skenario optimistis atau 311 TWh pada skenario moderat untuk 2025. Proyeksi ini memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibanding proyeksi untuk 2024 yang sebesar 305 TWh untuk skenario optimistis dan 295 TWh untuk skenario moderat.

Referring to the 2021-2030 RUPTL document, taking into account the projected population, inflation rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and electrification ratio, the Company projects Indonesia's electricity growth of 322 TWh in the optimistic scenario or 311 TWh in the moderate scenario for 2025. This projection shows a better growth rate than the projection for 2024 which is 305 TWh for the optimistic scenario and 295 TWh for the moderate scenario.



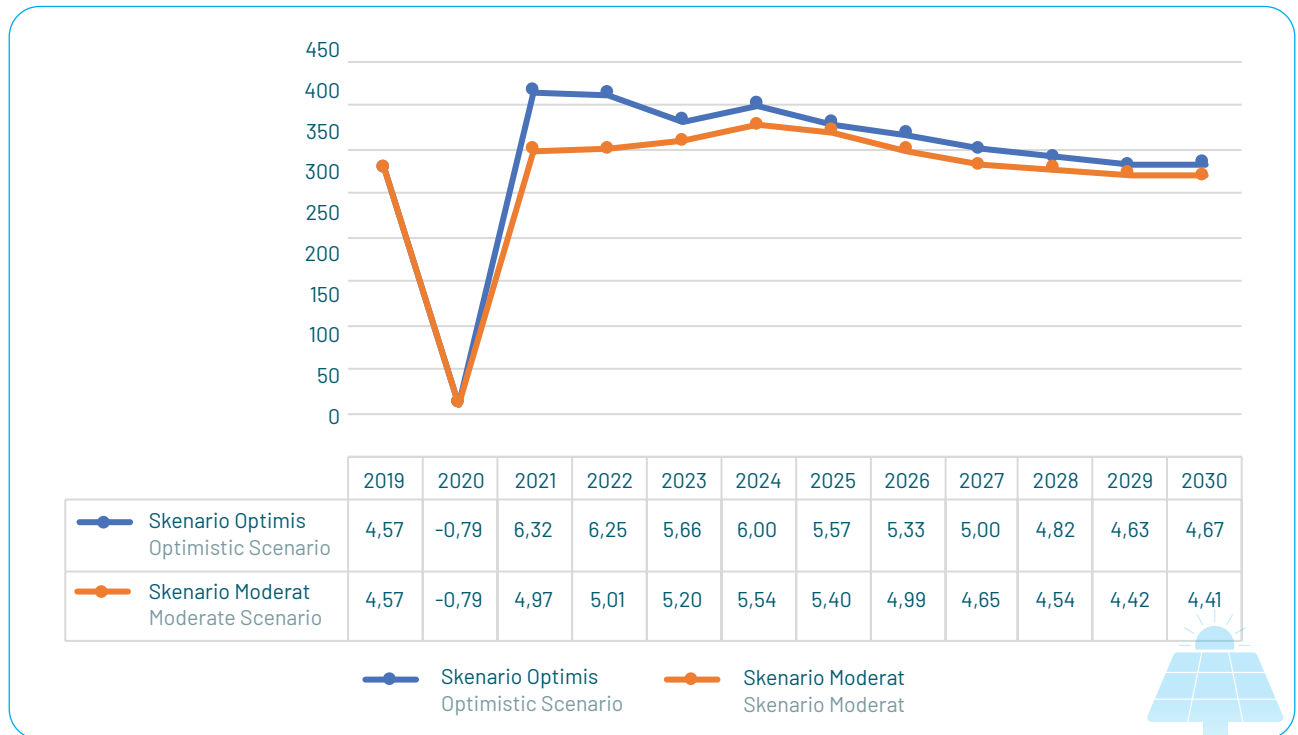
Sumber: RUPTL 2021-2030

Source: RUPTL 2021-2030

Prospek Usaha Business Prospect

Dengan proyeksi pertumbuhan listrik tersebut, Perseroan memproyeksikan realisasi pertumbuhan penjualan dengan persentase 5,57% pada skenario optimistis dan 5,40% pada skenario moderat untuk 2025. Proyeksi tersebut memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding untuk 2024, dengan persentase 6,00% pada skenario optimistis dan 5,54% pada skenario moderat

With the projected electricity growth, the Company forecasts a sales growth realization of 5.57% under the optimistic scenario and 5.40% under the moderate scenario for 2025. These projections indicate a higher growth rate compared to 2024, which recorded 6.00% under the optimistic scenario and 5.54% under the moderate scenario.



Sumber: RUPTL 2021-2030

Source: RUPTL 2021-2030



Proyeksi Tahun 2025

2025 Projections

Proyeksi Kinerja Operasional Tahun 2025

2025 Operational Performance Projections

Tabel Proyeksi Kinerja Operasional Tahun 2025
Table of 2025 Operational Performance Projections

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2024 Realization 2024	Proyeksi 2025 Projection 2025	Sasaran Peningkatan Improvement Targets
GWh Loko Sentral (Bruto Production) GWh Loko Sentral (Gross Production)	GWh	343.892	363.888	5,81%
GWh Penjualan Tenaga Listrik GWh Sales of electricity	GWh	306.219	324.668	6,02%
SAIDI	menit/ pelanggan minutes, customer	320,24	322,8	0,80%
SAIFI	kali/ pelanggan times, customer	3,23	3,50	8,36%
Susut Jaringan Network Losses	%	8,55	8,62	0,82%

Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2025

2025 Financial Performance Projections

Tabel Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2025
Table of 2025 Financial Performance Projections

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realization 2024	Proyeksi 2025 Projection 2025	Sasaran Peningkatan Improvement Targets
Jumlah Aset Total Assets	1.772.375.266	1.774.158.561	0,10%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	711.215.031	734.865.917	3,33%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.061.160.235	1.039.292.643	(2,06)%
Pendapatan Usaha Revenue	545.380.993	618.136.639	13,34%
Beban Usaha Operating Expenses	484.759.987	561.906.681	15,91%
Laba Usaha Operating Profit	60.621.006	56.229.958	(7,24)%
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	17.763.024	17.707.689	(0,31)%



Proyeksi Tahun 2025
2025 Projections

Proyeksi Struktur Modal Tahun 2025

Projected Capital Structure for

Tabel Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2025

Table of 2025 Financial Performance Projections

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi 2024 Realization 2024		Proyeksi 2025 Projection 2025		Sasaran Peningkatan Improvement Targets
	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	Rp juta Rp million	Komposisi Composition	
Liabilitas Liabilities	711.215.031	40,13%	734.865.917	41,42%	3,33%
Ekuitas Equity	1.061.160.235	59,87%	1.039.292.643	58,58%	(2,06)%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.772.375.266	100,00%	1.774.158.561	100,00%	0,10%

Proyeksi Kebijakan Dividen Tahun 2025

Projected Dividend Policy for 2025

Kebijakan dividen untuk tahun 2025 ditetapkan melalui Rapat Umum pemegang saham (RUPS) Tahunan.

The dividend policy for 2025 is determined through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS).

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Perseroan tidak melakukan penawaran umum baik berupa saham maupun obligasi pada tahun 2024, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat diungkapkan pada bagian ini.

The Company did not conduct any public offerings, either in the form of shares or bonds, in 2024. Therefore, there is no information to be disclosed in this section.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Perseroan melakukan ikatan pengadaan untuk investasi barang modal saat pembangunan proyek berlangsung, umumnya dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari tahap *engineering, procurement, and construction* (EPC). Pada 2024, Perseroan melakukan ikatan material untuk pengerjaan program percepatan dan konstruksi rutin dengan perincian sebagai berikut:

The Company entered procurement commitments for capital goods investments during the construction phase of its projects, generally conducted prior to or as part of the engineering, procurement, and construction (EPC) stage. In 2024, the Company entered material commitments for the implementation of the acceleration program and routine construction, with details as follows:

Tabel Perolehan Barang Modal
Table of Capital Goods Procurement

Uraian Description	Mata Uang yang Menjadi Denominasi Denominated Currency	Nilai dalam Mata Uang Asing (Nilai Penuh) Value in Foreign Currency (Full Amount)	Konversi ke Rupiah (dalam Jutaan Rupiah) Converted into Rupiah (in millions of rupiah)
Program percepatan Fast Track Program	USD	32.668.189	527.820
Kontrak pembangkitan Power plant contracts	Rupiah		1.110.065
			1.637.885
Kontrak transmisi Transmission contracts	Rupiah		42.972
Kontrak konstruksi rutin Regular construction contracts	USD	525.398.420	8.488.862
	EUR	228.818.741	3.849.343
	JPY	5.904.439.210	610.685
	Rupiah		24.218.618
	Lain-lain* Others*	7.841.413.351	9.929
Jumlah Total			37.177.437

* Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

* Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

Tujuan Ikatan Material Investasi Barang Modal

Objective of Material Commitments for Capital Expenditure

PLN melakukan ikatan material dengan tujuan untuk memastikan proses pembangunan dan pengadaan pembangkitan, transmisi, dan distribusi, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik agar dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

PLN entered into material commitments to ensure the timely and proper completion of the construction and procurement processes for generation, transmission, and distribution infrastructure, to meet electricity demand effectively.

Program Percepatan

Fast Track Program

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar

Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2006, dated July 5, 2006, as amended by Presidential Regulation No. 59 of 2009, dated December 23, 2009, the Government assigned the Company to construct coal-fired power plants (PLTU) at 42 locations across



Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Indonesia. This includes 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in the Java-Bali region and 32 power plants with a total capacity of 2,769 MW outside the Java-Bali region.

Kontrak Pembangkitan

Power Plants Contract

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

As of December 31, 2024, the Company has signed 37 EPC contracts, comprising 10 power plants with a total capacity of 7,490 MW in Java and Bali, and 27 power plants with a total capacity of 2,489 MW outside Java and Bali. Under these EPC contracts, the Company is required to pay an advance of approximately 15% of the contract value, while the remaining 85% is financed through banking credit facilities.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD876.217.780 dan Rp4.790.016 juta untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai aset dalam pembangunan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan. Kontrak transmisi

As of December 31, 2024, the Company has paid advances totaling USD 876,217,780 and Rp4,790,016 million for 35 EPC contracts, which are recorded as construction-in-progress assets. These advances were funded through proceeds from the issuance of Guaranteed Bonds and drawdowns from the fast-track program credit facilities.

Kontrak transmisi

Transmission Contracts

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Transmission contracts refer to agreements for the upgrading and construction of new transmission lines and substations in Java and other regions. These projects are financed through internal funds and bank credit facilities.

Kontrak Konstruksi Rutin

Regular Construction Contracts

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri Perseroan dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Capital goods procurement commitments for routine construction consist of contracts signed for additional power generation and the development of transmission and distribution networks. These projects are financed through the Company's internal funds as well as external sources, including foreign loans, grants, and investment projects as part of the state budget.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Sumber Dana

Source of Funds

PLN melakukan ikatan untuk investasi barang modal dengan sumber dana dari pendanaan internal. Untuk menutupi kekurangan pendanaan, Perseroan menargetkan perolehan dana investasi dari Penanaman Modal Negara, fasilitas pinjaman dari sejumlah Bank, serta penerbitan obligasi terjamin.

PLN entered capital goods investment commitments funded through internal financing sources. To cover any funding shortfall, the Company targets securing investment funds from State Investment (PMN), loan facilities from several banks, and the issuance of guaranteed bonds.

Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Mitigasi Risiko Mata Uang Asing

Denomination and Foreign Currency Risk Mitigation

Selain mata uang rupiah, PLN dapat melakukan kontrak dengan menggunakan mata uang asing (USD, EUR, JPY). Atas hal tersebut, PLN telah melakukan transaksi lindung nilai terhadap beberapa eksposur ikatan dan kontinjensi dalam mata uang asingnya sejak 2015, guna memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Transaksi lindung nilai PLN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara, beserta peraturan teknis pelaksanaan terkait.

Sebagai upaya mitigasi terhadap risiko mata uang asing, PLN melakukan pembahasan khusus dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan pemahaman komprehensif terhadap keadaan pasar. Perseroan kemudian mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal, di samping mengembangkan strategi yang disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan pada momentum yang tepat.

Lebih dari itu, PLN melakukan analisis terhadap sensitivitas mata uang asing untuk mengetahui setiap 10% kenaikan dan penurunan rupiah terhadap mata uang asing yang dinilai relevan. Kenaikan dan penurunan 10% tersebut memperlihatkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Analisis sensitivitas tersebut mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing, serta menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

In addition to rupiah, PLN may enter into contracts using foreign currencies (USD, EUR, JPY). To address this, PLN has conducted hedging transactions for certain exposures and contingencies denominated in foreign currencies since 2015, to mitigate the risk of foreign exchange fluctuations. These hedging transactions are carried out in accordance with Ministry of SOEs Regulation No. 09/MBU/2013 on the General Policy for Hedging Transactions by State-Owned Enterprises, along with the relevant technical implementation regulations.

As part of its foreign exchange risk mitigation efforts, PLN engages in dedicated discussions with Bank Indonesia to gain a comprehensive understanding of market conditions. The Company then incorporates these market insights into its internal financial projections, while also developing jointly approved strategies to mitigate foreign exchange exposure by purchasing the required foreign currency instruments at optimal times.

Furthermore, PLN conducts a foreign currency sensitivity analysis to assess the impact of a 10% increase or decrease in the rupiah against relevant foreign currencies. This 10% change reflects management's assessment of a reasonably possible fluctuation in exchange rates, considering current economic conditions. The sensitivity analysis includes after-tax balances of monetary items in foreign currencies, and adjusts the year-end translation based on the 10% movement in exchange rates.



Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Expenditure

Tujuan Investasi Barang Modal

Objective of Capital Expenditure

Tujuan program investasi yang dilaksanakan antara lain bertujuan untuk pembangunan Infrastruktur listrik baik pembangkitan, transmisi dan distribusi dan pembangunan dan pengembangan sarana lainnya.

The objectives of the investment program implemented include the development of electricity infrastructure, including generation, transmission, and distribution, as well as the construction and development of other supporting facilities.

Jenis dan Nilai Realisasi Investasi Barang Modal

Type and Value of Realization of Capital Expenditure

Jumlah investasi barang modal PLN pada 2024 adalah Rp67,07 triliun, yaitu mengalami peningkatan 3,53% atau Rp2,29 triliun jika dibandingkan tahun 2023. Berikut adalah rincian realisasi investasi barang modal yang direalisasikan tahun 2024 yang disajikan berdasarkan cash basis:

The total capital expenditure of PLN in 2024 amounted to Rp67.07 trillion, representing an increase of 3.53% or Rp2.29 trillion compared to 2023. The following are details of the actual capital goods investment realized in 2024, presented on a cash basis:

Tabel Realisasi Investasi Barang Modal
Table of Capital Expenditure Realization

(disajikan dalam satuan jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (presented in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Perubahan 2023-2024 2023 - 2024 Changes	
			Selisih Differences	%
Pembangunan pembangkit Power plant construction	10.353.207	11.496.640	(1.143.433)	(9,95)%
Maintenance CAPEX CAPEX Maintenance	12.439.889	15.583.057	(3.143.168)	(20,17)%
Penyambungan pelanggan Customer connection	12.528.573	8.645.442	3.883.131	44,92%
Pengembangan jaringan distribusi Distribution network development	12.685.144	11.426.695	1.258.449	11,01%
Pengembangan transmisi dan gardu induk Transmission and substation development	12.269.299	13.778.429	(1.509.130)	(10,95)%
Pembangunan infrastruktur gas Gas infrastructure development	112.932	23.741	89.191	375,68%
Pembangunan fiber optic Fiber Optic development	18.453	5.880	12.573	213,83%
Pembangunan infrastruktur energi primer Primary energy infrastructure development	754.529	617.399	137.130	22,21%
Sarana Facilities	4.338.924	1.755.435	2.583.489	147,17%
IDC IDC	1.573.236	1.455.651	117.585	8,08%
Jumlah Total	67.074.187	64.788.369	2.285.818	3,53%

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di sepanjang tahun 2024, sehingga tidak terdapat yang diungkapkan pada bagian ini.

There were no financial information items containing extraordinary and rare events throughout 2024; therefore, no disclosure is required in this section.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Facts and Information Subsequent to Accountant's Reporting Date

Terdapat beberapa informasi setelah tanggal laporan akuntan, sebagaimana siuraikan berikut ini:

1. Pada tanggal 24 Januari 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp1.000.000 juta atas SKPKB tahun fiskal 2020. Perusahaan telah menyampaikan surat Banding atas SKPKB tahun fiskal 2020 kepada DJP pada tanggal 6 Februari 2025.
2. Pada tanggal 20 Januari 2025, Perusahaan telah menerima pembayaran dari Pemerintah atas kekurangan piutang subsidi tahun 2023 sebesar Rp2.023.863 juta.
3. Pada tanggal 20 Januari 2025, Perusahaan telah menerima pembayaran dari Pemerintah atas kekurangan piutang subsidi tahun 2023 sebesar Rp2.023.863 juta.
4. Pemberhentian Tomi Parisianto sebagai Anggota Komite Audit nonkomisaris pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2025 tanggal 25 Januari 2025.
5. Pada tanggal 24 Februari 2025 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pembentukan Danantara. Pada tanggal 18 Maret 2025, Menteri BUMN telah melakukan konversi atas saham PT Perusahaan

There are several events after the date of the accountant's report, as described below:

1. On January 24, 2025, the Company made an additional payment of Rp1,000,000 million for the SKPKB for the fiscal year 2020. The Company submitted an appeal letter regarding SKPKB for fiscal year 2020 to the DJP on February 6, 2025.
2. On January 20, 2025, the Company proceed cash payment from the Government for the outstanding 2023 subsidy receivables amounting to Rp2,023,863 million.
3. On January 20, 2025, the Company received a payment from the Government for the outstanding subsidy receivables from 2023 amounting to IDR 2,023,863 million.
4. The dismissal of Tomi Parisianto as a non-commissioner member of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) is effective as of January 31, 2025, based on the Decision of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2025 dated January 25, 2025.
5. On February 24, 2025, Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises was enacted, which provides the legal basis for the establishment of Danantara. On March 18, 2025, the Minister of State-Owned Enterprises converted the shares of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) from previously non-classified shares into



Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Facts and Information Subsequent to Accountant's Reporting Date

- Listrik Negara (Persero), dari sebelumnya saham tidak terbagi atas seri, menjadi terdiri atas (i) satu saham Seri A Dwiwarna dan (ii) saham Seri B, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri BUMN Nomor: S-134/MBU/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero).
6. Pada tanggal 21 Maret 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian Holding Operasional ("PP 15/2025"), dimana peraturan tersebut menetapkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai Holding Operasional yang berasal dari pengalihan seluruh seri B dan/atau seri C milik Negara pada 52 BUMN, termasuk PT PLN (Persero). PP 15/2025 tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menerbitkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-190/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 perihal Persetujuan Pengalihan Saham PT PLN (Persero), dimana Menteri BUMN telah memberikan persetujuan atas pengalihan saham Seri B pada PT PLN (Persero) kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia selaku *Holding* Operasional. Menteri BUMN dan PT Biro Klasifikasi Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) Nomor: SK-90/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar. Dengan beralihnya saham Seri B kepada PT BKI, maka susunan pemegang saham PLN menjadi: (i) Menteri BUMN sebagai pemegang satu saham Seri A Dwiwarna, dan (ii) PT BKI sebagai pemegang seluruh saham Seri B.
 - (i) one Series A dual-class share and (ii) Series B shares, as stipulated in the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: S-134/MBU/03/2025 dated March 18, 2025, regarding the Change of Share Type and Amendments to the Articles of Association of PT PLN (Persero).
 6. On March 21, 2025, the Government issued Government Regulation No. 15 of 2025 on the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Limited Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding ("PP 15/2025"), in which this regulation stipulates the addition of State Capital Participation (PMN) into the share capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) or BKI as the Operational Holding, originating from the transfer of all Series B and/or Series C shares owned by the State in 52 State-Owned Enterprises, including PT PLN (Persero). PP 15/2025 was followed up by the Minister of State-Owned Enterprises through the issuance of Minister of SOEs Letter No: S-190/MBU/03/2025 dated March 22, 2025, on the Approval of the Transfer of Shares of PT PLN (Persero), in which the Minister of SOEs has given approval for the transfer of Series B shares in PT PLN (Persero) to PT Biro Klasifikasi Indonesia as the Operational Holding. Subsequently, the Minister of SOEs and PT Biro Klasifikasi Indonesia then issued the Shareholders' Resolution (KPPS) No: SK-90/MBU/03/2025 dated March 22, 2025, on the Amendment to the Articles of Association. With the transfer of Series B shares to PT BKI, the composition of PLN's shareholders becomes: (i) the Minister of SOEs as the holder of one Series A Dwiwarna share, and (ii) PT BKI as the holder of all Series B shares.

Informasi Material Transaksi terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Merger, Akuisisi, dan Restrukturisasi

Information on Material Transaction Related to Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and Restructuring

Pada tahun 2024, Perseroan melalui entitas anak, PLN telah melakukan ekspansi bisnis dengan membentuk beberapa anak perusahaan baru dan Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama (*Joint Venture*) antara lain:

- a. PT Nusantara Tembesi Baru Energi, PT Nusantara Guodian Karangates Indonesia, dan PT Nusantara Renewables Investasi oleh PT PLN Nusantara Renewable (Anak Usaha PT PLN Nusantara Power);
- b. PT Minahasa Brantas Energi, PT Indo Acwa Tenaga Saguling, dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak oleh PT PLN Indonesia Power Renewables (Anak Usaha PT PLN Indonesia Power);
- c. PT Terang Wahana Hijau oleh PT Indonesia Comnets Plus Investasi (Anak Usaha PT Indonesia Comnets Plus); dan
- d. PT Aruna Hijau Power oleh PT PLN Batam.

In 2024, the Company, through its subsidiaries, PLN, expanded its business by establishing several new subsidiaries as well as Associated Companies and Joint Ventures, including:

- a. PT Nusantara Tembesi Baru Energi, PT Nusantara Guodian Karangates Indonesia, and PT Nusantara Renewables Investasi, established by PT PLN Nusantara Renewable (a subsidiary of PT PLN Nusantara Power);
- b. PT Minahasa Brantas Energi, PT Indo Acwa Tenaga Saguling, and PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, established by PT PLN Indonesia Power Renewables (a subsidiary of PT PLN Indonesia Power);
- c. PT Terang Wahana Hijau, established by PT Indonesia Comnets Plus Investasi (a subsidiary of PT Indonesia Comnets Plus); and
- d. PT Aruna Hijau Power, established by PT PLN Batam.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/ or Transactions with Affiliated or Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transactions Involving Conflicts of Interest

Pada tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

In 2024, the Company did not engage in any transactions that involved conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi atau Berelasi

Transactions with Affiliated or Related Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7.

The Company conducts transactions with related parties in accordance with the provisions stipulated in PSAK No. 224 "Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi juga telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada Catatan 51.

Entities related to the Government are those controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government. The Government refers to government bodies, government agencies, and similar entities at the local, national, or international levels. Entities related to the Government include those controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Regional Governments that are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) as the shareholder proxy.

More detailed information regarding related party transactions is also disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 51.

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Purpose of Related Party Transactions

Transaksi ini dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

These transactions are conducted to generate business revenue and are carried out routinely, repeatedly, and/or continuously.

Sifat Hubungan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Nature of Relationship in Transactions with Related Parties

Sifat hubungan berelasi dalam transaksi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN;
2. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan;
3. Grup Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
4. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup Perusahaan.

The nature of related-party relationships in the transactions carried out by the Company is as follows:

1. The Government, represented by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, who is a shareholder of the Company and State-Owned Enterprises (SOEs);
2. The Company has related-party relationships with other SOEs jointly owned by the Ministry of Finance;
3. The Company Group has significant influence over investments in associate entities or joint ventures;
4. The Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel of the Company Group.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Ketentuan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Provisions for Transactions with Related Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penjualan barang dan jasa kepada pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan, yang pada umumnya menggunakan dasar harga pasar yang berlaku ditambah margin tertentu sesuai kesepakatan;
2. Pengangkutan bahan bakar maupun suku cadang oleh pihak berelasi ditetapkan berdasarkan kontrak pengangkutan yang disepakati bersama berdasarkan hasil negosiasi dengan memperhatikan unsur-unsur biaya yang ada ditambah dengan margin tertentu;
3. Penempatan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan dan perjanjian yang saling menguntungkan dan memberikan keuntungan optimal pada Perseroan;
4. Perolehan dana pinjaman dilakukan melalui negosiasi syarat dan kondisi yang paling optimal bagi kepentingan operasional Perseroan.

The Company conducts transactions with related parties by applying the following policies:

1. Sales of goods and services to related parties are established based on sales contracts, generally using prevailing market prices plus an agreed margin;
2. Transportation of fuel and spare parts by related parties is based on mutually agreed transportation contracts, negotiated by considering the existing cost elements plus a certain margin;
3. Placement of funds is conducted based on mutual needs and agreements that provide optimal benefits to the Company;
4. Borrowing of funds is carried out through negotiation of terms and conditions that are most optimal for the operational interests of the Company.

Nama, Sifat Hubungan, Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup PLN adalah sebagai berikut:

The list of related parties that have transactions with the PLN Group is as follows:

Tabel Nama, Sifat Hubungan, Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

Table of Name, Nature of Relationship, and Nature of Transactions with Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir Ultimate shareholders	Penerimaan subsidi listrik dan kompensasi, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah Receipt of electricity subsidy and compensation, two-step loan and Government loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans.
PT Bank Mandiri Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, short-term investment, and receipt of bank loans
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank Placement of restricted cash in bank and time deposit, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Bank DKI	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
PT Bank Pembangunan Daerah	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
PT Bank Syariah Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan Utang Bank Receipt of Bank Payables
PT Indonesia Asahan Aluminium ("Inalum")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Pertamina Geothermal Energy	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Pertamina (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
PT Pertamina Gas (Pertagas)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuels
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar batubara Purchase of coal fuel
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas Purchase of gas fuel
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank Receipt of non-bank government financial institution

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Geo Dipa Energi (Persero)	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Tanjung Kasam Power	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Dalle Energy Batam	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Mitra Energi Batam	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Rekind Daya Mamuju	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Sumber Segara Primadaya	Entitas asosiasi Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Indo Pusaka Berau	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loans
PT Bajradaya Sentranusa	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik dan pemberian pinjaman jangka panjang Purchase of electricity and issuance of long-term loans
PT Bukit Pembangkit Innovative	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang dan Transaksi pembelian tenaga listrik Issuance of long-term loans and Purchase of electricity
PT Perta Daya Gas PMSE	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loans
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loans
PT Rajamandala Electric Power	Ventura bersama Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
PT GCL Indotenaga	Ventura bersama Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang Issuance of long-term loans
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi Construction services
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa Rent
Dana Pensiun PLN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa Rent
Pemerintah Daerah Local Government	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Utang lain-lain Other payables
Pemerintah Pusat Central Government	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah Entity related to the Government	Pendapatan usaha lain-lain Other revenues



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi
Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Value of Transactions with Related Parties

Berikut disajikan tabel rincian nilai transaksi pihak berelasi:

The following table presents the details of related party transaction values:

Tabel Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Table of Transaction Values with Related Parties

Uraian Description	2024		2023	
	Rp juta Rp million	Persentase* Percentage*	Rp juta Rp million	Persentase* Percentage*
Piutang pihak berelasi Receivables from related parties	1.276.116	0,08%	1.279.413	0,07%
Rekening bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks	179.084	0,00%	144.857	0,01%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	55.714.471	3,14%	52.389.196	3,14%
Investasi jangka pendek Short-term investments	977.100	0,05%	889.256	0,06%
Piutang usaha - Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Trade receivables - Government-related entity	2.648.312	0,15%	2.485.622	0,15%
Piutang dari Pemerintah Receivables from Government	43.290.748	2,45%	22.446.998	1,34%
Jumlah terhadap Aset Total to Assets	104.085.831	5,87%	79.635.342	4,77%
Penerusan pinjaman Two-step Loans	26.036.940	3,64%	29.183.428	4,46%
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non-Bank Government and non-bank Government financial institution loans	2.842.807	0,40%	2.222.907	0,34%
Utang sewa Lease liabilities	2.508.257	0,34%	2.065.544	0,31%
Utang bank Bank loans	37.890.922	5,33%	36.783.280	5,62%
Utang usaha Trade payables	22.712.501	3,19%	15.523.529	2,37%
Utang lain-lain Other payables	4.336.085	0,62%	3.564.415	0,54%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	3.796.431	0,53%	720.537	0,11%
Jumlah terhadap Liabilitas Total to Liabilities	98.123.557	13,80%	90.063.640	13,75%
Penjualan tenaga listrik - Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Sales of electricity - Government-related entity	22.942.416	6,50	22.370.966	6,71%
Subsidi listrik Pemerintah Government electricity subsidy	77.045.335	100%	68.636.731	100%
Pendapatan kompensasi Compensation income	100.184.044	100%	73.991.897	100%
Pendapatan usaha lain-lain Other revenues	2.712.160	20,49%	2.989.560	29,09%
Beban bahan bakar dan pelumas Fuel and lubricants expenses	88.482.550	49,35%	73.641.677	44,70%

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

Uraian Description	2024		2023	
	Rp juta Rp million	Persentase* Percentage*	Rp juta Rp million	Persentase* Percentage*
Beban pembelian tenaga listrik Purchased electricity expenses	34.970.809	19,57%	33.874.025	21,88%
Beban pemeliharaan Maintenance expenses	843.765	2,67%	787.248	2,67%
Beban usaha lain-lain Other operating expenses	413.044	3,68%	603.635	6,32%
Beban keuangan Finance costs	3.135.803	12,79%	3.740.463	17,80%

* Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

* The percentage of the relevant assets/liabilities/revenue/expenses.

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp191.568 juta dan Rp151.759 juta.

The total compensation of the Company's Board of Commissioners for the years ended December 31, 2024, and 2023 amounted to Rp191,568 million and Rp151,759 million, respectively.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp377.122 juta dan Rp298.096 juta.

The total compensation of the Company's Board of Directors for the years ended December 31, 2024, and 2023 amounted to Rp377,122 million and Rp298,096 million, respectively.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

All compensation to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors represents short-term employee benefits.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi Transaction Fairness with Related Parties

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 224 Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle*.

The fairness of all transactions conducted with related parties, whether carried out under the same terms and conditions as with third parties or not, has been disclosed in the financial statements in accordance with PSAK 224: Related Party Disclosures. In addition, the fairness assessment of related party transactions is based on the arm's length principle.

Kebijakan Perusahaan terkait Mekanisme Review atas Transaksi Company Policy Related to Transaction Review Mechanism

PLN menerapkan kebijakan untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO), sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas setiap keputusan serta transparansi dan akurasi pencatatan transaksi bisnis.

PLN implements a policy to apply an internal control system using the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) approach, as an effort to enhance accountability in every decision, as well as transparency and accuracy in business transaction records.



Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

COSO merupakan organisasi internasional yang menyediakan kerangka dan pedoman manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud*. PLN mengadopsi standar COSO pada *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR). Secara spesifik, penerapan ICoFR oleh PLN bertujuan untuk memenuhi kriteria COSO tentang pelaporan keuangan yang andal. Penerapan ICoFR di PLN diharapkan tidak hanya membantu Perusahaan dalam mencapai keandalan laporan keuangan, tetapi untuk membuktikan bahwa proses bisnis sudah dijalankan dengan efektif.

COSO is an international organization that provides frameworks and guidelines for risk management, internal control, and fraud prevention. PLN adopts the COSO standards in its Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). Specifically, the implementation of ICoFR by PLN aims to meet COSO's criteria for reliable financial reporting. The implementation of ICoFR at PLN is expected not only to assist the Company in achieving the reliability of financial reports, but also to demonstrate that business processes are being carried out effectively.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memastikan Kewajaran Transaksi

The Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Ensuring the Fairness of Transactions

Direksi memastikan transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Adapun Dewan Komisaris dan Komite Audit telah melakukan review untuk memastikan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi tetap dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors ensures that affiliate transactions have undergone adequate procedures in accordance with generally accepted business practices. Meanwhile, the Board of Commissioners and the Audit Committee have conducted reviews to ensure that material transactions involving conflicts of interest and/or transactions with related parties are still carried out in accordance with generally accepted business practices, comply with the arm's length principle, and fulfill applicable laws and regulations.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Fulfillment of Related Regulations and Provisions

PLN melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *International Financial Report Standard* (IFRS).

PLN prepares its financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI), the Financial Services Authority (OJK) regulations, and the International Financial Reporting Standards (IFRS).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melakukan konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Sasaran Konvergensi IFRS adalah merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IFRS, Konvergensi PSAK terhadap IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap, sehingga PSAK yang berlaku saat ini juga mengalami beberapa kali revisi agar sesuai dengan IFRS terkini.

The Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) has undertaken a convergence of the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) with IFRS. The goal of IFRS convergence is to revise PSAK so that it is materially aligned with IFRS. This convergence is conducted gradually in Indonesia, leading to multiple revisions of the applicable PSAK to align with the latest IFRS.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated or Related Parties

PLN sebagai entitas yang sudah listing di pasar modal domestik maupun internasional, berkewajiban untuk mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK) yang berbasis pada IFRS dan Peraturan OJK yang berlaku. Standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh Perseroan dituangkan dalam bentuk Kebijakan Akuntansi. Meski dalam praktik penyusunan laporan keuangan telah mengadopsi PSAK yang berlaku pada saat periode pelaporan, pemutakhiran Kebijakan Akuntansi Perseroan akan selalu dilakukan dengan berpedoman pada PSAK terkini dan peraturan-peraturan terbaru sebagai pedoman tertulis kepada para pelaku dan pelaksana penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Perseroan.

As an entity listed on both domestic and international capital markets, PLN is obligated to comply with the applicable Financial Accounting Standards in Indonesia (PSAK), which are based on IFRS, as well as prevailing OJK regulations. The financial accounting standards adopted by the Company are reflected in its Accounting Policies. Although the preparation of financial statements already adopts the PSAK applicable during the reporting period, the Company's Accounting Policies are continuously updated in accordance with the latest PSAK and the most recent regulations, serving as a written guideline for the personnel responsible for the preparation of Financial Statements within the Company.

Kepatuhan terhadap Peraturan yang Berlaku Compliance with Applicable Regulations

Perseroan tidak menghadapi kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material, terutama dalam tiga tahun terakhir.

The Company has not faced any cases of non-compliance with laws, rules, or regulations related to significant or material related party transactions, particularly within the last three years.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Changes in Accounting Policies and Their Impacts

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi Information on Changes in Accounting Policies

Penerapan dari amandemen yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan :

- Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

The adoption of amendments effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2024, did not result in significant changes to the Group's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment to PSAK No. 201: "Presentation of Financial Statements – Classification of Liabilities as Current or Non-Current"



Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya

Changes in Accounting Policies and Their Impacts

- Amandemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amandemen PSAK No. 207: "Laporan Arus Kas" dan PSAK No.107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" – Pengaturan Pembiayaan Pemasok;
- Amandemen PSAK No. 116: "Sewa – Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik"

Standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 117 : "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 117 Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif;
- Amandemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran"
- Standar baru dan amandemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi, dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

- Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements – Non-Current Liabilities with Covenants"
- Amendments to PSAK No. 2: "Statement of Cash Flows" and PSAK No. 107: "Financial Instruments: Disclosures" – Supplier Finance Arrangements
- Amendment to PSAK No. 73: "Leases – Lease Liability in a Sale and Leaseback"

New standards and amendments that have been issued, but have not yet become effective for the fiscal year beginning January 1, 2024, are as follows:

- PSAK No. 117: "Insurance Contracts"
- Amendment to PSAK No. 117 Insurance Contracts on the initial application of PSAK 117 and PSAK 109 – comparative information
- Amendment to PSAK No. 221: "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability"
- The above new standards and amendments are effective starting January 1, 2025, with early adoption permitted.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the Group is assessing the potential impact of the adoption of these new standards, amendments, revisions, and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Impact of Changes in Accounting Policies

Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

The adoption of new PSAK standards, amendments, and improvements effective after January 1, 2024, did not result in significant changes to the Company's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year.

Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba

Impact of Price Changes on Revenue and Profit

Pada tahun 2024 terdapat perubahan regulasi terkait pentarifan yaitu mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 28 Tahun 2016 dan menggantinya dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2024 (Permen ESDM 7/2024) Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Permen ESDM No. 7/2024 mengatur terkait Stratifikasi Tarif Tenaga Listrik yaitu perluasan segmentasi/tegangan golongan tarif peruntukan Rumah Tangga Sangat Mewah (R-3/TM; daya di atas 200 kVA), golongan tarif untuk keperluan Bisnis Sangat Besar (B-3/TT; daya 30.000 kVA ke atas), golongan tarif untuk keperluan Traksi bagi Perusahaan Kereta Listrik yang memerlukan daya di atas 30.000 kVA (T-TT), golongan tarif untuk keperluan Curah dengan daya sampai dengan 200 kVA (C-TR) dan daya di atas 30.000 kVA (C-TT). Selain itu Permen ini juga menghapus golongan tarif untuk keperluan Sosial R-1/220 VA, sehingga golongan tarif tenaga listrik saat ini menjadi sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) golongan tarif. Struktur Tarif Tenaga Listrik (Permen ESDM No. 7/2024):

In 2024, there was a regulatory change related to tariffs, specifically the revocation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (Permen ESDM) No. 28 of 2016 and its replacement with Permen ESDM No. 7 of 2024 ("Permen ESDM 7/2024") on the Electricity Tariff Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Permen ESDM No. 7/2024 regulates the Stratification of Electricity Tariffs, namely the expansion of segmentation, voltage tariff classes for Very Luxury Household use (R-3, TM; capacity above 200 kVA), tariff classes for Very Large Business use (B-3, TT; capacity of 30,000 kVA and above), tariff classes for Traction use for Electric Train Companies requiring capacity above 30,000 kVA (T-TT), tariff classes for Bulk use with capacity up to 200 kVA (C-TR) and capacity above 30,000 kVA (C-TT). In addition, this regulation also eliminates the tariff class for social use R-1, 220 VA, so that the current electricity tariff classes total 37 (Thirty-Seven) tariff classes. Electricity Tariff Structure (Permen ESDM No. 7/2024):

No.	Golongan Tarif Tariff Group	Batas Daya Power Limit
1	S-1/TR	450 VA
2	S-1/TR	900 VA
3	S-1/TR	1,300 VA
4	S-1/TR	2,200 VA
5	S-1/TR	3,500 VA s.d. to 200 kVA
6	S-2/TM	di atas above 200 kVA
7	R-1/TR	450 VA
8	R-1/TR	900 VA
9	R-1/TR	900 VA-RTM
10	R-1/TR	1,300 VA
11	R-1/TR	2,200 VA
12	R-2/TR	3,500 VA s.d. to 200 kVA
13	R-3/TR R-3/TM	6.600 VA atau lebih 6,600 VA or more
14	B-1/TR	450 VA
15	B-1/TR	900 VA
16	B-1/TR	1.300 VA
17	B-1/TR	2,200 VA s.d. to 5,500 VA

No.	Golongan Tarif Tariff Group	Batas Daya Power Limit
18	B-2/TR	6,600 VA s.d. to 200 kVA
19	B-3/TM B-3/TT	di atas above 200 kVA
20	I-1/TR	450 VA
21	I-1/TR	900 VA
22	I-1/TR	1,300 VA
23	I-1/TR	2,200 VA
24	I-1/TR	3.500 VA s.d. to 14 kVA
25	I-2/TR	lebih dari 14 kVA s.d. 200 kVA more than 14 kVA to 200 kVA
26	I-3/TM	lebih dari 200 kVA s.d. kurang dari 30,0 kVA more than 200 kVA to less than 30.0 kVA
27	I-4/TT	30.000 kVA atau lebih 30,000 kVA or more
28	P-1/TR	450 VA
29	P-1/TR	900 VA
30	P-1/TR	1,300 VA
31	P-1/TR	2,200 VA s.d. to 5,500 VA



Dampak Perubahan Harga terhadap Pendapatan dan Laba

Impact of Price Changes on Revenue and Profit

No.	Golongan Tarif Tariff Group	Batas Daya Power Limit
32	P-1/TR	6,600 VA s.d. to 200 kVA
33	P-2/TM	lebih dari 200 kVA more than 200 kVA
34	P-3/TR	-
35	T/TM	lebih dari 200 kVA more than 200 kVA
	T/TT	

No.	Golongan Tarif Tariff Group	Batas Daya Power Limit
36	C/TR	s.d. to 200 kVA
	C/TM	lebih dari 200 kVA s.d. kurang dari 30.000 kVA more than 200 kVA to less than 30,000 kVA
	C/TT	lebih dari 30.000 kVA more than 30,000 kVA
37	L/TR, L/TM, L/TT	-

Pada tahun 2024, tidak ada pemberlakuan perubahan untuk 13 golongan tarif tenaga listrik yang dilakukan penyesuaian (*tariff adjustment*). Ini juga berlaku untuk golongan tarif yang mengalami perluasan segmentasi tegangan listrik / stratifikasi sesuai ketentuan Permen ESDM No. 7 Tahun 2024. Sehingga untuk penetapan *tariff adjustment* TW 1 s.d. 4 Tahun 2024 diberlakukan dengan tarif tetap oleh Pemerintah (Kementerian ESDM). Selanjutnya, penetapan tarif di tahun 2024 tersedia dalam situs Perseroan.

Dengan tidak adanya penyesuaian tarif pada 2024, tidak terdapat uraian dampak perubahan harga jual terhadap perolehan pendapatan dan laba PLN untuk diungkapkan.

In 2024, there was no implementation of changes for 13 electricity tariff groups that underwent adjustment (*tariff adjustment*). This also applies to tariff groups experiencing expanded segmentation of electrical voltage/stratification according to the provisions of Permen ESDM No. 7 of 2024. Therefore, for the determination of tariff adjustments for quarters 1 to 4 of 2024, fixed tariffs were applied by the Government (Ministry of Energy and Mineral Resources). Furthermore, the tariff determination in 2024 is available on the Company's website.

With no tariff adjustments in 2024, there is no description of the impact of price changes on PLN's revenue and profit to be disclosed.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

Sebagai bentuk pemenuhan aspek kepatuhan, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dan diubah oleh regulator. Adapun peraturan baru dan perubahan di sepanjang tahun 2024 yang signifikan berpengaruh pada kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

As part of fulfilling compliance aspects, the Company continuously follows the developments of laws and regulations issued and amended by regulators. The new regulations and changes throughout 2024 that have a significant impact on the Company's performance are as follows:

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya
Table of Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment		Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN	
1.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 2 of 2024 on Rooftop Solar Power Plants Connected to the Electricity Network of Electricity Supply Business License Holders for Public Interest	Baru - Kapasitas pemasangan PLTS Atap tidak dibatasi 100% dari daya terpasang PLN tetapi berdasarkan ketersediaan kuota PLN. - Kuota kapasitas sistem PLTS Atap dilakukan klusterisasi pada tingkat PLN UP3, dan dipublikasikan oleh PLN melalui laman, aplikasi, dan/atau media sosial resmi PLN. Kuota ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap 5 (lima) tahun. - Peniadaan mekanisme ekspor impor. Nilai kelebihan energi listrik dari sistem PLTS Atap pelanggan ke jaringan pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik pelanggan. - Peniadaan biaya kapasitas untuk semua jenis pelanggan PLN yang memasang PLTS Atap. - Pengaturan dan penyederhanaan waktu permohonan pemasangan PLTS Atap oleh Pelanggan PLN dan pengajuan dilayani oleh PLN berdasarkan mekanisme FIFS (<i>First In First Serve</i>). - Biaya pengadaan <i>advanced meter</i> sebagai pengganti meter kWh ekspor impor ditanggung Pemegang IUPTLU. - Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan dan pengawasan program PLTS Atap, termasuk Pusat Pengaduan PLTS Atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS Atap atau Pemegang IUPTLU.	New - The capacity of the Rooftop PLTS installation is not limited to 100% of PLN's installed capacity but is based on the availability of PLN quota. - The capacity quota for Rooftop PLTS system is clustered at PLN UP3 level, and published by PLN through PLN's official website, application, and/or social media. This quota is determined by the Director General of Electricity every 5 (five) years. - Elimination of the import-export mechanism. The excess value of electrical energy from the customer's Rooftop PLTS system to IUPTLU holder's network is not considered in determining the amount of customer's electricity bill. - Elimination of capacity costs for all types of PLN customers who install Rooftop PLTS. - Arrangement and simplification of the application time for Rooftop PLTS installation by PLN Customers and applications are served by PLN based on the FIFS (First In First Serve) mechanism. - The cost of procuring advanced meters as a replacement for import-export kWh meters is borne by the IUPTLU Holder. - Application-based service mechanism for the easy submission of applications, reporting, and supervision of Rooftop PLTS program, including Rooftop PLTS Complaint Center, which receives complaints from Rooftop PLTS customers or IUPTLU Holders.	Dampak: - Penggunaan kuota PLTS Atap (<i>clustering</i>) berdasarkan kuota RUPTL PLN dapat memberikan keamanan pada sistem PLN, karena penambahan kapasitas PLTS Atap telah diproyeksikan dalam RUPTL PLN. - Dengan dihapusnya mekanisme ekspor-impor tenaga listrik, tidak ada kewajiban PLN melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTS Atap, namun PLN wajib menjaga keandalan sistem. - Kapasitas PLTS Atap tidak dibatasi, dan peniadaan biaya kapasitas berdampak pada kewajiban menjaga keandalan sistem seluruhnya di-cover dari biaya penyediaan tenaga listrik PLN. - Dapat menambah porsi bauran energi terbarukan dalam sistem tenaga listrik. - Dengan adanya regulasi PLTS Atap, hal ini menjadi potensi bisnis bagi SH/AP PLN sebagai <i>provider</i> PLTS Atap bagi pelanggan yang membutuhkan.	Impact: - The use of Rooftop PLTS quota (clustering) based on PLN RUPTL quota can provide security to PLN system, because the addition of Rooftop PLTS capacity has been projected in PLN RUPTL. - With the elimination of the electricity export-import mechanism, there is no obligation for PLN to purchase electricity from Rooftop PLTS, but PLN is required to maintain system reliability. - Rooftop PLTS capacity is not limited, and the elimination of capacity costs has an impact on the obligation to maintain system reliability entirely covered by PLN's electricity supply costs. - Can increase the portion of renewable energy mix in the electricity system. - With the existence of Rooftop PLTS regulations, this has become a business potential for SH/AP PLN as a Rooftop PLTS provider for customers who need it.



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment		Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN	
2.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Presidential Regulation (Perpres) No. 14 of 2024 on the Implementation of Carbon Capture and Storage Activities	Baru	New	<i>Concern</i> PLN dalam Permen ESDM No. 16/2024: a. Kepastian Hukum Rezim Kontrak dibandingkan dengan Rezim Perizinan - Perlu ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan CCS/CCUS yang dilaksanakan oleh Kontraktor pada wilayah kerjanya. Misalnya dalam hal jangka waktu Kontrak Kerja Sama ("KKS") telah berakhir atau sumber migas telah habis tereksploitasi, apakah penyelenggaraan CCS/CCUS dilaksanakan melalui amandemen KKS atau Kontraktor tersebut harus mengurus perizinan eksplorasi dan operasi penyimpanan karbon. - Hal ini penting untuk memberikan kejelasan <i>cut-off</i> terhadap rezim Kontrak sesuai UU Migas atau diimplementasikan dengan rezim perizinan. - Selain itu, dalam hal sudah tidak ada lagi produksi migas (<i>depleted reservoir</i>) pada Wilayah Kerja Migas-nya, seharusnya <i>depleted reservoir</i> tersebut dikembalikan kepada Pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung program strategis pemerintah dalam melaksanakan Transisi Energi. b. Dampak Implementasi CCS sebagai Strategi Transisi Energi Nasional - CCS sebagai salah satu strategi transisi energi pada sektor ketenagalistrikan yang memiliki peran penting untuk menjaga keandalan penyediaan tenaga listrik, dimana pembangkit eksisting tetap dapat dimanfaatkan dengan jumlah emisi dihasilkan jauh berkurang.	PLN's Concern in ESDM Regulation No. 16, 2024: a. Legal Certainty of the Contract Regime compared to the Licensing Regime - There needs to be legal certainty in the implementation of CCS, CCUS implemented by Contractors in their working areas. For example, if the Cooperation Contract ("KKS") period has ended or the oil and gas resources have been fully exploited, is the implementation of CCS, CCUS implemented through a KKS amendment or the Contractor must take care of carbon storage exploration and operation permits. - This is important to provide clarity on the cut-off for the Contract regime, according to the Oil and Gas Law, or implemented with a licensing regime. - In addition, if there is no further oil and gas production (<i>depleted reservoir</i>) in the Oil and Gas Working Area, the depleted reservoir should be returned to the Government so that it can be reused to support the Government's strategic program in implementing the Energy Transition. b. Impact of CCS Implementation as a National Energy Transition Strategy - CCS, as one of the energy transition strategies in the electricity sector, plays a crucial role in maintaining the reliability of electricity supply, where existing power plants can still be utilized, with the number of emissions produced being significantly reduced.
3.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan karbon pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dalam rangka kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2024 on the Implementation of Carbon Storage Activities in Carbon Storage Permit Areas as part of Carbon Capture and Storage Activities	Baru, sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon	New, as a follow-up to Presidential Regulation No. 14 of 2024 on the Implementation of Carbon Capture and Storage Activities.		

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment	Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN
		• Untuk mengendalikan biaya program transisi energi, biaya imbal jasa penyimpanan karbon (<i>Storage fee</i>) atas pemanfaatan <i>depleted reservoir</i> seharusnya tidak semata menekankan aspek komersial (b to b). Melainkan harus ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga biaya pelaksanaan CCS tidak menambah beban negara.	• To control the cost of the energy transition program, the cost of carbon storage services (<i>Storage fee</i>) for the utilization of depleted reservoirs should not only emphasize the commercial aspect (b to b). But it must be determined by the Government, so that the cost of implementing CCS does not increase the burden on the state.
		c. Kehati-hatian terhadap aspek Lingkungan Hidup Jenis risiko dari kegiatan CCS sangat berbeda dengan risiko kegiatan eksplorasi dan eksploitasi termasuk menyimpan karbon yang bersumber dari penghasil karbon lain. Hal ini belum diatur secara rinci dalam regulasi CCS yang ada.	c. Caution towards Environmental Aspects The type of risk associated with CCS activities differs significantly from the risks of exploration and exploitation activities, including the storage of carbon from other carbon producers. This has not been regulated in detail in the existing CCS regulations.
		Dampak: PLN dapat merealisasikan salah satu pemodelan <i>Zero Emission</i> (ZE) untuk optimasi rencana penyediaan tenaga listrik adalah dengan <i>Carbon Capture Storage</i> (CCS) yaitu penambahan pembangkit berbasis pada kebijakan pemanfaatan EBET yang agresif dan implementasi teknologi CCS pada pembangkit yang berlokasi di dekat lapangan minyak dan gas bumi.	Impact: PLN can realize one of the Zero Emission (ZE) modeling to optimize the electricity supply plan, which involves Carbon Capture Storage (CCS), namely the addition of power plants based on an aggressive EBET utilization policy and the implementation of CCS technology in power plants located near oil and gas fields.
		PLN telah menyampaikan concern di atas kepada KESDM pada saat penyusunan Permen dan pada saat sosialisasi Permen, termasuk diskusi dengan praktisi serta akademisi.	PLN has conveyed the above concerns to KESDM during the preparation of the Regulation and during the dissemination of the Regulation, including discussions with practitioners and academics.



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment		Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN	
4.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Minister of Industry Regulation No. 33 of 2024 on the Revocation of Minister of Industry Regulation No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure, as Amended Several Times, Most Recently by Minister of Industry Regulation No. 23 of 2023 on the Second Amendment to Minister of Industry Regulation Number 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.	- Mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. - Kewenangan penetapan Besaran nilai minimum TKDN proyek yang sebelumnya berada pada Kemenperin beralih kepada Kementerian ESDM selaku kementerian teknis di bidang ketenagalistrikan. - Threshold TKDN barang dan jasa berdasarkan ketentuan PP Pemberdayaan Industri. - Ketentuan khusus terhadap implementasi kebijakan TKDN dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemberi pinjaman, khusus bagi proyek yang didanai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.	- Revoking the Minister of Industry Regulation No. 54/M-IND/PER/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure. - The authority to determine the minimum value of TKDN for projects that were previously under the Ministry of Industry has been transferred to the Ministry of Energy and Mineral Resources, as the technical ministry in the electricity sector. - The threshold for TKDN for goods and services is based on the provisions of PP on Industrial Empowerment. - Special provisions for implementing TKDN policies can be adjusted to align with the policies of lenders, particularly for projects funded by foreign loans and/or grants.	Terdapat 2 isu strategis dalam pemanfaatan produk dalam negeri, yaitu: 1. Semua <i>International Lender (Development Bank)</i> menolak untuk memasukkan ketentuan TKDN dalam biddoc dan biddoc wajib mengikuti <i>Guideline Lender</i> dengan alasan asas <i>fairness</i>. 2. Kapabilitas industri nasional saat ini belum memenuhi nilai TKDN sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenperin 54/2012 sehingga realisasi pencapaian TKDN proyek EBT di Indonesia masih di bawah threshold Permenperin tersebut. Dampak: - Proyek-proyek EBT khususnya yang didanai Pinjaman dan hibah luar negeri dari <i>Development Bank</i> yang sebelumnya terdapat terkendala akibat adanya perbedaan dengan dokumen <i>lender</i> dan berpotensi proses <i>funding</i> proyek EBT dari PHLN terhenti, saat ini dapat diakomodasi dengan penerbitan Permen tersebut. Sehingga PLN tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendanaan bunga murah, <i>grace period</i> yang panjang dan masa tenor cicilan yang panjang. - Regulasi TKDN ini diharapkan dapat mendorong tercapainya bauran energi EBT dan pengurangan emisi karbon sesuai target Pemerintah.	There are two strategic issues in the utilization of domestic products, namely: 1. All International Lenders (Development Banks) refuse to include TKDN provisions in biddoc and biddoc must follow the Lender Guidelines on the grounds of fairness. 2. The current national industrial capability has not met the TKDN value as required in Permenperin 54/2012, and thus, the realization of TKDN achievement for EBT projects in Indonesia remains below the threshold set by Permenperin. Impact - NRE projects, especially those funded by foreign loans and grants from the Development Bank, which were previously constrained by differences with lender documents and potentially halted the NRE project funding process from PHLN, can now be accommodated by issuing the Regulation. So that PLN still can obtain low-interest funding, a long grace period, and a long installment tenor period. - This TKDN regulation is expected to encourage the achievement of the NRE energy mix and carbon emission reduction according to the Government's target.
	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Modul Surya. Minister of Industry Regulation No. 34 of 2024 on Procedures for Calculating the Domestic Component Level (TKDN) Value of Solar Module Products.	Baru, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024	New, as a follow-up to the Regulation of the Minister of Industry No. 33 of 2024		

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment	Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2024 on the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.	Baru, sebagai pengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-Ind/Per/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	New, as a replacement for the Regulation of the Minister of Industry No. 54/M-Ind/Per/3/2012 on Guidelines for the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.
	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 191/2024 tentang Batas Minimum (threshold) Nilai TKDN Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 191/2024 on the Minimum Threshold Value of TKDN for Electricity Infrastructure Development Projects.	Baru, sebagai tindak lanjut Permen ESDM 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	New, as a follow-up to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2024 on the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.
	Kepdirjen EBTKE 150/2024 tentang Tata Cara Perhitungan Pemenuhan Nilai TKDN Gabungan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Proyek PLT ET. Director General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation Decree No. 150/2024 on Procedures for Calculating the Fulfillment of Combined Goods and Services TKDN Value within Renewable Energy Power Plant (PLT ET) Projects.	Baru, sebagai tindak lanjut Permen ESDM 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	New, as a follow-up to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2024 on the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.
	Kepdirjen Ketenagalistrikan 364/2024 tentang Tata Cara Penghitungan Pemenuhan Nilai TKDN Gabungan Barang dan Jasa Dalam Lingkup Proyek PIK untuk Pembangkit Listrik Tak Terbarukan, Jaringan Transmisi, dan Gardu Induk. Director General of Electricity Decree No. 364/2024 on Procedures for Calculating the Fulfillment of Combined Goods and Services TKDN Value within Electricity Infrastructure Projects (PIK) for Non-Renewable Power Plants, Transmission Networks, and Substations.	Baru, sebagai tindak lanjut Permen ESDM 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	New, as a follow-up to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11/2024 on the Use of Domestic Products for the Development of Electricity Infrastructure.



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment		Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN	
5.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 7 of 2024 on Electricity Tariffs Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	- Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2023. - Stratifikasi golongan tarif sebagai berikut: - Rumah Tangga Tegangan Rendah (R3/TR) daya 6.600 VA s.d. 200 kVA dan Tegangan Menengah (R3/TM) daya di atas 200 kVA. - Bisnis Tegangan Menengah (B3/TM) daya 200 s.d. 30.000 kVA dan Bisnis Tegangan Tinggi (B3/TT), (B3/TM) daya 30.000 kVA ke atas. - Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA s.d. 30.000 kVA dan Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas. - Curah Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA, Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya lebih dari 200 kVA s.d. 30.000 kVA, dan Curah Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas.	- Revoking the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 28 of 2016 on Electricity Tariffs Provided by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8 of 2023. - The tariff group stratification is as follows: - Low Voltage Household (R3, TR) with a power of 6,600 VA to 200 kVA and Medium Voltage (R3, TM) with a power above 200 kVA. - Medium Voltage Business (B3, TM) with a power of 200 to 30,000 kVA and High Voltage Business (B3, TT), (B3, TM) with a power of 30,000 kVA and above. - Medium Voltage Traction (T, TM) with a power above 200 kVA to 30,000 kVA and High Voltage (T, TT) power of 30,000 kVA and above. - Low Voltage Flow (C, TR) power up to 200 kVA, Medium Voltage Flow (C, TM) power more than 200 kVA up to 30,000 kVA, and High Voltage Flow (C, TT) power 30,000 kVA and above.	Dampak: - Dengan adanya golongan Rumah Tangga Tegangan Menengah maka benefit yang diperoleh PLN yaitu dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga mewah yang saat ini potensinya semakin meningkat, keandalan lebih baik dan pengurangan susut. - Dengan adanya golongan Bisnis Tegangan Tinggi maka benefit yang diperoleh PLN yaitu PLN dapat memberikan dukungan listrik untuk pelanggan besar seperti <i>Data Center</i> seperti Microsoft, Amazon Web Services, dll. PLN dapat meningkatkan keandalan, pengurangan susut, penggunaan lahan yang lebih kecil, investasi peralatan (kabel, trafo) yang lebih efisien. - Dengan adanya golongan Traksi Tegangan Tinggi maka benefit yang diperoleh PLN yaitu dapat memberikan dukungan listrik untuk transportasi publik yang baru: MRT, LRT dan kereta cepat. Keandalan lebih baik, pengurangan susut, penggunaan lahan yang lebih kecil, investasi peralatan (kabel, trafo) yang lebih efisien, dan tarif lebih murah di konsumen. - Dengan adanya golongan Curah Tegangan Rendah maka benefit yang diperoleh PLN yaitu dapat memberikan dukungan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Percepatan ekosistem kendaraan listrik, tarif listrik lebih murah menggunakan Curah TR dari Tarif Bisnis. - Untuk golongan Curah Tegangan Tinggi maka benefit yang diperoleh PLN yaitu dapat memberikan dukungan pemegang Wilus sehingga keandalan lebih baik, pengurangan susut, penggunaan lahan yang lebih kecil, investasi peralatan (kabel, trafo) yang lebih efisien, dan tarif lebih murah di konsumen.	Impact: - With the Medium Voltage Household group, the benefits obtained by PLN are that it can meet the electricity needs of luxury households whose potential is currently increasing, better reliability, and reduced losses. - With the High Voltage Business group, the benefits obtained by PLN are that PLN can provide electricity support for large customers, such as Data Centers, including Microsoft, Amazon Web Services, etc. PLN can increase reliability, reduce losses, use less land, and invest in more efficient equipment (cables, transformers). - With the High Voltage Traction group, the benefits obtained by PLN are that it can provide electricity support for new public transportation: MRT, LRT, and high-speed trains. Better reliability, reduce losses, use less land, invest in more efficient equipment (cables, transformers), and cheaper rates for consumers. - With the Low Voltage Bulk group, the benefits obtained by PLN are that it can provide support for Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) and Public Electric Vehicle Battery Exchange Stations (SPBKLU). Acceleration of the electric vehicle ecosystem, cheaper electricity rates using Bulk TR from Business Tariffs. - For the High Voltage Bulk group, the benefits obtained by PLN are that it can provide support for Wilus holders so that reliability is better, reduced losses, smaller land use, more efficient equipment investment (cables, transformers), and cheaper rates for consumers.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment		Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN	
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 14 of 2024 on the Implementation of Supervision and Administrative Sanctions in the Environmental Sector	Baru • Penambahan 1(satu) jenis sanksi administratif baru berupa denda administratif (2,5 – 5% dari nilai investasi atau paling banyak Rp. 3 Miliar) yang merupakan amanah pada Undang-Undang Cipta Kerja. Denda administratif menggantikan sanksi pidana pada beberapa jenis pelanggaran.	New • Addition of 1(one) new type of administrative sanction in the form of an administrative fine (2.5 – 5% of the investment value or a maximum of Rp3 billion), which is a mandate in the Job Creation Law. Administrative fines replace criminal sanctions for several types of violations.	Dampak: • Penambahan jenis denda administratif dalam ketentuan merupakan salah satu “game changer” dalam penyelenggaraan pengawasan dan sanksi administratif bidang lingkungan hidup. • Penambahan denda administratif mendorong PLN untuk mematuhi ketentuan dan memperketat pengawasan serta pelaksanaan bisnisnya agar terhindar dari pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan lingkungan hidup.	Impact: • The addition of types of administrative fines in the provisions is one of the “game changers” in the implementation of supervision and administrative sanctions in the environmental sector. • The addition of administrative fines encourages PLN to comply with the provisions and tighten its supervision and implementation of business activities to avoid environmental management-related violations.
7.	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 3 of 2024 on the Provision of Electricity Tariff Subsidies for Household Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	- Mencabut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2019. - Pemadanan data konsumen dengan data dasar dilakukan melalui sistem layanan penghubung(web service) dan/atau secara langsung (on desk). - Waktu pemadanan data setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. - Penyesuaian golongan tarif konsumen disesuaikan pada bulan berikutnya berdasarkan hasil pemadanan data (tidak terdapat penetapan oleh Direktur Jenderal KESDM) - Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan hasil pemadanan data kepada Menteri melalui Dirjen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukan pemadanan data.	- Revoking, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 29 of 2016 on the Mechanism for Providing Electricity Tariff Subsidies for Households, as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 17 of 2019. - Matching of consumer data with basic data is carried out through a liaison service system (web service) and/or directly (on desk). - Data matching time every 3 (three) months in January, April, July, and October. - Consumer tariff group adjustments are adjusted in the following month based on the results of data matching (there is no determination by the Director General of KESDM) - The Board of Directors of PT PLN (Persero) submits the results of the data matching to the Minister through the Director General within 10 (ten) working days after the data matching is completed.	Dampak : • Pemberian subsidi tarif tenaga listrik dapat lebih tepat sasaran seperti penerima yang berhak mendapat subsidi yang tinggal di rumah konsumen PLN dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik. • PLN langsung dapat menyesuaikan golongan tarif tenaga listrik Konsumen yang tidak terdapat dalam hasil pemadanan data. Sehingga tidak ada fungsi kontrol dari regulator serta timbulnya risiko beban fiskal apabila penerima subsidi bertambah.	Impact: • The provision of electricity tariff subsidies can be more targeted, such as recipients who are entitled to subsidies and who live in PLN consumer homes can receive electricity tariff subsidies. • PLN can directly adjust the electricity tariff groups of Consumers who are not included in the data matching results. So that there is no control function from the regulator, and the risk of fiscal burden arises if the recipients of subsidies increase.



Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya

Significant Amendments to Laws and Regulations and Their Impact

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Amendment	Uraian Dampak dan Tindak Lanjut yang dilakukan PLN Explanation of Impact and Follow-Up Actions Taken by PLN
		- Konsumen rumah tangga daya > 900 VA yang masuk dalam data dasar dapat menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah dilakukan penurunan daya menjadi golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi. - Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu yang menempati rumah tinggal Konsumen daya > 900 VA berhak menerima subsidi tarif tenaga listrik setelah dilakukan penurunan daya menjadi golongan tarif daya 900 VA bersubsidi. Penurunan daya harus mendapatkan persetujuan Konsumen pemilik rumah tinggal.	- Household consumers with power > 900 VA who are included in the basic data can receive electricity tariff subsidies after the power is reduced to the subsidized 900 VA household power category. - Poor and underprivileged households occupying residential homes, as well as consumers with power > 900 VA, are entitled to receive electricity tariff subsidies after their power is reduced to the subsidized 900 VA power tariff category. The power reduction must obtain the approval of the Consumer who owns the residential home.
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2024 on the Amendment to Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 on Guidelines for the Management of Regional-Owned Assets	- Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. - Poin penting dari perubahan yaitu terkait faktor penyesuaian sewa untuk infrastruktur ketenagalistrikan yang semula ditetapkan berdasarkan range tertentu dan ditetapkan besarnya oleh Pemda, saat ini besarnya diseragamkan dalam Permen. - Faktor penyesuaian yang ditetapkan sebagai berikut : 0% (nol persen) untuk pembangkit listrik minihydro dan mikrohydro (< 10 MW), dan tenaga air; dan 1% (satu persen) untuk pembangkit listrik lainnya. 1% (satu persen) untuk jaringan transmisi tenaga Listrik; dan 0% (nol persen) untuk jaringan distribusi tenaga listrik.	- Amending the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 19 of 2016 on Guidelines for Management of Regional Property. - The important point of the change is related to the rental adjustment factor for electricity infrastructure which was originally determined based on a certain range and the amount was determined by the Regional Government, currently the amount is standardized in the Regulation. - The adjustment factors determined are as follows: 0% (zero percent) for minihydro and microhydro power plants (<10 MW), and hydropower; and 1% (one percent) for other power plants. 1% (one percent) for electricity transmission networks; and 0% (zero percent) for electricity distribution networks.
			Dampak : - Dengan faktor penyesuaian sewa tersebut, beban keuangan perusahaan menjadi lebih ringan dibandingkan rancangan awal, sehingga diharapkan tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan. Impact: - With the rental adjustment factor, the Company's financial expenses becomes lighter compared to the initial design, so it is expected not to have a negative impact on the Company's financial condition.

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Assessment Kelangsungan Usaha

Assessment of Business Continuity

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, tidak ditemukan faktor yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan pada tahun buku terakhir. Penilaian ini didasarkan pada prospek pertumbuhan industri yang terus menunjukkan arah positif dan potensi perkembangan yang stabil. Serta dibuktikan dengan tidak adanya catatan dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2024 terkait dengan ancaman terhadap kelangsungan usaha Perseroan (*going concern*).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Perseroan menyusun strategi jangka panjang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan rencana tahunan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik dan pemanfaatan teknologi terkini, Perseroan berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Based on management's evaluation, no factors were found that could have a significant impact on the Company's business continuity in the latest fiscal year. This assessment is based on the industry growth prospects, which continue to show a positive trend and stable development potential. It is also supported by the absence of any notes in the 2024 Audited Financial Statements regarding threats to the Company's going concern.

As part of its long-term strategy, the Company develops long-term strategies in the Company's Long-Term Plan (RJPP) and annual plans in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). By applying good governance principles and utilizing the latest technology, the Company focuses on achieving sustainable growth while providing added value to all stakeholders.

Analisis Posisi Perusahaan

Analysis of Company Position

PLN menilai kelangsungan usaha, mencakup terkait faktor-faktor yang disebutkan di atas, dengan melakukan pemetaan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Hasil pemetaan SWOT yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal Perseroan pada 2024 adalah sebagai berikut:

PLN assesses business continuity, including the factors mentioned above, by conducting a SWOT analysis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). The results of the SWOT mapping conducted on the Company's internal and external factors in 2024 are as follows:

Strength/Opportunities

1. Melayani kebutuhan energi yang terus meningkat pasca Covid-19 dengan mengoptimalkan aset untuk memperluas pendapatan dan basis pelanggan.
2. Meningkatkan keandalan dan efisiensi dengan melakukan digitalisasi pada aset pembangkit dan jaringan.

Strength/Opportunities

1. Serving the increasing energy needs post-COVID-19 by optimizing assets to expand revenue and customer base.
2. Improving reliability and efficiency by digitalizing power plants and network assets.



Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity

3. Memenuhi *Additional Demand* menawarkan peluang bagi PLN untuk meningkatkan pendapatan dan *business development* secara signifikan.
4. Pembentukan *Subholding* memungkinkan fokus yang lebih baik dalam operasi dan efisiensi bisnis untuk mengembangkan sumber pendapatan inovatif yang dapat mendiversifikasi pendapatan PLN dan mengurangi risiko yang timbul dari potensi perubahan regulasi.
5. PLN *Mobile* dengan jumlah *downloader* saat ini, memungkinkan peluang monetisasi data dan peningkatan *engagement* pelanggan/*customer* didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi.
6. Peran PLN sebagai PSO sebagai penyedia listrik untuk mendukung perekonomian Indonesia.

3. Meeting *Additional Demand* offers opportunities for PLN to increase revenue and business development significantly.
4. The formation of *Subholding* enables a better focus on operations and business efficiency, allowing for the development of innovative revenue sources that can diversify PLN's income and mitigate risks arising from potential regulatory changes.
5. PLN *Mobile*, with the current number of downloads, enables opportunities for data monetization and increased customer engagement supported by technological and information developments.
6. PLN's role as PSO is to support Indonesia's economy as the electricity provider.

Weakness/ Opportunities

1. Perubahan tren ke arah *electrifying lifestyle* menjadi peluang bagi PLN untuk terus mengembangkan kapasitas yang optimal yang akan berdampak pada peningkatan penjualan tenaga listrik.
2. Menurunkan tingkat emisi dengan melakukan percepatan pengembangan EBT sesuai Perpres 112/2022.
3. Transformasi IT dan Sistem Digital untuk mendukung 3D.
4. Digitalisasi proses bisnis sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk *improvement* pada pengelolaan data, informasi & *management information system*.

Weakness/ Opportunities

1. The shift toward an electrifying lifestyle trend presents an opportunity for PLN to continuously develop optimal capacity, which will lead to increased electricity sales.
2. Reducing emission levels by accelerating the development of New and Renewable Energy (NRE) sources, as outlined in Presidential Regulation 112/2022.
3. IT and Digital System transformation to support 3D.
4. Digitization of business processes in line with technological and informational developments to improve data management, information, and management information systems.

Strength/Threat

1. Perubahan tren ke arah *electrifying lifestyle* menjadi peluang bagi PLN untuk terus mengembangkan kapasitas yang optimal yang akan berdampak pada peningkatan penjualan tenaga listrik.
2. Peningkatan keandalan sistem dan pelayanan bagi seluruh pelanggan.
3. Kemampuan kompetensi tenaga kerja PLN saat ini masih terspesialisasi pada pola bisnis ketenagalistrikan konvensional yang membatasi kemampuan PLN untuk mendukung pengembangan dan diversifikasi bisnis yang inovatif.
4. PLN dapat menjajaki opsi pembiayaan berbunga rendah untuk berinvestasi dalam *Green Project* melalui peningkatan ESG Score.

Strength/Threat

1. The shift toward an electrifying lifestyle trend presents an opportunity for PLN to continuously develop optimal capacity, which will lead to increased electricity sales.
2. Increasing system reliability and services for all customers.
3. PLN's current workforce competencies are still specialized in conventional electricity business patterns, which limits PLN's ability to support innovative business development and diversification.
4. PLN can explore low-interest financing options to invest in green projects by improving its ESG Score.

Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Weakness/Threat

1. Meningkatkan keandalan dan efisiensi pembangkit ditengah volatilitas harga bahan bakar yang berpotensi menaikkan BPP.
2. Kompleksitas rencana transisi energi dimana kurangnya visibilitas dalam rencana pelaksanaan dan kebutuhan investasi untuk transisi energi yang dapat menyebabkan penundaan dan kesalahan alokasi sumber daya.

Weakness/Threat

1. Increasing the reliability and efficiency of power plants amid fuel price volatility that has the potential to raise BPP.
2. The complexity of the energy transition plan, where the lack of visibility in implementation plans and investment needs for the energy transition may cause delays and misallocation of resources.

Asumsi Pelaksanaan Assessment Kelangsungan Usaha

Assumptions for Business Continuity Assessment

Assessment terhadap kelangsungan usaha Perseroan dilakukan dengan menggunakan asumsi yang mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan kebijakan pemerintah lainnya, di samping asumsi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan jumlah penduduk, inflasi, target elektrifikasi, dan target pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Perseroan menggunakan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan 2 (dua) skenario, yaitu optimistis dan moderat. Selain itu, Perseroan mempertimbangkan data daftar tunggu pelanggan besar serta program pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Wisata Super Prioritas, dan lain-lain.

The assessment of the Company's business continuity is conducted using assumptions that refer to the National Electricity General Plan (RUKN) and other government policies, alongside assumptions regarding economic growth, population growth and size, inflation, electrification targets, and targets for the development of New and Renewable Energy (EBT). The Company uses economic growth projection assumptions with 2 (two) scenarios, namely optimistic and moderate. Additionally, the Company considers data on the waiting lists of large customers, as well as government programs such as Special Economic Zones (KEK), Industrial Zones (KI), Priority Tourism Destinations (DPP), Super Priority Tourism Destinations, and others.



Photo by Endana Yusuf Wahyu





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

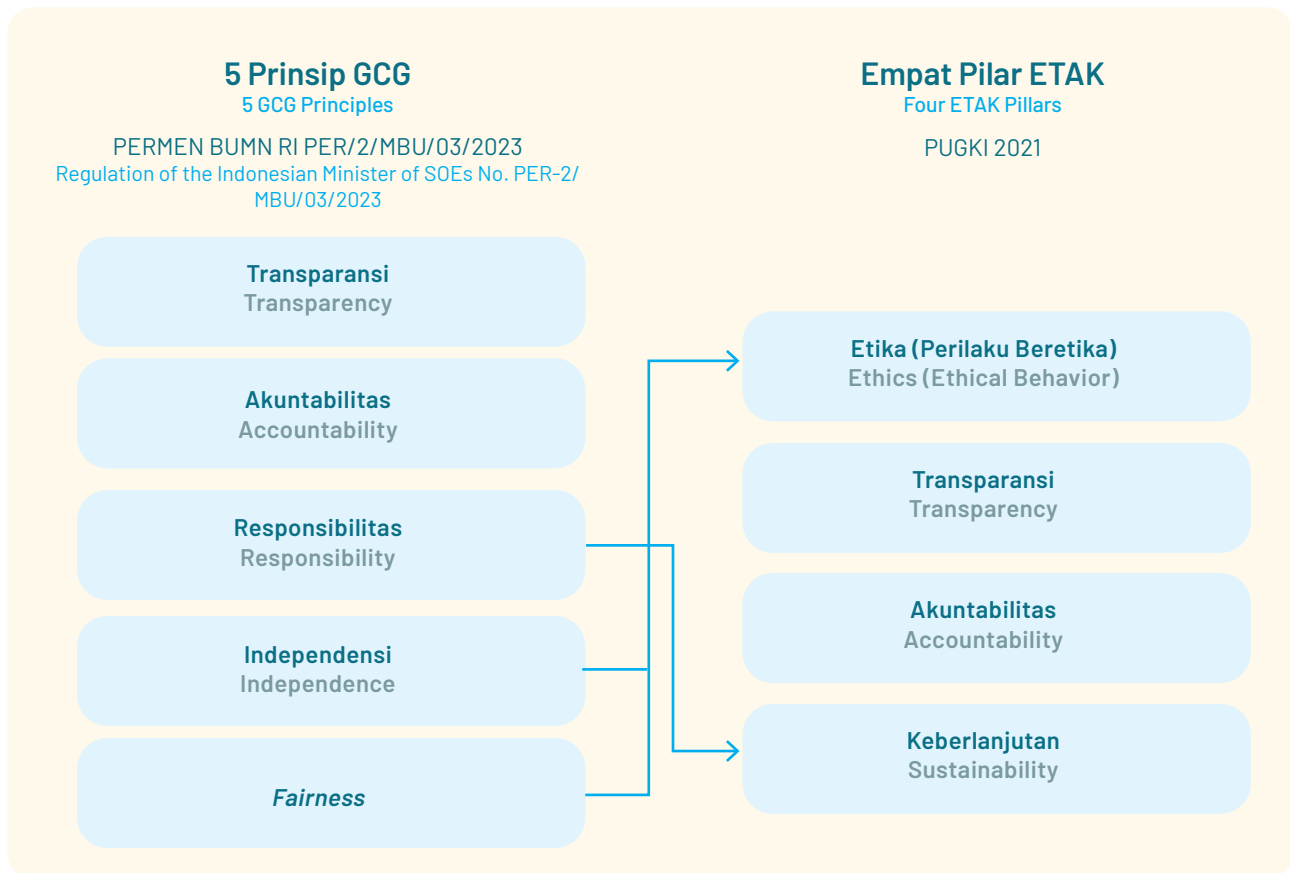


Pendahuluan

Introduction

PT PLN (Persero), sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berkomitmen untuk menerapkan Governansi Perseroan yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan fairness. Prinsip GCG tersebut juga sejalan dengan 4 (empat) pilar governansi korporat berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) tahun 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan (ETAK). Dengan menginternalisasi 5 prinsip dan empat pilar yang saling berkaitan tersebut, PT PLN (Persero) berupaya mendorong terciptanya nilai yang berkelanjutan bagi Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

As one of the State-Owned Enterprises (SOEs), PT PLN (Persero) is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) by upholding the principles outlined in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. These GCG principles are also aligned with the four pillars of corporate governance based on the 2021 Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely Ethical Behavior, Accountability, Transparency, and Sustainability (ETAK). By internalizing these five principles and four interrelated pillars, PT PLN (Persero) strives to promote the creation of sustainable value for the Company and all stakeholders.





Pendahuluan

Introduction

Visi Perseroan telah berfokus pada pencapaian kinerja berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam upaya ini, Perseroan memastikan bahwa seluruh organ Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan yang mengutamakan penerapan prinsip GCG (TARIF) maupun 4 pilar (ETAK) dalam setiap proses pengambilan keputusan. Visi Perseroan tidak hanya mendukung keberlanjutan kinerja Perseroan, tetapi juga memperkuat praktik governansi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder.

Perseroan juga telah mengimplementasikan konsep keberlanjutan secara menyeluruh dalam setiap aspek proses bisnis Perseroan. Konsep keberlanjutan ini terintegrasi dengan baik dalam strategi jangka panjang, yang tidak hanya mencakup kinerja ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dalam menghadapi perubahan dinamika lingkungan bisnis, Perseroan secara proaktif mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik dalam kegiatan operasional saat ini maupun di masa depan. Pendekatan ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip GCG (TARIF) maupun 4 pilar (ETAK), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja yang optimal, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang yang menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company's vision has focused on achieving sustainable performance by considering the interests of all stakeholders. In this effort, the Company ensures that all corporate organs, including the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other supporting bodies, play a significant role in supporting the implementation of good corporate governance. This is reflected in policies that prioritize the application of GCG principles (TARIF) as well as the four ETAK pillars in every decision-making process. The Company's vision not only supports the sustainability of its performance but also strengthens governance practices that are responsive to the needs and expectations of stakeholders.

The Company has also comprehensively implemented the concept of sustainability in every aspect of its business processes. This sustainability concept is well-integrated into the long-term strategy, which encompasses not only economic performance but also considers social and environmental impacts. In facing changes in the business environment, the Company proactively identifies and anticipates potential risks related to economic, social, and environmental aspects, both in current operations and in the future. This approach is carried out based on GCG principles (TARIF) and the four ETAK pillars, which emphasize transparency, accountability, and sustainability in every decision and action taken. Thus, the Company not only focuses on achieving optimal performance but also is committed to maintaining long-term sustainability that benefits all stakeholders.

Tujuan Penerapan Governansi Perseroan

Objectives of GCG Implementation

PLN merumuskan tujuan penerapan Governansi Perseroan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

PLN has formulated the objectives of implementing Corporate Governance as follows:

1. Optimizing the Company's value in order to build strong competitiveness both nationally and internationally, thereby enabling the Company to sustain its existence and achieve long-term sustainability in line with its purpose and objectives.

Pendahuluan

Introduction

2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.
 3. Mendorong agar Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
 4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
2. Encouraging professional, efficient, and effective management of the Company, while empowering the functions and enhancing the independence of the Company's Organs.
 3. Encouraging the Company's Organs to make decisions and take actions based on high moral values and compliance with prevailing laws and regulations, as well as to foster awareness of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company.
 4. Enhancing the Company's contribution to the national economy.
 5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan Governansi Perseroan

Legal Basis and Policy for Implementing Corporate Governance

Penerapan tata kelola PLN mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman GCG, antara lain:

1. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN 19/2003);
2. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT 40/2007);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021;
7. Asean *Corporate Governance Scorecard*;
8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015;
9. *Soft Structure* GCG.

The implementation of PLN's governance refers to a number of laws and GCG guidelines, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE Law 19/2003);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law 40/2007);
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises;
6. The 2021 Indonesian General Guidelines for Corporate Governance;
7. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
8. Corporate Governance Guidelines for Public Companies, POJK No. 21/POJK.04/2015;
9. GCG Soft Structure.



Pendahuluan

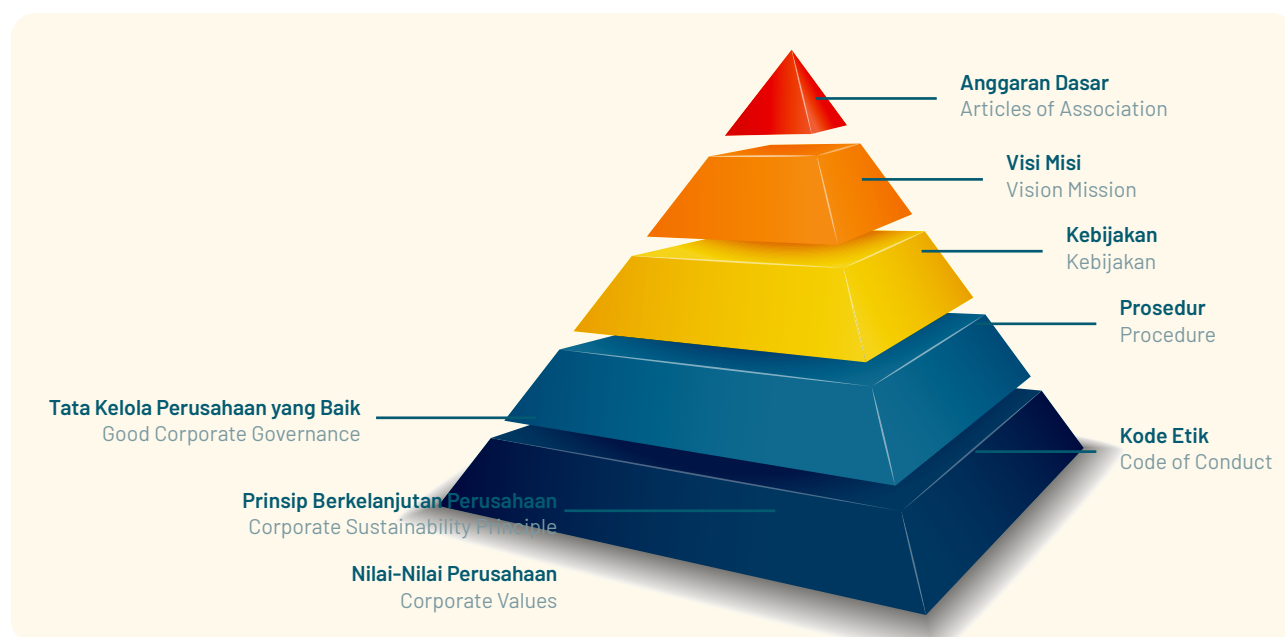
Introduction

PLN melaksanakan penerapan GCG dengan didukung oleh keberadaan sejumlah peraturan dan kebijakan internal yang berfungsi sebagai soft-structure GCG, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan serta standar praktik terbaik GCG yang berlaku.

Soft-structure GCG PLN tercermin melalui arsitektur kebijakan PT PLN (Persero), sesuai Peraturan Direksi No.0141.P/DIR/2021 tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi No. 0014.P/DIR/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0141.P/DIR/2021 Tentang Arsitektur dan Tata Kelola Kebijakan PT PLN (Persero), dengan ilustrasi sebagai berikut:

PLN implements GCG supported by a number of internal regulations and policies that serve as its GCG soft-structure, formulated based on laws and regulations as well as prevailing GCG best practice standards.

PLN's GCG soft-structure is reflected in the policy architecture of PT PLN (Persero), in accordance with the Board of Directors' Regulation No. 0141.P/DIR/2021 on the Policy Architecture and Governance of PT PLN (Persero), and the Board of Directors' Regulation No. 0014.P/DIR/2023 on the Amendment to the Board of Directors' Regulation No. 0141.P/DIR/2021 on the Policy Architecture and Governance of PT PLN (Persero), illustrated as follows:



Hingga akhir Desember 2024, Jenis peraturan internal atau kebijakan yang dimiliki Perseroan dalam mendukung penerapan GCG antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
3. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);

Until the end of December 2024, the types of the Company's internal regulations or policies of to support the implementation of GCG were, among others, as follows:

1. The Company's Articles of Association;
2. Corporate Governance Guidelines;
3. Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors (*Board Manual*);

Pendahuluan

Introduction

4. Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) menjadi panduan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing, guna mencapai visi dan misi Perusahaan. *Board Manual* PLN terdiri dari:
 - a. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris (Buku 1) yang mengatur tata laksana hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. *Board Manual* Direksi (Buku 2) yang mengatur tata laksana hubungan kerja di organ Direksi;
 - c. *Board Manual* Dewan Komisaris (Buku 3) yang mengatur tata laksana kerja di organ Dewan Komisaris.
5. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan (*Code of Conduct*);
6. Piagam Komite Audit;
7. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
8. Piagam Komite Manajemen Risiko
9. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal
10. Piagam Pengawasan Internal
11. Buku Pedoman Manajemen Risiko
12. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
13. Sistem Pelaporan Pelanggaran
14. Pedoman Organisasi
15. Kebijakan Pelaporan LHKPN
16. Kebijakan Pencegahan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

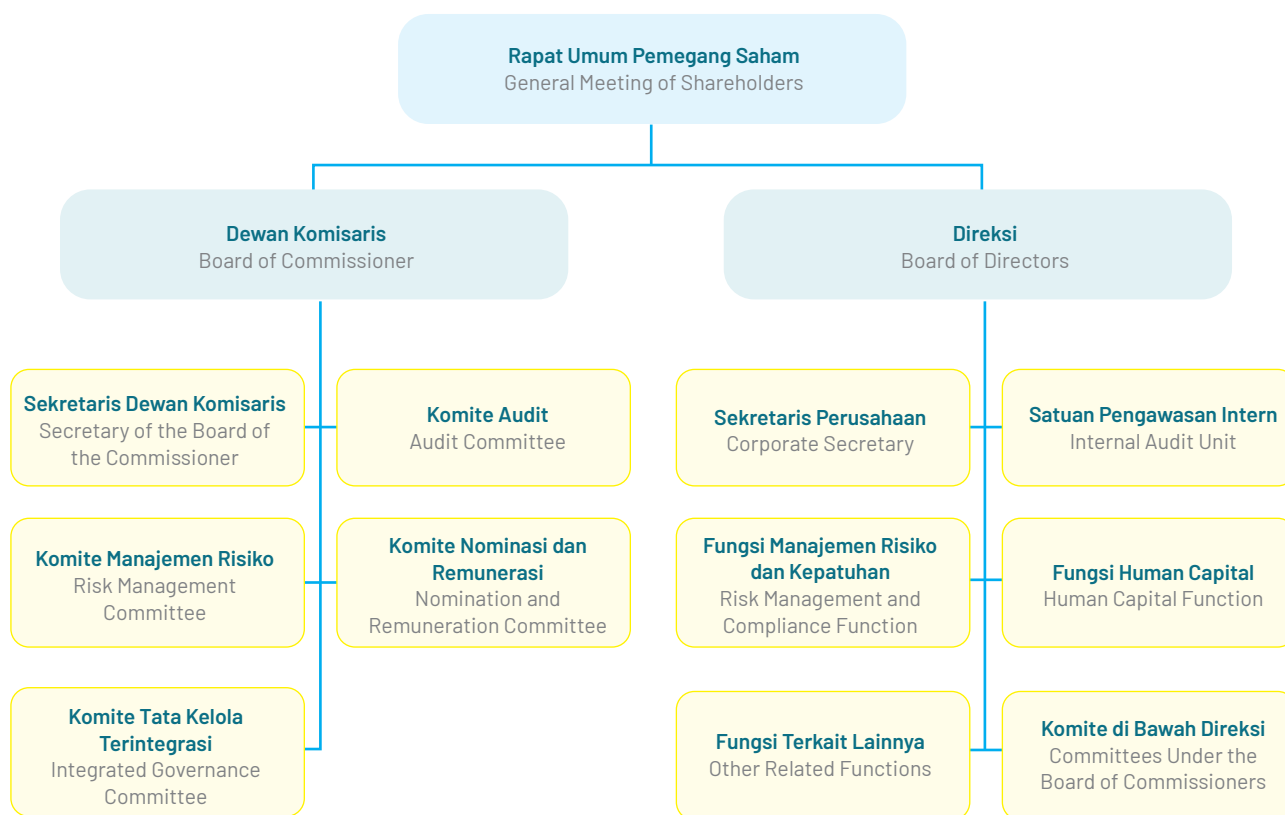
4. The Board Manual serves as a guide for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's vision and mission. PLN's Board Manual consists of:
 - a. Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners (Book 1), which governs the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - b. Board Manual for the Board of Directors (Book 2), which governs the internal working relationships within the Board of Directors;
 - c. Board Manual for the Board of Commissioners (Book 3), which governs the working procedures of the Board of Commissioners.
5. Code of Conduct and Business Ethics Guidelines;
6. Audit Committee Charter;
7. Nomination and Remuneration Committee Charter;
8. Risk Management Committee Charter;
9. Internal Control System Policy;
10. Internal Audit Charter;
11. Risk Management Guidelines;
12. Goods and Services Procurement Guidelines;
13. Whistleblowing System;
14. Organizational Guidelines;
15. LHKPN Reporting Policy;
16. Gratuity Control and Conflict of Interest Prevention Policy.

Struktur Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance Structure

Struktur tata kelola perusahaan di PT PLN (Persero) didasarkan pada pembagian yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi, sedangkan Direksi bertanggung jawab dalam menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Setiap tingkat dalam struktur tata kelola ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berikut struktur Tata Kelola Perseroan per 31 Desember 2024:

The corporate governance structure at PT PLN (Persero) is based on a clear division among the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other stakeholders. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the policies adopted by the Board of Directors, while the Board of Directors is responsible for the day-to-day operations of the Company. Each level within this governance structure plays a vital role in ensuring that the Company is managed properly and in accordance with good governance principles. The following is the Corporate Governance Structure as of December 31, 2024:



Praktik dan Strategi Perseroan Menjaga Governansi Terbaik dan Berkelanjutan

The Company's Practices and Strategies for Maintaining the Best and Sustainable Governance

Dalam upaya menuju tata kelola terbaik, PT PLN (Persero) terus melakukan berbagai langkah strategis sebagai berikut:

1. Membentuk Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023. Hingga akhir Desember 2024, Perseroan memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan juga memiliki komite di bawah Direksi diantaranya Komite *Sustainability* dan Komite Teknologi Informasi.

As an effort to realize the best governance, PT PLN (Persero) continues to take various strategic steps, including:

1. Establishing Supporting Organs for the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and No. PER-3/MBU/03/2023. As of December 2024, the Company has Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee, and the Integrated Governance Committee, as well as committees under the Board of Directors, including the Sustainability Committee and the Information Technology Committee.

Pendahuluan

Introduction

2. Secara berkala yaitu setiap awal tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Surat Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan pernyataan kepemilikan saham yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan untuk didokumentasikan di Perseroan.
 3. Pelaksanaan sosialisasi kepada Pegawai terkait pelaksanaan Upaya Pencegahan Gratifikasi dan *Conflict of Interest* di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 dan di UP3 Binjai yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024.
 4. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai (PI) dan Surat Pernyataan Pasangan sebagai bentuk komitmen diri mendukung penerapan prinsip 4 no's dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ditandatangani dan di upload seluruh pegawai *Holding*
 5. *Capacity Building* Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024 kepada Internal dan Eksternal
 - a. Internal
 - Awareness SMAP kepada seluruh pegawai melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS) untuk semester II tahun 2024 yang dilaksanakan pada periode November 2024.
 - Pelaksanaan Asistensi *Maturity Level* Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ML SMAP) SM II Tahun 2024 pada seluruh Divisi dan Kantor Unit Induk pada tanggal 04 Desember 2024.
 - b. Eksternal
 - Pelaksanaan Penyuluhan Anti Korupsi KPK (PAKSI) yang dilaksanakan pada periode Tahun 2024 sebanyak 49 pegawai tersebar di Unit dan Divisi mendapatkan sertifikasi PAKSI KPK
 6. Penerapan kepatuhan GCG pada *boundary* KPI Dewan Komisaris dan Direksi serta 1 level pejabat di bawah Direksi
 7. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan tepat waktu, dengan seluruh 9.657 Wajib LHKPN telah menyelesaikan laporan pada 31 Maret 2024, mencapai 100%.
2. On a regular basis, at the beginning of each year, the Board of Commissioners and the Board of Directors sign a Statement Letter declaring no conflict of interest and a declaration of share ownership, which is submitted to the Board of Commissioners and the Corporate Secretary for documentation within the Company.
 3. Conducting employee awareness sessions on the Prevention of Gratuities and Conflict of Interest at PT PLN (Persero) of North Sumatra Distribution Main Unit on August 23, 2024, and at UP3 Binjai on August 29, 2024.
 4. Signing of the Employee Integrity Pact (PI) and Spouse Declaration Letter as a personal commitment to support the implementation of the four no's principles and the Anti-Bribery Management System (ABMS), with all Holding employees required to sign and upload the documents.
 5. Capacity Building on Gratuity Control in 2024 for Internal and External Parties
 - a. Internal
 - ABMS awareness for all employees through the Compliance Online System (COS) application for the second semester of 2024, conducted in November 2024.
 - Implementation of the Anti-Bribery Management System Maturity Level Assistance (ABMS ML) for the second semester of 2024 across all Divisions and Main Unit Offices on December 4, 2024.
 - b. External
 - Implementation of the Corruption Prevention Counseling by the KPK (PAKSI) in 2024, with 49 employees across Units and Divisions obtaining KPK PAKSI certification.
 6. Implementation of GCG compliance within the KPI boundaries of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and one level below the Board of Directors.
 7. Submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) on time, with all 9,657 mandatory reporters completing their reports by March 31, 2024, achieving 100%.



Pendahuluan

Introduction

8. Melakukan sosialisasi Peraturan Direksi tentang *Whistleblowing System*/WBS kepada seluruh Satuan Kerja, Divisi dan Seluruh Unit Induk di lingkungan PT PLN (Persero) pada tanggal 04 Januari – 23 Januari 2024 yang dilaksanakan 8 *batch* pada 3 lokasi yakni UPDL Palembang (4 – 5 Januari 2024), UPDL Semarang (8 – 9 Januari 2024, 15 – 16 Januari 2024, 18 – 19 Januari 2024, dan 22 – 23 Januari 2024), dan UPDL Makassar (11 – 12 Januari 2024, 18 – 19 Januari 2024, dan 22 – 23 Januari 2024).

8. Conducting dissemination of the Board of Directors' Regulation regarding the Whistleblowing System (WBS) to all Work Units, Divisions, and Main Units within PT PLN (Persero) was carried out from January 4 to January 23, 2024, in 8 batches at 3 locations: UPDL Palembang (January 4–5, 2024); UPDL Semarang (January 8–9, January 15–16, January 18–19, and January 22–23, 2024); UPDL Makassar (January 11–12, January 18–19, and January 22–23, 2024).

Hasil Penilaian Implementasi Governansi Perseroan

Assessment Results of Corporate Governance Implementation

Penilaian terhadap implementasi *Governance* di PT PLN (Persero) dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan berjalan sesuai dengan harapan dan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2024, Perseroan melakukan penilaian GCG menggunakan 3 (tiga) parameter yaitu:

1. Parameter *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan Tahun 2024;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015;
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI);

Berikut hasil pencapaian atas penilaian atau *assessment* terhadap ketiga parameter tersebut:

The assessment of governance implementation at PT PLN (Persero) is conducted periodically to ensure that corporate governance practices run in accordance with expectations and applicable regulations. In 2024, the Company carried out a GCG assessment using 3 (three) parameters:

1. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameter issued in 2024;
2. The Guidelines for Governance of Public Companies under POJK 21/POJK.04/2015;
3. The Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI);

The following are the achievement results from the assessments based on these three parameters:

Pendahuluan

Introduction

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang diterbitkan Tahun 2024

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued in 2024

Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standards		Jumlah Pertanyaan Total Questions	Skor Maksimal Maximum Score	Pemenuhan Compliance			Total Skor Total Score
				Not Applicable (N/A)	Tidak No	Ya Yes	
LEVEL 1							
Bagian A Section A	Hak-hak dan Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham Rights and Equal Treatment of Shareholders	30	20,00	12	8	10	14,67
Bagian B Section B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	22	15,00	0	4	18	12,27
Bagian C Section C	Transparansi dan Pengungkapan Transparency and Disclosure	34	25,00	1		1	16,91
Bagian D Section D	Tanggung Jawab Dewan The Board's Responsibilities	63	40,00	3	14	46	31,11
TOTAL LEVEL 1		149	100,00	16	37	96	74,96
LEVEL 2							
Bonus	18	30	30	3	7	8	13,33
Penalti Penalty	26	-67	-67	5	20	1	(2,58)
TOTAL LEVEL 2		149	30,00	8			10,75
TOTAL		149	130,00	24			85,71

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka POJK 21/POJK.04/2015

Guidelines for Governance of Public Companies POJK 21/POJK.04/2015

Aspek Aspect		Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Status	
				Comply	Explain
A.	Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Company Relationship with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights	2	5	0	5
B.	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of the Board of Commissioners	2	6	3	3
C.	Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors	2	6	3	3
D.	Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Participation	1	6	3	3
E.	Keterbukaan Informasi Information Disclosure	1	2	2	0
TOTAL		8	25	11	14



Pendahuluan

Introduction

Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI); Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI);

Aspek Aspects	Prinsip Principles	Rekomen- dasi Recom- mendation	Status		Area of Improvement	
			Apply	Explain	Saran Suggestion	Tidak Ada Saran (N/A) No Sugges- tions (N/A)
I. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Role and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	7	31	22	9	6	3
II. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2	11	5	6	4	2
III. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	5	5	0	0	0
IV. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Behavior	3	4	3	1	2	0
V. Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	4	6	6	0	0	0
VI. Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	9	9	0	0	0
VII. Hak-hak Pemegang Saham Shareholders' Rights	3	11	0	11	17	2
VIII. Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Respect for Stakeholders	3	4	1	3	2	1
TOTAL	28	81	51	30	31	8

Hasil penilaian menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat implementasi tata kelola yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk terus melakukan perbaikan. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan praktik tata kelola perusahaan guna mencapai standar yang lebih tinggi. Informasi lebih lanjut terkait Penerapan atas pedoman governansi Perusahaan dan Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia

The assessment results indicate that the Company has achieved a good level of governance implementation, although there is still room for continuous improvement. Therefore, PT PLN (Persero) is committed to continuously enhancing corporate governance practices to reach higher standards. Further information regarding the implementation of the Company's governance guidelines and statements on the recommendations that have been carried out are explained in more detail in the subsection on the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Selaras dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20-23, Rapat Umum Pemegang Saham /RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk:
 - a. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan perhitungan tahunan
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

In accordance with Articles 20-23 of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) in the Company consists of:

1. The Annual General Meeting of Shareholders, which is held for:
 - a. Approving the Annual Report and ratify the annual accounts;
 - b. Ratifying the Company's Work Plan and Budget.
2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders, which may be held at any time, if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or the Shareholders.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Procedures for Holding the GMS

Penyelenggaraan RUPS Tahunan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar n, dimana penyelenggaraan RUPS Tahunan dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

The implementation of the Annual GMS refers to the Law on Limited Liability Company and the Articles of Association, in which the AGMS is held by following the procedures below:

1. Pemanggilan Kepada Pemegang Saham

Perseroan menyampaikan Pemanggilan/Undangan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat.

Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan

1. Notice to Shareholders

The Company issues a Notice/Invitation to the General Meeting of Shareholders no later than 14 (fourteen) days before the date of the Meeting, excluding the date of the notice and the date of the Meeting itself. The notice of the General Meeting of Shareholders is delivered via registered mail.

The notice must include the date, time, venue, and agenda of the Meeting, along with a statement that the materials to be discussed during the Meeting are available at the Company's office from the date of the notice until the date of the General Meeting of Shareholders.

2. Pelaksanaan RUPS

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

2. Implementation of the GMS

Shareholders or their proxies who are entitled to attend the Annual GMS are those whose names are listed in the Shareholders Register.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

3. Pengumuman Hasil RUPS

Dalam rangka memastikan transparansi dan keabsahan keputusan yang diambil, hasil RUPS Tahunan akan dituangkan dalam bentuk akta notaris yang disahkan oleh notaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bukti sah atas keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam rapat.

3. Announcement of GMS Results

To ensure transparency and legitimacy of the resolutions adopted, the results of the Annual GMS shall be recorded in a notarial deed certified by a notary and conveyed to the Shareholders as valid evidence of the resolutions agreed upon during the meeting.

Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

Quorum, Voting, and Resolutions

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

The General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights, unless otherwise stipulated in the Company's Articles of Association.

Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

A Shareholder may be represented by another Shareholder or another person by means of a power of attorney. At the Meeting, each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies in the Meeting; however, any votes they cast in their capacity as proxies shall not be counted in the voting process.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

Voting on matters concerning individuals shall be conducted by unsigned closed ballots, and voting on other matters shall be conducted verbally, unless the Chairperson of the Meeting decides otherwise without objection from any Shareholders present.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang ditandatangani.

All resolutions shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be reached, the resolution shall be adopted by a simple majority vote of the valid votes cast at the Meeting, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. Voting on matters concerning individuals shall be conducted by signed closed ballots.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemegang saham dapat mengubah Anggaran Dasar melalui mekanisme RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi acuan bagi PLN. Perubahan tersebut harus memperoleh persetujuan dari Menteri, sementara perubahan lainnya cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri. Direksi tidak dapat mengubah Anggaran Dasar tanpa melalui keputusan RUPS. Namun, Direksi dapat mengajukan usulan perubahan Anggaran Dasar, memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris, lalu membahasnya dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham. Prosedur RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Anggaran Dasar disetujui dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa hukum yang mewakili minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari total saham dengan hak suara sah, dan keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasa hukum yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Jika kuorum kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin a tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat dilaksanakan secara sah jika dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa hukum yang mewakili minimal $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari total saham dengan hak suara sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh pemegang saham dan/atau kuasa hukum yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari total saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Pemegang saham juga memiliki hak terkait pencalonan Direksi sesuai dengan PER-7/MBU/09/2022 dan Pedoman GCG PT PLN (Persero). Adapun, Direktur diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Shareholders may adopt valid resolutions without physically convening a General Meeting of Shareholders, provided that all Shareholders have been notified in writing and all Shareholders give their written approval to the proposed resolutions and sign the approval. Resolutions adopted in this manner shall have the same legal force as resolutions validly adopted at a physical General Meeting of Shareholders.

Shareholders may amend the Articles of Association through the mechanism of the GMS based on Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which serves as the legal reference for PLN. Such amendments must receive approval from the Minister, while other changes only require notification to the Minister. The Board of Directors cannot amend the Articles of Association without a resolution from the GMS. However, the Board of Directors may propose amendments, obtain recommendations from the Board of Commissioners, and then deliberate them at the GMS to obtain shareholder approval. The procedure for amending the Company's Articles of Association through the GMS is as follows:

- a. Amendments to the Articles of Association must be approved at a GMS attended by shareholders and/or legal proxies representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with valid voting rights, and the resolution must be approved by shareholders and/or proxies representing more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the GMS;
- b. If the quorum specified in point a is not met, a second GMS may be legally held if attended by shareholders and/or proxies representing at least $\frac{3}{5}$ (three-fifths) of the total shares with valid voting rights, and the resolution is valid if approved by shareholders and/or proxies representing more than $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with voting rights present at the GMS.

Shareholders also hold the right to nominate members of the Board of Directors in accordance with PER-7/MBU/09/2022 and the GCG Guidelines of PT PLN (Persero). The members of the Board of Directors are appointed by the GMS from candidates proposed by the Shareholders, and such nominations are binding on the GMS.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Pelaksanaan RUPS Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2024

Implementation of the 2024 Annual GMS of PT PLN (Persero)

Sepanjang tahun 2024, PT PLN (Persero) telah melaksanakan 2 kali RUPS Tahunan yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 tanggal 22 Juli 2024; dan
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Januari 2024.

Throughout 2024, PT PLN (Persero) held two Annual GMS, namely:

1. Approval of the 2023 Annual Report and Ratification of the 2023 Financial Statements on July 22, 2024; and
2. Ratification of the 2024 Fiscal Year Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT PLN (Persero) on January 29, 2024.

RUPS Tahunan: Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Annual GMS: Approval for the 2023 Fiscal Year Annual Report and Ratification of the 2023 Fiscal Year Financial Statements

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Invitation	Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS Implementation	Lokasi Location	Pimpinan Rapat Chairperson	Pihak Independen Independent Party
31 Mei 2024 May 31, 2024	22 Juli 2024 July 22, 2024	Jakarta (Indonesia)	Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Hanafi, SH.

Agenda	Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realization
1 Keuangan Konsolidasian Perseroan. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Dijalankan Selama Tahun Buku 2023; The Company's Consolidated Financial Statements. Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, along with the Granting of Full Discharge and Release of Responsibility (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors for the Management Actions of the Company and to the Board of Commissioners for the Supervisory Actions of the Company Carried Out During the 2023 Fiscal Year;	1 Keputusan: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023. 2. Mengesahkan: a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sesuai dengan laporan Nomor 00074/2.1457/AU.1/02/0241- 4/1N/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material"; dan b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporan Nomor 00833/2.1025/AU.2/11/0241- 4/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material". Resolutions: 1. Approving the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023. 2. Ratifying: a. The Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, as stated in Report Number 00074/2.1457/AU.1/02/0241-4/1N/2024 dated May 28, 2024, with an opinion of "fair in all material respects"; and b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, as stated in Report Number 00833/2.1025/AU.2/11/0241-4/1/IV/2024 dated April 30, 2024, with an opinion of "fair in all material respects".

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realization	
		3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku dan laporan Perseroan.	3. By approving the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratifying the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK), all for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) granted full discharge and release of responsibility (Volledig Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors for managing the Company and to all members of the Board of Commissioners for supervising the Company during the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, provided that such actions were not criminal offenses and/or in violation of prevailing laws and regulations and applicable legal procedures, and were properly reflected in the Company's books and reports.
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year	2. Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023 sebesar Rp22.025.595.125.212 sebagai berikut: 1. Dividen tunai sebesar Rp3.090.004.000.000 atau 14,03% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2023; 2. Sisanya ditetapkan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan. Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung	Realization: Implemented in 2024 during the Annual GMS. Resolutions: Determining the use of consolidated net profit attributable to the owners of the parent entity for the Fiscal Year 2023 amounting to Rp22,025,595,125,212 as follows: 1. A cash dividend of Rp3,090,004,000,000 or 14.03% of the profit for the current year attributable to the owners of the parent entity for the Fiscal Year 2023; 2. The remaining amount was designated as reserves to support the Company's operational activities and business development. Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 dengan diterbitkannya Surat 47526/KEU.01.02/F01070000/2024-R



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realization	
3.	Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024, serta Tantiem/insentif Kinerja/insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Determination of Salaries/Honoraria including Facilities and Allowances for the 2024 Fiscal Year, as well as Bonuses/Performance Incentives/Special Incentives for the 2023 Fiscal Year and/or Long-Term Incentives for the Period 2024-2026, for the Board of Directors and Board of Commissioners;	3.	Keputusan Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau insentif jangka panjang periode tahun 2024 - 2026 serta gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara tersendiri. Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 dengan diterbitkannya Surat 57920/KEU.01.01/EVP SHB/2024-SR dan 57921/KEU.01.01/EVP SHB/2024-SR (Pembayaran tantiem)
			Resolution: The determination of tantiem (bonus)/performance incentives/special incentives for the 2023 Fiscal Year and/or long-term incentives for the 2024-2026 period, as well as salaries/honorariums along with facilities and allowances for the 2024 Fiscal Year for the Board of Directors and Board of Commissioners, would be decided separately. Realization: Carried out in 2024 with the issuance of Letters 57920/KEU.01.01/EVP SHB/2024-SR and 57921/KEU.01.01/EVP SHB/2024-SR (Payment of bonus)
4.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024; Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year;	4.	Keputusan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 dengan diterbitkannya Surat 56480/DAN.01.02/F01070400/2024
			Resolution: The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024 was made separately by the Minister of State-Owned Enterprises as the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners. Realization: Carried out in 2024 with the issuance of Letter No. 56480/DAN.01.02/F01070400/2024.
4.	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Participation Funds.	4.	Keputusan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 dengan diterbitkannya Surat 56480/DAN.01.02/F01070400/2024
			Resolution: The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements as well as the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Program (PUMK) for the Fiscal Year 2024 was made separately by the Minister of State-Owned Enterprises as the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners. Realization: Carried out in 2024 with the issuance of Letter No. 56480/DAN.01.02/F01070400/2024.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realization		
5.	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Participation Funds.	5.	Keputusan: Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 untuk periode Tahun Buku 2023 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari. Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 pada saat RUPS Tahunan berlangsung	Resolution: Accepting the Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) originating from the State Budget (APBN) for Fiscal Years 2020, 2021, and 2022 for the Fiscal Year 2023 period, on the condition that all activities and uses complied with the Joint Review of PMN and the Ministry of SOEs Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, provided that no irregularities were found thereafter. Realization: Carried out in 2024 during the Annual GMS.

RUPS Tahunan: Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2024

Annual GMS: Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT PLN (Persero) for the 2024 Fiscal Year

Tanggal Undangan RUPS Date of GMS Invitation	Tanggal Pelaksanaan RUPS Date of GMS Implementation	Lokasi Location	Pimpinan Rapat Chairperson	Pihak Independen Independent Party
15 Januari 2024 January 15, 2024	29 Januari 2024 January 29, 2024	Jakarta (Indonesia)	Komisaris Utama President Commissioner	Notaris Muhammad Hanafi, SH.

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realizations		
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2024	1	Keputusan: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 dengan pokok-pokok sebagai berikut: Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung	Resolution: Approving the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 and the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for 2024, with the main points as follows: Realization: Implemented in 2024 during the Annual GMS.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Agenda		Keputusan dan Realisasi Resolutions and Realizations	
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-T JSL) Tahun 2024 Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-T JSL) for 2024	2 Keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 sebagai berikut: 1. Program TJSL yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat Community Involvement Development (CID) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), di luar Pendanaan UMK pada Laporan RKA perusahaan tahun 2024 sebesar Rp400.000.000.000 atau 106,19% dari prognosa 2023. 2. Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000 atau 50% dari prognosa 2023, yang dicatatkan pada Aktiva Tidak Lancar. Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.	Resolution: Approving the 2024 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as follows: 1. The TJSL program implemented by the Community Involvement Development (CID) unit of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sourced from the budget recognized as the Company's expense, excluding MSME Funding in the Company's 2024 work plan report, amounting to Rp400,000,000,000 or 106.19% of the 2023 forecast. 2. The TJSL program for MSME Funding sourced from the revolving fund of the 2024 MSME Funding Program, which would be disbursed in cooperation with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), amounting to Rp1,500,000,000 or 50% of the 2023 forecast, recorded under Non-Current Assets. Realization: Implemented in 2024 through a partnership with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) amounting Rp1,500,000,000.
3	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Determination of the Annual Management Contract containing the Key Performance Indicator (KPI) Targets for the Board of Directors Collegially and the Board of Commissioners for 2024	3 Keputusan Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung	Resolution: Determining the Annual Management Contract containing the 2024 Key Performance Indicators (KPI) Targets for the Board of Directors on a collegial basis and the Board of Commissioners. Realisasi: Implemented in 2024 during the Annual GMS.
4	Persetujuan pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Approval of the assignment to provide electricity for subsidized tariff groups and certain tariff groups in accordance with Government's mandate to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	4 Keputusan Menyetujui pelaksanaan penugasan penyediaan tenaga listrik untuk golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertentu sesuai dengan ketetapan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Realisasi: Telah dilaksanakan di Tahun 2024 pada saat RUPS Tahunan Berlangsung	Resolution: Approving the implementation of the assignment to provide electricity for subsidized tariff groups and specific tariff groups in accordance with the Government's mandate to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Realization: Implemented in 2024 during the Annual GMS.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

RUPS Luar Biasa

Extraordinary GMS of PT PLN (Persero) 2024

Sepanjang tahun 2024, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham meliputi:

Throughout 2024, Shareholders had adopted Shareholders' Resolutions including:

Tanggal RUPS Date of GMS	Perihal Subject
19 Maret 2024 March 19, 2024	- Pengangkatan Sdri. Nawal Nely sebagai Komisaris dan Pemberhentian Sdr. Eko Sulistyo dan Sdr. Tedi Bharata sebagai Komisaris - Appointment of Ms. Nawal Nely as Commissioner and Dismissal of Mr. Eko Sulistyo and Mr. Tedi Bharata as Commissioners
23 Juli 2024 July 23, 2024	- Pengangkatan Sdr. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menggantikan Sdr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Sdr. Mutanto Yuwono dan Sdr. Andi Arief sebagai Komisaris Independen. - Appointment of Mr. Burhanuddin Abdullah as President Commissioner and Independent Commissioner replacing Mr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Mr. Mutanto Yuwono and Mr. Andi Arief as Independent Commissioners
14 November 2024 November 14, 2024	- Pemberhentian dengan hormat jajaran komisaris yang terdiri dari Sdr. Suahasil Nazara selaku Wakil Komisaris Utama, Sdri. Nawal Nely sebagai Komisaris, Sdr. Mohamad Ikhsan sebagai Komisaris, Sdr. Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, Sdr. Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris dan mengukuhkan pemberhentian Sdr. Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen. - Honorable dismissal of the Board of Commissioners consisting of Mr. Suahasil Nazara as Vice President Commissioner, Ms. Nawal Nely as Commissioner, Mr. Mohamad Ikhsan as Commissioner, Mr. Arcandra Tahar as Independent Commissioner, Mr. Dudy Purwagandhi as Commissioner, and confirming the dismissal of Mr. Charles Sitorus as Independent Commissioner. - Pengangkatan jajaran Komisaris baru yang terdiri dari Sdr. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Sdr. Aminuddin Ma'ruf sebagai Komisaris, Sdr. Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris, Sdr. Yazid Fanani, dan Sdr. Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen - Appointment of the new members of the Board of Commissioners consisting of Mr. Suahasil Nazara as Vice President Commissioner, Mr. Aminuddin Ma'ruf as Commissioner, Mr. Jisman P. Hutajulu as Commissioner, Mr. Yazid Fanani, and Mr. Ali Masykur Musa as Independent Commissioners
14 November 2024 November 14, 2024	- Pengangkatan kembali Sdr. Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sdri. Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan. - Reappointment of Mr. Darmawan Prasodjo as President Director and Ms. Sinthya Roesly as Finance Director

Keputusan RUPS Sebelumnya dan Tindak Lanjutnya

Resolutions of Previous GMS and Follow-up

Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS tahun buku 2022 yang diselenggarakan tahun 2023 telah dilaksanakan. Berikut Keputusan RUPS tahun buku 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023 dan tindak lanjutnya:

All recommendations from the GMS resolutions for the 2022 fiscal year held in 2023 had been implemented. The following are the GMS resolutions for the 2022 fiscal year held in 2023 and their follow-up actions:

RUPS Tahunan Tahun 2023 2023 Annual GMS	Status Tindak Lanjut Status of Follow-up
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Approval of the Annual Report for Fiscal Year 2022 and Ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2023	Semua Keputusan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya All resolutions had been fully followed up.
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2023 Ratification of the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT PLN (Persero) for Fiscal Year 2023	Semua Keputusan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya All resolutions had been fully followed up.



Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ dalam tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, dilakukan semata untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi merupakan pihak yang berwenang dalam mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan batasan yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar.

Berdasarkan *Board Manual* Perseroan, Direksi mengambil keputusan secara kolegal melalui pelaksanaan rapat Direksi, dengan tetap memenuhi akuntabilitas pengambilan keputusan dan pendelegasian kewenangan, Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada Direktur tertentu, pejabat Perseroan, ataupun pihak lain.

The Board of Directors is an internal organ in governance tasked with and responsible for managing the Company, carried out solely for the benefit of the Company and in accordance with the Company's objectives and purposes. The Board of Directors is the authorized party to represent the Company, both inside and outside the court, within the limits stipulated in the Articles of Association.

Based on the Company's Board Manual, the Board of Directors makes decisions collegially through the implementation of Board of Directors meetings, while still fulfilling accountability in decision-making and delegation of authority. The Board of Directors may delegate part of the decision-making authority to certain Directors, Company officials, or other parties.

Komposisi Direksi

Composition of Board of Directors

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024.

Throughout 2024, there were no changes in the Board of Directors' composition as explained in the Company Profile chapter, under the subchapter on Information Regarding Changes in the Composition of Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year.

Komposisi Direksi PLN Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors of PLN as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Keahlian Expertise
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director	14 November 2024– 14 November 2028 November 14, 2024 – November 14, 2028	Ekonomi, Keuangan, Manajemen, Energi dan Lainnya Economics, Finance, Management, Energy, and Others
Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance	14 November 2024– 14 November 2028 November 14, 2024 – November 14, 2028	Ekonomi, Keuangan, Manajemen, Teknik dan Ketenagalistrikan Economics, Finance, Management, Engineering, and Electricity
Yusuf Didi Setiarto	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Director of Legal Affairs and Human Capital Management	7 Desember 2021 -7 Desember 2026 December 7, 2021 – December 7, 2026	Ekonomi, Keuangan, Manajemen, Hukum dan Energi Economics, Finance, Management, Law, and Energy
Evy Haryadi	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning	16 Juni 2021-16 Juni 2026 June 16, 2021 – June 16, 2026	Teknik dan Energi Engineering and Energy

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Keahlian Expertise
Edi Srimulyanti	Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce	21 September 2022– 21 September 2027 September 21, 2022 – September 21, 2027	Ekonomi, Keuangan, Manajemen dan Ketenagalistrikan Economics, Finance, Management, and Electricity
Hartanto Wibowo	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Director of Corporate Planning and Business Development	6 Januari 2022–6 Januari 2027 January 6, 2022 – January 6, 2027	Ekonomi, Keuangan, Manajemen dan Teknik Economics, Finance, Management, and Engineering
Wiluyo Kusdiharto	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Management Project and New and Renewable Energy	14 Mei 2020–25 Juli 2027 May 14, 2020 – July 25, 2027	Teknik Engineering
Adi Lumakso	Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Power Plant Management	6 Desember 2021–7 Desember 2026 December 6, 2021 – December 7, 2026	Ekonomi, Keuangan, Manajemen, Teknik dan Ketenagalistrikan Economics, Finance, Management, Engineering, and Electricity
Adi Priyanto	Direktur Distribusi Director of Distribution	7 Desember 2021–7 Desember 2026 December 7, 2021 – December 7, 2026	Ekonomi, Keuangan, Manajemen dan Teknik Economics, Finance, Management, and Engineering
Suroso Isnandar	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	20 September 2023– 20 September 2028 September 20, 2023 – September 20, 2028	Teknik dan Ketenagalistrikan Engineering and Electricity

Pedoman Direksi

Board of Directors Guidelines

Pedoman Direksi PT PLN (Persero) mengacu pada:

1. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris yang disahkan pada Juli 2022;
2. *Board Manual* Direksi yang disahkan pada Juli 2022.

Ruang lingkup yang diatur dalam Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris diantaranya mengatur terkait:

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan
2. Tata Laksana Kerja terkait Batasan Kewenangan
3. Tata Laksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis Dari Dewan Komisaris

The Board of Directors Guidelines of PT PLN (Persero) refer to:

1. The Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners, ratified in July 2022;
2. The Board Manual of the Board of Directors, ratified in July 2022.

The scope regulated in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners includes:

1. Board Manual Related to Position
2. Board Manual Related to Authority Limits
3. Board Manual Related to the Implementation and Supervision of Company Operations
4. Workflow of Board of Directors' Authority that Requires Approval from the Board of Commissioners and Authority that Requires Approval from the GMS After Obtaining Written Response from the Board of Commissioners.



Direksi

Board of Directors

Informasi lebih lengkap terkait Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris dapat diakses pada *website* PT PLN (Persero) <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Board Manual Direksi mencakup diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yang memuat diantaranya:
 - Masa Jabatan Direksi;
 - Rangkap Jabatan;
 - Pelaksana Tugas Direktur yang Lowong;
 - Pemberhentian Direksi
 - Program Pengenalan Direktur yang Baru
 - Program Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Direksi
2. Tugas dan Wewenang Direksi
 - Tugas Direksi
 - Umum
 - Pembagian Tugas Direktur
 - Penetapan Pembagian Tugas Direktur; dan
 - Lain sebagainya
3. Hak dan Kewajiban Direksi
4. Rapat Direksi
5. Komite Direktur
6. Sekretaris Perusahaan
7. Satuan Pengawasan Intern
8. Hubungan dengan Perusahaan Afiliasi.

Saat ini Pedoman Direksi tersebut (*Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi serta Board Manual Direksi*) dalam proses pemutakhiran seiring dengan terbitnya Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL, Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM serta peraturan turunan dari Peraturan Menteri BUMN tersebut.

More detailed information regarding the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners can be accessed on PT PLN (Persero) website: <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

The scope regulated in the Board Manual of the Board of Directors includes among others:

1. General Provisions including:
 - Tenure of the Board of Directors;
 - Concurrent Positions;
 - Acting Director for Vacant Positions;
 - Dismissal of Directors;
 - New Director Introduction Program;
 - Development/Competency Update Program for the Board Directors.
2. Duties and Authorities of the Board of Directors:
 - Duties of the Board of Directors;
 - General;
 - Division of Duties of the Board of Directors;
 - Determination of the segregation of Duties of Directors; and
 - Others.
3. Rights and Obligations of the Board of Directors;
4. Board of Directors Meetings;
5. Board of Directors Committees;
6. Corporate Secretary;
7. Internal Audit Unit;
8. Relations with Affiliate Companies.

Currently, these Board of Directors Guidelines (the Board Manual of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the Board Manual of the Board of Directors) are in the process of being updated following the issuance of the Copy of the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/3/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities, Copy of Ministry of SOE Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and TJSL Programs, Copy of Ministry of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources, and derivative regulations from these Ministry of SOE Regulations.

Masa Jabatan Direksi

Board of Directors' Tenure

Selaras dengan Board Manual Direksi, masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota sewaktu-waktu. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan berbagai alasan, antara lain karena kinerja yang tidak memenuhi kontrak manajemen, perubahan strategi bisnis, ketidakmampuan menjalankan tugas, atau keterlibatan dalam tindakan yang merugikan BUMN/negara. Alasan lain termasuk pelanggaran hukum, kode etik, atau anggaran dasar, status sebagai tersangka/terdakwa, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengunduran diri, maupun halangan tetap seperti sakit berkepanjangan. Selain itu Anggota Direksi dapat diberhentikan karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.

In accordance with the Company's Articles of Association, the tenure for the Board of Directors is 5 (five) years without prejudice to the GMS rights to dismiss members at any time. Members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on a resolution of the GMS or the Minister for various reasons, including poor performance that does not meet the management contract, changes in business strategy, inability to perform duties, or involvement in actions detrimental to the State-Owned Enterprise (SOE)/the state. Other reasons include violations of laws, codes of conducts, or the Articles of Association, status as a suspect/defendant, legally binding court rulings, resignation, or permanent incapacity such as prolonged illness. Additionally, members of the Board of Directors may be dismissed for other reasons deemed appropriate by the GMS or the Minister in the interest and objectives of the SOE.

Tugas Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

PLN mengatur pembagian tugas bagi anggota Direksi untuk menjaga serta memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dapat dilaksanakan secara efektif. Secara mendasar, pembagian tugas anggota Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
3. Penjabaran tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) yang mengatur mengenai kewenangan setiap anggota Direksi.

PT PLN regulates the segregation of duties among members of the Board of Directors to maintain and ensure that each member's duties and responsibilities are carried out effectively. Fundamentally, the segregation of duties among the Board of Directors members is conducted under the following provisions:

1. Referring to the Company's Articles of Association, the main duties of the Board of Directors are:
 - a. Leading and managing the Company in accordance with the Company's purpose and objectives while continuously striving to improve the Company's efficiency and effectiveness;
 - b. Controlling, maintaining, and managing the Company's assets.
2. The segregation of duties among members of the Board of Directors is determined based on the resolutions of the GMS, and if the GMS does not decide, the segregation of duties is determined based on the Board of Directors Meeting decision.
3. The detailed explanation of duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors members is further regulated in the Board of Directors Regulation concerning the Organization and Board Manual of PT PLN (Persero), which governs the authority of each member of the Board of Directors.



Tugas dan Tanggung Jawab Masing –Masing Anggota Direksi

Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, maka dilakukan pembagian tugas di antara Direktur. Namun demikian, sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan secara keseluruhan tetap berada pada Direksi secara kolektif (*board*) sebagai Organ Perseroan.

The Board of Directors works collectively; however, to carry out their duties more efficiently and effectively, the segregation of duties among the Directors is implemented. Nevertheless, even though duties have been divided, the responsibility for managing the Company as a whole remains with the Board of Directors collectively (*board*) as the Company's Organ.

Pembagian tugas, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi PLN berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0026.P/DIR/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

The segregation of duties, scope, and responsibilities of each member of the Board of Directors of PT PLN is based on the Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) Number 0026.P/DIR/2024 on the Organization and Board Manual of PT PLN (Persero) as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director	- Memastikan arah dan strategi pengelolaan PLN berjalan dengan benar menuju terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan PLN - Memastikan pencapaian target kinerja dan keberlanjutan perusahaan serta anak perusahaan - Memantau pelaksanaan strategi dan mengarahkan tim manajemen eksekutif dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting - Melaksanakan fungsi <i>corporate leader</i> untuk memastikan engagement seluruh pegawai PLN sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan seluruh sumber daya PLN melangkah mencapai visi, misi dan tujuan PLN - Memimpin tim manajemen eksekutif PLN dan anak perusahaan dalam memastikan arah keseluruhan tim manajemen PLN selaras dengan visi, misi dan aspirasi PLN - Mewakili PLN dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal utama - Mengelola visibilitas di seluruh area bisnis PLN dan mengambil keputusan akhir dalam keputusan <i>cross-company value chain</i> untuk memaksimalkan kepentingan PLN - Memastikan optimalisasi pengelolaan sumber daya perusahaan dan anak perusahaan dalam mencapai target, visi dan misi perusahaan - Memastikan PLN terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan - Memastikan PLN dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik / <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) - Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance	12. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan checks and balances melalui 4 Eyes Principle dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan. 12. Ensuring that all activities are planned, implemented, and evaluated in accordance with GCG principles, as well as carrying out risk management, internal controls, and regulatory compliance effectively, including applying checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision making, to maintain Company productivity.
		1. Memastikan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan, meliputi anggaran, pendanaan, perbendaharaan, perpajakan dan pelaporan keuangan; 2. Memastikan strategi dan kebijakan manajemen valuasi aset; 3. Memastikan ketersediaan pendanaan, pinjaman, kepatuhan, kewajiban finansial dalam perjanjian pinjaman termasuk finansial <i>debt covenant</i>, serta melakukan pembinaan untuk PLN dan Anak Perusahaan atas pemenuhan <i>debt covenant</i>; 4. Memastikan perencanaan dan pengendalian anggaran yang tepat waktu dan akurat untuk memastikan PLN memiliki alokasi dana yang cukup untuk mencapai tujuan bisnisnya; 5. Memastikan pengelolaan pendapatan, pembayaran dan manajemen likuiditas yang optimal serta administrasi treasury untuk ketersediaan <i>cash flow</i> yang cukup dalam mempertahankan operasional PLN; 6. Memastikan ketersediaan laporan keuangan serta analisis akuntansi, pajak, dan asuransi yang akurat, tepat waktu, berbiaya efektif, komprehensif untuk memberikan gambaran akurat tentang kesehatan finansial PLN; 7. Memastikan pengembangan, konsolidasi, dan pengelolaan sistem manajemen nilai aset operasional (instalasi ketenagalistrikan), dan aset properti untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas aset strategis Perusahaan yang merupakan bagian dan proses <i>asset performance</i> dalam keseluruhan siklus; 8. Memastikan pengusulan, penggantian dan pembayaran tepat waktu terkait dengan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui berkoordinasi dengan Pemerintah; 9. Mengembangkan dan mengevaluasi usulan subsidi dan kompensasi listrik yang optimal dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 10. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 11. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui 4 Eyes Principle dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan. 1. Ensuring the strategy and policies for financial management, including budgeting, funding, treasury, taxation, and financial reporting; 2. Ensuring the strategy and policies for asset valuation management; 3. Ensuring the availability of funding, loans, compliance, financial obligations under loan agreements including financial debt covenants, as well as providing guidance to PLN and its Subsidiaries on compliance with debt covenants; 4. Ensuring timely and accurate budget planning and control to guarantee that PLN has sufficient fund allocation to achieve its business objectives; 5. Ensuring optimal revenue management, payments, and liquidity management as well as treasury administration to maintain sufficient cash flow for PLN's operations; 6. Ensuring the availability of accurate, timely, cost-effective, and comprehensive financial statements and analyses of accounting, taxation, and insurance to provide an accurate picture of PLN's financial soundness; 7. Ensuring the development, consolidation, and management of the operational asset value management system (electricity installations) and property assets to generate efficiency and effectiveness of the Company's strategic assets as part of the asset performance process throughout the entire cycle; 8. Ensuring the timely proposal, replacement, and payment related to Public Service Obligations (PSO) in accordance with applicable regulations through coordination with the Government; 9. Developing and evaluating proposals for optimal electricity subsidies and compensation in the formulation of the State Budget (APBN); 10. Ensuring all activities and work program priorities meet ESG performance indicators as well as environmental and social safeguards requirements according to the scope of the Division to realize a sustainable company; and 11. Ensuring that all activities are planned, implemented, and evaluated in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles, as well as carrying out effective risk management, internal controls, and regulatory compliance including applying checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making to maintain Company productivity.



Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member	
Yusuf Didi Setiarto	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Director of Legal Affairs and Human Capital Management	- Merumuskan strategi dan kebijakan legal, manajemen human capital, general affair, aset properti perizinan, serta Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L); - Merumuskan program kerja dan anggaran pada masing-masing fungsi di Direktorat Legal dan Manajemen <i>Human Capital</i>; - Memastikan pengembangan dan pengelolaan proses bisnis, struktur organisasi, job management, perencanaan tenaga kerja, serta sistem kompetensi dan budaya PLN yang selaras dengan strategi PLN untuk meningkatkan nilai (value) human capital dalam mencapai visi dan misi PLN; - Memastikan pengembangan talenta dan kompetensi pegawai; - Memastikan pengendalian pengelolaan layanan kepada pegawai dan purnakarya yang didukung dengan sistem informasi serta hubungan industrial dan alih daya; - Memastikan pengelolaan administrasi umum dan fasilitas korporat serta pengadaan kantor pusat; - Memastikan pengelolaan dan pendayagunaan aset properti PLN dan anak perusahaan; - Memastikan implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja keamanan, dan lingkungan di seluruh kegiatan ketenagalistrikan PLN Grup selaras dengan strategi PLN dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan; - Memastikan harmonisasi regulasi dan kebijakan internal sesuai dengan arsitektur dan tata kelola kebijakan yang berlaku; - Memastikan pendampingan dan pelaksanaan kontrak dan korporasi yang melindungi kepentingan PLN dan Anak Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; - Memastikan pengelolaan kepemilikan hak atas aset properti yang relevan, memastikan pengamanan dan pemeliharaan aset properti serta menjalin hubungan dengan pemerintah/kelembagaan dalam rangka mempercepat tersedianya perizinan yang diperlukan pada fase perencanaan dan operasional; - Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan Lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan Lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan - Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan checks and balances melalui 4 <i>Eyes Principle</i> dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.	- Formulating strategies and policies for legal affairs, human capital management, general affairs, property asset licensing, as well as Occupational Health, Safety, Security, and Environment (OHSSE); - Formulating work programs and budgets for each function within the Directorate of Legal Affairs and Human Capital Management; - Ensuring the development and management of business processes, organizational structure, job management, workforce planning, as well as PLN's competency and culture systems aligned with PLN's strategy to enhance the value of human capital in achieving PLN's vision and mission; - Ensuring the development of employee talents and competencies; - Ensuring control over the management of services to employees and retirees supported by information systems, industrial relations, and outsourcing; - Ensuring management of general administration and corporate facilities as well as procurement for the head office; - Ensuring the management and utilization of property assets of PLN and its subsidiaries; - Ensuring implementation of occupational health, safety, security, and environmental management across all electricity-related activities of the PLN Group in line with PLN's strategy and applicable occupational health, safety, security, and environmental regulations; - Ensuring harmonization of regulations and internal policies in accordance with the applicable policy architecture and governance; - Ensuring assistance and implementation of contracts and corporate matters that protect the interests of PLN and its subsidiaries in compliance with prevailing laws and regulations; - Ensuring management of ownership rights over relevant property assets, ensuring the security and maintenance of property assets, and establishing relationships with government/institutions to expedite the availability of necessary permits during planning and operational phases; - Ensuring all activities and work program priorities meet ESG performance indicators as well as environmental and social safeguards requirements according to the scope of the Division to realize a sustainable company; and - Ensuring that all activities are planned, implemented, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), as well as carrying out risk management, internal controls, and regulatory compliance effectively, including applying checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making to maintain Company productivity.
Evy Haryadi	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning	- Memimpin perencanaan sistem ketenagalistrikan (RUPTL) sampai dengan pengesahan pemerintah yang meliputi: kebijakan umum dan asumsi dasar pengembangan ketenagalistrikan, menyusun demand forecast, memvalidasi neraca daya, fue mix, dan kebutuhan bahan bakar; - Memastikan pengendalian realisasi dan integrasi konstruksi pembangkitan, transmisi dan distribusi sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);	- Leading the electricity system planning (RUPTL) through to government approval, which includes: general policies and basic assumptions for electricity development, preparing demand forecasts, validating power balance, fuel mix, and fuel requirements; - Ensuring the control of realization and integration of power plant, transmission, and distribution construction in accordance with the Electricity Supply Business Plan (RUPTL);

Direksi
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
		- Memastikan kajian kelayakan investasi pengembangan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan; - Memimpin penyusunan strategi dan kebijakan manajemen aset, serta manajemen operasi, dan pemeliharaan sistem transmisi, yang terintegrasi dengan fungsi pembangkit, distribusi, dan niaga; - Memimpin perencanaan program dan anggaran sistem transmisi; - Mengkonsolidasikan dan mengevaluasi rencana penambahan kapasitas sistem transmisi; - Memastikan beroperasinya sistem ketenagalistrikan meliputi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi; - Memastikan pemeliharaan fasilitas operasi ketenagalistrikan SCADATEL dan otomatis, telekomunikasi, proteksi sistem, peralatan <i>remote station</i>, dan fasilitas hardware master station; - Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas Unit Operasi Sistem Ketenagalistrikan, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi persyaratan faktor ketersediaan untuk memastikan pasokan listrik yang andal; - Memastikan pengendalian penyelesaian konstruksi transmisi. - Mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengoprasian sistem ketenagalistrikan dan pendistribusian tenaga listrik tegangan ekstra tinggi dan tegangan tinggi serta proses <i>"energy bidding"</i> (termasuk pasokan dan sumber pembeli tunggal); - Memastikan pengendalian penyelesaian konstruksi transmisi; - Memastikan penyusunan strategi dan kebijakan pengelolaan manajemen aset ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan; - Memastikan implementasi kebijakan pengelolaan manajemen aset ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan; - Memimpin dan memastikan program transisi energi dan keberlanjutan menuju net zero emission; - Memastikan integrasi perencanaan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi ESG dan <i>safeguard</i>; - Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan - Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan
		- Ensuring the feasibility studies of investment in electricity power plant, transmission, and distribution development; - Leading the formulation of strategies and policies for asset management, as well as operations and maintenance management of the transmission system, integrated with generation, distribution, and commercial functions; - Leading the planning of transmission system programs and budgets; - Consolidating and evaluating plans for transmission system capacity expansion; - Ensuring the operation of the electricity system, including high voltage and extra high voltage networks; - Ensuring the maintenance of SCADATEL and automation electricity operation facilities, telecommunications, system protection, remote station equipment, and master station hardware facilities; - Planning, coordinating, directing, controlling, supervising, and evaluating the duties of the Electricity System Operations Units, so that all activities are carried out in line with the established strategies and policies while meeting availability factor requirements to ensure a reliable power supply; - Ensuring control over the completion of transmission construction; - Supervising the planning, implementation, and evaluation of electricity system operations and distribution of extra high voltage and high voltage electricity, including the <i>"energy bidding"</i> process (covering supply and single buyer source); - Ensuring control over the completion of transmission construction; - Ensuring the formulation of strategies and policies for the management of electricity and non-electricity assets; - Ensuring the implementation of electricity and non-electricity asset management policies; - Leading and ensuring the energy transition and sustainability programs toward net zero emission; - Ensuring integration of planning, implementation, monitoring, and evaluation of ESG and safeguard aspects; - Ensuring that all activities and work program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguards requirements according to the scope of the Division to support a sustainable company; and - Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and that risk management, internal controls, and regulatory compliance are carried out effectively, including the application of checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making, to maintain Company productivity.



Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
Edi Srimulyanti	Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce	1. Merumuskan strategi dan kebijakan <i>retail</i> dan <i>niaga</i>, meliputi pengembangan produk dan bisnis kWh, pemasaran, penjualan, pelayanan konsumen, dan <i>customer experience</i>; 2. Memimpin pengembangan bisnis dan produk <i>end to end</i> untuk produk layanan listrik (kWh); 3. Memimpin pengembangan dan pengelolaan pemasaran dengan menginisiasi dan implementasi strategi pemasaran yang efektif untuk mengakuisisi konsumen baru maupun retensi konsumen eksisting serta pengelolaan additional demand; 4. Memastikan penyusunan kebijakan aspek administrasi Penyesuaian Perhitungan Pemakaian Tenaga Listrik (P3TL); 5. Memimpin pelaksanaan manajemen hubungan konsumen dan strategi solusi energi terbaik guna meningkatkan revenue dan kepuasan konsumen untuk konsumen enterprise serta akuisisi konsumen enterprise baru dan <i>captive</i>; 6. Memastikan kinerja penjualan dan kualitas layanan, baik secara langsung melalui channel terpusat untuk layanan konsumen di kantor pusat, maupun secara tidak langsung melalui saluran layanan konsumen yang tidak terpusat di unit induk, berdasarkan insight dan pengalaman konsumen yang dapat meningkatkan revenue dan kepuasan konsumen; 7. Memastikan akuisisi dan retensi konsumen <i>business to business</i> dan <i>business to consumer</i> melalui <i>best practice</i> dalam data <i>analytics</i> sistem, proses bisnis, dan optimasi <i>customer experience journey</i>; 8. Memastikan penyusunan strategi dan anggaran untuk pemenuhan <i>additional demand</i>; 9. Memastikan manajemen penagihan dan piutang (AIR), serta memberikan perbaikan berkelanjutan pada layanan PLN berdasarkan wawasan dan data konsumen; 10. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 11. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui 4 <i>Eyes Principle</i> dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.
Hartanto Wibowo	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Director of Corporate Planning and Business Development	1. Memimpin fungsi perencanaan korporat secara <i>end-to-end</i> dalam mengembangkan dan mengelola bisnis PLN 2. Memimpin dan pengembangan strategi bisnis dan portofolio perusahaan secara keseluruhan di seluruh bisnis dan fungsi PLN 3. Memimpin implementasi strategi dan kebijakan PLN dalam perencanaan strategis, proyeksi keuangan jangka panjang, pengembangan bisnis lintas wilayah, unit dan Anak Perusahaan 4. Memimpin prioritas proyek untuk <i>centralized planning</i> dengan mempertimbangkan alokasi <i>capital expenditure</i> yang optimal dan berdasarkan ketentuan yang berlaku

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member	
Wiluyo Kusdiharto	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Management Project and New and Renewable Energy	- Memastikan pengusulan rencana proyek PLN yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) - Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan bisnis/produk baru di luar bisnis inti perusahaan (<i>Beyond kWh</i>) - Memimpin dan mengelola kemitraan bisnis/ pengembangan kemitraan (<i>joint venture</i>), sinergi dengan BUMN dan anak perusahaan; - Memimpin pengembangan dan evaluasi portofolio bisnis PLN melalui pembentukan, penggabungan, akuisisi, dan penyertaan saham di Anak Perusahaan dan Usaha Patungan; - Memimpin pengembangan dan pengendalian peran, interaksi dan sinergi antara PLN, Anak Perusahaan dan Usaha Patungan dalam sebuah entitas holding company untuk meningkatkan kinerja dan mencapai visi/misi PLN - Memimpin fungsi monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan dan Anak Perusahaan, pengelolaan process excellence BUMN dan manajemen program strategis ketenagalistrikan; - Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta <i>aspek perlindungan lingkungan dan sosial (safeguards requirements)</i> sesuai dengan lingkup divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan - Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan checks and balances melalui 4 Eyes Principle dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan	- Ensuring the proposal of PLN's project plans financed through State Capital Injection (PMN); - Leading and coordinating the development of new businesses/products beyond the Company's core business (<i>Beyond kWh</i>); - Leading and managing business partnerships/joint venture development and synergy with State-Owned Enterprises (SOEs) and subsidiaries; - Leading the development and evaluation of PLN's business portfolio through the establishment, merger, acquisition, and equity participation in subsidiaries and joint ventures; - Leading the development and management of roles, interactions, and synergies among PLN, subsidiaries, and joint ventures within a holding company structure to enhance performance and achieve PLN's vision and mission; - Leading the function of monitoring and evaluating the performance of the company and its subsidiaries, managing SOEs process excellence, and overseeing strategic electricity programs; - Ensuring that all activities and program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguards requirements in accordance with the scope of the Division to realize a sustainable company; and - Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and that risk management, internal controls, and regulatory compliance are effectively implemented, including applying checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making to maintain Company productivity.
		- Memimpin penyusunan strategi dan kebijakan untuk manajemen proyek dan manajemen rantai pasok material terpusat; - Menetapkan dan memastikan pelaksanaan strategi dan kebijakan pengawasan siklus kepemilikan Independent Power Producer (IPP), dan mengintegrasikannya dengan sistem kelistrikan PLN, termasuk perencanaan, kontrak, dan pemantauan konstruksi; - Memimpin proses engineering dan perencanaan pengadaan EPC (pembangkit EBT dan non-EBT, transmisi dan gardu induk), IPP (EBT dan non-EBT), dan material terpusat; - Memimpin proses pelaksanaan pengadaan EPC (pembangkit EBT dan non-EBT, transmisi, dan gardu induk), IPP (EBT dan non-EBT), dan material terpusat; - Memimpin pengawasan proyek-proyek ketenagalistrikan, baik EPC (pembangkit EBT dan non-EBT, transmisi, dan gardu induk) maupun IPP (EBT dan non-EBT) termasuk perizinan dan pengadaan/pembebasan lahan; - Memimpin penyelesaian permasalahan proyek untuk mencapai target Biaya Mutu dan Waktu (BMW); - Memimpin pelaporan <i>progress</i> proyek dan <i>feedback</i> proyek; - Memastikan implementasi <i>supply chain</i> management dan logistik material terpusat; - Memastikan efektivitas manajemen <i>vendor</i>; - Memastikan <i>monitoring</i> realisasi CAPEX, pinjaman, dan fasilitas kepastian;	- Leading the formulation of strategies and policies for project management and centralized material supply chain management; - Establishing and ensuring the implementation of strategies and policies for monitoring the ownership cycle of Independent Power Producers (IPP), and integrating them into PLN's power system, including planning, contracting, and construction monitoring; - Leading the engineering and procurement planning processes for EPC projects (NRE and non-NRE power plants, transmission lines, and substations), IPPs (NRE and non-NRE), and centralized materials; - Leading the implementation of procurement processes for EPC projects (NRE and non-NRE power plants, transmission lines, and substations), IPPs (NRE and non-NRE), and centralized materials; - Leading the supervision of electricity projects, both EPC (NRE and non-NRE power plants, transmission lines, and substations) and IPP (NRE and non-NRE), including licensing and land procurement/acquisition; - Leading project issue resolution to meet the targets for Cost, Quality, and Time (CQT); - Leading project progress reporting and providing project feedback; - Ensuring the implementation of centralized material supply chain and logistics management; - Ensuring vendor management effectiveness; - Ensuring the monitoring of CAPEX realization, loans, and customs facilities;

**Direksi**
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
		11. Memastikan pemenuhan TKDN korporat; 12. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 13. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko dan, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.
Adi Lumakso	Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Power Plant Management	1. Memimpin penyusunan Strategi dan kebijakan manajemen aset, serta manajemen operasi, dan pemeliharaan pembangkit di PLN, Anak Perusahaan, dan IPP yang terintegrasi dengan fungsi transmisi, distribusi, niaga, dan lainnya yang terkait; 2. Memimpin perencanaan program dan anggaran pembangkitan; 3. Mengonsolidasikan, meninjau dan menyetujui perencanaan Anak Perusahaan pembangkitan pada operasi, investasi dan anggaran untuk mencapai kinerja sesuai dengan rencana strategis PLN: a. Mengidentifikasi dan melaporkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk memantau dan mengontrol kinerja di sub kepemilikan; dan b. Menetapkan panduan, kebijakan, standar, dan <i>service level agreement</i> PKS untuk memantau kinerja manajemen aset oleh Anak Perusahaan pembangkitan; 4. Memastikan kebijakan harga dan perencanaan pasokan energi primer di PLN, Anak Perusahaan, dan IPP; 5. Memantau dan memastikan implementasi harga dan pasokan energi primer untuk menjamin keamanan pasokan energi primer di pembangkit PLN, Anak Perusahaan, dan IPP; 6. Mengkonsolidasikan dan mengevaluasi rencana penambahan kapasitas pembangkit PLN, Anak Perusahaan; 7. Mengelola penyusunan strategi, kebijakan dan mekanisme pengelolaan single buyer meliputi administrasi, proses settlement transaksi tenaga listrik dengan pihak internal, mensupervisi pengelolaan transaksi tenaga listrik dan memastikan pengelolaannya sesuai ketentuan; 8. Memastikan penerapan kebijakan dan strategi dalam pengoprasian dan pemeliharaan aset pembangkitan dengan menstandarisasi praktik operation and maintenance di PLN dan Anak Perusahaan; 9. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi tugas-tugas Unit Pembangkitan, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi persyaratan faktor ketersediaan untuk memastikan pasokan listrik yang andal; 10. Memastikan ketersediaan kapasitas pembangkit melalui pembangkit sewa, <i>excess power</i>, dan skema lainnya; 11. Ensuring compliance with corporate Domestic Component Level (TKDN) requirements; 12. Ensuring that all activities and program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguard requirements in accordance with the scope of the Division to realize a sustainable company; and 13. Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and that risk management, internal control, and regulatory compliance are effectively implemented, including the application of checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making, to maintain Company productivity. 1. Leading the formulation of strategies and policies for asset management, as well as operations and maintenance management of power plants within PLN, its subsidiaries, and Independent Power Producers (IPPs), integrated with transmission, distribution, commercial, and other relevant functions; 2. Leading the planning of power plant programs and budgets; 3. Consolidating, reviewing, and approving the planning of power plant subsidiaries related to operations, investment, and budgeting to achieve performance in line with PLN's strategic plans: a. Identifying and reporting Key Performance Indicators (KPIs) to monitor and control performance within subsidiaries; and b. Establishing guidelines, policies, standards, and service level agreements (SLAs) to monitor asset management performance by power plant subsidiaries; 4. Ensuring pricing policies and planning of primary energy supply within PLN, its subsidiaries, and IPPs; 5. Monitoring and ensuring the implementation of primary energy pricing and supply to guarantee secure energy supply at PLN, subsidiary, and IPP power plants; 6. Consolidating and evaluating plans for additional power plant capacity at PLN and its subsidiaries; 7. Managing the development of strategies, policies, and mechanisms for single buyer operations, including administration and transaction settlement processes for electricity with internal parties, supervising electricity transaction management, and ensuring compliance with applicable regulations; 8. Ensuring the implementation of policies and strategies in power plant operations and maintenance by standardizing operation and maintenance practices at PLN and its subsidiaries; 9. Planning, coordinating, directing, controlling, supervising, and evaluating the duties of the Power Plant Unit to ensure all activities are carried out in accordance with established strategies and policies while fulfilling availability requirements to ensure a reliable power supply; 10. Ensuring the availability of power plant capacity through rental plants, excess power, and other schemes;;

Direksi

Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member	
		11. <i>Endorsement</i> usulan Anggaran Operasi dan Investasi fungsi Pembangkitan Anak Perusahaan; 12. Memantau kinerja operasi pembangkitan PLN dan Anak Perusahaan diantaranya EAF, EFOR, <i>heat rate</i>, <i>safety</i>, kepatuhan, dan lain-lain); 13. Memantau kinerja operasi dengan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) berdasarkan kewajiban kontrak (diantaranya ketersediaan IPP, <i>heat</i>, <i>rate</i>, <i>safety</i>, kepatuhan, dan lain-lain); 14. memantau dan meninjau target dispatch untuk <i>Independent Power Producer</i> (IPP) yang harus dipenuhi; 15. Menyetujui pembayaran dengan <i>Independent Power Producer</i> (IPP) berdasarkan ketentuan kontrak yang telah ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan oleh Divisi Perbendaharaan; 16. Memastikan pengelolaan dan pendayagunaan <i>Fly Ash Bottom Ash</i> (FABA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 17. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>Safeguards Requirement</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 18. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui <i>4 Eyes Principle</i> dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.	11. Endorsing proposals for the Operating and Investment Budgets for the Power Plant Function of Subsidiaries; 12. Monitoring the operational performance of PLN and its subsidiaries' power plant units (including EAF, EFOR, heat rate, safety, compliance, etc.); 13. Monitoring operational performance with IPPs based on contractual obligations (including IPP availability, heat rate, safety, compliance, etc.); 14. Monitoring and reviewing dispatch targets that must be met by IPPs; 15. Approving payments to IPPs in accordance with pre-established contract provisions to be executed by the Treasury Division; 16. Ensuring the management and utilization of Fly Ash Bottom Ash (FABA) in accordance with applicable regulations; 17. Ensuring that all activities and program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguards requirements in accordance with the scope of the Division to achieve a sustainable company; and 18. Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), as well as implementing effective risk management, internal control, and regulatory compliance, including applying checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making, to maintain Company productivity.
Adi Priyanto	Direktur Distribusi Director of Distribution	1. Memimpin penyusunan strategi dan kebijakan manajemen aset, serta manajemen operasi, dan pemeliharaan distribusi PLN yang terintegrasi dengan fungsi transmisi, pembangkitan, dan niaga; 2. Memimpin perencanaan program dan anggaran distribusi serta listrik desa; 3. Mengonsolidasikan dan mengevaluasi rencana penambahan kapasitas distribusi dan listrik desa; 4. Memastikan pengendalian penyelesaian konstruksi distribusi dan program listrik desa; 5. Memastikan penyusunan kebijakan standarisasi metering dari hulu sampai dengan hilir dan kebijakan yang berkaitan dengan meter, baik aspek teknis Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) maupun Penyesuaian Perhitungan Pemakaian Tenaga Listrik (P3TL) serta penyusunan Standar PLN (SPLN) bidang distribusi; 6. Memastikan penerapan kebijakan dan strategis dalam pengoprasian dan pemerlihaaran aset distribusi; 7. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas Unit Distribusi, agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan tetap memenuhi persyaratan faktor ketersediaan untuk memastikan pasokan listrik yang andal;	1. Leading the formulation of strategies and policies for asset management, as well as operations and maintenance management of PLN's distribution systems, integrated with transmission, power plant, and commercial functions; 2. Leading the planning of distribution programs and budgets, including rural electrification; 3. Consolidating and evaluating plans for capacity expansion in distribution and rural electrification; 4. Ensuring effective control over the completion of distribution construction and rural electrification programs; 5. Ensuring the development of standardized metering policies from upstream to downstream, along with policies related to meters, including technical aspects of Electricity Usage Regulation (P2TL) and Adjustment of Electricity Usage Calculation (P3TL), as well as the development of PLN Standards (SPLN) in the distribution sector; 6. Ensuring the implementation of strategic policies in the operation and maintenance of distribution assets; 7. Planning, coordinating, directing, controlling, supervising, and evaluating the tasks of the Distribution Unit to ensure that all activities are carried out in accordance with established strategies and policies while meeting availability requirements to ensure reliable electricity supply;

**Direksi**
Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member
		8. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 9. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan checks and balances melalui 4 Eyes Principle dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.
Suroso Isnandar	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	1. Melaksanakan pengurusan PLN sesuai bidang pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS/Menteri; 2. Melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan bidang pengelolaan risiko yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi strategi dan kebijakan PLN yang telah ditetapkan; 3. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 4. Melaksanakan penetapan langkah yang diperlukan untuk memastikan PLN telah memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga agar kegiatan usaha PLN tidak menyimpang dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. memimpin pengembangan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) untuk memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan; 6. Memastikan pelaksanaan fungsi perlindungan data pribadi; 7. Memastikan kepatuhan hukum PLN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi perubahan peraturan Perundang-undangan di perusahaan; 8. Melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan PLN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh PLN kepada pihak eksternal; 9. Melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua satuan kerja organisasi pengelolaan risiko; 10. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (<i>safeguards requirements</i>) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan 11. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan <i>checks and balances</i> melalui 4 Eyes Principle dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.
		8. Ensuring that all activities and program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguards requirements within the Division's scope to achieve a sustainable company; and 9. Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and implementing effective risk management, internal control, and regulatory compliance, including the application of checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making, to maintain Company productivity.
		1. Carrying out the management of PLN in the area of risk management in accordance with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister's Decree; 2. Establishing strategies and policies in the field of risk management under the responsibility, by considering PLN's established vision, strategy, and policies; 3. Coordinating and providing direction for the implementation of good corporate governance (GCG) principles; 4. Determining necessary measures to ensure that PLN complies with all applicable laws and regulations and that its business activities do not deviate from such regulations; 5. Leading the development of Business Continuity Management (BCM) to ensure the continuity of the company's operations; 6. Ensuring the implementation of personal data protection functions; 7. Ensuring PLN's legal compliance with applicable laws and regulations and anticipating regulatory changes that may impact the Company; 8. Monitoring and ensuring PLN's adherence to all agreements and commitments made with external parties; 9. Monitoring compliance and conducting embedded supervision across all organizational units involved in risk management; 10. Ensuring that all activities and program priorities meet ESG performance indicators and environmental and social safeguards requirements within the Division's scope to support the Company's sustainability goals; and 11. Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and implementing effective risk management, internal control, and regulatory compliance, including the application of checks and balances through the 4 Eyes Principle in decision-making to maintain Company productivity.

Independensi Direksi

Board of Directors' Independence

Perseroan memandang independensi Direksi sebagai hal yang sangat penting dalam rangka memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Perseroan berorientasi pada kepentingan Perseroan, bukan kepentingan pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan. Setiap anggota Direksi diharapkan dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan, dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap Perseroan.

Seluruh anggota Direksi PT PLN (Persero) yang menjabat pada tahun 2024 telah menyatakan independensinya melalui penandatanganan Pakta Integritas pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun. Prinsip ini juga mendukung penerapan Governance dalam menjaga integritas dan keberlanjutan Perseroan.

The Company considers the independence of the Board of Directors as a critical aspect in ensuring that decisions made by the Company are oriented toward the Company's best interests and not influenced by any party that could compromise objectivity. Each member of the Board of Directors is expected to make decisions objectively, free from conflicts of interest, and without pressure from any party, thereby enhancing transparency, accountability, and public trust in the Company.

All members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) serving in 2024 had declared their independence by signing an Integrity Pact at the beginning of their appointment, which is renewed at the beginning of each year. This principle also supports the implementation of sound governance in maintaining the integrity and sustainability of the Company.





Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan

Conflict of Interest and Concurrent Positions

PT PLN (Persero) mengatur benturan kepentingan dan rangkap jabatan dalam Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan benturan kepentingan pada pelaksanaan rapat dilakukan oleh peserta rapat yang mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, baik yang bersifat personal, keuangan, jabatan, atau bentuk benturan kepentingan lainnya terkait salah satu atau lebih materi dalam agenda rapat. Setelah pengungkapan tersebut, pimpinan rapat bersama seluruh peserta rapat akan memutuskan apakah pihak yang mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut harus meninggalkan ruangan rapat selama agenda tersebut berlangsung atau hanya tidak dilibatkan dalam pembahasan atau pengambilan keputusan mengenai materi tersebut.

Sejalan dengan Board Manual Direksi, para Direktur tidak diperbolehkan merangkap jabatan lain sebagai berikut:

1. Direktur pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh anggota Direksi PT PLN (Persero) yang menjabat per 31 Desember 2024 tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi.

PT PLN (Persero) regulates conflicts of interest and concurrent positions in the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Disclosure of conflicts of interest during meetings is carried out by any participant who identifies a potential conflict of interest, whether personal, financial, positional, or any other form, related to one or more items on the meeting agenda. Following such disclosure, the meeting chairperson, together with all participants, will decide whether the individual disclosing the potential conflict of interest should leave the room for the duration of the relevant agenda item or simply refrain from participating in the discussion or decision-making process on that matter.

In accordance with the Board Manual of the Board of Directors, members of the Board of Directors are prohibited from concurrently holding the following positions:

1. Director at a State-Owned Enterprise (SOE), Regionally-Owned Enterprise (ROE), or private company;
2. Member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board at an SOE;
3. Structural or functional positions within central and/or regional government institutions/agencies;
4. Other positions as stipulated by prevailing laws and regulations, including management roles in political parties and/or candidacy/membership in legislative bodies and/or candidacy for Regional Head/Deputy Regional Head; and
5. Any other position that may give rise to a conflict of interest.

As of December 31, 2024, all members of the Board of Directors of PT PLN (Persero) did not hold concurrent positions in other companies, as stated in the Company Profile section, Board of Directors Profile Subchapter.

Informasi Kepemilikan Saham Direksi

Information on the Board of Directors Shareholding

Kebijakan terkait informasi kepemilikan saham Direksi diatur dalam Board Manual Direksi. Sejalan dengan kebijakan tersebut kepemilikan saham anggota Direksi harus diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus adalah daftar yang memuat informasi mengenai saham yang dimiliki oleh Direktur dan Komisaris beserta keluarganya, baik dalam Perseroan maupun pada perusahaan lain, serta tanggal saham tersebut diperoleh. Daftar ini berfungsi sebagai dokumen yang mencatat setiap perubahan kepemilikan saham. Daftar Khusus harus disediakan di tempat kedudukan Perseroan dan dapat diakses oleh Pemegang Saham. Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan.

Pada tahun 2024, Direksi PLN (Persero) telah menyusun dan melaporkan Daftar Khusus/kepemilikan saham atas nama pribadi, anak dan istri (keluarga) di Perusahaan maupun di perusahaan lain kepada Sekretaris Perusahaan untuk didokumentasikan di Perusahaan.

The policy regarding share ownership information of the Board of Directors is regulated in the Board Manual of the Board of Directors. In line with this policy, the share ownership of Board of Directors members must be disclosed periodically through a Special Register administered by the Corporate Secretary. The Special Register contains information on shares owned by Directors and Commissioners, as well as their families, whether in the Company or in other companies, along with the date the shares were acquired. This register serves as a document that records any changes in share ownership. The Special Register must be maintained at the Company's domicile and made accessible to Shareholders. The management of the Special Register is delegated to the Corporate Secretary.

In 2024, the Board of Directors of PLN (Persero) had prepared and reported the Special Register/share ownership under their own names, and those of their children and spouses (family), in the Company and in other companies, to the Corporate Secretary for documentation within the Company.

Kebijakan dan Program Pengenalan Direksi

Policy and Introduction Program of the Board of Directors

Kebijakan pengenalan Direksi diatur dalam *Board Manual* Direksi. Sejalan dengan Kebijakan tersebut Direksi yang baru diangkat pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan, yang mencakup tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya;

The orientation policy for the Board of Directors is regulated in the Board Manual of the Board of Directors. In line with this policy, newly appointed new members of the Board of Directors must be provided with an Orientation Program about the Company to help them understand their duties and responsibilities as Directors, the Company's business processes, and to enable them to work in harmony with other Corporate Organs.

The Orientation Program for newly appointed Directors shall at least include the following:

1. Implementation of the Company's Good Corporate Governance (GCG) principles;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters;



Direksi

Board of Directors

3. Keterangan mengenai kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Program Pengenalan Perseroan dapat dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan ini berada pada Sekretaris Perusahaan atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program Pengenalan ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur tersebut.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pengangkatan Direksi PT PLN (Persero) yang baru diangkat, sehingga tidak ada informasi mengenai materi dan mekanisme program pengenalan di Perseroan.

3. Information on delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information on the roles and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Company Orientation Program may be conducted through various methods, such as presentations, meetings, company visits, document reviews, or other programs deemed appropriate based on the Company's needs.

The responsibility for organizing this orientation program lies with the Corporate Secretary or the party performing the function of the Corporate Secretary. The Orientation Program must be conducted no later than 1(one) month after the appointment of the Director.

In 2024, there were no newly appointed Board of Directors at PT PLN (Persero), therefore, there is no information regarding the materials and mechanisms of the orientation program in the Company.

Pelaksanaan Kegiatan Direksi

Implementation of Board of Directors' Activities

Selama tahun 2024, Direksi PT PLN (Persero) melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

In 2024, the Board of Directors of PT PLN(Persero)conducted various following activities:

Rapat Direksi

Board of Directors' Meetings

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pengelolaan Perseroan. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat ditetapkan tanpa diadakan Rapat Direksi, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Direktur (Keputusan Direksi Sirkuler). Rapat Direksi dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan etika pelaksanaan rapat yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Board of Directors' meetings are meetings held by the Board of Directors to discuss and make decisions related to the management of the Company. Binding decisions can be made without holding a meeting, provided that the decisions are approved in writing and signed by all Board of Directors (Board of Directors' Circular Decisions). Board of Directors' meetings are conducted with due regard to proper meeting ethics and applicable regulations.

Direksi

Board of Directors

Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua Peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Rapat yang melalui sarana elektronik harus senantiasa direkam dan dibuatkan risalahnya sebagai sarana tertib administrasi dan dokumentasi hukum.

Board of Directors' meetings may be held via teleconference, video conference, or other electronic means that allow all meeting participants to see and hear each other directly and participate in the meeting. Meetings conducted via electronic means must always be recorded and minutes must be prepared as part of administrative order and legal documentation.

Kebijakan Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting Policy

Kebijakan rapat Direksi terkait jenis rapat, mekanisme rapat termasuk frekuensi rapat diatur dalam *Board Manual* Direksi. Rapat Direksi terdiri dari:

1. Rapat Direksi;
2. Rapat Direksi yang dihadiri oleh Dewan Komisaris.

The policy regarding the types of Board of Directors' meetings, meeting mechanisms including meeting frequency is regulated in the Board Manual of the Board of Directors. The meetings consist of:

1. Board of Directors meetings;
2. Board of Directors meetings attended by the Board of Commissioners.

Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin jika dianggap perlu oleh:

1. Seorang atau lebih Direktur;
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Komisaris yang menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
3. Permintaan tertulis seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Board of Directors' meetings outside the regular schedule can be held if deemed necessary by:

1. One or more Directors;
2. A written request from one or more Commissioners specifying the matters to be discussed;
3. A written request from one or more shareholders holding the largest number of shares, specifying the matters to be discussed.

Rapat Direksi di luar jadwal rutin bersifat segera dan strategis, dengan agenda yang mencakup hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan secara mendesak melalui Rapat Direksi tersebut.

Board of Directors' meetings outside the regular schedule are urgent and strategic, with an agenda that includes matters requiring urgent decision-making through the Board of Directors meeting.

Frekuensi Rapat Direksi sebagaimana yang diatur *Board Manual* Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Berikut rencana frekuensi rapat Direksi tahun 2024:

The frequency of Board of Directors' meetings as regulated in the Board Manual of the Board of Directors is held as often as deemed necessary, but at least once every 1 (one) month. The following is the planned frequency of Board of Directors meetings in 2024:

Rapat Internal Direksi Board of Directors Internal Meetings	Rapat Gabungan Direksi Board of Directors – Board of Commissioners Consultation Meetings	Rapat dengan Pemegang Saham Meetings with Shareholders
12	12	2



Direksi Board of Directors

Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Direktur atau wakilnya. Seorang Direktur dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Direktur lainnya, berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

A Board of Directors meeting is considered valid and authorized to make binding decisions if attended by more than 1/2 (half) of the total number of Directors or their representatives. A Director may be represented in the meeting only by another Director, based on a written power of attorney granted specifically for that purpose.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors

Selama tahun 2024, Direksi PT PLN (Persero) telah melaksanakan rapat sebanyak 31 kali rapat yang terdiri dari 16 rapat internal Direksi 13 kali rapat dengan Dewan Komisaris dan 2 kali rapat dengan Pemegang Saham. Berikut informasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat selama tahun 2024:

Throughout 2024, the Board of Directors of PT PLN (Persero) held a total of 31 meetings, consisting of 16 internal Board of Directors meetings, 13 meetings with the Board of Commissioners, and 2 meetings with Shareholders. The following is information on the attendance rate of the Board of Directors at meetings throughout 2024:

Kehadiran Direksi dalam Rapat Tahun 2024

Attendance of Directors in Meetings in 2024

Uraian Description	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Board of Directors' Attendance in Board of Directors' Internal meeting			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Board of Directors' Attendance in Consultation Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners)			Kehadiran Direksi dalam Rapat RUPS Tahunan Board of Directors' Attendance in the Annual GMS meeting		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Darmawan Prasodjo	Direktur Utama President Director	16	16	100%	13	13	100%	2	2	100%
Sinthya Roesly	Direktur Keuangan Director of Finance	16	15	94%	28	27	96%	2	2	100%
Yusuf Didi Setiarto	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Director of Legal Affairs and Human Capital Management	16	13	81%	19	17	89%	1	1	50%
Evy Haryadi	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning	16	13	81%	20	19	95%	2	2	100%
Edi Srimulyanti	Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce	16	15	94%	16	16	100%	2	2	100%

Direksi

Board of Directors

Uraian Description	Jabatan Position	Kehadiran Direksi dalam Rapat Internal Direksi Board of Directors' Attendance in Board of Directors' Internal meeting			Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan (Direksi dan Dewan Komisaris) Board of Directors' Attendance in Consultation Meetings (Board of Directors and Board of Commissioners)			Kehadiran Direksi dalam Rapat RUPS Tahunan Board of Directors' Attendance in the Annual GMS meeting		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten- dances	Tingkat Kehad-iran Atten- dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten- dances	Tingkat Kehad-iran Atten- dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Required Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten- dances	Tingkat Kehad-iran Atten- dance Rate
Hartanto Wibowo	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Director of Corporate Planning and Business Development	16	15	94%	25	23	92%	2	2	100%
Wiluyo Kusdiharto	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Management Project and New and Renewable Energy	16	13	81%	18	18	100%	2	2	100%
Adi Lumakso	Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Power Plant Management	16	14	88%	21	21	100%	2	2	100%
Adi Priyanto	Direktur Distribusi Director of Distribution	16	12	75%	16	16	100%	2	2	100%
Suroso Isnandar	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	16	16	100%	28	26	93%	2	2	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance Rate of the Board of Directors				89%	97%			95%		

Keputusan Rapat Direksi

Board of Directors' Meeting Decisions

Selama tahun 2024, Direksi Perseroan telah mengeluarkan 23 keputusan Rapat Direksi sebagai berikut:

1. *Update Usulan RKAP 2024;*
2. Anggaran Investasi Murni Pembangunan Infrastruktur Transmisi Dan Gardu Induk;
3. Pengembangan Gedung PLN Bersama;

During 2024, the Board of Directors of the Company issued 23 resolutions of the Board of Directors Meeting as follows:

1. *Update of 2024 RKAP Proposal;*
2. Pure Investment Budget for Transmission Infrastructure and Substation Development;
3. Joint PLN Building Development;

**Direksi**

Board of Directors

4. SDM; 5. Anggaran Investasi Untuk Kelanjutan Proyek Transmisi ; 6. Penyelesaian Kewajiban Bea Masuk ; 7. Penerbitan Anggaran Investasi Penyambungan Pelanggan; 8. Optimalisasi Penyerapan PMN; 9. Persetujuan Laporan Keuangan PLN Tahun 2023 (Audited); 10. Anggaran Investasi Murni Pembangunan Infrastruktur Transmisi dan Gardu Induk 11. Nilai Penjualan Saham; 12. Penetapan Dividen PT PLN (Persero) Tahun 2023; 13. Penerbitan Anggaran Investasi Untuk Penyelesaian Proyek PLTA ; 14. Anggaran Investasi Murni Pembangunan Infrastruktur Transmisi dan Gardu Induk 15. Penetapan Dividen Tahun Buku 2023 dan Penghasilan BOD BOC SHAP PLN; 16. Penghapusbukuan ATTB Tanah dan Bangunan; 17. SDM; 18. Postur RKAP Tahun 2025; 19. Penyesuaian Penugasan Untuk Penyediaan Pembangkit; 20. Penambahan Anggaran Operasi; 21. Sewa pembangkit; 22. Anggaran Investasi Murni Pembangunan Infrastruktur Pembangkit; 23. Transformasi Pelayanan <i>Human Capital</i>.	4. Human Resources; 5. Investment Budget for Continuation of Transmission Project; 6. Settlement of Import Duty Obligations; 7. Issuance of Customer Connection Investment Budget; 8. Optimization of PMN Absorption; 9. Approval of PLN's Financial Statements for 2023 (Audited); 10. Pure Investment Budget for Transmission Infrastructure and Substation Development 11. Share Sales Value; 12. Determination of PT PLN (Persero)'s Dividends for 2023; 13. Issuance of Investment Budget for Completion of Hydroelectric Power Plant Projects; 14. Pure Investment Budget for Transmission Infrastructure and Substation Development 15. Determination of Dividends for Fiscal Year 2023 and Income of BOD BOC of SHAP of PLN; 16. Write-off of ATTB of Land and Buildings; 17. Human Resources; 18. RKAP Posture for 2025; 19. Adjustment of Assignment for Provision of Power Plants; 20. Additional Operating Budget; 21. Power Plant Rental; 22. Pure Investment Budget for Power Plant Infrastructure Development; 23. Transformation of Human Capital Services.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Direksi

Policy and Implementation of Board of Directors Trainings

Kebijakan pelatihan atau pengembangan kompetensi dan kapabilitas Direksi PT PLN (Persero) diatur dalam Board Manual Direksi. Program pelatihan dan/atau pengembangan *knowledge and skills* merupakan salah satu program penting bagi Direktur untuk mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas Perseroan serta pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Program pengembangan bagi Direksi yang dilakukan secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Direktur dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

The policy on training or competency and capability development for the Board of Directors of PT PLN (Persero) is regulated in the Board Manual for the Board of Directors. Training and/or knowledge and skills development programs are important initiatives for Directors to keep up with the latest developments in the Company's activities as well as other knowledge related to the performance of the Board of Directors' duties.

The ongoing development program for the Board of Directors aims to enhance the competence and capability in carrying out the functions, duties, and responsibilities.

Direksi

Board of Directors

Direksi, melalui Sekretaris Perusahaan, melakukan identifikasi dan perencanaan program pengembangan *knowledge* dan *skills* Direksi yang sesuai dengan kebutuhan mutakhir, dan hal tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

The Board of Directors, through the Corporate Secretary, identify and plan the knowledge and skills development programs for the Board of Directors according to current needs, which are incorporated into the Company's Work Plan and Budget.

Selama tahun 2024, Direksi PT PLN (Persero) telah melakukan berbagai pelatihan Direksi sebagai berikut:

During 2024, the Board of Directors of PT PLN (Persero) participated in various training programs as follows:

Nama/Jabatan Name/Position	Tanggal Date	Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Darmawan Prasodjo Direktur Utama President Director	07 Maret 2024 March 7, 2024	<i>"Forward Thinking, Acceleration and Sustainability"</i>	IDN Media Fortune Indonesia	The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta
	29 April 2024 April 29, 2024	<i>Sharing Knowledge Transisi Energi</i> Energy Transition Knowledge Sharing	Kompas	Kantor Kompas, Jakarta
	23 Juli 2024 July 23, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	25 Oktober 2024 October 25, 2024	<i>Leadership Challenge in the Digital Era Tahun 2024 - Digital Transformation in the Energy Sector : Challenges and Opportunities</i>	OJK	Hotel Fairmont, Jakarta
	22 November 2024 November 22, 2024	<i>"Harnessing Indonesia's Potential in Downstream Industries and Renewable Energy for a Sustainable Future"</i> pada Indonesia Investment Forum 2024 "Harnessing Indonesia's Potential in Downstream Industries and Renewable Energy for a Sustainable Future" at the Indonesia Investment Forum 2024	Indonesia Investment Forum 2024	London
	11 Desember 2024 December 11, 2024	<i>Sharing Session "Overview dan Lessons Learned : Pengawasan Program Prioritas Presiden oleh KSP"</i> Sharing Session on "Overview and Lessons Learned: Monitoring the President's Priority Programs by the Presidential Staff Office (KSP)"	Kantor Staf Presiden Presidential Staff Office	Jakarta
Sinthya Roesly Direktur Keuangan Director of Finance	19 Januari 2024 January 19, 2024	<i>Workshop KBUMN - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability</i> KBUMN Workshop - Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Bali
	26 Januari 2024 January 26, 2024	<i>Workshop on High Level Technologies for Energy Transition</i>	ADB	Tokyo, Jepang Tokyo, Japan
	13 Maret 2024 March 13, 2024	<i>Learning Program Certified in Accounting Finance and Business</i>	IAI, IFAC	Jakarta
	14 Mei 2024 May 14, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional - Profesional Level Professional Accountant Certification - Professional Level	IAI, IFAC	Jakarta

**Direksi**
Board of Directors

Nama/Jabatan Name/Position	Tanggal Date	Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Lokasi
Yusuf Didi Setiarto Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Manajemen Human Capital	30 Juli 2024 July 30, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional - <i>Advance Level</i> Professional Accountant Certification - Advanced Level	IAI, IFAC	Jakarta
	21 Agustus 2024 August 21, 2024	Sertifikasi <i>Chartered Accountant</i> Chartered Accountant Certification	IAI, IFAC	Jakarta
	5 Oktober 2024 October 5, 2024	<i>Workshop - Detection & Protection of Financial Distress</i>	IAI, IFAC	Jakarta
	16 Desember 2024 December 16, 2024	<i>Workshop - Manajemen Risiko Pajak Atas Penerapan Core Tax & Update PMK 81/2024</i> Workshop - Tax Risk Management on Core Tax Implementation & Update of PMK 81/2024	IAI, IFAC	Jakarta
	20 Desember 2024 December 20, 2024	<i>Workshop - Risk Based Budgeting for an Integrated Risk Management</i>	IAI, IFAC	Jakarta
	01 Juni 2024 June 1, 2024	<i>Leadership Fun Camp BUMN Muda : Future Leader For Indonesia 2045</i>	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Jawa Tengah Central Java
	28 Juli 2024 July 28, 2024	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi Qualified Risk Governance Professional	CRMS, LPK MKS	
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	<i>Qualified Risk Governance Profession (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	
	13 September 2024 September 13, 2024	<i>Workshop "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"</i> Workshop on "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Bandung
Evy Haryadi Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning	17 September 2024 September 17, 2024	<i>detikcom Leaders Forum</i>	Detik.com	Jakarta
	22 - 23 Januari 2024 January 22-23, 2024	<i>Workshop on High Level Technologies For Energy Transition</i>	ADB	Tokyo, Jepang Tokyo, Japan
	26 - 28 Februari 2024 February 26-28, 2024	<i>Siemens Grid Software Summit</i>	Siemens	Orlando, Amerika Serikat Orlando, the US
	05 Maret 2024 March 5, 2024	IDE Katadata 2024 "Sesi: <i>Powering the Future: Advancing Electrification and Renewable Energy</i> " DE Katadata 2024 "Session: Powering the Future: Advancing Electrification and Renewable Energy"	Katadata	Jakarta
	06 Maret 2024 March 6, 2024	<i>"Conference Road to PLN Investment Days 2024"</i>	Kompas	Jakarta
	10 Juli 2024 July 10, 2024	<i>"Leading up to COP29: In Solidarity for a Green World"</i>	Kaukus Ekonomi Hijau	Jakarta
	12 November 2024 November 12, 2024	<i>"Driving 8% Economic Growth Through Sustainable Initiatives: Collaborative Strategies for Advancing Green Business in the Energy Sector"</i>	Paviliun Indonesia COP29	Baku, Azerbaijan

Direksi

Board of Directors

Nama/Jabatan Name/Position	Tanggal Date	Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location
Edi Srimulyanti Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce	15 November 2024 November 15, 2024	<i>"The Critical Link: Empowering Utilities for the Energy Transition"</i>	World Bank Group, Pavilion	Baku, Azerbaijan
	29 November 2024 November 29, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	11 Desember 2024 December 11, 2024	Katadata Indonesia <i>Policy Dialogue</i>	Katadata	Jakarta
	05 Maret 2024 March 5, 2024	<i>Electrifying Lifestyle outlook Technology Trent 2024</i>	Solopos	Jakarta
	05 Maret 2024 March 5, 2024	Sosialisasi Permen ESDM No.2 Tahun 2024	KESDM ESMD Ministry	Jakarta
	23 Juli 2024 July 23, 2024	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi Qualified Risk Governance Professional	CRMS ,LPK MKS	Bandung
Hartanto Wibowo Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Director of Corporate Planning and Business Development	30 Juli 2024 July 30, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	11 Desember 2024 December 11, 2024	Forum Diskusi Rumah Rakyat People's House Discussion Forum	APERSI	Jakarta
	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi. Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	22 Agustus 2024 August 22, 2024	ITB CEO SUMMIT 2024 "Akuisisi dan Eksploitasi Inovasi Industry (Energy)" ITB CEO Summit 2024 "Acquisition and Exploitation of Industry Innovation (Energy)"	ITB	Bandung
	September 2024	Seminar	2024 AIIB ANNUAL MEETING	Uzbekistan
Wiluyo Kusdwiarto Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Management Project and New and Renewable Energy	18 Mei 2024	YLC 7 IKA ITS PWJR: Keorganisasian Alumni ITS YLC 7 IKA ITS PWJR: Keorganisasian Alumni ITS	IKA ITS	Bogor
	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Teknologi Dekarbonisasi di Pembangkit Listrik dan Perusahaan Minyak & Gas: Implementasi dan Tantangannya Decarbonization Technology in Power Plants and Oil & Gas Companies: Implementation and Challenges	PII	Depok
	1 September 2024 September 1, 2024	HLF MSP Indonesia 2024	Bappenas	Bali
	3 September 2024 September 3, 2024	<i>The 7th Indonesia - China Energy Forum</i>	KESDM	Bali
	11 September 2024 September 11, 2024	Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024	Bappenas & KESDM Bappenas & ESMD Ministry	Jakarta
Adi Lumakso Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Power Plant Management	07 Oktober 2024 October 7, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta

**Direksi**
Board of Directors

Nama/Jabatan Name/Position	Tanggal Date	Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training	Penyelenggara Organizer	Lokasi Lokasi
	19-20 Juni 2024 June 19-20, 2024	Indonesia Internasional <i>Hydrogen Summit</i> Indonesia International Hydrogen Summit	On Us Asia and Petrominindo	Jakarta
Adi Priyanto Direktur Distribusi Director of Distribution	02 April 2024 April 2, 2024	<i>Energy Corner: Kesiapan PLN dalam Menjaga Pasokan Listrik di Masa Libur Lebaran</i> Energy Corner: PLN's Preparedness in Maintaining Electricity Supply During the Eid Holiday	CNBC	Jakarta
	07 Juni 2024 June 7, 2024	Sistem Kelistrikan Kalimantan Tengah Central Kalimantan Power System	DJK	Jakarta
Suroso Isnandar Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	7 Maret 2024 March 7, 2024	Tata Kelola Terintegrasi PLN <i>GroLeveraging Technology and AI for Strategic Business Decision-Making</i> Integrated Governance of PLN GroLeveraging Technology and AI for Strategic Business Decision-Making	Fortune Indonesia	Jakarta
	7 Maret 2024 March 7, 2024	BUMN <i>Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS)</i> 2024 - sebagai narasumber BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 - as speaker	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Jakarta
	29 Mei 2024 May 29, 2024	<i>Green Economic Forum 2024 (sebagai narasumber)</i> Green Economic Forum 2024 (as speaker)	CNBC Indonesia	Jakarta
	31 Juli 2024 July 31, 2024	<i>AI Bootcamp: Unleashing Productivity through AI - Narasumber</i> AI Bootcamp: Unleashing Productivity through AI - speaker	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Jakarta
	29 Agustus 2024 August 29, 2024	<i>THE FUTURE OF ENERGY IN INDONESIA 2024 (Narasumber) (Speaker)</i>	PJCI dan APUEA	Jakarta
	17 September 2024 September 17, 2024	Penguatan BUMN menuju Indonesia Emas (Narasumber) Strengthening SOEs Towards Golden Indonesia (Speaker)	Kementerian BUMN Kementerian BUMN	Jakarta
	20 September 2024 September 20, 2024	Implementasi GRC dan ESG (Narasumber) Implementation of GRC and ESG (Speaker)	FMR BUMN	Yogyakarta
	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Implementasi GRC dan ESG -II (Narasumber) Implementation of GRC and ESG - II (Speaker)	FMR BUMN	Yogyakarta
	29 November 2024 November 29, 2024	<i>Qualified Risk Governance Professional (QRGP)</i>	LSP MKS, IAF, KAN	Jakarta
	5 Desember 2024 December 5, 2024	<i>Risk Beyond International Conference</i>	ERMA	BALI
	10 Desember 2024 December 10, 2024	Bisnis Indonesia <i>Economy Outlook 2025</i> (Narasumber) Bisnis Indonesia Economy Outlook 2025 (Speaker)	Bisnis Indonesia	Jakarta
	12 Desember 2024 December 12, 2024	<i>Indonesia Brand Forum</i>	Kementerian BUMN SOEs Ministry	Yogyakarta

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Assessment of Committees under the Board of Directors

Secara umum, Direksi menilai masing-masing komite telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya. Informasi lebih lanjut terkait hasil penilaian Komite Direksi disajikan lebih lanjut pada masing-masing Komite Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

In general, the Board of Directors assesses that each committee performed well throughout 2024, as reflected in the support and roles it played in assisting the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities. The support provided included decision-making assistance and recommendations within the scope of the respective authority. Further information on the results of the Board of Directors Committees' assessment is presented in more detail in each respective Board of Directors Committee section of this Annual Report.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ dalam tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolegial. Masing-masing Komisaris tidak dapat bertindak secara terpisah, dengan keputusan didasarkan pada keputusan kolektif Dewan Komisaris.

As a governance organ, the Board of Commissioners is responsible for supervising and providing advice on the management of the Company. The Board of Commissioners' duties and responsibilities are carried out collegially. Each Commissioner may not act independently, as decisions are based on the collective decisions of the Board of Commissioners.

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Composition

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PT PLN (Persero) sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Informasi Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Tahun Buku 2024 dan Setelah Tahun Buku 2024 dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2024, there were changes in the Board of Commissioners' composition of PT PLN (Persero) as outlined in the Company Profile Chapter, Subchapter Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2024 Fiscal Year and After the 2024 Fiscal Year in this Annual Report.

Komposisi Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Composition of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, is as follows:



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Jabatan	Masa Jabatan Masa Jabatan	Keahlian Keahlian
Burhanuddin Abdullah	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	Ekonomi, Keuangan, Tata Kelola Economics, Finance, Governance
Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Periode Pertama: 23 Desember 2019 - 23 Desember 2024 dan Periode Kedua: 14 November 2024-14 November 2028 First Period: December 23, 2019 - December 23, 2024 and Second Period: November 14, 2024 - November 14, 2028	Ekonomi, Keuangan, Manajemen Risiko Economics, Finance, Risk Management
Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner	21 September 2022-21 September 2027 September 21, 2022 – September 21, 2027	Energi Energy
Susijijono Moegiarso	Komisaris Commissioner	16 Juli 2021-16 Juli 2026 July 16, 2021 – July 16, 2026	Ekonomi Economics
Mutanto Juwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	Audit
Andi Arief	Komisaris Independen Independent Commissioner	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	Audit
Aminuddin Ma'ruf	Komisaris Commissioner	14 November 2024-14 November 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	SDM HR
Yazid Fanani	Komisaris Independen Independent Commissioner	14 November 2024-14 November 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	Audit, Hukum Audit, Legal
Ali Masykur Musa	Komisaris Independen Independent Commissioner	14 November 2024-14 November 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	Manajemen Risiko, Audit Risk Management, Audit
Jisman Parada Hutajulu	Komisaris Commissioner	14 November 2024-14 November 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	Energi Energy

Pedoman Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Guidelines

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman GCG Perseroan, *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris serta *Board Manual* Dewan Komisaris. Ruang lingkup yang diatur dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris antara lain mencakup sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Tata Laksana Kerja terkait Jabatan;
3. Tata Laksana Kerja terkait Batas Kewenangan;
4. Tata Laksana Kerja terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
5. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Company's GCG Guidelines, Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners, and Board Manual of the Board of Commissioners. The scope regulated in the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners includes, among others, the following:

1. Introduction;
2. Board Manual related to Position;
3. Board Manual related to Authority Limits;
4. Board Manual related to the Implementation and Supervision of Company Operations;
5. Workflow of the Board of Directors' Authorities Requiring the Approval of the Board of Commissioners and Authorities Requiring the Approval of the GMS after obtaining a written response from the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Informasi lebih lengkap terkait *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris dapat diakses pada *website* Perusahaan <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris mencakup diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yang memuat diantaranya:
 - a. Masa Jabatan;
 - b. Rangkap Jabatan;
 - c. Pelaksana Tugas Komisaris yang Lowong;
 - d. Pemberhentian Dewan Komisaris
 - e. Program Pengenalan Dewan Komisaris yang Baru
 - f. Program Pengembangan/Pemutakhiran Kompetensi Dewan Komisaris
2. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
3. Hak dan Kewajiban Direksi
4. Prosedur Pengawasan Terhadap Kegiatan Operasional
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Rencana Kerja Tahunan dan KPI Dewan Komisaris
7. Organ Pendukung Dewan Komisaris
8. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.

Saat ini Pedoman Direksi tersebut (*Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi serta *Board Manual* Dewan Komisaris) dalam tahap pemutakhiran seiring dengan terbitnya Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL, Salinan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan SDM serta peraturan turunan dari Peraturan Menteri BUMN tersebut.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Tenure

Selaras dengan *Board Manual* Dewan Komisaris, masa jabatan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir Komisaris dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

More detailed information regarding the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners can be accessed on the Company's website: <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

Meanwhile, the scope regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners includes, among others, the following:

1. General Provisions, which include:
 - a. Tenure;
 - b. Concurrent Positions;
 - c. Acting Commissioner for Vacant Positions;
 - d. Dismissal of the Board of Commissioners;
 - e. Orientation Program for New Board of Commissioners;
 - f. Competency Development/Updating Program for the Board of Commissioners
2. Duties and Authorities of the Board of Commissioners
3. Rights and Obligations of the Board of Directors
4. Supervision Procedures over Operational Activities
5. Meetings of the Board of Commissioners
6. Annual Work Plan and KPIs of the Board of Commissioners
7. Supporting Organs of the Board of Commissioners
8. Code of Conduct for Board of Commissioners Meetings

Currently, these Board Manuals (Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and the Board Manual of the Board of Commissioners) are in the process of being updated in line with the issuance of the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/3/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Actions, Minister of SOEs Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and CSR/PKBL Programs, Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organizational Structure and Human Resources, as well as the derivative regulations of the aforementioned Ministerial Regulations.

In line with the Board Manual of the Board of Commissioners, the tenure for Commissioners is set at 5 (five) years without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners at any time. Upon the expiration of their tenure, Commissioners may be reappointed for one additional period by the General Meeting of Shareholders.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Jabatan Dewan Komisaris dapat berakhir sesuai dengan ketentuan PER-3/MBU/03/2023, diantaranya karena: meninggal dunia, berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, pemberhentian oleh RUPS/Menteri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk larangan rangkap jabatan.

The tenure of the Board of Commissioners may end in accordance with the provisions of PER-3/MBU/03/2023, including but not limited to: death, expiration of tenure, resignation, dismissal by the GMS/Minister, or failure to meet the requirements as stipulated in the articles of association and prevailing laws and regulations, including the prohibition of holding concurrent positions.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

Selaras dengan yang dimuat dalam *Board Manual* Dewan komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menganalisis Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Mengambil alih tugas dan tanggung jawab operasional sebagaimana Direksi, pada kondisi di mana Perseroan tidak memiliki satupun Direktur.
6. Mewakili Perseroan dalam hal seluruh Direksi memiliki benturan kepentingan.
7. Melakukan proses penunjukan Auditor Eksternal Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

In line with the provisions set out in the Board Manual of the Board of Commissioners, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Supervising the management of the Company conducted by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including on the Company's development plans, annual work plans and budgets, implementation of the provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as applicable laws and regulations.
2. Carrying out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association, GMS resolutions, and applicable laws and regulations.
3. Acting in the interest of the Company while considering the interests of the shareholders and being accountable to the GMS.
4. Reviewing and analyzing the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the report.
5. Assuming the operational duties and responsibilities of the Board of Directors in situations where the Company has no serving Directors.
6. Representing the Company in cases where all members of the Board of Directors have a conflict of interest.
7. Overseeing the process of appointing the Company's External Auditor to be determined by the GMS.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan 4 (empat) komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dewan Komisaris kemudian membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara anggota Dewan Komisaris, antara lain dengan menetapkan Komisaris sebagai ketua ataupun anggota pada komite-komite tersebut. Pembagian tugas anggota Dewan Komisaris sebagai ketua ataupun anggota komite pada 2024 adalah sebagai berikut:

In carrying out its duties, responsibilities, and authorities, the Board of Commissioners is supported by the Secretariat of the Board of Commissioners and 4 (four) committees, namely the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Nomination & Remuneration Committee, and the Integrated Governance Committee. The Board of Commissioners delegates duties, responsibilities, and authorities among its members, including appointing Commissioners as chairpersons or members of these committees. The distribution of duties among the members of the Board of Commissioners as chairpersons or members of the committees in 2024 is as follows:

Susunan Keanggotaan pada Komite-Komite Dewan Komisaris

Composition of Membership in Board of Commissioners Committees

No.	Komite Audit Audit Committee	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee
	Ketua Head	Ketua Head	Ketua Head	Ketua Head
1	Yazid Fanani	Ali Masykur Musa	Burhanuddin Abdullah	Burhanuddin Abdullah
	Anggota Member	Anggota Member	Anggota Member	Anggota Member
2	Aminuddin Ma'ruf	Suahasil Nazara	Aminuddin Ma'ruf	Suahasil Nazara
3	Jisman P Hutajulu	Dadan Kusdiana	Ali Masykur Musa	Dadan Kusdiana
4	Mutanto Juwono	Susiwijono Moegiarso	Yazid Fanani	Susiwijono Moegiarso
5	Andi Arief	Jisman. P Hutajulu	Andi Arief	Mutanto Juwono

Berikut pembagian tugas Dewan Komisaris PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024:

Berikut pembagian tugas Dewan Komisaris PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member	
Burhanuddin Abdullah	Komisaris Utama dan Komisaris Independen Komisaris Utama dan Komisaris Independen	- SDM - Tata Kelola - Bisnis dan Ekonomi	- HR - Governance - Business and Economics
Suahasil Nazara	Wakil Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama	- Manajemen Risiko - Keuangan, Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro - Tata Kelola	- Risk Management - Finance, Macroeconomics, Microeconomics - Governance
Dadan Kusdiana	Komisaris Commissioner	- Manajemen Risiko - Tata Kelola - Energi	- Risk Management - Governance - Energy
Susiwijono Moegiarso	Komisaris Commissioner	- Manajemen Risiko - Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro - Tata Kelola	- Risk Management - Macroeconomics, Microeconomics - Governance
Jisman Parada Hutajulu	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Manajemen Risiko - Sistem Ketenagalistrikan	- Risk Management - Electrical Power System



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Tugas Masing-Masing Duties of Each Member	
Aminuddin Ma'ruf	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Ekonomi • SDM	• Economics • HR
Yazid Fanani	Komisaris Commissioner	• Audit • Hukum	• Audit • Legal
Ali Masykur Musa	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Manajemen Risiko	• Risk Management
Andi Arief	Komisaris Independen Independent Commissioner	• Audit	• Audit
Mutanto Juwono	Komisaris Commissioner	• Audit	• Audit

Komisaris Independen

Independent Commissioners

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris lebih objektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan Perseroan serta pemegang saham. PT PLN (Persero) memiliki Komisaris Independen yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari luar Perseroan, yaitu bukan merupakan karyawan, Direksi, maupun Komisaris Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya di Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Jumlah Komisaris Independen PT PLN (Persero) saat ini adalah 5 orang dari total 10 orang Komisaris, sehingga persentase Komisaris Independen mencapai 50%. Jumlah tersebut telah melebihi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 2 Pasal 15 ayat 2, yang mensyaratkan minimal 20% dari total komisaris merupakan Komisaris Independen. Selain itu, ketentuan ini juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan ACGS.

In order to enhance the quality of supervision and ensure that decisions made by the Board of Commissioners are more objective, transparent, and prioritize the interests of the Company and its shareholders, PT PLN (Persero) has appointed Independent Commissioners who meet the following criteria:

1. Originating from outside the Company, meaning they have not been employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners of the Company within the last 6 (six) months, except in the case of reappointment as Independent Commissioner for the next tenure in the same Issuer or Public Company.
2. Not holding shares in the Company, either directly or indirectly.
3. Not having any affiliation with the Company, its Commissioners, Directors, or Major Shareholders.
4. Not having any business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.

The number of Independent Commissioners at PT PLN (Persero) currently stands at 5 out of a total of 10 Commissioners, making the percentage of Independent Commissioners 50%. This exceeds the requirement set forth in Article 15 paragraph 2 of the Minister of SOEs Regulation No. 2, which mandates that at least 20% of the total number of commissioners must be Independent Commissioners. In addition, this provision is also in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris Independen PT PLN (Persero) Per 31 Desember adalah sebagai berikut:

Composition of the Independent Board of Commissioners of PT PLN (Persero) as of December 31 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keahlian Expertise
Burhanuddin Abdullah	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Chairman of the Board of Commissioners	Ekonomi, Keuangan, Tata Kelola Economics, Finance, Governance
Mutanto Juwono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit
Andi Arief	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit
Yazid Fanani	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit, Hukum Audit, Legal
Ali Masykur Musa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Manajemen Risiko, Audit Risk Management, Audit

Berikut pernyataan independensi Komisaris Independen Perusahaan tahun 2024.

The following is the independence statement of the Company's Independent Commissioners in 2024.



Hingga akhir tahun 2024, tidak ada Komisaris Independen Perseroan yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode. Hal ini menunjukkan komitmen Perusahaan dalam menjaga independensi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

As of the end of 2024, none of the Company's Independent Commissioners have served more than 2 (two) terms of tenure. This reflects the Company's commitment to maintaining independence and adhering to the principles of Good Corporate Governance.



Dewan Komisaris Board of Commissioners

Independensi Dewan Komisaris

Independence of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris yang jabatannya bukan Komisaris Independen juga bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini tercermin dari penandatanganan Pakta Integritas pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya guna menjamin independensi Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat rangkap jabatan maupun adanya perubahan kepemilikan saham baik pribadi maupun keluarga di Perusahaan dan/atau Perusahaan lain. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

Berikut pernyataan independensi Komisaris Perusahaan tahun 2024.

Members of the Board of Commissioners who do not hold the position of Independent Commissioner also act independently in carrying out their duties and responsibilities. This is reflected in the signing of an Integrity Pact at the start of their appointment, which is renewed annually, declaring the absence of any affiliation with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners to ensure the independence of the Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners are also required to report any changes in status that may affect their independence, including concurrent positions or changes in share ownership, whether personal or by family members, in the Company and/or other companies. Throughout 2024, there were no situations involving potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners in the decision-making process.

The following is the independence statement of the Company's Commissioners for the year 2024.



Benturan Kepentingan dan Rangkap Jabatan

Conflict of Interest and Concurrent Positions

PT PLN (Persero) mengatur benturan kepentingan dan rangkap jabatan dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris. Pengungkapan benturan kepentingan pada pelaksanaan rapat dilakukan oleh peserta rapat yang mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan, baik yang bersifat personal, keuangan, jabatan, atau bentuk benturan kepentingan lainnya terkait salah satu atau lebih materi dalam agenda rapat. Setelah pengungkapan tersebut, pimpinan rapat bersama seluruh peserta rapat akan memutuskan apakah pihak yang mengungkapkan potensi benturan kepentingan tersebut harus meninggalkan ruangan rapat selama agenda tersebut berlangsung atau hanya tidak dilibatkan dalam pembahasan atau pengambilan keputusan mengenai materi tersebut.

Pengaturan rangkap jabatan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Informasi rangkap Jabatan Dewan Komisaris telah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan pada Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

PT PLN (Persero) regulates conflicts of interest and concurrent positions in the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners. Disclosure of conflicts of interest during meetings is made by any participant who identifies a potential conflict, whether personal, financial, positional, or in any other form, related to one or more items on the meeting agenda. Following such disclosure, the meeting chairperson, together with all participants, will decide whether the individual disclosing the potential conflict of interest must leave the meeting room during the relevant agenda item or simply be excluded from the discussion or decision-making process concerning the matter.

Regulations regarding concurrent positions of the Board of Commissioners are stipulated in the Company's Board Manual. Information on concurrent positions held by the Board of Commissioners is detailed in the Company Profile Chapter under the Subchapter on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Information on Board of Commissioners' Share Ownership

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris harus diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Daftar Khusus Dewan Komisaris adalah daftar yang memuat informasi mengenai saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Komisaris beserta keluarganya, baik dalam Perseroan maupun pada perusahaan lain, serta tanggal saham tersebut diperoleh. Daftar ini berfungsi sebagai dokumen yang mencatat setiap perubahan kepemilikan saham.

Daftar Khusus harus disediakan di tempat kedudukan Perseroan dan dapat diakses oleh Pemegang Saham. Pengelolaan Daftar Khusus didelegasikan kepada Sekretaris Perusahaan. Untuk pengelolaan Daftar Khusus Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris akan membantu Sekretaris Perusahaan dalam memperoleh Daftar Khusus yang terkait dengan Dewan Komisaris.

In line with the provisions set forth in the Company's Board Manual, share ownership by members of the Board of Commissioners must be periodically disclosed through a Special Register administered by the Secretary to the Board of Commissioners. The Special Register of the Board of Commissioners contains information on shares owned by members of the Board of Commissioners and their family members, both in the Company and in other companies, along with the date such shares were acquired. This register serves as a document to record any changes in share ownership.

The Special Register must be made available at the Company's document and accessible to Shareholders. Management of the Special Register is delegated to the Corporate Secretary. For the administration of the Board of Commissioners' Special Register, the Secretary to the Board of Commissioners will assist the Corporate Secretary in obtaining the relevant records related to the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris PLN (Persero) telah menyusun dan melaporkan Daftar Khusus/kepemilikan saham atas nama pribadi, anak dan istri (keluarga) di Perusahaan maupun di perusahaan lain kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk didokumentasikan di Perusahaan.

In 2024, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) prepared and submitted the Special Register/share ownership under the names of themselves, their children, and their spouses (family members) in the Company as well as in other companies to the Secretary to the Board of Commissioners for documentation within the Company.

Kebijakan dan Program Pengenalan Dewan Komisaris

Policy and Introduction Program of the Board of Commissioners

Kebijakan program pengenalan Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris. Sejalan dengan Kebijakan tersebut Komisaris yang baru diangkat pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Komisaris, proses bisnis Perseroan dan pengawasannya, serta dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya.

The Board of Commissioners' introduction program policy is regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners. In line with this policy, newly appointed Commissioners are required to undergo an Introduction Program about the Company, so they can understand their duties and responsibilities as Commissioners, the Company's business processes and supervision, and be able to work in alignment with other Company organs.

Pelaksanaan program pengenalan ini dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab utama, yang berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris. Pelaksanaan program Pengenalan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Komisaris tersebut.

The implementation of this introduction program is carried out by the Corporate Secretary as the main responsible party, coordinating with the Secretary to the Board of Commissioners. The program must be conducted no later than 3 (three) months after the Commissioner's appointment.

Program Pengenalan bagi Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan.
2. Gambaran mengenai Perseroan, yang mencakup tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, serta berbagai masalah strategis lainnya.
3. Keterangan mengenai kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

The Introduction Program for newly appointed Commissioners must at least cover the following topics:

1. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles by the Company.
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters.
3. Information regarding delegated authorities, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Program Pengenalan Perseroan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan. Pada tahun 2024, Perusahaan telah mengadakan program pengenalan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

The Company's Introduction Program can be conducted through various methods, such as presentations, meetings, visits to the Company, document reviews, or other programs deemed appropriate to the Company's needs where the program is conducted. In 2024, the Company has held an introduction program 2 (two) times, as follows:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

1. Tanggal 26 Agustus untuk Program pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat pada tanggal 19 Maret 2024 dan 23 Juli 2024
2. Tanggal 26 November 2024 untuk Program pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat pada tanggal 23 Juli 2024

1. 26 August date for the introduction program to the newly appointed Board of Commissioners on 19 March 2024 and 23 July 2024
2. 26 November 2024 date for the introduction program to the newly appointed Board of Commissioners on 14 November 2024

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris

Implementation of Board of Commissioners' Activities

Selama tahun 2024, Dewan Komisari PT PLN (Persero) melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan Rencana kerja sebagai berikut:

During 2024, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) carried out various activities in accordance with their duties, responsibilities, and work plan as follows:

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meetings

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Komisaris. Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan dengan senantiasa memperhatikan etika pelaksanaan rapat yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Decisions of the Board of Commissioners are made during Board of Commissioners Meetings. Binding decisions can also be made without holding a meeting, provided that the decisions are approved in writing and signed by all Commissioners. Board of Commissioners Meetings must always be conducted with proper meeting ethics and in accordance with applicable regulations.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Policy

Kebijakan rapat Dewan Komisaris terkait jenis rapat, mekanisme rapat termasuk frekuensi rapat diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris yang telah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023. sejalan dengan kebijakan tersebut, rapat Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Rapat Internal Dewan Komisaris dilaksanakan setiap bulan dan dihadiri oleh Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris.
2. Rapat Konsultasi Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dilaksanakan sekali setiap bulan dan dihadiri oleh:
a) Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Sekretaris Dewan Komisaris; b) Pihak lain yang diminta kehadirannya dalam rapat atau diundang oleh Dewan Komisaris.

The policy regarding the types of meetings, meeting mechanisms including meeting frequency is regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners, which refers to the Company's Articles of Association and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023. In line with this policy, the Board of Commissioners Meetings consist of:

1. Internal Board of Commissioners' Meetings held monthly and attended by the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Committees.
2. Board of Commissioners' Consultation Meetings, which invite the Board of Directors, held once a month and attended by: (a) Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary, and Secretary to the Board of Commissioners; (b) Other parties requested to attend the meeting or invited by the Board of Commissioners.



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh:

1. Komisaris Utama; atau
2. Usul sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah Komisaris; atau
3. Permintaan tertulis dari Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) saham Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris ini bersifat segera dan/atau strategis, yang memerlukan pengambilan keputusan mendesak.

Board of Commissioners Meetings may be held outside the regular schedule if deemed necessary by:

1. The President Commissioner; or
2. A proposal by at least $\frac{1}{3}$ (one-third) of the total Commissioners; or
3. A written request from Shareholders owning at least $\frac{1}{3}$ (one-third) of the Company's shares.

These Board of Commissioners Meetings are considered urgent and/or strategic, requiring immediate decision-making.

Kebijakan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Policy on the Board of Commissioners' Meeting Frequency

Kebijakan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris diatur *Board Manual* Dewan Komisaris, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) bulan.
2. Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk hadir dalam Rapat Dewan Komisaris sekali dalam 1(satu) bulan.

Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Komisaris. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang Komisaris yang tidak hadir hanya dapat diwakili oleh seorang Komisaris lainnya.
2. Kuasa diberikan dengan surat kuasa yang khusus untuk keperluan tersebut. Surat kuasa tersebut harus dilampirkan dalam risalah rapat sebagai bukti pemenuhan kuorum rapat.

The policy on the Board of Commissioners' meeting frequency is regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners, as follows:

1. The Board of Commissioners meetings are held at least once every 1(one) month.
2. The Board of Commissioners invites the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meetings once every 1(one) month.

The Board of Commissioners meetings are considered valid and can make binding decisions if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total members of the Board of Commissioners. A Commissioner may be represented in the Board of Commissioners meeting under the following conditions:

1. A Commissioner who is absent may only be represented by another Commissioner.
2. The power of attorney must be granted by a special power of attorney for this purpose. The power of attorney must be attached to the meeting minutes as proof of meeting quorum fulfillment.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 51 kali dengan rincian 7 (Tujuh) kali Rapat internal, 32 kali Rapat dengan Direktur Tertentu/Terkait, dan 12 kali Rapat Konsultasi selama tahun 2024. Selain itu Dewan Komisaris juga telah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 51 (fifty-one) meetings with details of 7 (seven) internal meetings, 32 meetings with certain/relevant directors, and 12 consultation meetings. Furthermore, the Board of Commissioners also attended the Annual General Meeting of Shareholders with the following attendance level:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Internal, Konsultasi dan Rapat dengan Direksi Tertentu/terkait

Attendance Rate of the Board of Commissioners in Internal Meetings, Consultations and Meetings with Specific/Related Directors

Nama dan Jabatan Name and Position	Periode Jabatan Tenure	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners in Board of Commissioners' Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Bersama Seluruh Direksi (Rapat Konsultasi) Attendance of the Board of Commissioners in the Joint Meeting of All Directors (Consultation Meeting)			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat dengan Direksi Terkait/Tertentu Attendance of Board of Commissioners in Meetings withRelated/Certain Board of Directors		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Man-datory Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten-dance	Tingkat Kehad-iran Atten-dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Man-datory Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten-dance	Tingkat Kehad-iran Atten-dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Man-datory Meetings	Jumlah Kehad-iran Number of Atten-dance	Tingkat Kehad-iran Atten-dance Rate
Dewan Komisaris yang Menjabat Per 31 Desember 2024 Board of Commissioners Serving as of December 31, 2024										
Burhanuddin Abdullah (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner)	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	3	2	67%	5	5	100%	10	6	60%
Suahasil Nazara (Wakil Komisaris Utama)* (Vice President Commissioner)*	Periode Pertama: 23 Desember 2019 - 23 Desember 2024 dan Periode Kedua: 14 November 2024-14 November 2028 First Period: December 23, 2019 - December 23, 2024 and Second Period: November 14, 2024 - November 14, 2028	7	4	57%	12	10	83%	32	15	45%
Susiwijono Moegiarso (Komisaris) (Commissioner)	16 Juli 2021-16 Juli 2026 July 16, 2021 – July 16, 2026	7	6	86%	12	9	75%	32	17	53%
Dadan Kusdiana (Komisaris) (Commissioner)	21 Sept 2022-21 Sept 2027 September 21, 2022 – September 21, 2027	7	6	86%	12	11	92%	32	21	66%
Mutanto (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	3	3	100%	5	5	100%	10	10	100%
Andi Arief (Komisaris Independen)** (Independent Commissioner)**	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	3	1	33%	5	4	80%	10	1	10%

Keterangan:

* diangkat kembali pada 14 Nov 2024

** Ybs sedang menjalani pengobatan

Remarks:

* reappointed on November 14, 2024

** He is currently undergoing treatment



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Periode Jabatan Tenure	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners in Board of Commissioners' Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Bersama Seluruh Direksi (Rapat Konsultasi) Attendance of the Board of Commissioners in the Joint Meeting of All Directors (Consultation Meeting)			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat dengan Direksi Terkait/Tertentu Attendance of Board of Commissioners in Meetings with Related/Certain Board of Directors		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Aminuddin Maruf (Komisaris) (Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
Yazid Fanani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
Ali Masykur Musa (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
Jisman Parada Hutajulu (Komisaris) (Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024 Attendance Average Rate of the Board of Commissioners as of December 31, 2024				83%		93%		73%		
Dewan Komisaris yang Berhenti Menjabat Sebelum Per 31 Desember 2024 Board of Commissioners who cease to serve before December 31, 2024										
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	20 Sept 2023-23 Juli 2024 September 20, 2023 – July 23, 2024	4	4	100%	7	7	100%	22	21	95%
Mohamad Ikhsan (Komisaris) (Commissioner)	26 Des 2019-14 Nov 2024 December 26, 2019 – November 14, 2024	6	6	100%	11	10	91%	30	28	93%
Dudy Purwagandhi (Komisaris) (Commissioner)	16 Jan 2021-21 Okt 2024 January 16, 2021 – October 21, 2024	6	5	83%	11	7	64%	30	19	63%
Tedi Bharata (Komisaris) (Commissioner)	25 Maret 2022-19 Maret 2024 March 25, 2022 – March 19, 2024	3	3	100%	2	1	50%	8	4	50%

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Periode Jabatan Tenure	Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance of Board of Commissioners in Board of Commissioners' Internal Meetings			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Bersama Seluruh Direksi (Rapat Konsultasi) Attendance of the Board of Commissioners in the Joint Meeting of All Directors (Consultation Meeting)			Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat dengan Direksi Terkait/Tertentu Attendance of Board of Commissioners in Meetings with Related/Certain Board of Directors		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Man- datory Meetings	Jumlah Kehad- iran Number of Atten- dance	Tingkat Kehad- iran Atten- dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Man- datory Meetings	Jumlah Kehad- iran Number of Atten- dance	Tingkat Kehad- iran Atten- dance Rate	Jumlah Wajib Rapat Number of Man- datory Meetings	Jumlah Kehad- iran Number of Atten- dance	Tingkat Kehad- iran Atten- dance Rate
Nawal Nely (Komisaris) (Commissioner)	19 Maret 2024-14 Nov 2024 March 19, 2024 - November 14, 2024	3	2	67%	9	8	89%	21	15	71%
Charles Sitorus (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	22 Juli 2022-29 Okt 2024 July 22, 2022 -October 29, 2024	6	6	100%	11	11	100%	30	29	97%
Arcandra Tahar (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	20 Sep 2023-10 Nov 2024 September 20, 2023 - November 10, 2024	6	5	83%	11	10	91%	30	28	93%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Sebelum 31 Desember 2024 Average Attendance Rate of the Board of Commissioners Before December 31, 2024				90%			84%			80%

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yaitu dengan agenda Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2024.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 51 (fifty-one) meetings with details of 7 (seven) internal meetings, 32 meetings with certain/relevant directors, and 12 consultation meetings. Furthermore, the Board of Commissioners also attended the Annual General Meeting of Shareholders with the following attendance level:



Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan	Periode Jabatan Tenure	Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Attendance of Board of Commissioners in the GMS		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Dewan Komisaris yang Menjabat Per 31 Desember 2024 Board of Commissioners Serving as of December 31, 2024				
Burhanuddin Abdullah (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) (President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner)	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	1	1	100%
Suahasil Nazara (Wakil Komisaris Utama) (Vice President Commissioner)	Periode Pertama: 23 Desember 2019 – 23 Desember 2024 dan Periode Kedua: 14 November 2024-14 November 2028 Periode Pertama: 23 Desember 2019 – 23 Desember 2024 dan Periode Kedua: 14 November 2024-14 November 2028	2	1	50%
Susijijono Moegiarso (Komisaris)(Commissioner)	16 Juli 2021-16 Juli 2026 July 16, 2021 – July 16, 2026	2	2	100%
Dadan Kusdiana (Komisaris)(Commissioner)	21 Sept 2022-21 Sept 2027 September 21, 2022 – September 21, 2027	2	2	100%
Mutanto Juwono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	1	1	100%
Andi Arief (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	23 Juli 2024-23 Juli 2029 July 23, 2024 – July 23, 2029	1	1	100%
Aminuddin Ma'ruf (Komisaris)(Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	Belum menjabat Sebagai Dewan Komisari PT PLN (Persero) saat RUPS LPT dan RKAP berlangsung Not Serving as a member of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) at the time the AGM RKAP Meetings were held		
Yazid Fanani (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029			
Ali Masykur Musa (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029			
Jisman Parada Hutajulu (Komisaris)(Commissioner)	14 Nov 2024-14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029			

Nama dan Jabatan Nama dan Jabatan	Periode Jabatan Tenure	Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Attendance of Board of Commissioners in the GMS		
		Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Komisaris yang Berhenti Menjabat sebelum Per 31 Desember 2024 Commissioners Resigned as of December 31, 2024				
Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Komisaris Utama dan Komisaris Independen) (President Commissioner and Independent Commissioner)	20 Sept 2023-23 Juli 2024 September 20, 2023 – July 23, 2024	1	1	100%
Mohamad Ikhsan (Komisaris)(Commissioner)	26 Des 2019-14 Nov 2024 December 26, 2019 – November 14, 2024	2	2	100%
Dudy Purwagandhi (Komisaris)(Commissioner)	16 Jan 2020-21 Okt 2024 January 16, 2021 – October 21, 2024	2	1	50%
Tedi Bharata (Komisaris)(Commissioner)	25 Maret 2022-19 Maret 2024 March 25, 2022 – March 19, 2024	1	1	100%
Nawal Nely (Komisaris)(Commissioner)	19 Maret 2024-14 Nov 2024 March 19, 2024 – November 14, 2024	2	2	100%
Charles Sitorus (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	22 Juli 2022-29 Okt 2024 July 22, 2022 – October 29, 2024	2	2	100%
Arcandra Tahar (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	20 Sep 2023-10 Nov 2024 September 20, 2023 – November 10, 2024	2	2	100%

Rekomendasi dan Persetujuan/Keputusan Dewan komisaris

Recommendation and Approval/Decisions of Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengeluarkan 15 Persetujuan dan 3 Rekomendasi, yang mencakup antara lain:

Throughout 2024, the Board of Commissioners issued 15 Approvals, and 3 Recommendations, which include, among others:

Keterangan Description	Perihal Subject
Persetujuan / Keputusan Approval/Decisions	- Persetujuan Tanda Tangan Komisaris Utama atas Laporan PMN III Tahun 2023 - Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dan Material PT PLN (Persero) - Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi SPI Tahun 2024 - Persetujuan dewan komisaris atas hasil penilaian wajar properti Investasi tahun 2023 PT PLPN (Persero)
	- Approval of the President Commissioner's Signature on the 2023 PMN III Report - Response to the Request for Approval of the Write-Off Proposal for Non-Operating Fixed Assets (ATTB) and Materials of PT PLN (Persero) - Approval of the 2024 Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT) of SPI - Approval of the Board of Commissioners on the Fair Valuation Results of Investment Property for 2023 of PT PLN (Persero)



Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Keterangan Description	Perihal Subject
	5. Persetujuan Dokumen Rencana Kedaruratan (<i>Contingency Plan</i>) Tahun 2024 6. Persetujuan Tanda Tangan Komisaris Utama untuk Laporan PMN Triwulan I Tahun 2024 7. Tanggapan atas permohonan Persetujuan dari Komite Audit Atas AUP APFS IsDB tahun 2023 oleh PWC 8. Tanggapan Tertulis Atas Permohonan Persetujuan Pendanaan RBL AICET <i>Phase-1</i> 9. Tanggapan Tertulis Dekom atas Permohonan Persetujuan Pendanaan RBL AICET <i>Phase-1</i> 10. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Laporan audit Intern Triwulan II Tahun 2024 11. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pendanaan IDR <i>Term Loan Facility</i> 12. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pendanaan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V 13. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Laporan Audit Intern Triwulan III Tahun 2024 14. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Tertulis atas Usulan Penghapusbukuan ATTB dan Material PT PLN (Persero) (<i>Batch IV</i> Tahun 2024) 15. Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi SPI Tahun 2025 5. Approval of the 2024 Emergency Plan (Contingency Plan) Document 6. Approval of the President Commissioner's Signature for the Q1 2024 PMN Report 7. Response to the Audit Committee's Request for Approval of the AUP APFS IsDB 2023 by PWC 8. Written Response to the Request for Approval of RBL AICET Phase-1 Funding 9. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Approval of RBL AICET Phase-1 Funding 10. Response to the Request for Approval of the Q2 2024 Internal Audit Report 11. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Approval of IDR Term Loan Facility Funding 12. Written Response from the Board of Commissioners to the Request for Approval of Funding through the Sustainable Public Offering (PUB) V 13. Response to the Request for Approval of the Q3 2024 Internal Audit Report 14. Response to the Request for Written Approval of the Proposal for Write-Off of ATTB and Materials of PT PLN (Persero) (<i>Batch IV</i> Year 2024) 15. Approval of the 2025 Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT) of SPI
Rekomendasi Recommendations	1. Tanggapan Atas Usulan Rekomendasi Penunjukan Lembaga Pemeringkatan untuk peringkat kesehatan perusahaan PT PLN (Persero) tahun buku 2023 2. Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) Berupa Tanah Milik PLN Kantor Pusat di Desa Binorong Kab Banjarnegara Jateng 3. Rekomendasi Perubahan PDP-DPPLN dan Pemberian Manfaat Pensiun ke-13 1. Response to the Proposed Recommendation for the Appointment of a Rating Agency for the Corporate Soundness Level of PT PLN (Persero) for Fiscal Year 2023 2. Recommendation on the Proposal for the Write-Off and Disposal of Non-Operating Fixed Assets (ATTB) in the Form of PLN-Owned Land at the Head Office in Binorong Village, Banjarnegara Regency, Central Java 3. Recommendation on the Amendment to PDP-DPPLN and the Provision of the 13th Pension Benefit

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Visits

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja pada 2024 dengan uraian sebagai berikut:

As part of its supervisory function, the Board of Commissioners conducted working visits in 2024 with the following details:

No.	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda
1	12 Januari 2024 January 12, 2024	Batam	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris PLN Batam Work Visit of PLN Board of Commissioners to Batam
2	18 Januari 2024 January 18, 2024	Depok, Jawa Barat Depok, West Java	Kunjungan Kerja PLN UIP2B Jamali Work Visit to PLN UIP2B Jamali

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Tempat Location	Agenda
3	17-19 Mei 2024 May 17-19, 2024	Surabaya dan UP3 Jember Surabaya and UP3 Jember	Kunjungan Kerja ke UID Surabaya dan UP3 Jember Work Visit to UID Surabaya and UP3 Jember
4	14 Juni 2024 June 14, 2024	Jakarta	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris UP3 Bulungan Work Visit of Board of Commissioners to UP3 Bulungan
5	18-19 Juni 2024 June 18 - 19, 2024	Bandung	Undangan Diskusi perihal PLTMH Universitas Andalas dan Site Visit Pushharlis Invitation to Discussion regarding Mini Hydropower Plant (PLTMH) at Andalas University and Pushharlis Site Visit
6	30 Juni-02 Juli 2024 June 30 - July 2, 2024	Lombok	Kunjungan Kerja ke PLTU Lombok Timur dan PLTU Lombok FTP-2 Work Visit to PLTU Lombok Timur and PLTU Lombok FTP-2
7	11 Juli 2024 July 11, 2024	Cilegon	Kunjungan Kerja PLTU Suralaya 1-10 dan IPP PLTU Jawa 7 Work Visit to PLTU Suralaya Units 1-10 and IPP PLTU Jawa 7
8	01-03 Agustus 2024 August 1 - 3, 2024	UID Bali	Site Visit PT PLN (Persero) UID Bali dan FGD KBUMN dengan Komisi VI DPR RI Site Visit to PT PLN (Persero) UID Bali and Focus Group Discussion (FGD) KBUMN with Commission VI of Indonesian House of Representatives (DPR RI)
9	15-18 September 2024 September 15 - 18, 2024	Papua New Guinea	Kunjungan Kerja ke PLNB Skouw - Papua New Guinea Work Visit to PLNB Skouw - Papua New Guinea
10	19-21 September 2024 September 19 - 21, 2024	Solo, dan Yogyakarta	Kegiatan Kunjungan ke Pelanggan Rumah Tangga Customer Visit Activities to Household Customers
11	25 September 2024 September 25, 2024	Depok, Jawa Barat	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Icon+ Gandul Work Visit of Board of Commissioners to Icon+ Gandul
12	26-28 September 2024 September 26 - 28, 2024	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java	Kajian Pekerjaan Sipil Perbaikan PLTMH Unand Study on Civil Works Repair of PLTMH Unand
13	30 September-07 Oktober 2024 September 30, October 7, 2024	Abu Dhabi	Kunjungan Kerja Komisaris Utama ke Abu Dhabi Work Visit of the President Commissioner to Abu Dhabi
14	28 Nov-01 Des 2024 November 8 - December 1, 2024	Balikpapan, dan IKN Balikpapan and IKN	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PLN Nusantara (IKN) Work Visit of Board of Commissioners to PLN Nusantara (IKN)
15	28-29 November 2024 November 28-29, 2024	Pekanbaru	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke PLN P3B Sumatera Work Visit of Board of Commissioners to PLN P3B Sumatera
16	03-06 Desember 2024 December 3-6, 2024	Bali	Kunjungan Kerja Komisaris Utama ke Bali Work Visit of the President Commissioner to Bali
17	19-22 Desember 2024 December 19-22, 2024	Solo	Supervisi dan Inspeksi Jaringan Transmisi dan Distribusi di Solo Supervision and Inspection of Transmission and Distribution Network in Solo



Kebijakan dan Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris

Policy and Implementation of Board of Commissioners' Training

Kebijakan pelatihan atau pengembangan kompetensi dan kapabilitas Dewan Komisaris PT PLN (Persero) diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris. Program pengembangan atau peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dilakukan untuk mengikuti perkembangan terkini dari aktivitas Perseroan serta pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

Program peningkatan kompetensi dapat berupa pelatihan, training, seminar, atau benchmarking ke perusahaan lain, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Program pengembangan ini dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris, berdasarkan rencana yang disusun oleh Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, terdapat pelaksanaan pelatihan Dewan Komisaris yang diwakili oleh Sdr. Mohamad Ikhsan pada tanggal 20-29 Agustus 2024 di MIT, Boston, USA dengan tema pelatihan Driving Strategic Innovation.

The policy on training or development of competence and capability for the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) is regulated in the Board Manual of the Board of Commissioners. The development or enhancement program for the competence of the Board of Commissioners and supporting organs is carried out to keep up with the latest developments in the Company's activities as well as other knowledge related to the implementation of the Board of Commissioners' duties. The main objective of this program is to improve the competence and capability of the Commissioners in carrying out their functions, duties, and responsibilities.

The competence development program can take the form of training, seminars, workshops, or benchmarking visits to other companies, according to the Company's needs. This development program is outlined in the Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners, based on plans prepared by the Commissioners or the supporting organs of the Board of Commissioners.

In 2024, there was a training held for the Board of Commissioners, represented by Mr. Mohamad Ikhsan on August 20-29, 2024 at MIT, Boston, USA with the training theme Driving Strategic Innovation.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Committees Under the Board of Commissioners

Sejalan dengan yang diatur dalam Board Manual Dewan Komisaris, salah satu tugas Dewan Komisaris adalah melakukan penilaian atau evaluasi kinerja Direksi dan Komite di Bawah Dewan Komisaris.

In line with the provisions set forth in the Board Manual of the Board of Commissioners, one of the duties of the Board of Commissioners is to conduct performance assessments or evaluations of the Board of Directors and Committees under the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris merujuk pada:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero); dan
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris.

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) Dewan Komisaris.

The policy on performance assessment of the Board of Commissioners refers to:

1. Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (SOEs);
2. The Articles of Association of PT PLN (Persero); and
3. The Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The performance of the Board of Commissioners is evaluated by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) based on the achievement of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPIs).

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Criteria for Performance Assessment of the Board of Commissioners

Penilaian kinerja Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan
 - Melakukan pembahasan dan penyusunan rencana kerja serta KPI Dewan Komisaris
2. Aspek Pengawasan & Pemberian Nasehat
 - Memberikan persetujuan/ tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap RKAP tahun 2024
 - Memberikan persetujuan/ tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap Laporan Tahunan 2023
 - Memberikan persetujuan/ tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap Laporan Manajemen Triwulanan
 - Memberikan persetujuan atau nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris
 - Melaksanakan rapat Dewan Komisaris
 - Tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris
 - Menyelesaikan risalah rapat Dewan Komisaris

The performance assessment of the Board of Commissioners uses several criteria as follows:

1. Planning Aspect
 - Conducting discussions and preparation of the Board of Commissioners' work plan and KPIs
2. Supervision & Advice Aspect
 - Providing approval/ response/ recommendation to Shareholders regarding the 2024 Business Plan and Budget (RKAP)
 - Providing approval/ response/ recommendation to Shareholders regarding the 2023 Annual Report
 - Providing approval/ response/ recommendation to Shareholders regarding the Quarterly Management Reports
 - Providing approval or advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners
 - Conducting meetings of the Board of Commissioners
 - Attendance rate of Commissioners at Board of Commissioners meetings
 - Completing minutes of the Board of Commissioners meetings



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

- Melaksanakan rapat Komite-Komite Dewan Komisaris dengan Direksi atau Unit Terkait (KA:24 kali, KMR:24 Kali, KNR:6 Kali, Komite Tata Kelola Terintegrasi:4 Kali)
 - Melaksanakan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
 - Realisasi Rencana Kerja Komite-Komite Dewan Komisaris
3. Aspek Pelaporan
- Laporan realisasi KPI Dewan Komisaris tiap semesteran atas pelaksanaan TJSL Perusahaan kepada Pemegang Saham
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan TJSL Perusahaan kepada Pemegang Saham
4. Dinamis
- Penyampaian usulan penetapan KAP tahun buku 2024 kepada Pemegang Saham
 - Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dengan mengikuti seminar/ *workshop benchmarking*
 - Pencapaian nilai implementasi GCG Dewan Komisaris tahun 2024
- Conducting meetings of the Board Committees with the Board of Directors or related units (Audit Committee (KA): 24 times, Risk Management Committee (KMR): 24 times, Nomination & Remuneration Committee (KNR): 6 times, Integrated Governance Committee (KTKT): 4 times)
 - Conducting work visits of the Board of Commissioners
 - Realization of the work plan of the Board of Commissioners Committees
3. Reporting Aspect
- Reports on the realization of the Board of Commissioners' KPIs each semester regarding the implementation of the Company's TJSL programs to Shareholders
 - Supervision reports of the Board of Commissioners to Shareholders
 - Supervision reports of the Board of Commissioners on the implementation of the Company's TJSL to Shareholders
4. Dynamic Aspect
- Submission of proposals for appointment of Public Accounting Firm (KAP) for the 2024 fiscal year to Shareholders
 - Implementation of competency enhancement activities for the Board of Commissioners by participating in seminars, workshops, or benchmarking
 - Achievement of the Board of Commissioners' Good Corporate Governance (GCG) implementation score in 2024

Hasil dan Penyampaian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Results and Presentation of the Board of Commissioners' Performance Assessment

Pencapaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian KPI Dewan Komisaris yaitu 92% dari target 100%. KPI yang tidak tercapai yaitu Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dengan mengikuti seminar/ *workshop/benchmarking* dengan target 2 kegiatan per setiap komisaris. Realisasinya hanya tercapai 6 kegiatan dari yang seharusnya 20 kegiatan. Hal ini dikarenakan kesibukan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menyampaikan realisasi KPI Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham secara semesteran.

The performance achievement of the Board of Commissioners in 2024 reached 92% of the 100% target. The KPI that was not met was the implementation of competency enhancement activities for the Board of Commissioners by attending seminars, workshops, or benchmarking, with a target of 2 activities per commissioner. The actual realization was only 6 activities out of the target of 20 activities. This was due to the busy schedule of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners submits the realization of its KPIs to the Shareholders on a semi-annual basis.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Penilaian Kinerja Direksi

Performance Evaluation of the Board of Directors

Kebijakan penilaian kinerja Direksi merujuk pada:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Anggaran Dasar PT PLN (Persero); dan
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators/KPI*) Direksi babik kolega maupun individu yang selanjutnya realisasi pencapaian KPI tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham.

The policy for assessing the performance of the Board of Directors refers to:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (SOEs);
2. The Articles of Association of PT PLN (Persero); and
3. The Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners.

The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners based on the achievement of the Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors, both collegial and individual, with the realization of these KPI achievements subsequently reported to the Shareholders.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Performance Evaluation Criteria for the Board of Directors

Berikut kriteria/Indikator penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI Kolegal dan Individual:

The following are the criteria/indicators for evaluating the performance of the Board of Directors based on collegial and individual KPIs:

Indikator Indicator	KM/DU	DIR KEU	DIR LHC	DIR RENBANG	DIR RETAIL	DIR MPRO	DIR MKIT	DIR TRANS	DIR DIST	DIR MRO
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia <i>Economic and Social Value for Indonesia</i>										
Finansial <i>Financial</i>										
1. EBITDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. ROIG- WACC	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
3. <i>Interest Bearing Debt to EB/TOA</i>	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4. <i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 <i>Completion and Submission of the 2023 Audited Financial Statements</i>	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Operasional <i>Operasional</i>										
6. <i>Distribution Efficiency Rate</i>	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
7. Rasio Elektrifikasi Nasional <i>National Electrification Ratio</i>	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

**Dewan Komisaris**
Board of Commissioners

Indikator Indicator	KM/DU	DIR KEU	DIR LHC	DIR RENBANG	DIR RETAIL	DIR MPRO	DIR MKIT	DIR TRANS	DIR DIST	DIR MRO
8. Penyelesaian <i>Roadmap Energy Transition (Green RUPTL)</i> Completion of Energy Transition Roadmap (Green RUPTL)	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
9. Penyelesaian program Dieselisasi Completion of Dieselization Program	✓	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
10. Penyelesaian Program Gasifikasi Completion of Gasification Program	✓	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation										
11. Optimasi <i>Holding Subholding</i> Optimization of Holding and Subholding	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
12. Peningkatan Pendapatan <i>Beyond kWh</i> Increase in Revenue Beyond kWh	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X
13. Dukungan infrastruktur Kendaraan Listrik melalui Peningkatan Jumlah SPKLU Support for Electric Vehicle Infrastructure through Increasing the Number of SPKLU	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
14. Jumlah Transaksi melalui PLN Mobile Number of Transactions through PLN Mobile	✓	X	X	X	✓	X	X	X	X	X
15. Implementasi <i>Roadmap</i> Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Roadmap for Improving Risk Management Application	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
C. Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership										
16. SAIDI (<i>System Average Interruption Duration Index</i>)	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X
17. SAIFI (<i>System Average Interruption Frequency Index</i>)	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Indikator Indicator	KM/DU	DIR KEU	DIR LHC	DIR RENBANG	DIR RETAIL	DIR MPRO	DIR MKIT	DIR TRANS	DIR DIST	DIR MRO
18. Pencapaian Program <i>Green Enabling Super Grid</i> Achievement of the Green Enabling Super Grid Program	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
19. Pencapaian Program <i>Green Enabling Smart Grid</i> Achievement of the Green Enabling Smart Grid Program	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X
D. Peningkatan Investasi Investment Improvement										
20. Realisasi PMN PMN Realization	✓	X	X	X	X	✓	X	X	X	X
21. Jumlah tambahan kapasitas pembangkit EBT Additional capacity of NRE power plants	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	X
E. Pengembangan Talenta Pengembangan Talenta										
22. Rasio <i>Top Talent</i> Milenial (<=42 tahun dalam <i>Nominated Talent</i>) Ratio of Millennial Top Talent (<=42 years old) in Nominated Talent	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X
23. Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Women in Nominated Talent	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X
24. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Ratio of Compliance with Risk Management Organ Qualifications	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	✓
25. Implementasi <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun Implementation of the Pension Fund Recovery Roadmap	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Keterangan: Remarks:

KM/DU	DIR KEU	DIR TRANS	DIR LHC	DIR RETAIL	DIR RENBANG	DIR MPRO	DIR MKIT	DIR DIS	DIR MRO
Kontrak Manajemen/ Direktur Utama Management Contract/ President Director	Direktur Keuangan Director of Finance	Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Director of Transmission and System Planning	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital Director of Legal and Human Capital Management	Direktur Retail dan Niaga Director of Retail and Commerce	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Director of Corporate Planning and Business Development	Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Director of Management Project and New and Renewable Energy	Direktur Manajemen Pembangkitan Director of Power Plant Management	Direktur Distribusi Director of Distribution	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management
✓	Menjadi Kriteria Penilaian Considered as Assessment Criteria								
X	Tidak Menjadi Kriteria Penilaian Not Considered as Assessment Criteria								

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Hingga akhir Desember 2024, Dewan Komisaris PT PLN (Persero) memiliki Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Penilaian terhadap Komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap tahun sekali, berdasarkan kriteria penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan realisasi rencana kerja Komite. Informasi lebih lanjut terkait hasil penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dijelaskan pada bab masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

As of the end of December 2024, the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) had established the Audit Committee, the Risk Management Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Integrated Governance Committee. The Board of Commissioners conducts an annual evaluation of these Committees based on criteria such as the execution of duties and responsibilities, meeting implementation, and realization of the Committees' work plans. Further information regarding the evaluation results of the Committees under the Board of Commissioners is provided in the respective chapters on each Committee in this Annual Report.



Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Work Relation Between Board of Directors and Board of Commissioners

Kebijakan yang mengatur hubungan antara Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2022. Ruang lingkup yang diatur dalam Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris mencakup antara lain:

1. Tata Laksana Kerja Terkait Jabatan;
2. Tata Laksana Kerja Terkait Batas Kewenangan;
3. Tata Laksana Kerja Terkait Pelaksanaan dan Pengawasan Operasional Perusahaan;
4. Alur Kerja Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris dan Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS Setelah Mendapatkan Tanggapan Tertulis dan Dewan Komisaris.

Board Manual Direksi dan Dewan Komisari Perseroan juga dapat diakses melalui *website* <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

Sejalan dengan kebijakan tersebut Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional Perseroan, termasuk penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan kinerja. Sementara itu, Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil oleh Direksi, memastikan bahwa semua kebijakan yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung kepentingan Perseroan.

The policy governing the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is outlined in the 2022 Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners. The scope covered in the Board Manual includes, among others:

1. Board Manual Related to Positions;
2. Board Manual Related to Authority Limits;
3. Board Manual Related to the Implementation and Supervision of Company Operations;
4. Workflow of the Board of Directors' Authorities Requiring Approval from the Board of Commissioners and Authorities Requiring Approval from the General Meeting of Shareholders (GMS) After Receiving a Written Response from the Board of Commissioners.

The Board Manual of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is also accessible via the website: <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>

In line with this policy, the Board of Directors is responsible for managing the Company's operations, including the preparation of annual work plans and performance reports. Meanwhile, the Board of Commissioners plays a supervisory role in overseeing the implementation of decisions made by the Board of Directors, ensuring that all policies are executed in accordance with applicable regulations and in the best interests of the Company.

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Diversity Policy of the Board of Directors and Board of Commissioners

Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui mekanisme RUPS oleh Pemegang Saham. Komposisi saat ini telah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris C.q Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana komposisi tersebut memenuhi standar keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi latar belakang pengalaman, keahlian, usia, gender dan independensi.

The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined through the GMS mechanism by the Shareholders. The current composition has considered the recommendation of the Board of Commissioners c.q. the Nomination and Remuneration Committee, and it meets the diversity standards for the Board of Directors and the Board of Commissioners, which include diversity in background, expertise, age, gender, and independence.



Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Diversity Policy of the Board of Directors and Board of Commissioners

Praktik keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sejalan dengan standar SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta sejalan dengan *Asean Corporate Governance Scorecard* yang ditetapkan oleh *Asean Capital Market Forum* (ACMF).

The Company's practice of diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is in line with the standards set out in OJK Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines for the Governance of Public Companies, as well as aligned with the ASEAN Corporate Governance Scorecard established by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

Keberagaman ini bertujuan untuk mendukung agar kepemimpinan Perseroan dilaksanakan secara profesional, efektif, dan akuntabel. Selain itu, pemenuhan aspek keberagaman juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, dapat diwakili dengan lebih baik, sehingga menciptakan kepercayaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

This diversity aims to support the management of the Company in a professional, effective, and accountable manner. Furthermore, fulfilling diversity aspects also aims to ensure that the interests of both internal and external stakeholders are better represented, thereby fostering trust and transparency in the decision-making process.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The diversity composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, can be seen in the following table:

No.	Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Realisasi Realization
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
1	Usia Age	• Usia 35 - 40 tahun 1 orang; • Usia 41 - 60 tahun 6 orang; dan • Usia 60 - 70 tahun 1 orang. • Usia 70 - 80 tahun 2 orang
2	Pendidikan Education	• The educational backgrounds of the members of the Board of Commissioners include Bachelor's, Master's, and Doctoral degrees in various fields such as Management, Economics, Politics, Business, Engineering, Law, Agricultural Mechanics, Science, Business Law, and Energy.
3	Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya diantaranya pada bidang Ekonomi, Keuangan, Ekonomi Nasional, Kebijakan Fiska, Audit, SDM, New Renewable Energy and Energy Conservation, Ketenagalistrikan, Teknologi Informasi dan Hukum
4	Independensi Independence	• 5 (lima) Komisaris Independen; dan • 5 (lima) Komisaris
5	Keahlian Expertise	• Economics, Finance, Governance, Risk Management, Energy, Audit, Human Resources, and Law.

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Diversity Policy of the Board of Directors and Board of Commissioners

No.	Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Realisasi Realization	
Direksi Board of Directors			
1	Usia Age	• Usia 40 – 49 tahun 1 orang; dan • Usia 50 – 59 tahun 9 orang;	• Aged 40–49 years: 1 person; and • Aged 50–59 years: 9 persons;
2	Gender	• 2 (dua) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki.	• 2 (dua) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki.
3	Pendidikan Education	• Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat Sarjana, Magister dan Doktor dengan berbagai bidang Pendidikan antara lain energi, ekonomi, ilmu komputer, manajemen, bisnis, teknik elektro, engineering, hukum, listrik, teknik industry, sipil (bangunan), sastra inggris, dan teknik Mesin	• The educational backgrounds of the members of the Board of Directors include Bachelor's, Master's, and Doctoral degrees in various fields such as Energy, Economics, Computer Science, Management, Business, Electrical Engineering, Engineering, Law, Electricity, Industrial Engineering, Civil Engineering (Building), English Literature, and Mechanical Engineering.
4	Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pejabat dan/atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya diantaranya pada bidang ekonomi energi, green economy, lembaga pembiayaan ekspor, penjaminan infrastruktur, perencanaan strategis, keuangan & niaga, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, operasi, manajemen risiko, esdm, hukum, migas, batubara, portofolio, pembangkit, pengadaan, konstruksi, bisnis, dan teknologi informasi.	• Members of the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors and/or Officials and/ or Senior Executives or other key positions have expertise in areas such as Energy Economics, Green Economy, Export Financing Institutions, Infrastructure Guarantee, Strategic Planning, Finance & Commerce, Electricity R&D, Operations, Risk Management, Energy and Mineral Resources, Law, Oil and Gas, Coal, Portfolio, Power Plant, Procurement, Construction, Business, and Information Technology.
5	Keahlian Expertise	• Ekonomi, Keuangan, Manajemen, Ketenagalistrikan, Teknik dan Energi	• Economics, Finance, Management, Electricity, Engineering, and Energy.

Laporan Perkembangan atas Pencapaian Tujuan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Progress Report on the Achievement of Diversity Objectives for the Board of Directors and Board of Commissioners

Sejak implementasi kebijakan keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris, secara keseluruhan, implementasi keberagaman tersebut telah membawa dampak positif baik dalam peningkatan kinerja Perseroan maupun dalam hubungan yang lebih baik dengan *stakeholder*. Perkembangan pencapaian atas implementasi keberagaman yang dirasakan nilai tambah bagi Perseroan antara lain adalah Memberikan kontribusi positif dalam memperkaya perspektif dan menciptakan keputusan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan serta terciptanya solusi baru dalam merespons tantangan bisnis.

Since the implementation of the diversity policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners, overall, the application of diversity has a positive impact, both in improving the Company's performance and in fostering better relationships with stakeholders. The progress made in achieving diversity implementation, which has added value to the Company, includes contributing positively by enriching perspectives and enabling more measured and business-aligned decision-making, as well as the creation of new solutions in responding to business challenges.



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dalam rangka menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses nominasi, suksesi, dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan cara yang transparan dan objektif.

As an implementation of Good Corporate Governance, the Company is obligated to ensure that the processes of nomination, succession, and remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are carried out in a transparent and objective manner.

Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dalam penentuan nominasi dan suksesi anggota Direksi serta Dewan Komisaris, PT PLN (Persero) merujuk pada berbagai peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada 16 Agustus 2007;
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, yang diterbitkan pada 20 Maret 2023;
3. Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut, kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: Syarat Materil, Syarat Formal, dan Persyaratan Lain yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

In determining the nomination and succession of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, PT PLN (Persero) refers to various applicable regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, promulgated on August 16, 2007;
2. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, issued on March 20, 2023;
3. The Company's Articles of Association;
4. The Nomination and Remuneration Committee Charter.

Based on the provisions in these regulations, candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors must meet a number of established criteria, namely: Material Requirements, Formal Requirements, and Other Requirements relevant to the needs of the Company.

Syarat Anggota Direksi

Requirements for Members of the Board of Directors

1. Syarat Materil
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:
 - a. keahlian;
 - b. integritas;
 - c. kepemimpinan;
 - d. pengalaman;
 - e. jujur;
 - f. perilaku yang baik; dan
 - g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan

1. Material Requirements
To be appointed as a member of the Board of Directors, an individual must meet the following material requirements:
 - a. expertise;
 - b. integrity;
 - c. leadership;
 - d. experience;
 - e. honesty;
 - f. good conduct; and
 - g. high dedication to advancing and developing the Company.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

2. Syarat Formal

Selain memenuhi kriteria syarat materil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. orang perseorangan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara,
- f. perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3. Syarat Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

- a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
- c. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
- f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

2. Formal Requirements

In addition to meeting the material criteria, to be appointed as a member of the Company's Board of Directors, an individual must also fulfill the following formal requirements:

- a. an individual person;
- b. legally competent to perform legal acts;
- c. has not been declared bankrupt within the last 5 (five) years prior to the appointment;
- d. has not previously served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment; and
- e. has never been convicted of a criminal offense causing financial loss to the state,
- f. a company, other business entities, and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the appointment.

3. Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Directors, in addition to fulfilling material and formal requirements, an individual must also meet the following additional requirements:

- a. not a political party official, legislative candidate, and/or a member of the legislature at the House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council (DPD), Provincial Regional House of Representatives (DPRD), or Regency/Municipal Provincial Regional House of Representatives;
- b. not a candidate for regional head/deputy regional head and/or a serving regional head/deputy regional head, including acting regional heads/deputies;
- c. not serving as a member of the Board of Directors in the relevant SOE or its subsidiary for more than 2 (two) tenures;
- d. not currently serving as an official in a ministry/agency, a member of the Board of Commissioners/Supervisors of another SOE, a member of the Board of Directors of another SOE, or a member of the Board of Directors of a subsidiary and/or other business entity;
- e. not currently holding a position which, under applicable laws and regulations, is prohibited from being held concurrently with a position as a member of the Board of Directors;
- f. having the dedication and willingness to fully commit time to carry out duties, as declared in a personal statement;



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.	g. Physically and mentally healthy, i.e., not suffering from any illness that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, proven by a health certificate from a hospital; and h. holding a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the past 2 (two) years.

Syarat Anggota Dewan Komisaris

Requirements for Members of the Board of Commissioners

1. Syarat Materil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat materil yaitu:

- a. integritas;
- b. dedikasi;
- c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2. Syarat Formal

Selain memenuhi kriteria syarat materil, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Persero, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. orang perseorangan;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

1. Material Requirements

To be appointed as a member of the Board of Commissioners, an individual must meet the following material requirements:

- a. integrity;
- b. dedication;
- c. understanding of company management issues related to at least one management function;
- d. possessing adequate knowledge in the line of business for which the person is being nominated; and
- e. being able to allocate sufficient time to perform their duties.

2. Formal Requirements

In addition to fulfilling the material requirements, to be appointed as a member of the Board of Commissioners of the SOE, an individual must meet the following formal requirements:

- a. an individual person;
- b. legally competent to perform legal acts;
- c. has not been declared bankrupt within the past 5 (five) years prior to appointment;
- d. has not served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the past 5 (five) years prior to appointment; and
- e. has never been convicted of a criminal offense causing financial loss to the state, a company, other business entities, and/or related to the financial sector within the last 5 (five) years prior to appointment.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

3. Syarat Lain

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

- a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah;
- c. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
- f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- i. bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
- j. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/ yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

3. Other Requirements

To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, in addition to meeting the material and formal requirements, an individual must also meet the following additional requirements:

- a. not a political party official, legislative candidate, and/or a member of the legislature at the House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council (DPD), Provincial Regional House of Representatives (DPRD), or Regency/Municipal DPRD;
- b. not a candidate for regional head/deputy regional head and/or a serving regional head/deputy regional head, including acting regional heads/deputies;
- c. not serving as a member of the Board of Directors in the relevant SOE or its subsidiary for more than two (2) terms;
- d. not currently serving as an official in a ministry/ agency, a member of the Board of Commissioners/ Supervisors of another SOE, a member of the Board of Directors of another SOE, or a member of the Board of Directors of a subsidiary and/or other business entity;
- e. not currently holding a position that, under applicable laws and regulations, is prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Board of Commissioners;
- f. having the dedication and willingness to fully commit time to carry out duties, as declared in a personal statement;
- g. physically and mentally healthy, i.e., not suffering from any illness that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, proven by a health certificate from a hospital;
- h. holding a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the past 2 (two) years;
- i. for prospective candidates from technical ministries or other government agencies, a nomination letter from the head of the relevant institution is required;
- j. for prospective members of the Board of Commissioners who are state officials, submission of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) for the past 2 (two) years, proven by proof of submission to the competent authority, is required.



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Proses Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination Process for the Board of Directors and Board of Commissioners

PT PLN (Persero) melaksanakan kebijakan nominasi/suksesi Direksi dan Dewan Komisaris melalui beberapa tahapan. Pada tahap awal, jika pergantian Direksi dan Dewan Komisaris dinilai butuh dilakukan, Perseroan akan mengajukan kandidat internal melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh panitia *ad hoc*, yang difasilitasi oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Kandidat yang terpilih dalam proses tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Setelah melalui proses tersebut, hasil uji kelayakan dan kepatutan akan diserahkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan resmi atas calon yang dipilih sebagai Direksi dan Dewan Komisaris baru Perseroan.

Berikut proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero):

PT PLN (Persero) implements the nomination/succession policy for the Board of Directors and Board of Commissioners through several stages. At the initial stage, if a change in the Board of Directors and Board of Commissioners is deemed necessary, the Company will propose internal candidates through a selection process conducted by an *ad hoc* committee, facilitated by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee. The candidates selected through this process are then submitted to the Ministry for a fit and proper test. After completing this process, the results of the fit and proper test will be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) to obtain approval and official appointment of the chosen candidates as the new members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

The following is the nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors/the Nominated Talent cluster flow at PT PLN (Persero):

Alur Cluster Nominated Talent Alur Cluster Nominated Talent



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023. Pengangkatan kembali tersebut mempertimbangkan kinerja, kontribusi terhadap perusahaan, serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilihan ulang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN (Persero) may be reappointed after the end of their tenure, subject to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023. Such reappointment shall take into account their performance, contributions to the Company, and the results of evaluations conducted by the Shareholder or the General Meeting of Shareholders (GMS). The re-election shall follow the mechanisms and procedures as stipulated in the provisions regarding the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board.

Penggunaan Jasa Profesional dalam Pencarian Kandidat Direksi dan Dewan Komisaris

Engagement of Professional Services in the Search for Candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners

Dalam rangka memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis pada kompetensi serta keahlian yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, PT PLN (Persero) menggunakan jasa profesional, yaitu PT DDI (PT Daya Dimensi Indonesia), dalam proses pencarian kandidat Direksi dan Dewan Komisaris, baik berdasarkan database yang dimiliki oleh penyedia jasa, maupun dari usulan yang diberikan oleh pemegang saham.

In order to ensure that the selection process is conducted objectively, transparently, and based on the competencies and expertise required for the positions, PT PLN (Persero) engages the services of a professional firm, namely PT DDI (PT Daya Dimensi Indonesia), in the search for candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners. This process involves sourcing candidates both from the service provider's existing database and from nominations submitted by shareholders.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners

Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007;
2. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023;
3. Anggaran Dasar Perusahaan;
4. *Board Manual* Dewan Komisaris;
5. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi;
6. Surat Pemegang Saham Nomor No.SR-38/Wk.MBU.01/08/2024 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024.

The Company's remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the following provisions:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies dated August 16, 2007;
2. Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on SOE Organs and Human Resources dated March 20, 2023;
3. The Company's Articles of Association;
4. Board Manual of the Board of Commissioners;
5. Nomination and Remuneration Committee Charter;
6. Shareholders' Letter No. No. SR-38/Wk.MBU.01/08/2024 on the Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in 2024 dated August 23, 2024



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

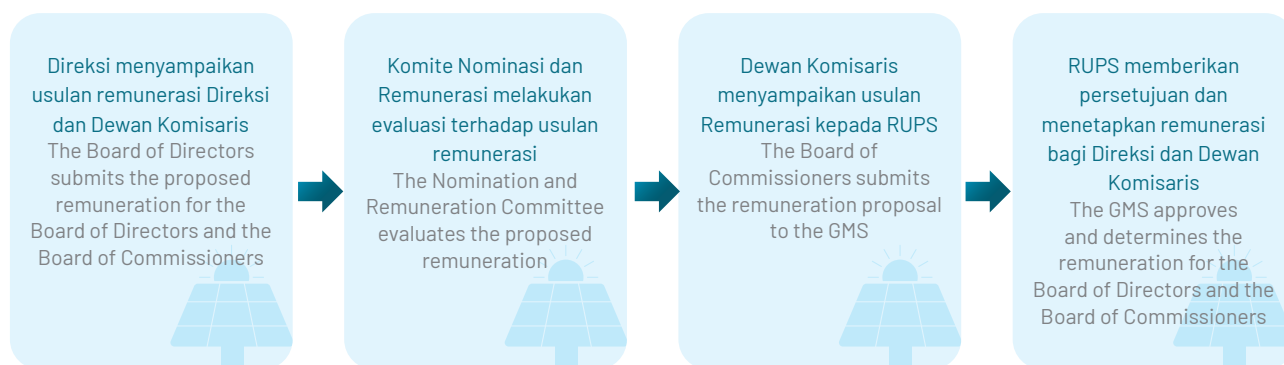
Remuneration Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors

Ketentuan mengenai besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sejalan dengan yang diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, pada 90 hari sebelum RUPS Tahunan, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menyampaikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian kinerja Perseroan. Dewan Komisaris kemudian menugaskan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap usulan remunerasi tersebut. Setelah evaluasi selesai, Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS dalam waktu 14 hari sebelum RUPS. Selanjutnya, RUPS akan membahas dan memberikan persetujuan atas usulan remunerasi yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Penetapan remunerasi tersebut menjadi keputusan resmi yang berlaku setelah disetujui dalam RUPS, dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

The provisions regarding the amount of salary or remuneration and/or allowances for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). In accordance with the Board Manual of the Board of Commissioners, 90 days prior to the Annual GMS, the Board of Commissioners requests the Board of Directors to submit a remuneration proposal for both the Board of Directors and the Board of Commissioners, based on the Company's performance achievements. The Board of Commissioners then assigns the Nomination and Remuneration Committee to evaluate the proposed remuneration. Upon completion of the evaluation, the Board of Commissioners submits the proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners to the GMS no later than 14 days before the meeting. The GMS will then deliberate and approve the proposed remuneration submitted by the Board of Commissioners. The approved remuneration becomes an official resolution effective upon GMS approval, by considering Good Corporate Governance (GCG) principles.

Berikut mekanisme remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero):

The following outlines the remuneration mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN (Persero):



Usulan remunerasi telah mempertimbangkan pencapaian kinerja Perseroan, faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor lain yang relevan, serta menggunakan faktor penyesuaian industri dengan mempertimbangkan sektor industri sejenis secara terukur (*benchmark*), kondisi persaingan usaha (*competitiveness*).

The proposed remuneration has considered the Company's performance achievements, business scale factors, business complexity factors, inflation rate, the Company's financial condition and capacity, and other relevant factors. It also uses industry adjustment factors by considering comparable industry sectors in a measurable way (*benchmarking*) and the level of business competition (*competitiveness*).

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Struktur Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pemegang Saham No.SR-38/Wk.MBU.01/08/2024 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024. adalah sebagai berikut:

The Structure of Remuneration received by the Board of Commissioners based on Shareholder Letter No. SR-38/Wk.MBU.01/08/2024 on the Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in 2024 dated August 23, 2024 is as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration Structure for the Board of Commissioners		Struktur Remunerasi Direksi Remuneration Structure for the Board of Directors	
1. Honorarium	1. Honorarium	1. Gaji	1. Salary
2. Tunjangan:	2. Allowances:	2. Tunjangan:	2. Allowances:
- Tunjangan Transportasi,	- Transportation Allowance	- Tunjangan Hari Raya,	- Holiday Allowance
- Tunjangan Hari Raya, dan	- Holiday Allowance	- Tunjangan Purna Jabatan,	- Post-Employment Allowance
- Tunjangan Purna Jabatan	- Post-Employment Allowance	- Tunjangan Perumahan.	- Housing Allowance
3. Fasilitas terdiri dari:	3. Facilities consisting of:	3. Fasilitas:	3. Facilities:
- Fasilitas Kesehatan,	- Health Facilities	- Fasilitas Kesehatan,	- Health Facilities
- Fasilitas Bantuan Hukum	- Legal Assistance Facilities	- Fasilitas Kendaraan,	- Vehicle Facilities
4. Tantiem	4. Tantiem (Bonus)	- Fasilitas Perumahan,	- Housing Facilities
		- Fasilitas Bantuan Hukum.	- Legal Assistance Facilities
		4. Tantiem	4. Tantiem (Bonus)

Penerapan LTI untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Implementation of LTI for the Board of Directors and Board of Commissioners

Hingga saat ini, Perseroan belum menerapkan skema *Long-Term Incentive* (LTI) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Ke depan, Perseroan akan terus mengevaluasi kebutuhan dan potensi implementasi skema LTI yang dapat lebih mendorong pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan dan memastikan keselarasan kepentingan antara pemegang saham dan Manajemen.

To date, the Company has not implemented a Long-Term Incentive (LTI) scheme for the Board of Directors and the Board of Commissioners. In the future, the Company will continue to evaluate the need and potential implementation of an LTI scheme that can better encourage the achievement of the Company's long-term goals and ensure alignment of interests between the shareholders and management.

Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Total Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Berikut jumlah remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) selama tahun 2024:

The following is the amount of remuneration received by the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PLN (Persero) during 2024:



Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

Jenis Remunerasi Remuneration Type	Jumlah diterima dalam 1 Tahun 2024 (Rp Juta) Total Amount Received in 1 Year in 2024 (Rp Million)			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah Anggota Number of Members	Total	Jumlah Anggota Number of Members	Total
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	10	24.053	10	50.343
Tunjangan Allowance	10	72.836	10	140.445
Tantiem Tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 Tantiem (Bonus) for the year 2023 paid in 2024	10	94.679	10	186.334
Jumlah Total		191.568		377.122

Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau Opsi Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Performance Bonus, Non-Performance Bonus, and/or Stock Options for the Board of Directors and Board of Commissioners

Bonus kinerja dan bonus non kinerja telah diungkap pada tabel Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. Adapun untuk opsi saham selama tahun 2024, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki opsi untuk membeli saham (*shares option*) terhadap saham PT PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham hanya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

The performance bonus and non-performance bonus have been disclosed in the table of Total Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year. As for stock options during 2024, members of the Board of Directors and Board of Commissioners do not have options to purchase shares (stock options) of PT PLN (Persero). This is in accordance with the Articles of Association of PT PLN (Persero), which states that share ownership is solely held by the Government of the Republic of Indonesia.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan peran penasihat dan pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk membentuk Komite Audit dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners tasked to assist the Board of Commissioners in carrying out its advisory and supervisory functions over the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners is obliged to establish an Audit Committee in compliance with the prevailing laws and regulations.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Pembentukan Komite Audit

Establishment of Audit Committee

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan Komite Audit merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Komite Audit PT PLN (Persero).

The Audit Committee is established based on the Board of Commissioners' Decision and operates collectively. The establishment of the Audit Committee refers to the following regulations:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises
3. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee; and
4. Board of Commissioners' Decision of PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2015 dated January 15, 2015 on the Audit Committee of PT PLN (Persero).

Komposisi Komite Audit

Composition of Audit Committee

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Komite Audit dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit. Komite Audit Perseroan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Selain itu, dua anggota Komite Audit lainnya juga merupakan Komisaris Independen. Persentase anggota independen dalam Komite Audit mencapai 37,5%. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan Komite Audit PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.19/SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

In 2024, there was a change in the composition of the Audit Committee due to the replacement of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee. The Company's Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner. In addition, the other two members of the Audit Committee are also Independent Commissioners. The percentage of independent members within the Audit Committee reaches 37.5%. The following is the composition of the Audit Committee of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, based on the Board of Commissioners' Decision No. 19/SK/DK-PLN/2024 dated November 21, 2024, concerning the Appointment of the Audit Committee Composition under the Board of Commissioners of PT PLN (Persero):



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di Komite Audit Position in Audit Committee	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Keahlian Expertise	Masa Jabatan Tenure
Yazid Fanani	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit dan Hukum Audit, Legal	Mengikuti Masa Jabatan Dewan Komisaris Following the tenure of the Board of Commissioners
Aminuddin Ma'ruf	Anggota Member	Komisaris Commissioner	SDM HR	
Andi Arief	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit	
Mutanto Juwono	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit	
Jisman Parada Hutajulu	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Energi Energy	2023-2026
Dwi Siska Susanti	Anggota Member	-	Hukum, Manajemen Legal, Management	
Tomi Parisianto Wibowo	Anggota Member	-	Ekonomi, Keuangan Economic, Finance	
Oktofriawan Hargiardana	Anggota Member	-	Audit	2024-2027

Komposisi Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi Komite Audit terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Anggota Komite Audit terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
3. Anggota Komite Audit yang dari unsur Komisaris independen berjumlah 3 (tiga) orang
4. Anggota Komite Audit telah memenuhi standar keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta memahami industri/bisnis Perseroan

The composition of the Company's Audit Committee complies with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and Regulation No. PER-3/MBU/03/2023, as follows:

1. The Audit Committee consists of a Head and Members who are appointed and dismissed by a decision of the Board of Commissioners and reported to the GMS.
2. Members of the Audit Committee include individuals from the Board of Commissioners as well as external parties.
3. The Audit Committee includes 3 (three) members from the Independent Commissioners.
4. The Audit Committee members possess the required expertise in accounting and finance and have a sound understanding of the Company's industry/business.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Profil anggota Komite Audit yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah disajikan di dalam bab Profil Perusahaan, subbagian Dewan Komisaris. Adapun, profil anggota Komite Audit yang merupakan non-anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The profiles of Audit Committee members from the Board of Commissioners can be found in the Company Profile chapter, under the Sub-chapter Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report. Below are the profiles of the Audit Committee members who are not part of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024:

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Dwi Siska Susanti

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia: 43 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Age: 43 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education

- J.S.D. (Doctoral in Juridical Science) from College of Law Doctoral Program in International Business Law National Chengchi University Taipei – Taiwan. (2013-2019). Research focus: public-private partnership, public procurement, corporate compliance, and foreign bribery law
- M.H. (Master of Law) from Faculty of Law, University of Indonesia Business Law (2003-2005)
- S.H. (Bachelor of Law) from Faculty of Law, University of North Sumatra, Indonesia (1998-2002)
- J.S.D. (Doctoral in Juridical Science) from College of Law Doctoral Program in International Business Law National Chengchi University Taipei – Taiwan (2013-2019)
- The Federal Bureau of Investigation National Academy, USA (2011)
- M.H. (Master of Law) from Faculty of Law, Universitas Indonesia Business Law (2003-2005)
- S.H. (Bachelor of Law) from Faculty of Law, Universitas Sumatra Utara, Indonesia (1998-2002)

Sertifikasi Certification

- *Certified Senior Lead Auditor; Certified Senior Lead Implementer; and Certified Trainer ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (PECB Canada);*
- *Certified Integrity Officer (API); Certified Trainer Anti-Corruption (PAK); and Certified Assessor of Competency (BNSP-LSP KPK);*
- *Certified Advocate/Legal Counsel PERADI*
- Certified Senior Lead Auditor; Certified Senior Lead Implementer; and Certified Trainer ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (PECB Canada)
- Certified Integrity Officer (API);
- Certified Trainer Anti-Corruption (PAK) and Certified Assessor of Competency (BNSP-LSP KPK)
- Certified Advocate/Legal Counsel PERADI

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience

- Consultant (2016-2023)
- GCG & Investment Committee for Board of Commissioners PT Patra Drilling Contractor (Desember 2022-Juli 2023)
- Programme Coordinator Anti-Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2019-2020)
- Advisor Anti Corruption Programme GIZ GmBH (2015-2016)
- Investigator (Last Position: Team Leader) Directorate of PreInvestigation (Direktorat Penyelidikan) Komisi Pemberantasan Korupsi (2005-2013)
- Project Officer Partnership for Business Competition (2003)
- Consultant (2016-2023)
- GCG & Investment Committee for Board of Commissioners of PT Patra Drilling Contractor (December 2022 – July 2023)
- Programme Coordinator Anti-Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2019-2020)
- Advisor Anti-Corruption Programme of GIZ GmBH (2015-2016)
- Employee at the Investigation Directorate of the Corruption Eradication Commission (2005 – 2013)
- Project Officer Partnership for Business Competition (2003)

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment

SK Dewan Komisaris No. 14/SK/DK-PLN/2023 tanggal 11 Juli 2023

Board of Commissioners' Decision Letter No. 14/SK/DK-PLN/2023 dated July 11, 2023

Periode Jabatan Tenure

Ke-1

1st

Jabatan Rangkap Concurrent Positions

- PT PLN (Persero)
– Tidak ada
- Perusahaan Lain
– Tidak ada
- PT PLN (Persero)
– None
- Other Companies
– None



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Tomi Parisianto Wibowo

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

Usia: 51 tahun per 31 Desember 2024

Kewarganegaraan

Age: 51 years old as of December 31, 2024

Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997)	Bachelor of Economics, Faculty of Economics, Universitas Indonesia (1997)
Sertifikasi Certification	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	Certification in Audit Committee Practices (CACP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	- SEVP Finance, Accounting & Strategic Performance, PT Bank Victoria International Tbk (2018-2021) - EVP Head of Finance and Accounting, PT Bank QNB Indonesia Tbk (2013-2018) - Group Head of Financial Control and Corporate Planning, PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2011-2013) - Senior Manager, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan / PricewaterhouseCoopers (2006-2011) - Associate Manager, KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja / Ernst & Young (1997-2006)	- SEVP Finance, Accounting & Strategic Performance, PT Bank Victoria International Tbk (2018-2021) - EVP Head of Finance and Accounting, PT Bank QNB Indonesia Tbk (2013-2018) - Group Head of Financial Control and Corporate Planning, PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2011-2013) - Senior Manager, Tanudiredja, Wibisana & Partners Public Accounting Firm / PricewaterhouseCoopers (2006-2011) - Associate Manager, KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja / Ernst & Young (1997-2006)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 25/SK/DK-PLN/2021 tanggal	Board of Commissioners' Decision Letter No. 25/SK/DK-PLN/2021 dated
Periode Jabatan Tenure	Ke-1	1 st
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	- PT PLN (Persero) - Tidak ada - Perusahaan Lain - Tidak ada	- PT PLN (Persero) - None - Other Companies - None

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Oktofriawan Hargiardana

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Usia: 39 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan
Age: 39 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education	- S2 Statistika, University of Manchester (2016) - S1 Statistika, Universitas Gadjah Mada (2008)	- Master's Degree in Statistics, University of Manchester (2016) - Bachelor's Degree in Statistics, Universitas Gadjah Mada (2008)
Sertifikasi Certification	- Certified in Audit Committee Practices (2025) - Certified Risk Professional (2024) - Qualified Risk Management Officer (2023)	- Certified in Audit Committee Practices (2025) - Certified Risk Professional (2024) - Qualified Risk Management Officer (2023)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT PGN (2023) - Economist PT Pertamina (Persero) (2019-2022) - Asisten Wakil Menteri ESDM (2017-2019) - Anggota Komite Audit PT Pertamina Gas (2017-2019)	- Member of the Risk Management Monitoring and Business Development Committee of PT PGN (2023) - Economist of PT Pertamina (Persero) (2019-2022) - Assistant to the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (2017-2019) - Member of the Audit Committee of PT Pertamina Gas (2017-2019)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No.19/SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024	Board of Commissioners' Decision No. 19/SK/DK-PLN/2024 dated November 21, 2024
Periode Jabatan Tenure	Ke-1	1 st
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	- PT PLN (Persero) - Tidak ada - Perusahaan Lain: - ASN Kementerian ESDM, dengan jabatan saat ini: Kepala Sub Koordinator Tata Kelola Hilir Migas	- PT PLN (Persero) - None - Other Companies: - Civil Servant (ASN) at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), currently serving as Head of the Sub-Coordinator for Downstream Oil and Gas Governance

Pernyataan Independensi Komite Audit

Audit Committee's Independence Statement

Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, antara lain sebagai berikut:

The Audit Committee has fulfilled the independence requirements set forth in the Company's Audit Committee Charter, including the following:



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Persyaratan Independensi Independence Criteria	Yazid Fanani	Aminuddin Ma'ruf	Andi Arief	Mutanto Juwono	Jisman Parada Hutajulu	Dwi Siska Susanti	Tomi Parisianto Wibowo	Oktofriawan Hargiardana
Memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Having a family relationship by marriage or descent up to the second degree with members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki hubungan usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Having a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sebagai Direksi atau karyawan Perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan lain dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit Serving as a member of Board of Directors or employee of the Company that has affiliations with other companies within one year prior to being appointed as a member of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan dan perusahaan afiliasi lainnya Holding shares, either directly or indirectly, in the Company or its affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bekerja pada Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau jasa lainnya yang memberikan jasa audit atau konsultasi pada Perusahaan dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit Working at a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other service providers that have provided audit or consulting services to the Company within one year prior to being appointed as a member of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

✓: tidak

X: iya

Remarks:

✓: No

X: Yes

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Pada tahun 2024, Komite Audit Perseroan telah menandatangani pernyataan independensi yang dimuat dalam Pakta Integritas.

In 2024, the Company's Audit Committee signed an independence statement included in the Integrity Pact.

Masa Jabatan Komite Audit

Tenure

Sejalan dengan Piagam Komite Audit dan ketentuan yang berlaku, masa jabatan Komisaris Independen yang diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan

In accordance with the Audit Committee Charter and applicable regulations, the tenure of an Independent Commissioner appointed as a member of the Audit Committee is the same as the tenure as Commissioner as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The tenure of Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and may be reappointed for no more than 2 (two) additional years, without prejudice to the rights of the Board.

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, Komite Audit menetapkan Piagam Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

In carrying out its duties effectively, transparently, competently, accountably, and acceptably to all relevant parties, the Audit Committee establishes an Audit Committee Charter that has been approved by the Board of Commissioners.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Komite Audit tersebut antara lain mengatur:

1. Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Visi dan Misi, Maksud dan Tujuan serta Dasar Hukum
2. Lingkup Pekerjaan yang mencakup:
 - Pengawasan atas informasi Keuangan
 - Pengawasan atas Pengendalian Internal
 - Pengawasan atas Fungsi Audit Internal
 - Pengawasan atas Audit Eksternal
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - Melakukan Telaah atas Pengaduan yang Berkaitan dengan PLN
 - Melaksanakan Tugas-Tugas Lainnya yang Diberikan oleh Dewan Komisaris
3. Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang
4. Organisasi dan Masa Jabatan Komite Audit
5. Penyelenggaraan Rapat, Pelaporan dan Program Kerja dan Anggaran
6. Penutup.

The scope regulated in the Audit Committee Charter includes:

1. Introduction, containing Background, Vision and Mission, Purpose, and Objectives, as well as Legal Basis
2. Scope of Work, which covers:
 - Supervision of Financial Information
 - Supervision of Internal Control
 - Supervision of the Internal Audit Function
 - Supervision of External Audit
 - Supervision of Compliance with Laws and Regulations
 - Reviewing Complaints Related to PLN
 - Carrying Out Other Duties Assigned by the Board of Commissioners
3. Responsibilities, Duties, and Authorities
4. Organization and Tenure of the Audit Committee
5. Meeting Implementation, Reporting, Work Program, and Budget
6. Conclusion.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of Audit Committee

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan laporan dan informasi keuangan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan para pemangku kepentingan lainnya serta tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal PLN.

Untuk memastikan bahwa Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit yang merupakan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Tugas

- Pengawasan atas informasi keuangan
- Pengawasan atas pengendalian internal
- Pengawasan atas fungsi Audit Internal
- Pengawasan atas Audit Eksternal yaitu melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan memberikan rekomendasi penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris
- Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris

2. Tanggung Jawab

- Bertanggung jawab secara kolektif kepada Dewan Komisaris atas aktifitas-aktifitasnya
- Bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memiliki Piagam Komite Audit, Rencana Kerja, Komunikasi dan Pelaporan
- Pelaksanaan kinerja anggota Komite Audit dievaluasi secara berkala serta keharusan sebagai anggota melakukan pengembangan diri (capacity building)
- Laporan Komite Audit dapat berupa laporan berkala, laporan khusus yang berisi isu-isu penting yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan laporan penugasan khusus dari Dewan Komisaris

The Audit Committee's duties and responsibilities include providing professional and independent opinions to the Board of Commissioners regarding the reports and financial information submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and other stakeholders, as well as on the effectiveness of PLN's Internal Control System.

To ensure that the Audit Committee carries out its duties efficiently and effectively, the duties, responsibilities, and authorities of the Audit Committee, delegated by the Board of Commissioners, are established as follows:

1. Duties

- Supervision of financial information
- Supervision of internal control
- Supervision of the Internal Audit function
- Supervision of External Audit, including selecting the Public Accounting Firm (KAP) to conduct the audit of the Company's Financial Statements and providing recommendations for appointing the KAP to the Board of Commissioners
- Supervision of compliance with laws and regulations
- Reviewing complaints related to the Company
- Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners

2. Responsibilities

- Being collectively responsible to the Board of Commissioners for its activities
- Acting independently in carrying out its duties and responsibilities
- Having an Audit Committee Charter, Work Plan, Communication, and Reporting
- The performance of Audit Committee members is evaluated periodically, and members are required to engage in self-development (capacity building)
- The Audit Committee's reports may include periodic reports, special reports containing important issues requiring the Board of Commissioners' attention, and special assignment reports from the Board of Commissioners

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

f. Evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja Komite Audit oleh pihak eksternal adalah pada saat dilakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun.

f. The evaluation of the Audit Committee's work plan implementation by external parties takes place during the annual evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG)

Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Audit Committee's Work Programs and Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Piagam dan yang Program Kerja Komite Audit.

Throughout 2024, the Audit Committee carried out various activities in accordance with the provisions set forth in the Charter and the Audit Committee Work Program.

Program dan Realisasi Komite Audit

Audit Committee's Program and Realization

Sejalan dengan piagam Komite Audit, salah satu kewajiban Komite Audit adalah memiliki program kerja Komite Audit, oleh karena itu Komite Audit telah menetapkan program Kerja Komite Audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 2 Januari 2024. Program Kerja tersebut menjadi tolak ukur *Key Performance Indicator* Komite Audit tahun 2024. Program Kerja Komite Audit memuat rencana kerja sebagai berikut:

Based on the Audit Committee Charter, one of the Audit Committee's obligations is to have a work program. Therefore, the Audit Committee established a Work Program that was approved by the Board of Commissioners on January 2, 2024. This Work Program served as the benchmark for the Audit Committee's Key Performance Indicators for 2024. The Audit Committee Work Program includes the following planned activities:

Program Kerja Work Programs	Target
Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners with Board of Directors	
1. <i>Review</i> dan Tanggapan Kinerja Perusahaan - Laporan Triwulanan dan KPI Triwulanan 2024 setelah data lengkap Review and Response to Company Performance - Quarterly Reports and Quarterly KPIs for 2024 after complete data is available	5 kali selama 1 tahun 5 times within 1 year
2. <i>Review</i> tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal Review of follow-up actions on internal/external audit results/findings	6 kali selama 1 tahun 6 times within 1 year
3. Memberi tanggapan tertulis/persetujuan/nasehat/saran/teguran kepada Direksi atas usulan Direksi Providing written responses/approvals/advice/suggestions/warnings to the Board of Directors regarding proposals from the Board of Directors	Usulan Direksi ditanggapi Board of Directors' Proposals are responded
Dewan Komisaris dengan RUPS Board of Commissioners with the GMS	
4. Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris - Rencana Kerja dan KPI Komite Audit tahun 2024 - Ketepatan waktu penyampaian sebelum RUPS Presenting the work program and KPIs of the Board of Commissioners - Audit Committee Work Plan and KPIs for 2024 - Timely submission before the GMS	1 berkas Sebelum RUPS 1 File Before the GMS



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Program Kerja Work Programs	Target
5. Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS - LM & KPI Tahun 2024 - Usulan penetapan KAP tahun Buku 2024 - Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 Conveying opinions/proposals of the Board of Commissioners to Shareholders/GMS - Annual Report & KPIs for 2024 - Proposal for appointment of Public Accounting Firm (KAP) for the 2024 fiscal year - Proposal for use of net profit for the 2023 fiscal year	4 Pendapat atau usulan setahun 2 pendapat atau usulan setahun 4 opinions or proposals per year 2 opinions or proposals per year
6. Menyampaikan laporan Komite Audit Submitting Audit Committee reports	1 Laporan setahun 1 report per year
Internal Dewan Komisaris Board of Commissioners Internal	
7. Menghadiri rapat Dewan Komisaris Attending Board of Commissioners meetings	20
8. Menghadiri rapat Komite Audit Attending Audit Committee meetings	10
9. Mengikuti seminar/workshop di luar negeri/dalam negeri Participating in seminars/workshops abroad/domestically	Di bawah 2 kali Under 2 times
10. Pencapaian skor GCG aspek Dewan Komisaris tahun 2024 Achievement of Good Corporate Governance (GCG) score for the Board of Commissioners aspect in 2024	3
11. Kunjungan Kerja Ke Unit Working Visits to Units	5

Rapat Komite Audit

Audit Committee's Meetings

Rapat Komite Audit merupakan pertemuan anggota Komite Audit baik secara internal atau bersama Dewan Komisaris dan dapat mengundang Direksi atau unit untuk membahas berbagai hal terkait Perseroan.

The Audit Committee meetings are gatherings of Audit Committee members, either internally or together with the Board of Commissioners, and may invite the Board of Directors or units to discuss various matters related to the Company.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Kebijakan rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan Kebijakan tersebut, Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) bulan sekali. Komite Audit bertanggung jawab atas agenda rapat dan topik yang akan didiskusikan dalam rapat.

Rapat komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ dari jumlah anggota. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Audit Committee Meeting Policy

The policy for Audit Committee meetings is regulated in the Audit Committee Charter. In accordance with this policy, the Audit Committee holds meetings at least once a month. The Audit Committee is responsible for the meeting agenda and the topics to be discussed during the meeting.

An Audit Committee meeting can be held if attended by more than 1/2 (half) of the members. Decisions in the Audit Committee meetings are made based on consensus deliberation.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite, Komite Audit memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat dengan agenda pembahasan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab Komite Audit. Rencana Rapat Komite Audit 2024 telah termuat di dalam Rencana Kerja Komite Audit tahun 2024.

Pada tahun 2024, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 60 kali rapat atau telah melampaui/sesuai rencana kerja yang sejumlah 24 kali rapat. Keseluruhan penyelenggaraan rapat Komite Audit tersebut terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota Komite non-Komisaris, serta rapat dengan manajemen Perseroan dan auditor eksternal sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Frequency and Attendance Rate of Audit Committee Meetings

According to the provisions in the Charter, the Audit Committee is obliged to hold meetings with discussion agendas aligned with the duties and responsibilities of the Audit Committee. The 2024 Audit Committee Meeting Plan is included in the 2024 Audit Committee Work Plan.

In 2024, the Audit Committee held 60 (sixty) meetings, exceeding/aligning with the work plan which scheduled 24 meetings. These meetings consisted of internal Committee meetings, meetings with the Board of Commissioners, meetings with non-Commissioner Committee members, as well as meetings with the Company's management and external auditors, as detailed in the following table:

Frekuensi Rapat Komite Audit Tahun 2024

Meeting Frequency of Audit Committee in 2024

No.	Jenis Rapat Types of Meetings	Jumlah Total
1.	Rapat internal dengan Komite Audit Internal meetings with the Audit Committee	8 kali times
2.	Rapat dengan Komite lain Meetings with other Committees	22 kali times
3.	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait Meetings with Directors, SEVP, EVP concerned	15 kali times
4.	Rapat dengan SPI, BPK, BPKP, KAP Meetings with SPI, BPK, BPKP, and KAP	15 kali times
Jumlah Rapat Total Meetings		60 kali times

Adapun untuk tingkat kehadiran dari dari masing-masing anggota Komite Audit dalam rapat adalah sebagai berikut:

The attendance rate of each member of Audit Committee in meetings is as follows:

Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat Tahun 2024

Attendance Rates of Audit Committee in Meetings in 2024

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rates
1	Arcandra Tahar Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	38	37	97%
2	Mohamad Ikhsan Anggota Member	38	36	95%
3	Charles Sitorus Anggota Member	38	38	100%
4	Nawal Nely Anggota Member	38	35	92%
5	Mutanto Juwono Anggota* Member*	21	21	100%



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

No.	Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rates
6	Andi Arief Anggota* Member*	21	11	46%
7	Nizam Burhanuddin Anggota Member	28	19	68%
8	Tomi Parisianto Anggota Member	60	55	92%
9	Dwi Siska Susanti Anggota Member	60	60	100%
10	Yazid Fanani Ketua Komite Audit** Head of Audit Committee **	8	8	100%
11	Aminuddin Ma'ruf Anggota** Member**	8	7	87,5%
12	Jisman Parada Hutajulu Anggota** Member**	8	7	87,5%
13	Oktofriawan Hargiardana Anggota** Member**	28	28	100%

Keterangan:

*) Menjabat sebagai Anggota Komite Audit mulai 23 Juli 2024

**) Menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit mulai 14 November 2024

***) Menjabat sebagai anggota Komite Audit mulai 1 September 2024

Remarks:

*) Serving as a Member of the Audit Committee starting from July 23, 2024

**) Serving as Head and Member of the Audit Committee starting from November 14, 2024

***) Serving as a Member of the Audit Committee starting from September 1, 2024

Telaahan dan Kajian

Review and Assessment

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melakukan telaahan/kajian atas permohonan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan arahan ataupun teguran Dewan Komisaris serta menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yaitu diantaranya terkait sebagai berikut:

1. Permohonan konfirmasi data atas evaluasi kinerja KAP tahun buku 2023 dari kementerian BUMN
2. Persetujuan dari Komite Audit atas AUP APFS IsDB tahun 2023 oleh PWC
3. Penyampaian evaluasi Komite Audit atas KAP kepada OJK tahun buku 2023
4. Penyampaian Laporan Kunjungan Kerja
5. Laporan pengadaan dan usulan penunjukan KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024

In 2024, the Audit Committee conducted reviews and assessments of the Board of Directors' requests for recommendations and/or approvals from the Board of Commissioners, and carried out assessments of the activities or actions of the Board of Directors that required direction or reprimands from the Board of Commissioners. The Audit Committee also submitted opinions in response to approval/recommendation requests from the Board of Directors, including the following:

1. Request for data confirmation on the evaluation of the Public Accounting Firm (KAP) for fiscal year 2023 from the Ministry of SOEs
2. Audit Committee approval of AUP APFS IsDB for 2023 by PWC
3. Submission of the Audit Committee's evaluation of the KAP to the Financial Services Authority (OJK) for fiscal year 2023
4. Submission of Work Visit Report
5. Report on procurement and proposal for the appointment of KAP to audit the Financial Statements for Fiscal Year 2024

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

6. Tanggapan atas permohonan persetujuan Laporan Audit Triwulanan	6. Response to the request for approval of the Quarterly Audit Report
7. Tanggapan atas Usulan Penghapusbukuan ATTB dengan cara ruislag berupa tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya IV Jaksel	7. Response to the proposal to write off ATTB assets through a land and building asset swap on Sriwijaya IV Street, South Jakarta
8. Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Subsidi Listrik TA 2023 dan Kompensasi TA 2023	8. Response to the Audit Report from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the 2023 Electricity Subsidy and 2023 Compensation
9. Permohonan persetujuan Laporan Audit Intern Triwulanan	9. Request for approval of the Internal Quarterly Audit Report
10. Penyampaian laporan Komite Audit perihal proyek BMPP I Ambon, IPP Jeneponto, kerjasama BYD, dan AMI	10. Submission of the Audit Committee's report on the BMPP I Ambon project, IPP Jeneponto, BYD cooperation, and AMI
11. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Rekomendasi penunjukan Lembaga Pemeringkatan Tingkat Kesehatan Tahun 2023	11. Response from the Board of Commissioners to the recommendation for the appointment of the Health Rating Agency for 2023
12. Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Tertulis atas Usulan Penghapusbukuan ATTB dan Material PT PLN (Persero)	12. Response to the request for written approval for the write-off of ATTB and materials of PT PLN (Persero)
13. Tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas TJSJL tahun 2023	13. Written response from the Board of Commissioners regarding the 2023 TSJL activities
14. Tanggapan Dewan Komisaris Atas Kesiapan BUMN Menjalankan Peta Jalan Implementasi ICOFR.	14. Response from the Board of Commissioners on SOE readiness to implement the ICOFR Implementation Roadmap
15. Persetujuan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi SPI Tahun 2025	15. Approval of the 2025 Integrated Internal Supervision Annual Work Program (PKPT) of the SPI

Penyampaian Laporan Komite Audit

Submission of Audit Committee Reports

Sejalan dengan piagam Komite Audit, secara berkala, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir triwulan, Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan serta temuan-temuan jika ada dan rekomendasi yang diperlukan. Komite Audit pada tahun 2024 telah menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

In line with the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to submit a report to the Board of Commissioners on a regular basis, no later than 1 (one) month after the end of each quarter. This report must include details of the activities carried out, any findings (if any), and necessary recommendations. In 2024, the Audit Committee submitted the following reports to the Board of Commissioners:

Laporan Komite Audit Audit Committee Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Triwulan I 1 st Quarter	25 Juni 2024 June 25, 2024
Triwulan II 2 nd Quarter	17 Juli 2024 July 17, 2024
Triwulan III 3 rd Quarter	29 Oktober 2024 October 29, 2024
Triwulan IV 4 th Quarter	21 Januari 2025 January 21, 2025



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Kunjungan Kerja Komite Audit

Audit Committee's Work Visits

Selama tahun 2024 Komite Audit melaksanakan kunjungan kerja sebanyak 5 kali sebagai berikut:

Throughout 2024, Audit Committee conducted work visits 5 times as follows:

Tempat Kunjungan Location	Agenda	Tanggal Tanggal
UID Bali	Kunjungan Kerja Work Visit	21-23 Januari 2024 January 21 – 23, 2024
Sumatera Barat West Sumatra	Kunjungan Kerja Work Visit	1-3 Mei 2024 May 1 – 3, 2024
Pusharlis Bandung Pusharlis Bandung	Kunjungan Kerja Work Visit	19 Juni 2024 June 19, 2024
PLTU Suralaya PLTU Suralaya	Kunjungan Kerja Work Visit	11 Juli 2024 July 11, 2024
UIP28 Gandul	Kunjungan Kerja Work Visit	25 September 2024 September 25, 2024

Pelatihan Komite Audit

Audit Committee's Trainings

Pada tahun 2024 anggota Komite Audit telah mengikuti Training atau program sertifikasi sebagai berikut:

In 2024, members of Audit Committee participated in trainings or certification program as follows:

No.	Tanggal Date	Training	Peserta Participants
1	10 Juni 2024 June 10, 2024	QRGP	Dwi Siska Susanti
2	19-21 November 2024 November 19 – 21, 2024	Certification in Audit Committee Practices (CACP)	Oktofriawan Hargiardana

Evaluasi Kinerja Komite Audit

Audit Committee's Performance Evaluation

Kebijakan evaluasi kinerja Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penilaian/ evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individu maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris dan dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang independen.

The policy for evaluating the performance of the Audit Committee is stipulated in the Audit Committee Charter. In line with this policy, the performance evaluation of the Audit Committee, both individually and collectively, is conducted annually by the Board of Commissioners and may be carried out with the assistance of an independent third party.

Pada tahun 2024, Komite Audit telah menetapkan target KPI dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Review dan Tanggapan terkait Laporan Triwulanan dan KPI Triwulanan 2024 setelah data lengkap
2. Review tindak lanjut hasil/temuan audit internal/ eksternal
3. Memberi tanggapan tertulis/persetujuan/nasehat/ saran/teguran kepada Direksi atas usulan Direksi

In 2024, the Audit Committee established KPI targets with the following assessment criteria:

1. Review and response to the 2024 Quarterly Reports and Quarterly KPIs after data completion
2. Reviewing follow-up actions on internal/external audit findings
3. Providing written responses/approvals/advice/ recommendations/warnings to the Board of Directors on proposals submitted by the Board of Directors

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

4. Menyampaikan program kerja dan KPI Dewan Komisaris meliputi Rencana Kerja dan KPI Komite Audit tahun 2024 dan Ketepatan waktu penyampaian sebelum RUPS 5. Menyampaikan pendapat/usul Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham/RUPS terkait: - LM & KPI Tahun 2024 - Usulan penetapan KAP tahun Buku 2024 - Usulan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 6. Menyampaikan laporan Komite Audit 7. Menghadiri rapat Dewan Komisaris 8. Menghadiri rapat Komite Audit 9. Mengikuti seminar/workshop di luar negeri/dalam negeri 10. Pencapaian skor GCG aspek Dewan Komisaris tahun 2024 11. Kunjungan Kerja Ke Unit	4. Submitting the work program and KPIs of the Board of Commissioners, including the 2024 Work Plan and KPIs of the Audit Committee, and ensuring timely submission before the GMS 5. Submitting opinions/proposals of the Board of Commissioners to the Shareholders/GMS regarding: - LM & KPIs for 2024 - Proposal for appointing the Public Accounting Firm for the 2024 fiscal year - Proposal for using net profit for the 2023 fiscal year 6. Submitting the Audit Committee report 7. Attending meetings of the Board of Commissioners 8. Attending Audit Committee meetings 9. Participating in seminars/workshops abroad/ domestically 10. Achieving the GCG score related to the Board of Commissioners' aspect in 2024 11. Conducting work visits to units

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi yang selanjutnya dapat disebut KNR merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan nasehat kepada Direksi khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip GCG serta pada prinsip kehati-hatian.

The Nomination and Remuneration Committee, hereinafter referred to as KNR, is a supporting body of the Board of Commissioners that assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors, particularly to ensure that the nomination and remuneration systems/policies are implemented in accordance with the applicable laws and regulations, following the principles of Good Corporate Governance (GCG) and prudence.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Establishment of Nomination and Remuneration Committee

Komite KNR dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan KNR merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

The KNR Committee is established based on the Board of Commissioners' Decision and operates collectively. The formation of the KNR refers to the following regulations:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. *Board Manual* Dewan Komisaris
4. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
3. Board Manual of the Board of Commissioners
4. The Nomination and Remuneration Committee Charter

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition of Nomination and Remuneration Committee

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi KNR dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota KNR. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan KNR PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 19/SK/DK-PLN/2024 tentang Penetapan Susunan KNR Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

In 2024, there was a change in the composition of the KNR due to the replacement of members of the Board of Commissioners and KNR members. The following is the composition or membership structure of the KNR of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 19/SK/DK-PLN/2024 dated 21 on the Determination of the KNR Composition in the Board of Commissioners of PT PLN (Persero):

Nama Name	Jabatan di KNR Position in KNR	Jabatan di Perusahaan Jabatan di Perusahaan	Keahlian Keahlian	Masa Jabatan Masa Jabatan
Burhanuddin Abdullah*	Ketua Head	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	- SDM - Tata Kelola - Bisnis dan Ekonomi - HR - Governance - Business and Economics	23 Juli 2024 – Saat ini - July 23, 2024 – Present
Andi Arief	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	Audit	23 Juli 2024 – Saat ini July 23, 2024 – Present
Ali Masykur Musa	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Audit - Manajemen Risiko - Audit - Risk Management	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present
Yazid Fanani	Anggota Member	Komisaris Commissioner	- Audit - Hukum Legal	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present
Aminuddin Ma'ruf	Anggota Member	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Ekonomi - SDM - Economics - HR	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present
Andi Hanif Mursid	Anggota Member	-	- SDM - Tata Kelola - HR - Governance	1 Desember 2021-31 Januari 2025 December 1, 2021 – January 31, 2025

*) Menjabat sebagai Komisaris Utama pada tanggal 23 Juli 2024

*) Serving as President Commissioner on July 23, 2024

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Komposisi KNR Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi KNR terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Anggota KNR terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
3. Anggota KNR yang dari unsur Komisaris independen berjumlah 3 (tiga) orang
4. Anggota KNR telah memenuhi standar keahlian di bidang SDM serta memahami industri/bisnis Perseroan

The composition of the Company's KNR complies with the Minister of SOEs Regulation PER-2/MBU/03/2023 and Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023:

1. The KNR composition consists of a Head and Members who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners' decision and reported to the GMS (General Meeting of Shareholders).
2. KNR Members consist of members from the Board of Commissioners and external parties outside the Company.
3. KNR Members from the independent Commissioners amount to 3 (three) persons.
4. KNR Members have met the expertise standards in the field of Human Resources and understand the Company's industry/business.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Nomination and Remuneration Committee

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Adapun, profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan non-anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The profiles of KNR members from the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter, under the Board of Commissioners Profile subsection in this Annual Report. The following are the profiles of KNR members who are not from the Board of Commissioners of PT PLN Persero as of December 31, 2024:

Andi Hanif Mursid

Anggota KNR
KNR Member

Usia: 51 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia

Age: 51 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education

- Management Development Program (MDP), Asian Institute of Management (2005)
- S2 Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2003)
- S1 Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1995)
- Management Development Program (MDP), Asian Institute of Management (2005)
- Master's Degree in Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (2003)
- Bachelor's Degree in Agribusiness Management, Institut Pertanian Bogor (1995)



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Sertifikasi Certification	• <i>Certified Human Capital Management</i> • <i>Certified Quality Management System</i> • <i>Certified Quality Management System Lead Auditor</i> • <i>Certified Learning and Development Professional</i> • <i>Certified Organization Development Professional</i> • <i>Certified Strategy and Business Planning Professional</i> • <i>Certified Strategy Execution Professional</i> • <i>Certified Coaching Professional</i> • <i>Certified Leadership Coach</i> • <i>Certified Talent Management Professional</i> • <i>Certified Safety Management System</i> • <i>Certified Change Management Professional</i>	• Certified Human Capital Management • Certified Quality Management System • Certified Quality Management System Lead Auditor • Certified Learning and Development Professional • Certified Organization Development Professional • Certified Strategy and Business Planning Professional • Certified Strategy Execution Professional • Certified Coaching Professional • Certified Leadership Coach • Certified Talent Management Professional • Certified Safety Management System • Certified Change Management Professional
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	• Chief Executive Officer The Next Normal (2020-2021) • Chief Executive Officer The Strengths Zone (2018-2021) • Keynote Speaker, Advisor, Trainer, Coach, and Facilitator for Business & Leadership Inspiration Entrepreneurship Zone (1998-2020) • General Manager – Learning and Development PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • Director – Pramana Agri Resources PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • Chairman of The Executive Board – Intraco Penta Foundation PT Intraco Penta (2014-2018) • Head of Learning & Development Division DSU Group (2008-2011) • Head of Training & People Development Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2006-2008) • Head of Training Program Development Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2000-2006) • Chairman Of The Executive Board – Quality & Safety Improvement Team – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2003-2006) • Deputy Head of Human Resources Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1998-2000) • Head of Human Resources Information System Department – Bogasari Flour Mills PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1997-1998) • Management Trainee (MT) PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1996-1997)	• Chief Executive Officer of The Next Normal (2020-2021) • Chief Executive Officer of The Strengths Zone (2018-2021) • Keynote Speaker, Advisor, Trainer, Coach, and Facilitator for Business & Leadership Inspiration of Entrepreneurship Zone (1998-2020) • General Manager – Learning and Development of PT Intraco Penta, Tbk (2011-2018) • Director – Pramana Agri Resources of PT Intraco Penta Tbk (2011-2018) • Chairman of The Executive Board – Intraco Penta Foundation of PT Intraco Penta (2014-2018) • Head of Learning & Development Division of DSU Group (2008-2011) • Head of Training & People Development Department – Bogasari Flour Mills of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2006-2008) • Head of Training Program Development Department – Bogasari Flour Mills of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2000-2006) • Chairman of The Executive Board – Quality & Safety Improvement Team – Bogasari Flour Mills of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (2003-2006) • Deputy Head of Human Resources Department – Bogasari Flour Mills of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1998-2000) • Head of Human Resources Information System Department – Bogasari Flour Mills of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1997-1998) • Management Trainee (MT) of PT Indofood Sukses Makmur Tbk (1996-1997)
Dasar Hukum Penunjukan Dasar Hukum Penunjukan	SK Dewan Komisaris No. 26/SK/DK-PLN/2021 tanggal 25 November 2021	Board of Commissioners' Decision Letter No. 26/SK/DK-PLN/2021 dated November 25, 2021
Periode Jabatan Periode Jabatan	Ke-1	1 st
Jabatan Rangkap Jabatan Rangkap	• PT PLN (Persero) - Tidak ada • Perusahaan Lain - Tidak ada	• PT PLN (Persero) - None • Other Companies - None

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of Nomination and Remuneration Committee

KNR telah memenuhi persyaratan independensi anggota KNT Perseroan, antara lain sebagai berikut:

KNR has fulfilled the independence requirements for the members of the Company's KNR, including the following:

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Burhanuddin Abdullah	Ali Masykur Musa	Yazid Fanani	Aminuddin Ma'ruf	Andi Arief	Andi Hanif Mursid
Memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Having a family relationship by marriage or descent up to the second degree with members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki hubungan usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Having a direct or indirect business relationship related to the Company's business activities	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sebagai Direksi atau karyawan Perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan lain dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai KNR Serving as a member of Board of Directors or employee of the Company who has affiliations with other companies within one year prior to being appointed as a member of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan dan perusahaan afiliasi lainnya Holding shares, either directly or indirectly, in the Company or its affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:
✓: tidak
X: iya

Remarks:
✓: no
X: yes

Pada tahun 2024, KNR Perseroan telah menandatangani pernyataan independensi yang dimuat dalam Pakta Integritas.

In 2024, the Company's KNR had signed the statement of independence included in the Integrity Pact.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee's Tenure

Sejalan dengan Piagam KNR dan ketentuan yang berlaku, masa jabatan tugas Anggota Komite yang berasal dari Komisaris ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masa tugas yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya apabila:

- Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris,
- Dipindahkan ke Komite Dewan Komisaris yang lain berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris

Masa tugas Anggota Komite non Komisaris berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

In line with the KNR Charter and applicable regulations, the tenure for Committee Members from the Board of Commissioners is determined based on prevailing laws and regulations. The tenure ends automatically if:

- The individual no longer serves as a Member of the Board of Commissioners,
- The individual is reassigned to another Board of Commissioners Committee based on a decision of the Board of Commissioners.

The tenure for non-Commissioner Committee Members is 3 (three) years and may be extended for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate their appointment at any time.

Piagam Komite Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Charter

Dalam rangka pelaksanaan tugas KNR dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, KNR menetapkan Piagam KNR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam KNR tersebut antara lain mengatur:

- Pendahuluan
- Visi dan Misi,
- Struktur Organisasi dan Keanggotaan KNR
- Tugas, Kewajiban dan Wewenang Komite
- Kode Etik Komite
- Rencana Kerja dan KPI KNR
- Rapat Komite
- Evaluasi Komite
- Penutup.

To ensure that the duties of KNR are carried out effectively, transparently, competently, accountably, and in a manner acceptable to all relevant stakeholders, KNR has established the KNR Charter, which had been approved by the Board of Commissioners.

The scope regulated in the KNR Charter includes, among others:

- Introduction
- Vision and Mission
- Organizational Structure and Membership of the KNR
- Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee
- Committee Code of Conduct
- KNR's Work Plan and KPI
- Committee Meetings
- Committee Evaluation
- Conclusion.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*);
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*);
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri;
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* individu anggota Direksi;
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/ tanggapan dari Dewan Komisaris;
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan;
10. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu kepada *best practice*;
11. Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditetapkan;
12. Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan;
1. Conducting periodic reviews of the Talent Management System;
2. Evaluating the systems and procedures for Talent Classification carried out by the Board of Directors;
3. Validating and calibrating the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (Selected Talent), in order to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Minister (Nominated Talent);
4. Evaluating candidates representing the Company to be proposed as members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of subsidiaries before being submitted to the GMS/Minister;
5. Evaluating proposals for individual Key Performance Indicators of the members of the Board of Directors;
6. Preparing proposals for individual performance evaluation systems for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
7. Preparing proposals for development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
8. Evaluating remuneration policies for employees that require the approval or feedback of the Board of Commissioners;
9. Evaluating the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure;
10. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has implemented the nomination and remuneration system of PT PLN (Persero) in accordance with best practices;
11. Reviewing and monitoring to ensure that the Board of Directors has carried out the processes of recruitment, career development, nomination, and remuneration in accordance with the established system;
12. Assisting in formulating remuneration policies in the form of salary and honorarium, fixed benefits and facilities, as well as performance-based variable incentives/ bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS for approval;



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

13. Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
 14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
 15. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas tugas Komite;
 16. Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Dewan Komisaris.
13. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other tasks of the Board of Commissioners;
 14. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners;
 15. Coordinating with the Secretary to the Board of Commissioners to ensure the smooth implementation of the Committee's duties;
 16. Preparing and submitting regular reports on the implementation of duties to the Board of Commissioners.

Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration's Work Programs and Activities

Sepanjang tahun 2024, KNR melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Piagam dan yang Program Kerja KNR.

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee (KNR) carried out various activities in accordance with its Charter and the KNR Work Program.

Program dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Programs and Realization of Nomination and Remuneration Committee

Sejalan dengan piagam KNR, salah satu kewajiban KNR adalah memiliki program kerja KNR, oleh karena itu KNR telah menetapkan program Kerja KNR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Program Kerja tersebut menjadi tolak ukur *Key Performance Indicator* KNR tahun 2024. Program Kerja KNR memuat rencana kerja sebagai berikut:

In line with the KNR Charter, one of the obligations of the Nomination and Remuneration Committee (KNR) is to establish a KNR Work Program. Accordingly, KNR has set the Work Program which had been approved by the Board of Commissioners. This Work Program serves as the benchmark for the KNR's Key Performance Indicators (KPI) for 2024. The KNR Work Program includes the following work plans:

Program Kerja Work Program	Target
Review dan evaluasi Sistem Pengelolaan Talenta (<i>Talent Management System</i>); Reviewing and evaluating the Talent Management System;	1 kali Once
Review dan evaluasi Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (<i>Selected Talent</i>) untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/ Menteri (<i>Nominated Talent</i>); Reviewing and evaluating the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (<i>Selected Talent</i>) to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS/Minister (<i>Nominated Talent</i>);	Januari 2024 Januari 2024
Pembahasan dan persetujuan KPI Direksi secara kolektif dan individu untuk 2024 (per semester). Discussing and approving the collective and individual KPIs of the Board of Directors for 2024 (per semester);	

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Program Kerja Work Program	Target
Review dan evaluasi sistem Nominasi dan Remunerasi PT PLN (Persero) yang mengacu pada <i>best practice</i> ; Reviewing and evaluating PT PLN (Persero)'s Nomination and Remuneration system by referring to best practices;	1 kali Once
Review dan evaluasi proses rekrutmen, pengembangan karier, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang telah ditentukan; Reviewing and evaluating the recruitment, career development, nomination, and remuneration processes in accordance with the established system;	Maret 2024 March 2024
Review dan evaluasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk diusulkan kepada RUPS guna memperoleh persetujuan; Reviewing and evaluating the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners to be proposed to the GMS for approval;	
Evaluasi Direksi secara kolektif dan individu atas pencapaian KPI 2023. Evaluating the collective and individual performance of the Board of Directors based on the 2023 KPI achievement;	
Review dan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri. Reviewing and evaluating the proposed candidates to represent the Company as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of subsidiaries, prior to being submitted to the GMS/Minister;	1 kali di bulan Mei 2024 Once in May 2024
Review dan evaluasi program pengembangan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Non Komisaris Reviewing and evaluating competency development programs for members of the Board of Commissioners and Non-Commissioner Committee Members	Juli 2024 July 2024
Review dan evaluasi struktur organisasi perusahaan Reviewing and evaluating the Company's organizational structure;	1 Kali 1 Kali
Review dan evaluasi produktivitas organisasi; Reviewing and evaluating organizational productivity;	September 2024
Review dan evaluasi kebijakan dan program K3 L Reviewing and evaluating the OHSE policies and programs;	
Review dan evaluasi pengelolaan tenaga alih daya. Reviewing and evaluating the management of outsourced personnel;	
Review dan evaluasi peran Serikat Pekerja (SP) PLN dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PLN Reviewing and evaluating the role of PLN's Labor Union (SP PLN) and PLN's Collective Labor Agreement (PKB);	1 Kali Once
Review dan evaluasi peran dana pensiun PLN Reviewing and evaluating the role of PLN's pension fund	November 2024
Review dan evaluasi peran Institute Teknologi PLN (IT PLN). Reviewing and evaluating the role of PLN Institute of Technology (IT PLN);	
Rapat Meetings	

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee's Meetings

Rapat KNR merupakan pertemuan anggota KNR baik secara internal atau bersama Dewan Komisaris dan dapat mengundang Direksi atau Divisi untuk membahas Remunerasi dan Nominasi.

KNR meetings are gatherings of KNR members, either held internally or together with the Board of Commissioners, and may also involve inviting the Board of Directors or relevant Divisions to discuss remuneration and nomination matters.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan rapat KNR diatur dalam Piagam KNR. Sejalan dengan Kebijakan tersebut, KNR mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali. KNR bertanggung jawab atas agenda rapat dan topik yang akan didiskusikan dalam rapat.

Rapat KNR dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota. Keputusan Rapat KNR diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua Komite serta satu anggota Komite dilengkapi dengan daftar hadir.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti 6 (Enam) kali rapat yang terdiri dari rapat internal Komite, rapat bersama Dewan Komisaris, rapat anggota non-Komisaris, serta rapat dengan para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Policy and Implementation of Nomination and Remuneration Committee Meetings

The meeting policy of the KNR is regulated in the KNR Charter. In line with this policy, the KNR holds meetings at least once a month. The KNR is responsible for determining the meeting agenda and topics to be discussed.

A KNR meeting can be held if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of its members. Decisions in KNR meetings are made based on deliberation and consensus. Every committee meeting is documented in minutes of meeting signed by the Committee Head and one Committee member, along with an attendance list.

Frequency and Attendance Rate of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 6 (six) meetings consisting of internal committee meetings, joint meetings with the Board of Commissioners, meetings of non-Commissioner members, as well as meetings with relevant stakeholders in accordance with the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee, as shown in the table below:

Pelaksanaan Frekuensi Rapat Komite nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Implementation of Nomination and Remuneration Meeting Frequency in 2024

No.	Jenis Rapat Types of Meetings	Jumlah Total
1	Rapat dengan Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners	4 kali times
2	Rapat dengan Direktur, SEVP, EVP Terkait Meeting with concerned Directors, SEVP, EVP	2 kali times
Jumlah Rapat Total Meetings		6 kali times

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Adapun untuk tingkat kehadiran dari dari masing-masing anggota KNR dalam rapat adalah sebagai berikut:

The attendance rate of each member of KNR in meetings is as follows:

No.	Nama Name	Masa Jabatan Tenure	Jabatan di PT PLN (Persero) Position at PT PLN (Persero)	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1	Agus Martowardojo ¹	20 September 2023- 23 Juli 2024 September 20, 2023 – July 23, 2024	Ketua/Komisaris Independen Head/ Independent Commissioner	4	4	100
2	Burhanuddin Abdullah ²	23 Juli 2024 – Saat ini July 23, 2024 – Present	Ketua/Komisaris Independen Head/ Independent Commissioner	2	2	100
3	Dudy Purwagandhi ³	6 Januari 2020 – 14 November 2024 January 6, 2020 – November 14, 2024	Anggota, Sekretaris/ Komisaris Member, Secretary/ Commissioner	6	6	100
4	Eko Sulisty ⁴	12 Oktober 2020 – 19 Maret 2024 October 12, 2020 – March 19, 2024	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	2	0	0
5	Tedi Bharata	25 Maret 2022 – 19 Maret 2024 March 25, 2022 – March 19, 2024	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	2	2	100
6	Charles Sitorus	31 Desember 2023 -14 November 2024 December 31, 2023 – November 14, 2024	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	6	5	83
7	Mohamad Ikhsan	26 Desember 2019 – 14 November 2024 December 26, 2019 – November 14, 2024	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	6	6	100
8	Ali Masykur Musa	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	1	1	100
9	Yazid Fanani	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	1	1	100
10	Andi Arief	23 Juli 2024 – Saat ini July 23, 2024 – Present	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	1	1	100
11	Aminuddin Ma'ruf	14 November 2024 – Saat ini November 14, 2024 – Present	Anggota/Komisaris Member/Commissioner	1	1	100
12	Andi Hanif Mursid	1 Desember 2021-31 Januari 2025 December 1, 2021 – January 31, 2025	Anggota non Komisaris Member non- Commissioner	6	6	100



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Telaahan dan Kajian Komite Nominasi dan Remunerasi

Review and Assessment of Nomination and Remuneration Committee

Pada tahun 2024, KNR telah melakukan telaahan/kajian atas permohonan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan arahan ataupun teguran Dewan Komisaris serta menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yaitu diantaranya terkait sebagai berikut:

1. Tanggapan Tertulis Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Direksi dan Satu Tingkat di bawah Direksi PT PLN (Persero), surat No. 36/SK-PLN/2024-R tanggal 27 Februari 2024;
2. Tanggapan Tertulis atas Pencapaian KPI Direksi PT PLN (Persero) secara Kolegal dan Individual tahun 2023, surat No. 54/DK-PLN/2024 tanggal 3 April 2024;
3. Penyampaian Nominated Talent BOD-1 PT PLN (Persero), surat No. 62/DK-PLN/2024-R tanggal 23 April 2024.
4. Tanggapan Tertulis Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Direksi dan Satu Tingkat di bawah Direksi PT PLN (Persero), surat No. 156/SK-PLN/2024-R tanggal 6 September 2024.

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee (KNR) conducted reviews/ assessment on requests from the Board of Directors seeking recommendations and/or approval from the Board of Commissioners. KNR also reviewed activities or actions by the Board of Directors that required guidance or reprimand from the Board of Commissioners, as well as provided opinions on approval/ recommendation requests from the Board of Directors, including the following:

1. Written Response to the Proposal for Changes in the Organizational Structure of the Board of Directors and One Level Below the Board of Directors of PT PLN (Persero), letter No. 36/SK-PLN/2024-R dated February 27, 2024;
2. Written Response to the Achievement of the 2023 Board of Directors' KPIs both collectively and individually at PT PLN (Persero), letter No. 54/DK-PLN/2024 dated April 3, 2024;
3. Submission of Nominated Talent BOD-1 PT PLN (Persero), letter No. 62/DK-PLN/2024-R dated April 23, 2024;
4. Written Response to the Proposal for Changes in the Organizational Structure of the Board of Directors and One Level Below the Board of Directors of PT PLN (Persero), letter No. 156/SK-PLN/2024-R dated September 6, 2024.

Penyampaian Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Submission of the Nomination and Remuneration Committee's Report

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Piagam Komite dan program kerja Komite untuk 2024, dengan perincian sebagai berikut:

1. Usulan *Nominated Talent* BoD-1 PT PLN (Persero) tahun 2024 untuk KBUMN;
2. Penilaian Kinerja Direksi PT PLN (Persero) untuk laporan ke KBUMN Tahun 2024;
3. Penilaian Kinerja Direksi PT PLN (Persero) untuk laporan ke KBUMN Tahun 2024;
4. Tanggapan Tertulis Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Direksi dan Satu Tingkat di bawah Direksi PT PLN (Persero) Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Manajemen Risiko.

The Nomination and Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities in line with the Committee Charter and the Committee's work program for 2024, with the following details:

1. Proposal for Nominated Talent of BoD-1 of PT PLN (Persero) in 2024 for KBUMN;
2. Performance Assessment of the Board of Directors of PT PLN (Persero) for reporting to KBUMN in 2024;
3. Performance Assessment of the Board of Directors of PT PLN (Persero) for reporting to KBUMN in 2024;
4. Written Response to the Proposed Changes in the Organizational Structure of the Board of Directors and One Level Below the Board of Directors of PT PLN (Persero) of the Compliance Division under the Directorate of Risk Management.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

5. Tanggapan Tertulis Atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Direksi dan Satu Tingkat di bawah Direksi PT PLN (Persero) (Divisi Energi Primer di bawah Direktorat Manajemen Pembangkitan).

5. Written Response to the Proposed Changes in the Organizational Structure of the Board of Directors and One Level Below the Board of Directors of PT PLN (Persero) (Primary Energy Division under the Directorate of Generation Management).

Laporan KNR KNR Report	Tanggal Penyampaian Date of Submission
Triwulan I 1 st Quarter	06 April 2024 April 6, 2024
Triwulan II 2 nd Quarter	17 Juli 2024 July 17, 2024
Triwulan III 3 rd Quarter	20 November 2024 November 20, 2024
Triwulan IV 4 th Quarter	06 Februari 2025 Februari 6, 2025

Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee's Training

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi yang dari unsur Dewan Komisaris telah disajikan pada Bab Profil Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee from the Board of Commissioners is presented in the Profile Chapter, Corporate Governance Chapter, Board of Commissioners Sub-Chapter in this Annual Report.

Evaluasi Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

KNR Performance Evaluation

Kebijakan evaluasi kinerja KNR diatur dalam Piagam KNR. Sejalan dengan kebijakan tersebut, penilaian/evaluasi terhadap kinerja KNR, baik secara individu maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris dan dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang independen.

The performance evaluation policy of the KNR is regulated in the KNR Charter. In line with this policy, the assessment/evaluation of the KNR's performance, both individually and collectively, is conducted annually by the Board of Commissioners and may be assisted by an independent third party.

Pada tahun 2024, KNR telah menetapkan target KPI dengan kriteria penilaian yang mencakup Manajemen Talent, Manajemen Remunerasi, Manajemen Kinerja, Manajemen Kompetensi, Manajemen Organisasi. Manajemen Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Rapat.

In 2024, the KNR set KPI targets with assessment criteria covering Talent Management, Remuneration Management, Performance Management, Competency Management, Organizational Management, Industrial Relations Management, and Meeting Implementation.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Komite Manajemen yang selanjutnya disebut KMR merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berperan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Perseroan.

The Management Committee, hereinafter referred to as the KMR, is the Board of Commissioners' supporting organ that plays a role in assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing advice to the Board of Directors related to the Company's risk management.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko

Establishment of Risk Management Committee

KMR dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan bekerja secara kolektif. Pembentukan KMR merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. *Board Manual* Dewan Komisaris
4. Piagam Komite Manajemen Risiko

The KMR is established based on a decision of the Board of Commissioners and operates collectively. The formation of the KMR refers to the following provisions:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
3. Board Manual of the Board of Commissioners
4. Risk Management Committee Charter

Komposisi Komite Manajemen Risiko

Composition of Risk Management Committee

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Komite Manajemen Risiko dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota Komite Manajemen Risiko. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 21/SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Manajemen Risiko Pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero):

In 2024, there was a change in the composition of the Risk Management Committee due to changes in the Board of Commissioners and members of the Risk Management Committee. The following is the composition or membership structure of the Risk Management Committee of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, based on the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 21/SK/DK-PLN/2024 dated November 21, 2024, on the Appointment of the Risk Management Committee Composition under the Board of Commissioners of PT PLN (Persero):

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di KMR Position in KMR	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Keahlian Expertise	Masa Jabatan Tenure
Ali Masykur Musa	Ketua Head	Komisaris Independen Independent Commissioner	Manajemen Risiko, Audit Risk Management, Audit	14 Nov 2024 – 14 Nov 2029 November 14, 2024 –November 14. 2029
Suahasil Nazara	Anggota Member	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Ekonomi, Manajemen Risiko Economics, Risk Management	14 Nov 2024 – 14 Nov 2029 November 14, 2024 –November 14. 2029
Susiwijono Moegiarso	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Ekonomi Economics	2021 – 2026
Dadan Kusdiana	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Energi Energy	2022 – 2027
Jisman Parada Hutajulu	Anggota Member	Komisaris Commissioner	Energi Energy	2024 – 2029
Widhyawan Prawiraatmadja	Anggota Member	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioner Member	Energi & Ekonomi Energy & Economics	20 Mei 2020- 30 Mei 2023 dan 1 Juni 2023- 31 Mei 2025 May 20, 2020 – May 30, 2023 and June 1, 2023 – May 31, 2025
Saguh Pangaribowo	Anggota Member	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioner Member	Manajemen Risiko & Ekonomi Risk Management & Economics	25 Februari 2021-29 Februari 2024 dan 1 Maret 2024-25 Februari 2026 February 25, 2021 – February 29, 2024 and March 1, 2024 – February 26, 2026
Leonardus Sitinjak	Anggota Member	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioner Member	Energi Energy	1 September 2024-31 Agustus 2027 September 1, 2024 – August 31, 2027

Komposisi KMR Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

1. Komposisi KMR terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS
2. Ketua KMR merupakan Komisaris Independen
3. Anggota KMR terdiri dari unsur Dewan Komisaris dan dari luar Perseroan
4. Anggota Komite KMR telah memenuhi standar keahlian di bidang Manajemen Risiko serta memahami industri/ bisnis Perseroan

The composition of the Company's KMR is based on the Regulation of the Minister of SOEs PER-2/MBU/03/2023 and the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023:

1. The composition of KMR consists of a Head and Members who are appointed and dismissed through a decision of the Board of Commissioners and reported to the GMS.
2. The Head of the KMR is an Independent Commissioner.
3. The members of the KMR consist of elements from the Board of Commissioners and external parties outside the Company.
4. The KMR members possess the required expertise in Risk Management and have a sound understanding of the Company's industry/business.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Profil Komite Manajemen Risiko

Profile of Risk Management Committee

Profil KMR yang dari unsur Dewan Komisaris telah disajikan pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Adapun profil Anggota KMR yang bukan berasal dari unsur Dewan Komisaris PT PLN Persero per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The profiles of KMR members from the Board of Commissioners can be found in the Company Profile Chapter, Subchapter Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report. The following are the profiles of KMR members who are not part of the Board of Commissioners of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024:

Widhyawan Prawiraatmadja

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Usia: 64 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Age: 64 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education	- S3 Ekonomi, University of Hawaii - S2 Ekonomi, University of Hawaii - S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung	- Ph.D. in Economics, University of Hawaii - Master's Degree in Economics, University of Hawaii - Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Institute Teknologi Bandung
Sertifikasi Certification	<i>Certified ISO 31000 Risk Management</i>	Certified ISO 31000 Risk Management
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	- Gubernur Indonesia untuk Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (2015-2016) - Kepala Unit Pengendalian Kinerja (UPK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) - Komisaris PT Pertamina Persero (2015-2016) - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2016) - Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas/Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (2013-2014) - Deputy Chairman for Commercial - SKK Migas (2013-2014) - Indonesia Country Executive for GE Energy (2010-2011) - Senior Vice President - Corporate Planning, Business Development & Transformation PT Pertamina Persero (2005-2009)	- Indonesia's Governor for the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (2015-2016) - Head of the Performance Control Unit (UPK) of Ministry of Energy and Mineral Resources (2014-2016) - Commissioner of PT Pertamina (Persero) (2015-2016) - Special Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources (2014-2016) - Deputy for Commercial Control of SKK Migas/Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (2013-2014) - Deputy Chairman for Commercial - SKK Migas (2013-2014) - Indonesia Country Executive of GE Energy (2010-2011) - Senior Vice President - Corporate Planning, Business Development & Transformation of PT Pertamina (Persero) (2005-2009)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 19/SK/DK-PLN/2020 tanggal 20 Mei 2020 j0. Surat Keputusan Dewan Komisaris No.07/SK/DK-PLN/2023 tanggal 31 Mei 2023	Board of Commissioners' Decision Letter No. 19/SK/DK-PLN/2020 dated May 20, 2020, in conjunction with Board of Commissioners' Decision Letter No.07/SK/DK-PLN/2023 dated May 31, 2023
Periode Jabatan Tenure	Ke-2	2 nd
Jabatan Rangkap Jabatan Rangkap	- PT PLN (Persero) - Tidak ada - Perusahaan Lain - Tidak ada	- PT PLN (Persero) - None - Other Companies - None

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Saguh Pangaribowo

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Usia: 56 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Age: 54 years as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education	• Master of Business Administration, International University of Japan • Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia	• Master of Business Administration, International University of Japan • / Bachelor's Degree in Economics, Universitas Indonesia
Sertifikasi Certification	• <i>Certified Risk Management Assurance</i> (CRMA) • <i>Certified Sustainability Reporting Specialist</i> (CSRS) • <i>Certified Internal Auditor</i> (CIA)	• Certified Risk Management Assurance (CRMA) • Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS) • Certified Internal Auditor (CIA)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	• Risk Management Technical Advisor PT Lippo Karawaci Tbk, 2021. • Konsultan Mandiri PT Pertamina (Persero), 2021. • Associate Partner PT Ernst & Young Indonesia (2005-2020). • Koordinator and Pengajar Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012). • Dosen paruh waktu Fakultas Ekonomi Universitas Bina Nusantara (2002-2008). • Quality Assurance Tim Corporate Governance BPKP (2001-2005). • Narasumber Audit Kinerja BUMN-BUMN oleh Ditjen Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2002-2005). • Tugas belajar ke Jepang dari Overseas Training Office Bappenas 1999-2001. • Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Perwakilan DKI Jakarta (1990-1999).	• Risk Management Technical Advisor of PT Lippo Karawaci Tbk, 2021 • Independent Consultant of PT Pertamina (Persero), 2021 • Associate Partner of PT Ernst & Young Indonesia (2005-2020) • Coordinator and Lecturer of Bina Nusantara CIA Executive Program (2005-2012) • Part-time Lecturer at the Faculty of Economics of Universitas Bina Nusantara (2002-2008) • Member of the Corporate Governance Quality Assurance Team of BPKP (2001-2005) • Speaker for SOEs Performance Audit, Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance (2002-2005) • Study assignment to Japan from the Overseas Training Office of Bappenas (1999-2001) • Auditor of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), Jakarta Representative Office (1990-1999)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No. 05/SK/DK-PLN/2020 tanggal 25 Februari 2021 Jo Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK/DK-PLN/2014 tanggal 1 Maret 2024	Decision Letter of the Board of Commissioners No. 05/SK/DK-PLN/2020 dated February 25, 2021, in conjunction with Decision Letter of the Board of Commissioners No.01/SK/DK-PLN/2014 dated March 1, 2024
Periode Jabatan Tenure	Ke-2	Ke-2
Jabatan Rangkap Jabatan Rangkap	• PT PLN (Persero) - Tidak ada • Perusahaan Lain - Tidak ada	• PT PLN (Persero) - None • Other Companies - None



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Leonardus Sitinjak

Anggota Komite Manajemen Risiko
Member of Risk Management Committee

Usia: 56 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Age: 56 tahun per 31 Desember 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education	• S2 Mesin – Curtin University of Technology Australia • S1 Mesin – ITB, Bandung	• Master's Degree in Mechanical Engineering – Curtin University of Technology, Australia • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering – ITB, Bandung
Sertifikasi Certification	• <i>Qualifies Risk Management Professional (QRMP)</i> • <i>Qualified Risk Management Professional (QRGP)</i>	• Qualifies Risk Management Professional (QRMP) • Qualified Risk Management Professional (QRGP)
Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	• Kepala Ranting PLN Parigi • Kepala Bagian Teknik PLN Canang Tahuna • Asman Operasi PLN Sektor Minahasa • Deputy Manager Operasi PLN Suluttenggo • Manajer PLN Sektor Minahasa • Manajer PLN Sektor Belawan • SRM Enjiniring PLN Tanjung Jati B • VP Pengelolaan Pembangkit Regional JBTVN • VP Pengelolaan Pembangkit Regional JBTVB • VP Pengendalian Operasi & Energi Primer Jamali • VP Operasi Pembangkitan IPP	• Branch Head of PLN Parigi • Head of Technical Division of PLN Canang Tahuna • Operations Assistant Manager of PLN Minahasa Sector • Deputy Operations Manager of PLN Suluttenggo • Manager of PLN Minahasa Sector • Manager PLN Belawan Sector • Senior Risk Management Engineer of PLN Tanjung Jati B • VP of Power Plant Management of JBTVN Region • VP of Power Plant Management of JBTVB Region • VP of Operations & Primary Energy Control, Jamali • VP of IPP Power Plant Operations
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK Dewan Komisaris No.16/SK/DK-PLN/2024 tanggal 1 September 2024	Decision Letter of the Board of Commissioners No.16/SK/DK-PLN/2024 dated September 1, 2024
Periode Jabatan Tenure	Ke-1	1 st
Jabatan Rangkap Jabatan Rangkap	• PT PLN (Persero) - Tidak ada • Perusahaan Lain - Tidak ada	• PT PLN (Persero) - None • Other Companies - None

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Pernyataan Independensi Komite Manajemen Risiko

Statement of Independence of KMR

KMR telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

KMR has fulfilled the Independence requirement as reflected in the following table:

Persyaratan Independensi Independence Requirments	Ali Masykur Musa	Suahasil Nazara	Susiwijono Moegiarso	Dadan KUSDiana	Jisman Parada Hutajulu	Widhyawan Prawiraatmadja	Saguh Pangaribowo	Leonardus Sitinjak
Memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Having family relationships by marriage or blood up to the second degree with members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki hubungan usaha yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Having direct or indirect business relationships related to the Company's business activities	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sebagai Direksi atau karyawan Perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan lain dalam waktu satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai KMR Serving as a Director or employee of a company affiliated with the Company within one year prior to being appointed as a KMR member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan dan perusahaan afiliasi lainnya Holding shares, either directly or indirectly, in the Company or its affiliated companies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

✓: tidak
X: iya

Remarks:

✓: no
X: yes

Pada tahun 2024, KMR Perseroan telah menandatangani pernyataan independensi yang dimuat dalam Pakta Integritas.

In 2024, the Company's KMR has signed the statement of independence stipulated in the Integrity Pact.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Masa Jabatan Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee's Tenure

Sejalan dengan Piagam KMR dan ketentuan yang berlaku, Masa jabatan Ketua KMR adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan sewaktu - waktu.

Masa jabatan anggota KMR dari luar Anggota Dewan Komisaris selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk menghentikan sewaktu-waktu.

In accordance with the KMR Charter and applicable regulations, the tenure for the Head of the KMR is 3 (three) years and may be reappointed thereafter, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

The tenure for KMR members from outside the Board of Commissioners is 3 (three) years and may be extended once for an additional 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

Piagam Komite Manajemen Risiko

Risk Management Charter

Dalam rangka pelaksanaan tugas KMR dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, KMR menetapkan Piagam KMR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam KMR tersebut antara lain mengatur:

1. Pendahuluan
2. Dasar Hukum
3. Visi dan Misi
4. Maksud dan Tujuan
5. Fungsi dan Tugas Pokok KMR
6. Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang KMR
7. Anggota dan Organisasi KMR
8. Kode Etik KMR
9. Rapat KMR
10. Pelaporan KMR
11. Evaluasi KMR
12. Penutup.

To ensure that the KMR can carry out its duties effectively, transparently, competently, accountably, and acceptably to all relevant parties, KMR has established a KMR Charter approved by the Board of Commissioners.

The scope regulated in the KMR Charter includes:

1. Introduction
2. Legal Basis
3. Vision and Mission
4. Purpose and Objectives
5. Functions and Main Duties of the KMR
6. Obligations, Responsibilities, and Authorities of the KMR
7. Members and Organization of the KMR
8. KMR Code of Conducts
9. KMR Meetings
10. KMR Reporting
11. KMR Evaluation
12. Conclusion.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

Tugas pokok Komite Manajemen Risiko:

- a. Tugas pokok yang berkaitan dengan Dewan Komisaris.
 - Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko serta penelaahan atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan
 - Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan mengenai hasil kajian/analisis risiko kepada Dewan Komisaris
 - Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko.
- b. Tugas Pokok yang berkaitan dengan Manajemen Eksekutif.
 - Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) telah menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko;
 - Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan manajemen risiko; dan
 - Memberikan saran kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris tentang berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses kajian risiko.
- c. Tugas Pokok yang berkaitan dengan Satuan Manajemen Risiko.
 - Menelaah Program Manajemen Risiko Perusahaan yang disusun Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - Membahas kelancaran proses manajemen risiko dan menjembatani hambatan penyelesaian masalah dengan manajemen eksekutif apabila terjadi hambatan dalam proses manajemen risiko;
 - Menelaah kecukupan sumber daya dan kualifikasi tenaga manajemen risiko di Perusahaan; dan
 - Mengevaluasi hasil pemantauan Satuan Kerja Manajemen Risiko atas tindak lanjut hasil manajemen risiko.

Main Duties of the Risk Management Committee:

- a. Main duties related to the Board of Commissioners:
 - Providing input to the Board of Commissioners in the form of assessments regarding the implementation of risk management as well as reviews of the adequacy of risk assessments conducted by Company Management
 - Preparing written reports and present the results of risk assessments/analysis to the Board of Commissioners
 - Providing input to the Board of Commissioners regarding changes and improvements to the Risk Management Committee Charter.
- b. Main duties related to Executive Management:
 - Monitoring and ensuring that all Company activities within the Long-Term Plan (RJP) and the Company Work Plan and Budget (RKAP) adhere to risk management principles;
 - Providing recommendations to Company Management through the Board of Commissioners for designing and implementing risk management policies;
 - Offering advice to Company Management through the Board of Commissioners on various matters that can enhance the smoothness and effectiveness of the risk assessment process.
- c. Main duties related to the Risk Management Unit:
 - Reviewing the Company's Risk Management Program prepared by the Risk Management Unit;
 - Discussing the smooth operation of the risk management process and bridge obstacles in problem resolution with executive management if obstacles occur during the risk management process;
 - Reviewing the adequacy of resources and qualifications of the risk management personnel in the Company; and
 - Evaluating the results of monitoring by the Risk Management Unit on follow-ups to risk management outcomes.



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

2. Tanggung Jawab

- a. Melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris
 - Laporan berkala, berisi pokok-pokok hasil kerja KMR berdasarkan penugasan Dewan Komisaris;
 - Laporan khusus, berisi kajian risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan;
 - Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
 - Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap kajian risiko yang telah dilakukan; dan
 - Laporan pelaksanaan tugas khusus.

2. Responsibilities

- a. Immediately reporting evaluation results to the Board of Commissioners:
 - Periodic reports, containing the main results of the KMR's work based on assignments from the Board of Commissioners;
 - Special reports, containing risk assessments estimated to potentially disrupt the Company's business activities;
 - Reports on field visits that include findings or facts, evaluations, analyses, conclusions, and recommendations;
 - Recommendations based on reviews and evaluations of the risk assessments conducted; and
 - Reports on the implementation of special assignments.

Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Work Program and Implementation of Risk Management Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, KMR melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Piagam dan yang Program Kerja KMR.

Throughout 2024, the KMR carried out various activities in accordance with the provisions of the Charter and the KMR Work Program.

Program Kerja Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee's Work Program

Sejalan dengan piagam KMR, salah satu kewajiban KMR adalah memiliki program kerja KMR, oleh karena itu KMR telah menetapkan program Kerja KMR yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Program Kerja tersebut menjadi tolak ukur Key Performance Indicator KMR tahun 2024. Program Kerja KMR memuat rencana kerja sebagai berikut:

In line with the KMR Charter, one of the obligations of the KMR is to have a work program. Therefore, the KMR has established Work Program that had been approved by the Board of Commissioners. This Work Program serves as the benchmark for the KMR's Key Performance Indicators (KPIs) for 2024. The KMR Work Program includes the following planned activities:

Program Kerja Work Programs	Target
1. Menyusun rencana kerja tahunan Komite Tahun 2025 Preparing the annual work plan of the Committee for the year 2025	Desember 2024 December 2024
2. Mengevaluasi, membahas dan memberikan saran atas Top Risks (Profil Risiko) yang dilaporkan secara periodik dan sewaktu-waktu. Evaluating, discussing, and providing recommendations on the Top Risks (Risk Profile) reported periodically and on an ad hoc basis	4 kali di bulan Januari, April, Juli dan Oktober Four times in January, April, July, and October

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Program Kerja Work Programs	Target
3. Mengevaluasi hasil kajian risiko dan dokumen lainnya yang disampaikan oleh Direksi sebagai kelengkapan atas usulan rencana investasi/pendanaan/transaksi dan/atau kegiatan operasional lainnya serta memberikan tanggapan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi tersebut Evaluating risk assessment results and other documents submitted by the Board of Directors as supporting materials for proposed investment/funding/transactions and/or other operational activities, and providing feedback to the Board of Commissioners regarding these proposals	Dilakukan sewaktu-waktu sesuai permohonan yang disampaikan Direksi Conducted as needed upon request submitted by the Board of Directors
4. Melakukan review dan memberikan tanggapan atas Rencana Perusahaan: - RKAP Tahun Buku 2024 (bila terdapat perubahan asumsi) - RUPTL 2024 - 2033 (jika diperlukan) - RJPP 2024 - 2028 (bila dibutuhkan) - RKAP Tahun Buku 2025 Reviewing and providing feedback on the Company's Plans: - RKAP for Fiscal Year 2024 (if there were changes in assumptions) - RUPTL 2024 - 2033 (if needed) - RJPP 2024 - 2028 (if required) - RKAP for Fiscal Year 2025	Juli April Juni July April June
5. Melakukan <i>review</i>, membahas, menanggapi dan memberikan usulan persetujuan kinerja Perusahaan oleh Dewan Komisaris, untuk hal-hal berikut: - LM dan KPI Aspek Manajemen Risiko Triwulanan Tahun 2024 - <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> PLN Tahun 2023; - Laporan Realisasi PMN Triwulanan Tahun 2023 dan 2024 Reviewing, discussing, responding to, and proposing approval of the Company's performance by the Board of Commissioners for the following matters: - LM and KPI for Risk Management Quarterly Aspects in 2024 - PLN Annual Report and Sustainability Report for 2023 - Quarterly Reports on the Realization of State Capital Injection (PMN) for 2023 and 2024	Januari, April, Juli, Oktober April January, April, July, October April
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners	Dilakukan sewaktu-waktu sesuai permohonan yang disampaikan Direksi Conducted as needed upon request submitted by the Board of Directors.
7. Pengenalan/induksi/peningkatan kompetensi Conducting orientation/induction and competency development	Dilakukan sewaktu-waktu sesuai permohonan yang disampaikan Direksi Conducted as needed upon request submitted by the Board of Directors.
8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas triwulanan Komite kepada Dewan Komisaris: - Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW I Tahun 2024 - Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW II Tahun 2024 - Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW III Tahun 2024 - Laporan Kegiatan dan Realisasi KPI TW IV Tahun 2024 Submitting quarterly Task Implementation Reports of the Committee to the Board of Commissioners: - Activity and KPI Realization Report for Q1 2024 - Activity and KPI Realization Report for Q2 2024 - Activity and KPI Realization Report for Q3 2024 - Activity and KPI Realization Report for Q4 2024	April Juli Oktober Desember April July October December



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Rapat Komite Manajemen Risiko

KMR Meeting

Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadwal di antara Ketua dan para Anggota KMR.

To ensure that the duties are carried out according to their objectives, regular and scheduled meetings need to be arranged between the Head and the members of the KMR.

Kebijakan Rapat Komite Manajemen Risiko

Kebijakan rapat KMR diatur dalam Piagam KMR. Sejalan dengan Kebijakan tersebut, Komite KMR mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang dipimpin oleh Ketua KMR.

KMR Meeting Policy

The KMR meeting policy is regulated in the KMR Charter. In line with this policy, the KMR Committee holds meetings at least once a month, chaired by Head of KMR.

Pertemuan dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau apabila terdapat hal-hal khusus yang perlu dibahas bersama.

Meetings with the Company's Risk Management Unit are held at least once every 3 (three) months and/or whenever there are specific matters that need to be discussed together.

Dalam pelaksanaan rapat KMR dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Sekretaris Perusahaan dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memberikan informasi

In conducting KMR meetings, Executive Management may be invited through the Corporate Secretary and/or the Risk Management Unit to provide information.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2024, KMR telah melaksanakan rapat sebanyak 40 kali rapat dan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frequency and Attendance Rates of KMR Meetings

Throughout 2024, the KMR held 40 meetings with the following attendance rates:

Nama Name	Jabatan di PT PLN (Persero) Position at PT PLN (Persero)	Periode Jabatan Tenure	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rates
Mohamad Ikhsan	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	26 Desember 2019 - 14 Nov 2024 December 26, 2019 - November 14, 2024	38	38	100%
Ali Masykur Musa	Ketua KMR dan Komisaris Independen KMR Head and Independent Commissioner	14 Nov 2024 - 14 Nov 2029 November 14, 2024 - November 14, 2029	2	2	100%

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan di PT PLN (Persero) Position at PT PLN (Persero)	Periode Jabatan Tenure	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rates
Suahasil Nazara	Anggota KMR dan Wakil Komisaris Utama KMR Member and Vice President Commissioner	14 Nov 2024 – 14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	38	35	92%
Dadan Kusdiana	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	16 Juli 2021 – 16 Juli 2026 July 16, 2021 – July 16, 2026	38	36	95%
Susiwijono Moegiarso	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	19 Maret 2024 – 14 Nov 2024 March 19, 2024 – November 14, 2024	38	34	89%
Nawal Nely	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	21 September 2022 – 21 September 2027 September 21, 2022 – September 21, 2027	23	26	88%
Jisman Parada Hutajalu	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	14 Nov 2024 – 14 Nov 2029 November 14, 2024 – November 14, 2029	2	2	100%
Widhyawan Prawiraatmadja	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioners Committee Member	20 Mei 2020 – 31 Mei 2025 May 20, 2020 – May 31, 2025	38	100%	100%
Saguh Pangaribowo	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioners Committee Member	25 Februari 2021– 25 Februari 2026 February 25, 2021 – February 25, 2026	38	100%	100%
Leonardus Sitinjak	Anggota Komite Non Dekom Non-Board of Commissioners Committee Member	1 September 2024 – 1 September 2029 September 1, 2024 – September 1, 2029	38	38	100%

Telaahan dan Kajian Komite Manajemen Risiko

Review and Assessment

Pada tahun 2024, KMR telah melakukan telaahan/kajian atas permohonan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan arahan ataupun teguran Dewan Komisaris serta menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yaitu diantaranya terkait sebagai berikut:

In 2024, the KMR conducted reviews/ assessment on requests from the Board of Directors to obtain recommendations and/or approvals from the Board of Commissioners, and carried out assessments of the Board of Directors' activities or actions that required guidance or reprimand from the Board of Commissioners. The KMR also provided opinions on requests for approval/ recommendations from the Board of Directors, including the following:



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

1. Permohonan Tanggapan PLN pada PT Industri Baterai Indonesia
 2. Permohonan Persetujuan/Tanda tangan Komisaris Utama untuk Laporan PMN Triwulan III Tahun 2023
 3. Penyampaian rencana kerja dan KPI KMR Tahun 2024 Persetujuan Dewan
 4. Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulanan tahun 2024
 5. Penyampaian Hasil Penelaahan Kebutuhan Revisi RKAP dan KPI PT PLN (Persero) Tahun 2024
 6. Penyampaian Laporan dan Permohonan Dukungan atas Penugasan dari Pemerintah kepada PLN untuk Penjualan Tenaga Listrik ke Papua Nugini
 7. Permohonan Tanggapan Tertulis/Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2024-2028.
1. Request for PLN's response regarding PT Industri Baterai Indonesia
 2. Request for approval/signature of the President Commissioner for the Third Quarter 2023 PMN Report
 3. Submission of the 2024 KMR work plan and KPIs for Board approval
 4. Commissioner's approval of the 2024 Quarterly Management Reports
 5. Submission of the review results on the need for revisions to the 2024 RKAP and KPIs of PT PLN (Persero)
 6. Submission of reports and request for support regarding government assignments to PLN for Electricity Sales to Papua New Guinea
 7. Request for written response/approval from the Board of Commissioners on the 2024-2028 Corporate Long-Term Plan of PT PLN (Persero)

Penyampaian Laporan Komite Manajemen Risiko

Submission of KMR Report

Sejalan dengan piagam KMR, secara berkala KMR wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan KMR. Oleh karena itu, Pada tahun 2024, KMR menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

In accordance with the KMR charter, the KMR is required to periodically submit reports to the Board of Commissioners on the implementation of KMR activities. Therefore, in 2024, the KMR submitted the following reports to the Board of Commissioners:

Laporan Komite Manajemen Risiko KMR Report	Tanggal Penyampaian Date of Submission
Triwulan I 1 st Quarter	10 April 2024 April 10, 2024
Triwulan II 2 nd Quarter	21 Juli 2024 July 21, 2024
Triwulan III 3 rd Quarter	17 Oktober 2024 October 17, 2024
Triwulan IV 4 th Quarter	9 Februari 2025 February 9, 2025

Kunjungan Kerja Komite Manajemen Risiko

KRM Work Visits

Selama tahun 2024 KMR melaksanakan kunjungan kerja sebanyak 6 (enam) kali sebagai berikut:

Throughout 2024, KMR carried out 6 (six) work visits as follows:

Tempat Kunjungan Location	Agenda	Tanggal Date
PLN Batam	Site visit	1-3 Mei 2024 May 1-3, 2024
PLN UIP2B Jamali	Site visit	18 Januari 2024 January 18, 2024

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

Tempat Kunjungan Location	Agenda	Tanggal Date
UP3 Bulungan	Site visit	14 Juni 2024 June 14, 2024
PL TU Suralaya	Site visit	11 Juli 2024 July 11, 2024
PLN UIP2B Jamali	Site visit	25 September 2024 September 25, 2024
Papua New Guinea	Site visit	15-18 September 2024 September 15-18, 2024

Pelatihan Komite Manajemen Risiko

KMR Trainings

Pelaksanaan pelatihan Komite Manajemen Risiko mengacu pada Program Kerja Komite Manajemen Risiko. Pada tahun 2024 Komite Manajemen Risiko telah mengikuti *Training* atau program sertifikasi terkait *Qualified Risk Governance Professional (QRGP)* yang diikuti oleh Komisaris Mohamad Ikhsan serta Anggota Komite Manajemen Risiko Non Komisaris Sdr. Saguh Pangaribowo dan Sdr. Widhyawan Prawiraatmadja.

The implementation of Risk Management Committee training refers to the Risk Management Committee Work Program. In 2024, the Risk Management Committee participated in training or certification programs related to the Qualified Risk Governance Professional (QRGP), attended by Commissioner Mohamad Ikhsan and Non-Commissioner Risk Management Committee Members Mr. Saguh Pangaribowo and Mr. Widhyawan Prawiraatmadja.

Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko

KMR Performance Evaluation

Kebijakan evaluasi kinerja KMR diatur dalam Piagam KMR. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Evaluasi terhadap kinerja anggota KMR baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara *self-assessment* dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota KMR untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator berikut:

1. Kehadiran dalam rapat komite;
2. Penguasaan materi yang dibahas;
3. Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat;
4. Secara efektif dan proaktif melakukan tindak lanjut terhadap area-area yang penting dan memerlukan perhatian;
5. Secara efektif menganalisa dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh;
6. Kemampuan memberikan masukan dalam laporan kepada Dewan Komisaris lengkap dan tepat waktu;

The performance evaluation policy of the KMR is regulated in the KMR Charter. In line with this policy, the performance evaluation of KMR members, both individually and collectively, is conducted annually through a self-assessment using an evaluation method within a system established by the Board of Commissioners' Decision. The results of this evaluation are used as a reference for considering the extension of RMC members' terms for the following year, based on the following indicators:

1. Attendance at committee meetings;
2. Mastery of the topics discussed;
3. Quality of and input provided during meetings;
4. Effective and proactive follow-up on key areas requiring attention;
5. Effective analysis and inquiry to ensure sufficient information is obtained;
6. Ability to provide input in reports to the Board of Commissioners in a complete and timely manner;



Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners

7. Kontribusi dalam melakukan evaluasi dan analisis atas usulan RKAP dan RJPP yang diajukan oleh Direksi; 8. Kontribusi dalam mengidentifikasi aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi, dan analisis terhadap upaya mitigasi yang diperlukan; dan 9. Pelaporan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris terkait manajemen risiko dan pengendalian internal Perusahaan.	7. Contribution to the evaluation and analysis of the proposed Corporate Budget and Work Plan (RKAP) and Long-Term Corporate Plan (RJPP) submitted by the Board of Directors; 8. Contribution in identifying high-risk company activities and analyzing necessary mitigation measures; and 9. Reporting to the Board of Commissioners regarding the Company's risk management and internal control.

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

PT PLN (Persero) merupakan Perseroan yang termasuk pada klasifikasi sistemik A kategori konglomerasi, sehingga sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Pasal 56, Perseroan wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

PT PLN (Persero) is a Company included in the systemic classification A conglomeration category, and thus, in line with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 Article 56, the Company is required to form an Integrated Governance Committee.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan organ pendukung yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberi nasihat atas pengelolaan Perseroan

The Integrated Governance Committee is a supporting body formed to assist the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the management of the Company.

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Establishment of Integrated Governance Committee

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT PLN (Persero) dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Komite Tata Kelola Terintegrasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT PLN (Persero).

The Integrated Governance Committee is established based on the Board of Commissioners' Meeting Decision of PT PLN (Persero) and stipulated in the Board of Commissioners' Decision of PT PLN (Persero). The Integrated Governance Committee is independent in carrying out its duties, in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners of PT PLN (Persero).

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
3. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

The Integrated Governance Committee's establishment refers to the following provisions:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises
3. Integrated Governance Committee Charter

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Composition of the Integrated Governance Committee

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan adanya pergantian Dewan Komisaris dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Berikut komposisi atau susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 22 /SK/DK-PLN/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero):

In 2024, there was a change in the Integrated Governance Committee's composition with the replacement of the Board of Commissioners and Integrated Governance Committee members. The following is the Integrated Governance Committee's composition or structure of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024 based on the Board of Commissioners' Decision No. 22/SK/DK-PLN/2024 dated November 21, 2024 on the Establishment of the Integrated Governance Committee's Composition of PT PLN (Persero):

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024

Anggota Member	Posisi di Komite Position on the Committee	Jabatan Position
Burhanuddin Abdullah	Ketua Head	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PLN President Commissioner and Independent Commissioner of PLN
Suhasil Nazara	Anggota Member	Komisaris PLN Commissioner of PLN
Dadan Kusdiana	Anggota Member	Komisaris PLN Commissioner of PLN
Susiwijono Moegiarso	Anggota Member	Komisaris PLN Commissioner of PLN
Emir Kresna Wardana	Anggota Member	Komisaris PT PLN Nusantara Power (<i>SubHolding</i>) Commissioner of PT PLN Nusantara Power (<i>SubHolding</i>)
Iskandar Simorangkir	Anggota Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN Indonesia Power (<i>SubHolding</i>) President Commissioner and Independent Commissioner of PT PLN Indonesia Power (<i>SubHolding</i>)
Achmad Bakir Pasaman	Anggota Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PLN Energi Primer Indonesia (<i>SubHolding</i>) President Commissioner and Independent Commissioner of PT PLN Energi Primer Indonesia (<i>SubHolding</i>)



Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Anggota Member	Posisi di Komite Position on the Committee	Jabatan Position
Supirman	Anggota Member	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Indonesia Comnets Plus (SubHolding) President Commissioner and Independent Commissioner of PT Indonesia Comnets Plus (SubHolding)
Dody Trisunu	Anggota Member	Komisaris Independen PT PLN Batam (Anak Perusahaan) Independent Commissioner of PT PLN Batam (Subsidiary)
Herry Nugraha	Anggota Member	Komisaris Utama PT PLN Energi Management Indonesia (Anak Perusahaan) President Commissioner of PT PLN Energi Management Indonesia (Subsidiary)
Bambang Iswanto	Anggota Member	Komisaris Utama PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (Anak Perusahaan) President Commissioner of PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (Subsidiary)
Gong Matua Hasibuan	Anggota Member	Komisaris Utama PT Haleyora Power (Anak Perusahaan) President Commissioner of PT Haleyora Power (Subsidiary)
Agung Nugraha	Anggota Member	Komisaris Utama PT PLN Nusa Daya (Anak Perusahaan) President Commissioner of PT PLN Nusa Daya (Subsidiary)
Fritz Edward Siregar	Anggota Member	Komisaris Independen PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (Anak Perusahaan) Independent Commissioner of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (Subsidiary)
Sapto Aji Nugroho	Anggota Member	Komisaris Utama PT Pelayanan Bahtera Adhiguna (Cucu Perusahaan) President Commissioner of PT Pelayanan Bahtera Adhiguna (Granddaughter Company)
Parningaton Mardikari	Anggota Member	Komisaris Independen PT PLN Nusantara Power Renewables (Cucu Perusahaan) Independent Commissioner of PT PLN Nusantara Power Renewables (Granddaughter Company)
Maya Rani Puspita	Anggota Member	Komisaris Utama PT PLN Power Renewables (Cucu Perusahaan) President Commissioner of PT PLN Power Renewables (Granddaughter Company)

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan telah sesuai dengan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023:

- Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
- Tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap PLN Grup.
- Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang bisnis ketenagalistrikan;
- Mampu bekerja sama, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif, dan menyediakan waktu cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup memadai mengenai prinsip dan proses penerapan GCG secara umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas operasional PLN
- Komisaris Utama menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota.
- Anggota komite berasal dari Dewan Komisaris PT PLN (Persero)/holding dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan

The Company's Integrated Governance Committee composition is in line with the Integrated Governance Committee Charter, which refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023:

- Have good integrity, morals, and ethics;
- Have no personal interests or relationships that could cause a conflict of interest with PLN Group.
- Have adequate educational background, skills, knowledge, and experience in the electricity business sector
- Able to work together, have good and effective communication skills, and provide sufficient time to carry out the duties;
- Have adequate knowledge and understanding of the principles and processes of GCG implementation in general, as well as laws and regulations related to PLN's operational activities
- The President Commissioner serves as the Chair of the committee and is also a member.
- Committee members come from the Board of Commissioners of PT PLN (Persero)/holding and the Board of Commissioners of Subsidiaries

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profile of Integrated Governance Committee

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi seluruhnya beranggotakan dari unsur Dewan Komisaris, sehingga Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The Integrated Governance Committee members are all members of the Board of Commissioners, and thus, the Integrated Governance Committee Profile can be seen in the Company Profile Chapter, Board of Commissioners Profile Sub-Chapter in this Annual Report.

Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Statement of Independence of the Integrated Governance Committee

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi persyaratan independensi telah sesuai dengan yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

The Integrated Governance Committee has fulfilled the independence requirements as stipulated in the Integrated Governance Committee Charter as reflected in the following table:

Persyaratan Independensi Independence Requirements	Burhanuddin Abdullah	Suahasil Nazara	Susiwijono Moegiarso	Dadan Kusdiana	Mutanto Juwono
Memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi dalam hal keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham [dan/atau hubungan keluarga] dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang Saham di Lingkungan PLN, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dimaksud sesuai dengan pengertian yang ditetapkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Having personal interests or relationships in financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Supervisory Board, Board of Directors and/or Shareholders in PLN, which may affect the ability to act independently. The financial, management, share ownership and/or family relationships referred to are in accordance with the definition set forth in the applicable laws and regulations	✓	✓	✓	✓	✓
Memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan PLN Grup Having business relationships, either directly or indirectly, related to the activities of PLN Group	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:
✓: tidak
X: iya

Remarks:
✓: no
X: yes

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan telah menandatangani pernyataan independensi yang dimuat dalam Pakta Integritas.

In 2024, the Company's Integrated Governance Committee signed a statement of independence contained in the Integrity Pact.



Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tenure of the Integrated Governance Committee

Sejalan dengan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, masa tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS. berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas berakhir.

Dewan Komisaris PT PLN (Persero), dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi jika dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota komite sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan penunjukan/pengangkatan anggota komite yang bersangkutan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris PLN yang menjabat sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, maka Ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen PLN lainnya yang menjadi Ketua pada salah satu Komite pada PLN dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

In line with the Integrated Governance Committee Charter, the tenure of Integrated Governance Committee is the same as the term of appointment as a member of the Board of Commissioners as determined by the GMS. automatically terminates if his/her term of office as a member of the Board of Commissioners or the Supervisory Board ends.

The Board of Commissioners of PT PLN (Persero) may dismiss at any time a member of the Integrated Governance Committee if he/she is deemed not to have carried out his/her duties as a member of the committee as stated in the Decision on the appointment/resignation of the relevant committee member.

In the event that a member of PLN's Board of Commissioners who serves as the Chairman of Integrated Governance Committee resigns from his/her position as a member of PLN's Board of Commissioners, the Chairman of the Committee must be replaced by another member of PLN's Independent Board of Commissioners who becomes the Chairman of one of the Committees at PLN within a maximum of 30 (thirty) days.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee (TKT) Charter

Dalam rangka pelaksanaan tugas TKT dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, Komite Tata Kelola Terintegrasi menetapkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada Maret 2024 dan telah merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Pasal 56, Perseroan wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Ruang lingkup yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut antara lain mengatur:

1. Dasar Hukum
2. Pembentukan dan Struktur Komite
3. Persyaratan Anggota Komite
4. Keanggotaan Komite

To perform TKT's duties effectively, transparently, competently, accountably, and in an acceptable manner to all stakeholders, the Integrated Governance Committee has established the Integrated Governance Committee Charter, which has been approved by the Board of Commissioners in March 2024 and refers to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 Article 56, stating that the Company is required to form an Integrated Governance Committee.

The scope regulated in the Integrated Governance Committee Charter includes:

1. Legal Basis
2. Formation and Structure of the Committee
3. Requirements for Committee Members
4. Committee Membership

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite	5. Duties, Responsibilities, and Authorities of the Committee
6. Pengangkatan, Pemberhentian serta Masa Tugas Anggota Komite	6. Appointment, Dismissal, and Tenure of Committee Members
7. Rapat Komite	7. Committee Meetings
8. Pelaporan	8. Reporting
9. Penutup	9. Closing

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan di dalam Piagam Komite, dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero);
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/ Menteri; dan
- Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

The Integrated Governance Committee has duties and responsibilities based on the provisions in the Committee Charter, with the following details:

- Evaluating the Integrated Governance policy;
- Monitoring and evaluating the suitability of the Integrated Governance policy of PT PLN (Persero);
- Evaluating the implementation of Integrated Governance, at least through an assessment of the adequacy of internal control and the implementation of integrated compliance functions;
- Providing recommendations to the Board of Commissioners/Supervisory Board for the improvement of the Integrated Governance policy;
- Communicating with work units for functions including Internal Audit, legal and compliance, finance and Risk Management, human resources, and aspects of the required business operational functions, to obtain information, clarification and to request reports required in an integrated manner;
- Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or GMS resolutions/ Ministerial Decrees; and
- Carrying out other authorities, duties, and responsibilities related to its functions.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Implementation of Integrated Governance Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Throughout 2024, the Integrated Governance Committee carried out various activities in accordance with those stipulated in the Integrated Governance Committee Charter.



Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee's Meeting

Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadwal antara Ketua dan para Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite Tata Kelola Terintegrasi), yang juga dapat mengundang Direksi dan Divisi Perseroan sesuai dengan kebutuhan untuk membahas hal-hal yang perlu didiskusikan.

In carrying out its duties in accordance with its objectives, it is necessary to organize regular and scheduled meetings between the Chairman and Members of the Integrated Governance Committee, which can also invite the Board of Directors and Divisions of the Company as needed to discuss matters as necessary.

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diatur dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Sejalan dengan Kebijakan tersebut, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan. Rapat Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51 % dari jumlah anggota.

Integrated Governance Committee's Meeting Policy

The Integrated Governance Committee's meeting policy is regulated in the Integrated Governance Committee Charter. In line with the Policy, the Integrated Governance Committee may hold a meeting at least 1 (one) time every quarter. Integrated Governance's Meeting may only be held if attended by at least 51% of the total members.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir. Pengaturan hak suara anggota Komite menganut prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

The Committee's meeting decision is made based on consensus. In the event that consensus is not reached, decision is made based on a majority vote. The meeting decision is considered valid if approved by more than 1/2 of the total attending members of the Integrated Governance Committee. The regulation of voting rights of Committee members adheres to the principle of 1 (one) person 1 (one) vote.

Rapat Komite dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

The Committee's meeting may be held via teleconference, video conference, or other electronic media. The Committee's meeting results must be stated in the minutes of meeting, signed by all attending members and properly documented.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Dissenting opinion that occur in the meeting is clearly stated in the minutes of meeting along with the reason for the dissenting opinion.

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan Rapat sebanyak 4 (Empat) kali terdiri dari rapat Dewan Komisaris dengan Komisaris Independen Subholding, dan Anak Perusahaan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Telaahan dan Kajian

Telaahan dan Kajian

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan telaahan/kajian atas permohonan Direksi untuk mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan Dewan Komisaris, dan melakukan kajian atas kegiatan atau tindakan Direksi yang perlu mendapatkan arahan ataupun teguran Dewan Komisaris serta menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/rekomendasi dari Direksi yaitu diantaranya terkait sebagai berikut:

1. Pemaparan awal Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Manajemen Risiko Terintegrasi SubHolding/Anak Perusahaan
3. Pemaparan Kondisi Keuangan dan Kondisi Operasional Sub Holding dan Anak Perusahaan per 30 Juni 2024
4. Pemaparan Implementasi Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi di Sub Holding dan Anak Perusahaan per 30 Juni 2024;
5. Pemaparan Implementasi Kepatuhan Terintegrasi di Sub Holding & Anak Perusahaan per 30 Juni 2024;
6. Penyeragaman Anggaran Dasar Sub Holding dan Anak Perusahaan;
7. Kepatuhan Terintegrasi;
8. Pengawasan Internal Terintegrasi.

Frequency and Attendance Level of Integrated Governance Committee's Meetings

The Integrated Governance Committee held 4(four) meetings, consisting of meetings of the Board of Commissioners with Independent Commissioners of Subholdings and Subsidiaries who are members of the Integrated Governance Committee.

In 2024, the Integrated Governance Committee has reviewed/studied the request of the Board of Directors to obtain recommendations and/or approval from the Board of Commissioners, and reviewed the activities or actions of the Board of Directors that need direction or reprimand from the Board of Commissioners and expressed opinions on requests for approval/recommendations from the Board of Directors, including those related to the following:

1. Initial presentation of Integrated Risk Management
2. Integrated Risk Management of SubHolding/Subsidiary
3. Presentation of Financial Condition and Operational Condition of Sub Holding and Subsidiary as of June 30, 2024
4. Presentation of Implementation of Integrated Internal Supervision System in Sub Holding and Subsidiary as of June 30, 2024;
5. Presentation of Implementation of Integrated Compliance in Sub Holding & Subsidiary as of June 30, 2024;
6. Standardization of Articles of Association of Sub Holding and Subsidiary;
7. Integrated Compliance;
8. Integrated Internal Supervision.

Penyampaian Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Submission of Integrated Governance Committee's Report

Sejalan dengan piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, secara berkala Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib membuat dan menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi. Oleh karena itu, Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

In line with the Integrated Governance Committee charter, the Integrated Governance Committee is required to periodically prepare and submit a report on each implementation of its duties accompanied by recommendations if necessary to the Board of Commissioners, signed by the Chairman of Integrated Governance Committee. Therefore, in 2024, the Integrated Governance Committee submitted a Report to the Board of Commissioners as follows



Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Other Committee Under the Board of Commissioners

Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi	Tanggal Penyampaian Tanggal Penyampaian
Triwulan I	16 Mei 2024 16 Mei 2024
Triwulan II	12 Agustus 2024 12 Agustus 2024
Triwulan III	29 Oktober 2024 29 Oktober 2024
Triwulan IV	22 Januari 2025 22 Januari 2025

Pelatihan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee's Training

Pada tahun 2024 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengikuti *Training* yaitu *Certificate of Competence* di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 yang diikuti oleh Sdr. Mohamad Ikhsan. Adapun pelatihan yang diikuti dari Unsur Dewan Komisaris telah disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, the Integrated Governance Committee attended a Training, which was the Certificate of Competence in Jakarta on October 21, 2024, attended by Mr. Mohamad Ikhsan. The training attended by the Board of Commissioners has been presented in the Corporate Governance Chapter, the Board of Commissioners Sub-Chapter in this Annual Report.

Evaluasi Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee's Performance Evaluation

Secara umum, Dewan Komisaris menilai Komite Tata Kelola Terintegrasi telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya.

In general, the Board of Commissioners assesses that the Integrated Governance Committee performed properly in 2024, as reflected in the committee's support and role in the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities. The support provided included decision-making and providing recommendations in accordance with the limitations of its authority.



Komite Lain di Bawah Direksi

Komite Lain di Bawah Direksi

Komite *Sustainability*

Sustainability Committee

PT PLN (Persero) membentuk komite *sustainability* sejak tahun 2021 dan diperbaharui secara berkala dalam rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembentukan komite ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan target-target keberlanjutan, serta memperkuat komitmen terhadap pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

PT PLN (Persero) has established a sustainability committee since 2021, which is regularly updated to support the implementation of sustainability principles in all aspects of the Company's operations, including social, economic, and environmental aspects. The establishment of this committee aims to ensure that the Company conducts its business activities in line with sustainability targets, as well as to strengthen its commitment to managing risks and opportunities related to ESG (*Environmental, Social, and Governance*) issues.

Pembentukan Komite *Sustainability*

Establishment of Sustainability Committee

Komite *Sustainability* dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero). Pembentukan Komite *Sustainability* merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
3. Anggaran Dasar PLN
4. Peraturan Direksi PT PLN (Perser) Nomor 0045.P/DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Bisnis Berkelanjutan PT PLN (Persero)

The Sustainability Committee is established based on a Board of Directors' Decision and formalized in a Decision Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero). The establishment of the Sustainability Committee refers to the following regulations:

1. Presidential Regulation No. 111 of 2022 on the Implementation of Sustainable Development Goals Achievement
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of SOEs
3. The Articles of Association of PLN
4. Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0045.P/DIR/2024 on the Sustainable Business Strategic Policy of PT PLN (Persero)

Struktur dan Keanggotaan Komposisi Komite *Sustainability*

Structure and Composition of Sustainability Committee

Komposisi Komite *Sustainability* terdiri dari unsur Direksi dan EVP Perseroan. Komposisi atau susunan keanggotaan Komite *Sustainability* PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.0322.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* adalah sebagai berikut:

The composition of the Sustainability Committee consists of members from the Board of Directors and EVPs of the Company. The composition or membership structure of the Sustainability Committee of PT PLN (Persero) as of December 31, 2024, as stipulated in the Board of Directors' Decision No. 0322.K/DIR/2024 on the Establishment of the Sustainability Committee, is as follows:



Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Steering Committee	1. Direktur Utama 2. Direktur Transmisi dan Perencanaan 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Legal dan Manajemen HC 5. Direktur Retail dan Niaga 6. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 7. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 8. Direktur Manajemen Pembangkitan 9. Direktur Distribusi 10. Direktur Manajemen Risiko	1. President Director 2. Director of Transmission and Planning 3. Director of Finance 4. Director of Legal and HC Management 5. Director of Retail and Commerce 6. Director Corporate Planning and Business Development 7. Director of Project Management and New Renewable Energy 8. Director of Power Plant Management 9. Director of Distribution 10. Director of Risk Management
Ketua Head	EVP Transisi Energi dan Keberlanjutan	EVP of Energy Transition and Sustainability
Wakil Ketua Deputy Head	1. EVP K3L 2. EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan 3. EVP Aneka Energi Baru Terbarukan 4. EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise 5. EVP Komunikasi Korporat dan TJSL 6. EVP Kepatuhan	1. EVP of Occupational Safety and Health (OHS), Security, and Environment 2. EVP of Electricity System Planning 3. EVP of Various New Renewable Energies 4. EVP of Enterprise Sales and Customer Service 5. EVP of Corporate Communication and TJSL 6. EVP of Compliance

Informasi terkait struktur dan keanggotaan Komite Sustainability dijelaskan lebih lanjut pada buku terpisah yaitu Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

Information related to the structure and membership of the Sustainability Committee is further explained in a separate document, namely the 2024 Sustainability Report.

Profil Komite Sustainability

Profile of Sustainability Committee

Anggota Komite Sustainability terdiri dari unsur Direksi, sehingga Profil Komite Sustainability dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Members of the Sustainability Committee consist of members from the Board of Directors. Thus, profile of the Sustainability Committee can be seen in the Company Profile chapter, specifically in the Board of Directors Profile subsection of this Annual Report.

Independensi Komite Sustainability

Independence of Sustainability Committee

Komite Sustainability PT PLN (Persero) telah bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak intervensi yang dapat mengurangi objektivitasnya.

The Sustainability Committee of PT PLN (Persero) has acted independently in carrying out its duties and functions, ensuring that every decision made is free from interventions that could compromise its objectivity.

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Pedoman Komite Sustainability

Sustainability Committee Guidelines

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite *Sustainability* dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, kompeten, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, Direksi mendelegasikan kewenangan pengelolaan berkelanjutan kepada Komite *Sustainability* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No.0322.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite *Sustainability* dan telah merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023.

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan Direksi tersebut antara lain mengatur Susunan Keanggotaan Komite *Sustainability*, Bagan Organisasi Komite *Sustainability* dan Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Sustainability*

In order to carry out the duties of the Sustainability Committee effectively, transparently, competently, accountably, and acceptably to all relevant stakeholders, the Board of Directors delegates the authority for sustainable management to the Sustainability Committee as established by the Board of Directors' Decision No. 0322.K/DIR/2024 on the Establishment of the Sustainability Committee, which refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-1/MBU/03/2023.

The scope regulated in this Board of Directors' Decision includes, among others, the Composition of the Sustainability Committee Membership, the Organizational Structure of the Sustainability Committee, and the Duties and Responsibilities of the Sustainability Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sustainability

Duties and Responsibilities of Sustainability Committee

1. Melaksanakan, memonitor, dan memastikan penerapan prinsip <i>sustainability</i> 2. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran kerangka kerja <i>sustainability</i> dan target seluruh aspek <i>sustainability</i> 3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pencapaian target pencapaian <i>sustainability</i> 4. Melaporkan progres dan perkembangan <i>sustainability</i> kepada Direksi melalui <i>committee meeting</i> 5. Menyiapkan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite <i>sustainability</i> 6. Mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan seluruh dokumen selama proses pelaksanaan tugas komite <i>sustainability</i>	1. Implementing, monitoring, and ensuring the application of sustainability principles 2. Developing and updating the sustainability framework and targets across all aspects of sustainability 3. Monitoring and evaluating the achievement of sustainability targets 4. Reporting progress and developments in sustainability to the Board of Directors through committee meetings 5. Preparing administrative processes in carrying out the duties and responsibilities of the sustainability committee 6. Documenting and archiving all documents throughout the execution of the Sustainability Committee's duties

Pelaksanaan Kegiatan Komite Sustainability

Implementation of Sustainability Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite *Sustainability* melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Direksi No.0322.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite Sustainability sebagai berikut:

Throughout 2024, the Sustainability Committee carried out various activities in accordance with the provisions of the Board of Directors' Decision No. 0322.K/DIR/2024 on the Establishment of the Sustainability Committee as follows:



Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Rapat Komite Sustainability

Sustainability Committee's Meetings

Sepanjang tahun 2024, Komite Sustainability telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali rapat dan dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Throughout 2024, the Sustainability Committee held 12 meetings with the following agendas and attendance rates of the Board of Directors:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	- ESG Workstream : ESG Risk Rating - Energy Transition Workstream: Green Ecosystem - Enablers Workstream: Reporting and Matutiry Level Sustainability	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
2	29 Januari 2024 January 29, 2024	- Energy Transition Workstream: Peningkatan Kapasitas Pembangkit EBT dan Green Ecosystem - Energy Transition Workstream: Increasing Capacity of Renewable Energy Power Plants and Green Ecosystem - ESG Workstream: KPI ESG Dashboard - Enablers Workstream: Sustainability Financing and Digitalisasi	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
3	13 Februari 2024 February 13, 2024	- Energy Transition Workstream: Co-Firing Biomassa, Peningkatan Kapasitas Pembangkit EBT dan Green Ecosystem - Energy Transition Workstream: Biomass Co-Firing, Increasing Capacity of NRE Power Plants, and Green Ecosystem - ESG Workstream: EDGE Certification - Enablers Workstream: Budget Tagging and Executive Dashboard	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
4	27 Februari 2024 February 27, 2024	- NZE Moonshot - Biomass Co-firing	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
5	13 Maret 2024 March 13, 2024	- Energy Transition Workstream: Co-Firing Biomassa, Peningkatan Kapasitas Pembangkit EBT dan Green Ecosystem - ESG Workstream: EDGE Certification, ESG Audit, and SMT	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
6	27 Maret 2024 March 27, 2024	- Energy Transition Workstream: Pengelolaan Green Attribute - Energy Transition Workstream: Management of Green Attribute - ESG Workstream: Dashboard update, Sustainability Roadmap PLN Icon	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance
7	25 April 2024 April 25, 2024	- Energy Transition Workstream: Penetapan target pembangkit energi terbarukan COD tahun 2024 - ESG Workstream: Progres Akreditasi Pusertif sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (LVV GRK) ISO 14064 - Energy Transition Workstream: Setting targets for renewable energy power plants COD in 2024 - ESG Workstream: Progress on Accreditation of Pusertif as a Greenhouse Gas Validation and Verification Institution (LVV GRK) ISO 14064	- Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem - Direktur Keuangan - Director of Transmission and System Planning - Director of Finance

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	21 Mei 2024 May 21, 2024	• <i>Energy Transition Workstream: akuisisi green attribute IPP</i> • <i>ESG Workstream: Pelaporan IFRS S1 & S2</i> • Energy Transition Workstream: Acquisition of green attribute IPP • ESG Workstream: IFRS S1 & S2 Reporting	• Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem • Direktur Keuangan • Director of Transmission and System Planning • Director of Finance
9	19 Juni 2024 June 19, 2024	• <i>Energy Transition Workstream: Overview Emisi GRK Korporat 2023 dan Prognosa Emisi 2024 , PLN NP Achievements pada Transparansi Perhitungan dan Penurunan Emisi GRK, Prognosa Capaian Co-firing Biomassa dan Dukungan yang Diperlukan</i> • Energy Transition Workstream: Overview of Corporate GHG Emissions 2023 and Emission Forecast 2024, PLN NP Achievements on Transparency of GHG Emissions Calculation and Reduction, Biomass Co-firing Achievement Forecast and Required Support • <i>ESG Workstream: Sustainability Academy and Gender Academy</i>	• Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem • Direktur Keuangan • Direktur Legal dan Manajemen Human Capital • Director of Transmission and System Planning • Director of Finance • Director of Legal and Human Capital Management
10	10 Juli 2024 July 10, 2024	• <i>Energy Transition Workstream: Akuisisi Green Attribute</i> • <i>ESG Workstream: Pelaporan IFRS S1 & S2</i> • Energy Transition Workstream: Acquisition of Green Attribute • ESG Workstream: IFRS S1 & S2 Reporting	• Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem • Direktur Keuangan • Director of Transmission and System Planning • Director of Finance
11	31 Juli 2024 July 31, 2024	• <i>Energy Transition Workstream: Dekarbonisasi dan Nilai Ekonomi Karbon</i> • Energy Transition Workstream: Decarbonization and Carbon Economic Value • <i>ESG Workstream: Dashboard Executive</i>	• Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem • Direktur Keuangan • Director of Transmission and System Planning • Director of Finance
12	16 Oktober 2024 October 16, 2024	• <i>Energy Transition Workstream: Akuisisi Green Attribute</i> • <i>ESG Workstream: CDP Questionnaire dan Pelaporan IFRS S1 & S2</i> • Energy Transition Workstream: Acquisition of Green Attribute • ESG Workstream: CDP Questionnaire and IFRS S1 & S2 Reporting	• Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem • Direktur Keuangan • Director of Transmission and System Planning • Director of Finance

Pelaksanaan Pelatihan Komite Sustainability

Implementation of Sustainability Committee's Trainings

Pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh Komite Sustainability yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The training programs attended by members of the Sustainability Committee from the Board of Directors can be found in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.



Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Evaluasi Kinerja Komite *Sustainability*

Performance Evaluation of Sustainability Committee

Secara umum, Direksi menilai Komite *Sustainability* telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya.

In general, the Board of Directors assesses that the Sustainability Committee had performed well throughout 2024, as reflected in the committee's support and role in assisting the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities. The support provided includes decision-making and providing recommendations in accordance with its scope of authority.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Information Technology Steering Committee

PT PLN (Persero) membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kapabilitas dan perencanaan strategis teknologi informasi secara lebih agile dan adaptif terhadap dinamika perubahan bisnis, termasuk kebutuhan sumber daya, arah strategis perusahaan, serta pemenuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.

Komite Pengarah Teknologi Informasi atau yang selanjutnya disebut Komite Pengarah TI dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 0181.K/DIR/2017 Tahun 2017 dan diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0063.K/DIR/2025 Tahun 2025.

Pembentukan dan pembaharuan Komite Pengarah TI dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana Komite Pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keselarasan antara Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan TI.

PT PLN (Persero) established the Information Technology Steering Committee in order to optimize the management of capabilities and the strategic planning of information technology in a more agile and adaptive manner in response to dynamic business changes, including resource needs, the Company's strategic direction, and compliance with applicable regulations.

The Information Technology Steering Committee, hereinafter referred to as the IT Steering Committee, was established and formalized through the Decision Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0181.K/DIR/2017 of 2017 and was updated through the Decision Letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0063.K/DIR/2025 of 2025.

The establishment and update of the IT Steering Committee were carried out by referring to the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, in which the IT Steering Committee is responsible for ensuring alignment between the Information Technology Strategic Plan and the Company's Long-Term Plan, ensuring the implementation of the Information Technology Strategic Plan as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and evaluating, directing, and monitoring the implementation of IT operations.

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Struktur dan Keanggotaan Komposisi Komite Pengarah TI

IT Steering Committee's Structure and Composition

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anggota Komite Pengarah TI di BUMN paling sedikit terdiri dari Direktur yang membidangi TI dan Direktur yang membidangi Manajemen Risiko. Berikut ini adalah komposisi atau susunan keanggotaan Komite Pengarah TI sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0063.K/DIR/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Pengarah TI:

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, members of the IT Steering Committee in State-Owned Enterprises must include at least the Director in charge of Information Technology and the Director in charge of Risk Management. The following is the composition or membership structure of the IT Steering Committee as stipulated in the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0063.K/DIR/2025 of 2025 on the Establishment of the IT Steering Committee:

Ketua Head	1. Direktur Utama	1. President Director
Wakil Ketua Deputy Head	1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur Keuangan	1. Director of Risk Management 2. Director of Finance
Anggota Member	1. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital 2. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 3. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 4. Direktur Manajemen Pembangkitan 5. Direktur Transmisi dan Perencanaan 6. Direktur Distribusi 7. Direktur Retail dan Niaga	1. Director of Legal and Human Capital Management 2. Director of Corporate Planning and Business Development 3. Director of Project Management and New Renewable Energy 4. Director of Power Plant Management 5. Director of Transmission and Planning 6. Director of Distribution 7. Director of Retail and Commerce
Sekretaris Komite Secretary of the Committee	1. Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi 2. EVP Sistem dan Teknologi Informasi 3. EVP Manajemen Digital	1. Head of Digital and Information Technology Unit 2. EVP of Information System and Technology 3. EVP of Digital Management

Profil Komite Pengarah TI

Profile of IT Steering Committee

Anggota Komite Pengarah TI terdiri dari unsur Direksi, sehingga Profil Anggota Komite Pengarah TI dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan Sub Bab Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

The members of the IT Steering Committee consist of members of the Board of Directors; therefore, the profiles of the IT Steering Committee members can be found in the Company Profile chapter, subsection Board of Directors Profile, in this Annual Report.



Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI

Duties and Responsibilities of IT Steering Committee

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0063.K/DIR/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Pengarah TI, berikut ini adalah Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI:

1. Ketua Komite
 - a. Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab Komite Pengarah TI sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG);
 - b. Menentukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab Komite Pengarah TI guna memastikan keselarasan antara Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP); dan
 - c. Memimpin atau menugaskan Wakil Ketua Komite untuk memimpin rapat Komite Pengarah TI sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan.
2. Wakil Ketua Komite
 - a. Mengevaluasi dan memastikan keselarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - b. Memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - c. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi;
 - d. Menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Teknologi Informasi kepada Ketua.
3. Anggota Komite
 - a. Menghadiri rapat Komite Pengarah TI sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan;
 - b. Memberikan saran, pertimbangan, dan pandangan untuk memastikan keselarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
 - c. Mengarahkan dan memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada Direktorat atau Satuan Kerja masing-masing; dan
 - d. Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Direktorat atau Satuan Kerja masing-masing.

Based on the Decision of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 0063.K/DIR/2025 of 2025 on the Establishment of the IT Steering Committee, the duties and responsibilities of the IT Steering Committee are as follows:

1. Head of the Committee
 - a. Providing strategic direction in carrying out the duties and responsibilities of the IT Steering Committee in accordance with Good Corporate Governance (GCG);
 - b. Determining strategies and policies in carrying out the duties and responsibilities of the IT Steering Committee to ensure alignment between the Information Technology Strategic Plan (ITSP) and the Company's Long-Term Plan (CLTP); and
 - c. Leading or assigning the Deputy Head of the Committee to lead the IT Steering Committee meetings according to the established schedule and agenda.
2. Deputy Head of the Committee
 - a. Evaluating and ensuring alignment between the Information Technology Strategic Plan (ITSP) and the Company's Long-Term Plan (CLTP);
 - b. Ensuring the implementation of the Information Technology Strategic Plan as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
 - c. Evaluating, directing, and monitoring the implementation of Information Technology operations;
 - d. Submitting evaluation and monitoring reports on the implementation of Information Technology to the Head.
3. Committee Members
 - a. Attending IT Steering Committee meetings according to the established schedule and agenda;
 - b. Providing advice, considerations, and insights to ensure alignment between the Information Technology Strategic Plan (RSTI) and the Company's Long-Term Plan (RJPP);
 - c. Directing and ensuring the implementation of the Information Technology Strategic Plan as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) within their respective Directorates or Work Units; and
 - d. Evaluating, directing, and monitoring the implementation of Information Technology operations within their respective Directorates or Work Units.

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

4. Sekretaris Komite

- Mengelola hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat meliputi penyusunan dan distribusi undangan, penentuan peserta rapat sesuai agenda, pencatatan kehadiran, serta penyusunan dan distribusi materi rapat;
- Menyusun risalah rapat, dokumentasi hasil keputusan, serta distribusi risalah rapat dan keputusan rapat kepada peserta rapat secara tertib dan terorganisir;
- Mengelola dan mengorganisir penyimpanan seluruh dokumen yang terkait dengan Komite Pengarah TI;
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil rapat Komite Pengarah TI kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite; dan
- Memonitor dan menyusun laporan tindak lanjut hasil rapat Komite Pengarah TI.

4. Secretary of the Committee

- Managing matters related to meeting implementation, including preparing and distributing invitations, determining participants according to the agenda, recording attendance, and preparing and distributing meeting materials;
- Preparing meeting minutes, document decisions, and distribute meeting minutes and resolutions to participants in an orderly and organized manner;
- Managing and organizing the storage of all documents related to the IT Steering Committee;
- Preparing and submitting reports on the results of IT Steering Committee meetings to the Head, Deputy Head, and Committee Members; and
- Monitoring and preparing follow-up reports on the outcomes of IT Steering Committee meetings.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pengarah TI

Implementation of IT Steering Committee's Activities

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah TI telah melaksanakan rapat pembahasan rencana strategis TI sebanyak 7 (tujuh) kali dan dengan agenda dan tingkat kehadiran Direksi sebagai berikut:

Throughout 2024, the IT Steering Committee held 7 (seven) meetings to discuss the IT strategic plan, with the following agendas and attendance rates of the Board of Directors:

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Keuangan, Direktur Manajemen Risiko, EVP dan VP terkait Director of Finance, Director of Risk Management, and concerned EVP and VP
2	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Distribusi, Direktur Transmisi dan Perencanaan, EVP dan VP terkait Director of Distribution, Director of Transmission and Planning, and concerned EVP and VP
3	4 September 2024 September 4, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, EVP dan VP terkait Director of Corporate Planning and Business Development, concerned EVP and VP
4	6 September 2024 September 6, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan, EVP dan VP terkait Director of Legal and Human Capital Management, Director of Project Management and New Renewable Energy, concerned EVP and VP
5	11 September 2024 September 11, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Manajemen Pembangkitan, EVP dan VP terkait Director of Power Plant Management, concerned EVP and VP

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6	3 Oktober 2024 October 3, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Retail dan Niaga, EVP dan VP terkait Director of Retail and Commerce, concerned EVP and VP
7	4 Desember 2024 December 4, 2024	Sesi Arahan <i>Top Management</i> untuk Pemutakhiran Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Tahun 2024-2028 Top Management Briefing Session on the Update of the Information Technology Strategic Plan (RSTI) for 2024-2028	Direktur Utama, EVP dan VP terkait President Director, concerned EVP and VP

Pelaksanaan Pelatihan Komite Pengarah TI

Training Implementation of IT Steering Committee

Pelaksanaan pelatihan yang diikuti oleh Komite Pengarah TI yang dari unsur Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The training attended by the IT Steering Committee members from the Board of Directors can be found in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

Evaluasi Kinerja Komite Pengarah TI

IT Steering Committee Performance Evaluation

Secara umum, Direksi menilai Komite Pengarah TI telah bekerja secara baik selama 2024 yang tercermin melalui dukungan dan peran komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dukungan yang telah diberikan mencakup dalam pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan batasan kewenangannya.

In general, the Board of Directors assesses that the IT Steering Committee had performed well throughout 2024, as reflected by the committee's support and role in assisting the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities. The support provided includes decision-making and giving recommendations within the scope of its authority.

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ pendukung yang memimpin dan melaksanakan fungsi sekretariat Dewan Komisaris, mencakup peran sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Dewan Komisaris dengan pihak lain. Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dapat berasal dari lingkup eksternal Perseroan, dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners appoints the Secretary to the Board of Commissioners as a supporting organ responsible for leading and carrying out the secretarial functions of the Board of Commissioners, including acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties. The Secretary to the Board of Commissioners may be appointed from outside the Company, with a tenure determined by the Board of Commissioners.

Syarat Sekretaris Dewan Komisaris

Criteria for Secretary to the Board of Commissioners

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris PLN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara pasal 127 dengan rincian sebagai berikut:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan; dan
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 16/SK/DK-PLN/2020 tanggal 6 Mei 2020 ditetapkan Sekretaris Dewan Komisaris adalah Sdr. Achmad Taufik. Surat Keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020 s.d. 14 April 2023. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 04/SK/DK-PLN/2023 tanggal 11 April 2023 tentang perpanjangan masa tugas Sdr. Achmad Taufik sebagai Sekretaris Dewan Komisaris. Surat Keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2023 s.d. 14 April 2025. Kemudian pada 02 September 2024 diangkat Sekretaris Dewan Komisaris yang baru yaitu Sdr. Dwi Badarmanto sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK/DK-PLN/2024 .

The criteria for the PLN's Secretary to the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023 dated March 24, 2023, on the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, Article 127, with the following details:

1. Understanding the management, supervision, and development systems of SOEs;
2. Possessing strong integrity;
3. Understanding secretarial functions; and
4. Having the ability to communicate and coordinate effectively.

Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 16/SK/DK-PLN/2020 dated May 6, 2020, Mr. Achmad Taufik was appointed as the Secretary to the Board of Commissioners. The decision was effective from May 15, 2020, to April 14, 2023. Subsequently, pursuant to the Board of Commissioners' Decision Letter No. 04/SK/DK-PLN/2023 dated April 11, 2023, Mr. Achmad Taufik's tenure as Secretary to the Board of Commissioners was extended, effective from April 15, 2023, to April 14, 2025. Later, on September 2, 2024, a new Secretary to the Board of Commissioners, Mr. Dwi Badarmanto, was appointed based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 14/SK/DK-PLN/2024.

Marsma TNI (Purn.) Ir. Dwi Badarmanto M.T.

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Usia: 66 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Age: 66 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia



Riwayat Pendidikan Education

- Magister Elektronika dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1996
- Sarjana Elektronika dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Tahun 1991
- Master's degree in Electronics from Institut Teknologi Bandung, 1996
- Bachelor's degree in Electronics from the Naval Technology College, 1991



Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Service History/Experience

- Komisaris Indonesia Air Transport (2019)
- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (2015-2016)
- Asisten Deputi II/Bidang Strategi Politik Luar Negeri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2014 – 2015)
- Perwira Menengah Staf Ahli Kadis Angkatan Udara Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2011 –2014)
- Kepala Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (2010 –2011)
- Koordinator Staf Khusus Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (2008 –2010)
- Perwira FMS di Washington DC Amerika (2002 – 2007)
- Koordinator Staf Khusus Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan (2001- 2002)
- Kepala Laboratorium Elektronika Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara (1999 –2001)
- Commissioner of Indonesia Air Transport (2019)
- Head of the Information Service of the Indonesian Air Force (2015–2016)
- Deputy Assistant II for Foreign Political Strategy to the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs (2014–2015)
- Middle-ranking Officer, Expert Staff to the Chief of the Air Force in Science and Technology (2011–2014)
- Head of Logistics and Maintenance Division, General Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Defense (2010–2011)
- Coordinator of Special Staff to the Secretary General of the Ministry of Defense (2008–2010)
- FMS Officer in Washington, D.C., USA (2002–2007)
- Coordinator of Special Staff to the Director General of Defense Strategy of the Ministry of Defense (2001–2002)
- Head of the Electronics Laboratory at the Research and Development Office of the Indonesian Air Force (1999–2001)

Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) Nomor: 14/SK/DK-PLN/2024 tanggal 2 September 2024.	Board of Commissioners' Decision Letter of PT PLN (Persero) No. 14/SK/DK-PLN/2024 dated September 2, 2024.
Periode Jabatan Tenure	Ke-1	1 st
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• PT PLN (Persero) - Tidak ada • Perusahaan Lain - Tidak ada	• PT PLN (Persero) - None • Other Companies - None

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Secretary to the Board of Commissioners

Sesuai Board Manual PLN, sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris yang perincian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
2. Mengoordinasi penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.
3. Menyusun dan memfinalisasi laporan dan dokumen yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, antara lain Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.

In accordance with PLN's Board Manual, the Secretary to the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

1. Leading and organizing secretarial activities within the Board of Commissioners, with further details of the duties regulated by the Board of Commissioners.
2. Coordinating the provision of information required by the Board of Commissioners, such as regular reports from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Internal Audit Reports), as well as other reports/information regarding the Company.
3. Preparing and finalizing reports and documents that are the responsibility of the Board of Commissioners, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Work Plan and Budget of the

Komite Lain di Bawah Direksi

Other Committees under the Board of Directors

4. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris, penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi Rapat serta pembuatan risalah Rapat, serta tugas – tugas lain yang terkait.
5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasikan kegiatan Komite Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan mengadministrasikan risalah Rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Menetapkan prosedur teknis Kunjungan Kerja Dewan Komisaris.
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
9. Menjadi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
10. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut.
11. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan tugasnya.

Board of Commissioners.

4. Organizing meetings of the Board of Commissioners, including preparation and distribution of invitations, dissemination of meeting materials, preparation of minutes of meetings, and other related tasks.
5. Coordinating and facilitating activities of the Committees under the Board of Commissioners.
6. Preparing and administering the minutes of meetings and other documents of the Board of Commissioners, and distributing resolutions or outcomes of meetings to relevant parties.
7. Establishing technical procedures for the Board of Commissioners' official visits.
8. Ensuring that the Board of Commissioners complies with prevailing laws and regulations and implements Good Corporate Governance (GCG) principles.
9. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.
10. Accessing records or information related to employees, funds, assets, and other resources of the Company that are relevant to the performance of duties, based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, and is required to submit a written report on the outcome of the assignment.
11. The Secretary and Secretariat Staff of the Board of Commissioners must maintain the confidentiality of Company documents, data, and information, both from internal and external parties, and ensure such information is used solely for the purpose of their duties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Implementation of Secretary to the Board of Commissioners' Duties

Sekretaris Dewan Komisaris PLN telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan atas Penyusunan Rancangan dan Pelaksanaan RJP dan
2. Pengawasan atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perseroan
3. Pengawasan atas *Sub Holding*, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Afiliasi
4. Pengawasan atas Direksi
5. Pengawasan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

The Secretary to the Board of Commissioners of PLN carried out the following duties and responsibilities in 2024:

1. Oversight of the preparation and implementation of the Corporate Long-Term Plan (RJPP);
2. Oversight of the implementation of the Company's plans and policies;
3. Oversight of subsidiaries, sub-holdings, and affiliated companies;
4. Oversight of the Board of Directors;
5. Oversight of Good Corporate Governance (GCG) practices.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan dan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan berfungsi memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sekretaris Perusahaan berperan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS/ Menter serta sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan.

The Board of Directors carries out the corporate secretarial function and appoints a Corporate Secretary. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. The Corporate Secretary is responsible for ensuring the Company's compliance with disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. The Corporate Secretary plays a role in providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis and/or upon request. In addition, the Corporate Secretary manages and safeguards the Company's documents, including but not limited to the shareholders register, special registers, and minutes of meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the GMS/Minister, and serves as a liaison with stakeholders.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary

Alois Wisnuhardana

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia: 53 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Tangerang

Age: 53 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia
Domicile: Tangerang



Riwayat Pendidikan

Education

- Sarjana Sains, Jurusan Kimia, FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 1997

- Bachelor of Science in Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Year 1997

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja

Service History/Experience

- Kepala Departemen Manajemen Stakeholder, Eximbank Indonesia/ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Juli 2020-Juni 2022)
- Communication and Content Advisor, PT PLN (Persero) (Februari 2020-Juni 2020)
- Communication Advisor, Kementerian PUPR (Oktober 2019-Juni 2020)
- Communication Advisor, Kementerian Perhubungan (Oktober 2019-Januari 2020)
- Asisten Juru Bicara Presiden (November 2019-Januari 2020)
- Advisor, Kantor Staf Presiden (Agustus 2016 - Oktober 2019)
- Editor in Chief, Tabloid RUMAH dan Majalah IDEA, Kompas Gramedia Group (2009-2016)
- Deputy Managing Editor, Tabloid PCPlus, Kompas Gramedia Group (2002-2007)
- Reporter di berbagai media (1995 - 2000)
- Head of Stakeholder Management Department, Indonesia Eximbank (July 2020 - June 2022)
- Communication and Content Advisor, PT PLN (Persero) (February 2020 - June 2020)
- Communication Advisor, Ministry of Public Works and Housing (October 2019 - June 2020)
- Communication Advisor, Ministry of Transportation (October 2019 - January 2020)
- Assistant Presidential Spokesperson (November 2019 - January 2020)
- Advisor, Executive Office of the President of the Republic of Indonesia (August 2016 - October 2019)
- Editor in Chief, RUMAH Tabloid and IDEA Magazine, Kompas Gramedia Group (2009 - 2016)
- Deputy Managing Editor, PCPlus Tabloid, Kompas Gramedia Group (2002 - 2007)
- Reporter at various media outlets (1995 - 2000)

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dasar Hukum Penunjukan

Legal Basis of Appointment

- Keputusan Direksi No. 0226.K/SDM.01.04/DIR/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- Board of Directors' Decision Letter No. 0226.K/SDM.01.04/DIR/2022 dated May 23, 2022.

Jabatan Rangkap

Concurrent Positions

- PT PLN (Persero)
 - Tidak ada
- Perusahaan Lain
 - Tidak ada

- PT PLN (Persero)
 - None
- Other Companies
 - None

Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan

Organizational Structure of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam memimpin, membina, dan mengelola Sekretariat Perusahaan. Mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 0027.P/DIR/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Utama PT PLN (Persero), organisasi Sekretariat Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary is responsible to the President Director for leading, overseeing, and managing the Corporate Secretariat. Referring to the Board of Directors Regulation No. 0027.P/DIR/2024 dated July 1, 2024, concerning the Organization and Work Procedures of the Office of the President Director of PT PLN (Persero), the structure of the Corporate Secretariat is as follows:



Pedoman Kerja dan Tugas Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Work Guidelines, Duties, and Responsibilities of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berpedoman pada *Corporate Governance Code*, *Board Manual* dan *Board Manual* Direksi dan Peraturan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan dalam menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dan mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

The Corporate Secretary is guided by the Corporate Governance Code, the Board Manual, the Board of Directors Manual, and the Board of Directors Regulation on the Organization and Work Procedures of the Company in carrying out the Corporate Secretary function and



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dalam memimpin, membina, dan mengelola Sekretariat Perusahaan yang meliputi memastikan fungsi perencanaan, implementasi dan monitoring agenda transformasi PLN, pengelolaan stakeholder, pengelolaan rapat, keadministrasian, keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris serta kebijakan, strategi dan implementasi komunikasi PLN, dengan tugas pokok:

1. Merumuskan strategi dan kebijakan sekretariat perusahaan, program transformasi, manajemen *stakeholder*, komunikasi korporat dan TJSL;
2. Merumuskan program kerja dan anggaran pada masing-masing fungsi di Sekretariat Perusahaan;
3. Memastikan penyusunan perangkat dan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
4. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan rapat PLN, tindak lanjut risalah/rapat dan aktivitas program perubahan;
5. Memastikan aktivitas rapat Direksi, rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kesekretariatan perusahaan, pengelolaan administrasi, fasilitas, dan protokol Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Menyediakan laporan-laporan dan informasi material kepada pasar modal, lembaga serta pihak pihak terkait sesuai kewajiban selaku emiten dan BUMN serta memenuhi ketentuan dan regulasi termasuk memelihara laman investor relation di website PLN;
7. Melakukan pengelolaan hubungan dengan investor dan institusi lain (Lembaga Negara, DPR, Pemda, Kedutaan dan lain-lain) dalam dan luar negeri, termasuk menyediakan informasi PLN sesuai peraturan, melalui penyelenggaraan pertemuan dengan investor, *analyst*, lembaga, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengelola informasi dan dokumentasi sesuai kebutuhan keterbukaan informasi publik, serta memelihara laman PPID di *website* PLN;
9. Mengelola hubungan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan berbagai fungsi di PLN untuk mendorong program inisiatif;

supporting the implementation of the Board of Directors' duties. The Corporate Secretary is responsible to the President Director for leading, fostering, and managing the Corporate Secretariat, which includes ensuring the functions of planning, implementing, and monitoring PLN's transformation agenda, stakeholder management, meeting management, administration, protocol for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as PLN's communication policies, strategies, and implementation, with the main duties as follows:

1. Formulating strategies and policies for the corporate secretariat, transformation programs, stakeholder management, corporate communication, and TJSL;
2. Developing work programs and budgets for each function within the Corporate Secretariat;
3. Ensuring the preparation of devices and guidelines for Good Corporate Governance (GCG);
4. Planning, implementing, and evaluating PLN's meeting activities, follow-up on meeting minutes, and change program activities;
5. Ensuring the activities of Board of Directors meetings, Board of Directors and Board of Commissioners meetings, General Meeting of Shareholders (GMS), corporate secretarial duties, administration management, facilities, and protocols for the Board of Directors and Board of Commissioners;
6. Providing reports and material information to the capital market, institutions, and related parties in accordance with obligations as a publicly listed company and state-owned enterprise, as well as complying with applicable provisions and regulations, including maintaining the investor relations page on PLN's website;
7. Managing relations with investors and other institutions (State Institutions, House of Representatives, Regional Governments, Embassies, etc.) domestically and internationally, including providing PLN information as required by regulations, through organizing meetings with investors, analysts, institutions, and others according to applicable rules;
8. Managing information and documentation in accordance with public information disclosure needs, and maintaining the Public Information Disclosure Officer (PPID) page on PLN's website;
9. Managing relationships and communication with stakeholders and various functions within PLN to support program initiatives;

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

10. Mengelola komunikasi internal, eksternal, dan hubungan masyarakat, serta mengelola isu dan krisis komunikasi yang terjadi;
 11. Mengelola program TJSL dan *Community, Involvement and Development* (CID) termasuk memastikan pengendalian pelaksanaan dan kinerja program TJSL di seluruh lingkungan PLN dan Anak Perusahaan;
 12. Mengembangkan dan mengkaji strategi, pedoman valuasi untuk program transformasi PLN;
 13. Mengelola dan memonitor implementasi kelangsungan perubahan;
 14. Mengidentifikasi risiko dan mitigasi perubahan untuk memastikan keberhasilan perubahan serta menjaga stabilitas organisasi berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, dan kepatuhan;
 15. Memastikan standar *Key Performance Indicator* (KPI) program perubahan dan berkoordinasi dengan fungsi pengendalian kinerja PLN untuk menetapkan KPI program perubahan;
 16. Memastikan terlaksananya kebijakan, strategi, dan implementasi komunikasi PLN, hubungan masyarakat, hubungan dengan media, hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), termasuk di dalamnya pengarusutamaan gender, untuk meningkatkan citra positif dan positioning PLN sebagai perusahaan listrik milik negara yang berkontribusi positif bagi pembangunan dan rakyat Indonesia;
 17. Memastikan seluruh aktivitas dan prioritas program kerja memenuhi indikator kinerja ESG serta aspek perlindungan lingkungan dan sosial (*safeguards requirements*) sesuai dengan lingkup Divisinya untuk mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan; dan
 18. Memastikan bahwa seluruh kegiatan direncanakan, dijalankan dan dievaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta menjalankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi secara efektif termasuk menerapkan check and balance melalui *4 Eyes Principle* dalam pengambilan keputusan, untuk menjaga produktivitas perusahaan.
10. Managing internal and external communications, public relations, as well as handling communication issues and crises that occur;
 11. Managing the Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) and Community Involvement and Development (CID) programs, including ensuring control over the implementation and performance of TJSL programs throughout PLN and its subsidiaries;
 12. Developing and reviewing strategies and valuation guidelines for PLN's transformation programs;
 13. Managing and monitoring the implementation of change continuity;
 14. Identifying risks and change mitigation measures to ensure the success of changes and maintain organizational stability based on Good Corporate Governance (GCG), risk management, and compliance;
 15. Ensuring the standards of Key Performance Indicators (KPI) for change programs and coordinating with PLN's performance control functions to establish KPIs for change programs;
 16. Ensuring the implementation of PLN's communication policies, strategies, and execution, public relations, media relations, internal and external communications, as well as Social and Environmental Responsibility (TSJL) and Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives, including gender mainstreaming, to enhance PLN's positive image and positioning as a state-owned electricity company that contributes positively to Indonesia's development and people;
 17. Ensuring all activities and work program priorities meet ESG performance indicators as well as environmental and social safeguards requirements according to the scope of the Division to realize a sustainable company; and
 18. Ensuring that all activities are planned, executed, and evaluated in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), while effectively implementing risk management, internal controls, and regulatory compliance, including applying check and balance through the 4 Eyes Principle in decision-making, to maintain the Company's productivity.



Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program of Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan Perseroan. Sepanjang tahun 2024, program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Corporate Secretary participates in development programs related to their functions and duties in order to support the implementation of the Company's management functions. Throughout 2024, the competency development programs attended by the Corporate Secretary are as follows:

Program Pengembangan Sekretaris Perusahaan

Competency Development Program of Corporate Secretary

No.	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Waktu Pelaksanaan Date
1.	Forum Keterbukaan Informasi Publik (Bank Indonesia). Public Information Disclosure Forum (Bank Indonesia).	27 Mei 2024 May 27, 2024

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Implementation of Corporate Secretary's Duties

Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perseroan. Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2024 meliputi program kerja sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS RKAP Tahun Buku 2024 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2023;
2. Melaksanakan dokumentasi risalah RUPS, akta RUPS dan hal-hal lain berkenaan dengan RUPS;
3. Membuat risalah Rapat Direksi dan mendokumentasikannya;
4. Mengoordinasikan rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi, seperti rapat bersama Dewan Komisaris, Rapat Dengar Pendapat dengan DPR, dan sebagainya;
5. Menyusun laporan korporat, di antaranya Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan, Laporan Statistik, Laporan Tahunan Dipublikasi, dan Laporan Keberlanjutan;
6. Melaksanakan penilaian *Self-Assessment* GCG periode tahun 2023;

The Corporate Secretary carries out activities to assist the Board of Directors in managing the Company. The implementation of the Corporate Secretary's duties throughout 2024 includes the following work programs:

1. Organizing the GMS for the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the GMS for the 2023 Annual Report;
2. Managing the documentation of the GMS minutes, GMS deeds, and other matters related to the GMS;
3. Preparing and documenting the minutes of Board of Directors meetings;
4. Coordinating meetings attended by the Board of Directors, such as meetings with the Board of Commissioners, hearings with the House of Representatives (DPR), and others;
5. Preparing corporate reports, including Quarterly Reports, Annual Reports, Statistical Reports, Published Annual Reports, and Sustainability Reports;
6. Conducting the 2023 period Good Corporate Governance (GCG) Self-Assessment;

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

7. Melaporkan setiap informasi material kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
8. Melakukan pengkinian informasi yang ada di dalam situs web Perusahaan;
9. Melakukan korespondensi dengan para pemangku kepentingan dari lembaga keuangan;
10. Menerima kunjungan investor dan analis terkait update informasi Perusahaan;
11. Mengelola hubungan dengan lembaga negara dan pemangku kepentingan lainnya; dan
12. Mendukung kelancaran tugas Direksi dan Dewan Komisaris dari sisi keprotokolan di lingkungan PLN dan kegiatan kelistrikan strategis PLN (peresmian, peletakan batu pertama, dan peninjauan proyek kelistrikan strategis PLN);
13. Memastikan pelaksanaan agenda kegiatan, kesekretariatan, persuratan dan kebutuhan kedinasan Direksi;
14. Memastikan semua aktivitas implementasi dan keberlangsungan program transformasi di seluruh organisasi direncanakan dengan baik melalui identifikasi jumlah aktivitas/proses yang terdampak, fungsi yang terlibat/terdampak, evaluasi program transformasi, proses transisi dan jangka waktu transformasi;
15. *Monitoring* dan pelaporan implementasi dan keberlangsungan program transformasi PLN;
16. Memastikan penyiapan materi Direktur Utama berupa presentasi, sambutan, speech serta informasi lainnya yang sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan memperhatikan isu-isu korporat terkini berbasis pada data yang akurat dan terkelola dengan baik;
17. Mengelola disposisi serta memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut uap penyelesaian disposisi, isu strategis dan arahan Direktur Utama;
18. Memberikan informasi-informasi penting yang sepatutnya diketahui dan diperlukan oleh Direktur Utama sebelum melakukan penandatanganan dokumen-dokumen penting/material dan memastikan telah dikelola dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kehati-hatian (*prudent*), baik ke luar maupun ke dalam;
19. Menyelenggarakan PLN *Journalist Award* 2023;
7. Reporting any material information to the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Financial Services Authority (OJK);
8. Updating information available on the Company's website;
9. Corresponding with stakeholders from financial institutions;
10. Receiving visits from investors and analysts related to Company information updates;
11. Managing relationships with state institutions and other stakeholders; and
12. Supporting the smooth execution of protocol tasks for the Board of Directors and Board of Commissioners within PLN and PLN's strategic electricity activities (inaugurations, groundbreakings, and inspections of PLN's strategic electricity projects);
13. Ensuring the implementation of activity agendas, secretarial duties, correspondence, and official needs of the Board of Directors;
14. Ensuring that all activities related to the implementation and sustainability of the transformation program throughout the organization are well planned through identifying the number of impacted activities/processes, involved/affected functions, evaluating the transformation program, transition processes, and transformation timelines;
15. Monitoring and reporting on the implementation and sustainability of PLN's transformation program.
16. Ensuring the preparation of materials for the President Director, including presentations, welcomes, speeches, and other information that align with Company policies while considering current corporate issues based on accurate and well-managed data;
17. Managing dispositions as well as monitoring and evaluating follow-up actions related to disposition resolution, strategic issues, and directives from the President Director;
18. Providing important information that the President Director should know and require before signing important/material documents, ensuring they are managed according to Good Corporate Governance (GCG) principles and prudence, both externally and internally;
19. Organizing the PLN *Journalist Award* 2023;



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

20. Memastikan pengembangan kebijakan dan strategi komunikasi PLN serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berbasis pada *International Organization for Standardization* (ISO) dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
21. Mengelola komunikasi dan media komunikasi eksternal (*website, below the line, sponsorship, dan event PLN*) dan serta hubungan masyarakat;
22. Mengelola komunikasi dan media komunikasi internal dengan integrasi pengelolaan komunikasi serta komunikasi program transformasi dan program-program perubahan lainnya dari Satuan Kerja Kantor Pusat, Unit Induk, Pusat-pusat dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan citra positif dan *positioning* PLN sebagai perusahaan listrik milik negara yang berkontribusi positif bagi pembangunan dan rakyat Indonesia;
23. Memastikan pelaksanaan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik;
24. Memastikan kolaborasi dengan fungsi Hubungan Industrial dalam mengelola komunikasi dengan pegawai dan serikat pekerja;
25. Mengelola isu dan krisis komunikasi PLN;
26. Memastikan pengelolaan program TJSL *core subject Community Involvement and Development* (CID) sesuai dengan prinsip GCG dan pengendalian Implementasi CID antara Kantor Pusat (pengelola *stakeholders*), Unit dan Anak Perusahaan;
27. Memastikan pengelolaan kinerja pengelolaan UMK melalui penyaluran kolaborasi BUMN, pemulihan dan penagihan mitra binaan eksisting;
28. Mengelola pelaporan program TJSL bersama komite *sustainability*.

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Performance Assessment of Corporate Secretary

Kinerja Sekretaris Perusahaan dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan. Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam mendukung fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pencapaian target KPI yang ditetapkan.

The performance of the Corporate Secretary is evaluated regularly at least once a year in order to maintain the quality of the corporate secretary function. The performance assessment of the Corporate Secretary is conducted based on the realization of the duties and responsibilities in supporting the management function of the Company by the Board of Directors as well as the achievement of the established KPI targets.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Direksi menyelenggarakan pengawasan intern dan membentuk unit audit internal bernama Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan membuat piagam pengawasan intern dalam bentuk Piagam Audit Intern. Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT PLN (Persero) memberikan mandat kepada fungsi audit internal untuk memberikan *assurance* dan *consulting* yang objektif, saran, wawasan dan pandangan ke depan. Ruang lingkup SPI terkait kegiatan audit internal mencakup semua area kegiatan operasional seluruh bisnis PLN serta dapat mencakup area kegiatan operasional seluruh unit bisnis Perusahaan Anak sesuai Pedoman Tata kelola Terintegrasi PT PLN (Persero) dengan memperhatikan *governance* yang berlaku. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Board of Directors conducts internal audit and has established an internal audit unit called the Internal Supervision Unit (SPI), along with an internal audit charter in the form of an Internal Audit Charter. The Board of Commissioners and the President Director of PT PLN (Persero) have mandated the internal audit function to provide objective assurance and consulting services, advice, insights, and forward-looking perspectives. The scope of SPI's internal audit activities covers all operational areas across PLN's entire business and may also include operational areas of all business units of Subsidiaries in accordance with PT PLN (Persero)'s Integrated Governance Guidelines, by considering the applicable governance principles. SPI is led by a chief appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanisms and with the approval of the Board of Commissioners.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Profile of Chief Audit Executive

Sulistyo Biantoro

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Chief Audit Executive

Usia: 48 tahun per 31 Desember 2024
Kewarganegaraan: Indonesia
Domisili: Tangerang Selatan
Age: 48 years old as of December 31, 2024
Citizenship: Indonesia
Domicile: South Tangerang



Riwayat Pendidikan Education

- Master of Commerce, University of Queensland, Australia Tahun 2026
- Diploma IV, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2000
- Diploma III, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 1998

- Master of Commerce, University of Queensland, Australia, Year 2026
- Diploma IV, State College of Accountancy (STAN), in 2000
- Diploma III, State College of Accountancy (STAN), in 1998

Sertifikasi Certification

- Certified Internal Auditor (CIA) Tahun 2023
- Certified Fraud Examiner (CFE) Tahun 2022
- Certified GRC Professional (GRCP) Tahun 2022
- Certified GRC Audit (GRCA) Tahun 2022
- Certificate Qualified Chief Risk Officer (QCRO) Tahun 2022
- Loop Certified Professional Coach (LCPC) Tahun 2022
- Passed Chartered Financial Analyst (CFA level I exam) Tahun 2017
- Granted Chartered Accountant (CA) Indonesia Tahun 2014
- Certified Public Accountant (CPA) Tahun 2001

- Certified Internal Auditor (CIA) in 2023
- Certified Fraud Examiner (CFE) in 2022
- Certified GRC Professional (GRCP) in 2022
- Certified GRC Audit (GRCA) in 2022
- Certificate Qualified Chief Risk Officer (QCRO) in 2022
- Loop Certified Professional Coach (LCPC) in 2022
- Passed Chartered Financial Analyst (CFA Level I Exam) in 2017
- Granted Chartered Accountant (CA) Indonesia in 2014
- Certified Public Accountant (CPA) in 2001



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Riwayat Jabatan/ Pengalaman Kerja Service History/Experience	- Expert Human Capital Management PLN (Desember 2020 – April 2022) - Plt. Direktur Utama PT Haleyora Power (Juni 2020 – Desember 2020) - EVP Keuangan PLN (Agustus 2017 – Juni 2020) - Kepala Divisi Akuntansi PLN (Agustus 2014 – Agustus 2017) - Group Head Regional V SPI PLN (Juni 2012 – Agustus 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan RI (Juli 1998 – Juni 2012)	- Expert in Human Capital Management of PLN (December 2020 – April 2022) - Acting President Director of PT Haleyora Power (June 2020 – December 2020) - Executive Vice President of Finance of PLN (August 2017 – June 2020) - Head of Accounting Division of PLN (August 2014 – August 2017) - Group Head of Regional V, Internal Audit Unit (SPI) of PLN (June 2012 – August 2014) - Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) (July 1998 – June 2012)
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0294.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 22 April 2022.	Board of Directors' Decision of PT PLN (Persero) Number 0294.K/SDM.02.02/DIR/2022 dated April 22, 2022.
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	- PT PLN (Persero) - Tidak ada - Perusahaan Lain - Tidak ada	- PT PLN (Persero) - None - Other Companies - None

Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

Organizational Structure and Position of Internal Audit Unit

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi utama melaksanakan audit internal pada PLN dengan kedudukan sebagai berikut:

1. SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI);
2. KSPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
3. KSPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
4. KSPI dibantu oleh pejabat setingkat Manajemen Atas dan jajarannya yang penyebutannya akan disesuaikan dengan Peraturan Direksi mengenai organisasi yang berlaku di PLN; dan
5. Auditor bertanggung jawab kepada KSPI.

Mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 0027.P/DIR/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Utama PT PLN (Persero) kedudukan SPI berada langsung di bawah Direktur Utama pada Direktorat Utama dan struktur sebagai berikut:

The Internal Audit Unit (SPI) is a working unit whose primary function is to carry out internal audits within PLN, with the following structure:

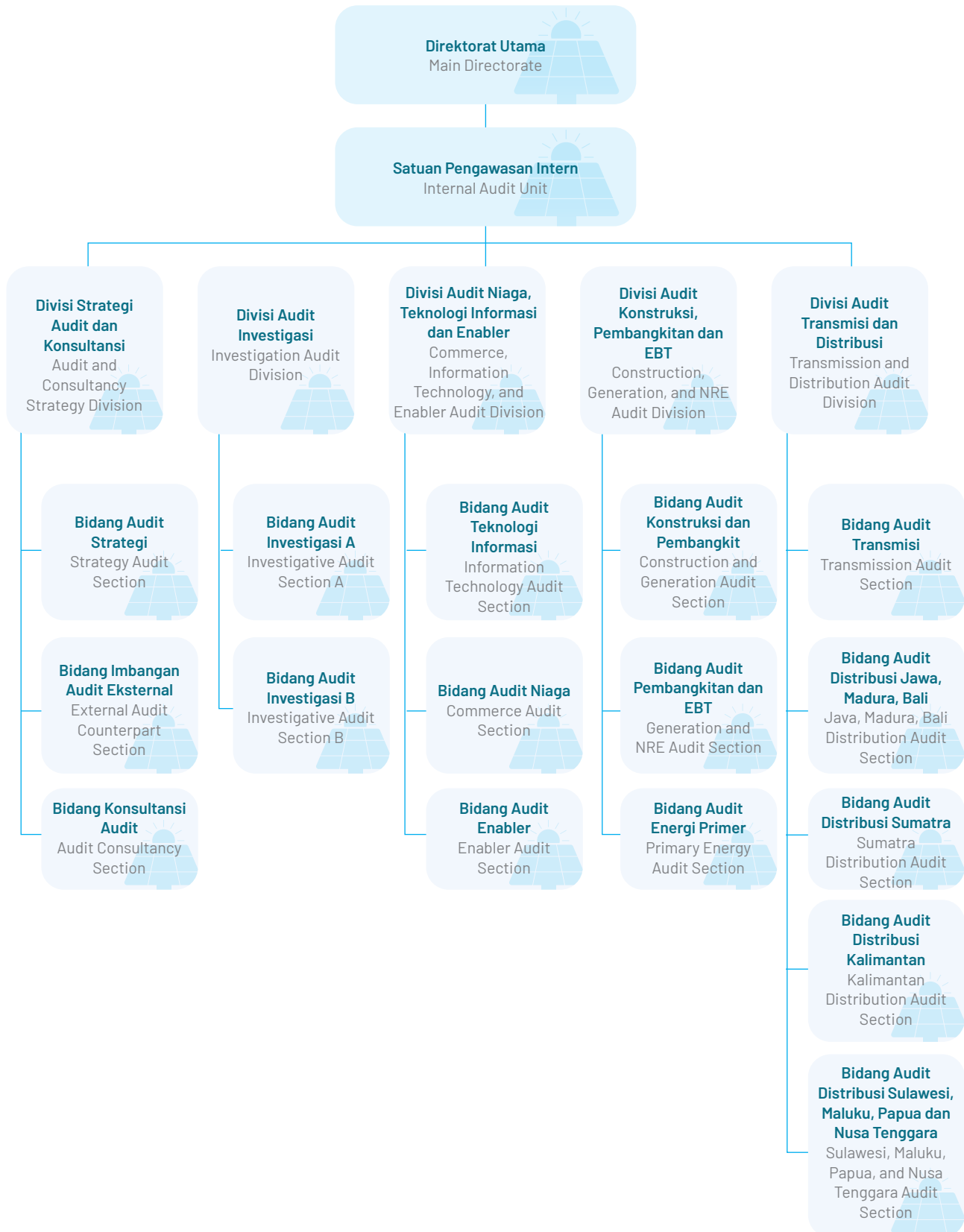
1. SPI is chaired by the Head of the Chief Audit Executive (KSPI);
2. The KSPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
3. The KSPI reports directly to the President Director;
4. The KSPI is assisted by officials at the Senior Management level and their teams, whose titles will be adjusted in accordance with the applicable Board of Directors Regulation on organizational structure within PLN; and
5. Auditors report to the KSPI.

Referring to the Board of Directors Regulation Number: 0027.P/DIR/2024 dated July 1, 2024, on the Organization and Work Procedure of the Directorate General of PT PLN (Persero), the SPI is positioned directly under the President Director within the Main Directorate, with the following structure:

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Struktur Satuan Pengawasan Intern Structure of the Internal Audit Unit





Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Intern

Work Guidelines of the Internal Audit Unit

Auditor Internal dalam Satuan Pengawasan Intern harus memiliki kesiapan baik secara individual maupun secara fungsional (kelembagaan) dan kemampuan profesional untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Untuk memberikan landasan dan pedoman bagi Auditor Internal, maka Perseroan menetapkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Global Internal Audit Standards (GIAS). Piagam Audit Intern merupakan sebuah dokumen formal yang mendefinisikan mandat fungsi audit internal dan persyaratan lainnya yang bertujuan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan dan tanggung jawab Auditor Internal serta memberikan kewenangan yang diperlukan Auditor Internal untuk menjalankan tugasnya dalam pencapaian tujuan PLN.

Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama terakhir kali pada tanggal 28 Oktober 2024. Piagam Audit Intern berlaku untuk SPI dalam mengaudit seluruh unit bisnis PLN serta dapat berlaku untuk SPI dalam mengaudit Perusahaan Anak sesuai Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT PLN (Persero), dengan memperhatikan governance yang berlaku. Perseroan melakukan *review* secara berkala terhadap Piagam Audit Intern agar senantiasa relevan dengan ketentuan dan standar Audit Intern yang berlaku serta dinamika perkembangan organisasi dan bisnis Perseroan.

Internal Auditors within the Internal Audit Unit (SPI) must be prepared both individually and functionally (institutionally), and possess professional capabilities to support the achievement of the Company's objectives. To provide a foundation and guidance for Internal Auditors, the Company has established the Internal Audit Charter, which is prepared based on applicable laws and regulations as well as the Global Internal Audit Standards (GIAS). The Internal Audit Charter is a formal document that defines the mandate of the internal audit function and other requirements, serving as the basis for the implementation and responsibilities of Internal Auditors and granting them the necessary authority to carry out their duties in achieving PLN's objectives.

The Internal Audit Charter is established by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners and was signed by the President Director and the President Commissioner, most recently on October 28, 2024. The Internal Audit Charter applies to the SPI in auditing all PLN business units and may also apply to SPI in auditing Subsidiaries in accordance with PT PLN (Persero)'s Integrated Governance Guidelines, while adhering to applicable governance principles. The Company conducts periodic reviews of the Internal Audit Charter to ensure its continued relevance with applicable internal audit standards and regulatory provisions, as well as the evolving dynamics of the organization and the Company's business.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

Dewan Komisaris dan Direktur Utama PLN memberikan mandat kepada fungsi audit intern yang dijalankan SPI untuk memberikan assurance yang objektif, saran, wawasan, dan pandangan ke depan. Dalam menjalankan mandat tersebut, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Audit Intern mencakup:

1. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

The Board of Commissioners and the President Director of PLN have mandated the internal audit function, carried out by the SPI, to provide objective assurance, advice, insights, and forward-looking perspectives. In carrying out this mandate, SPI has duties and responsibilities in accordance with the Internal Audit Charter, which include:

1. Preparing the annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal supervision function;

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

2. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
 3. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 4. Memantau tindakan perbaikan atas temuan;
 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 6. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 7. Melakukan penyusunan dan pengkajian Piagam Audit Intern secara periodik;
 8. Melaksanakan evaluasi kualitas Layanan *Assurance* dan Layanan Konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen atas seluruh proses audit;
 9. Memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha PLN;
 10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di internal SPI maupun dengan bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan perusahaan sesuai kewenangannya;
 11. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan; dan
 12. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ensuring the implementation of internal supervision in accordance with the plan;
 3. Reporting significant findings to the President Director and the Board of Commissioners for prompt corrective action;
 4. Monitoring corrective actions on findings;
 5. Evaluating the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes, in accordance with prevailing laws and regulations and company policies;
 6. Conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness in the areas of finance, commerce, operations, human resources, information technology, and other activities;
 7. Preparing and reviewing the Internal Audit Charter periodically;
 8. Conducting quality evaluations of Assurance and Consulting Services by SPI personnel or by independent parties for all audit processes;
 9. Ensuring SPI members participate in continuing professional development and other training in line with the growing complexity and activities of PLN's business;
 10. Coordinating and collaborating internally within SPI and with other departments and units, as well as with other supervisory agencies or institutions, to support the achievement of set targets and improve the performance of SPI and the Company according to its authority;
 11. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data related to the performance of internal audit duties and responsibilities, unless otherwise permitted under prevailing laws and regulations and/or court decisions; and
 12. Protecting confidential information obtained during tenure in accordance with the applicable laws and regulations.

Auditor Satuan Pengawasan Intern

Internal Audit Unit's Auditor

Auditor Internal bersikap independen, objektif dan profesional dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Auditor Internal memiliki peran melakukan aktivitas audit internal berupa pemberian layanan *assurance* dan konsultasi.

Internal Auditors must act independently, objectively, and professionally in carrying out their duties, enabling them to express their views and opinions without influence or pressure from any party. Internal Auditors play a role in carrying out internal audit activities by providing assurance and consulting services.



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Kualifikasi Auditor Internal

Qualification of Internal Auditors

Auditor Internal memiliki beberapa kualifikasi wajib sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan internal perusahaan;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Mematuhi standar yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA);
6. Mematuhi etika dan profesionalisme audit internal PLN;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

Internal Auditors must meet the following mandatory qualifications:

1. Possessing integrity and demonstrating professional, independent, honest, and objective behavior in carrying out their duties;
2. Having knowledge and experience in audit techniques and other disciplines relevant to their area of responsibility;
3. Having an understanding of laws and regulations and the Company's internal policies;
4. Having the ability to interact and communicate effectively, both verbally and in writing;
5. Complying with the standards issued by The Institute of Internal Auditors (IIA);
6. Adhering to PLN's internal audit ethics and professionalism;
7. Maintaining the confidentiality of Company information and/or data related to the execution of internal audit duties and responsibilities, except when required by law and regulations and/or court decisions;
8. Understanding the principles of good corporate governance and risk management; and
9. Continuously enhancing knowledge, skills, and professional competence.

Kecukupan Jumlah Auditor Internal

Adequate Number of Internal Auditors

Perusahaan memastikan kecukupan jumlah auditor SPI sesuai dengan analisis beban kerja berdasarkan rencana kerja audit tahunan dimana pada 31 Desember 2024, SPI PLN terdiri atas pegawai dengan rincian sebagai berikut:

The Company ensures the adequacy of the number of SPI auditors in accordance with workload analysis based on the annual audit work plan. As of December 31, 2024, PLN's SPI consisted of employees with the following breakdown:

Komposisi Personil Satuan Pengawasan Intern

Composition of Internal Audit Unit Personnel

Jabatan Position	Jumlah Total
Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) Chief Audit Executive (KSPI)	1
Executive Vice President (EVP)	5
Vice President (VP)	16
Manager Audit Audit Manager	55
Auditor Fungsional dan Administrasi Functional and Administration Auditor	348
Jumlah	425

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Sertifikasi Profesi Auditor Internal

Professional Certification of Internal Auditor

SPI juga didukung dengan auditor yang memiliki sertifikasi sebagai profesi audit internal serta sertifikasi lain yang mendukung pelaksanaan tugas SPI sebagai berikut:

SPI is also supported by auditors who hold certifications in internal audit professions as well as other certifications that support the execution of SPI's duties, as follows:

Setifikasi Personil Satuan Pengawasan Intern

Certification of Internal Audit Unit Personnel

No.	Sertifikasi Certification	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Certification Holders
Sertifikasi Nasional National Certification		
1	Qualified Internal Auditor(QIA) - Advance	249
2	Chartered Accountant (CA)	4
3	Certificate of Public Accountant(CPA)	2
4	Certified Risk Management Officer(CRMO)	7
5	Qualified Risk Management Officer(QRMO)	311
6	Certified Risk Management Professional(CRMP)	1
7	Qualified Risk Management Professional(QRMP)	63
8	Certified Risk Governance Professional(CRGP)	5
9	Qualified Risk Governance Professional(QRGP)	6
10	Qualified Chief Risk Officer(QCRO)	11
11	Certified Government Risk Management(CGRM)	1
12	Certified Internal Audit Executive(CIAE)	14
13	Certified Forensic Audit(CFrA)	1
Sertifikasi Internasional International Certification		
1	Certified Fraud Examiner(CFE)	9
2	Certified Information System Auditor(CISA)	10
3	Certified Internal Auditor(CIA)	1
4	Chartered Management Accountant(CMA)	1
5	Certified Hacking Forensic Investigator(CHFI)	12
6	Governance Risk Compliance Professional(GRCP)	3
7	Governance Risk Compliance Auditor(GRCA)	2
8	Certified Cellebrite Operator(CCO)	2
9	Certified Cellebrite Physical Analyzer(CCPA)	2
10	Oxygen Forensic Certified(OFC)	6
11	Professional Evaluation and Certification Board(PECB)	-
Lain-Lain Others		
1	Dunamis Certified Human Capital Management(DCHCM)	1
2	Certified Human Resource Professional(CHRP)	2
3	Certified Human Resource Business Partner(CHRBP)	1
Jumlah Total		727

**Unit Audit Internal**
Internal Audit Unit**Program Pengembangan Kompetensi Auditor Internal****Competency Development Program of Internal Auditor**

SPI PLN telah melaksanakan sertifikasi internasional dan nasional serta diklat non-sertifikasi sebagai upaya untuk senantiasa meningkatkan kompetensi auditor internal. Selama tahun 2024 telah dilakukan sejumlah 18 jenis sertifikasi dengan realisasi sebanyak 306 peserta kegiatan pengembangan kapabilitas SDM melalui pelaksanaan sertifikasi, workshop maupun diklat terkait profesi audit intern. Hingga saat ini total terdapat 26 jenis sertifikasi dan 697 sertifikasi yang dimiliki oleh auditor SPI dengan rincian sebagai berikut:

PLN's SPI has implemented both international and national certifications, as well as non-certification training programs, as part of its continuous efforts to enhance the competencies of internal auditors. In 2024, a total of 18 types of certifications were conducted, with 306 participants taking part in capacity development activities through certification programs, workshops, and training sessions related to the internal audit profession. As of now, SPI auditors hold a total of 26 types of certifications and 697 individual certifications, with the following breakdown:

No.	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Jumlah Pemegang Sertifikasi Number of Auditors Holding Certificates
Sertifikasi Internasional International Certification		
1.	<i>Certified Fraud Examiner(CFE)</i>	9
2.	<i>Certified Information System Auditor(CISA)</i>	10
3.	<i>Certified Internal Auditor(CIA)</i>	1
4.	<i>Chartered Management Accountant(CMA)</i>	1
5.	<i>Certified Hacking Forensic Investigator(CHFI)</i>	12
6.	<i>Governance Risk Compliance Professional(GRCP)</i>	3
7.	<i>Governance Risk Compliance Auditor(GRCA)</i>	2
8.	<i>Certified Cellebrite Operator(CCO)</i>	2
9.	<i>Certified Cellebrite Physical Analyzer(CCPA)</i>	2
10.	<i>Oxygen Forensic Certified(OFC)</i>	6
Sertifikasi Nasional National Certification		
11.	<i>Qualified Internal Auditor(QIA) - Advance</i>	219
12.	<i>Chartered Accountant(CA)</i>	4
13.	<i>Certificate of Public Accountant(CPA)</i>	2
14.	<i>Certified Risk Management Officer(CRMO)</i>	7
15.	<i>Qualified Risk Management Officer(QRMO)</i>	311
16.	<i>Certified Risk Management Professional(CRMP)</i>	1
17.	<i>Qualified Risk Management Professional(QRMP)</i>	63
18.	<i>Certified Risk Governance Professional(CRGP)</i>	5
19.	<i>Qualified Risk Governance Professional(QRGP)</i>	6
20.	<i>Qualified Chief Risk Officer(QCRO)</i>	11
21.	<i>Certified Government Risk Management(CGRM)</i>	1
22.	<i>Certified Internal Audit Executive(CIAE)</i>	14
23.	<i>Certified Forensic Audit(CFrA)</i>	1
Lain-Lain Others		
1	<i>Dunamis Certified Human Capital Management(DCHCM)</i>	1
2	<i>Certified Human Resource Professional(CHRP)</i>	2
3	<i>Certified Human Resource Business Partner(CHRBP)</i>	1

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern

Implementation of Internal Audit Unit's Duties

Pada tahun 2024 SPI PT PLN (Persero) menerapkan metode audit berbasis risiko (risk based internal audit). SPI memiliki jumlah audit universe sebanyak 125 auditee yang terdiri dari 69 Direktorat / Divisi / satuan Kantor Pusat, 46 unit induk/pusat-pusat, dan 10 *Sub Holding* dan anak perusahaan (operasional dan TI) yang ditangani oleh 4 Divisi Audit yaitu Divisi Audit Niaga, Divisi Teknologi Informasi dan Enabler, Divisi Audit Konstruksi, Pembangkitan & EBT, Divisi Audit Transmisi dan Distribusi, dan Divisi Audit Investigasi. Jumlah audit *universe* menyesuaikan dengan organisasi Perseroan saat program audit dibuat. Sebagai perbandingan, audit *universe* dari tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Audit Universe Tahun 2022-2024

Audit Universe 2022 - 2024

No.	Audit Universe	2022	2023	2024
1.	Direktorat Directorate	50	69	69
2.	Unit Induk Parent Unit	49	52	46
3.	Unit Pelaksana Executing Unit	362	-	-
4.	Anak Perusahaan Subsidiaries	23	13	10
Jumlah Total		484	134	125

Berdasarkan rencana pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024, seluruh penugasan telah terealisasi 100% dimana selama tahun 2024 SPI telah melaksanakan :

1. Audit sebanyak 258 penugasan;
2. Pemeriksaan ATTB dan PRR sebanyak 87 penugasan;
3. Reviu sebanyak 10 penugasan;
4. Audit investigasi sebanyak 44 penugasan; dan
5. Konsultansi sebanyak 30 penugasan.

Sampai dengan tahun 2024, tindak lanjut rekomendasi yang jatuh tempo telah terlaksana 100% oleh unit *auditee*. Untuk rekomendasi yang belum jatuh tempo, masih dalam proses pemenuhan tindak lanjut dan tim SPI telah melakukan monitoring secara periodik dan berkelanjutan untuk memastikan tindak lanjut dapat memadai dan selesai sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

In 2024, the SPI of PT PLN (Persero) implemented a risk-based internal audit method. SPI has an audit universe consisting of 125 auditees, which includes 69 Directorates/ Divisions/Head Office units, 46 parent units/centers, and 10 Sub-Holdings and subsidiaries (operational and IT). These are managed by 4 Audit Divisions: the Commerce Audit Division, the Information Technology and Enabler Division, the Construction, Generation & NRE Audit Division, the Transmission and Distribution Audit Division, and the Investigation Audit Division. The size of the audit universe adjusts according to the Company's organizational structure at the time the audit program is created. For comparison, the audit universe from 2022 to 2024 is as follows:

Based on the plan in the 2024 Annual Audit Work Program (PKPT), all assignments were 100% completed. During 2024, SPI carried out:

1. 258 audit assignments;
2. 87 ATTB and PRR inspections;
3. 10 review assignments;
4. 44 investigative audits; and
5. 30 consultancy assignments.

Until 2024, follow-ups on recommendations that were due had been 100% implemented by the auditee units. In term of recommendations not yet due, follow-up fulfillment is still in process, and the SPI team has conducted periodic and continuous monitoring to ensure the follow-ups are adequate and completed within the agreed timeframe.



Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

SPI memiliki tanggung jawab dalam menjaga kualitas penugasan dengan melakukan kegiatan penjaminan kualitas sejumlah kegiatan *Quality Assurance Review* (QAR) pada SPI Holding dan 11 SPI SH/AP dengan tujuan untuk menilai kesesuaian atas aktivitas audit internal dengan definisi, kode etik, dan standar sesuai *The International Professional Practices Framework* ("IPPF").

SPI juga aktif melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas pelaksanaan audit eksternal diantaranya BPK RI, BPKP dan KAP dan rutin melaporkannya secara periodik kepada manajemen.

Selama tahun 2024 SPI melaksanakan rapat koordinasi bersama Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit sebanyak 6 kali yang antara lain membahas tentang progres pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi serta penyusunan PKPT.

SPI is responsible for maintaining the quality of assignments by conducting Quality Assurance Review (QAR) activities across the SPI Holding and 11 SPI Sub-Holdings/Subsidiaries to assess the conformity of internal audit activities with definitions, code of conducts, and standards according to The International Professional Practices Framework (IPPF).

SPI also actively monitors the follow-up on recommendations from external audits, including those by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), and Public Accounting Firms (KAP), and routinely reports these periodically to management.

Throughout 2024, SPI held coordination meetings with the Board of Commissioners and/or Audit Committee 6 times to discuss the progress of audit and consultancy activities as well as the preparation of the PKPT.

Penilaian Kinerja Satuan Pengawasan Intern

Performance Assessment of the Internal Audit Unit

Kinerja Satuan Pengawasan Intern dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. Penilaian kinerja Satuan Pengawasan Intern dilakukan berdasarkan realisasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SPI dalam mendukung fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pencapaian target KPI yang ditetapkan. Selain itu, Satuan Pengawasan Intern juga menjalankan program jaminan dan peningkatan kualitas (*Quality Assurance & Improvement Program*) yang didesain untuk memastikan kesesuaian aktivitas audit internal dengan GIAS dan peraturan lain yang relevan untuk mengevaluasi penerapan etika dan profesionalisme oleh Auditor Internal. QAIP berdasarkan pelaksanaan reviunya dilaksanakan melalui penilaian yang dilakukan oleh SPI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan penilaian eksternal yang dilakukan oleh pihak independen (eksternal) secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. KSPI akan melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama mengenai kesesuaian fungsi audit internal dengan Standar Internal Audit, yang akan dinilai melalui program *Quality Assurance and Improvement Program* (QAIP).

The performance of the Internal Audit Unit (SPI) is evaluated regularly at least once a year to maintain the quality of the internal audit function. The performance assessment of the Internal Audit Unit is based on the realization of the duties and responsibilities carried out by SPI in supporting the management functions of the Company by the Board of Directors as well as the achievement of the established KPI targets. Additionally, the Internal Audit Unit also implements a Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) designed to ensure that internal audit activities comply with the Global Internal Audit Standards (GIAS) and other relevant regulations, as well as to evaluate the application of ethics and professionalism by Internal Auditors. QAIP, based on its review, is carried out through assessments conducted by SPI at least once a year and external assessments conducted by independent parties at least once every 3 (three) years. The Chief Audit Executive (KSPI) will periodically report to the Board of Commissioners and the President Director regarding the conformity of the internal audit function with Internal Audit Standards, which will be evaluated through the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP).

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan memiliki skala organisasi yang besar untuk dapat menopang proses bisnis yang kompleks dengan cakupan yang luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif untuk memastikan setiap level organisasi mampu menjalankan setiap program strategis dan mendorong kinerja keuangan dan operasional dalam rangka mencapai tujuan Perseroan sesuai rencana jangka Panjang Perseroan. Perseroan telah merancang dan menerapkan sistem pengendalian internal dalam memastikan efektivitas penciptaan nilai yang berorientasi jangka panjang dengan memberikan jaminan secara memadai atas integritas dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil, laporan keuangan dan terjaganya aset-aset Perseroan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai suatu proses yang terintegrasi baik dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, Sistem Pengendalian Internal melibatkan peran aktif setiap unsur yang ada di Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen sampai dengan individu pegawai. Oleh karena itu, Perseroan menetapkan sistem pengendalian internal yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam bentuk kebijakan strategis yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 0052.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPIN) PT PLN (Persero). Perseroan juga telah menerapkan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) sebagai salah satu tujuan *internal control* yaitu pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0039.P/DIR/2018 tentang Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

The Company has a large organizational scale to support complex business processes with a broad scope. Therefore, an effective control mechanism is required to ensure that every organizational level is capable of executing each strategic program and driving financial and operational performance in order to achieve the Company's objectives according to its Long-Term Plan. The Company has designed and implemented an internal control system to ensure the effectiveness of long-term value creation by providing adequate assurance of integrity and accountability in every decision made, financial reporting, safeguarding of the Company's assets, and compliance with applicable laws and regulations.

As an integrated process in both decision-making and ongoing activities, the Internal Control System involves the active roles of all elements within the Company, ranging from the Board of Commissioners, Directors, management, to individual employees. Therefore, the Company establishes a coordinated and integrated internal control system in the form of strategic policies set forth based on the Board of Directors Regulation Number: 0052.P/DIR/2022 on the Internal Control System (SPIN) of PT PLN (Persero). The Company has also implemented Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) as one of the internal control objectives, specifically internal control over financial reporting, established based on the Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) Number 0039.P/DIR/2018 on the Implementation of Internal Control over Financial Reporting.

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Framework

Penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Perseroan mengacu pada kerangka kerja yang diadopsi secara umum seperti *Framework on Internal Control Integrated Framework – Guidance* yang diterbitkan *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO). Kerangka kerja tersebut mencakup lima komponen pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

The implementation of the internal control system within the Company refers to a widely adopted framework such as the Framework on Internal Control Integrated Framework – Guidance issued by the Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO). This framework includes five components of internal control, which are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan standar ISO 3100:2018 *Risk Management – Guidelines* sebagai upaya dalam mengintegrasikan sistem pengendalian internal dengan model 3 lini (*three lines model*).

activities. In addition, the Company also considers the ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines standard as an effort to integrate the internal control system with the three lines model.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

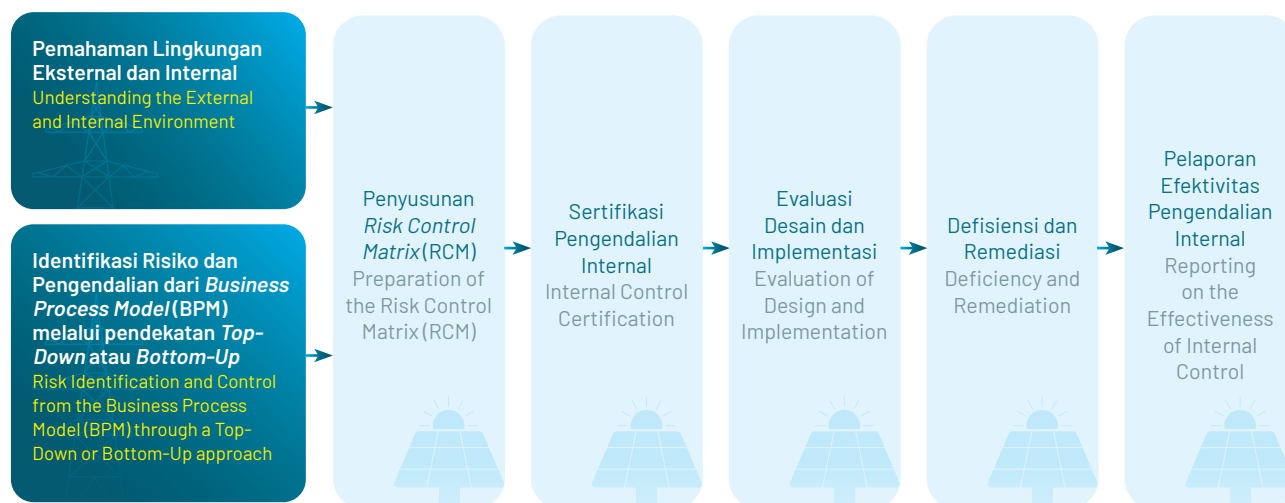
Internal Control Implementation

Pelaksanaan pengendalian internal mencakup aktivitas yang dapat memberikan jaminan secara memadai bahwa kekeliruan (*error*) dapat dicegah dan kecurangan (*fraud*) dapat dideteksi dan dikoreksi. Tahapan pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

The implementation of internal control includes activities that can provide reasonable assurance that errors can be prevented and fraud can be detected and corrected. The stages of internal control implementation within the Company are as follows:

Tahapan Pelaksanaan Pengendalian Internal

Stages of Internal Control Implementation



Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan lingkup Sistem Pengendalian Internal dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengendalian internal. Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan arahan atau rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan kebijakan SPIN termasuk pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Financial and operational controls, as well as compliance with applicable laws and regulations, fall within the scope of the Internal Control System and are carried out in accordance with the stages of internal control implementation. The Board of Commissioners, assisted by the Board of Commissioners' Committee, supervises and provides guidance or recommendations to the Board of Directors regarding the implementation of the Internal Control System Policy (SPIN), including financial and operational controls and compliance

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

yang berlaku. Direksi melaksanakan kebijakan SPIN dan memastikan pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan efektif.

Satuan kerja sebagai lini pertama menerapkan SPIN pada setiap aktivitas yang dijalankan dan melaksanakan praktik pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap aktivitas proses bisnis sesuai dengan mekanisme pendelegasian wewenang pada satuan kerja. Satuan Kerja Pengelola Sistem Pengendalian Internal sebagai lini kedua melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja pengelolaan dan efektivitas pengendalian internal yang dijalankan satuan kerja setiap triwulan. Satuan Pengawasan Intern melaksanakan *assurance* dan konsultasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal. Auditor eksternal berperan dalam rangka memastikan kecukupan akan standar pencatatan dan laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal di Perseroan.

with applicable laws and regulations. The Board of Directors implements the SPIN policy and ensures that financial and operational controls, as well as compliance with applicable laws and regulations, are effectively carried out.

Work units, as the first line, implement SPIN in every activity conducted and carry out financial and operational control practices, as well as compliance with applicable laws and regulations in each business process activity according to the delegation of authority mechanism within the work units. The Internal Control System Management Unit, as the second line, evaluates the performance achievements and effectiveness of internal controls carried out by the work units every quarter. The Internal Audit Unit provides assurance and consulting to enhance the effectiveness and efficiency of internal controls. External auditors play a role in ensuring the adequacy of recording and financial reporting standards as well as compliance with laws and regulations and internal controls within the Company.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Evaluation on the Effectiveness of Internal Control

Business Process Owner (BPO) baik secara individu maupun Satuan Kerja yang mengelola proses bisnis melaksanakan evaluasi atas pengendalian internal sesuai dengan lingkup tanggung jawab dan wewenang dalam menjalankan proses bisnis yang dilaporkan setiap triwulan. Satuan Kerja Pengelola Sistem Pengendalian Internal melakukan pengujian atas efektivitas rancangan pengendalian (*Internal Control Testing*) untuk tujuan operasional, laporan keuangan (ICOFR) dan non-keuangan dan kepatuhan yang dilaporkan oleh Satuan Kerja atau BPO. Satuan Pengawasan Intern menyusun perencanaan dan melaksanakan audit berdasarkan hasil *Internal Control Testing*. Satuan Pengawasan Intern menerbitkan Laporan efektivitas SPIN yang disusun minimal 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Business Process Owners (BPO), both individually and as Work Units managing business processes, conduct evaluations of internal controls in accordance with their scope of responsibility and authority in carrying out business processes, with reports submitted quarterly. The Internal Control System Management Unit performs testing on the effectiveness of control design (*Internal Control Testing*) for operational purposes, financial reporting (ICOFR), non-financial, and compliance, based on reports from the Work Units or BPO. The Internal Audit Unit plans and conducts audits based on the results of *Internal Control Testing*. The Internal Audit Unit issues a report on the effectiveness of the Internal Control System (SPIN) at least once a year, which is submitted to the President Director and the Board of Commissioners.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disimpulkan bahwa pengendalian internal Perseroan telah efektif. Tidak terdapat temuan signifikan dalam pengendalian internal Perseroan tahun 2024 yang dapat berpengaruh secara material atau memiliki kemungkinan berpengaruh secara material terhadap pengendalian internal Perseroan.

Based on these evaluations, it is concluded that the Company's internal controls have been effective. There were no significant findings in the Company's internal controls in 2024 that could materially affect or potentially materially affect the Company's internal controls.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Internal Control System

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah diterapkan secara efektif dengan infrastruktur yang memadai sesuai dengan skala dan lingkungan bisnis serta standar penerapan yang berlaku untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

The Board of Commissioners and the Board of Directors declare that the Company's Internal Control System had been effectively implemented with adequate infrastructure in accordance with the scale and business environment as well as the applicable implementation standards for the period ending December 31, 2024.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Perseroan dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dan penugasan pemerintah, menghadapi dinamika ketidakpastian baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka memitigasi hal tersebut, PLN menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi pada seluruh rangkaian aktivitas bisnis dan operasi yang dijalankan. Pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan atas setiap investasi dan program kerja di PLN dan Anak Perusahaan dilakukan secara cermat dan prudent berlandaskan praktik *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC). Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi diharapkan melindungi dan menciptakan nilai bagi PLN dan Anak Perusahaan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perseroan berupaya merespon peluang dan risiko secara tepat untuk memastikan pertumbuhan nilai dan keberlanjutan bisnis di masa mendatang.

The Company, in carrying out its business of providing electricity and fulfilling government assignments, faces dynamic uncertainties caused by both internal and external factors. To mitigate these, PLN implements Integrated Risk Management across all its business and operational activities. Risk management and decision-making for every investment and work program at PLN and its Subsidiaries are conducted carefully and prudently based on Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) practices. The application of integrated risk management is expected to protect and create value for PLN and its Subsidiaries by minimizing the potential impact of risks that could disrupt the achievement of established goals and objectives. The Company strives to respond appropriately to opportunities and risks to ensure value growth and business sustainability in the future.

Gambaran Umum Manajemen Risiko Perseroan

Overview of the Company's Risk Management

Perseroan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan standar praktik terbaik serta skala organisasi dan bisnis yang dijalankan PLN dengan mengadopsi standar ISO 31000 *Risk Management - Guidelines*. Kebijakan Manajemen Risiko PLN ditetapkan

The Company establishes its Risk Management Policy in accordance with best practice standards as well as the scale of PLN's organization and business operations by adopting the ISO 31000 Risk Management - Guidelines standard. PLN's Risk Management Policy is set forth through the Statement

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

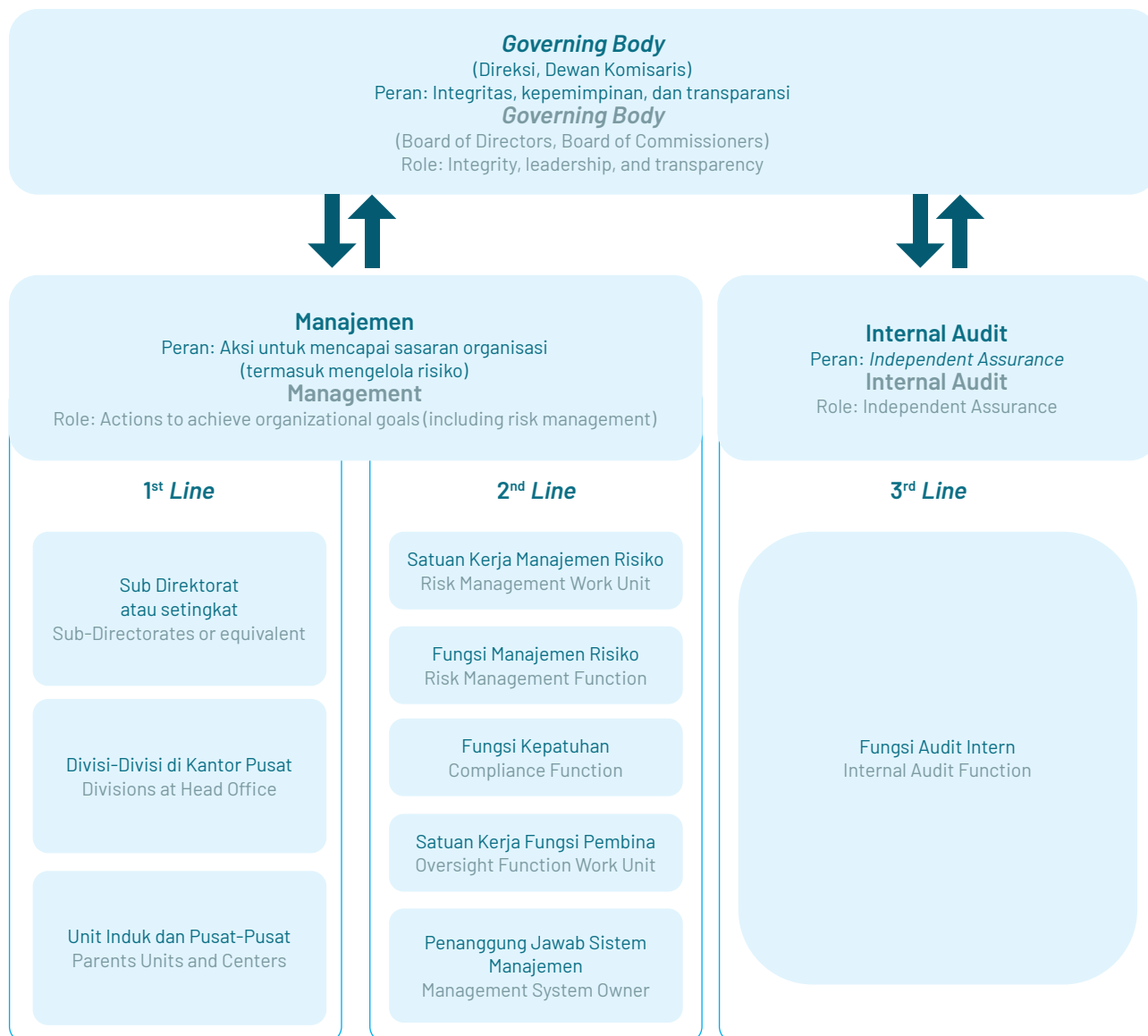
melalui Statement of Corporate Intent Manajemen Risiko Terintegrasi Nomor 0070.P/DIR/2021 sebagai *core policy* yang memuat Tata Nilai Risiko dan Strategi & Mekanisme Manajemen Risiko Terintegrasi. Perseroan juga menetapkan Peraturan Direksi No. 0016.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi, yang memuat ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pengelolaan risiko sebagai pedoman umum manajemen risiko serta acuan pelaksanaan pengelolaan risiko Perseroan. Organ Pengelola Manajemen Risiko Terintegrasi PLN terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang membidangi Pengelolaan Manajemen Risiko, Direktur yang membidangi Pengelolaan Keuangan, dan Satuan Pengawasan Intern. Proses manajemen risiko dilakukan oleh pemilik risiko dibantu oleh risk officer masing-masing unit kerja yang difasilitasi oleh Satuan Manajemen Risiko. PLN melaksanakan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko di tiap proses manajemen risiko. Koordinasi pengelolaan risiko Perseroan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang terdiri dari Divisi Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko, (2) Divisi Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT, (3) Divisi Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi, serta (4) Divisi Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi mendorong peran aktif seluruh orang Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan individu di lingkungan Perseroan serta diterapkan secara menyeluruh dalam lingkup grup PLN. Manajemen Risiko Perseroan dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi mempengaruhi Perseroan, dan mengelola risiko tersebut agar tetap berada dalam selera risiko Perseroan, demi memberikan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) atas pencapaian tujuan-tujuan Perseroan. Model koordinasi manajemen risiko Perseroan menggunakan Model Tiga Lini (*Three-Lines Model*) yang membagi fungsi-fungsi, mengklarifikasi dan memperkuat prinsip-prinsip yang mendasari, memperluas cakupan, dan menjelaskan bagaimana peran utama setiap fungsi dalam bekerja sama untuk memfasilitasi tata Kelola dan manajemen risiko yang kuat.

of Corporate Intent on Integrated Risk Management Number 0070.P/DIR/2021 as the core policy, which includes the Risk Value Framework and the Strategy & Mechanism of Integrated Risk Management. The Company also issues the Board of Directors Regulation No. 0016.P/DIR/2023 on the Strategic Policy on Integrated Risk Management, which contains the required provisions for risk management as a general guideline and reference for the Company's risk management implementation. The Integrated Risk Management Organ of PLN consists of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Integrated Governance Committee, Directors in charge for Risk Management and Finance Management, and the Internal Audit Unit. The risk management process is carried out by risk owners assisted by risk officers in each work unit, facilitated by the Risk Management Unit. PLN conducts risk assessments consisting of identification, analysis, and evaluation of risks at each stage of the risk management process. The coordination of the Company's risk management is conducted by the Risk Management Work Unit, which consists of: (1) the Infrastructure, Quality Assurance, and Risk Management Reporting Division; (2) the Construction, Generation, and NRE Risk Management Division; (3) the Transmission and Distribution Risk Management Division; and (4) the Strategic, Financial, and Human Capital Risk Management Division.

The implementation of integrated risk management encourages active participation from all levels of the Company, including the Board of Commissioners, Board of Commissioners Committees, Board of Directors, management, and individuals within the Company, and is applied comprehensively across the PLN group. The Company's Risk Management is designed to identify events that may potentially affect the Company and manage those risks within the Company's risk appetite, to provide reasonable assurance of achieving the Company's objectives. The Company's risk management coordination model uses the Three-Lines Model, which divides functions, clarifies and strengthens the underlying principles, expands the scope, and explains the key role of each function in working together to facilitate strong governance and risk management.

Struktur Tata Kelola Model Tiga Lini
Governance Structure of Three Line Models



Dalam praktik Manajemen Risiko Terintegrasi, PLN menerapkan mekanisme *Four Eyes Principle* (4EP) dalam pengambilan keputusan. Perseroan melakukan perbaikan berkesinambungan yang mencerminkan siklus *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) yang dirancang guna mengintegrasikan 4EP dengan praktik pengelolaan risiko yang melekat pada rangkaian proses bisnis dan manajerial di seluruh

In the implementation of Integrated Risk Management, PLN implements the *Four Eyes Principle* (4EP) mechanism in decision-making. The Company carries out continuous improvements reflecting the *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) cycle designed to integrate 4EP with risk management practices embedded in the business and managerial processes throughout all levels and environments within

Sistem Manajemen Risiko

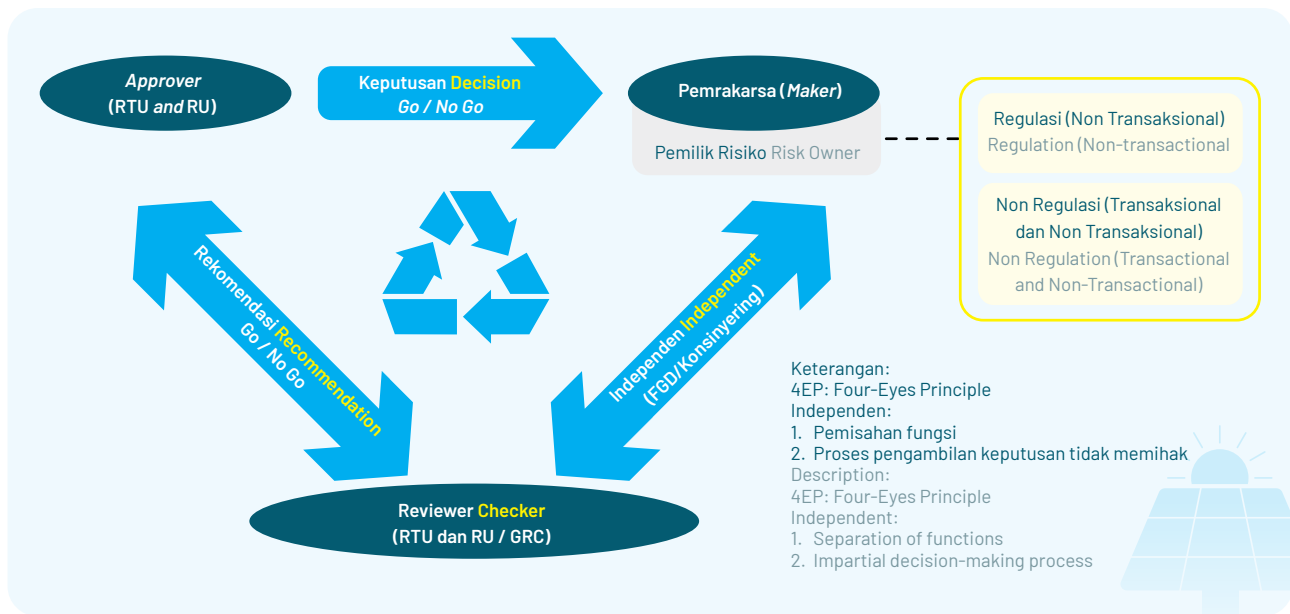
Risk Management System

lingkungan dan tingkatan PLN. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan keselarasan dan kesesuaiannya dengan implementasi GCG. Pengambilan keputusan dalam praktik pengelolaan risiko diselaraskan dengan mekanisme *delegation of authority* yang berlaku bagi jajaran manajemen PLN.

PLN. This is done by ensuring alignment and compliance with the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Decision-making in risk management practices is aligned with the delegation of authority mechanism applicable to PLN's management ranks.

Pengambilan Keputusan dan Kegiatan 4EP

Decision Making and Activities of 4EP



Profil Risiko dan Penanganannya

Risk Profile and its Handling

Perseroan mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan pencapaian target yang ditetapkan sepanjang tahun 2024. Terdapat 20 Risiko Utama yang teridentifikasi dan menjadi Profil Risiko Korporat Tahun 2024. Perseroan menetapkan upaya penanganan atau mitigasi untuk masing-masing risiko tersebut untuk memastikan tingkat risiko sesuai dengan *Risk Appetite* Perseroan sebagai berikut:

The Company identifies risks that have the potential to impact performance and the achievement of targets set throughout 2024. A total of 20 Key Risks have been identified and constitute the 2024 Corporate Risk Profile. The Company has established mitigation or handling efforts for each of these risks to ensure that the risk level remains in line with the Company's Risk Appetite, as follows:



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Penangan Risiko Korporat

Corporate Risk Handling

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1.	Risiko ketidakpastian pemakaian energi Listrik. The risk of uncertainty in the use of electrical energy.	1. Mengakuisisi captive power 2. Melakukan pemutusan kepada pelanggan yang menunggak. 3. Memperbanyak <i>channel</i> pembayaran 4. Melakukan sosialisasi <i>flyer</i> pembayaran listrik lebih awal 5. Melakukan kolaborasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan AP2T untuk mengakomodir <i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah (PPP) untuk pelanggan Kogol 2 6. Melakukan kolaborasi dengan pihak bank membuat program fleksibel 7. Menyampaikan info tagihan Listrik 8. Mensupervisi unit untuk melayani PB/PD pelanggan sesuai SLA Hari Layanan Pelanggan 9. Melaksanakan program kolaborasi Distribusi dengan Niaga 10. Memastikan ketersediaan anggaran pengelolaan pelanggan 11. Evaluasi terkait yang menyebabkan TMP Tidak tercapai 12. Memastikan dilakukannya riset pasar untuk memonitoring perilaku konsumsi listrik pelanggan dan disrupsi dalam teknologi untuk mengembangkan <i>customer experience</i> dan <i>excellence services</i>. 13. Monitoring hasil pembacaan kWh meter 14. Memastikan, memonitor, dan mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut terkait proses bisnis 15. pengelolaan pengukuran meter untuk meminimalkan <i>energy not sale</i> antara lain kWh meter tua/rusak, pemasangan <i>Automatic Meter Reading</i> (AMR), 16. Melaksanakan program rutin penggantian kWh meter rusak/tua (umur di atas 10 tahun) 17. Melakukan <i>update</i> pada kebijakan terkait regulasi susut non teknis 18. Memastikan pelaksanaan P2TL berjalan sesuai dengan prosedur 19. <i>EV ecosystem development</i>: Bekerjasama dengan dealer kendaraan listrik dan pihak lainnya untuk memanfaatkan produk SPKLU dan SPBKLU serta memiliki <i>home charging</i>. 20. Meningkatkan program ekstensifikasi dan intensifikasi pelanggan 21. Mengusulkan infrastruktur yang diperlukan oleh pelanggan ke dalam draft RUPTL 22. Memastikan Anggaran Investasi <i>Additional demand</i> tidak terlambat terbit 23. Melakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> kendala-kendala yang terjadi dilapangan

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		24. Memasukkan klausul denda pada PJBTL 25. Menagihkan denda atas keterlambatan proyek dari sisi konsumen 26. Proaktif menyampaikan informasi kesiapan kapasitas sistem dan produk layanan melalui dialog dengan setiap asosiasi (Besi Baja, Semen, Tekstil, Kimia, REI, APERSI, dsb.), BPKM, BPKMD, Dinas Perindustrian, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata. 27. Melakukan gathering dengan pelanggan dan atau calon pelanggan potensial secara berkala. 28. Melakukan cek poin secara berkala bersama pelanggan dalam rangka penyambungan KTT 29. Melakukan due diligence kelengkapan data Konsumen
		24. Including penalty clauses in PJBTL 25. Billing penalties for project delays on the customer side 26. Proactively communicating system capacity readiness and service products through dialogue with associations (Iron & Steel, Cement, Textile, Chemical, REI, APERSI, etc.), BPKM, BPKMD, and related government agencies 27. Organizing regular gatherings with customers and/or potential customers 28. Conducting regular checkpoints with customers for KTT connections 29. Performing due diligence on customer data completeness
2.	Risiko kegagalan pengembangan bisnis. Risk of business development failure	1. Melakukan pembangunan infrastruktur penunjang <i>beyond kWh</i> 2. Melaksanakan program <i>Content Streaming Aggregator (bundling layanan internet)</i> 3. Meningkatkan utilisasi aset <i>Fiber To The Home (FTTH Scale Up)</i> 4. Memenuhi tambahan modal disetor terhadap JVC Solar PV Manufacturing 5. Memenuhi skema JVC pada program Pilot B2B dan B2C solar rooftop 6. Melakukan kerjasama dengan konsultan <i>Independent Business Development</i> 7. Pelaksanaan program baru pemasaran produk <i>beyond kWh</i> 8. Menjalin kerja sama kemitraan dengan mitra strategis 9. Menjalin kerja sama kemitraan dengan konsultan dalam pengembangan green energy membramo 10. Menjalin kerja sama kemitraan dengan konsultan dalam pengembangan <i>Hydrogen Business Development</i> 11. Melakukan kajian ulang atau <i>second opinion</i> dengan kerja sama dengan konsultan <i>Independent Business Development</i> 12. Melakukan kerjasama dengan mitra strategis dalam pembentukan JVC guna pengembangan pembangunan infrastruktur gas. 13. Menyusun perencanaan kebutuhan Pasokan batubara tahun 2024 dan berkoordinasi dengan Ditjen Minerba ESDM dalam pencantuman volume kebutuhan batubara sektor ketenagalistrikan ke dalam RKAB 2024
		1. Developing supporting infrastructure for beyond kWh 2. Implementing the Content Streaming Aggregator program (internet service bundling) 3. Increasing asset utilization of Fiber To The Home (FTTH Scale-Up) 4. Fulfilling additional paid-in capital for the JVC Solar PV Manufacturing 5. Fulfilling the JVC scheme in the Pilot B2B and B2C solar rooftop programs 6. Collaborating with Independent Business Development consultants 7. Executing new programs for marketing beyond kWh products 8. Establishing partnership cooperation with strategic partners 9. Partnering with consultants for green energy Mamberamo development 10. Partnering with consultants for Hydrogen Business Development 11. Conducting reviews or obtaining second opinions through collaboration with Independent Business Development consultants 12. Collaborating with strategic partners to establish a JVC for gas infrastructure development 13. Planning coal supply needs for 2024 and coordinating with the Directorate General of Mineral and Coal (Ditjen Minerba ESDM) to include electricity sector coal volume requirements in the 2024 RKAB
3.	Risiko hambatan pasokan Batubara. Risk of coal supply constraints.	1. Menjalin kontrak jangka panjang dengan sumber tambang dan mitra pemasok (dengan perbaikan pada skema kontrak terkait skema pembayaran, harga, dan pengikatan komitmen pemenuhan pasokan sesuai kontrak dll) 2. Monitoring dan evaluasi rutin Pemenuhan SLA terkait ketepatan penyampaian laporan dan kecepatan penyampaian dok penagihan dalam pengelolaan dan kehandalan pasokan batubara dengan pengelola pembangkit.
		1. Establishing long-term contracts with mining sources and supplier partners (including improvements in contract schemes related to payment terms, pricing, and supply commitment enforcement, etc.) 2. Routinely monitoring and evaluating SLA fulfillment related to the accuracy of report submissions and timeliness of billing document delivery in managing and ensuring coal supply reliability with power plant operators

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		- Mendorong serta memastikan implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) berjalan dan menjamin kontinuitas pasokan batubara dalam negeri - Pengembangan program P2EP (Pusat Pengatur Energi Primer) <i>Primary Energy Supply Operation:</i> <i>Integrated Stock Performance Monitoring</i> <i>Fleet Management</i> - Inklusi parameter-parameter eksternal <i>Aggregated Dashboards</i> <i>Iterated Vendor Performance</i> <i>Contract Management</i> - Melakukan penambahan armada angkut baik sewa atau pembelian kapal berdasarkan evaluasi kajian logistik yang optimal: - Pengadaan Kapal Panamax (1 Set) - Pengadaan Kapal Supramax (1 Set) - Pengadaan TB 2400HP / Barge 330 ft (2 Set) - Pengadaan TB 2000HP / Barge 300 ft (2 Set) - Pengadaan Kapal Keruk Tipe CSD (1 Set) - Melakukan <i>monitoring</i> kepada anak perusahaan PLN EPI yang sudah melakukan penambangan untuk optimasi program pasokan batubara dari sumber tambang batubara AP ke PLTU dan non kelistrikan - Mengoptimalkan <i>coal blending facility</i> agar dapat menyerap kalori batubara yang ada dan sesuai spesifikasi PLTU <i>Monitoring</i> dan evaluasi rutin Pemenuhan SLA terkait Kualitas batubara dalam pengelolaan dan kehandalan pasokan batubara dengan pengelola pembangkit
4.	Risiko hambatan pasokan gas alam. Risk of natural gas supply disruptions.	- Melakukan koordinasi atas perencanaan gas dengan <i>stakeholders</i> (perencanaan sistem PLN, Regulator, <i>supplier</i> gas) sehingga pasokan atas gas dapat terpenuhi - Meningkatkan kerja sama dalam bentuk kontrak jangka panjang dengan para pemasok untuk kerjasama baru - Mengusahakan amandemen perpanjangan kontrak <i>existing</i>, untuk menjamin ketersediaan supply dengan pemasok - Meminta dukungan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kargo LNG yang tidak dapat dipenuhi oleh BP Tangguh dan LNG Bontang dengan harga yang affordable bagi PLN. - Mengoptimalkan pemanfaatan izin niaga gas PLN EPI untuk fleksibilitas pasokan gas - Mengusahakan melakukan amandemen kontrak <i>eksisting</i> dengan detail sebagai berikut : - Melakukan amandemen perjanjian untuk pemasok agar memastikan besaran volume, <i>interruptible</i>, terms sesuai kebutuhan gas yang <i>ter-update</i>. - Melakukan amandemen perjanjian untuk kontrak PJBG agar dapat menambah titik serah (Multi Destinasi) atau opsi <i>swap</i> pasokan gas ke pembangkit lain untuk mengoptimalkan pasokan gas
		- Encouraging and ensuring the implementation of the Managing Agency Partner (MIP) and securing the continuity of domestic coal supply - Developing the P2EP (Primary Energy Control Center) program - Operating Primary Energy Supply through: - Integrated stock performance Monitoring - Fleet Management - Inclusion of external parameters - Aggregated dashboards - Iterated vendor performance - Contract Management - Adding transportation fleets either by leasing or purchasing ships based on optimal logistics assessment: - Procuring Panamax vessel (1 set) - Procuring Supramax vessel (1 set) - Procuring TB 2400HP / Barge 330 ft (2 sets) - Procuring TB 2000HP / Barge 300 ft (2 sets) - Procuring CSD-type dredger (1 set) - Monitoring PLN EPI subsidiaries that have conducted mining activities to optimize coal supply programs from AP coal mining sources to power plants and non-electricity sectors - Optimizing coal blending facilities to absorb the available coal calorific value and match the specifications of power plants - Routinely monitoring and evaluating SLA fulfillment related to coal quality in managing and ensuring coal supply reliability with power plant operators
		- Coordinating gas planning with stakeholders (PLN system planning, regulators, gas suppliers) to ensure sufficient gas supply - Enhancing cooperation in the form of long-term contracts with suppliers for new partnerships - Seeking amendments for the extension of existing contracts to ensure supply availability with suppliers - Requesting government support to fulfill LNG cargo needs not met by BP Tangguh and LNG Bontang at affordable prices for PLN - Optimizing the utilization of PLN EPI's gas trading license for supply flexibility - Seeking to amend existing contracts with details as follows: - Amending agreements with suppliers to ensure volume, interruptible terms, and other terms match the updated gas needs - Amending PJBG contracts to add delivery points (multi-destination) or gas supply swap options to other power plants to optimize supply

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		- Melakukan pengembangan aplikasi pengendalian dan pemantauan pasokan gas yang mencakup fitur, minimal memuat informasi : - Monitoring dan evaluasi realisasi penyerapan gas sesuai terms dalam kontrak - Penyediaan database harga gas berdasarkan kontrak eksisting maupun potensi pasokan termasuk batasan minimum / maksimum pasokan gas serta mensimulasikan rencana pasokan gas berdasarkan kebutuhan gas yang diajukan oleh masing-masing unit / regional untuk mendapatkan prognosa total biaya bahan bakar gas. - Melakukan <i>monitoring</i> progress dan percepatan pembangunan, serta legalitas pengoperasian infrastruktur gas sebagai berikut: - Infrastruktur LNG Sulawesi - Terminal LNG Bali - Terminal LNG Arun - Manajemen stakeholder terkait regulasi Harga Gas Bumi Tertentu yang berlaku untuk PLN Group. - Melakukan <i>stakeholder management</i> terkait ketersediaan penerimaan bagian negara atas alokasi kargo LNG Tangguh secara periodik di tahun 2024.
5.	Risiko kenaikan pemakaian BBM pada <i>fuel mix</i> . Risk of increasing fuel consumption in the fuel mix.	- Pemenuhan pasokan Bahan Bakar BBM semua pembangkit - Pemenuhan pasokan bahan bakar BBM pembangkit milik sewa akibat penurunan performansi pembangkit PLTU dan PLTA - Pemenuhan pasokan bahan bakar BBM miliknya IPP - Melaksanakan pemeliharaan rutin atau periodik pembangkit PLTA - Melaksanakan pemeliharaan rutin atau periodik pembangkit PLTD
6.	Risiko pasokan material distribusi utama tersendat. Risk of disruption of supply of main distribution materials.	- Jasa Konsultansi <i>Supply Chain Management</i> - Menindaklanjuti hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh konsultan dalam pemetaan stock minimum UID/UIW. - Koordinasi kesiapan Pusertif terkait jumlah sampling untuk pengujian material sesuai batas minimal yang ditentukan pada SPLN - Penugasan Pengujian Serah Terima Material Distribusi Utama Tahun 2024. - Jasa Konsultansi Enjiniring Pemdampingan Evaluasi Prakuifikasi DPT - Penilaian <i>vendor</i> berbasis matrik penilaian 2023 - Melakukan evaluasi efektivitas mekanisme usulan permintaan secara bulanan pada PLN Unit Induk untuk menjamin kesiapan pabrikan
		- Developing a gas supply control and monitoring application that includes, at minimum, the following features: - Monitoring and evaluating gas offtake realization according to contract terms - Providing a gas price database based on existing contracts and potential supply, including minimum/maximum supply limits, and simulating gas supply plans based on unit/ regional gas demand to forecast total gas fuel cost - Monitoring the progress and accelerating the development and legal operation of the following gas infrastructure: - Sulawesi LNG infrastructure - Bali LNG terminal - Arun LNG terminal - Managing stakeholders related to the Specific Natural Gas Price regulation applicable to PLN Group - Managing stakeholders regarding the availability of the state's entitlement from the allocation of Tangguh LNG cargoes periodically in 2024
		- Fulfilling fuel (BBM) supply for all power plants - Fulfilling fuel (BBM) supply for rented power plants due to performance decline of coal-fired (PLTU) and hydro (PLTA) power plants - Fulfilling fuel (BBM) supply for Independent Power Producers (IPP) - Conducting routine or periodic maintenance of hydro power plants (PLTA) - Conducting routine or periodic maintenance of diesel power plants (PLTD)
		- Supply Chain Management consultancy services - Following up on the assessment results conducted by the consultant regarding minimum stock mapping at UID/UIW - Coordinating Pusertif's readiness related to the number of samples for material testing according to the minimum limits specified in the SPLN - Assigning testing for the Main Distribution Material Handover in 2024 - Engineering Consultancy Services for Prequalification Evaluation Assistance of DPT - Assessing vendors based on the 2023 evaluation matrix - Evaluating the effectiveness of monthly request proposal mechanisms at PLN's Parent Units to ensure manufacturers' readiness



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		8. Melakukan langkah-langkah strategis guna memenuhi kebutuhan MDU (semisal opsi pengadaan <i>spot</i>, penerapan <i>price adjustment</i>, dan sebagainya) dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah GCG, untuk menghindari terjadinya permasalahan/krisis pasokan MDU yang semakin berdampak pada kinerja perusahaan. Melaksanakan strategis pengadaan MDU dengan cara efektif durasi kontrak, penerapan <i>price adjustment</i> dll 8. Taking strategic steps to fulfill MDU needs (such as spot procurement options, applying price adjustment, etc.) while observing GCG principles to avoid potential MDU supply issues/crises that could further affect Company performance. Implementing MDU procurement strategies through effective contract duration, price adjustment application, and more
7.	Risiko <i>availability</i> pembangkit tidak optimal. Risk of suboptimal power plant availability.	1. Melaksanakan pemeliharaan pembangkit yang dikelola PLN 2. Melaksanakan pemeliharaan pembangkit akibat adanya gangguan yang dikelola SH/AP 3. Melaksanakan Pemeliharaan rutin PLTU sesuai dengan <i>manual book</i> 4. Melaksanakan Pemeliharaan rutin PLTG sesuai dengan <i>manual book</i> 5. Melaksanakan Pemeliharaan rutin PLTGU sesuai dengan <i>manual book</i> 6. Melaksanakan Pemeliharaan rutin PLTP sesuai dengan <i>manual book</i> 7. Melaksanakan Pemeliharaan rutin PLTS sesuai dengan <i>manual book</i> 1. Conducting maintenance of power plants managed by PLN 2. Conducting maintenance of power plants due to disturbances managed by SH/AP 3. Performing routine maintenance of coal-fired power plants (PLTU) according to the manual book 4. Performing routine maintenance of gas turbine power plants (PLTG) according to the manual book 5. Performing routine maintenance of combined-cycle power plants (PLTGU) according to the manual book 6. Performing routine maintenance of geothermal power plants (PLTP) according to the manual book 7. Performing routine maintenance of solar power plants (PLTS) according to the manual book
8.	Risiko padam parsial maupun blackout sistem ketenagalistrikan. Risk of partial power outages or blackouts in the electricity system.	1. Implementasi Program penggantian/pemeliharaan sistem proteksi yang <i>obsolete</i> (<i>relay</i>, telekomunikasi dan <i>power supply</i>) 2. Penyelesaian pembangunan Trafo/ IBT dan SUTT/ SUTET sesuai target COD 3. Merencanakan <i>update/</i> pembangunan <i>Control Center</i> baru untuk mengakomodir perkembangan teknologi pembangkit dan pembebanan terbaru 4. Membuat komitmen dari penyedia energi primer untuk memenuhi pasokan energi primer sesuai dengan rencana operasi pembangkit 5. Memaksimalkan pembangkit yang relatif baru untuk dapat mengadopsi otomatisasi pengaturan beban yang tersentralisasi (<i>Automatic Generation Control</i> (AGC)/<i>Load Frequency Control</i> (LFC)). 6. Implementasi ADS (<i>Adaptive Defense Scheme</i>) pada seluruh sistem/subsistem. 7. Program peningkatan keandalan jaringan transmisi (Perbaikan <i>tower</i> kritis, Rekonduktoring, Penggantian Isolator dan Perbaikan Pentanahan). 8. Melakukan pembinaan kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu saluran transmisi 9. Program peningkatan keandalan Gardu Induk (Penggantian MTU kritis). 10. Implementasi Program <i>Anti Blackout</i> 1. Implementing the replacement/maintenance program for obsolete protection systems (relays, telecommunications, and power supply) 2. Completing the construction of transformers/ IBTs and high-voltage transmission lines (SUTT/ SUTET) according to COD targets 3. Planning updates/construction of new Control Centers to accommodate technological developments in power generation and recent load demands 4. Securing commitments from primary energy providers to meet the supply of primary energy according to the power plant operational plan 5. Maximizing relatively new power plants to adopt centralized load control automation (Automatic Generation Control (AGC)/Load Frequency Control (LFC)) 6. Implementing ADS (Adaptive Defense Scheme) across all systems/subsystems 7. Carrying out transmission network reliability improvement programs (critical tower repairs, reconductoring, insulator replacements, and grounding improvements) 8. Guiding community activities that have the potential to disrupt transmission lines 9. Executing substation reliability improvement programs (replacement of critical MTUs) 10. Implementing the Anti-Blackout Program

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
9.	Risiko kecelakaan kerja yang menyebabkan <i>fatality</i> . Risk of occupational accidents causing fatalities.	- Implementasi CSMS <i>full cycle</i> di seluruh unit PLN minimal 50% dari total <i>vendor high risk</i> <i>Roll Out</i> program pembangunan budaya K3 ke seluruh unit distribusi - Updating materi diklat pengawas K3 / K2. - Finalisasi standarisasi <i>cost structure</i> aspek K3 dan SLA kontrak TAD (Yantek) - Review kriteria <i>maturity</i> level K3 tahun 2025 - Pengembangan aplikasi HSSE <i>Mobile Apps</i> dengan penambahan fitur <i>Critical Control Verification</i> (CCV). - Benchmark Tata Kelola dan Implementasi K3 ke perusahaan global. - Penyusunan standar / pedoman 5S untuk kantor (Unit Induk, UP3, ULP, Posko) dan Mobil Yantek. <i>Improvement</i> pemetaan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dengan memastikan semua Direktorat yang bertanggung jawab mengendalikan risiko kecelakaan kerja. - Memberikan rekomendasi atau arahan dan membuat program kerja <i>improvement</i> apabila terjadi kecelakaan kerja
10.	Risiko keterlambatan penyelesaian proyek strategis. Risk of delays in completing strategic projects.	- Percepatan pengadaan pembangkit dengan melakukan evaluasi keselarasan antara rencana penambahan pembangkit dengan target pengembangan pembangkit, mempertimbangkan <i>supply demand</i>, <i>resource based</i>, keekonomian, keandalan, ketahanan energi nasional, dan sustainabilitas. - Implementasi Sistem <i>Building Information Modelling</i> (BIM) pada proyek-proyek PLN - Memastikan ketersediaan pendanaan khususnya proyek yang perlu penambahan <i>Loan Agreement</i>. - Prioritas penyelesaian proyek yang terkait dengan evakuasi daya dan penyambungan pelanggan baru, termasuk memutuskan tindak lanjut proyek yang terkendala atau terhenti. - Optimalisasi proses serah terima proyek dari unit pembangunan kepada unit pengusahaan termasuk prosedur terkait. - Pengembangan sistem <i>monitoring project</i> RUPTL secara end to end dalam 10 <i>stage gate</i>. (<i>motion</i> PMO) - Memastikan ketersediaan material transmisi utama (MTU) - Memastikan ketersediaan pasokan Energi Primer (gas dan batubara) untuk pelaksanaan komisioning. - Menyusun rencana implementasi PMIS untuk Perencanaan, Pengelolaan Pendanaan, <i>Monitoring</i> dan Pengendalian Proyek Ketenagalistrikan

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
11.	Risiko Keterbatasan sumber daya pendukung program listrik pedesaan. Risk of limited resources supporting rural electricity program	1. Menggunakan APLN untuk pendanaan program lisdes 2024 2. Meminta penugasan dari Pemerintah untuk Program Lisdes dengan anggaran PMN 3. Penyiapan KHS dan alokasi material, serta melakukan monitoring kesesuaian dan ketersediaan alokasi MDU sesuai dengan rencana 4. Bekerja sama dengan PEMDA untuk masalah infrastruktur dan perijinan dan pembuatan PKS 5. Bersama KLHK Meneruskan MoU antara UIW P2B dengan Triliun Kasuari & Cendrawasih yang saat ini sudah terbit 1. Using APLN to fund the 2024 rural electrification program (Lisdes). 2. Requesting assignment from the Government for the Lisdes Program with PMN budget. 3. Preparing KHS and material allocation, as well as monitoring the conformity and availability of MDU allocation according to plan. 4. Collaborating with Regional Governments (PEMDA) on infrastructure, permits, and drafting Cooperation Agreements (PKS). 5. Continuing the MoU with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) between UIW P2B and Triliun Kasuari & Cendrawasih, which has now been issued.
12.	Risiko program transisi energi mengalami kendala implementasi. Risk of obstacles in implementing the energy transition program.	1. Program <i>Accelerated renewable energy development</i>. Dimulai dengan penyusunan dokumen untuk : a. <i>Additional Renewable Baseload</i> b. <i>Additional Wind & Solar (VRE)</i> c. <i>New Energy</i> 2. Program <i>De-dieselization</i> a. Program EBT & Hybrid b. Program Gasifikasi c. program Interkoneksi ke Grid 3. Persiapan pembangunan <i>Green Enabling Transmission</i> antar pulau 4. penyelesaian pembangunan pembangkit EBT 5. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian terkait 6. Melakukan Program <i>Scale-Up PLTU Co-Firing</i> 7. Menambah Jumlah <i>PLTU-Co-firing</i>, menambah kapasitas (GW), menambah Produksi (TWh) dan menambah Biomassa (Jt Ton) 1. Implementing the Accelerated Renewable Energy Development program, starting with preparing documents for: a. Additional Renewable Baseload b. Additional Wind & Solar (VRE) c. New Energy 2. Running the De-dieselization program: a. NRE & Hybrid program b. Gasification program c. Grid Interconnection program 3. Preparing the development of Green Enabling Transmission between islands 4. Completing the construction of NRE power plants 5. Coordinating intensively with related Ministries 6. Scaling up the PLTU Co-Firing program 7. Increasing the number of PLTU Co-Firing units, adding capacity (GW), increasing production (TWh), and boosting biomass volume (million tons)
13.	Risiko <i>deadlock</i> pada <i>development</i> program digitalisasi. Risk of deadlock in the development of the digitalization program.	1. Inisiatif <i>digital moonshot</i> 2. Melakukan <i>change request</i> 3. Meningkatkan <i>performance server database</i>, kapasitas <i>storage</i>, dan kapasitas virtualisasi 4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur <i>network DC DRC</i> 5. Meningkatkan <i>Enterprise Asset Management (EAM)</i> Distribusi 6. Melakukan <i>Reengineering</i> Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) 7. Melakukan Pengembangan <i>Big Data Analytic</i> 8. <i>Managed Service IT</i> 9. Peningkatan infrastruktur penunjang teknologi informasi 1. Initiating the digital moonshot initiative 2. Implementing change requests 3. Enhancing database server performance, storage capacity, and virtualization capacity 4. Increasing DC DRC network infrastructure capacity 5. Improving Enterprise Asset Management (EAM) for Distribution 6. Reengineering the Integrated Complaint and Grievance Application (APKT) 7. Developing Big Data Analytics 8. Managing IT Managed Services 9. Upgrading supporting information technology infrastructure
14.	Risiko serangan <i>cyber</i> terhadap IT dan OT. Risk of cyber attacks on IT and OT systems.	1. Meningkatkan program instalasi Anti Virus PLN Group dan Unified Endpoint Management (PLN Holding) di seluruh device pegawai organik dan TAD (yang menggunakan fasilitas IT dalam operasional) 2. Implementasi Security Operation Center (SOC) pada H/SH/AP yang terintegrasi secara mandiri atau terpusat. 3. Meningkatkan kegiatan cyber security awareness untuk seluruh pegawai organik dan TAD di seluruh Unit PLN Group. 1. Enhancing the installation program of Antivirus for PLN Group and Unified Endpoint Management (PLN Holding) on all devices used by organic employees and TAD personnel (who use IT facilities in operations). 2. Implementing a Security Operation Center (SOC) at H/SH/AP, either independently or in a centralized and integrated manner. 3. Increasing cybersecurity awareness activities for all organic employees and TAD across all PLN Group units.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		- Penyusunan Data Governance untuk IT dan OT PLN. - Standarisasi Tata Kelola IT & OT serta <i>cyber security</i> secara bertahap di seluruh Unit PLN Group. - Melanjutkan persiapan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 dalam ruang lingkup layanan TI di lingkungan PLN. - Melakukan pembatasan instalasi aplikasi (AO → UEM). - Melakukan pengaktifan pengaturan mengenai <i>screensaver automatic lock</i> (AO → UEM). - Melakukan <i>update patches, signature, dan renewal license</i> seluruh perangkat <i>security</i> (AO → UEM). - Memastikan seluruh jaringan <i>inbound</i> dan <i>outbound</i> terhubung dengan <i>Firewall</i> IT dan OT.
15.	Risiko ketidaksiapan organisasi dan SDM dalam mendukung transformasi 2.0. Risk of organizational and HR unpreparedness in supporting Transformation 2.0.	- Conducting training and certification related to security. - Performing maturity assessments regularly. - Developing applications securely using the Secure Software Development Life Cycle (SDLC). - Sending reminders to SME BPO regarding the preparation of the Dirkom document. - Rescheduling the preparation of Dirkom together with SME BPO. - Conducting desk studies and interviews with RKO and TCO regarding the Moonshot initiative. - Coordinating with the Business Process and Organizational Strategy divisions to monitor developments in job formations and main duties. - Drafting standard procedure policies for workforce planning and control. - Analyzing workload using consultants with sampling in one or two divisions. - Maintaining regular coordination with the HTD Division regarding recruitment progress. - Collaborating with Indonesian Student Associations (PPI) abroad to find candidates meeting requirements. - Partnering with leading universities within the country. - Conducting joint recruitment with State-Owned Enterprises (SOEs). - Implementing the COLONY program. - Applying HCIS according to the latest policies. - Developing remuneration systems to support productivity and workforce engagement toward PLN P75 (Right Spend). - Conducting education and training tailored to competency needs.

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

No.	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
16.	Risiko kegagalan dalam menjaga pemenuhan <i>debt covenant</i> . Risk of failure to maintain compliance with debt covenants.	1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penerimaan subsidi dan kompensasi untuk menjaga pendapatan operasi perusahaan. 2. Melakukan evaluasi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) dan menyiapkan tindak lanjut agar BPP tidak melebihi target. 3. Melakukan <i>monitoring covenant</i> melalui <i>rolling forecast</i>.
17.	Risiko depresiasi rupiah terhadap valuta asing. Risk of rupiah depreciation against foreign currencies.	1. Melaksanakan program lindung nilai (<i>hedging</i>). 2. Melaksanakan pembayaran kewajiban pinjaman tepat waktu. 3. Memantau dan melaporkan kondisi market update, sehingga dapat memberikan informasi terkini yang dibutuhkan manajemen secara berkala.
18.	Risiko keterbatasan pendanaan internal dalam mendanai investasi ketenagalistrikan. Risk of limited internal funding to finance electricity sector investments.	1. Menyusun kajian model pendapatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tarif adjustment untuk perhitungan kompensasi. 2. Melakukan pencadangan biaya penyusutan atas rencana pengembangan investasi baru. 3. Melakukan pembayaran pokok pinjaman secara tepat waktu.
19.	Risiko penurunan keandalan sistem ketenagalistrikan terhadap perubahan iklim. Risk of decreased reliability of the power system due to climate change.	1. Melaksanakan program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada waduk PLTA yang elevasinya di bawah normal. 2. Melaksanakan program pemenuhan <i>reserve margin</i> pembangkit sebesar derating pembangkit hidro saat terjadi El Niño tinggi. 3. Melaksanakan normalisasi kapasitas waduk PLTA.
20.	Risiko perubahan kebijakan/regulasi sektoral yang mempengaruhi proses bisnis PLN. Risk of changes in sectoral policies/regulations affecting PLN's business processes.	1. Menyusun <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA). 2. Melakukan <i>Re-Adjustment</i> kepada <i>stakeholder</i> terkait atas isu strategis yang berhubungan dengan bisnis PLN karena adanya perubahan/pergantian regulator di tahun 2024. 3. Melakukan profiling <i>stakeholder</i> strategis. 4. Melakukan koordinasi aktif dengan regulator terkait upaya penyusunan dan harmonisasi regulasi eksternal guna mendukung kepentingan dan proses bisnis PLN. 5. Melakukan <i>monitoring</i> isu-isu strategis. 6. Mengembangkan Sistem Informasi <i>Regulation Framework Information System</i> (RFIS).

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Tingkat risiko akhir dari masing-masing risiko utama korporat tahun 2024 digambarkan pada Peta Risiko Triwulan IV Tahun 2024 dimana terdapat Risiko *Inherent* dan Risiko Residu. Risiko *Inherent* adalah tingkat risiko awal dimana perlakuan risiko baik itu tindakan pengendalian maupun tindakan mitigasi risikonya belum dilaksanakan dan Risiko Residu adalah tingkat risiko yang tertinggal saat dilaporkan pada akhir masa pemantauan risiko.

The final risk level of each main corporate risk for 2024 is illustrated in the Risk Map for the Fourth Quarter of 2024, which includes Inherent Risk and Residual Risk. Inherent Risk is the initial risk level before any risk treatments, whether control actions or mitigation measures, are implemented. Residual Risk is the remaining risk level reported at the end of the risk monitoring period.

Peta Risiko Tahun 2024

2024 Risk Map

Probabilitas Probability	Hampir Pasti Terjadi Almost Certain 5 > 80%					
	7	12	17	22	25	
	4	9	14	19	24	
	3	8	13	18	23	
	2	6	11	16	21	
	1	5	10	15	20	
	Sangat Rendah Very Low 1 ≤ Rp1,58 T	Rendah Low 2 ≤ Rp1,58 T - Rp3,16 T	Moderat Moderate 3 ≤ Rp3,16 T - Rp4,75 T	Tinggi High 4 ≤ Rp4,75 T - Rp6,33 T	Sangat Tinggi Very High 5 ≥ Rp6,33 T	
Dampak Impact						



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Peningkatan Kualitas Manajemen Risiko

Enhancing Risk Management Quality

Perseroan menetapkan sasaran strategis (*roadmap*) dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. *Roadmap Maturity 4.0 (managed)* pada 2024, disusun 5 (lima) program besar terdiri yang dari sasaran yang diikuti pelaksanaan strategi berupa *capacity building* untuk mengintegrasikan sasaran tersebut. Kemudian, dilakukan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran tersebut, untuk selanjutnya dilakukan penilaian sebagai evaluasi pelaksanaannya.

The Company sets strategic targets (*roadmap*) to improve the quality of risk management implementation. The *Roadmap Maturity 4.0 (managed)* in 2024 consisted of five major programs derived from the targets, followed by the implementation of strategies in the form of capacity building to integrate these targets. Then, the Risk Management Information System was developed to strengthen efforts to achieve these targets, which was subsequently evaluated through assessments of its implementation.

Risk Management Maturity Roadmap
Risk Management Maturity Roadmap

	Komitmen Commitment	Keterpaduan Integrated	Konsistensi Consistency	Keunggulan Excellence	Keberlanjutan Sustainability
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Target →	Tersedianya komitmen manajemen untuk mendukung program-program manajemen risiko sesuai <i>roadmap</i> Availability of management commitment to supporting risk management programs according to the roadmap	Terbangunnya kapasitas internal untuk melaksanakan program-program integrasi manajemen risiko Building internal capacity to carry out integrated risk management programs	Terwujudnya integrasi manajemen risiko di seluruh organisasi sebagai <i>steppingstone</i> menuju kinerja berbasis manajemen risiko Realization of risk management integration throughout the organization as a steppingstone towards performance-based risk management	Tersedianya sistem informasi manajemen risiko yang andal guna mendukung kinerja manajemen risiko Availability of a reliable risk management information system to support risk management performance	Tercapainya kapabilitas manajemen risiko untuk pengembangan ketahanan dan risiko keberlanjutan organisasi Achievement of risk management capabilities for the development of organizational resilience and risk sustainability
Strategi Strategy →	- Membangun komitmen Manajemen PLN - Penguatan struktur organisasi manajemen risiko - Building PLN Management commitment - Strengthening the risk management organizational structure	- Membangun sinergi manajemen risiko di seluruh organisasi PLN - Penguatan proses pengambilan keputusan - Building risk management synergy across the PLN organization - Strengthening decision-making processes	- Meningkatkan kinerja manajemen risiko - Meningkatkan dan meratakan keahlian manajemen risiko - Improving risk management performance - Improving and leveling risk management expertise	- Penguatan sistem informasi manajemen risiko - Peningkatan budaya manajemen risiko - Mempertahankan keunggulan organisasi - Strengthening the risk management information system - Improvement of risk management culture - Maintaining organizational excellence	- Penguatan Budaya Risiko - Penguatan ketahanan dan keberlanjutan perusahaan - Strengthening Risk Culture - Strengthening corporate resilience and sustainability

Sesuai *roadmap* menuju *level maturity 4.0*, PLN menetapkan 2 *stream* pada strategi *Capacity Building* yaitu program diklat pembelajaran dan program sertifikasi manajemen risiko. Perseroan mengadakan diklat pembelajaran internal manajemen risiko, dengan pegawai yang mengikuti program diklat pembelajaran sampai dengan tahun 2024 mencapai 38.018 peserta di seluruh PLN Group dan yang telah tersertifikasi sebanyak 968 orang.

In accordance with the roadmap towards maturity level 4.0, PLN has established two streams in the Capacity Building strategy: the risk management training program and the risk management certification program. The Company conducts internal risk management training, with a total of 38,018 employees participated in the training program across the entire PLN Group by 2024, and 968 employees had been certified.

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Sepanjang tahun 2024, program pembelajaran terkait manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the risk management learning programs are as follows:

Program Pembelajaran Manajemen Risiko Tahun 2024

Risk Management Learning Program 2024

Program Pembelajaran Learning Program	Jumlah Peserta Total Participants
Manajemen Risiko Fundamental Fundamental Risk Management	38.343
Manajemen Risiko Dasar Level Individu Basic Risk Management at the Individual Level	22
Manajemen Risiko Dasar Level Organisasi Basic Risk Management at the Organizational Level	26
Teknik Asesmen Risiko Risk Assessment Techniques	7
Total	38.018

Hingga 2024 jumlah sertifikasi seluruh PLN Group adalah sebagai berikut:

As of 2024, the number of certifications for the entire PLN Group is as follows:

Organ Sertifikasi Certification Organ	Jumlah Sertifikasi Total Certifications
PLN Holding	672
Nusantara Power	75
Indonesia Power	65
Icon Plus	34
Energi Primer Indonesia	26
PLN Enjiniring	25
Nusa Daya	18
PLN Batam	23
Energi Management Indonesia	10
Mandau Cipta Tenaga Nusantara	9
Haleyora Power	11
Total	968

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Review of the Effectiveness of Risk Management System

Dalam rangka memperbaiki implementasi manajemen risiko secara berkesinambungan, dilakukan asesmen tingkat kematangan manajemen risiko atau *Risk Maturity Index* (RMI) secara berkala. Mulai tahun 2024 Asesmen RMI dilakukan pada entitas tingkat Korporat BUMN Induk (Holding), Sub-Holding dan Anak Perusahaan dengan menggunakan kriteria RMI dari BUMN. Untuk Unit Induk

In order to continuously improve the implementation of risk management, periodic assessments of the risk maturity level or Risk Maturity Index (RMI) are conducted. Starting in 2024, RMI assessments would be carried out at the corporate level of the State-Owned Enterprises (SOE) Holding, Sub-Holding, and Subsidiaries using the RMI criteria established by the SOE Ministry. For the Parent Unit, the



Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

penilaian RMI akan disesuaikan dengan pemenuhan *roadmap* implementasi manajemen risiko. Sedangkan untuk Divisi pengelolaan risiko diukur dengan realisasi pelaksanaan mitigasi.

Sebagaimana telah dilakukan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) di PLN untuk periode masa pengukuran tahun buku 2023 dengan skala pengukuran 1-5, yang telah dilakukan melalui kajian dokumen dan wawancara sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Sk-8/DKU.MBU/12/2023 tentang petunjuk teknis, Indeks Kematangan Risiko PLN adalah 3,4 yaitu pada fase praktik yang baik, yang memiliki arti:

1. Menerapkan seluruh dimensi praktik manajemen risiko, mendekati/sejalan dengan praktik standar industrinya;
2. Pegawai cukup sadar akan risiko, budaya risiko mulai diterapkan di dalam perusahaan;
3. Struktur organisasi, kerangka kerja, kepatuhan, proses, sistem, dan alat terkait manajemen risiko telah diterapkan, level implementasinya masih bervariasi;
4. Menerapkan manajemen risiko secara konsisten sesuai framework manajemen risiko dan menerapkan prinsip manajemen risiko terus-menerus; dan
5. Penjabaran (*cascading*) target kinerja perusahaan telah dilakukan hingga tingkat individu.

RMI assessment would be aligned with the fulfillment of the risk management implementation roadmap. Meanwhile, for the Risk Management Division, the measurement would be based on the realization of mitigation implementation.

As had been done for the Risk Maturity Index (RMI) measurement at PLN for the 2023 fiscal year period using a 1-5 scale, which was conducted through document review and interviews in accordance with the Decree of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number Sk-8/DKU.MBU/12/2023 concerning technical guidelines, PLN's Risk Maturity Index is 3.4, indicating a good practice phase, meaning:

1. Implementing all dimensions of risk management practice, approaching or aligned with industry standard practices;
2. Employees were reasonably aware of risks, and a risk culture was beginning to be applied within the Company;
3. The organizational structure, framework, compliance, processes, systems, and tools related to risk management had been implemented, though the level of implementation still varies;
4. Consistently applying risk management according to the risk management framework and continuously applying risk management principles; and
5. Cascading the Company's performance targets down to the individual level has been carried out.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko Perseroan telah diterapkan secara efektif dengan infrastruktur yang memadai sesuai dengan skala dan lingkungan bisnis serta standar penerapan yang berlaku untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

The Board of Commissioners and Board of Directors declare that the Company's Risk Management System had been effectively implemented with adequate infrastructure in accordance with the scale and business environment as well as the applicable implementation standards for the period ending December 31, 2024.

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

Kode etik merupakan standar perilaku yang diharapkan pada setiap kegiatan, tindakan dan Keputusan yang diambil oleh setiap individu dan menjadi pondasi utama dalam menjalankan bisnis yang sehat, profesional, dan berintegritas. Konsistensi penerapan kode etik membantu membantu entitas bisnis menghindari praktik bisnis yang melanggar hukum, seperti korupsi, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang. PLN telah menetapkan kode etik dalam bentuk Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis untuk memberikan dorongan kepada segenap Pegawai agar tetap konsisten dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dibuat dalam bentuk buku saku serta sosialisasi dan internalisasi untuk mendorong komitmen kepatuhan seluruh insan PLN terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Perseroan berupaya menumbuhkembangkan kebiasaan dan tata pergaulan profesional yang baik, sekaligus mencerminkan jati diri PLN yang merupakan perwujudan dari kesungguhan hati keluarga besar PLN untuk bekerja dan berusaha selaras dengan Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan yang sudah disepakati bersama.

PLN melakukan audit etika bisnis yang menjadi bagian audit ISO 30414 : 2018 Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setiap tahun oleh internal PLN yaitu divisi *human capital strategic* dan pihak eksternal (badan sertifikasi).

A code of conduct serves as the standard of behavior expected in every activity, action, and decision made by individuals, and it becomes the foundation for conducting business in a healthy, professional, and ethical manner. Consistent application of the code of conduct helps business entities avoid unlawful business practices such as corruption, discrimination, or abuse of authority. PLN has established a code of conduct in the form of a Code of Conduct and Business Ethics to encourage all employees to remain consistent in implementing Good Corporate Governance.

The Code of Conduct and Business Ethics is provided in the form of a pocketbook and is also disseminated and internalized to foster commitment from all PLN personnel to comply with the Code of Business Conduct and Ethics. The Company strives to cultivate good professional habits and conduct, which also reflect PLN's identity as an embodiment of PLN family's sincere commitment to work and strive in alignment with the Company's agreed-upon Vision, Mission, and Core Values.

PLN organizes business ethics audits as part of the ISO 30414:2018 Human Resource Management audit, which is carried out annually by PLN's internal Human Capital Strategy division and external party (certification agency).

Budaya Perseroan

Corporate Culture

Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis menjabarkan bagaimana Perseroan menjalankan bisnisnya sesuai dengan tata nilai utama yang disepakati. Tata Nilai PLN menjadi panduan bagi seluruh Insan PLN Group, yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja untuk memberikan kontribusi kepada Perseroan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Tanggal 1 Juli 2020, No. SE-7/MBU/07/2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, PLN menetapkan tata nilai AKHLAK sebagai tata nilai perusahaan PLN Group. Penjelasan lengkap tentang Tata Nilai AKHLAK telah diuraikan di bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The Code of Business Conduct and Ethics outlines how the Company conducts its business in accordance with the core values that have been mutually agreed upon. PLN's Core Values serve as a guide for all members of PLN Group, shaping their mindset, attitude, and daily behavior at work in order to contribute to the Company. Based on the Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020, No. SE-7/MBU/07/2020 on the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises, PLN has adopted the AKHLAK values as the corporate values of PLN Group. A detailed explanation of AKHLAK Core Values is provided in the Company Profile section of this Annual Report.



Pokok Muatan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Principles of Code of Business Conduct and Ethics

Pedoman Perilaku terakhir dilakukan pembaruan pada tahun 2024 untuk memastikan muatannya senantiasa relevan dengan perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis Perseroan. Pokok muatan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis yang berlaku di lingkungan PLN adalah sebagai berikut:

The Code of Conduct was last updated in 2024 to ensure its contents remain relevant to the developments within the organization and the Company's business environment. The principles of the Code of Business Conduct and Ethics applicable within PLN are as follows:

Pokok Muatan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Principles of Code of Business Conduct and Ethics

No.	Pokok Muatan Principle	
1.	Pernyataan Komitmen Direksi dan Komisaris.	Statement of Commitment from the Board of Directors and Board of Commissioners
2.	Visi dan Misi PLN	PLN's Vision and Mission
3.	Tata Nilai Perusahaan	Corporate Core Values
4.	Konflik dan Kepentingan	Conflict of Interest
5.	Gratifikasi	Gratuities
6.	Anti Suap dan Korupsi	Anti-Bribery and Anti-Corruption
7.	Sistem Pengaduan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)	Whistleblowing System
8.	Komitmen, Kepedulian, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	Commitment, Concern, and Participation in Occupational Health, Safety, and Environmental Management
9.	Kesempatan yang Sama Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi	Equal Opportunity for Employment and Promotion
10.	Integritas Laporan Keuangan	Integrity of Financial Reporting
11.	Perlindungan Informasi Perusahaan dan Intangible Asset serta Etika Bermedia Sosial	Protection of Company Information and Intangible Assets, and Social Media Ethics
12.	<i>Respectful Workplace Policy</i>	Respectful Workplace Policy
13.	Perlindungan dan Pemanfaatan Harta Perusahaan	Protection and Utilization of Company Assets
14.	Kegiatan Sosial dan Politik	Social and Political Activities
15.	Etika Terkait Dengan Stakeholder (Pemegang Kepentingan)	Ethics Related to Stakeholders
16.	Mekanisme Penegakkan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan Atas Pelanggaran	Enforcement Mechanism of the Code of Conduct, Including Violation Reporting
17.	Pelanggaran dan Sanksi	Violations and Sanctions

Pemberlakuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Implementation of Code of Business Conduct and Ethics

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini menjadi tanggung jawab seluruh Insan PLN Group termasuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini di lingkungan Perseroan. Pihak-pihak yang wajib melaksanakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perseroan, yaitu :

1. Komisaris, Direksi dan Pegawai PLN;
2. Komisaris, Direksi dan Pegawai Anak Perusahaan termasuk *Subholding*;
3. Komisaris, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Afiliasi; dan
4. Pihak Ketiga (Konsultan, Pemasok IPP, Tenaga Alih Daya, Mitra Kerja, Kontraktor dan pihak lainnya yang terlibat dalam bisnis perusahaan).

Insan PLN Group wajib menjalankan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, memahami kebijakan perusahaan, berkomitmen terhadap integritas, menghindari pelanggaran, dan mengungkapkan masalah yang diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis.

The implementation of the Code of Business Conduct and Ethics is the responsibility of all members of PLN Group, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, to apply the Code within the Company's environment. The parties required to adhere to the Company's Code of Business Conduct and Ethics include:

1. Commissioners, Board of Directors, and Employees of PLN;
2. Commissioners, Board of Directors, and Employees of Subsidiaries, including Subholdings;
3. Commissioners, Board of Directors, and Employees of Affiliated Companies; and
4. Third Parties (Consultants, IPP Suppliers, Outsourced Personnel, Business Partners, Contractors, and other parties involved in the company's business).

All members of PLN Group are required to comply with the Code of Business Conduct and Ethics, understand the Company's policies, commit to integrity, avoid violations, and report issues as stipulated in the Code of Business Conduct and Ethics.

Penyebarluasan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Dissemination of the Code of Business Conduct and Ethics

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh Insan PLN Group maupun eksternal Perseroan. PLN berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh dengan ketentuan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada seluruh Insan PLN Group maupun eksternal Perseroan serta melakukan penyegaran secara berkala;
2. Setiap Insan PLN Group melakukan *awareness* setiap biannual dan diharuskan menandatangani komitmen *compliance* atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis melalui aplikasi web Komando <https://budaya.pln.co.id/> setiap tahunnya;

Dissemination efforts are carried out to introduce and spread awareness of the Code of Business Conduct and Ethics to all members of PLN Group as well as to external parties. PLN is committed to conducting effective and comprehensive dissemination activities based on the following provisions:

1. Conducting dissemination of the Code of Business Conduct and Ethics to all members of PLN Group and external stakeholders, with periodic refreshers;
2. Every member of PLN Group must participate in biannual awareness activities and is required to sign a compliance commitment to the Code of Business Conduct and Ethics via the Komando web application at <https://budaya.pln.co.id/> each year;



Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

3. Setiap *stakeholders* dapat mengakses Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis melalui *website* <https://pln.co.id/>;
4. Melakukan evaluasi atas pencapaian atau pemahaman Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis kepada Insan PLN Group baik pada masa orientasi maupun masa bekerja; dan
5. Mengkaji secara berkala terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dalam rangka mengembangkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan peraturan Perseroan.

3. All stakeholders may access the Code of Business Conduct and Ethics through the website <https://pln.co.id/>;
4. Evaluating the understanding and implementation of the Code of Business Conduct and Ethics among PLN Group personnel during both orientation and employment periods; and
5. Periodically reviewing the Code of Business Conduct and Ethics to support its development, which may be further elaborated in various Company policies and regulations when necessary.

Sanksi Pelanggaran atas Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Sanctions for Violating the Code of Business Conduct and Ethics

Insan PLN Group yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perseroan. Jenis sanksi dan mekanisme pemberian sanksi mengacu ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Members of PLN Group who are proven to have violated the Code of Business Conduct and Ethics will be subject to sanctions in accordance with the applicable regulations within the Company. The types of sanctions and the sanctioning mechanisms refer to the provisions that apply within the Company.

Selanjutnya terkait dengan pelaporan, penanganan, dan penegakan pelanggaran, perusahaan mengembangkan sistem penanganan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Standar Prosedur Pengelolaan Disiplin Pegawai.

Furthermore, regarding the reporting, handling, and enforcement of violations, the Company has developed a disciplinary violation management system regulated under the Employee Discipline Management Standard Procedure.

Pelanggaran dan pemberian sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait dengan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Violations and sanctions imposed in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB) related to the Code of Business Conduct and Ethics throughout the year 2024 are as follows:

Kasus Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

Violation of the Code of Business Conduct and Ethics

No.	Jenis Pelanggaran Type of Violation	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Jumlah Kasus Total Cases
1	Barang Milik Perseroan Company Property	Sedang Moderate	3
2	Barang Milik Perseroan Company Property	Berat Severe	3
3	Citra Perseroan Company Image	Sedang Moderate	8
4	Gratifikasi atau Pemerasan Gratuity or Extortion	Sedang Moderate	10
5	Keselamatan Kerja Occupational Safety	Sedang Moderate	1
6	Konflik Kepentingan Conflict of Interest	Sedang Moderate	4
7	Konflik Kepentingan Conflict of Interest	Berat Severe	1
8	Mangkir Absence	Ringan Light	6

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

No.	Jenis Pelanggaran Type of Violation	Jenis Sanksi Type of Sanctions	Jumlah Kasus Total Cases
9	Mangkir Absence	Sedang Moderate	14
10	Mangkir Absence	Berat Severe	3
11	Menolak Mutasi Refusal of Transfer	Sedang Moderate	3
12	Pemalsuan data/dokumen Documentary/data forgery	Berat Severe	2
13	Penyalahgunaan Tenaga Listrik Misuse of Electric Power	Berat Severe	7
14	Perselisihan Pegawai Employee Dispute	Sedang Moderate	1
15	Tugas Kedinasan Service Duties	Ringan Light	5
16	Tugas Kedinasan Service Duties	Sedang Moderate	14

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy of Long-Term Performance-Based Compensation for Management and/or Employees

Perseroan bukan merupakan perusahaan terbuka (*go-public*) dan belum melakukan penawaran saham terbuka sampai dengan 31 Desember 2024. Selain itu, tidak terdapat program kepemilikan saham oleh Manajemen dan karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) maupun manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Dengan demikian, tidak ada informasi mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka Panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP).

The Company is not a publicly listed company (*go-public*) and has not conducted any public share offerings up to December 31, 2024. Additionally, there is no stock ownership program for management and employees, such as an *Employee Stock Option Program* (ESOP) or a *Management Stock Option Program* (MSOP). Therefore, there is no information regarding any long-term performance-based compensation policies for management and/or employees owned by the Company (if any), including management stock ownership programs (MSOP) and/or employee stock ownership programs (ESOP).



Pengungkapan Kepemilikan Saham

Disclosure of Share Ownership

Pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan pribadi dan keluarga baik kepemilikan atas saham Perusahaan maupun atas perusahaan lain dalam bentuk daftar khusus yang dilaporkan setiap tahun. Namun belum diatur secara khusus terkait penyampaian informasi mengenai kepemilikan saham dan perubahannya tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan, mengingat Perseroan bukan merupakan perusahaan terbuka.

Disclosure of information regarding share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners refers to the Company's Articles of Association. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to submit information to the Company regarding their personal and family ownership, both of the Company's shares and shares in other companies, in the form of a special list reported annually. However, there are no specific regulations regarding the submission of information about share ownership and any changes thereto within a maximum of 3 (three) working days after the acquisition or any change in share ownership of the Company, considering that the Company is not a publicly listed company.

Pemenuhan Hak-Hak Kreditor

Fulfillment of Creditors' Rights

Pemenuhan hak-hak kreditor dilakukan berdasarkan pada kontrak atau kesepakatan kerja yang telah disepakati dengan kreditor khususnya terkait dengan pengungkapan informasi atau laporan Perusahaan. Kebijakan perlindungan hak dan kepentingan kreditor diatur dalam Pedoman GGC Perusahaan yang diterbitkan pada Juli 2022. Perseroan juga mengatur mengenai kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditor lewat kebijakan internal tentang pendanaan melalui pinjaman.

The fulfillment of creditors' rights is carried out based on contracts or work agreements that have been agreed upon with the creditors, particularly regarding the disclosure of information or Company reports. The policy for protecting the rights and interests of creditors is regulated in the Company's GGC (Good Governance Code) Guidelines issued in July 2022.

Perseroan dalam pemenuhan hak dan kepentingan kreditor dalam hal pelaksanaan rencana kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditor, dengan ini memiliki kewajiban untuk:

1. Menyiapkan rencana pendanaan, seperti proyeksi *cash flow*, rasio-rasio keuangan yang diperlukan dan biaya-biaya operasional;
2. Melakukan *review* atas syarat dan ketentuan dalam perjanjian fasilitas atau pendanaan dalam internal Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan-persetujuan internal Perseroan;
3. Melakukan *review* atas syarat dan kondisi dalam dokumen kesepakatan dengan Kreditor seperti *Non Disclosure Agreement* namun tidak terbatas pada dokumen non pendanaan lainnya dengan Kreditor;

The Company also regulates cooperation and/or agreements with creditors through internal policies on funding through loans. In fulfilling the rights and interests of creditors in the implementation of cooperation plans and/or agreements with creditors, the Company has the obligation as follows:

1. Preparing a funding plan, such as cash flow projections, required financial ratios, and operational costs;
2. Reviewing the terms and conditions in the facility or funding agreement within the Company, including but not limited to internal corporate approvals;
3. Reviewing the terms and conditions in agreement documents with creditors such as Non-Disclosure Agreements, but not limited to other non-funding documents with creditors;

Pemenuhan Hak-Hak Kreditur

Fulfillment of Creditors' Rights

4. Memberikan Informasi atau dokumen-dokumen terkait kerjasama dan/atau kesepakatan secara transparan, akurat dan tepat waktu sebagaimana disepakati dalam masing-masing perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur; 5. Menggunakan pinjaman atau fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan; dan 6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama dan/atau kesepakatan dengan kreditur.	4. Providing information or documents related to cooperation and/or agreements in a transparent, accurate, and timely manner as agreed in each cooperation agreement and/or agreement with the creditors; 5. Using loans or facilities in accordance with the agreed credit usage purpose; and 6. Fulfilling the obligations as stipulated in the cooperation agreements and/or agreements with creditors.

Kebijakan *Insider Trading*

Insider Trading Policy

Perusahaan melarang konflik kepentingan untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi Perusahaan dengan menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan. Perseroan belum memiliki kebijakan khusus terkait *insider trading* mengingat Perusahaan bukan merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya dimiliki oleh PLN Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN.

The Company prohibits conflicts of interest aimed at gaining direct or indirect benefits from Company information by abusing one's position and job in disclosing information, in accordance with the provisions of the Company's Code of Business Conduct and Ethics. The Company has not established a specific policy on insider trading, considering it is not a publicly listed company and all of its shares are owned by PLN of the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of State-Owned Enterprises.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang digunakan untuk menerima, melakukan pra-analisa, melakukan analisa dan evaluasi Pengaduan, *monitoring* dan evaluasi pengelolaan Sistem Pengaduan Pelanggaran, serta menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Pengelolaan dan tindak lanjut atas pengaduan WBS merupakan salah satu bentuk komitmen penerapan SNI ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan SNI ISO 37002: 2021 tentang *Whistleblowing Management System* di lingkungan PLN.

The Whistleblowing System, hereinafter referred to as WBS, is a system used to receive, conduct pre-analysis, perform analysis and evaluation of complaints, monitor and evaluate the management of the Whistleblowing System, as well as to follow up on complaints submitted by the Whistleblower. The management and follow-up of WBS complaints is a form of commitment to implementing SNI ISO 37001:2016 regarding the Anti-Bribery Management System and SNI ISO 37002:2021 concerning the Whistleblowing Management System within PLN.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System Policy

Perseroan memberlakukan Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelanggaran berdasarkan Peraturan Direksi No. 010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) yang disahkan pada 2 Maret 2022. *Whistleblowing System* merupakan bagian dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Kepatuhan PT PLN (Persero), sebagai bentuk implementasi program pendeteksian pada strategi manajemen kepatuhan dimana WBS merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam mengendalikan tindakan *Fraud* dan/atau pelanggaran di PLN. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Kepatuhan PT PLN (Persero), melalui kebijakan operasionalnya mencabut Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0010.P/DIR/2022 tentang Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Oleh karena itu, Perseroan menetapkan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) tentang Standar Prosedur Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) Nomor: 0018 .E/DIR/2024 tanggal 26 Juni 2024.

The Company implements the Management of the Whistleblowing System based on the Board of Directors Regulation No.010.P/DIR/2022 on the Whistleblowing System within PT PLN (Persero), which was enacted on March 2, 2022. The Whistleblowing System is part of the implementation of PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation No. 0015.P/DIR/2023 on the Strategic Compliance Management Policy of PT PLN (Persero), serving as a form of implementation of the detection program within the compliance management strategy. The WBS is considered one of the most effective methods in controlling fraud and/or violations within PLN. The Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0015.P/DIR/2023 on the Strategic Compliance Management Policy of PT PLN (Persero), through its operational policy, revokes the Board of Directors Regulation No. 0010.P/DIR/2022 on the Whistleblowing System. Therefore, the Company has established the Implementing Regulation of PT PLN (Persero) on the Standard Procedure for the Whistleblowing System within PT PLN (Persero), Number: 0018.E/DIR/2024 dated June 26, 2024.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dissemination of Whistleblowing System

Kegiatan sosialisasi terkait WBS kepada para pemangku kepentingan setiap tahun, baik internal maupun eksternal. Sosialisasi tersebut telah dilaksanakan kepada seluruh Satuan Kerja melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain pertemuan daring (*virtual meeting*), portal internal perusahaan, situs web resmi PLN, serta melalui pemasangan banner di setiap Satuan, Divisi, dan Unit Kerja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai sistem pelaporan pelanggaran yang dikelola oleh PLN secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pada tahun 2024 DIV PKP telah melakukan sosialisasi Perdir WBS kepada seluruh Satuan Kerja, Divisi dan Seluruh Unit Induk di Lingkungan PLN pada tanggal 04 Januari – 23 Januari 2024 yang dilaksanakan 8 batch pada 3 lokasi yakni UPDL

Dissemination activities related to the Whistleblowing System (WBS) are conducted annually for all stakeholders, both internal and external. This socialization has been carried out for all Work Units through various communication channels, including virtual meetings, the Company's internal portal, the official PLN website, and by installing banners in every Work Unit, Division, and Work Unit. This aims to enhance the understanding of all stakeholders regarding the violation reporting system managed by PLN in a professional, transparent, and accountable manner. In 2024, the PKP Division conducted dissemination of the Board of Directors Regulation on WBS to all Work Units, Divisions, and all Parent Units within PLN from January 4 to January 23, 2024, implemented in 8 batches across 3 locations: UPDL Palembang (January 4–5, 2024), UPDL Semarang (January

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Palembang (4 – 5 Januari 2024), UPDL Semarang (8 – 9 Januari 2024, 15 – 16 Januari 2024, 18 – 19 Januari 2024, dan 22 – 23 Januari 2024), dan UPDL Makassar (11 – 12 Januari 2024, 18 – 19 Januari 2024, dan 22 – 23 Januari 2024). Materi sosialisasi Peraturan Direksi Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang secara garis besar mencakup tentang mekanisme WBS dan batasan tanggung jawab; kerahasiaan, perlindungan dan sanksi; teknis pengaduan aplikasi WBS; serta Konsep Mekanisme WBS terintegrasi PLN Grup.

8–9, 15–16, 18–19, and 22–23, 2024), and UPDL Makassar (January 11–12, 18–19, and 22–23, 2024). The dissemination material of the Board of Directors Regulation on the Whistleblowing System broadly covers the WBS mechanism and scope of responsibility; confidentiality, protection, and sanctions; technical reporting via the WBS application; as well as the concept of the integrated WBS mechanism within PLN Group.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System Manager

Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor: 0018 .E/DIR/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Standar Prosedur Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero) mengatur bahwa Pengelola WBS dilaksanakan oleh Satuan Kerja fungsi kepatuhan dan/atau oleh pihak ketiga yang memiliki kompetensi pengelolaan WBS.

Satuan Kerja fungsi kepatuhan sebagai Pengelolaan Pengaduan, menerima Pengaduan dan melakukan pra-analisa Pengaduan yang masuk dalam ruang lingkup kategori Pengaduan WBS serta menganalisa dan mengevaluasi Pengaduan terhadap pemenuhan indikasi dan Bukti Permulaan dalam menentukan tindak lanjut Pengaduan.

The Implementing Regulation of PT PLN (Persero) Number: 0018.E/DIR/2024 dated June 26, 2024, on the Standard Procedure for the Whistleblowing System within PT PLN (Persero), stipulates that the management of the WBS is carried out by the Compliance Function Work Unit and/or by a third party with competence in WBS management.

The Compliance Function Work Unit, as the Whistleblowing Manager, is responsible for receiving complaints, conducting a preliminary analysis of complaints that fall within the scope of WBS complaint categories, and analyzing and evaluating complaints to determine the presence of indications and initial evidence in order to decide on appropriate follow-up actions.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Whistleblowing Report Submission

Pelapor adalah semua pihak baik perorangan, badan hukum maupun bentuk organisasi lainnya di lingkungan internal atau eksternal PLN yang menyampaikan Pengaduan melalui saluran yang disediakan oleh PLN dengan memberikan identitas atau tanpa identitas (*anonymous*). Direksi dan Pegawai wajib berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap *Fraud* dan/atau Pelanggaran termasuk menyampaikan Pengaduan apabila terdapat Indikasi adanya *Fraud* dan/atau Pelanggaran. Pengaduan disampaikan oleh Pelapor melalui salah satu atau beberapa media yang disediakan oleh PLN, antara lain sebagai berikut:

Whistleblowers refers to any party—individuals, legal entities, or other forms of organizations—either internal or external to PLN, who submits a Complaint through the channels provided by PLN, with or without disclosing their identity (*anonymous*). The Board of Directors and Employees are required to play an active role in preventing fraud and/or violations, including reporting any indication of fraud and/or violations. Complaints may be submitted by the Reporter through one or more of the following channels provided by PLN:



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

1. *Whistleblowing System* pada *website* <https://cos.pln.co.id>;
2. Telepon, *Short Message Service* (SMS) atau Whatsapp ke nomor resmi Pengaduan Pelanggaran di 08119861901;
3. Email ke wbpln@pln.co.id;
4. Surat kepada Executive Vice President Kepatuhan PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo Blok M - I No. 135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160;
5. Pengaduan langsung oleh Pelapor kepada pengelola WBS pada Satuan Kerja fungsi kepatuhan; dan/atau
6. Media PLN lainnya yang akan diinformasikan lebih lanjut secara tertulis oleh Satuan Kerja fungsi kepatuhan.

Kategori Pengaduan yang dapat dilaporkan melalui WBS meliputi:

1. *Fraud*, antara lain:
 - a. Korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, pemerasan ekonomi, dan tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Tipikor.
 - b. Penyalahgunaan aset/wewenang, pencurian/ penggelapan terhadap kas atau persediaan, material, dan/atau aset lainnya.
 - c. Rekayasa laporan keuangan dan/atau non-keuangan.
2. Pelanggaran antara lain:
 - a. Tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Tindakan yang menyimpang dari peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan, kode etik, maupun *Standard Operational Procedures* (SOP).
 - c. Tindakan yang menyimpang dari peraturan disiplin Pegawai PLN.

Pengaduan dengan Terlapor adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Organ Pendukung Dewan Komisaris, maka mekanisme penanganan Pengaduan diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaduan dengan Terlapor adalah Pegawai, Pegawai Anak Perusahaan, dan/ atau personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PLN akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait sesuai kewenangannya. Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor dengan menyertakan identitas atau tanpa identitas (*anonymous*) dapat dilengkapi dengan informasi komunikasi guna efektivitas penanganan Pengaduan.

1. The Whistleblowing System at the website: <https://cos.pln.co.id>;
2. Telephone, Short Message Service (SMS), or WhatsApp to the official Whistleblowing Complaint number: 08119861901;
3. Email to: wbpln@pln.co.id;
4. Letter addressed to the Executive Vice President of Compliance, PT PLN (Persero) Head Office, Jalan Trunojoyo Blok M - I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160;
5. Direct complaint by the Whistleblower to the WBS management at the Compliance Function Work Unit; and/ or
6. Other PLN media that will be further informed in writing by the Compliance Function Work Unit.

Types of Complaints that may be reported through the WBS include:

1. Fraud, including but not limited to:
 - a. Corruption, including but not limited to conflict of interest, bribery, illegal gratuities, economic extortion, and other acts prohibited by applicable anti-corruption laws and regulations.
 - b. Misuse of assets/ authority, theft/ embezzlement of cash or inventory, materials, and/or other assets.
 - c. Manipulation of financial and/or non-financial reports.
2. Violations, including but not limited to:
 - a. Acts that deviate from applicable laws and regulations.
 - b. Acts that deviate from Company regulations, code of conduct, or Standard Operating Procedures (SOP).
 - c. Acts that violate PLN employee disciplinary regulations.

If the Whistleblower Party is a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Supporting Organs of the Board of Commissioners, the complaint handling mechanism will be regulated separately in accordance with applicable provisions. If the Reported Party is an employee, a subsidiary employee, and/or other personnel working directly for or on behalf of PLN, the complaint will be followed up by the relevant Work Unit in accordance with its authority. Complaints submitted by a Whistleblower, whether with or without identity (*anonymous*), may include contact information to facilitate effective handling of the Complaint.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

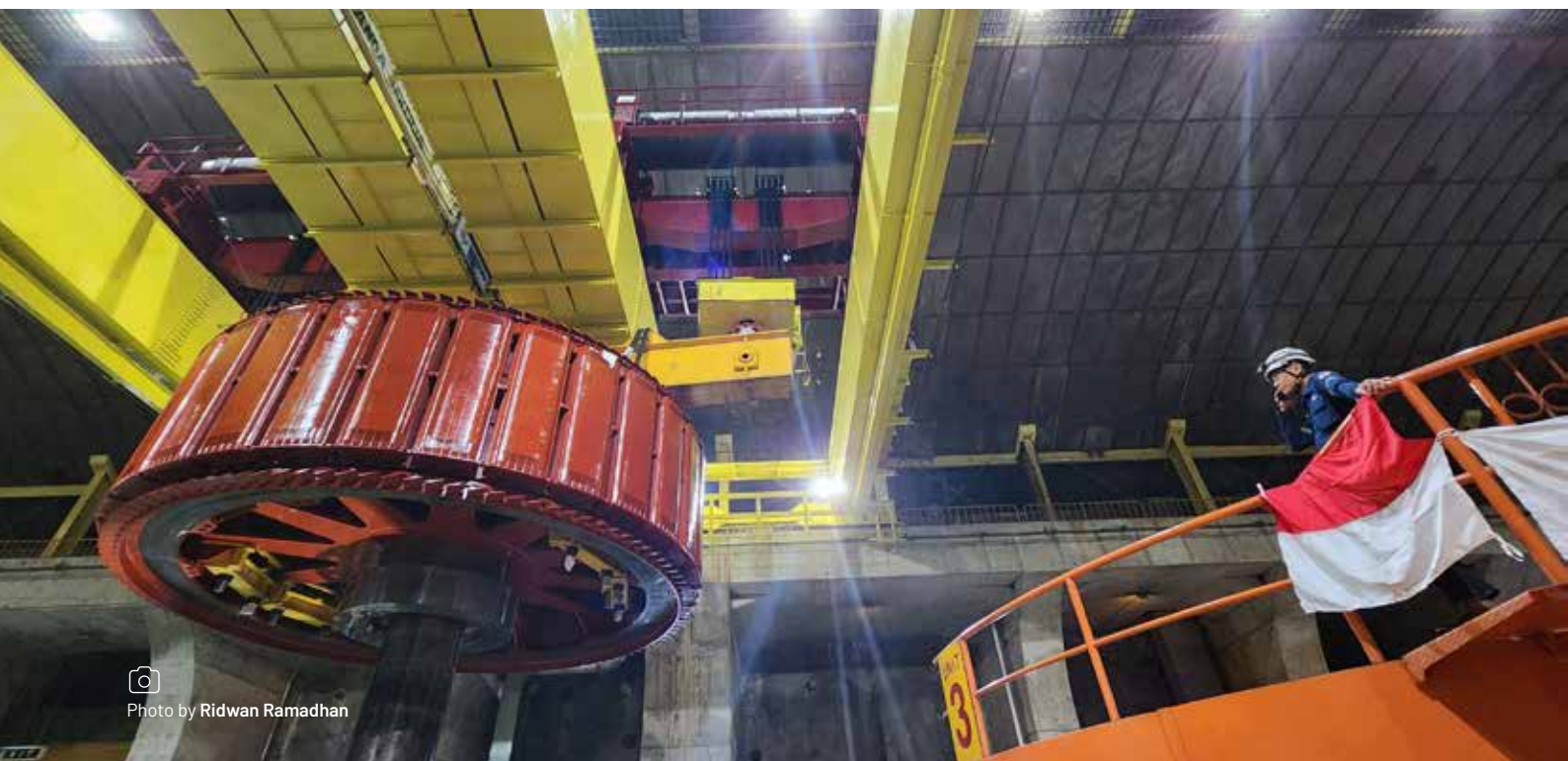


Photo by Ridwan Ramadhan

Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Whistleblowing Handling

Perseroan melakukan penanganan Pengaduan meliputi pengelolaan dan tindak lanjut Pengaduan dari Pelapor yang telah memenuhi indikasi dengan dilengkapi Bukti Permulaan guna menghindari laporan palsu/fitnah. Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor dengan identitas atau tanpa identitas (*anonymous*) melalui media Pengaduan, dengan tahapan:

1. Pengelolaan Pengaduan berupa penerimaan Pengaduan, pra-analisa serta analisa dan evaluasi Pengaduan.
2. Tindak Lanjut Pengaduan berupa Audit investigasi, investigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai, dan tindak lanjut Pengaduan lainnya.

Pengaduan yang berdasarkan analisa dan evaluasi tidak termasuk kategori Pengaduan tersebut akan disampaikan kepada Satuan Kerja terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Satuan Kerja fungsi kepatuhan dapat menginformasikan status perkembangan proses penanganan Pengaduan kepada Pelapor.

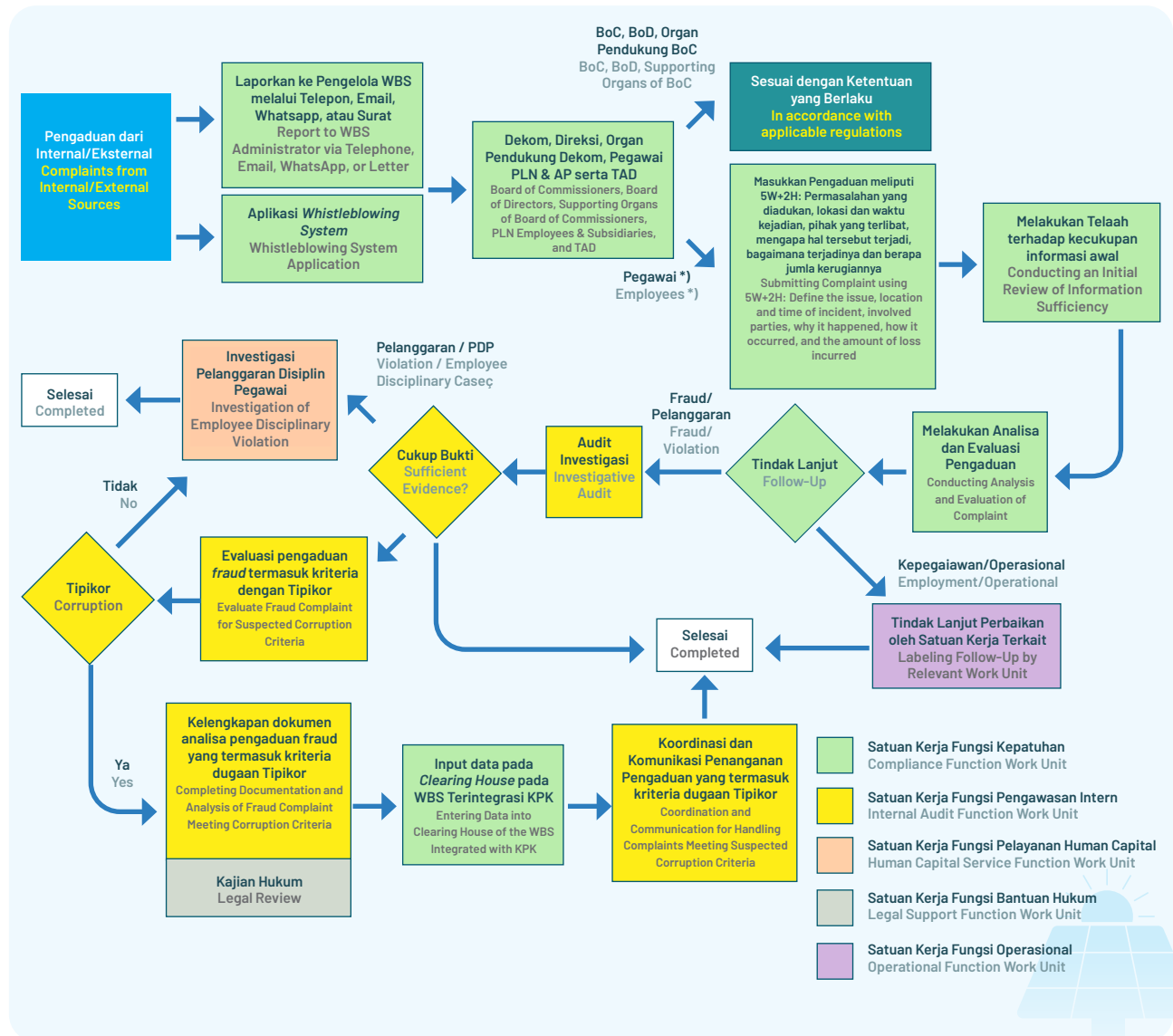
The Company handles complaints by managing and following up on reports from Whistleblowers that meet the necessary indications and are supported by Preliminary Evidence, in order to prevent false or defamatory reports. Complaints submitted by Whistleblowers, whether identified or anonymous, through the designated reporting channels, are processed in the following stages:

1. Complaint Management, which includes receiving the complaint, conducting a preliminary analysis, and performing a full analysis and evaluation of the complaint.
2. Complaint Follow-up, which may involve an investigative audit, investigation of employee disciplinary violations, and other forms of complaint follow-up.

Complaints that, based on analysis and evaluation, are not categorized as WBS complaints will be forwarded to the relevant Work Unit for follow-up in accordance with their authority. The Compliance Function Work Unit may provide updates on the complaint handling process to the Whistleblower.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Alur Prosedur Penanganan Pengaduan WBS Procedures of WBS Report Handling



Satuan Kerja fungsi kepatuhan dapat meminta Satuan Kerja fungsi pengawasan intern untuk menindaklanjuti Pengaduan Fraud dan/atau Pelanggaran yang belum memenuhi indikasi dan Bukti Permulaan, dalam hal Pengaduan memiliki risiko tinggi/ekstrem, memiliki nilai kerugian yang material/besar, dapat merusak citra PLN, dan/atau berulang dan bersifat masif. Laporan Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja terkait sesuai kewenangannya. Dalam hal Pengaduan yang berdasarkan hasil Audit investigasi Satuan Kerja fungsi pengawasan intern terbukti Fraud, maka dievaluasi sesuai kriteria dugaan Tipikor. Dalam hal Pengaduan yang berdasarkan

The Compliance Function Work Unit may request the Internal Audit Function Work Unit to follow up on Fraud and/or Violation Complaints that have not yet met the indications and Preliminary Evidence, in cases where the Complaint poses a high/extreme risk, involves significant/material losses, may damage PLN's reputation, and/or is recurrent and widespread. The Complaint Report will be followed up by the relevant Work Unit in accordance with its authority. If the Complaint, based on the results of an investigative audit by the Internal Audit Function Work Unit, is proven to be Fraud, it will be evaluated against the criteria for suspected Corruption. If the Complaint, based on the results

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

hasil Audit investigasi Satuan Kerja fungsi pengawasan intern terbukti Fraud, akan tetapi tidak termasuk kriteria dugaan Tipikor, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN. *Fraud* dan/atau Pelanggaran yang telah terbukti merugikan perusahaan dan/atau negara dapat dilimpahkan kepada Pihak Berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

of an investigative audit by the Internal Audit Function Work Unit, is proven to be Fraud but does not meet the criteria for suspected Corruption, further examination will be carried out in accordance with the applicable regulations at PLN. Fraud and/or Violations that have been proven to cause harm to the Company and/or the state may be referred to the Authorities in accordance with prevailing regulations.

Perlindungan dan Kerahasiaan Identitas Pelapor

Protection and Confidentiality of Whistleblower Identity

PLN memberikan jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan terhadap Tindakan balas dendam serta rehabilitasi kepada Pelapor, Korban, dan/atau Saksi termasuk kepada Pengelola Whistleblowing System (WBS) dan pihak-pihak terkait yang menindaklanjuti Pengaduan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh PLN berupa perlindungan karir dan perlindungan hukum.

PLN guarantees the confidentiality of identities and provides protection against retaliation and rehabilitation to Whistleblowers, Victims, and/or Witnesses, including the Whistleblowing System (WBS) Administrators and related parties who follow up on the complaints. The forms of protection provided by PLN include career protection and legal protection.

Perlindungan hukum, dapat berupa perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata; perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga dari ancaman fisik dan/atau mental; perlindungan terhadap harta pribadi dan/atau keluarga; dan/atau kerahasiaan dan/atau penyamaran identitas.

Legal protection may include protection from criminal and/or civil lawsuits; protection of personal and family safety from physical and/or mental threats; protection of personal and/or family property; and/or confidentiality or disguise of identity.

Perlindungan karir dapat berupa pemutusan hubungan kerja; penurunan jabatan, penurunan grade, penurunan penilaian kinerja individu, penurunan penghasilan dan/atau mutasi; pelecehan atau diskriminasi; dan/atau informasi dan/atau data yang merugikan.

Career protection may include protection from termination of employment; demotion, downgrade in grade, decrease in individual performance appraisal, reduction in income and/or transfer; harassment or discrimination; and/or harmful information and/or data.

PLN menjamin kerahasiaan identitas (*confidentiality*) Pelapor, Korban, dan/atau Saksi, Pengelola WBS dan pihak-pihak terkait yang menindaklanjuti Pengaduan, kecuali dalam proses hukum memerlukan informasi identitas Pelapor, Korban, dan/atau Saksi namun dengan persetujuan dari yang bersangkutan. Perlindungan dan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor, Korban, dan/atau Saksi yang membuat Pengaduan palsu dalam hal Pengaduan yang disampaikan tidak memiliki dasar dan/atau mengandung unsur bukti palsu. Perlindungan dan kerahasiaan tidak diberikan apabila Pelapor sendiri yang menyebarkan Pengaduannya kepada pihak lain yang mengakibatkan risiko terungkapnya kerahasiaan identitas maupun materi Pengaduan.

PLN guarantees the confidentiality of the identity (*confidentiality*) of the Whistleblower, Victim, and/or Witness, the WBS managers, and related parties who follow up on the complaint, except when the legal process requires the identity of the Whistleblower, Victim, and/or Witness with the consent of the respective individual. Protection and confidentiality will not be granted to the Whistleblower, Victim, and/or Witness who submits a false complaint where the complaint has no basis and/or contains false evidence. Protection and confidentiality will not be provided if the Whistleblower themselves discloses the complaint to other parties, leading to the risk of identity or complaint content being exposed.



Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Jumlah pengaduan dan Tindak Lanjut

Number of Complaints and Follow-up

Terhadap terlapor dan/atau Pegawai lain terkait, yang telah terbukti melakukan Fraud dan/atau Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2024, terdapat 364 laporan pengaduan Fraud/Pelanggaran di PLN yang masuk. Pengaduan telah selesai dianalisis dan dievaluasi adalah sebanyak 364 materi (100%). Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah sebanyak 155 materi (42,58%). Pengaduan terkait operasional/kepegawaian sebanyak 87 materi (23,9%). Pengaduan dalam kategori Fraud dan/atau Pelanggaran sebanyak 37 materi (10,16%).

Pengaduan yang dilaksanakan Audit Investigasi sebanyak 25 materi pengaduan, jumlah pengaduan yang terbukti sebanyak 6 materi pengaduan (24%) dan 8 materi pengaduan (32%) yang tidak terbukti dan 11 materi pengaduan (44%) dalam proses audit investigasi. Mayoritas pengaduan yang terbukti adalah terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan pelaksanaan pengadaan tidak sesuai ketentuan. SPI telah melaporkan kasus-kasus yang terbukti kepada Direktur Utama, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Direktur Pembina terkait dan Divisi Pelayanan Human Capital untuk diproses tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanctions will be imposed on the reported party and/or other related employees who are proven to have committed Fraud and/or Violations, in accordance with the prevailing laws and regulations. Throughout 2024, a total of 364 Fraud/Violation complaint reports were received by PLN. All 364 reports (100%) had been analyzed and evaluated. Of these, 155 reports (42.58%) could not be followed up. Complaints related to operations/personnel matters amounted to 87 reports (23.9%). Complaints falling under the Fraud and/or Violation category totaled 37 reports (10.16%).

A total of 25 complaints underwent an investigative audit. Of these, 6 complaints (24%) were proven, 8 complaints (32%) were unproven, and 11 complaints (44%) are still in the process of investigative audit. Most of the proven complaints were related to alleged abuse of authority/position and procurement practices that did not comply with regulations. The Internal Audit Unit (SPI) has reported the proven cases to the President Director, the Director of Legal and Human Capital Management, the relevant Supervising Director, and the Human Capital Services Division for follow-up in accordance with applicable regulations.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Kebijakan anti korupsi merupakan wujud komitmen Perseroan dalam memastikan proses penciptaan nilai di lingkungan PLN berjalan secara efektif serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Sebagai bagian dari penerapan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, Perusahaan secara tegas melarang dan akan menindak setiap bentuk pelanggaran yang mengarah pada tindakan korupsi. Meskipun hingga saat ini Perusahaan belum menetapkan kebijakan anti korupsi secara tersendiri, namun prinsip-prinsip anti korupsi telah terintegrasi dalam kebijakan

Anti-Corruption Policy is a manifestation of the Company's commitment to ensure that the value creation process within PLN operates effectively and supports long-term sustainability. As part of the implementation of the Code of Business Conduct and Ethics, the Company strictly prohibits and will take action against any form of violation leading to corrupt practices. Although the Company has not yet established a separate anti-corruption policy, the anti-corruption principles have been integrated into policies derived from the Code of Business Conduct and Ethics.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

yang diturunkan dari Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan mengenai benturan kepentingan, manajemen anti penyuapan, pengendalian gratifikasi, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta penyediaan saluran pelaporan atas pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan tindak korupsi. PLN memberlakukan kebijakan anti-korupsi melalui ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Direksi No. 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT PLN (Persero).
2. Peraturan Direksi No. 0076.P/DIR/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT PLN (Persero).
3. Peraturan Direksi No. 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero).
4. Edaran Direksi No. 0011.E/DIR/2020 tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan di Lingkungan PT PLN (Persero).
5. Edaran Direksi No. 0013.E/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan *Integrity Due Diligence* di Lingkungan PT PLN (Persero).
6. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0015.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Kepatuhan PT PLN (Persero).
7. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0018.E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT PLN (Persero).
8. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0028.E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pedoman Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
9. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0009.E/DIR/2020 tentang Pedoman pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* di Lingkungan PT PLN (Persero).
10. Peraturan Direksi Nomor: 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management*, dan Compliance (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero).
11. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 01.SKB/PLN/2020 Tentang Pembentukan Struktur Organ SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT PLN (Persero).

Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh Insan PLN Persero, yaitu dewan komisaris, direksi, dan seluruh pegawai yang memiliki hubungan kerja dengan PLN.

These policies cover regulations regarding conflicts of interest, anti-bribery management, gratification control, management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN), and provision of reporting channels for violations, including those related to corruption. PLN enforces the anti-corruption policy through the provisions regulated in the following regulations:

1. Board of Directors Regulation No. 0074.P/DIR/2017 on Guidelines for State Officials' Wealth Reports (LHKPN) within PT PLN (Persero).
2. Board of Directors Regulation No. 0076.P/DIR/2017 on Guidelines for Gratification Control at PT PLN (Persero).
3. Board of Directors Regulation No. 0122.P/DIR/2019 on Conflict-of-Interest Management within PT PLN (Persero).
4. Board of Directors' Circular No. 0011.E/DIR/2020 on Guidelines for Anti-Bribery Compliance Function within PT PLN (Persero).
5. Board of Directors' Circular No. 0013.E/DIR/2020 on Guidelines for Integrity Due Diligence Implementation within PT PLN (Persero).
6. Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0015.P/DIR/2023 on Strategic Compliance Management Policy of PT PLN (Persero).
7. Implementing Regulation of PT PLN (Persero) No. 0018.E/DIR/2024 on Standard Operating Procedures for Violation Reporting System (Whistleblowing System) within PT PLN (Persero).
8. Implementing Regulation of PT PLN (Persero) No. 0028.E/DIR/2024 on Procedure Standard for the Implementation Guidelines of Anti-Bribery Management System Audit.
9. Board of Directors' Circular of PT PLN (Persero) No. 0009.E/DIR/2020 on Guidelines for Fraud Risk Assessment Implementation within PT PLN (Persero).
10. Board of Directors Regulation No. 0196.P/DIR/2019 on the Implementation of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) within PT PLN (Persero).
11. Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 01.SKB/PLN/2020 on the Establishment of Organ Structure for SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System of PT PLN (Persero).

These regulations apply to all PLN personnel, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees who have an employment relationship with PLN.



Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Kebijakan ini juga diberlakukan untuk seluruh subholding dan anak perusahaan. Kebijakan ini dilakukan reviu secara berkala.

Kebijakan anti korupsi juga berlaku pada pemasok atau mitra PLN yang diatur dalam kebijakan strategis pengadaan barang dan jasa dalam ketentuan etika pengadaan barang/jasa yang wajib bagi pemasok/mitra. Mitra/pemasok wajib menandatangani pakta integritas ketika proses kontraktual pengadaan, yang terkait dengan informasi:

1. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Mendukung dan melaksanakan Prinsip 4 NO's.
3. Bersikap jujur, objektif, transparan dan akuntabel.
4. Menghindari konflik kepentingan.
5. Memberikan informasi kepada PT PLN (Persero) apabila mengetahui adanya indikasi perbuatan curang maupun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan turut menjaga kerahasiaan saksi.
6. Mendukung penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

This policy also applies to all sub-holdings and subsidiaries. The policy is reviewed periodically.

The anti-corruption policy also applies to PLN suppliers or partners as regulated in the strategic procurement policy and the code of ethics for goods/services procurement, which is mandatory for suppliers/partners. Partners/suppliers are required to sign an integrity pact during the procurement contractual process, which relates to the following information:

1. Prevention and eradication of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).
2. Supporting and implementing the 4 NO's Principle.
3. Being honest, objective, transparent, and accountable.
4. Avoiding conflicts of interest.
5. Providing information to PT PLN (Persero) if aware of any indications of fraud or KKN, while maintaining the confidentiality of witnesses.
6. Supporting the implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS).

Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi

Training and Dissemination of Anti-Corruption Policy

Sosialisasi kebijakan anti-korupsi dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, SMAP, WBS yang diselenggarakan setiap tahun kepada seluruh pegawai di lingkungan Satuan Kerja, termasuk di dalamnya *subholding* dan anak perusahaan serta *workshop* dan *awareness* program tata kelola kepatuhan terintegrasi yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola terintegrasi PLN Group secara berkala. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai media komunikasi, antara lain pertemuan daring (virtual), portal internal, dan situs web resmi Perusahaan, serta melalui pemasangan banner yang terintegrasi dengan Program Kepatuhan di lingkungan holding PLN. Setiap tahun komisaris, direksi, dan seluruh pekerja termasuk pasangannya melakukan penandatanganan pakta integritas.

Socialization of anti-corruption policies is carried out on an ongoing basis through socialization of the Code of Conduct and Business Ethics, SMAP, WBS held annually to all employees in the Work Unit environment, including subholding and subsidiaries as well as workshops and awareness of integrated compliance governance programs which are then regularly monitored and evaluated against the structure, process and results of PLN Group's integrated governance. This activity is carried out through various communication media, including online (virtual) meetings, internal portals, and the Company's official website, as well as through the installation of banners integrated with the Compliance Program in the PLN holding environment. Every year, commissioners, directors, and all employees, including their spouses, sign an integrity pact. integrity pact.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Anti-Bribery Management System (ABMS)

Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup seluruh proses bisnis di Unit kerja PLN didapat pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan masa berlaku 3 tahun dinyatakan dilanjutkan sampai dengan tahun 2027 dengan tidak ada catatan ketidaksesuaian yang bersifat major. Hal ini merupakan penegasan kembali dan sebagai bukti nyata PLN dalam menjalankan proses bisnis perusahaan yang bersih dari praktik korupsi dengan berprinsip pada *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik). *"Tone from the top"*, mulai dari jajaran Komisaris dan Direksi, kami telah berkomitmen menjalankan penerapan ISO 37001 SMAP dengan prinsip 4No's yaitu *No Bribery*, *No Kickback*, *No Gift*, dan *No Luxurious Hospitality*.

Seluruh proses bisnis kantor pusat, unit kerja PLN, dan Sub Holding/Anak perusahaan telah tersertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP. Audit Resertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP dilakukan oleh pihak badan sertifikasi (external) setiap 3 tahun sekali.

Dalam rangka perpanjangan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di tahun 2024, Perseroan menyusun rencana kerja persiapan resertifikasi sebagai berikut:

1. Mengukur efektivitas dalam penerapan SMAP dengan standar SNI ISO 37001:2016 yang dijalankan dengan tools maturity level SMAP di seluruh Satuan Kerja PLN. Hasil pengukuran efektivitas penerapan SMAP Tahun 2024 didapat dengan pencapaian rata-rata di level 4,64 dari target 4,53, hal ini menunjukkan penerapan SMAP di PLN sudah efektif memenuhi seluruh klausul pada standar SNI ISO 37001:2016.
2. Mengevaluasi penerapan SMAP dengan melaksanakan Audit Internal SMAP kepada seluruh Unit Induk pada Bulan Juni 2024 dan untuk seluruh Divisi pada Bulan Juli 2024, dimana hasil temuan audit internal SMAP sudah ditindaklanjuti sebagai perbaikan berkelanjutan.
3. Evaluasi atas penerapan SMAP disampaikan oleh BoD dan BoC melalui tinjauan dan arahan atas penerapan SMAP yang disampaikan pada bulan Juli 2024.
4. Untuk menjaga sertifikasi SMAP standar SNI ISO 37001:2016 di PLN dilakukan Audit Resertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP oleh Lembaga Sertifikasi yang sudah

The SNI ISO 37001:2016 ABMS certification covering all business processes within PLN Work Units was obtained on October 24, 2021, with a validity period of 3 years and has been extended until 2027 with no major non-conformity findings. This serves as a reaffirmation and tangible proof of PLN's commitment to conducting its business processes free from corruption practices, based on the principles of Good Corporate Governance. *"Tone from the top,"* starting from the Board of Commissioners and Board Directors, we have committed to implementing ISO 37001 ABMS with the 4No's principle: No Bribery, No Kickback, No Gift, and No Luxurious Hospitality.

All business processes at the head office, PLN Work Units, and Sub-Holdings/Subsidiaries have been certified with SNI ISO 37001:2016 ABMS. The re-certification audit of SNI ISO 37001:2016 ABMS is conducted by an external certification body every three years.

In preparation for the SNI ISO 37001:2016 ABMS certification renewal in 2024, the Company had prepared the following re-certification work plan:

1. Measuring the effectiveness of ABMS implementation according to the SNI ISO 37001:2016 standard using the ABMS maturity level tools across all PLN Work Units. The effectiveness measurement results for 2024 showed an average achievement of level 4.64 against a target of 4.53, indicating that ABMS implementation at PLN is effectively meeting all clauses of the SNI ISO 37001:2016 standard.
2. Evaluating ABMS implementation by conducting Internal ABMS Audits at all Parent Units in June 2024 and across all Divisions in July 2024, with internal audit findings already followed up as part of continuous improvement.
3. The evaluation of ABMS implementation would be presented by the Board of Directors (BoD) and Board of Commissioners (BoC) through reviews and directives on ABMS implementation scheduled for July 2024.
4. To maintain the ABMS certification under the SNI ISO 37001:2016 standard at PLN, a re-certification audit will be conducted by an accredited Certification Body



Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

terakreditasi Komite Akreditasi Nasional, dengan menunjuk PT TUV NORD Indonesia pada 17 September – 25 Oktober 2024 dilakukan audit resertifikasi untuk 46 Unit Induk dan PLN Kantor Pusat, dengan hasil sertifikasi SNI ISO 37001:2016 di PLN memenuhi seluruh klausul dan dilanjutkan sampai tahun 2027.

under the National Accreditation Committee. PT TUV NORD Indonesia had been appointed to conduct the re-certification audit from September 17 to October 25, 2024, covering 46 Main Units and PLN Headquarters, with certification results fulfilling all clauses and extending the certification validity until 2027.

Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control

Pengendalian gratifikasi Perseroan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. Perseroan dalam melakukan pengelolaan gratifikasi telah membuat pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: 0076.P/DIR/2017. Dalam Pengelolaan gratifikasi di perseroan ditunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai unit yang dibentuk oleh Direksi PLN dengan tugas yaitu pengelolaan, pemantauan dan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan PLN. Saat ini penunjukan UPG PLN melalui surat tugas tim UPG nomor: 0228.Stg/MRK.01.04/F01090000/2024 ditandatangani DIR MRO tanggal 5 Agustus 2024. PLN membuka saluran untuk melaporkan gratifikasi dalam bentuk aplikasi Compliance Online System yang dapat diakses oleh seluruh insan PLN melalui <http://cos.pln.co.id>, dan kanal konsultasi ke UPG melalui whatsapp di nomor : 0811-1700-0485.

Dalam periode Tahun 2024 UPG PLN telah menindaklanjuti pelaporan penerimaan gratifikasi sebanyak 26 Laporan dan laporan penolakan gratifikasi sebanyak 19 laporan. Sebagai penguatan program pengendalian gratifikasi UPG bersinergi dengan tim kepatuhan seluruh satuan kerja dalam melakukan deseminasi program anti gratifikasi melalui sosialisasi internal dan eksternal, imbauan pengendalian gratifikasi pada momen hari raya dan perayaan hari jadi PLN, infografis anti gratifikasi pada media sosial korporat, pemetaan titik rawan penerimaan gratifikasi di seluruh proses bisnis dan awareness anti gratifikasi melalui pemahaman materi pada aplikasi cos.pln.co.id serta kegiatan lomba video pendek dengan tema anti gratifikasi.

The Company's gratification control refers to the Regulation of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. In managing gratification, the Company has established a Gratification Control Guideline based on Board of Directors Regulation Number: 0076.P/DIR/2017. For gratification management, the Company appoints a Gratification Control Unit (UPG), which is a unit formed by PLN's Board of Directors with the duties of managing, monitoring, and reporting gratification within PLN. Currently, the appointment of PLN's UPG is through the UPG team assignment letter number: 0228.Stg/MRK.01.04/F01090000/ 2024, signed by DIR MRO on August 5, 2024. PLN provides a channel for reporting gratification through the Compliance Online System (COS) application, accessible to all PLN personnel at <http://cos.pln.co.id>, and a consultation channel to UPG via WhatsApp at the number: 0811-1700-0485.

In the 2024 period, PLN's UPG followed up on 26 reports of gratification receipt and 19 reports of gratification rejection. To strengthen the gratification control program, UPG collaborates with the compliance teams across all work units in disseminating the anti-gratification program through internal and external dissemination, reminders about gratification control during religious holidays and PLN anniversary celebrations, anti-gratification infographics on corporate social media, mapping of vulnerable points for gratification acceptance across all business processes, and raising anti-gratification awareness through educational materials on the cos.pln.co.id application, as well as organizing a short video competition themed on anti-gratification.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0074.P/DIR/2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT PLN (Persero), jenjang jabatan pegawai yang termasuk ke dalam kategori Wajib LHKPN adalah BOC, BOD, Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar, Supervisor Atas, Supervisor Dasar khusus pengadaan, serta Fungsional I-III. Implementasi pelaporan LHKPN di PT PLN (Persero) dimulai dari Tahun 2015 dan sudah 6 tahun berturut pelaporan LHKPN PLN tepat waktu dengan persentase 100% pelaporan Wajib LHKPN (WL). Untuk Wajib Laporan LHKPN PLN Tahun 2023 dimana periode pelaporan di Tahun 2024 terlapor sejumlah 9.657 Wajib Laporan dengan status telah menyelesaikan laporan pada 31 Maret 2024.

Based on the Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2020 on the Amendment to the Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 on the Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth Reports, the LHKPN or State Officials' Wealth Report is a mandatory report submitted by state officials regarding their assets when first assuming office, upon transfer, promotion, and retirement. Another obligation accompanying the LHKPN is to disclose their wealth and to be willing to undergo an examination of their assets. The purpose of creating the LHKPN is part of the authority held by the KPK to carry out steps or efforts to prevent corruption crimes, including by registering and examining the LHKPN.

Based on the Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) Number: 0074.P/DIR/2017 on the Guidelines for the State Officials' Wealth Report within PT PLN (Persero), employee positions categorized as mandatory LHKPN reporters include the Board of Commissioners (BOC), Board of Directors (BOD), Senior Management, Middle Management, Basic Management, Senior Supervisor, Basic Supervisor specifically in procurement, as well as Functional Levels I-III. The implementation of LHKPN reporting at PT PLN (Persero) began in 2015, and PLN has consecutively submitted timely LHKPN reports for 6 years with a 100% reporting rate from mandatory reporters (WL). For PLN's mandatory LHKPN reporters in 2023, where the reporting period was in 2024, there were 9,657 mandatory reporters who completed their reports by March 31, 2024.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Management of Conflict of Interest

Pengelolaan Benturan Kepentingan merupakan bagian dari komitmen anti korupsi yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero). Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan disusun sebagai perangkat acuan bagi seluruh Insan PLN dalam memahami,

Conflict-of-Interest Management is part of the anti-corruption commitment established through the Board of Directors Regulation No. 0122.P/DIR/2019 on Conflict-of-Interest Management within PT PLN (Persero). The Conflict-of-Interest Management Guidelines serve as a reference tool for all PLN personnel in understanding,



Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy

mengidentifikasi, serta mengambil langkah-langkah yang tepat dan tegas dalam menghadapi potensi maupun kejadian konflik kepentingan di lingkungan Perseroan. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan, keputusan, dan hubungan kerja dijalankan secara objektif, profesional, dan selaras dengan prinsip integritas serta nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik.

PLN berkomitmen untuk mencegah terjadinya benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan maupun integritas operasional salah satunya dengan melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara berkala oleh Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pegawai PLN dalam pengambilan Keputusan yang bebas dari unsur konflik kepentingan.

identifying, and taking appropriate and decisive steps when facing potential or actual conflicts of interest within the Company. The guideline aims to ensure that every action, decision, and working relationship is carried out objectively, professionally, and in line with integrity principles and good corporate governance values.

PLN is committed to preventing any conflict between personal interests and the Company's interests, which may affect the quality of decision-making or operational integrity. One of the preventive measures includes the periodic signing of an Integrity Pact by the Board of Directors, Board of Commissioners, and all PLN employees to ensure decision-making is free from elements of conflict of interest.

Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi Legal Cases and Administrative Sanctions

Perseroan menghadapi sejumlah perkara hukum yang sedang ditangani sepanjang tahun berjalan. Perseroan melakukan upaya mitigasi atas potensi risiko khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan sanksi administratif. Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan terhadap aspek hukum dan kepatuhan, serta memastikan seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Company faces in several legal cases throughout the current year. The Company undertakes mitigation efforts to address potential risks, particularly those related to legal issues and administrative sanctions. Regular monitoring of legal and compliance aspects is conducted to ensure that all business activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan Legal Cases Faced by the Company

Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, Perseroan menyampaikan informasi terkait perkara hukum tersebut secara terbuka, mencakup uraian pokok perkara, status penyelesaian hingga akhir periode pelaporan, serta potensi dampaknya terhadap kondisi operasional, keuangan, dan reputasi Perseroan. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan

As part of its commitment to upholding the principles of transparency and accountability, the Company discloses information regarding legal cases in an open manner, including summaries of the main issues, the status of resolution up to the end of the reporting period, and the potential impact on the Company's operational, financial, and reputational conditions. This reflects the Company's

Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan bahwa seluruh proses penyelesaian perkara hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan. Sepanjang tahun 2024, Perseroan menghadapi 12 Perkara Hukum dan terdapat 6 perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian sampai dengan akhir tahun 2024 sebagai berikut:

dedication to implementing good corporate governance and ensuring that all legal case resolutions are carried out in accordance with applicable laws and regulations, while taking into consideration the best interests of the Company and its stakeholders. Throughout 2024, the Company was involved in 12 legal cases, with 6 of them still in the process of resolution as of the end of the year, as detailed below:

Perkara Hukum Perusahaan

Legal Cases Faced by the Company

No.	Permasalahan Case	Kronologi/historical Chronology/historical	Status
1.	Sengketa <i>Gas Transportation Agreement</i> ("GTA") antara PCML selaku <i>Shipper</i>/Penjual, KJG selaku <i>Transporter</i> dan Perusahaan selaku <i>Offtaker</i>/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati. Dispute over the <i>Gas Transportation Agreement</i> (GTA) between PCML as the <i>Shipper</i>/Seller, KJG as the <i>Transporter</i>, and the Company as the <i>Offtaker</i>/Buyer concerning a shortfall in payment for gas transportation fees to the Tambak Lorok CCGT Plant, due to the volume of gas delivered being less than the agreed minimum volume.	Tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di International Court of Commerce ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa <i>Gas Transportation Agreement</i> ("GTA") antara PCML selaku <i>Shipper</i>/Penjual, KJG selaku <i>Transporter</i> dan Perusahaan selaku <i>Offtaker</i>/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati. Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas <i>Ship or Pay</i> ("SOP") 2016-2019 senilai USD144.536.677 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (<i>pre-award</i> dan <i>post-award</i>). Perusahaan memiliki posisi yang kuat dan karena berdasarkan fakta hukum, kegagalan pengiriman volume gas yang disepakati tidak disebabkan oleh kesalahan dari Perusahaan melainkan kesalahan dari PCML karena kegagalannya dalam menyediakan gas sesuai volume gas minimum yang disepakati. Selain itu, KJG dengan Perusahaan telah menandatangani kesepakatan perdamaian bahwa KJG membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab pembayaran SOP 2016-2019, apapun putusan Majelis Arbiter ICC nantinya. On August 29, 2018, the Company faced an arbitration request filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as the Claimant against PC Muriah Ltd ("PCML") as Respondent 1 and the Company as Respondent 2 at the International Court of Commerce ("ICC"). The request concerned a dispute over the <i>Gas Transportation Agreement</i> (GTA) involving PCML (Shipper/Seller), KJG (Transporter), and the Company (Offtaker/Buyer), related to a payment shortfall for gas transportation fees to the Tambak Lorok CCGT Plant due to the volume of gas delivered being below the agreed minimum. The Claimant demanded reimbursement of a sum withheld by the Company from the Claimant's invoices since April 2018 and, alternatively, that PCML be held responsible for the 2016-2019 <i>Ship or Pay</i> (SOP) obligation amounting to USD 144,536,677 (in full) plus related costs (<i>pre-award</i> and <i>post-award</i>). The Company maintained a strong position, supported by legal facts, asserting that the failure to deliver the agreed gas volume was not due to the Company's fault but rather PCML's failure to supply the minimum agreed gas volume. Furthermore, KJG and the Company had previously signed a settlement agreement in which KJG released the Company from any SOP payment liabilities for 2016-2019, regardless of the eventual ICC arbitration ruling.	Pada tanggal 26 Februari 2021 PLN dan KJG menandatangani Perjanjian Perdamaian dalam rangka penyelesaian sengketa secara amicable yang pada pokoknya membebaskan PLN dari segala tuntutan, terlepas dari apapun putusan majelis arbitrase nantinya. Tanggal 14 Juni 2024 Majelis Arbiter ICC telah memutus perkara tersebut yang pada pokok Putusannya memenangkan PLN dengan amar putusan antara lain: 1. KJG harus membayar PLN sebesar Rp3.600.000.000, sehubungan dengan biaya dan pengeluarannya dan US\$286.250, sehubungan dengan kontribusinya kepada ICC di muka atas biaya arbitrase; serta 2. PCML harus membayar PLN sebesar Rp2.200.000.000 sehubungan dengan biaya-biaya klaim silang. Bahwa PCML telah melaksanakan Putusan ICC pada 18 September 2024. On February 26, 2021, PLN and KJG signed a Settlement Agreement for the amicable resolution of the dispute, in which PLN was essentially released from all claims, regardless of the arbitration tribunal's final decision. On June 14, 2024, the ICC Arbitration Tribunal rendered its decision, which essentially ruled in PLN's favor, with key points including: 1. KJG must pay PLN Rp3,600,000,000 for its costs and expenses and US\$286,250 for its advance contribution to ICC arbitration costs; and 2. PCML must pay PLN Rp2,200,000,000 in relation to cross-claim costs. PCML executed the ICC award on September 18, 2024.



Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

No.	Permasalahan Case	Kronologi/historical Chronology/historical	Status
2.	Gugatan sengketa kepemilikan tanah Gardu Induk Plumpang yang diajukan oleh Karel Egbert Noya Junior selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) selaku Tergugat, Kementerian Keuangan selaku Turut Tergugat I, Kementerian BUMN selaku Turut Tergugat II, Kementerian ATR/BPN selaku Turut Tergugat III terkait klaim kepemilikan tanah Gardu Induk Plumpang. Penggugat mendalilkan PLN menduduki tanah Gardu Induk Plumpang tanpa sertifikat dan tanpa memberikan ganti rugi pada Penggugat. Lawsuit over the ownership dispute of the Plumpang Substation land filed by Karel Egbert Noya Junior as the Plaintiff against PT PLN (Persero) as the Defendant, the Ministry of Finance as Co-Respondent I, the Ministry of State-Owned Enterprises as Co-Respondent II, and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as Co-Respondent III, related to a claim of ownership of the Plumpang Substation land. The Plaintiff alleged that PLN occupied the Plumpang Substation land without a land certificate and without providing compensation to the Plaintiff.	Tanggal 10 Desember 2020, Perusahaan menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum No. 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr terkait sengketa kepemilikan tanah Gardu Induk Plumpang yang diajukan oleh Karel Egbert Noya Junior selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) selaku Tergugat, Kementerian Keuangan selaku Turut Tergugat I, Kementerian BUMN selaku Turut Tergugat II, Kementerian ATR/BPN selaku Turut Tergugat III mengenai klaim kepemilikan tanah GI Plumpang. Penggugat mendalilkan PLN menduduki tanah Gardu Induk Plumpang tanpa sertifikat dan tanpa memberikan ganti rugi pada Penggugat sehingga atas tindakan tersebut PLN dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar 1365 KUHPerdata jo Pasal 21 (3) UU 5/1960 jis Pasal 42 (2) UU 2 tahun 2012, selanjutnya penggugat mengajukan petitum yang pada pokoknya meminta ganti rugi tanah Gardu Induk Plumpang sesuai harga pasar dan ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000. Pada 15 Juni 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya. Putusan tersebut dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Juli 2023 dengan amar putusan yang pada pokoknya yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Terhadap Putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung pada 16 Oktober 2023 dan pada 8 November 2023 PLN telah menerima Memori Kasasi Karel Egbert Noya Junior serta pada 22 November 2023 PLN telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Pada 21 Agustus 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus perkara tersebut dengan pokok putusan yaitu Menolak seluruh permohonan Pemohon Kasasi. On December 10, 2020, the Company faced a tort lawsuit No. 732/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr regarding the ownership dispute over the Plumpang Substation land filed by Karel Egbert Noya Junior as the Plaintiff against PT PLN (Persero) as the Defendant, with the Ministry of Finance, Ministry of State-Owned Enterprises, and Ministry of ATR/BPN as Co-Respondents I-III respectively. The Plaintiff alleged that PLN had occupied the Plumpang Substation land without a certificate and without compensating the Plaintiff, and that this act constituted a tort under Article 1365 of the Indonesian Civil Code in conjunction with Article 21(3) of Law No. 5/1960 and Article 42(2) of Law No. 2 of 2012. The Plaintiff filed a claim essentially requesting compensation for the Plumpang Substation land at market value and immaterial damages amounting to Rp100,000,000,000. On June 15, 2022, the North Jakarta District Court rendered its verdict, which essentially rejected the lawsuit in its entirety. This decision was upheld by the Jakarta High Court on July 17, 2023, with a ruling that reinforced the verdict of the North Jakarta District Court. In response to the verdict, the Plaintiff filed a cassation appeal to the Supreme Court on October 16, 2023. PLN received the Plaintiff's Cassation Memorandum on November 8, 2023, and submitted its Counter Cassation Memorandum on November 22, 2023. On August 21, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia rendered its decision, essentially rejecting all of the Plaintiff's cassation claims.	PLN telah menerima Relas Putusan Kasasi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Masih menunggu relas Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. PLN had received the Cassation Verdict Notification (Relas) from the Clerk of the North Jakarta District Court, and the decision has obtained permanent legal force (inkracht). PLN is currently awaiting the official copy of the verdict from the North Jakarta District Court.

Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

No.	Permasalahan Case	Kronologi/historical Chronology/historical	Status
3.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa kepemilikan Aset tanah milik PLN (PLTD Poka) yang diajukan oleh Ricky Helniha. Tort Lawsuit over Asset Ownership Dispute Regarding PLN-Owned Land (PLTD Poka) Filed by Ricky Helniha	Tanggal 23 November 2022, perusahaan menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum sengketa kepemilikan Aset tanah milik PT PLN (Persero) dimana di atasnya berdiri PLTD Poka, seluas 30.480m² di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang diajukan oleh Ricky Helniha sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara No. 1078/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Penggugat menyatakan bahwa sebagian tanah SHM milik Penggugat seluas 1.978 m² tumpang tindih dengan SHGB milik PT PLN (Persero) dan mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp74.000.000.000 (Tujuh Puluh Empat Miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) akibat penguasaan tanah oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 15 Mei 2023, telah dilaksanakan Sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Sela, yang pada intinya mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat terkait kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo). Atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Upaya hukum banding. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan dengan amar "menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini". Pada tanggal 5 Desember 2023 PLN mengajukan Upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. On November 23, 2022, the Company faced a tort lawsuit over an asset ownership dispute concerning PT PLN's (Persero) land, on which the PLTD Poka facility stands, covering an area of 30,480 m² located in Poka Village, Teluk Ambon Subdistrict, Ambon City. The lawsuit was filed by Ricky Helniha as the Plaintiff at the South Jakarta District Court under Case Register No. 1078/Pdt.G/2022/PN Jkt. Sel. The Plaintiff claimed that part of his land ownership certificate (SHM), measuring 1,978 m², overlapped with PLN's building use rights certificate (SHGB), and alleged to have suffered material losses amounting to Rp74,000,000,000 (Seventy-Four Billion Rupiah) and immaterial losses of Rp100,000,000,000 (One Hundred Billion Rupiah) due to PLN's control over the land. On May 15, 2023, a hearing was held with the agenda of reading the Interlocutory Decision, which essentially upheld the Objection (Eksepsi) of the Defendant and Co-Defendants regarding relative jurisdiction (stating that the South Jakarta District Court was not authorized to adjudicate the case). The Plaintiff appealed this decision. On October 11, 2023, the DKI Jakarta High Court issued a ruling with the order: "declaring that the South Jakarta District Court has jurisdiction to examine this case." On December 5, 2023, PLN filed a cassation appeal to the Supreme Court through the Registrar's Office of the South Jakarta District Court.	Tanggal 5 Desember 2023, PLN telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung dan sedang menunggu hasil putusan kasasi. Pada 10 Desember 2024 PLN mendapatkan informasi berdasarkan data kepaniteraan Mahkamah Agung RI bahwa perkara a quo telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2024, dengan amar putusan kasasi "Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi" (PLN), sehingga proses persidangan perkara a quo akan diulang kembali untuk pemeriksaan pokok perkara. On December 5, 2023, PLN pursued a legal remedy by submitting a cassation memorandum to the Supreme Court and was awaiting the outcome of the cassation decision. On December 10, 2024, PLN obtained information from the case registry system of the Supreme Court of the Republic of Indonesia indicating that the case in question had been decided on October 17, 2024, with the ruling: "To reject the Cassation Petition filed by the Cassation Petitioner" (PLN). As a result, the trial process for the case would be resumed for substantive examination.
4.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum hak atas tanah tanggal 19 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli oleh BPHMS BNKP melawan Direktur PT PLN (Persero) dimana PLN UP3 Nias menguasai lahan tanah Kantor Jaga Lahewa sejak tahun 1981 berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Nomor: 540/W.II/81 tanggal 27 Juli 1981.	PLN UP3 Nias menerima surat pemberitahuan dari BNKP Resort 35 Jemaat Lahewa nomor: 127/J.Lhw/0001/R.35/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Hak Milik BNKP Jemaat Lahewa Resort 35 BNKP, karena tanah tersebut selama bertahun-tahun tidak lagi dimanfaatkan oleh PLN untuk dudukan PLTD sehingga diminta kembali oleh BNKP dan meminta bangunan segera dibongkar/dikosongkan karena akan digunakan untuk membangun fasilitas demi peningkatan pelayanan BNKP dengan gugatan immateriil sebesar kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) akibat penguasaan tanah oleh PT PLN (Persero). Tanggal 16 November 2023, Putusan PN Gunung Sitoli dengan Amar Putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (PLN Menang) dan Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023, dikeluarkan Putusan PT Medan dengan amar putusan "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sitoli tanggal 16 November 2022 yang dimohonkan banding" (PLN Kalah). Selanjutnya pada tanggal 13 November 2023 terbit Putusan Kasasi dengan amar putusan "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi" (PLN Kalah). Selanjutnya PLN mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Mei 2024.	Tanggal 2 Mei 2024 PLN mengajukan Peninjauan Kembali dan disertai dengan penyampaian Memori Peninjauan Kembali. Hingga saat ini Putusan Peninjauan Kembali belum diterbitkan oleh Mahkamah Agung. On May 2, 2024, PLN filed a Judicial Review accompanied by the submission of the Judicial Review Memorandum. Until now, the Judicial Review decision has not yet been issued by the Supreme Court.



Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

No.	Permasalahan Case	Kronologi/historical Chronology/historical	Status
	Tort Lawsuit over Land Rights Filed on October 19, 2021, at Gunung Sitoli District Court by BPHMS BNKP Against the Director of PT PLN (Persero). The case concerns land occupied by PLN UP3 Nias for the Lahewa Guard Post Office since 1981, based on a Land Handover Agreement Letter No. 540/W.II/81 dated July 27, 1981.	PLN UP3 Nias received a notification letter from BNKP Resort 35, Lahewa Congregation No. 127/J.Lhw/0001/R.35/08/2021 dated August 10, 2021, stating that the rightful owner of the land was BNKP Lahewa Congregation, Resort 35 BNKP. The letter further asserted that the land had not been used by PLN for years as the site for a diesel power plant (PLTD) and therefore should be returned to BNKP. BNKP requested that the building be immediately vacated or dismantled to make way for new facilities to improve its services. An immaterial compensation claim of Rp100,000,000,000 (One Hundred Billion Rupiah) was submitted, citing losses caused by PT PLN (Persero)'s control over the land. On November 16, 2022, the Gunung Sitoli District Court issued a ruling with the decision: "Declaring the Plaintiff's claim inadmissible" (PLN won). However, on March 7, 2023, the Medan High Court issued a decision with the ruling: "Revoking the Gunung Sitoli District Court decision dated November 16, 2022, which was appealed" (PLN lost). Subsequently, on November 13, 2023, a Supreme Court cassation decision was issued with the ruling: "Rejecting the Cassation Petition submitted by the Cassation Petitioner" (PLN lost). Then, PLN filed an extraordinary legal remedy of Judicial Review on May 2, 2024.	
5.	Gugatan yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano dengan register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn terkait kepemilikan atas tanah di PLTA Tonsea Lama. A lawsuit was filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol as the Plaintiff at the Tondano District Court with case register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn concerning ownership of land at the Tonsea Lama Hydroelectric Power Plant (PLTA Tonsea Lama).	Tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano dengan register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn terkait kepemilikan atas tanah di PLTA Tonsea Lama. Penggugat mengajukan ganti rugi sebesar Rp409.560.000.000 dan tuntutan bahwa tanah seluas 15.000 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Buku Garisan Tanah Tonsea Lama No. 829 Folio 80 adalah atas nama Almarhum Hendrik Nelwan. Pada tanggal 5 April 2023, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (PLN Menang). On June 7, 2022, the Company faced the lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol as the Plaintiff at the Tondano District Court with register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn regarding ownership of land at PLTA Tonsea Lama. The Plaintiff demanded compensation of Rp409,560,000,000 and claimed that the land area of 15,000 m² with ownership proof in the form of the Tonsea Lama Land Register Book No. 829 Folio 80 was under the name of the late Hendrik Nelwan. On April 5, 2023, the case was decided by the Tondano District Court with the verdict that the Plaintiff's lawsuit was inadmissible (PLN won).	1. Tanggal 17 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Manado telah menerbitkan Putusan Banding dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (PLN Menang). 2. Berdasarkan data kepaniteraan Mahkamah Agung RI, perkara a quo telah diputus pada tanggal 2 Mei 2024, dengan amar putusan kasasi "Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi" (PLN Menang). 1. On July 17, 2023, the Manado High Court issued an Appeal Decision rejecting the Plaintiff's lawsuit in its entirety (PLN won). 2. Based on data from the Supreme Court registry, the case was decided on May 2, 2024, with the cassation ruling stating "Rejecting the cassation request from the Petitioner" (PLN won).
6.	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah tapak tower T95 jaringan transmisi 70 kV Bitung - Sawangan yang diajukan oleh Andy Tendean selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) Bitung (UPT Manado) selaku Tergugat, Kepala Pemerintah RI cq. Menteri BUMN selaku Turut Tergugat I dan Kepala Pemerintah RI cq. Menteri ATR/BPN cq Gubernur Provinsi Sulawesi Utara cq. Walikota Bitung cq. Kepala BPN Provinsi Sulawesi Utara cq. Walikota Bitung cq. Kepala BPN Provinsi Sulawesi Utara cq. Kepala BPN Kota Bitung selaku Turut Tergugat II pada Pengadilan Negeri Bitung.	Pada tanggal 5 Agustus 2024, Perusahaan menghadapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Btg terkait Sengketa kepemilikan tanah tapak tower T95 jaringan transmisi 70 kV Bitung - Sawangan yang diajukan oleh Andy Tendean selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) Bitung (UPT Manado) selaku Tergugat, Kepala Pemerintah RI cq. Menteri BUMN selaku Turut Tergugat I dan Kepala Pemerintah RI cq. Menteri ATR/BPN cq Gubernur Provinsi Sulawesi Utara cq. Walikota Bitung cq. Kepala BPN Provinsi Sulawesi Utara cq. Kepala BPN Kota Bitung selaku Turut Tergugat II pada Pengadilan Negeri Bitung. Penggugat mendalilkan bahwa PLN telah menduduki tanah seluas 842m² dan kemudian di dalamnya menerbitkan SHGB No. 00127/Kel.Paceda Tahun 2021 seluas 100m² atas nama PLN, dimana tanah objek sengketa tersebut masih masuk dalam SHM No.00310/Kel.Paceda dan dikuasai tanpa izin Penggugat sehingga tanah milik Penggugat seluas 2.567m² berkurang atau berubah luas menjadi 1.725m². Selanjutnya Penggugat mengajukan petitum yang pada pokoknya meminta ganti rugi sebesar Rp3.947.000.000.	Pada tanggal 23 Desember 2024 telah dilakukan sidang di Pengadilan Negeri Bitung dengan agenda pembuktian surat Penggugat dan Tergugat Proses sidang di Pengadilan Negeri Bitung, pada tanggal 8 Januari 2025 akan dilakukan sidang pembuktian dari para pihak. On December 23, 2024, a hearing was held at the Bitung District Court with the agenda of submitting documentary evidence from both the Plaintiff and the Defendant. The trial process at the Bitung District Court would continue with an evidentiary hearing from the parties on January 8, 2025.

Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

No.	Permasalahan Case	Kronologi/historical Chronology/historical	Status
	Tort Lawsuit regarding the dispute over ownership of the land for tower site T95 of the 70 kV transmission network Bitung – Sawangan, filed by Andy Tendean as the Plaintiff against PT PLN (Persero) Bitung (UPT Manado) as the Defendant, the Head of the Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as Co-Defendant I, and the Head of the Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN), the Governor of North Sulawesi Province, the Mayor of Bitung, the Head of the National Land Agency (BPN) of North Sulawesi Province, and the Head of the BPN of Bitung City as Co-Defendant II, at the Bitung District Court.	On August 5, 2024, the Company faced a tort lawsuit Number 120/ Pdt.G/2024/PN Btg concerning a dispute over the ownership of the land for tower site T95 of the 70 kV transmission network Bitung – Sawangan, filed by Andy Tendean as Plaintiff against PT PLN (Persero) Bitung (UPT Manado) as Defendant, the Head of the Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as Co-Defendant I, and the Head of the Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN), the Governor of North Sulawesi Province, the Mayor of Bitung, the Head of the National Land Agency (BPN) of North Sulawesi Province, and the Head of the BPN of Bitung City as Co-Defendant II at the Bitung District Court. The Plaintiff alleged that PLN occupied a land area of 842 m² and subsequently issued Right to Build Title (SHGB) No. 00127/Kel. Paceda Year 2021 covering 100 m² in PLN's name, whereas the disputed land was still part of Freehold Title (SHM) No. 00310/Kel. Paceda and was controlled without the Plaintiff's permission, resulting in a reduction of the Plaintiff's land from 2,567 m² to 1,725 m². Furthermore, the Plaintiff submitted a petition essentially demanding compensation amounting to Rp3,947,000,000.	

Perkara Hukum yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Legal Cases Faced by Members of Board of Commissioners and/or Board of Directors

Pada tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh anggota Direksi baik berupa perkara pidana maupun perdata. Namun terdapat perkara hukum yang dihadapi Charles Sitorus yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Komisaris Independen Perseroan. Akibat kasus tersebut, Kementerian BUMN resmi memberhentikan Charles Sitorus dari jabatannya sebagai Komisaris Independen PLN, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-269/MBU/11/2024, efektif sejak 29 Oktober 2024.

In 2024, there were no legal issues faced by any members of the Board of Directors, either criminal or civil cases. However, there was a legal matter involving Charles Sitorus, who previously served as one of the Company's Independent Commissioners. As a result of the case, the Ministry of State-Owned Enterprises officially dismissed Charles Sitorus from his position as Independent Commissioner of PLN, based on the Minister of SOEs' Decree Number SK-269/MBU/11/2024, effective as of October 29, 2024.

Perkara Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan

Legal Cases Faced by Subsidiaries

Seluruh perkara hukum yang dihadapi oleh Anak Perusahaan sepanjang tahun 2024 dilaporkan secara terperinci melalui Laporan Tahunan masing-masing entitas. Penyampaian ini dilakukan sebagai bentuk transparansi serta komitmen Anak Perusahaan dalam

All legal cases faced by the Subsidiaries throughout 2024 are reported in detail through the Annual Reports of each respective entity. This disclosure is made as a form of transparency and the Subsidiaries' commitment to uphold the principles of accountability and good corporate



Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi

Legal Cases and Administrative Sanctions

menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui pelaporan tersebut, masing-masing Anak Perusahaan memberikan informasi yang mencakup pokok perkara, status penyelesaian, serta potensi dampaknya terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya konsolidasi pengelolaan risiko hukum secara menyeluruh dalam lingkungan Grup PLN.

governance. Through these reports, each Subsidiary provides information covering the case particulars, the status of resolution, and the potential impact on business activities and operational performance. This also forms part of the efforts to consolidate comprehensive legal risk management within PLN Group.

Sanksi Administratif

Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang berdampak material yang dikenakan kepada PT PLN (Persero), termasuk kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, oleh otoritas atau lembaga pengawas terkait. Perseroan memastikan pemenuhan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi dalam rangka menghindari potensi risiko kerugian akibat sanksi administratif. PLN senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas dalam setiap kegiatan usaha dan memastikan bahwa seluruh organ Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Throughout 2024, no material administrative sanctions were imposed on PT PLN (Persero), including its Board of Commissioners and Board of Directors, by any relevant authorities or supervisory institutions. The Company ensures compliance with applicable laws and regulations as well as the implementation of good corporate governance principles at all organizational levels in order to avoid potential risks of losses due to administrative sanctions. PLN remains committed to maintaining integrity in all business activities and ensuring that all corporate organs carry out their duties and responsibilities in accordance with the prevailing regulations.



Pengadaan Barang Dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Pengadaan Barang dan Jasa memegang peranan strategis dalam mendukung kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan ini merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan anggaran secara signifikan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan misi organisasi. Dalam konteks PT PLN (Persero), fungsi Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sangat penting, khususnya dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Secara umum, proses Pengadaan Barang dan Jasa mencakup serangkaian tahapan yang terstruktur dan terintegrasi, dimulai dari identifikasi kebutuhan dan penyusunan anggaran, perencanaan pengadaan, pelaksanaan proses pengadaan, penandatanganan perjanjian atau kontrak, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan antara penyedia dan pengguna barang/jasa. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa harus dipastikan sasaran Pengadaan Barang/Jasa dapat terpenuhi dengan baik. Pengadaan Barang/Jasa harus didasarkan pada konsep *value for money* (VfM)/nilai beli yang sepadan, yaitu merujuk pada kombinasi optimum dari 6 (enam) *rights* (6 Rs) sasaran Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kebutuhan dari Pengguna Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan pentingnya pendayagunaan produk dalam negeri dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produk dalam negeri dan dapat memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, akuntabel, dan ramah lingkungan.

Procurement of Goods and Services plays a strategic role in supporting the continuity of operations and achieving the organization's objectives. This activity serves as a primary instrument for the significant utilization of budgets to acquire the goods and services necessary for carrying out the organization's mission. For PT PLN (Persero), the function of Goods and Services Procurement is particularly important, especially in providing reliable, efficient, and sustainable electricity infrastructure. Generally, the Procurement process involves a series of structured and integrated stages, starting from needs identification and budget preparation, procurement planning, execution of the procurement process, signing of agreements or contracts, contract implementation, to the handover of work results between the provider and the user of goods/services. Each of these stages is carried out with an emphasis on the principles of transparency, accountability, efficiency, and compliance with applicable regulations and provisions.

In conducting Goods/Services Procurement, it must be ensured that the procurement objectives are properly fulfilled. Procurement should be based on the concept of value for money (VfM), referring to the optimal combination of the 6 (six) rights (6 Rs) to meet the needs of the goods/services users. Procurement also pays attention to the importance of utilizing domestic products by prioritizing local products in accordance with domestic product utilization regulations and providing price preferences for domestic products. Procurement within PLN must apply the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness and reasonableness, openness, accountability, and environmental friendliness.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

Kebijakan Strategis Pengadaan Barang dan Jasa yang terintegrasi sangat penting bagi Perseroan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pengadaan. Seiring dengan kebutuhan akan Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat high level dan strategis maka

An Integrated Strategic Procurement Policy for Goods and Services is crucial for the Company in determining the direction of procurement policies and strategies. In line with the need for a high-level and strategic Goods/Services Procurement Policy, the Company has established the Board



Pengadaan Barang Dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Perseroan menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero). Ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi manajemen risiko dan Direktur yang memimpin, membina, dan mengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terkait diantaranya Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0033.E/DIR/2024 tentang Standar Prosedur Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa serta peraturan pelaksana lainnya terkait Pengadaan dan Logistik.

Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PLN yang menggunakan sumber dana Anggaran PLN atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri dan/atau Pinjaman/Hibah Dalam Negeri yang secara langsung diberikan ke PLN, sepanjang tidak diatur dalam naskah perjanjian. Ruang lingkup Kebijakan Strategis Pengadaan Barang/Jasa diantaranya meliputi:

1. Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa
2. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Proses Umum Pengadaan Barang/Jasa
4. Perjanjian/Kontrak
5. Administrasi dan Dokumentasi
6. Pengendalian dan Pengawasan

of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0018.P/DIR/2023 on the Strategic Procurement Policy of Goods and Services of PT PLN (Persero). The implementation provisions for Goods/Services Procurement are further regulated in operational policies established by the Director who leads, fosters, and manages the risk management function and the Director who leads, fosters, and manages the related Goods/Services Procurement function, including the Implementing Regulation of PT PLN (Persero) No. 0033.E/DIR/2024 on the Standard Procedure for Managing Goods/Services Providers and other implementing regulations related to Procurement and Logistics.

The Strategic Procurement Policy of Goods/Services is established as a guideline for Goods/Services Procurement within PLN that uses funds sourced from PLN's Budget or Foreign Loans/Grants and/or Domestic Loans/Grants directly provided to PLN, as long as not otherwise regulated in the agreement documents. The scope of the Strategic Procurement Policy of Goods and Services includes, among others:

1. General Provisions for Goods and Services Procurement
2. Goods and Services Procurement Organization
3. General Procurement Process for Goods and Services
4. Agreements/Contracts
5. Administration and Documentation
6. Control and Supervision

Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Dissemination of Goods and Services Procurement Policy

Perseroan memastikan keselarasan pelaksanaan pengadaan di seluruh unit kerja, serta meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dengan secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai peraturan, pedoman, serta prosedur pengadaan yang telah ditetapkan, baik yang bersifat internal perusahaan maupun yang mengacu pada ketentuan eksternal dari regulator. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan forum, termasuk pelatihan tatap muka, webinar, penyebaran dokumen resmi, serta diskusi interaktif bersama unit kerja di lingkungan Perseroan.

The Company ensures the alignment of procurement implementation across all work units, as well as enhances understanding and compliance with applicable regulations by periodically conducting dissemination activities on goods and services procurement policies. These activities aim to provide the latest information regarding procurement regulations, guidelines, and procedures that have been established, both internal Company policies and those referring to external requirements from regulators. The dissemination is conducted continuously through various media and forums, including face-to-face training, webinars, dissemination of official documents, and interactive discussions with work units within the Company.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Procurement of Goods and Services

Selain itu, dalam rangka membangun pemahaman yang selaras serta memperkuat kemitraan strategis antara Perseroan dan para penyedia barang/jasa, PLN secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pengadaan kepada seluruh mitra kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif mengenai kebijakan, prosedur, serta standar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Perseroan. Sosialisasi kepada penyedia dan mitra kerja ini mencakup penjelasan terkait prinsip-prinsip dasar pengadaan, mekanisme pelaksanaan, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, serta penerapan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Sosialisasi dilakukan secara berkala melalui berbagai media dan forum, termasuk situs web, media sosial, laman e-Procurement, vendor gathering, survei dan media lainnya yang dapat diakses vendor atau calon mitra secara luas. Perseroan juga membuka ruang dialog untuk mendengar masukan dan menjawab pertanyaan dari para mitra kerja, guna menciptakan hubungan kerja yang sehat, terbuka, dan saling menguntungkan.

Furthermore, to build aligned understanding and strengthen strategic partnerships between the Company and goods/ services providers, PLN actively conducts procurement policy dissemination activities with all business partners. These activities aim to deliver comprehensive information on the policies, procedures, and standards of goods and services procurement applicable within the Company. Dissemination activity for providers and partners includes explanations regarding fundamental procurement principles, implementation mechanisms, obligations and responsibilities of the parties involved, as well as the application of integrity and transparency values at every stage of the procurement process. The dissemination is conducted regularly through various media and forums, including websites, social media, e-Procurement portals, vendor gatherings, surveys, and other media widely accessible to vendors or prospective partners. The Company also opens a dialogue space to receive feedback and answer questions from partners, in order to create a healthy, open, and mutually beneficial working relationship.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Method

Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PLN dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

a. *e-Purchasing*

e-Purchasing merupakan metode pengadaan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, dengan nilai tertentu.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Khusus Penunjukan Langsung dengan metode *Open Book* dapat dilakukan dengan menunjuk lebih dari satu Penyedia Barang/Jasa.

Procurement of Goods and Services within PLN is carried out using the following methods:

1. Procurement of Goods/ Construction Works/ Other Services

a. *e-Purchasing*

e-Purchasing is a procurement method for Goods/ Services that are already listed in the electronic catalog.

b. Direct Procurement

Direct Procurement refers to the procurement of Goods/Services to meet operational needs, where the price is believed to be the result of market competition, within a certain value limit.

c. Direct Appointment

Direct Appointment is carried out by appointing 1 (one) Goods/Services Provider who meets the specified criteria. Specifically, Direct Appointment using the *Open Book* method may be done by appointing more than one Goods/Services Provider.



Pengadaan Barang Dan Jasa

Procurement of Goods and Services

d. Tender Terbatas

Tender Terbatas dilakukan secara terbatas, dilakukan dengan mengundang calon Penyedia Barang/Jasa yang terdapat pada DPT atau *Shortlist*.

e. Tender Cepat

Tender Cepat merupakan metode Pengadaan Barang/Jasa pada Penyedia Barang/Jasa yang telah terqualifikasi dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi dan teknis, sanggah dan sanggah banding.

f. Tender Terbuka

Tender Terbuka dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

d. Limited Tender

Limited Tender is conducted on a limited basis by inviting prospective Goods/Services Providers listed in the Qualified Providers List (DPT) or Shortlist.

e. Fast Tender

Fast Tender is a procurement method for Goods/Services from qualified Providers by comparing prices without requiring qualification assessment, administrative and technical offer evaluations, objections, and appeal processes.

f. Open Tender

Open Tender is conducted openly and widely announced to give opportunities to Goods/Services Providers who meet the requirements.

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

a. e-Purchasing

e-Purchasing merupakan metode pengadaan untuk Barang/Jasa yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional yang diyakini bahwa harga tersebut merupakan hasil persaingan di pasar, dengan nilai tertentu.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

d. Tender Terbatas

Tender Terbatas dilakukan secara terbatas, dilakukan dengan mengundang calon Penyedia Barang/Jasa yang terdapat pada DPT atau Shortlist.

e. Tender Terbuka

Tender Terbuka dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

2. Procurement of Construction Works

a. e-Purchasing

e-Purchasing is a procurement method for Goods/Services already listed in the electronic catalog.

b. Direct Procurement

Direct Procurement refers to the procurement of Goods/Services to meet operational needs where the price is believed to be the result of market competition, within a certain value limit.

c. Direct Appointment

Direct Appointment is carried out by appointing 1(one) Goods/Services Provider who meets the specified criteria.

d. Limited Tender

Limited Tender is conducted on a limited basis by inviting prospective Goods/Services Providers listed in the Qualified Providers List (DPT) or Shortlist.

e. Open Tender

Open Tender is conducted openly and widely announced to give opportunities to Goods/Services Providers who meet the requirements.

3. Pengadaan Jasa Konsultansi:

a. Seleksi Umum

Seleksi Umum adalah metode pengadaan Jasa Konsultansi yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas. Seleksi Umum dipilih dengan pertimbangan bahwa sifat pekerjaan yang tidak mendesak dengan cakupan pekerjaan relatif luas.

3. Procurement of Consulting Services:

a. General Selection

General Selection is a procurement method for Consulting Services conducted openly and widely announced. General Selection is chosen considering that the nature of the work is not urgent and has a relatively broad scope.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Procurement of Goods and Services

b. Seleksi Terbatas

Seleksi Terbatas adalah metode pengadaan Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan mengundang calon Penyedia Jasa Konsultansi yang terdapat pada DPT atau *Shortlist*.

c. Penunjukan Langsung

Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk satu penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

d. Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung yaitu metode pengadaan Jasa Konsultansi untuk memenuhi kebutuhan operasional dengan nilai tertentu.

4. Pengadaan Khusus

Metode dalam pengadaan khusus mengikuti ketentuan pada Peraturan ini atau metode lainnya dengan memperhatikan ketentuan sektoral.

b. Limited Selection

Limited Selection is a procurement method for Consulting Services carried out by inviting prospective Consulting Service Providers listed in the Qualified Providers List (DPT) or Shortlist.

c. Direct Appointment

Direct Appointment is carried out by appointing one Consulting Service Provider according to the specified criteria.

d. Direct Procurement

Direct Procurement is a procurement method for Consulting Services to meet operational needs with a certain value limit.

4. Special Procurement

Methods in special procurement follow the provisions in this Regulation or other methods, by considering sectoral regulations.

Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa

Management of Goods and Services Procurement

Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dan calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara terintegrasi di seluruh lingkungan PLN Group melalui teknologi terkini, mulai dari pendaftaran, kualifikasi, pengelompokan, penilaian kinerja, maupun pembinaan (termasuk Daftar Hitam (*Blacklist*)), sehingga didapat data Penyedia Barang/Jasa dan calon Penyedia Barang/Jasa yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PLN melakukan Penilaian Kualifikasi dan Due Diligence untuk menghasilkan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang berlaku dalam masa tertentu dan dilakukan pemutakhiran secara periodik atau setiap kebutuhan yang dipandang perlu.

The management of Goods/Services Providers and prospective Goods/Services Providers is conducted in an integrated manner throughout PLN Group environment using the latest technology, starting from registration, qualification, classification, performance evaluation, to development (including Blacklist management), thereby obtaining comprehensive data on Goods/Services Providers and prospective Providers to support the implementation of Goods/Services Procurement. PLN conducts Qualification Assessments and Due Diligence to produce a Selected Providers List (DPT) that is valid for a certain period and is updated periodically or whenever deemed necessary.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Perseroan terus berkomitmen untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi dalam mewujudkan perusahaan yang berintegritas transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks, Perseroan secara aktif menyesuaikan praktik GCG agar selaras dengan perkembangan regulasi serta pedoman tata kelola yang berlaku secara nasional maupun internasional. Upaya peningkatan kualitas GCG dilakukan melalui pengadopsian praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan Perusahaan. PLN merujuk pada berbagai standar acuan penting, antara lain pedoman dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI), ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015. Dengan mengintegrasikan berbagai standar penerapan GCG, Perseroan berupaya menciptakan sistem tata kelola yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat reputasi, dan mendorong kinerja jangka panjang yang berkelanjutan.

The Company remains committed to strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles as the foundation for building an organization that is transparent, accountable, and sustainable with high integrity. To respond increasingly complex business dynamics, the Company actively adapts its GCG practices to align with evolving regulations and governance guidelines at both national and international levels. Efforts to enhance the quality of GCG are carried out through the adoption of best practices that are relevant to the Company's characteristics and needs. PLN refers to several key reference standards, including guidelines from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUG-KI), the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), as well as the Corporate Governance Guidelines for Public Companies as stipulated in the Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015. By integrating these various GCG implementation standards, the Company strives to establish a governance system that not only meets legal obligations but also enhances stakeholder trust, strengthens its reputation, and drives long-term sustainable performance.

Standar Kementerian BUMN

SOEs Ministry Standards

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi entitas strategis dalam sektor ketenagalistrikan nasional, PLN berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) secara konsisten dan berkelanjutan. Perseroan senantiasa memastikan bahwa seluruh aktivitas korporasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Salah satu landasan penting dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan adalah Peraturan Menteri

As a State-Owned Enterprises (SOEs) serving as a strategic entity in the national electricity sector, PLN is committed to consistently and sustainably implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Company continuously ensures that all corporate activities comply with prevailing laws and regulations, particularly those issued by the Ministry of State-Owned Enterprises. A key foundation for the implementation of GCG within the Company is the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan ini memberikan arah strategis dan operasional bagi seluruh BUMN dalam menyelenggarakan tata kelola yang profesional serta sejalan dengan tujuan penciptaan nilai yang berkelanjutan.

PLN terus memperkuat kerangka kerja tata kelola perusahaan yang terintegrasi, mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengawasan internal, dan pelaksanaan kegiatan korporasi signifikan. Penerapan pedoman ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen Perusahaan dalam mewujudkan BUMN yang tangguh, adaptif, mampu bertahan dan tumbuh serta memberikan kontribusi optimal bagi negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Activities of State-Owned Enterprises. This regulation provides strategic and operational direction for all SOEs in implementing professional governance in line with the goal of creating sustainable value.

PLN continues to strengthen its integrated corporate governance framework, covering decision-making processes, risk management, internal supervision, and the execution of significant corporate activities. The implementation of these guidelines not only reflects compliance with regulations but also serves as a concrete manifestation of the Company's commitment to building a resilient, adaptive, and sustainable SOE capable of contributing optimally to the nation, society, and other stakeholders.

Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia

Indonesian General Guidelines for Corporate Governance

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PLN secara konsisten merujuk pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun dan diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). PUGKI 2021 merupakan pembaruan dari pedoman sebelumnya yang dirancang untuk menyelaraskan praktik tata kelola perusahaan di Indonesia dengan standar global serta dinamika terkini di tingkat internasional, dalam rangka menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. PLN telah melaksanakan pemetaan terhadap praktik tata kelola yang telah dijalankan. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan pendekatan *apply or explain*, di mana setiap prinsip yang belum dapat diterapkan secara penuh disertai dengan penjelasan yang terbuka, objektif, dan transparan atas kendala atau alasan yang

As part of its ongoing commitment to strengthening the implementation of Good Corporate Governance (GCG), PLN consistently refers to the 2021 Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI), which was developed and published by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The 2021 PUGKI is an update of the previous guidelines, designed to align corporate governance practices in Indonesia with global standards and current international developments, with the aim of fostering a more transparent, accountable, and sustainable business environment. PLN has conducted a mapping of its governance practices based on the *apply or explain* approach, in which each principle not yet fully implemented is accompanied by an open, objective, and transparent explanation of the constraints or reasons behind it. This initiative reflects the Company's commitment to continuously align its governance practices with the best developments at both national and global levels.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines

melatarbelakanginya. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk secara berkelanjutan menyelaraskan praktik tata kelola dengan perkembangan terbaik di tingkat nasional maupun global. Penyesuaian dan penyempurnaan secara bertahap terus dilakukan guna memastikan bahwa seluruh aspek tata kelola yang dijalankan senantiasa relevan dan adaptif terhadap tantangan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Dari aspek, prinsip dan rekomendasi yang dipetakan atas penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) pada PLN tahun 2024, terdapat 51 rekomendasi yang telah dilaksanakan (*apply*) dan 30 rekomendasi lainnya dijelaskan (*explain*). Dari 30 rekomendasi *explain* tersebut, terdapat 31 saran yang diberikan sebagai *area of improvement*, sedangkan 8 rekomendasi tidak diberikan saran karena dianggap tidak relevan (*Not Applicable / N/A*) sebagaimana dapat dilihat pada tabel status pemetaan PUGKI tahun 2024 berikut:

Adjustments and gradual improvements are consistently carried out to ensure that all aspects of governance remain relevant and adaptive to stakeholder expectations and evolving challenges.

In terms of principles and recommendations mapped from the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) at PLN in 2024, a total of 51 recommendations had been applied (*apply*), while 30 recommendations had been explained (*explain*). Of the 30 explained recommendations, 31 suggestions were provided as areas for improvement, while 8 recommendations were not accompanied by suggestions as they were deemed Not Applicable (N/A), as shown in the 2024 PUGKI mapping status table below:

Pemetaan Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
Mapping of the Implementation of Indonesian General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI)

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
Prinsip 1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Principle 1. Role and Responsibility of Board of Directors and Board of Commissioners			
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi Role and Responsibility of Board of Directors			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>). To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to attain the following governance outcomes: a. competitiveness with a focus on long-term performance; b. ethical and responsible business conduct; c. positive contributions to society and the environment; and d. capability to endure and grow (<i>corporate resilience</i>).	Apply	Perusahaan telah memiliki sasaran strategi yang bertujuan untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan. Direksi telah menjalankan perannya melalui penetapan kinerja jangka panjang agar dapat mempunyai daya saing. Dalam pengelolaannya, Direksi senantiasa memastikan Perusahaan dikelola secara beretika dan bertanggung jawab sesuai dengan pedoman etika bisnis yang telah ditetapkan, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta memastikan Perusahaan mampu bertahan dan bertumbuh melalui pengembangan bisnis Perusahaan. The Company established strategic objectives aimed at achieving sustainable value creation. The Board of Directors had fulfilled its role by setting long-term performance targets to enhance competitiveness. In its management approach, the Board of Directors consistently ensures that the Company is governed ethically and responsibly in accordance with the established code of business ethics, makes positive contributions to society and the environment through the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, and ensures the Company's resilience and growth through business development initiatives.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with its long-term objectives, by effectively leveraging innovation and technology.	Apply	Direksi senantiasa memastikan bahwa seluruh perencanaan strategis mulai dari visi, misi, tujuan serta strategi Perusahaan telah disusun secara selaras dan konsisten dengan RJPP dan RKAP Perusahaan. Perusahaan juga telah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam penyusunan strategi dan perencanaan korporasi. Hal ini tercermin melalui berbagai inisiatif transformasi digital yang secara sistematis dituangkan dalam dokumen RJPP, RKAP serta IT Masterplan. The Board of Directors consistently ensures that all strategic planning, including the Company's vision, mission, objectives, and strategies, is formulated in alignment and consistency with the Company's RJPP and RKAP. The Company also integrated the use of innovation and technology into its corporate strategy and planning. This is reflected in various digital transformation initiatives systematically incorporated into the RJPP, RKAP, and the IT Master Plan documents.
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's vision, mission, goals, objectives, and strategies, and that comply with applicable laws, regulations, and standards.	Apply	Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif melalui proses bisnis manajemen risiko yang di dalamnya terdapat matriks pengukuran manajemen risiko (risk maturity), pemantauan risiko, serta meningkatkan budaya risiko. Direksi juga menetapkan rancangan sistem pengendalian intern berdasarkan kerangka three lines model yang efektif dan telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern di Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Eksternal Auditor atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. The Board of Directors ensured the implementation of effective risk management through a risk management business process that included a risk maturity matrix, risk monitoring, and the enhancement of risk culture. The Board of Directors also established the design of the internal control system based on an effective Three Lines Model framework and conducted evaluations/assessments of the effectiveness of internal controls within the Company, as outlined in the External Auditor's Report on the Effectiveness of the Internal Control System and Compliance with applicable laws and regulations.
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems, as well as the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	Apply	Direksi telah memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan. Direksi Perusahaan wajib menandatangani Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan setiap tahunnya. Perusahaan juga selalu melaporkan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham secara tepat waktu dan mengungkapkan kinerja Laporan Keuangan setiap tahun dalam Laporan Tahunan. The Board of Directors ensured the integrity of the Company's accounting and financial reporting system. The Company's Board of Directors is required to sign the Board of Directors' Statement of Responsibility for the Financial Statements each year. The Company consistently submits its Financial Statements to the Shareholders in a timely manner and discloses financial performance annually in its Annual Report.
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting is properly prepared.	Apply	Laporan Keberlanjutan Perusahaan (<i>Sustainability Report</i>) tahun 2023 telah disusun dengan memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip pengungkapan yang relevan sesuai dengan sektor utilitas listrik. Laporan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, hingga tata kelola (ESG). The Company's 2023 Sustainability Report had been prepared by considering and adhering to relevant disclosure principles in accordance with the electricity utility sector. The report covered significant aspects, including economic, environmental, social, and governance (ESG) performance.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
1.1.6 Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a corporate information technology (IT) governance framework that aligns with the corporation's business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports the corporation's goals and strategies.	Apply	Perusahaan telah memiliki kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi yang mendukung kegiatan bisnis Perusahaan. Saat ini Perusahaan telah menyusun IT Masterplan, <i>Information Technology Service Management</i> (ITSM) dan IT <i>Disaster Recovery Management</i>. The Company established an information technology (IT) governance framework that supported its business activities. Currently, the Company has developed an IT Master Plan, Information Technology Service Management (ITSM), and IT Disaster Recovery Management.
1.1.7 Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations operating under Sharia principles, the Board of Directors must ensure the authority and availability of adequate supporting tools to enable the Sharia Supervisory Board to perform its role effectively.	Explain	Perusahaan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (N/A) dikarenakan PLN tidak menjalankan kegiatan usaha yang berbasis prinsip Syariah. The Company does not operate based on Sharia principles (N/A) as PLN does not conduct business activities based on Sharia principles.
1.1.8 Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors Charter is reviewed periodically. The charter includes, among other things, the division of roles among individual Directors, which may be regulated in the Board of Directors Charter or through Board of Directors' decision letters.	Explain	Piagam Direksi (<i>Board Manual</i>) yang berlaku saat ini disahkan pada tahun 2022 yang didalamnya mencantumkan tugas dan tanggung jawab Direksi. Pembagian tugas dan peran masing-masing Direksi diatur secara rinci dalam Keputusan Direksi tentang Pembagian Tugas Direksi, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Saat ini, belum ada pemutakhiran yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. The current Board of Directors Charter (Board Manual) was approved in 2022 covering the duties and responsibilities of the Board of Directors. The division of duties and roles of each Director is detailed in the Board of Directors' Decision on the Division of Duties of the Board of Directors, which serves as a reference for carrying out the functions and responsibilities of each Board member. As of now, there has been no update referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2023 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
1.1.9 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of Board members involved in financial crimes and proven misconduct.	Explain	Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus terkait pengunduran diri Direksi apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan. Namun dalam Anggaran Dasar dan <i>Board Manual</i> telah terdapat pengaturan terkait pemberhentian anggota Direksi, salah satunya apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara serta dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau mengundurkan diri. The Company has not yet established a specific policy regarding the resignation of the Board of Directors if involved in and proven guilty of financial crimes. However, the Articles of Association and the Board Manual include provisions related to the dismissal of Board members, including cases where they violate laws and regulations and/or the Company's Articles of Association, engage in actions detrimental to the Company and/or the State, are declared guilty based on a court decision with permanent legal force, and/or resign.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
1.2 Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Apply	Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap bulan berdasarkan Kontrak Manajemen maupun <i>Key Performance Indicator</i> masing-masing Direksi. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan pembahasan dalam RUPS Tahunan. The Board of Commissioners monitors and evaluates the performance of the Board of Directors every month based on the Management Contract and the Key Performance Indicators (KPIs) of each Director. The results of these evaluations are then submitted to the Shareholders as material for discussion at the Annual GMS.
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining the performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Apply	Dewan Komisaris bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi telah membahas dan menyetujui kriteria evaluasi kinerja yang tertuang dalam KPI Direktorat dan KPI individu Direksi. Setiap tahun, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian atas capaian kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya terhadap pencapaian target-target yang tercantum dalam KPI. The Board of Commissioners, together with the Nomination and Remuneration Committee, discussed and approved the performance evaluation criteria outlined in the Directorate KPIs and the individual KPIs of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners, together with the Nomination and Remuneration Committee, assesses the performance achievements of the President Director and other members of the Board of Directors against the targets specified in the KPIs.
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision, and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice, and approves the corporation's long-term business plan, short-term financial plan, and long-term financial plan. The Board of Commissioners offers guidance and monitors the implementation management by the Board of Directors. Both the Board of Directors and the Board of Commissioners are involved in decisions of significant importance to the corporation, as stipulated in the corporation's articles of association.	Apply	Dewan Komisaris telah memberikan telaah atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disampaikan Direksi. Dewan Komisaris telah memberikan telaah dan arahan kepada Direksi sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 terkait pengawasan RJPP dan RKAP. Selain itu, sepanjang tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris telah terlibat dalam pengambilan keputusan penting bagi Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar. The Board of Commissioners had reviewed the draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) submitted by the Board of Directors. The Board of Commissioner provided reviews and guidance to the Board of Directors in accordance with the 2024 Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners related to the supervision of the RJPP and RKAP. Additionally, throughout 2024, the Board of Directors and the Board of Commissioners had been involved in making important decisions for the Company in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association.
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions requiring the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.	Apply	Laporan Tahunan Perusahaan telah mengungkapkan jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. The Company's Annual Report discloses the types of the Board of Directors decisions that require approval from the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
1.3.3 Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur non diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. In making such proposals, the Board of Commissioners considers diversity, non-discriminatory elements, and provides equal opportunities without distinguishing ethnicity, religion, race, inter-group relations, or gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is formal and transparent.	<i>Explain</i>	Pada tahun 2024, tidak terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi sehingga terkait usulan Dewan Komisaris terhadap calon anggota Direksi berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi Not Applicable. Adapun pada tahun 2024, terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, namun calon yang diusulkan berasal dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham, sehingga terkait usulan Dewan Komisaris terhadap calon anggota Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi Not Applicable. In 2024, there were no dismissals or appointments of Board of Directors members; therefore, proposals from the Board of Commissioners regarding candidates for the Board of Directors based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee are Not Applicable. Meanwhile, in 2024, there were dismissals and appointments of members of the Board of Commissioners; however, the proposed candidates came from the Ministry of State-Owned Enterprises as the Shareholder, so proposals from the Board of Commissioners regarding candidates for the Board of Commissioners based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee are Not Applicable.
1.3.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee responsible for the nomination function formulates a succession policy in the nomination process of Board of Directors members. Every year, the Board of Commissioners reviews the implementation report of the development and succession plan submitted by the President Director.	<i>Apply</i>	Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsi nominasi dan menyusun kebijakan suksesi bagi Direksi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap tahun Dewan Komisaris telah meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan oleh Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Nomination and Remuneration Committee had carried out the nomination function and formulated a succession policy for the Board of Directors as outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter. Every year, the Board of Commissioners reviews the implementation report of the development and succession plan submitted by the President Director.
1.3.5 Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala merevisi sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners: a) proposes to the GMS, which may be preceded by proposals from the Committee responsible for the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners that aligns with the sustainable development of the corporation and the long-term interests of the corporation and shareholders; b) periodically reviews the remuneration system for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	<i>Apply</i>	Ketentuan mengenai besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi di Perusahaan yaitu menetapkan dan menelaah kebijakan mengenai pengusulan remunerasi yang dilakukan oleh Direksi serta menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/ insentif kerja) kepada RUPS. Provisions regarding the amount of salary or remuneration and/or allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners, through the Company's Remuneration and Nomination Committee, establishes and reviews policies related to the proposal of remuneration made by the Board of Directors and submits remuneration proposals (salary, allowances, and facilities as well as tantiem (bonus)/incentives) to the GMS.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
1.3.6 Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Apply	Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan termasuk kebijakan governansi di Perusahaan, secara berkala Dewan Komisaris mengawasi struktur, proses, dan hasil governansi Perusahaan serta mengusulkan perbaikannya. Hal ini diimplementasikan melalui telaah atas kebijakan governansi serta pelaksanaan <i>assessment</i> atas implementasi praktik governansi di Perusahaan. In accordance with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to conduct oversight, including governance policies in the Company, the Board of Commissioners periodically supervises the structure, processes, and outcomes of the Company's governance and proposes improvements. This is implemented through reviews of governance policies and assessments of the implementation of governance practices within the Company.
1.3.7 Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement proper and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporation's objectives, targets, and strategies, as well as comply with applicable laws and regulations, code of conduct, and standards.	Apply	Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan selaras dengan rencana bisnis Perusahaan. Melalui rapat internal, Dewan Komisaris melakukan telaah atas kebijakan dan implementasi manajemen risiko dan memberikan arahan dalam rapat gabungan agar Direksi senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi sistem manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal serta menilai toleransi risiko Perusahaan. The Board of Commissioners is responsible to supervise and provide input to the Board of Directors in implementing effective risk management and internal control systems that align with the Company's business plan. Through internal meetings, the Board of Commissioners reviews the policies and implementation of risk management and provides guidance in joint meetings to ensure that the Board of Directors consistently complies with applicable laws and regulations, code of ethics, and standards. The Board of Commissioners also established a Risk Management Committee to assist in evaluating the risk management system, including internal control systems, and assessing the Company's risk tolerance.
1.3.8 Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners oversees and directs to ensure the integrity of accounting and corporate financial reporting systems, as well as the independence of internal and external audit functions.	Apply	Dewan Komisaris memastikan bahwa integritas atas pelaporan akuntansi dan Laporan Keuangan Perusahaan dapat terjaga. Laporan Keuangan senantiasa di reviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham maupun dipublikasikan kepada publik dalam Laporan Tahunan. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan atas kegiatan audit internal dan eksternal namun tidak mengintervensi proses dan hasil audit. The Board of Commissioners ensures the integrity of the Company's accounting reporting and Financial Statements. The Financial Statements are regularly reviewed and approved by the Board of Commissioners and the Audit Committee before being submitted to Shareholders or published to the public in the Annual Report.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereview dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the corporation's annual report and sustainability report, ensuring their integrity, and supervises the corporation's disclosure and communication processes.	Apply	Dewan Komisaris telah memantau, mereview dan menyetujui Laporan Tahunan serta memastikan integritas laporan dan mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasiannya melalui penandatanganan Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan PT PLN Tahun 2024. The Board of Commissioners monitored, reviewed, and approved the Annual Report, ensuring the integrity of the report and supervising the disclosure and communication process through the signing of the Statement of Responsibility by the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 Annual Report and Sustainability Report of PT PLN.
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Explain	Piagam Dewan Komisaris (Board Manual) yang berlaku saat ini disahkan pada tahun 2022. Namun, hingga saat ini, belum ada pemutakhiran yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. The current Board of Commissioners Charter (Board Manual) was enacted in 2022. However, until now, there has been no update referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/2023 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if they are involved in financial crimes and are proven to have committed wrongdoing.	Explain	Perusahaan belum menetapkan kebijakan khusus terkait pengunduran diri Dewan Komisaris apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan. Namun dalam Anggaran Dasar dan <i>Board Manual</i> telah terdapat pengaturan terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris, salah satunya apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara serta dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau mengundurkan diri. The Company has not yet established a specific policy regarding the resignation of Board of Commissioners members if they are involved in and proven to have committed financial crimes. However, the Articles of Association and the Board Manual contain provisions related to the dismissal of Board members, including if they violate laws and regulations and/or the provisions of the Company's Articles of Association, are involved in actions that harm the Company and/or the State, and/or are declared guilty based on a court decision with permanent legal force; and/or resign.
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent Commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions during Board of Commissioners meetings.	Apply	Komisaris Independen telah berkontribusi dalam mengawasi dan memberikan arahan secara independen dan berintegritas dalam setiap rapat Dewan Komisaris. Komisaris Independen Perusahaan saat ini dijabat oleh Sdr. Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, Mutanto Juwono Yazid Fanani dan Ali Masykur Musa. Seluruhnya telah memenuhi kriteria independensi dan membuat pernyataan independensi sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan. The Independent Commissioners contributed by overseeing and providing independent and integrity-based guidance in every Board of Commissioners meeting. The current Independent Commissioners of the Company are Mr. Burhanuddin Abdullah, Andi Arief, Mutanto Juwono, Yazid Fanani, and Ali Masykur Musa. All have met the independence criteria and have submitted independence statements as disclosed in the Annual Report.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of openness and constructive dialogue that allows various viewpoints to be expressed, including coordinating the setting of appropriate meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, opportunities must be provided for the Board of Commissioners to meet with members of the Board of Directors and senior management.	Apply	Komisaris Utama memimpin seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya. Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama antara lain memastikan dan mengoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas sebagai ketua rapat. Dewan Komisaris juga melakukan dialog dan koordinasi dengan Direksi beserta jajarannya di Perusahaan dalam rapat gabungan bersama Direksi. Namun belum terdapat pengaturan terkait penugasan Komisaris Utama untuk mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris (menjadi juru bicara/perwakilan dari Dewan Komisaris). The President Commissioner leads all other members of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the President Commissioner include ensuring and coordinating the activities and duties of the Board of Commissioners, as well as serving as the chairperson of meetings. The Board of Commissioners also holds dialogues and coordination with the Board of Directors and its members in joint meetings with the Board of Directors. However, there is currently no regulation regarding the assignment of the President Commissioner to represent the Board of Commissioners in matters with parties outside the Board (acting as the spokesperson/representative of the Board of Commissioners).
1.4 Pembentukan Komite Establishment of Committee			
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Risk Management Monitoring Committee.	Apply	Saat ini, Perusahaan telah memiliki empat Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Currently, the Company has four Committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee, and the Integrated Governance Committee.
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent, and that the other committees formed by the Board of Commissioners have a majority of independent members. Moreover, all committee members possess competence, commitment, and adequate authority to perform their roles effectively and independently.	Apply	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit dan Komite lainnya berasal dari pihak independen atau pihak profesional yang tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan. Seluruh anggota Komite Perusahaan telah memiliki keahlian dan kompetensi sesuai pembedaan masing-masing. Seluruh anggota Komite telah membuat pernyataan independensi Komite sebagaimana dipublikasikan dalam Laporan Tahunan. At present, the Head the Audit Committee is held by an Independent Commissioner, and all members of the Audit Committee and other Committees come from independent parties or professionals who have no affiliation with the Company. All Committee members possess expertise and competence according to their respective fields. All Committee members made independence statements as published in the Annual Report.
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure objective and independent monitoring of the Audit Committee's duties, the President Commissioner must not serve as the head of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	Apply	Saat ini Ketua Komite Audit dijabat oleh Sdr. Yazid Fanani yang merupakan anggota Komisaris Independen. Currently, the Head of the Audit Committee is Mr. Yazid Fanani, who is an Independent Commissioner.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
1.5 Penilaian Kinerja – Dewan Komisaris dan Anggotanya		Performance Assessment – Board of Commissioners and Members
1.5.1 Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Board of Commissioners conducts annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual commissioner.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara kolegal terhadap keseluruhan kinerja Dewan Komisaris, termasuk kinerja organ komite serta masing-masing anggota Dewan Komisaris. Saat ini, kebijakan terkait mekanisme penilaian kinerja tersebut belum diatur secara rinci dalam Board Manual. Selain itu, proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris belum melibatkan pihak independen atau konsultan eksternal sebagai pendukung dalam pelaksanaannya. The Board of Commissioners conducted collegial monitoring and evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners, including the performance of committee bodies and each individual member of the Board of Commissioners. Currently, the policy regarding the performance evaluation mechanism is not yet detailed in the Board Manual. In addition, the performance evaluation process of the Board of Commissioners has not involved independent parties or external consultants as support in its implementation.
1.6 Benturan Kepentingan		Conflict of Interest
1.6.1 Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner must inform the Board of Commissioners and the head of the committee responsible for nominations before accepting a new appointment as a director or commissioner of a public corporation, another directorship, or other position with a significant time commitment.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah menetapkan kebijakan terkait larangan jenis-jenis jabatan yang dapat dirangkap oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual. Namun ketentuan tersebut belum mengatur terkait jumlah maksimal jabatan yang dapat dirangkap Direksi sebagai Dewan Komisaris di Anak Perusahaan. Pada praktiknya, seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan. The Company established policies regarding the prohibition of certain types of positions that can be concurrently held by members of the Board of Directors as regulated in the Articles of Association and Board Manual. However, these provisions do not yet regulate the maximum number of concurrent positions that the Board of Directors can hold as members of the Board of Commissioners in Subsidiaries. In practice, all current members of the Board of Directors do not hold concurrent positions.
1.6.2 Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related-party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and decision-making related to potential conflicts of interest involving the concerned Commissioner or their affiliates.	<i>Apply</i>	Perusahaan telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan yang di dalamnya mengatur apabila anggota Komisaris memiliki potensi dan/atau benturan kepentingan, maka wajib tidak melibatkan diri dari proses pengambilan keputusan. Perusahaan menindak tegas bagi yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi juga menandatangani surat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan setiap tahunnya. The Company has a Conflict-of-Interest policy that stipulates if members of the Board of Commissioners have a potential and/or actual conflict of interest, they are required to abstain from the decision-making process. The Company takes strict action against those proven to engage in conflict-of-interest behavior. The Board of Commissioners and Board of Directors also sign a statement annually declaring that they have no conflicts of interest.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Competency Development of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and the Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations, standards, as well as other applicable obligations. The Board of Directors, through the corporate secretary, supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the skills and knowledge needed to perform their roles on the Board.	Apply	Dewan Komisaris telah memastikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan memiliki kebijakan memberikan induksi atau program pengenalan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat. Setiap tahunnya, Perusahaan juga memfasilitasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pelatihan terkait keberlanjutan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan bisnis Perusahaan yang disampaikan secara rutin. Commissioners understand their respective roles, duties, and responsibilities. The Company has a policy to provide induction or orientation programs to all newly appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Annually, the Company also facilitates each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners to participate in training and development programs, including sustainability-related training. All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors also receive up-to-date information on the Company's business developments, which are delivered regularly.

Prinsip 2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Principle 2. Composition and Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners

2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Composition of Board of Directors and Board of Commissioners			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In selecting candidates for directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not solely rely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates.	Apply	Dalam menentukan kandidat calon Direktur dan Dewan Komisaris telah melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. Namun karena pengangkatan calon Direksi melalui RUPS Sirkuler maka tidak ada pengungkapan terkait profil calon pada saat pemanggilan RUPS. In determining candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the process through the Nomination and Remuneration Committee does not rely solely on recommendations from the Board of Commissioners, management, or majority shareholders. The Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, may use independent sources to identify qualified candidates. However, since the appointment of director candidates is conducted through a Circular GMS, there is no disclosure related to candidate profiles at the time of the GMS notice.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, ability, and expertise required to properly fulfill the roles of the Board of Directors, while also considering the fulfillment of diversity within the Board of Directors.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Namun Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS (N/A), karena keputusan Pemegang Saham terkait pemilihan/pemilihan kembali dilakukan secara RUPS Sirkuler sehingga tidak ada pemanggilan RUPS. The Board of Commissioners ensured that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, ability, and expertise required to properly fulfill the roles of the Board of Directors, while also considering the fulfillment of diversity in the Board of Directors in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of SOEs. However, information about Board of Directors candidates must be disclosed during the election/re-election process and must be available from the date of the GMS notice until the GMS is held, and downloadable via the website of the publicly listed company and/or e-GMS (Not Applicable), because the shareholders' resolution regarding election/re-election is conducted via Circular GMS, so there is no GMS notice.
2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The corporation's policy on diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.	<i>Explain</i>	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan namun pengungkapan belum mencakup tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. The corporation's policy on diversity within the Board of Directors and the Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report, but the disclosure does not yet include how diversity is achieved through proper succession planning in the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so that they can produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to identify qualified candidates.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. (N/A Dewan Komisaris belum menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat karena calon Dewan Komisaris berasal dari Kementerian BUMN sehingga tidak dilakukan UKK oleh Perusahaan dan tidak ada pengungkapan terkait penunjukan konsultan independen). The Board of Commissioners ensured that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners were clear and transparent to produce the desired Board composition. (N/A: The Board of Commissioners has not used independent sources to determine qualified candidates because the candidates for the Board of Commissioners come from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), so no fit and proper test (UKK) is conducted by the Company, and there is no disclosure regarding the appointment of independent consultants).

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee performing the nomination function establishes nomination procedures and criteria consistent with the Board of Commissioners' skills matrix approved by the Board of Commissioners and ensures that candidate profiles meet the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	Apply	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi telah menetapkan prosedur dan kriteria nominasi dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee responsible for the nomination function set nomination procedures and criteria based on the skills matrix of the Board of Commissioners, which had been approved by the Board, and ensures that candidate profiles meet the requirements set forth in the skills matrix and nomination criteria.
2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners should be formed in such a way that its members collectively reflect diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners.	Apply	Komposisi Dewan Komisaris secara kolektif telah mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. Namun Komposisi Dewan Komisaris belum mencerminkan aspek keberagaman berdasarkan gender. Namun demikian, dari sisi jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi korporasi The composition of the Board of Commissioners collectively reflects diversity in terms of abilities, expertise, knowledge, experience, age, and cultural background needed to properly fulfill the role of the Board of Commissioners. However, the composition of the Board has not yet reflected diversity in terms of gender. However, in terms of the number of Board members, the corporate conditions have been taken into consideration.
2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and to manage roles with potential conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited tenure and disclosure of the duration of membership and their independence from the corporate perspective.	Apply	Untuk memaksimalkan kemampuan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, telah terdapat 5 (lima) Komisaris Independen, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To maximize the ability of the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and to manage roles with potential conflicts of interest, there are currently 5 (five) Independent Commissioners, with limited tenure and disclosure of the duration of Board of Commissioners membership as well as the independence from the corporate perspective.
2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate effective functions of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, tight, and transparent process for the appointment and election of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Apply	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (<i>Selected Talent</i>), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (<i>Nominated Talent</i>). To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance the confidence of investors and stakeholders, the Nomination and Remuneration Committee has ensured that there is a formal, tight, and transparent process for the appointment and election of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, which includes validating and calibrating the talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners (<i>Selected Talent</i>), in order to produce a list of talents to be nominated by the Board of Commissioners to the GMS (<i>Nominated Talent</i>).



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners			
2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure oriented towards the sustainable development of the corporation and encouraging the achievement of long-term goals. The remuneration for the Board of Directors must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors as well as the economic situation and corporate performance.	Explain	Kebijakan remunerasi anggota Direksi belum terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan untuk mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi diusulkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors does not yet consist of a remuneration structure oriented towards the sustainable development of the corporation to encourage the achievement of long-term objectives. The remuneration of the Board of Directors is proposed through the Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors, the economic situation, and corporate performance.
2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure oriented towards the sustainable development of the corporation and encouraging the achievement of long-term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance. In addition, considerations must also be given to the position as the President Commissioner and chairman, as well as membership in committees.	Explain	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris telah terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi, namun belum berdasarkan kinerja jangka panjang korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners already consists of a remuneration structure oriented towards the sustainable development of the corporation and encouraging the achievement of long-term objectives. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic situation, and corporate performance; however, it is not yet based on the corporation's long-term performance.
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the performance, qualifications, and competencies of directors and commissioners while considering the corporation's operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure for establishing the remuneration policy for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Explain	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that the remuneration package is determined based on the performance, qualifications, and competencies of directors and commissioners, while considering the corporation operational performance, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a fair and transparent procedure for establishing the remuneration policy for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
Prinsip 3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Principle 3. Work Relationship between Board of Directors and Board of Commissioners			
3.1 Sifat Hubungan Kerja Nature of Work Relationship			
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There is open discussion between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as among the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it remains important to maintain the confidentiality of information to prevent leakage of confidential information.	Apply	Telah terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dengan tetap memandang penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There have been open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as among the members of both Boards, while still recognizing the importance of maintaining confidentiality to prevent leakage of confidential information.
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with the respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy and regularly discusses its implementation.	Apply	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi telah bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with the respective duties and roles, the Board of Directors has collaborated with the Board of Commissioners in formulating the corporation's mission, vision, and strategy, and regularly discusses its implementation.
3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary plays an important role in supporting the effectiveness of the work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Apply	Sekretaris Perusahaan telah memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Korporasi juga telah diangkat berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. The Corporate Secretary has played an important role in supporting the effectiveness of the work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, promoting the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders. The Corporate Secretary is also appointed with the approval of the Board of Commissioners.
3.2 Akses Informasi Dewan Komisaris Access to Information for the Board of Commissioners			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners receives accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.	Apply	Direksi telah bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors has been responsible for ensuring that the Board of Commissioners receives accurate, relevant, and timely access to information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively regarding all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request the Board of Directors to provide additional information.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
3.3 Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi. Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Impact of Ownership Structure on the Corporation.			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and the relationships among the corporation's shareholders that may affect the management and operations of the corporation.	Apply	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. Impact of ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners have considered their responsibilities within the context of the share ownership structure and the relationships among corporate shareholders that may affect the management and operations of the corporation.
Prinsip 4. Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Principle 4. Ethical and Responsible Behavior			
4.1 Pedoman Etika dan Perilaku Ethical and Behavior Guidelines			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi. b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi. c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya. e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi. f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi. g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	Apply	Pedoman Perilaku dan Etika Usaha telah menuangkan secara jelas harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics, which must clearly express the corporation's expectations that every member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and employees shall: - Acting in the best interests of the corporation. - Acting honestly and with high standards of integrity. - Acting independently and based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence. - Complying with the laws and regulations applicable to the corporation and its operations. - Avoiding actions that violate laws or unethical conduct according to the corporation's code of ethics. - Not engaging or participating in any activity that would create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that would negatively affect the corporation's reputation. - Not taking advantage of corporate property or information, or other corporate or customer-owned assets, for personal gain or in a manner that causes harm to the corporation or its customers. - Not exploiting their position or any opportunities arising from their position for personal gain. - Avoiding to request or receive any payments, gratuities, or other benefits from third parties for themselves or others that would result in a conflict of interest or provide undue benefits to third parties in violation of laws and regulations. - Respecting differing opinions and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees. - Ensuring to complete, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.		The Code of Business Conduct and Ethics clearly outlines the corporation's expectations that every member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees shall: - Acting in the best interests of the corporation; - Acting honestly and with high standards of integrity; - Acting independently and on the basis of complete information, in good faith, with due diligence and prudence; - Complying with laws and regulations applicable to the corporation and its operations; - Avoiding actions that violate laws and regulations or constitute unethical behavior based on the corporation's code of ethics; - Not engaging or participating in any activities that may give rise to conflicts of interest with the corporation's best interests or negatively impact the corporation's reputation; - Not exploiting corporate property, information, or other corporate or customer-owned assets for personal gain or in a way that causes harm to the corporation or its customers; - Not misusing the position or opportunities arising from the position for personal benefit; - Avoid to ask or accept payments, gratuities, or other benefits from third parties for themselves or others that may result in a conflict of interest or unlawfully benefit third parties; - Respecting differing opinions and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees; - Ensuring disclosures are complete, fair, accurate, timely, and understandable in reports and documents submitted to regulators and in other public communications.
4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan (<i>anti-fraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and counter-terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards.	<i>Explain</i>	Direksi telah menetapkan kebijakan dan praktik anti suap, antikorupsi, antikecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. Namun Perusahaan belum menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. The Board of Directors established policies and practices on anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, and political involvement by referring to national or international standards on anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, or other relevant standards. However, the Company has not yet established policies and practices on anti-money laundering and counter-terrorism financing.
4.2 Nilai-Nilai dan Budaya Organisasi Values and Culture of Organization		
4.2.1 Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi. The corporation articulates, fosters, and discloses its corporate culture and values	<i>Apply</i>	Korporasi telah mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi, yaitu terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. The Corporation articulated, fostered, and disclosed its corporate culture and values, as evidenced by conducting assessment and monitoring programs to ensure that all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees of the corporation understand the relevant code of ethics and apply it effectively to prevent the corporation's involvement in inappropriate behavior.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
4.3 Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya. Enforcement and Communication of Code of Conduct, Values and Culture.		
4.3.1 Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The code of conduct and corporate ethics guidelines are effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporation's strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	Apply	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi telah dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The code of conduct and corporate ethics guidelines have been effectively communicated to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and all employees, integrated into the corporation's strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure, and enforced.
Prinsip 5. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Principle 5. Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1 Pengendalian Internal dan Kepatuhan. Internal Control and Compliance		
5.1.1 Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors periodically reviews the adequacy of the design and the operational effectiveness of the corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems, and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	Apply	Direksi telah melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors conducted periodic reviews of the adequacy of the design and the operational effectiveness of the corporate governance, risk management, internal control, and compliance systems, and reported the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.
5.2 Manajemen Risiko Risk Management		
5.2.1 Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are integrated as a unified whole, transparently disclosed, embedded in the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions during joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.	Apply	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are integrated as a single entity, transparently disclosed, embedded in the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions during meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5.2.2 Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists the Board of Commissioners in carrying out its duties by establishing a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the corporation's risk management.	Apply	Komite Pemantau Manajemen Risiko telah membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee had supported the implementation of the Board of Commissioners' duties by establishing a transparent, focused, and independent mechanism for overseeing the corporation's risk management.
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance		
5.3.1 Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a unified manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.	Apply	Direksi telah membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors had established an integrated governance, risk management, and compliance (GRC) system, addressing various uncertainties in a unified manner and with high integrity, to ensure that the corporation could achieve its objectives.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the unit responsible for compliance functions does not concurrently perform functions that could potentially cause conflicts of interest.	Apply	Direksi telah memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors had ensured that the unit responsible for compliance functions did not concurrently perform functions that could potentially cause conflicts of interest.
5.4 Audit Internal Internal Audit			
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.	Apply	Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitored and ensured that the internal audit function assisted the corporation in achieving its objectives by applying an objective and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.
Prinsip 6. Pengungkapan dan Transparansi Principle 6. Disclosure and Transparency			
6.1 Kebijakan dan Pengungkapan Kebijakan dan Pengungkapan			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has policies and procedures for disclosure and transparency that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive and confidential corporate information.	Apply	Terdapat kebijakan yang mengatur pengendalian informasi yang disahkan oleh Direksi untuk mengatur tentang klasifikasi informasi, pihak-pihak yang memberikan data dan prosedur pengungkapan serta daftar informasi yang dikecualikan dan daftar informasi publik pada. SK 0118.K/DIR/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero). There is a policy governing information control authorized by the Board of Directors to regulate the classification of information, parties that provide data and disclosure procedures as well as a list of exempt information and a list of public information in. SK 0118.K/DIR/2020 concerning Determination of List of Exempt Information and List of Public Information within PT PLN (Persero).
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. The rights of shareholders to regularly receive timely and relevant material information about the corporation must be fulfilled.	Apply	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang Perusahaan telah dipenuhi dengan adanya kewajiban pengungkapan kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Charter Dewan Komisaris dan Charter Direksi. The right of shareholders to obtain regular and timely relevant material information about the Company has been fulfilled by the disclosure obligations to shareholders as stipulated in the Articles of Association, the Charter of the Board of Commissioners and the Charter of the Board of Directors.
6.2 Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports			



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
6.2.1 Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The corporation discloses the system and procedures to ensure that interim financial statements, which are not audited or reviewed by external auditors, are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	Apply	Perusahaan telah mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat berupa pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim, peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/ pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim, serta peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. The Company has disclosed systems and procedures to ensure that interim financial statements that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions in the form of internal controls over financial reporting, including interim financial statements, the role of the risk management/compliance/management oversight function and internal audit function in ensuring the integrity of interim financial statements, and the role of the Audit Committee in reviewing interim financial statements to be published.
6.2.2 Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of the financial statement audit conducted by the external auditor. This activity includes recommending the appointment, reappointment, and, if necessary, the dismissal and remuneration of the external auditor.	Apply	Komite Audit telah memastikan kualitas audit laporan keuangan oleh auditor eksternal, termasuk memberikan rekomendasi atas penunjukan, pemberhentian, dan remunerasi melalui proses seleksi yang transparan, serta memastikan tidak ada klausul dalam kontrak yang mengganggu independensi atau kompetensi auditor dan mendorong penyampaian temuan signifikan secara tepat waktu. Komite Audit juga menjaga komunikasi yang baik dengan auditor eksternal, termasuk melalui pertemuan tanpa kehadiran manajemen untuk memastikan independensi dan kualitas audit, memantau interaksi antara manajemen dan auditor agar tetap profesional, serta menelaah management letter dan tanggapan manajemen sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. The Audit Committee has ensured the quality of the audit of financial statements by the external auditor, including providing recommendations on appointment, dismissal and remuneration through a transparent selection process, as well as ensuring that there are no clauses in the contract that interfere with the auditor's independence or competence and encouraging timely submission of significant findings. The Audit Committee also maintains good communication with the external auditors, including through meetings without management present to ensure audit independence and quality, monitoring interactions between management and auditors to remain professional, and reviewing management letters and management responses as part of continuous improvement.
6.2.3 Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. The sustainability report must be prepared and disclosed accurately and compiled in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Apply	Laporan keberlanjutan disusun secara akurat dan sesuai dengan kerangka pelaporan nasional maupun internasional seperti GRI Standards, POJK 51/2017, dan SEOJK 16/2021 serta telah melalui proses assurance oleh pihak independen yang kompeten untuk memastikan keandalan informasi yang disampaikan. The sustainability report is prepared accurately and in accordance with national and international reporting frameworks such as GRI Standards, POJK 51/2017, and SEOJK 16/2021 and has gone through an assurance process by competent independent parties to ensure the reliability of the information submitted.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
6.2.4 Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The corporation issues an integrated annual report that places historical performance in context and describes the corporation's risks, opportunities, and future prospects, thereby helping shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	Apply	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Tahunan yang disusun secara terintegrasi, dengan menyajikan informasi kinerja historis dalam konteks risiko, peluang, dan prospek masa depan. Laporan Tahunan mencakup realisasi kinerja keuangan tiga tahun terakhir, perbandingan antara target dan realisasi, serta proyeksi tahun berikutnya, sekaligus menampilkan prospek usaha untuk memperkuat pemahaman pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap arah strategis dan penciptaan nilai berkelanjutan. Selain itu, Perusahaan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari pendekatan pelaporan terintegrasi, sesuai dengan kerangka nasional dan internasional seperti GRI Standards, POJK 51/2017, SEOJK 16/2021, serta IFRS. The Company has published an integrated Annual Report, which presents historical performance information in the context of risks, opportunities and future prospects. The Annual Report includes the realization of the last three years' financial performance, comparison between target and realization, and projection for the following year, while also presenting the business outlook to strengthen shareholders' and stakeholders' understanding of strategic direction and sustainable value creation. In addition, the Company also publishes a Sustainability Report as part of an integrated reporting approach, in accordance with national and international frameworks such as GRI Standards, POJK 51/2017, SEOJK 16/2021, and IFRS.
6.3 Diseminasi Informasi Dissemination of Information		
6.3.1 Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. The information dissemination channels must provide equal, timely, and relatively inexpensive access to relevant information for users.	Apply	Perusahaan telah memiliki saluran penyebaran informasi yang menyediakan akses setara, tepat waktu, dan relative murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna selain situs web berupa sosial media. Perusahaan juga telah memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya dibuktikan dengan adanya PERDIR dengan Nomor SK 0118.K/DIR/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero) dan diperolehnya sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. The Company has information dissemination channels that provide equal, timely, and relatively inexpensive access to relevant information for users other than websites in the form of social media. The company has also ensured that the information disseminated is safeguarded and protected as evidenced by the existence of PERDIR with SK Number 0118.K/DIR/2020 concerning Determination of List of Exempt Information and List of Public Information within PT PLN (Persero) and obtaining ISO 27001: 2013 certification for Information Security Management System.
6.3.2 Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The corporation ensures that the annual statement regarding the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including explanations of the application of each Recommendation and Guidance, is available on the website for a minimum period of five years.	Apply	Perusahaan telah melaksanakan penilaian penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) untuk tahun buku 2024 dan menyatakan bahwa seluruh Rekomendasi dan Panduan yang relevan telah diterapkan. Penjelasan atas penerapan tersebut dimuat secara lengkap dalam Laporan Tahunan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik. The Company has conducted an assessment of its implementation of the Indonesian General Corporate Governance Guidelines (PUGKI) for the financial year 2024 and certifies that all relevant Recommendations and Guidelines have been implemented. An explanation of the implementation is provided in full in this Annual Report as part of our commitment to good corporate governance.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
6.3.3 Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal <i>cross listing</i>, kriteria dan prosedur <i>cross listing</i>, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk <i>listing</i> utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross-listing, the criteria and procedures for cross-listing, as well as the criteria and procedures for recognizing listing requirements for the primary listing, must be transparent and documented.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum melakukan cross listing atau pencatatan efek di yurisdiksi selain di Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan ini dinilai belum relevan (<i>Not Applicable</i>) untuk saat ini. Namun demikian, Perusahaan telah menerbitkan obligasi yang terdaftar di pasar modal di Indonesia, sehingga tunduk pada ketentuan tata kelola yang berlaku di yurisdiksi tersebut. Perusahaan telah mengidentifikasi dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal terkait, serta mendokumentasikan kriteria dan prosedur <i>cross listing</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana informasi mengenai kepatuhan dan tata kelola ini diungkapkan secara transparan dalam Laporan Tahunan ini. The Company has not cross listed or listed securities in jurisdictions other than Indonesia. Therefore, this provision is considered not relevant (<i>Not Applicable</i>) for now. However, the Company has issued bonds that are listed on the capital market in Indonesia, so it is subject to the governance provisions applicable in that jurisdiction. The Company has identified and complied with the requirements set forth by the relevant capital market authorities, as well as documented the cross listing criteria and procedures in accordance with the applicable provisions, as this compliance and governance information is transparently disclosed in this Annual Report.
Prinsip 7. Pengungkapan dan Transparansi Principle 7. Disclosure and Transparency		
7.1 Hak Pemegang Saham Shareholders' Rights		
7.1.1 Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communication policy that facilitates and encourages the participation of shareholders or investors.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum menyusun kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor, termasuk pengaturan upaya memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor sehingga belum ada pengungkapan kebijakan tersebut dalam <i>website</i> dan laporan Perusahaan. Namun demikian, dalam prakteknya Perusahaan telah menyediakan wadah atau <i>platform</i> dialog konstruktif antara pemegang saham dengan manajemen, serta telah mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya. The Company has not yet developed the Company's communication policy with shareholders or investors, including arrangements to facilitate and encourage the participation of shareholders or investors, so there is no disclosure of the policy on the Company's website and reports. However, in practice the Company has provided a platform for constructive dialog between shareholders and management, and has publicly disclosed all material new facts available to financial analysts and other parties.
7.1.2 Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, as a parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to its subsidiaries and jointly controlled entities in which the corporation's investment is significant.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah memastikan bahwa kebijakan governansi korporat berlaku bagi entitas anak berupa Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak. Perusahaan juga telah memiliki kebijakan yang mengatur investasi di entitas anak baik yang mayoritas maupun yang di bawah mayoritas. Namun Perusahaan belum memastikan kebijakan governansi korporat berlaku bagi entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, seperti DPPLN. The Company has ensured that corporate governance policies apply to its subsidiaries in the form of corporate governance framework and policies in subsidiaries. The Company also has policies governing investments in subsidiaries, both majority and less than majority. However, the Company has not ensured that corporate governance policies apply to entities with legal entities other than limited liability companies, such as DPPLN.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
7.1.3 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and substantial sales of corporate assets to ensure that transactions occur transparently and under fair conditions, protecting the rights of all shareholders according to their class.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum mengungkapkan aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi dalam <i>website</i>. Selain itu Perusahaan juga belum memiliki kebijakan yang mengatur taktik yang mencegah pengambil alihan (<i>anti-take-over devices</i>) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. The Company has not disclosed the rules and procedures governing acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions such as mergers and asset sales so that investors understand their rights and entitlements to compensation on the website. In addition, the Company does not yet have a policy that anti-take-over devices should not be used to shield management and the Board of Commissioners from accountability.
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Fair Treatment of Shareholders		
7.2.1 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: - semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; - pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures that ensure: - all shareholders of the same series within one class of shares are treated equally; - disclosure of these rules and procedures as well as disclosure of the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control disproportionate to their share ownership.	<i>Explain</i>	Mengingat Perusahaan belum Tbk maka tidak ada ketentuan para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Namun Perusahaan belum menyusun mekanisme /prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak pemegang saham sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. As the Company is not yet a public company, there is no requirement for investors to be informed of the rights attached to all series or classes of shares before they purchase them. Any change in the economic value of shares or voting rights is subject to the approval of the adversely affected share class. However, the Company has not developed a mechanism/ procedure that allows shareholders the opportunity to obtain effective redress for violations of shareholder rights in accordance with applicable laws and regulations at a reasonable cost and without undue delay.
7.2.2 Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku terkait transaksi dengan pihak berelasi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan wajar (<i>arm's length transaction</i>). Dewan Komisaris dan Komite Audit berperan dalam memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's-length principle</i>). Namun Perusahaan belum memiliki kebijakan terkait pelarangan transaksi yang merugikan pemegang saham, serta belum terdapat pengungkapan dalam Laporan Tahunan terkait kesimpulan dari kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan termasuk proses persetujuan Dewan Komisaris atas transaksi tersebut. The Company has standardized operational policies and procedures related to transactions with related parties to ensure that transactions are conducted in a fair and reasonable manner (arm's length transaction). The Board of Commissioners and Audit Committee play a role in providing direction and input to the Board of Directors so that transactions with related parties can be carried out in accordance with the arm's-length principle. However, the Company does not yet have a policy regarding the prohibition of transactions that harm shareholders, and there is no disclosure in the Annual Report regarding the conclusion of the Audit Committee's review of related party transactions / significant conflicts of interest including the Board of Commissioners' approval process for such transactions.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Description
7.2.3 Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that assures conflicts of interest are properly managed and protects the interests of the corporation and its shareholders.	<i>Explain</i>	Perusahaan memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. Perusahaan memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. (<i>Not Applicable</i>) Mengingat saat ini Perusahaan tidak melakukan perdagangan saham, maka Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>. The company has and discloses policies to prevent insider trading. The Company has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not yet available in the market. (<i>Not Applicable</i>) Given that the Company does not currently trade shares, the Company does not have a specific policy to prevent insider trading.
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders		
7.3.1 Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation sends the GMS notice with a complete agenda and materials as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to thoroughly review the meeting agenda. Invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as the corporation's website.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan penjelasannya serta materi lengkap (paling lambat 28 hari sebelum RUPS). Pemanggilan RUPS RKAP 2024 tanggal 15 Januari, pelaksanaan 29 Januari 2024. Dan pemanggilan RUPS LPT tanggal 15 Juli 2024, pelaksanaan RUPS LPT tanggal 22 Juli 2024. Selain itu, undangan RUPS yang diungkapkan dalam <i>website</i> belum disertai penjelasan untuk setiap agenda. The company has not made the GMS call with the agenda and explanation as well as complete materials (at the latest 28 days before the GMS). Invitation to the 2024 GMS for the Corporate Work Plan and Budget dated January 15, the implementation of January 29, 2024. And the GMS for the Annual Report invitation dated July 15, 2024, the implementation of the GMS for the Annual Report on July 22, 2024. In addition, the GMS invitation disclosed on the website has not been accompanied by an explanation for each agenda.
7.3.2 Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders to participate and vote effectively at the GMS.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah memiliki aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS yang diatur secara umum dalam Anggaran Dasar. Pada saat RUPS LPT dan RUPS RKAP terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak hadir. Perusahaan belum memiliki prosedur pemungutan suara secara elektronik, serta belum menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The Company has rules and procedures that facilitate shareholders to participate and vote effectively at the GMS which are generally regulated in the Articles of Association. At the GMS for the Annual Report and the Corporate Work Plan and Budget there were members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were absent. The Company does not yet have electronic voting procedures, and has not appointed an independent party (supervisor/inspector) to count and/or certify the votes in the GMS and disclose them in the GMS minutes.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Explain	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. (Not Applicable karena pada tahun 2024 tidak terdapat pengangkatan Direksi baru dan calon Dewan Komisaris berasal dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham, sehingga tidak ada usulan dari Dewan Komisaris terhadap calon anggota Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi). Shareholders effectively participate in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. (Not Applicable because in 2024 there were no new appointments of Directors and candidates for the Board of Commissioners came from the Ministry of SOEs as Shareholders, so there were no proposals from the Board of Commissioners for candidates for the Board of Commissioners based on the considerations of the Nomination and Remuneration Committee).
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	Explain	Dalam Undangan RUPS LPT Tahun 2023, Perusahaan belum memberikan penjelasan dalam agenda terkait calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS dan juga belum memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. In the Invitation to the 2023 GMS for the Annual Report, the Company has not provided an explanation in the agenda related to the prospective external auditor to be appointed or reappointed in the GMS and also has not ensured that the external auditor attends the GMS and is obliged to answer questions from shareholders related to the audit of the financial statements.
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The delivery of voting results and a complete summary of the GMS minutes are announced to the	Explain	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. Namun Risalah RUPS belum memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. Selain itu, Website Perusahaan telah mengungkapkan informasi penyelenggaraan RUPS selama 10 (sepuluh) tahun, meliputi informasi: Pengumuman RUPS, Ringkasan Risalah RUPS LPT dan RKAP, serta Laporan Tahunan. Namun website belum memuat materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain hasil pemungutan suara, termasuk penjelasan agenda RUPS. The minutes of the GMS are informed to the shareholders no later than 30 working days after the GMS. However, the GMS Minutes do not contain the questions asked by the shareholders and the answers given by the chairman of the meeting or the party answering. In addition, the Company's website has disclosed information on the organization of the GMS for 10 (ten) years, including information: Announcement of GMS, Summary of Minutes of the GMS for the Annual Report and the Corporate Work Plan and Budget, and Annual Report. However, the website does not yet contain meeting materials, reports and related documents which include, among others, voting results, including an explanation of the GMS agenda.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
Prinsip 8. Penghargaan Terhadap Pemangku Kepentingan Principle 8. Awards for Stakeholders			
8.1	Keterlibatan Pemangku kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement) Stakeholder Engagement		
8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation, through the Corporate Secretary, conducts regular, transparent, and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and complaints as well as the corporation's impact on them.	Explain	Perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan telah menjalankan komunikasi yang secara regular, transparan, dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci. Proses identifikasi dan pemilihan pemangku kepentingan utama telah dilakukan, serta tersedia saluran untuk menyampaikan masukan dan keluhan, termasuk melalui <i>Whistleblowing System</i> . Perusahaan juga telah mengungkap pendekatan dalam menjalin keterlibatan, namun belum mengungkapkan frekuensi keterlibatan dengan masing-masing pemangku kepentingan utama. The Company through the Corporate Secretary has conducted regular, transparent and effective communication with key stakeholders. The process of identifying and selecting key stakeholders has been carried out, and channels are available to convey input and complaints, including through the Whistleblowing System. The Company has also disclosed its approach to engagement, but has not disclosed the frequency of engagement with each key stakeholder.
8.2	Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis Integration of Sustainability in Business Model		
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners, together with the Board of Directors, are responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including setting the corporation's sustainability strategies, priorities, and targets. The Board of Directors and the Board of Commissioners incorporate sustainability considerations in carrying out their roles, including in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans, and risk management.	Apply	Dewan Komisaris bersama Direksi memegang tanggung jawab atas tata kelola keberlanjutan secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan Perusahaan, serta memastikan bahwa seluruh strategi dan capaian kinerja keberlanjutan dikomunikasikan secara jelas kepada para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif mengikuti dan memahami isu-isu keberlanjutan yang relevan bagi kelangsungan bisnis Perusahaan, di mana evaluasi kinerja keduanya juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan yang signifikan. Sebagai bentuk penguatan struktur keberlanjutan, Direksi telah membentuk Komite <i>Sustainability</i> yang diketuai oleh Executive Vice President (EVP) Transisi Energi dan Keberlanjutan untuk memastikan integrasi aspek keberlanjutan dalam seluruh proses bisnis Perusahaan. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for responsible, transparent and accountable sustainability governance, including in setting the Company's sustainability strategies, priorities and targets, and ensuring that all sustainability strategies and performance achievements are clearly communicated to stakeholders. In carrying out their oversight function, the Board of Commissioners and Board of Directors actively follow and understand sustainability issues relevant to the Company's business continuity, where their performance evaluation also includes oversight of the management of significant sustainability risks and opportunities. To strengthen the sustainability structure, the Board of Directors has established a Sustainability Committee chaired by the Executive Vice President (EVP) of Energy Transition and Sustainability to ensure the integration of sustainability aspects throughout the Company's business processes.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Description
8.3 Perlindungan Terhadap Pemangku Kepentingan Protection for Stakeholders			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the implementation of high standards of ethics, social, and environmental responsibility throughout the corporation, and ensures that appropriate policies and procedures are applied to respect and comply with the rights of stakeholders.	Apply	Direksi telah memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan secara etis, bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dan transparan, serta menghormati hak-hak semua pemangku kepentingan. The Board of Directors has ensured that all company activities are conducted in an ethical, socially and environmentally responsible and transparent manner, while respecting the rights of all stakeholders.
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work in the long-term interest of the corporation and to prioritize sustainability.	Explain	Direksi mendorong karyawan untuk bekerja demi kepentingan jangka panjang Perusahaan dengan mengedepankan aspek keberlanjutan, di antaranya melalui pemberlakuan remunerasi berbasis kinerja yang mempertimbangkan unsur risiko, pengembangan program manajemen SDM yang efektif, serta pembentukan Dana Pensiun PLN yang dikelola secara independen. Namun demikian, Perusahaan saat ini belum memiliki kebijakan insentif jangka panjang (<i>Long Term Incentive/LTI</i>) yang dapat mendukung penciptaan nilai berkelanjutan dan retensi talenta. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the Company by prioritizing sustainability aspects, including through the implementation of performance-based remuneration that considers risk elements, the development of effective HR management programs, and the establishment of an independently managed PLN Pension Fund. However, the Company currently does not have a Long Term Incentive (LTI) policy that can support sustainable value creation and talent retention.

ASEAN Corporate Governance Scorecard

ASEAN Corporate Governance Scorecard

PLN telah memulai proses adopsi terhadap praktik-praktik terbaik berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). ACGS merupakan instrumen penilaian yang dirancang untuk mengukur penerapan GCG berdasarkan parameter yang terstandarisasi di tingkat regional, serta mengacu pada prinsip-prinsip internasional seperti OECD *Principles of Corporate Governance*. Sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola berbasis ACGS, PLN telah melaksanakan pemetaan untuk menilai tingkat kesesuaian dan implementasi praktik tata kelola perusahaan dengan kriteria dan indikator yang ditetapkan dalam ACGS. Penilaian ini dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi area-area yang telah memenuhi standar, serta aspek-aspek yang memerlukan peningkatan lebih lanjut guna mencapai keselarasan dengan benchmark regional. Rincian hasil pemetaan berdasarkan ACGS untuk tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

PLN has begun the process of adopting best practices based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). ACGS is an assessment instrument designed to measure the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on standardized parameters at the regional level, as well as referring to international principles such as the OECD Principles of Corporate Governance. As part of the process to strengthen governance based on ACGS, PLN has conducted a mapping to assess the level of conformity and implementation of corporate governance practices with the criteria and indicators set out in the ACGS. This assessment is carried out systematically and comprehensively to identify areas that have met the standards, as well as aspects that require further improvement to achieve alignment with regional benchmarks. The detailed results of the mapping based on the ACGS for the year 2024 are presented as follows:



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Pemetaan Penerapan ACGS Tahun 2024

Mapping of the Implementation of ACGS 2024

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
LEVEL 1		
Bagian A Part A	Hak-Hak Dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	
A.1.1	Apakah Perusahaan membayarkan deviden (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; yaitu, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim telah dinyatakan dan (ii) disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk dividen final? Dalam hal perusahaan telah menawarkan dividen scrip (tanda kesediaan membayar deviden), apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at annual general meetings (AGM) for final dividends? In case the company has offered scrip dividend, did the company pay the dividend within 60 days.	Ya Yes
A.2	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus mengetahui peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.	
A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, yang dibuktikan dengan mata acara, untuk menyetujui remunerasi (fee, tunjangan, benefit natura, dan honorarium lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi non eksekutif direktur/komisaris? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/ commissioners?	Ya Yes
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham nonpengendali untuk mencalonkan calon direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	Ya Yes
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham memilih direktur/komisaris secara individu? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	Ya Yes
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	Ya Yes
A.2.5	Apakah risalah RUPST terakhir mencatat bahwa pemegang saham diberikesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	Tidak No
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk seluruh keputusan/setiap mata acara RUPST terkini? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	N/A
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan komisaris dan direksi yang menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan direksi dan direktur utama menghadiri RUPST terakhir? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	Tidak No
A.2.9	Apakah memperbolehkan pemungutan suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>). Does the company allow voting in absentia?	N/A
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	N/A
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan telah menunjuk pihak independen (pengawas/pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPST? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	N/A
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara pada RUPST/RUPSLB terkini untuk semua keputusan? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	N/A
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPST dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	Tidak No
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan alasan dan penjelasan atas setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemanggilan RUPST/sirkuler dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	Tidak No
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan mata acara rapat umum dan/atau meminta diadakannya rapat umum dengan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	Ya Yes
A.3	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan. Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.	
A.3.1	Dalam kasus merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan, yang melibatkan pemegang saham, apakah direksi/dewan komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	N/A
A.4	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi. The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.	
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practice to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	Ya Yes
A.5	Hak suara dan kepemilikan saham Shares and voting rights	
A.5.1	Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada masing-masing kelas saham (misalnya melalui situs yang dimiliki perusahaan/ laporan/Bursa/situs regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website/reports/the stock exchange/the regulator's website)?	Ya Yes



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
A.6	Pemberitahuan RUPST Notice of AGM	
A.6.1	Apakah setiap keputusan yang diambil pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu hal saja, yaitu tidak ada penggabungan beberapa hal menjadi satu keputusan yang sama? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	Ya Yes
A.6.2	Apakah Perusahaan menerjemahkan pemberitahuan RUPS ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada waktu yang sama dalam versi bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	Tidak No
	Apakah pemberitahuan RUPST/Sirkuler memiliki rincian sebagai berikut: Does the notice of AGM/circulars have the following details:	
A.6.3	Apakah profil direksi/dewan komisaris (setidaknya usia, kualifikasi, tanggal penunjukan awal, pengalaman, dan jabatan direktur di perusahaan lain) dalam pemilihan/pemilihan kembali tersedia? Are the profiles of directors/ commissioners (at least age, academic, qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	N/A
A.6.4	Apakah auditor yang ditunjuk/ditunjuk kembali diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	Tidak No
A.6.5	Apakah dokumen surat kuasa dapat diperoleh dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	Tidak No
A.7	Menghindari Insider trading dan penyalahgunaan. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
A.7.1	Apakah direksi/komisaris wajib melaporkan transaksi saham perseroan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	N/A
A.8	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi. Related party transactions by directors and key executives.	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang memerlukan komite direksi/komisaris independen untuk menelaah materi/transaksi pihak berelasi untuk menentukan apakah mereka berada dalam kepentingan terbaik perusahaan? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material/RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	Ya Yes
A.8.2	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan pada agenda tertentu ketika terdapat benturan kepentingan? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	Ya Yes
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas pinjaman kepada direksi/komisaris baik melarang praktik ini atau memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding these practices or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	Tidak No
A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran. Protecting minority shareholders from abusive actions.	

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
A.9.1	Apakah Perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adalah adil dan termasuk dalam kegiatan usaha perusahaan? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arm's length?	Ya Yes
A.9.2	Dalam hal transaksi pihak berelasi membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak berkepentingan? In case of related party transaction requiring shareholders approval, is the decision made by disinterested shareholders?	N/A
Bagian B Part B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
B.1	Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material yang bersifat retrospektif dan berwawasan ke depan yang akan dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara. Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision.	
	Apakah Informasi penting terkait keberlanjutan disebutkan perusahaan? Material Sustainability-related information should be specified	
B.1.1	Apakah Perusahaan mengidentifikasi/ melaporkan ESG topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Ya Yes
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu? Does the company identify climate change as an issue?	Ya Yes
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terintegrasi, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Ya Yes
	Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus menyediakan metrik (standar pengukuran) yang andal dan diungkapkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses. If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form.	
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Ya Yes
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Ya Yes
B.1.6	Apakah perusahaan memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporannya telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Ya Yes
B.2	Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan. Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters.	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Ya Yes
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai permasalahan keberlanjutan yang penting bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Ya Yes
B.3	Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan sistem fisik dan transisi terkait perubahan iklim risiko. The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks. Dewan harus menilai apakah struktur permodalan perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait untuk memastikan ketahanannya terhadap berbagai skenario. Apakah perusahaan mengungkapkan. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios.	
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa direksi melakukan review setiap tahun untuk memastikan struktur modal dan utang perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko yang terkait? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Tidak No
B.4	Perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial. The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises. Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas: Does the company disclose a policy and practices that address:	
B.4.1	Keberadaan dan ruang lingkup upaya perusahaan dalam mengatasi kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Ya Yes
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	Ya Yes
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dengan mendorong pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Ya Yes
B.4.4	Upaya perusahaan untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Ya Yes
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	Tidak No
B.5	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka. Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.	
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak melalui situs perusahaan atau Laporan Tahunan dimana pemangku kepentingan (pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) dapat menggunakannya untuk menyuarkan perhatian dan/atau keluhan mereka terkait kemungkinan pelanggaran atas hak-hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g., customers, suppliers, general public, etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	Ya Yes
B.6	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan. Mechanisms for employee participation should be permitted to develop.	
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety, and welfare for its employees?	Ya Yes
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	Tidak No
B.6.3	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi atas kinerja perusahaan yang dihitung tidak hanya berdasarkan ukuran pencapaian jangka keuangan dalam jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	Tidak No
B.7	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan-badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini. Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this.	
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup tata cara pengaduan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web perusahaan atau laporan tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report?	Ya Yes
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan perilaku ilegal/tidak etis dari pembalasan dendam? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behavior from retaliation?	Ya Yes
Bagian C Part C	Transparansi dan Pengungkapan Disclosure and Transparency	
C.1	Struktur Kepemilikan yang Transparan Transparent Ownership Structure	
C.1.1	Apakah informasi terkait Kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik saham, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	Ya Yes



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung (jika ada) dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	Ya Yes
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham para direksi/dewan komisaris baik langsung dan tidak langsung? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	Ya Yes
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung yang dimiliki oleh manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	Ya Yes
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan secara detail mengenai kelompok usahanya termasuk anak Perseroan, asosiasi, usaha patungan dan special purpose enterprises (SPE)/ special purpose vehicles (SPV)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/(SPVs)?	Ya Yes
C.2	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan item berikut: Does the company's Annual Report disclose the following items:	
C.2.1	Tujuan perusahaan? Corporate objectives?	Ya Yes
C.2.2	Indikator kinerja keuangan? Financial performance indicators?	Ya Yes
C.2.3	Indikator kinerja non-keuangan? Non-financial performance indicators?	Ya Yes
C.2.4	Kebijakan dividen? Dividend policy?	Tidak No
C.2.5	Rincian Biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur/dewan komisaris pada listed company lain? Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners?	Ya Yes
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Confirmation Statement	
C.2.6	Apakah laporan tahunan memuat pernyataan yang menyatakan kepatuhan perusahaan sejalan dengan Pedoman Tata Kelola dan adanya ketidakpatuhan, mengidentifikasi dan menjelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut? Does the annual report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Tidak No
C.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Remuneration of Members of the Board and Key Executives	
C.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi untuk direktur/komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Ya Yes
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan secara publik [yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	Tidak No

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, fasilitas serta imbalan lainnya, yaitu insentif berdasarkan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk anggota Direksi dan Direktur Utama? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	Tidak No
C.3.4	Perusahaan mengungkapkan secara publik (yaitu laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan secara publik) rincian remunerasi masing-masing untuk anggota Direksi dan Direktur Utama? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	Tidak No
C.4	Pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)	
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait review dan persetujuan atas transaksi pihak berelasi yang material/signifikan? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	Ya Yes
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat dan nilai setiap RPT material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Ya Yes
C.5	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan Directors and Commissioners Dealings in Shares of the Company	
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	N/A
C.6	External Auditor and Auditor Report Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	
	Dimana perusahaan audit yang sama bergerak untuk layanan baik audit dan non-audit Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	Tidak No
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	Tidak No
C.7	Media Komunikasi Medium of Communications	
	Apakah perusahaan menggunakan bentuk komunikasi berikut? Does the company use the following modes of communication?	
C.7.1	Pelaporan Kuartalan? Quarterly reporting?	Ya Yes
C.7.2	Website Perusahaan? Company website?	Ya Yes
C.7.3	Briefing Analis? Analyst's briefing?	Ya Yes
C.7.4	Penjelasan media/ konferensi pers? Media briefings/press conferences?	Ya Yes
C.8	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan Timely Filing/Release of Annual/Financial Reports	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
C.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari dari akhir tahun buku? Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	Tidak No
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak dari akhir tahun buku? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Tidak No
C.8.3	Apakah pernyataan kebenaran dan kewajaran dari Laporan Keuangan Tahunan telah ditegaskan oleh Direksi/Dewan Komisaris dan atau pihak yang relevan dalam perusahaan? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Ya Yes
C.9	Website Perusahaan Company Website	
	Apakah perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi terkini dari item berikut: Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:	
C.9.1	Laporan keuangan (triwulanan terbaru)? Financial statements/reports (latest quarterly)?	Tidak No
C.9.2	Materi briefing untuk analis dan media? Materials provided in briefings to analysts and media?	Ya Yes
C.9.3	Laporan tahunan dapat diunduh? Downloadable Annual Reports?	Ya Yes
C.9.4	Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPSLB? Notice of AGM and/or EGM?	Ya Yes
C.9.5	Ringkasan RUPST dan/atau RUPSLB? Minutes of AGM and/or EGM?	Ya Yes
C.9.6	Anggaran dasar perusahaan? Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)?	Tidak No
C.10	Hubungan Investor Investor Relations	
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, fax, dan email) dari petugas yang bertanggung jawab dalam hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer responsible for investor relations?	Ya Yes
Bagian D Part D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
D.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Board Duties and Responsibilities	
	Kejelasan tanggung jawab Dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan Clearly defined board responsibilities and corporate governance policies	
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?	Ya Yes
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan direksi/dewan komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners approval disclosed?	Ya Yes
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab direksi/dewan komisaris diungkapkan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
Visi/Misi Perusahaan Corporate Vision/Mission		
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki visi dan misi yang terkini/update/diperbaharui? Does the company have an updated vision and mission statement?	Ya Yes
D.1.5	Apakah direksi memainkan peran utama dalam proses mengembangkan dan meninjau ulang strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	Ya Yes
D.1.5	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Ya Yes
D.2	Struktur Dewan Board Structure	
Pedoman Etika atau perilaku Code of Ethics or Conduct		
D.2.1	Apakah rincian pedoman etika atau perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Ya Yes
D.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi Kode Etik? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	Ya Yes
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the codes of ethics or conduct?	Ya Yes
Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition		
D.2.4	Apakah komposisi komisaris independen memenuhi setidaknya 50% dari total dewan komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	Ya Yes
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batasan jangka waktu sembilan tahun atau kurang atau 2 periode dalam jangka waktu lima tahun* masing-masing untuk para direktur/komisaris independen? * Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years* each for its independent directors/commissioners? * The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	Ya Yes
D.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batasan lima jabatan di perusahaan terbuka secara bersamaan bagi masing-masing direksi/komisaris? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	N/A
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua perusahaan yang terdaftar di luar grup perusahaan? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	Ya Yes



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
Komite Nominasi Nominating Committee		
D.2.8	Apakah perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	Ya Yes
D.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	Ya Yes
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi berasal dari komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	Tidak No
D.2.12	Apakah tingkat kehadiran Komite Nominasi dalam rapat diungkapkan, dan jika iya apakah Komite Nominasi rapat setidaknya dua kali dalam satu tahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	Ya Yes
Komite Remunerasi/ Komite Kompensasi Remuneration Committee/Compensation Committee		
D.2.13	Apakah perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	Ya Yes
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari Dewan Komisaris dengan sebagian besar komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	N/A
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi berasal dari komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes
D.2.16	Apakah Komite Remunerasi mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?	Tidak No
D.2.17	Apakah Komite Remunerasi mengungkapkan tingkat kehadiran dalam rapat yang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee at least twice during the year?	Ya Yes
Komite Audit Audit Committee		
D.2.18	Apakah perusahaan mempunyai Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	Ya Yes
D.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Dewan Komisaris dengan sebagian besar merupakan komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	N/A
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit berasal dari komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	Ya Yes
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/ struktur tata kelola/ piagam Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Audit Committee?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
	D.2.22 Apakah tingkat kehadiran anggota pada rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun? Does at least one of the independent directors/ commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	Ya Yes
	D.2.23 Apakah salah satu komisaris independen pada komite setidaknya memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	Ya Yes
	D.2.24 Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan, dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	Ya Yes
D.3	Proses Dewan Board Processes	
	Rapat dan tingkat kehadiran Dewan Board meetings and attendance	
	D.3.1 Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum tahun anggaran dimulai? Are the board of directors meetings scheduled before the start of financial year?	Tidak No
	D.3.2 Apakah direksi/dewan komisaris mengadakan rapat minimal enam kali dalam satu tahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times per year?	Ya Yes
	D.3.3 Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari total rapat direksi/dewan komisaris yang diadakan dalam setahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Tidak No
	D.3.4 Apakah perusahaan menetapkan minimal kuorum 2/3 dalam menentukan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Tidak No
	D.3.5 Apakah dewan komisaris perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya sekali selama setahun tanpa dihadiri pihak eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	Ya Yes
	Akses Informasi Access to Information	
	D.3.6 Apakah surat undangan rapat direksi/dewan komisaris diberikan kepada direksi/dewan komisaris paling lambat lima hari kerja sebelum rapat diadakan? Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	Tidak No
	D.3.7 Apakah sekretaris perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung dewan menjalankan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Ya Yes
	D.3.8 Apakah sekretaris perusahaan diberikan pelatihan mengenai hukum (legal), akuntansi atau pelaksanaan kesekretariatan perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	Tidak No
	Penunjukkan Dewan dan Pemilihan Kembali Board Appointments and Re-election	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Tidak No
D.3.10	Apakah perusahaan mengungkapkan alur proses penunjukan direktur/komisioner? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	Ya Yes
D.3.11	Apakah semua direktur/komisioner dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan terdaftar di negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun**? ** Masa jabatan lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN CG Scorecard pada tahun 2011. Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years** each? ** The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	Ya Yes
Masalah Remunerasi Remuneration Matters		
D.3.12	Apakah Pemegang Saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Ya Yes
D.3.13	Apakah perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti penerapan pengambilan kembali dana/keuntungan kepada individu jika penerima tidak memenuhi syarat yang disepakati/melanggar kontrak) dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	Tidak No
Audit Internal Internal Audit		
D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi auditor internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	Ya Yes
D.3.15	Apakah kepala auditor internal diidentifikasi atau jika <i>outsourcing</i> , nama perusahaan eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Ya Yes
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	Tidak No
Pemantauan Risiko Risk Oversight		
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala mereview keefektifan kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
D.3.18	Apakah laporan tahunan mengungkapkan bahwa direksi/komisaris telah melakukan review terhadap pengendalian perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko? Does the Annual Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	Ya Yes
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	Ya Yes
D.3.20	Apakah laporan tahunan memuat pernyataan dari Dewan Komisaris atau Komite Audit terkait kecukupan pengendalian internal perusahaan/ sistem manajemen risiko? Does the Annual Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	Ya Yes
D.4	Posisi Dewan People on the Board	
	Komisaris Utama Board Chairman	
D.4.1	Apakah yang menjabat sebagai komisaris utama dan direktur utama adalah orang yang berbeda? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Ya Yes
D.4.2	Apakah komisaris utama adalah seorang komisaris independen? Is the chairman an independent director/ commissioner?	Ya Yes
D.4.3	Apakah terdapat salah satu Direktur yang merupakan mantan Direktur Utama perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	Ya Yes
D.4.4	Apakah tugas dan tanggung jawab komisaris utama diungkapkan? Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	Ya Yes
	Direktur Independen Senior Lead Independent Director	
D.4.5	Jika komisaris utama tidak independen, apakah direksi dan dewan komisaris mengangkat seorang komisaris independen senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	Ya Yes
	Keahlian dan Kompetensi Skills and Competencies	
D.4.6	Apakah terdapat setidaknya satu komisaris yang memiliki pengalaman kerja pada sebagian besar sektor dimana perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	Ya Yes
D.5	Kinerja Dewan Board Performance	
	Pengembangan Anggota Direksi Directors Development	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program pengenalan bagi direksi/ komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/ commissioners?	Ya Yes
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan praktik serta program aktual yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berjalan atau yang berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/ commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Ya Yes
Kinerja dan Kontrak Manajemen Eksekutif/Direktur Utama CEO/Executive Management Appointments and Performance		
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana Direksi/komisaris menyusun rencana suksesi direktur utama dan manajemen utama? Does the company disclose how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Tidak No
D.5.4	Apakah direksi/dewan komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan direktur utama? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Ya Yes
Penilaian Dewan (secara kolegal) Board Appraisal		
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan direksi/dewan komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Ya Yes
Penilaian Direktur/Komisaris (Individu) Director Appraisal		
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of individual director/ commissioner and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Tidak No
Penilaian Komite Committee Appraisal		
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah direksi dan dewan komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Tidak No
LEVEL 2		
Level 2 (Bonus Items)		
Bagian (B)A Part (B)A	Hak-Hak dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan harus diberitahu terkait aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan menyediakan dan menerapkan mekanisme pemungutan suara secara elektronik, yang aman dan real-time, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	Ya Yes

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
(B)A.2	Panggilan RUPS Notice of AGM	
(B)A.1.1	Apakah perusahaan menerbitkan panggilan RUPS (dengan rincian agenda dan penjelasannya) yang diumumkan pada Pemegang Saham, paling lambat 28 hari sebelum tanggal rapat (RUPS)? Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	Tidak No
Bagian (B)B Part (B)B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	
B.1		
(B)B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan cara mereka mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Ya Yes
(B)B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan Laporan keberlanjutan/Sustainability Reporting miliknya yang terjamin secara eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report / Sustainability Reporting is externally assured?	Ya Yes
(B)B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan merespon perhatian pemangku kepentingan terhadap ESG? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Ya Yes
(B)B.1.4	Apakah perusahaan mempunyai unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab mengelola urusan keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Ya Yes
(B)B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Ya Yes
(B)B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana pencapaian atau hasil keberlanjutan tahun sebelumnya mempengaruhi jumlah remunerasi yang diterima oleh direktur eksekutif dan manajemen senior? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Tidak No
(B)B.1.7	Apakah <i>Whistleblowing System</i> perusahaan dikelola oleh pihak / institusi independen? Is the company's Whistleblowing System managed by independent parties / institutions?	Tidak No
Bagian (B)C Part (B)C	Transparansi dan Pengungkapan Disclosure and Transparency	
(B)C.1	Kualitas Laporan Tahunan Quality of Annual Report	
(B)C.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan audited dirilis dalam waktu 60 hari dari akhir tahun keuangan ? Are the audited annual financial report/statement released within 60 days from the financial year end?	Tidak No
Bagian (B)D Part (B)D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	
(B)D.1	Kompetensi dan Keberagaman Dewan Board Competencies and Diversity	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
(B)D.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu orang Direksi/Komisaris Independen yang perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	Tidak No
(B)D.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan indikator tujuan atas implementasi keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris termasuk laporan perkembangan atas pencapaian tujuan tersebut? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	Tidak No
(B)D.2	Struktur Dewan Board Structure	
(B)D.2.1	Apakah Komite Nominasi seluruhnya terdiri dari Direksi/Komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	N/A
(B)D.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses identifikasi kandidat Direktur sejalan dengan arahan strategi Perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company' strategic directions?	Ya Yes
(B)D.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Board Appointments and Re-Election	
(B)D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan jasa profesional dalam mencari kandidat Direksi/Dewan Komisaris (berdasarkan database Direksi maupun dari usulan pemegang saham)? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/ commissioners?	N/A
(B)D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure & Composition	
(B)D.4.1	Apakah komposisi Komisaris Independen lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	Tidak No
(B)D.5	Pemantauan Risiko Risk Oversight	
(B)D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewannya mengidentifikasi risiko utama terkait dengan teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	Ya Yes
(B)D.6	Kinerja Dewan Board Performance	
(B)D.6.1	Apakah Perusahaan memiliki Komite Risiko secara terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	Ya Yes
Level 2 (Penalti Penalty)		
Bagian (P)A Part (P)A	Hak Pemegang Saham dan Perlakuan Setara Terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	
(P)A.1	Hak Dasar Pemegang Saham Basic Shareholder Rights	

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai untuk menawarkan secara adil terkait pembelian kembali saham kepada para pemegang saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	N/A
(P)A.2	Pemegang Saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi dengan satu sama lain pada isu-isu tentang hak-hak dasar pemegang saham seperti yang didefinisikan dalam Prinsip, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	
(P)A.2.1	Apakah ada bukti hambatan yang mencegah pemegang saham saling berkomunikasi atau konsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	Tidak No
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan harus diberitahu tentang aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan item agenda tambahan dan mendadak (darurat) ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	Tidak No
(P)A.3.2	Apakah Komisaris Utama, Ketua Komite Audit dan direktur utama menghadiri RUPS terakhir? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	Tidak No
(P)A.4	Struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu melakukan pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya, harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
	Apakah perusahaan lalai untuk mengungkapkan adanya: Did the company fail to disclose the existence of:	
(P)A.4.1	Kesepakatan dengan Pemegang Saham? Shareholders agreement?	N/A
(P)A.4.2	Kekuatan lebih yang dimiliki Pemegang Saham dalam mempengaruhi Perusahaan melalui voting? Voting cap?	N/A
(P)A.4.3	Hak suara ganda? Multiple voting rights?	N/A
(P)A.5	Struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan saham mereka harus diungkapkan. Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Adakah struktur kepemilikan saham Perusahaan berbentuk piramid dan/atau kepemilikan saham secara silang, jelas terlihat? Is a pyramid ownership structure and/or cross holding structure apparent?	Tidak No
(P)A.6	Perdagangan orang dalam (insider trading) dan penyalahgunaan transaksi sendiri harus dilarang. Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.	
(P)A.6.1	Pernakah ada hukuman terhadap insider trading yang melibatkan Direksi/Dewan Komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	N/A
(P)A.7	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan tidak adil. Protecting minority shareholders from abusive action.	



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
(P)A.7.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non-compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	Tidak No
(P)A.7.2	Apakah ada transaksi pihak berelasi yang dapat digolongkan sebagai bantuan keuangan (yang tidak dilakukan secara wajar) untuk entitas selain anak perusahaan yang dimiliki secara penuh? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e. not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	Tidak No
Bagian (P)B Part (P)B	Peran Pemangku Kepentingan Role of Stakeholders	
(P)B.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)B.1.1	Pernakah ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perburuan (berserikat)/ketenagakerjaan/konsumen/ kepailitan/komersial/kompetisi atau isu-isu lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/consumer/insolvency/commercial/ competition or environmental issues?	Ya Yes
(P)B.2	Stakeholder berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai dan handal secara tepat waktu dan teratur. Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	
(P)B.2.1	Apakah Perusahaan telah mendapatkan sanksi dari regulator terkait kelalaian dalam membuat pengumuman sesuai periode waktu? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	Tidak No
(P)B.2.2	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan melakukan kegiatan greenwashing (informasi palsu/menyesatkan terkait produk yang ramah lingkungan)? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	Tidak No
Bagian (P)C Part (P)C	Transparansi dan Pengungkapan Disclosure and Transparency	
(P)C.1	Sanksi dari Regulator pada Laporan Keuangan Sanctions from regulator on financial reports	
(P)C.1.1	Apakah laporan keuangan perusahaan mendapatkan "pendapat wajar dengan pengecualian" dari auditor eksternal? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	Tidak No
(P)C.1.2	Apakah laporan keuangan perusahaan mendapatkan "pendapat tidak wajar" dari auditor eksternal? Did the company receive a "adverse opinion" in its external audit report?	Tidak No
(P)C.1.3	Apakah laporan keuangan perusahaan mendapatkan opini "menolak memberi pendapat" dari auditor eksternal? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	Tidak No
(P)C.1.4	Apakah perusahaan telah merevisi laporan keuangan tahun lalu di luar alasan perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	Tidak No
Bagian (P)D Part (P)D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of The Board	
(P)D.1	Kepatuhan terhadap aturan listing, peraturan dan hukum yang berlaku. Compliance with listing rules, regulations and applicable laws.	

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Item	Standar Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Standard	Status Pemenuhan Fulfillment Status
(P)D.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pencatatan selain peraturan pengungkapan selama setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	Tidak No
(P)D.1.2	Apakah pernah terjadi kasus dimana Direksi/ Dewan Komisaris non eksekutif mengundurkan diri dan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	Tidak No
(P)D.2	Struktur Dewan Board Structure	
(P)D.2.1	Apakah perusahaan mempunyai direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun* (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama? * Jangka waktu lima tahun harus diwajibkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011 Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years* each (which ever is higher) in the same capacity? * The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	Tidak No
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan tepat gambaran seluruh direktornya sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	Tidak No
(P)D.2.3	Apakah perusahaan mempunyai direktur /komisaris independen yang menjabat di lebih dari lima dewan di perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non- executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	Tidak No
(P)D.3	Audit Eksternal External Audit	
(P)D.3.1	Apakah ada di antara direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	Tidak No
(P)D.4	Struktur dan Komposisi Dewan Board Structure and Composition	
(P)D.4.1	Apakah Komisaris Utama pernah menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the Chairman been the company CEO in the last three years?	Tidak No
(P)D.4.2	Apakah non eksekutif direktur/komisaris menerima saham hasil kinerja atau bonus ? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	Tidak No



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Guidelines for Governance of Public Companies

Sebagai bagian dari langkah strategis dalam memperkuat sistem tata kelola yang baik, PLN telah menginisiasi pemetaan atas penerapan GCG berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Inisiasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan telah selaras dengan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi utama yang tercantum dalam pedoman tersebut. Kegiatan pemetaan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen evaluatif, namun juga sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut yang terarah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola yang berkelanjutan. Hasil pemetaan atas penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka selama periode pelaporan, terdapat 11 status comply dan 14 status explain, sebagaimana tabel berikut:

As part of a strategic step to strengthen a good governance system, PLN has initiated a mapping of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on the Guidelines for Governance of Public Companies as regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of the Guidelines for Governance of Public Companies, as well as the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on the Guidelines for Governance of Public Companies. This initiative aims to assess the extent to which the application of GCG principles within the Company aligns with the 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) key recommendations outlined in the guidelines. This mapping activity is intended not only as an evaluative instrument but also as a basis for formulating a targeted follow-up plan to improve the quality of sustainable governance. The results of the mapping of the implementation of the Guidelines for Governance of Public Companies during the reporting period showed 11 'comply' statuses and 14 'explain' statuses, as detailed in the following table:

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Guidelines for Governance of Public Companies

Rekomendasi Recommendation	Status	Penjelasan Explanation
Aspek A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A. Relationship of Public Companies with Shareholders to Guarantee Shareholders' Rights		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1. Improving Values of the Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS).		
1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. A Public Company has methods or technical procedures for collecting votes (voting), whether openly or secretly, that prioritize independence and the interests of shareholders.	Explain	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait pemungutan suara dalam RUPS sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar. Perusahaan dimiliki 100% oleh Pemerintah RI, sehingga tidak diperlukan mekanisme voting dalam pengambilan Keputusan pada RUPS. The Company has established a policy regarding voting in the GMS as stipulated in the Articles of Association. The Company is 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, so a voting mechanism is not required for adopting resolutions in the GMS.
1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company attend the Annual GMS.	Explain	Terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang Direksi tidak menghadiri RUPST RKAP. Dewan Komisaris tidak hadir dikuasakan kepada Anggota Dewan Komisaris lain dan Direksi tidak hadir dikuasakan kepada Anggota Direksi lainnya. Terdapat 1 (satu) orang Anggota Dewan Komisaris yang tidak menghadiri RUPST Laporan Tahunan dan dikuasakan kepada Anggota Dewan Komisaris lain. There was 1 (one) member of the Board of Commissioners and 1 (one) member of the Board of Directors who did not attend the AGMS for the Work Plan and Budget (RUPST RKAP). The absent Board of Commissioners member did not grant power of attorney to another Board of Commissioners member, and the absent Board of Directors member did not grant power of attorney to another member of the Board of Directors. There was 1 (one) Board of Commissioners member who did not attend the AGMS for the Annual Report and granted power of attorney to another Board of Commissioners member.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
1.3.	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The summary minutes of the GMS are available on the Company's Website for at least 1(one) year.	<i>Explain</i>	Perusahaan telah mempublikasikan Ringkasan Risalah RUPS LPT dan RUPS RKAP dalam website Perusahaan, namun belum mempublikasikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dalam website Perusahaan, paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The Company has published the Summary Minutes of the GMS for the Annual Report and the Work Plan and Budget on the Company's website, but has not yet published the Summary Minutes of the Extraordinary GMS on the Company's website for at least 1(one) year.
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Enhancing the Quality of Communication of Public Companies with Shareholders or Investors			
2.1	Perusahaan memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Company has a communication policy with shareholders or investors.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum memiliki kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor secara rinci, yang memuat strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. The Company does not yet have a detailed communication policy with Shareholders or Investors, which includes strategies, programs, and timing of communication, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in such communication.
2.2	Perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan dengan pemegang saham atau investor dalam situs web. The Company discloses its communication policy with shareholders or investors on its website.	<i>Explain</i>	Perusahaan belum mengungkapkan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dalam website Perusahaan. The Company has not disclosed the Communication Policy with Shareholders or Investors on the Company's website.
Aspek B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B. Functions and Roles of the Board of Commissioners			
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3. Strengthening Membership and Composition of the Board of Commissioners			
3.1.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan. The determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the Company's condition.	<i>Comply</i>	Per 31 Desember 2024, Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 5 Komisaris Independen dan 6 Komisaris, Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilengkapi dengan charter Komite Nominasi dan Remunerasi. As of December 31, 2024, the Company's Board of Commissioners consists of 10 (ten) members, comprising 5 Independent Commissioners and 6 Commissioners. The number of members of the Board of Commissioners does not exceed the number of members of the Board of Directors. The Company has established a Nomination and Remuneration Committee, which is supported by a Nomination and Remuneration Committee charter.
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Commissioners members considers the diversity of skills, knowledge, and experience required.	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Tahun 2024 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris dalam <i>website</i> Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan. The composition of the Company's Board of Commissioners in 2024 considered diverse backgrounds in terms of skills, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. This can be seen from the profiles of each Board of Commissioners member on the Company's website and in the Company's Annual Report.
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Commissioners			
4.1.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance.	<i>Explain</i>	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. The Board of Commissioners has not yet established a self-assessment policy, which serves as a guideline used as a form of accountability for the collective performance evaluation of the Board of Commissioners.



Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Company's Annual Report.	Explain	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023 telah mengungkapkan kebijakan dan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Dewan Komisaris secara lengkap belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang didalamnya menjelaskan pengaturan terkait maksud dan tujuan penilaian, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan. The Company's 2023 Annual Report disclosed the policy and process for evaluating the performance of the Board of Commissioners. However, the full self-assessment policy of the Board of Commissioners, including explanations regarding the purpose and objectives of the assessment, the periodic timing of its implementation, and the benchmarks or evaluation criteria used based on recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee, had not been fully disclosed in the Annual Report.
4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of Board members if involved in financial crimes.	Explain	Dewan Komisaris belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. The Board of Commissioners has not yet established a resignation policy for members involved in financial crimes, a policy that could enhance stakeholder confidence in the Public Company and help maintain the Company's integrity.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee responsible for Nomination and Remuneration functions formulates a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	Comply	Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki kebijakan/charter Komite Nominasi dan Remunerasi yang mencakup pengaturan terkait kebijakan suksesi Direksi. The Nomination and Remuneration Committee has established a policy/charter that includes regulations related to the succession policy for the Board of Directors.
Aspek C. Fungsi dan Peran Direksi Aspect C. Functions and Roles of the Board of Directors			
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5. Strengthening Membership and Composition of the Board of Directors			
5.1.	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. The determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Public Company as well as the effectiveness of decision-making.	Comply	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Komposisi Direksi Perusahaan sampai dengan akhir Desember 2024 adalah 10 (sepuluh) orang. Perusahaan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah dilengkapi dengan charter Komite Nominasi dan Remunerasi yang di dalamnya telah mencakup pengaturan terkait prosedur nominasi anggota Direksi. The determination of the number of members of the Board of Directors had considered the Company's condition by referring to the Articles of Association and applicable laws and regulations. As of the end of December 2024, the Company's Board of Directors consisted of 10 (ten) members. The Company established a Nomination and Remuneration Committee, which is equipped with a Nomination and Remuneration Committee Charter that includes provisions related to the nomination procedures for members of the Board of Directors.
5.2.	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The determination of the composition of the Board of Directors considers the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	Comply	Komposisi Direksi Perusahaan Tahun 2024 telah memperhatikan latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan Perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi dalam <i>website</i> Perusahaan dan Laporan Tahunan Perusahaan. The composition of the Company's Board of Directors in 2024 reflects diverse backgrounds in terms of expertise, knowledge, and experience aimed at supporting the Company's development. This is evident from the profiles of each member of the Board of Directors available on the Company's website and in the Company's Annual Report.

Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee accounting and finance must possess expertise and/or knowledge in the field of accounting	Comply	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan telah memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Tahun 2024, Direktur Keuangan Perusahaan dijabat oleh Sdri. Sinthya Roesly pernah menjabat sebagai Divisi Keuangan dan Niaga PT PLN (Persero)(1996-2003). The member of the Board of Directors responsible for accounting and finance possesses expertise and/or knowledge in the field of accounting. In 2024, the position of Finance Director was held by Ms. Sinthya Roesly, who previously served in the Finance and Commerce Division of PT PLN (Persero) (1996-2003).
Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6. Improving the Quality of Duties and Responsibilities Implementation of the Board of Directors			
6.1.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors.	Explain	Direksi belum memiliki kebijakan Penilaian Sendiri atau <i>Self Assessment</i> Direksi (pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal). The Board of Directors does not yet have a Self-Assessment Policy (a guideline used as a form of accountability for evaluating the performance of the Board of Directors collectively).
6.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Directors is disclosed in the Company's annual report.	Explain	Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2023 telah mengungkapkan proses penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai Direksi secara lengkap belum diungkapkan dalam Laporan Tahunan yang didalamnya menjelaskan pengaturan terkait maksud dan tujuan penilaian, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan. The Company's 2023 Annual Report had disclosed the process for evaluating the performance of the Board of Directors. However, the self-assessment policy for evaluating the Board of Directors had not been fully disclosed in the Annual Report, including the provisions regarding the purpose and objectives of the assessment, the periodic implementation timeline, and the benchmarks or evaluation criteria used based on the recommendations provided by the Company's Nomination and Remuneration Committee.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if involved in financial crimes.	Explain	Direksi belum memiliki kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors does not yet have a policy on the resignation of Board members involved in financial crimes.
Aspek D. Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D. Stakeholder Engagement			
Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7. Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Engagement			
7.1	Perusahaan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . The Company has a policy to prevent insider trading.	Explain	Perusahaan belum memandang perlu memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> dikarenakan status Perusahaan belum <i>listed</i> (memperdagangkan saham). The Company does not yet deem it necessary to have a policy to prevent insider trading, as the Company is not listed (does not trade shares).
7.2	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . The Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Comply	Perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud sebagaimana diatur dalam Kebijakan Anti Fraud, Pedoman SMAP, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan Benturan Kepentingan dan Kebijakan LHKPN. The Company has anti-corruption and anti-fraud policies as stipulated in the Anti-Fraud Policy, ABMS Guidelines, Gratuity Policy, Conflict of Interest Policy, and LHKPN Policy.
7.3	Perusahaan memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Company has a policy on the selection and capacity-building of suppliers or vendors.	Comply	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diunggah dalam situs website Perusahaan. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. The Company has established a Goods and Services Procurement Policy, which has been uploaded to the Company's website. The scope of this policy includes criteria for selecting suppliers or vendors, efforts to enhance supplier or vendor capabilities, transparent procurement mechanisms, and the fulfillment of rights related to suppliers or vendors.



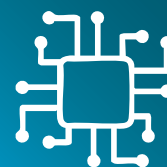
Penerapan atas Pedoman Governansi Perusahaan

Implementation of Corporate Governance Guidelines

Rekomendasi Recommendation		Status	Penjelasan Explanation
7.4	Perusahaan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.	Explain	Perusahaan telah memiliki kebijakan secara umum mengenai pemenuhan hak-hak kreditur dan tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada kreditur sebagaimana yang diatur dalam Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> terkait Kebijakan Perlindungan Hak dan Kepentingan Kreditur. Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> terkait Kebijakan Perlindungan Hak dan Kepentingan Kreditur belum mengatur pertimbangan dalam melakukan perjanjian. The Company has a general policy regarding the fulfillment of creditors' rights and the follow-up actions in fulfilling the Company's obligations to creditors, as stipulated in the Good Corporate Governance Guidelines related to the Policy on the Protection of Creditors' Rights and Interests. However, the Good Corporate Governance Guidelines do not yet regulate considerations in entering into agreements.
7.5	Perusahaan memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . The Company has a whistleblowing system policy.	Comply	Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>). The Company already has a policy related to the whistleblowing system.
7.6	Perusahaan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Company has a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	Explain	Dalam praktiknya, Perusahaan telah pemberian insentif jangka pendek kepada Direksi berdasarkan pencapaian dalam tahun buku sebelumnya atas capaian kinerja Direksi. Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. In practice, the Company has provided short-term incentives to the Board of Directors based on achievements in the previous fiscal year in relation to Board of Directors' performance. However, the Company does not yet have a policy on providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.
Aspek E. Keterbukaan Informasi Aspect E. Information Disclosure			
Prinsip 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8. Enhancing the Implementation of Information Disclosure			
8.1	Perusahaan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Company utilizes information technology more broadly, beyond just the website, as a medium for information disclosure.	Comply	Perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi secara lebih luas. Selain <i>website</i> , Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media lainnya seperti majalah dan <i>platform</i> media sosial, yaitu: • Instagram : pln123_official • Twitter : @pln_123 • Facebook : PLN 123 • Youtube : @PTPLNPersero The Company has utilized information technology more broadly. In addition to its website, the Company uses of information technology and other media applications such as magazines and social media platforms, namely: • Instagram: pln123_official • Twitter: @pln_123 • Facebook: PLN 123 • YouTube: @PTPLNPersero
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owners of at least 5% (five percent) of the shares in the Public Company, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owners through the majority and controlling shareholder.	Comply	Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2023, Sampai dengan 31 Desember 2024, Pemegang Saham mayoritas PT PLN (Persero) adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka persentase kepemilikan saham 5% atau lebih adalah oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. As disclosed in the 2023 Annual Report, as of December 31, 2024, the majority shareholder of PT PLN (Persero) is the Government of the Republic of Indonesia. Accordingly, the ownership of 5% or more of the Company's shares is held by the Government of the Republic of Indonesia.



Photo by Balqis Isnaini
UIP JBB



Teknologi Informasi

Information Technology



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan digital memberikan dorongan pada Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proses bisnis melalui pengembangan sistem dan teknologi informasi yang mampu mengoptimalkan operasional bisnis, memberikan nilai tambah serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam waktu yang relatif singkat. PLN memerlukan dukungan TI yang modern dan mengadaptasi tren teknologi seperti *big data analytics*, *integration system*, *cloud computing*, *mobility*, *social media*, *Internet of Things (IoT)*, *artificial intelligence*, *Enterprise Resource Planning (ERP)*, *Enterprise Asset Management (EAM)* dan sebagainya.

Platform aplikasi korporat dan pelayanan pelanggan, pengembangan *Advanced Metering Infrastructure (AMI)*, implementasi *big data analytics* serta penguatan integrasi data melalui pembangunan *Management Information System (MIS)* menuju *Single Source of Truth (SSoT)* menjadi fokus mendasar dalam pengembangan layanan TI selama 2024. Dukungan TI diselaraskan dengan kebutuhan bisnis korporat dalam mencapai Transformasi Digital PLN dengan memperhatikan standar global ataupun *benchmark* serta memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan TI.

The development of information technology (IT) and digital encourages the Company to continuously improve the efficiency and effectiveness of business process management through the development of information systems and technologies capable of optimizing business operations, providing added value, and supporting decision-making processes within a relatively short time. PLN requires modern IT support that adapts to technology trends such as big data analytics, integration systems, cloud computing, mobility, social media, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM), and others.

Corporate application platforms and customer service, development of Advanced Metering Infrastructure (AMI), implementation of big data analytics, as well as strengthening data integration through the development of a Management Information System (MIS) toward a Single Source of Truth (SSoT) become fundamental focuses in IT service development throughout 2024. IT support is aligned with the corporate business needs to achieve PLN's Digital Transformation by considering global standards and benchmarks as well as adhering to IT development principles.

Fungsi Pengelola TI

IT Management Function

Fungsi pengelola TI berada di Divisi Sistem dan Teknologi Informasi (DIVSTI) dan Divisi Manajemen Digital (DIVMDG) yang berada di bawah Satuan Digital dan Teknologi Informasi (SDTI) berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0167.P/DIR/2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0027.P/DIR/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Utama PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0026.P/DIR/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

The IT management function is carried out by the Technology Information System Division (DIVSTI) and the Digital Management Division (DIVMDG), which are under the Digital and Information Technology Unit (SDTI), based on the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0167.P/DIR/2024 on Amendments to the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0027.P/DIR/2024 on the Organization and Work Procedures of the Main Directorate of PT PLN (Persero) and the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0026.P/DIR/2024 on the Organization and Work Procedures of PT PLN (Persero).



Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

Divisi Sistem dan Teknologi Informasi (*Technology Information System Division*) bertugas mengembangkan kebijakan dan strategi rencana operasional, mengelola operasional infrastruktur teknologi informasi dan teknologi operasi, memastikan implementasi keamanan siber, memastikan pengelolaan data warehouse menuju *single source of truth*, perancangan dan pengembangan data analitik, dan pengakomodasian kebutuhan data spasial.

Divisi Manajemen Digital (*Digital Management Division*) bertugas mengembangkan strategi digital dan teknologi informasi PLN, mengelola portofolio proyek digital, mendorong pengembangan kapabilitas digital di PLN, dan mengelola kurasi pengetahuan digital dalam lingkup pembangkit, transmisi, distribusi, dan kelistrikan lainnya, serta memastikan analisis kebutuhan teknologi.

Dalam implementasi pengelolaan/penyelenggaraan TI di PLN, DIVSTI dan DIVMDG juga dibantu oleh tim Komite Pengarah TI yang beranggotakan paling sedikit Direktur yang membidangi Teknologi Informasi dan Direktur yang membidangi Manajemen Risiko. Komite Pengarah TI memiliki wewenang untuk menetapkan pengambilan keputusan strategis yang berdampak besar terhadap kelangsungan bisnis PLN, memberikan arahan terkait peran Teknologi Informasi dan penyelarasannya dengan arah bisnis PLN yang disusun dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi, menyelaraskan Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*), *Asset Information Strategy*, *High Level Asset Information Standard* PLN dengan RJPP, memastikan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi dituangkan dalam RKAP, serta mengevaluasi, mengarahkan dan memantau implementasi penyelenggaraan Teknologi Informasi.

PLN telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0063.K/DIR/2025 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT PLN (Persero) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan pembentukan Komite Pengarah TI yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0061.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi di Lingkungan PT PLN (Persero).

Technology Information System Division is responsible for developing policies and strategic operational plans, managing the operations of information technology and operational technology infrastructure, ensuring the implementation of cybersecurity, overseeing data warehouse management toward a single source of truth, designing, and developing data analytics, and accommodating spatial data needs.

The Digital Management Division is responsible for developing PLN's digital and information technology strategies, managing the digital project portfolio, driving the development of digital capabilities at PLN, managing the curation of digital knowledge within the scope of generation, transmission, distribution, and other electricity-related sectors, as well as ensuring technology needs analysis.

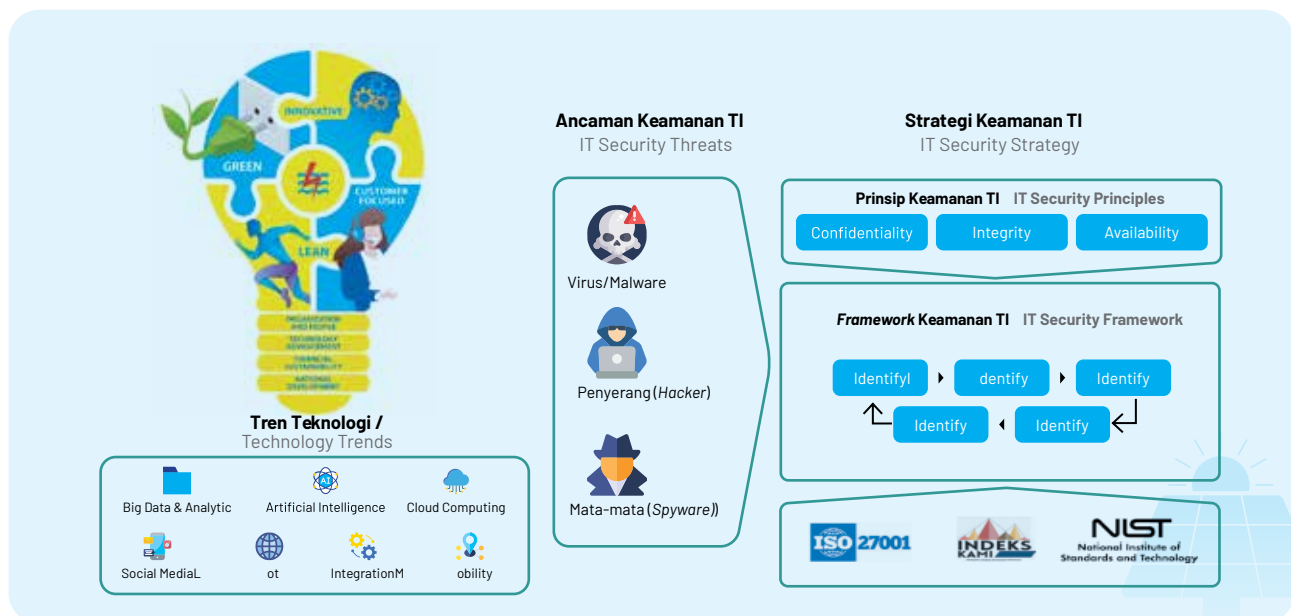
In the implementation of IT management/operations at PLN, DIVSTI and DIVMDG are also supported by the IT Steering Committee team, which consists of at least the Director in charge of Information Technology and the Director in charge of Risk Management. The IT Steering Committee has the authority to make strategic decisions that have a significant impact on PLN's business continuity, provide guidance related to the role of Information Technology and its alignment with PLN's business direction as outlined in the Information Technology Strategic Plan, align the Information Technology Strategic Plan, Asset Information Strategy, and PLN's High-Level Asset Information Standard with the Long-Term Business Plan (RJPP), ensure the implementation of the Information Technology Strategic Plan is incorporated into the Annual Work Plan and Budget (RKAP), and evaluate, direct, and monitor the implementation of Information Technology operations.

PLN has established Board of Directors' Decision No. 0063.K/DIR/2025 on the Formation of the Information Technology Steering Committee of PT PLN (Persero) as a follow-up to the Ministry of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and as a follow-up to the provisions for establishing the IT Steering Committee stipulated in the Board of Directors' Regulation of PT PLN (Persero) No. 0061.P/DIR/2023 on Strategic Information Technology Policies within PT PLN (Persero).

Tata Kelola Keamanan TI IT Security Governance

Dalam memastikan pemanfaatan TI selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, strategi dan budaya perusahaan, PLN menerapkan tata kelola TI (IT Governance). Tata kelola TI mendeskripsikan tanggung jawab Direksi dan eksekutif, struktur organisasi serta prinsip-prinsip dan proses-proses yang memastikan sistem TI dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara komprehensif.

To ensure the utilization of IT aligns with the Company's vision, mission, values, strategy, and culture, PLN implements IT governance. IT governance encompasses the responsibilities of the Board of Directors and executives, as well as the organizational structure and principles and processes that ensure IT systems can comprehensively support the achievement of the Company's objectives.



Penggunaan TI memiliki sejumlah risiko yang terkait dengan *cyber security* dan *disaster recovery*. Untuk melindungi sistem TI Perseroan dari ancaman risiko tersebut, PLN sudah bersertifikasi ISO 27001 dimana mekanisme proses pengamanan data dan informasi secara terstruktur. Pengamanan informasi itu sendiri adalah suatu proses perlindungan terhadap informasi untuk memastikan *confidentiality*, *integrity*, dan *availability* atas informasi tersebut. Pada posisi 2024, PLN telah melakukan reorganisasi guna pengelolaan penguatan keamanan siber, dengan membentuk bidang khusus untuk menangani keamanan siber.

The use of IT carries several risks related to cybersecurity and disaster recovery. To protect the Company's IT systems from these threats, PLN is certified with ISO 27001, which provides a structured process mechanism for securing data and information. Information security itself is a process of protecting information to ensure its confidentiality, integrity, and availability. As of 2024, PLN has undergone reorganization to strengthen cybersecurity management by establishing a dedicated unit specifically to handle cybersecurity.



Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

Kerangka Kerja Manajemen Keamanan Siber PLN PLN Cybersecurity Management Framework



PLN telah mendapatkan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dimana hal ini memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi yang ada sudah menggunakan kaidah dan standar keamanan guna memastikan selalu memenuhi kaidah *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability*. Sistem keamanan TI di PLN juga mengacu pada beberapa kerangka kerja dan praktik terbaik. Beberapa kerangka kerja yang digunakan sebagai referensi oleh PLN selain Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013, antara lain: *National Institute of Standards and Technology* (NIST), dan *North American Electric Reliability Corporation* (NERC).

PLN has obtained the ISO 27001:2013 Information Security Management System certification, ensuring that the management of existing data and information adheres to security principles and standards, consistently meeting the principles of Confidentiality, Integrity, and Availability. PLN's IT security system also refers to several frameworks and best practices. In addition to the ISO 27001:2013 Information Security Management, some of the frameworks used as references by PLN include the National Institute of Standards and Technology (NIST) and the North American Electric Reliability Corporation (NERC).

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Disaster Recovery Center* (DRC)

Untuk mendukung kelangsungan layanan operasional perusahaan yang menggunakan sistem teknologi informasi, Divisi Teknologi Informasi telah memastikan ketersediaan infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai komponen penting untuk pemulihan sistem pada kondisi darurat. Untuk meningkatkan keandalan dan kesiapan sistem dalam menghadapi potensi gangguan operasional, perusahaan melaksanakan :

- *Upgrade* kapasitas infrastruktur jaringan dan *server*.
- Implementasi sistem monitoring aplikasi dan infrastruktur DC dan DRC
- Pelaksanaan simulasi *switchover* aplikasi dari DC ke DRC untuk mengukur kesiapan sistem, prosedur, dan personel dalam menghadapi gangguan nyata aplikasi yang ada di DC.

Availability of *Disaster Recovery Plan* (DRP) and *Disaster Recovery Center* (DRC)

To support the continuity of the Company's operational services that utilize information technology systems, the Information Technology Division has ensured the availability of the *Data Center* (DC) and *Disaster Recovery Center* (DRC) infrastructure as essential components for system recovery in emergencies. To enhance the reliability and readiness of the system in facing potential operational disruptions, the Company carries out:

- Upgrading the capacity of the network and server infrastructure.
- Implementing monitoring systems for applications and the infrastructure of DC and DRC.
- Conducting application switchover simulations from DC to DRC to measure the readiness of systems, procedures, and personnel in handling actual application disruptions at the DC.

Sertifikasi Sistem Keamanan TI

IT Security System Certification

Pelaksanaan *Audit Surveillance* pada Sertifikasi ISO 27001: 2013 mengacu pada kemungkinan perluasan ruang lingkup sesuai pelaksanaan IT/OT *Security Assessment* pada 9 (sembilan) unit PLN yang terdiri dari *Master Station* UIP2B Gandul, *Data Center* PLN Pusat, *Data Center* UID Jaya, RCC Cawang, RCC Ungaran, RCC Waru, GITET Gandul, GITET Cawang dan PLTU Tanjung Jati.

Pelaksanaan *Audit Surveillance* pada Sertifikasi ISO 27001: 2013 mengacu pada kemungkinan perluasan ruang lingkup sesuai pelaksanaan IT/OT *Security Assessment* pada 9 (sembilan) unit PLN yang terdiri dari *Master Station* UIP2B Gandul, *Data Center* PLN Pusat, *Data Center* UID Jaya, RCC Cawang, RCC Ungaran, RCC Waru, GITET Gandul, GITET Cawang dan PLTU Tanjung Jati.

Pengawasan (*Monitoring*)

Monitoring

PLN telah membentuk *Security Operation Center* (SOC) dalam melakukan *monitoring* sistem TI 24 x7, dan dilakukan pelaporan terkait kondisi keamanan secara berkala.

PLN has established a *Security Operation Center* (SOC) to monitor IT systems 24/7, with regular reporting on security conditions.



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Teknologi

Technology

PLN telah menerapkan teknologi pengamanan terbaru dan diperbarui secara rutin untuk dapat memastikan perangkat keamanan selalu dalam kondisi terbaik dan untuk dapat melakukan pengamanan secara menyeluruh (*end to end*) pada sistem teknologi informasi perusahaan. Dalam mengamankan data dan informasi, PLN juga telah menerapkan enkripsi untuk dapat memastikan keamanan pada saat data disimpan, ditransmisikan dan digunakan dengan aspek menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data.

PLN has implemented the latest security technologies, which are regularly updated to ensure security devices are always in optimal condition and to provide comprehensive (*end-to-end*) protection of the Company's information technology systems. In securing data and information, PLN also applies encryption to ensure security during data storage, transmission, and usage, maintaining the confidentiality, integrity, and availability of the data.

Kolaborasi

Collaboration

PLN berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengamanan data dan informasi. Kerja sama strategis dengan lembaga negara maupun asosiasi serta organisasi profesional menjadi poin penting untuk dapat menunjang bagaimana organisasi dapat menerapkan pengamanan data dan informasi secara menyeluruh.

PLN collaborates with relevant parties in securing data and information. Strategic partnerships with government agencies, associations, and professional organizations are key to supporting the organization's implementation of comprehensive data and information security.

Kebijakan

Policy

PLN membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengamanan data dan informasi dalam bentuk Keputusan Direksi (Kepdir), Standar minimum dalam implementasi kontrol keamanan (standard), dan Standar Prosedur Operasi (SOP) untuk dapat mengatur bagaimana organisasi dapat melaksanakan fungsi pengamanan secara lebih terkendali dan terstruktur.

PLN establishes and implements data and information security policies in the form of Board of Directors' Decisions (Kepdir), minimum standards for security control implementation (standards), and Standard Operating Procedures (SOPs) to regulate how the organization carries out security functions in a more controlled and structured manner.

Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran

Dissemination and Awareness Raising

PLN juga melakukan inisiatif peningkatan pengamanan melalui program-program *awareness* dan sosialisasi baik secara internal, eksternal dan pihak-pihak yang terkait yang terhubung dengan PLN.

PLN also takes initiatives to enhance security through awareness and dissemination programs conducted both internally and externally, as well as with related parties connected to PLN.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

PLN melakukan *awareness* secara berkala dengan memberikan buletin secara rutin pada seluruh karyawan, menempatkan poster-poster terkait keamanan data dan informasi di lingkungan kerja. *Awareness* keamanan data dan informasi juga diprogramkan pada pelanggan, mitra, *supplier* untuk dapat memberikan pemahaman secara lebih luas terkait bahaya ancaman keamanan siber, dan pentingnya menjaga keamanan data dan informasi. Secara rutin, PLN juga melakukan simulasi-simulasi keamanan untuk dapat memastikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang siap dalam menanggulangi ancaman keamanan.

PLN regularly conducts awareness activities by distributing bulletins to all employees and placing posters related to data and information security in the workplace. Data and information security awareness programs are also designed for customers, partners, and suppliers to provide a broader understanding of the dangers of cybersecurity threats and the importance of safeguarding data and information. Routinely, PLN conducts security simulations to ensure the company is prepared to respond to security threats.

Strategi Pengembangan TI

IT Development Strategy

Untuk mencapai visi PLN “Menjadi Perusahaan *Global Top 500* dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi”, terdapat 4 (empat) pilar dalam Program Transformasi 2.0 yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2024-2028, yaitu *Growth Moonshots*, *Digital Moonshots*, dan *Net Zero Emissions (NZE) Moonshots*, serta didukung oleh *Moonshot Launchpad* sebagai *Enabler*. Transformasi 2.0 mengubah peran TI, dari yang sebelumnya bersifat pasif dan hanya sebagai *support* atas kebutuhan bisnis, menjadi bersifat proaktif dan responsif dalam mendukung strategi bisnis.

To achieve PLN’s vision of “Becoming a Global Top 500 Company and the #1 Customer Choice for Energy Solutions,” there are four pillars in the Transformation 2.0 Program, which have been formulated in the Company’s Long-Term Plan for the 2024-2028 period. These pillars are Growth Moonshots, Digital Moonshots, and Net Zero Emissions (NZE) Moonshots, supported by the Moonshot Launchpad as an enabler. Transformation 2.0 shifts the role of IT from a previously passive function, merely supporting business needs, to a proactive and responsive role in supporting business strategy.

Sejalan dengan peran TI tersebut, maka telah ditetapkan Visi TI yang diharapkan akan mampu mendukung pencapaian Visi PLN, yaitu “Menjadi *Driver* Transformasi Digital yang Berfokus pada Solusi TI yang Efisien, *Secure*, *Scalable*, dan *Forward-Looking* untuk Menjadi Perusahaan Global 500”. Untuk mewujudkan Visi TI tersebut, telah ditetapkan Misi TI sebagai berikut:

In line with this IT role, an IT Vision has been established, expected to support the achievement of PLN’s Vision: “Becoming the Driver of Digital Transformation Focused on IT Solutions that are Efficient, Secure, Scalable, and Forward-Looking to Become a Global Top 500 Company.” To realize this IT Vision, the following IT Mission has been defined:

1. *Scaling Up IT Capability & Security*
Peningkatan kapabilitas TI termasuk di dalamnya model operasi dan keamanan TI.
2. *Accelerating Digital Capabilities*
Fokus pada akselerasi peningkatan kapabilitas digital.

1. *Scaling Up IT Capability & Security*
Enhancing IT capabilities, including IT operating models and cybersecurity.
2. *Accelerating Digital Capabilities*
Focusing on the acceleration of digital capability development.



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

3. *Enhanced Data Driven Innovation and Data Integrity*
Peningkatan *data driven capabilities* untuk mempersiapkan PLN menuju *data driven organization*.
4. *Accelerating Digital Solution to become Global Digital Lighthouse*
Implementasi *emerging technology* yang *future proof* untuk menjadi *Global Digital Lighthouse*.

Selanjutnya, sebagai panduan dalam pengembangan TI ke depan, telah dirumuskan IT Guiding Principle yang akan menjadi panduan dalam hal:

1. Pengambilan keputusan agar konsisten dan selaras dengan strategi bisnis.
2. Penentuan prioritas investasi agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.
3. Pemilihan solusi TI yang efektif dan efisien, agar dapat meminimalisir risiko dan mencegah terjadinya perubahan atau desain ulang sistem.
4. Pengelolaan TI agar sesuai dengan standar, kebijakan, dan regulasi yang berlaku.

IT Guiding Principles terdiri dari 5 (lima) kelompok domain prinsip sesuai dengan domain arsitektur pada *framework* TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*), yaitu Domain Bisnis, Data, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan TI:

1. Prinsip pengelolaan TI pada Domain Bisnis:
 - a. Prinsip *Business-IT Alignment*
 - b. Prinsip *Information Management is Everybody's Business*
 - c. Prinsip *Flexibility and Growth*
 - d. Prinsip *Architecture Conformance*
2. Prinsip *Embedded Risk Management & Business Continuity* Prinsip pengelolaan TI pada Domain Aplikasi:
 - a. Prinsip *Cost-Effectiveness and Value Optimization*
 - b. Prinsip *Modular and Scalable*
 - c. Prinsip *Integration and Synergy*
 - d. Prinsip *Forward Looking Technology Implementation*
 - e. Prinsip *Standardization and Harmonization*
3. Prinsip pengelolaan TI pada Domain Data:
 - a. Prinsip *Advanced Data Quality Management*
 - b. Prinsip *Data Harmonization Towards Single Source of Truth (SSoT)*
 - c. Prinsip *Data Accessibility and Availability*
 - d. Prinsip *Real-Time Data Processing and Analytics*
 - e. Prinsip *Data Democratization*
 - f. Prinsip *Interoperable Data Ecosystems*

3. Enhanced Data Driven Innovation and Data Integrity
Strengthening data-driven capabilities to prepare PLN to become a data-driven organization.
4. Accelerating Digital Solution to become Global Digital Lighthouse
Implementing future-proof emerging technologies to position PLN as a Global Digital Lighthouse.

Furthermore, as a guide for future IT development, the IT Guiding Principles have been formulated to serve as a reference for:

1. Decision-making to ensure consistency and alignment with business strategy.
2. Investment prioritization to deliver optimal added value to the Company.
3. Selection of effective and efficient IT solutions, aiming to minimize risks and prevent unnecessary changes or system redesigns.
4. IT management in accordance with applicable standards, policies, and regulations.

The IT Guiding Principles comprise five principal domains, aligned with the architecture domains in the TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*): Business, Data, Application, Infrastructure, and IT Security.

1. IT Management Principles in the Business Domain:
 - a. Business-IT Alignment Principle
 - b. Information Management is Everybody's Business Principle
 - c. Flexibility and Growth Principle
 - d. Architecture Conformance Principle
2. Embedded Risk Management Principle & Business Continuity – IT Management Principle in the Application Domain
 - a. Cost-Effectiveness and Value Optimization Principle
 - b. Modular and Scalable Principle
 - c. Integration and Synergy Principle
 - d. Forward Looking Technology Implementation Principle
 - e. Standardization and Harmonization Principle
3. IT management principles in the Data Domain
 - a. Advanced Data Quality Management Principle
 - b. Data Harmonization Towards Single Source of Truth (SSoT) Principle
 - c. Data Accessibility and Availability Principle
 - d. Real-Time Data Processing and Analytics Principle
 - e. Data Democratization Principle
 - f. Interoperable Data Ecosystems Principle

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

4. Prinsip pengelolaan TI pada Domain Infrastruktur:
 - a. Prinsip *Reliability and Availability*
 - b. Prinsip *Control Infrastructure Diversity*
 - c. Prinsip *Uplift Infrastructure Interoperability*
 - d. Prinsip *Infrastructure Synergies*
5. Prinsip pengelolaan TI pada Domain Keamanan TI:
 - a. Prinsip *Secure by Design and Default*
 - b. Prinsip *Zero Trust*
 - c. Prinsip *Security is Everyone's Responsibilities*
 - d. Prinsip *Secure Data Lifecycle*

4. IT management principles in the Infrastructure Domain:
 - a. Reliability and Availability Principle
 - b. Control Infrastructure Diversity Principle
 - c. Uplift Infrastructure Interoperability Principle
 - d. Infrastructure Synergies Principle
5. IT management principles in the IT Security Domain:
 - a. Secure by Design and Default Principle
 - b. Zero Trust Principle
 - c. Security is Everyone's Responsibilities Principle
 - d. Secure Data Lifecycle Principle

Dukungan TI terhadap Strategi Utama Transformasi PLN

IT Support for PLN's Core Transformation Strategy

Untuk mendukung strategi utama transformasi PLN, penyusunan strategi TI diawali dengan analisis konteks bisnis, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan analisis terhadap dokumen rencana strategis PLN. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap tren teknologi terkini yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Blockchain*, *Machine Learning*, *Robotics and Automation*, *Virtual/Augmented Reality*, *Data Analytics*, dan *Cloud Computing*, serta dilakukan *benchmark* terhadap implementasi teknologi di perusahaan-perusahaan lain.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, kemudian dirumuskan rencana strategi TI ke dalam 7 (tujuh) IT *objectives* yang terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) IT initiatives dengan penjabaran sebagai berikut:

1. *Omnichannel Optimization to Improve Customer Experience in PLN's Digital Ecosystem*
IT *Objectives* ini berfokus pada implementasi teknologi terkini dalam peningkatan *customer experience* di PLN Group.
2. *Streamlining IT Operations through Application Standardization, Consolidation, and Interoperability to Achieve SSoT*
IT *Objectives* ini berfokus pada peningkatan kapabilitas aplikasi dalam mendukung tercapainya *Single Source of Truth* (SSoT).

To support PLN's core transformation strategy, the formulation of the IT strategy begins with an analysis of the business context, conducted through Focus Group Discussions (FGDs) and a review of PLN's strategic planning documents. Subsequently, an analysis is carried out on current technology trends relevant to business needs, such as Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Machine Learning, Robotics and Automation, Virtual/Augmented Reality, Data Analytics, and Cloud Computing, as well as benchmarking the implementation of these technologies in other companies.

Based on the study results, the IT strategic plan was then formulated into 7 (seven) IT objectives, comprising 37 (thirty-seven) IT initiatives, with the following descriptions:

1. *Omnichannel Optimization to Improve Customer Experience in PLN's Digital Ecosystem*
This IT objective focuses on implementing the latest technologies to enhance customer experience across PLN Group's digital ecosystem.
2. *Streamlining IT Operations through Application Standardization, Consolidation, and Interoperability to Achieve SSoT*
This IT objective focuses on enhancing application capabilities to support the achievement of a Single Source of Truth (SSoT).



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

3. *Optimizing IT-OT Convergence to Drive Operational Excellence in Support of PLN's Net Zero Emission*
IT Objectives ini berfokus pada implementasi teknologi terkini dan konvergensi IT-OT dalam peningkatan *operational excellence* di PLN Group.
 4. *AI Implementation to Support Data-Driven Capabilities for Better Decision Making*
IT Objectives ini berfokus pada *peningkatan data-driven capability* di lingkungan PLN Group.
 5. *Reliability and Availability Enhancement through IT Infrastructure Optimization to Minimize Disruptions in Critical Applications*
IT Objectives ini berfokus pada peningkatan kapabilitas infrastruktur TI di lingkungan PLN Group.
 6. *Strengthening IT Resiliency to Enhance Cyber Attack Prevention for Compliance, Reputation, and Financial Risks*
IT Objectives ini berfokus pada implementasi teknologi terkini dalam peningkatan keamanan TI di PLN Group.
 7. *Optimizing IT and Data Governance to Enhance Business Agility and Facilitate Strategic IT Implementation*
IT Objectives ini berfokus pada peningkatan kapabilitas organisasi TI melalui penguatan tata kelola TI dan tata kelola data di PLN Group.
3. *Optimizing IT-OT Convergence to Drive Operational Excellence in Support of PLN's Net Zero Emission*
This IT objective focuses on implementing the latest technologies and converging IT-OT to enhance operational excellence across PLN Group.
 4. *AI Implementation to Support Data-Driven Capabilities for Better Decision Making*
This IT objective focuses on enhancing data-driven capabilities within PLN Group.
 5. *Reliability and Availability Enhancement through IT Infrastructure Optimization to Minimize Disruptions in Critical Applications*
This IT objective focuses on improving IT infrastructure capabilities within PLN Group.
 6. *Strengthening IT Resiliency to Enhance Cyber Attack Prevention for Compliance, Reputation, and Financial Risks*
This IT objective focuses on the implementation of cutting-edge technologies to enhance IT security within PLN Group.
 7. *Optimizing IT and Data Governance to Enhance Business Agility and Facilitate Strategic IT Implementation*
This IT objective focuses on strengthening IT organizational capabilities through enhanced IT governance and data governance within PLN Group.

Implementasi Program Strategis TI Tahun 2024

Implementation of Strategic IT Programs in 2024

New PLN Mobile

New PLN Mobile

New PLN Mobile dikembangkan sebagai *market place* untuk produk kelistrikan, Anak Perusahaan dan mitra sekaligus partner di luar PLN Grup. Secara garis besar tujuan dari pengembangan New PLN Mobile adalah untuk menciptakan *direct marketing channel*, membangun *branding* Perusahaan, memberikan nilai pada pelanggan, meningkatkan *engagement* pelanggan, menumbuhkan loyalitas pelanggan, terwujudnya Beyond kWh dan Monetisasi serta tercapainya Transformasi Digital PLN.

New PLN Mobile is developed as a marketplace for electricity-related products, subsidiaries, and partners, including external collaborators beyond PLN Group. Broadly, the aim of developing New PLN Mobile is to establish a direct marketing channel, build corporate branding, provide value to customers, enhance customer engagement, foster customer loyalty, realize the concept of Beyond kWh and monetization, and ultimately achieve PLN's Digital Transformation.

Implementasi *Big Data Analytics*

Implementation of Big Data Analytics

Implementasi *Big Data Analytics* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan validitas data pada bisnis proses Perusahaan, membangun pusat data transaksi PLN untuk keperluan pelaporan dan analisa, serta sebagai instrumen dalam melakukan *predictive analysis* sehingga hal-hal yang dapat menghambat operasional bisnis dapat diantisipasi.

Pada tahun 2024, *use case big data analytics* masih terus dikembangkan menyesuaikan kebutuhan BPO (*Business Process Owner*).

The implementation of Big Data Analytics aims to improve the effectiveness of management decision-making, enhance the quality, completeness, and validity of data within the Company's business processes, establish a centralized PLN transaction data hub for reporting and analysis purposes, and serve as a tool for conducting predictive analysis to anticipate potential business operation disruptions.

In 2024, the use cases of big data analytics continue to be developed and refined based on the needs of Business Process Owners (BPOs).

AMI (*Advanced Metering Infrastructure*)

AMI (Advanced Metering Infrastructure)

AMI merupakan sistem informasi metering yang memiliki kapabilitas dalam pembacaan meter secara *realtime* untuk meningkatkan keberhasilan dan kelengkapan *Load Profile*, mampu menyimpan *data meter*, *remote connect/disconnect*, serta VEE (*Validation, estimation, and Editing*). Selain itu pengembangan AMI juga bertujuan untuk meningkatkan fitur *theft detection* yang lebih akurat dalam mendeteksi anomali dan pencurian listrik lebih dini. AMI adalah pengembangan dari AMR untuk pembacaan meter otomatis dengan tambahan kemampuan untuk penerapan tarif dinamis dan koneksi *Home Area Network*. Ekosistem AMI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu *smart meter*, media komunikasi dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang terdiri dari *Head End System* (HES) dan *Meter Data Management System* (MDMS).

Pengembangan AMI yang telah berhasil dilakukan dari sisi teknologi informasi yaitu instalasi Server MDMS serta Migrasi data A2MRT dan MDMS (*system interim*) ke server MDMS baru dan penyempurnaan *Dashboard* MDMS beserta fitur-fitur utama yaitu Fitur ANEV, Fitur *Commissioning*, Integrasi *billing* AP2T. Selain itu, infrastruktur MDMS telah memiliki *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DC-DRC) yang berada di Trunojoyo dan Gandul.

AMI is a metering information system that has the capability for real-time meter reading to improve the success rate and completeness of the Load Profile, can store meter data, perform remote connect/disconnect, as well as VEE (Validation, Estimation, and Editing). In addition, the development of AMI also aims to enhance theft detection features to be more accurate in detecting anomalies and electricity theft at an earlier stage. AMI is an advancement of AMR for automatic meter reading with additional capabilities for the application of dynamic tariffs and Home Area Network connectivity. The AMI ecosystem consists of three main components: smart meter, communication media, and an information technology-based support system comprising the Head End System (HES) and the Meter Data Management System (MDMS).

The successful development of AMI from the information technology side includes the installation of the MDMS server, migration of A2MRT and interim MDMS data to the new MDMS server, and enhancement of the MDMS dashboard along with its main features, namely the ANEV feature, Commissioning feature, and AP2T billing integration. In addition, the MDMS infrastructure is equipped with a Data Center and Disaster Recovery Center (DC-DRC) located in Trunojoyo and Gandul.



Implementasi MIS menuju *Single Source of Truth* (SSoT)

MIS Implementation Towards Single Source of Truth (SSoT)

Penyempurnaan ERP termasuk data, proses, *people* sebagai solusi yang perlu dilakukan untuk menuju *Single Source of Truth* (SSoT) melalui arsitektur desain yang terintegrasi, revitalisasi proses bisnis berbasis TI dengan pembaharuan *platform* ERP serta melaksanakan *change management* yang melibatkan *business process owner*. Manfaat operasional yang didapatkan dari implementasi MIS menuju *Single Source of Truth* (SSoT) antara lain sumber data utama yang akuntabel, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembuatan laporan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, peningkatan validitas data laporan keuangan, laporan progres dan keuangan proyek, dan realisasi anggaran, serta peningkatan efektifitas dan kemudahan dalam proses 4R (*right size, right spend, right skill, right system*) dalam *Human Experience Management*.

ERP enhancement, including data, processes, and people, is a solution that needs to be carried out to achieve Single Source of Truth (SSoT) through integrated architecture design, IT-based business process revitalization with ERP platform renewal, as well as implementing change management involving business process owners. Operational benefits obtained from the implementation of MIS towards Single Source of Truth (SSoT) include a primary data source that is accountable, valid, and auditable as the basis for reporting and supporting accurate decision-making, improved validity of financial reports, project progress and financial reports, and budget realization, as well as increased effectiveness and ease in the 4R process (right size, right spend, right skill, right system) in Human Experience Management.

EAM Distribusi

EAM Distribution

Penerapan EAM Distribusi bertujuan untuk meningkatkan *predictive maintenance* sebagai informasi dalam pengambilan keputusan, standarisasi proses bisnis maintenance dan integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien, kontrol dan *monitoring* sistem operasi dan pemeliharaan yang lebih terukur. EAM Distribusi ditargetkan untuk diimplementasikan pada seluruh unit Distribusi PLN. Pendataan penambahan aset dan implementasi Asset Health Index untuk menuju *predictive maintenance* sebagai *value preposition* untuk mendukung digitalisasi data aset distribusi, serta perencanaan pemeliharaan aset dengan *Preventive Maintenance* dan *Condition Base Maintenance*.

The implementation of EAM Distribution aims to enhance predictive maintenance as information for decision-making, standardize maintenance business processes, and achieve more effective and efficient system integration, as well as better control and monitoring of operations and maintenance systems. EAM Distribution is targeted to be implemented across all PLN Distribution units. Asset data collection and the implementation of the Asset Health Index are conducted to enable predictive maintenance as a value proposition to support the digitalization of distribution asset data, as well as asset maintenance planning through Preventive Maintenance and Condition-Based Maintenance.

EAM Transmisi

EAM Transmission

EAM Transmisi merupakan sistem pendukung proses bisnis *Operation, Maintenance, Engineering* untuk aset transmisi dimana dapat dilakukan *monitoring* kondisi peralatan transmisi untuk meminimalisir gangguan peralatan yang dapat mengakibatkan gangguan layanan kelistrikan secara meluas, *monitoring* perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan, serta hasil inspeksi pemeliharaan. EAM Transmisi merupakan aplikasi input dan interfacing dari aplikasi satelite lainnya yaitu CBM PST, JALUR, FOIS, GIS Aplikasi *Enterprise Asset Management* di unit transmisi yang dapat meningkatkan pemeliharaan aset melalui *preventive maintenance* dan *condition base maintenance*.

EAM Transmission is a supporting system for the business processes of Operation, Maintenance, and Engineering for transmission assets. It enables the monitoring of transmission equipment conditions to minimize equipment failures that could lead to widespread power service disruptions, as well as the monitoring of maintenance planning, scheduling, and inspection results. EAM Transmission serves as an input application and interfaces with other satellite applications such as CBM PST, JALUR, FOIS, and GIS. It is an Enterprise Asset Management application in transmission units that enhances asset maintenance through preventive maintenance and condition-based maintenance.

Re-engineering AP2T

Re-engineering AP2T

Re-engineering Design AP2T dilakukan dengan pelaksanaan peremajaan infrastruktur sistem *payment collection* dilakukan pada sisi *hardware* dan migrasi *software* untuk meningkatkan keandalan dan *high availability* pengelolaan sistem billing PLN. Selain itu, secara bertahap telah disusun rencana jangka panjang *Re-engineering design* sistem *billing* dan pelayanan pelanggan untuk modernisasi proses bisnis pelayanan pelanggan dan pengembangan *High Level Design Architecture*-nya.

The re-engineering design of AP2T was carried out by renewing the payment collection system infrastructure, including hardware upgrades and software migration, to improve the reliability and high availability of PLN's billing system management. In addition, a long-term plan for the re-engineering design of the billing and customer service system has been gradually developed, aimed at modernizing the customer service business processes and developing its High-Level Design Architecture.

Integrated Digital System Warehouse

Integrated Digital System Warehouse

Integrated digital system warehouse dilakukan melalui digitalisasi ATTB dan pengelolaan gudang untuk memastikan proses pengelolaan material yang lebih *lean* dan *efficient* sehingga tercapai akurasi data antara sistem digital dengan stok material real di Gudang, terbangun histori *tracking* material di sepanjang siklus hidup aset serta proses material retur yang terintegrasi. Inisiatif yang dikembangkan yaitu pengelolaan material

The integrated digital system warehouse is implemented by digitalizing ATTB and warehouse management to ensure leaner and more efficient material management processes so that it leads to data accuracy between the digital system and actual material stock in the warehouse, establish a material tracking history throughout the asset lifecycle, and enable an integrated material return process. The initiatives developed include return material management, warehouse stock



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

retur, digitalisasi stok gudang, *tracking* material, standardisasi Gudang serta kesiapan SDM dan Organisasi. Pada tahun 2024, beberapa inisiatif masih melanjutkan program pada tahun sebelumnya dan akan fokus pada konsistensi implementasi di lapangan dengan parameter maturity level untuk pengelolaan *Material Return* dan pengembangan *Material & Asset Life Cycle*.

digitalization, material tracking, warehouse standardization, as well as human resources and organizational readiness. In 2024, several initiatives continue from the previous year and will focus on consistent field implementation with maturity level parameters for Material Return management and the development of the Material & Asset Life Cycle.

Implementasi *Geographic Information System* (GIS)

Geographic Information System (GIS) Implementation

Penerapan teknologi GIS merupakan proyek jangka panjang yang mampu memberikan kapabilitas dalam pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial khususnya bagi aset PLN. Peluang *improvement* implementasi GIS saat ini yaitu untuk mengintegrasikan data spasial yang masih bersifat silo, menstandarisasi teknologi/*platform* GIS termasuk dari sisi struktur data, integrasi platform GIS korporat dengan seluruh *core system* TI PLN (ERP, EAM, CRM & *Billing System*, *Big Data*), serta pengembangan *web map services*. Selain itu implementasi GIS juga merupakan bentuk *compliance* terhadap kebijakan Satu Peta Nasional dan Kebijakan Teknologi Informasi Terpusat. Saat implementasi GIS telah dikembangkan untuk Aset Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk, Peralatan Distribusi, Lokasi Pelanggan, Pelayanan Pelanggan, Lokasi Gangguan, dan Lokasi Armada Pelayanan.

The implementation of GIS technology is a long-term project that provides capabilities for the collection, processing, and visualization of spatial data, particularly for PLN's assets. Current improvement opportunities in GIS implementation include integrating spatial data that is still siloed, standardizing GIS technology/platforms including data structure, integrating the corporate GIS platform with all core PLN IT systems (ERP, EAM, CRM & Billing System, Big Data), and developing web map services. In addition, the GIS implementation also represents compliance with the National One Map Policy and the Centralized Information Technology Policy. GIS has currently been developed for Generation Assets, Transmission and Substations, Distribution Equipment, Customer Locations, Customer Services, Outage Locations, and Service Fleet Locations.

Portal HXMS

Portal HXMS

Portal HXMS merupakan *environment* Aplikasi *Tailor Made* yang disiapkan sebagai antisipasi jika terdapat proses bisnis human capital yang sangat unik dan tidak diakomodir di Aplikasi ERP PLN (SAP) / Aplikasi Inti ataupun *Package Software* yang ada di pasar. Prinsip pengembangan modular dan dapat dimanfaatkan/dikembangkan bersama oleh entitas PLN Group

HXMS Portal is a tailor-made application environment prepared as an anticipation measure for any human capital business processes that are highly unique and not accommodated by PLN's ERP Application (SAP), Core Applications, or existing market package software. The development follows a modular principle and can be utilized or co-developed collaboratively by entities within PLN Group.

Kinerja Layanan TI Tahun 2024

IT Service Performance in 2024

Pengelolaan service management dilakukan untuk memastikan keandalan layanan-layanan TI yang telah beroperasi sesuai dengan target downtime yang telah ditentukan untuk menjamin proses bisnis PLN berjalan lancar. Layanan TI terdiri dari Layanan Aplikasi, Jaringan, dan Infrastruktur yang masing-masing memiliki target SLA, dengan rata-rata realisasi pencapaian SLA tahun 2024 sebagai berikut:

- Pencapaian SLA Layanan Aplikasi TI: 146%
- Pencapaian SLA Layanan Jaringan: 122%

Service management is carried out to ensure the reliability of IT services that are already in operation, in accordance with the predetermined downtime targets, to guarantee the smooth running of PLN's business processes. IT services consist of Application, Network, and Infrastructure Services, each with its own SLA target, with the average SLA achievement in 2024 is as follows:

- SLA Achievement for IT Application Services: 146%
- SLA Achievement for Network Services: 122%

No.	Layanan TI IT Service	Target Downtime (Jam) Target Downtime (Hours)	Realisasi (Jam) Realization (Hours)	Pencapaian (100%) Achievement (100%)
1	Aplikasi Application	2,22	1,19	146%
2	Jaringan Network	3,92	3,04	122%

Risiko Utama dan *Disruption* Teknologi Informasi

Key Risks and Information Technology Disruptions

Dalam pelaksanaan operasional proses bisnis tentunya terdapat beberapa potensi risiko yang akan muncul terkait Teknologi Informasi. Oleh karena itu bidang Teknologi Informasi PLN telah memetakan risiko internal beserta dengan mitigasi nya di tahun 2024 antara lain:

In the execution of business process operations, there are naturally several potential risks related to Information Technology that may arise. Therefore, PLN's Information Technology division has mapped out internal risks along with their mitigations for the year 2024, including:

Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
Terjadinya gangguan operasional layanan infrastruktur <i>Data Center</i> Occurrence of operational disruptions in Data Center infrastructure services	1. Implementasi <i>Isolation Backup</i> : Penambahan <i>Storage Backup</i> DC & DRC 2. Penambahan Kapasitas <i>Object Storage</i> 3. Peremajaan dan Penambahan Kapasitas
Terjadinya gangguan operasional layanan Jaringan OT Occurrence of operational disruptions in OT Network services	1. Penyusunan Redrawing Topologi Jaringan OT 2. Pemisahan Jaringan IT/OT 3. Penerapan <i>Redundant</i> link untuk <i>Backhaul Control Center</i>



Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Risiko Risk	Mitigasi Mitigation	
Terjadinya gangguan operasional layanan Jaringan IT Occurrence of operational disruptions in IT Network services	1. Peningkatan Kapasitas <i>Network</i> 2. SDWAN	1. Network Capacity Enhancement 2. SDWAN
Terjadinya gangguan operasional layanan Aplikasi Korporat Occurrence of operational disruptions in Corporate Application services	1. Peningkatan Lisensi ITSM	1. Increasing ITSM Licenses
Penyelesaian CR Aplikasi Korporat tidak sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan Completion of Corporate Application CR not following planned scope and schedule	1. Implementasi Aplikasi iCRM 2. Penyelarasan SOP Manajemen Perubahan	1. Implementation of iCRM Application 2. Alignment of Change Management SOP
Penyelesaian pekerjaan implementasi MIS menuju SSoT tidak sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan Completion of MIS implementation work towards Single Source of Truth (SSoT) not following planned scope and schedule	1. Monitoring pelaksanaan <i>project</i> melalui program PMQA (<i>Project Monitoring and Quality Assurance</i>) 2. Pelaksanaan BPR (<i>Business Process Re-Engineering</i>) untuk <i>end-to-end</i> proses bisnis 3. Pelaksanaan Pengadaan CMC&T (<i>Change Management, Communication & Training</i>) 4. Pelaksanaan Pengadaan Implementasi <i>Single Source of Truth</i> F1 dan F2 (<i>Hardware, Software, Implementor</i>)	1. Project monitoring through PMQA (Project Monitoring and Quality Assurance) program 2. Implementation of BPR (Business Process Re-Engineering) for end-to-end business processes 3. Procurement implementation of CMC&T (Change Management, Communication & Training) 4. Procurement implementation of Single Source of Truth F1 and F2 (Hardware, Software, Implementor)
Pengembangan fitur aplikasi PLN <i>Mobile</i> tidak sesuai dengan ekspektasi user (pelanggan) The development of PLN Mobile application features is not meeting user (customer) expectations.	1. Pengembangan 5 Fitur 2. Peningkatan Keandalan Operasionalisasi PLN Mobile	1. Development of 5 Features 2. Improvement of Operational Reliability of PLN Mobile
Penyelesaian pekerjaan Re-Engineering AP2T tidak sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan Completion of the Re-Engineering AP2T work is not in accordance with the planned scope and schedule	1. Implementasi <i>Re-Engineering</i> AP2T meliputi peremajaan software, hardware dan bisnis proses	1. Implementation of AP2T Re-Engineering, including software, hardware, and business process renewal
Penyelesaian pekerjaan Implementasi AMI tidak sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan Completion of AMI Implementation work is not in accordance with the planned scope and schedule	1. Implementasi AMI	1. Implementation of AMI
Penyelesaian pekerjaan <i>Enhancement</i> EAM tidak sesuai ruang lingkup dan waktu yang direncanakan Completion of EAM Enhancement work is not in accordance with the planned scope and schedule	1. Pengembangan dan Implementasi EAM Distribusi (<i>Update EAM Maximo 8</i>) 2. Penambahan modul Aplikasi EAM Distribusi 3. Pengadaan dan <i>Scale Up</i> Infrastruktur EAM Distribusi 4. Implementasi Vegetation Management untuk Distribusi 5. <i>Roll Out</i> dan Pengembangan Aplikasi EAM Transmisi 6. Migrasi Database EAM Legacy 7. Penambahan <i>Server, upgrade memory</i> dan <i>storage</i> EAM Legacy	1. Development and Implementation of Distribution EAM (Update EAM Maximo 8) 2. Addition of Distribution EAM Application modules 3. Procurement and Scale-Up of Distribution EAM Infrastructure 4. Implementation of Vegetation Management for Distribution 5. Roll Out and Development of Transmission EAM Application 6. Migration of Legacy EAM Database 7. Addition of Servers, upgrade memory and storage for Legacy EAM

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Risiko Risk	Mitigasi Mitigation	
Pengembangan <i>Dashboard</i> tidak sesuai dengan ekspektasi BPO Dashboard development is not meeting BPO expectations	1. Pengembangan <i>Big Data Analytics</i> 2. Pengembangan <i>Dashboard</i>	1. Development of Big Data Analytics 2. Development of Dashboard
Optimalisasi pemanfaatan GIS tidak sesuai ekspektasi BPO Optimization of GIS utilization is not meeting BPO expectations	1. Pengadaan Lisensi Ekstensi <i>Network Analyst</i> untuk GIS Korporat, Lisensi AGIS <i>Desktop Advance</i> 2. Penambahan fitur GIS <i>Development - Tracing Geometric Network at Arcgis Enterprise</i> 3. Lisensi ArcGIS <i>Image Server</i> dan <i>Analyst</i> 4. Integrasi Web Portal SCADA dengan EAM, GIS, AP2T	1. Procurement of Network Analyst Extension License for Corporate GIS, AGIS Desktop Advance License 2. Addition of GIS Development features - Tracing Geometric Network at ArcGIS Enterprise 3. ArcGIS Image Server and Analyst License 4. Integration of SCADA Web Portal with EAM, GIS, AP2T
Terjadinya gangguan keamanan siber Occurrence of cybersecurity incidents	1. Implementasi <i>Security</i> (Antivirus Korporat) 2. Penguatan <i>Security</i> WAN PLN Net 3. Penguatan keamanan STI 4. Pelaksanaan <i>Assessment</i> Keamanan IT/OT 5. Koordinasi Tim CSIRT <i>Holding, SubHolding</i> dan Anak Perusahaan 6. Penyelesaian temuan SOC	1. Implementation of Security (Corporate Antivirus) 2. Strengthening the Security of PLN Net WAN 3. Strengthening STI security 4. Implementation of IT/OT Security Assessment 5. Coordination of the CSIRT Team from Holding, Sub-Holding, and Subsidiaries 6. Resolution of SOC findings

IT Maturity Level

IT Maturity Level

Peningkatan Tata Kelola TI selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun sekali guna untuk melakukan pengukuran terhadap kematangan tata kelola TI (*IT Maturity Level*) perusahaan sesuai dengan *standard* internasional *framework* COBIT 2019. Tahapan pelaksanaan dalam *assessment* *IT Maturity Level* didasarkan pada kajian *current state* dan *target state* tingkat kematangan tata kelola TI, dimana selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran terhadap kekurangan dokumentasi tata kelola TI dan pelaksanaan *assessment* oleh konsultan eksternal. Telah ditentukan *roadmap* peningkatan nilai *capability* *IT Maturity Level* yang dibagi menjadi 4 *milestone*, dengan setiap *milestone* telah selaras dengan peraturan BUMN dengan detail sebagai berikut:

3.03 Kondisi Saat Ini (2021)

- Melakukan *assessment* untuk seluruh COBIT 5.0 Level 1 *Outcome* baru diidentifikasi *Work Product/Output* untuk menilai kesiapan pengukuran *Outcome*.
- Memastikan kembali bisnis proses, prosedur dan *evidence* yang ada pada level 1, 2, 3, 4, 5 pada perhitungan saat ini *ter-update*.

Enhancement of IT Governance aligned with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/02/2018 on the Principles of Information Technology Governance of the Ministry of State-Owned Enterprises, carried out every two years to measure the Company's IT governance maturity level (*IT Maturity Level*) in accordance with the international standard framework COBIT 2019. The implementation stages of *IT Maturity Level* assessment are based on the review of the current state and target state of IT governance maturity level, which will then be followed by updating deficiencies in IT governance documentation and conducting the assessment by an external consultant. A roadmap for improving the *IT Maturity Level* capability value has been established, divided into four milestones, with each milestone aligned with the SOE regulations, detailed as follows:

3.03 Current Condition (2021)

- Conducting an assessment for all COBIT 5.0 Level 1 Outcomes by newly identifying the *Work Product/Output* to assess the readiness for *Outcome* measurement.
- Reconfirming that the business processes, procedures, and existing evidence at levels 1, 2, 3, 4, and 5 in the current calculation are up to date.



Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

3,10 Milestone I (2023)

- Melakukan transisi mekanisme perhitungan yang tadinya menggunakan COBIT 5 menjadi COBIT 2019.
- Melakukan *assessment* ulang untuk seluruh proses dengan COBIT 2019 dan memastikan pencapaian tidak turun.
- Memastikan setiap proses yang belum ada di COBIT 5 minimal mendapatkan level 2.

3,28 Milestone II (2025)

- Memastikan seluruh proses minimal mencapai level 3 dan menjaga pencapaian level 4 dan level 5 dengan menggunakan COBIT 2019.

3,75 Milestone III (2027)

- Memastikan 50% dari seluruh proses COBIT 2019 sudah mencapai level 4 dan yang sudah mencapai level 5 tidak mengalami penurunan.

4,10 Milestone IV (2029)

- Memastikan 100% dari seluruh proses COBIT 2019 sudah mencapai level 4 dan yang sudah mencapai level 5 tidak mengalami penurunan.

3.10 Milestone I (2023)

- Transitioning the calculation mechanism from COBIT 5 to COBIT 2019.
- Reassessing all processes using COBIT 2019 and ensuring the achievement level does not decrease.
- Ensuring that each process not previously included in COBIT 5 achieves at least level 2.

3.28 Milestone II (2025)

- Ensuring that all processes reach at least level 3 and maintaining the achievement of levels 4 and 5 using COBIT 2019.

3.75 Milestone III (2027)

- Ensuring that 50% of all COBIT 2019 processes have reached level 4, and those that have already reached level 5 do not experience a decline.

4,10 Milestone IV (2029)

- Ensuring that 100% of all COBIT 2019 processes have reached level 4, and those that have already reached level 5 do not experience a decline.

Pencapaian IT *Maturity Level* IT Maturity Level Achievement

PLN telah melakukan IT *Maturity Assessment* untuk mengukur *capability level* organisasi terhadap penerapan tata kelola TI dengan menggunakan standar COBIT 5 (*Control Objective for Information and Related Technologies*) pada 5 domain proses yang terdiri dari *Evaluate, Direct and Monitor, Align Plan and Organize, Build Acquire and Implement, Deliver Service Support*, serta *Monitor Evaluate and Assess*.

Berdasarkan hasil *assessment* terhadap *capability level* pada setiap proses didapatkan nilai IT *Maturity Level* PLN yaitu mencapai 3,33 yang menunjukkan bahwa seluruh proses telah terdokumentasi dengan baik dan terkomunikasikan ke seluruh bagian terkait. Selaras dengan arah strategis PLN dalam pembentukan *Holding-Subholding*, telah dilakukan analisis kapabilitas dan *maturity assessment* terhadap tingkat kesiapan IT pada *Subholding* dan anak perusahaan.

PLN has conducted an IT Maturity Assessment to measure the organization's capability level in implementing IT governance using the COBIT 5 (Control Objective for Information and Related Technologies) standard across five process domains: Evaluate, Direct and Monitor; Align, Plan and Organize; Build, Acquire and Implement; Deliver, Service and Support; and Monitor, Evaluate and Assess.

Based on the assessment results of the capability level for each process, PLN achieved an IT Maturity Level score of 3.33, indicating that all processes are well-documented and communicated across all relevant departments. In line with PLN's strategic direction in forming the Holding-Sub holding structure, capability analysis and maturity assessment have also been conducted to evaluate IT readiness levels within the Sub holdings and subsidiaries.



Photo by Rahmi Zunita
PLN Indonesia Power



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Disclaimer:

Informasi mengenai kegiatan Perseroan terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan ini merupakan ringkasan kinerja TJSL sepanjang tahun 2024, yang secara lengkap telah diuraikan dalam Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Tahun 2024. Laporan Keberlanjutan tersebut diterbitkan secara terpisah namun pada waktu yang bersamaan dengan Laporan Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021. Secara umum, informasi dalam Laporan Tahunan ini dan Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Tahun 2024 bersifat saling melengkapi.

"Information on the Company's activities related to Social and Environmental Responsibility (TJSL) in this Annual Report is a summary of TJSL performance throughout 2024, which has been completely presented in the Sustainability Report PT PLN (Persero) 2024. The Sustainability Report is published separately at the same time as this Annual Report, in accordance with the provisions of Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021. In general, the information in this Annual Report and the Sustainability Report PT PLN (Persero) 2024 are complementary."

Komitmen Penerapan TJSL untuk Mendukung Swasembada Energi dan Transisi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Commitment To Implementing TJSL to Support Energy Self-Sufficiency and Transition Towards A Sustainable Future

Sebagai BUMN strategis di sektor ketenagalistrikan, PLN memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam mempercepat transisi menuju energi bersih serta mewujudkan swasembada energi. Dalam menjalankan peran tersebut, PLN terus menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan. PLN menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi dan tujuan jangka panjang Perusahaan, sejalan dengan tekad untuk memajukan masa depan energi yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PLN meyakini bahwa keberhasilan transisi energi dan pencapaian kemandirian energi nasional tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pembangunan infrastruktur

As a strategic State-Owned Enterprise (SOE) in electricity sector, PLN plays an important role in supporting the achievement of national development targets, particularly in accelerating the transition to clean energy and realizing energy self-sufficiency. In performing such role, PLN continuously demonstrates its commitment as a responsible and sustainability-oriented company. PLN places sustainability at the core of the Company's long-term strategy and goals, in line with its determination to advance an inclusive, equitable, and environmentally friendly energy future for all Indonesian people.

PLN believes that the success of energy transition and achievement of national energy independence cannot be separated from the synergy between equitable electricity



Komitmen Penerapan TJSL untuk Mendukung Swasembada Energi dan Transisi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Commitment To Implementing TJSL to Support Energy Self-Sufficiency and Transition Towards A Sustainable Future

ketenagalistrikan yang merata dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, PLN secara konsisten mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan lingkungan ke dalam strategi bisnis Perusahaan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN tidak hanya menjalankan fungsi utama sebagai penyedia energi yang andal dan terjangkau, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Sepanjang tahun 2024, PLN telah mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis dalam kerangka TJSL yang berfokus pada mendukung sistem energi rendah karbon dan memperkuat kemandirian energi masyarakat. Program-program tersebut mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan akses kelistrikan di wilayah tertinggal, serta pengembangan inisiatif kemandirian energi berbasis komunitas. Keseluruhan program ini dikemas secara terpadu dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menjawab tantangan energi hari ini dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi di masa depan.

infrastructure development and sustainable community empowerment. Therefore, PLN consistently integrates economic, social, community, and environmental dimensions into its business strategy. Through Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, PLN not only performs its primary function as a reliable and affordable energy provider, but also as a driving force for sustainable development that provides concrete contribution to improving community welfare and preserving the environment.

Throughout 2024, PLN implemented various strategic initiatives within TJSL framework which focused on supporting low-carbon energy systems and strengthening community energy independence. These programs included strengthening community capacity in utilizing new renewable energy (EBT), increasing electricity access in underdeveloped areas, and developing community-based energy independence initiatives. All these programs are packaged in an integrated manner and oriented towards community empowerment so as to answer today's energy challenges and strengthen socio-economic resilience in the future.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan konsistensi dalam menjalankan TJSL, pada tahun 2024 PLN berhasil meraih penghargaan sebagai Perusahaan Paling Bertanggung Jawab dalam ajang Nusantara CSR Awards. Penghargaan ini juga mencerminkan kepemimpinan transformasional dari Direktur Utama PLN, Sdr. Darmawan Prasodjo, yang turut dinobatkan sebagai Pemimpin Transformasi Bisnis Berkelanjutan atas keberhasilannya mengarahkan 31 program TJSL yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.



As a form of appreciation for the success and consistency in implementing TJSL, in 2024, PLN won the award as the Most Responsible Company at Nusantara CSR Awards. This award also reflects the transformational leadership of PLN's President Director, Mr. Darmawan Prasodjo, who is also named the Leader of Sustainable Business Transformation for his success in directing 31 TJSL programs with concrete contributions to the community and environment.

Komitmen Penerapan TJSL untuk Mendukung Swasembada Energi dan Transisi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Commitment To Implementing TJSL to Support Energy Self-Sufficiency and Transition Towards A Sustainable Future

Dengan landasan komitmen yang kuat, arah strategi yang jelas, serta implementasi program TJSL yang terstruktur dan berdampak, PLN terus memperkuat perannya sebagai katalisator dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi menuju sistem energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan mandiri.

With a solid basis of commitment, clear strategic direction, and structured and impactful implementation of TJSL programs, PLN continues to strengthen its role as a catalyst in realizing national energy independence. This becomes an important foundation in accelerating the transformation towards a just, inclusive, and sustainable energy system for a greener, more resilient, and independent future for Indonesia.

Governansi (Tata Kelola) Keberlanjutan

Sustainability Governance

Tata kelola keberlanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Pilar ini berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mencapai tujuan bisnisnya tetapi juga memenuhi tanggung jawabnya terhadap isu-isu lingkungan dan sosial. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk menjadi pemimpin terpercaya di sektor ketenagalistrikan, PLN membangun bisnisnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam penerapan aspek-aspek keberlanjutan.

PLN memahami bahwa tata kelola keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian integral dari strategi bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, PLN menerapkan kebijakan, strategi, dan proses yang memastikan keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya. Setiap keputusan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan dan bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sustainability governance is one main pillar in implementing Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. This pillar plays an important role in ensuring that the Company not only achieves its business goals but also fulfills its responsibilities towards environmental and social issues. As the Company committed to becoming a trusted leader in electricity sector, PLN builds its business based on good governance principles, including in implementing sustainability aspects.

PLN understands that sustainability governance is not simply a matter of regulatory compliance, but an integral part of a long-term growth-oriented business strategy. Therefore, PLN implements policies, strategies, and processes that ensure its sustainability in every aspect of its operations. Every decision made is in line with the principles of sustainability and aims at creating long-term value for all stakeholders.

Struktur Governansi Keberlanjutan dan Penanggung Jawab Penerapan Program Keberlanjutan Perusahaan

Sustainability Governance Structure and Person in Charge of Implementing Company's Sustainability Program

PLN telah membangun struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang mendukung penerapan tata kelola keberlanjutan secara efektif. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ tata kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Masing-masing organ memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Dalam rangka melaksanakan tata kelola keberlanjutan, Direksi telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan keberlanjutan kepada Komite *Sustainability* yang dibentuk sejak 2021. Komite ini diperbarui melalui Keputusan Direksi Nomor 0322.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite Sustainability PT PLN (Persero). Seluruh anggota Direksi berperan sebagai *Steering Committee* dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan arahan strategis. Direksi menunjuk Executive Vice President (EVP) Transisi Energi dan Keberlanjutan sebagai Ketua Komite *Sustainability*. Komite ini terdiri dari berbagai Kepala Satuan dan EVP lintas Satuan Kerja dan Divisi, yang terbagi ke dalam sejumlah *workstream*, antara lain: lingkungan dan pengelolaan perubahan iklim (yang mencakup sub-aliran kerja dekarbonisasi pembangkit fosil, ekspansi energi baru terbarukan, dan pengembangan ekosistem hijau), sosial, tata kelola, komunikasi dan hubungan kelembagaan, pengembangan kapasitas, digitalisasi, pengawasan terobosan, serta keuangan, risiko, dan komersial.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen nyata dalam implementasi bisnis berkelanjutan, pada tahun 2024 PLN juga membentuk struktur jabatan baru secara khusus, yaitu ESG dan *Safeguard*. Struktur ini berfungsi sebagai tim inti pengelola keberlanjutan di setiap unit PLN dan bertugas mengoordinasikan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang terkait dengan aspek keberlanjutan.

PLN has built corporate governance structure and infrastructure that support the effective implementation of sustainability governance. In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's governance organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each organ has clear authority and responsibility as mandated in the Articles of Association and laws and regulations, including the responsibility for managing and supervising the Company's long-term business sustainability.

In order to apply sustainable governance, the Board of Directors has delegated the authority for sustainability management to the Sustainability Committee, which was established in 2021. This committee has been renewed under the Board of Directors' Decision No. 0322.K/DIR/2024 on the Establishment of the Sustainability Committee of PT PLN (Persero). All members of the Board of Directors act as the Steering Committee in implementing supervisory function and strategic direction. The Board of Directors appoints the Executive Vice President (EVP) of Energy Transition and Sustainability as the Chairman of Sustainability Committee. This committee consists of various Unit Heads and EVPs across Work Units and Divisions, divided into a number of workstreams, among others: environment and climate change management (which includes sub-workstreams for decarbonization of fossil power plants, new renewable energy expansion, and green ecosystem development), social, governance, communication and institutional relations, capacity development, digitalization, breakthrough supervision, as well as finance, risk, and commercial.

Furthermore, as a form of concrete commitment to implementing sustainable business, in 2024, PLN also formed a new job structure specifically, namely ESG and Safeguard. This structure functions as the core team for managing sustainability in each PLN unit and is in charge of coordinating the fulfillment of financing requirements related to sustainability aspects.

Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan

Competency Development Related to Sustainable Finance

Sepanjang tahun 2024, PLN secara aktif mengembangkan kapasitas dan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, serta para pelaksana penerapan strategi keberlanjutan Perseroan melalui partisipasi dalam berbagai program pelatihan dan kegiatan strategis. Beberapa kegiatan utama yang diikuti antara lain:

1. Keterlibatan langsung dalam konferensi perubahan iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29)
2. Pelatihan *"Environmental, Social, and Governance (ESG) in Focus"* melalui kerja sama dengan Monash University
3. *Workshop on High Level Technologies for Energy Transition* – oleh Asian Development Bank (ADB)
4. *Workshop KBUMN: Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability* – oleh Kementerian BUMN.

Throughout 2024, PLN actively developed the capacity and competencies of the Board of Commissioners, Board of Directors, and executors of the Company's sustainability strategy through participation in various training programs and strategic activities. Some of the main activities attended include:

1. Direct involvement in the United Nations annual climate change conference (COP29)
2. Training of *"Environmental, Social, and Governance (ESG) in Focus"* in cooperation with Monash University
3. *Workshop on High Level Technologies for Energy Transition* – by Asian Development Bank (ADB)
4. *KBUMN Workshop: Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability* – by the Ministry of SOEs.

Penilaian Risiko atas Penerapan Program Keberlanjutan

Risk Assessment of Sustainability Program Implementation

PLN secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berpotensi memberikan dampak material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan dan mitigasi risiko jangka panjang. Proses penilaian risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yang mencakup pemahaman terhadap sumber-sumber risiko serta klasifikasi jenis-jenis risiko yang relevan dengan operasional PLN. Setelah itu, dilakukan pengukuran risiko untuk menilai besaran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian, PLN kemudian menetapkan strategi mitigasi risiko yang sesuai guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

PLN proactively identifies and manages risks related to economic, social, and environmental aspects that have the potential material impact on the Company's business continuity. This is done as part of governance strategy oriented towards sustainability and long-term risk mitigation. The risk assessment process begins with risk identification, which includes an understanding of risk sources and classification of risk types relevant to PLN's operations. After that, risk measurements are carried out to assess the magnitude of the impact and the likelihood of the risk occurring. Based on the results of identification and assessment, PLN then determines the appropriate risk mitigation strategy to minimize the negative impacts caused.

Lebih lanjut, Direksi PLN juga berperan dalam pengendalian risiko dan dampak perubahan iklim. PLN secara aktif merespons tantangan dan peluang terkait transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sebagai bagian dari komitmen ini, PLN mempertimbangkan dampak

Furthermore, the PLN Board of Directors plays a role in controlling the risks and impacts of climate change. PLN actively responds to the challenges and opportunities related to the transition to a low-carbon economy. As part of this commitment, PLN considers the impact of climate change



Governansi (Tata Kelola) Keberlanjutan Sustainability Governance

perubahan iklim terhadap model bisnis, strategi risiko, serta implikasinya terhadap laporan keuangan. Perseroan terus berupaya memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan telah sejalan dengan praktik terbaik dalam industri, guna menjaga keberlanjutan operasional serta daya saing di tengah perubahan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Informasi terkait profil risiko keberlanjutan dan mitigasinya dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) tahun 2024 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

on business models, risk strategies, and their implications for financial statements. The company strives to ensure that the risk management system implemented is in line with best practices in the industry, in order to maintain operational sustainability and competitiveness amidst changing regulations and stakeholder expectations. Information related to sustainability risk profile and its mitigation can be seen in the 2024 Sustainability Report of PT PLN (Persero), presented separately from this Annual Report.

Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement

PLN menempatkan para pemangku kepentingan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam implementasi program keberlanjutan di Perseroan dilakukan secara proaktif melalui komunikasi yang transparan dan kolaborasi yang erat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan selaras dengan kebutuhan serta harapan para *stakeholder*.

PLN positions stakeholders as parties with major role in supporting the Company's business sustainability. Stakeholder engagement in the implementation of sustainability programs in the Company is carried out proactively through transparent communication and close cooperation. This aims to ensure that every initiative carried out is in line with the needs and expectations of stakeholders.

Sepanjang tahun 2024, PLN secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keberlanjutan agar dapat menciptakan dampak positif yang luas dan berkelanjutan. Melalui dialog yang konstruktif serta mekanisme umpan balik yang efektif, Perseroan berupaya menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung efektivitas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Throughout 2024, PLN actively engaged various stakeholders in the planning, implementation, and evaluation process of sustainability programs to create a broad and sustainable positive impact. Through constructive dialogue and effective feedback mechanisms, the Company strives to balance social, economic, and environmental interests in every decision-making so as to support the effectiveness of achieving sustainable development goals.

Kinerja Aspek Ekonomi

Economic Aspect Performance

PLN berkomitmen untuk terus bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dengan memastikan pencapaian kinerja ekonomi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perseroan juga berupaya menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN secara konsisten menerapkan strategi yang tepat untuk mendorong peningkatan kinerja ekonomi secara berkelanjutan sehingga selama tahun 2024 PLN mampu menyediakan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari aspek kinerja ekonomi Perusahaan, pada tahun 2024, PLN mencatatkan pertumbuhan kinerja yang secara keseluruhan memenuhi target dalam RKAP Tahun 2024. Hingga akhir tahun 2024 kapasitas terpasang pembangkit milik PLN mencapai 75.936 Megawatt (MW), sehingga meningkatkan kemampuan menyediakan listrik kepada pelanggan. Realisasi penjualan listrik tahun 2024 mencapai 306,22 TerraWatt Hour (TWh), lebih tinggi 2,08% dari target 300 TWh. Untuk total pendapatan tahun 2024 mencapai Rp545,38 triliun, atau lebih tinggi 1,59% dari target sebesar Rp536,83 triliun. Capaian ini juga mencerminkan pertumbuhan sebesar 11,9% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan pendapatan sebesar Rp487,38 triliun. Laba usaha Perseroan turut menunjukkan kinerja yang solid dengan raihan sebesar Rp60,62 triliun, meningkat 22,37% dari target Rp49,54 triliun. Sebagian dari laba tersebut telah didistribusikan kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk pajak, dividen, remunerasi dan tunjangan karyawan, serta program kemasyarakatan (CSR) dengan nilai total yang didistribusikan sebesar Rp96,58 triliun.

Selain pencapaian kinerja ekonomi, PLN juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inisiatif strategis. Inisiatif tersebut meliputi pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil serta kolaborasi dengan industri dalam negeri melalui optimalisasi pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN telah mencapai 93,05%, yang mencerminkan bahwa sebanyak 83.763 desa atau kelurahan di seluruh

PLN is committed to continuously grow and develop in a sustainable manner by ensuring that the economic performance is achieved in line with the target set. The Company also strives to create significant added value for all stakeholders. As part of this commitment, PLN consistently implements appropriate strategies to encourage sustainable economic performance improvements, and thus, throughout 2024, PLN was able to provide electricity supply to support the national economic growth.

From the economic performance aspect of the Company, in 2024, PLN recorded performance growth that overall met the target in the 2024 RKAP. As of the end of 2024, the installed capacity of PLN's power plants reached 75,936 Megawatts (MW), thus increasing the ability to provide electricity to customers. The realization of electricity sales in 2024 reached 306.22 TerraWatt Hour (TWh), 2.08% higher than the target of 300 TWh. The total revenue in 2024 reached Rp545.38 trillion, or 1.59%, higher than the target of Rp536.83 trillion. These achievements also reflect a growth of 11.9% compared to revenue of Rp487.38 trillion in 2023. The Company's operating profit also showed solid performance with an achievement of Rp60.62 trillion, an increase of 22.37% from the target of Rp49.54 trillion. A part of the profit has been distributed to stakeholders in the form of taxes, dividends, remuneration and employee benefits, as well as community programs (CSR) with a total value distributed of Rp96.58 trillion.

In addition to achieving economic performance, PLN also plays an active role in driving national economic growth through various strategic initiatives. These initiatives include the development of electricity infrastructure in remote areas and collaboration with domestic industries through optimizing the fulfillment of Local Content (TKDN). PLN continues to demonstrate its commitment to providing equitable access to electricity throughout Indonesia. As of the end of 2024, the Village Electrification Ratio (RDB) reached 93.05%, reflecting that 83,763 villages or sub-districts throughout the archipelago gained access to



Kinerja Aspek Ekonomi Economic Aspect Performance

nusantara telah memperoleh akses terhadap listrik. Di sisi lain, Rasio Elektrifikasi Nasional (REN) tercatat sebesar 99,83%. Dari total desa yang telah berlistrik, sebanyak 77.942 desa dilayani langsung oleh listrik PLN, termasuk wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara itu, 3.127 desa mendapat pasokan listrik dari penyedia non-PLN, dan 2.624 desa lainnya menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang merupakan program bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selanjutnya, sejalan dengan kebijakan peningkatan nilai TKDN, pada tahun 2024 PLN berhasil mencapai tingkat TKDN sebesar 53,90%, meningkat dari 47,09% pada tahun 2023. Peningkatan ini turut diikuti oleh kenaikan total belanja dalam negeri yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp392,6 triliun, naik 5,8% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp370,9 triliun.

Pembahasan mengenai kinerja ekonomi PLN pada tahun 2024 secara rinci telah disampaikan pada Bab Analisis Pembahasan dan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini serta penjelasan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2024.

electricity. On the other hand, the National Electrification Ratio (REN) was recorded at 99.83%. Of the total villages electrified, 77,942 villages are directly served by PLN electricity, including disadvantaged, frontier, and outermost (3T). Meanwhile, 3,127 villages received electricity supplies from non-PLN providers, and 2,624 other villages used Energy-Saving Solar Lamps (LTSHE), an assistance program from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

Furthermore, in line with the policy of increasing TKDN value, in 2024, PLN managed in achieving a TKDN level of 53.90%, an increase from 47.09% in 2023. This increase was also followed by an increase in total domestic spending, which in 2024, was recorded at Rp392.6 trillion, up 5.8% compared to Rp370.9 trillion in 2023.

A detailed discussion of PLN's economic performance in 2024 is presented in the Management Discussion and Analysis Chapter of this Annual Report and explained in the 2024 Sustainability Report.



Photo by Nirwan Aji Santoso
PLN UID Sumut

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

Komitmen PLN terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

PLN's Commitment to Environmental Management and Conservation

Sebagai penyedia utama energi listrik di Indonesia, PLN memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tanggung jawab Perseroan terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. PLN menyadari bahwa operasional bisnisnya berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, sehingga Perseroan senantiasa berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatannya. PLN tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik yang andal tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung transisi menuju energi bersih demi masa depan yang lebih hijau.

PLN bertekad untuk mendukung upaya global dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan strategi lingkungan yang sejalan dengan prinsip ESG. Dari sisi kebijakan, PLN telah memiliki kebijakan internal pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan yang ditandatangani Direksi tanggal 27 Maret 2024. Sementara itu, dari sisi strategi, PLN terus mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan energi bersih dan terbarukan, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan efisiensi dalam operasional Perseroan. Selain itu, PLN juga aktif dalam program rehabilitasi lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

As the main provider of electricity in Indonesia, PLN has a strong commitment to carrying out the Company's responsibility for environmental management and conservation. PLN realizes that its business operations may potentially impact the environment, therefore, the Company always strives to integrate sustainability principles into every aspect of its activities. PLN not only focuses on providing reliable electricity but also plays an active role in maintaining ecosystem balance and supporting the transition to clean energy for a greener future.

PLN is determined to support global efforts in mitigating climate change and sustainable energy transitions. This commitment is realized through various environmental policies and strategies in line with ESG principles. In terms of policy, PLN has an internal policy for environmental management and conservation as stated in the Occupational Health, Safety, Security, and Environment Policy signed by the Board of Directors on March 27, 2024. Meanwhile, in terms of strategy, PLN continues to develop innovations in the use of clean and renewable energy, reducing carbon emissions, and increasing efficiency in the Company's operations. In addition, PLN is also active in environmental rehabilitation programs, biodiversity conservation, as well as community education and involvement in preserving the environment.



Komitmen PLN dalam keberlanjutan lingkungan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Sepanjang tahun 2024, PLN Group berhasil meraih 42 penghargaan, termasuk 10 penghargaan tertinggi Aditama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam ajang 'Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024'. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi PLN dalam pengembangan energi hijau serta upaya penurunan emisi karbon.

PLN juga berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam *Investing on Climate Editor's Choice Award 2024*, yaitu kategori *Renewable Energy Investment*, *Best Literacy for Climate Resilience*, dan *Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability*.

PLN's commitment to environmental sustainability has received recognition at national and international levels. Throughout 2024, PLN Group won 42 awards, including 10 of the highest Aditama awards from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) at the '2024 EBTKE Stakeholder Performance Appreciation Night' event. This award reflects PLN's dedication to developing green energy and efforts to reduce carbon emissions.

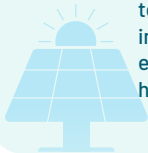
PLN also won three prestigious awards in the 2024 *Investing on Climate Editor's Choice Award*, namely the *Renewable Energy Investment* category, *Best Literacy for Climate Resilience*, and *Inspirational Figures in Environmental and Social Sustainability*. These awards



Kinerja Lingkungan Environmental Performance

Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti nyata atas upaya PLN dalam memimpin transisi energi di Indonesia serta menjadi motivasi untuk terus memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) guna mendukung pencapaian target *net zero emission* di masa depan.

Wujud nyata dari komitmen PLN terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga dibuktikan dengan keberhasilan PLN dalam meraih 20 PROPER Emas dan 18 PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Raihan ini menjadi pengakuan atas konsistensi PLN dalam melampaui kepatuhan terhadap regulasi lingkungan (*beyond compliance*), serta implementasi praktik-praktik terbaik dalam efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan inovasi sosial.



are concrete evidence of PLN's efforts in leading the energy transition in Indonesia and are motivation to continue expanding the use of new and renewable energy (EBT) to support the achievement of the net zero emission target in the future.

The concrete steps of PLN's commitment to sustainable environmental management are also proven by PLN's success in achieving 20 Gold PROPER and 18 Green PROPER from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). These achievements serve as an acknowledgment of PLN's consistency in going beyond compliance with environmental regulations, as well as implementing best practices in energy efficiency, waste management, biodiversity conservation, and social innovation.

Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024

Environmental Management Program Initiatives in 2024

Sejalan dengan komitmen PLN untuk mendukung kelestarian lingkungan, sepanjang tahun 2024 Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif program pengelolaan lingkungan sebagai langkah nyata dan konsistensi dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

In line with PLN's commitment to supporting environmental sustainability, throughout 2024, the Company implemented various environmental management program initiatives as a concrete step and consistency in creating a sustainable positive impact. These programs are designed to support sustainable development goals that include environmental management and preservation.

Pengelolaan Energi

Energy Management

Energi merupakan aspek penting bagi PLN dalam menjalankan operasional bisnisnya serta memenuhi kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, PLN terus berupaya mengelola sumber daya energi secara berkelanjutan guna mendukung transisi energi dan mengurangi dampak lingkungan. Dalam operasionalnya, PLN memanfaatkan berbagai sumber energi primer, baik yang bersifat terbarukan maupun tidak terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Energy is an important aspect for PLN in carrying out its business operations and meeting the national electricity needs sustainably. Throughout 2024, PLN constantly strove to manage energy resources sustainably to support the energy transition and reduce environmental impacts. In its operations, PLN utilizes various primary energy sources, both renewable and non-renewable, to meet national electricity needs.

Pada tahun 2024, konsumsi energi terbesar masih berasal dari sumber tidak terbarukan, terutama batubara, dengan total penggunaan batubara mencapai 1.197.723.393 GJ. Sedangkan penggunaan sumber energi terbarukan yang digunakan Perseroan mencapai sekitar 1,5%, yang

In 2024, the largest energy consumption still came from non-renewable sources, particularly coal, with total coal use reaching 1,197,723,393 GJ. Meanwhile, the use of renewable energy sources used by the Company reached around 1.5%, which came from biomass with a usage volume of 1,624,937

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

berasal dari biomassa dengan volume pemakaian sebesar 1.624.937 ton. Dari sisi konsumsi listrik, PLN tidak hanya menyalurkan listrik kepada pelanggan, tetapi juga menggunakan listrik untuk operasional internal, mencakup penggunaan listrik untuk sentral pembangkit, gardu induk dan sistem distribusi listrik. Pada tahun 2024 tercatat total volume listrik yang digunakan sebesar 12.598,31 GWh atau setara dengan 45,35 juta GJ.

Meskipun terjadi peningkatan penggunaan listrik selama tahun 2024, secara berkelanjutan PLN berupaya mengurangi pemakaian energi dari sumber energi primer tidak terbarukan. Berbagai inisiatif strategi yang konsisten dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

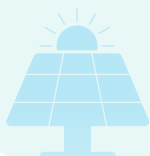
tons. In terms of electricity consumption, PLN not only distributes electricity to customers, but also uses electricity for internal operations, including the use of electricity for central power plants, substations, and electricity distribution systems. In 2024, the total volume of electricity used was recorded at 12,598.31 GWh or equivalent to 45.35 million GJ.

Though there was an increase in electricity use in 2024, PLN continuously strove to reduce the energy use from non-renewable primary energy sources. Various strategic initiatives consistently carried out by the Company include:



Untuk mendukung efisiensi energi, PLN telah menerapkan berbagai strategi, seperti modernisasi jaringan distribusi menggunakan teknologi *smart grid*, peningkatan otomatisasi dan digitalisasi dalam distribusi listrik yang dilengkapi aplikasi pendukung seperti Portal SCADA, dan *Meter Data Management System* (MDMS), serta implementasi sistem manajemen energi berbasis standar ISO 50001:2018. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan operasional, tetapi juga mengurangi kehilangan energi dalam jaringan. PLN juga terus mengembangkan inovasi dan program strategis, termasuk *Electrifying Agriculture* untuk meningkatkan elektrifikasi sektor pertanian dan *Electrifying Marine* guna mengurangi ketergantungan pelabuhan pada bahan bakar fosil.

To support energy efficiency, PLN has implemented various strategies, such as modernizing the distribution network by using smart grid technology, increasing automation and digitalization in electricity distribution equipped with supporting applications such as SCADA Portal and Meter Data Management System (MDMS), as well as implementing energy management system based on ISO 50001:2018 standard. This step is not only aimed at optimizing operations, but also reducing energy loss in the network. PLN also constantly makes innovations and develops strategic programs, including the Electrifying Agriculture to increase electrification of agricultural sector and the Electrifying Marine to reduce port dependence on fossil fuels.



Inisiatif strategis yang dilakukan PLN tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga turut berperan dalam pencapaian Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.

The strategic initiatives carried out by PLN not only increase operational efficiency, but also play a role in achieving Goal 12: Responsible Consumption and Production.

Pengelolaan dan Pengendalian Emisi Gas GRK

GHG Emission Management and Control

Sebagai penyedia energi utama di Indonesia, PLN berkomitmen dalam pengelolaan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mendukung target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Dengan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama batubara, PLN menyadari bahwa emisi GRK dari sektor ketenagalistrikan dapat berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, PLN telah menerapkan berbagai strategi mitigasi dan pengendalian emisi untuk mengurangi jejak karbon dalam operasionalnya.

As the main energy provider in Indonesia, PLN is committed to managing Greenhouse Gas (GHG) emissions to support the Net Zero Emission (NZE) target by 2060. With its dependence on fossil fuels, particularly coal, PLN is aware that GHG emissions from electricity sector can have a significant impact on climate change. Therefore, PLN has implemented various mitigation and emission control strategies to reduce the carbon footprint in its operations.

Kinerja Lingkungan Environmental Performance

PLN secara berkala melakukan inventarisasi dan penghitungan emisi GRK Pembangkit berdasarkan Edaran Direksi No. 0025 Tahun 2022 tentang Standar Prosedur Pengelolaan Emisi GRK, yang merupakan turunan dari Peraturan Direksi No. 0161 Tahun 2021 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Perubahan Iklim. Total emisi GRK dari cakupan 1, 2, dan 3 pada tahun 2024 mencapai 276,56 juta ton CO₂e.

PLN memanfaatkan sumber EBT dan menambah pembangkit dengan 75% berbasis EBT, guna mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Untuk mengurangi emisi GRK, PLN menerapkan berbagai inisiatif strategis di berbagai sektor. Dalam pengembangan EBT, PLN menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW hingga tahun 2034. Untuk menekan emisi dari pembangkit listrik, PLN menerapkan teknologi rendah emisi, seperti *co-firing* biomassa, konversi PLTG ke PLTGU, dan *Clean Coal Technology*(CCT).

PLN periodically conducts inventory and calculation of GHG emissions from power plants based on Board of Directors' Circular No. 0025 of 2022 on Standard Procedures for GHG Emissions Management, a derivative of Board of Directors' Regulation No. 0161 of 2021 on Strategic Policy for Climate Change Management. The total GHG emissions from scopes 1, 2, and 3 in 2024 reached 276.56 million tons of CO₂e.

PLN utilizes new and renewable energy sources and adds power plants with 75% new and renewable energy-based to support the Power Supply Business Plan (RUPTL). To reduce GHG emissions, PLN implements various strategic initiatives in various sectors. In developing EBT, PLN is targeting an additional capacity of 69.5 GW by 2034. To reduce emissions from power plants, PLN implements low-emission technologies, such as biomass *co-firing*, conversion of PLTG to PLTGU, and Clean Coal Technology (CCT).

Realisasi dan Dampak Reduksi Emisi GRK

Realization and Impact of GHG Emission Reduction



✓ Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung transisi energi dan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, PLN berhasil mencatatkan realisasi reduksi emisi sebesar ±12,77 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi 4 inisiatif utama PLN di antaranya, penambahan kapasitas pembangkit EBT, program *co-firing* biomassa PLTU, konversi dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU), serta *clean coal technology*.

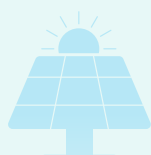
✓ Inisiatif lainnya juga dilakukan oleh PLN melalui transisi energi dengan merealisasikan 3.233 SPKLU di seluruh Indonesia, termasuk 500 unit SPKLU Tiang yang terintegrasi dengan tiang listrik. Selain itu ada 526 SPBKLU, 9.956 SPLU dan 28.356 *home charging*. Pada tahun 2024 jumlah pelanggan *home charging* mencapai 28.356 pelanggan meningkat 302% dari tahun 2023 sejumlah 9.393 pelanggan. Sehingga total konsumsi listrik mencapai 9.100 MWh atau tumbuh 370% dari tahun 2023 sebesar 2.400 MWh.

Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian NZE 2060, tetapi juga sejalan dengan target Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim, dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

✓ As part of its commitment to supporting energy transition and decarbonization of electricity sector, PLN managed to record the realization of emission reduction of ±12.77 million tons of CO₂ in 2024. This achievement was the result of the implementation of 4 main PLN initiatives, including the addition of EBT generating capacity, PLTU biomass *co-firing* program, conversion of Gas Power Plants to Steam Power Plants (PLTGU), and clean coal technology.

✓ Other initiatives were also carried out by PLN through energy transition by realizing 3,233 SPKLU throughout Indonesia, including 500 SPKLU Pole units integrated with electricity poles. In addition, there were 526 SPBKLU, 9,956 SPLU and 28,356 *home charging*. In 2024, the number of home charging customers reached 28,356 customers, an increase of 302% from 2023 of 9,393 customers. So that the total electricity consumption reached 9,100 MWh or grew by 370% from 2023 of 2,400 MWh.

These steps not only support the achievement of NZE 2060, but are also in line with the target of Goal 13: Addressing Climate Change, of the Sustainable Development Goals, which emphasizes reducing emissions and adapting to climate change.



Pengelolaan Air

Water Management

PLN menyadari bahwa ketersediaan air bersih merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Air digunakan terutama untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) serta untuk kebutuhan operasional di berbagai fasilitas perusahaan. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mengelola sumber daya air secara bijak guna memastikan ketersediaan air bagi kebutuhan operasional tanpa mengganggu ekosistem dan masyarakat sekitar.

Pada tahun 2024, PLN mencatat total konsumsi air mencapai 2.108,03 juta m³, yang bersumber dari berbagai sumber seperti air permukaan, air tanah, air laut, dan air hujan. Untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan air, PLN telah menerapkan berbagai inisiatif strategis, di antaranya:

PLN realizes that the availability of clean water is a crucial aspect in maintaining environmental balance. Water is used primarily for hydroelectric power plants (PLTA) as well as for operational needs in various company facilities. Therefore, PLN is committed to managing water resources wisely to ensure the availability of water for operational needs without disrupting the ecosystem and surrounding communities.

In 2024, PLN recorded total water consumption reaching 2,108.03 million m³, which came from various sources such as surface water, groundwater, seawater, and rainwater. To ensure the sustainability and efficiency of water use, PLN has implemented various strategic initiatives, including:



✓ Pemantauan dan Pengelolaan Sumber Air Bersama

PLN memastikan bahwa pengambilan air dari sumber yang juga digunakan oleh masyarakat tidak menimbulkan dampak negatif. Hingga akhir 2024, tidak ada keluhan dari masyarakat terkait gangguan akibat pengambilan air oleh PLN.

✓ Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)

Dalam menghadapi kondisi kekeringan, PLN menerapkan TMC untuk meningkatkan curah hujan dan menjaga ketersediaan air di bendungan. Teknologi ini telah diterapkan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Masamba, Sulawesi Selatan, yang menjadi sumber air bagi PLTA Bakaru.

✓ Kepatuhan terhadap Regulasi PLTS Terapung

Dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung, PLN memastikan bahwa pemanfaatan ruang di waduk tidak lebih dari 5% dari luas permukaan waduk pada kondisi air normal, sesuai dengan regulasi Kementerian PUPR. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah gangguan terhadap pemanfaatan air oleh masyarakat sekitar.

✓ Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk Efisiensi Air

PLN terus mengembangkan program efisiensi air melalui konsep 3R guna mengurangi pemborosan. Pada tahun 2024, PLN berhasil menghemat 4.660.977 m³ air yang diterapkan di 42 unit pembangkit.

✓ Penggunaan Teknologi Pengukuran Debit Air

Proses pengambilan air oleh PLN menggunakan pompa yang dilengkapi dengan *flow meter* untuk memastikan penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan dan menghindari pemborosan.

Upaya ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang dijalankan PLN dalam mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta mendukung percepatan pencapaian Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan bagi semua.

✓ Monitoring and Management of Shared Water Resource

PLN ensures that water withdrawal from sources also used by the community does not cause negative impacts. Until the end of 2024, there were no complaints from the community regarding disruptions due to water withdrawal by PLN.

✓ Weather Modification Technology (TMC)

In dealing with drought conditions, PLN implements TMC to increase rainfall and maintain water availability in the dam. This technology has been implemented in Masamba watershed, South Sulawesi, which serves as the water source for PLTA Bakaru.

✓ Compliance with floating PLTS (PLTS Terapung) Regulations

In developing floating Solar Power Plant (PLTS), PLN ensures that the utilization of space in the reservoir is no more than 5% of the reservoir's surface area under normal water condition, in accordance with the regulations of the Ministry of PUPR. This aims to maintain ecosystem balance and prevent disruption to water utilization by the surrounding community.

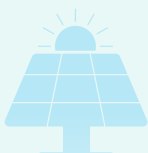
✓ 3R Program (*Reduce, Reuse, Recycle*) for Water Efficiency

PLN continues to develop water efficiency programs through the 3R concept to reduce waste. In 2024, PLN managed to save 4,660,977 m³ of water applied in 42 generating units.

✓ Use of Water Discharge Measurement Technology

PLN's water intake process uses a pump equipped with a flow meter to ensure water use is in accordance with needs and avoid waste.

These efforts are in line with the sustainability principles implemented by PLN in supporting a cleaner and more environmentally friendly energy transition and supporting the acceleration of achieving Goal 6: Clean Water and Adequate Sanitation, of the Sustainable Development Goals, which aims to ensure the availability and sustainable management of clean water for all.



Pengelolaan Limbah dan Efluen Waste and Effluent Management

PLN berkomitmen untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku serta prinsip keberlanjutan. Dalam operasionalnya, PLN menghasilkan berbagai jenis limbah, termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non-B3, yang memerlukan pengelolaan khusus agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan timbulan limbah, PLN memanfaatkan sumber daya sendiri maupun bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Total volume timbulan limbah B3 pada tahun 2024 tercatat sebanyak 475.339,39 ton, sedangkan total volume timbulan limbah Non B3 terdaftar (FABA) sebanyak 3.266.594 ton dan Limbah Domestik (Sampah) sebanyak 5.123,82 ton.

Selain itu, PLN juga turut mengelola efluen secara bertanggung jawab guna memastikan dampaknya terhadap lingkungan tetap terkendali. Pengelolaan efluen dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan proses pemantauan dan pengukuran kualitas hasil olahan secara berkala. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2024, kualitas olahan efluen telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016. Selain itu, selama tahun 2024 juga tidak terjadi peristiwa tumpahan bahan kimia atau cairan berbahaya dalam jumlah signifikan yang dapat mencemari badan air.

PLN is committed to managing waste responsibly in accordance with applicable environmental regulations and sustainability principles. In its operations, PLN generates various types of waste, including B3 waste (Hazardous and Toxic Materials) and non-hazardous (non-B3) waste, which require special management so as not to have a negative impact on the environment. In managing waste generation, PLN utilizes its own resources and cooperates with stakeholders. The total volume of B3 waste generation in 2024 was recorded at 475,339.39 tons, while the total volume of registered Non-B3 waste generation (FABA) was 3,266,594 tons and Domestic Waste was 5,123.82 tons.

In addition, PLN also manages effluent responsibly to ensure that its impact on the environment remains under control. Effluent management is carried out through the Wastewater Treatment Plant (WWTP), with monitoring process and measuring the quality of treated effluent periodically. Based on the measurement results in 2024, the quality of treated effluent complied with the quality standards stipulated in the Minister of Environment Regulation No. 8 of 2009 and Minister of Environment and Forestry Regulation No. 68 of 2016. In addition, throughout 2024 there were no incidents of significant chemical spills or hazardous liquids that could pollute water bodies.

Strategi Inovatif Pengelolaan Limbah dari Kegiatan Pembangkitan, Transmisi, dan Distribusi Listrik.
Innovative Strategy for Waste Management from Electricity Generation, Transmission, and Distribution Activities.



✓ Pengelolaan Limbah B3: Memastikan Pengolahan Sesuai Regulasi

PLN memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Lingkungan. Untuk pengelolaan limbah B3, PLN Distribusi Listrik bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi dalam pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pada tahun 2024, 100% limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola sesuai dengan regulasi.

✓ Pada tahun 2024, PLN menerapkan berbagai strategi pengelolaan limbah B3 secara berkelanjutan melalui pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Strategi pengurangan limbah dilakukan dengan penggunaan teknologi oil purifier untuk memurnikan minyak isolasi trafo, modifikasi peralatan proses dengan teknologi ramah lingkungan, serta regenerasi resin bekas pada sistem pengolahan air. Dalam upaya penggunaan kembali (*reuse*), PLN memanfaatkan aki atau baterai bekas sebagai penyimpanan

✓ Hazardous Waste Management: Ensuring Treatment According to Regulations

PLN has hazardous waste storage facilities equipped with Technical Details of Hazardous Waste Storage and Environmental Approval. For hazardous waste management, PLN cooperates with third parties who have official permits in collecting, transporting, utilizing, processing, and disposing hazardous waste. In 2024, 100% of the hazardous waste generated was treated in accordance with regulations.

✓ In 2024, PLN implemented various strategies for sustainable B3 waste management through reduce, reuse, and recycle approach. The waste reduction strategy is carried out by using oil purifier technology to purify transformer insulating oil, modify process equipment with environmentally friendly technology, and regenerate used resin in water treatment system. In an effort to reuse, PLN utilized used batteries as energy storage in solar cell systems.

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

energi dalam sistem *solar cell*. Sementara itu, melalui strategi daur ulang (*recycle*), PLN berhasil mengurangi limbah B3 dengan mendaur ulang gypsum sebagai bahan campuran semen serta mengolah kembali minyak pelumas bekas agar memenuhi standar industri dan dapat digunakan kembali. Di tahun 2024 PLN mengurangi volume timbulan limbah B3 sebesar 1.920,55 ton atau 0,40% dari total timbulan limbah B3.

✓ Pengelolaan Limbah Non-B3: Pemanfaatan FABA untuk Ekonomi Sirkular

Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) yang dihasilkan dari PLTU telah diubah menjadi material yang bernilai ekonomi. PLN memiliki fasilitas penyimpanan dan pemanfaatan FABA serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan limbah ini. Total volume FABA yang didaur ulang tahun 2024 mencapai 2.346.899 ton atau 72,74% dari total timbulan FABA sebesar 3.226.594 ton.

✓ Pengelolaan Limbah Domestik: Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Limbah domestik berasal dari aktivitas operasional dan administratif PLN, seperti sampah kertas, plastik, sisa makanan, dan elektronik. PLN menerapkan strategi *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (3R) untuk mengurangi limbah domestik. Selama tahun 2024 PLN mengurangi timbulan limbah domestik/sampah sebesar 139,60 ton atau setara 2,72% dari total timbulan limbah domestik/sampah.

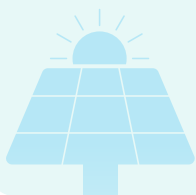
Meanwhile, through recycling strategy, PLN managed to reduce B3 waste by recycling gypsum as a material in cement mixture and reprocessing used lubricating oil so that they met industry standards and were reusable. In 2024, PLN reduced the volume of B3 waste generation by 1,920.55 tons or 0.40% of the total B3 waste generation.

✓ Non-B3 Waste Management: Utilization of FABA for a Circular Economy

Fly Ash and Bottom Ash (FABA) waste generated from PLTU was converted into materials with economic value. PLN has facilities for FABA storage and utilization and cooperates with various parties to utilize this waste. The total volume of FABA recycled in 2024 reached 2,346,899 tons or 72.74% of the total FABA generation of 3,226,594 tons.

✓ Domestic Waste Management: Waste Reduction and Utilization

Domestic waste comes from PLN's operational and administrative activities, such as paper, plastic, food waste, and electronics. PLN applies the Reduce, Reuse, and Recycle (3R) strategy to reduce domestic waste. Throughout 2024, PLN reduced its domestic waste/garbage generation by 139.60 tons or equivalent to 2.72% of total domestic waste/garbage generation.



Berbagai inisiatif strategis yang diterapkan PLN mendukung pencapaian Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, dan daur ulang.

Various strategic initiatives taken by PLN support the achievement of Goal 12: Responsible Consumption and Production of the Sustainable Development Goals with a focus on reducing waste production through prevention, reduction, and recycling.

Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Biodiversity Conservation

PLN menerapkan berbagai kebijakan dan strategi untuk meminimalkan dampak lingkungan serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Pada tahun 2024, PLN menetapkan Kebijakan Keanekaragaman Hayati dan Restorasi Lahan sebagai komitmen untuk mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati ke dalam seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan hingga pasca-operasi. Mengingat sebagian wilayah operasional PLN berada di dekat kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, pada tahun 2024, PLN melakukan koordinasi dengan pengelola beberapa taman nasional, antara lain: dengan Balai Besar TN Lore Lindu, Balai TN Bogani Nani Wartabone serta dengan TN Bali Barat.

PLN implements various policies and strategies to minimize environmental impacts and support biodiversity conservation. In 2024, PLN established a Biodiversity and Land Restoration Policy as a commitment to integrating biodiversity protection into the entire project cycle, from planning to post-operation. Given that some of PLN's operational areas are located near areas with high biodiversity value, in 2024, PLN coordinated with the managers of several national parks, among others: Lore Lindu National Park Center, Bogani Nani Wartabone National Park Office, and West Bali National Park.



Kinerja Lingkungan Environmental Performance

Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Kontribusi terhadap SDGs.

Biodiversity Conservation and Contribution to SDGs.



Upaya pelestarian yang dilakukan PLN telah berhasil menjaga dan meningkatkan jumlah spesies flora dan fauna yang dilindungi. Hingga tahun 2024, tercatat 408 spesies fauna dan 203 spesies flora yang berada di area konservasi PLN. Upaya ini sejalan dengan pencapaian Tujuan 15: Ekosistem Daratan, dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bertujuan untuk melindungi, merestorasi, dan mendukung penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan.

PLN's conservation efforts have succeeded in maintaining and increasing the number of protected flora and fauna species. As of 2024, 408 fauna species and 203 flora species were recorded in PLN's conservation areas. This effort is in line with the achievement of Goal 15: Terrestrial Ecosystem, of the Sustainable Development Goals, which aims to protect, restore, and support the sustainable use of terrestrial ecosystem.

Selanjutnya, PLN juga turut mendukung program reforestasi melalui penanaman pohon untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Pada tahun 2024, PLN berhasil menanam 1.029.327 pohon dengan total area konservasi mencapai 1.200 Ha, yang berkontribusi pada peningkatan serapan emisi karbon.

Furthermore, PLN also supports the reforestation program through tree planting to increase environmental carrying capacity. In 2024, PLN managed in planting 1,029,327 trees with a total conservation area of 1,200 Ha, contributing to increase carbon emission absorption.

Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Environmental Management and Conservation Costs

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan, PLN secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Pengalokasian biaya ini mencakup aspek operasional di setiap unit bisnis/unit pelaksana. Pada tahun 2024, PLN merealisasikan anggaran investasi untuk pengelolaan lingkungan sebesar Rp10,07 triliun, yang digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif strategis sejalan dengan agenda transisi energi dan pengurangan emisi.

As a form of commitment to sustainability, PLN consistently allocates budget for environmental management and conservation. This cost allocation covers operational aspects in each business unit/implementing unit. In 2024, PLN allocated an investment budget of Rp10.07 trillion for environmental management, which was used to fund various strategic initiatives in line with energy transition and emission reduction agenda.

Pengaduan Masalah Lingkungan Environmental Complaints

PLN menyediakan layanan pengaduan bagi pihak-pihak yang ingin melaporkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan yang timbul akibat kegiatan operasional Perseroan. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai sarana yang telah disediakan. Selama tahun 2024 PLN menerima beberapa pengaduan terkait pengelolaan

PLN provides a complaint service for parties who wish to report problems related to environmental management arising from the Company's operational activities. Complaints can be submitted through various means provided. Throughout 2024, PLN received several complaints related to environmental management, and they were followed up

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

lingkungan hidup, dan telah ditindaklanjuti untuk penyelesaian. Salah satu pengaduan yang disampaikan terkait rencana perluasan dan pengembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai, NTT. PLN menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mendukung pembentukan tim investigasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tim investigasi akan memastikan perluasan dan pengembangan PLTP Ulumbu telah memenuhi standar lingkungan yang ketat, dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat.

for settlement. One complaint submitted was related to the planned expansion and development of PLTP Ulumbu in Manggarai Regency, NTT. PLN followed up on the complaint by supporting the formation of an investigation team by NTT Provincial Government and involving all stakeholders. The investigation team will ensure that the expansion and development of PLTP Ulumbu has met strict environmental standards, and has not had a negative impact on the environment or the community.

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

Social Performance – Customer Relationship Management Aspects

Komitmen PLN terhadap Pengembangan Produk dan Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

PLN's Commitment to Product Development and Customer Relationship Management

PLN berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan guna meningkatkan pengalaman pelanggan serta mendukung transformasi sektor energi. Transformasi digital menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah pengembangan New PLN *Mobile*, sebuah SuperApp yang mengintegrasikan berbagai layanan kelistrikan, kendaraan listrik, hingga layanan internet dalam satu *platform*. Aplikasi ini memungkinkan pelanggan mengakses layanan PLN dengan lebih mudah, transparan, dan efisien, mencerminkan komitmen perusahaan dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna.

PLN is committed to continuing to develop products and services to improve customer experience and support the transformation of energy sector. Digital transformation is the main focus in efforts to improve operational efficiency and provide convenience for customers. One concrete form of this transformation is the development of New PLN Mobile, a SuperApp that integrates various electricity services, electric vehicles, and internet services in one platform. This application allows customers to access PLN services more easily, transparently, and efficiently, reflecting the Company's commitment to providing the best experience for users.

Sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pelanggan, PLN juga terus meningkatkan standar pelayanan di *Contact Center* PLN 123 dengan memenuhi standar kelas dunia. Keberhasilan ini dibuktikan dengan raihan 14 penghargaan dalam ajang *Global Contact Center World Award* (GCCWA) 2024 tingkat Asia Pasifik. Melalui

As part of efforts to maintain the quality of customer service, PLN also continues to improve service standards at PLN 123 Contact Center by meeting world-class standards. This success is evidenced by the achievement of 14 awards at the 2024 Global Contact Center World Award (GCCWA) in Asia Pacific. Through various business transformations



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

Social Performance – Customer Relationship Management Aspects

berbagai transformasi bisnis yang dilakukan, PLN berhasil menghadirkan layanan pelanggan yang lebih cepat, responsif, dan berkualitas tinggi. *Contact Center* PLN kini berfungsi sebagai layanan satu pintu dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang optimal, mencakup tingkat respons yang cepat, tingkat keberhasilan layanan yang tinggi, serta kepuasan pelanggan yang terus meningkat. Lebih lanjut, penghargaan ini sekaligus merupakan wujud nyata dari transformasi PLN dalam menempatkan *customer focused* sebagai pilar utama Perseroan.

carried out, PLN has succeeded in providing faster, more responsive, and high-quality customer service. PLN Contact Center now functions as a one-stop service with optimal Service Level Agreement (SLA), including fast response rate, high service success rate, and increasing customer satisfaction. Furthermore, these awards are also concrete manifestation of PLN's transformation in placing customer focus as the Company's main pillar.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

Equality in Fulfilling Service Quality to Customers

PLN berkomitmen untuk menyediakan layanan kelistrikan yang berkualitas, dan merata bagi seluruh pelanggan di Indonesia. Dengan mengutamakan inovasi, keberlanjutan, dan digitalisasi, PLN memastikan bahwa setiap individu dan sektor usaha dapat mengakses listrik secara optimal, tanpa memandang lokasi, skala usaha, atau latar belakang sosial ekonomi. Sebagai penyedia utama tenaga listrik di Indonesia, PLN terus berinovasi untuk meningkatkan keandalan jaringan, mempercepat elektrifikasi di daerah terpencil, serta mengoptimalkan layanan pelanggan berbasis teknologi digital agar setiap pelanggan mendapatkan pengalaman layanan yang setara dan berkualitas.

PLN is committed to providing quality and equitable electricity services to all customers in Indonesia. By prioritizing innovation, sustainability, and digitalization, PLN ensures that every individual and business sector can access electricity optimally, regardless of location, business scale, or socio-economic background. As the main provider of electricity in Indonesia, PLN continues to innovate to improve network reliability, accelerate electrification in remote areas, and optimize digital technology-based customer services so that every customer gets an equal and quality service experience.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan layanan, PLN terus membangun dan memperkuat jaringan listrik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik yang sama. Salah satu langkah konkret dalam pemerataan energi ini adalah Program Listrik Desa, yang bertujuan menghadirkan listrik hingga ke pelosok negeri. Selain itu, PLN juga berkomitmen untuk memberikan layanan listrik yang inklusif dengan memastikan bahwa kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat menikmati akses listrik yang berkeadilan. Program Subsidi Listrik Tepat Sasaran diterapkan untuk membantu pelanggan yang membutuhkan, sementara program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine* hadir untuk memberikan dukungan listrik bagi sektor pertanian dan perikanan, sehingga meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di kedua sektor tersebut.

To realize service equality, PLN continues to build and strengthen electricity network, particularly in the 3T (disadvantaged, frontier, and outermost) areas, to ensure that all people obtain the same access to electricity. One concrete step in this energy equality is the Village Electricity Program, aiming at providing electricity to remote areas of the country. Furthermore, PLN is also committed to providing inclusive electricity services by ensuring that vulnerable groups and low-income communities can enjoy equitable access to electricity. The Targeted Electricity Subsidy Program is implemented to help customers in need, while the Electrifying Agriculture and Electrifying Marine programs are presented to provide electricity support for agriculture and fisheries sectors, thereby increasing productivity and community welfare in both sectors.

Transparansi Informasi Produk dan Layanan

Transparency of Product and Service Information

PLN mewujudkan transparansi informasi produk dan layanan dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses bagi pelanggan. PLN menghadirkan berbagai saluran komunikasi, seperti situs web resmi dan Contact Center PLN 123, yang memungkinkan pelanggan mendapatkan informasi tentang layanan listrik, tarif, serta berbagai program dan inisiatif terbaru. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelanggan terhadap layanan PLN serta memastikan bahwa para pelanggan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kebutuhan kelistrikan.

Selain itu, dalam menjalankan komunikasi pemasaran, PLN senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sepanjang tahun 2024, PLN tidak menerima sanksi hukum atau denda terkait ketidakpatuhan dalam penyampaian informasi produk maupun komunikasi pemasaran.

PLN realizes transparency of product and service information by providing clear, accurate, and easily accessible information for customers. PLN presents various communication channels, such as official website and PLN 123 Contact Center, which allow customers to obtain information about electricity services, tariffs, and various latest programs and initiatives. This transparency aims to improve customer understanding of PLN services and ensure that customers can make the right decisions regarding their electricity needs.

In addition, in carrying out marketing communications, PLN always complies with applicable regulations, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Throughout 2024, PLN did not incur any legal sanctions or fines related to non-compliance in delivering product information or marketing communications.

Pasokan Listrik yang Aman dan Efisien

Safe and Efficient Electricity Supply

PLN terus berupaya memastikan pasokan listrik yang aman, andal, dan efisien bagi seluruh pelanggan di Indonesia. PLN secara aktif melakukan pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur listrik guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerapan Program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yang bertujuan untuk memeriksa dan memastikan keamanan instalasi listrik pelanggan. Selain itu, PLN juga mengimbau pelanggan untuk melakukan perawatan rutin terhadap instalasi listrik guna menghindari risiko korsleting dan kebakaran.

Dalam mendukung efisiensi dan keamanan listrik, PLN juga menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jaringan listrik, termasuk kabel transmisi dan distribusi, guna memastikan pasokan listrik yang stabil dan berkualitas. Selain itu, PLN terus mengembangkan teknologi digitalisasi jaringan melalui sistem *Advanced Metering Infrastructure* (AMI) dan *Advanced Distribution Management System* (ADMS), yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan jaringan listrik secara lebih efektif.

PLN strives to ensure a safe, reliable, and efficient electricity supply for all customers in Indonesia. PLN actively maintains and develops electricity infrastructure to improve the reliability of electricity system. One concrete step taken is the implementation of Control of Electricity Usage (P2TL) Program, which aims to check and ensure the safety of customers' electrical installations. In addition, PLN also urges customers to carry out regular maintenance on electrical installations to avoid the risk of short circuits and fires.

In supporting electrical efficiency and safety, PLN also implements the Indonesian National Standard (SNI) for electricity networks, including transmission and distribution cables, to ensure a stable and quality electricity supply. In addition, PLN continues to develop network digitalization technology through Advanced Metering Infrastructure (AMI) and Advanced Distribution Management System (ADMS), which enable more effective monitoring and management of electricity network.



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

Social Performance – Customer Relationship Management Aspects

PLN memastikan keamanan listrik serta penyalurannya ke pelanggan. Seluruh kabel yang kami gunakan untuk menyalurkan listrik adalah produk kabel yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia/SNI Komite Teknis Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Secara rutin PLN melakukan pemeliharaan jaringan distribusi, dan penertiban terhadap kabel serta optical distribution point (ODP) ilegal di tiang listrik milik PLN.

PLN ensures the safety of electricity and its distribution to customers. All cables utilized to distribute electricity are cable products that have fulfilled the Indonesian National Standard/SNI for the Technical Committee for Electricity Transmission and Distribution of Electric Power from the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources. PLN routinely performs maintenance for the distribution network, and controls illegal cables and optical distribution points (ODP) on PLN's electricity poles.

Sebagai hasil dari upaya peningkatan kualitas dan keandalan layanan, pada tahun 2024 tidak ada produk atau layanan listrik PLN yang ditarik kembali. Hal ini mencerminkan keberhasilan PLN dalam menjaga standar mutu yang tinggi serta memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi standar keselamatan dan efisiensi yang berlaku.

As a result of efforts to improve the quality and reliability of services, in 2024 no PLN electricity products or services were recalled. This reflects PLN's success in maintaining high quality standards and ensuring that every product and service provided to customers meets applicable safety and efficiency standards.

Keamanan Siber dan Privasi Informasi Pelanggan

Cybersecurity and Customer Information Privacy

Dalam era transformasi digital yang semakin kompleks, perlindungan terhadap infrastruktur kritis menjadi prioritas utama untuk memastikan kelangsungan bisnis, keamanan data pelanggan, serta menjaga reputasi perusahaan. Ancaman siber yang semakin canggih dan beragam menuntut PLN untuk menerapkan sistem keamanan yang tangguh dan proaktif dalam menghadapi potensi risiko. Untuk itu, PLN telah menetapkan Kebijakan Keamanan Siber yang diatur dalam Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0047.E/DIR/2024 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi Di Lingkungan PT PLN (Persero). Kebijakan ini mencakup langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keamanan Teknologi Informasi PLN agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta melindungi sumber daya Teknologi Informasi di lingkungan PLN terhadap penggunaan, penyebaran, perusakan, dan perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

In an era of increasingly complex digital transformation, protecting critical infrastructure is a top priority to ensure business continuity, customer data security, and maintain the Company's reputation. Increasingly sophisticated and diverse cyber threats require PLN to implement a robust and proactive security system in dealing with potential risks. To that end, PLN has established a Cybersecurity Policy as regulated in the Implementing Regulation of PT PLN (Persero) No. 0047.E/DIR/2024 on Standard Procedures for Managing Information Technology Security in PT PLN (Persero). This policy includes strategic steps in implementing PLN's Information Technology security management to comply with the Company's business needs and applicable laws and regulations, as well as protecting Information Technology resources within PLN from use, distribution, destruction, and changes by irresponsible parties.

Untuk memperkuat keamanan informasi, PLN secara aktif mengimplementasikan berbagai inisiatif perlindungan data pelanggan, sehingga selama tahun 2024, PLN tidak menerima sanksi dari pihak berwenang terkait dugaan kebocoran informasi atau pelanggaran privasi, pelanggan,

To strengthen information security, PLN actively implements various customer data protection initiatives, and therefore, throughout 2024, PLN did not incur any sanctions from the authorities regarding alleged information leaks or privacy violations. This matter reflects the effectiveness of data

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

Social Performance – Customer Relationship Management Aspects

yang mencerminkan efektivitas sistem perlindungan data yang telah diterapkan. Salah satu langkah nyata dalam meningkatkan ketahanan siber adalah kolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) di bawah Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) melalui pembentukan PLN-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*). Tim ini berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap potensi serangan siber di lingkungan internal PLN maupun dalam ekosistem energi nasional secara lebih luas.

Selain penguatan sistem keamanan, PLN juga berfokus pada peningkatan literasi digital bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. PLN secara rutin melakukan *security awareness training* bagi seluruh pegawai dan melaksanakan audit *surveillance* ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang dilaksanakan pada 27-30 Mei 2024. Selain itu pada tahun 2024 PLN membentuk PLN-CSIRT di subholding dan anak perusahaan untuk memperkuat perlindungan di seluruh unit bisnisnya melalui Keputusan Direksi Nomor 0287.K/DIR/2024 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Cyber Security Incident Response Team*) PT PLN (Persero) yang disahkan pada tanggal 4 November 2024.

protection system that has been implemented. One concrete step in improving cyber resilience is collaborating with Electronic Certification Center (BSrE) under the National Crypto and Cyber Agency (BSSN) through the formation of the PLN-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*). This team plays a role in improving preparedness and response to potential cyber attacks in PLN's internal environment and in the national energy ecosystem at large.

Apart from strengthening security system, PLN also focuses on improving digital literacy for employees and other stakeholders. PLN regularly conducts security awareness training for all employees and carries out surveillance audits of ISO 27001:2013 Information Security Management System, carried out on May 27-30, 2024. Furthermore, in 2024, PLN established PLN-CSIRT in subholdings and subsidiaries to strengthen protection in all its business units through the Board of Directors' Decision No. 0287.K/DIR/2024 on Cyber Security Incident Response Team of PT PLN (Persero), ratified on November 4, 2024.

Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

Customer Complaint Management

PLN telah mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan pelanggan yang terintegrasi guna memastikan respons cepat dan penyelesaian yang efektif terhadap keluhan pelanggan. Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal, termasuk *Contact Center* PLN 123, aplikasi *New PLN Mobile*, media sosial, *email*, serta asisten virtual. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan pengaduan, PLN juga telah mengembangkan *Virtual Command Center* (VCC) yang memungkinkan pemantauan dan penyelesaian pengaduan secara *real time* melalui aplikasi Yantek Mobile.

Sepanjang tahun 2024, PLN menerima 25.479.240 pengaduan dan permintaan informasi melalui berbagai saluran, dengan mayoritas pengaduan diterima melalui New PLN Mobile sebesar 47,00% dan *Contact Center* PLN 123 sebesar 42,15%. Seluruh pengaduan/keluhan yang disampaikan pelanggan tahun 2024 telah dapat diselesaikan.

PLN has developed an integrated customer complaint management system to ensure a fast response and effective settlement of customer complaints. Customers can submit complaints through various channels, including PLN 123 Contact Center, New PLN Mobile application, social media, email, and virtual assistants. To improve efficiency in handling complaints, PLN has also developed a Virtual Command Center (VCC) that allows real-time monitoring and settlement of complaints through Yantek Mobile application.

Throughout 2024, PLN received 25,479,240 complaints and requests for information through various channels, with the majority of complaints received through New PLN Mobile at 47.00% and PLN 123 Contact Center at 42.15%. All complaints/grievances submitted by customers in 2024 were settled.



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Hubungan dengan Pelanggan

Social Performance – Customer Relationship Management Aspects

Survei Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Survey

Untuk memastikan kepuasan pelanggan, PLN secara berkala melakukan survei guna menilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Pada tahun 2024, survei ini dilakukan melalui metode tatap muka dan mandiri, melibatkan 10.356 pelanggan. Hasil survei menunjukkan bahwa Skor Tingkat Kepuasan Pelanggan meningkat menjadi 98,93 dari skala 100, meningkat dari tahun 2023 sebesar 98,02. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan merasa “sangat puas” terhadap produk dan layanan yang diberikan Perseroan.

To ensure customer satisfaction, PLN periodically conducts survey to assess the customer satisfaction level with the services provided. In 2024, this survey was conducted through face-to-face and independent methods, involving 10,356 customers. The survey results showed that the Customer Satisfaction Level Score increased to 98.93 on a scale of 100, an increase from 98.02 in 2023. This shows that customers feel “very satisfied” with the products and services provided by the Company.

Indeks Kepuasan Pelanggan 2020 - 2024

Customer Satisfaction Index In 2012-2024

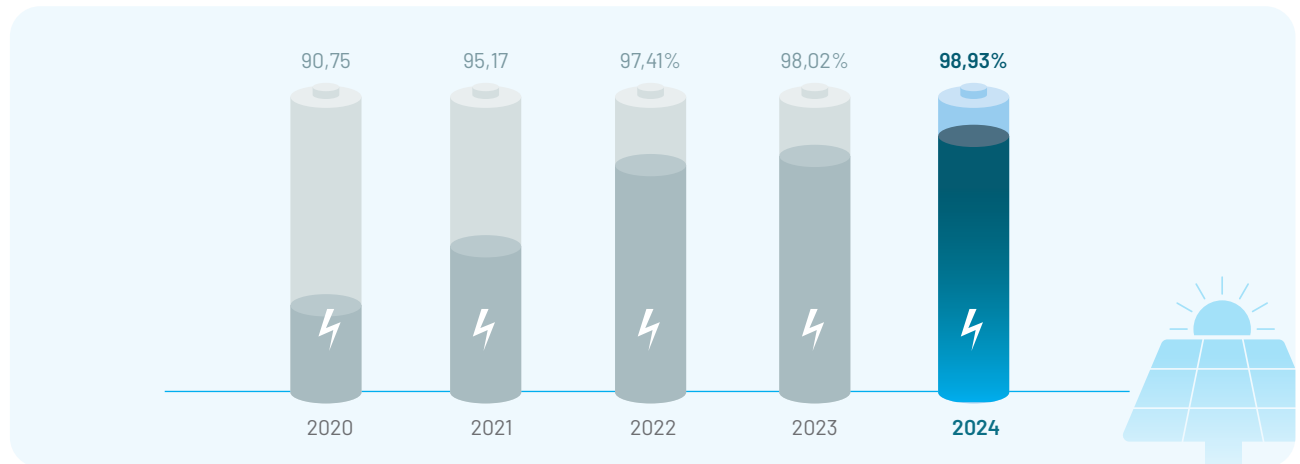


Photo by Bayu Fatma
PLN UIW NTB

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

Komitmen PLN Dalam Menciptakan SDM yang Unggul

PLN's Commitment to Creating Excellent Human Resources

PLN menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pilar strategis dalam mendukung keberlanjutan Perseroan dan kemandirian energi nasional. PLN berkomitmen membangun SDM yang unggul melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, serta pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan. Komitmen ini juga tercermin dalam upaya pengembangan karir, peningkatan kapasitas individu, dan penerapan standar tinggi dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam pengelolaan SDM, PLN mengadopsi praktik terbaik yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditingkat internal, Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan yang memastikan pengelolaan SDM dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai standar hukum yang berlaku. Melalui kebijakan ini, PLN memastikan kesejahteraan karyawan terjaga sekaligus mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara berkelanjutan, demi terwujudnya swasembada energi nasional yang berintegritas.

PLN places Human Resources (HR) as one of strategic pillars in supporting the Company's sustainability and national energy independence. PLN is committed to establishing excellent HR through continuous competency improvement, creating inclusive work environment, and providing equal opportunities for all employees. This commitment is also reflected in career development efforts, increasing individual capacity, and implementing high standards in occupational health and safety aspects.

In HR management, PLN adopts best practices in line with laws and regulations, particularly Law No. 13 of 2003 on Manpower and its amendments through Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Internally, the Company has established various policies that ensure HR management is carried out transparently, fairly, and in accordance with applicable legal standards. Through this policy, PLN ensures that employee welfare is maintained while supporting the achievement of the Company's goals in a sustainable manner, in order to realize national energy self-sufficiency with integrity.

Inisiatif Program Pengelolaan SDM Tahun 2024

Human Resources Management Program Initiative in 2024

PLN selalu mengutamakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pemenuhan hak-hak karyawan. Komitmen Perseroan dalam menghormati HAM tercermin dalam kebijakan yang secara tegas menolak segala bentuk praktik kerja paksa. Selain itu, PLN juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur, menerapkan prinsip non-diskriminasi, mendukung inklusivitas dan keberagaman, menjamin kebebasan berserikat, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan layak bagi seluruh karyawan.

PLN always prioritizes respect for Human Rights (HAM), including the fulfillment of employee rights. The Company's commitment to respecting human rights is reflected in a policy that firmly rejects all forms of forced labor practices. In addition, PLN is also committed to not employing minors, implementing the principle of non-discrimination, supporting inclusivity and diversity, guaranteeing freedom of association, and creating a safe and decent work environment for all employees.



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

Keberagaman, Kesempatan Setara dan Non-Diskriminasi

Diversity, Equal Opportunity, and Non-Discrimination

PLN menyadari bahwa keberagaman dalam lingkungan kerja merupakan elemen penting dalam mendorong inovasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, Perseroan menitikberatkan pada prinsip keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan dalam mendukung keberlanjutan Perseroan. PLN membuka kesempatan kerja secara setara kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), tanpa memandang latar belakang suku, budaya, ras, agama, atau afiliasi politik. Proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan terbuka yang dapat diakses melalui laman resmi: <https://rekrutmen.pln.co.id>.

Sebagai bentuk komitmen tertulis terhadap keberagaman, PLN menerbitkan *Statement of Corporate Intent* No. 0056.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Dukungan PLN terhadap peningkatan peran perempuan juga diwujudkan melalui penguatan peran komunitas Srikandi PLN dan penyelenggaraan PLN *Women Summit* 2024, yang diikuti oleh seluruh pegawai perempuan.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, PLN juga menerapkan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja, sejalan dengan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Komitmen ini diperkuat melalui penerapan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2020 tentang Perlindungan, Pencegahan, dan Penanganan Pelecehan Seksual di lingkungan kerja. Selama tahun 2024, tidak terdapat laporan atau kasus yang berkaitan dengan dugaan diskriminasi dalam hubungan kerja di lingkungan PLN.

Adapun komposisi karyawan PLN pada tahun 2024 mencerminkan keberagaman, dengan proporsi karyawan pria sebesar 78,89% dan perempuan sebesar 21,11%. Perseroan juga mencatat keberadaan kelompok minoritas sebesar 0,05% dan penyandang disabilitas sebesar 0,10%.

PLN recognizes that diversity in the work environment is an important element in driving innovation and effective decision-making. Therefore, the Company emphasizes the principles of diversity, inclusion, and equal opportunities for all employees in supporting the Company's sustainability. PLN opens equal employment opportunities to all Indonesian citizens (WNI), regardless of ethnicity, culture, race, religion, or political affiliation. The recruitment process is conducted transparently and openly and is accessible through the official website: <https://rekrutmen.pln.co.id>.

As a form of written commitment to diversity, PLN issued a *Statement of Corporate Intent* No. 0056.P/DIR/2023 on Gender Mainstreaming Policy (PUG). PLN's support for increasing the role of women is also manifested through strengthening the role of PLN Srikandi community and holding the 2024 PLN Women Summit, attended by all female employees.

As part of its efforts to create a workplace free from violence and discrimination, PLN also implements Policy on Mutual Respect in the Workplace, in line with ILO Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation, and ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment in the World of Work. This commitment is strengthened through the implementation of Board of Directors' Regulation No. 0015.P/DIR/2020 on Protection, Prevention, and Handling of Sexual Harassment in the Workplace. Throughout 2024, there were no reports or cases related to alleged discrimination in employment relations within PLN.

The composition of PLN employees in 2024 reflected diversity, with a proportion of 78.89% male employees and 21.11% female employees. The Company also recorded the presence of 0.05% minority groups and 0.10% people with disabilities.

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

Kesetaraan Dalam Pengembangan Karier

Equality in Career Development

PLN menjamin setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier, tanpa memandang gender, usia, latar belakang, atau kondisi fisik. Komitmen ini tercermin dalam struktur organisasi dan komposisi manajerial yang inklusif, mencerminkan keberagaman yang mencakup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Perseroan secara aktif mendorong partisipasi perempuan dalam posisi manajerial dan strategis.

Sebagai bagian dari indikator kinerja utama (KPI) keberagaman, PLN menetapkan target nominated *talent* perempuan sebesar 32%. Pada tahun 2024, jumlah pegawai perempuan yang menduduki posisi manajerial mencapai 377 orang, atau setara dengan 16,19% dari total 2.329 posisi manajerial. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, yang tercatat sebanyak 339 orang atau 15,15% dari 2.237 posisi manajerial. Selain itu, PLN juga mencatat adanya keberagaman dalam kelompok manajerial dari kategori rentan, yaitu sebanyak 1 orang dari kelompok minoritas dan 2 orang penyandang disabilitas, sebagai wujud nyata penerapan prinsip kesetaraan dalam pengembangan karier.

PLN guarantees that every employee has the same opportunity to develop their career, regardless of gender, age, background, or physical condition. This commitment is reflected in an inclusive organizational structure and managerial composition, reflecting diversity that includes vulnerable groups such as people with disabilities and minority groups. The Company actively encourages women's participation in managerial and strategic positions.

As part of the diversity key performance indicators (KPI), PLN set a target of 32% female nominated talent. In 2024, there were 377 female employees occupying managerial positions, or equivalent to 16.19% of the total 2,329 managerial positions. This number showed an increase compared to that of 2023 of 339 female employees or 15.15% of 2,237 managerial positions. In addition, PLN also recorded the diversity in managerial group from vulnerable category, namely 1 employee from a minority group and 2 employees with disabilities, as a concrete manifestation of equality principle application in career development.

Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

Equality in Competency Development

PLN meyakini bahwa pengembangan kompetensi merupakan aspek penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, khususnya dalam menghadapi tantangan transisi energi. Sebagai bagian dari komitmen terhadap kesetaraan, PLN memastikan bahwa seluruh karyawan, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap program pengembangan kapasitas dan pelatihan kerja. Setiap pegawai didorong untuk terus meningkatkan keahlian dan pengetahuan, baik melalui pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, maupun pendidikan formal.

Untuk memperkuat agenda transisi energi, PLN secara aktif meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk Program Pegawai Tugas Belajar (PTB). Pada tahun 2024, sebanyak 163

PLN believes that competency development is an important aspect in generating excellent and adaptive human resources, particularly in facing the challenges of energy transition. As part of its commitment to equality, PLN ensures that all employees, without exception, have equal access to capacity development programs and job training. All employees are encouraged to continuously improve their skills and knowledge, either through technical training, leadership development, or formal education.

To strengthen the energy transition agenda, PLN actively increases HR capacity through various strategic initiatives, including Employee Study Program (PTB). In 2024, 163 PLN employees were recorded continuing their studies at various



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

pegawai PLN tercatat melanjutkan studi di berbagai universitas terbaik dunia guna memperkuat kesiapan Perseroan dalam menghadapi masa depan industri energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Investasi PLN dalam pengembangan kompetensi juga tercermin dari peningkatan anggaran pelatihan. Total biaya pendidikan dan pelatihan (diklat) pada tahun 2024 mencapai Rp1.042,65 miliar dengan rata-rata jam pelatihan per pegawai pada tahun 2024 sebesar 85,62 jam. Hal ini diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keberagaman materi pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan transformasi industri dan digitalisasi sektor ketenagalistrikan.

world-class universities to strengthen the Company's readiness to face a greener and more sustainable future for the energy industry.

PLN's investment in competency development is also reflected in the increase of training budget. The total cost of education and training programs in 2024 reached Rp1,042.65 billion, with an average training hours per employee in 2024 of 85.62 hours. This is balanced by an increase in the quality and diversity of training materials that are more relevant to the needs of industrial transformation and digitalization of the electricity sector.

Perlindungan Hak Pekerja: Komitmen terhadap Anti Pekerja Anak dan Bebas Kerja Paksa

Protection of Workers' Rights: Commitment to Anti-Child Labor and Freedom from Forced Labor

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan yang adil, PLN secara tegas memastikan tidak terdapat pekerja anak maupun praktik kerja paksa dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang layak, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip kerja yang adil.

PLN menetapkan kebijakan internal yang melarang mempekerjakan individu di bawah usia 18 tahun, selaras dengan regulasi nasional serta standar internasional seperti Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk Terburuk Pekerja Anak. Selain itu, seluruh karyawan bekerja dalam batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 8 (delapan) jam kerja per hari. Apabila terdapat jam kerja tambahan, PLN memastikan kompensasi lembur diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Selama tahun pelaporan, PLN tidak menerima laporan maupun temuan terkait keberadaan pekerja anak atau praktik kerja paksa di seluruh wilayah operasionalnya.

As part of its commitment to respecting human rights and fair labor practices, PLN firmly ensures that there is no child labor or forced labor practices in all of its operational activities. The Company upholds humanitarian values and is committed to creating a decent, dignified, and fair work environment.

PLN has established an internal policy that prohibits the employment of individuals under the age of 18, in line with national regulations and international standards such as ILO Convention No. 138 on Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182 on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. In addition, all employees work within the specified time limit, which is 8 (eight) working hours per day. If there are additional working hours, PLN ensures that overtime compensation is provided in accordance with the provisions stipulated in the Company Regulations and applicable labor regulations.

Throughout the reporting year, PLN did not receive any reports or findings related to the existence of child labor or forced labor practices in all of its operational areas.

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hubungan Industrial

Freedom of Association and Protection of Industrial Relations

PLN menghormati dan mendukung hak setiap karyawan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja sebagai bagian dari prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh undang-undang dan standar ketenagakerjaan internasional. Perseroan memastikan bahwa tidak ada hambatan atau risiko yang dapat menghalangi pelaksanaan hak ini di seluruh lingkungan kerja. Hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 28.335 pegawai, atau 74% dari total karyawan PLN, menjadi anggota dari tiga serikat pekerja yang aktif di PLN.

Sebagai bagian dari kerja sama antara manajemen dan serikat pekerja, PLN bersama perwakilan serikat telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan hubungan kerja. PKB yang berlaku untuk periode pelaporan adalah PKB Periode 2022-2024, yang menjangkau dan melindungi seluruh pegawai PLN, termasuk mereka yang bukan anggota serikat pekerja. Hal ini menunjukkan komitmen PLN terhadap hubungan industrial yang sehat, transparan, dan inklusif.

PLN respects and supports the right of every employee to associate and form a labor union as part of the principle of freedom of association guaranteed by international labor laws and standards. The Company ensures that there are no obstacles or risks that can hinder the implementation of this right in all work environments. As of December 31, 2024, there were 28,335 employees, or 74% of PLN's total employees, who were members of three active labor unions at PLN.

As part of the collaboration between management and labor unions, PLN together with union representatives have prepared and established a Collective Labor Agreement (CLA) as an instrument for protecting and regulating work relations. The CLA applicable for the reporting period is the 2022-2024 CLA, which covers and protects all PLN employees, including those who are not members of a labor union. This demonstrates PLN's commitment to healthy, transparent, and inclusive industrial relations.

Remunerasi yang Setara dan Kesejahteraan Pegawai

Equal Remuneration and Employee Welfare

PLN berkomitmen untuk menjalankan praktik ketenagakerjaan terbaik dengan menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi. Remunerasi bagi karyawan diberikan berdasarkan klasifikasi jabatan, masa kerja, tanggung jawab, lokasi kerja, dan kinerja individu, tanpa membedakan *gender*. Komitmen ini tercermin dalam rasio remunerasi 1:1 antara karyawan pria dan wanita pada posisi dan tanggung jawab yang setara. Pada tahun 2024, remunerasi pada jabatan terendah di PLN masih berada di atas ketentuan upah minimum regional (UMR) di seluruh wilayah operasional Perseroan. Komponen remunerasi meliputi gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan yang disesuaikan dengan jenjang jabatan dan status kepegawaian. Beberapa jenis tunjangan tertentu, seperti cuti besar, penghargaan kesetiaan masa kerja (winduan), serta bantuan pinjaman, hanya diberikan kepada pegawai tetap.

PLN is committed to implementing the best employment practices by upholding the principles of fairness, transparency, and non-discrimination. Remuneration for employees is provided based on the classification of positions, length of service, responsibilities, work location, and individual performance, regardless of genders. This commitment is reflected in the 1:1 remuneration ratio between male and female employees in equal positions and responsibilities. In 2024, the remuneration for the lowest position at PLN was still above the regional minimum wage (UMR) provisions in all of the Company's operational areas. Remuneration components include basic salary and various types of allowances adjusted to position level and employment status. Certain types of allowances, such as extended leave, loyalty awards for length of service (for every eight years of service), and loan assistance, are only provided to permanent employees.



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

PLN juga memberikan cuti melahirkan selama 123 hari kalender kepada pegawai perempuan. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 822 pegawai perempuan yang menjalani cuti melahirkan dan 2.620 pegawai laki-laki yang mengambil cuti kelahiran anak. Seluruh karyawan yang mengambil cuti tersebut telah kembali bekerja tanpa ada pengunduran diri setelah masa cuti berakhir. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peran ganda perempuan. Untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi pegawai yang memasuki masa purnabakti, PLN juga menyediakan berbagai program perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Seluruh program ini menjadi bagian dari sistem penghargaan dan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi insan PLN.

PLN also provides 123 calendar days of maternity leave to female employees. Throughout 2024, 822 female employees took maternity leave and 2,620 male employees took paternity leave. All employees who took leave have returned to work without any resignations after the leave period ended. This shows the Company's success in creating a work environment that supports women's dual roles. To ensure long-term welfare, particularly for employees entering retirement, PLN also provides various social protection programs such as pension health insurance, Old-Age Security (JHT), and Pension Security (JP). All of these programs are part of a comprehensive reward and social protection system for PLN employees.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan

Employee Health and Safety

PLN berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasional dan kesejahteraan pegawai. Pelayanan kesehatan kerja diberikan kepada seluruh pegawai PLN maupun pekerja mitra, untuk mengurangi risiko terhadap paparan bahaya atau risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sepanjang tahun 2024, PLN telah menerapkan prinsip higiene industri sebagai langkah identifikasi dan pengendalian berbagai faktor risiko di lingkungan kerja, termasuk suhu ekstrem dan tingkat kebisingan. Selain itu, PLN juga melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (*Medical Check-Up/MCU*) terhadap 37.062 pegawai sebagai bagian dari upaya deteksi dini kondisi kesehatan. Untuk mendukung pemeliharaan kesehatan secara berkelanjutan, Perseroan meluncurkan *Corporate Wellness Program* yang bersifat preventif dan promotif. Program ini mendorong pembiasaan pola hidup sehat di kalangan pegawai, yang implementasinya didukung oleh penggunaan *Wellness Application* sebagai sarana monitoring. Melalui inisiatif ini, PLN memastikan pegawai tetap sehat dan bugar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

PLN is committed to creating a healthy work environment as part of its efforts to maintain operational sustainability and employee welfare. Occupational health services are provided to all PLN employees and partner workers, to reduce the risk of exposure to hazards or Occupational Health and Safety (OHS) risks. Throughout 2024, PLN implemented industrial hygiene principles as a step to identify and control various risk factors in the work environment, including extreme temperatures and noise levels. In addition, PLN also conducted comprehensive Medical Check-Up (MCU) on 37,062 employees as part of efforts to detect health conditions early. To support sustainable health maintenance, the Company launched a preventive and promotive Corporate Wellness Program. This program encourages healthy lifestyle habits among employees, the implementation of which is supported by the use of Wellness Application as a monitoring tool. Through this initiative, PLN ensures that employees remain healthy and fit in carrying out their duties and responsibilities optimally.

Untuk menunjang layanan kesehatan darurat, PLN menyediakan fasilitas medis di unit-unit pembangkit dan bekerja sama dengan tenaga medis bersertifikat. Selain itu, PLN menjamin layanan kesehatan non-penyakit akibat

To support emergency health services, PLN provides medical facilities in generating units and cooperates with certified medical personnel. Furthermore, PLN guarantees non-occupational disease (non-PAK) health services for

Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

kerja (non-PAK) bagi pegawai dan keluarganya, dengan total biaya yang telah direalisasikan pada tahun 2024 mencapai Rp954 miliar untuk 38.289 orang. Perseroan juga menyertakan seluruh pegawai dan keluarga dalam BPJS Kesehatan, dengan total iuran sebesar Rp206 miliar.

Selain itu, PLN juga senantiasa memprioritaskan keselamatan kerja sebagai pilar utama dalam menjaga produktivitas dan kelangsungan operasional. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan budaya keselamatan yang kuat, dengan target utama *zero accident*. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, PLN melakukan penilaian tingkat kematangan K3 secara triwulanan. Sebagai bentuk penguatan budaya keselamatan, PLN menerapkan PLN *Life Saving Rules*, yakni 10 aturan dasar keselamatan kerja yang disosialisasikan ke seluruh unit untuk mengurangi potensi risiko.

employees and their families, the total cost realized in 2024 reached Rp954 billion for 38,289 people. The Company also includes all employees and their families in BPJS Kesehatan (health insurance by social security agency), with a total contribution of Rp206 billion.

Furthermore, PLN also constantly prioritizes occupational safety as the main pillar in maintaining productivity and operational continuity. This commitment is realized through the implementation of strong safety culture, with the main target of zero accident. To ensure compliance with occupational safety standards, PLN conducts quarterly assessments of the level of OHS maturity. As a form of strengthening safety culture, PLN implements PLN Life Saving Rules, namely 10 basic occupational safety rules disseminated to all units to reduce potential risks.

Turnover Karyawan

Employee Turnover

Pada tahun 2024, PLN merekrut sebanyak 663 pegawai baru yang terdiri dari 494 orang atau 74,5% laki-laki dan 169 orang atau 25,5% perempuan. Di sisi lain, jumlah karyawan juga mengalami penyesuaian seiring dengan keluarnya sejumlah pegawai karena berbagai alasan, seperti pengunduran diri, memasuki masa pensiun, mutasi kembali ke anak perusahaan, pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hormat, maupun karena meninggal dunia. Sepanjang tahun 2024, tingkat turnover karyawan tercatat sebesar 2,69%. Perseroan terus memantau dan mengelola tingkat turnover yang ada guna menjaga kesinambungan operasional serta memastikan proses alih pengetahuan berjalan dengan baik, terutama di tengah tantangan transisi energi dan transformasi organisasi.

In 2024, PLN recruited 663 new employees consisting of 494 or 74.5% male and 169 or 25.5% female. On the other hand, the number of employees has also been adjusted along with of a number of employees exiting for various reasons, such as resignation, entering retirement, re-transfer to a subsidiary, dishonorable termination of employment (PHK), or death. Throughout 2024, the employee turnover rate was recorded at 2.69%. The Company continues to monitor and manage the existing turnover rate to maintain operational continuity and ensure that the knowledge transfer process runs smoothly, particularly amidst the challenges of energy transition and organizational transformation.

Penanganan Pengaduan Karyawan

Handling of Employee Complaints

PLN menyediakan berbagai saluran pengaduan bagi karyawan sebagai wujud komitmen terhadap penciptaan lingkungan kerja yang terbuka, responsif, dan kondusif. Setiap karyawan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional perusahaan. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung kepada atasan masing-masing untuk

PLN provides various complaint channels for employees as a form of commitment to creating an open, responsive, and conducive work environment. Every employee has the right to submit complaints, input, or suggestions related to various aspects of the Company's operations. Complaints can be submitted directly to their respective superiors for follow-up, or through official channels such as in-person meetings



Kinerja Sosial – Aspek Pengelolaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Social Performance – Employment Management, Occupational Health and Safety Aspects

ditindaklanjuti, maupun melalui saluran resmi seperti pertemuan tatap muka dalam kegiatan *gathering*, atau melalui *Employee Care Center* yang disediakan khusus untuk menangani isu-isu ketenagakerjaan secara profesional. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pengaduan yang mengindikasikan pelanggaran terhadap pengelolaan ketenagakerjaan. Dengan demikian, PLN tidak menerima denda maupun sanksi atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

during gathering activities, or through Employee Care Center specifically provided to handle employment issues professionally. Throughout 2024, there were no complaints indicating violations of employment management. Thus, PLN did not incur any fines or sanctions for non-compliance with labor laws and regulations.

Survei Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Survey

Pada tahun 2024, PLN kembali melaksanakan *Employee Experience Survey* yang diselenggarakan setiap tahun untuk mengukur tingkat keterlibatan (*engagement*) dan kepuasan kerja pegawai organik aktif. Survei ini merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan. Hasil survei tahun ini menunjukkan tingkat *engagement* pegawai yang sangat tinggi, dengan skor mencapai 92%. Capaian ini mencerminkan komitmen PLN dalam menjaga hubungan yang kuat antara Perseroan dan karyawan, sekaligus menjadi indikator positif atas efektivitas strategi pengelolaan sumber daya manusia yang telah diterapkan.

In 2024, PLN again conducted an Employee Experience Survey, held annually to measure the level of engagement and job satisfaction of active organic employees. This survey is part of the Company's efforts to create a positive, productive, and sustainable work environment. The results of this year's survey show a very high level of employee engagement, with a score reaching 92%. This achievement reflects PLN's commitment to maintaining a strong relationship between the Company and employees, as well as serving as a positive indicator of the effectiveness of human resource management strategy that has been implemented.

Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment

Komitmen PLN dalam Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

PLN's Commitment to Social Development and Community Empowerment

PLN menyadari bahwa keberlangsungan usaha tidak dapat dipisahkan dari penerimaan dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, membangun hubungan

PLN realizes that business continuity is inseparable from community acceptance and support. Therefore, establishing harmonious and mutually beneficial relationships with the

Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment

yang harmonis dan saling menguntungkan dengan masyarakat merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan. PLN menyelaraskan seluruh program TJSL dengan kerangka kerja *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan ISO 26000 *Guidance on Social Responsibility*, sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan standar global dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Implementasi program dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis yang aktif dalam setiap tahap pelaksanaan.

Seluruh program tersebut dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Creating Shared Value* (CSV), yang menyeimbangkan kepentingan perusahaan (*Profit*), masyarakat (*People*), dan lingkungan (*Planet*). Perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya membawa manfaat bagi perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan semangat kolaboratif dan keberlanjutan, PLN terus berkomitmen menjadi bagian dari solusi bagi tantangan sosial dan lingkungan, demi Indonesia yang lebih terang, berdaya, dan sejahtera.

community is part of the Company's long-term strategy. PLN aligns all TJSL programs with the Sustainable Development Goals (SDGs) framework and ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, as an effort to ensure that every step taken is in line with global standards in sustainable development and social responsibility. The program is carried out in a participatory and sustainable manner, by involving community as an active strategic partner in every stage of implementation.

All of these programs are designed with reference to the principles of Creating Shared Value (CSV), which balance the interests of the Company (Profit), community (People), and the environment (Planet). The Company ensures that every activity carried out not only brings benefits to the Company, but also provides sustainable added value to the community and the surrounding environment. With a collaborative and sustainable spirit, PLN is consistently committed to becoming part of the solution to social and environmental challenges, for a brighter, more empowered, and more prosperous Indonesia.

Inisiatif Program Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Tahun 2024

Social and Community Empowerment Program Initiatives in 2024

Sebagai bentuk nyata dari komitmen terhadap prinsip-prinsip ESG, PLN telah menetapkan berbagai program TJSL yang menjadi prioritas utama pada tahun 2024. Program-program ini difokuskan pada sektor-sektor strategis yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah sekitar operasional Perseroan. Fokus utama diarahkan pada empat sektor, yaitu pendidikan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), lingkungan, serta inisiatif *Creating Shared Value* (CSV) yang mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sepanjang tahun 2024 PLN telah menyalurkan dana TJSL yang bersumber dari berbagai skema pendanaan, antara lain dari *Community Involvement and Development*

As a concrete form of commitment to ESG principles, PLN established various TJSL programs as top priorities in 2024. These programs were focused on strategic sectors considered capable of making significant contribution to accelerate sustainable development, particularly in areas around the Company's operations. The main focus is directed at four sectors, namely education, development of micro and small enterprises (MSEs), environment, and Creating Shared Value (CSV) initiative integrating business interests with community empowerment.

To support the implementation of these programs, throughout 2024, PLN distributed TJSL funds sourced from various funding schemes, including from Community Involvement and Development (CID) with an allocation of



Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment

(CID) dengan alokasi sebesar Rp400 miliar dan realisasi sebesar Rp377,37 miliar, serta Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dialokasikan sebesar Rp1,5 miliar dengan tingkat realisasi 100%. Selain itu, PLN juga telah mengalokasikan anggaran untuk program TJSL non-CID sebesar Rp210,79 miliar dengan realisasi mencapai Rp176,85 miliar. Seluruh inisiatif ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan dampak positif yang merata bagi masyarakat.

Rp400 billion and a realization of Rp377.37 billion, as well as the Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding Program with an allocation of Rp1.5 billion and a realization rate of 100%. In addition, there was also an allocation of Rp210.79 billion for non-CID TJSL program with a realization of Rp176.85 billion. All of these initiatives are implemented in an integrated and sustainable manner, with the aim of creating a positive impact that is evenly distributed to the community.

Pendidikan Education

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, PLN mengalokasikan dana sebesar Rp81,07 miliar untuk Program Pendidikan dalam pelaksanaan TJSL tahun 2024. Dana ini digunakan untuk melanjutkan dan memperluas cakupan sejumlah program strategis yang bertujuan mendorong akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Beberapa program unggulan yang dijalankan antara lain Beasiswa Duta Bercahaya, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan generasi muda berprestasi dan berwawasan kebangsaan; Internet Pintar, yang menyediakan akses internet gratis bagi pelajar di daerah terpencil; serta Perpustakaan PLN Edu, yang memberikan akses bahan bacaan dan pembelajaran digital bagi masyarakat. Selain itu, melalui Sekolah Informasi dan program PLN Peduli Pendidikan, Perseroan turut membekali siswa dan masyarakat dengan pengetahuan kelistrikan, literasi digital, dan keterampilan dasar lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman.



Seluruh inisiatif ini dijalankan sebagai bagian dari upaya jangka panjang PLN untuk menciptakan generasi yang cerdas, adaptif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa sekaligus menjadi salah satu prioritas dukungan PLN terhadap Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

To support the improvement of quality of education in Indonesia, PLN allocated funds of Rp81.07 billion for Education Program in implementing TJSL in 2024. These funds were used to continue and expand the scope of a number of strategic programs aimed at encouraging access, equity, and quality of education in various regions. Several leading programs carried out included Duta Bercahaya Scholarship, intended to support the development of young generation with achievements and national insight; Smart Internet, providing free internet access for students in remote areas; and PLN Edu Library, providing access to reading materials and digital learning for the community. In addition, through the Information School and PLN Peduli Pendidikan program, the Company also provides students and the community with knowledge of electricity, digital literacy, and other basic skills relevant to current developments.

All of these initiatives are carried out as part of PLN's long-term efforts to create a generation that is smart, adaptive, and ready to contribute to the progress of the nation while also being one of PLN's support priorities for Goal 4: Quality Education of the Sustainable Development Goals.

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Development of
Micro and Small
Enterprises
(MSEs)

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, PLN mengalokasikan dana sebesar Rp107,31 miliar untuk Program Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2024. Program ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif strategis, antara lain pengembangan UMK melalui Rumah BUMN, integrasi UMK ke dalam rantai pasok (supply chain) Perseroan, pemberdayaan kelompok rentan, pengembangan kawasan desa wisata, serta program PLN Peduli Pengembangan UMK.

As part of its commitment to promote inclusive and sustainable economic growth, PLN allocated Rp107.31 billion for the Micro and Small Enterprises (MSMEs) Development Program in 2024. This program was implemented through various strategic initiatives, including MSME development through Rumah BUMN, integration of MSMEs into the Company's supply chain, empowerment of vulnerable groups, development of tourist village areas, and PLN Peduli Pengembangan MSME program.

Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment

PLN juga menjalankan program pendampingan dan pembinaan UMKM untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan daya saing, salah satunya melalui Rumah BUMN dan Program Difablepreneur Berdaya yang ditujukan khusus bagi penyandang disabilitas. Selama tahun 2024, realisasi penyaluran dana UMK mencapai Rp107,31 miliar, dengan 20.289 pelaku UMKM menerima manfaat langsung dari program ini, dan sebanyak 241 UMKM berhasil naik kelas, menunjukkan peningkatan kapasitas usaha mereka secara signifikan. Selain itu, PLN juga mendorong UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan. Pada periode pelaporan, tercatat sekitar 4.300 UMKM dari berbagai sektor industri terlibat aktif dalam mendukung operasional PLN sebagai mitra usaha.



Melalui inisiatif ini, PLN tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur usaha kecil sebagai fondasi ekonomi lokal yang tangguh sekaligus menjadi salah satu prioritas dukungan PLN terhadap Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PLN also runs MSME mentoring and coaching programs to support digital transformation and increase competitiveness, one of which is through Rumah BUMN and Difablepreneur Berdaya Program which is specifically intended for people with disabilities. Throughout 2024, the realization of MSME fund distribution reached Rp107.31 billion, with 20,289 MSMEs receiving direct benefits from this program, and 241 MSMEs successfully upgrading, showing a significant increase in their business capacity. In addition, PLN also encourages MSMEs to become part of the Company's supply chain. Throughout the reporting period, it was recorded that around 4,300 MSMEs from various industrial sectors were actively involved in supporting PLN's operations as business partners.

Through this initiative, PLN not only creates economic opportunities, but also strengthens the structure of small businesses as the foundation of a resilient local economy while also becoming one of PLN's support priorities for Goal 8: Decent Work and Economic Growth of the Sustainable Development Goals.

Program Lingkungan Environmental Programs

Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, PLN mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,70 miliar untuk mendanai berbagai program lingkungan dalam rangka program TJSL tahun 2024. Berbagai inisiatif yang dijalankan meliputi pembangunan sarana air bersih dan MCK, pelestarian flora dan fauna, program Sampah Menjadi Energi (*Co-firing*), Sekolah Informal untuk edukasi lingkungan, serta program PLN Peduli Lingkungan yang fokus pada rehabilitasi ekosistem. Salah satu kegiatan utama adalah penanaman pohon produktif dan mangrove di sekitar wilayah operasional perusahaan, dengan prioritas lokasi penghijauan di area terdekat aset dan fasilitas PLN.



Dalam upaya meningkatkan akses air bersih, PLN bekerja sama dengan TNI AD pada tahun 2024 untuk membuka 50 titik baru penyediaan air bersih di berbagai wilayah Indonesia. Sejak tahun 2023, program ini telah membangun 106 titik sarana air bersih sehingga dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sebelumnya kesulitan mengakses sumber air layak. Inisiatif ini secara langsung mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain: Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak.

As a form of concern for environmental sustainability and efforts to support sustainable development, PLN allocated a budget of Rp107.70 billion to fund various environmental programs within the framework of the 2024 TJSL program. Various initiatives carried out included the construction of clean water and toilet facilities, flora and fauna preservation, Waste to Energy (*Co-firing*) program, Informal Schools for environmental education, and the PLN Cares for the Environment program which focuses on ecosystem rehabilitation. One of the main activities is planting productive trees and mangroves around the Company's operational areas, with priority for greening locations in areas closest to PLN assets and facilities.

To increase access to clean water, PLN cooperated with the Indonesian Army in 2024 to open 50 new clean water supply points in various regions of Indonesia. Since 2023, this program has built 106 clean water facilities and reached people in areas previously had difficulty accessing clean water sources. This initiative directly supports the achievement of several Sustainable Development Goals (SDGs), including: Goal 6: Clean Water and Adequate Sanitation.



Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment

Program CSV CSV Program



Sebagai bagian dari pendekatan *Creating Shared Value* (CSV), PLN terus mengembangkan program-program yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi Perseroan, tetapi juga menciptakan dampak sosial positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2024, PLN mengalokasikan dana sebesar Rp20,68 miliar untuk mendukung berbagai inisiatif CSV, di antaranya program sambung listrik gratis, *Electrifying Agriculture*, *Electrifying Marine*, pemanfaatan FABA (*fly ash* dan *bottom ash*), serta promosi penggunaan motor listrik.

Salah satu program yang dilakukan tahun 2024 adalah *Light Up The Dream*, yaitu penyambungan listrik gratis bagi keluarga prasejahtera yang didanai melalui donasi sukarela dari pegawai PLN. Program ini sejalan dengan tujuan TJSL Perseroan dalam membuka akses energi yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2024, *Light Up The Dream* berhasil menjangkau 12.011 keluarga prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, program *Electrifying Agriculture* dan *Electrifying Marine* turut mendorong transformasi sektor pertanian dan kelautan melalui elektrifikasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional pelaku usaha mikro dan komunitas nelayan.

As part of *Creating Shared Value* (CSV) approach, PLN continues to develop programs that not only provide economic value for the Company, but also provide positive social impacts directly felt by the community. In 2024, PLN allocated funds of Rp20.68 billion to support various CSV initiatives, including free electricity connection program, *Electrifying Agriculture*, *Electrifying Marine*, utilization of FABA (*fly ash* and *bottom ash*), and promotion of the use of electric motors.

One program carried out in 2024 was *Light Up The Dream*, a free electricity connection for underprivileged families funded through voluntary donations from PLN employees. This program is in line with the Company's TJSL goal of opening up fair and inclusive energy access for all levels of community. In 2024, *Light Up The Dream* successfully reached 12,011 underprivileged families in various regions of Indonesia. In addition, the *Electrifying Agriculture* and *Electrifying Marine* programs also encouraged the transformation of agricultural and marine sectors through electrification, thereby increasing the productivity and operational efficiency of micro-business actors and fishing communities.

Penanganan Pengaduan Masyarakat Handling Community Complaints

PLN berkomitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat adat di wilayah operasionalnya dan menjaga hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal. Pada tahun 2024, PLN menerima pengaduan dari Komunitas Masyarakat Adat 10 Gendang di Kabupaten Manggarai, NTT, terkait penolakan rencana pengembangan PLTP Ulumbu. Menanggapi hal tersebut, PLN menerapkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dan menjalin dialog terbuka. Dalam penyelesaiannya, PLN juga berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman RI yang turut memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan warga, guna mencapai solusi yang menghormati hak-hak masyarakat serta sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

PLN is committed to respecting the rights of indigenous peoples in its operational areas and maintaining harmonious relations with local communities. In 2024, PLN received a complaint from the 10 Gendang Indigenous Community in Manggarai Regency, NTT, regarding the rejection of PLTP Ulumbu development plan. In response to such matter, PLN implemented the principle of *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) and established an open dialogue. In resolving this issue, PLN also coordinated with the National Human Rights Commission and the Indonesian Ombudsman, who also facilitated mediation between the Company and residents, in order to reach a solution that respects the community's rights and is in line with Human Rights principles.

Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance - Aspects Of Social Development and Community Empowerment

Survei Kepuasan Masyarakat

Community Satisfaction Survey

Pelaksanaan program-program TJSL senantiasa disertai dengan pengukuran dampak sosial terhadap masyarakat. Pengukuran ini dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Social Return on Investment* (SROI). Pada tahun 2024, skor IKM mencapai 88,31, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelaksanaan program TJSL. Sementara itu, hasil pengukuran SROI tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 2,94. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program TJSL menghasilkan manfaat ekonomi sebesar Rp2,94 bagi masyarakat. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencatat nilai SROI sebesar 2,71, menandakan efektivitas program yang semakin baik dalam memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi penerima manfaat.

The implementation of TJSL programs is always accompanied by measuring the social impact on the community. This measurement is carried out through two main indicators, namely Community Satisfaction Index (CSI) and Social Return on Investment (SROI). In 2024, the IKM score reached 88.31, reflecting a high level of community satisfaction with the implementation of TJSL program. Meanwhile, the results of the 2024 SROI measurement showed a figure of 2.94. This figure indicated that every Rp1 invested in the TJSL program generated economic benefits of Rp2.94 for the community. This achievement showed an increase compared to the SROI value of 2.71 in 2023, indicating the increasing effectiveness of the program in providing social and economic impacts for beneficiaries.

Testimoni

Testimonial



“

Kami berterimakasih kepada PLN karena sudah mengikutsertakan dan memberdayakan kami sebagai UMKM di *local champions* agar bisa menembus pasar global. Ini menjadi kesempatan kami memasarkan produk kami untuk *go global*.

We are grateful that PLN includes and empowers us as MSMEs in local champions to penetrate the global market. This is our opportunity to market our products to go global.

Nurmala

Pemilik UMKM Kerajinan Tangan Fashters
Owner of Fashters Handicraft Small Business

”



Kinerja Sosial – Aspek Pengembangan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance – Aspects Of Social Development and Community Empowerment



“

Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak PLN yang telah membantu kami dari pompa air listrik hingga jaringan listrik ke wilayah pertanian. Tentunya ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat kami serta mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian, efisiensi waktu, dan lainnya.

Our highest appreciation goes to PLN that has helped us from electric water pumps to electricity networks to agricultural areas. This will certainly be beneficial for our community and can increase the quantity and quality of agricultural production, time efficiency, and so on.

Riyanto

Kepala Kampung Telaga Sari
Head of Telaga Sari Village

”

“

Sekarang dengan hadirnya listrik, saya sangat bersyukur dan bisa membuka peluang usaha. Saya mendoakan semoga PLN tambah sukses serta dapat membantu masyarakat kecil.

Now that we have electricity here, I am very grateful and can open up business opportunities. I pray that PLN will be more successful and can help the lower class.

Lija Dg. Tasa

Warga Kelurahan Karunrung, Kota Makassar
Residents of Karunrung Subdistrict, Makassar.

”

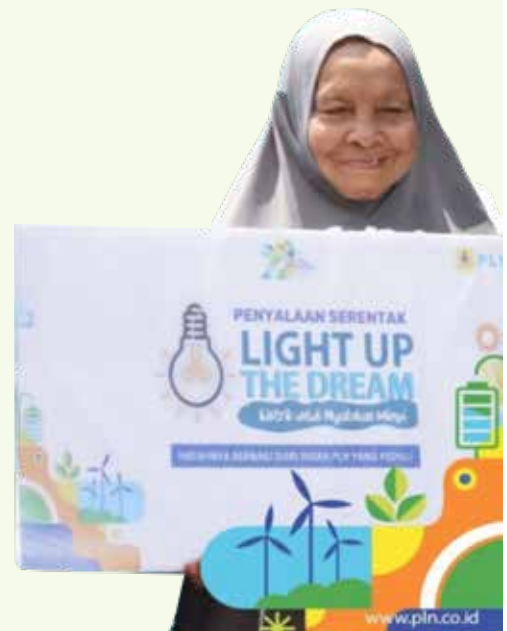




Photo by **Tri Benson**
Operasional-Climb Up Inspection-Kabupaten Tegal



Laporan Keuangan Audit

Audited Financial
Statements



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
*DECEMBER 31, 2024 AND 2023***



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY
ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

1. Nama/Name Alamat kantor/Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card Nomor telepon/Phone number Jabatan/Position	DARMAWAN PRASODJO PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan The Green Cluster Grand Canyon Blok I-2 No. 25 BS RT. 009, RW. 005, Kec Serpong, Tangerang Selatan (021) 7261122 DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR
2. Nama/Name Alamat kantor/Office address Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domicile as stated in ID Card Nomor telepon/Phone number Jabatan/Position	SINTHYA ROESLY PT PLN (PERSERO) Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan APT Taman Rasuna TWR 17-14 D RT 003 RW 010 Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan (021) 7261122 DIREKTUR KEUANGAN / DIRECTOR OF FINANCE

menyatakan bahwa/state that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian; 2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Beraku Umum di Indonesia; 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interni Perusahaan dan Entitas Anak.	1. We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements; 2. The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles; 3. a. All information contained in the Consolidated Financial Statements is complete and correct; b. The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts and do not omit material information and facts; 4. We are responsible for the Company and its Subsidiaries Internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 23 Mei 2025 / May 23, 2025

 DARMAWAN PRASODJO Direktur Utama / President Director	 SINTHYA ROESLY Direktur Keuangan / Director of Finance

Jl. Trunojoyo Blok M-I/135 Kebayoran Baru Jakarta 12160
T (021) 7261875, 7261122, 7262234, 7251234, 7250550
F (021) 7221330, 7397150 W www.pln.co.id

Paraf



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

00919/2.1457/AU.1/02/0241-5/1/V/2025



Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. Pemulihan atas pajak dibayar di muka

Lihat Catatan 4 - Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi signifikan, Catatan 19 - Pajak dibayar di muka dan Catatan 47 - Pajak penghasilan, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat pajak dibayar di muka sebesar Rp21,03 triliun terkait berbagai jenis pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan mencadangkan provisi atas ketidakpastian posisi pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp6,89 triliun.

Kami menentukan ini sebagai hal audit utama karena pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Selain itu, penyelesaian posisi pajak yang diambil oleh Grup dapat berlangsung beberapa tahun dan pada beberapa kasus, sulit untuk memprediksi hasilnya.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas penilaian manajemen atas pemulihan pajak dibayar di muka sehubungan dengan ketidakpastian posisi pajak yang diambil oleh Grup.
- Kami memperoleh dan membaca korespondensi dengan otoritas pajak dan hasil putusan pengadilan pajak untuk memahami posisi yang diambil oleh Grup.
- Kami menilai probabilitas hasil sengketa kasus pajak yang masih berjalan, kemampuan Grup untuk mempertahankan posisinya dan pemulihan atas pajak dibayar di muka yang diestimasi oleh Grup dengan memeriksa korespondensi antara Grup dan otoritas pajak yang relevan, dengan keterlibatan spesialis pajak kami.
- Kami melakukan rekalkulasi provisi berdasarkan estimasi kemungkinan keberhasilan yang ditentukan oleh Grup. Kami menilai, dengan melibatkan spesialis pajak kami, kemampuan Grup dalam mempertahankan posisi perpajakannya pada area-area tertentu yang dipertanyakan oleh otoritas pajak dengan mempertimbangkan analisis teknis kasus perpajakannya.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. Recoverability of prepaid taxes

Refer to Note 4 - Critical accounting judgements and significant accounting estimates, Note 19 - Prepaid taxes and Note 47 - Income tax, to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2024, the Group recorded prepaid taxes of Rp21.03 trillion relating to various taxes based on the assessments issued by the Directorate General of Taxation and held a provision against uncertain tax positions of income tax and other taxes of Rp6.89 trillion.

We determined this as a key audit matter because the judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the tax determination is uncertain. In addition, the resolution of the tax position taken by the Group can take several years and, in some cases, it is difficult to predict the outcome.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- We understood management's assessment of the recoverability of the prepaid taxes with respect to the uncertain tax positions taken by the Group.
- We obtained and read the correspondence with the tax authorities and the outcomes of tax court rulings to understand the positions taken by the Group.
- We assessed the probability of outcomes on the open tax cases, the Group's ability to defend its position and the recoverability of prepaid tax estimated by the Group by examining the correspondence between the Group and the relevant tax authorities, with the involvement of our tax specialists.
- We recalculated the provision based on the estimated likelihood of success determined by the Group. We assessed, with the involvement of our tax specialists, the Group's ability to defend its taxation position in certain areas challenged by the tax authorities by considering the technical analysis of the tax cases.



- Kami menilai apakah pengungkapan terkait yang disajikan di laporan keuangan konsolidasian telah memadai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan standar akuntansi yang berlaku.

2. Penilaian atas nilai tercatat liabilitas imbalan kerja

Lihat Catatan 3s - Informasi kebijakan akuntansi material - Imbalan kerja, Catatan 4 - Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi signifikan, dan Catatan 49 - Liabilitas imbalan kerja, atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja sebesar Rp74,02 triliun, yang terdiri atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan jangka panjang lainnya. Program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun PLN, pihak berelasi.

Manajemen melibatkan aktuaris independen untuk menentukan liabilitas imbalan kerja pada akhir tahun. Aktuaris mengestimasi nilai kini liabilitas imbalan kerja berdasarkan asumsi-asumsi utama untuk setiap jenis program imbalan kerja. Asumsi-asumsi signifikan meliputi estimasi tingkat kenaikan gaji per tahun, tingkat kenaikan manfaat pensiun per tahun, estimasi kenaikan biaya kesehatan masa depan dan tingkat diskonto.

Kami menentukan ini sebagai hal audit utama karena estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam menentukan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas syarat dan ketentuan liabilitas imbalan kerja.
- Kami menilai kompetensi, kapabilitas dan objektivitas aktuaris independen sebagai pakar manajemen.
- Kami menguji nilai kini liabilitas imbalan kerja, dengan melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Memahami metode penilaian yang digunakan oleh aktuaris dan menilai apakah metode penilaian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;

- We assessed the adequacy of the related disclosures provided in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the applicable accounting standards.

2. Assessment on the carrying value of employee benefits liabilities

Refer to Note 3s - Material accounting policy information - Employee benefits, Note 4 - Critical accounting judgements and significant accounting estimates, and Note 49 - Employee benefits liabilities, to the consolidated financial statements.

As at 31 December 2024, the Group recorded employee benefits liabilities of Rp74.02 trillion, consisting of pension program, other post-employment benefits, health care benefits and other long-term benefits. The pension program are managed by Dana Pensiun PLN, a related party.

Management engaged an independent actuary to determine the employee benefits liabilities at the year end. The actuary estimated the present value of employee benefit liabilities based on the key assumptions for each type of employee benefit plan. The significant assumptions include the estimated rate of salary increase per annum, pension benefit increase rate per annum, estimated future increases in medical costs and discount rates.

We determined this as a key audit matter because of the significant estimates made by management in determining the present value of the employee benefits liabilities.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We performed the following audit procedures in response to this matter:

- We understood the terms and conditions of the employee benefit liabilities.
- We assessed the competence, capabilities and objectivity of the independent actuary as management's expert.
- We tested the present value of the employee benefits liabilities, by performing the following procedures:
 - Understanding the valuation method used by the actuary and assessed whether the valuation method used was acceptable under the applicable accounting standards;



- Menilai dan mengevaluasi asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria, dengan bantuan tenaga ahli aktuaris internal kami, dengan melakukan prosedur berikut:
 - Menguji tingkat diskonto yang digunakan dengan membandingkannya dengan imbal hasil pasar obligasi Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Menguji estimasi tingkat kenaikan gaji, biaya kesehatan di masa depan, dan manfaat pensiun dengan membandingkannya dengan data historis dan rencana jangka panjang manajemen mengenai proyeksi kenaikan gaji, program imbalan pemeliharaan kesehatan, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya.
 - Menghitung ulang liabilitas imbalan kerja Grup untuk memeriksa keakuratan matematis.
 - Menguji akurasi data pegawai yang digunakan dalam model aktuaria, secara sampel, pada dokumen pendukung.
 - Kami menilai apakah pengungkapan terkait yang disajikan di laporan keuangan konsolidasian telah memadai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan standar akuntansi yang berlaku.
- 3. Nilai wajar aset tetap yang dicatat menggunakan model revaluasi**
- Lihat Catatan 3h - Aset tetap, Catatan 4 - Pertimbangan akuntansi penting dan estimasi akuntansi signifikan, dan Catatan 6 - Aset tetap, atas laporan keuangan konsolidasian.
- Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat aset tetap tertentu menggunakan model revaluasi sebesar Rp1.413,08 triliun dari total aset tetap sebesar Rp1.511,90 triliun.
- Manajemen melibatkan penilai independen untuk menentukan nilai wajar aset tetap pada akhir tahun, seperti menentukan data dan asumsi, dan menelaah metode penilaian pada proses revaluasi aset tetap. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset tetap. Perubahan asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang dicatat menggunakan model revaluasi.
- Assessing and evaluating the key assumptions used in the actuarial calculation, with the assistance of our internal actuarial experts, by performing the following procedures:
 - Testing the discount rates used by comparing them to market yields of Government bonds as at 31 December 2024.
 - Testing the estimated rate of salary increase, future health costs, and pension benefit increase by comparing them to historical data and management's long-term plan regarding the projected salary increase, health-care benefit and other long-term benefit plans.
 - Recalculating the employee benefits liabilities of the Group to check their mathematical accuracy.
 - Testing the accuracy of employee data used in the actuarial models, on a sample basis, to supporting documents.
 - We assessed the adequacy of the related disclosures provided in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the applicable accounting standards.
- 3. Fair value of property, plant and equipment recorded using the revaluation model**
- Refer to Note 3h – Property, plant and equipment, Note 4 – Critical accounting judgements and significant accounting estimates, and Note 6 – Property, plant and equipment, to the consolidated financial statements.
- As at 31 December 2024, the Group recorded certain property, plant and equipment using the revaluation model amounting to Rp1,413.08 trillion from total property, plant and equipment balance of Rp1,511.90 trillion.
- Management engaged an independent appraiser to determine the fair value of property, plant and equipment at the year end, such as to determine data and assumptions, and reviewed the valuation method in the process of property, plant and equipment revaluation. The approach and method used in conducting a revaluation depend on the class of property, plant and equipment. Changes in the assumptions used can significantly affect the value of assets recorded using the revaluation model.



Kami menentukan ini sebagai hal audit utama karena aset tetap signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan penilaian mereka melibatkan estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen termasuk tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam menentukan nilai wajar dari aset tetap.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami memperoleh pemahaman atas proses revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Grup.
- Kami memperoleh rincian aset tetap dan menguji keandalan rincian tersebut dengan melakukan pengecekan atas jumlah saldo ke neraca saldo.
- Kami menilai kompetensi, kapabilitas dan objektivitas pakar manajemen dan pakar auditor, yang merupakan penilai independen.
- Kami menguji nilai wajar aset tetap, dengan mendapatkan pemahaman atas metode penilaian yang digunakan oleh pakar manajemen, penilai independen, dan menilai apakah metode penilaian telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Kami menguji nilai wajar aset tetap, dengan menilai dan mengevaluasi asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penilaian nilai wajar aset tetap. Hal ini dilakukan dengan bantuan pakar auditor, penilai independen, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Kami melakukan penilaian atas input data dan asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh pakar manajemen, penilai independen, untuk menentukan nilai wajar aset tetap;
 - Menguji perhitungan matematis dan mengevaluasi data yang digunakan dalam model revaluasi, secara sampel, pada dokumen pendukung.
- Kami menilai apakah pengungkapan terkait yang disajikan di laporan keuangan konsolidasian telah memadai sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan standar akuntansi yang berlaku.

We determined this as a key audit matter as property, plant and equipment are significant to the consolidated financial statements and their valuation involves significant estimates, judgements and assumptions made by management, as well as a high degree of uncertainty in determining their fair value of property, plant and equipment.

How our audit addressed the Key Audit Matter

- *We understood the Group's property, plant and equipment revaluation process.*
- *We obtained details of property, plant and equipment and tested the reliability of the details by checking the total balances to the trial balance.*
- *We assessed the competence, capabilities and objectivity of the management's expert and the auditors' expert, who are independent appraisers.*
- *We tested the fair value of the property, plant, and equipment by gaining an understanding of the valuation method used by the management's expert, an independent appraiser, and assessing whether the valuation method was acceptable under the applicable accounting standards.*
- *We tested the fair value of the property, plant, and equipment by assessing and evaluating the key assumptions used in their valuation. This was performed with the assistance of the auditors' expert, an independent appraiser, by the following procedures:*
 - *We assessed the data inputs and key assumptions used by management's expert, an independent appraiser in determining the fair value of property, plant and equipment;*
 - *Testing the mathematical calculations and evaluating the data used in the revaluation model, on a sample basis, to supporting documents.*
- *We assessed the adequacy of the related disclosures provided in the consolidated financial statements in accordance with the requirements of the applicable accounting standards.*



Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan Grup, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan Grup diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan Grup, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Group's annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Group's annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Group's annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Generally Accepted Accounting Principles, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
23 Mei/May 2025



Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0241



Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Kecamatan Liris, Jakarta
00919/2.1457/01/02/0241-5/1/V/2025



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

AS AT DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	6	1,511,901,240	1,448,970,621	Property, plant and equipment
Aset hak guna	7	29,368,236	30,574,504	Right-of-use assets
Properti investasi	8	5,567,178	5,939,235	Investment properties
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	30,284,844	26,526,781	Investments in associates and joint ventures
Pajak dibayar di muka	19	12,340,937	12,376,005	Prepaid taxes
Aset pajak tangguhan	47	609,374	540,694	Deferred tax assets
Piutang pihak berelasi	10	1,097,914	1,028,387	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	3,289,705	4,434,080	Restricted cash in banks
Piutang lain-lain	17	1,500,345	1,883,832	Other receivables
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	246,471	41,138	Prepaid expenses and advances
Aset derivatif		604,572	-	Derivative assets
Aset tidak lancar lain	12	8,118,061	6,940,941	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,604,928,877	1,539,256,218	Total Non-Current Assets
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	13	61,364,446	55,920,541	Cash and cash equivalents
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11	232,510	99,019	Restricted cash in banks
Investasi jangka pendek	14	984,587	913,670	Short-term investments
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak berelasi	15	2,569,123	2,412,928	Related parties
Pihak ketiga	15	25,077,279	24,428,027	Third parties
Piutang dari Pemerintah	16	43,290,748	22,446,998	Receivables from Government
Piutang lain-lain	17	3,417,791	2,306,621	Other receivables
Persediaan	18	20,139,800	17,862,312	Inventories
Pajak dibayar di muka	19	5,403,503	3,783,609	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	20	4,269,422	952,477	Prepaid expenses and advances
Piutang pihak berelasi	10	178,202	251,026	Receivables from related parties
Aset derivatif		518,978	6,258	Derivative assets
Jumlah Aset Lancar		167,446,389	131,383,486	Total Current Assets
JUMLAH ASET		1,772,375,266	1,670,639,704	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham				Capital stock - par value of Rp1 per share
Modal dasar - 439.000.000 saham				Authorised - 439,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Subscribed and paid-up
150.536.096 saham	21	150,536,096	150,536,096	150,536,096 shares
Tambahan modal disetor	22a	34,608	34,608	Additional paid-in capital
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali		(2,100)	(2,100)	Difference in value from transactions with non-controlling interests
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	21	95,738,657	76,803,066	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	21	103,765,084	107,538,313	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain		709,892,501	679,584,024	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1,059,964,846	1,014,494,007	Equity attributable to owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		1,195,389	1,137,392	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		1,061,160,235	1,015,631,399	TOTAL EQUITY
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan	47b	70,002,171	58,228,739	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				Long-term liabilities - net of current portion
Penerusan pinjaman	24	23,023,177	26,243,812	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Government and non-bank Government
Pemerintah nonbank	25	2,092,807	1,472,907	financial institution loans
Utang sewa	26	10,015,345	10,501,832	Lease liabilities
Utang bank	27	135,444,401	127,875,171	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	188,527,108	191,986,322	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	29a	4,723,016	5,101,199	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	31	433,655	466,867	Other payables
Pendapatan ditangguhkan	23	34,449,127	27,104,985	Deferred revenue
Liabilitas imbalan kerja	49	70,452,141	62,831,038	Employee benefits liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		539,162,948	511,812,872	Total Non-Current Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/3 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	30	22,712,501	15,523,529	Related parties
Pihak ketiga	30	47,985,318	41,623,998	Third parties
Utang pajak	32	5,301,877	4,231,945	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	33	10,495,898	8,049,497	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja				Short-term employee
jangka pendek	49	10,998,635	7,882,380	benefits liabilities
Uang jaminan langganan	34	18,463,585	17,245,794	Customer security deposits
Utang biaya proyek	35	1,680,636	1,512,219	Project cost payables
Pendapatan ditangguhkan	23	3,849,635	1,581,942	Deferred revenue
Liabilitas derivatif	56	61,781	201,359	Derivative liabilities
Utang jangka panjang jatuh tempo				Current maturities of
dalam satu tahun				long-term liabilities
Penerusan pinjaman	24	3,013,763	2,939,616	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan				Government and non-bank
lembaga keuangan				Government financial
Pemerintah nonbank	25	750,000	750,000	institution loans
Utang sewa	26	2,880,568	2,267,698	Lease liabilities
Utang bank	27	21,785,261	20,947,017	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	28	10,532,135	5,578,511	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	29a	615,418	554,608	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	31	10,925,072	12,305,320	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		172,052,083	143,195,433	Total Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		711,215,031	655,008,305	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS		1,772,375,266	1,670,639,704	TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2/1 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN USAHA				REVENUE
Penjualan tenaga listrik	36	353,176,020	333,191,062	Sales of electricity
Penyambungan pelanggan	23	1,746,004	1,288,284	Customer connection fees
Subsidi listrik Pemerintah	37	77,045,335	68,636,731	Government electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	100,184,044	73,991,897	Compensation income
Lain-lain	38	13,229,590	10,276,090	Other
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>545,380,993</u>	<u>487,384,064</u>	Total Revenue
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Bahan bakar dan pelumas	39	179,290,971	164,731,578	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	40	178,626,777	154,831,184	Purchased electricity
Sewa	41	2,607,032	1,874,862	Leases
Pemeliharaan	42	31,546,011	29,518,324	Maintenance
Kepegawaian	43	30,709,373	32,355,934	Personnel
Penyusutan aset tetap	6	46,672,799	43,967,082	Property, plant and equipment depreciation
Penyusutan aset hak guna	7	3,822,214	3,347,165	Right-of-use assets depreciation
Lain-lain	44	<u>11,484,810</u>	<u>9,557,861</u>	Other
Jumlah Beban Usaha		<u>484,759,987</u>	<u>440,183,990</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA		<u>60,621,006</u>	<u>47,200,074</u>	OPERATING PROFIT
(Beban)/pendapatan lain-lain - bersih	46	(2,129,058)	1,513,051	Other (expenses)/income - net
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih		(6,780,398)	3,723,639	(Loss)/gain on foreign exchange - net
Penghasilan keuangan		976,269	953,515	Finance income
Beban keuangan	45	<u>(24,417,860)</u>	<u>(21,010,355)</u>	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK		<u>28,269,959</u>	<u>32,379,924</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	47	<u>(10,506,935)</u>	<u>(10,308,466)</u>	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		<u><u>17,763,024</u></u>	<u><u>22,071,458</u></u>	PROFIT FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2/2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LABA TAHUN BERJALAN		17,763,024	22,071,458	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Bagian penghasilan/(kerugian) komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	9	873,889	(295,350)	Share of other comprehensive income/(loss) from associates and joint ventures
Lindung nilai arus kas		(52,937)	(136,353)	Cash flow hedging
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	6	48,461,883	339,113	Changes in property, plant and equipment revaluation surplus
Pengukuran kembali atas program manfaat pasti	49	(12,741,753)	5,723,808	Remeasurement on defined benefit plans
Manfaat pajak terkait	47b	(5,685,266)	(1,333,843)	Related income tax benefit
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		30,855,816	4,297,375	Other comprehensive income for the year after tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		48,618,840	26,368,833	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		17,705,027	22,025,595	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		57,997	45,863	Non-controlling interests
Jumlah		17,763,024	22,071,458	Total
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		48,560,843	26,322,970	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		57,997	45,863	Non-controlling interests
Jumlah		48,618,840	26,368,833	Total
LABA PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	48	117,613	149,874	EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED (in Rupiah full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent entity										Balance as at January 1, 2023
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Subscribed and paid-up capital	Penyerahan modal Negara dalam proses penertiban saham/ Stock subscription from Government in issuance process	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo laba/Retained earnings	Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Surplus revaluasi aset tetap/ Property, plant and equipment revaluation surplus	Pengukuran kembali atas program manfaat pensiun/ Remeasurement on defined benefit plans	Bagian komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ Share of other comprehensive income from associates and joint ventures	Salah satu transaksi dengan pihak nonpengendali/ Difference in value from transactions with non-controlling interests	Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	145.536.096	5.000.000	34.608	64.657.026	99.438.371	688.538.705	(16.929.028)	4.085.359	(2.100)	990.359.037	991.450.566
Cadangan umum tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan modal dari penerbitan saham	5.000.000	(5.000.000)	-	12.146.040	(12.146.040)	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	(2.188.000)	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	-	408.387	(408.387)	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	22.025.595	264.508	4.464.570	(295.350)	(136.353)	26.388.833	26.388.833
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	150.536.096	-	34.608	76.803.066	107.538.313	688.394.826	(12.464.458)	3.790.009	(2.100)	1.014.494.007	1.015.631.399
Cadangan umum tahun berjalan	-	-	-	18.935.591	(18.935.591)	-	-	-	-	-	-
Penambahan modal dari penerbitan saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	(3.090.004)	-	-	-	-	(3.090.004)	(3.090.004)
Reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap ke saldo laba	-	-	-	-	547.339	(547.339)	-	-	-	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	17.765.027	39.973.431	(9.938.567)	873.889	(62.937)	48.560.843	48.560.843
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	150.536.096	-	34.608	95.738.657	103.765.084	727.820.918	(22.403.025)	4.663.898	(188.290)	1.059.964.846	1.061.160.235

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4/1 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		378,674,148	352,802,996	Cash receipts from customers
Penerimaan kompensasi		80,568,343	72,273,887	Compensation received
Penerimaan subsidi listrik	37	75,817,286	68,702,258	Government subsidy received
Penerimaan restitusi pajak penghasilan badan		256,480	830,862	Cash receipts for corporate income taxes
Penerimaan restitusi pajak lainnya		885,465	2,227,389	Cash receipts for other taxes
Penerimaan bunga		912,237	926,748	Interest received
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya		(396,283,303)	(354,978,086)	Cash paid to suppliers and others
Pembayaran kas kepada karyawan		(32,550,126)	(29,249,781)	Cash paid to employees
Pembayaran bunga		(24,321,736)	(20,232,726)	Interest expense paid
Pembayaran surat ketetapan pajak		(5,141,967)	(3,806,315)	Payment of tax assessment letters
Pembayaran pajak penghasilan		(3,457,799)	(2,107,261)	Income tax paid
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		75,359,028	87,389,971	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap		1,004,691	352,056	Proceeds from sale of property, plant and equipment
Perolehan dividen dari entitas asosiasi dan ventura Bersama		911,045	764,202	Proceeds from dividends of associates and joint ventures
Penarikan rekening bank dan deposito bank dibatasi penggunaannya		6,071,079	6,960,344	Withdrawal of restricted cash in banks and time deposits
Penempatan rekening bank dibatasi penggunaannya		(5,233,317)	(7,332,896)	Placement of restricted cash in bank
Penambahan piutang pihak berelasi		(9,805)	(119,408)	Additions of receivables from related parties
Perolehan aset tetap (termasuk uang muka proyek)		(63,454,161)	(63,922,131)	Addition of property, plant and equipment (including advances for projects)
Penarikan investasi jangka pendek		377,900	309,191	Withdrawal of short-term investments
Penempatan investasi jangka pendek		(445,415)	(475,260)	Placement of short-term investments
Penambahan aset tidak lancar lain		(1,459,440)	(2,429,806)	Addition of other non-current assets
Penerimaan atas piutang pihak berelasi		248,372	299,285	Receipt of receivables from related parties
Penempatan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	9	(452,387)	(73,063)	Placement of investments in associates and joint ventures
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(62,441,438)	(65,667,486)	Net cash used in investing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements
form an integral part of these consolidated financial statements

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4/2 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	22	(3,090,004)	(2,188,000)	Payment of dividends
Pembayaran dividen ke nonpengendali		(12,008)	(4,884)	Payment of dividends to non-controlling interests
Penerimaan penerusan pinjaman		30,710	333,848	Proceeds of two-step loans
Pembayaran penerusan pinjaman		(2,949,638)	(2,855,228)	Repayments of two-step loans
Pembayaran utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan				Repayments of Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah nonbank		(750,000)	(750,000)	
Penerimaan utang Pemerintah dan lembaga keuangan				Proceeds of Government and non-bank Government financial institution loans
Pemerintah nonbank		1,355,066	-	
Penerimaan utang bank - jangka pendek		37,210,417	22,500,000	Proceeds of bank loans - short term
Penerimaan utang bank - jangka panjang		29,661,130	31,405,559	Proceeds of bank loans - long term
Pembayaran utang bank - jangka pendek		(37,210,417)	(22,500,000)	Repayments of bank loans - short term
Pembayaran utang bank - jangka panjang		(23,018,763)	(34,034,467)	Repayments of bank loans - long term
Pembayaran utang obligasi dan sukuk ijarah		(5,553,934)	(2,863,200)	Repayments of bonds payable and sukuk ijarah
Pembayaran utang sewa		(2,933,531)	(5,556,021)	Payments of lease liabilities
Pembayaran utang listrik swasta		(569,372)	(517,439)	Payments of electricity purchase payable
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(7,830,344)	(17,029,832)	Net cash used in financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		5,087,246	4,692,653	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		356,678	(275,190)	Effect of changes in foreign currency
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas kas dan setara kas		(19)	(18)	Allowance for expected credit loss of cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		55,920,541	51,503,096	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		61,364,446	55,920,541	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan 50 untuk penyajian informasi arus kas.

Refer to Note 50 for the presentation of cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi lainnya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" atau "Perusahaan") didirikan pada tahun 1961 dalam bentuk jawatan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Perusahaan merupakan kelanjutan usaha beberapa perusahaan listrik Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut meliputi: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM dan NV WEMI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965, status Perusahaan berubah menjadi perusahaan yang berbadan hukum. Selanjutnya ditetapkan menjadi Perusahaan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972. Kemudian berdasarkan Akta No. 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, status badan hukum Perusahaan berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT PLN (Persero). Akta perubahan ini disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 tanggal 1 Agustus 1994, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6731.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 37, tanggal 19 September 2023 dari Muhammad Hanafi, S.H., notaris di Jakarta mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. AHU-AH.01.03.-0120486 tanggal 20 September 2023.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di wilayah Indonesia dan 11 entitas anak. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and other information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN" or the "Company") was established in 1961 as a unit of the Indonesian Ministry of Energy and Public Works. The Company is a business continuation of several Dutch electricity companies which have been taken over by the Government of the Republic of Indonesia including, among others, the following: NV ANIEM, NV SEM, NV OJEM, NV EMS, NV EMBALOM, NV GEBEO, NV OGEM and NV WEMI. Based on Government Regulation No. 19 year 1965, the status of the Company was changed to that of a legal entity. Subsequently, based on Government Regulation No. 30 year 1970, as amended by Government Regulation No. 18 year 1972, the Company became a Perusahaan Umum. Based on Notarial Deed No. 169 of Sutjipto, S.H., notary in Jakarta, dated July 30, 1994, the Company's status was changed to a Limited Liability Company and it was named Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara or PT PLN (Persero). This change was approved by the Minister of Justice in his decision letter No. C2-11.519.HT.01.01.Th.94 dated August 1, 1994 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 13, 1994, Supplement No. 6731.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, with the most recent change by Notarial Deed No. 37, dated September 19, 2023 of Muhammad Hanafi, S.H., notary in Jakarta regarding issued and fully paid-up capital stock. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Ministerial Decree No. AHU-AH.01.03.-0120486, dated September 20, 2023.

The Company is domiciled in Jakarta, with 48 business unit offices across Indonesia and 11 subsidiaries. The Company's Head Office is located at Jl. Trunojoyo Blok M I No. 135, Jakarta.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi lainnya (lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pembangunan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN termasuk margin tertentu yang diharapkan kepada BUMN yang diberikan penugasan khusus. Perusahaan merupakan BUMN yang sedang melaksanakan penugasan khusus berupa penyediaan tenaga listrik bersubsidi kepada masyarakat (Catatan 37).

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki 51.435 karyawan tetap (tidak diaudit) (2023: 51.245 karyawan tetap). Jumlah karyawan tidak termasuk karyawan dari PT Haleyora Powerindo yang bergerak dibidang jasa tenaga kerja. PT Haleyora Powerindo adalah entitas anak dari PT Haleyora Power, entitas anak Perusahaan.

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on *)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Obligasi Rupiah					Rupiah Bonds
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	1,500,000	Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020	31 Agustus 2020/ August 31, 2020	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 September 2020/ September 8, 2020	376,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	6 Mei 2020/ May 6, 2020	1,737,135	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	4,812,430	Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	18 Februari 2020/ February 18, 2020	115,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	1,912,900	Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Oktober, 2019 October 1, 2019	797,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	2,953,620	Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and other information (continued)

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Purpose and Objective of the Company is to engage in electricity business for public use of sufficient quantity and quality and also to earn profit and perform the Government's assignment in electricity business in order to support the development of the country with the application of the principles of a Limited Liability Company.

Based on Law No. 19 year 2003, regarding State-Owned Enterprises ("SOEs"), the Government is obliged to provide compensation to SOEs, that were appointed to perform special assignments, for all expenses which they have incurred, including a certain expected return (margin). The Company is an SOE, that performs the special assignment of providing subsidised electricity to the public (Note 37).

As at December 31, 2024 the Group had 51,435 permanent employees (unaudited) (2023: 51,245 permanent employees). The total number of employees does not include employees of PT Haleyora Powerindo whose nature of business is manpower services. PT Haleyora Powerindo is a subsidiary of PT Haleyora Power, the Company's subsidiary.

b. The Company's public offering of bonds

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows:



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

**b. Penawaran umum efek utang Perusahaan
(lanjutan)**

**b. The Company's public offering of bonds
(continued)**

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Obligasi dan Surat Utang PLN, sebagai berikut:
(lanjutan)

The Company has issued several PLN Bonds and Notes, as follows: (continued)

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on *)	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount Rp	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	1 Agustus 2019/ August 1, 2019	1,250,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	19 Februari 2019/ February 19, 2019	2,393,000	Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	19 Februari 2019/ February 19, 2019	863,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Oktober 2018/ October 10, 2018	832,000	Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Oktober 2018/ October 10, 2018	224,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Juli 2018/ July 10, 2018	1,278,500	Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018	29 Juni 2018/ June 29, 2018	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	10 Juli 2018/ July 10, 2018	750,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	23 Februari 2018/ February 23, 2018	2,535,000	Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	23 Februari 2018/ February 23, 2018	698,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	2 November 2017/ November 2, 2017	2,545,500	Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	2 November 2017/ November 2, 2017	694,500	Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Juli 2017/ July 12, 2017	1,600,000	Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017	21 Juni 2017/ June 21, 2017	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Juli 2017/ July 12, 2017	400,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase I Year 2017
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	1,244,000	Shelf Registration Bonds I PLN Phase II Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	11 Desember 2013/ December 11, 2013	429,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah I PLN Phase II Year 2013
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	879,000	Shelf Registration Bonds I PLN Phase I Year 2013
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	27 Juni 2013/ June 27, 2013	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	8 Juli 2013/ July 8, 2013	121,000	Shelf Registration Sukuk Ijarah I PLN Phase I Year 2013
Obligasi PLN XII Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	2,500,000	PLN XII Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	30 Juni 2010/ June 30, 2010	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	9 Juli 2010/ July 9, 2010	500,000	Sukuk Ijarah V PLN Year 2010
Obligasi PLN XI Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	2,703,000	PLN XI Bonds Year 2010
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	13 Januari 2010/ January 13, 2010	297,000	Sukuk Ijarah IV PLN Year 2010
Obligasi PLN X Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	1,440,000	PLN X Bonds Year 2009
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008	Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange	12 Januari 2009/ January 12, 2009	760,000	Sukuk Ijarah III PLN Year 2009
Obligasi PLN IX Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	2,700,000	PLN IX Bonds Year 2007
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	29 Juni 2007/ June 29, 2007	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	11 Juli 2007/ July 11, 2007	300,000	Sukuk Ijarah II PLN Year 2007
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	22 Juni 2016/ June 22, 2016	2,200,100	PLN VIII Bonds Year 2006
Sukuk Ijarah PLN I Tahun 2006	12 Juni 2006/ June 12, 2006	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	22 Juni 2016/ June 22, 2016	200,000	Sukuk Ijarah I PLN Year 2006
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3 November 2004/ November 3, 2004	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	12 November 2004/ November 12, 2004	1,500,000	PLN VII Bonds Year 2004
Obligasi PLN VI Tahun 1997	27 Juni 1997/ June 27, 1997	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	12 Agustus 1997/ August 12, 1997	600,000	PLN VI Bonds Year 1997
Obligasi PLN V Tahun 1996	28 Juni 1996/ June 28, 1996	Bursa Efek Surabaya/ Surabaya Stock Exchange	28 Agustus 1996/ August 28, 1996	1,000,000	PLN V Bonds Year 1996
Obligasi PLN IV Tahun 1995	30 Juni 1995/ June 30, 1995	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	4 September 1995/ September 4, 1995	680,000	PLN IV Bonds Year 1995
Obligasi PLN III Tahun 1995	30 Januari 1995/ January 30, 1995	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	18 April 1995/ April 18, 1995	318,430	PLN III Bonds Year 1995
Obligasi PLN II Tahun 1993	28 September 1993/ September 28, 1993	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	8 November 1993/ November 8, 1993	600,000	PLN II Bonds Year 1993
Obligasi PLN I Tahun 1992	25 September 1992/ September 25, 1992	Bursa Paralel Indonesia/ Indonesia Parallel exchange	10 November 1992/ November 10, 1992	300,000	PLN I Bonds Year 1992
Jumlah				51,541,115	Total

*) Pada tanggal 22 Juli 1995 Bursa Paralel Indonesia diakuisisi oleh Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabungkan dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

*) On July 22, 1995 the Indonesia Parallel Exchange was acquired by the Surabaya Stock Exchange. On November 30, 2007, the Surabaya Stock Exchange and Jakarta Stock Exchange merged and changed their name to the Indonesia Stock Exchange.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum efek utang Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan telah beberapa kali menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah PLN, sebagai berikut:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount USD *)
Surat Utang Jangka Menengah Global - USD				
Penerbitan tahun 2020	30 Juni 2020/ June 30, 2020	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	1 Juli 2020/ July 1, 2020	1,500,000,000
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ November 5, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	7 November 2019/ November 7, 2019	1,000,000,000
	17 Juli 2019/ July 17, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	18 Juli 2019/ July 18, 2019	1,400,000,000
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ October 25, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	26 Oktober 2018/ October 26, 2018	1,000,000,000
	21 Mei 2018/ May 21, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	16 Mei 2018/ May 16, 2018	2,000,000,000
Penerbitan tahun 2017	15 Mei 2017/ May 15, 2017	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	16 Mei 2017/ May 16, 2017	2,000,000,000
Penerbitan tahun 2012	24 Oktober 2012/ October 24, 2012	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	25 Oktober 2012/ October 25, 2012	1,000,000,000
Penerbitan tahun 2011	22 November 2011/ November 22, 2011	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	23 November 2011/ November 23, 2011	1,000,000,000
Jumlah				<u>10,900,000,000</u>
Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR				
Penerbitan tahun 2019	5 November 2019/ November 5, 2019	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	7 November 2019/ November 7, 2019	500,000,000
Penerbitan tahun 2018	25 Oktober 2018/ October 25, 2018	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	26 Oktober 2018/ October 26, 2018	500,000,000
Jumlah				<u>1,000,000,000</u>
Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY				
Penerbitan tahun 2019	20 September 2019/ September 20, 2019	Tidak tercatat/ Not listed	N/A	23,200,000,000
Jumlah				<u>23,200,000,000</u>

*) Dalam jumlah penuh

Majapahit Holding B.V., Belanda, entitas anak yang bertujuan khusus yang sepenuhnya milik Perusahaan, menerbitkan Obligasi Terjamin, sebagai berikut:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount USD *)
Obligasi Terjamin - USD				
Penerbitan 2009	6 November 2009/ November 6, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	9 November 2009/ November 9, 2009	1,250,000,000
Penerbitan 2009	7 Agustus 2009/ August 7, 2009	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	11 Agustus 2009/ August 11, 2009	750,000,000
Penerbitan 2007	28 Juni 2007/ June 28, 2007	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	29 Juni 2007/ June 29, 2007	1,000,000,000
Penerbitan 2006	16 Oktober 2006/ October 16, 2006	Bursa Efek Singapura/ Singapore Stock Exchange	17 Oktober 2006/ October 17, 2006	1,000,000,000
Jumlah				<u>4,000,000,000</u>

*) Dalam jumlah penuh

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Company's public offering of bonds (continued)

The Company has issued several PLN Medium-term Notes, as follows:

Global Medium Term Notes - USD	
Issued in 2020	
Issued in 2019	
Issued in 2018	
Issued in 2017	
Issued in 2012	
Issued in 2011	
Total	
Global Medium Term Notes - EUR	
Issued in 2019	
Issued in 2018	
Total	
Global Medium Term Notes - JPY	
Issued in 2019	
Total	

*) In full amount

Majapahit Holding B.V., the Netherlands, a wholly-owned special-purpose subsidiary of the Company, issued Guaranteed Notes, as follows:

	Tanggal efektif/ Effective date	Bursa pencatatan/ Listed on	Tanggal pencatatan/ Listed date	Jumlah yang ditawarkan/ Offered amount USD *)
Guaranteed Notes - USD				
Issued in 2009				
Issued in 2009				
Issued in 2007				
Issued in 2006				
Total				

*) In full amount



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Susunan pengurus dan informasi lain

c. Management and other information

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, the Company's management consisted of the following:

	2024	2023	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Burhanuddin Abdullah	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Suhasil Nazara	Suhasil Nazara	Vice President Commissioner
Komisaris	Dadan Kusdiana	Dadan Kusdiana	Commissioners
	Aminuddin Ma'ruf	Susijono Moegiarso	
	Jisman Parada Hutajulu	Mohamad Ikhsan	
	Susijono Moegiarso	Dudy Purwagandhi	
		Tedi Bharata	
		Eko Sulistyo	
Komisaris Independen	Andi Arief	Arcandra Tahar	Independent Commissioners
	Yazid Fanani	Charles Sitorus	
	Ali Masykur Musa		
	Mutanto Juwono		
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	Darmawan Prasodjo	Darmawan Prasodjo	President Director
Direktur Keuangan	Sinthya Roesly	Sinthya Roesly	Director of Finance
Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis	Hartanto Wibowo	Hartanto Wibowo	Director of Corporate Planning and Business Development
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital	Yusuf Didi Setiarto	Yusuf Didi Setiarto	Director of Legal and Human Capital Management
Direktur Retail dan Niaga	Edi Srimulyanti	Edi Srimulyanti	Director of Retail and Commerce
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem	Evy Haryadi	Evy Haryadi	Director of Transmission and System Planning
Direktur Manajemen Pembangkitan	Adi Lumakso	Adi Lumakso	Director of Generation Management
Direktur Distribusi	Adi Priyanto	Adi Priyanto	Director of Distribution
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan	Wiluyo Kusdwiarto	Wiluyo Kusdwiarto	Director of Management Projects and New Renewable Energy
Direktur Manajemen Risiko	Suroso Isnandar	Suroso Isnandar	Director of Risk Management
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Yazid Fanani	Arcandra Tahar	Chairman
Anggota	Aminuddin Ma'ruf	Mohamad Ikhsan	Members
	Jisman Parada Hutajulu	Charles Sitorus	
	Andi Arief	Tom Parisianto Wibowo	
	Mutanto Juwono	Nizam Burhanuddin	
	Dwi Siska Susanti	Dwi Siska Susanti	
	Tom Parisianto Wibowo		
	Oktofriawan Hagiardana		
Sekretaris Perusahaan			Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan	Alois Wisnuhardana	Alois Wisnuhardana	Corporate Secretary

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU")**

**a. Penerapan Peraturan Jasa Keuangan No.
6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi
atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik ("POJK No. 6")**

Grup mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PPA") dan Kontrak Penjualan Energi ("ESC"), dengan Penyedia dan Pengembang Tenaga Listrik Swasta ("IPP"). IPP tersebut merupakan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Sebelum 1 Januari 2016, Grup menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 8: "Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa" ("ISAK No. 8") dalam mengevaluasi apakah PPA dan ESC dengan IPP mengandung unsur sewa (Catatan 3.I).

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan POJK No. 6 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No. 6, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli listrik. POJK No. 6 berlaku secara prospektif untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengizinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. POJK No. 6 berlaku sampai akhir tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2017.

Grup memutuskan untuk menerapkan lebih awal POJK No. 6 secara prospektif sejak 1 Januari 2016. Oleh karena itu, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang mengandung sewa (Catatan 3.I), mulai 1 Januari 2016 disajikan sebagai pembelian tenaga listrik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya. Pada tanggal 1 Januari 2016, Grup juga melakukan penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait.

**2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES ("GAAP")**

**a. Implementation of Financial Services
Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017
regarding Accounting Treatment for
Transactions Based on Power Purchase
Agreements ("POJK No. 6")**

The Group has entered into Power Purchase Agreements ("PPAs") and Energy Sales Contracts ("ESCs"), with Independent Power Producers ("IPPs"). Those IPPs are holders of Electricity Business Licences for public use.

Before January 1, 2016, the Group applied Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") No. 8: "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease" ("IFAS No. 8") in evaluating whether PPAs and ESCs with IPPs contain a lease (Note 3.I).

On March 1, 2017, the Financial Services Authority ("FSA") issued POJK No. 6 which is applicable for listed and public companies. Based on POJK No. 6, transactions based on a PPA are treated as sale and purchase transactions, even though the PPAs contain substances other than that of the sale and purchase of electricity. POJK No. 6 applies prospectively for the year beginning on January 1, 2017, and early implementation is allowed for the year beginning on January 1, 2016. POJK No. 6 is valid until the end of the assignment on the acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation No. 14 year 2017.

The Group decided to implement POJK No. 6 early prospectively beginning on January 1, 2016. Therefore, the electricity sale and purchase transactions based on PPAs which contain a lease (Note 3.I), since January 1, 2016, are presented as purchases of electricity in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when incurred. On January 1, 2016, the Group also adjusted the related assets and liabilities.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU")
(lanjutan)**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tentang
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik ("POJK No. 6") (lanjutan)**

Jumlah bersih penyesuaian atas aset dan liabilitas terkait sebesar Rp43.428.454 dan telah dicatat sebagai penyesuaian saldo laba pada tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:

**2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES ("GAAP") (continued)**

**a. Implementation of Financial Services
Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017
regarding Accounting Treatment for
Transactions Based on Power Purchase
Agreements ("POJK No. 6") (continued)**

The net adjustments on related assets and liabilities amounted to Rp43,428,454 and were recorded as an adjustment to retained earnings on January 1, 2016, the details of which are as follows:

	1 Januari 2016 sebelum penyesuaian/ January 1, 2016 before adjustment	Penyesuaian saldo awal/ Beginning balance adjustment	1 Januari 2016 setelah penyesuaian/ January 1, 2016 after adjustment	
Aset tetap	1,187,879,590	(72,227,600)	1,115,651,990	Property, plant and equipment
Aset pajak tangguhan	29,088,271	(14,787,769)	14,300,502	Deferred tax assets
	<u>1,216,967,861</u>	<u>(87,015,369)</u>	<u>1,129,952,492</u>	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang listrik swasta	7,093,280	755,783	7,849,063	Electricity purchase payable
Utang sewa	149,621,763	(128,065,144)	21,556,619	Lease Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang sewa	6,759,138	(3,313,534)	3,445,604	Lease liabilities
Biaya masih harus dibayar	10,627,055	(2,216,084)	8,410,971	Accrued expenses
Utang listrik swasta	311,196	9,968	321,164	Electricity purchase payable
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	8,910,438	380,409	9,290,847	Related parties
Pihak ketiga	17,715,563	1,998,142	19,713,705	Third parties
Utang lain-lain	20,188,608	6,637	20,195,245	Other payables
	<u>221,227,041</u>	<u>(130,443,823)</u>	<u>90,783,218</u>	

**Dampak penerapan POJK No. 6
terhadap saldo laba awal**

**The effect of POJK No. 6
application on beginning
retained earnings**

43,428,454

Mulai 1 Januari 2020, Grup menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 116, "Sewa". Standar akuntansi ini menggantikan standar akuntansi berikut:

- PSAK No. 30: "Sewa"
- ISAK No. 8: "Penentuan apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa"
- ISAK No. 23: "Sewa Operasi-Insentif"
- ISAK No. 24: "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK No. 25: "Hak atas Tanah"

Starting January 1, 2020, the Group implemented Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") 116, "Leases". This standard replaced the previous accounting standards as follows:

- SFAS No. 30: "Leases"
- IFAS No. 8: "Determining Whether an Arrangement Contains a Lease"
- IFAS No. 23: "Operating Leases-Incentives"
- IFAS No. 24: "Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease"
- IFAS No. 25: "Land Rights"

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU")
(lanjutan)**

**a. Penerapan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 6/POJK.04/2017 tentang
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga
Listrik ("POJK No. 6") (lanjutan)**

Perjanjian jual beli tenaga listrik yang diikuti oleh Grup tetap mengacu pada POJK No. 6 karena peraturan tersebut masih berlaku sampai berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden. Dengan demikian, perlakuan akuntansi untuk PPA dan ESC dengan IPP masih tetap sama seperti sebelum Grup menerapkan PSAK No. 116, yaitu diperlakukan sebagai transaksi jual beli dan dikecualikan dari ruang lingkup penerapan PSAK No. 116.

**b. Perubahan pada PSAK dan amendemen yang
berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024**

Penerapan dari amendemen yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amendemen PSAK No. 207: "Laporan Arus Kas" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" – Pengaturan Pembiayaan Pemasok
- Amendemen PSAK No. 116: "Sewa – Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik"

Standar dan amendemen akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup adalah sebagai berikut:

**2. IMPLEMENTATION OF
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES ("GAAP") (continued)**

**a. Implementation of Financial Services
Authority Regulation No. 6/POJK.04/2017
regarding Accounting Treatment for
Transactions Based on Power Purchase
Agreements ("POJK No. 6") (continued)**

The PPAs entered into by the Group are still accounted for under POJK No. 6 because it remains valid until the end of the assignment on acceleration of electricity infrastructure development in accordance with Presidential Regulation. Therefore, the accounting treatment for PPAs and ESCs with IPPs remains the same as before the Group implemented SFAS No. 116, i.e. treated as sale and purchase transactions; hence, excluded from the scope of SFAS No. 116.

**b. Changes to SFAS and amendments which are
effective for years beginning on or after
January 1, 2024**

The adoption of the following amendments to accounting standards which are effective from January 1, 2024 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year:

- Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements – Classification of Liabilities as Current or Non-Current"
- Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements – Long-term Liabilities with Covenants"
- Amendment to SFAS No. 207: "Statement of Cash Flows" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" – Supplier Finance Arrangements
- Amendment to SFAS No. 116: "Leases – Lease Liability in a Sale and Leaseback"

Certain new and amended accounting standards have been published that are not mandatory for the year ended 31 December 2024 and have not been early adopted by the Group are as follows:



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG
BERLAKU UMUM DI INDONESIA ("PABU")
(lanjutan)**

**b. Perubahan pada PSAK dan amendemen yang
berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024
(lanjutan)**

- PSAK No. 117: "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117 Kontrak Asuransi tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif;
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran"

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup masih menilai dampak dari standar dan amendemen akuntansi baru.

**2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING
PRINCIPLES ("GAAP") (continued)**

**b. Changes to SFAS and amendments which are
effective for years beginning on or after
January 1, 2024 (continued)**

- SFAS No. 117, "Insurance Contracts"
- The amendments to SFAS No. 117, "Insurance Contract" about initial application of SFAS 117 and SFAS 109 – comparative information;
- Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability"

As at 31 December 2024, the Group is still assessing the impact of the new and amended accounting standards.

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Pernyataan kepatuhan

Sejak 1 Januari 2016, laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan PABU, yang mencakup sebagai berikut:

- Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh DSAK-IAI, yang meliputi PSAK dan ISAK;
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAS-IAI"), yang meliputi Standar Akuntansi Syariah ("SAS"); dan
- Ketentuan akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh OJK, terdiri dari Peraturan OJK No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal - Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan OJK No. 6 POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION**

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Statement of compliance

Since January 1, 2016, the consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian GAAP, which covers the following:

- Financial Accounting Standards issued by DSAK-IAI, which cover SFAS and IFAS;
- Syariah Financial Accounting Standards issued by the Syariah Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants ("DSAS-IAI"), which cover Syariah Accounting Standards ("SAS"); and
- Applicable Capital Market Regulations as stated by the FSA, including FSA Regulation No. VIII.G.7 consisting of Guidance for the Presentation of Financial Statements, Decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("CM-FISB") No. KEP-347/BL/2012 regarding Presentation and Disclosure of Financial Statements of Listed or Public Companies, and FSA Regulation No. 6 POJK.04/2017 regarding Accounting Treatment for Transactions Based on Power Purchase Agreements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 4.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared using the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on the going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 4.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN
MATERIAL (lanjutan)**

AKUNTANSI

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

POLICY

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Entitas anak (lanjutan)

i. Subsidiaries (continued)

i.1. Konsolidasi (lanjutan)

i.1. Consolidation (continued)

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

i.2. Akuisisi

i.2. Acquisition

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontingensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

i. Entitas anak (lanjutan)

i. Subsidiaries (continued)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

i.2. Acquisition (continued)

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontingensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

iii. Pelepasan entitas anak

iii. Disposal of subsidiaries

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

iv. Accounting for associates and joint ventures

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates is accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- Akuisisi

- Acquisitions

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Akuisisi (lanjutan)

- Acquisitions (continued)

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Metode ekuitas

- Equity method of accounting

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura Bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principles of consolidation (continued)

**iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan
ventura bersama (lanjutan)**

**iv. Accounting for associates and joint
ventures (continued)**

- Metode ekuitas (lanjutan)

**- Equity method of accounting
(continued)**

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Pelepasan

- Disposals

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan dan Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from partial disposal or dilution of an investment in an associate and a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

d. Penjabaran mata uang asing

d. Foreign currency translation

i. Mata uang fungsional dan penyajian

i. Functional and presentation currency

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rp, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rp, which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transaksi dan saldo

ii. Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at this date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the exchange rates prevailing at the date of the consolidated statement of financial position published by Bank Indonesia were as follows:

	2024	2023	
	Kurs tengah/ Middle rate*)	Kurs tengah/ Middle rate*)	
Yen Jepang ("JPY")	103	109	Japan Yen ("JPY")
Ringgit Malaysia ("MYR")	3,612	3,364	Malaysian Ringgit ("MYR")
Dolar AS ("USD")	16,157	15,439	US Dollars ("USD")
Euro ("EUR")	16,823	17,086	Euro ("EUR")
Franc Swiss ("CHF")	17,884	18,374	Swiss Franc ("CHF")
Dolar Kuwait ("KWD")	52,440	50,220	Kuwait Dollars ("KWD")

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

d. Foreign currency translation (continued)

iii. Entitas dalam Grup

iii. Group companies

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Grup sebagai berikut:

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Group's presentation currency as follows:

- (a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;
- (b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi); dan

- (a) *The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate at the date of the consolidated statement of financial position;*
- (b) *The income and expenses for each item of profit or loss are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions); and*

	2024 Kurs rata-rata/ Average rate*)	2023 Kurs rata-rata/ Average rate*)	
Dolar AS (USD)	15,850	15,254	US Dollars (USD)
*) dalam jumlah penuh			*) in full amount

- (c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

- (c) *All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.*

e. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

e. Transactions with related parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 224: "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Peraturan OJK No. VIII.G.7:

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 224: "Related Party Disclosures" and OJK Regulation No. VIII.G.7:

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- (a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

**e. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

e. Transactions with related parties (continued)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:*

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- (viii) Entitas, atau setiap anggota dari kelompok yang menjadi bagiannya, memberikan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- (i) *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each other);*
- (ii) *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
- (iii) *Both entities are joint ventures of the same third party;*
- (iv) *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
- (v) *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- (vi) *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- (vii) *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or*
- (viii) *The entity, or any member of the group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

**e. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi
(lanjutan)**

e. Transactions with related parties (continued)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah termasuk entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Government-related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as the shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Aset keuangan

f. Financial assets

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

i. Classification, recognition and measurement

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- financial assets measured at fair value either through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and
- those to be measured at amortised cost.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

The classification depends on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI").

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah memilih tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are SPPI.

Instrumen utang

Debt instruments

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- *Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

**i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran
(lanjutan)**

**i. Classification, recognition and
measurement (continued)**

Instrumen utang (lanjutan)

Debt instruments (continued)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan atau beban lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam penghasilan dan beban kurs mata uang asing dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi dan disajikan bersih dalam laba rugi.

- Fair value through other comprehensive income: Assets that are held for the collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, in cases where the assets' cash flows represent SPPI, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income and expenses. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses on foreign exchanges, net and impairment expenses in other expenses.
- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship, is recognised in profit or loss and presented net in profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

ii. Penghentian pengakuan

ii. Derecognition

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

iii. Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Penurunan nilai aset keuangan

g. Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, which is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

g. Impairment of financial assets (continued)

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

The Group applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected credit loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

h. Aset tetap

h. Property, plant and equipment

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:

After initial recognition, the following classes of assets are measured using the revaluation method:

- Hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk, dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik; dan
- Material cadangan utama.

- *Land rights;*
- *Buildings, reservoirs and infrastructure;*
- *Installations and power plants;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply; and*
- *Major spare parts.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

h. Aset tetap (lanjutan)

h. Property, plant and equipment (continued)

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali hak atas tanah. Hak atas tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Manajemen melakukan revaluasi aset secara berkala. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses, except land rights. Land rights are not depreciated. The valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the FSA. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Management revaluates the assets in regular basis. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is presented to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Apabila penurunan melebihi "surplus revaluasi aset tetap", maka selisih lebihnya dibebankan pada laba rugi.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use a revaluation model are credited to "property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "property, plant and equipment revaluation surplus" as part of other comprehensive income. If the decrease exceeds the "property, plant and equipment revaluation surplus", the excess difference is charged to profit or loss.

Terkait hak atas tanah, Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 216, "Aset Tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

For land rights, the Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group accounts for these transactions as leases under SFAS No. 116, "Leases". If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 216, "Property, plant and equipment" under which land rights are recognised at cost and not depreciated.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

h. Aset tetap (lanjutan)

h. Property, plant and equipment (continued)

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

Property, plant and equipment, except land rights, are depreciated to their residual values using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	Buildings, reservoirs, and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	40	Transmission equipment
Perlengkapan distribusi	10 - 40	Distribution equipment
Perlengkapan umum	5	General equipment
Kendaraan bermotor	5	Motor vehicles
Material cadangan utama	10 - 40	Major spare parts
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	10	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	10	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	10 - 25	Vessels and equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa, dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 3.j).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 3.j).

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari aset tetap Grup. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

For property, plant and equipment which can no longer be utilised or sold, the carrying amount is eliminated from the Group's property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

Jika aset yang direvaluasi dihapuskan, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are disposed, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

h. Aset tetap (lanjutan)

h. Property, plant and equipment (continued)

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer, sedang diperbaiki, dan akan dihapus. Aset yang tidak digunakan dalam operasi, kecuali aset yang akan dihapus, disusutkan dengan metode garis lurus dan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that will be relocated/transferred, repaired, and disposed. Assets not used in operations, except for assets to be disposed, are depreciated using the same method and based on the economic useful lives of the property, plant and equipment.

Aset dalam pembangunan

Construction in progress

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Construction in progress represents costs directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, depreciation of property, plant and equipment used in the construction and cost of testing whether the asset is functioning properly. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya goodwill, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI	KEBIJAKAN	AKUNTANSI	3. MATERIAL	ACCOUNTING	POLICY
MATERIAL	(lanjutan)		INFORMATION	(continued)	

i. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Aset nonkeuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill*, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui langsung dalam laba rugi. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

j. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan. jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

k. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

i. Impairment of non-financial assets

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment testing was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

j. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less of the reporting date. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dari operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pesewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

k. Leases (continued)

The Group as a lessor (continued)

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised as revenue on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added to the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial position based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 20 years but may have extension options. Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivables;*
- *variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and*
- *payments of penalties for terminating the - lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.*



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	3. MATERIAL ACCOUNTING INFORMATION (continued)
k. Sewa (lanjutan)	k. Leases (continued)
Grup sebagai penyewa (lanjutan)	The Group as a lessee (continued)
Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa. Untuk menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup: - jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima; - menggunakan pendekatan <i>build-up</i> yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini; dan - membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang, dan jaminan. Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna. Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.	Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions. To determine the incremental borrowing rate, the Group: - where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received; - uses a build-up approach that starts with a risk free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group, where there is no recent third-party financing; and - makes adjustments specific to the lease, e.g., term, currency and security. The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset. Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima; dan
- biaya langsung awal, dan biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.j).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

k. Leases (continued)

The Group as a lessee (continued)

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of lease liability;
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received; and
- any initial direct costs, and restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use assets are depreciated over the underlying assets' useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.j).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)

k. Sewa (lanjutan)

k. Leases (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Modifikasi sewa

Lease modification

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

A lessee shall account for a lease modification as a separate lease if both:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, a lessee shall:

- mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian; dan
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revision menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan; atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

- allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease; and
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. The revised discount rate is determined as the interest rate implicit in the lease for the remainder of the lease term, if that rate can be readily determined, or the lessee's incremental borrowing rate at the effective date of the modification, if the interest rate implicit in the lease cannot be readily determined.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, the lessee shall account for the measurement of the lease liability by:

- menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- decreasing the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The lessee shall recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease.
- making a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

l. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

m. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

l. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

m. Investment properties

Investment properties are properties (land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

m. Properti investasi

m. Investment properties

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya..

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment properties at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the year in which it arises.

Nilai wajar didasarkan kepada harga pasar aktif, disesuaikan, jika perlu, dengan perbedaan alam, lokasi atau kondisi dari aset tersebut. Jika informasi tersebut tidak tersedia, Grup menggunakan metode penilaian alternatif, seperti harga terbaru di pasar yang kurang aktif atau proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for differences in the nature, location or condition of the specific asset. If this information is not available, the Group uses alternative valuation methods, such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections.

Penentuan nilai wajar investasi dilakukan pada tanggal posisi keuangan didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Penilaian ini membentuk dasar untuk nilai tercatat pada laporan keuangan konsolidasian.

The fair value of investment property as at the financial position date is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. These valuations form the basis for the carrying amounts in the consolidated financial statements.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the year of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, the existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahan pemakaian.

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)	3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Aset takberwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya antara 4 sampai dengan 5 tahun.

Biaya legal terkait pembaruan hak atas tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah antara 20 sampai dengan 30 tahun.

o. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama periode manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

q. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan, dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan jenis persediaan pada masa mendatang.

n. Intangible assets

Computer software

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets. Directly attributable costs are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives of between four to five years.

Legal costs to renew land rights

Legal costs related to the renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised over the period of the land rights between 20 to 30 years.

o. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

p. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

q. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow-moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow-moving inventory is determined on the basis of estimated future usage of individual inventory items.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI	3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
MATERIAL (lanjutan)	INFORMATION (continued)
q. Persediaan (lanjutan)	q. Inventories (continued)
Persediaan batubara merupakan batubara yang menjadi hak Grup dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak yang mencakup alokasi komponen tenaga kerja, penyusutan dan biaya <i>overhead</i> yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan beban penjualan. Penyisihan persediaan batubara usang ditentukan berdasarkan estimasi penjualan persediaan pada masa mendatang.	Coal inventory represents the Group's entitlement to coal on hand and is valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is determined on a moving average basis, which includes an appropriate allocation of labour, depreciation and overheads related to mining activities. Net realisable value is the estimated sales amount in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and selling expenses. The provision for obsolete coal inventory is determined based on estimates of future inventory sales.
r. Pengakuan pendapatan dan beban	r. Revenue and expense recognition
<u>Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan</u>	<u>Revenue from contracts with customers</u>
Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut: - identifikasi kontrak dengan pelanggan; - identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan; - penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak; - alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan - pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).	Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows: - identify contract(s) with a customer; - identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct; - determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period; - allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost-plus margin; and - recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring a promised good or service to a customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

**r. Revenue and expense recognition
(continued)**

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)

Revenue from contracts with customers
(continued)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Penjualan tenaga listrik

Sale of electricity

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh). Umumnya, pelanggan dapat membeli token mereka sendiri ("prabayar") atau ditagih setiap bulan ("pascabayar"). Untuk pelanggan pascabayar, pendapatan dari penjualan listrik diakui setiap bulan berdasarkan hasil baca meter atas pemakaian pelanggan. Untuk pelanggan prabayar, Grup mengakui pendapatan berdasarkan estimasi jumlah penggunaan token pelanggan pada periode tertentu. Penerimaan dimuka dari pelanggan telah dicatat pada utang lain-lain.

Revenue from the sale of electricity is recognised based on customers' electricity usage (kWh). Generally, customers can buy their own token ("prepaid") or are billed monthly ("postpaid"). For postpaid customers, revenue from the sale of electricity is recognised monthly based on the meter reading result of each customer. For prepaid customers, the Group recognises the revenue based on the estimated usage of the customer during the period. The prepayment from customers received is recorded under other payables.

Subsidi listrik Pemerintah

The Government's electricity subsidy

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang diberlakukan penyesuaian tarif menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral ("ESDM") No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2023 (bersama-sama disebut "Peraturan ESDM tentang tarif tenaga listrik").

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus a 7% margin and the actual sales price for each tariff group except for tariff groups for which tariff adjustments were applied based on Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") Regulation No. 28 Year 2016 on tariff for electricity provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara with the latest amendment by Regulation of the Minister of ESDM No. 8 Year 2023 (together referred as "ESDM Regulation on tariff for electricity").



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

**r. Revenue and expense recognition
(continued)**

Subsidi listrik Pemerintah (lanjutan)

The Government's electricity subsidy
(continued)

Subsidi listrik Pemerintah diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan dimana tertera berapa jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai subsidi listrik Pemerintah pada akhir tahun perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK").

The Government's electricity subsidy is recognised as revenue based on a monthly verification report where the amount of subsidy to be paid by the Government is stated and has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia. The Government's electricity subsidy value at the end of the year is subject to the Supreme Audit Agency ("BPK") audit.

Pendapatan kompensasi

Compensation income

Pendapatan kompensasi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas tarif golongan non-subsidi yang tidak mengalami perubahan kenaikan tarif berdasarkan Peraturan ESDM tentang tarif tenaga listrik.

Compensation income is income from the Government of Indonesia for non-subsidy tariff groups which have not experienced a tariff adjustment based on ESDM Regulation on tariff for electricity.

Nilai kompensasi merupakan estimasi manajemen yang pada akhir tahun akan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah Indonesia. Nilai kompensasi listrik Pemerintah perlu diaudit oleh BPK.

The compensation value is a management estimate which at the end of the year will be reviewed by the State Development Audit Agency ("BPKP") and has been recognised as an obligation by the Government of Indonesia. The Government's electricity compensation value is subject to the BPK audit.

Biaya penyambungan pelanggan

Customer connection fees

Grup menganggap biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan yang digunakan untuk membangun atau mengakuisisi aset tetap untuk menghubungkan pelanggan secara tidak langsung berkaitan erat dengan pasokan listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan merupakan satu kesatuan karena pelanggan tidak dapat memperoleh manfaat dari kedua layanan ini sendiri. Infrastruktur penyambungan berfungsi untuk memenuhi kewajiban penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pasokan listrik dan biaya penyambungan pada dasarnya sama, dan memiliki pola transfer yang sama ke pelanggan. Oleh karena itu, biaya penyambungan dan pasokan tenaga listrik merupakan satu kewajiban pelaksanaan. Dengan demikian, biaya penyambungan diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi terhitung sejak tanggal koneksi.

The Group views connection fees received from customers that are used to construct or acquire property, plant and equipment to connect the customers as indirectly related to the promise of providing a supply of electricity to the customers. Supply of electricity and connection fees are not distinct because the customers cannot benefit from these two services on their own. The purpose of the connection infrastructure is to fulfil the obligation to supply electricity to the customers. Both the supply of electricity and connection fees are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customers. Therefore, connection fees and the supply of electricity are one performance obligation. As such, connection fees are recognised as deferred revenue and amortised based on the average useful life of the distribution of assets starting from the connection date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan batubara

Pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika mengontrol transfer ke pelanggan. Kontrol beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika batu bara dimuat ke kapal dimana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Grup menjual batubara dengan syarat *Free on Board* ("FOB"), di mana Grup tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah kontrol barang telah berlalu di pelabuhan muat. Untuk jangka waktu ini hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana kontrol lewat. Selain itu, Grup menjual batubara dengan syarat *Cost, Insurance and Freight* ("CIF"), tetapi berdasarkan perjanjian penjualan, kepemilikan dan risiko kerugian atas batubara akan tetap berada pada Grup sampai batubara melewati pelabuhan bongkar. Oleh karena itu, Grup menganggap bahwa biaya asuransi dan pengangkutan bukan merupakan kewajiban pelaksanaan terpisah melainkan satu kesatuan dengan kewajiban pelaksanaan dengan penjualan batubara dikarenakan kontrol atas persediaan batubara berpindah ke pembeli pada saat batubara tersebut sudah sampai di lokasi pembeli. Oleh karena itu Grup tidak memiliki kewajiban pelaksanaan terpisah untuk jasa pengangkutan dan asuransi yang disediakan.

Pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi

Pendapatan biaya jasa bulanan dari pelayanan jaringan dan jasa telekomunikasi diakui dalam suatu periode waktu selama jasa tersebut diberikan.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan usaha lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari sewa trafo dan jasa-jasa administratif lainnya. Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut telah diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan servis aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total servis yang akan diberikan karena pelanggan telah menerima dan menggunakan manfaat secara simultan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

**r. Revenue and expense recognition
(continued)**

Sales of coal

Sales revenue is recognised on each individual sale when control transfers to the customer. Control passes to the customer and sales revenue is recognised when the coal is loaded onto the vessel on which the coal will be shipped to the destination port or the customer's premises.

The Group generally sells its coal products under Free on Board ("FOB") terms, where the Group has no responsibility for freight or insurance once control of the goods has passed at the loading port. For this term there is only one performance obligation, which is for the provision of a product at the point where control passes. In addition, the Group also sells coal under Cost, Insurance and Freight ("CIF") terms, but under the sales agreement, the title and risk of loss of coal shall remain with the Group until such coal passes at the discharging port. As such, the Group considers that the insurance and freight costs are not separate performance obligations but one performance obligation with the sale of coal, because the control over coal supplies passes to the buyer when the coal has arrived at the buyer's location. Accordingly, the Group does not have any separate performance obligations for the transportation and insurance services provided.

Telecommunication network and service

Monthly service fees from telecommunication network and service revenue are recognised over period of time during the services are provided.

Other revenues

Other revenues consist of transformer rental and other administrative services. Revenue from providing services is recognised in the accounting period in which the services are rendered. For fixed-price contracts, revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers received and consumed the benefit simultaneously.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan) **3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)**

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

s. Imbalan kerja

Kewajiban jangka pendek

Liabilitas untuk upah dan gaji, termasuk imbalan non – moneter dan akumulasi cuti sakit yang akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah akhir dari periode ketika pekerja memberikan jasa yang berhubungan diakui hingga jasa yang diberikan hingga akhir dari periode pelaporan dan dihitung pada jumlah yang diperkirakan akan dibayar ketika liabilitas diselesaikan. Liabilitas disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja masa kini pada neraca.

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program manfaat pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

r. Revenue and expense recognition (continued)

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. Consequently, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

s. Employee benefits

Short term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits and accumulating sick leave that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current year and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PKB adalah program manfaat pasti.

Sehubungan dengan program manfaat pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban manfaat pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban manfaat pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

Nilai kini kewajiban manfaat pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan imbal hasil obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program manfaat pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

s. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the Manpower Regulations or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Manpower Regulations or the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Manpower Regulations or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension program is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment awards.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the yields of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the consolidated statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

s. Imbalan kerja (lanjutan)

s. Employee benefits (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar di muka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to publicly or privately managed pension plans. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination benefits

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS No. 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Health care benefits

Grup menyediakan imbalan pemeliharaan kesehatan untuk karyawan yang berhak atas imbalan tersebut. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan pada karyawan aktif dan pensiunan yang memenuhi masa kerja minimum tertentu atau berhenti bekerja karena cacat atau meninggal dunia. Perkiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode akuntansi yang sama dengan yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode saat terjadinya.

The Group provides health care benefits to its employees who are entitled to these benefits. The entitlement to these benefits is usually granted to both active and retired employees who have fulfilled the minimum service period or ceased working due to disability or death. The expected costs of these benefits are accrued over the years of employment using the same accounting method as used for defined benefit pension plans. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period they arise.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

s. Imbalan kerja (lanjutan)

s. Employee benefits (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian, dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada Perjanjian Kerja Bersama.

The Group provides other long-term employee benefits such as a long leave allowance, disability benefit, death benefit, and loyalty benefit. The benefits paid are based on the Group's CLA.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus. Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun tidak. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

The long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. The disability benefit is provided to employees who have a work accident. The death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. The loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

t. Provisi

t. Provisions

Provisi restorasi lingkungan, biaya restrukturisasi dan tuntutan hukum diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provision for environmental restoration, restructuring costs and legal claims is recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Ketika terdapat beberapa kewajiban yang serupa, kemungkinan penyelesaian mengakibatkan arus keluar ditentukan dengan mempertimbangkan kelas kewajiban secara keseluruhan. Provisi diakui walaupun kemungkinan adanya arus keluar sehubungan dengan item manapun yang termasuk dalam kelas kewajiban yang sama mungkin kecil.

Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

t. Provisi (lanjutan)

t. Provisions (continued)

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai beban bunga.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

u. Piutang

u. Receivables

Piutang usaha merupakan jumlah yang dapat diterima dari pelanggan atas penjualan tenaga listrik, energi primer dan jasa dalam kegiatan usaha normal. Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha normal Grup. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Trade receivables represent amounts due from customers for sales of electricity, primary energy and services in the normal course of business. Other receivables represent receivables that are not related to the normal business activities of the Group. If receivables are expected to be collected within one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, the receivables are presented as non-current assets in the consolidated statement of financial position.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any loss allowance.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukkan, dikreditkan terhadap item baris yang sama.

Impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

Piutang pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Receivables from related parties are initially presented as non-current assets unless there are specific reasons for them to be presented as current assets in the consolidated statements of financial position.

Lihat Catatan 3.g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

See Note 3.g for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

v. Pajak penghasilan

v. Income tax

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal goodwill; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; or deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

v. Income tax (continued)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak atas dalam ventura bersama dan asosiasi dimana Grup dapat mengendalikan waktu pembalikan perbedaan temporer dan kemungkinan perbedaan tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Deferred tax assets and liabilities are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in joint ventures and associates where the Group is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not be reversed in the foreseeable future.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

w. Laba per saham

w. Earnings per share

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding for the year.

Labar per saham dilusi dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

x. Informasi segmen

x. Segment information

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group and are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their segment operation performance.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka dikategorikan berdasarkan lokasi geografis di mana penjualan tenaga listrik dilakukan.

Information reported to the chief operating decision maker for the purposes of resource allocation and assessment of their performance is grouped based on the geographical location where electricity sales are made.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

y. Properti pertambangan

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait dan tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

y. Mining properties

Development expenditure incurred by or on behalf of the Group is accumulated separately for each area of interest in which economically recoverable resources have been identified. Such expenditure includes costs directly attributable to the construction of mines and related infrastructure and excludes physical assets and land rights (i.e., right to build, right to cultivate and right to use), which are recorded as fixed assets.

z. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

z. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak diselesaikan, dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Borrowings are derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

z. Pinjaman (lanjutan)

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup, pada atau sebelum akhir tahun pelaporan, dipertimbangkan dalam mengklasifikasikan perjanjian pinjaman dengan perjanjian sebagai lancar atau tidak lancar. Kovenan yang harus dipatuhi oleh Grup setelah tahun pelaporan tidak mempengaruhi klasifikasi pada tanggal pelaporan.

**3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

z. Borrowings (continued)

Loans are classified as current liabilities unless the Group has a right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Covenants that the Group is required to comply with, on or before the end of the reporting year, are considered in classifying loan arrangements with covenants as current or non-current. Covenants that the Group is required to comply with after the reporting period do not affect the classification at the reporting date.

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi tentang nilai aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direvisi secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap tahun tersebut, atau pada tahun revisi dan tahun berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi tahun tersebut.

Pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES**

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgements, estimates, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the year in which the estimate is revised if the revision affects only that year, or in the year of the revision and future years if the revision affects both current and future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgements are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Penentuan umur sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau tahun setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

Pendapatan dari jasa penyambungan pelanggan

Sebagai bagian dari implementasi PSAK No. 115, Grup telah menilai kembali perlakuan yang diterapkan pendapatan dari penyambungan pelanggan. Grup mempertimbangkan semua fakta dan kondisi yang relevan untuk menentukan pengakuan pendapatan terkait biaya penyambungan pelanggan. Untuk itu, Grup perlu menentukan kewajiban pelaksanaan yang timbul sehubungan dengan penerimaan biaya penyambungan dari pelanggan. Grup mempertimbangkan fakta bahwa kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik secara berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tahun 2009 dan semua pelanggan dikenakan tarif listrik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penggunaan tenaga listrik. Penerimaan biaya penyambungan menimbulkan kewajiban bagi Grup untuk menyediakan akses listrik secara berkelanjutan kepada pelanggan. Grup menyimpulkan bahwa menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Perusahaan merupakan kewajiban yang tidak terpisah dengan penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

**Critical judgements in applying accounting
policies (continued)**

Determining lease term (continued)

In determining the lease term, Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or years after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs, which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

Revenues from customer connection fees

As a result of the implementation of SFAS No. 115, the Group has reassessed its treatment of revenue from customer connection fees. The Group has considered all relevant facts and circumstances to determine the exact timing of revenue recognition pertaining to connection fees paid by customers. To do so, the Group needs to determine what performance obligations it has as a result of receiving connection fees. The Group considered the fact that the obligation to provide an ongoing supply of electricity is regulated by the 2009 Electricity Law and that the Group charges all customers the same regulated tariff for electricity usage prescribed by the Government of the Republic of Indonesia. The receipt of connection fees creates an obligation for the Group to provide ongoing electricity supply to its customers. The Group has concluded that connecting the customers to its network is an obligation which cannot be separated from the delivery of electricity.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pertimbangan penting dalam penerapan
kebijakan akuntansi (lanjutan)**

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - bentuk legal dari kendaraan terpisah; dan
 - persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 9 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

**Critical judgements in applying accounting
policies (continued)**

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
 - *the legal form of the separate vehicle;*
 - *the terms of the contractual arrangement; and*
 - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 9 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group has also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sumber ketidakpastian estimasi

Sources of estimation uncertainty

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir tahun pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting year, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

**Provisi atas kerugian kredit ekspektasian
piutang usaha dan aset keuangan lainnya**

**Provision for expected credit losses of trade
receivables and other financial assets**

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan tipe produk dan tipe dan/atau peringkat pelanggan).

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g., by product type and customer type and/or customer rating).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi, dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions, and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Pengakuan pendapatan

Revenue recognition

Penjualan tenaga listrik Prabayar

Prepaid sales of electricity

Penjualan tenaga listrik Prabayar mencakup estimasi atas listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan antara tanggal pembelian token terakhir dan akhir tahun keuangan Grup. Estimasi dilakukan dengan memproporsikan jumlah hari antara tanggal terakhir pembelian token yang dibeli dengan tanggal laporan keuangan Grup dengan konsumsi historis pelanggan.

Prepaid sales of electricity includes an estimate of electricity consumed by customers between the date of the last token purchased and the financial year end of the Group. An estimate is made by prorating the total days between the date of the last token purchased and the date of the Group's financial statement using the historical consumption of the customers.

Biaya penyambungan pelanggan

Customer connection fees

Jasa koneksi yang diserahkan kepada pelanggan tidak merepresentasikan nilai yang berdiri sendiri (*stand-alone value*) untuk pelanggan tersebut. Sebagai hasilnya, Grup mencatat biaya penyambungan yang diterima dari pelanggan untuk menghubungkan pelanggan ke jaringan listrik Grup sebagai pendapatan yang diakui sepanjang waktu dan diamortisasi sejak tanggal penyambungan sesuai masa estimasi konsumsi pelanggan. Konsumsi pelanggan diestimasi berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi. Dengan mempertimbangkan banyaknya variasi aset distribusi dan masa manfaat atas aset-aset tersebut, Grup telah menerapkan rata-rata masa manfaat 20 tahun yang dipercaya telah merepresentasikan keseluruhan masa manfaat. Perubahan estimasi atas masa manfaat aset distribusi akan mengakibatkan perubahan pada pengakuan pendapatan dari biaya penyambungan.

A connection service which is provided to the customer does not represent a stand-alone value for that customer. Consequently, the Group recognises connection fees received from customers to connect the customers to its network as revenue over time and amortises it starting from the connection date based on the estimated consumption pattern of the customer. The customers' consumption is estimated based on the average useful life of the distribution assets. Given the wide variety of distribution assets and remaining useful lives, the Group has applied an average life of 20 years, which the Group believes to be representative of the useful lives of the assets. A change in the estimated useful lives of distribution assets would result in a change in the revenue recognised from connection fees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

**Estimated useful lives of property, plant and
equipment**

Masa manfaat setiap aset tetap yang dimiliki Grup ditentukan berdasarkan periode aset tersebut diharapkan masih dapat digunakan. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis atau komersial, dan hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta tahun pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

**Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang
menggunakan model revaluasi**

**Fair value of property, plant and equipment and
investment properties that use the revaluation
model**

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

In the process of asset revaluation, management, with the assistance of an independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 6 dan 8.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 8, respectively.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Sources of estimation uncertainty (continued)

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Grup.

The determination of post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries when calculating such amounts. Those assumptions include, among others, the discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from assumptions are accumulated and amortised over future periods and therefore, generally affect the recognised expenses and liabilities recorded in such future periods. While it is believed that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the post-employment benefits liability of the Group.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 49.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefits are disclosed in Note 49.

Pajak penghasilan

Income taxes

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

The calculations of income tax expenses for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by management's estimation and assumption regarding the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN
ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

**Sewa - estimasi suku bunga pinjaman
inkremental**

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)**

Sources of estimation uncertainty (continued)

**Leases - estimation of the incremental
borrowing rate**

Since the Group cannot readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

5. SUBSIDIARIES

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **	
			2024	2023		2024	2023
PT PLN Indonesia Power ("PIP") dan entitas anak/and its subsidiaries	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	426,760	400,904
PT PLN Indonesia Power Services ("PIPS"; dahulu bernama/previously named PT Cogindo Daya Bersama *)	Jakarta	Kogenerasi, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen/ Cogeneration, energy distribution, energy service and management	99.99	99.99	1999	1,437	1,146
PT Artha Daya Coalindo ("ADC") *	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	80.00	80.00	1998	675	719
PT Indo Ridlatama Power ("IRP") *	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	90.00	90.00	2018	1,394	1,538
PT PLN Indonesia Power Renewables ("IPRen") dan entitas anak/and its subsidiaries *)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	2016	9,997	8,341
PT PLN Indonesia Geothermal ("IGeo")	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/Development of new and renewable energy	96.04	96.04	2019	242	203
PT Suralaya Indo Tenaga ("SIT") *** dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	***)	7,658	6,531
PT Putra Suralaya Indo Tenaga ("PSI") ***	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/ Electricity and energy	99.99	99.99	***)	7,658	6,531
PT PLN Nusantara Power ("PNP") dan entitas anak/and its subsidiaries	Surabaya	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	1995	355,348	343,072
PT PLN Nusantara Power Services (PLN NPS; dahulu bernama/previously named PT PJB Services) dan entitas anak/and its subsidiary *)	Surabaya	Jasa/Service	99.00	99.00	2001	1,953	2,046
PT Mitra Karya Prima ("MKP") *	Surabaya	Jasa/Service	92.00	92.00	2005	237	183



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:
(lanjutan)

5. SUBSIDIARIES (continued)

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **	
			2024	2023		2024	2023
PT PLN Nusantara Power Construction ("NPC") dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Jasa engineering, pengadaan dan konstruksi, dan jasa listrik/ Engineering, procurement and construction, and electricity	99.00	99.00	2004	2,161	2,278
PT Prima Power Nusantara ("PPN")	Jakarta	Jasa engineering, pengadaan dan konstruksi, dan jasa listrik/ Engineering, procurement and construction, and electricity	100.00	100.00	2016	155	199
PT Navigat Innovative Indonesia ("NII") *	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian/ Trading, construction, mining and agriculture	72.97	72.97	2002	508	483
PT PLN Nusantara Renewables ("PLN NR") dan entitas anak/and its subsidiaries	Jakarta	Investasi/ Investment	99.99	99.99	2015	10,260	8,672
PT Pembangunan Jawa-Bali Investindo ("PJB Investindo") *	Jakarta	Investasi/ Investment	99.99	99.99	2020	406	260
PT Pembangunan Jawa Baskara Investasi Cirata ("PJBIC")	Jakarta	Perusahaan tujuan tertentu untuk Proyek Cirata/ Special Purpose Company for Cirata's Project	99.99	99.99	2020	406	258
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC") *	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa engineering supply chain dan konsultasi di bidang kelistrikan/ Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector	100.00	100.00	2018	748	925
PT PLN Nusantara Renewable Investasi ("NRI") *	Jakarta	Penasihat dan perunding dalam merger dan akuisisi/ Advisors or mediators in merger and acquisitions	99.88	-	-	103	-
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam ("PLN Batam") dan entitas anak/and its subsidiary	Batam	Penyedia tenaga listrik/ Electricity supplier	99.99	99.99	2000	23,673	21,022
PT Pelayanan Energi Batam ("PEB")	Batam	Pembangunan pipa gas dan energi lainnya/ Construction of gas pipeline and other energy sector	99.99	99.99	2016	1,077	1,139
PT Indonesia Comnet Plus ("ICON Plus") dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi/Telecommunication provider	99.99	99.99	2000	11,824	11,036
PT Indonesia Connectivity Investasi ("ICONVEST"; dahulu bernama/previiously named PT Rekadaya Elekrika Consult) dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Supervisi dan konsultasi/ Supervision and consultation	99.99	99.99	2010	112	107
PT Terang Wahana Hijau ("Icon Green")	Jakarta	Energi terbarukan/Renewable energy	99.50	-	2024	11	-
PT Prima Layanan Nasional Engineering ("PLNE")	Jakarta	Jasa engineering, pengadaan dan konstruksi ("EPC")/ Engineering, procurement and construction ("EPC")	99.90	99.90	2003	1,920	1,546
PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya ("PLN ND") dan entitas anak/and its subsidiary	Tarakan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.97	99.97	2004	1,388	1,074
PT Paguntaka Cahaya Nusantara ("PCN") *	Balikpapan	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.96	99.96	2018	2	2
Majapahit Holding B.V. ("MH") dan entitas anak/and its subsidiary	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Financial institution	100.00	100.00	2006	6,048	5,736
Majapahit Finance B.V. ("MF") *	Belanda/ The Netherlands	Lembaga keuangan/ Financial institution	100.00	100.00	2006	6,048	5,736
PT PLN Energi Primer Indonesia ("PLN EPI") dan entitas anak/and its subsidiaries	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	99.99	99.99	2009	25,663	17,892
PT Jambi Prima Coal ("JPC")	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	60.00	60.00	2010	251	282
PT PLN Batubara Investasi ("BBI") dan entitas anak/and its subsidiaries	Jakarta	Investasi/ Investment	99.96	99.96	2018	2,750	2,800
PT Bangun Persada Jambi Energi ("BPJE") *	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	***)	37	37
PT Mahakarya Abadi Prima ("MAP") *	Jambi	Pertambangan batu bara/ Coal mining	80.00	80.00	***)	3	3
PT Bayan Koalindo Lestari ("BKL") *	Palembang	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	51.00	2018	792	706

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: (lanjutan)

5. SUBSIDIARIES (continued)

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries: (continued)

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi komersial/ Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi **/ Total assets before elimination **)	
			2024	2023		2024	2023
PT Prima Bara Indonesia ("PBI") *	Kalimantan Tengah/ Central Kalimantan	Pertambangan batu bara/ Coal mining	51.00	51.00	***)	187	187
PT PLN Batubara Niaga ("BBN")	Jakarta	Perdagangan batu bara/ Coal trading	100.00	100.00	2020	3,461	3,038
PT PLN Energi Gas ("EG")	Jakarta	Pembangkitan tenaga listrik/ Power generation	99.99	99.99	2010	2,469	2,562
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Jakarta	Pelayaran/Shipping	99.99	99.99	2011	6,069	5,670
PT Haleyora Power ("HP") dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Jasa pemeliharaan dan operasi/ Maintenance and operation	99.99	99.99	2013	1,877	1,554
PT Haleyora Powerindo ("HPI") *	Jakarta	Layanan teknik dan pemeliharaan/ Technical and maintenance services	95.00	95.00	2013	646	641
PT Energy Management Indonesia ("EMI") dan entitas anak/and its subsidiary	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/Energy and environmental conservation service and new renewable energy	99.99	99.99	1987	49	126
PT Energi Biomasa Indonesia ("EBI")	Jakarta	Jasa konservasi energi dan lingkungan serta energi baru terbarukan/Energy and environmental conservation service and new renewable energy	99.00	99.00	2015	4	4
PT Energi Bangun Indonesia ("EBI 2") ***	Jakarta	Jasa perdagangan ekspor dan impor, perindustrian, pembangunan/ Export and import trading, industry, construction	80.00	80.00	***)	1	1
PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara ("PLN MCTN")	Jakarta	Jasa pengelolaan energi/Energy services	95.00	95.00	2000	1,660	1,247

*) Pemilikan tidak langsung/Indirect ownership

**) Dalam miliaran Rupiah/Stated in billions of Rupiah

***) Dalam tahap pengembangan/Under development stage



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Surplus (defisit) revaluasi/ Revaluation surplus (deficit)	Saldo akhir/ Ending balance
Blaya perolehan atau revaluasi						At cost or revaluation
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisitions</u>
Hak atas tanah	168,127,620	146,488	-	3,614,986	9,877,622	181,766,716
Bangunan umum, waduk dan prasarana	83,884,900	389,312	(12,684)	7,225,213	(781,713)	90,705,028
Instalasi dan mesin pembangkit	590,572,905	2,070,458	(821,756)	(11,743,507)	4,204,546	584,282,646
Perlengkapan transmisi	265,057,265	42,780	-	23,597,198	(10,366,617)	278,330,626
Perlengkapan distribusi	267,255,807	89,092	-	21,262,175	(23,646,108)	264,960,966
Material cadangan utama	3,316,055	325,898	-	3,365,377	(1,426,495)	5,580,835
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	8,655,541	52,148	(3,948)	1,483,009	(2,734,003)	7,452,747
Perlengkapan umum	21,674,868	475,975	-	1,958,891	-	24,109,734
Kendaraan bermotor	3,156,177	119,468	-	(3,082,879)	-	192,766
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	9,328,873	7,145	-	1,264,100	-	10,600,118
Kapal dan perlengkapan	<u>2,681,505</u>	<u>653,804</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,335,309</u>
Subjumlah	<u>1,423,711,516</u>	<u>4,372,568</u>	<u>(838,388)</u>	<u>48,944,563</u>	<u>(24,872,768)</u>	<u>1,451,317,491</u>
Aset dalam pembangunan	128,753,555	59,521,608	-	(105,682,228)	-	82,592,935
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>16,077,130</u>	<u>-</u>	<u>(2,713,568)</u>	<u>1,700,353</u>	<u>(1,086,707)</u>	<u>13,977,208</u>
Jumlah	<u>1,568,542,201</u>	<u>63,894,176</u>	<u>(3,551,956)</u>	<u>(55,037,312)</u>	<u>(25,959,475)</u>	<u>1,547,887,634</u>
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai						Accumulated depreciation and impairment
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisitions</u>
Bangunan umum, waduk dan prasarana	5,434,440	1,970,381	(12,684)	(4,662,661)	(2,729,476)	-
Instalasi dan mesin pembangkit	39,593,908	13,090,541	(821,756)	(39,016,800)	(12,845,893)	-
Perlengkapan transmisi	13,649,962	7,619,123	-	(25,454)	(21,243,631)	-
Perlengkapan distribusi	19,558,835	11,066,997	-	(129,809)	(30,496,023)	-
Material cadangan utama	188,461	109,415	-	1,242,709	(1,540,585)	-
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	2,301,142	1,148,212	(3,948)	(62,515)	(3,382,891)	-
Perlengkapan umum	18,548,886	10,285,405	-	(8,564,000)	-	20,270,291
Kendaraan bermotor	2,575,549	3,347	-	(1,092,704)	-	1,486,192
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	3,793,630	1,181,742	-	35,238	-	5,010,610
Kapal dan perlengkapan	<u>1,117,064</u>	<u>228,876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,345,940</u>
Subjumlah	<u>106,761,877</u>	<u>46,704,039</u>	<u>(838,388)</u>	<u>(52,275,996)</u>	<u>(72,238,499)</u>	<u>28,113,033</u>
Aset tidak digunakan dalam operasi	<u>8,999,230</u>	<u>1,056,080</u>	<u>(2,020,434)</u>	<u>647,126</u>	<u>(1,086,708)</u>	<u>7,595,294</u>
Jumlah	<u>115,761,107</u>	<u>47,760,119</u>	<u>(2,858,822)</u>	<u>(51,628,870)</u>	<u>(73,325,207)</u>	<u>35,708,327</u>
Penyisihan penurunan nilai	<u>3,810,473</u>	<u>111,280</u>	<u>(2,082)</u>	<u>(3,641,604)</u>	<u>-</u>	<u>278,067</u>
Jumlah tercatat	<u>1,448,970,621</u>					<u>1,511,901,240</u>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

	2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan atau revaluasi					At cost or revaluation	
Pemilikan langsung					Direct acquisitions	
Hak atas tanah	165,722,533	44,296	-	2,360,791	168,127,620	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	80,241,862	189,350	(1,176)	3,454,864	83,884,900	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	576,903,905	2,928,906	(635,018)	11,375,112	590,572,905	Installations and power plants
Perengkapan transmisi	242,370,927	19,316	-	22,667,022	265,057,265	Transmission equipment
Perengkapan distribusi	248,760,910	112,344	-	18,382,553	267,255,807	Distribution equipment
Material cadangan utama	3,194,857	209,561	-	(88,363)	3,316,055	Major spare parts
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	7,274,300	40,843	-	1,340,398	8,655,541	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perengkapan umum	20,255,166	326,228	-	1,093,474	21,674,868	General equipment
Kendaraan bermotor	2,862,730	256,039	-	37,408	3,156,177	Motor vehicles
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	5,795,912	4,034	-	3,528,927	9,328,873	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	1,912,780	422,303	-	346,422	2,681,505	Vessels and equipment
Subjumlah	1,355,295,882	4,553,220	(636,194)	64,498,608	1,423,711,516	Subtotal
Aset dalam pembangunan	135,756,415	57,878,648	(468,031)	(64,413,477)	128,753,555	Construction in progress
Aset tidak digunakan dalam operasi	19,283,887	-	(2,699,613)	(507,144)	16,077,130	Assets not used in operations
Jumlah	1,510,336,184	62,431,868	(3,803,838)	(422,013)	1,568,542,201	Total
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai						Accumulated depreciation and impairment
Pemilikan langsung						Direct acquisitions
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,703,562	2,676,431	(63)	54,510	5,434,440	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	19,968,790	20,140,221	(36,470)	(478,633)	39,593,908	Installations and power plants
Perengkapan transmisi	6,298,086	7,073,908	-	277,968	13,649,962	Transmission equipment
Perengkapan distribusi	9,470,612	10,166,288	-	(78,065)	19,558,835	Distribution equipment
Material cadangan utama	97,143	102,082	-	(10,764)	188,461	Major spare parts
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	1,127,653	1,167,405	-	6,084	2,301,142	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Perengkapan umum	17,033,001	1,579,007	-	(63,122)	18,548,886	General equipment
Kendaraan bermotor	2,313,026	103,494	-	159,029	2,575,549	Motor vehicles
Perengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya	2,978,984	835,349	-	(20,703)	3,793,630	Other telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	948,992	175,441	-	(7,369)	1,117,064	Vessels and equipment
Subjumlah	62,939,849	44,019,626	(36,533)	(161,065)	106,761,877	Subtotal
Aset tidak digunakan dalam operasi	10,594,605	1,052,915	(2,628,824)	(19,466)	8,999,230	Assets not used in operations
Jumlah	73,534,454	45,072,541	(2,665,357)	(180,531)	115,761,107	Total
Penyisihan penurunan nilai	3,752,747	30,219	-	27,507	3,810,473	Provision for impairment
Jumlah tercatat	1,433,048,983				1,448,970,621	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

	2024	2023	
Beban usaha	46,672,799	43,967,082	Operating expenses
Aset dalam pembangunan	31,240	52,544	Construction in progress
Beban lain-lain	1,056,080	1,052,915	Other expenses
Jumlah	47,760,119	45,072,541	Total



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Grup memiliki beberapa bidang hak atas tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Perusahaan jatuh tempo antara tahun 2025 sampai dengan 2051, tetapi dapat diperpanjang oleh Grup. Grup juga mempunyai beberapa bidang hak atas tanah dengan HGB yang sedang dalam proses perpanjangan. Grup telah membeli hak atas tanah yang sedang dalam pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2024, bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi lainnya serta kapal diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar USD24.593.721.735 (nilai penuh) atau setara dengan Rp397.360.762 (2023: USD23.379.863.502 (nilai penuh) atau setara dengan Rp360.961.713) dan Rp7.927.060 (2023: Rp10.857.070).

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.793.817 dan Rp17.699.061.

Revaluasi aset

Pada tahun 2024, manajemen mempekerjakan penilai eksternal independen dan berkualifikasi untuk menentukan nilai wajar aset tetap yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"). KJPP RHR merupakan penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

The Group owns several pieces of land rights with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2025 to 2051, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land rights with HGB, which are still in an extension process. The Group has recently purchased land rights which are in the process of transfer of certificates to the name of the Group.

As at December 31, 2024, the buildings, installations and power plants, transmission equipment, other telecommunications and data processing equipment and vessels were insured with total insurance coverage of USD24,593,721,735 (full amount) or equivalent to Rp397,360,762 (2023: USD23,379,863,502 (full amount) or equivalent to Rp360,961,713) and Rp7,927,060 (2023: Rp10,857,070).

The acquisition costs of property, plant and equipment that have been fully depreciated but are still in use as at December 31, 2024 and 2023 amount to Rp21,793,817 and Rp17,699,061 respectively.

Asset revaluation

In 2024, management engaged external independent and qualified valuers, Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), to determine the fair value of property, plant and equipment. KJPP RHR is an independent valuer registered with the Ministry of Finance and FSA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi aset (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 113 dan berdasarkan valuasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2024 menggunakan/ <i>Fair value measurement at December 31, 2024 using</i>				
Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pengukuran nilai wajar berulang				<i>Recurring fair value measurement</i>
Hak atas tanah	-	37,540,085	144,226,631	181,766,716 <i>Land rights</i>
Bangunan, waduk dan prasarana	-	6,912,544	83,792,484	90,705,028 <i>Buildings, reservoirs and infrastructure</i>
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	584,282,646	584,282,646 <i>Installations and power plants</i>
Perlengkapan transmisi	-	-	278,330,626	278,330,626 <i>Transmission equipment</i>
Perlengkapan distribusi	-	-	264,960,966	264,960,966 <i>Distribution equipment</i>
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi data yang digunakan dalam penyediaan listrik	-	-	7,452,747	7,452,747 <i>Telecommunications and processing equipment used for electricity supply</i>
Material cadang utama	-	-	5,580,835	5,580,835 <i>Major spare parts</i>
Jumlah	-	44,452,629	1,368,626,935	1,413,079,564 <i>Total</i>

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

Nilai wajar Tingkat 2 dari hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan, waduk dan prasarana menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

- Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- Tingkat hunian;
- Tingkat pertumbuhan;
- Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
- Biaya pembuatan baru per meter persegi;
- Tingkat depresiasi;
- Biaya operasional;
- Keuntungan pengembangan; dan
- Indeks kemahalan konstruksi.

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Asset revaluation (continued)

The table below analyses fixed assets recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 113 and based on valuation as at December 31, 2024 as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).

There were no property, plant and equipment which could be classified at Level 1 fair value.

There were no transfers between Level 1 and Level 2 during the year.

The Level 2 fair value of land rights is calculated using the market approach and income approach, while the value of building, reservoirs and infrastructure is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:

- Sale or rental price per square metre;
- Occupancy rate;
- Growth rate;
- Discount and capitalisation rate;
- Replacement cost new per square metre;
- Depreciation rate;
- Operational expense;
- Developers margin; and
- Construction cost index.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi aset (lanjutan)

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)

Asset revaluation (continued)

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ January 2024	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Jumlah yang diakui pada laba rugi/ Amount recognised in profit or loss		Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/Amount recognised in other comprehensive income	31 Desember/ December 2024	
				Depresiasi/ Depreciation	Penurunan nilai/ Impairment			
Hak atas tanah	130,181,325	4,241	5,527,110	-	(8,229)	8,522,184	144,226,631	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	69,363,365	221,578	14,967,252	(2,590,154)	(56,702)	1,887,145	83,792,484	Building, reservoirs and infrastructures
Instalasi dan mesin pembangkit	518,626,189	1,839,864	46,004,020	(19,812,838)	(333,967)	37,959,378	584,282,646	Installations and power plants
Perlengkapan transmisi	259,661,371	162,193	15,311,393	(8,540,602)	(458,317)	12,194,588	278,330,626	Transmissions equipment
Perlengkapan distribusi	247,726,906	89,185	21,278,548	(11,067,922)	(214,750)	7,148,999	264,960,966	Distributions equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi								Telecommunications and data processing
yang digunakan dalam								equipment used for
penyediaan listrik	6,333,876	40,113	2,848,857	(2,335,356)	(3,290)	568,547	7,452,747	electricity supply
Material cadangan utama	3,502,464	331,800	1,720,907	(106,788)	247	132,205	5,580,835	Major spare parts
Jumlah	<u>1,235,395,496</u>	<u>2,688,974</u>	<u>107,658,087</u>	<u>(44,453,660)</u>	<u>(1,075,008)</u>	<u>68,413,046</u>	<u>1,368,626,935</u>	Total

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Revaluasi aset (lanjutan)

Asset revaluation (continued)

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Teknik penilaian/ Valuation technique	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ Unobservable inputs	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi yang dipakai/ Range of unobservable inputs used	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ Relationship of unobservable inputs to fair value	
Hak atas tanah					Land rights
Tapak Tower	Pendekatan biaya dengan metode penjumlahan/ The cost approach with the summation method	- Luas Right of Way ("ROW") ROW area	60.00% - 70.00%*	- Semakin tinggi luas dan kompensasi ROW maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the ROW area and compensation the higher the fair value	Land for tower site
		- Kompensasi ROW/ Compensation ROW			
Tanah gardu dan pembangkit	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ The income approach with the land development method	- Penentuan sesuai pengembangan/ Adjustment of parameter development	60.00% - 80.00%*	- Semakin tinggi koefisien indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the KLB, the higher the fair value	Land for substation and power plant
		- Data luas dan aspek legal/ Land area and legal aspects		- Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ Certified land will have higher fair value	
		- Perubahan peruntukan/ Zoning changes		- Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ Zoning of neighboring land might have higher fair value	
Bangunan					Buildings
Bangunan umum	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Indeks koefisien/ Index coefficient	1.50 - 6.91	- Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value	General buildings
		- Volume bangunan/ Building volumes	60.00% - 70.00%*	- Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher building volumes, the higher the fair value	
Waduk dan prasarana	Tren/ Trending	- Indeks koefisien/ Index coefficient	1.00 - 2.57	- Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the index coefficient, the higher the fair value	Reservoirs and infrastructures
Instalasi dan mesin pembangkit	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat kemunduran fungsional/ Functional obsolescence rate	1.00% - 71.00%	- Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the rate, the lower the fair value	Installations and power plants
		- Nilai pengganti baru/ RCN	50.00% - 60.00%	- Semakin besar tingkatnya, maka semakin rendah nilai wajar/ The higher the rate, the lower the fair value	
		- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 3.80	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	
Perlengkapan transmisi	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 1.50	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Transmissions equipment
Perlengkapan distribusi	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 1.82	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Distributions equipment
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.01 - 1.10	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Telecommunications and data processing equipment used for electricity supply
Material cadang utama	Pendekatan biaya/ Cost approach	- Tingkat indeks PPI/ PPI index rate	1.00 - 3.80	- Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ The higher the PPI index rate, the higher the fair value	Major spare parts

*) Terdapat banyak input yang tidak dapat diobservasi. Hal ini merepresentasikan kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi./There are too many unobservable inputs. This represents the weights of the unobservable inputs.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Revaluasi aset (lanjutan)

Asset revaluation (continued)

Perubahan surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

The changes in revaluation surplus, net of applicable deferred income taxes, were charged to other comprehensive income and are presented in property, plant and equipment revaluation surplus in the consolidated statements of changes in equity.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	688,394,826	688,538,705	<i>Beginning balance</i>
Kenaikan surplus revaluasi	48,461,883	346,260	<i>Increase on revaluation surplus</i>
Penghapusan	-	(7,147)	<i>Disposals</i>
	48,461,883	339,113	
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas aset tetap yang telah dijual	(547,339)	(408,387)	<i>Reclassification of revaluation surplus to retained earnings from disposals of property, plant and equipment</i>
Beban pajak terkait	(8,488,452)	(74,605)	<i>Related income tax expense</i>
Saldo akhir	<u>727,820,918</u>	<u>688,394,826</u>	<i>Ending balance</i>

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus dimana penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah, dan elemen perbandingan lainnya.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions where adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

Jika Grup tidak menerapkan model revaluasi, nilai tercatat bersih aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp763.314.898 dan Rp688.378.882.

If the Group did not apply the revaluation model, the net carrying value of property, plant and equipment as at December 31, 2024 and 2023 would have amounted to Rp763,314,898 and Rp688,378,882, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Aset dalam pembangunan

Construction in progress

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan dan renovasi/persiapan sarana kelistrikan, sebagai berikut:

This account represents costs incurred in relation to the construction and renovation/preparation of power supply facilities, as follows:

	2024	2023	
Proyek penugasan - program percepatan:			<i>Mandatory project - fast track program:</i>
Pembangkitan	5,015,078	4,689,759	<i>Power plants</i>
Transmisi	<u>5.108,398</u>	<u>5.108,398</u>	<i>Transmission</i>
Subjumlah	<u>10.123,476</u>	<u>9.798,157</u>	<i>Subtotal</i>
Konstruksi rutin:			<i>Regular construction:</i>
Pembangkitan	35,998,071	70,020,323	<i>Power plants</i>
Transmisi	25,954,306	38,440,674	<i>Transmission</i>
Distribusi	10,194,570	9,881,967	<i>Distribution</i>
Perlengkapan	<u>322,512</u>	<u>612,434</u>	<i>Equipment</i>
Subjumlah	<u>72,469,459</u>	<u>118,955,398</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>82,592,935</u>	<u>128,753,555</u>	<i>Total</i>

(i) Program percepatan

(i) Fast track program

Program percepatan (*fast track program*) merupakan proyek yang ditugaskan Pemerintah kepada Grup. Aset dalam pembangunan untuk program percepatan termasuk pembayaran uang muka kepada kontraktor, biaya pinjaman serta pengeluaran lain yang dikapitalisasi.

The fast track program represents projects which are mandated by the Government to the Group. Construction in progress under the fast track program includes advance payments made to the contractors, borrowing costs and other capitalised expenditures.

Pembangkitan

Power plants

Program percepatan aset dalam pembangunan pembangkitan terutama merupakan PLTU Lombok 2 (2x50 MW), PLTU 1 Kalimantan Barat – Parit Baru 2x50 MW, dan PLTU 2 Kalimantan Barat Bengkayang 2x27,5 MW.

The fast track program of power plants under construction consists mainly of PLTU Lombok 2 (2x50 MW), PLTU 1 Kalimantan Barat – Parit Baru 2x50 MW, and PLTU 2 Kalimantan Barat Bengkayang 2x27,5 MW.

Transmisi

Transmission

Program percepatan aset dalam pembangunan transmisi dan gardu induk antara lain proyek SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan.

The fast track program of transmission and substation under construction mainly consists of projects such as Overhead Powerline SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Construction in progress (continued)

(ii) Konstruksi rutin

(ii) Regular construction

Pembangkitan

Power plants

Aset dalam pembangunan untuk pembangkitan terutama merupakan PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) (4x260 MW), PLTA Peusangan 2x88 MW, dan PLTU Sulut 1 2x50 MW.

Power plants under construction consist mainly of PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (UCPS) (4x260 MW), PLTA Peusangan 2x88 MW, dan PLTU Sulut 1 2x50 MW

Transmisi

Transmission

Aset dalam pembangunan transmisi terutama merupakan proyek jaringan transmisi 500 kV untuk Sumatera, Jawa - Bali, 150 kV untuk luar Sumatera, Jawa - Bali, proyek gardu induk 150 kV serta proyek interkoneksi jaringan.

Transmission under construction consists mainly of projects of transmission lines of 500 kV in Sumatera, Java - Bali, 150 kV outside Sumatera, Java - Bali, substations of 150 kV and interconnection of transmission projects.

Distribusi

Distribution

Aset dalam pembangunan distribusi terutama merupakan proyek jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah 20 kV serta proyek gardu distribusi.

Distribution under construction consists mainly of projects of mid and low voltage distribution lines of 20 kV and distribution substation projects.

Perlengkapan

Equipment

Perlengkapan untuk aset dalam pembangunan termasuk materi dan perlengkapan khusus yang digunakan untuk menunjang fungsi pembangkitan dan distribusi listrik.

Equipment under construction consists of specialised materials and equipment used to support the generation and distribution of electricity.

Pada tanggal 31 Desember 2024, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTA Peusangan	9,145,230	97%
PLTA Upper Cisokan Pumped Storage	5,065,707	LOT 1A: 7,67% LOT 1B: 5,05%
PLTU Lombok FTP 2 (2x50 MW)	3,591,305	88%
PLTU Sulut-1 (2x50 MW)	3,158,459	99%
PLTU Kalselteng 2 - 2X100 MW (Asam-Asam)	2,017,057	99.9%
PLTU Kalbar 1 - Parit Baru (2 x 50 MW)	1,714,347	86%
SUTET 275 kV Gumawang - Lampung 1	1,662,337	68%
PLTU Sorong Ex. Timika (4 x 7 MW)	1,139,296	55%
SUTET 500 KV Muara Enim - New Aur Duri	1,018,510	34%
USC 150 kV Interkoneksi Bangka - Sumsel (line 2)	798,577	99.9%
Transmisi lainnya/Various transmission line	27,583,281	2%-98%
Pembangkitan lainnya/other power plants	15,181,747	2%-98%
Lainnya/Others	10,517,082	2%-98%
Jumlah/Total	82,592,935	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Selama tahun berjalan, terdapat beberapa transfer parsial aset dalam pembangunan menjadi aset tetap di beberapa proyek seperti PLTU 1 Sulut, PLTU Palu 3 dan PLTU Timor 1 karena beberapa bagian dari proyek tersebut telah selesai.

Pada tanggal 31 Desember 2023, estimasi persentase jumlah tercatat aset dalam pembangunan Grup terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

Nama Proyek/Project Name	Nilai/ Amount	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	8,271,637	96%
PLTA Peusangan (2x88 MW)	7,779,468	94%
PLTA Asahan III - Sumatera Utara (2x87 MW)	6,936,508	96%
PLTU 1 Sulut (2x50 MW)	4,174,398	94%
PLTU Palu 3 (2x50 MW)	4,032,968	90%
PLTA Jatigede (2x55 MW)	3,924,462	98%
PLTU Lombok FTP-2 (2x50 MW)	3,367,632	82%
PLTU Timor 1 (2X50 MW)	2,226,187	95%
PLTU 1 Kalimantan Barat – Parit Baru (2x50 MW)	1,741,384	86%
PLTMG Luwuk (40 MW)	512,824	80%
Transmisi lainnya/Various transmission lines	43,549,072	2%-98%
Pembangkitan lainnya/Other power plants	31,742,614	2%-98%
Lainnya/Others	10,494,401	2%-98%
Jumlah/Total	128,753,555	

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek aset dalam pembangunan menerima Sertifikat Laik Operasi.

Selama tahun berjalan, Grup telah mengkapitalisasi biaya pinjaman mencakup bunga pinjaman dan selisih kurs mata uang asing ke pekerjaan dalam pelaksanaan aset dalam pembangunan sebesar Rp4.565.891 (2023: Rp4.643.438). Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum yaitu sebesar 5,96% pada tahun 2024 (2023: 5,81%).

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, sementara belum digunakan dalam operasi, serta aset akan diperbaiki.

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Construction in progress (continued)

During the year, there were some partial transfer of construction in progress to property, plant and equipment in several projects such as PLTU 1 Sulut, PLTU Palu 3 and PLTU Timor 1 due to some parts of the project had been completed.

As at December 31, 2023, the estimated percentage of completion of the Group's construction in progress projects was as follows:

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are Certified for Operations.

During the year, the Group has capitalised borrowing costs including interest expense and foreign exchange differences to construction in progress amounting to Rp4,565,891 (2023: Rp4,643,438). Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general borrowings of 5.96% in 2024 (2023: 5.81%).

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in use in operations, and assets to be repaired.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tidak digunakan dalam operasi (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai dari penghapusan aset yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.056.080 dan Rp1.052.915 yang disajikan sebagai bagian dari pendapatan/(beban) lain-lain - bersih (Catatan 46).

Keuntungan penjualan aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp281.557 dan Rp281.267 (Catatan 46).

Berdasarkan penelaahan manajemen, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai Grup adalah cukup untuk menutupi kemungkinan adanya kerugian yang timbul dari nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

**6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
(continued)**

Assets not used in operations (continued)

Loss on impairment of assets not used in operations for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp1,056,080 and Rp1,052,915, respectively, which are presented as part of the other income/(expense) - net (Note 46).

Gain on sale of certain assets not used in operations for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 281,557 and Rp 281,267, respectively (Note 46).

Based on management's assessment, management is of the opinion that the provision for impairment is adequate to cover the possible impairment losses of the carrying amount of property, plant and equipment as at December 31, 2024 and 2023.

7. ASET HAK GUNA

7. RIGHT-OF-USE ASSETS

2024							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi dan penyesuaian/ Reclassification and adjustments	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange differences due to financial statements translations	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							At cost
Hak atas tanah	1,490,380	12,712	(2,572)	28,557	-	1,529,077	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	3,023,161	15,500	(852)	(83,525)	-	2,954,284	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	43,335,756	-	(83,826)	(14,130)	45,225	43,283,025	Installations and power plants
Perlengkapan distribusi	1,501,637	81,515	(14,319)	-	-	1,568,833	Distribution equipment
Perlengkapan umum	157,317	22,608	(54,483)	-	-	125,442	General equipment
Kendaraan bermotor	3,615,409	1,661,194	(236,373)	(179,394)	-	4,860,836	Motor vehicles
Kapal dan perlengkapan	2,316,459	1,330,955	(569,891)	28,716	-	3,106,239	Vessels and equipment
Jumlah	55,440,119	3,124,484	(962,316)	(219,776)	45,225	57,427,736	Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Hak atas tanah	96,455	42,546	(1,517)	-	-	137,484	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	1,184,876	282,543	(11,368)	(63,668)	-	1,392,383	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	21,429,780	1,930,135	(48,025)	68,337	9,689	23,389,916	Installations and power plants
Perlengkapan distribusi	12,514	150,164	-	-	-	162,678	Distribution equipment
Perlengkapan umum	106,161	48,568	(52,645)	(1,558)	-	100,526	General equipment
Kendaraan bermotor	1,806,240	1,174,609	(480,211)	(75,945)	-	2,424,693	Motor vehicles
Kapal dan perlengkapan	229,589	370,511	(148,280)	-	-	451,820	Vessels and equipment
Jumlah	24,865,615	3,999,076	(742,046)	(72,834)	9,689	28,059,500	Total
Jumlah tercatat	30,574,504					29,368,236	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA (lanjutan)

7. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

	2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan/ Exchange differences due to financial statements translations	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						At cost
Hak atas tanah	1,074,786	416,187	(593)	-	1,490,380	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	2,314,441	760,445	(51,725)	-	3,023,161	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	43,195,022	1,252,188	(1,101,817)	(9,637)	43,335,756	Installations and power plants
Perlengkapan distribusi	-	1,501,637	-	-	1,501,637	Distribution equipment
Perlengkapan umum	127,917	60,399	(30,999)	-	157,317	General equipment
Kendaraan bermotor	2,340,694	1,581,183	(306,468)	-	3,615,409	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	6,037	12	(6,049)	-	-	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	2,912,692	-	(596,233)	-	2,316,459	Vessels and equipment
Jumlah	51,971,589	5,572,051	(2,093,884)	(9,637)	55,440,119	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Hak atas tanah	66,105	30,943	(593)	-	96,455	Land rights
Bangunan umum, waduk dan prasarana	947,658	295,632	(58,414)	-	1,184,876	Buildings, reservoirs and infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit	20,512,269	1,925,852	(1,010,110)	1,769	21,429,780	Installations and power plants
Perlengkapan distribusi	-	12,514	-	-	12,514	Distribution equipment
Perlengkapan umum	85,892	49,385	(29,116)	-	106,161	General equipment
Kendaraan bermotor	1,112,352	1,060,007	(366,119)	-	1,806,240	Motor vehicles
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	3,393	78	(3,471)	-	-	Telecommunications and data processing equipment
Kapal dan perlengkapan	238,727	139,142	(148,280)	-	229,589	Vessels and equipment
Jumlah	22,966,396	3,513,553	(1,616,103)	1,769	24,865,615	Total
Jumlah tercatat	29,005,193				30,574,504	Net carrying value

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset hak guna Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Tanjung Jati B 4x660 MW, yang berada di bawah perjanjian sewa pembiayaan (Catatan 26), dikategorikan sebagai instalasi dan mesin pembangkit. Aset tersebut diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar JPY 46.665.286.594 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 4.826.590 (2023: JPY216.052.563.775 (nilai penuh) atau setara dengan Rp23.668.558) dan USD 3.862.900.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp 62.412.875 (2023: USD1.936.320.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp29.894.844).

As at December 31, 2024, the right-of-use assets of the Tanjung Jati B Steam Power Plant ("PLTU") 4x660 MW, which are under a Financial Lease Agreement (Note 26), are categorised under installations and power plants. The assets were insured with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of JPY 46,665,286,594 (full amount) or equivalent to Rp4,826,590 (2023: JPY216,052,563,775 (full amount) or equivalent to Rp23,668,558) and USD 3,862,900,000 (full amount) or equivalent to Rp 62,412,875 (2023: USD1,936,320,000 (full amount) or equivalent to Rp29,894,844).

Beban penyusutan untuk aset hak guna dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for right-of-use assets was allocated to the following:

	2024	2023	
Beban usaha	3,822,214	3,347,165	Operating expenses
Persediaan	139,142	139,142	Inventories
Aset dalam pembangunan	37,720	27,246	Construction in progress
Jumlah	3,999,076	3,513,553	Total



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, Grup berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset hak guna pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

7. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Based on management's assessment, the Group is of the opinion that there were no indications of impairment of right-of-use assets as at December 31, 2024 and 2023.

8. PROPERTI INVESTASI

8. INVESTMENT PROPERTIES

2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Perubahan nilai wajar/ Change in fair value	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance
Pemilikan langsung					
Hak atas tanah dan bangunan	5,939,235	(236,524)	-	(135,533)	5,567,178
					Direct acquisitions Land rights and buildings
2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Perubahan nilai wajar/ Change in fair value	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance
Pemilikan langsung					
Hak atas tanah dan bangunan	5,623,489	207,770	-	107,976	5,939,235
					Direct acquisitions Land rights and buildings

Properti investasi merupakan hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki anggota Grup, yaitu PIP, PNP dan PLN Batam yang terletak di Pademangan - Jakarta Utara, Paiton - Jawa Timur, Bekasi - Jawa Barat, Pluit - Jakarta Utara, Asahan - Sumatera Utara dan Kramatwatu Serang dengan hak legal berupa HGB berjangka waktu dari 7 sampai 40 tahun, jatuh tempo pada 2032, yang disewakan kepada PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali dan beberapa hak atas tanah dan bangunan yang disewakan ke pihak ketiga.

Investment properties represents land rights and buildings owned by members of the Group comprising of PIP, PNP and PLN Batam, located in Pademangan North Jakarta, Paiton - East Java, Bekasi - West Java, Pluit - North Jakarta, Asahan - North Sumatera and Kramatwatu Serang with HGB for periods between seven to 40 years until 2032, which are leased to PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT Nusantara Regas, PT Bajradaya Sentranusa, PT Karya Semesta Gemilang, PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali and several land rights and buildings that are leased to third parties.

Selama tahun 2024, beberapa hak atas tanah dan bangunan sejumlah Rp204.810 telah direklasifikasi ke aset tetap sedangkan beberapa hak atas tanah dan bangunan sejumlah Rp69.277 telah direklasifikasi dari aset tetap ke properti investasi.

During 2024, certain land rights amounting to Rp204,810 have been reclassified to fixed assets while certain land rights and buildings amounting to Rp69,277 have been reclassified from fixed assets to investment properties.

Penghasilan sewa yang diperoleh dari properti investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43.688 dan Rp42.345.

Rental income earned from investment properties for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp43,688 and Rp42,345 respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi yang dilakukan oleh KJPP RHR dan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan ("KJPP MBPRU"), penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

As at December 31, 2024 and 2023, the Group performed a revaluation of the fair value of its investment properties which was performed by KJPP RHR and Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan ("KJPP MBPRU"), respectively, independent valuers registered with the Ministry of Finance and FSA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Nilai wajar properti investasi diklasifikasikan sebagai level 2 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar level 2 dari hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

- Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
- Tingkat hunian;
- Tingkat pertumbuhan; dan
- Tingkat diskonto dan kapitalisasi.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Grup juga mencatat perubahan nilai wajar masing-masing sebesar (Rp236.524) dan Rp207.770 yang disajikan sebagai bagian dari (beban)/penghasilan lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 46).

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Grup tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk perbaikan dan perawatan di masa depan.

8. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The fair values of investment properties are within level 2 of the fair value hierarchy.

The level 2 fair value of land rights is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach and consist of the following:

- Sale or rental price per square metre;
- Occupancy rate;
- Growth rate; and
- Discount and capitalisation rate.

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

The Group also recorded the changes in fair value amounted to (Rp236,524) and Rp207,770, respectively, were presented as part of other (expense)/income - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended December 31, 2024 and 2023 (Note 46).

As at December 31, 2024 and 2023, the Group does not have any contractual obligations for future repairs and maintenance.

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi/ Commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership (%)	
				2024	2023
Entitas asosiasi/Associates					
PT Geo Dipa Energi ("GDE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2002	5.50**)	5.50**)
PT Mitra Energi Batam ("MEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2004	30.00	30.00
PT Sumber Segara Primadaya ("S2P")	Cilacap	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	49.00	49.00
PT Dalle Energy Batam ("DEB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	20.00	20.00
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPEI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2013	45.00	45.00
PT Tanjung Kasam Power ("TJK")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2012	10.00**)	10.00**)
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2005	46.53	46.53
PT Adhiguna Putera ("AGP")	Jakarta	Pelayaran/ Shipping	1987	24.98	25.00
PT Musi Mitra Jaya ("MMJ")	Palembang	Transportasi batubara/ Coal transportation	2011	25.60	25.50
PT Sriwijaya Bara Logistic ("SBL")	Musi Banyuasin	Transportasi batubara/ Coal transportation	2014	25.60	25.50
PT Rekind Daya Mamuju ("RDM")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2018	10.00**)	10.00**)
PT Sumbagsel Energi Sakti Pewali ("SS Pewali")	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	10.00**)	10.00**)
PT Energi Prima Elektrika ("EPE")	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	7.50**)	7.50**)
PT Aruna Hijau Power ("AHP")	Batam	Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electricity supports	2024	20.00	-



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of investments in associates and joint
ventures are as follows: (continued)

Entitas/Entity	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi/ Commercial operations	Persentase penyertaan/ Percentage of ownership (%)	
				2024	2023
<u>Entitas asosiasi/Associates (lanjutan/continued)</u>					
PT Trina Mas Agra Indonesia ("TMAI")	Kendal	Manufaktur Solar Photovoltaic/ Solar Photovoltaic Manufacturer	*)	25.00	25.00
<u>Ventura bersama/Joint ventures</u>					
PT Unelec Indonesia ("Unindo")	Jakarta	Penunjang penyedia tenaga listrik/ Electricity supports	1988	32.35	32.35
PT Bajradaya Sentranusa ("BDSN")	Asahan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2011	36.61	36.61
PT Bukit Pembangkit Innovative ("BPI")	Palembang	Pembangkit tenaga listrik uap panas/ Steam gas electricity power plant	2015	40.25	40.25
PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali ("Komipo PJB")	Jepara	Operasi dan pemeliharaan/ Operational and maintenance	2010	49.00	49.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	51.00	51.00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi dan penyimpanan Liquified Natural Gas ("LNG")/ Transportation and storage of LNG	2015	35.00	35.00
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity controller and distribution	2014	49.00	49.00
PT Pura Daya Prima ("PDP")	Sumatera Selatan	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2006	15.00	15.00
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali ("SGPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2021	35.00	35.00
PT Guohua Taidian Pembangkitan Jawa Bali ("GTPJB")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2019	30.00	30.00
PT North Sumatra Hydro Energy ("NSHE")	Sumatera Utara	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	25.00	25.00
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi ("PMSE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2023	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, kelistrikan, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya/Power generation, supporting activities electricity, wholesaler of office machinery and industry, spare parts and fittings	2022	30.00	30.00
PT Industri Baterai Indonesia ("IBI")	Jakarta	Industri EV Battery dan ESS/ EV Battery and ESS Industry	*)	19.90	25.00
PT Nusantara Sembcorp Solar Energi ("NSSE")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	51.00
PT Nusantara Tembesi Bayu Energi ("NTBE")	Batam	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-
PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia ("NGKI")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-
PT Minahasa Brantas Energi ("MBE")	Sulawesi Utara	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	2024	51.00	-
PT Indo Acwa Tenaga Saguling ("IATS")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-
PT Indo Acwa Tenaga Singkarak ("IATSing")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Electricity supplier	*)	51.00	-

*) Dalam tahap pengembangan

*) In development stage

**) Terdapat perwakilan PLN

**) PLN has a representative

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk sahamnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)

All the associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

As at December 31, 2024 and 2023, management believes that there is no restriction and significant risk regarding the investments in associates and joint ventures.

Changes in investments in associates and joint ventures are as follows:

2024													
	Jumlah tercatat 1 Januari 2024/ Carrying amount January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ Share in net income/ (loss)	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income/(loss)	Dividen/ Dividends	Jumlah tercatat 31 Desember 2024/ Carrying amount December 31, 2024							
Entitas asosiasi							Associates						
S2P	7,590,934	-	1,318,035	-	(381,907)	8,527,062	S2P						
SBL	352,656	-	9,997	-	-	362,653	SBL						
MMJ	263,342	-	(7,721)	-	-	255,621	MMJ						
TJK	148,212	-	5,468	6,992	-	160,672	TJK						
MEB	138,161	-	14,503	(152)	-	152,512	MEB						
GDE	114,458	-	14,963	-	(1,202)	128,219	GDE						
TMAI	30,468	96,627	(20,781)	-	-	106,314	TMAI						
DEB	95,844	-	(11,015)	-	-	84,829	DEB						
IPB	126,174	-	(52,088)	-	-	74,086	IPB						
SS Pewali	68,001	-	(1,590)	-	-	66,411	SS Pewali						
EPEI	57,849	-	5,424	-	(1,145)	62,128	EPEI						
AGP	41,292	-	18,282	(29)	(7,919)	51,626	AGP						
RDM	46,588	-	(10,387)	2,882	-	39,083	RDM						
AHP	-	2,500	-	-	-	2,500	AHP						
EPE	-	-	-	-	-	-	EPE						
Subjumlah	9,073,979	99,127	1,283,090	9,693	(392,173)	10,073,716	Subtotal						
Ventura bersama							Joint ventures						
IRT	6,444,894	-	931,190	281,605	-	7,657,689	IRT						
SGPJB	4,593,871	-	643,883	228,024	(171,150)	5,294,628	SGPJB						
NSHE	1,984,981	-	184,557	100,882	-	2,270,420	NSHE						
BPI	1,803,802	-	42,957	84,168	(89,107)	1,841,820	BPI						
BDSN	1,146,697	-	121,898	56,568	(125,165)	1,199,998	BDSN						
GCL	854,342	-	146,886	107,347	(160,001)	948,574	GCL						
PMSE	177,557	2,072	45,908	(1,015)	-	224,522	PMSE						
NGKI	-	151,643	-	-	-	151,643	NGKI						
REP	146,743	-	(10,578)	6,307	-	142,472	REP						
NSSE	-	102,470	44	-	-	102,514	NSSE						
PDG	79,208	-	18,045	-	-	97,253	PDG						
IBI	112,951	-	(31,270)	-	-	81,681	IBI						
Komipo PJB	78,732	-	5,516	-	(6,822)	77,426	Komipo PJB						
NTBE	-	43,372	(318)	-	-	43,054	NTBE						
MBE	-	32,283	3	-	-	32,286	MBE						
PDP	13,673	-	1,253	-	(308)	14,618	PDP						
MCB	12,290	-	(366)	-	-	11,924	MCB						
IATSing	-	10,710	-	-	-	10,710	IATSing						
IATS	-	10,710	(6,236)	350	-	4,824	IATS						
GTPJB	3,061	-	359	(40)	(308)	3,072	GTPJB						
CPSI	-	-	-	-	-	-	CPSI						
Unindo	-	-	-	-	-	-	Unindo						
Subjumlah	17,452,802	353,260	2,093,731	864,196	(552,861)	20,211,128	Subtotal						
Jumlah	26,526,781	452,387	3,376,821	873,889	(945,034)	30,284,844	Total						



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)

9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura
bersama adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Changes in investments in associates and joint
ventures are as follows: (continued)

	2023					
	Jumlah tercatat 1 Januari 2023/ Carrying amount January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Bagian atas laba/(rugi) bersih entitas/ Share in net income/ (loss)	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ Share of other comprehensive income/(loss)	Dividen/ Dividends	Jumlah tercatat 31 Desember 2023/ Carrying amount December 31, 2023
Entitas asosiasi						Associates
S2P	6,702,401	-	1,189,343	(1,709)	(299,101)	7,590,934
SBL	335,061	-	17,595	-	-	352,656
MMJ	255,178	-	8,164	-	-	263,342
TJK	139,107	-	9,759	-	(654)	148,212
MEB	133,463	-	6,198	-	(1,500)	138,161
IPB	122,602	-	5,453	-	(1,881)	126,174
GDE	114,458	-	-	-	-	114,458
DEB	107,959	-	(6,115)	-	(6,000)	95,844
SS Pewali	26,787	42,063	(849)	-	-	68,001
EPEI	54,955	-	3,421	-	(527)	57,849
RDM	57,596	-	(11,008)	-	-	46,588
AGP	36,147	-	13,464	(383)	(7,936)	41,292
TMAI	-	31,000	(532)	-	-	30,468
EPE	-	-	-	-	-	-
Subjumlah	8,085,714	73,063	1,234,893	(2,092)	(317,599)	9,073,979
Ventura bersama						Joint ventures
IRT	5,693,459	-	940,566	(189,131)	-	6,444,894
SGPJB	4,257,899	-	583,291	(37,268)	(210,051)	4,593,871
NSHE	1,857,315	-	138,752	(11,086)	-	1,984,981
BPI	1,766,927	-	60,648	(17,549)	(6,224)	1,803,802
BDSN	1,216,250	-	117,074	(35,415)	(151,212)	1,146,697
GCL	796,984	-	117,796	(1,469)	(58,969)	854,342
PMSE	149,866	-	27,691	-	-	177,557
REP	142,903	-	5,180	(1,340)	-	146,743
IBI	112,951	-	-	-	-	112,951
PDG	62,992	-	16,216	-	-	79,208
Komipo PJB	76,190	-	9,023	-	(6,481)	78,732
PDP	11,409	-	2,264	-	-	13,673
MCB	9,521	-	2,769	-	-	12,290
GTPJB	3,088	-	275	-	(302)	3,061
CPSI	-	-	-	-	-	-
Unindo	-	-	-	-	-	-
Subjumlah	16,157,754	-	2,021,545	(293,258)	(433,239)	17,452,802
Jumlah	24,243,468	73,063	3,256,438	(295,350)	(750,838)	26,526,781
						Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table contains the summarised financial information for associates and joint ventures as at December 31, 2024 and 2023 which are accounted for using the equity method.

Entitas asosiasi

Associates

	2024				Jumlah/ Total	
	S2P	MMJ	SBL	Lainnya/ Others		
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	909,817	6,071	5,641	1,522,729	2,444,258	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	4,866,075	309,024	362,807	2,060,755	7,598,661	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	5,775,892	315,095	368,448	3,583,484	10,042,919	Total current assets
Aset tidak lancar	29,278,617	1,213,742	677,236	17,761,487	48,931,082	Non-current assets
Liabilitas lancar						Current liabilities
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	3,955,782	-	-	1,402,303	5,358,085	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya	1,340,102	779,955	352,045	639,266	3,111,368	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	5,295,884	779,955	352,045	2,041,569	8,469,453	Total current liabilities
Liabilitas tidak lancar						Non-current liabilities
Liabilitas keuangan	8,043,582	-	-	6,326,506	14,370,088	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	4,312,433	507,246	154,570	3,756,779	8,731,028	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	12,356,015	507,246	154,570	10,083,285	23,101,116	Total non-current liabilities
Aset bersih	17,402,610	241,636	539,069	9,220,117	27,403,432	Net assets
% kepemilikan	49.00%	25.60%	25.60%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	8,527,279	61,859	138,002	1,088,638	9,815,778	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas (217)	-	-	-	(160,258)	(160,475)	Adjustment of equity methods
Kenaikan nilai wajar	-	228,950	265,290	-	494,240	Fair value uplift
Amortisasi kenaikan nilai wajar	-	(35,188)	(40,639)	-	(75,827)	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	8,527,062	255,621	362,653	928,380	10,073,716	Total carrying value
Pendapatan	12,798,252	410,494	337,977	3,191,305	16,738,028	Revenue
Beban pokok pendapatan	(6,026,295)	(346,323)	(199,896)	(1,876,339)	(8,448,853)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(181,524)	-	-	(119,991)	(301,515)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	9,515	-	-	1,024	10,539	Finance income
Beban keuangan	(955,081)	-	-	(85,398)	(1,040,479)	Finance costs
Beban operasi	(2,202,560)	(5,756)	(6,190)	(778,258)	(2,992,764)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	13,218	(75,988)	(63,730)	(49,505)	(176,005)	Other income/(expenses) - net
Beban pajak penghasilan	(765,658)	(12,585)	(29,111)	(192,436)	(999,790)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	2,689,867	(30,158)	39,050	90,402	2,789,161	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	49.00%	25.60%	25.60%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	1,318,035	(7,721)	9,997	(37,221)	1,283,090	The Group's share in net income for the year of associates
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	-	98,121	98,121	Other comprehensive income
Bagian Grup atas penghasilan komprehensif lainnya asosiasi	-	-	-	9,693	9,693	The Group's share of other comprehensive income of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(381,907)	-	-	(10,266)	(392,173)	Dividends received from associates



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Entitas asosiasi (lanjutan)

Associates (continued)

	2023					
	S2P	MMJ	SBL	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	2,495,233	4,274	4,884	1,839,766	4,344,157	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	4,395,057	312,278	380,094	1,443,041	6,530,470	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	6,890,290	316,552	384,978	3,282,807	10,874,627	Total current assets
Aset tidak lancar	29,807,788	878,598	429,514	10,705,565	41,821,465	Non-current assets
Liabilitas lancar						Current liabilities
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	5,317,392	-	-	973,177	6,290,569	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya	1,965,322	511,430	261,402	574,684	3,312,838	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	7,282,714	511,430	261,402	1,547,861	9,603,407	Total current liabilities
Liabilitas tidak lancar						Non-current liabilities
Liabilitas keuangan	7,650,942	-	-	4,183,932	11,834,874	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	6,272,720	481,536	149,283	1,205,499	8,109,038	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	13,923,662	481,536	149,283	5,389,431	19,943,912	Total non-current liabilities
Aset bersih	15,491,702	202,184	403,807	7,051,080	23,148,773	Net assets
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	7,590,934	51,557	102,971	919,202	8,664,664	The Group's share of the net assets of associates
Penyesuaian metode ekuitas	-	-	-	(52,155)	(52,155)	Adjustment of equity methods
Kenaikan nilai wajar	-	228,950	265,290	-	494,240	Fair value uplift
Amortisasi kenaikan nilai wajar	-	(17,165)	(15,605)	-	(32,770)	Amortisation of fair value uplift
Jumlah tercatat	7,590,934	263,342	352,656	867,047	9,073,979	Total carrying value
Pendapatan	12,962,233	336,402	402,361	2,261,237	15,962,233	Revenue
Beban pokok pendapatan	(6,159,683)	(285,514)	(302,745)	(1,872,334)	(8,620,276)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(111,687)	-	-	(30,295)	(141,982)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	14,267	-	-	1,602	15,869	Finance income
Beban keuangan	(1,119,760)	-	-	(74,771)	(1,194,531)	Finance costs
Beban operasi	(2,520,773)	(6,232)	(6,455)	(447,291)	(2,980,751)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	46,261	(5,298)	(5,529)	(161,747)	(126,313)	Other income/(expenses) - net
Beban pajak penghasilan	(683,627)	(7,342)	(18,631)	(117,916)	(827,516)	Income tax expense
Laba/(rugi) tahun berjalan	2,427,231	32,016	69,001	(441,515)	2,086,733	Profit/(loss) for the year
% kepemilikan	49.00%	25.50%	25.50%	5.50% - 46.53%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih asosiasi tahun berjalan	1,189,343	8,164	17,595	19,791	1,234,893	The Group's share in net income for the year of associates
Kerugian komprehensif lainnya	(3,487)	-	-	(1,534)	(5,021)	Other comprehensive loss
Bagian Grup atas kerugian komprehensif lainnya asosiasi	(1,709)	-	-	(383)	(2,092)	The Group's share of other comprehensive loss of associates
Dividen yang diterima dari perusahaan asosiasi	(299,101)	-	-	(18,498)	(317,599)	Dividends received from associates

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Ventura bersama

Joint ventures

	2024						Jumlah/ Total	
	BDSN	BPI	IRT	SGPJB	NSHE	Lainnya/ Others		
Aset lancar								Current assets
Kas dan setara kas	608,536	337,869	1,206,361	3,576,069	32,785	1,183,440	6,945,060	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	722,799	446,590	25,818	7,160,432	377	1,632,332	9,988,348	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	1,331,335	784,459	1,232,179	10,736,501	33,162	2,815,772	16,933,408	Total current assets
Aset tidak lancar	5,738,754	4,671,721	55,507,022	22,892,269	21,375,573	12,083,848	122,269,187	Non-current assets
Liabilitas lancar								Current liabilities
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	247,813	13,127	368,435	3,037,323	2,231,938	1,539,110	7,437,746	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya	94,643	244,129	266,549	80,765	3,259	639,492	1,328,837	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	342,456	257,256	634,984	3,118,088	2,235,197	2,178,602	8,766,583	Total current liabilities
Liabilitas								Non-current liabilities
Liabilitas keuangan	2,208,582	-	38,271,749	11,325,391	9,157,941	1,982,328	62,945,991	Financial liabilities
Liabilitas lainnya	1,241,266	618,582	2,817,391	1,536,558	978,847	5,870,773	13,063,417	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	3,449,848	618,582	41,089,140	12,861,949	10,136,788	7,853,101	76,009,408	Total of non-current liabilities
Aset bersih	3,277,785	4,580,342	15,015,077	17,648,733	9,036,750	4,867,917	54,426,604	Net assets
% kepemilikan	36.61%	40.25%	51.00%	30.00%	25.00%	15.00% - 51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,199,997	1,843,588	7,657,689	5,294,620	2,259,188	1,916,884	20,171,966	The Group's share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	1	(1,768)	-	8	11,232	29,689	39,162	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	1,199,998	1,841,820	7,657,689	5,294,628	2,270,420	1,946,573	20,211,128	Total carrying value
Pendapatan	640,613	945,071	8,163,534	10,672,235	6,148,121	3,279,999	29,849,573	Revenue
Beban pokok pendapatan	(19,236)	(682,498)	(3,490,907)	(7,023,600)	(4,679,349)	(1,979,006)	(17,874,596)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(1,004)	(31,459)	-	-	-	(8,890)	(41,353)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	4,693	-	473	131,462	-	40,112	176,740	Finance income
Beban keuangan	(161,960)	-	(2,117,346)	(1,317,138)	(472,308)	(493,286)	(4,562,038)	Interest expense
Beban operasi	(50,026)	(86,459)	(42,346)	(266,161)	(37,551)	(386,182)	(868,725)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	10,761	40,080	(66,971)	(87,395)	(2,516)	(14,584)	(120,625)	Other income/(expense) - net
Beban pajak penghasilan	(90,876)	(78,010)	(620,574)	36,874	(218,170)	(47,970)	(1,018,726)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	332,965	106,725	1,825,863	2,146,277	738,227	390,193	5,540,250	Profit for the year
% kepemilikan	36.61%	40.25%	51.00%	30.00%	25.00%	15.00% - 51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	121,898	42,957	931,190	643,883	184,557	169,246	2,093,731	The Group's share of net income for the year of joint ventures
Penghasilan komprehensif lainnya	154,516	209,113	552,167	760,079	403,528	317,635	2,397,038	Other comprehensive income
Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya ventura bersama	56,568	84,168	281,605	228,024	100,882	112,949	864,196	Share of other comprehensive income of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	(125,165)	(89,107)	-	(171,150)	-	(167,439)	(552,861)	Dividends received from joint ventures



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN
VENTURA BERSAMA (lanjutan)**

Ventura bersama (lanjutan)

**9. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT
VENTURES (continued)**

Joint ventures (continued)

	2023						Jumlah/ Total	
	BDSN	BPI	IRT	SGFJB	NSHE	Lainnya/ Others		
Aset lancar								Current assets
Kas dan setara kas	599,714	209,818	509,503	3,194,233	233,384	831,723	5,578,375	Cash and cash equivalents
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	611,023	673,896	28,287	2,477,130	209,434	1,883,710	5,883,480	Other current assets (excluding cash)
Jumlah aset lancar	1,210,737	883,714	537,790	5,671,363	442,818	2,715,433	11,461,855	Total current assets
Aset tidak lancar	5,629,893	4,430,640	45,536,417	28,000,415	14,212,401	9,807,082	107,616,848	Non-current assets
Liabilitas lancar								Current liabilities
Liabilitas keuangan (tidak termasuk utang usaha)	179,865	81,041	1,199,738	1,890,167	762,144	1,203,189	5,316,144	Financial liabilities (excluding trade payables)
Liabilitas lancar lainnya	84,464	112,315	136,834	46,220	2,780	434,281	816,894	Other current liabilities
Jumlah liabilitas lancar	264,329	193,356	1,336,572	1,936,387	764,924	1,637,500	6,133,068	Total current liabilities
Liabilitas tidak lancar								Non-current liabilities
Liabilitas keuangan	2,244,129	-	-	13,206,945	5,253,892	6,134,353	26,839,319	Financial liabilities
Liabilitas tidak lancar lainnya	1,189,370	591,295	32,100,588	3,217,640	720,152	1,029,199	38,848,244	Other non-current liabilities
Jumlah liabilitas tidak lancar	3,433,499	591,295	32,100,588	16,424,585	5,974,044	7,163,552	65,687,563	Total of non-current liabilities
Aset bersih	3,142,802	4,529,703	12,637,047	15,310,806	7,916,251	3,721,494	47,258,103	Net assets
% kepemilikan	36.61%	40.25%	51.00%	30.00%	25.00%	25.00%-51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	1,150,580	1,823,205	6,444,894	4,593,242	1,979,063	1,395,390	17,386,374	The Group's share of the net assets of joint ventures
Penyesuaian metode ekuitas	(3,883)	(19,403)	-	629	5,918	83,167	66,428	Adjustments of equity methods
Jumlah tercatat	1,146,697	1,803,802	6,444,894	4,593,871	1,984,981	1,478,557	17,452,802	Total carrying value
Pendapatan	632,625	1,056,929	11,016,251	10,028,632	4,372,076	3,978,925	31,085,438	Revenue
Beban pokok pendapatan	(21,594)	(783,257)	(7,077,375)	(6,677,829)	(3,381,658)	(2,722,479)	(20,664,192)	Cost of revenue
Depresiasi dan amortisasi	(1,650)	(14,013)	-	(16,889)	-	(59,438)	(91,990)	Depreciation and amortisation
Pendapatan keuangan	3,681	1,922	336	159,838	-	11,188	176,965	Finance income
Beban keuangan	(170,697)	(140)	(2,589,954)	(1,388,379)	(219,994)	(528,573)	(4,897,737)	Interest expense
Beban operasi	(42,712)	(90,904)	(36,031)	(201,312)	(42,732)	(165,552)	(579,243)	Operating expenses
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih	8,737	83,638	932,857	75,475	359	74,743	1,175,809	Other income/(expense) - net
Beban pajak penghasilan	(88,602)	(103,497)	(401,836)	(35,233)	(173,043)	(97,814)	(900,025)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	319,788	150,678	1,844,248	1,944,303	555,008	491,000	5,305,025	Profit for the year
% kepemilikan	36.61%	40.25%	51.00%	30.00%	25.00%	25.00%-51.00%		% of ownership
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama tahun berjalan	117,074	60,648	940,566	583,291	138,752	181,214	2,021,545	The Group's share of net income for the year of joint ventures
Kerugian komprehensif lainnya	(96,737)	(43,599)	(370,845)	(124,228)	(44,343)	(6,825)	(686,577)	Other comprehensive loss
Bagian atas kerugian komprehensif lainnya ventura bersama	(35,415)	(17,549)	(189,131)	(37,268)	(11,086)	(2,809)	(293,258)	Share of other comprehensive loss of joint ventures
Dividen yang diterima dari perusahaan ventura bersama	(151,212)	(6,224)	-	(210,051)	-	(65,752)	(433,239)	Dividends received from joint ventures

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI

10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
REP	485,856	437,855	REP
SGPJB	440,009	578,667	SGPJB
PMSE	139,520	136,437	PMSE
GCL	123,836	58,923	GCL
PDG	-	36,387	PDG
IPB	-	1,411	IPB
Lain-lain	86,895	29,733	Others
Jumlah	<u>1,276,116</u>	<u>1,279,413</u>	Total
Dikurangi: bagian lancar	<u>178,202</u>	<u>251,026</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>1,097,914</u>	<u>1,028,387</u>	Non-current portion

REP

REP

Pada tanggal 4 Juli 2014, PIP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD9.399.962 kepada REP, entitas asosiasi, untuk membiayai proyek 46,6 MW di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah grace period selama pembangunan. Tanggal operasi komersial PLTA telah diamendemen, terakhir kali melalui Amendemen Pertama atas PJBTl tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan.

On July 4, 2014, PIP, a subsidiary, provided a long-term loan of USD9,399,962 to REP, an associate, for the financing of the 46.6 MW project at Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears an interest rate of 10% per annum with a 17.5 year term of repayment after a grace period during construction. The Commercial Operation Date ("COD") has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated August 10, 2017, to become 57 months after the financial close date.

Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

On May 12, 2019, the HPP Rajamandala 1 x 47 MW was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

Pada tanggal 23 November 2016, PIP memberikan tambahan pinjaman sebesar USD5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

On November 23, 2016, PIP provided additional loans of USD5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo pokok pinjaman PIP kepada REP adalah sebesar USD15.124.452 atau setara dengan Rp244.367 (2023: USD15.124.452 atau setara dengan Rp233.507) dan piutang bunga sebesar USD14.516.149 atau setara dengan Rp234.537 (2023: USD12.999.560 atau setara dengan Rp200.700). Piutang lainnya sebesar Rp6.952 (2023: Rp3.648) merupakan biaya relokasi pegawai dan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan.

As at December 31, 2024, PIP's principal amounts due from REP is USD15,124,452 or equivalent to Rp244,367 (2023: USD15,124,452 or equivalent to Rp233,507) and interest receivables amounting to USD14,516,149 or equivalent to Rp234,537 (2023: USD12,999,560 or equivalent to Rp200,700). Other receivables of Rp6,952 (2023: Rp3,648) represent costs of employee relocation and operation and maintenance services revenue.

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024, penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar USD1.516.589 atau setara dengan Rp24.133 (2023: USD1.512.445 atau setara dengan Rp23.350) yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

During the period ended December 31, 2024, interest income amounted to USD1,516,589 or equivalent to Rp24,133 (2023: USD1,512,445 or equivalent to Rp23,350) which is presented in the consolidated statements of profit or loss.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

REP (lanjutan)

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. PIP tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:

- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau

Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

SGPJB

Pada tanggal 20 November 2018, PLN NR, entitas anak PNP, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD56.516.733 kepada SGPJB dengan suku bunga LIBOR 6 bulan + 4%. Pinjaman akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2033. Pelunasan pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. PLN NR dan SGPJB telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan acuan suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR, berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2023. Selama tahun 2024, SGPJB melakukan pembayaran pinjaman sebesar USD12.631.182 atau setara dengan Rp204.082 (2023: USD17.389.764 atau setara dengan Rp264.603).

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang pokok pinjaman PNP dari SGPJB adalah sebesar USD22.148.346 (setara dengan Rp357.851) dan piutang bunga sebesar USD5.084.997 (setara dengan Rp82.158).

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang pokok pinjaman PNP dari SGPJB adalah sebesar USD34.779.529 (setara dengan Rp536.960) dan piutang bunga sebesar USD2.545.639 (setara dengan Rp41.707).

PMSE

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang pokok pinjaman PMSE dari PJBIC adalah sebesar USD8.370.326 (setara dengan Rp135.239) dan piutang bunga sebesar USD264.932 (setara dengan Rp4.281).

**10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
(continued)**

REP (continued)

During the years ended December 31, 2024 and 2023, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. PIP is not able to request repayment of loan principal provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:

- The monies stand to the credit of the Distribution Accounts; or

Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.

SGPJB

On November 20, 2018, PLN NR, a PNP subsidiary, granted a long-term loan to SGPJB amounting to USD56,516,733 with an interest rate of LIBOR 6 months + 4%. The loan will mature on December 15, 2033. The interest will be due every January 15 and July 15. PLN NR and SGPJB obtained approval from the General Meeting of Shareholders to change the interest rate benchmark from LIBOR to SOFR, effective from May 12, 2023. During 2024, SGPJB made loan payments of USD12,631,182 or equivalent to Rp204.082 (2023: USD17,389,764 or equivalent to Rp264,603).

As at December 31, 2024, PNP's principal outstanding loan balance from SGPJB was USD22,148,346 (equivalent to Rp357.851) and interest receivables amounting to USD5,084,997 (equivalent to Rp82.158).

As at December 31, 2023, PNP's principal outstanding loan balance from SGPJB was USD34,779,529 (equivalent to Rp536,960) and interest receivables amounting to USD2,545,639 (equivalent to Rp41,707).

PMSE

As at December 31, 2024, PMSE's principal outstanding loan balance from PJBIC was USD8,370,326 (equivalent to Rp135.239), and the balance of interest receivables amounting to USD264,932 (equivalent to Rp4.281).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PMSE (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo piutang pokok pinjaman PMSE dari PJBIC adalah sebesar USD8.588.400 (setara dengan Rp132.396) dan piutang bunga sebesar USD225.193 (setara dengan Rp4.041).

GCL

Pada tanggal 27 Juni 2023, GCL, entitas asosiasi PIP, melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") No.005/GMS-GCLIT/2023 telah mengumumkan dividend kepada PIP, entitas anak IP, sebesar USD3,500,000 (setara dengan Rp52.591).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo piutang PIP dari GCL masing-masing adalah sebesar USD5.838.314 (setara dengan Rp123.836) dan USD3.816.530 (setara dengan Rp58.923).

GCL telah membayar IPRen sebesar USD7.700.000 (setara dengan Rp124.601) dan sisa saldo yang belum dibayar sebesar USD5.838.314 (setara dengan Rp94.330).

PDG

Pada tanggal 12 Juni 2013, PIP, entitas anak, memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD18.837.112 kepada PDG, ventura bersama, untuk membiayai proyek PLTU Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, IP melakukan amandemen atas pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada PDG sehingga jumlah pinjaman berubah menjadi USD18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan hingga tanggal terakhir yakni 9 Januari 2014 dan jangka waktu pinjaman berubah menjadi delapan tahun yang akan jatuh tempo pada 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,5% per tahun.

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek (Interest During Construction) dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023.

**10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
(continued)**

PMSE (continued)

As at December 31, 2023, PMSE's principal outstanding loan balance from PJBIC was USD8,588,400 (equivalent to Rp132,396), and the balance of interest receivables amounted to USD225,193 (equivalent to Rp4,041).

GCL

On June 27, 2023, GCL, the associates of PIP, through the General Meeting of Shareholders ("GMS") No.005/GMS-GCLIT/2023, declared its dividends to PIT, the subsidiary of PIP, which amounted to USD3,500,000 (equivalent to Rp52,591).

As at December 31, 2024 and 2023, PIP's principal outstanding loan balance from GCL was USD5,838,314 (equivalent to Rp123,836) and USD3,816,530 (equivalent to Rp58,923), respectively.

GCL has paid IPRen for USD7.700.000 (equivalent to Rp124,601) and the remaining amount that has not been paid amounted to USD5,838,314 (equivalent to Rp94,330).

PDG

On June 12, 2013, IP, a subsidiary, granted a long-term loan amounting to USD18,837,112 to PDG, a joint venture, for financing the PLTU Tambak Lorok Semarang. On November 30, 2015, IP made an amendment to the long-term loan given to PDG which resulted in the revision of the total loan granted to become USD18,191,529 in accordance with the funds transferred up to January 9, 2014, and the tenor of the loan was amended to eight years and will be due on December 1, 2023. This loan bears an interest of rate 6.5% per annum.

The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the date of cash withdrawal until May 30, 2014 and was fully paid on June 1, 2016. The principal shall be collected every six months from June 1, 2016 until December 1, 2023



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/81 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PDG (lanjutan)

Pada tahun 2024, PDG melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar USDnihil dan bunga sebesar USDnihil (setara dengan Rpnihil) (2023: pokok USD2.273.941 (setara dengan Rp34,681) dan bunga sebesar USD680.250 (setara dengan Rp10.361)).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, piutang lainnya sebesar Rpnihil dan Rp754, merupakan piutang atas bunga dan biaya pegawai.

IPB

Pada tanggal 25 Oktober 2023, IPB melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") telah mengumumkan dividen kepada PIP sebesar Rp1.881. IPB telah membayar kepada PIP sebesar Rp470 dan sisanya yang belum dibayarkan sebesar Rp1.411.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo piutang PIP dari IPB masing-masing adalah sebesar RpNihil.

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang pihak berelasi tidak material, sehingga penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**10. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES
(continued)**

PDG (continued)

In 2024, PDG has made a principal loan repayment of USDnil and interest amounting to USDnil (equivalent to Rpnil) (2023: principal USD2,273,941 (equivalent to Rp34,681) and interest amounting to USD680,250 (equivalent to Rp10,361)).

As at December 31, 2024 and December 31, 2023, other receivables amounted to Rpnil and Rp754 respectively, representing interest receivables and employee costs.

IPB

On October 25, 2023, IPB through the General Meeting of Shareholders ("GMS"), declared its dividends to PIP, which amounting to Rp1,881. IPB has paid PIP Rp470, and the remaining amount that has not been paid amounting to Rp1,411.

As at December 31, 2024, PIP's principal outstanding loan balance from IPB was amounting to RpNil.

Management of the Group is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from related parties is not material, therefore, a provision for expected credit losses is not considered necessary as at December 31, 2024 and 2023.

Refer to Note 51 for the information on the details of transactions and balances with related parties.

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA

11. RESTRICTED CASH IN BANKS

	2024	2023	
Dana cadangan			Reserve accounts
Sumitomo Mitsui			Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, Singapura			Banking Corporation, Singapore
JPY	2,329,524	3,442,122	JPY
USD	941,553	878,677	USD

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/82 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA
(lanjutan)

11. RESTRICTED CASH IN BANKS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jaminan bank garansi			Bank guarantees
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Tbk ("BRI")			("BRI")
Rupiah	39,973	20,057	Rupiah
USD	31,006	31,032	USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
("Bank Mandiri")			("Bank Mandiri")
Rupiah	46,350	51,756	Rupiah
USD	41,200	39,369	USD
PT Bank Negara Indonesia (Persero)			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Tbk ("BNI")			("BNI")
Rupiah	20,272	2,643	Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah			PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur ("BPD Jatim")			Jawa Timur ("BPD Jatim")
Rupiah	283	459	Rupiah
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank KB Bukopin Tbk			PT Bank KB Bukopin Tbk
("Bank Bukopin")			("Bank Bukopin")
Rupiah	16,749	16,749	Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk			PT Bank CIMB Niaga Tbk
("CIMB Niaga")			("CIMB Niaga")
Rupiah	<u>55,307</u>	<u>50,237</u>	Rupiah
Subjumlah	3,522,217	4,533,101	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(2)</u>	<u>(2)</u>	Allowance for expected credit loss
Jumlah	<u>3,522,215</u>	<u>4,533,099</u>	Total
Dikurangi: bagian lancar	<u>232,510</u>	<u>99,019</u>	Less: current portion
Bagian tidak lancar	<u>3,289,705</u>	<u>4,434,080</u>	Non-current portion
Tingkat bunga deposito			Interest rate per annum
berjangka per tahun			on time deposits
Rupiah	1.50% - 6.25%	1.50% - 5.42%	Rupiah
USD	2.00% - 2.57%	3.80% - 4.50%	USD

Perusahaan menempatkan dana cadangan pada Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura sebesar JPY22.523.144.616 dan USD58.275.261 pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: JPY31.519.528.142 dan USD56.912.835) untuk memenuhi persyaratan *Financial Lease Agreement* (Catatan 26).

The Company established a reserve account with Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore amounting to JPY 22,523,144,616 and USD58,275,261 as at December 31, 2024 (2023: JPY31,519,528,142 and USD56,912,835) to fulfil the requirements of the *Financial Lease Agreement* (Note 26).

Jaminan bank garansi merupakan rekening bank yang digunakan untuk jaminan pelaksanaan proyek dan pemberian jasa oleh Grup.

Bank guarantees represent cash in banks and were used as collateral for projects and services provided by the Group.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/83 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA
(lanjutan)

Rincian rekening bank dibatasi penggunaannya
berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

11. RESTRICTED CASH IN BANKS (continued)

Details of restricted cash in banks by currency are as
follows:

	2024		2023		
	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
Rupiah	178,934	178,934	141,901	141,901	Rupiah
JPY	22,523,144,616	2,329,524	31,519,528,142	3,442,122	JPY
USD	62,744,309	1,013,759	61,472,835	949,078	USD
Jumlah		3,522,217		4,533,101	Total

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

*) In full amount, except for Rupiah

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi
dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of
transactions and balances with related parties.

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2024	2023	
Properti pertambangan	1,832,596	1,832,596	Mining properties
Pengembangan proyek	3,728,267	2,702,707	Project development
Biaya dibayar di muka			Prepayments
Pembelian gas	186,138	76,902	Gas purchased
Lain-lain	52,053	225,991	Others
Subjumlah	238,191	302,893	Subtotal
Aset takberwujud			Intangible assets
Piranti lunak	1,106,003	547,829	Software
Biaya legal terkait hak atas tanah	269,295	371,794	Legal costs for land rights
Subjumlah	1,375,298	919,623	Subtotal
Biaya kontrak	774,918	1,060,056	Contract cost
Lain-lain	168,791	123,066	Others
Jumlah	8,118,061	6,940,941	Total

Manajemen Grup meyakini bahwa properti
pertambangan, uang muka, dan biaya dibayar di
muka dapat dipulihkan.

Management of the Group believes that the mining
properties, advances, and prepayments are
recoverable.

Beban amortisasi aset tak berwujud dan biaya
kontrak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar
Rp948.723 dan Rp804.516 disajikan sebagai beban
usaha lain-lain (Catatan 44).

Amortisation of intangible assets and contract cost for
the years ended December 31, 2024 and 2023,
amounting to Rp948,723 and Rp804,516 respectively,
is presented as part of other operating expenses (Note
44).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/84 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. KAS DAN SETARA KAS

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Kas	32,124	9,539	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Entitas yang berelasi dengan			Government related entities
Pemerintah			Bank Mandiri
Bank Mandiri			Rupiah
Rupiah	15,044,042	14,225,085	USD
USD	1,261,092	941,420	EUR
EUR	207,481	39,425	JPY
JPY	44,058	169,555	MYR
MYR	5,181	4,459	BNI
BNI			Rupiah
Rupiah	11,531,570	10,324,109	USD
USD	2,323,279	4,484,442	JPY
JPY	173,493	49,760	EUR
EUR	135,146	14,700	MYR
MYR	2,538	3,058	BRI
BRI			Rupiah
Rupiah	12,321,013	8,464,570	USD
USD	4,959,362	8,561,088	EUR
EUR	342,907	130,260	JPY
JPY	68,285	18,189	Bank Tabungan Negara ("BTN")
Bank Tabungan Negara ("BTN")			Rupiah
Rupiah	3,237,619	1,689,507	Bank Syariah Indonesia ("BSI")
Bank Syariah Indonesia ("BSI")			Rupiah
Rupiah	1,422,752	1,048,175	USD
USD	797	-	PT Bank DKI ("Bank DKI")
PT Bank DKI ("Bank DKI")			Rupiah
Rupiah	545,683	665,609	USD
USD	-	44,274	JPY
JPY	-	831	
Subjumlah	53,626,298	50,878,516	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(16)	(15)	Allowance for expected credit losses
Jumlah entitas yang berelasi dengan Pemerintah	<u>53,626,282</u>	<u>50,878,501</u>	Total Government related entities
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")			PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")
Rupiah	522,749	716,187	Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")			PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC NISP")
Rupiah	405,133	583,337	Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")			PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank Maybank Indonesia")
Rupiah	437,722	260,418	Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")			PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
Rupiah	2,077,643	200,950	Rupiah
Bank Bukopin			Bank Bukopin
JPY	30,552	32,337	JPY
Rupiah	261,668	13,904	Rupiah
USD	7,439	7,185	USD
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari jumlah)			Others (each below 5% of total)
USD	1,438,198	953,749	USD
EUR	8,282	370,914	EUR
Rupiah	367,154	349,975	Rupiah
Dinar	18,818	10,356	Dinar
Subjumlah	5,575,358	3,499,312	Subtotal
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(3)	(3)	Allowance for expected credit losses
Jumlah pihak ketiga	<u>5,575,355</u>	<u>3,499,309</u>	Total third parties
Jumlah kas dan bank	<u>59,233,761</u>	<u>54,387,349</u>	Total cash on hand and in banks



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/85 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

13. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2024	2023	
Setara kas - deposito berjangka			Cash equivalents - time deposits
Pihak berelasi			Related parties
BRI			BRI
Rupiah	912,500	792,500	Rupiah
USD	517,708	161,466	USD
BNI			BNI
Rupiah	82,500	135,735	Rupiah
USD	-	169,829	USD
Bank Mandiri			Bank Mandiri
Rupiah	13,350	76,150	Rupiah
USD	116,330	-	USD
BTN			BTN
Rupiah	155,000	45,000	Rupiah
USD	80,785	-	USD
BSI			BSI
Rupiah	210,000	130,000	Rupiah
Jumlah pihak berelasi	2,088,173	1,510,680	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Bank Bukopin			Bank Bukopin
Rupiah	42,400	22,400	Rupiah
Lain-lain			Others
Rupiah	112	112	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	42,512	22,512	Total third parties
Jumlah deposito berjangka	2,130,685	1,533,192	Total time deposits
Jumlah	61,364,446	55,920,541	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun			Interest rate per annum on time deposits
Rupiah	4.32% - 5.44%	3.73% - 4.92%	Rupiah
USD	3.59% - 4.73%	2.98% - 3.75%	USD
Jangka waktu	1 - 3 Bulan/Months	1 - 3 Bulan/Months	Maturity

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of cash and cash equivalents by currency are as follows:

	2024		2023		
	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
Rupiah	49,622,715	49,622,715	39,753,262	39,753,262	Rupiah
USD	662,560,515	10,704,990	992,515,957	15,323,453	USD
EUR	41,242,909	693,816	32,499,673	555,299	EUR
JPY	3,059,017,290	316,388	2,478,548,665	270,672	JPY
Lain-lain	1,642,458	26,537	1,157,691	17,873	Others
Jumlah		61,364,446		55,920,559	Total

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

*) In full amount, except Rupiah

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/86 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. INVESTASI JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM INVESTMENTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Deposito berjangka			<i>Time deposits</i>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
BRI			<i>BRI</i>
Rupiah	139,200	135,000	<i>Rupiah</i>
USD	804,660	355,407	<i>USD</i>
Bank Mandiri			<i>Bank Mandiri</i>
Rupiah	1,603	303	<i>Rupiah</i>
USD	-	312,521	<i>USD</i>
BNI			<i>BNI</i>
Rupiah	106	5,227	<i>Rupiah</i>
USD	<u>31,531</u>	<u>80,798</u>	<i>USD</i>
Jumlah pihak berelasi	<u>977,100</u>	<u>889,256</u>	<i>Total related parties</i>
Investasi lain-lain			<i>Other investments</i>
Rupiah	<u>7,487</u>	<u>24,414</u>	<i>Rupiah</i>
Jumlah	<u>984,587</u>	<u>913,670</u>	<i>Total</i>
Tingkat bunga deposito berjangka			<i>Interest rate per annum on</i>
per tahun			<i>time deposits</i>
Rupiah	4.93% - 5.78%	4.42% - 5.04%	<i>Rupiah</i>
USD	1.74% - 4.55%	2.04% - 3.57%	<i>USD</i>
Jangka waktu			<i>Maturity</i>
Rupiah	6 - 12 Bulan/ <i>Months</i>	6 - 12 Bulan/ <i>Months</i>	<i>Rupiah</i>
USD	6 - 12 Bulan/ <i>Months</i>	6 - 12 Bulan/ <i>Months</i>	<i>USD</i>
Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.			<i>Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.</i>

15. PIUTANG USAHA

15. TRADE RECEIVABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah	2,648,312	2,485,622	<i>Government related entities</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(79,189)</u>	<u>(72,694)</u>	<i>Allowance for expected credit losses</i>
Subjumlah	<u>2,569,123</u>	<u>2,412,928</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Umum	27,791,005	27,639,793	<i>Public</i>
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ("TNI" dan "POLRI")	<u>799,506</u>	<u>622,856</u>	<i>Tentara Nasional Indonesia and Kepolisian Negara Republik Indonesia ("TNI" and "POLRI")</i>
Subjumlah	28,590,511	28,262,649	<i>Subtotal</i>
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	<u>(3,513,232)</u>	<u>(3,834,622)</u>	<i>Allowance for expected credit losses</i>
Subjumlah	<u>25,077,279</u>	<u>24,428,027</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah, bersih	<u>27,646,402</u>	<u>26,840,955</u>	<i>Total, net</i>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/87 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Belum jatuh tempo	26,115,349	25,244,818
Lewat jatuh tempo		
1 s/d 30 hari	769,304	542,714
31 s/d 60 hari	285,700	370,391
61 s/d 360 hari	622,977	1,563,547
Lebih dari 360 hari	<u>3,445,493</u>	<u>3,026,801</u>
Jumlah	<u>31,238,823</u>	<u>30,748,271</u>

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo awal	3,907,316	3,559,350
(Pembalikan)/penambahan	(311,219)	348,870
Penghapusan	<u>(3,676)</u>	<u>(904)</u>
Saldo akhir	<u>3,592,421</u>	<u>3,907,316</u>

Piutang usaha Perusahaan dan PLN Batam dijamin sebagian dengan uang jaminan langganan jika terjadi kegagalan pembayaran (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat piutang usaha Grup didominasi Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024, piutang usaha sebesar Rp31.238.823 mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp3.592.421 setelah mempertimbangkan uang jaminan langganan. Piutang usaha yang diturunkan nilainya terutama terkait dengan pelanggan umum yang belum melakukan pembayaran piutang lebih dari tiga bulan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas yang buruk atas piutang usaha karena Grup memiliki jumlah pelanggan yang besar, tersebar mencakup segmen pasar dan area geografis yang luas di seluruh Indonesia. Kesimpulan ini didukung juga oleh data historis kolektibilitas Grup atas piutang usaha yang baik selama beberapa periode. Oleh karena itu, manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah cukup.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

15. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Belum jatuh tempo	26,115,349	25,244,818	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 s/d 30 hari	769,304	542,714	1 to 30 days
31 s/d 60 hari	285,700	370,391	31 to 60 days
61 s/d 360 hari	622,977	1,563,547	61 to 360 days
Lebih dari 360 hari	<u>3,445,493</u>	<u>3,026,801</u>	More than 360 days
Jumlah	<u>31,238,823</u>	<u>30,748,271</u>	Total

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	3,907,316	3,559,350	Balance at beginning
(Pembalikan)/penambahan	(311,219)	348,870	(Reversals)/additions
Penghapusan	<u>(3,676)</u>	<u>(904)</u>	Write-off
Saldo akhir	<u>3,592,421</u>	<u>3,907,316</u>	Ending balance

The Company and PLN Batam's trade receivables are partially secured by customer security deposits in case of default (Note 34).

As at December 31, 2024 and 2023, all carrying amounts of the Group's trade receivables were dominated in Rupiah.

As at December 31, 2024, trade receivables amounted to Rp31,238,823 were impaired and have been provisioned by Rp3,592,421 after considering the customers security deposits. The impaired trade receivables mainly relate to public customers who have not paid the receivables for more than three months.

Management believes there is no heightened risk of poor credit quality of trade receivables because the Group has a broad customer base, dispersed across varying market segments and geographic locations throughout Indonesia. This assessment is also supported by the Group's good historical collection rates of trade receivables across the periods. Therefore, management is of the opinion that the allowance for expected credit loss of trade receivables is adequate.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/88 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH

Piutang dari Pemerintah terdiri atas piutang kompensasi dan piutang subsidi listrik kepada Grup.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang kompensasi	37,450,898	17,835,197
Piutang subsidi listrik (Catatan 37)	<u>5,839,850</u>	<u>4,611,801</u>
Jumlah	<u>43,290,748</u>	<u>22,446,998</u>

Piutang kompensasi

Piutang kompensasi merupakan piutang atas pendapatan kompensasi dari Pemerintah yang belum diterima untuk penggantian perbedaan tarif aktual dan tarif yang dihitung oleh Grup. Grup selalu menerima keputusan tarif tetap dari Pemerintah. Dengan kata lain, perhitungan yang dilakukan oleh Grup terkait tarif listrik tidak disetujui oleh Kementerian ESDM. Grup diharuskan menggunakan tarif listrik tetap yang sudah disetujui atau tarif aktual.

Berdasarkan PMK No. 159/PMK.02/2022, Perusahaan mencatat pendapatan dan piutang kompensasi sesuai dengan asersi manajemen dan akan ditetapkan sebagai kebijakan dana kompensasi oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil revidi oleh BPKP. Finalisasi kebijakan dana kompensasi tersebut akan dilakukan berdasarkan LHP BPK. Perbedaan yang timbul dari hasil audit BPK akan mempengaruhi laba rugi pada tahun audit tersebut difinalisasi. Nilai piutang kompensasi pada tanggal 31 Desember 2023 diakui berdasarkan estimasi terbaik manajemen dan telah direvidi oleh BPKP. Nilai piutang kompensasi pada tanggal 31 Desember 2024 diakui berdasarkan hasil audit BPK.

Berdasarkan Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 13 Maret 2024, nilai dana kompensasi pada tahun 2023 sebesar Rp74.014.279. Selama tahun 2023, Grup telah menerima pembayaran kompensasi tahun 2023 sebesar Rp56.179.082 dan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Grup telah menerima kekurangan pembayaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp16.770.789 dengan rinciannya diterima kas sebesar Rp 16.094.804 dan disalinghapuskan dengan kelebihan penerimaan kompensasi tahun 2022 dari Pemerintah sebesar Rp675.985. Sehingga saldo piutang kompensasi tahun 2023 Rp17.835.197.

16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT

Receivables from the Government consist of compensation receivables and electricity subsidy receivables to the Group.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Piutang kompensasi	37,450,898	17,835,197
Piutang subsidi listrik (Catatan 37)	<u>5,839,850</u>	<u>4,611,801</u>
Jumlah	<u>43,290,748</u>	<u>22,446,998</u>

Compensation receivables

Compensation receivables represent receivables of compensation revenue from the Government that have not yet been received for the difference between the actual tariff charged versus the tariffs calculated by the Group. The Group has always accepted the fixed electricity tariff decision from the Government. In other words, the calculation of the electricity tariff proposed by the Group was not approved by the Ministry of ESDM. The Group was required to use a fixed electricity tariff that had been approved or the actual tariff.

Based on PMK No. 159/PMK.02/2022, the Company records compensation income and receivables in accordance with management estimates and they will finally be determined based on the compensation fund policy by the Minister of Finance based on the results of the review by BPKP. Finalisation of the compensation fund policy will be made based on the LHP of the BPK. Any differences from the audit of BPK will impact profit or loss in the year the audit is finalised. The amount of compensation receivables as at December 31, 2023 was recognised based on management's best estimate which have been reviewed by BPKP. The amount of compensation receivables as at December 31, 2024 was recognised based on the results of the BPK audit.

Based on the Government Policy regarding PT PLN (Persero)'s Revenue Shortfall due to the 2023 Electricity Tariff Determination issued by the Ministry of Finance on March 13, 2024, the value of the compensation fund in 2023 is Rp74,014,279. During 2023, the Group has received compensation payments for 2023 amounted to Rp56,179,082 and during the period ending 31 December 2023, the Group has received a shortfall in compensation payments for 2022 amounted to Rp16,770,789 with details received in cash amounted to Rp16,094,804 and set-off with excess compensation received in 2022 from the Government amounting to Rp675,985. The balance compensation receivables at 2023 Rp17,835,197.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/89 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PIUTANG DARI PEMERINTAH (lanjutan)

Piutang kompensasi (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan perhitungan dana kompensasi listrik tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK tanggal 27 Mei 2024, nilai dana kompensasi pada tahun 2023 sebesar Rp73.995.537 sehingga terdapat kelebihan penerimaan kompensasi listrik tahun 2023 sebesar Rp18.742.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan perhitungan dana kompensasi listrik tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPK tanggal 5 Mei 2025 nilai dana kompensasi pada tahun 2024 sebesar Rp 100.202.786. Selama tahun 2024, Grup telah menerima pembayaran kompensasi tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp80.568.343 termasuk set-off dengan kelebihan penerimaan kompensasi tahun 2023 senilai Rp18.742. Sehingga saldo piutang kompensasi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.450.898.

Lihat Catatan 37 untuk informasi rincian piutang subsidi listrik.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

16. RECEIVABLES FROM GOVERNMENT (continued)

Compensation receivables (continued)

Based on Minutes of Audit and calculation of electricity compensation for fiscal year 2023 issued by BPK on May 27, 2024, the amount of the compensation in 2023 amounted to Rp73,995,537 so there was an excess of 2023 compensation received amounted to Rp18,742.

Based on Minutes of Audit and calculation of electricity compensation for fiscal year 2024 issued by BPK on May 5, 2025, the amount of the compensation in 2024 amounted to Rp100,202,786. During 2024, Group has received payment of compensation 2023 and 2024 amounted to Rp80,568,343 include set off with an excess of 2023 compensation received amounted to Rp18,742. Balance of compensation receivables at 31 December 2024 amounted to Rp37,450,898.

Refer to Note 37 for information on the details of receivables for electricity subsidy.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

17. PIUTANG LAIN-LAIN

17. OTHER RECEIVABLES

	2024	2023	
Pihak ketiga	2,551,535	2,041,178	Third parties
Karyawan	1,222,650	1,437,586	Employees
Lain-lain	1,143,951	711,689	Others
Jumlah	4,918,136	4,190,453	Total
Dikurangi: bagian lancar	3,417,791	2,306,621	Less: current portion
Bagian tidak lancar	1,500,345	1,883,832	Non-current portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/90 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah yang pelunasannya dilakukan melalui pemotongan gaji.

Piutang pekerjaan pihak ketiga sebagian besar terdiri dari piutang atas penjualan LNG kepada Jawa Satu Power.

Lain-lain sebagian besar terdiri dari piutang non-listrik yang akan dilunasi dengan pembayaran tunai dan piutang dari vendor yang akan dilunasi dengan pemotongan tagihan vendor.

17. OTHER RECEIVABLES (continued)

Receivables from employees represent housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Third party work receivables mostly consist of receivables from LNG sales to Jawa Satu Power.

Others mostly consist of non-electricity receivables which will be repaid by cash payments and receivables from vendor which will be settled through cash payments or deduction of vendor invoices.

18. PERSEDIAAN

18. INVENTORIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Batubara, bahan bakar dan pelumas	14,630,846	12,872,697	Coal, fuel and lubricants
Persediaan umum	3,156,915	3,249,223	General supplies
Switchgear dan jaringan	1,607,985	1,228,772	Switchgear and network
			Meter recording devices,
Alat ukur, pembatas dan alat kontrol	1,012,399	789,539	circuit breaker, and control equipment
Transformator	177,898	130,681	Transformers
Kabel	137,418	113,497	Cables
Biomassa	40,615	26,468	Biomass
Jumlah	20,764,076	18,410,877	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang	(624,276)	(548,565)	Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence
Jumlah, bersih	<u>20,139,800</u>	<u>17,862,312</u>	Total, net

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of changes in allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	548,565	379,628	Beginning balance
Penambahan	75,711	168,937	Additions
Saldo akhir	<u>624,276</u>	<u>548,565</u>	Ending balance

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan kecuali persediaan batu bara di Unit Tanjung Jati B yang diasuransikan kepada PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar USD62.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp1.001.734 (2023: USD31.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp478.609 dan JPY3.000.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan Rp328.650). Manajemen Grup berpendapat bahwa persediaan tersebut telah diasuransikan secara memadai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Group does not have any insurance to cover the possible losses on inventories except for coal stock in Unit Tanjung Jati B which were insured with PT Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia against fire and other possible risks with insurance coverage of USD 62,000,000 (full amount) or equivalent to Rp1.001.734 (2023: USD31,000,000 (full amount) or equivalent to Rp478,609 and JPY3,000,000,000 (full amount) or equivalent to Rp328,650). The Group's management believes that the inventories were adequately insured as at December 31, 2024 and 2023.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/91 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PERSEDIAAN (lanjutan)

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp124.214.427 dan Rp108.822.151.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang.

18. INVENTORIES (continued)

The total amount of inventories recognised as expenses for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp124,214,427 and Rp108,822,151 respectively.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on the decline in the value of inventories and inventory obsolescence.

19. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

19. PREPAID TAXES

	2024	2023	
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	2,539,394	2,247,953	Value-Added Tax ("VAT")
Pajak Penghasilan Badan ("PPH")			Overpayment of Corporate Income
lebih bayar			Tax ("CIT")
PPH Badan			CIT
2024	742,520	-	2024
2023	199,781	820,124	2023
2022	4,544	368,005	2022
2021	-	4,753	2021
Bea meterai	43,873	86,193	Stamp duty
Lebih bayar PPh Pasal 21	46,165	-	Overpayment of Income tax Article 21
Lebih bayar PPh Pasal 4 (2)	28,199	-	Overpayment of Income tax Article 4 (2)
Pembayaran di muka atas			Prepayments of Tax Assessment Letters
Surat Ketetapan Pajak			for Underpayment (Note 47c)
Kurang Bayar (Catatan 47c)	21,025,734	17,540,760	
Jumlah	24,630,210	21,067,788	Total
Provisi atas ketidakpastian			Provision against uncertain
posisi pajak	(6,885,770)	(4,908,174)	tax treatment
Jumlah, bersih	17,744,440	16,159,614	Total, net
Dikurangi: bagian lancar	5.403.503	3.783.609	Less: current portion
Bagian tidak lancar	12.340.937	12.376.005	Non-current portion

Selama tahun 2023, Grup telah melakukan penghapusan atas kelebihan bayar PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp210.830. Kemudian, Grup juga telah mendapatkan pembayaran atas kelebihan bayar PPh Badan untuk tahun 2021 sebesar Rp325.592.

Selama tahun 2024, Grup telah melakukan penghapusan atas kelebihan bayar PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp4.753. Kemudian Grup juga telah mendapatkan pembayaran atas kelebihan bayar PPh Badan untuk tahun 2022 Rp363.461, dan PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp636.954.

Lihat Catatan 47 untuk informasi mengenai beban pajak penghasilan dan surat ketetapan pajak.

During 2023, the Group has written off the 2019 corporate income tax overpayment amounting Rp210,830. Then, the Group has also received refund for the overpayment of corporate income tax for 2021 amounting to Rp325,592.

During 2024, the Group has written off the 2021 corporate income tax overpayment amounting Rp4,753. In addition, the Group has also received refund for the overpayment of corporate income tax for 2022 amounting to Rp363,461 and corporate income tax for 2023 amounting to Rp636,954.

Refer to Note 47 for income tax expense information and tax assessment letters.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/92 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

20. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Biaya dibayar di muka			<i>Prepaid expenses</i>
Premi asuransi	3,118,898	178,545	<i>Insurance</i>
Sewa	<u>50,255</u>	<u>44,138</u>	<i>Rent</i>
Subjumlah	<u>3,169,153</u>	<u>222,683</u>	<i>Subtotal</i>
Uang muka			<i>Advances</i>
Proyek	27,829	318,673	<i>Projects</i>
Pembelian barang	586,479	223,069	<i>Purchases of goods</i>
Pembelian bahan bakar	816	503	<i>Purchases of fuel</i>
Lain-lain	<u>418,989</u>	<u>39,791</u>	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>1,034,113</u>	<u>582,036</u>	<i>Subtotal</i>
Aset kontrak	<u>312,627</u>	<u>188,896</u>	<i>Contract assets</i>
Jumlah	<u>4,515,893</u>	<u>993,615</u>	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian lancar	<u>4,269,422</u>	<u>952,477</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian tidak lancar	<u><u>246,471</u></u>	<u><u>41,138</u></u>	<i>Non-current portion</i>

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS

Modal saham

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan mempunyai modal dasar masing-masing sebesar Rp439.000.000 yang terbagi atas 439.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-106/MBU/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, pernyataan Keputusan Menteri BUMN sebagai RUPS menyetujui penambahan penyertaan modal Negara sebesar 10.075.210 saham dengan nilai Rp10.075.210 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp145.536.096. Atas persetujuan Penyertaan Modal Negara tersebut, maka penyertaan modal Negara dalam proses penerbitan saham (Catatan 22b) direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., tanggal 19 September 2023 No. 37 mengesahkan penambahan penyertaan modal negara sebesar 5.000.000 saham dengan nilai Rp5.000.000 sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp150.536.096. Atas persetujuan penyertaan modal negara tersebut, maka saldo penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham (Catatan 22b) direklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor.

Capital stock

The Company's shares of stock are fully owned by the Government of the Republic of Indonesia.

As at December 31, 2024 and 2023, the Company has authorised capital amounting to Rp439,000,000 consisting of 439,000,000 shares, with par value of Rp1 per share.

Based on letter of the Minister of SOE No. S-106/MBU/02/2022 dated February 14, 2022 the decision of the Minister of SOE as the GMS approved additional Government equity participation of 10,075,210 shares for a value of Rp10,075,210, thereby increasing the subscribed and paid-up capital to Rp145,536,096. Following the approval of the Government Participation, the stock subscription from the Government in the issuance process (Note 22b) has therefore been reclassified to subscribed and paid-in capital.

Based on the Notarial Deed of Notary Muhammad Hanafi, S.H., dated September 19, 2023 No. 37 had authorised an increase in state capital participation of 5,000,000 shares with a value of Rp5,000,000. Thereby increasing the issued and paid-up capital to Rp150,536,096. Upon approval of state capital participation, the balance of state capital participation in the share issuance process (Note 22b) is reclassified to issued and paid-up capital.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/93 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA (lanjutan)

**21. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS
(continued)**

Saldo laba

Retained earnings

Saldo laba terdiri dari sebagai berikut:

Retained earnings consist of the following:

i. Saldo laba yang ditentukan penggunaannya

i. Appropriated retained earnings

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

Berdasarkan RUPS tahun 2023 No.0152.K/DIR/2024 pada tanggal 22 Juli 2024, saldo laba tahun 2022 sebesar Rp18.935.591 ditetapkan sebagai cadangan umum.

Based on GMS for the year 2023 No.0152.K/DIR/2024 dated July 22, 2024, an appropriation from the 2022 retained earnings amounting to Rp18,935,591 was approved.

Berdasarkan RUPS tahun 2022 No.0164.K/DIR/2023 pada tanggal 7 Juni 2023, terdapat saldo laba tahun 2022 yang ditetapkan sebagai cadangan umum sebesar Rp12.146.040.

Based on GMS for the year 2022 No.0164.K/DIR/2023 dated June 7, 2023, an appropriation from the 2022 retained earnings amounting to Rp12,146,040 was approved.

ii. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

ii. Unappropriated retained earnings

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp103.765.084 dan Rp107.538.313.

As at December 31, 2024 and 2023, the balance of the unappropriated retained earnings amounting to Rp103,765,084 and Rp107,538,313, respectively.

Dividen

Dividends

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2023 0152.K/DIR/2024 yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2024, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun 2023 sejumlah Rp3.090.004 (dividen per saham Rp20.527 (nilai penuh)). Dividen tunai final tahun 2023 telah dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2024.

Based on the decision of the GMS for the year 2023 0152.K/DIR/2024 on July 22, 2024, the shareholders agreed to distribute cash dividends from 2023 net income amounting to Rp3,090,004 (dividend per share Rp20,527 (full amount)). The cash dividends for 2023 were paid on December 31, 2024.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tahun 2022 0164.K/DIR/2023 yang diadakan pada tanggal 7 Juni 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai final untuk tahun 2022 sejumlah Rp2.188.000 (dividen per saham Rp15.034 (nilai penuh)). Dividen tunai final tahun 2022 telah dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2023.

Based on the decision of the GMS for the year 2022 0164.K/DIR/2023 on June 7, 2023, the shareholders agreed to distribute cash dividends from 2022 net income amounting to Rp2,188,000 (dividend per share Rp15,034 (full amount)). The cash dividends for 2022 were paid on July 6, 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/94 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM
PROSES PENERBITAN SAHAM**

a. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dan aset yang dibukukan dan sebagai akibat keikutsertaan Perusahaan dalam pengampunan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(106,753)	(106,753)
Aset pengampunan pajak	<u>141,361</u>	<u>141,361</u>
Jumlah	<u>34,608</u>	<u>34,608</u>

b. Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2022, tanggal 31 Agustus 2022, penambahan penyertaan modal negara secara tunai yang masih dalam proses penerbitan saham adalah sebesar Rp5.000.000. Pada tahun 2023, penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham sebesar Rp5.000.000 telah direklasifikasi sebagai modal saham (lihat Catatan 21).

**22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND STOCK
SUBSCRIPTION FROM GOVERNMENT IN
ISSUANCE PROCESS**

a. Additional paid-in capital

Additional paid-in capital as at December 31, 2024 consists of the difference in restructuring transactions between entities under common control and the assets booked as a result of the Company's participation in the tax amnesty program with the following details:

*Difference in restructuring transactions
between entities under common control
Tax amnesty assets*

b. Stock subscription from Government in issuance process

Based on Government Regulation No. 27 year 2022, dated August 31, 2022, the additions of stock subscription from the Government in cash which is still in the issuance process amounting to Rp5,000,000. In 2023, stock subscription from the Government in the issuance process amounting to Rp5,000,000 has been reclassified to share capital (see Note 21).

23. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Biaya penyambungan		
Saldo awal	28,686,927	21,203,504
Penambahan	9,568,575	8,771,707
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	<u>(1,746,004)</u>	<u>(1,288,284)</u>
Saldo akhir	<u>36,509,498</u>	<u>28,686,927</u>
Uang muka penjualan tenaga listrik		
	<u>1,789,264</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>38,298,762</u>	<u>28,686,927</u>
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>3,849,635</u>	<u>1,581,942</u>
Bagian jangka panjang	<u>34,449,127</u>	<u>27,104,985</u>

Biaya penyambungan diamortisasi sejak tanggal penyambungan berdasarkan rata-rata masa manfaat aset distribusi.

Pada tahun 2024, Manajemen melakukan reklasifikasi atas penyajian uang muka penjualan tenaga listrik dengan nilai sebesar Rp 1,789, 264 yang sebelumnya disajikan pada hutang lain-lain (lihat Catatan 31).

23. DEFERRED REVENUE

Connection fees	
Beginning balance	
Additions	
Recognised as revenue during the year	
Ending balance	
Advances received on sale of electricity	
	<i>Total</i>
Less: current portion	
Long-term portion	

Connection fees are amortised starting from the connection date based on the average useful life of the distribution of assets.

In 2024, Management reclassified the presentation of advances received for sales of electricity with a value of Rp 1,789,264 which was previously presented in other payables (see Note 31).



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/95 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN

24. TWO-STEP LOANS

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek Perusahaan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

This account represents overseas, collateral-free loans of the Government of the Republic of Indonesia which are passed on to the Company to finance its projects. The details of the two-step loans are as follows:

	2024	2023	Periode/ Period*)
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")			
USD			
IBRD - 7940 IND - 1238	2,147,732	2,206,840	2011 - 2034
IBRD - 8280 ID - 1256	1,309,807	1,352,458	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	457,351	466,128	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	220,475	226,543	2010 - 2034
IBRD - 9278-1290	31,244	3,952	2022 - 2027
Asian Development Bank ("ADB")			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	770,713	937,702	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	523,484	636,906	2004 - 2027
ADB - 3015 INO - 1255	499,965	521,880	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	474,380	476,896	2010 - 2035
ADB - 3083 INO - 1257	193,285	200,598	2014 - 2033
ADB - 8276 INO - 1258	21,399	22,208	2014 - 2033
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Jerman ("KfW")			
EUR			
KfW F 26180 - 1262	114,596	142,256	2019 - 2029
*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments			
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	2,712,680	3,165,721	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	2,458,834	2,884,663	2004 - 2033
JICA IP 532 - 1214	2,509,023	2,772,630	2006 - 2048
JICA IP 538 - 1221	1,977,251	2,180,497	2009 - 2047
JICA IP 525 - 1197	1,117,045	1,236,983	2005 - 2045
JICA IP 513 - 1164	750,429	880,390	2004 - 2033
JICA IP 527 - 1211	658,920	747,267	2007 - 2037
JICA IP 539 - 1222	633,615	722,533	2009 - 2037
JICA IP 560 - 1253	354,019	386,912	2013 - 2053
JICA IP 517 - 1178	319,674	354,842	2004 - 2044
JICA IP 555 - 1231	91,053	97,410	2013 - 2039
JICA IP 561 - 1252	60,469	76,248	2013 - 2053
JICA IP 526 - 1198	47,091	52,147	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	36,920	40,982	2004 - 2044
JICA IP 572 - 1265	42,916	41,172	2016 - 2055
JICA IP 537 - 1220	4,295	4,898	2009 - 2037
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium			
EUR			
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium - 1185	17,102	19,300	2005 - 2033
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	2,809,451	3,172,711	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	1,860,481	2,133,364	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	575,636	707,214	2013 - 2027

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/96 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan)

24. TWO-STEP LOANS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Periode/ Period*)</u>
Agence Francaise de Developpement ("AFD")			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	203,988	250,616	2013 - 2028
AFD CID 1019 01H - 1237	10,702	30,673	2010 - 2035
AFD CID 1039 01H - 1259	<u>53,616</u>	<u>65,871</u>	2014 - 2026
Jumlah/Total	<u>26,069,641</u>	<u>29,219,411</u>	
Biaya transaksi belum diamortisasi/Unamortised transaction costs	<u>(32,701)</u>	<u>(35,983)</u>	
Jumlah, bersih/Total, net	<u>26,036,940</u>	<u>29,183,428</u>	
Dikurangi/less: bagian jatuh tempo dalam satu tahun/current maturities			
IBRD			
USD			
IBRD - 7940 IND - 1238	169,976	154,551	2011 - 2034
IBRD - 8280 ID - 1256	110,995	100,857	2014 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	32,030	29,102	2012 - 2035
IBRD - 7905 IND - 1235	17,450	15,866	2010 - 2034
ADB			
USD			
ADB - 1982 INO - 1170	232,491	201,238	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	157,913	136,685	2004 - 2027
ADB - 3015 INO - 1255	48,523	44,133	2014 - 2033
ADB - 2619 INO - 1236	27,226	23,597	2010 - 2035
ADB - 3083 INO - 1257	17,484	15,902	2014 - 2033
ADB - 8276 INO - 1258	1,936	1,761	2014 - 2033
KfW			
EUR			
KfW F 26180 - 1262	25,466	25,865	2019 - 2029
Japan Bank for International Cooperation (d/h The Export-Import Bank of Japan)			
JPY			
JICA IP 515 - 1177	285,545	301,497	2004 - 2034
JICA IP 512 - 1163	273,204	288,466	2004 - 2033
JICA IP 532 - 1214	116,910	123,441	2006 - 2048
JICA IP 538 - 1221	87,878	92,787	2009 - 2047
JICA IP 513 - 1164	83,381	88,039	2004 - 2033
JICA IP 525 - 1197	54,490	57,534	2005 - 2045
JICA IP 539 - 1222	50,689	53,521	2009 - 2037
JICA IP 527 - 1211	48,809	51,536	2007 - 2037
JICA IP 517 - 1178	16,394	17,309	2004 - 2044
JICA IP 560 - 1253	12,422	13,116	2013 - 2053
JICA IP 561 - 1252	2,122	2,585	2013 - 2053
JICA IP 526 - 1198	2,297	2,425	2005 - 2045
JICA IP 516 - 1196	1,893	1,999	2004 - 2044
JICA IP 555 - 1231	1,203	1,905	2013 - 2039
JICA IP 537 - 1220	344	363	2009 - 2037
JICA IP 572 - 1265	1,117	-	2016 - 2055
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium			
EUR			
Kerajaan Belgia/Kingdom of Belgium - 1185	1,900	1,930	2005 - 2033

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/97 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENERUSAN PINJAMAN (lanjutan)

24. TWO-STEP LOANS (continued)

	2024	2023	Periode/ Period*)
China Exim Bank			
USD			
China Exim Bank - 1261	510,809	488,109	2015 - 2029
China Exim Bank - 1260	372,096	355,561	2015 - 2029
China Exim Bank - 1248	164,467	157,159	2013 - 2027
AFD			
USD			
AFD CID 1024 01B - 1254	58,282	55,693	2013 - 2028
AFD CID 1019 01F - 1237	10,702	20,446	2010 - 2035
AFD CID 1039 01H - 1259	15,319	14,638	2014 - 2026
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun/Current portion	3,013,763	2,939,616	
Bagian jangka panjang/Non-current portion	23,023,177	26,243,812	

*) Termasuk masa tenggang pembayaran/Include grace periods in terms of payments

	2024	2023	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
USD	2.88% - 7.71%	2.88% - 7.66%	USD
JPY	0.01% - 2.15%	0.01% - 2.65%	JPY
EUR	0.35% - 2.35%	0.35% - 2.35%	EUR

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian penerusan pinjaman yang berlaku pada tanggal laporan.

The Company made payments of principal and interest on the two-step loans in accordance with the schedule of payment within the agreements of the two-step loans as at the reporting date.

Rincian saldo penerusan pinjaman berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of the two-step loans balance in currency are as follows:

	2024		2023		
	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
USD	752,844,441	12,163,708	868,745,367	13,412,560	USD
JPY	133,177,040,109	13,774,235	143,264,058,836	15,645,295	JPY
EUR	7,828,598	131,698	9,455,327	161,556	EUR
Jumlah		26,069,641		29,219,411	Total

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/98 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK**

**25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT
FINANCIAL INSTITUTION LOANS**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
PT Sarana Multi Infrastruktur	2,842,807	2,222,907	PT Sarana Multi Infrastruktur
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	750,000	750,000	Less: current portion
Bagian jangka panjang	2,092,807	1,472,907	Long-term portion
Tingkat suku bunga per tahun Rupiah	5.25% - 6.67%	5.25%	Interest rate per annum Rupiah

PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pokok pinjaman	2,855,066	2,250,000	Principal
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1,150)	(2,548)	Unamortised transaction cost
Perbedaan nilai wajar	(11,109)	(24,545)	Fair value difference
Jumlah	2,842,807	2,222,907	Total

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara Pusat Investasi Pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban Pusat Investasi Pemerintah kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggung jawab dalam perjanjian investasi Perusahaan.

On December 23, 2015, Government Investment Center and PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") signed a novation agreement which transfers all current and future rights and obligations of Government Investment Center to SMI, including interest and responsibilities in the Company's investment agreement.

Pada tanggal 29 Desember 2023, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kredit No. 22 dan Perjanjian Fasilitas Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 21 dengan SMI. Selama tahun 2024, Grup melakukan penarikan pinjaman lembaga keuangan pemerintah non-bank tersebut sebesar Rp1.355.066 (2023: Rpnil).

On December 29, 2023, the signing of Credit Agreement No. 22 and Facility Agreement Based on Musyarakah Principle No. 21 with SMI was carried out. During 2024, the Group made a withdrawal of these non-bank government financial institution loans amounting to Rp1,355,066 (2023: Rpnil).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in this agreement.

Saldo pinjaman yang terutang dari utang kepada Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank ini dibayarkan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

The outstanding balance of this non-bank Government Financial Institution Loans is repayable according to the following schedule:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Dibayarkan:			Payable:
Dalam satu tahun	750,000	750,000	Within one year
Pada tahun kedua	750,000	750,000	In the second year
Pada tahun ketiga	-	750,000	In the third year
Pada tahun kelima	1,355,066	-	In the fifth year
Jumlah	2,855,066	2,250,000	Total



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/99 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. UTANG KEPADA PEMERINTAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN PEMERINTAH NON-BANK (lanjutan)

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga utang kepada Pemerintah sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan - pembatasan dalam perjanjian utang kepada Pemerintah yang berlaku pada tanggal laporan.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

25. GOVERNMENT AND NON-BANK GOVERNMENT
FINANCIAL INSTITUTION LOANS (continued)

The Company made payments of principal and interest on Government loans in accordance with the schedule of payments and complied with the restrictions specified within the agreements of Government loans as at the reporting date.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

26. UTANG SEWA

Akun ini terdiri dari utang Perusahaan kepada PT Central Java Power ("CJP") dalam rangka Perjanjian Sewa Pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4x660MW Tanjung Jati B Unit A, B, C, D, dan beberapa kontrak sewa sehubungan dengan sewa kompresor gas di berbagai daerah.

Nilai kini pembayaran minimum atas utang sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

26. LEASE LIABILITIES

This account represents the Company's liabilities to PT Central Java Power ("CJP") in relation to the Financial Lease Agreement on the acquisition of 4x660MW Tanjung Jati B Units A, B, C, D, and several lease contracts in relation to the leases of the gas compressors at the various locations.

The present value of minimum lease payments for such lease liabilities as at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Berdasarkan jatuh tempo

By due date

	2024	2023	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			Minimum lease payments due:
Tidak lebih dari satu tahun	3,597,203	3,377,616	Not later than one year
Antara lebih dari satu tahun sampai tiga tahun	5,941,077	4,491,646	Later than one year and not later than three years
Antara lebih dari tiga tahun sampai lima tahun	4,594,047	1,736,079	Later than three years and not later than five years
Lebih dari lima tahun	4,944,166	9,648,430	Later than five years
Jumlah	19,076,493	19,253,771	Total
Dikurangi: bunga	(6.180.580)	(6.484.241)	Less: interest
Nilai kini pembayaran sewa masa datang	12,895,913	12,769,530	Present value of future minimum lease payments
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	2,880,568	2,267,698	Less: current portion
Bagian jangka panjang	10,015,345	10,501,832	Long-term portion

Total arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.822.916 dan Rp8.801.603.

The total cash outflow for all leases as at December 31, 2024 and 2023, was Rp9,822,916 and Rp8,801,603, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/100 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. UTANG SEWA (lanjutan)

26. LEASE LIABILITIES (continued)

Berdasarkan pemberi sewa

By lessor

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1,157,553	1,138,625	<i>PT Pelabuhan Indonesia (Persero)</i>
Dana Pensiun PLN	889,744	926,919	<i>Dana Pensiun PLN</i>
Lain-lain	<u>460,960</u>	<u>-</u>	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>2,508,257</u>	<u>2,065,544</u>	<i>Subtotal</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Sulawesi Regas Satu	301,527	1,596,225	<i>PT Sulawesi Regas Satu</i>
PT State Grid Power Indonesia	1,138	1,492,879	<i>PT State Grid Power Indonesia</i>
CJP	1,155,827	1,360,500	<i>CJP</i>
PT Perta Daya Gas	-	990,143	<i>PT Perta Daya Gas</i>
PT Lumoso	1,486	586,541	<i>PT Lumoso</i>
PT Gas Benoa Terminal	511,638	741,444	<i>PT Gas Benoa Terminal</i>
PT Batam Trans Gasindo	417,063	499,191	<i>PT Batam Trans Gasindo</i>
PT Prima Maritim Bahari	2,014	-	<i>PT Prima Maritim Bahari</i>
PT Indah Bima Prima	35,385	401,745	<i>PT Indah Bima Prima</i>
PT Sumber Petrindo Perkasa	1,383,824	356,416	<i>PT Sumber Petrindo Perkasa</i>
PT Bahtera Samudera	-	70,105	<i>PT Bahtera Samudera</i>
Gemilang Line	6,577,754	2,608,797	<i>Gemilang Line</i>
Lain-lain	<u>10,387,656</u>	<u>10,703,986</u>	<i>Others</i>
Subjumlah	<u>12,895,913</u>	<u>12,769,530</u>	<i>Subtotal</i>
Jumlah	<u>12,895,913</u>	<u>12,769,530</u>	<i>Total</i>
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>2,880,568</u>	<u>2,267,698</u>	<i>Less: current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>10,015,345</u>	<u>10,501,832</u>	<i>Long-term portion</i>
Tingkat suku bunga per tahun:			<i>Interest rate per annum:</i>
Rupiah	6.06% - 27.67%	6.51% - 27.67%	<i>Rupiah</i>
USD	13.19%	13.19%	<i>USD</i>
JPY	7.57% - 18.10%	7.57% - 18.10%	<i>JPY</i>

Rincian utang sewa menurut mata uang adalah sebagai berikut:

Details of the lease liabilities by currency are as follows:

	<u>2024</u>		<u>2023</u>		
	<u>Dalam mata uang original/ In original currency*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang original/ In original currency*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
Rupiah	11,323,024	11,323,024	10,909,839	10,909,839	<i>Rupiah</i>
JPY	11,175,181,496	1,155,826	12,458,102,846	1,360,500	<i>JPY</i>
USD	25,813,155	<u>417,063</u>	32,333,146	<u>499,191</u>	<i>USD</i>
Jumlah		<u>12,895,913</u>		<u>12,769,530</u>	<i>Total</i>

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

*) In full amount, except for Rupiah

Beban bunga dan keuangan terkait utang sewa pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.889.385 dan Rp3.841.618 (Catatan 45).

Interest expense and financial charges related to lease liabilities for the years ended December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp6,889,385 and Rp3,841,618, respectively (Note 45).



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/101 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK

27. BANK LOANS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>			<u>Loans related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah:			Government related entities:
- BNI	87,499	174,997	BNI -
- BRI	87,499	174,997	BRI -
- Bank Mandiri	87,499	174,997	Bank Mandiri -
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")	87,498	174,997	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")
Subjumlah	349,995	699,988	Subtotal
Agen: Bank DKI			Agent: Bank DKI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah:			Government related entities:
- Bank DKI	123,214	287,500	Bank DKI -
- SMI	42,858	100,000	SMI -
- Bank Jateng	21,429	50,000	Bank Jateng -
- BPD Aceh	10,714	25,000	BPD Aceh -
- Bank Kalteng	10,714	25,000	Bank Kalteng -
- Bank Riau	10,714	25,000	Bank Riau -
- Bank Kalbar	10,714	25,000	Bank Kalbar -
- BPD Bali	8,036	18,750	BPD Bali -
Subjumlah	238,393	556,250	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Agen: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")			Agent: Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	-	878,996	Third parties
Jumlah pinjaman terkait program percepatan	588,388	2,135,234	Total loans related to fast track program
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>			<u>Loans not related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah:			Government related entities:
- BNI	1,443,964	1,618,206	BNI -
- BRI	525,255	588,636	BRI -
- Bank Mandiri	1,181,531	1,324,105	Bank Mandiri -
Subjumlah	3,150,750	3,530,947	Subtotal

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/102 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)			Government related entities (continued)
Agan: BRI			Agent: BRI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BRI	4,459,603	6,346,285	BRI -
- Bank Mandiri	3,503,954	4,661,095	Bank Mandiri -
- BNI	1,003,954	1,518,238	BNI -
- SMI	526,785	705,357	SMI -
- BPD Papua	273,214	337,500	BPD Papua -
- LPEI	71,429	142,857	LPEI -
Pihak ketiga	<u>2,570,025</u>	<u>3,234,309</u>	Third parties
Subjumlah	<u>12,408,964</u>	<u>16,945,641</u>	Subtotal
Agan: Bank Mandiri			Agent: Bank Mandiri
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank Mandiri	4,221,960	3,609,199	Bank Mandiri -
- BNI	2,052,706	1,317,325	BNI -
- BTN	2,000,000	2,000,000	BTN -
- SMI	150,916	226,375	SMI -
- BRI	75,458	113,187	BRI -
- LPEI	37,729	56,594	LPEI -
Pihak ketiga	<u>3,057,709</u>	<u>2,835,568</u>	Third parties
Subjumlah	<u>11,596,478</u>	<u>10,158,248</u>	Subtotal
Agan: BSI			Agent: BSI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	2,522,057	2,381,567	BSI -
Pihak ketiga	<u>414,546</u>	<u>425,931</u>	Third parties
Subjumlah	<u>2,936,603</u>	<u>2,807,498</u>	Subtotal
BTN	857,143	1,071,429	BTN



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/103 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2024	2023	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga			Third parties
Agen: BCA			Agent: BCA
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	3,950,068	1,450,068	BNI -
- Bank Mandiri	3,625,171	3,625,171	Bank Mandiri -
- BTN	1,950,068	1,450,068	BTN -
- BSI	2,000,000	-	BSI -
Pihak ketiga	<u>14,074,693</u>	<u>4,074,693</u>	Third parties
Subjumlah	<u>25,600,000</u>	<u>10,600,000</u>	Subtotal
Agen: Bank CIMB Niaga			Agent: Bank CIMB Niaga
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- SMI	455,357	562,500	SMI -
- BSI	91,071	112,500	BSI -
Pihak ketiga	<u>4,328,572</u>	<u>4,700,000</u>	Third parties
Subjumlah	<u>4,875,000</u>	<u>5,375,000</u>	Subtotal
Agen: Bank DBS Indonesia			Agent: DBS Bank Indonesia
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BTN	323,140	308,780	BTN -
Pihak ketiga	<u>24,720,210</u>	<u>30,878,000</u>	Third parties
Subjumlah	<u>25,043,350</u>	<u>31,186,780</u>	Subtotal
State Bank of India ("SBI")	200,000	200,000	State Bank of India ("SBI")
Bank Bukopin	300,000	300,000	Bank Bukopin
Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")	150,000	150,000	Bank BCA Syariah ("BCA Syariah")
Agen: Bank Permata			Agent: Bank Permata
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	2,481,854	2,407,585	Third parties
HSBC	1,796,415	1,759,499	HSBC
ADB	27,518,817	23,296,286	ADB
Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB")	3,005,471	1,495,010	Asian Infrastructure Investment Bank ("AIIB")

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/104 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
Agen: Credit Agricole CIB Paris			Agent: Credit Agricole CIB Paris
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	2,374,736	2,264,147	Third parties
Agen: Export Guarantee and Insurance Corporation ("EGAP")			Agent: Export Guarantee and Insurance Corporation ("EGAP")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	137,440	153,220	Third parties
Agen: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE")			Agent: Servizi Assicurativi del Commercio Estero ("SACE")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	307,804	364,731	Third parties
Agen: Korea Exim Bank ("KEXIM")			Agent: Korea Exim Bank ("KEXIM")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	573,574	639,432	Third parties
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")	7,138,004	6,792,886	International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD")
Islamic Development Bank ("IDB")	3,709,442	3,242,430	Islamic Development Bank ("IDB")
Agen: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")			Agent: Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	7,552,659	7,856,253	Third parties
Agen: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")			Agent: MUFG Bank, Ltd. ("MUFG Bank")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,023,936	2,883,038	Third parties
Agen: Export Development Canada ("EDC")			Agent: Export Development Canada ("EDC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	2,726,494	3,184,294	Third parties
Agen: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")			Agent: Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	810,508	893,642	Third parties
Agence Francaise De Developpement ("AFD")	865,304	1,003,546	Agence Francaise De Developpement ("AFD")
Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")	669,586	778,005	Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK")
Agen: BNP Paribas SA			Agent: BNP Paribas SA
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	939,995	1,091,114	Third parties



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/105 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2024	2023	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
Agen: Standard Chartered Bank ("SCB")			Agent: Standard Chartered Bank ("SCB")
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	654,370	886,165	Third parties
KfW	5,170,253	3,403,540	KfW
Mizuho Bank	562,336	698,070	Mizuho Bank
Jumlah pinjaman tidak terkait program percepatan	157,137,286	147,418,436	Total loans not related to fast track program
Jumlah	157,725,674	149,553,670	Total
Biaya transaksi belum diamortisasi	(496,012)	(731,482)	Unamortised transaction costs
Jumlah, bersih	157,229,662	148,822,188	Total, net
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun			Less: current maturities
<u>Pinjaman terkait program percepatan</u>			<u>Loans related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	87,499	87,499	BNI -
- BRI	87,499	87,499	BRI -
- Bank Mandiri	87,499	87,499	Bank Mandiri -
- LPEI	87,498	87,498	LPEI -
Subjumlah	349,995	349,996	Subtotal
Agen: Bank DKI			Agent: Bank DKI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank DKI	123,214	164,286	Bank DKI -
- SMI	42,858	57,142	SMI -
- Bank Jateng	21,429	28,571	Bank Jateng -
- BPD Aceh	10,714	14,286	BPD Aceh -
- Bank Kalteng	10,714	14,286	Bank Kalteng -
- Bank Riau	10,714	14,286	Bank Riau -
- Bank Kalbar	10,714	14,286	Bank Kalbar -
- BPD Bali	8,036	10,714	BPD Bali -
Subjumlah	238,393	317,857	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Agen: ICBC			Agent: ICBC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	-	878,996	Third parties
Jumlah pinjaman terkait program percepatan	588,388	1,546,849	Total loans related to fast track program

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/106 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u>			<u>Loans not related to fast track program</u>
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
Agen: BNI			Agent: BNI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BNI	269,701	242,811	BNI -
- BRI	98,106	88,325	BRI -
- Bank Mandiri	<u>220,684</u>	<u>198,682</u>	Bank Mandiri -
Subjumlah	<u>588,491</u>	<u>529,818</u>	Subtotal
Agen: BRI			Agent: BRI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BRI	941,834	1,787,971	BRI -
- Bank Mandiri	630,280	1,068,590	Bank Mandiri -
- BNI	517,933	435,963	BNI -
- SMI	79,101	176,653	SMI -
- LPEI	71,429	71,429	LPEI -
- BPD Papua	4,603	63,135	BPD Papua -
Pihak ketiga	<u>263,420</u>	<u>578,163</u>	Third parties
Subjumlah	<u>2,508,600</u>	<u>4,181,904</u>	Subtotal
Agen: Bank Mandiri			Agent: Bank Mandiri
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- Bank Mandiri	122,620	122,620	Bank Mandiri -
- SMI	75,458	75,458	SMI -
- BRI	37,729	37,729	BRI -
- LPEI	18,865	18,865	LPEI -
Pihak ketiga	<u>198,077</u>	<u>198,078</u>	Third parties
Subjumlah	<u>452,749</u>	<u>452,750</u>	Subtotal
Agen: BSI			Agent: BSI
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah			Government related entities
- BSI	230,261	155,759	BSI -
Pihak ketiga	<u>37,655</u>	<u>25,472</u>	Third Parties
Subjumlah	<u>267,916</u>	<u>181,231</u>	Subtotal
BTN	214,286	214,286	BTN



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/107 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	2024	2023	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan</u> (lanjutan)			<u>Loans not related to fast track program</u> (continued)
Pihak ketiga			Third parties
Agen: Bank CIMB Niaga			Agent: Bank CIMB Niaga
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan			Government related
Pemerintah			entities
- SMI	107,143	107,143	SMI -
- BSI	21,429	21,429	BSI -
Pihak ketiga	2,371,428	371,428	Third parties
Subjumlah	2,500,000	500,000	Subtotal
HSBC	288,000	275,202	HSBC
ADB	1,178,848	613,097	ADB
Agen: Credit Agricole CIB Paris			Agent: Credit Agricole CIB Paris
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	316,632	276,790	Third parties
Agen: Bank DBS Indonesia			Agent: DBS Bank Indonesia
Sindikasi:			Syndicated:
Entitas yang berelasi dengan			Government related
Pemerintah			entities
- BTN	129,256	-	BTN -
Pihak ketiga	7,949,244	7,256,330	Third parties
Agen: EGAP			Agent: EGAP
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	22,906	21,889	Third parties
Agen: SACE			Agent: SACE
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	51,301	52,104	Third parties
Agen: KEXIM			Agent: KEXIM
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	95,596	91,347	Third parties
IBRD	455,877	370,521	IBRD
IDB	239,286	-	IDB
Agen: JBIC			Agent: JBIC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,267,571	1,313,550	Third parties
Agen: MUFG Bank			Agent: MUFG Bank
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	1,023,937	1,441,519	Third parties
Agen: EDC			Agent: EDC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	605,887	578,962	Third parties
Agen: SMBC			Agent: SMBC
Sindikasi:			Syndicated:
Pihak ketiga	124,693	119,152	Third parties

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/108 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<u>Pinjaman tidak terkait program percepatan (lanjutan)</u>			<u>Loans not related to fast track program (continued)</u>
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
AFD	77,245	78,670	AFD
BGK	113,296	115,071	BGK
Agen: BNP Paribas SA Sindikasi: Pihak ketiga	134,285	136,389	Agent: BNP Paribas SA Syndicated: Third parties
Agen: SCB Sindikasi: Pihak ketiga	218,123	221,541	Agent: SCB Syndicated: Third parties
KfW	247,884	251,123	KfW
Mizuho Bank	<u>124,964</u>	<u>126,922</u>	Mizuho Bank
Jumlah pinjaman tidak terkait program percepatan	<u>21,196,873</u>	<u>19,400,168</u>	Total loans not related to fast track program
Jumlah pinjaman jatuh tempo dalam satu tahun	<u>21,785,261</u>	<u>20,947,017</u>	Total current portion
Bagian jangka panjang	<u>135,444,401</u>	<u>127,875,171</u>	Long-term portion
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
Rupiah	5.00% - 9.10%	4.48% - 8.74%	Rupiah
USD	2.56% - 7.05%	2.56% - 8.03%	USD
JPY	0.62% - 1.74%	0.60% - 1.74%	JPY
EUR	0.33% - 5.40%	0.39% - 6.66%	EUR

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rincian utang bank berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, the details of bank loans by currency are as follows:

	<u>2024</u>		<u>2023</u>		
	<u>Dalam mata uang original/ In original currency*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	<u>Dalam mata uang original/ In original currency*)</u>	<u>Ekuivalen Rp/ Rp equivalent</u>	
Rupiah	65,145,180	65,145,180	54,802,587	54,802,587	Rupiah
USD	3,125,990,713	50,506,632	4,112,700,597	63,495,984	USD
EUR	1,297,331,124	21,824,612	873,294,663	14,921,375	EUR
JPY	195,781,121,181	<u>20,249,250</u>	149,568,004,937	<u>16,333,724</u>	JPY
Jumlah		<u>157,725,674</u>		<u>149,553,670</u>	Total

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

*) In full amount, except for Rupiah



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/109 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

Pinjaman terkait program percepatan

Loans related to fast track program

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak EPC untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Perpres No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Perpres No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

The Company obtained loan facilities from several banks to finance 85% of the value of EPC contracts for its fast track program. These loans are fully guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Perpres No. 91 Year 2007, which superseded Perpres No. 86 Year 2006, regarding the Grant of Government Guarantee for Construction of a Coal-Fired Power Plant. In connection with these loans, the Company is restricted by general rules as described in the loan agreements.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024 and 2023, the details of such loan facilities are as follows:

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility*)	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance*)		Pembayaran kembali/ Repayment*)		Periode pinjaman/ Loan term
				2024	2023	2024	2023	
1	The export Import Bank of China PLTU 2 Paton, Jawa Timur/East Java	Dolar AS/ US Dollar	331	-	-	-	-	24 30 Januari/January 2008 - 21 Juli/July 2023
2	The export Import Bank of China PLTU 1 Suralaya, Banten	Dolar AS/ US Dollar	284	-	-	-	-	24 30 Januari/January 2008 - 21 Juli/July 2023
3	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap	Dolar AS/ US Dollar	569	-	57	57	57	14 Oktober/October 2009 - 2 November 2024
4	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	Rupiah	2,225,000	238,393	556,250	317,857	317,857	12 November 2015 - 12 November 2025
5	Pinjaman sindikasi dikoordinasi/ Syndicated loan coordinated by BNI PLTU Kalimantan Timur/East Kalimantan	Rupiah	2,449,963	349,995	699,989	349,995	349,995	17 Desember/December 2015 - 16 Desember/December 2025

*) Dalam jutaan mata uang original

*) In million original currency

	2024	2023	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
Rupiah	8.12% - 8.68%	7.58% - 8.28%	Rupiah
USD	7.32% - 7.74%	5.92% - 7.38%	USD

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/110 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

Pinjaman tidak terkait program percepatan

Loans not related to fast track program

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ^{*)}	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ^{*)}		Pembayaran kembali/ Repayment ^{*)}		Periode pinjaman/ Loan term
				2024	2023	2024	2023	
1	Bank Mandiri							
-	Pinjaman Perusahaan 2016/ Corporate Loan 2016	Rupiah	12,000,000	905,498	1,358,248	452,749	5,498,900	19 Desember/December 2016 - 23 November 2026
-	Pinjaman Perusahaan 2020/ Corporate Loan 2020	Rupiah	8,800,000	8,800,000	8,800,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 September 2030
-	Pinjaman Perusahaan 2023/ Corporate Loan 2023	Rupiah	9,000,000	1,890,980	-	-	-	29 Desember/December 2023 - 29 Desember/December 2033
	Subjumlah			11,596,478	10,158,248	452,749	5,498,900	Subtotal
2	BRI							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	13,250,000	8,044,643	9,937,500	1,892,857	1,892,857	23 April 2019 - 23 April 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2015/ Corporate Loan 2015	Rupiah	12,000,000	1,714,286	3,428,571	1,714,286	1,714,286	17 Desember/December 2015 - 17 Desember/December 2025
-	Pinjaman Perusahaan 2016/ Corporate Loan 2016	Rupiah	4,402,500	-	-	-	568,198	23 Mei/May 2016 - 23 Mei/May 2023
-	Pinjaman Sindikasi 2018/ Syndicated Loan 2018	Rupiah	4,506,787	2,650,036	3,293,855	658,771	322,932	14 November 2018 - 14 November 2028
-	Pinjaman Perusahaan 2014/ Corporate Loan 2014	Rupiah	2,000,000	-	285,714	285,714	285,715	17 Desember/December 2014 - 17 Desember/December 2024
-	Kredit Modal Kerja 2011/ Working Capital Loan 2011	Rupiah	20,000,000	-	-	37,210,417	21,200,000	21 Juni/June 2024 - 21 Juni/June 2025
	Subjumlah			12,408,965	16,945,640	41,762,045	25,983,988	Subtotal
3	BNI							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	5,071,000	3,150,750	3,530,948	588,491	529,818	18 Desember/December 2019 - 18 Desember/December 2029
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2022/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2022	Rupiah	108,607	-	-	-	1,300,000	30 Juni/June 2024 - 30 Juni/June 2025
	Subjumlah			3,150,750	3,530,948	588,491	1,829,818	Subtotal
4	BSI							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	2,846,000	1,526,494	1,607,498	267,916	181,231	18 Desember/December 2019 - 18 Desember/December 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2020/ Corporate Loan 2020	Rupiah	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 September 2030
-	Pinjaman Perusahaan 2023/ Corporate Loan 2023	Rupiah	1,000,000	210,109	-	-	-	29 Desember/December 2023 - 29 Desember/December 2033
	Subjumlah			2,936,603	2,807,498	267,916	181,231	Subtotal
5	BTN							
-	Fasilitas Kredit Modal Kerja Bilateral 2019/ Bilateral Working Capital Loan Facility 2019	Rupiah	1,500,000	857,143	1,071,429	214,286	214,285	24 April 2019 - 24 April 2029
6	BCA							
-	Pinjaman Perusahaan 2022/ Corporate Loan 2022	Rupiah	10,600,000	10,600,000	10,600,000	-	-	9 Desember/December 2022 - 23 Desember/December 2032
-	Pinjaman Perusahaan 2024/ Corporate Loan 2024	Rupiah	15,000,000	15,000,000	-	-	-	24 Desember/December 2024 - 24 Desember/December 2034
	Subjumlah			25,600,000	10,600,000	-	-	Subtotal
7	Bank CIMB Niaga							
-	Pinjaman Perusahaan 2019/ Corporate Loan 2019	Rupiah	3,500,000	2,125,000	2,625,000	500,000	500,000	23 April 2019 - 23 April 2029
-	Pinjaman Perusahaan 2020/ Corporate Loan 2020	Rupiah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2026
-	Pinjaman Perusahaan 2020 (syariah)/ Corporate Loan 2020 (sharia)	Rupiah	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	4 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2026
-	Pinjaman Perusahaan 2022 (syariah)/ Corporate Loan 2022 (sharia)	Rupiah	750,000	750,000	750,000	-	-	9 Desember/December 2022 - 23 Desember/December 2032
	Subjumlah			4,875,000	5,375,000	500,000	500,000	Subtotal
8	Bank HSBC							
-	Fasilitas Kredit untuk Tambak Lorok 2018/ Credit Facility for Tambak Lorok 2018	Dolar AS/ US Dollar	214	111	114	18	18	19 Februari/February 2018 - 19 Agustus/August 2032
9	Bank DBS Indonesia							
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2019/ Term Loan Facilities 2019	Dolar AS/ US Dollar	970	-	270	270	450	25 Juni/June 2019 - 25 Juni/June 2024
-	Fasilitas Kredit Berjangka MIGA 2020/ MIGA Term Loan Facilities 2020	Dolar AS/ US Dollar	500	300	500	200	-	23 Desember/December 2020 - 23 Desember/December 2025
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2021/ Term Loan Facilities 2021	Dolar AS/ US Dollar	500	500	500	-	-	22 Desember/December 2021 - 22 Desember/December 2026
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2022/ Term Loan Facilities 2022	Dolar AS/ US Dollar	750	750	750	-	-	23 Desember/December 2022 - 23 Desember/December 2027
	Subjumlah			1,550	2,020	470	450	Subtotal
10	MUFG Bank							
-	Fasilitas Kredit Berjangka 2020/ Term Loan Facilities 2020	Yen Jepang/ Japan Yen	33,000	9,900	26,400	16,500	8,460	5 Maret/March 2020 - 5 Maret/March 2025
-	Pinjaman Perusahaan 2018/ Corporate Loan 2018	Dolar AS/ US Dollar	100	-	-	-	60	13 Desember/December 2018 - 13 Desember/December 2023

^{*)} Dalam jutaan mata uang original

^{*)} In million original currency



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/111 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

**Pinjaman tidak terkait program percepatan
(lanjutan)**

Loans not related to fast track program (continued)

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ^{*)}	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ^{*)}		Pembayaran kembali/ Repayment ^{*)}		Periode pinjaman/ Loan term
				2024	2023	2024	2023	
11	SCB							
-	Fasilitas Arun 2013/ Arun Facility 2013	Euro	85	21	28	7	7	11 Desember/December 2013 - 30 September 2027
-	Fasilitas Bangkanai 2013/ Bangkanai Facility 2013	Euro	71	18	24	6	6	23 Desember/December 2013 - 30 September 2027
	Subjumlah			39	52	13	13	Subtotal
12	AFD							
-	Pinjaman Perusahaan 2015/ Corporate Loan 2015	Euro	70	51	59	7	9	7 Mei/May 2015 - 7 Mei/May 2030
13	KfW							
-	Fasilitas Kredit untuk 1000 Pulau Energi Terbarukan untuk Program Elektrifikasi/ Credit Facility for 1000 Islands Renewable Energy for Electrification Program	Euro	65	-	0.1	-	0.6	5 September 2019 - 15 November 2033
-	Fasilitas Kredit untuk Bangkanai Peaker/ Credit Facility for Bangkanai Peaker	Euro	83	33.0	38.8	8.0	8.3	15 September 2017 - 15 Desember/December 2028
-	Fasilitas Kredit untuk Geothermal Energy Program Ulumbu & Mataloko 2018/ Credit Facility for Geothermal Energy Program Ulumbu & Mataloko 2018	Euro	150	-	0.7	1.0	1.4	11 Oktober/October 2018 - 15 November 2033
-	Fasilitas Kredit untuk Kumbih 03 2017/ Credit Facility for Kumbih 03 2017	Euro	85	1.0	0.1	1.0	0.3	15 Desember/December 2017 - 30 Desember/December 2032
-	Fasilitas Kredit untuk Hydropower Program 2019/ Credit Facility for Hydropower Program 2019	Euro	295	-	1.4	3.0	3.4	5 September 2019 - 15 November 2033
-	Fasilitas Kredit untuk RBL SNT/ Credit Facility for RBL SNT	Euro	45	23.0	28.9	6.0	6.4	23 Mei/May 2016 - 30 Juni/June 2028
-	Fasilitas Kredit untuk RBL SNT (KW 29069)/ Credit Facility for RBL SNT (KW 29069)	Euro	255	251.0	129.1	-	-	8 Desember/December 2020 - 15 Mei/May 2036
	Subjumlah			308.0	199.1	19.0	20.4	Subtotal
14	ADB							
-	Fasilitas Kredit akses Energi Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur 2017/ Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2017	Dolar AS/ US Dollar	584	-	-	-	78	10 Oktober/October 2017 - 15 Mei/May 2037
-	Fasilitas Kredit Penguatan Gardu Sumatera 2015/ Credit Facility Grid Strengthening Sumatera 2015	Yen Jepang/ Japan Yen	78,688	72,860	78,688	5,829	-	15 November 2023 - 15 Mei/May 2037
-	Fasilitas Kredit Penguatan Gardu Sumatera 2015/ Credit Facility Grid Strengthening Sumatera 2015	Euro	490	378	392	33	33	4 Desember/December 2015 - 15 September 2035
-	Fasilitas Kredit Penguatan Gardu Sumatera 2015/ Credit Facility Grid Strengthening Sumatera 2015	Dolar AS/ US Dollar	29	-	23	2	2	15 September 2024 - 15 September 2035
-	Fasilitas Kredit Penguatan Gardu 2015/ Credit Facility Grid Strengthening 2015	Euro	19	19	-	-	-	15 September 2024 - 15 September 2035
-	Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur 2020 (Tahap II)/ Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2020 (Phase II)	Dolar AS/ US Dollar	25	18	20	2	2	4 Desember/December 2015 - 15 September 2035
-	Fasilitas Kredit akses Energi berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur 2020 (Tahap II)/ Credit Facility for Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia 2020 (Phase II)	Yen Jepang/ Japan Yen	112	18	326	-	-	8 Desember/December 2020 - 15 Oktober/October 2040
-	Fasilitas Kredit akses Energi yang berkelanjutan dan Andal – Jawa Barat dan Jawa Tengah/ Credit Facility for Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java	Dolar AS/ US Dollar	70,495	70,495	-	-	-	15 Oktober/October 2024 15 Oktober/October 2040
-	Fasilitas Kredit akses Energi yang berkelanjutan dan Andal – Jawa Barat dan Jawa Tengah/ Credit Facility for Sustainable and Reliable Energy Access Program – Western and Central Java	Yen Jepang/ Japan Yen	600	356	150	-	-	31 Desember/December 2021 - 15 Oktober/October 2041
15	EDC dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company ("HEXIM")							
-	Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2016/ Credit Facility for Batam Mobile Power Plant 2016	Dolar AS/ US Dollar	436	163	200	36	36	2 Desember/December 2016 - 27 Januari/January 2029
-	Fasilitas Kredit untuk Batam Mobile Power Plant 2017/ Credit Facility for Batam Mobile Power Plant 2017	Dolar AS/ US Dollar	14	5	6	1	1	1 Mei/May 2017 - 27 Januari/January 2029
	Subjumlah			168	206	37	37	Subtotal
16	JBIC							
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Jawa 2 Priok 2016/ Credit Facility for Construction of Jawa 2 Priok Steam Electricity Power Plant 2016	Yen Jepang/ Japan Yen	30,827	16,269	18,916	2,647	2,647	20 Oktober/October 2016 - 30 April 2031
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Lontar 2016/ Credit Facility for Construction of Lontar Steam Electricity Power Plant 2016	Dolar AS/ US Dollar	45	25	28	4	4	
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Lontar 2016/ Credit Facility for Construction of Lontar Steam Electricity Power Plant 2016	Yen Jepang/ Japan Yen	16,430	9,584	9,362	1,369	1,369	14 Maret/March 2016 - 1 Oktober/October 2031
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan Muara Karang 2017/ Credit Facility for Construction of Muara Karang Facility 2017	Dolar AS/ US Dollar	179	101	96	15	15	10 Maret/March 2017 - 29 Mei/May 2031
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalselteng 2 2017/ Credit Facility for Construction of Kalselteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017	Yen Jepang/ Japan Yen	14,545	7,750	8,942	1,192	1,192	20 Juni/June 2017 - 15 September 2032
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalselteng 2 2017/ Credit Facility for Construction of Kalselteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017	Dolar AS/ US Dollar	37	20	23	3	3	
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalselteng 2 2017/ Credit Facility for Construction of Kalselteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017	Yen Jepang/ Japan Yen	16,939	8,924	7,260	1,754	1,608	
-	Fasilitas Kredit untuk Pembangunan PLTU Kalselteng 2 2017/ Credit Facility for Construction of Kalselteng 2 Steam Electricity Power Plant 2017	Dolar AS/ US Dollar	89	50	46	9	8	
17	IBRD							
-	Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Distribution Development Program 2016/ Credit Facility to Finance Power Distribution Development Program 2016	Dolar AS/ US Dollar	500	-	440	26	25	20 Mei/May 2016 - 15 Maret/March 2036
-	Fasilitas Kredit Akses Energi Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur 2024/ Credit Facility for Sustainable Energy in Eastern Indonesia 2024	Euro	374	374	-	-	-	15 September 2024 - 15 Maret/March 2036
-	Fasilitas Kredit Akses Energi Berkelanjutan di Kawasan Indonesia Timur 2024/ Credit Facility for Sustainable Energy in Eastern Indonesia 2024	Dolar AS/ US Dollar	500	52	-	-	-	7 Mei/May 2024 - 15 Februari/February 2044

^{*)} Dalam jutaan mata uang original

^{*)} In million original currency

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/112 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

27. BANK LOANS (continued)

**Pinjaman tidak terkait program percepatan
(lanjutan)**

Loans not related to fast track program (continued)

No.	Kreditur dan jenis pinjaman/ Creditor and type of loan	Mata uang/ Currency	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ^{*)}	Jumlah pinjaman/ Outstanding balance ^{*)}		Pembayaran kembali/ Repayment ^{*)}		Periode pinjaman/ Loan term
				2024	2023	2024	2023	
18	KEXIM - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Dolar AS/ US Dollar	71	36	41	6	6	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
19	IDB - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Power Grid Enhancement Program 2017/ Credit Facility to Finance Power Grid Enhancement Program 2017	Dolar AS/ US Dollar	210	230	210	7	-	10 Januari/January 2017 - 6 Agustus/August 2033
20	SMBC - Fasilitas Kredit Berjangka 2018/ Term Loan Facilities 2018 - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTA Jatigede/ Credit Facility to Finance PLTA Jatigede	Dolar AS/ US Dollar Dolar AS/ US Dollar	1,320 73	- 50	- 58	- 8	420 8	1 Agustus/August 2018 - 1 Agustus/August 2023 30 Maret/March 2017 - 30 Maret/March 2031
	Subjumlah			50	58	8	428	Subtotal
21	Mizuho - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Lombok Peaker 2017/ Credit Facility to Finance Lombok Peaker 2017	Euro	74	33	41	7	7	24 Mei/May 2017 - 24 Januari/January 2029
22	Credit Agricole CIB PARIS - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Muara Tawar 2017/ Credit Facility to Finance PLTGU Muara Tawar 2017	Dolar AS/ US Dollar	249	147	147	20	24	8 November 2017 - 8 Mei/May 2032
23	BNP Paribas SA - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Sumbagut 2 Peaker 2018/ Credit Facility to Finance Sumbagut 2 Peaker 2018	Euro	108	56	64	8	8	9 Februari/February 2018 - 9 Oktober/October 2031
24	BGK - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTU Lombok FTP-2 2018/ Credit Facility to Finance PLTU Lombok FTP-2 2018	Euro	81	40	46	7	7	21 Februari/February 2018 - 28 Februari/February 2033
25	SACE - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Euro	37	18	21	3	3	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
26	Exportni Garancni a Pojistovaci Spolecnost ("EGAP") - Fasilitas Kredit untuk Membiayai PLTGU Grati 2016/ Credit Facility to Finance PLTGU Grati 2016	Dolar AS/ US Dollar	17	9	10	1	1	24 Juni/June 2016 - 23 Desember/December 2030
27	AIIB - Fasilitas Kredit untuk Membiayai Proyek Penguatan Distribusi Tenaga Listrik Jawa Timur & Bali 2021/ Credit Facility to Finance East Java & Bali Power Distribution Strengthening Project 2021	Dolar AS/ US Dollar	310	186	97	-	-	10 Februari/February 2021 - 15 Oktober/October 2040
28	Permata - Pinjaman Perusahaan 2022/ Corporate Loan 2022	Rupiah	2,750,000	2,481,854	2,407,585	-	-	8 Desember/December 2022 - 8 Desember/December 2032
29	Bank Central Asia Syariah ("BCA Syariah") - Pinjaman Perusahaan 2022/ Corporate Loan 2022	Rupiah	150,000	150,000	150,000	-	-	9 Desember/December 2022 - 9 Desember/December 2032
30	KB Bukopin - Pinjaman Perusahaan 2022/ Corporate Loan 2022	Rupiah	300,000	300,000	300,000	-	-	9 Desember/December 2022 - 9 Desember/December 2032
31	Bank SBI - Pinjaman Perusahaan 2022/ Corporate Loan 2022	Rupiah	200,000	200,000	200,000	-	-	9 Desember/December 2022 - 9 Desember/December 2032

^{*)} Dalam jutaan mata uang original

^{*)} In million original currency



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/113 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. UTANG BANK (lanjutan)

Pinjaman tidak terkait program percepatan
(lanjutan)

	2024	2023
Tingkat suku bunga per tahun		
Rupiah	5.00% - 9.10%	4.48% - 8.87%
USD	2.56% - 7.05%	2.56% - 8.03%
EUR	0.33% - 5.40%	0.39% - 6.66%
JPY	0.62% - 1.74%	0.60% - 1.74%

Perusahaan melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman bank sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perjanjian pinjaman bank yang berlaku pada tanggal laporan.

Selama tahun 2024, Grup melakukan penarikan seluruh pinjaman bank sebesar USD594.571.260 (setara dengan Rp9.355.894), EUR129.122.011 (setara dengan Rp2.205.677), JPY5.009.426.604 (setara dengan Rp514.042) dan Rp54.795.933 (2023: USD889.139.834 (setara dengan Rp13.755.461), EUR9.790.783 (setara dengan Rp161.380), JPY5.010.927.035 (setara dengan Rp529.788) dan Rp39.458.930). Pelunasan lebih awal secara sukarela atas pokok pinjaman selama tahun 2024 adalah sebesar RpNihil (Desember 2023: Rp4.100.000).

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman bank tersebut.

Tidak ada indikasi bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi batasan-batasan yang diwajibkan ketika batasan-batasan tersebut akan diuji berikutnya pada tanggal pelaporan 31 Desember 2025.

27. BANK LOANS (continued)

Loans not related to fast track program (continued)

	2024	2023
Interest rate per annum		
Rupiah	5.00% - 9.10%	4.48% - 8.87%
USD	2.56% - 7.05%	2.56% - 8.03%
EUR	0.33% - 5.40%	0.39% - 6.66%
JPY	0.62% - 1.74%	0.60% - 1.74%

The Company has made payments of principal and interest on the bank loans in accordance with the schedule of payment specified within the agreements of the bank loans as at the reporting date.

During 2024, the Group made withdrawals from all bank loans amounting to USD594,571,260 (equivalent to Rp9,355,894), EUR129,122,011 (equivalent to Rp2,205,677), JPY5,009,426,604 (equivalent to Rp514,042) and Rp54,795,933 (2023: USD889,139,834 (equivalent to Rp13,755,461), EUR9,790,783 (equivalent to Rp161,380), JPY5,010,927,035 (equivalent to Rp529,788) and Rp39,458,930). The voluntary early repayments of the loan principal during 2024 amounting to RpNil (December 2023: Rp4,100,000).

In relation to this loan facility, the Company has complied with the covenants in this bank loans agreements.

There is no indication that the entity may experience difficulty in complying with the covenants when they are next tested at the reporting date of December 31, 2025.

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Obligasi dan sukuk ijarah

	2024	2023
Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah		
Obligasi Berkelanjutan IV		
PLN Tahap I Tahun 2020	1,500,000	1,500,000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV		
PLN Tahap I Tahun 2020	376,500	376,500
Obligasi Berkelanjutan III		
PLN Tahap VII Tahun 2020	1,420,435	1,420,435
Obligasi Berkelanjutan III		
PLN Tahap VI Tahun 2020	4,812,430	4,812,430
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III		
PLN Tahap VI Tahun 2020	115,500	115,500
Obligasi Berkelanjutan III		
PLN Tahap V Tahun 2019	1,117,200	1,912,900
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III		
PLN Tahap V Tahun 2019	791,000	797,500

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA

Bonds and sukuk ijara (continued)

	2024	2023
Rupiah Bonds and Sukuk Ijara		
Shelf Registration Bonds IV		
PLN I Year 2020	1,500,000	1,500,000
Shelf Registration Sukuk Ijara IV		
PLN I Year 2020	376,500	376,500
Shelf Registration Bonds III		
PLN VII Year 2020	1,420,435	1,420,435
Shelf Registration Bonds III		
PLN VI Year 2020	4,812,430	4,812,430
Shelf Registration Sukuk Ijara III		
PLN VI Year 2020	115,500	115,500
Shelf Registration Bonds III		
PLN V Year 2019	1,117,200	1,912,900
Shelf Registration Sukuk Ijara III		
PLN V Year 2019	791,000	797,500

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/114 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijara (continued)

	2024	2023	
<u>Obligasi dan Sukuk Ijarah Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah Bonds and Sukuk Ijara (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap IV Tahun 2019	2,316,620	2,953,620	PLN IV Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap IV Tahun 2019	976,000	1,250,000	PLN IV Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap III Tahun 2019	812,000	2,024,000	PLN III Year 2019
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap III Tahun 2019	337,000	600,000	PLN III Year 2019
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap II Tahun 2018	622,000	622,000	PLN II Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap II Tahun 2018	110,000	110,000	PLN II Year 2018
Obligasi Berkelanjutan III			Shelf Registration Bonds III
PLN Tahap I Tahun 2018	1,200,000	1,200,000	PLN I Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III			Shelf Registration Sukuk Ijara III
PLN Tahap I Tahun 2018	623,000	623,000	PLN I Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap III Tahun 2018	2,078,000	2,078,000	PLN III Year 2018
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap III Tahun 2018	594,500	594,500	PLN III Year 2018
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap II Tahun 2017	1,893,000	2,094,000	PLN II Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap II Tahun 2017	611,000	611,000	PLN II Year 2017
Obligasi Berkelanjutan II			Shelf Registration Bonds II
PLN Tahap I Tahun 2017	1,217,000	1,386,000	PLN I Year 2017
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II			Shelf Registration Sukuk Ijara II
PLN Tahap I Tahun 2017	214,000	214,000	PLN I Year 2017
<u>Surat Utang Jangka Menengah Global - USD</u>			<u>Global Medium-term Notes - USD</u>
Penerbitan tahun 2020	24,235,500	23,158,500	Issued in 2020
Penerbitan tahun 2019	38,776,800	37,053,600	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	48,471,000	46,317,000	Issued in 2018
Penerbitan tahun 2017	32,314,000	30,878,000	Issued in 2017
Penerbitan tahun 2012	16,157,000	15,439,000	Issued in 2012
<u>Surat Utang Jangka Menengah Global - EUR</u>			<u>Global Medium-term Notes - EUR</u>
Penerbitan tahun 2019	8,411,350	8,543,150	Issued in 2019
Penerbitan tahun 2018	8,411,350	8,543,150	Issued in 2018
<u>Surat Utang Jangka Menengah Global - JPY</u>			<u>Global Medium-term Notes - JPY</u>
Penerbitan tahun 2019	103,428	2,129,517	Issued in 2019



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/115 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)
(lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	2024	2023	
<u>Obligasi Terjamin - USD</u>			<u>Guaranteed Notes - USD</u>
Penerbitan tahun 2007	4,658,257	4,451,249	Issued in 2007
Subjumlah	205,275,870	203,808,551	Subtotal
Biaya emisi belum diamortisasi	(6,216,627)	(6,243,718)	Unamortised debt issuance costs
Jumlah	199,059,243	197,564,833	Total
Disajikan di laporan posisi keuangan			Presented in consolidated
Konsolidasian sebagai:			statements of financial position:
Liabilitas jangka pendek	10,532,135	5,578,511	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	188,527,108	191,986,322	Non-current liabilities
Jumlah	199,059,243	197,564,833	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024, rincian obligasi yang diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024, details of bonds which were issued at nominal value and are denominated in Rupiah are as follows:

	Pokok/ Principal	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Wali amanat/ Trustee	
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020						Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020
Seri A	312,000	8 September 2020 - 8 September 2025	6.70%			Series A
Seri B	28,000	8 September 2020 - 8 September 2027	7.25%			Series B
Seri C	158,000	8 September 2020 - 8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	841,000	8 September 2020 - 8 September 2035	8.65%			Series D
Seri E	161,000	8 September 2020 - 8 September 2040	8.86%			Series E
Subjumlah/Subtotal	1,500,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020						Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020
Seri A	39,000	8 September 2020 - 8 September 2025	6.70%			Series A
Seri B	35,000	8 September 2020 - 8 September 2027	7.25%			Series B
Seri C	200,000	8 September 2020 - 8 September 2030	7.90%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	56,000	8 September 2020 - 8 September 2035	8.65%			Series D
Seri E	46,500	8 September 2020 - 8 September 2040	8.86%			Series E
Subjumlah/Subtotal	376,500					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020						Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020
Seri B	99,155	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2025	8.25%			Series B
Seri C	312,180	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2027	8.55%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	1,009,100	6 Mei/May 2020 - 6 Mei/May 2030	9.10%			Series D
Subjumlah/Subtotal	1,420,435					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020						Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020
Seri A	40,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2027	7.70%			Series A
Seri B	3,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2030	8.00%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	9,000	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2035	8.70%			Series C
Seri D	62,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2040	9.05%			Series D
Subjumlah/Subtotal	115,500					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/116 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)
(lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	Pokok/ Principal	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Wali amanat/ Trustee	
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020						Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020
Seri A	540,630	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2025	7.20%			Series A
Seri B	672,500	18 Februari/February 2020 - 18 Februari/February 2027	7.70%			Series B
Seri C	544,250	18 Februari/February 2030 - 18 Februari/February 2020 -	8.00%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	1,459,000	18 Februari/February 2035 - 18 Februari/February 2020 -	8.70%			Series D
Seri E	1,596,050	18 Februari/February 2040	9.05%			Series E
Subjumlah/Subtotal	4,812,430					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019						Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019
Seri B	445,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2026	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	6,200	1 Oktober/October 2029 - 1 Oktober/October 2019 -	8.60%			Series C
Seri D	166,000	1 Oktober/October 2034 - 1 Oktober/October 2019 -	9.40%			Series D
Seri E	500,000	1 Oktober/October 2039	9.90%			Series E
Subjumlah/Subtotal	1,117,200					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019						Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Year 2019
Seri B	10,000	1 Oktober/October 2019 - 1 Oktober/October 2026	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	92,000	1 Oktober/October 2029 - 1 Oktober/October 2019 -	8.60%			Series C
Seri D	135,000	1 Oktober/October 2034 - 1 Oktober/October 2019 -	9.40%			Series D
Seri E	554,000	1 Oktober/October 2039	9.90%			Series E
Subjumlah/Subtotal	791,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019						Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019
Seri B	315,250	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2026	8.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	549,000	1 Agustus/August 2029 - 1 Agustus/August 2019 -	8.70%			Series C
Seri D	395,000	1 Agustus/August 2034 - 1 Agustus/August 2019 -	9.50%			Series D
Seri E	1,057,370	1 Agustus/August 2039	9.98%			Series E
Subjumlah/Subtotal	2,316,620					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019						Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019
Seri B	368,000	1 Agustus/August 2019 - 1 Agustus/August 2026	8.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	20,000	1 Agustus/August 2029 - 1 Agustus/August 2019 -	8.70%			Series C
Seri D	49,000	1 Agustus/August 2034 - 1 Agustus/August 2019 -	9.50%			Series D
Seri E	539,000	1 Agustus/August 2039	9.98%			Series E
Subjumlah/Subtotal	976,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019
Seri C	183,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2026	9.35%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	211,000	19 Februari/February 2029 - 19 Februari/February 2019 -	9.60%			Series D
Seri E	263,000	19 Februari/February 2034 - 19 Februari/February 2019 -	9.80%			Series E
Seri F	155,000	19 Februari/February 2039	9.95%			Series F
Subjumlah/Subtotal	812,000					



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/117 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)
(lanjutan)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijara (continued)

	Pokok/ Principal	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Wali amanat/ Trustee	
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019						Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase III Year 2019
Seri C	204,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2026	9.35%			Series C
Seri D	45,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2029	9.60%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series D
Seri E	60,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2034	9.80%			Series E
Seri F	28,000	19 Februari/February 2019 - 19 Februari/February 2039	9.95%			Series F
Subjumlah/Subtotal	337,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018
Seri B	483,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2025	9.00%			Series B
Seri C	78,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2028	9.10%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	15,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2033	9.30%			Series D
Seri E	46,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2038	9.65%			Series E
Subjumlah/Subtotal	622,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018						Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase II Year 2018
Seri B	45,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2025	9.00%			Series B
Seri C	15,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2028	9.10%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	50,000	10 Oktober/October 2018 - 10 Oktober/October 2038	9.65%			Series D
Subjumlah/Subtotal	110,000					
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018
Seri B	442,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2025	8.35%			Series B
Seri C	138,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2028	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	281,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2033	8.90%			Series D
Seri E	339,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2038	9.00%			Series E
Subjumlah/Subtotal	1,200,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018						Shelf Registration Sukuk Ijara III PLN Phase I Year 2018
Seri B	150,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2025	8.35%			Series B
Seri C	258,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2028	8.40%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	105,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2033	8.90%			Series D
Seri E	110,000	10 Juli/July 2018 - 10 Juli/July 2038	9.00%			Series E
Subjumlah/Subtotal	623,000					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018
Seri B	10,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2025	6.80%			Series B
Seri C	341,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2028	7.25%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	362,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2033	8.20%			Series D
Seri E	1,365,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2038	8.75%			Series E
Subjumlah/Subtotal	2,078,000					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018						Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase III Year 2018
Seri B	88,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2028	7.25%			Series B
Seri C	57,500	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2033	8.20%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	449,000	22 Februari/February 2018 - 22 Februari/February 2038	8.75%			Series D
Subjumlah/Subtotal	594,500					

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/118 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

	Pokok/ Principal	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat kupon/ imbalan ijarah per tahun/ Coupon rate/ Ijara fee per annum	Periode pembayaran bunga/ Interest payment period	Wali amanat/ Trustee	
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017</i>
Seri C	800,000	3 November 2017 - 3 November 2027	8.20%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Seri D	<u>1,093,000</u>	3 November 2017 - 3 November 2032	8.70%			Series D
Subjumlah/Subtotal	<u>1,893,000</u>					
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017						<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase II Year 2017</i>
Seri B	121,000	3 November 2017 - 3 November 2027	8.20%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Seri C	<u>490,000</u>	3 November 2017 - 3 November 2032	8.70%			Series C
Subjumlah/Subtotal	<u>611,000</u>					
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017						<i>Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017</i>
Seri C	1,217,000	11 Juli/July 2017 - 11 Juli/July 2027	8.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017						<i>Shelf Registration Sukuk Ijara II PLN Phase I Year 2017</i>
Seri B	<u>214,000</u>	11 Juli/July 2017 - 11 Juli/July 2027	8.50%	Kuartalan/ Quarterly	Bank Tabungan Negara	Series B
Jumlah/Total	<u>23,737,185</u>					

Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus, namun dijamin dengan seluruh aset Perusahaan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain.

The bonds are not secured by specific collateral but are secured by all of the Company's assets and the bondholders' rights are pari passu without preference to other creditors.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

The Company has complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee of the corresponding bonds and sukuk ijarah.

Tidak ada indikasi bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi batasan-batasan yang ditentukan ketika batasan-batasan tersebut akan diuji berikutnya pada tanggal pelaporan 31 Desember 2025.

There is no indication that the entity may experience difficulty in complying with the restrictions when they are next tested at the reporting date of December 31, 2025.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan sukuk ijarah digunakan untuk mendanai proyek transmisi, proyek distribusi, dan modal kerja.

The proceeds from the issuance of bonds payable and sukuk ijarah are used to finance the transmission project, distribution project, and working capital.

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rating details on all outstanding bonds and Sukuk Ijarah bonds issued by the Company are as follows:



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/119 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)**

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

Obligasi dan sukuk ijarah (lanjutan)

Bonds and sukuk ijarah (continued)

Rincian peringkat untuk seluruh obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Rating details on all outstanding bonds and Sukuk Ijarah bonds issued by the Company are as follows: (continued)

	2024	
	Peringkat/ Rating	Lembaga pemeringkat/ Rating agency
Obligasi/Bonds (lanjutan/continued)		
Obligasi/Bonds idAAA (lanjutan/continued)		
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017/ Shelf Registration Bonds II PLN Phase I Year 2017	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017/ Shelf Registration Bonds II PLN Phase II Year 2017	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018/ Shelf Registration Bonds II PLN Phase III Year 2018	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase I Year 2018	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase II Year 2018	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase III Year 2019	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase IV Year 2019	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase V Year 2019	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase VI Year 2020	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020/ Shelf Registration Bonds III PLN Phase VII Year 2020	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020/ Shelf Registration Bonds IV PLN Phase I Year 2020	idAAA	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah/Sukuk Ijarah idAAA		
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017/ Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase I Year 2017	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017/ Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase II Year 2017	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018/ Shelf Registration Sukuk Ijarah II PLN Phase III Year 2018	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase I Year 2018	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase II Year 2018	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase III Year 2019	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase IV Year 2019	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase V Year 2019	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020/ Shelf Registration Sukuk Ijarah III PLN Phase VI Year 2020	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020/ Shelf Registration Sukuk Ijarah IV PLN Phase I Year 2020	idAAA(sy)	PT Pemeringkat Efek Indonesia

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/120 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

**Surat Utang Jangka Menengah Global dan
Obligasi Terjamin**

**Global Medium-Term Notes and Guaranteed
Notes**

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin dalam Dolar Amerika pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium-term Notes and Guaranteed Notes as at December 31, 2024 in US Dollars are as follows:

	<u>Pokok/ Principal*) USD</u>	<u>Harga penerbitan/ Issuing price</u>	<u>Periode pinjaman/ Loan term</u>	<u>Tingkat bunga/ Interest rate</u>	<u>Wali amanat/ Trustee</u>	
Surat utang jangka menengah						Global medium- term notes
<u>Penerbitan tahun 2020</u>						<u>Issued in 2020</u>
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.15%	30 Juni/June 2020 - 30 Juni/June 2030	3.00%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2030
Jatuh tempo 2050	<u>1,000,000,000</u>	98.28%	30 Juni/June 2020 - 30 Juni/June 2050	4.00%		Due in 2050
Subjumlah	<u>1,500,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2019</u>						<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2029	700,000,000	99.39%	17 Juli/July 2019 - 17 Juli/July 2029	3.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2029
Jatuh tempo 2049	700,000,000	98.83%	17 Juli/July 2019 - 17 Juli/July 2049	4.88%		Due in 2049
Jatuh tempo 2030	500,000,000	99.78%	5 November 2019 - 5 Februari/February 2030	3.38%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2030
Jatuh tempo 2050	<u>500,000,000</u>	99.57%	5 November 2019 - 5 Februari/February 2050	4.38%		Due in 2050
Subjumlah	<u>2,400,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2018</u>						<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2028	1,000,000,000	99.62%	21 Mei/May 2018 - 21 Mei/May 2028	5.45%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2028
Jatuh tempo 2029	500,000,000	99.00%	25 Oktober/October 2018 - 25 Januari/January 2029	5.38%		Due in 2029
Jatuh tempo 2048	1,000,000,000	99.32%	21 Mei/May 2018 - 21 Mei/May 2048	6.15%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2048
Jatuh tempo 2049	<u>500,000,000</u>	99.29%	25 Oktober/October 2018 - 25 Oktober/October 2049	6.25%		Due in 2049
Subjumlah	<u>3,000,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2017</u>						<u>Issued in 2017</u>
Jatuh tempo 2027	1,500,000,000	98.99%	15 Mei/May 2017 - 15 Mei/May 2027	4.13%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2027
Jatuh tempo 2047	<u>500,000,000</u>	98.51%	15 Mei/May 2017 - 15 Mei/May 2047	5.25%		Due in 2047
Subjumlah	<u>2,000,000,000</u>					Subtotal
<u>Penerbitan tahun 2012</u>						<u>Issued in 2012</u>
Jatuh tempo 2042	1,000,000,000	98.51%	24 Oktober/October 2012 - 24 Oktober/October 2042	5.25%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2042
Obligasi terjamin						Guaranteed notes
<u>Penerbitan tahun 2007</u>						<u>Issued in 2007</u>
Jatuh tempo 2037	<u>288,312,000</u>	98.59%	28 Juni/June 2007 - 29 Juni/June 2037	7.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2037
Jumlah	<u>10,188,312,000</u>					Total

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/121 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)**

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

**Surat Utang Jangka Menengah Global dan
Obligasi Terjamin (lanjutan)**

**Global Medium-Term Notes and Guaranteed
Notes (continued)**

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Euro pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium-Term Notes in Euro as at December 31, 2024 are as follows:

	Pokok/ Principal*) EUR	Harga penerbitan/ Issuing price	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat bunga/ Interest rate	Wali amanat/ Trustee	
Surat utang jangka menengah						Global medium- term notes
<u>Penerbitan tahun 2019</u>						<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2031	500,000,000	99.42%	5 November 2019 - 5 November 2031	1.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2031
<u>Penerbitan tahun 2018</u>						<u>Issued in 2018</u>
Jatuh tempo 2025	500,000,000	99.22%	25 Oktober/October 2018 - 25 Oktober/October 2025	2.88%	Deutsche Bank Trust Company Americas	Due in 2025
Jumlah	1,000,000,000					Total

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dalam Yen Jepang pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The details of Global Medium-Term Notes in Japanese Yen as at December 31, 2024 are as follows:

	Pokok/ Principal*) JPY	Harga penerbitan/ Issuing price	Periode pinjaman/ Loan term	Tingkat bunga/ Interest rate	Wali amanat/ Trustee	
Surat utang jangka menengah						Global medium- term notes
<u>Penerbitan tahun 2019</u>						<u>Issued in 2019</u>
Jatuh tempo 2029	1,000,000,000	100%	20 September 2019 - 20 September 2029	1.05%	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Due in 2029

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount

Perusahaan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.

The Company complied with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.

Tidak ada indikasi bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi batasan-batasan yang ditentukan ketika batasan-batasan tersebut akan diuji berikutnya pada tanggal pelaporan 31 Desember 2025.

There is no indication that the entity may experience difficulty in complying with the restrictions when they are next tested at the reporting date of December 31, 2025.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin, dan untuk tujuan umum korporasi.

The proceeds from the Global Medium-Term Notes and Guaranteed Notes issued were used to fund the capital expenditure requirements in connection with the fast track program, regular construction and for general corporate purposes.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/122 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
(lanjutan)

28. BONDS PAYABLE AND SUKUK IJARA (continued)

**Surat Utang Jangka Menengah Global dan
Obligasi Terjamin** (lanjutan)

**Global Medium-Term Notes and Guaranteed
Notes** (continued)

Rincian peringkat untuk seluruh surat utang jangka menengah global, obligasi terjamin, dan *Japanese Yen bond* yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

Rating details on all outstanding global medium-term notes, guaranteed notes, and the Japanese Yen bond owned by the Company are as follows:

	Lembaga pemeringkat/Rating agency			
	Moody's Investor Service, Inc.,	Standard and Poor's	Fitch	Japan Credit Rating
Surat utang jangka menengah global dalam Dollar Amerika/				
Global medium-term notes in US Dollars				
Penerbitan tahun 2020/Issued in 2020	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2019/Issued in 2019	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2018/Issued in 2018	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2017/Issued in 2017	Baa2	n/a	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2012/Issued in 2012	Baa2	BBB	BBB	n/a
Surat utang jangka menengah global dalam Euro/				
Global medium-term notes in Euro				
Penerbitan tahun 2019/Issued in 2019	Baa2	BBB	BBB	n/a
Penerbitan tahun 2018/Issued in 2018	Baa2	n/a	BBB	n/a
Obligasi terjamin/Guaranteed notes				
Penerbitan tahun 2007/Issued in 2007	Baa2	BBB	BBB	n/a
Obligasi dalam Yen Jepang/				
Japanese Yen Bond				
Penerbitan tahun 2019/Issued in 2019	Baa2	BBB	n/a	BBB+

29. UTANG LISTRIK SWASTA

29. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLES

Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan IPP.

This account represents electricity purchase payables, which were restructured through renegotiation with the IPPs.

Rincian berdasarkan pemasok dan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut:

Details according to creditors and payment schedules are as follows:

a. Berdasarkan kreditur

a. By creditor

	2024	2023	
PT Paiton Energy			PT Paiton Energy
2024: USD287.630.378			2024: USD287.630.378
2023: USD320.915.631	4,647,244	4,954,616	2023: USD320,915,631
PT Jawa Power			PT Jawa Power
2024: USD42.779.578			2024: USD42,779,578
2023: USD45.416.849	691,190	701,191	2023: USD45,416,849
Jumlah	5,338,434	5,655,807	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	615,418	554,608	Less: current portion
Bagian jangka panjang	4,723,016	5,101,199	Long-term portion



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/123 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. UTANG LISTRIK SWASTA (lanjutan)

29. ELECTRICITY PURCHASE PAYABLES (continued)

b. Berdasarkan jadwal pembayaran

b. By instalment schedule

	2024	2023	
Dibayarkan:			Payable:
Dalam satu tahun	615,418	554,608	Within one year
Pada tahun kedua	653,457	588,069	In the second year
Pada tahun ketiga	694,926	624,418	In the third year
Pada tahun keempat	740,309	664,045	In the fourth year
Setelah lima tahun	2,634,324	3,224,667	After five years
Jumlah	5,338,434	5,655,807	Total

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga sebesar 4,81% dan 18,45% yang dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

Payables to PT Paiton Energy and PT Jawa Power bear annual interest of 4.81% and 18.45%, and are payable in 360 monthly installments from January 1, 2002 until December 1, 2031.

30. UTANG USAHA

30. TRADE PAYABLES

Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2024	2023	
Pihak berelasi			Related parties
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	16,146,028	8,842,519	Purchase of fuel, goods and services
Pembelian tenaga listrik	6,566,473	6,681,010	Purchase of electricity
Subjumlah	22,712,501	15,523,529	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Pembelian bahan bakar, barang dan jasa	23,230,993	24,101,662	Purchase of fuel, goods and services
Pembelian tenaga listrik	24,754,325	17,522,336	Purchase of electricity
Subjumlah	47,985,318	41,623,998	Subtotal
Jumlah	70,697,819	57,147,527	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade payables by currency are as follows:

	2024		2023		
	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
Rupiah	44,465,780	44,465,780	34,893,505	34,893,505	Rupiah
USD	1,607,318,970	25,969,452	1,432,937,142	22,123,116	USD
Lain-lain**)	16,252,219	262,587	8,478,895	130,906	Others**)
Jumlah		70,697,819		57,147,527	Total

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

**) Utang usaha dalam mata uang lainnya disajikan dalam jumlah setara USD, menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount, except for Rupiah

**) Trade payables in other currencies are presented in USD equivalents using the exchange rate prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/124 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. UTANG USAHA (lanjutan)

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

30. TRADE PAYABLES (continued)

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

31. UTANG LAIN-LAIN

31. OTHER PAYABLES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan			Acquisition of property, plant and equipment and construction in progress
Rupiah	5,340,378	4,427,251	Rupiah
USD	806,130	1,782,969	USD
EUR	709,867	396,655	EUR
JPY	206,501	369,034	JPY
Pemerintah daerah	3,180,744	2,512,403	Local government
Uang muka penjualan tenaga listrik		1,622,157	Advances received on sale of electricity
Karyawan	160,461	80,143	Employees
Lain-lain	<u>954,646</u>	<u>1,581,575</u>	Others
Jumlah	11,358,727	12,772,187	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>10,925,072</u>	<u>12,305,320</u>	Less: current portion
Bagian jangka panjang	<u><u>433,655</u></u>	<u><u>466,867</u></u>	Non-current portion

Pemerintah Daerah

Utang kepada Pemerintah Daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah.

Local Government

The payables to Local Government represent the amount collected by the Company from the customers for street lighting taxes. This is subsequently remitted to the respective Local Government.

Uang muka penjualan tenaga listrik

Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Advances received on sale of electricity

This account represents cash received from the sale of prepaid electricity.

Karyawan

Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan di muka atas cicilan penjualan rumah dinas.

Employees

Payable to employees mainly represents receipt of advance instalment payments from employees related to house instalments.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/125 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. UTANG PAJAK

32. TAXES PAYABLE

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan			Corporate income taxes
Pasal 29	2,672,130	1,014,813	Article 29
Pajak lain-lain			Other taxes
PPN	881,243	1,312,139	VAT
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	1,211,552	1,415,342	Article 21
Pasal 23 dan 26	250,870	191,656	Articles 23 and 26
Pasal 22	145,392	138,665	Article 22
Pasal 4(2)	94,760	113,958	Article 4(2)
Pasal 15	41,936	41,601	Article 15
Lain-lain	3,994	3,771	Others
Subjumlah	2,629,747	3,217,132	Subtotal
Jumlah	5,301,877	4,231,945	Total

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

33. ACCRUED EXPENSES

	2024	2023	
Bunga dan beban keuangan			Interest and financing charges
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Utang bank	419,755	397,527	Bank loans
Utang penerusan pinjaman	303,559	323,010	Two-step loans
Utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan pemerintah non bank	2,008	-	Government and non bank government financial institution loans
Jumlah pihak berelasi	725,322	720,537	Total related parties
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Utang obligasi dan sukuk ijarah	2,196,944	2,154,153	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang bank	700,978	1,253,697	Bank loans
Utang bunga sewa	506,461	560,948	Lease liability interest
Utang listrik swasta	18,833	19,837	Electricity purchase payables
Jumlah pihak ketiga	3,423,216	3,988,635	Total third parties
Subjumlah	4,148,538	4,709,172	Subtotal
Biaya operasional	6,347,360	3,340,325	Operational charges
Jumlah	10,495,898	8,049,497	Total

Rincian biaya masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of accrued expenses by currency are as follows:

	2024		2023		
	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent	
Rupiah	7,276,114	7,276,114	4,191,201	4,191,201	Rupiah
USD	151,766,337	2,452,089	200,444,199	3,094,658	USD
JPY	5,619,522,435	581,216	5,802,685,833	633,711	JPY
EUR	11,085,006	186,479	7,604,152	129,927	EUR
Jumlah		10,495,898		8,049,497	Total

*) Dalam jumlah penuh, kecuali Rupiah

*) In full amount, except for Rupiah

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/126 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

33. ACCRUED EXPENSES (continued)

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

34. UANG JAMINAN LANGGANAN

Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

34. CUSTOMER SECURITY DEPOSITS

This account represents customer security deposits determined based on power supply and electricity tariff. Customer security deposits will be refunded, net of unpaid electricity bills, upon discontinuation of customers' subscriptions.

35. UTANG BIAYA PROYEK

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya dan pengadaan material untuk konstruksi. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorisation* atau dokumen lain yang sejenis.

35. PROJECT COST PAYABLES

This account represents payables to contractors arising from expenses and material purchases for construction. This account will be reclassified into the two-step loans account at the issuance of the *Withdrawal Authorisation* or other similar documents.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Nama proyek			Project name
PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)	1,680,636	1,502,488	PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW)
Lain-lain	-	9,731	Others
Jumlah	<u>1,680,636</u>	<u>1,512,219</u>	Total

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK

Penjualan tenaga listrik berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

36. SALES OF ELECTRICITY

Sales of electricity by customer are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pihak berelasi (Catatan 51)			Related parties (Note 51)
Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah	<u>22,942,416</u>	<u>22,370,966</u>	Government related entities
Pihak ketiga			Third parties
Umum	328,074,169	308,655,795	Public
TNI dan Polri	<u>2,159,435</u>	<u>2,164,301</u>	TNI and Polri
Subjumlah	<u>330,233,604</u>	<u>310,820,096</u>	Subtotal
Jumlah	<u>353,176,020</u>	<u>333,191,062</u>	Total

Pendapatan sebesar Rp353.176.020 (2023: Rp333.191.062) diakui sepanjang waktu.

Revenue amounting to Rp353,176,020 (2023: Rp333,191,062) is recognised overtime.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/127 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PENJUALAN TENAGA LISTRIK (lanjutan)

Penjualan tenaga listrik untuk tahun 2024 dan 2023 didasarkan pada Tarif Dasar Listrik, yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 21 Tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN Batam.

Tidak terdapat penyesuaian tarif selama 2024 untuk golongan pelanggan nonsubsidi lainnya.

Grup tidak memiliki penjualan kepada pelanggan dengan jumlah melebihi 10% dari total pendapatan usaha.

36. SALES OF ELECTRICITY (continued)

Sales of electricity for the years 2024 and 2023 are based on the Basic Electricity Tariff determined by the Government and Local Government as follows:

- Regulation of the Ministry of ESDM No. 28 Year 2016 most recently amended by Regulation of the Ministry of ESDM No. 3 Year 2020.
- Regulation of the Governor of Riau Islands No. 21 Year 2017, regarding the tariff of electricity provided by PLN Batam.

There is no electricity tariff adjustment during 2024 for other non-subsidy customers.

The Group has no single customer from which it generates revenue of more than 10% of total revenue.

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Indonesia atas selisih antara biaya yang diperbolehkan ditambah margin 7% dengan harga jual aktual per masing-masing golongan tarif kecuali untuk golongan tarif yang telah mendapatkan penyesuaian tarif otomatis menurut Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan ke-4 atas Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik untuk listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perusahaan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik tahun anggaran 2024 dan 2023 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.02/2021, tanggal 7 Desember 2021. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif dikurangi biaya pokok penyediaan tenaga listrik (Rp/kWh) di masing-masing golongan tarif dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. Biaya pokok penyediaan tenaga listrik dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, di bawah Kementerian ESDM.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Direktorat Jenderal Anggaran, di bawah Kementerian Keuangan.

37. GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY

Subsidy revenue represents the revenue from the Government of Indonesia for the difference between allowable cost plus a 7% margin with actual sales price for each tariff group except for tariff groups which received automatic tariff adjustment based on Ministry of ESDM Regulation No. 3 Year 2020 regarding the fourth amendment of Ministry of ESDM Regulation No. 28 Year 2016 regarding electricity tariff for electricity provided by PT PLN (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia provides electricity subsidies to customers through the Company. The procedure for calculation and payment of the electricity subsidy for budget years 2024 and 2023 uses Minister of Finance Regulation No. 178/PMK.02/2021, dated December 7, 2021. The electricity subsidy is calculated from the negative difference between the average sales prices (Rp/kWh) of each tariff group less the cost of electricity supplies (Rp/kWh) at each tariff group multiplied by the electricity sales volume (kWh) for each tariff group. The cost of electricity supplies is computed based on the formula determined by the Directorate General of Electricity, under the Ministry of ESDM.

The amount of the electricity subsidy within a budget year is finalised based on the result of the compliance audit of the usage of the electricity subsidy performed by an auditor assigned by the Directorate General of Budget under the Ministry of Finance.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/128 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH (lanjutan)

**37. GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY
(continued)**

Pendapatan subsidi listrik dirinci selama tahun berjalan sebagai berikut:

The details of revenue from electricity subsidy during the year are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	4,611,800	4,677,328	Beginning balance
Subsidi listrik (Catatan 51)	77,045,335	68,636,731	Electricity subsidy (Note 51)
Realisasi penerimaan subsidi tahun anggaran berjalan:			Realisation of subsidy from current year budget:
Penerimaan tunai	<u>(75,817,285)</u>	<u>(68,702,258)</u>	Cash received
Piutang subsidi listrik periode periode anggaran tahun berjalan (Catatan 16)	<u>5,839,850</u>	<u>4,611,801</u>	Receivables for electricity from current year budget (Note 16)

38. PENDAPATAN USAHA LAIN-LAIN

38. OTHER REVENUES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Penjualan batubara	6,209,180	5,083,674	Coal sales
Jaringan dan jasa telekomunikasi	3,767,126	2,902,542	Telecommunication network and services
Jasa pemeliharaan	1,654,485	908,851	Maintenance services
Sewa transformator	642,217	470,331	Transformer rental
Perubahan daya tersambung dan administrasi	175,686	42,623	Upgrading of electricity power and administration fees
Lain-lain	<u>780,896</u>	<u>868,069</u>	Others
Jumlah	<u>13,229,590</u>	<u>10,276,090</u>	Total

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Bahan bakar minyak			Fuel oils
High speed diesel	42,535,644	37,389,487	High speed diesel
Fuel marine oil	1,556,556	1,545,568	Fuel marine oil
Lain-lain	<u>306,317</u>	<u>251,999</u>	Others
Subjumlah	<u>44,398,517</u>	<u>39,187,054</u>	Subtotal
Bahan bakar - nonminyak			Non-oil fuels
Batubara	77,406,140	69,496,783	Coal
Gas alam	51,321,994	50,585,153	Natural gas
Panas bumi	4,332,027	4,171,101	Geothermal
Biomassa	986,439	518,199	Biomass
Air	<u>450,735</u>	<u>393,477</u>	Water
Subjumlah	<u>134,497,335</u>	<u>125,164,713</u>	Subtotal
Minyak pelumas	<u>395,119</u>	<u>379,811</u>	Lubricants
Jumlah	<u>179,290,971</u>	<u>164,731,578</u>	Total



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/129 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**39. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
(lanjutan)**

Grup memiliki pembelian pasokan bahan bakar yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan, yaitu pembelian ke Grup Pertamina.

Lihat Catatan 51 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

39. FUEL AND LUBRICANTS EXPENSE (continued)

Group has fuel and lubricants purchases that exceed 10% of the total revenues, specifically from Pertamina Group.

Refer to Note 51 for information on the details of transactions and balances with related parties.

40. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

Akun ini termasuk pembelian tenaga listrik dari IPP terkait PPA dan ESC, pembelian tenaga listrik selama masa uji coba dan pembelian tenaga listrik dari kelebihan produksi dari IPP tertentu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

40. PURCHASED ELECTRICITY

This account includes the purchase of electricity from certain IPPs in relation to PPAs and ESCs, the purchase of electricity during the commissioning stage and the purchase of excess electricity generated by certain IPPs. The details are as follows:

	2024	2023	
Pihak berelasi			Related parties
S2P	13,671,404	13,645,080	S2P
SGPJB	12,242,255	10,982,860	SGPJB
PGE	3,827,310	3,678,905	PGE
BPI	1,320,789	1,495,370	BPI
Lain-lain	3,909,051	4,071,810	Others
Subjumlah	<u>34,970,809</u>	<u>33,874,025</u>	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
PT Paiton Energy	15,386,067	14,029,469	PT Paiton Energy
PT Bhumi Jati Power	14,747,732	13,839,359	PT Bhumi Jati Power
PT Bhimasena Power Indonesia	13,414,659	12,179,617	PT Bhimasena Power Indonesia
PT Jawa Power	9,508,489	9,075,756	PT Jawa Power
PT Cirebon Energi Prasarana	7,376,448	4,576,001	PT Cirebon Energi Prasarana
PT Huadian Bukit Asam Power	6,057,154	1,416,060	PT Huadian Bukit Asam Power
PT Jawa Satu Power	5,307,451	1,034,969	PT Jawa Satu Power
PT Lestari Banten Energi	4,147,522	4,258,338	PT Lestari Banten Energi
PT General Energi Bali	3,606,655	3,342,523	PT General Energi Bali
PT Bosowa Energi	3,532,858	3,005,134	PT Bosowa Energi
PT Cirebon Electric Power	3,421,356	3,234,917	PT Cirebon Electric Power
PT Star Energy Geothermal	3,223,942	3,006,723	PT Star Energy Geothermal
Sarulla Operations Ltd	2,709,741	2,434,683	Sarulla Operations Ltd
PT Poso Energy	2,391,063	1,892,597	PT Poso Energy
PT DSSP Power Sumsel	2,283,657	2,279,174	PT DSSP Power Sumsel
PT Meulaboh Power Generation	2,183,092	300,592	PT Meulaboh Power Generation
Star Energy Geothermal Salak Ltd	2,170,355	2,096,834	Star Energy Geothermal Salak Ltd
Lain-lain *)	42,187,727	38,954,413	Others*)
Subjumlah	<u>143,655,968</u>	<u>120,957,159</u>	Subtotal
Jumlah	<u>178,626,777</u>	<u>154,831,184</u>	Total

*) Masing-masing di bawah Rp2.000.000.

*) Each below Rp2,000,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/130 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. BEBAN SEWA

41. LEASE EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban yang berkaitan dengan sewa dengan pembayaran variabel yang tidak termasuk dalam utang sewa	1,338,595	1,072,229	<i>Expense relating to variable lease payments not included in lease liabilities</i>
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek	906,215	665,437	<i>Expense relating to short-term leases</i>
Beban yang berkaitan dengan sewa nilai rendah	<u>362,222</u>	<u>137,196</u>	<i>Expense relating to leases of low value assets</i>
Jumlah	<u>2,607,032</u>	<u>1,874,862</u>	Total

42. BEBAN PEMELIHARAAN

42. MAINTENANCE EXPENSES

Akun ini merupakan beban yang timbul dari pemakaian material dan jasa borongan untuk keperluan pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

This account represents spare parts used and contractor fees for maintenance purposes. The details of maintenance expenses are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Jasa borongan	25,105,530	23,477,681	<i>Contractor fees</i>
Pemakaian material	<u>6,440,481</u>	<u>6,040,643</u>	<i>Spare parts used</i>
Jumlah	<u>31,546,011</u>	<u>29,518,324</u>	Total

43. BEBAN KEPEGAWAIAN

43. PERSONNEL EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Tunjangan	8,661,077	8,206,665	<i>Allowances</i>
Jasa produksi dan insentif prestasi kerja	8,212,143	4,508,497	<i>Bonus and performance incentives</i>
Gaji	5,951,220	5,371,033	<i>Salaries</i>
Imbalan kerja (Catatan 49)	(1,705,513)	7,091,073	<i>Employee benefits (Note 49)</i>
Lain-lain	<u>9,590,446</u>	<u>7,178,666</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>30,709,373</u>	<u>32,355,934</u>	Total

44. BEBAN USAHA LAIN-LAIN

44. OTHER OPERATING EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Honorarium	2,275,483	2,142,848	<i>Honorarium</i>
Pembacaan meter	2,241,372	1,975,466	<i>Meter reading</i>
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 12)	948,723	804,516	<i>Amortisation of intangible assets (Note 12)</i>
Pengelolaan pelanggan	344,555	285,101	<i>Customer maintenance</i>
Teknologi informasi	210,257	389,676	<i>Technological information</i>
(Pemulihan)/penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang	(309,032)	348,870	<i>(Reversal)/allowance of expected credit losses of receivables</i>
Lain-lain	<u>5,773,452</u>	<u>3,611,384</u>	<i>Others</i>
Jumlah	<u>11,484,810</u>	<u>9,557,861</u>	Total



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/131 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. BEBAN KEUANGAN

45. FINANCE COSTS

	2024	2023	
Pihak berelasi			Related parties
Utang bank	2,811,682	2,302,633	Bank loans
Penerusan pinjaman	864,077	899,210	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah	157,057	159,811	Government loans
Instrumen derivatif *)	(697,013)	378,809	Derivative instruments *)
Subjumlah	<u>3,135,803</u>	<u>3,740,463</u>	Subtotal
Pihak ketiga			Third parties
Utang obligasi	8,607,815	7,967,939	Bonds payable
Utang sewa (Catatan 26)	6,889,385	3,841,618	Lease liabilities (Note 26)
Utang bank	5,388,191	5,058,296	Bank loans
Utang listrik swasta	359,117	379,165	Electricity purchase payables
Lain-lain	<u>37,549</u>	<u>22,874</u>	Others
Subjumlah	<u>21,282,057</u>	<u>17,269,892</u>	Subtotal
Jumlah	<u>24,417,860</u>	<u>21,010,355</u>	Total

*) Beban keuangan dari transaksi instrumen derivatif.

*) Finance expense from transaction of derivative instrument.

46. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH

46. OTHER (EXPENSES)/INCOME - NET

	2024	2023	
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama (Catatan 9)	3,376,821	3,256,438	Share in net income of associates and joint ventures (Note 9)
Penghasilan denda administrasi (Penurunan)/kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 8)	1,658,351	1,958,812	Administrative penalty income (Decrease)/increase in the fair value of investment properties (Note 8)
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(236,524)	207,770	Gain on sale of assets not used in operations (Note 6)
Penyisihan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	281,557	281,267	Provision against uncertain tax treatment
Penghasilan jasa dan klaim	(3,162,860)	(473,543)	Claim and service income
Penurunan nilai aset tetap (Catatan 6)	88,856	54,806	Provision for impairment of property, plant and equipment (Note 6)
Beban penyusutan aset tetap tidak digunakan dalam operasi (Catatan 6)	(1,158,660)	(30,219)	Depreciation expense of assets not used in operations (Note 6)
Program pemberdayaan lingkungan	(1,056,080)	(1,052,915)	Community development programs
Kerugian penurunan nilai aset dalam pembangunan	(526,341)	(494,016)	Loss on impairment of construction in progress
Beban penelitian	-	(376,682)	Research expenses
Lain-lain	(297,108)	(136,479)	Others
	<u>(1,097,070)</u>	<u>(1,682,188)</u>	
Jumlah	<u>(2,129,058)</u>	<u>1,513,051</u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/132 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN

47. INCOME TAX

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban pajak kini			<i>Current tax</i>
Perusahaan			<i>The Company</i>
Tahun berjalan	309,757	349,269	<i>Current year</i>
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Tahun berjalan	2,486,153	1,398,184	<i>Current year</i>
Tahun sebelumnya	<u>1,691,539</u>	<u>206,824</u>	<i>Prior year</i>
	<u>4,487,449</u>	<u>1,954,277</u>	
 Beban pajak tangguhan			 <i>Deferred tax expense</i>
Perusahaan	2,712,343	1,626,130	<i>The Company</i>
Entitas anak	<u>3,307,143</u>	<u>6,728,059</u>	<i>Subsidiaries</i>
	<u>6,019,486</u>	<u>8,354,189</u>	
 Jumlah beban pajak penghasilan	<u>10,506,935</u>	<u>10,308,466</u>	 <i>Total income tax expense</i>

a. Pajak kini

a. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the consolidated profit before income tax and the estimated taxable income is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	28,269,959	32,379,924	<i>Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laba sebelum pajak entitas anak	(38,340,160)	(40,704,165)	<i>Profit before tax attributable to subsidiaries</i>
Disesuaikan dengan jurnal eliminasi konsolidasian	<u>(175,015)</u>	<u>(27,388)</u>	<i>Adjustment for consolidation elimination entries</i>
 Laba sebelum pajak - Perusahaan	(10,245,216)	(8,351,629)	 <i>Profit before tax - the Company</i>
Koreksi fiskal:			<i>Fiscal correction:</i>
Beban sewa	1,061,686	(2,004,751)	<i>Lease expenses</i>
Penyambungan pelanggan	7,620,314	7,377,524	<i>Customer connection fees</i>
Penyusutan aset tetap	(17,390,184)	(16,386,008)	<i>Depreciation of property, plant and equipment</i>
Imbalan kerja	(5,675,867)	2,552,136	<i>Employee benefits</i>
Penyusutan biaya dikapitalisasi	(2,277,247)	(1,554,038)	<i>Depreciation of capitalised expense</i>
Biaya/(pendapatan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			<i>Non-deductible expenses/ (non-taxable income):</i>
Kesejahteraan karyawan	1,031,887	404,082	<i>Employee welfare</i>
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang dan penurunan nilai persediaan			<i>Allowance for expected credit losses of receivables and allowance for decline in value of inventories</i>
dan persediaan usang	(369,001)	410,583	<i>and inventory obsolescence</i>
Penghasilan bunga telah dikenakan pajak final	(1,000,639)	(552,410)	<i>Interest income subjected to final tax</i>
Beban lain tidak dapat dikurangkan	<u>28,652,252</u>	<u>19,692,099</u>	<i>Other non-deductible expenses</i>
 Estimasi laba fiskal kena pajak Perusahaan tahun berjalan	<u>1,407,985</u>	<u>1,587,588</u>	 <i>The Company's taxable income for the year</i>
 Beban pajak kini - Perusahaan	309,757	349,269	 <i>Current tax - the Company</i>
 Beban pajak kini - Entitas anak	<u>4,177,692</u>	<u>1,605,008</u>	 <i>Current tax - the Subsidiaries</i>
 Total beban pajak	<u>4,487,449</u>	<u>1,954,277</u>	 <i>Total income tax expenses</i>



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/133 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

a. Pajak kini (lanjutan)

a. Current tax (continued)

Labna kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual CIT Return.

b. Pajak tangguhan

b. Deferred tax

	2024				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja	175,592	4,795	4,768	185,155	Employee benefits liabilities
Pendapatan ditangguhkan	254	519	-	773	Deferred revenue
Aset hak guna	(1,374)	(971)	-	(2,345)	Right-of-use assets
Aset tetap	223,944	80,852	(11,333)	293,463	Property, plant and equipment
Penyisihan penurunan nilai piutang	58,599	1,146	-	59,745	Provision for impairment losses of receivables
Penyisihan persediaan	30,647	(6,203)	-	24,444	Provision for inventories
Bonus	47,654	(6,272)	-	41,382	Bonuses
Beban ditangguhkan	5,378	1,379	-	6,757	Deferred charges
Jumlah	540,694	75,245	(6,565)	609,374	Total
Liabilitas pajak tangguhan					Deferred tax liabilities
Akumulasi rugi fiskal	-	3,581	-	3,581	Accumulated tax losses
Liabilitas imbalan kerja	14,475,245	(1,132,929)	2,798,418	16,140,734	Employee benefits liabilities
Pendapatan ditangguhkan	6,293,502	1,711,815	-	8,005,317	Deferred revenue
Liabilitas sewa	1,895,286	(140,078)	-	1,755,208	Lease liabilities
Aset hak guna	(5,559,384)	479,922	-	(5,079,462)	Right-of-use assets
Aset tetap	(75,622,099)	(7,131,617)	(8,477,119)	(91,230,835)	Property, plant and equipment
Bonus	173,318	36,578	-	209,896	Bonuses
Penyisihan persediaan	82,970	16,054	-	99,024	Provision for inventories
Penyisihan penurunan nilai piutang	3,276	(222)	-	3,054	Provision for impairment losses of receivables
Lainnya	29,147	62,165	-	91,312	Others
Jumlah	(58,228,739)	(6,094,731)	(5,678,701)	(70,002,171)	Total
		(6,019,486)	(5,685,266)		

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/134 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

b. Pajak tangguhan (lanjutan)

b. Deferred tax (continued)

2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance	
				Deferred tax assets
Aset pajak tangguhan				Accumulated tax losses
Akumulasi rugi fiskal	1,709	(1,709)	-	Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja	107,178	66,623	1,791	Right-of-use assets
Aset hak guna	6,446	(7,820)	-	Property, plant and equipment
Aset tetap	124,192	99,752	-	Provision for impairment losses of receivables
Penyisihan penurunan nilai piutang	91,959	(33,360)	-	Provision for inventories
Penyisihan persediaan	29,064	1,583	-	Bonuses
Bonus	57,293	(9,639)	-	Share net income from associates and joint ventures
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(3)	3	-	Others
Lainnya	9,610	(3,978)	-	
Jumlah	427,448	111,455	1,791	Total
				Deferred tax liabilities
Liabilitas pajak tangguhan				Employee benefits liabilities
Liabilitas imbalan kerja	15,042,706	696,458	(1,263,919)	Deferred revenue
Pendapatan ditangguhkan	4,646,551	1,646,951	-	Lease liabilities
Liabilitas sewa	2,181,801	(286,515)	-	Right-of-use assets
Aset hak guna	(5,515,652)	(43,732)	-	Property, plant and equipment
Aset tetap	(64,983,639)	(10,562,283)	(76,177)	Bonuses
Bonus	178,156	(4,838)	-	Provision for inventories
Penyisihan persediaan	35,956	47,014	-	Provision for impairment losses of receivables
Penyisihan penurunan nilai piutang	1,902	1,374	-	Others
Lainnya	(15,242)	39,927	4,462	
Jumlah	(48,427,461)	(8,465,644)	(1,335,634)	Total
		(8,354,189)	(1,333,843)	

Pajak atas laba sebelum pajak konsolidasian berbeda dengan jumlah teoritis yang dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas laba/(rugi) masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable of profit/(loss) of the consolidated subsidiaries as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan komprehensif konsolidasian	28,269,959	32,379,924	Profit before income tax per consolidated statements of comprehensive income
Beban pajak sesuai tarif pajak yang berlaku yaitu 22%	6,219,391	7,123,583	Tax expense at prevailing tax rate of 22%
Pengaruh pajak atas:			Tax effect of:
Kesejahteraan karyawan	255,201	114,592	Employee welfare
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	(742,901)	(716,416)	Share in net income of associates and joint ventures
Penghasilan bunga dikenakan pajak final	(214,779)	(209,773)	Interest income subject to final tax
Utilisasi rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	-	(434,312)	Utilisation of prior year's tax loss carry forward
Revaluasi aset	52,035	(45,709)	Revaluation of assets
Beban lain tidak dapat dikurangkan	4,937,988	4,476,501	Other non-deductible expenses
Jumlah	10,506,935	10,308,466	Total



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/135 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

c. Surat ketetapan pajak

c. Tax assessment letters

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal year	Surat ketetapan pajak/ Tax assessment letter	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in Rupiah 2024	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in Rupiah 2023	Status/Status
PLN					
PPN Pemungut/VAT collector	2016	Kurang bayar/Underpayment	-	19,468	Putusan diterima, pengembalian diterima/Verdict accepted, refund has been received
PPh pasal 21/Income tax art 21	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	35,522	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh pasal 22/Income tax art 22	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	364,684	Permohonan peninjauan kembali dari DJP ditolak/Request for judicial review from DJP rejected
PPh pasal 23/Income tax art 23	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	49,274	Permohonan peninjauan kembali dari DJP ditolak/Request for judicial review from DJP rejected
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	198,992	Permohonan peninjauan kembali dari DJP ditolak/Request for judicial review from DJP rejected
PPN dalam negeri/Domestic VAT	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	278,105	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPN pemungut/VAT collector	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	304,029	Permohonan peninjauan kembali dari DJP ditolak/Request for judicial review from DJP rejected
STP PPN dalam negeri/ Tax assessment letter domestic VAT	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	41,383	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPN pemungut/VAT collector	2018	Kurang bayar/Underpayment	310,037	310,037	Permohonan peninjauan kembali dari DJP ditolak/Request for judicial review from DJP rejected
PPh pasal 21/Income tax art 21	2018	Kurang bayar/Underpayment	336,283	336,283	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 22/Income tax art 22	2018	Kurang bayar/Underpayment	48,455	176,068	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 23/Income tax art 23	2018	Kurang bayar/Underpayment	2,380,167	2,380,167	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2018	Kurang bayar/Underpayment	2,950,557	2,950,558	Peninjauan kembali/Judicial review
Bea meterai/Stamp duty	2018	Kurang bayar/Underpayment	199,341	199,341	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 21/Income tax art 21	2019	Kurang bayar/Underpayment	114,695	114,695	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	499,208	499,208	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2019	Kurang bayar/Underpayment	1,064,278	1,064,278	Banding/Appeal
PPh pasal 26/Income tax art 26	2019	Kurang bayar/Underpayment	223,992	215,145	Peninjauan kembali/Judicial review
Bea meterai/Stamp Duty	2019	Kurang bayar/Underpayment	377,385	188,692	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh Badan/Corporate income tax	2019	Kurang bayar/Underpayment	6,122,611	3,061,305	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2019	Kurang bayar/Underpayment	878,959	878,959	Peninjauan kembali/Judicial review
PPh pasal 4 ayat (2)/ Income tax art 4(2)	2020	Kurang bayar/Underpayment	477,687	477,687	Proses Banding/Appeal process
Bea meterai/Stamp duty	2020	Kurang bayar/Underpayment	79,047	39,524	Proses Banding/Appeal process
PPh pasal 21/Income tax art 21	2020	Kurang bayar/Underpayment	-	13,981	Tidak diajukan keberatan/No objection
PPh pasal 22/Income tax art 22	2020	Kurang bayar/Underpayment	241,613	241,613	Proses Banding/Appeal process
PPh pasal 23/Income tax art 23	2020	Kurang bayar/Underpayment	1,342,502	671,251	Proses Banding/Appeal process
PPh Badan/Corporate income tax	2020	Kurang bayar/Underpayment	2,704,402	1,622,641	Proses Banding/Appeal process
PPh pasal 26/Income tax art 26	2020	Kurang bayar/Underpayment	46,735	46,735	Proses Banding/Appeal process
PPN dalam negeri/Domestic VAT	2020	Kurang bayar/Underpayment	84,257	84,257	Proses Banding/Appeal process
STP PPN dalam negeri/ Tax assessment letter domestic VAT	2020	Kurang bayar/Underpayment	11,847	11,847	Proses Banding/Appeal process

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/136 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

c. Tax assessment letters (continued)

Jenis pajak/Tax type	Tahun pajak/ Fiscal year	Surat ketetapan pajak/ Tax assessment letter	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in Rupiah 2024	Jumlah yang diperkarakan dalam Rupiah/ Dispute amount in Rupiah 2023	Status/Status
PNP					
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	136,172	136,172	Proses Banding/Appeal process
PPh Badan/Corporate income tax	2019	Kurang bayar/Underpayment	-	18,555	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PIP					
PPh Badan/Corporate income tax	2016	Kurang bayar/Underpayment	16,094	16,094	Banding/Appeal
PPh pasal 23/Income tax art 23	2018	Kurang bayar/Underpayment	19,925	19,925	Banding/Appeal
PPh pasal 4 ayat (2)/Income tax art 4(2)	2018	Kurang bayar/Underpayment	136,071	136,071	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2019	Kurang bayar/Underpayment	-	108,289	Selesai/Completed
PPh pasal 22/Income tax art 22	2020	Kurang bayar/Underpayment	31,808	31,808	Banding/Appeal
PPh Badan/Corporate income tax	2020	Kurang bayar/Underpayment	15,863	-	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2021	Kurang bayar/Underpayment	50,122	50,122	Keberatan/Objection
PPh Badan/Corporate income tax	2022	Lebih bayar/Overpayment	8,918	-	Pemeriksaan/Inspection
HP					
PPh Badan/Corporate income tax	2016	Kurang bayar/Underpayment	-	12,680	Permohonan banding ditolak/Request for appeal rejected
PPh Badan/Corporate income tax	2017	Kurang bayar/Underpayment	12,655	12,655	Banding/Appeal
PPh pasal 22/Income tax art 22	2017	Kurang bayar/Underpayment	122	122	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2017	Kurang bayar/Underpayment	4,891	4,891	Banding/Appeal
PPh Badan/Corporate income tax	2018	Lebih bayar/Overpayment	6,660	-	Banding/Appeal
PPN pemungut/VAT collector	2019	Kurang bayar/Underpayment	-	9,887	Selesai/Completed
PPh Badan/Corporate income tax	2022	Lebih bayar/Overpayment	-	9,467	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh Badan/Corporate income tax	2023	Lebih bayar/Overpayment	15,050	-	Pemeriksaan/Inspection
EPI					
PPh Badan/Corporate income tax	2017	Lebih bayar/Overpayment	-	40,914	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh pasal 15/Income tax art 15	2017	Lebih bayar/Overpayment	5,632	-	Banding/Appeal
PPN/VAT	2020	Lebih bayar/Overpayment	12,503	12,503	Banding/Appeal
PPh Badan/Corporate income tax	2022	Lebih bayar/Overpayment	-	34,823	Selesai/Completed
PPh Badan/Corporate income tax	2023	Lebih bayar/Overpayment	59,189	-	Proses Pemeriksaan/Inspection process
Tarakan					
PPh pasal 21/Income tax art 21	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	1,036	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh pasal 23/Income tax art 23	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	108	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh pasal 4 ayat (2)/Income tax art 4(2)	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	4	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
PPh Badan/Corporate income tax	2017	Kurang bayar/Underpayment	-	8,905	Banding diterima sebagian/Appeal partially granted
Jumlah/Total			21.025.734	17.540.760	
Provisi/provision			(6.885.770)	(4.908.174)	
Jumlah, bersih/Total, net			14.139.964	12.632.586	



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/137 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

c. Tax assessment letters (continued)

Pada tanggal 11 Januari 2023, Perusahaan telah menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") No. KEP-00001/PPH/KPP.1903/2023 tentang Keputusan SKPKB PPh Pasal 4(2) dengan keputusan pengembalian pajak melalui kompensasi SPMKP sebesar Rp238.979 dan penerimaan kas sebesar Rp781.461 untuk masa pajak Desember 2017. Pada tanggal 16 November 2022, DJP telah mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan banding. Selama tahun 2023, Perusahaan telah menerima beberapa Putusan atas Peninjauan Kembali Mahkamah Agung untuk pajak tahun 2017 dan 2018. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, beberapa kasus perpajakan masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung.

On January 11, 2023, the Company received the Tax Overpayment Refund Instruction ("SPMKP") No. KEP 00001/PPH/KPP.1903/2023 concerning the decision on SKPKB Income Tax Article 4(2) with the decision of tax refund through compensating the SPMKP amounting to Rp238,979 and cash receipts amounting to Rp781,461 for the fiscal period December 2017. On November 16, 2022, DJP has submitted the Judicial Review regarding the appeal decision. During 2023, the Company has received several Decrees of Supreme Court Judicial Review for taxes fiscal year 2017 and 2018. Up to the completion date of these consolidated financial statements, several tax cases are still in the process of being examined in the Supreme Court.

Pada tanggal 7 November 2023, Perusahaan menerima Surat Hasil Pemeriksaan Pajak ("SPHP") dari DJP atas pemeriksaan pajak tahun fiskal 2020. Perusahaan telah memberikan tanggapan atas SPHP tersebut pada tanggal 16 November 2023. Kemudian, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dengan jumlah kurang bayar pajak sebesar Rp9.840.654 dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp3.209.536.

On November 7, 2023, the Company received a Tax Audit Result Letter ("SPHP") from the DJP regarding the tax audit for fiscal year 2020. The Company has submitted a response towards the SPHP on November 16, 2023. Afterwards, the Company received a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") with a total tax underpayment amounting to Rp9,840,654 and has made a payment amounting to Rp3,209,536.

Pada tanggal 7 Februari 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp1.753.012 atas SKPKB tahun fiskal 2020. Perusahaan telah menyampaikan surat keberatan atas SKPKB tahun fiskal 2020 kepada DJP pada tanggal 26 Februari 2024.

On February 7, 2024, the Company has made an additional payment of Rp1,753,012 for the SKPKB fiscal year 2020. The Company has submitted objection letters to DJP regarding SKPKB for fiscal year 2020 on February 26, 2024.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp3.073.733 atas SKPKB tahun fiskal 2019.

On October 8, 2024, the Company has made an additional payment of Rp3,073,733 for the SKPKB fiscal year 2019.

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Grup telah menerima pengembalian pajak dari hasil keberatan dan banding untuk tahun fiskal 2016, 2018, 2019, 2022 sebesar Rp334.280 yang terdiri dari pengembalian pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp19.469, PPh Pasal 22 sebesar Rp228.197, PPh Pasal 26 sebesar Rp77.147 dan PPh badan sebesar Rp9.467. Grup menerima pengembalian pajak tersebut melalui penerimaan kas sebesar Rp330.085 dan melalui pemotongan utang pajak sebesar Rp4.195.

During years ended December 31, 2024, the Group received tax refunds from the proceeds of the objections and appeals for fiscal years 2016, 2018, 2019, 2022 amounted to Rp334,280 consisting of tax refunds for underpayment of VAT amounted to Rp19,469, Income Tax Article 22 amounted to Rp228,197, Income Tax Article 26 amounted to Rp77,148 and Corporate Income Tax amounted to Rp9,467. The Group received those tax refunds through cash receipts amounting to Rp330,085 and through a deduction of tax payables amounting to Rp4,195.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/138 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

c. Surat ketetapan pajak (lanjutan)

c. Tax assessment letters (continued)

Pada tanggal 24 Januari 2025 dan 26 Maret 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp1.500.000 atas SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan tahun fiskal 2020.

On January 24, 2025 and March 26, 2025, the Company has made an additional payment of Rp1,500,000 for the SKPKB Corporate Income Tax Art. 25/29 for the fiscal year 2020.

Pada tanggal 9 Januari 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak melalui penerimaan kas atas kelebihan PPh Pasal 26 masa November dan Desember 2019 sebesar Rp760.

On January 9, 2025, the Company has received tax refunds through cash receipts for excess Income Tax art. 26 for the period November and December 2019 amounted to Rp760.

Pada tanggal 21 Januari 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak melalui penerimaan kas atas kelebihan PPh Pasal 4 ayat (2) Desember 2018 sebesar Rp435.992.

On January 21, 2025 the Company has received tax refunds through cash receipts for overpayment of Income Tax art. 4 (2) for the period December 2018 amounted to Rp435,992.

Pada tanggal 10 April 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak melalui pemotongan utang pajak atas kelebihan PPh 4 ayat (2) masa Desember 2019 sebesar Rp1.060.118, PPh Pasal 21 masa Desember 2019 sebesar Rp97.609, dan PPh Pasal 25/29 Badan masa Januari sampai Desember 2019 sebesar Rp27.877.

On 10 April 2025, the Company has received tax refunds through deduction of tax payable for excess Income Tax art. 4 (2) for the period December 2019 amounted to Rp1,060,118, Income Tax Art. 21 for the period December 2019 amounted to Rp97,609, and Corporate Income Tax Art. 25/29 for the period January to December 2019 amounted to Rp27,877.

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi atas ketidakpastian posisi pajak telah mencukupi.

Management believes that the provision against uncertain tax positions is adequate.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Based on the taxation laws in Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax based on self-assessment. The DJP may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

e. Aturan Model Pilar Dua Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD")

e. Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perseroan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dikarenakan PMK-136 belum efektif pada tanggal pelaporan, Grup tidak memiliki eksposur atas pajak kini. Grup menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan terkait pajak penghasilan Pilar Dua, sebagaimana diatur dalam amendemen terhadap PSAK 212 "Pajak Penghasilan" yang diterbitkan pada bulan Desember 2023.

Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules The Ministry of Finance ("MoF") Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025. Since the PMK-136 was not effective at the reporting date, the Group has no related current tax exposure. The Group applies the exception to recognise and disclose information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes, as provided in the amendment to PSAK 212 "income Taxes" issued in December 2023.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/139 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

47. INCOME TAX (continued)

e. Aturan Model Pilar Dua *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD") (lanjutan)

e. *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD") *Pillar Two Model Rules* (continued)

Grup sedang dalam proses menilai apakah mereka termasuk dalam cakupan model Pilar Dua dan terdapat eksposur terhadap PMK-136 saat PMK-136 diberlakukan. Dikarenakan kompleksitas dalam penerapan PMK-136 dan perhitungan pendapatan *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE") dampak PMK-136 yang telah diundangkan belum dapat diperkirakan secara wajar.

The Group is in the process of assessing whether they are within the scope of Pillar Two model and if there is any exposure to the PMK-136 for when PMK-136 comes into effect. Due to the complexities in applying the PMK-136 and calculating *Global Anti-Base Erosion* ("GloBE") income, the quantitative impact of the enacted PMK-136 is not yet reasonably estimable.

48. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

48. EARNINGS PER SHARE BASIC/DILUTED

	2024	2023	
Laba konsolidasian tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	17,705,027	22,025,595	Consolidated profit for the year attributable to the owners
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (dalam ribuan lembar saham)	150,536	146,961	Weighted average number of ordinary shares outstanding (in thousand of shares)
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah penuh)	117,613	149,874	Basic earnings per share attributable to the owners of the parent entity (in full amount of Rupiah)
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.			The Company did not have potential dilutive ordinary shares, therefore basic earnings per share is the same as the dilutive earnings per share.

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2024	2023	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek			Short-term employee benefits liabilities
Bonus dan insentif prestasi kerja	7,429,860	4,250,487	Bonus and performance incentives
Liabilitas pascakerja jangka pendek	3,568,775	3,631,893	Post-employment benefits liability-current portion
Jumlah	10,998,635	7,882,380	Total
	2024	2023	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang			Long-term employee benefits liabilities
Imbalan pascakerja lainnya	17,501,759	14,601,989	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	55,746,191	51,117,646	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	772,966	743,296	Other long-term benefits
Jumlah	74,020,916	66,462,931	Total
Dikurangi: bagian jangka pendek	3,568,775	3,631,893	Less: current portion
Bagian jangka panjang	70,452,141	62,831,038	Long-term portion

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/140 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Beban diakui di laba rugi			Expense recognised in profit
(Catatan 43):			or loss (Note 43):
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun manfaat pasti	102,955	93,920	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	2,246,803	1,955,024	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(4,285,122)	4,733,796	Health care benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>229,851</u>	<u>308,333</u>	Other long-term benefits
Jumlah	<u>(1,705,513)</u>	<u>7,091,073</u>	Total
Pengukuran kembali program			Remeasurement on defined benefit
manfaat pasti diakui di			plan recognised in other
penghasilan komprehensif lain:			comprehensive income:
<u>Imbalan pascakerja</u>			<u>Post-employment benefits</u>
Program pensiun manfaat pasti	103,309	334,441	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	1,874,636	(528,416)	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	<u>10,763,808</u>	<u>(5,529,833)</u>	Health care benefits
Jumlah	<u>12,741,753</u>	<u>(5,723,808)</u>	Total

Kenaikan signifikan pada pengukuran kembali program manfaat pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain sebagian besar disebabkan karena perubahan asumsi keuangan.

The significant increase in remeasurement on defined benefit plans which is recognised in other comprehensive income is mainly due to changes in the financial and demographic assumptions.

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension program

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

The Group established a defined benefit pension program covering all of its eligible permanent employees. This pension plan provides benefits based on basic pension income and the period of employment.

Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

This pension plan is managed by Dana Pensiun PLN ("DP-PLN"), a related party, whose deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-284/KM.17/1997 dated May 15, 1997.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 19,45% dari penghasilan dasar pensiun.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer which are 6.00% and 19.45% from basic pension income, respectively.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Health care benefits

Pada tanggal 31 Desember 2024, telah ditandatangani perjanjian antara PT PLN (Persero) dengan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional terkait dengan pengelolaan fasilitas kesehatan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan dengan jangka waktu di bawah satu tahun.

As of 31 December 2024, PT PLN (Persero) was entered into a one-year insurance agreement with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional related to the health care benefit plans for pensioners and their eligible dependents.

Imbalan pascakerja lainnya

Other post-employment benefits

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

In addition to the pension plan and health care benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/141 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term benefits

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian, dan penghargaan kesetiaan kerja.

The Group also provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit, and loyalty benefits.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

The principal assumptions used in the calculations of post employment benefits obligation

Tabel mortalita

Imbalan pascakerja lainnya	TMI 2019
Program pensiun manfaat pasti	CSO-58 & AMT- 49
Imbalan jangka panjang lainnya	TMI 2019
Imbalan pemeliharaan kesehatan	CSO-58 & AMT- 49
Usia pensiun normal	56 tahun/years

Mortality table
Other post-employment benefits
Defined benefit pension program
Other long-term benefits
Health care benefits
Normal retirement age

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman dari perusahaan dan entitas anak setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan untuk perhitungan imbalan pemeliharaan kesehatan dan dana pensiun adalah tabel mortalita CSO-58 untuk peserta aktif dan AMT-49 untuk peserta pasif. Asumsi mortalitas yang digunakan untuk perhitungan imbalan pascakerja lainnya dan imbalan jangka panjang lainnya adalah tabel mortalita TMI-2019.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used for calculation of health care and pension benefit are based on the CSO-58 mortality table for active employment and AMT-49 for pensioners. The mortality assumptions used for other post-employment and other long-term benefits are based on TMI-2019.

Perhitungan aktuarial atas program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria ("KKA") yang terdaftar, yaitu KKA Indra Catarya Situmeang, dalam laporannya tertanggal 30 April 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang dihitung oleh KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangsan, dalam laporannya tertanggal 1 April 2024.

The actuarial calculations of the pension program, other post-employment benefits, health care benefits, and other long-term benefits for the year ended December 31, 2024 was calculated by a registered Actuarial Consulting Firm ("KKA"), KKA Indra Catarya Situmeang, based on its reports dated April 30, 2025, and for the year ended December 31, 2023 was calculated by KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangsan, based on its reports dated April 1, 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/142 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

i. Program pensiun

i. Pension program

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan sebagai berikut:

The liability recognised in the consolidated statements of financial position is determined as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Nilai kini kewajiban yang didanai	10,908,857	10,408,465	<i>Present value of funded obligations</i>
Nilai wajar aset program	<u>(11,388,020)</u>	<u>(10,919,630)</u>	<i>Fair value of plan assets</i>
Jumlah	(479,163)	(511,165)	<i>Total</i>
Dampak batas atas aset	<u>479,163</u>	<u>511,165</u>	<i>Impact of asset ceiling</i>

**Liabilitas pada laporan
posisi keuangan konsolidasian**

***Liability in the
consolidated statement of
financial position***

Pergerakan kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit pension program obligation over the year is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	10,408,465	10,336,245	<i>Beginning balance</i>
Dibebankan ke laba rugi:			<i>Charged to profit or loss:</i>
Biaya jasa kini	132,588	134,419	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	<u>664,087</u>	<u>696,250</u>	<i>Interest expense</i>
	<u>796,675</u>	<u>830,669</u>	
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurements:</i>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(64,254)	72,094	<i>Loss/(gain) from changes in financial assumptions</i>
Kerugian aktuarial dari perubahan beberapa asumsi	446	-	<i>Actuarial loss from various of changes in assumptions</i>
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	629,590	186,210	<i>Experience loss</i>
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	<u>68,917</u>	<u>-</u>	<i>Loss from change in demographic assumptions</i>
	<u>634,699</u>	<u>258,304</u>	
Pembayaran manfaat	<u>(930,982)</u>	<u>(1,016,753)</u>	<i>Benefit payments</i>
Saldo akhir	<u>10,908,857</u>	<u>10,408,465</u>	<i>Ending balance</i>

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets over the year is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo awal	10,919,630	9,890,942	<i>Beginning balance</i>
Imbal hasil atas aset program	698,856	696,520	<i>Return on plan assets</i>
Iuran pemberi kerja	206,264	873,664	<i>Employer's contributions</i>
Iuran pekerja	28,683	40,229	<i>Employee contributions</i>
Pembayaran manfaat	<u>(930,982)</u>	<u>(1,016,753)</u>	<i>Benefit payments</i>
Kerugian aktuarial pada aset program	<u>465,569</u>	<u>435,028</u>	<i>Actuarial loss on plan assets</i>
Saldo akhir	<u>11,388,020</u>	<u>10,919,630</u>	<i>Ending balance</i>



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/143 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

i. Program pensiun (lanjutan)

i. Pension program (continued)

Mutasi program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the defined benefits pension program are as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	-	445,303	At beginning of the year
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	132,588	134,419	Current service cost
Biaya bunga	664,087	696,250	Interest expense
Bunga atas dampak batas atas aset	33,819	-	Interest in effect of asset ceiling
Iuran pekerja	(28,683)	(40,229)	Employee contributions
Imbalan hasil aset program	(698,856)	(696,520)	Return on plan assets
Iuran pemberi kerja	(206,264)	(873,664)	Employer's contributions
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari:			Actuarial (gain)/loss from changes in:
Asumsi demografis	68,917	-	Demographic assumptions
Asumsi keuangan	(64,254)	72,094	Financial assumptions
Asumsi lainnya	446	-	Other assumptions
Penyesuaian atas pengalaman	629,590	186,210	Experience adjustments
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program	(465,569)	(435,028)	Remeasurement of return on plan assets
Perubahan dampak batas atas aset	(65,821)	511,165	Changes in effect of asset ceiling
Pada akhir tahun	-	-	At the end of the year

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	2024				2023				
	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	%	Dikutip/ Quoted	Tidak dikutip/ Unquoted	Jumlah/ Total	%	
Tabungan dan deposito									Savings and time deposits
Tabungan	-	-	-	0.00%	-	52,066	52,066	0.48%	Saving accounts
Uang jaminan	-	49,257	49,257	0.00%	-	-	-	0.00%	Security deposits
Deposito on call	-	102,770	102,770	0.90%	-	1,700	1,700	0.02%	On call deposits
Deposito berjangka	-	767,400	767,400	6.74%	-	610,550	610,550	5.59%	Time deposits
Instrumen ekuitas									Equity instruments
Saham	416,842	-	416,842	3.66%	461,668	-	461,668	4.23%	Stocks
Penempatan langsung	-	2,106,340	2,106,340	18.50%	-	1,794,114	1,794,114	16.43%	Direct placement
Instrumen utang									Debt instruments
Obligasi	3,527,345	-	3,527,345	30.97%	3,652,453	-	3,652,453	33.45%	Corporate bonds
Sukuk	433,892	-	433,892	3.81%	449,547	-	449,547	4.12%	Sukuk
Unit penyertaan reksa dana	569,093	-	569,093	5.00%	456,684	-	456,684	4.18%	Investment units of mutual funds
Efek beragunan aset	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	Asset backed securities
Surat utang jangka menengah	100,507	-	100,507	0.88%	100,658	-	100,658	0.92%	Medium-term note
Surat Berharga Negara	1,828,146	-	1,828,146	16.05%	1,859,750	-	1,859,750	17.03%	Government securities
Properti									Property
Hak atas tanah	-	126,162	126,162	1.10%	-	126,161	126,161	1.15%	Land rights
Bangunan	-	514,171	514,171	4.52%	-	489,729	489,729	4.48%	Buildings
Tanah dan bangunan	-	588,385	588,385	5.17%	-	573,533	573,533	5.25%	Land and buildings
Lain-lain	-	257,710	257,710	2.26%	-	291,016	291,016	2.67%	Others
Jumlah	6,875,825	4,512,195	11,388,020	100%	6,980,760	3,938,869	10,919,629	100.00%	Total

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	7.03 % - 7.14%	6.61% - 6.87%	Discount rate
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	5.00%	5.00%	Pension benefit increase rate

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/144 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

i. Program pensiun (lanjutan)

i. Pension program (continued)

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp933.804 dan Rp1.610.413. Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Expected contributions to post-employment benefit plans for the years ended December 31, 2024 and 2023 are Rp933,804 and Rp1,610,413, respectively. The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban manfaat pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(159,857)	180,511	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	182,633	(163,244)	Salary growth rate

ii. Imbalan pascakerja lainnya

ii. Other post-employment benefits

Pergerakan kewajiban imbalan pascakerja lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other post-employment benefits obligation over the year is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	14,601,989	14,032,285	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	1,284,657	935,678	Current service cost
Biaya bunga	962,146	1,010,142	Interest expense
Biaya jasa lalu	-	15,901	Past service cost
Imbal hasil atas aset program	-	(6,697)	Return on plan assets
	2,246,803	1,955,024	
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	2,295,557	(1,268,632)	Experience loss/(gains)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(478,315)	740,177	(Gain)/loss from change in financial assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	488	26	Loss from combination of changes in assumptions
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	56,906	13	Loss from change in demographic assumptions
	1,874,636	(528,416)	
Pembayaran manfaat	(1,221,669)	(856,904)	Benefit payments
Saldo akhir	17,501,759	14,601,989	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	6.98% - 7.13%	6.56% - 7.37%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00% - 7.12%	5.00% - 7.12%	Rate of salary increase per annum



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/145 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

ii. Imbalan pascakerja lainnya (lanjutan)

ii. Other post-employment benefits (continued)

Sensitivitas dari imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other post-employment benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan pascakerja lainnya/ Impact on other post-employment benefits			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(1,924,684)	2,321,698	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	2,353,621	(1,988,091)	Salary growth rate

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan

iii. Health care benefit

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi, dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema pensiun manfaat pasti.

The Group operates a number of post-employment health care benefit schemes. The method of accounting, assumptions, and the frequency of valuations are similar to those used for defined benefit pension schemes.

Pergerakan kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the health care benefits obligation over the year is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	51,117,646	53,702,837	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	455,808	860,118	Current service cost
Biaya jasa lalu	(8,203,811)	-	Past service cost
Biaya bunga	3,462,881	3,873,678	Interest expense
	(4,285,122)	4,733,796	
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	15,043,467	2,635,442	Loss from change in financial assumptions
Kerugian/(keuntungan) dari penyesuaian atas pengalaman	(8,787,063)	(8,165,275)	Experience (gains)/losses
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	4,451,531	-	Loss from change in demographic assumptions
Kerugian aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	55,873	-	Loss from combination of changes in assumptions
	10,763,808	(5,529,833)	
Pembayaran manfaat	(1,850,141)	(1,789,154)	Benefit payments
Saldo akhir	55,746,191	51,117,646	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	7.12% - 7.14%	6.77% - 7.60%	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	6.00%	5.35%	Future health cost increase

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/146 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan (lanjutan)

iii. Health care benefit (continued)

Sensitivitas dari imbalan pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the health care benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan pemeliharaan kesehatan/ Impact on health care benefits			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(6,178,824)	7,662,195	Discount rate
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	3,657,816	(8,775,285)	Medical inflation rate

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

iv. Other long-term benefits

Pergerakan kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the other long-term benefits obligation over the year is as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	743,295	724,791	Beginning balance
Dibebankan ke laba rugi:			Charged to profit or loss:
Biaya jasa kini	195,794	188,023	Current service cost
Biaya jasa lalu	(6,663)	-	Past service cost
Biaya bunga	34,295	37,200	Interest expense
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(12,037)	3,965	(Gain)/loss from change in financial assumptions
Kerugian dari penyesuaian atas pengalaman	13,352	79,361	Experience losses
Kerugian yang timbul dari perubahan asumsi demografis	5,129	-	Loss from change in demographic assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari kombinasi perubahan asumsi	(19)	(216)	Gains from combination of changes in assumptions
	<u>229,851</u>	<u>308,333</u>	
Pembayaran manfaat	<u>(200,180)</u>	<u>(289,828)</u>	Benefit payments
Saldo akhir	<u>772,966</u>	<u>743,296</u>	Ending balance

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	6.47% - 7.02%	6.17% - 6.46%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00% - 7.12%	7.12%	Rate of salary increase per annum



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/147 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
(lanjutan)

iv. Other long-term benefits (continued)

Sensitivitas dari imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term benefits			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	(23,200)	24,556	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1%	26,240	(25,171)	Salary growth rate

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program manfaat pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension program and post-employment medical plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Kewajiban program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada Zero Coupon Bond dari Indonesia Government Securities Yield Curve. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve. If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

Grup mengalokasikan investasi aset program ke berbagai jenis instrumen investasi untuk memastikan diversifikasi yang tepat, meminimalkan dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh portofolio. Sementara bagian terbesar dari aset diinvestasikan dalam instrumen utang. Grup juga mengalokasikan dana ke rekening tabungan, deposito berjangka, instrumen ekuitas, dan properti. Grup percaya bahwa instrumen utang memberikan pengembalian jangka panjang terbaik dengan tingkat risiko yang dapat diterima.

The Group allocates its investment plan assets across various types of investment instruments to ensure proper diversification, minimizing the impact of poor performance from any single asset on the entire portfolio. While the largest portion of assets is invested in debt instruments, the Group also allocates funds to savings accounts, time deposits, equity instruments and property. The Group believes that debt instruments provide the best long-term returns with an acceptable level of risk.

Harapan umur hidup

Life expectancy

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

The majority of the plans' obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans' liabilities.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti untuk program pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah 6,46 – 17,24 tahun, 7,13 – 17,89 tahun, 7,14 – 24,42 tahun, dan 2,74 – 6,99 tahun secara berurutan.

The weighted average duration of the defined benefit obligations for the pension program, other post-employment benefits program, healthcare benefits, and other long-term benefits are 6.46 – 17.24 years, 7.13 – 17.89 years, 7.14 – 24.42 years, and 2.74 – 6.99 years, respectively.

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pascakerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan dan/atau PKB.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the Manpower Regulations and/or the CLA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/148 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

49. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Harapan umur hidup (lanjutan)

Life expectancy (continued)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	Antara 1 - 2 tahun/ <i>Between 1 - 2 years</i>	Antara 2 - 5 tahun/ <i>Between 2 - 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jumlah/Total	
Program pensiun manfaat pasti	1,442,009	1,256,926	3,539,176	11,523,029	17,761,140	Defined benefit pension program
Imbalan pascakerja lainnya	1,832,926	1,312,330	3,726,561	69,952,580	76,824,397	Other post-employment benefits
Imbalan pemeliharaan kesehatan	205,685	14,147,812	3,735,192	79,288,020	97,376,709	Health care benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	80,054	323,636	548,196	331,480	1,283,366	Other long-term benefits
Jumlah	3,560,674	17,040,704	11,549,125	161,095,109	193,245,612	Total

50. INFORMASI ARUS KAS

50. CASH FLOWS INFORMATION

a. Transaksi nonkas

a. Non-cash transactions

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group's liabilities arising from investing and financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated statements of cash flows as cash flows from financing activities.

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi dan pendanaan nonkas adalah sebagai berikut:

Supplemental disclosures on non-cash investing and financing activities are as follows:

	2024	2023	
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas:			Non-cash investing and financing activities:
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan melalui utang biaya proyek dan uang muka proyek	8,715,683	8,169,455	Additions to property, plant and equipment and construction in progress through project cost payables and advances for projects
Penambahan aset hak guna melalui utang sewa	3,124,484	5,572,051	Addition of right-of-use assets through lease liabilities
Penambahan piutang pihak berelasi atas piutang dividen	33,989	54,327	Additions of receivables from related parties from dividend receivable
Penambahan piutang pihak berelasi dari kapitalisasi bunga	64,032	26,884	Additions of receivables from related parties through interest capitalisation



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/149 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

50. CASH FLOWS INFORMATION (continued)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2024 and 2023, is as follows:

	2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pembayaran/ Repayments	Perubahan lainnya/ Other changes*)	Saldo akhir/ Ending balance	
Penerusan pinjaman	29,183,428	30,710	(2,949,638)	(227,560)	26,036,940	Two-step loans
Utang kepada lembaga keuangan Pemerintah nonbank	2,222,907	1,355,066	(750,000)	14,834	2,842,807	Non-bank Government financial institution loans
Utang bank	148,822,188	66,871,547	(60,229,180)	1,765,107	157,229,662	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	197,564,833	-	(5,553,934)	7,048,344	199,059,243	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang sewa	12,769,530	3,124,484	(2,933,531)	(64,570)	12,895,913	Lease liabilities
Utang listrik swasta	5,655,807	-	(569,372)	251,999	5,338,434	Electricity purchase payables
Jumlah	396,218,693	71,381,807	(72,985,655)	8,788,154	403,402,999	Total

*) Termasuk perubahan selisih kurs dan amortisasi biaya transaksi

*) Including foreign exchange difference and amortisation of transaction costs

	2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pembayaran/ Repayments	Perubahan lainnya/ Other changes*)	Saldo akhir/ Ending balance	
Penerusan pinjaman	33,184,714	333,848	(2,855,228)	(1,479,906)	29,183,428	Two-step loans
Utang kepada lembaga keuangan Pemerintah nonbank	2,952,823	-	(750,000)	20,084	2,222,907	Non-bank Government financial institution loans
Utang bank	152,410,118	53,905,559	(56,534,467)	(959,022)	148,822,188	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	201,334,421	-	(2,863,200)	(906,388)	197,564,833	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang sewa	12,862,315	5,572,051	(5,556,021)	(108,815)	12,769,530	Lease liabilities
Utang listrik swasta	6,240,746	-	(517,439)	(67,500)	5,655,807	Electricity purchase payables
Jumlah	408,985,137	59,811,458	(69,076,355)	(3,501,547)	396,218,693	Total

*) Termasuk perubahan selisih kurs dan amortisasi biaya transaksi

*) Including foreign exchange difference and amortisation of transaction costs

51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI

51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES

Sifat hubungan berelasi

Nature of related parties

- Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
- Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- Grup mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 9).
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

- The Government, in this case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and SOEs.
- The Company is related to other SOEs owned by the Ministry of Finance.
- The Group has significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 9).
- The Board of Commissioners and Directors are members of the key management of the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/150 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

Nature of related parties (continued)

Below is the list of related parties that engage in transactions with the Group:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	Pemegang saham akhir/ Ultimate shareholder	Penerimaan subsidi listrik dan kompensasi, penerimaan penerusan pinjaman, dan utang kepada pemerintah/ Receipt of electricity subsidy and compensation, two-step loan and Government loans
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, short-term investments, and receipt of bank loans
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, kas dan setara kas, dan penerimaan utang bank/ Placement of restricted cash in banks and time deposits, cash and cash equivalents, and receipt of bank loans
Bank DKI	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
Bank Pembangunan Daerah ("BPD")	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
BTN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
BSI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan penerimaan utang bank/ Placement of cash and cash equivalents and receipt of bank loans
LPEI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang bank/ Receipt of bank loans
PT Indonesia Asahan Aluminium ("Inalum")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ Purchase of fuels and lubricants
PT Pertamina Gas ("Pertagas")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ Purchase of gas
PT Bukit Asam Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar batubara/ Purchase of coal
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian bahan bakar gas/ Purchase of gas



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/151 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup: (lanjutan)

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

Nature of related parties (continued)

Below is the list of related parties that engage in transactions with the Group: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi dan saldo/ Nature of transaction and balance
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan/ Insurance services for the Company's buildings, installation and power plant, transmission equipment and vessels
Perum Jasa Tirta	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
SMI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan utang dari lembaga keuangan pemerintah nonbank/ Receipt of non-bank government financial institution loans
GDE	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
TJK	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
DEB	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
MEB	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
RDM	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
S2P	Entitas asosiasi/Associate	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
IPB	Entitas asosiasi/Associate	Pemberian pinjaman jangka panjang/ Issuance of long-term loans
BDSN	Ventura bersama/Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
Komipo PJB	Ventura bersama/Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
BPI	Ventura bersama/Joint venture	Transaksi pembelian tenaga listrik/ Purchase of electricity
SGPJB	Ventura bersama/Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik/ Issuance of long-term loans and purchase of electricity
PDG	Ventura bersama/Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang/ Issuance of long-term loans
PMSE	Ventura bersama/Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang/ Issuance of long-term loans
REP	Ventura bersama/Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang dan transaksi pembelian tenaga listrik/ Issuance of long-term loans and purchase of electricity
GCL	Ventura bersama/Joint venture	Pemberian pinjaman jangka panjang/ Issuance of long-term loans
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi/ Construction services
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Wika")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Transaksi jasa konstruksi/ Construction services
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa/ Lease
Dana Pensiun PLN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	Sewa/ Lease
Pemerintah Daerah	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Utang lain-lain/ Other payables
Pemerintah Pusat	Entitas yang berhubungan dengan Pemerintah/ Government related entity	Pendapatan usaha lain-lain/ Other revenues

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/152 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

**Rincian transaksi dan saldo dengan pihak
berelasi:**

**Details of transactions and balances with related
parties:**

	Catatan/ Notes	2024		2023		
		Rp	%)	Rp	%)	
Piutang pihak berelasi	10					Receivables from related parties
REP		485,856	0.03	437,855	0.03	REP
SGPJB		440,009	0.03	578,667	0.03	SGPJB
PMSE		139,520	0.01	136,437	0.01	PMSE
GCL		123,836	0.01	58,923	0.00	GCL
PDG		-	-	36,387	0.00	PDG
IPB		-	-	1,411	0.00	IPB
Lain-lain		86,895	0.00	29,733	0.00	Others
Subjumlah		1,276,116	0.08	1,279,413	0.07	Subtotal
Rekening bank dibatasi penggunaannya	11					Restricted cash in banks
Bank Mandiri		87,550	0.00	91,125	0.01	Bank Mandiri
BRI		70,979	0.00	51,089	0.00	BRI
BNI		20,272	0.00	2,643	0.00	BNI
BPD Jatim		283	0.00	-	0.00	BPD Jatim
Subjumlah		179,084	0.00	144,857	0.01	Subtotal
Kas dan setara kas	13					Cash and cash equivalents
BRI		19,121,775	1.08	18,128,073	1.09	BRI
Bank Mandiri		16,691,534	0.94	15,456,094	0.93	Bank Mandiri
BNI		14,248,526	0.80	15,181,633	0.91	BNI
BTN		3,473,404	0.20	1,734,507	0.10	BTN
BSI		1,633,549	0.09	1,178,175	0.07	BSI
Bank DKI		545,683	0.03	710,714	0.04	Bank DKI
Subjumlah		55,714,471	3.14	52,389,196	3.14	Subtotal
Investasi jangka pendek	14					Short-term investments
BRI		943,860	0.05	490,407	0.03	BRI
BNI		31,637	0.00	86,025	0.01	BNI
Bank Mandiri		1,603	0.00	312,824	0.02	Bank Mandiri
Subjumlah		977,100	0.05	889,256	0.06	Subtotal
Piutang usaha	15					Trade receivables
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah		2,648,312	0.15	2,485,622	0.15	Government related entities
Piutang dari Pemerintah	16					Receivables from Government
		43,290,748	2.45	22,446,998	1.34	
Jumlah		104,085,831	5.87	79,635,342	4.77	Total
Penerusan pinjaman	24					Two-step loans
		26,036,940	3.64	29,183,428	4.46	
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah nonbank	25					Government and non-bank Government financial institution loans
SMI		2,842,807	0.40	2,222,907	0.34	SMI
Utang sewa	26					Lease liabilities
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)		1,157,553	0.16	1,138,625	0.17	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Dana Pensiun PLN		889,744	0.12	926,919	0.14	Dana Pensiun PLN
Lain-lain		460,960	0.06	-	0.00	Others
Subjumlah		2,508,257	0.34	2,065,544	0.31	Subtotal

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/153 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

**Rincian transaksi dan saldo dengan pihak
berelasi: (lanjutan)**

**Details of transactions and balances with related
parties: (continued)**

	Catatan/ Notes	2024		2023		
		Rp	%)	Rp	%)	
Utang bank	27					Bank loans
Bank Mandiri		12,620,115	1.78	13,394,567	2.05	Bank Mandiri
BNI		8,538,191	1.20	6,078,834	0.93	BNI
BRI		5,147,814	0.73	7,223,105	1.11	BRI
BTN		5,130,351	0.72	4,830,277	0.74	BTN
BSI		4,613,129	0.65	2,494,067	0.38	BSI
SMI		1,175,917	0.17	1,594,232	0.25	SMI
BPD Papua		273,214	0.04	337,500	0.05	BPD Papua
LPEI		196,656	0.03	374,448	0.06	LPEI
Bank DKI		123,214	0.02	287,500	0.04	Bank DKI
Bank Jateng		21,429	0.00	50,000	0.01	Bank Jateng
BPD Aceh		10,714	0.00	25,000	0.00	BPD Aceh
Bank Kalteng		10,714	0.00	25,000	0.00	Bank Kalteng
Bank Riau		10,714	0.00	25,000	0.00	Bank Riau
Bank Kalbar		10,714	0.00	25,000	0.00	Bank Kalbar
BPD Bali		8,036	0.00	18,750	0.00	BPD Bali
Subjumlah		37,890,922	5.33	36,783,280	5.62	Subtotal
Utang usaha	30					Trade payables
Grup Pertamina		14,089,594	1.98	8,385,952	1.28	Pertamina Group
S2P		2,255,344	0.32	1,988,917	0.30	S2P
PTBA		2,024,175	0.28	1,127,386	0.17	PTBA
SGPJB		1,727,318	0.24	2,131,439	0.33	SGPJB
Lain-lain						Others
Pengendalian melalui Pemerintah						Control through the Government of
Republik Indonesia		994,075	0.14	574,699	0.09	the Republic of Indonesia
Ventura Bersama		1,179,126	0.17	981,167	0.15	Joint ventures
Entitas asosiasi		442,869	0.06	333,969	0.05	Associates
Subjumlah		22,712,501	3.19	15,523,529	2.37	Subtotal
Utang lain-lain	31					Other payables
Pemerintah Daerah		3,180,744	0.45	2,512,403	0.38	Local Government
Wika		361,097	0.05	459,087	0.07	Wika
WK		251,274	0.04	563,090	0.09	WK
Lain-lain		542,970	0.08	29,835	0.00	Others
Subjumlah		4,336,085	0.62	3,564,415	0.54	Subtotal
Biaya masih harus dibayar	33					Accrued expenses
Biaya operasional						Operational charges
Asuransi Perisai Listrik Nasional		3,071,110	0.43	-	-	Asuransi Perisai Listrik Nasional
Bunga dan beban keuangan						Interest and financing charges
Penerusan pinjaman		303,559	0.04	323,010	0.05	Two-step loans
Utang bank						Bank loans
Bank Mandiri		150,316	0.02	144,535	0.02	Bank Mandiri
BNI		101,828	0.01	90,685	0.01	BNI
BSI		65,173	0.01	54,975	0.01	BSI
BTN		53,177	0.01	56,361	0.01	BTN
BRI		45,220	0.01	44,705	0.01	BRI
SMI		2,798	0.00	4,095	0.00	SMI
Utang kepada Pemerintah dan lembaga						Government and non-bank Government
keuangan pemerintah nonbank		2,008	0.00	-	0.00	financial institution loans
LPEI		596	0.00	1,029	0.00	LPEI
Bank DKI		173	0.00	405	0.00	Bank DKI
Lain-lain		473	0.00	737	0.00	Others
Subjumlah		3,796,431	0.53	720,537	0.11	Subtotal
Jumlah		98,123,557	13.80	90,063,640	13.75	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/154 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

**Rincian transaksi dan saldo dengan pihak
berelasi: (lanjutan)**

**Details of transactions and balances with related
parties: (continued)**

	Catatan/ Notes	2024		2023		
		Rp	%*)	Rp	%*)	
Penjualan tenaga listrik	36					Sale of electricity
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah		22,942,416	6.50	22,370,966	6.71	Government related entities
Subsidi listrik Pemerintah	37	77,045,335	100	68,636,731	100.00	Government electricity subsidy
Pendapatan kompensasi	16	100,184,044	100	73,991,897	100.00	Compensation income
Pendapatan usaha lain-lain	38					Other revenues
SGPJB		2,187,194	16.53	1,255,286	12.22	SGPJB
GCL		102,080	0.77	278,520	2.71	GCL
S2P		8,439	0.06	796,864	7.75	S2P
Lain lain		414,447	3.13	658,890	6.41	Others
Jumlah		2,712,160	20.49	2,989,560	29.09	Total
Beban bahan bakar dan pelumas	39					Fuel and lubricants expenses
Grup Pertamina		70,951,238	39.57	58,407,720	35.46	Pertamina Group
PTBA		14,421,176	8.04	14,156,135	8.59	PTBA
Lain-lain		3,110,136	1.74	1,077,822	0.65	Others
Jumlah		88,482,550	49.35	73,641,677	44.70	Total
Beban pembelian tenaga listrik	40					Purchased electricity expenses
S2P		13,671,404	7.65	13,645,080	8.81	S2P
SGPJB		12,242,255	6.85	10,982,860	7.09	SGPJB
PGE		3,827,310	2.14	3,678,905	2.38	PGE
BPI		1,320,789	0.74	1,495,370	0.97	BPI
Lainnya		3,909,051	2.19	4,071,810	2.63	Others
Jumlah		34,970,809	19.57	33,874,025	21.88	Total
Beban pemeliharaan	42					Maintenance expenses
Komipo PJB		277,231	0.88	258,450	0.88	Komipo PJB
Lain-lain		566,534	1.79	528,798	1.79	Others
Jumlah		843,765	2.67	787,248	2.67	Total
Beban usaha lain-lain	44					Other operating expenses
AJI		5,612	0.05	115,425	1.21	AJI
Lain-lain		407,432	3.55	488,210	5.11	Others
Jumlah		413,044	3.68	603,635	6.32	Total
Beban keuangan	45					Finance costs
Utang bank		2,811,682	11.63	2,302,633	10.96	Bank loans
Penerusan pinjaman		864,077	3.54	899,210	4.28	Two-step loans
Instrumen derivatif		(697,013)	(2.85)	378,809	1.80	Derivative instruments
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah nonbank		157,057	0.47	159,811	0.76	Government and non-bank Government financial institution loans
Jumlah		3,135,803	12.79	3,740,463	17.80	Total

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan

*) Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/155 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**Rincian transaksi dan saldo dengan pihak
berelasi: (lanjutan)**

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp191.568 dan Rp151.759.

Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp377.122 dan Rp298.096.

Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Grup ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.

**51. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH
RELATED PARTIES (continued)**

Details of transactions and balances with related parties: (continued)

Total compensation of the Company's Board of Commissioners for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp191,568 and Rp151,759, respectively.

Total compensation of the Company's Board of Directors for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp377,122 and Rp298,096, respectively.

All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represents short-term employee benefits.

Information about the contributions made by the Group to DP-PLN is disclosed in Note 49.

**52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

**52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

As at December 31, 2024 and 2023, the Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	2024				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ Others**)	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	3,059,017,290	662,560,515	41,242,909	1,642,458	Cash and cash equivalents
Piutang pihak berelasi	-	68,400,609	-	-	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	22,523,144,616	62,744,309	-	-	Restricted cash in banks
Investasi jangka pendek	-	836,191	-	-	Short-term investments
Jumlah aset moneter*)	25,582,161,906	794,541,624	41,242,909	1,642,458	Total monetary assets*)
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	133,177,040,109	752,844,441	7,828,598	-	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	11,175,181,496	25,813,155	-	-	Lease liabilities
Utang bank	195,781,121,181	3,125,990,713	1,297,331,124	-	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1,000,000,000	10,188,312,000	1,000,000,000	-	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	-	330,409,956	-	-	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	1,996,565,045	49,893,528	42,197,077	-	Other payables
Utang biaya proyek	3,587,565,217	21,999,332	1,498,341	-	Project cost payables
Utang usaha	-	1,607,318,970	-	16,252,219	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	5,619,522,435	151,766,337	11,085,006	-	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter*)	352,336,995,483	16,254,348,432	2,359,940,146	16,252,219	Total monetary liabilities*)
Liabilitas moneter bersih*)	(326,754,833,577)	(15,459,806,808)	(2,318,697,237)	(14,609,761)	Net monetary liabilities*)
Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	(33,795,599)	(249,784,099)	(39,006,748)	(236,050)	Equivalent in millions of Rupiah
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	(322,822,496)				Net total - in millions of Rupiah

*) Dalam jumlah penuh

**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/156 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM
MATA UANG ASING (lanjutan)**

**52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES
(continued)**

	2023				
	JPY*)	USD*)	EUR*)	Lain-lain/ Others**)	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	2,478,548,665	992,515,957	32,499,673	1,157,691	Cash and cash equivalents
Piutang pihak berelasi	-	80,387,320	-	-	Receivables from related parties
Rekening bank dibatasi penggunaannya	31,519,528,142	61,472,835	-	-	Restricted cash in banks
Investasi jangka pendek	-	48,495,744	-	-	Short-term investments
Jumlah aset moneter*)	<u>33,998,076,807</u>	<u>1,182,871,856</u>	<u>32,499,673</u>	<u>1,157,691</u>	Total monetary assets*)
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Penerusan pinjaman	143,264,058,836	868,745,367	9,455,327	-	Two-step loans
Utang sewa pembiayaan	12,458,102,846	32,333,146	-	-	Lease liabilities
Utang bank	149,568,004,937	4,112,700,597	873,294,663	-	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	19,500,000,000	10,188,312,000	1,000,000,000	-	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	-	366,332,480	-	-	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	3,368,729,242	115,484,762	23,142,706	-	Other payables
Utang biaya proyek	4,096,684,410	25,754,624	1,596,171	-	Project cost payables
Utang usaha	-	1,432,937,142	-	8,478,895	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	<u>5,802,685,833</u>	<u>200,444,199</u>	<u>7,604,152</u>	<u>-</u>	Accrued expenses
Jumlah liabilitas moneter*)	<u>338,058,266,104</u>	<u>17,343,044,317</u>	<u>1,915,093,019</u>	<u>8,478,895</u>	Total monetary liabilities*)
Liabilitas moneter bersih*)	<u>(304,060,189,297)</u>	<u>(16,160,172,461)</u>	<u>(1,882,593,346)</u>	<u>(7,321,204)</u>	Net monetary liabilities*)
Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	<u>(33,205,197)</u>	<u>(249,496,903)</u>	<u>(32,166,555)</u>	<u>(113,032)</u>	Equivalent in millions of Rupiah
Jumlah bersih - dalam jutaan Rupiah	<u>(314,981,687)</u>				Net total - in millions of Rupiah

*) Dalam jumlah penuh

**) Aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara USD dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Assets and liabilities denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rate prevailing at the reporting date

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 23 Mei 2025, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Grup akan mengalami kenaikan sebesar Rp9.213.755 (2023: penurunan sebesar Rp9.385.670 pada tanggal 28 Mei 2024).

If assets and liabilities in foreign currencies as at December 31, 2024 had been translated using the closing rates at issuance of May 23, 2025, the total net foreign currency liabilities of the Group would have been increased by Rp9,213,755 (2023: decreased by Rp9,385,670 at issuance of May 28, 2024).

53. SEGMENT OPERASI

53. OPERATING SEGMENTS

Informasi wilayah geografis

Geographical information

Segmen operasi disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

The operating segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Grup dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif operasi geografis yang terdiri dari Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua.

Management has determined the operating segments based on reports reviewed by the Board of Directors, which has been identified as the Group's chief operating decision maker and which makes strategic decisions. The Board of Directors considers the business operations from the geographical operations consisting of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku and Papua.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/157 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

53. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

53. OPERATING SEGMENTS (continued)

Informasi wilayah geografis (lanjutan)

Geographical information (continued)

Untuk tujuan pelaporan manajemen, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 Grup dibagi dalam operasi geografis Sumatera, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Operasi geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Grup, rinciannya adalah sebagai berikut:

For management reporting purposes, as at December 31, 2024 and 2023 and for the years ended December 31, 2024 and 2023, the Group is divided into the geographical areas of Sumatera, Java Bali and Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, and Maluku and Papua. These geographical operations are the basis on which the Group reports segment information, with the following details:

	2024					
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/ Total
Pendapatan usaha						Revenue
Pendapatan eksternal	102,028,620	1,091,447,933	37,564,631	33,496,408	14,839,772	1,279,377,364
Pendapatan antar segmen	(44,475,745)	(654,001,096)	(17,383,830)	(13,920,495)	(4,215,205)	(733,996,371)
Jumlah pendapatan usaha	<u>57,552,875</u>	<u>437,446,837</u>	<u>20,180,801</u>	<u>19,575,913</u>	<u>10,624,567</u>	<u>545,380,993</u>
Hasil segmen						Segment results
Beban usaha	(47,114,758)	(345,108,280)	(16,870,805)	(16,610,962)	(8,560,169)	(434,264,974)
Beban penyusutan	(6,084,470)	(39,646,956)	(1,906,119)	(1,782,925)	(1,074,543)	(50,495,013)
Labai(rugi) usaha	4,353,647	52,691,601	1,403,877	1,182,026	989,855	60,621,006
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	(944,772)	(4,934,473)	(31,042)	274,778	235,002	(5,400,507)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	359,623	3,069,283	(52,088)	3	-	3,376,821
Penghasilan keuangan	91,691	883,593	985	-	-	976,269
Beban keuangan	(3,212,285)	(19,154,587)	(891,224)	(698,987)	(460,777)	(24,417,860)
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	-	(6,885,770)	-	-	-	(6,885,770)
Beban pajak	(348,400)	(10,095,135)	(63,400)	-	-	(10,506,935)
Labai(rugi) bersih	<u>299,504</u>	<u>15,574,512</u>	<u>367,108</u>	<u>757,820</u>	<u>764,080</u>	<u>17,763,024</u>
Aset segmen						Segment assets
Jumlah aset konsolidasian	224,743,887	1,359,020,011	77,296,033	72,699,296	38,616,039	1,772,375,266
Liabilitas segmen						Segment Liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasian	219,688,276	283,256,532	83,533,068	77,021,137	47,716,018	711,215,031
	2023					
	Sumatera	Jawa Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku & Papua	Jumlah/ Total
Pendapatan usaha						Revenue
Pendapatan eksternal	82,223,685	1,006,804,631	27,592,951	28,013,641	8,355,466	1,152,990,374
Pendapatan antar segmen	(47,466,662)	(581,215,186)	(15,929,051)	(16,171,910)	(4,823,501)	(665,606,310)
Jumlah pendapatan usaha	<u>34,757,023</u>	<u>425,589,445</u>	<u>11,663,900</u>	<u>11,841,731</u>	<u>3,531,965</u>	<u>487,384,064</u>
Hasil segmen						Segment results
Beban usaha	(32,263,019)	(331,837,971)	(11,468,392)	(11,319,529)	(5,980,832)	(392,869,743)
Beban penyusutan	(4,779,066)	(38,173,494)	(1,719,322)	(1,630,242)	(1,012,123)	(47,314,247)
Labai(rugi) usaha	(2,285,062)	55,577,980	(1,523,814)	(1,108,040)	(3,460,990)	47,200,074
(Beban)/penghasilan lain-lain tidak dapat dialokasikan	269,479	6,386,258	148,615	(244,686)	328,760	6,888,426
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	370,572	2,880,413	5,453	-	-	3,256,438
Penghasilan keuangan	-	953,515	-	-	-	953,515
Beban keuangan	(2,835,235)	(16,288,937)	(765,344)	(739,674)	(381,165)	(21,010,355)
Penurunan nilai aset tetap	-	-	-	-	-	-
Cadangan atas ketidakpastian dalam perlakuan pajak	-	(4,908,174)	-	-	-	(4,908,174)
Beban pajak	-	(10,308,466)	-	-	-	(10,308,466)
Labai(rugi) bersih	<u>(4,480,246)</u>	<u>34,292,589</u>	<u>(2,135,090)</u>	<u>(2,092,400)</u>	<u>(3,513,395)</u>	<u>22,071,458</u>
Aset segmen						Segment assets
Jumlah aset konsolidasian	140,494,179	1,402,769,965	50,637,493	50,287,299	26,450,768	1,670,639,704
Liabilitas segmen						Segment Liabilities
Jumlah liabilitas konsolidasian	13,648,191	626,192,593	5,766,766	6,035,528	3,365,227	655,008,305

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/158 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki perjanjian penting sebagai berikut:

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar

Gas

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity *)
Perusahaan				
Kotogasib, Rengat dan Siberida	PHE Jambi Merang	2019 - 2026	BBTUD	5
PLTGU Riau	EMP Bentu	2021 - 2026	BBTUD	40
	Medco EP Grissik	2015 - 2028	BBTUD	20
Sutami dan Tarahan	PGN (FSRU Lampung)	2024 - 2029	BBTUD	s.d 250/up to 250
	Pertamina	2023 - 2025	Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice
	ENI East Sepinggan Ltd.			
	ENI Energy East Sepinggan B.V.			
	Pertamina Hulu Energy East Sepinggan			
	PGN	2019 - 2030	BBTUD	5-6
	Pertamina (LNG)	2018 - 2026	Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice
Luwuk	E&P Tomori	2021 - 2027	BBTUD	5
Melibur	PT Imbang Tata Alam	2020 - 2025	BBTU	711
Jawa Satu Power, Sutami, dan Tarahan	BP Berau (LNG)	2014 - 2035	Kargo/ Cargo	Program pengiriman tahunan/Annual Delivery Program (ADP)
Nunukan	Pertamina EP	2019 - 2025	BBTUD	2
PIP				
Priok	Nusantara Regas	2024 - 2026	Kargo/ Cargo	Sesuai kebutuhan/ Depends on necessity
Cilegon	PLN EPI - PHE OSES	2024 - 2029	BBTUD	5
Grati	Medco Energy Sampang Pty Ltd.	2004 - 2027	BBTUD	Notifikasi JHK/ JHK Notification (TOP 95%)
	Singapore Petroleum Sampang Ltd.			
	Cue Sampang Pty. Ltd. (Gas Sampang)			
	Kangean Energy Indonesia Ltd	2012 - 2028	BBTUD	20-50 (TOP 90%)
	PT Pertamina Gas	2014 - 2033	MMSCFD	s.d/up to 100 (Take or Pay ("TOP") 80)
Keramasan	PT Medco E&P Lematang dan PT Medco E&P Indonesia	2017 - 2027	BBTUD	20 (TOP 90%)
	PEP Keramasan	2021 - 2024**	BBTUD	2.9
Mahakam	Pertamina (Persero)	2022 - 2024**	BBTUD	2022: 8 2023: s.d/up to 11.7 2024: s.d/up to 18.3 (TOP 75% ACQ)
	PT Pertamina Gas (Pertagas)	2018 - 2028	MMSCFD	2020-2028 DRC: 5.333
	Pertamina EP Tanjung Batu	2023 - 2024**	MMSCFD	5

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Sedang dalam proses perpanjangan kontrak/On process of contract extension



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/159 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut: (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Gas (lanjutan)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period
PIP (lanjutan/continued)		
Jambi	Energasindo Heksa Karya	2023 - 2028
Semarang	PT Sumber Petrindo Perkasa	2014 - 2029
	Pertamina Gas Negara JTB	2022 - 2035
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	2021 - 2025
Priok, Cilegon, dan Bali	Pertamina (LNG)	2018 - 2026
	BP Berau (LNG)	2014 - 2035
	Pertamina	2023 - 2025
	ENI East Sepinggan Ltd.	
	Neptune Energy East Sepinggan B.V.	
	Pertamina Hulu Energy East Sepinggan	
Priok dan Cilegon	PGN	2019 - 2030
	PGN (FSRU Lampung)	2024 - 2029
PNP		
Gresik	Pertamina Hulu Energi WMO	2023 - 2027
	PT Saka Energi Indonesia	2011 - 2026
	Kangean Energy Indonesia Ltd.	2008 - 2028
	Petrogas Jatim Utama	2016 - 2025
	PLN EPI - HCML	2024 - 2027
	PT Pertamina Gas	2014 - 2033
	Pertamina Gas Negara JTB	2022 - 2035
Muara Karang	Pertamina Hulu Energi ONWJ	2023 - 2030
Muara Tawar	PT Pertamina EP	2024 - 2026
Arun dan Belawan	Perta Arun Gas	2022 - 2024**
Belawan	PT Pertagas	2015 - 2029
Pekanbaru	PHE Jambi Merang	2022 - 2026
	Transportasi Gas Indonesia	2018 - 2028
Kalselteng	Medco Bangkanai	2016 - 2033
Kaltimra	Medco E&P Indonesia	2022 - 2025
	Pertamina EP	2023 - 2027
Gorontalo	Pertamina	2023 - 2025
	ENI East Sepinggan Ltd.	
	Neptune Energy East Sepinggan B.V.	
	Pertamina Hulu Energy East Sepinggan	

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

As at December 31, 2024, the Group has significant commitments and contingencies, as follows: (continued)

a. Fuel supply agreements (continued)

Gas (continued)

Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity *)
BBTUD	9
BBTUD	40 - 54.5
BBTUD	90 - 100
BBTUD	7.2 - 8.8
Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation
Kargo/ Cargo	Notice
Kargo/ Cargo	Program pengiriman tahunan/ Annual Delivery Program (ADP)
Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation
Kargo/ Cargo	Notice
BBTUD	5-6
BBTUD	s.d/up to 250
BBTUD	15
BBTUD	24.33
BBTUD	30
TBTU	7.3
BBTUD	30
MMSCFD	s.d./up to 100 (Take or Pay "TOP") 80)
BBTUD	90 - 100
TBTU	2,562
MMSCFD	12
BBTUD	Sesuai kebutuhan/ Depends on necessity
MSCF	34,675,000
BBTUD	5
MSCF	16,706,050
BBTUD	20
BBTUD	3
BBTUD	6.3
Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation
Kargo/ Cargo	Notice

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Sedang dalam proses perpanjangan kontrak/On process of contract extension

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/160 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut: (lanjutan)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Gas (lanjutan)

Sektor/ Sector	Pemasok/ Supplier	Periode/ Period	Satuan/ Unit	Kuantitas/ Quantity *)
PNP (lanjutan/continued)				
Sengkang Muara Karang, Muara Tawar, Arun, Belawan, dan Gorontalo	PLN EPI - EEES & EMA BP Berau (LNG)	2023 - 2027 2014 - 2035	BBTU Kargo/ Cargo	47,100 Program pengiriman tahunan/ Annual Delivery Program (ADP)
	Pertamina (LNG)	2018 - 2026	Kargo/ Cargo	Lampiran konfirmasi/ Confirmation Notice 5-6
Muara Karang dan Muara Tawar	PGN	2019 - 2030	BBTUD	
	PGN (FSRU Lampung) Nusantara Regas	2024 - 2029 2024 - 2026	BBTUD BBTUD	s.d/up to 250 Sesuai kebutuhan/ Depends on necessity
PLN Batam				
Multidestinas	PGN	2019 - 2028	BBTUD	61.4
	PGN (FSRU Lampung)	2024 - 2029	BBTUD	s.d/up to 250
	Jadestone	2024 - 2038	BBTUD	21
	Transportasi Gas Indonesia	2022 - 2038	BBTUD	20.5

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Sedang dalam proses perpanjangan kontrak/On process of contract extension

Sehubungan dengan perjanjian diatas, Perusahaan mempunyai fasilitas *stand-by letter of credit* dengan rincian sebagai berikut:

In relation with the above agreements, the Company has stand-by letter of credit facilities with the following details:

Bank penerbit/ Issuing Bank	Penerima manfaat/ Beneficiary	Mata uang/ Currency	Jumlah/ Total *)
BRI	Ophir Indonesia (Sampang) Pty.	USD	14,340,950
	PT Pertamina	USD	39,205,507
	PGN	USD	20,700
	PT Transportasi Gas Indonesia	USD	24,140,240
	Kangean Energy Indonesia	USD	10,495,869
	Petrochina international Jabung Ltd.	USD	5,040,000
Bank Mandiri	BP Berau Ltd.	USD	118,687,684
BNI	PT Petrogas Jatim Utama	Rupiah	103,293,225,000
	PT Pertamina	USD	43,649,970

*) dalam jumlah penuh

*) in full amount



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/161 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

a. Fuel supply agreements (continued)

Batubara

Coal

Pemasok/Suppliers	Volume kontrak tahunan/ Annual contract volume (dalam/in metric ton) *)	Periode/Period
Perusahaan		
PT Multi Harapan Utama	600,000	2021 - 2027
PT Kaltim Prima Coal	500,000	2021 - 2027
PT Kaltim Prima Coal	500,000	2021 - 2027
PT Kaltim Prima Coal	800,000	2023 - 2024**
PT Bharinto Ekatama	603,000	2024 - 2025
PT Indominco Mandiri	536,000	2024 - 2025
PT Bukit Baiduri Energi	200,000	2023 - 2025**
PT Mahakam Sumber Jaya	201,000	2024**
PT Kaltim Prima Coal	2,000,000	2023 - 2025
PT Indominco Mandiri	816,000	2024 - 2025
PT Kaltim Jaya Bara	267,000	2023 - 2024**
PT Bharinto Ekatama	680,000	2024 - 2025
PT Bukit Asam***	19,000,000	2012 - 2032
Kons. PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa***	2,005,000	2008 - 2028
Konsorsium PT Eksploitasi Energi Indonesia dan PT Borneo Indobara***	2,000,000	2022 - 2027
Kons. PT Dwi Guna Laksana & PT Borneo Indo Bara***	1,890,000	2017 - 2033
PT PLN Batubara Niaga***	1,000,000	2024**
PT Indexim Coalindo***	1,100,000	2018 - 2028
Kons. PT Antareja Energi Asia, PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua dan PT Berkas Murah Rejeki***	2,000,000	2022 - 2027
PT Kaltim Prima Coal***	370,000	2024**
Kons. PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa***	5,553,000	2007 - 2027
PT Titan Infra Energy***	2,920,000	2007 - 2033
PT Global Energi Lestari, PT Era Perkasa Mining, dan PT Quasar Inti Nusantara***	2,215,000	2022 - 2027
PT Rizky Anugrah Pratama, PT Kasongan Mining Mills, PT Hutamas Koado, PT Marga Perkasa, PT Arini, dan CV Hirzan***	1,490,000	2022 - 2027
PIP		
PT Bukit Asam	5,200,000	2013 - 2025
PT Oktasan Baruna Persada	2,100,000	2018 - 2026
PT Berau Coal	2,573,000	2009 - 2025
PT Artha Daya Coalindo	2,100,000	2017 - 2027
PT Multi Harapan Utama	1,000,000	2022 - 2026
PT Adaro Indonesia	1,200,000	2024**
PNP		
PT Bukit Asam (Tarahan)	550,000	2004 - 2031
PT Bhumi Rantau Energi	437,500	2024 - 2026
PT Baratabang	800,000	2024 - 2025
PLN Batam		
PT Kideco Jaya Agung	300,000	2007 - 2027
PT PLN Batubara Niaga	300,000	2023 - 2024**

*) Dalam jumlah penuh/In full amount

**) Sedang dalam proses perpanjangan kontrak atau kontrak tahunan/On process of contract extension or annual contract

***) Kontrak pasokan batu bara Perusahaan termasuk pengiriman ke pembangkit yang telah ditransfer ke PNP dan PIP/The Company's coal supply contracts including delivery to power plants that have been transferred to PNP and PIP

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/162 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

a. Fuel supply agreements (continued)

Batubara (lanjutan)

Coal (continued)

Pada tanggal 9 Maret 2018, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Sesuai surat keputusan tersebut, harga batubara ditetapkan sebesar maksimal USD70/metric ton dengan acuan pada kalori 6.322 kcal/kg. Surat keputusan tersebut juga mengatur formula untuk menghitung harga dengan spesifikasi yang berbeda seperti yang tercantum dalam keputusan tersebut. Pada tanggal 26 Desember 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan No. 261 K/30/MEM/2019 mengenai pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Surat keputusan ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 mengenai harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

On March 9, 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 1395 K/30/MEM/2018 regarding the Coal Selling Price for Electricity Supply for The Public Interest, which was retroactively valid from January 1, 2018. According to the decree, the coal price was regulated at a maximum price of USD70/metric ton referenced to coal at 6,322 kcal/kg. The decree also regulated the formula to calculate the price for different specifications of coal as listed in the decree. On December 26, 2019, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Decree No. 261K/30/MEM/2019 regarding the fulfillment of domestic coal needs in 2020, which was effective on January 1, 2020. This decree revokes the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1395K/30/MEM/2018 regarding the selling price of coal for the supply of electricity for public purposes.

Pada tanggal 2 November 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin utama peraturan tersebut yang berkaitan dengan Grup adalah hasil pertambangan batubara termasuk dalam jenis barang yang dikenai PPN, maka seluruh pembelian batubara dikenakan PPN terhitung mulai tanggal tersebut dengan tarif 10%. Sesuai dengan UU HPP yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021, tarif PPN yang akan berlaku per tanggal 1 April 2022 adalah sebesar 11%.

On November 2, 2020, the Minister of Law and Human Rights issued Law No. 11 year 2020 on Job Creation. The main point of the law relating to the Group relates to the inclusion of coal mining products in the types of goods subject to VAT, and therefore all purchases of coal are subject to VAT at 10%. In accordance with the HPP Law which was approved on October 29, 2021, the VAT rate that will be applied as at April 1, 2022 is 11%.

Harga pembelian batubara pada tahun berjalan setelah disesuaikan dengan nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, Ash Fusion Temperature ("AFT") dan Hardgrove Grindability Index ("HGI") berkisar antara Rp340.718 sampai dengan Rp1.680.308 per ton (2023: Rp294.841 sampai dengan Rp1.361.082 per ton).

The price of coal purchases for the current year after being adjusted against calorific value, ash content, sulfur, water, Ash Fusion Temperature ("AFT") and Hardgrove Grindability Index ("HGI") ranges from Rp340,718 to Rp1,680,308 per ton (2023: Rp294,841 to Rp1,361,082 per ton).



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/163 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

a. Fuel supply agreements (continued)

Bahan bakar minyak

Fuel

Perusahaan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 066-1.PJ/040/DIR/2007 tanggal 16 Mei 2007. Perjanjian ini telah diamandemen tanggal 14 Agustus 2009 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

The Company and Pertamina entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 066-1.PJ/040/DIR/2007 dated May 16, 2007. This agreement was amended on August 14, 2009, whereby, the Company and Pertamina agreed among other things: (i) that the monthly fuel price to be used for the period January 1 until April 30, 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore ("MOPS") plus VAT for the period May 1, 2007 until December 31, 2007; (ii) that the fuel price subsequent to December 31, 2007 will be determined by both parties every year; (iii) that the terms of payment and penalty charges on late payment use a monthly rate of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%; (iv) that effective on May 1, 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until April 30, 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than August 31, 2007; (v) that the maximum payables to Pertamina, including bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) that this agreement is valid for five years from January 1, 2007 until December 31, 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen untuk melakukan pengawasan terhadap pengukuran serah terima serta pemeriksaan kualitas bahan bakar minyak yang dibeli oleh PLN dari Pertamina.

Based on the Joint Deal Letter dated May 16, 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor to perform supervision on the delivery measurement and quality inspection of fuel oil purchased by PLN from Pertamina.

Berdasarkan Addendum IV Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 8 Maret 2017, PLN dan Pertamina menyepakati perpanjangan jangka waktu pasokan hingga tahun 2020.

Based on Amendment IV of the Fuel Sale and Purchase Agreement dated March 8, 2017, PLN and Pertamina agreed to extend the period of supply until 2020.

Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 8 Februari 2022, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on Addendum VIII dated February 8, 2022, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from January 1, 2021 to December 31, 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/164 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

a. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

Bahan bakar minyak (lanjutan)

- a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada addendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, formula harga baru akan disepakati untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Perjanjian jual beli bahan bakar minyak dengan Pertamina telah berakhir pada 31 Desember 2023. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak, Perusahaan telah menandatangani perjanjian jual beli bahan bakar minyak baru dengan Pertamina Patra Niaga mulai 1 Januari 2024.

Pada 12 Agustus 2024, Perusahaan telah memperbaharui perjanjian jual beli bahan bakar minyak No. 0026.PJ/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 dengan Pertamina Patra Niaga untuk periode 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024. Atas perjanjian ini sedang dilakukan amandemen untuk perpanjangan atas Kontrak Jangka Panjang Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak. Sebagai dasar pembelian bahan bakar minyak dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Maret 2025, Perusahaan telah menandatangani Kesepakatan Awal No. 0054.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 dan 0011.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2025.

Uap panas bumi

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

Sektor/Sector	Pemasok/Supplier	Periode/ Period
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PGE	2012 - 2040
Lahendong Unit 1	PGE	2002 - 2032
Lahendong Unit 2 & 3	PGE	2007 - 2039
Lahendong Unit 4	PGE	2011 - 2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PGE	2012 - 2042
Hululais Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/years*)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PGE	30 tahun/years*)
Kotamobagu Unit 1,2,3 & 4	PGE	30 tahun/years*)
Darajat Unit 1	PGE, Star Energy Geothermal Darajat I Ltd., Star Energy, Geothermal Darajat II Ltd.	1994 - 2030
Gunung Salak Unit 1,2 & 3	PGE, Star Energy Geothermal Salak Ltd., Ltd., Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.	1993 - 2040

*) Sejak tanggal komersialisasi/Since Commercial Date

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

a. Fuel supply agreements (continued)

Fuel (continued)

- a. During the negotiation period, the new price formula for the period of January 1, 2021 to December 31, 2021, uses the provisional price formula agreed in the amendment for the period of January 1, 2018 to December 31, 2020.
- b. Based on the above situation, a new price formula will be agreed for the period starting from January 1, 2022 to December 31, 2023.

The fuel purchase agreement with Pertamina ended on December 31, 2023. To fulfill the Company's fuel needs, the Company has signed a new fuel purchase agreement with Pertamina Patra Niaga starting January 1, 2024.

On August 12, 2024, the Company renewed the Fuel Sale and Purchase Agreement with Pertamina Patra Niaga No. 0026.PJ/EPI.01.03/PLNEPI0100/2024 for period July 1st, 2024 until September 30, 2024. Amendments are being made to this agreement to extend the Long-Term Fuel Sales and Purchase Agreement. As the basis for purchasing fuel from 1 October 2024 to 31 March, 2025, the Company has signed Heads of Agreement No. 0054.Pj/EPI.01.02/PLNEPI0100/2024 and 0011.Pj/EPI.01.03/PLNEPI0100/2025.

Geothermal steam

As at December 31, 2024 and 2023, the Group entered into geothermal steam purchase agreements with several suppliers as follows:



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/165 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi

Sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan PPA dan ESC dengan IPP skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegotiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PT PLN (Persero) di bawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajiban harga dan disparitas harga jual listrik IPP dan harga jual Perusahaan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Grup dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, perjanjian signifikan antara Grup dengan IPP adalah sebagai berikut:

Sudah beroperasi

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts

Prior to 1997, the Company entered into PPAs and ESCs with large-scale IPPs. In 1999, the Company entered into renegotiation of the PPAs and ESCs through a Working Group on PT PLN (Persero) Special Contract Renegotiation under the direction of the Government. Such renegotiation includes, among other subjects, equalisation in contract conditions, reasonableness of price and disparity of selling price between the IPPs and the Company.

Based on the agreements with certain IPPs, the Group may exercise its option to purchase all of the IPP's rights, title and interest in the projects at any time during the contract period.

As at December 31, 2024, the significant agreements between the Group with IPPs are as follows:

In operation

Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan Bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF (%)	Periode/ Period	Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date
Perusahaan						
PT Bajradaya Sentranusa	PLTA Asahan I	Tenaga Air/ Hydro	180	1,175 GWh/ year	2011 - 2041	18 Januari 2011/ January 18, 2011
PT Malea Energy	PLTA Malea	Tenaga Air/ Hydro	90	474 GWh/ year	2021 - 2051	2 Juli 2021/ July 2, 2021
PT Poso Energy	PLTA Poso	Tenaga Air/ Hydro	515	1,669 GWh/ year	2023 - 2053	7 Februari 2023/ February 7, 2023
PT Tanggamus Electric Power	PLTA Semangka	Tenaga Air/ Hydro	56	278.7 GWh/ year	2018 - 2048	2 Juli 2018/ July 2, 2018
PT UPC Sidrap Bayu Energi	PLTB Sidrap	Angin/Wind	70	Variabel/ Variable	2018 - 2048	5 April 2018/ April 5, 2018
PT Energi Bayu Jeneponto	PLTB Tolo	Angin/Wind	60	Variabel/ Variable	2019 - 2049	14 Mei 2019/ May 14, 2019
PT Bekasi Power	PLTGU Bekasi Power	Gas Pipa/ Gas Pipe	119	90%	2013 - 2033	5 Januari 2013/ January 5, 2013
PT Cikarang Listrindo	PLTGU Cikarang Ekspansi (150 MW)	Gas Pipa/ Gas Pipe	150	72%	2011 - 2031	1 Juni 2011/ June 1, 2011
PT Metaepsi Pejebe Power Generation	PLTGU Gunung Megang (2x40 MW + 1 x30 MW)	Gas Pipa/ Gas Pipe	110	85%	2013 - 2028	8 Juli 2013/ July 8, 2013
PT Jawa Satu Power	PLTGU Jawa-1 Unit 1 & 2	Gas Pipa/ Gas Pipe	1760	60%	2024 - 2049	29 Maret 2024/ March 29, 2024
PT Asrigita Prasarana	PLTGU Palembang Timur (150 MW)	Gas Pipa/ Gas Pipe	150	85%	2005 - 2025	16 Desember 2005/ December 16, 2005
PT Medco Ratch Power Riau	PLTGU Riau (275 MW)	Gas Pipa/ Gas Pipe	275	60%	2022 - 2042	10 Februari 2022/ February 10, 2022
PT Kertanegara Energi Perkasa	PLTGU Senipah (117 MW)	Gas Pipa/ Gas Pipe	117	85%	2021 - 2041	11 Februari 2021/ February 11, 2021
Pertamina dan Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Darajat Unit 2	Panas Bumi/ Geothermal	90	95%	2000 - 2030	1 Februari 2000/ February 1, 2000
Pertamina dan Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Darajat Unit 3	Panas Bumi/ Geothermal	110	95%	2007 - 2037	1 Agustus 2007/ August 1, 2007
PT Geo Dipa Energi	PLTP Dieng	Panas Bumi/ Geothermal	55	95%	2002 - 2032	11 Oktober 2002/ October 11, 2002

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/166 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

Sudah beroperasi (lanjutan)

In operation (continued)

<u>Perusahaan/Company</u>	<u>Proyek/Project</u>	<u>Bahan Bakar/ Fuel</u>	<u>Kapasitas/ Capacity (MW)</u>	<u>AF (%)</u>	<u>Periode/ Period</u>	<u>Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date</u>
Perusahaan (lanjutan/continued)						
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Kamojang Unit 4	Panas Bumi/ Geothermal	60	90%	2008 - 2038	26 Januari 2008/ January 26, 2008
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Lumut Balai	Panas Bumi/ Geothermal	55	90%	2019 - 2049	1 September 2019/ September 1, 2019
PT Supreme Energy Muara Laboh	PLTP Muara Laboh	Panas Bumi/ Geothermal	80	90%	2019 - 2049	16 Desember 2019/ December 16, 2019
PT Geo Dipa Energi	PLTP Patuha	Panas Bumi/ Geothermal	55	95%	2014 - 2044	27 September 2014/September 27, 2014
PT Supreme Energy Rantau Dedap	PLTP Rantau Dedap	Panas Bumi/ Geothermal	86	90%	2021 - 2051	26 Desember 2021/ December 26, 2021
Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Salak Unit 4-6	Panas Bumi/ Geothermal	197	85%	1997 - 2040	10 Oktober 1997/ October 10, 1997
Sarulla Operations Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 1, 2	Panas Bumi/ Geothermal	220	90%	2017 - 2048	2 Oktober 2017/ October 2, 2017
Sarulla Operations Ltd	PLTP Sarulla 1 Unit 3	Panas Bumi/ Geothermal	110	90%	2018 - 2048	3 April 2018/ April 3, 2018
PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi #3	Panas Bumi/ Geothermal	50	90%	2022 - 2052	7 Oktober 2022/ October 7, 2022
PT Sorik Marapi Geothermal Power	PLTP Sorik Marapi #4	Panas Bumi/ Geothermal	50	90%	2023 - 2053	16 Desember 2023/ December 16, 2023
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Ulubelu Unit 3	Panas Bumi/ Geothermal	55	90%	2016 - 2046	26 Juli 2016/ July 26, 2016
PT Pertamina Geothermal Energy	PLTP Ulubelu Unit 4	Panas Bumi/ Geothermal	55	90%	2017 - 2047	25 Maret 2017/ March 25, 2017
Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Wayang Windu Unit 1	Panas Bumi/ Geothermal	110	95%	2000 - 2030	1 Juni 2000/ June 1, 2000
Star Energy Geothermal Ltd	PLTP Wayang Windu Unit 2	Panas Bumi/ Geothermal	110	95%	2009 - 2039	13 Maret 2009/ March 13, 2009
PT Pembangkitan Jawa Bali Masdar Energy	PLTS Terapung Cirata	Surya/Solar	145	Variabel/ Variable	2023 - 2048	13 November 2023/ November 13, 2023
PT Lestari Banten Energi	PLTU Banten (1x625 MW)	Batubara/Coal	625	80%	2017 - 2042	28 Maret 2017/ March 28, 2017
PT Tenaga Listrik Bengkulu	PLTU Bengkulu (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	27 Juli 2020/ July 27, 2020
PT General Energy Bali	PLTU Celukan Bawang (2x125 & 1x130 MW)	Batubara/Coal	380	85%	2015 - 2045	23 September 2015/September 23, 2015
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Cilacap (2x281 MW)	Batubara/Coal	562	80%	2007 - 2037	1 Februari 2007/ February 1, 2007
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Cilacap Ekspansi (1x614 MW)	Batubara/Coal	614	80%	2016 - 2046	10 Juni 2016/ June 10, 2016
PT Cirebon Electric Power	PLTU Cirebon (1x660 MW)	Batubara/Coal	660	80%	2012 - 2042	27 Juli 2012/ July 27, 2012
PT Cahaya Fajar Kaltim	PLTU Embalut Ekspansi (1x50 MW)	Batubara/Coal	50	87%	2014 - 2039	14 Agustus 2014/ Agustus 14, 2014
PT Cirebon Energy Prasarana	PLTU Jawa 1/Cirebon Exp	Batubara/Coal	1000	86%	2023 - 2048	19 Mei 2023/ May 19, 2023
PT Bhimasena Power Indonesia	PLTU Jawa Tengah 1	Batubara/Coal	1900	86%	2022 - 2047	31 Agustus 2022/ August 31, 2022
PT Bhumijati Power	PLTU Jawa-4 (FTP2) (2x1000 MW)	Batubara/Coal	2000	86%	2022 - 2047	30 September 2022/September 30, 2022
PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali	PLTU Jawa-7 Bojonegara (2x1000 MW)	Batubara/Coal	2000	86%	2021 - 2046	8 Juli 2021/ July 8, 2021
PT Sumber Segara Primadaya	PLTU Jawa-8 – Cilacap (1x945 MW)	Batubara/Coal	945	80%	2019 - 2049	9 November 2019/ November 9, 2019
PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2012 - 2042	31 Oktober 2012/ October 31, 2012
PT Bosowa Energi	PLTU Jeneponto Ekspansi (2x125 MW)	Batubara/Coal	250	80%	2018 - 2048	1 April 2018/ April 1, 2018
PT GCL Indo Tenaga	PLTU Kalbar-1 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2021 - 2046	25 Juni 2021/ June 25, 2021
PT Tanjung Power Indonesia	PLTU Kalsel-1 (FTP2) (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2019 - 2044	14 Desember 2019/ December 14, 2019



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/167 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan
kontrak penjualan energi (lanjutan)

Sudah beroperasi (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

b. Power purchase agreements and energy
sales contracts (continued)

In operation (continued)

Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan Bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF (%)	Periode/ Period	Tanggal Operasi komersial/ Commercial Operation Date
Perusahaan (lanjutan/continued)						
PT SKS Listrik Kalimantan	PLTU Kalteng-1 / Kalselteng-1 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	4 November 2020/ November 4, 2020
PT Graha Power Kaltim	PLTU Kaltim-2 (FTP2) (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	31 Maret 2020/ March 31, 2020
PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)	PLTU Kaltim-4 (2x100 MW)	Batubara/Coal	200	80%	2020 - 2045	14 April 2020/ April 14, 2020
PT DSSP Power Kendari	PLTU Kendari-3 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2019 - 2044	28 Oktober 2019/ October 28, 2019
PT Lombok Energy Dynamics	PLTU Lombok Timur (2x25 MW)	Batubara/Coal	50	80%	2017 - 2042	10 April 2017/ April 10, 2017
PT Rekind Daya Mamuju	PLTU Mamuju (2x25 MW)	Batubara/Coal	50	80%	2018 - 2043	18 September 2018/ September 18, 2018
PT Meulaboh Power Generation	PLTU Meulaboh 3 & 4 (2x200 MW)	Batubara/Coal	400	80%	2023 - 2048	31 Desember 2023/ December 31, 2023
PT Bukit Pembangkit Innovative	PLTU MT Banjarsari (2x110 MW)	Batubara/Coal	220	80%	2015 - 2045	30 Juni 2015/ June 30, 2015
PT Indo Ridlatama Power	PLTU MT Kaltim-1 (2x27,5 MW)	Batubara/Coal	55	80%	2018 - 2048	1 Desember 2018/ December 1, 2018
PT Priamanaya Energi	PLTU MT Keban Agung (2x120 MW)	Batubara/Coal	240	80%	2016 - 2046	1 Mei 2016/ May 1, 2016
PT Gou Hua Energi Musi Makmur Indonesia	PLTU MT Simpang Belimbing (2x113,5 MW)	Batubara/Coal	227	80%	2013 - 2043	27 Februari 2013/ February 27, 2013
PT DSSP Power Sumsel	PLTU MT Sumsel-5 (2x150 MW)	Batubara/Coal	300	80%	2016 - 2041	20 Desember 2016/ December 20, 2016
PT Huadian Bukit Asam Power	PLTU MT Sumsel-8	Batubara/Coal	1200	80%	2023 - 2048	7 Oktober 2023/ October 7, 2023
PT Paiton Energy	PLTU Paiton 1 (2x610 MW)	Batubara/Coal	1220	85%	2001 - 2041	1 Januari 2001/ January 1, 2001
PT Jawa Power	PLTU Paiton 2 (2x610 MW)	Batubara/Coal	1220	83%	2000 - 2030	1 November 2020/ November 1, 2020
PT Paiton Energy	PLTU Paiton 3 (1x815 MW)	Batubara/Coal	815	85%	2012 - 2042	18 Maret 2012/ March 18, 2012
PT Gorontalo Listrik Perdana	PLTU Sulbagut-1 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2021 - 2046	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Minahasa Cahaya Lestari	PLTU Sulut-3 (2x50 MW)	Batubara/Coal	100	80%	2021 - 2046	1 Juli 2021/ July 1, 2021
Lainnya		Batubara/Coal	1,215			
PLN Batam						
PT Dalle Energy Batam	PLTG Panaran	Gas/Gas	82	90%	2005 - 2025	1 Desember 2005/ December 1, 2005
PT Mitra Energy Batam	PLTG Panaran	Gas/Gas	56	84%	2004 - 2034	29 Oktober 2004/ October 29, 2004
PT Energi Listrik Batam	PLTG Tanjung Uncang	Gas/Gas	70	85%	2016 - 2036	1 Mei 2016/ May 1, 2016
KSO PT Beringin Mas Powerindo-PT VPower Operation Services-PT Supreme Energi Indonesia	PLTMG Sewa Kabil 50 MW	Gas/Gas	50	65%	2023 - 2028	4 November 2023/ November 4, 2023
PT TJK Power	PLTU Tanjung Kasam	Batubara/Coal	110	85%	2012 - 2042	25 Oktober 2012/ October 25, 2012
PT Maxpower Indonesia	PLTMG Balo	Gas/Gas	50	90%	2024 - 2029	25 April 2024/ April 25, 2024
KSO PT Bagus Karya-PT CNTIC Indonesia	PLTMG Tanjung Uncang	Gas/Gas	60	90%	2024 - 2029	13 September 2024/ September 13, 2024
Lainnya a)			204			
Jumlah			25,925			Total

a) Meliputi kontrak dengan IPP, yang terdiri dari IPP berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batubara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

a) Represents contracts with IPPs, consisting of IPPs which are located in several areas of Indonesia which will use coal, geothermal, and mini hydro for generation with each power plant's capacity less than 50 MW.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/168 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan kontrak penjualan energi (lanjutan)

Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Power purchase agreements and energy sales contracts (continued)

Not yet in operation (development stage)

No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF ^(b) (%)	Periode/ Period ^(a)	Status/ Status
Perusahaan							
1	PT Indo Raya Tenaga	PLTU Jawa-9&10	Batubara/Coal	2.000	86%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/Construction Stage
2	PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia	PLTU MT Sumsel -1	Batubara/Coal	600	80%	2023 - 2053	Tahap Pembangunan/Construction Stage
3	PT North Sumatera Hydro Energy	PLTA Batang Toru	Tenaga Air/Hydro	510	47%	2026 - 2056	Tahap Pembangunan/Construction Stage
4	PT Kerinci Merangin Hidro	PLTA Merangin	Tenaga Air/Hydro	360	41%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
5	PT Sumbangsenergi Sakti Pewali	PLTU MT Sumbagsel-1	Batubara/Coal	300	80%	2024 - 2049	Tahap Pembangunan/Construction Stage
6	PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD)	Rantau Dedap #2	Panas Bumi/Geothermal	134	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
7	Star Energy Geothermal Wayang Windu	Wayang Windu #4	Panas Bumi/Geothermal	120	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
8	PT Sejahtera Alam Energy (SAE)	Baturaden #1	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
9	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa #1	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
10	PT Supreme Energy Rajabasa	Rajabasa #2	Panas Bumi/Geothermal	110	90%	2029 - 2059	Eksplorasi/Exploration
11	PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML)	Muara Laboh #2	Panas Bumi/Geothermal	140	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
12	PT Sintesa Banten Geothermal	Rawadano #2	Panas Bumi/Geothermal	80	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
13	PT Sejahtera Alam Energy (SAE)	Baturaden #2	Panas Bumi/Geothermal	75	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
14	Bali Energy Limited (BEL)	Bedugul #2	Panas Bumi/Geothermal	55	95%	2030 - 2055	Eksplorasi/Exploration
15	Star Energy Geothermal Wayang Windu	Wayang Windu #3	Panas Bumi/Geothermal	60	80%	2026 - 2056	Eksplorasi/Exploration
16	PT Indo Awa Tenaga	Terapung Saguling	Surya/Solar	60	28%	2026 - 2051	Potensi/Potential
17	PT Geo Dipa Energi	Dieng #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
18	PT Geo Dipa Energi	Dieng #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Eksplorasi/Exploration
19	PT Geo Dipa Energi	Dieng #4	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2031 - 2061	Eksplorasi/Exploration
20	Star Energy Geothermal	Gunung Salak #7	Panas Bumi/Geothermal	55	80%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
21	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Hululis #1	Panas Bumi/Geothermal	55	85%	2025 - 2055	Pendanaan/Financing
22	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Hululis #2	Panas Bumi/Geothermal	55	85%	2025 - 2055	Pendanaan/Financing
23	PT Medco Cahaya Geothermal	Ijen #3	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2026 - 2056	Tahap Pembangunan/Construction Stage
24	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Lumut Balai #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Tahap Pembangunan/Construction Stage
25	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Lumut Balai #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Potensi/Potential
26	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Lumut Balai #4	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2024 - 2054	Potensi/Potential
27	PT Geo Dipa Energi	Patuha #2	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2025 - 2055	Tahap Pembangunan/Construction Stage
28	PT Geo Dipa Energi	Patuha #3	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2028 - 2058	Eksplorasi/Exploration
29	PT Geo Dipa Energi	Patuha #4	Panas Bumi/Geothermal	55	75%	2029 - 2059	Potensi/Potential
30	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Sungai Penuh #1	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
31	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	Sungai Penuh #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2028 - 2058	Potensi/Potential
32	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngabel #1	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2027 - 2057	Eksplorasi/Exploration
33	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngabel #2	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2030 - 2057	Potensi/Potential
34	PT Bakrie Damakarya	Telaga Ngabel #3	Panas Bumi/Geothermal	55	90%	2030 - 2057	Potensi/Potential
35	PT Geo Dipa Energi	Dieng #5	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
36	PT Geo Dipa Energi	Dieng #6	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2025 - 2055	Eksplorasi/Exploration
37	PT Sorik Merapi Geothermal Power	Sorik Merapi #5	Panas Bumi/Geothermal	50	90%	2022 - 2051	Eksplorasi/Exploration
38	PT Nusantara Gudian Karangates Indonesia	PLTS Terapung Karangates	Surya/Solar	100	25%	2026 - 2031	Potensi/Potential
39	PT Indo Awa Tenaga Singkarak Lainnya/Others ^(c)	PLTS Terapung Singkarak	Surya/Solar	50 874	25% 	2026 - 2031 	Potensi/Potential
PLN Batam Lainnya/Others			Gas	79			
1	Jumlah			7.052		Total	

- a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 20 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal operasi komersial.
- b) AF = Faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perusahaan.
- c) Meliputi kontrak dengan IPP, yang terdiri dari IPP dalam tahap pembangunan dan IPP dalam tahap pembiayaan PPA yang berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan *mini hydro* dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.

- a) *The agreements are effective from the date of signing, and buying and selling of electricity is valid between 20 to 30 years starting from the commercial operation date.*
- b) *AF = Power supply factor which must be absorbed by the Company.*
- c) *Represents contracts with IPPs, consisting of IPPs under construction and IPPs in the financing stage, and PPAs which are located in several areas of Indonesia which will use coal, geothermal, and mini hydro for generation with each power plant's capacity less than 50 MW.*



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/169 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian jual beli tenaga listrik dan
kontrak penjualan energi (lanjutan)

Belum beroperasi (dalam tahap
pengembangan) (lanjutan)

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

Selain dari perjanjian jual beli tenaga listrik di atas, Grup juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi.

c. Perolehan barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi adalah sebagai berikut:

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

b. *Power purchase agreements and energy
sales contract (continued)*

*Not yet in operation (development stage)
(continued)*

The electricity power price per kWh for gas, MFO, and coal power plants is determined by certain formulas as stated in the agreement which regulates, among other subjects, capital cost recovery, fixed operation and maintenance cost payment, fuel expense and variable operation and maintenance cost payment. For geothermal heat power plants, the electricity power price is determined by a certain formula as stated in the agreement, involving, among other things, Energy Charge and Capacity Charge.

In addition to the above PPAs, the Group also entered into rental agreements that fall into the category of operating leases.

c. *Capital expenditures*

As at December 31, 2024 and 2023, total commitments for capital expenditures based on contracts, which are related to procurement of power plants, transmission and distribution are as follows:

		2024 Jumlah dalam mata uang original/ Amount in original currency*)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent	
Program percepatan				Fast track program
Kontrak pembangkitan	USD	32,668,189	527,820	Power plant contracts
	Rupiah		1,110,065	
			1,637,885	
Kontrak transmisi	Rupiah		42,972	Transmission contracts
Kontrak konstruksi rutin	USD	525,398,420	8,488,862	Regular construction contracts
	EUR	228,818,741	3,849,343	
	JPY	5,904,439,210	610,685	
	Rupiah		24,218,618	
	Lain-lain/Others**)	7,841,413,351	9,929	
			37,177,437	

*) Dalam jumlah penuh

**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/170 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

c. Capital expenditures (continued)

		2023	
		Jumlah dalam mata uang original/ Amount in original currency*)	Setara Rupiah/ Rupiah equivalent
Mata Uang/ Currency			
Program percepatan Kontrak pembangkitan	USD	34,621,335	533,722
	Rupiah		<u>1,142,144</u>
			<u>1,675,866</u>
Kontrak transmisi	Rupiah		<u>68,585</u>
Kontrak konstruksi rutin	USD	587,748,048	9,060,724
	EUR	285,505,302	4,893,424
	JPY	6,843,564,388	749,692
	Rupiah		27,522,179
	Lain-lain/Others**)	7,841,413,351	<u>10,628</u>
			<u>42,236,647</u>

*) Dalam jumlah penuh

**) Perolehan barang modal dalam mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) In full amount

**) Capital expenditures denominated in other foreign currencies are presented as USD equivalents using the exchange rates prevailing at the reporting date

Jumlah diatas adalah diluar dari nilai tersisa pembayaran di muka yang sudah dibayarkan oleh Grup sesuai dengan masing-masing kontrak, yang nantinya akan mengurangi pembayaran di masa depan yang dilakukan oleh Grup.

The above amount excludes the remaining advance payments that have been paid by the Group in accordance with the respective contracts, which then will reduce future payments to be made by the Group.

Program percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Fast track program

Based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 Year 2006 dated July 5, 2006 which was amended by Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 dated December 23, 2009, the Government mandates the Company to build coal-fired PLTUs at 42 locations in Indonesia, which include ten power plants with aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 32 power plants with aggregate capacity of 2,769 MW outside Java - Bali.

Kontrak pembangkitan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perusahaan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Power plant contracts

Until December 31, 2024, the Company has signed 37 EPC contracts, which consist of ten electricity power plants with an aggregate capacity of 7,490 MW in Java - Bali and 27 electricity power plants with an aggregate capacity of 2,489 MW outside Java - Bali. Based on the EPC contracts, the Company is required to pay the contractor a down payment, which is approximately 15% of the contract price and the remaining 85% will be funded through credit facilities from banks.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/171 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

c. Perolehan barang modal (lanjutan)

c. Capital expenditures (continued)

Program percepatan (lanjutan)

Fast track program (continued)

Kontrak pembangkitan (lanjutan)

Power plant contracts (continued)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar uang muka sebesar USD876.217.780 (nilai penuh) dan Rp4.790.016 untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai aset dalam pembangunan (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Until December 31, 2024, the Company has made a down payment amounting to USD876,217,780 (full amount) and Rp4,790,016 for 35 EPC contracts which is recorded as construction in progress (Note 6). The down payments are funded by the proceeds of the issued Guaranteed Notes and withdrawal of credit facilities for the fast track program.

Kontrak transmisi

Transmission contracts

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

Transmission contracts are contracts for upgrading and constructing new transmission and sub-stations in Java and outside Java. These projects are financed by the Company's own funds and withdrawal of credit facilities from banks.

Kontrak konstruksi rutin

Regular construction contracts

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri Perusahaan dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Capital expenditure commitments for regular construction represent project contracts signed for additional electricity generating plants and development of the transmission and distribution network. These projects are financed by the Company's own funds and other external funding through offshore loans, grants and investment projects from the state budget.

d. Fasilitas pinjaman yang belum digunakan

d. Unused loan facilities

Penerusan pinjaman

Two-step loans

Mata uang/Currency	Dalam mata uang original/ In original currency*)	Ekuivalen Rp/ Rp equivalent
USD	608,066,238	9,824,526
JPY	13,871,063,248	1,434,657
Jumlah/Total		11,259,183

*) Dalam jumlah penuh

*) In full amounts

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, fasilitas pinjaman belum digunakan setara Rp11.259.183 dan Rp10.932.783 dikenakan provisi sebesar 0,10% - 0,34% per tahun. Tidak ada lagi fasilitas yang tidak dikenakan provisi. Fasilitas ini berakhir antara tahun 2025 sampai dengan 2028.

As at December 31, 2024 and 2023, the unused facilities equivalent to Rp11,259,183 and Rp10,932,783 bear a provision charge of 0.10% - 0.34% per annum. There is no remaining facilities that do not bear any provision charge. These facilities will expire between 2025 and 2028.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/172 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

d. Fasilitas pinjaman belum digunakan (lanjutan)

d. Unused loan facilities (continued)

Perjanjian pinjaman tidak terkait program percepatan

Loan agreements not related to fast track program

Pada tanggal 31 Desember 2024, rincian fasilitas pinjaman belum digunakan tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

As at December 31, 2024, the details of unused loan facilities not related to fast track program are as follows:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility ^{*)}	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities ^{*)}	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period ^{**) Tahun/Year}
<u>Fasilitas pinjaman dalam USD/USD loan facilities</u>					
1	JBIC	53	5	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
2	PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. A	36	3	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
3	JBIC	214	31	19 Februari 2018/ February 19, 2018	15
4	PLTU Kalselteng 2 Facility Tr. B	112	94	8 Desember 2020/ December 8, 2020	20
5	HSBC	600	244	31 Desember 2021/ December 31, 2021	20
6	ADB 4009-INO - RBL KMP	310	124	10 Februari 2021/ February 10, 2021	20
7	ADB	500	448	7 Mei 2024/ May 7, 2024	20
8	ADB 4164-INO - SREAP Western & Central Java	15	15	7 Mei 2024/ May 7, 2024	20
9	AIIB	48	48	7 Mei 2024/ May 7, 2024	20
	AIIBL0292A - East Java & Bali Power Distribution				
	IBRD				
	IBRD 9557-ID ISLE-1 Program				
	Clean Technology Fund ("CTF")				
	CTF Loan TF0C1477				
	Canada Clean Energy and Forest Climate Fund ("CCEFC")				
	CCEFC Loan TF0C1478				
	Jumlah dalam USD/Total in USD	1.888	1.012		
<u>Fasilitas pinjaman dalam EUR/EUR loan facilities</u>					
1	KfW	85	82	15 Desember 2017/ December 15, 2017	15
2	Power Plant Kumbih	81	17	21 Februari 2018/ February 21, 2018	15
3	BGK	150	147	11 Oktober 2018/ October 11, 2018	15
4	PLTU Lombok FTP-2	225	219	5 September 2019/ September 5, 2019	14
5	KfW	70	69	5 September 2019/ September 5, 2019	14
6	Geothermal Energy Program	85	85	13 Maret 2020/ March 13, 2020	12
7	KfW	255	4	8 Desember 2020/ December 8, 2020	15
8	Bakaru I + II Hydro Power Project	58	58	22 Desember 2022/ December 22, 2022	15
9	KfW	64	64	28 Desember 2023/ December 28, 2023	5
	1000 Islands Renewable Energy for electrification Program				
	Mizuho Bank				
	Riau Peaker - Finnvera Covered Facility				
	KfW 29069 - RBL SNT				
	Sustainable Hydropower Programmer I - Sawangan Hydropower Plant (HPP)				
	RBL SREAP Western and Central Java				
	Jumlah dalam EUR/Total in EUR	1.073	745		

^{*)} Dalam jutaan
^{**)} Termasuk masa tenggang

^{*)} In million
^{**)} Include grace period



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/173 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

**d. Fasilitas pinjaman belum digunakan
(lanjutan)**

d. Unused loan facilities (continued)

Perjanjian pinjaman tidak terkait program
percepatan (lanjutan)

Loan agreements not related to fast track
program (continued)

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek/ Creditor and project funded	Fasilitas maksimum/ Maximum facility*)	Fasilitas pinjaman belum digunakan/ Unused loan facilities*)	Tanggal perjanjian/ Date of agreement	Periode/ Period**)
<u>Fasilitas pinjaman dalam JPY/JPY loan facilities</u>					
1	JBIC PLTU Kalselteng 2	16,939	1,830	20 Juni 2017/ June 20, 2017	15
	Jumlah dalam JPY/Total in JPY	16,939	1,830		
<u>Fasilitas pinjaman dalam Rupiah/Rupiah loan facilities</u>					
1	BRI Bank Loan Capex Sindikasi 2018 PKS 6 - JBT	4,506,787	552,116	14 November 2018/ November 14, 2018	10
2	BRI Kredit Modal Kerja Standby Loan (Revolving)	20,000,000	20,000,000	21 Juni 2024/ June 21, 2024	1
3	BNI (Agen Sindikasi) 11 proyek PLTU dan PLTMG Tahap I	5,071,000	801,941	18 Desember 2019/ December 18, 2019	10
4	BSI (Agen Sindikasi) 4 proyek PLTU dan PLTMG Tahap II	2,846,000	870,358	18 Desember 2019/ December 18, 2019	10
5	BCA (Bilateral) Corporate Loan Facilities BCA 2019 - Revolving	3,000,000	3,000,000	3 Desember 2024/ December 3, 2024	1
6	Bank Danamon Kredit Modal Kerja 2019 - Danamon - Revolving Syariah	2,000,000	2,000,000	12 Desember 2024/ December 12, 2024	1
7	UOB Kredit Modal Kerja 2021 - UOB - Revolving	1,000,000	1,000,000	31 Mei 2024/ May 31, 2024	1
8	HSBC Indonesia Kredit Modal Kerja 2021 - HSBC - Revolving	1,400,000	1,400,000	30 Juni 2024/ June 30, 2024	1
9	Bank Maybank Indonesia Pembiayaan Musyarakah 2022 - Maybank - Revolving	1,000,000	1,000,000	14 Maret 2025/ March 14, 2025	1
10	LPEI Kredit Modal Kerja 2021 - LPEI Revolving	3,500,000	3,500,000	20 Desember 2023/ December 20, 2023	2
11	MUFG Bank Kredit Modal Kerja 2022 - Bank MUFG - Revolving	1,000,000	1,000,000	30 September 2024/ September 30, 2024	1
12	Bank Mandiri Kredit Modal Kerja 2022 - Bank Mandiri - Revolving	300,000	300,000	21 Juni 2024/ June 21, 2024	1
13	PT Bank QNB Indonesia Tbk Kredit Modal Kerja 2022 - Bank QNB - Revolving	500,000	500,000	21 September 2024/ September 21, 2024	1
14	BNI Kredit Modal Kerja 2022 - BNI - Revolving	108,607	108,607	30 Juni 2024/ June 30, 2024	1
15	Bank Permata PLTU Timor 2x5 MW Tahap III	2,750,000	268,146	8 Desember 2022/ December 8, 2022	10
16	Bank Mandiri (Agen Sindikasi) Bank loan Capex Sindikasi 2023 - Konvensional	9,000,000	7,109,020	29 Desember 2023/ December 29, 2023	10
17	BSI Bank Loan Capex Sindikasi 2023 - Syariah	1,000,000	789,891	29 Desember 2023/ December 29, 2023	10
18	PT SMI Bank Loan Capex Bilateral 2023 - Konvensional PT SMI	1,000,000	338,920	29 Desember 2023/ December 29, 2023	10
19	PT SMI Bank Loan Capex Bilateral 2023 - Syariah PT SMI	1,000,000	306,014	29 Desember 2023/ December 29, 2023	10
20	Permata Kredit Modal Kerja 2024 - Bank Permata - Revolving	1,000,000	1,000,000	29 Februari 2024/ February 29, 2024	10
	Jumlah dalam Rupiah/Total in Rupiah	61,982,394	45,845,013		

*) Dalam jutaan

**) Termasuk masa tenggang

*) In million

**) Include grace period

	2024	2023	
Tingkat suku bunga per tahun			Interest rate per annum
Rupiah	4.28% - 7.26%	4.48% - 8.87%	Rupiah
USD	3.91% - 6.04%	2.56% - 8.03%	USD
JPY	0.98% - 4.75%	0.60% - 1.74%	JPY
EUR	0.97% - 3.81%	0.40% - 5.40%	EUR

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/174 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

e. Program operasi dan pemeliharaan

e. Operation and maintenance programs

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perusahaan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

In order to improve and restore the performance of generator units up to a certain level, the Company has entered into Operation and Maintenance Agreements with contractors. The contract payment comprises fixed and variable portions. The contractors have to meet certain targets and will be charged a penalty if these targets are not met. The commitments with the contractors for the fixed portion are as follows:

Pembangkitan/ <i>Power plant</i>	Kontraktor/ <i>Contractors</i>	Nilai kontrak setara/ <i>Contract amount equivalent Rp</i>	Periode/ <i>Period</i>
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	1,017,392	2011 - 2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium/ <i>Consortium of</i> Fortum Service OY & PT Medco Energy	<u>416,612</u>	2005 - 2029
Jumlah		<u>1,433,804</u>	Total

f. Kontinjensi

f. Contingencies

(i) Pada tanggal 29 Agustus 2018, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") sebagai Pemohon melawan PC Muriah Ltd ("PCML") sebagai Termohon 1 dan Perusahaan sebagai Termohon 2 di International Court of Commerce ("ICC"). Permohonan tersebut terkait sengketa Gas Transportation Agreement ("GTA") antara PCML selaku *Shipper*/Penjual, KJG selaku *Transporter*, dan Perusahaan selaku *Offtaker*/Pembeli mengenai kekurangan pembayaran atas biaya transportasi gas ke PLTGU Tambak Lorok dikarenakan volume gas yang dikirim kurang dari volume gas minimum yang disepakati.

(i) *On August 29, 2018, the Company faced an Arbitration Request filed by PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") as the Applicant against PC Muriah Ltd ("PCML") as the first defendant and the Company as the second defendant in the International Court of Commerce ("ICC"). The application is related to the Gas Transportation Agreement ("GTA") dispute between PCML as the Shipper/Seller, KJG as the Transporter, and the Company as the Offtaker/Buyer regarding the underpayment of gas transportation costs to the PLTGU Tambak Lorok since the volume of gas sent is less than the minimum gas volume agreed.*

Pemohon menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018 dan secara alternatif dengan PCML bertanggung jawab atas *Ship or Pay* ("SOP") 2016-2019 senilai USD144.536.677 (nilai penuh) ditambah biaya-biaya (*pre-award* dan *post-award*).

The Applicant demands a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018 and alternatively with PCML being responsible for Ship or Pay ("SOP") for 2016-2019 amounting to USD144,536,677 (full amount) plus costs (pre-award and post-award).

KJG dengan Perusahaan telah menyepakati bahwa KJG membebaskan Perusahaan dari tanggung jawab pembayaran SOP 2016-2019, apapun putusan Majelis ICC. Oleh sebab itu, tidak ada provisi yang perlu diakui berkaitan dengan hal ini.

KJG and the Company have agreed that KJG frees the Company from the responsibility for paying the 2016-2019 SOP, whatever the decision of the ICC Assembly is. Therefore, there is no provision that needs to be recognised in this regard.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/175 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Pada tanggal 14 Juni 2024, Majelis ICC telah memutuskan perkara tersebut yang pada pokok putusannya memenangkan PLN dengan amar putusan antara lain menolak permohonan Pemohon yang meminta pengembalian sejumlah uang yang dipotong oleh Perusahaan dari tagihan Pemohon sejak April 2018. Selain itu, Majelis ICC juga memutuskan PCML untuk membayar KJG senilai USD17.300.000 beserta bunga.

- (ii) Pada tanggal 25 Oktober 2016, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Poe Soe Fang sebagai Penggugat, dalam hal ini juga sebagai Komisaris PT Barito Jaya, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR terkait Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. Penggugat mengajukan ganti rugi atas Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebesar Rp191.386 yang sebelumnya sudah disetujui oleh Tergugat I, Edy Kartono selaku Direktur Utama PT Barito Jaya, sebesar Rp18.321. Penggugat mengajukan tuntutan agar Perusahaan dapat mengganti rugi sebesar Rp191.386 bukan sebesar Rp18.321.

Pada tanggal 23 Oktober 2018, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 1 November 2018, Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 7 Mei 2019.

Perusahaan menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 November 2019.

Pada tanggal 5 September 2023, perkara Banding No. 680/PDT/2023/PT.DKI telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan seluruh gugatan Pemohon Banding (Penggugat) tidak dapat diterima dan hasil putusan banding telah diberitahukan kepada masing-masing pihak.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

On June 14, 2024, the ICC Assembly issued a verdict in which PLN obtained a favorable decision, among other things, the court rejected the Applicant's request to receive a refund of the amount deducted by the Company from the Applicant's invoice since April 2018. Additionally, the ICC also ordered PCML to pay KJG the amount USD17,300,000 plus interest.

- (ii) On October 25, 2016, the Company faced a lawsuit filed by Poe Soe Fang as a Plaintiff and also as the Commissioner of PT Barito Jaya, in the District Court of North Jakarta with register No. 501/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR regarding the Procurement of Land for Construction PLTMG Kalsel Peaker 200 MW. The Plaintiff filed for compensation due to the Procurement of Land for Publics amounting to Rp191,386 that had been previously agreed upon by Defendant I, Edy Kartono as President Director of PT Barito Jaya, amounting to Rp18,321. The Plaintiff submitted the claims in order to obtain the compensation from the Company amounting to Rp191,386 instead of Rp18,321.

On October 23, 2018, the District Court of North Jakarta decided to deny the entire Plaintiff's claim. On November 1, 2018, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of DKI Jakarta and sent the Memorandum of Appeal on May 7, 2019.

The Company submitted the Counter Memorandum of Appeal on November 15, 2019.

On September 5, 2023, the appeal case no. 680/PDT/2023/PT.DKI has been decided by the DKI Jakarta High Court which has permanent inkraacht with a ruling that all the claims of the Appellant (Plaintiff) are inadmissible and the results of the appeal decision have been notified to each party.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/176 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

- (iii) Pada tanggal 7 Juni 2022, Perusahaan menghadapi gugatan yang diajukan oleh Ronny Rotinsulu Tumengkol sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano dengan register No. 172/Pdt.G/2022/PN.Tnn terkait kepemilikan atas tanah di PLTA Tonsea Lama. Penggugat mengajukan ganti rugi sebesar Rp409.560 dan tuntutan bahwa tanah seluas 15.000 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Buku Garisan Tanah Tonsea Lama No. 829 Folio 80 adalah atas nama Almarhum Hendrik Nelwan.

Pada tanggal 5 April 2023, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 April 2023.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Pengadilan Tinggi Manado telah menerbitkan Putusan Banding dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan menyerahkan Memori Kasasi pada 5 September 2023.

Perusahaan menyampaikan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 September 2023. Pada tanggal 2 Mei 2024, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari Penggugat.

- (iv) Pada tanggal 12 Oktober 2023, salah satu anggota Konsorsium dalam Perjanjian Nomor: 1594.PJ/DAN.02.01/DIR/2016 terkait Pembangunan PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW) yakni Hyundai Engineering Co. Ltd ("Hyundai") mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT PLN (Persero) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan perkara register No.46050/X/ARBBANI/2023. Hyundai merupakan bagian dari konsorsium yang dipimpin oleh PT Truba Jaya Engineering, dengan beranggotakan ITOCHU Corporation dan Hyundai.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

- (iii) On June 7, 2022, the Company faced a lawsuit filed by Ronny Rotinsulu Tumengkol as a Plaintiff in the District Court of Tondano with register No.172/Pdt.G/2022/PN.Tnn regarding ownership of land rights in PLTA Tonsea Lama. The Plaintiff filed for losses amounting to Rp409,560 and a demand that the land of 15,000 m2 with proof of ownership of land rights by Land Line Book of Tonsea Lama No. 829 Folio 80 is on behalf of Almarhum Hendrik Nelwan.

On April 5, 2023, the District Court of Tondano decided to declare inadmissible the Plaintiff's claim. On April 26, 2023, the Plaintiff filed an appeal to the High Court of Manado and sent the Memorandum of Appeal on April 26, 2023.

On July 17, 2023, the Jakarta High District Court decided to deny the entire Plaintiff's claim. On August 15, 2023, the Plaintiff filed a cassation to the Supreme Court and submitted a Memorandum of Cassation on September 5, 2023.

The Company submitted its Counter Memorandum of Cassation on September 18, 2023. On May 2, 2024, the Supreme Court decided to deny the Plaintiff's Cassation Application.

- (iv) On October 12, 2023, one of the members of the Consortium in Agreement Number: 1594.PJ/DAN.02.01/DIR/2016 regarding the Construction of PLTU Kalselteng 2 (2x100 MW), namely Hyundai Engineering Co. Ltd ("Hyundai") filed a lawsuit against PT PLN (Persero) through the Indonesian National Arbitration Board ("BANI") with case registration No. 46050/X/ARBBANI/2023. Hyundai is part of a consortium led by PT Truba Jaya Engineering, with ITOCHU Corporation and Hyundai as the members.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/177 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Pada tahun 2022, akibat kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Truba, Perusahaan dan pihak konsorsium pun menyetujui amandemen kontrak No. A.04/2022, yang menyatakan bahwa sisa lingkup pekerjaan Truba dialihkan kepada Hyundai dan perpanjangan waktu atas proyek pun disetujui dari yang sebelumnya target COD di tanggal 20 Juli dan 20 Oktober 2020 menjadi 31 Desember 2023. Pada 17 Mei 2023, terjadi kebakaran di lokasi proyek, sehingga dilakukan amandemen kontrak terkait tambahan pekerjaan atas pemulihan dan pemeliharaan untuk material dan peralatan yang terkena dampak insiden kebakaran.

Hyundai beranggapan bahwa Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalam gugatan ini, Hyundai meminta ganti kerugian terkait biaya yang timbul akibat pengalihan ruang lingkup, perpanjangan waktu kontrak pekerjaan serta biaya yang timbul akibat terjadinya peristiwa kebakaran dengan total tuntutan sebesar Rp2.910.782.

Pada tanggal 24 Juni 2024, putusan terhadap kasus ini telah dibacakan di BANI Dimana PLN memperoleh kepastian yang menyatakan bahwa nilai dari klaim perpanjangan waktu (EOT-1) hanyalah sebesar $\pm 36,34\%$ dari total klaim yang diajukan Hyundai, sehingga Hyundai tidak dapat mempermasalahkan putusan perpanjangan waktu. Perusahaan juga memperoleh kepastian yang menyatakan bahwa klaim EOT-2 yang diajukan Hyundai telah masuk ke dalam nilai kontrak dan klaim tersebut belum dapat diajukan.

- (v) Pada tanggal 8 Agustus 2023, Perusahaan menghadapi gugatan Nomor 46033/VIII/ARB-BANI/2023 yang diajukan oleh PT Truba Jaya Engineering ("Truba") di BANI terkait proyek pembangunan PLTMG Paket 2. Truba mengklaim bahwa atas keterlambatan proyek yang terjadi disebabkan kesulitan keuangan yang salah satunya disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran tagihan oleh Perusahaan.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

In 2022, due to the financial difficulties faced by Truba, the Company and the consortium agreed to contract amendment No. A.04/2022, which states that the remaining scope of work for Truba was transferred to Hyundai and an extension of time for the project was approved from the previous COD target of July 20 and October 20, 2020 to December 31, 2023. On May 17, 2023, a fire accident occurred at the location project, so that contract amendments were made regarding additional work on recovery and maintenance for materials and equipment affected by the fire incident.

Hyundai believes that the Company has committed an unlawful act, hence in this lawsuit, Hyundai is asking for compensation related to costs arising from the transfer of scope, extension of work contract time and costs arising from a fire incident with a total demand of Rp2,910,782.

On June 24, 2024, the decision on this case was read at BANI where PLN had obtained certainty stating that the extension of time (EOT-1) value claimable was only $\pm 36.34\%$ of the total extension of time claim submitted by Hyundai, therefore Hyundai could no longer dispute the extension of time decision. Furthermore, the Company also received certainty which stated that the EOT-2 claim submitted by Hyundai had already been included in the contract value and this claim could not yet be submitted.

- (v) On August 8, 2023, the Company received a lawsuit Number 46033/VIII/ARB-BANI/2023 filed by PT Truba Jaya Engineering ("Truba") at BANI regarding the PLTMG Package 2 construction project. Truba claims that the project delays occurred due to financial difficulties, one of which was caused by a delay in payment of invoice by the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/178 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Truba mengajukan permohonan arbitrase (konvensi) dan menuntut Perusahaan sebesar Rp250.980. Di sisi lain, Perusahaan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Truba karena Perusahaan berpandangan Truba telah melakukan wanprestasi yang ditunjukkan dengan tidak dapat terselesaikannya proyek ini. Pada tanggal 31 Januari 2024, putusan terhadap kasus ini telah dibacakan secara lisan di BANI dengan amar putusan konvensi menyatakan bahwa Perusahaan harus membayar kepada Truba atas tagihan pembayaran progress pekerjaan sebesar Rp39.139. Amar putusan rekonvensi menyatakan bahwa Perjanjian PLTMG Paket 2 berakhir karena pemutusan dengan alasan Truba telah melakukan wanprestasi serta Truba memiliki kewajiban untuk membayar kepada Perusahaan sebesar Rp43.332. Pada tanggal 27 Februari 2024, putusan ini telah selesai didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No. 02/ARB/HKM/2024/PN.Jak.Sel.

Pada tanggal 28 Maret 2024, Truba mengajukan pencabutan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No. 316/Pdt.Sus-Arbt/2024/PN.Jkt.Sel. Namun pada 22 Mei 2024, Truba menarik pencabutan permohonan pembatalan putusan BANI tersebut.

- (vi) Pada tanggal 12 November 2024, Perusahaan menghadapi Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Boustead Maxitherm Industries ("BMI") sebagai Pemohon melawan Perusahaan sebagai Termohon 1 dan PT Modern Widya Tehnical ("MWT") sebagai Termohon 2 di International Court of Commerce ("ICC") terkait proyek pembangunan PLTU 2 Papua. Dalam permohonannya, BMI mengajukan beberapa klaim yaitu: (i) bahwa Perusahaan terlambat dalam melakukan serah terima lahan, (ii) Perusahaan terlambat dalam melakukan pembebasan lahan untuk lokasi jetty, (iii) Perusahaan gagal dalam menyediakan listrik yang stabil selama uji coba *reliability run*, (iv) Perusahaan gagal menerbitkan *Taking Over Certificate* (TOC) untuk kedua unit seperti yang dipersyaratkan dalam kontrak dan (v) Perusahaan telah mencairkan Bank Garansi BMI secara melawan hukum. Jumlah klaim yang diajukan BMI yaitu sebesar Rp203.795.009.232 dan USD 6.174.066.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

Truba submitted a request for arbitration (convention) and sued the Company for Rp250,980. On the other hand, the Company filed a counterclaim (reconvention) against Truba as the Company was of the view that Truba had committed a breach of contract as demonstrated by the failure to complete this project. On January 31, 2024, the decision in this case was read orally at BANI with the convention ruling stating that the Company must pay Truba the invoice for payment of work progress amounting to Rp39,139. The reconvention decision stated that the PLTMG Package 2 Agreement ended due to termination on the grounds that Truba had defaulted and Truba had an obligation to pay the Company Rp43,332. On February 27, 2024, this decision had been registered in South Jakarta District Court with register No. 02/ARB/HKM/2024/ PN.Jak.Sel.

On March 28, 2024, Truba filed a petition to annul BANI's decision to the South Jakarta District Court with register No. 316/Pdt.Sus-Arbt/2024/PN.Jkt.Sel. However, on May 22, 2024, Truba had revoked the petition to annul BANI's decision.

- (vi) On November 12, 2024, the Company faced a request for Arbitration filed by PT Boustead Maxitherm Industries ("BMI") as the Claimant against the Company as the 1st Respondent and PT Modern Widya Tehnical ("MWT") as the 2nd Respondent at the International Court of Commerce ("ICC") regarding the PLTU 2 Papua construction project. In its application, BMI submitted several claims, namely: (i) that the Company was late in conducting land handover, (ii) the Company was late in conducting land acquisition for the jetty location, (iii) the Company failed to provide stable electricity during the reliability run test (RR Test), (iv) the Company failed to issue Taking Over Certificate (TOC) for both units as required in the contract and (v) the Company has unlawfully liquidated the Bank Guarantee of BMI. The amount of claims submitted by BMI amounted to Rp203,795,009,232 and USD 6,174,066.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/179 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN
KONTINJENSI (lanjutan)**

f. Kontinjensi (lanjutan)

Atas permohonan arbitrase tersebut, pada tanggal 14 Februari 2025, Perusahaan telah memberikan tanggapan atas Permohonan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penunjukan *co-arbiter*. Sampai saat ini, proses ICC sedang dalam tahap penyusunan Kerangka Acuan ("TOR") oleh Arbiter, dimana penyusunan TOR diberikan tenggat waktu hingga 30 Juni 2025.

(vii) Grup juga menghadapi gugatan ganti rugi dalam jumlah yang tidak material di beberapa lokasi bangunan jaringan transmisi atau distribusi, perselisihan dengan karyawan, perkara dengan pelanggan dan pemasok. Terhadap gugatan yang tidak material tersebut, manajemen menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen berpendapat klaim-klaim tersebut tidak material dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha Grup.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, atas litigasi-litigasi yang masih dalam proses tersebut, belum dapat diestimasi secara andal dan manajemen berpendapat bahwa Grup memiliki dasar yang kuat dalam perkara tersebut, sehingga penyisihan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian ini cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian di masa yang akan datang.

**54. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)**

f. Contingencies (continued)

Upon the request for arbitration, on February 14, 2025, the Company has responded to the Request and followed up with the appointment of *co-arbiter*. Currently the ICC process is in the stage of preparing the Terms of Reference ("TOR") by the Arbitrator, where the deadline for preparing the TOR is by June 30, 2025.

(vii) The Group is also facing claims for compensation in immaterial amounts at several transmission or distribution network building locations, disputes with employees, cases with customers and suppliers. Regarding immaterial claims, management follows up in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Management believes that these claims are not material and do not affect the Group's business activities.

As of the completion date of these consolidated financial statements, the litigation that is still in process cannot be estimated reliably and management is of the opinion that the Group has a strong basis in these cases, so that the allowance for losses recorded in these consolidated financial statements is sufficient to cover possible future losses.

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL**

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek sebesar Rp143.002.650 (2023: Rp116.125.129) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset derivatif yang diklasifikasikan oleh Grup sebagai instrumen keuangan derivatif yang dicatat pada laba rugi sebesar Rp1.123.550 (2023: Rp6.258).

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT**

a. Categories and classes of financial instruments

As at December 31, 2024 and 2023, the Group classified its cash and cash equivalents, trade receivables, receivables from Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short-term investments amounting to Rp143,002,650 (2023: Rp116,125,129) as financial assets at amortised cost and derivative assets were classified by the Group as derivative financial instruments through profit or loss amounting to Rp1,123,550 (2023: Rp6,258).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/180 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**a. Kategori dan klasifikasi instrumen
keuangan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, uang jaminan langganan, utang biaya proyek, utang penerusan pinjaman, utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah nonbank, utang sewa, utang bank, utang obligasi dan sukuk ijarah, utang listrik swasta, dan utang lain-lain sebesar Rp516.099.664 (2023: Rp492.945.917) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas derivatif yang diklasifikasikan oleh Grup sebagai instrumen keuangan derivatif yang dicatat pada laba rugi sebesar Rp61.781 (2023: Rp201.359).

b. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman (Catatan 24, 25, 26, 27, 28 dan 29) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 21), saldo laba, dan tambahan modal disetor (Catatan 22).

Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Batasan pinjaman Grup mensyaratkan antara lain pemenuhan rasio pinjaman terhadap ekuitas dan rasio kecukupan modal. Manajemen secara berkala memonitor persyaratan tersebut untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam batasan pinjaman Perusahaan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya pinjaman sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan melalui utang selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

**a. Categories and classes of financial
instruments (continued)**

As at December 31, 2024, the Group classified its trade payables, accrued expenses, customer security deposits, project cost payables, accrued expenses, two-step loans, Government and non-bank Government financial institution loans, lease liabilities, bank loans, bonds payable and sukuk ijarah, electricity purchase payables, and other payables amounting to Rp516,009,664 (2023: Rp492,945,917) as financial liabilities carried at amortised cost and derivative liabilities were classified by the Group as derivative financial instruments through profit or loss amounting to Rp61,781 (2023: Rp201,359).

b. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of debt (Notes 24, 25, 26, 27, 28 and 29) and equity attributable to owners of the parent consisting of capital stock (Note 21), retained earnings, and additional paid-in capital (Note 22).

Board of Directors of the Group periodically review the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group's loan covenants require among other things, the fulfillment of a certain debt to equity ratio and capital adequacy ratio. Management regularly monitors such requirements to ensure that there are no defaults on the loans of the Company.

The Group aims to minimise the cost of debt in order to maximise its value. Therefore, in its financing policies, the Group always takes into account the financial risk that may arise in the future.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/181 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan**

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Direktorat Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Grup. Direktorat ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup.

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

**c. Financial risk management objectives and
policies**

The objectives and policies of the Group's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within defined policies approved by the Directors.

In managing those risks, the Group established a Directorate of Risk Management which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guidelines and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The directorate is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management.

The Group has established a risk taxonomy by dividing risk into five categories, such as strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/182 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Terkait dengan risiko keuangan, Grup telah menetapkan kebijakan manajemen untuk melakukan transaksi lindung nilai. Sebagai salah satu BUMN, kebijakan manajemen yang telah disetujui menjadi sangat penting agar tidak timbul masalah pada waktu pelaksanaan akuntansi lindung nilai tersebut. Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs Bloomberg pada tanggal laporan. Aset dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi dari kontrak derivatif. Kontrak derivatif Grup diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada FVTPL. Transaksi ini semata-mata dimaksudkan untuk memitigasi risiko nilai tukar, tidak untuk diperdagangkan, dan memastikan ketersediaan likuiditas valas untuk pembayaran sebagian kewajiban valas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1-3 bulan pada periode pelaporan Grup. Lihat Catatan 3 untuk kebijakan akuntansi untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan untuk klasifikasi instrumen keuangan. Grup tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas transaksi-transaksi tersebut.

Related to financial risks, the Group has established management's policy related to hedging transactions. As a SOE, the approved management policy is very important in order to avoid any issues that may arise during the implementation of such hedging programs. All derivative instruments are recognised in the consolidated statement of financial position at their fair values. Fair value is determined based on market value using the Bloomberg rate at the reporting date. Derivative assets or liabilities are presented as the amount of unrealised gain or loss from derivative contracts. The Group's derivative contracts are classified as financial assets measured at FVTPL. These transactions are solely intended for mitigating foreign exchange risk, not for trading and ensuring the availability of foreign currency liquidity for principal and interest payments due in the 1-3 months of the Group's reporting period. Refer to Note 3 for the accounting policy of financial assets and liabilities for the financial instruments classification. The Group does not apply hedge accounting on those transactions.

Risiko pasar

Market risk

Manajemen risiko mata uang asing

Foreign currency risk management

Grup memiliki banyak transaksi dan sumber pendanaan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

The Group undertakes many transactions and funding sources denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations.

Grup telah melakukan diskusi dengan Bank Indonesia ("BI") untuk mendapatkan pemahaman komprehensif atas keadaan pasar. Grup kemudian akan mempertimbangkan keadaan pasar ke dalam proyeksi keuangan internal mereka dan mengembangkan strategi yang telah disetujui bersama untuk memitigasi eksposur risiko mata uang asing dengan membeli instrumen mata uang asing yang dibutuhkan disaat yang tepat.

The Group holds regular discussions with Bank Indonesia ("BI") to get a comprehensive understanding of the market outlook. The Group then incorporates this outlook into its internal financial forecasts and develops a concerted strategy to mitigate its foreign currency exposure by purchasing the required foreign currency denominated instruments at the right time.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 52.

The Group's foreign currency exposure as at the reporting date is disclosed in Note 52.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/183 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and policies (continued)

Risiko pasar

Market risk

Sensitivitas mata uang asing

Foreign currency sensitivity

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax*)							
	2024							
	USD		JPY		EUR		Lain-lain/Others**)	
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%
Aset keuangan								
Piutang pihak berelasi	86,202	(86,202)	-	-	-	-	-	-
Rekening bank dibatasi penggunaannya	79,073	(79,073)	181,703	(181,703)	-	-	-	-
Kas dan setara kas	834,989	(834,989)	24,678	(24,678)	54,118	(54,118)	2,070	(2,070)
Investasi jangka pendek	1,054	(1,054)	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset keuangan	1,001,318	(1,001,318)	206,381	(206,381)	54,118	(54,118)	2,070	(2,070)

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman

**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation

**) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/184 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Foreign currency sensitivity (continued)

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. Kenaikan dan penurunan 10% menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing. (lanjutan)

The following table explains the details of the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in Rupiah against the relevant foreign currencies. This 10% increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible changes in foreign currency rates considering the current economic conditions. The sensitivity analysis includes after tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates. (continued)

Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax*)									
2024									
USD			JPY		EUR		Lain-lain/Others**)		
10%	-10%		10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Liabilitas keuangan									Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(948,769)	948,769	(1,074,390)	1,074,390	(10,272)	10,272	-	-	Two-step loans
Utang sewa	(32,531)	32,531	(90,154)	90,154	-	0	-	-	Lease liabilities
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(3,939,517)	3,939,517	(1,579,441)	1,579,441	(1,702,320)	1,702,320	-	-	Bank loans and medium term notes
Utang obligasi dan sukuk ijarah	(12,839,779)	12,839,779	(8,067)	8,067	(1,312,171)	1,312,171	-	-	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	(416,398)	416,398	-	-	-	-	-	-	Electricity purchase payables
Utang lain-lain	(62,878)	62,878	(16,107)	16,107	(55,370)	55,370	-	-	Other payables
Utang biaya proyek	(27,725)	27,725	(28,942)	28,942	(1,966)	1,966	-	-	Project cost payables
Utang usaha	(2,025,617)	2,025,617	-	-	-	-	(20,482)	20,482	Trade payables
Biaya masih harus dibayar	(191,263)	191,263	(45,335)	45,335	(14,545)	14,545	-	-	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	(20,484,477)	20,484,477	(2,842,436)	2,842,436	(3,096,644)	3,096,644	(20,482)	20,482	Total financial liabilities
Jumlah - bersih	(19,483,159)	19,483,159	(2,636,055)	2,636,055	(3,042,526)	3,042,526	(18,412)	18,412	Total - net

^{*)} Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
^{**)} Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

^{*)} Not considering the effect of borrowing cost capitalisation
^{**)} Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/185 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and
policies (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

Foreign currency sensitivity (continued)

Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax*)							
2023							
USD		JPY		EUR		Lain-lain/Others**)	
10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%
Aset keuangan							
Piutang pihak berelasi	96,806	(96,806)	-	-	-	-	-
Rekening bank dibatasi penggunaannya	74,028	(74,028)	268,485	(268,485)	-	-	-
Kas dan setara kas	1,195,229	(1,195,229)	21,112	(21,112)	43,313	(43,313)	1,394
Investasi jangka pendek	58,401	(58,401)	-	-	-	-	(1,394)
Jumlah aset keuangan	1,424,464	(1,424,464)	289,597	(289,597)	43,313	(43,313)	1,394
Liabilitas keuangan							
Penerusan pinjaman	(1,046,180)	1,046,180	(1,220,333)	1,220,333	(12,601)	12,601	-
Utang sewa	(38,937)	38,937	(106,119)	106,119	-	-	-
Utang bank dan surat utang jangka menengah	(4,952,687)	4,952,687	(1,274,030)	1,274,030	(1,163,867)	1,163,867	-
Utang obligasi dan sukuk ijarah	(12,269,193)	12,269,193	(166,102)	166,102	(1,332,731)	1,332,731	-
Utang listrik swasta	(441,153)	441,153	-	-	-	-	-
Utang lain-lain	(139,072)	139,072	(28,695)	28,695	(30,843)	30,843	-
Utang biaya proyek	(31,015)	31,015	(34,896)	34,896	(2,127)	2,127	-
Utang usaha	(1,725,603)	1,725,603	-	-	-	-	(10,211)
Biaya masih harus dibayar	(241,383)	241,383	(49,428)	49,428	(10,134)	10,134	-
Jumlah liabilitas keuangan	(20,885,223)	20,885,223	(2,879,603)	2,879,603	(2,552,303)	2,552,303	(10,211)
Jumlah - bersih	(19,460,759)	19,460,759	(2,590,006)	2,590,006	(2,508,990)	2,508,990	(8,817)

Financial assets
Receivables from related parties
Restricted cash in banks
Cash and cash equivalents
Short-term investments

Financial liabilities
Two-step loans
Lease liabilities
Bank loans and medium term notes
Bonds payable and sukuk ijarah
Electricity purchase payables
Other payables
Project cost payables
Trade payables

Total financial liabilities

Total - net

*) Tidak memperhitungkan efek atas kapitalisasi biaya pinjaman
**) Mata uang asing lainnya disajikan dalam jumlah setara USD menggunakan kurs tanggal pelaporan

*) Not considering the effect of borrowing cost capitalisation
**) Other foreign currencies are presented as USD equivalent using the exchange rates prevailing at reporting date

Manajemen risiko tingkat suku bunga

Interest rate risk management

Grup memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang terekspos terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup dengan risiko suku bunga nilai wajar. Grup mengelola risiko dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

The Group has transactions at fixed and floating interest rates. Transactions at floating interest rates are exposed to cash flows interest rate risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Group to fair value interest risk. The Group manages the risk by maintaining an appropriate mix of fixed and floating rate borrowings.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/186 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL**
(lanjutan)

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT** (continued)

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan** (lanjutan)

**c. Financial risk management objectives and
policies** (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

Sensitivitas tingkat suku bunga

Interest rate sensitivity

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan, terutang sepanjang tahun. Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin ("bp") pada tingkat bunga yang relevan dengan variabel lain dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 bp merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax outstanding at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the end of the reporting year was outstanding for the whole year. The sensitivity analysis uses an assumption of a 50 basis point ("bp") increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. A 50 bp increase or decrease represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax		
	2024		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	239,196	(239,196)	Cash and cash equivalents
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	13,737	(13,737)	Restricted cash in banks and time deposits
Investasi jangka pendek	3,840	(3,840)	Short-term investments
Subjumlah laba/(rugi)	256,773	(256,773)	Subtotal income/(loss)
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Penerusan pinjaman	(101,544)	101,544	Two-step loans
Utang bank	(613,196)	613,196	Bank loans
Subjumlah (rugi)/laba	(714,740)	714,740	Subtotal (loss)/income
Total (rugi)/laba	(457,967)	457,967	Total (loss)/income

	Dampak terhadap laba setelah pajak/ Effect to profit after tax		
	2023		
	+ 50 bp	- 50 bp	
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan setara kas	218,053	(218,053)	Cash and cash equivalents
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	17,679	(17,679)	Restricted cash in banks and time deposits
Investasi jangka pendek	3,563	(3,563)	Short-term investments
Subjumlah laba/(rugi)	239,295	(239,295)	Subtotal income/(loss)
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Penerusan pinjaman	(113,815)	113,815	Two-step loans
Utang bank	(580,407)	580,407	Bank loans
Subjumlah (rugi)/laba	(694,222)	694,222	Subtotal (loss)/income
Total (rugi)/laba	(454,927)	454,927	Total (loss)/income



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/187 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa pihak ketiga akan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup. Sebagai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melayani publik oleh Pemerintah Republik Indonesia, Grup diwajibkan melayani semua pelanggan tanpa melihat apakah nantinya akan bisa membayar atau tidak. Dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang, Grup menerapkan uang jaminan pelanggan dan melakukan pemutusan sambungan listrik ke pelanggan ditentukan jika pelanggan tidak membayar lewat dari tiga bulan untuk meminimalkan risiko kredit. Untuk kas dan setara kas, Grup mengelola rekening pada beberapa bank untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan pada satu institusi.

Credit risk refers to the risk that the counterparties will default on their contractual obligations resulting in a loss to the Group. As a company that performs a public service obligation on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Group is obliged to serve all customers regardless of the ability to pay. To minimise the risk of uncollected receivables, the Group collects customer security deposits and will terminate the electricity connection to the customer if a customer does not make payment on time after three-months to minimise the Group's credit risk. For cash and cash equivalents, the Group maintains accounts with several banks to avoid a significant concentration of cash with one institution.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Lihat Catatan 55a untuk rinciannya.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk. See Note 55a for details.

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp142.970.526 (2023: Rp116.115.590). Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha, piutang dari Pemerintah, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi, rekening bank dibatasi penggunaannya, dan investasi jangka pendek.

As at December 31, 2024, the total maximum exposure from credit risk was Rp 142,970,526 (2023: Rp116,115,590). Credit risk arises from cash in banks, time deposits, trade receivables, receivables from the Government, other receivables, receivables from related parties, restricted cash in banks and short-term investments.

Kualitas kredit piutang usaha

Credit quality of trade receivables

Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko kredit kualitas signifikan yang terpusat karena piutang usaha Grup tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar yang meliputi berbagai jenis pelanggan baik ritel maupun industrial yang tersebar di setiap wilayah geografis. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas piutang usaha secara berkala. Lihat Catatan 15 untuk rincian umur piutang usaha dan penilaian penurunan nilai piutang usaha.

The Group believes that there is no significant concentration of credit quality risk because its trade receivables are spread over a large number of customers across diverse industries covering various types of customers, both retail and industrial, which are spread across a number of geographic areas. The Group also performs ongoing credit evaluation of its trade receivables. See Note 15 for detailed information of the aging of trade receivables and impairment assessment of trade receivables.

Kualitas kredit piutang dari pemerintah

Credit quality of receivables from the Government

Grup berkeyakinan bahwa piutang dari pemerintah dapat diterima sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari Pemerintah Republik Indonesia. Grup berkeyakinan bahwa tidak ada risiko gagal bayar oleh Pemerintah.

The Group believes that receivables from the Government can be fully recovered in time from the Government of the Republic of Indonesia. The Group believes there is no risk of default by the Government.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/188 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

**c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)**

**c. Financial risk management objectives and
policies (continued)**

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Kualitas kredit kas di bank, deposito berjangka
dan rekening bank yang dibatasi
penggunaannya

Credit quality of cash in banks, time deposits and
restricted cash in banks

Grup menempatkan kas di bank, deposito berjangka dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik. Oleh karena itu, Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal. Pihak terkait yang dimaksud termasuk institusi keuangan utama dan BUMN.

The Group places cash in banks, time deposits and restricted cash in banks with reputable counterparties that have a good credit rating or standing. Consequently, the Group believes that the credit risk of such financial assets is minimal. These counterparties include large financial institutions and SOEs.

Kualitas kredit piutang lainnya

Credit quality of other receivables

Piutang lainnya ditagihkan kepada pihak berelasi dan karyawan Grup. Oleh karena itu, Grup dapat memonitor kolektibilitas piutang-piutang ini dengan seksama. Grup memiliki tingkat kolektibilitas yang baik atas piutang-piutang terkait.

Other receivables are to be collected from the Group's related parties and employees. Therefore, the Group can closely monitor the collectability of these receivables. The Group has a good historical collection rate of these financial assets.

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas, simpanan, fasilitas bank dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial assets. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash, reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

In addition, the Group maintains an adequate amount of cash and cash equivalents and short-time investments, which may be readily converted to cash should there be any unforeseen interruption to its cash collections.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Lampiran 5/189 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)

55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

c. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management objectives and
policies (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

Tabel dibawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amount disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

	2024					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ More than one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ More than three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	3,814,371	7,468,012	5,899,741	13,912,557	31,094,681	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank
Pemerintah nonbank	923,725	1,014,793	500,020	(71,881)	2,366,657	Government financial institution loans
Utang sewa	7,739,552	11,445,741	9,981,224	15,296,782	44,463,299	Lease liabilities
Utang bank	30,285,419	56,846,858	34,509,679	81,274,726	202,916,682	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	20,957,277	48,575,049	53,119,965	212,256,583	334,908,874	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	946,571	1,893,713	1,888,665	1,978,686	6,707,635	Electricity purchase payables
Utang usaha	70,697,819	-	-	-	70,697,819	Trade payables
Uang jaminan langganan	18,463,585	-	-	-	18,463,585	Customer security deposits
Utang biaya proyek	1,680,636	-	-	-	1,680,636	Project cost payables
Biaya masih harus dibayar	10,495,898	-	-	-	10,495,898	Accrued expenses
Utang lain-lain	10,925,072	-	-	-	10,925,072	Other payables
Jumlah	176,929,925	127,244,166	105,899,295	324,647,453	734,720,838	Total
	2023					
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ More than one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ More than three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Penerusan pinjaman	3,879,000	11,152,850	5,863,507	14,158,231	35,053,588	Two-step loans
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan						Government and non-bank
Pemerintah nonbank	860,086	1,572,657	-	-	2,432,743	Government financial institution loans
Utang sewa	7,755,080	16,465,372	9,717,289	15,979,902	49,917,643	Lease liabilities
Utang bank	30,132,625	79,207,058	29,005,608	48,755,197	187,100,488	Bank loans
Utang obligasi dan sukuk ijarah	15,901,038	67,554,314	50,997,451	204,084,612	338,537,415	Bonds payable and sukuk ijarah
Utang listrik swasta	904,491	2,771,110	1,804,735	1,890,337	7,370,673	Electricity purchase payables
Utang usaha	56,560,627	-	-	-	56,560,627	Trade payables
Uang jaminan langganan	17,440,297	-	-	-	17,440,297	Customer security deposits
Utang biaya proyek	1,512,219	-	-	-	1,512,219	Project cost payables
Biaya masih harus dibayar	8,281,513	-	-	-	8,281,513	Accrued expenses
Utang lain-lain	11,900,979	-	-	-	11,900,979	Other payables
Jumlah	155,127,955	178,723,361	97,388,590	284,868,279	716,108,185	Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat masalah likuiditas karena Grup memiliki cadangan fasilitas kredit yang memadai, adanya jaminan Pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari Pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik.

Management believes that there will be no liquidity issue as the Group has sufficient standby credit facilities, government guarantees for related debt repayment and subsidy revenue from the Government of Indonesia for provision of electricity.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/191 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**55. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL
(lanjutan)**

**55. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)**

d. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial instruments (continued)

Beberapa pinjaman dengan suku bunga tetap, nilai tercatat atas liabilitas keuangan tidak menunjukkan nilai wajarnya, sehingga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar atas pinjaman diukur dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan menggunakan suku bunga pasar dengan penyesuaian kredit pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar.

For certain loans with fixed interest rates, the carrying amount of the financial liabilities does not represent their fair values, thus as at December 31, 2024 and 2023, the fair value of loans is measured using discounted cash flows based on the interest rate based on credit adjusted market interest rates at the reporting date. The fair values of the above financial instruments are classified as Level 2 fair values in the fair value hierarchy.

Nilai wajar dari utang obligasi, ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi dalam pasar aktif pada tanggal pelaporan. Nilai wajar utang obligasi di atas diklasifikasikan sebagai nilai wajar Tingkat 1 dalam hierarki nilai wajar.

The fair value of bonds payable is determined by the quoted market price at the reporting date. The fair values of the bonds payable is classified as Level 1 fair values in the fair value hierarchy.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, instrumen keuangan derivatif dihitung menggunakan Tingkat 2. Nilai wajar diukur pada nilai tunai estimasi arus kas masa depan berdasarkan kurva pendapatan yang dapat diobservasi.

As at December 31, 2024 and 2023, the derivative financial instruments are measured using a Level 2 method. The fair value is measured as the present value of the estimated future cash flows based on observable yield curves.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya.

The carrying amounts of other financial assets and liabilities approximate their fair values due to the short-term nature of the financial instruments.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there were no transfers between levels.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/192 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. INFORMASI TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)

56. ADDITIONAL INFORMATION (UNAUDITED)

a. Penerapan POJK No. 6

Sejak 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan secara prospektif POJK No. 6 untuk transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan IPP. Dampak penerapan POJK No. 6 telah disesuaikan ke saldo laba 1 Januari 2016 (Catatan 2.a).

Sesuai POJK No. 6, setiap transaksi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun sebenarnya mengandung substansi selain jual beli (Catatan 3.l). Tabel berikut ini disajikan sebagai informasi tambahan jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

Tabel di bawah ini mengandung sewa, namun belum memperhitungkan dampaknya terhadap perhitungan subsidi dan kompensasi.

a. Implementation of POJK No. 6

Since January 1, 2016, the Company has implemented POJK No. 6 prospectively for transactions based on Power Purchase Agreements with IPPs. The effect of POJK No. 6 implementation has been accounted for by adjustment to retained earnings as at January 1, 2016 (Note 2.a).

In accordance with POJK No. 6, all transactions based on Power Purchase Agreements are treated as sale and purchase transactions, although containing a substance other than sale and purchase (Note 3.l). The following tables are presented as additional information on whether PPAs were deemed to contain a lease.

The table below contains leases, but has not yet considered their impact on subsidy and compensation calculations.

	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 31 Desember/ December 2024	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 31 Desember/ December 2023	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 1 Januari/ January 2023	
Laporan posisi keuangan Konsolidasian				Consolidated statements of financial position
<u>Aset tidak lancar</u>				<u>Non-current assets</u>
Aset hak guna	386,647,958	389,709,339	289,502,625	Right-of-use assets
<u>Ekuitas</u>				<u>Equity</u>
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	2,819,907	24,914,812	18,062,996	Retained earnings - unappropriated
<u>Liabilitas jangka panjang</u>				<u>Non-current liabilities</u>
Utang sewa	480,420,352	462,447,383	364,930,285	Lease liabilities
Utang listrik swasta	4,082,997	4,440,725	5,003,716	Electricity purchase payables
Liabilitas pajak tangguhan	41,253,240	34,990,561	25,517,554	Deferred tax liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>				<u>Current liabilities</u>
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	22,243,249	15,075,976	14,760,085	Related parties
Pihak ketiga	42,428,950	37,361,205	31,761,423	Third parties
Biaya masih harus dibayar	15,488,814	12,205,648	11,362,056	Accrued expenses
Utang sewa	21,119,285	16,574,047	14,010,625	Electricity purchase payables
Utang listrik swasta	564,247	513,891	494,649	Lease liabilities
	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 2024	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 2023		
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian				Consolidated statements of comprehensive income
Beban usaha:				Operating expenses:
Bahan bakar	248,590,418	227,582,433		Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	5,757,418	1,285,365		Purchased electricity
Sewa	2,726,122	2,143,968		Leases
Pemeliharaan	45,946,823	42,847,126		Maintenance
				Right-of-use of assets
Penyusutan aset hak guna	20,803,011	17,018,911		depreciation
Laba usaha	132,690,219	110,625,384		Operating profit



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/193 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**56. INFORMASI TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)
(lanjutan)**

**56. ADDITIONAL INFORMATION (UNAUDITED)
(continued)**

a. Penerapan POJK No. 6 (lanjutan)

a. Implementation of POJK No. 6 (continued)

	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 2024	Dengan/Under PSAK/SFAS No. 116 2023	
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih	(27,990,622)	6,037,319	(Loss)/gain on foreign exchange - net
Beban keuangan	(98,857,159)	(88,332,622)	Finance cost
(Rugi)/laba sebelum pajak	4,689,649	30,796,647	(Loss)/profit before tax
Beban pajak	(5,289,607)	(9,963,950)	Finance cost
(Rugi)/laba tahun berjalan	(599,958)	20,832,697	(Loss)/Profit for the year
Laporan arus kas konsolidasian			Consolidated statements of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash from operating activities
Pembayaran kas kepada pemasok	(309,736,511)	(278,512,002)	Cash paid to suppliers
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	36,387,512	45,041,213	Cash provided from operation activities
Pembayaran bunga	(97,625,534)	(87,079,426)	Interest expense paid
Kas bersih dari aktivitas operasi	88,602,023	97,009,355	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash from financing activities
Pembayaran utang listrik swasta	(528,655)	(483,198)	Payment of electricity purchase payables
Pembayaran utang sewa	(16,217,242)	(15,209,646)	Payment of lease liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(21,073,338)	(26,649,216)	Net cash used from financing activities

Tabel berikut ini telah direvisi untuk mengoreksi informasi yang diterbitkan sebelumnya, disajikan sebagai informasi tambahan jika perjanjian jual beli listrik dianggap mengandung sewa.

The following tables have been revised to correct the information previously issued, are presented as additional information on whether PPAs were deemed to contain a lease.

	2023		
	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Sebelum Koreksi/ Before Corrections	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Setelah Koreksi/ After Corrections	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statement of financial position
<u>Aset tidak lancar</u>			<u>Non-current assets</u>
Aset hak guna	316,112,230	389,709,339	Right-of-use assets
<u>Ekuitas</u>			<u>Equity</u>
Saldo laba – belum ditentukan			Retained earnings - unappropriated
Penggunaannya	30,337,664	24,914,812	
<u>Liabilitas jangka panjang</u>			<u>Non-current liabilities</u>
Utang sewa	382,666,776	462,447,383	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	36,520,083	34,990,561	Deferred tax liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>			<u>Current liabilities</u>
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	15,153,778	15,075,976	Related parties
Pihak ketiga	38,354,041	37,361,205	Third parties
Biaya masih harus dibayar	11,159,094	12,205,648	Accrued expenses
Utang sewa	15,781,088	16,574,047	Lease liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/194 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. INFORMASI TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)
(lanjutan)

56. ADDITIONAL INFORMATION (UNAUDITED)
(continued)

a. Penerapan POJK No. 6 (lanjutan)

a. Implementation of POJK No. 6 (continued)

	2023		
	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Sebelum Koreksi/ Before Corrections	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Setelah Koreksi/ After Corrections	
Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			Consolidated statements of comprehensive income
Beban usaha :			Operating expenses :
Bahan bakar dan pelumas	226,316,663	227,582,433	Fuel and lubricants
Pembelian tenaga listrik	15,561,222	1,285,365	Purchased electricity
Pemeliharaan	42,684,623	42,847,126	Maintenance
Penyusutan aset hak guna	3,347,165	17,018,911	Right-of-use assets depreciation
Laba usaha	100,040,436	110,625,384	Operating profit
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing – bersih	5,804,402	6,037,319	Other (loss)/gain on foreign exchange - net
Beban keuangan	(75,982,728)	(88,332,622)	Finance cost
(Rugi)/laba sebelum pajak	32,326,676	30,796,647	(Loss)/Profit before tax
Beban pajak	(10,300,557)	(9,963,950)	Income tax expense
(Rugi)/laba tahun berjalan	22,026,119	20,832,697	(Loss)/Profit for the year
Laporan arus kas konsolidasian			Consolidated statements of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash from operating activities
Pembayaran kas kepada pemasok	(292,628,437)	(278,512,002)	Cash paid to suppliers
Kas diperoleh dari aktivitas operasi	30,924,778	45,041,213	Cash provided from operation activities
Pembayaran bunga	(73,666,894)	(87,079,426)	Interest expense paid
Kas bersih dari aktivitas operasi	96,305,453	97,009,355	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash from financing activities
Pembayaran utang sewa	(14,505,744)	(15,209,646)	Payment of lease liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(25,945,314)	(26,649,216)	Net cash used from financing activities
	2022		
	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Sebelum Koreksi/ Before Corrections	Saldo/Balance PSAK/SFAS No.116 Setelah Koreksi/ After Corrections	
Laporan posisi keuangan konsolidasian			Consolidated statement of financial position
<u>Aset tidak lancar</u>			<u>Non-current assets</u>
Aset hak guna	226,445,292	289,502,625	Right-of-use assets
<u>Ekuitas</u>			<u>Equity</u>
Saldo laba – belum ditentukan penggunaannya	22,288,575	18,062,996	Retained earnings - unappropriated
<u>Liabilitas jangka panjang</u>			<u>Non-current liabilities</u>
Utang sewa	296,951,467	364,930,285	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	26,710,470	25,517,554	Deferred tax liabilities
<u>Liabilitas jangka pendek</u>			<u>Current liabilities</u>
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	14,734,214	14,760,085	Related parties
Pihak ketiga	33,839,527	31,761,423	Third parties
Biaya masih harus dibayar	9,505,157	11,362,056	Accrued expenses
Utang sewa	13,318,281	14,010,625	Lease liabilities



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/195 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**56. INFORMASI TAMBAHAN (TIDAK DIAUDIT)
(lanjutan)**

**56. ADDITIONAL INFORMATION (UNAUDITED)
(continued)**

b. Kontribusi kepada Pemerintah Indonesia

b. Contribution to the Government of Indonesia

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN Republik Indonesia No. S-6/DKU.MBU/02/2024. Selama tahun 2024, jumlah kontribusi Perusahaan terkait pendapatan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") adalah sebagai berikut:

The supplementary financial information presents information related to the Company's contribution to the Government of Indonesia as required by the Circular Letter of Ministry of SOE of the Republic of Indonesia No. S-6/DKU.MBU/02/2024. During 2024, the Company's contribution related to tax revenue and non-tax state revenue ("PNBP") are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Pajak penghasilan	20,459,832	14,542,004	Income Tax
PPN	22,069,040	20,990,951	VAT
Bea meterai	268,841	77,471	Stamp duty
Bea masuk	48,076	113,906	Import duty
Pajak daerah dan retribusi daerah	19,320,789	16,660,764	Local taxes and retribution
PNBP	<u>73,679</u>	<u>188,230</u>	PNBP
Jumlah	<u>62,240,257</u>	<u>52,573,326</u>	Total

57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

57. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- (i) Pada tanggal 24 Januari 2025, Perusahaan telah melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp1.000.000 atas SKPKB tahun fiskal 2020. Perusahaan telah menyampaikan surat Banding atas SKPKB tahun fiskal 2020 kepada DJP pada tanggal 6 Februari 2025.
- (ii) Pada tanggal 20 Januari 2025, Perusahaan telah menerima pembayaran dari Pemerintah atas kekurangan piutang subsidi tahun 2023 sebesar Rp2.023.863.
- (iii) Flodesa Anggarijanto ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit nonkomisaris pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) terhitung sejak tanggal 1 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 03/SK/DK-PLN/2025 tanggal 24 Januari 2025.
- (iv) Pemberhentian Tomi Parisianto sebagai Anggota Komite Audit nonkomisaris pada Dewan Komisaris PT PLN (Persero) terhitung sejak tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) No. 01/SK/DK-PLN/2025 tanggal 25 Januari 2025.

- (i) On January 24, 2025, the Company has made an additional payment of Rp1,000,000 for the SKPKB fiscal year 2020. The Company has submitted objection letters to DJP regarding SKPKB for fiscal year 2020 on February 6, 2025.
- (ii) On January 20, 2025, the Company proceeds cash payment from the Government for subsidy receivable year 2023 amounting to Rp2,023,863.
- (iii) Flodesa Anggarijanto was appointed as Member of the non-Board of Commissioners Audit Committee PT PLN (Persero) began February 1, 2025 based on Decision Letter No. 03/SK/DK-PLN/2025 dated January 24, 2025 of Board of Commissioners PT PLN (Persero).
- (iv) Termination of Tomi Parisianto as Member of the non-Board of Commissioners Audit Committee PT PLN (Persero) began January 31, 2025 based on Decision Letter No. No. 01/SK/DK-PLN/2025 dated January 25, 2025 of the Board of Commissioners PT PLN (Persero).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/196 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**57. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

57. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

(v) Pada tanggal 24 Februari 2025 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dimana Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pembentukan Danantara. Pada tanggal 18 Maret 2025, Menteri BUMN telah melakukan konversi atas saham PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dari sebelumnya saham tidak terbagi atas seri, menjadi terdiri atas (i) satu saham Seri A Dwiwarna dan (ii) saham Seri B, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri BUMN Nomor: S-134/MBU/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero).

(v) On February 24, 2025, Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 year 2003 regarding State-Owned Enterprises was issued, where the Law provides a legal basis for the establishment of Danantara. On March 18, 2025, the Minister of SOE converted the shares of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), from previously shares not divided into series, to consisting of (i) one Series A Dwiwarna share and (ii) Series B shares, as stated in the Letter of the Minister of BUMN Number: S-134/MBU/03/2025 dated March 18, 2025 regarding Changes in Types of Shares and Changes to the Articles of Association of PT PLN (Persero).

(vi) Pada tanggal 21 Maret 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Untuk Pendirian *Holding* Operasional ("PP 15/2025"), dimana peraturan tersebut menetapkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI sebagai *Holding* Operasional yang berasal dari pengalihan seluruh seri B dan/atau seri C milik Negara pada 52 BUMN, termasuk PT PLN (Persero). PP 15/2025 tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menerbitkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-190/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 perihal Persetujuan Pengalihan Saham PT PLN (Persero), dimana Menteri BUMN telah memberikan persetujuan atas pengalihan saham Seri B pada PT PLN (Persero) kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia selaku *Holding* Operasional. Menteri BUMN dan PT Biro Klasifikasi Indonesia kemudian menerbitkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) Nomor: SK-90/MBU/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar. Dengan beralihnya saham Seri B kepada PT BKI, maka susunan pemegang saham PLN menjadi: (i) Menteri BUMN sebagai pemegang satu saham Seri A Dwiwarna, dan (ii) PT BKI sebagai pemegang seluruh saham Seri B.

(vi) On March 21, 2025, the Government issued Government Regulation Number 15 of 2025 regarding the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of Operational Holding ("PP 15/2025"), where the regulation stipulates the addition of State Capital Participation (PMN) into the share capital of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) or BKI as an Operational Holding originating from the transfer of all B series and/or C series owned by the State in 52 BUMN, including PT PLN (Persero). PP 15/2025 was followed up by the Minister of BUMN by issuing a Letter of the Minister of BUMN Number: S-190/MBU/03/2025 dated March 22, 2025 concerning the Approval of the Transfer of Shares of PT PLN (Persero), where the Minister of BUMN has given approval for the transfer of Series B shares in PT PLN (Persero) to PT Biro Klasifikasi Indonesia as the Operational Holding. The Minister of SOEs and PT Biro Klasifikasi Indonesia then issued a Shareholders' Decree (KPPS) Number: SK-90/MBU/03/2025 dated March 22, 2025 regarding Amendments to the Articles of Association. With the transfer of Series B shares to PT BKI, the composition of PLN shareholders becomes: (i) the Minister of SOEs as the holder of one Series A Dwiwarna share, and (ii) PT BKI as the holder of all Series B shares.



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/197 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

DECEMBER 31, 2024 AND 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**58. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025.

**58. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR AND
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements is the responsibility of the management and the Directors have approved them for issuance on May 23, 2025.



Photo by Ziauddin Haq Vafian Zafiro
PLN UIT JBT



Lampiran

Appendix



Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021:
Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
A. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Key Financial Highlights presents financial information in a comparative format for 3 (three) financial years, or since the commencement of business for Issuers or Public Companies that have been in business for less than 3 (three) years. At the very least, financial highlights covers: 1) pendapatan/penjualan; 2) laba bruto; 3) laba (rugi); 4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5) total laba (rugi) komprehensif; 6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7) laba (rugi) per saham; 8) jumlah aset; 9) jumlah liabilitas; 10) jumlah ekuitas; 11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14) rasio lancar; 15) rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. 1) income/sales; 2) gross profit; 3) profit (loss); 4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 5) total comprehensive profit (loss); 6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 7) earnings (loss) per share; 8) total assets; 9) total liabilities; 10) total equity; 11) profit (loss) to total assets ratio; 12) profit (loss) to equity ratio; 13) profit (loss) to income ratio; 14) current ratio; 15) debt to equity ratio; 16) debt to total assets ratio; and 17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	18 -24
B. INFORMASI SAHAM STOCK INFORMATION	
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information for Public Companies at least contains: 1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; 1) shares issued for each three-month period in a comparison for the last 2 (two) financial years, at least covering: a) number of outstanding shares; b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on; c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on; Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed on the Stock Exchange;	24

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
2) dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: - tanggal pelaksanaan aksi korporasi; - rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; - jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; - jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan - harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; 2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on: - date of corporate action; - Ratio of stock split, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares; - number of outstanding shares prior to and after corporate action; and - the number of convertible securities exercised (if any); and - share price prior to and after corporate action; 3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan in the event that shares were suspended and/or delisted from trading during the financial year under review, then the Issuer or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and 4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut. in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken in resolving the suspension and/or delisting;	
C. LAPORAN DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS REPORT	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors Report should at least contain the following items:	
1) kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; - peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; - proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; - perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan - kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; the performance of the Issuer or Public Company, at least covering: - strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; - Role of the Board of Directors in formulating strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; - Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; - comparison between achievement of results and targets of the Issuer of Public Company; and - challenges faced by the Issuer or Public Company;	66 - 95
2) gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	
description on business prospects of the Issuer of Public Company; and	
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of governance by the Issuer or Public Company.	
D. LAPORAN DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS REPORT	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:	
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	
assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company; including the supervision of the Board of Commissioners on the formulation and implementation of the Issuer's or Public Company's strategy by the Board of Directors;	
2) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	
view on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;	
3) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	
view on the implementation of governance by the Issuer or Public Company;	

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description		Halaman Page
E. PROFIL EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK PROFILE OF THE ISSUER OR PUBLIC COMPANY		
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:		
(1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of Issuer or Public Company, including change of name, reasons for such change, and the effective date of the change of name during the financial year under review;		104 - 106
(2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan d) alamat situs web; access to the Issuer or Public Company, including branch or representative offices, where public can have access to information of the Issuer or Public Company, which include: a) address; b) telephone number; c) e-mail address; and d) website address;		103
(3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;		104 - 106
(4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company including corporate culture and values;		115 - 119
(5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; line(s) of business according to the latest articles of association, business activities performed in the financial year, and types of products and/or services provided;		119 - 125
(6) wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area in which operational activities are taken place or the scope of the company's operational activities		136 - 142
(7) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1(satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; structure of organization of the Issuer or Public Company in chart, at least 1(one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and those under the Board of Commissioners, with the names and titles;		143 - 145
(8) daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;		184
(9) profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;		164 - 173
		1176

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
(9) The Board of Directors profile at least contains: a) name and position according to duties and responsibilities; b) latest photograph; c) age; d) citizenship; e) educational background and/or certification; f) work history, including information on: (1) legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company; (2) concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position in or outside the Issuer or Public Company.; and in the event that members of the Board of Directors do not have concurrent positions, such matter shall be disclosed; and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly up to individual owners, including names of affiliated parties. in the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, such matter shall be disclosed;	
(10) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; (2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; (3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; h) pernyataan independensi komisaris independent dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; The Board of Commissioners profile, at least contains: a) name and position; b) latest photograph; c) age; d) citizenship; e) educational background and/or certification; f) work history, including information on: (1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners; (2) legal basis for the first appointment as member of the Board of Commissioners who is also an Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company; (3) concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other position in or outside the Issuer or Public Company. in the event that members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions, such matter shall be disclosed; and (4) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly, up to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; h) Statement of independence of the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and i) changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, such matter shall be disclosed;	145 - 163 174-175
(11) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event of changes in the membership composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners occurring subsequent to the end of the financial year and up to the deadline for submission of the Annual Report, membership composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners shall be presented both prior and after such change(s);	176
(12) jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	177 - 178

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
(13) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. names of shareholders and percentage of shareholding at the beginning and end of the financial year, comprising information on: a) shareholders with a minimum of 5% (five percent) of shares of the Issuer of Public Company; b) members of the Board of Directors and Board of Commissioners that own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not own shares, such matter shall be disclosed; and c) public shareholders, that is, shareholders that each owns less than 5% (five percent) of shares of the Issuer or Public Company; disclosure of such information can be presented in tabular form.	182 - 183
(14) persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders listed in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners do not hold indirect ownership of shares, such matter shall be disclosed.	183
(15) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing; number of shareholders and percentage of shareholding at the end of the financial year, classified by: a) ownership of local institutions; b) ownership of foreign institutions; c) ownership of local individual; and d) ownership of foreign individual;	183
(16) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information on the majority and controlling shareholder(s) of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual ultimate shareholders, presented in a schematic diagram or chart;	182
(17) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. name of subsidiary entity, associated company or joint venture company where the Issuer or Public Company exercise a joint control with the entity (if any), along with the percentage of shareholding, lines of business, total assets, and operating status of the subsidiary entity, associated company or joint venture company;	128 - 135
(18) kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, conversion effect, addition and reduction of capital (if any);	189
(19) informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Information on the listing of securities other than the ones as referred to in number 18), which have not yet matured during the financial year, at least contains the name of the securities, year of issuance, interest rate/rate of return, maturity date, bid value, and rating (if any);	190 - 196

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
(20) informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the use of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting firm (KAP) services along with their networks/associations/alliances include: a) name and address; b) period of assignment; c) information on audit and/or non-audit services provided; d) audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and e) In the event that the appointed AP, KAP and their networks/associations/alliances do not provide non-audit services, such information shall be disclosed; and Disclosure of such information can be presented in tabular form.	185 - 187
(21) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP.	188 - 189
F. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management discussion and analysis presents an analysis and discussion of financial statements accounts and other important information with an emphasis on material changes that occurred during the financial year, which at least includes:	
1) tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas; operational review by business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least containing information on: a) production, covering process, capacity, and growth; b) income/sales; and c) profitability	209 - 224
2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas; Comprehensive financial performance analysis, including a comparison of the financial performance for the current year with the previous year, as well as explanation on the cause of changes and impact of such changes, covering at least: a) current assets, non-current assets, and total assets; b) short term liabilities, long term liabilities and total liabilities; c) equity; d) revenues/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and e) cash flows;	224 - 237
3) kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; solvency by including the computation of relevant ratios;	239 - 242
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectability of receivables of the Issuer or Public Company, including the computation of relevant ratios;	239 - 242
5) struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on capital structure, including the basis for determining the said policies;	242 - 244
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; discussion on material commitments for capital expenditure, including the explanation on at least: a) the purpose of commitments; b) sources of funds expected to fulfill the commitments; c) currency of denomination; and d) steps taken by the Issuer of Public Company to mitigate relevant foreign exchange risk;	256 - 258

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

	Keterangan Description	Halaman Page
7)	bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; discussion on capital expenditure realized during the last financial year, at least include: a) type of capital expenditure; b) purpose of capital expenditure; and c) value of capital expenditure;	259
8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); material information and facts occurring subsequent to the date of accountant's report (if any); and	260 - 261
9)	prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; business prospects of the Issuer or Public Company in connection with the conditions of the industry, economy in general, accompanied by supporting quantitative data from a reliable data source;	251 - 253
10)	perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; comparison between target/projection at beginning of financial year and the results achieved (realization), concerning: a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; or d) other matters deemed important by the Issuer or Public Company;	250 - 251
11)	target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (<i>capital structure</i>); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; Target/projection at most for the next 1 (one) year of the Issuer or Public Company, concerning: a) income/sales; b) profit (loss); c) capital structure; or d) dividend policy; or e) other matters deemed important by the Issuer or Public Company;	254 - 255
12)	aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of products and/or services of the Issuer or Public Company, at the very least on marketing strategy and market share;	207 - 209
13)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. description of the dividend policy during the last 2 (two) financial years, at least covering: a) dividend policy, including information on the percentage of total dividends distributed to net profit; b) the payment date of cash dividend and/or date of non-cash dividend distribution; c) amount of dividend per share (cash and/or non-cash); and d) amount of dividend per year paid; disclosure of information can be presented in tabular form. in the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, such matter shall be disclosed.	244 - 245
14)	realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; use of proceeds from public offering, under the condition of: a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and b) in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then the Issuer should explain the said changes;	255

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: (1) pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); dan (2) peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, merger/consolidation acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, transactions with related parties and transactions with conflicts of interest that occurred during the year under review, at least includes: a) transaction date, value, and object; b) name of transacting parties; c) nature of affiliation (if any); d) description of the fairness of the transaction; and e) compliance with related rules and regulations; f) in the event that there is an affiliation, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information on: (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that such transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that such transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; g) for affiliated or material transactions which are business activities aimed to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, add an explanation of such information; h) for disclosure of affiliated transactions and/or transactions with conflicts of interest resulting from the implementation of such transactions that have been approved by independent shareholders, add information regarding the date of the GMS which approved the said transactions; i) in the event that there is no affiliated transaction and/or transaction with conflicts of interest transaction, such matter shall be disclosed;	262
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in laws and regulations which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the financial statements (if any); and	273 - 281
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statements (if any);	270 - 271

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
G. TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK CORPORATE GOVERNANCE OF THE ISSUER OR PUBLIC COMPANY	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:	
1) RUPS, paling sedikit memuat a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: (1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1(satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; GMS, at least contains: a) Information regarding the resolutions of the GMS during and 1(one) year prior to the financial year, including: (1) resolutions of the GMS during and 1(one) year prior to the financial year which are realized in the financial year; and (2) resolutions of the GMS during and 1(one) year prior to the financial year which have not been realized along with the reasons; b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party for vote counting at the GMS, such matter shall be disclosed;	298 - 306
2) Direksi, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas ireksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. The Board of Directors at least covering: a) the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; description of the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors can be presented in tabular form. b) statement that the Board of Directors already has board manual or charter; c) policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the said meetings can be presented in tabular form. d) training and/or competency development for members of the Board of Directors: (1) policies on training and/or competency development for members of the Board of Directors, including an induction program for newly appointed members (if any); and (2) training and/or competency development attended by members of the Board of Directors during the financial year (if any); e) the Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties during the financial year shall at least contain: 1) performance appraisal procedures; and 2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and f) in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee supporting the implementation of the Board of Directors' duties, such matter shall be disclosed.	307 - 332

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: (1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan (3) pihak yang melakukan penilaian. f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: (1) prosedur penilaian kinerja; dan (2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The Board of Commissioners, at least covering: a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners; b) statement that the Board of Commissioners already has board manual or charter; c) policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings with the Board of Directors, and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the said meetings can be presented in tabular form. d) training and/or competency development for members of the Board of Commissioners: (1) policies on training and/or competency development for members of the Board of Commissioners, including an induction program for newly appointed members (if any); and (2) training and/or competency development attended by members of the Board of Commissioners during the financial year (if any); e) the performance appraisal of the Board of Directors and Board of Commissioners including of each respective member, at least covering: (1) performance appraisal procedure; (2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and (3) assessor; f) the Board of Commissioners' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties during the financial year shall at least contain: (1) performance appraisal procedures; and (2) the criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	332 - 357
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: (1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; (2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan (3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The nomination and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners shall at least contain: a) nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nominating members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and b) procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, among others: (1) procedures for determining remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners; (2) The structure of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and (3) the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; disclosure of information can be presented in tabular form.	361 - 369

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
5) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies that conduct business based on Islamic law, as stipulated in the articles of association, at least contains: a) name; b) legal basis of appointment; c) assignment period; d) duties and responsibilities; and e) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance with Islamic Principles by the Issuer or Public Company in the capital market;	<i>Not Applicable</i> (Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha di bidang syaria'ah) <i>Not Applicable</i> (The Company does not operate in the Sharia sector)
6) Komite audit, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit; The Audit Committee, at least covering: a) name and position in the committee; b) age; c) citizenship; d) educational background; e) work history, including information on: (1) legal basis of appointment as committee member; (2) concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and (3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; f) period and terms of office of each member of the Audit Committee; g) statement of independence of the Audit Committee; h) training and/or competency development attended during the financial year (if any); i) policies and implementation of the frequency of the audit committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;	369 - 384
7) komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; (2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan (3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>); k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: (1) alasan tidak dibentuknya komite; dan (2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	384 - 396

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
The nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing: - name and position in the committee; - age; - citizenship; - educational background; - work history, including information on: - legal basis of appointment as committee member; - concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and - working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; - period and terms of office of each member of the Committee; - statement of independence of the Committee; - training and/or competency development attended during the financial year (if any); - description of duties and responsibilities; - statement that the Committee already has committee charter; - policies and implementation of the frequency of the Committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and - brief description of the implementation of activities during the financial year; and - in the event that no nomination and remuneration committee is established, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose: - reasons for not establishing the committee; and - the party carrying out the nomination and remuneration function;	
8) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: - nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; - usia; - kewarganegaraan; - riwayat pendidikan; - riwayat jabatan, meliputi informasi: - dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; - rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; - periode dan masa jabatan anggota komite; - pernyataan independensi komite; - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan - uraian tugas dan tanggung jawab; - pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite; - kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan - uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; Other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees supporting the functions and duties of the Board of Commissioners, the least contain: - name and position in the committee; - age; - citizenship; - educational background; - work history, including information on: - legal basis of appointment as committee member; - concurrent position(s), as member of the Board of Commissioners, Board of Board of Directors, and/or committees and other position (if any); and - working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; - period and terms of office of each member of the Committee; - statement of independence of the Committee; - training and/or competency development attended during the financial year (if any); - description of duties and responsibilities; - statement that the Committee already has committee charter; - policies and implementation of the frequency of the committee meetings and the level of attendance of each members in the meetings; and - brief description of the implementation of activities during the financial year; and	397-411, 411-419, 420-429
9) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: - nama; - domisili; - riwayat jabatan, meliputi: - dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; - riwayat pendidikan; - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan - uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	433 - 439

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
The Corporate Secretary, at least covering: - name; - domicile; - work history, including information on: - legal basis of the appointment as the Corporate Secretary; and - working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; - educational background; - training and/or competency development attended during the financial year; and - brief description of the implementation of the Corporate Secretary's duties during the financial year;	
10) Unit audit internal, paling sedikit memuat: - nama kepala unit audit internal; - riwayat jabatan, meliputi: - dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan - pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; - kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); - pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; - struktur dan kedudukan unit audit internal; - uraian tugas dan tanggung jawab; - pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan - uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; The Internal Audit Unit, at least covering: - name of Head of Internal Audit Unit; - work history, including information on: - legal basis of the appointment as Head of the Internal Audit Unit; and - working experience and period in and outside the Issuer or Public Company; - qualification or certification as internal auditor (if any); - training and/or competency development attended during the financial year; - structure and position of the Internal Audit Unit; - description of duties and responsibilities; - statement that the Internal Audit Unit already has Internal Audit Unit charter; and - brief description on the implementation of duties of the Internal Audit Unit during the year under review including the policies and implementation of frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;	440 - 449
11) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; - tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan - pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering: - financial and operational control, and compliance with other prevailing laws and regulations; and - review of the effectiveness of internal control system; - statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	450 - 453
12) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; - jenis risiko dan cara pengelolaannya; - tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan - pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least covering: - General description of the risk management system of the Issuer or Public Company; - risk type and management - Review of the effectiveness of the risk management system implemented by the Issuer or Public Company; and - statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or the Audit Committee on the adequacy of the risk management system;	453 - 469
13) perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: - pokok perkara/gugatan; - status penyelesaian perkara/gugatan; dan - pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; Legal issues with material impacts faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners (if any), at least contain: - substance of the case/claim; - status of settlement of case/claim; and - potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;	489 - 495

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
14) informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); information about administrative sanctions imposed to the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities during the financial year (if any);	495
15) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; information on the code of conduct of the Issuer or Public Company, includes: a) key points of the code of conduct; b) socialization of the code of conduct and enforcement; and c) statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Issuer of Public Company;	470 - 474
16) uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program</i> /MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program</i> /ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program</i> /MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program</i> /ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership (ESOP) program; In the event of providing the MSOP and/or ESOP program, the information disclosed shall contain at least: a) number of shares and/or options; b) exercise period; c) requirements for eligible employees and/or management; and d) exercise price or determination of exercise price;	474
17) uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; A brief description of the information disclosure policy regarding: a) share ownership of members of the Board of Directors and Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and b) implementation of the policy;	322, 340-341, 475
18) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: (1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan (2) tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least covering: a) mechanism for violation reporting; b) protection for the whistleblower; c) handling of violation reports; d) unit responsible for handling violation reports; and e) results of violation report handling, at least includes: (1) number of complaints received and processed during the financial year; and (2) follow-up of complaints; in the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, such matter shall be disclosed.	476 - 483

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
19) uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: a) programs and procedures implemented in dealing with corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in the Issuer or Public Company; and b) anti-corruption training/socialization to employees of the Issuer or Public Company; In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having such a policy shall be explained.	483 - 489
20) penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Implementation of the Guidelines for Corporate Governance of Public Companies for Issuers issuing equity-based securities or for Public Companies, including: a) a statement regarding recommendation that have been implemented; and/or b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternative implementation (if any); disclosure of information can be presented in tabular form.	501 -553
H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES	
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 on Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at least includes: a) explanation of the sustainability strategy; b) overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c) brief profile of the Issuer or Public Company; d) explanation of the Board of Directors; e) sustainability governance; f) sustainability performance; g) written verification from an independent party, if any; h) feedback sheet for readers, if any; and i) the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	574 - 611
2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)

Referensi SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021: Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Reference of SEOJK Number 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	Halaman Page
3) informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat: a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; Information on the Sustainability Report in number 1) can: a) disclosed in other relevant sections outside the Social and Environmental Responsibility section, such as the Board of Directors' explanation regarding the Sustainability Report is disclosed in the section related to the Board of Directors' Report; and/or b) refers to other sections outside the Social and Environmental Responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
4) Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
5) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must: a) contain all the information as referred to in number 1); and b) be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
6) Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the Social and Environmental Responsibility section conveys that information on Social and Environmental Responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
7) Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. The separate Sustainability Report must be submitted together with the Annual Report.	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
I. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT AUDITED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS	
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered in the Financial Services Authority. The said financial statements include an accountability statement for financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulations on the responsibility of the Board of Directors on the financial statements or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company.	612 - 829
I. SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT	
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners regarding the responsibility for the Annual Report is prepared according to the format as attached in the Appendix I, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.	98 - 99

Referensi Pertanyaan ARA di Luar SEOJK 016/2021

Reference of ARA Questions Outside SEOJK 016/2021

Keterangan Description	Halaman Page
Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris (PUGKI 1.3.2) Types of decisions requiring Board of Commissioners' approval (PUGKI 1.3.2)	348 - 350
Rincian tugas Komisaris Utama (PUGKI 1.3.13.1) Details of President Commissioner's duties (PUGKI 1.3.13.1)	336
Tanggung jawab Komite Audit dalam pemberian rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal (ASEAN CG Score Card E.2.24) Audit Committee's Responsibilities in providing recommendations on the appointment and dismissal of external auditors (ASEAN CG ScoreCard E.2.24)	187, 377
Sertifikasi profesi (misalnya dalam bidang Risiko, Akuntansi, Perpajakan, IT, Hukum) yang dimiliki oleh (Kriteria tambahan ARA 2019) untuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Lainnya Professional certification (e.g. in Risk, Accounting, Tax, IT, Legal) obtained by (Additional Criteria of ARA 2019) for the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee, and Other Committees	371-374, 386, 399-401
Deskripsi proses governansi terkait isu IT termasuk disruption (gangguan), <i>cyber security</i> (keamanan dunia maya), dan <i>disaster recovery</i> (pemulihan bencana) untuk memastikan semua risiko utama telah diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan pada Direksi (ASEAN CG Score Card B.E.5.1) Description of governance processes related to IT issues including disruption, cyber security, and disaster recovery to ensure all major risks are identified, managed, and reported to the Board of Directors (ASEAN CG Score Card B.E.5.1)	556 - 573
Kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> (PUGKI 7.2.3) Policy to prevent insider trading (PUGKI 7.2.3)	476
Kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja perusahaan jangka panjang (ASEAN CG Score Card C.3.3) Reward/compensation policy with due regard to long-term company performance (ASEAN CG Score Card C.3.3)	474
Kebijakan untuk melakukan penelaahan dan persetujuan transaksi dengan pihak berelasi yang material/signifikan (ASEAN CG Score Card D.3.1) Policy for reviewing and approving material/significant transactions with related parties (ASEAN CG Score Card D.3.1)	262 - 270
Kebijakan terkait perencanaan atas suksesi anggota Direksi dan manajemen kunci (ASEAN CG Score Card E.5.3) Policy related to succession planning for members of the Board of Directors and key management (ASEAN CG Score Card E.5.3)	361-366, 181
Kerangka pelaporan berkelanjutan yang diakui secara internasional (contoh: GRI, <i>Integrated Reporting</i> , SASB) yang diadopsi oleh Perusahaan (ASEAN CG Score Card B.C.1.1) Internationally recognized framework for sustainability reporting (e.g. GRI, Integrated Reporting, SASB) adopted by the Company (ASEAN CG Score Card B.C.1.1)	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)

Referensi Bonus Penilaian ARA

Reference of ARA Rating Bonus

Keterangan Description	Halaman Page
Jelaskan bagaimana visi Perusahaan dalam upaya mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan serta peran organ-organ Perusahaan yang dapat mencerminkan implementasi governansi yang berlandaskan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas; dengan mempertimbangkan kepentingan <i>stakeholders</i> Explain how the Company's vision is in effort to support the company's performance sustainably and the role of the Company's organs that can reflect governance implementation based on the principles of integrity, transparency, and accountability; by considering stakeholders' interests	117
Jelaskan implementasi konsep keberlanjutan dan integrasinya dalam proses bisnis Perusahaan termasuk bagaimana perusahaan mengantisipasi risiko perubahan lingkungan bisnis (pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang dengan berlandaskan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas Explain the implementation of sustainability concept and its integration into the Company's business processes including how the company anticipates the risk of changes in business environment (in economic, social, and environmental aspects) in performing the company's current and future operational activities based on the principles of integrity, transparency, and accountability	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)

Referensi Bonus Penilaian ARA

Reference of ARA Rating Bonus

Keterangan Description	Halaman Page
Jelaskan sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Perusahaan, termasuk kesiapan prosedur dan sistem informasi Perusahaan, untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2, terutama terkait pengungkapan atas empat pilar yang ada (<i>Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Target</i>) Explain the extent to which the Company has prepared, including the readiness of the Company's procedures and information systems, to prepare sustainability report by referring to IFRS S1 and IFRS S2, particularly related to the disclosure of the four existing pillars (<i>Governance, Strategy, Risk Management, Metrics & Target</i>)	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)
Jelaskan bagaimana Perusahaan memastikan bahwa integritas bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang berdampak positif bagi Perusahaan, baik dari segi reputasi, operasional, maupun keberlanjutan jangka panjang Explain how the Company ensures that integrity is not only legal compliance, but also part of business strategies that has a positive impact on the Company, including in terms of reputation, operations, and long-term sustainability	Disajikan dalam Laporan Keberlanjutan (buku terpisah) Presented in the Sustainability Report (separate booklet)

Referensi Penalti Penilaian ARA

Reference of ARA Rating Penalty

Keterangan Description	Halaman Page
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (SE OJK) Information on administrative sanctions/sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities during the financial year (SE OJK)	489-495
Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi yang signifikan atau material dalam tiga tahun terakhir? (ACGS P.B.2.1) Are there any cases of non-compliance with laws, rules and regulations related to significant or material related party transactions in the last three years? (P.B.2.1)	270
Apakah telah terjadi pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuhan/ ketenagakerjaan/ konsumen/ kepailitan/ komersial/ persaingan atau lingkungan (ACGS P.C.1.1) Has there been any violation of law relating to labor/employment/consumer/bankruptcy/commercial/competition or environmental issues? (P.C.1.1)	489-495
Apakah perusahaan menghadapi sanksi dari regulator karena tidak membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa penting (<i>material event</i>)? (P.C.2.1) Does the company face sanctions from regulators for not making an announcement within the stipulated time frame for material events? (P.C.2.1)	495
Apakah perusahaan memperoleh putusan bersalah dari pengadilan pajak tertinggi terkait masalah perpajakan apapun selama tiga tahun terakhir (<i>Others</i>) Whether the company obtained a guilty verdict from the highest tax court regarding any tax issue during the past three years (<i>Others</i>)	247
Apakah ada bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi aturan dan peraturan pencatatan apa pun selama setahun terakhir selain dari aturan pengungkapan? (P.E.1.1) Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations over the last year apart from the disclosure rules? (P.E.1.1)	495



PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Kantor Pusat Head Office

Jalan Trunojoyo Blok M - I No 135
Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia

☎ (+62-21) 7251234, 7261122

📠 (+62-21) 7221330

www.pln.co.id

20
24

Laporan Tahunan
Annual Report